

PRESERVING VALUES. INSTILLING RESILIENCE.



LAPORAN TAHUNAN
Annual Report
2021

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") tahun 2021 ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan PPA yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana PPA menjalankan kegiatannya. PPA tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu persis sesuai yang diharapkan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "PPA" atau "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) secara umum.

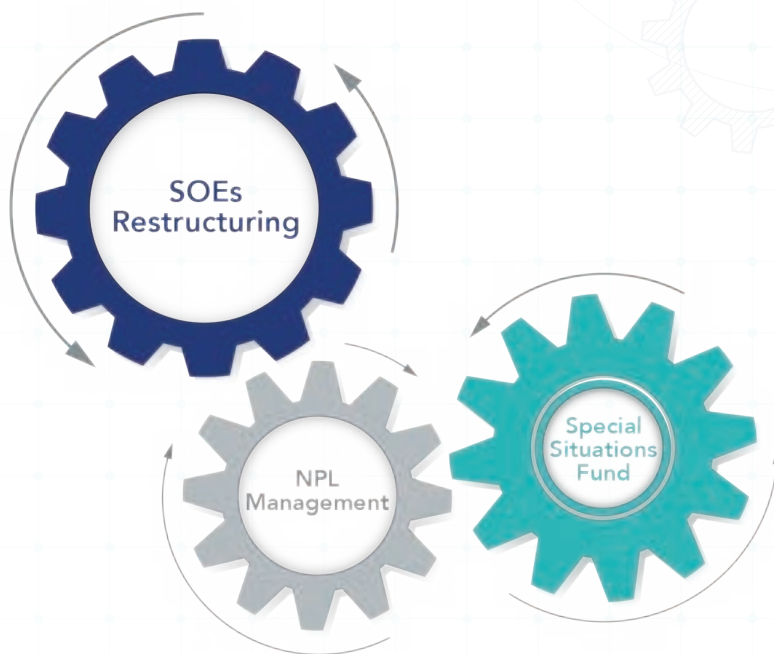
Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh dalam situs web resmi PPA dengan alamat www.ptppa.com.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") 2021 Annual Report contains statements of financial conditions, operational outcome, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PPA, which are classified as forward-looking statements in the application of laws and regulations, except for historical matters. The statements found in this Annual Report are subject to known and unknown risks (prospective) and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of PPA, also the business environment where PPA conducts its business. PPA shall have no guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This Annual Report contains the words "PPA" or "Company" which is defined as PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). The word "we" is used to simply refer to PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in general.

This Annual Report is available on PPA's official website at the address www.ptppa.com



PRESERVING VALUES. INSTILLING RESILIENCE.

Tahun 2021 menjadi tahun prestasi bagi PPA dalam perjalanannya mencapai visi sebagai perusahaan nasional di bidang pengelolaan aset atau National Asset Management Company (NAMCO). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sejak tahun sebelumnya dengan fokus pada 3 (tiga) pilar bisnis (BUMN Titip Kelola, Pengelolaan NPL, serta *Special Situations Fund*) telah mulai membuahkan hasil. Dengan demikian, PPA membuktikan eksistensinya sebagai salah satu solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi korporasi, memberikan nilai bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta membantu bisnis berakselerasi secara berkesinambungan.

The year 2021 is a milestone year for PPA in its journey to achieve its vision as a national company in the field of asset management or National Asset Management Company (NAMCO). Capacity building and capability improvement since the previous year with a focus on 3 (three) business pillars (SOE Restructuring, NPL Management, and Special Situations Fund) have begun to bear fruit. Thus, PPA proves its existence as one of the solutions to various challenges faced by corporations, provides value to State-Owned Enterprises (SOE), and helps businesses accelerate in a sustainable manner.

Kesinambungan Tema

THEME CONTINUITY



2018 Repositioning for the Future Growth

Tahun 2018, Perusahaan memperkuat eksistensi dengan menjadikan investasi sebagai landasan bagi pengembangan ke depan. Tema "*Repositioning for the Future Growth*" memberikan gambaran tentang kinerja Perusahaan di tahun 2018, sebagai hasil dari keputusan investasi yang telah dilakukan di tahun 2017.

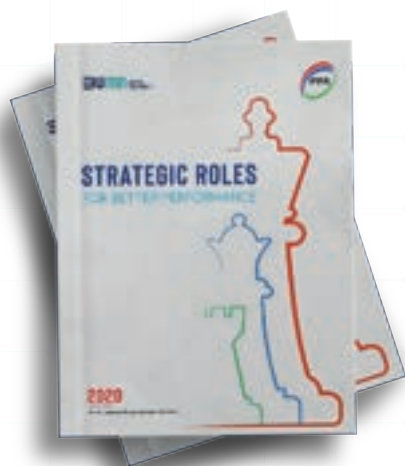
In 2018, the Company strengthened its viability by laying the groundwork for future growth through investment. The subject of "*Repositioning for Future Growth*" depicts the Company's performance in 2018 as a result of 2017 investment decisions.



2019 Strengthening the Strength

Tema "*Strengthening the Strength*" menjadi gambaran bahwa di tahun 2019, PPA terus meningkatkan kerja sama dalam rangka membangun aliansi strategis dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, untuk memperkuat jaringan internasional di bidang pengelolaan aset. PPA juga terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam melaksanakan amanah Pemerintah sebagai agen restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN.

The subject "*Strengthening the Strength*" highlights how, in 2019, PPA continued to improve cooperation in order to create strategic partnerships with a variety of parties both at home and abroad, and to strengthen worldwide asset management networks. PPA also continued to improve its capacity and capability in carrying out the Government's mandate as an agent for restructuring and/or revitalization of SOEs.



2020 Strategic Roles for Better Performance

Tahun 2020 menjadi tahun yang penting bagi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA"). Di tengah kemunculan pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa berdampak terhadap peradaban khususnya bagi perekonomian, PPA dipercaya oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri BUMN selaku pemegang saham, untuk melaksanakan penugasan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Titip Kelola sebagai perluasan dari peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang sebelumnya telah dijalankan oleh PPA. Penugasan BUMN Titip Kelola menjadi cermin kepercayaan besar pemegang saham kepada PPA untuk dapat melakukan pembenahan, *rightsizing* dan penguatan BUMN Indonesia. Terutama dengan peran BUMN sebagai agen perubahan dan lokomotif bagi perekonomian Indonesia, penguatan BUMN tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya untuk bangkit dari keterpurukan pasca pukulan besar pandemi COVID-19.

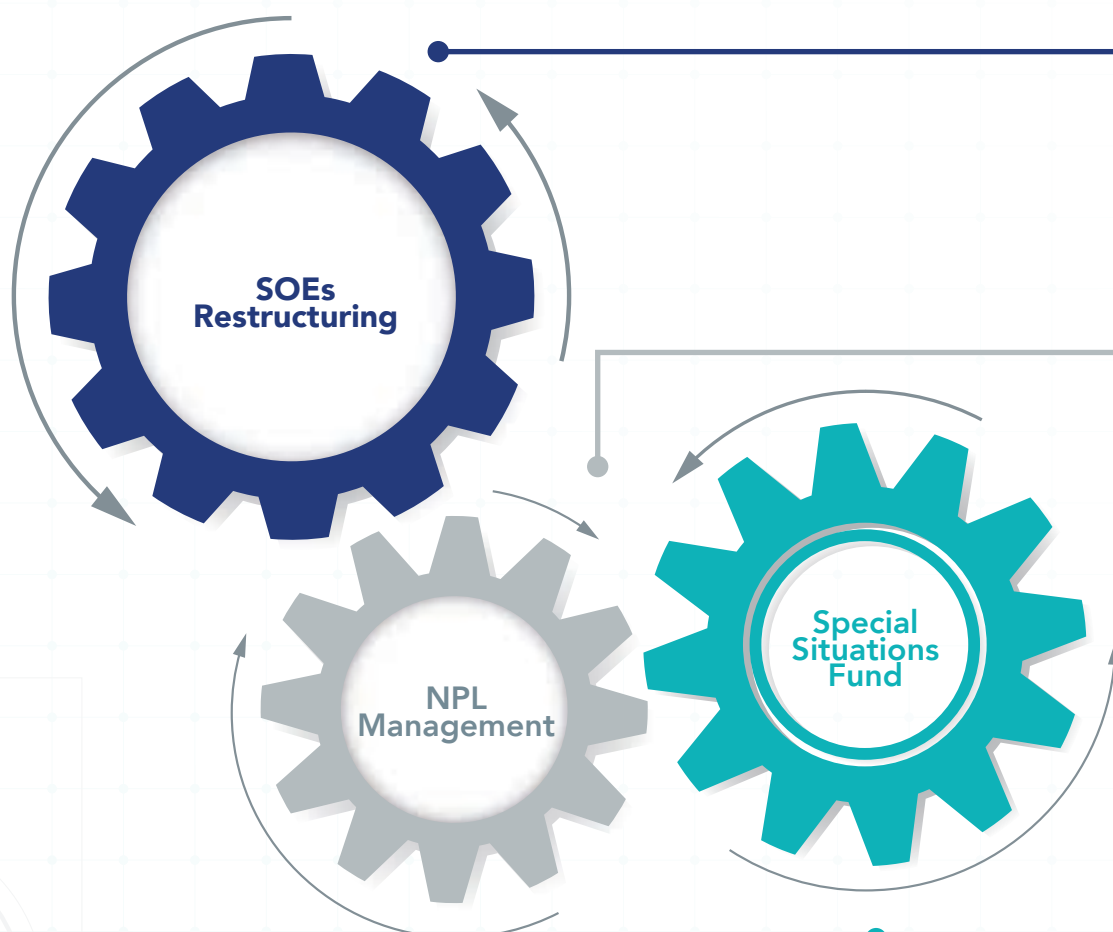
Pada 1 September 2020 PPA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penerbitan Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 senilai Rp642,10 miliar yang ditawarkan melalui 3 (tiga) seri. Di samping memperkuat struktur permodalan jangka panjang, penerbitan Obligasi ini juga membawa PPA ke level berikutnya, yang akan memberikan dampak yang besar bagi organisasi dan kepatuhan PPA sebagai emiten yang memperdagangkan surat utangnya kepada masyarakat.

2020 was an important year for PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA"). In the midst of the COVID-19 pandemic emergence which is having a massive impact on humanity, notably the economy, PPA has been entrusted by the Indonesian government, namely the Ministry of SOEs, to carry out the assignment of State-Owned Enterprises (SOEs) Titip Kelola as an extension of the role of SOE Restructuring and/or Revitalization that PPA has previously performed. SOEs Restructuring assignment reflects shareholders' confidence in the PPA's ability to develop, rightsize, and strengthen Indonesian SOEs. The strengthening of SOEs will definitely have a positive impact on the Indonesian economy, particularly as agents of change and motors for the Indonesian economy, especially in raising from the major blow of the COVID-19 pandemic.

On September 1, 2020, PPA also officially issued Perusahaan Pengelola Aset 2020 Bond I which is worth Rp642.10 billion and was offered in 3 (three) series on the Indonesia Stock Exchange. The issuance of these Bonds not only strengthened PPA's long-term capital structure, but it also advanced PPA to the next level, having a significant impact on the organization and compliance of PPA as an issuer that trades its debt instruments to the public.

3 PILAR BISNIS KEGIATAN PPA

3 MAIN PILLARS OF
PPA'S ACTIVITIES



BUMN Titip Kelola SOEs Restructuring

Untuk memperluas perannya dalam restrukturisasi dan revitalisasi, PPA diamanatkan untuk melakukan strategi *turnaround* dan pertumbuhan untuk memperkuat BUMN. Melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pemegang saham, yaitu Pemerintah Indonesia, PPA mendorong BUMN yang dikelola untuk membentuk strategi operasional dan keuangannya dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam melakukan BUMN Titip Kelola, PPA akan merevitalisasi kompetensi inti bisnis BUMN untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan berfokus pada bisnis inti BUMN dan peluang pasar serta perbaikan keuangan dan operasional, PPA memimpin pengembangan *roadmap* dan sekaligus mendorong eksekusi dan pemantauan. Hingga akhir tahun 2021 Perusahaan memperoleh mandat SKK (Surat Kuasa Khusus) dari Menteri BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham untuk mengelola 20 BUMN dan 1 anak usaha BUMN. Melalui SKK tersebut, Menteri BUMN memberikan kewenangan dan/atau hak untuk melakukan tindakan penanganan termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

Expanding its role beyond restructuring and revitalization, PPA is mandated to perform turnaround and growth strategy to strengthen SOEs. Through Special Power of Attorney (PoA) from the ultimate shareholder, i.e. the Government of Indonesia, PPA drives SOEs Restructuring to shape their operational and financial strategy in achieving sustainable business growth.

In performing SOEs Restructuring, PPA will revitalize core competences of the SOE's business to sharpen its competitive edge. Focusing on the SOE's core business and prospective market as well as financial and operational improvement, PPA will champion the development of roadmap, and drive the execution and monitoring. As of the end of 2021, the Company received Special Power of Attorney (Surat Kuasa Khusus or "SKK") mandate from the Minister of SOE as the Shareholder's Proxy to manage 20 SOEs and 1 SOE subsidiary. Through the SKK, the Minister of SOE grants the authority and/or the right to take action, including but not limited to the implementation of Restructuring and/or Revitalization activities.

Penanganan Non Performing Loan (NPL)

Non-Performing Loan (NPL) Management

Selama krisis ekonomi, portofolio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) perbankan berpeluang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini meningkatkan risiko kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya memunculkan risiko sistemik di sektor perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Dalam mencegah potensi risiko tersebut terhadap perekonomian Indonesia, PPA berperan dalam penanganan dan pengelolaan aset NPL perusahaan perbankan. Upaya ini diharapkan dapat membantu Bank dalam melakukan divestasi kredit yang dapat menghambat kinerja operasional dan keuangannya.

Melalui Perjanjian B2B dengan Bank, PPA mengelola aset NPL dengan skema *off balance sheet* atau *on balance sheet*. Dalam mekanisme *off balance sheet*, PPA akan menggunakan AMC (SPV) sebagai alat dalam mengelola portofolio NPL.

During major economic crisis, commercial banks may experience a significant raise in non-performing loan (NPL) portfolio, posing business risks to the ongoing business of the bank and eventually systemic risks to the overall banking and financial sectors. In preventing such potential risks to Indonesia economy, PPA plays role in handling and managing the NPL assets of banking companies. This effort is expected to assist the Banks in divesting loans that can hinder their operational and financial performance.

Secured in a B2B Agreement with the Banks, PPA manages the NPL assets through off balance or on balance sheet scheme. Under the off balance sheet mechanism, PPA will use AMC (SPV) as a tool in managing NPL portfolio.

Special Situations Fund

PPA memfokuskan kembali kegiatan investasi saat ini dan melakukan *rebranding* menjadi *Special Situations Fund* (SSF). Dengan fokus utama pada BUMN Indonesia, SSF memberikan solusi investasi yang mutakhir untuk melengkapi layanan perbankan tradisional.

SSF PPA berinvestasi dalam berbagai struktur permodalan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan klien pada beragam tahapan siklus usaha. Selain itu, SSF PPA juga menyediakan layanan *advisory* untuk melengkapi kegiatan investasi kami.

PPA refocuses its existing investment activities and rebrand it as Special Situations Fund (SSF). Focusing more on Indonesian SOEs, SSF provides sophisticated investment solutions to complement traditional banking services.

PPA SSF invests in various level of capital structure, tailored to client needs and requirements in broad array of business stages. In addition to that, PPA SSF also provides advisory services to complement our investment activities.



Pencapaian Kinerja 2021

2021 PERFORMANCE
ACHIEVEMENTS

Di tengah situasi yang masih penuh tantangan serta upaya transformasi, Perusahaan berhasil mencatat kinerja yang positif. Pencapaian tersebut terealisasi berkat kebijakan dan kinerja strategis yang dilakukan oleh manajemen serta Insan PPA.

In the midst of challenging situations as well as its transformation efforts, the Company succeeded in recording a positive performance. The achievement was realized due to the strategic policies and performance carried out by the management and Personnel of PPA.



Rp **165,1**
miliar billion

↑ 56,12%

Perusahaan berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp165,1 miliar, lebih tinggi 56,12% dari tahun 2020 yang Rp105,8 miliar.

The Company managed to post Rp165.1 billion in net profit for the year, 56.12% higher than 2020, which amounted to Rp105.8 billion.



Rp **6,6**
triliun trillion

↑ 48,61%

Total pendapatan usaha Perusahaan pada tahun 2021 mencapai Rp6,6 triliun atau 48,61% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang Rp4,4 triliun.

The Company's total operating revenues in 2021 reached Rp6.6 trillion or 48.61% higher than the previous year, which amounted to Rp4.4 trillion.



Rp **17,7**
triliun trillion

↑ 36,34%

Total aset Perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 36,34%, dari Rp13,0 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp17,7 triliun di tahun 2021.

The Company's total assets experienced a significant increase, namely 36.34%, from Rp13.0 trillion in 2020 to Rp17.7 trillion in 2021.



Rp **8,3**
triliun trillion

↓ 10,79%

Liabilitas Perusahaan tahun 2021 mengalami penurunan 10,79%, dari Rp9,3 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp8,3 triliun.

The Company's liabilities in 2021 experienced a 10.79% decrease from Rp9.3 trillion in 2020 to Rp8.3 trillion.

"Sangat Baik"
"Excellent"

Berdasarkan hasil assessment penerapan GCG tahun 2021 di lingkungan Perusahaan, PPA berhasil meraih skor 91,73 atau dengan predikat "Sangat Baik."

Based on the 2021 GCG implementation assessment results within the Company, PPA managed to receive a score of 91.73 or with the predicate "Excellent"



Rp **9,4**
triliun trillion

↑ 156,11%

Total ekuitas Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp9,4 triliun, lebih tinggi 156,11% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3,7 triliun.

The Company's total equity in 2021 amounted to Rp9.4 trillion, 156.11% higher compared to the total in 2020, which amounted to Rp3.7 trillion.

"Perusahaan Sehat"
"Sound Company"

Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2021 mendapatkan skor 85,5, sehingga Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA."

The Company's Soundness Level in 2021 received a score of 85.5, meaning that the Company can be categorized as a "Sound" SOE company with "AA" soundness classification.



Daftar Isi

CONTENTS

10 Ikhtisar Utama
MAIN HIGHLIGHTS

24 Laporan Manajemen
MANAGEMENT REPORT

56 Profil Perusahaan
COMPANY PROFILE

126 Pembahasan dan Analisa
Manajemen
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

144 Tata Kelola Perusahaan
CORPORATE GOVERNANCE

454 Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
Perusahaan
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENT
RESPONSIBILITY

514 Laporan Keuangan
Konsolidasian
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



12 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

20 Ikhtisar Saham
Stock Highlights

20 Dividen Saham
Stock Dividend

**21 Ikhtisar Obligasi yang Diterbitkan
PPA dan masih Beredar untuk
Periode 2020-2021**
Summary of PPA Issued and
Outstanding Bonds in 2020-2021

Ikhtisar Utama

MAIN HIGHLIGHTS

01





Ikhtisar Keuangan

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Ikhtisar
Utama

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING SUMMARY OF KEY FINANCIAL DATA

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Angka-angka pada seluruh tabel &
grafik menggunakan notasi Bahasa Indonesia
(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Numerical expressed in billions of Rupiahs
and in Indonesian format, unless stated otherwise
(Rp Million, unless stated otherwise)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021	Description
Pendapatan Usaha							Operating Income
Pendapatan Jasa Konstruksi	4.259.315	3.496.210	5.783.502	6.077.796	5.768.613	21,83 ↑	Construction Service Income
Pinjaman yang Diberikan	117.443	184.829	198.908	210.458	203.674	-36,46 ↓	Loans
Pendapatan Hasil Investasi	2.025.952	492.371	273.367	223.398	133.686	311,47 ↑	Investment Return
Pendapatan Manufaktur	103.462	96.549	-	144.629	89.988	7,16 ↑	Manufacturing Income
Penjualan	-	-	348.251	120.611	62.015	- -	Sales
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi	34.466	46.243	60.432	41.745	17.859	-25,47 ↓	Consulting Services Income
Pendapatan Properti	30.039	17.487	-	3.031	4.561	100,00 ↑	Property Income
Pendapatan Investasi Infrastruktur	14.429	-	-	-	-	100,00 ↑	Revenues Investment Infrastructure
Pendapatan Sewa alat	8.119	6.237	-	1.455	-	30,17 ↑	Equipment rental Income
Pendapatan Penggantian Biaya	4.424	2.700	4.997	878	26.667	63,85 ↑	Fee Coverage Income
Pendapatan Imbalan Pengelolaan Aset (IPA)	-	-	-	-	13.444	- -	Asset Management Fee Income
Keuntungan/ (Kerugian) atas Investasi pada Efek Ekuitas	(61.991)	55.218	-	-	-	-212,27% ↓	
Jumlah Pendapatan Usaha	6.535.658	4.397.844	6.669.457	6.824.001	6.355.757	48,61 ↑	Total Operating Income

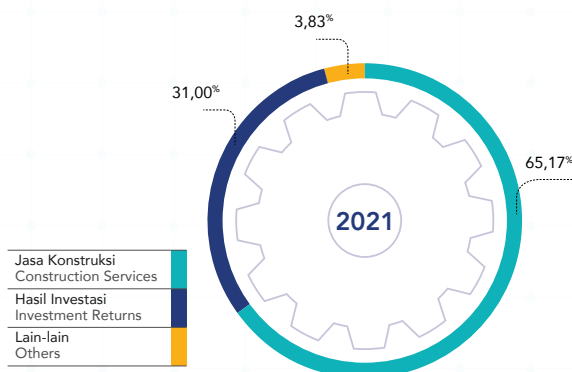
Angka-angka pada seluruh tabel & grafik menggunakan notasi Bahasa Indonesia (Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Numerical expressed in billions of Rupiahs and in Indonesian format, unless stated otherwise (Rp Million, unless stated otherwise)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020-2021	Description
Beban Usaha	-6.368.336	-4.154.610	(6.289.762)	-6.292.565	-5.782.914	53,28 ↑	Operating Expenses
Laba Usaha	167.322	243.234	379.695	531.436	572.843	-31,21 ↓	Operating Profit
Pendapatan Bunga	20.518	14.419	15.424	15.514	10.785	42,30 ↑	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	241	-	237	-	-	100,00 ↑	Fixed Asset Sales Profit
Beban Bunga dan Keuangan	-79.646	-91.805	-89.230	-76.004	-65.334	-13,22 ↓	Interest and Financial Expensed
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	18.752	26.169	41.528	75.448	11.977	-28,34 ↓	Increase in Fair Value of Investment Properties
Beban Pajak Final	-127.886	-101.709	-159.199	-174.168	-16.337	25,74 ↑	Final Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	152.776	87.905	66.706	106.821	133.038	73,80 ↑	Share of Joint Venture Profits
Penghasilan (Beban) Lain-lain	23.110	-15.200	80.548	-37.387	-162.042	-252,04 ↓	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	175.187	163.013	335.709	441.660	332.930	7,47 ↑	Profit Before Tax
Pajak Penghasilan	-10.062	-57.244	-8.639	-12.860	-6.445	-82,42 ↑	Income Tax
Laba Tahun Berjalan	165.125	105.769	327.070	428.800	326.485	56,12 ↓	Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:							Net Income attributable to:
Pemilik Entitas Induk	164.468	105.341	324.913	426.077	324.045	56,13 ↑	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	657	428	2.099	2.723	2.440	53,50 ↑	Non-Controlling Interests
Jumlah	165.125	105.769	327.070	428.800	326.485	56,12 ↑	Total
Penghasilan Komprehensif Lain	2.588.822	3.450	-10.119	61.779	250.968	74.938,32 ↑	Other Comprehensive Income
Jumlah Laba Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	2.753.947	109.219	316.951	490.579	577.453	2.421,49 ↑	Other Comprehensive Income for the Year
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:							Total Comprehensive Profit (Loss) attributable to:
Pemilik Entitas Induk	2.753.154	108.749	314.854	467.878	572.411	2.431,66 ↑	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	793	470	2.097	22.701	5.042	68,72 ↑	Non-Controlling Interest
Jumlah	2.753.947	109.219	316.953	490.579	577.453	2.421,49 ↑	Total
Laba per Saham (dalam rupiah penuh)	32.860	35.152	108.424	142.183	108.134	-90,65 ↓	Earnings per Share (in full rupiah amount)

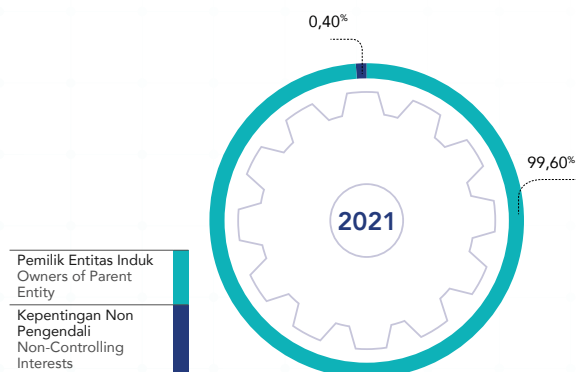
Pendapatan Usaha

OPERATING INCOME
%



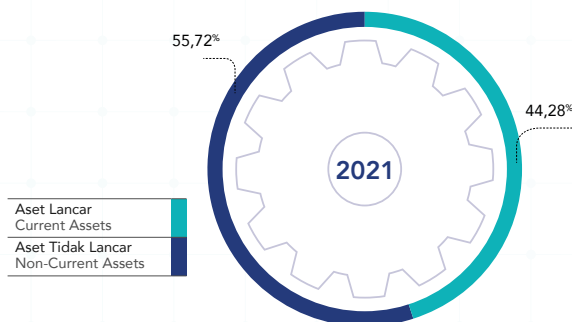
Laba Tahun Berjalan yang Distribusikan kepada

PROFIT OF THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
%



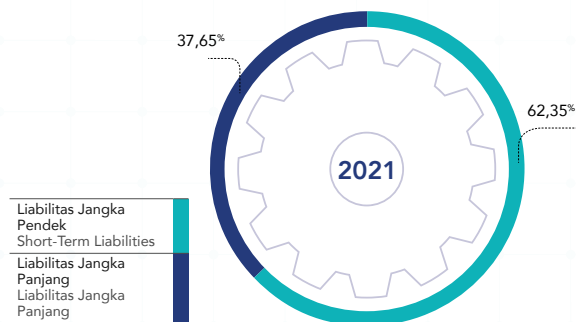
Aset

ASSETS
%



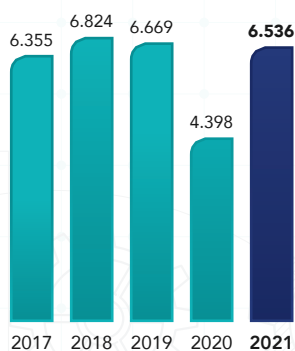
Liabilitas

LIABILITIES
%



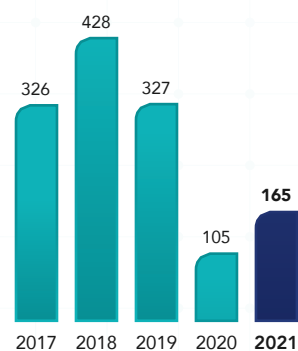
Pendapatan Usaha

REVENUES
(Rp miliar | billion)



Laba Tahun Berjalan

INCOME FOR THE YEAR
(Rp miliar | billion)



Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Positions

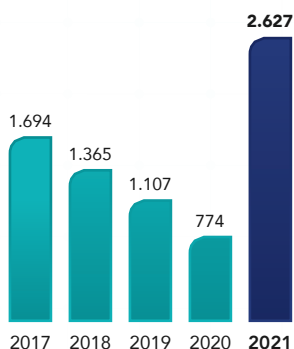
(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

(Rp Million, unless stated otherwise)

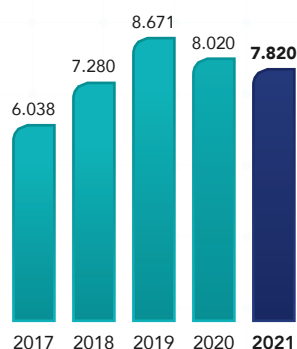
Uraian	2021	2020*	2019	2018*	2017*	YoY 2020-2021	Description
Aset Lancar							Total Current Assets
Kas dan Setara Kas	2.627.328	774.100	1.107.636	1.365.617	1.694.156	239,40 ↑	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	575.119	1.531.707	1.445.630	445.264	308.944	-62,45 ↓	Short Term Investment Loan
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi kepada	280.522	0	0	0		100,00 ↑	Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss to
Aset Keuangan Diperdagangkan	0	0	70.260	81.220	83.235	0,00 ↑	Financial Assets Traded
Piutang Usaha	1.118.654	1.435.385	1.477.597	1.176.353	1.221.166	-22,07 ↓	Accounts Receivable
Piutang Retensi	163.022	151.012	170.121	166.823	216.966	7,95 ↑	Retention Receivable
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	251.106	306.082	296.623	277.862	189.408	-17,96 ↓	Construction Joint Venture Accounts Receivable
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan kepada Pihak Berelasi	252.304	340.087	223.046	215.581	207.115	-25,81 ↓	Loans - Bailout Funds to Related Parties
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	1.504.552	2.331.224	2.418.106	2.218.365	1.293.722	-35,46 ↓	Gross Invoice to Employer
Persediaan	227.777	146.770	216.340	154.278	170.160	55,19 ↑	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	99.725	149.655	102.187	154.751	104.468	-33,36 ↓	Advance Payments and Prepaid Fees
Pajak Dibayar Di Muka	599.663	662.391	812.576	691.610	474.896	-9,47 ↓	Prepaid Taxes
Cessie Piutang Jangka Pendek	55.810	125.070	282.099	288.602	0	-55,38 ↓	Short Term Receivables Cessie
Aset Lancar Lainnya	65.364	67.342	49.138	43.772	74.695	-2,94 ↓	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	7.820.946	8.020.825	8.671.359	7.280.098	6.038.931	-2,49 ↓	Total Current Assets

* Direklasifikasi | Reclassified

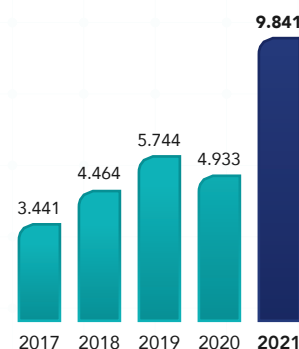
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun CASH AND CASH EQUIVALENTS (Rp miliar | billion)



Jumlah Aset Lancar TOTAL CURRENT ASSETS (Rp miliar | billion)



Jumlah Aset Tidak Lancar TOTAL NON-CURRENT ASSETS (Rp miliar | billion)



Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Positions

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

(Rp Million, unless stated otherwise)

Uraian	2021	2020*	2019	2018*	2017*	YoY 2020-2021		Description
Aset Tidak Lancar								Total Non-Current Assets
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	5.234.999	38.944	0	0	0	13.342,38	↑	Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	0	0	40.296	95.989	114.858	0,00	↑	Available for Sale Financial Assets
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau dan/atau Revitalisasi	402.763	536.683	1.416.472	1.388.273	1.356.385	-24,95	↓	Available-for-Sale Financial Assets
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	607.338	681.689	299.854	265.053	110.468	-10,91	↓	Long-Term Investment Loan
Properti Investasi	1.005.982	816.998	865.583	786.809	395.901	23,13	↑	Investment Property
Aset Pajak Tangguhan	67.254	73.457	42.066	25.569	20.605	-8,44	↑	Deferred Tax Assets
Uang Muka Investasi	0	0	0	6.250	0	0,00	↑	Investment Advances
Investasi pada Ventura Bersama	433.269	344.740	321.808	336.085	348.689	25,68	↑	Investment in Joint Venture
Piutang Lain-lain	238	238	238	0	0	0,00	↑	Other Receivables
Investasi Jangka Panjang Lainnya	546.711	546.776	102.940	138.053	41.818	-0,01	↓	Other Long Term Investment
Investasi pada Efek Ekuitas	185.198	220.626	0	0	0	-16,06	↓	Investment in Equity Securities
Aset Tetap	452.775	564.701	1.556.796	1.068.044	716.622	-19,82	↓	Fixed Assets
Goodwill	0	0	370.257	0	0	0,00	↑	Goodwill
Cessie Piutang Jangka Panjang	246.430	247.441	283.493	0	0	-0,41	↓	Long Term Receivables Cessie
Aset Hak Guna	46.499	11.714	0	0	0	296,95	↑	Right-of-use Assets
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	13.321	0	0	0	0	100,00	↑	Financial Assets of Concession Projects
Aset Tidak Lancar Lainnya	598.778	849.611	444.270	354.278	336.091	-29,52	↑	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	9.841.555	4.933.618	5.744.073	4.464.403	3.441.437	99,48	↑	Total Non-Current Assets
Liabilitas dan Ekuitas								Liabilities and Equity
Liabilitas Jangka Pendek	5.170.818	6.462.255	7.101.678	5.440.230	3.715.530	-19,98	↓	Short-Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	3.122.872	2.834.084	1.890.210	1.042.228	1.055.147	10,19	↑	Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas	8.293.690	9.296.339	8.991.888	6.482.458	4.770.677	-10,79	↓	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	9.368.811	3.658.104	5.423.544	5.262.043	4.709.691	156,11	↑	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	17.662.501	12.954.443	14.415.432	11.744.501	9.480.368	36,34	↑	Total Liabilities and Equity

* Direklasifikasi | Reclassified

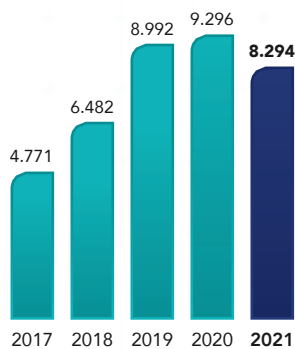
Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flows

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

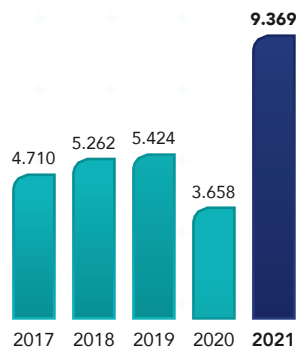
(Rp Million, unless stated otherwise)

Uraian	2021	2020	2019	2018	201	YoY 2020-2021	Description
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.917.614	-1.006.007	-381.389	-24.606	-17.640	-290,62 ↓	Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-1.564.826	-636.511	-1.488.651	-1.205.286	-946.654	145,84 ↑	Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.500.422	1.326.525	1.612.059	916.612	1.124.198	13,11 ↑	Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.853.210	-315.993	-257.981	-313.280	159.904	-686,47 ↓	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	774.116	1.107.636	1.365.617	1.694.156	1.534.252	-30,11 ↓	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun dari Entitas yang Konsolidasi (Tidak Dikonsolidasi)	-	-17.527	-	-	-	100,00 ↑	Cash and Cash Equivalents Balance at the Beginning of the Year from the Consolidated (Unconsolidated) Entity
Kas Airbone (Pelepasan Saham Airbone)	-	-	-	-16.926	-	- -	Airbone Cash (Release of Airbone Shares)
Penambahan dari Akuisisi	-	-	-	1.667	-	- -	Addition from Acquisition
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2.627.328	774.116	1.107.636	1.365.617	1.694.156	239,40 ↑	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Jumlah Liabilitas TOTAL LIABILITIES (Rp miliar | billion)



Jumlah Ekuitas TOTAL EQUITY (Rp miliar | billion)



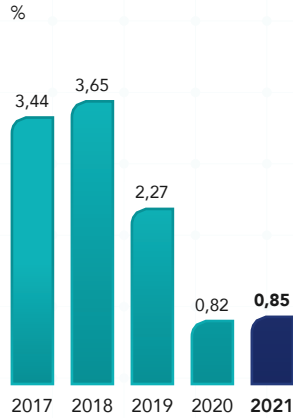
Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

Financial Ratios and Other Key Ratios

Uraian	2021	2020	2019	2018	201	YoY 2020-2021	Description
Rasio Profitabilitas dan Operasi							Ratio of Profitability to Operations
Rasio Laba Bersih terhadap Aset, atau <i>Return On Asset</i> (ROA) (%)	0,85	0,82	2,27	3,65	3,44	3,66 ↑	Return on Assets (ROA) (%)
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas, atau <i>Return On Equity</i> (ROE) (%)	1,76	2,89	6,03	8,15	6,93	-39,10 ↓	Return on Equity (ROE) (%)
Rasio Laba terhadap Pendapatan	2,56	2,41	4,90	6,28	5,14	6,22 -	Profit to Income Ratio
Marjin Laba Usaha (%)	2,68	5,53	5,69	7,79	9,01	-51,54 ↓	Operating Profit Margin (%)
Marjin Laba Bersih (%)	2,53	2,41	4,9	6,28	5,14	4,98 ↑	Net Profit Margin (%)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	97,44	94,47	94,31	92,21	90,99	3,14 ↑	Operating Expenses to Operating Income (%)
Produktivitas Tenaga Kerja (Rp-juta)	18,11	5.049	3.896	2.508	1.765	-99,64 ↓	Labor Productivity (Rp-million)
Rasio Likuiditas							Liquidity Ratio
Rasio Lancar (%)	151,25	127,55	122,1	133,82	161,89	18,58 ↓	Current Ratio (%)
Rasio Kas (%)	50,81	12,31	16,59	26,6	47,84	312,75 ↑	Cash Ratio (%)
Rasio Solvabilitas							Solvency Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	88,52	254,23	165,79	123,19	101,29	-65,18 ↓	Liabilities to Equity Ratio (%)
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%)	46,96	71,77	62,38	55,2	50,32	-34,57 ↓	Liabilities to Assets Ratio (%)
Total Modal Sendiri (Ekuitas) terhadap Total Aset (%)	53,04	28,23	37,62	44,8	49,68	87,90 ↑	Total Equity to Total Assets (%)
Rasio Pertumbuhan							Growth Ratio
Pendapatan Usaha (%)	48,61	-34,06	-2,26	7,37	27,11	242,72 ↓	Operating Income (%)
Beban Usaha (%)	53,28	-33,95	-0,04	8,81	26,09	256,93 ↓	Operating Expenses (%)
Labas Usaha (%)	-31,21	-35,94	-28,55	-7,23	38,31	-13,16 ↓	Operating Profit (%)
Labas Bersih (%)	56,13	-67,66	-23,72	31,34	16,08	-2.540,51 ↓	Net Profit (%)
Labas per Saham (%)	-6,52	-67,58	-23,74	31,49	15,95	90,35 ↓	Earnings per Share (%)
Aset (%)	36,34	-10,11	22,74	23,88	20,16	459,45 ↓	Assets (%)
Liabilitas (%)	-10,79	3,43	38,71	35,88	27,61	-414,58 ↑	Liabilities (%)
Ekuitas (%)	156,11	-32,55	3,07	11,73	13,45	579,60 ↓	Equity (%)

Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya Financial Ratios and Other Key Ratios

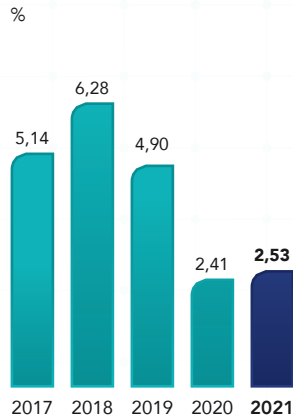
Return On Asset (ROA) RETURN ON ASSET (ROA)



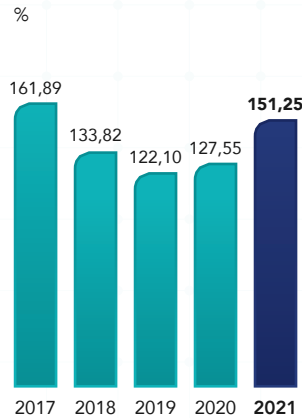
Return On Equity (ROE) RETURN ON EQUITY (ROE)



Marjin Laba Bersih NET PROFIT MARGIN



Rasio Lancar CURRENT RATIO



Ikhtisar Operasi dan Organisasi Operation and Organizatin Highlights

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	Description
Jumlah Karyawan	166	169	176	171	183	Number of Employees
Penugasan Restrukturisasi/ Revitalisasi BUMN	100%	100%	100%	100%	100%	Assignment for SOE Restructuring/ Revitalizing
Indikator Kinerja	102,51	96,62	101,40	104,84	102,35	Performance Indicator
Tingkat Kesehatan Perusahaan*	85,50	83,25	90,00	93,50	94,00	Company Soundness Level*
Assessment Penerapan GCG**	91,73	90,065	88,53	88,13	88,04	Assessment on GCG Implementation**
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)***	-	-	511,25	507,50	477,75	Superior Performance Assessment Criteria)***

^{*)} Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100 MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
Assessment on the Company's Soundness Level based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP 100 MBU/2002 on Assessment of the Soundness Level of State-Owned Enterprises.

^{**)} Assessment penerapan GCG menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
Assessment on GCG implementation using the method based on the Copy of the Decree of the Secretary to the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.

^{***)} Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penilaian kinerja Perusahaan. KPKU dilandasi pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.
The Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) is an integral part of the Company's performance assessment. KPKU is based on the letter of the Secretary to the Ministry of SOEs No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 on Submission of Guidelines to Determine Key Performance Indicators (KPI) and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOEs.

Ikhtisar Saham

STOCK HIGHLIGHTS

Ikhtisar Utama

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, PT PPA (Persero) belum menawarkan sahamnya ke publik serta belum mencatatkan saham di bursa mana pun.

Up to the end of the 2021 fiscal year, PT PPA (Persero) has not offered its shares to the public and has not listed shares on any exchange.

Laporan Manajemen

Dividen Saham

STOCK DIVIDEND

Profil Perusahaan

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2021, Pemegang Saham memutuskan tentang penggunaan laba Perusahaan untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut: menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perusahaan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2020 sebesar Rp105.341 juta seluruhnya sebagai laba ditahan.

Based on the Annual GMS for the 2020 fiscal year 2020 that was held on June 3, 2021, the Shareholders decided on the use of the Company's profits for the 2020 fiscal year as follows: determining the use of the Company's consolidated net income attributable to owners of the parent entity for the 2020 fiscal year in the amount of Rp105,341 million in total as retained earnings.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Realisasi pembagian Dividen Saham tunai untuk hasil usaha tahun buku 2020 yang dibagikan di tahun 2021 serta untuk hasil usaha tahun buku 2019 yang dibagikan di tahun 2020 dan Dividen Saham adalah sebagai berikut:

The realization of the distribution of cash Stock Dividends for the operating results in the 2020 fiscal year distributed in 2021 as well as for the operating results in the 2019 fiscal year distributed in 2020 and Stock Dividends are as follows:

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Dividen Saham Stock Dividend	2021 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2020): 2021 (for 2020 Fiscal Year Stock Dividend):	2020 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2019): 2020 (for 2019 Fiscal Year Stock Dividend)
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Juta) Distributed Cash Dividend (Rp Million)	Sesuai keputusan RUPS, PPA tidak membagikan dividen saham tunai di tahun 2021 in accordance with the GMS resolution, PPA did not distribute cash stock dividends in 2021	Sesuai keputusan RUPS, PPA tidak membagikan dividen saham tunai di tahun 2020 in accordance with the GMS resolution, PPA did not distribute cash stock dividends in 2020
Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	-	-
Rasio Pembayaran Dividen Dividend Payout Ratio	-	-
Tanggal Pengumuman Announcement Date	3 Juni 2021 June 3, 2021	29 Juni 2020 June 29, 2020
Tanggal Pembayaran Payment Date	-	-

Ikhtisar Obligasi yang Diterbitkan PPA dan Masih Beredar untuk Periode 2020-2021

SUMMARY OF PPA ISSUED AND OUTSTANDING BONDS IN 2020-2021

Tahun Penerbitan Issuance Year	Kode Obligasi Bond Code	Nama Obligasi Bond Name	Nilai Outstanding Outstanding Value	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate per Year	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Jangka Waktu (Tahun) Period of Time (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat dari Pefindo Rating from Pefindo	Bursa Perdagangan Trading Exchange	Status
2020	PPAP	Obligasi I Tahun 2020 Bond I Year 2020								
			100.000.000.000	9,95%	1 September 2020 September 1, 2020	3	19 Agustus 2023 August 19, 2023	idA (Single A)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif Active
			345.000.000.000	10,55%	1 September 2020 September 1, 2020	5	19 Agustus 2025 August 19, 2025	idA (Single A)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif Active
			197.100.000.000	11,00%	1 September 2020 September 1, 2020	7	19 Agustus 2027 August 19, 2027	idA (Single A)	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Aktif Active
Jumlah Total			642.100.000							

Peristiwa Penting

2021 EVENT HIGHLIGHTS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Januari
JANUARY



28

Virtual Seminar dalam Rangkaian HUT Ke-17 PT PPA dengan tema Corporate Restructuring - Enhancing Economic and Social Value,
Virtual Seminar in the series of PT PPA's 17th Anniversary with the theme Corporate Restructuring - Enhancing Economic and Social Value,

Maret
MARCH



12

HUT PT PPA Ke-17 secara virtual
17th Anniversary of PT PPA

April
APRIL



28

Dukung PPA menjadi National Asset Management Company (NAMCO), Pemerintah Alihkan 5 Saham Minoritas
Supporting PPA to become a National Asset Management Company (NAMCO), the Government Transfers 5 Minority Shares



29

Chief Editors Gathering Transformasi Bisnis PT PPA
Chief Editors Gathering on PT PPA's Business Transformation

Mei
MAY



11

Townhall Meeting terkait transformasi bisnis PT PPA
Townhall Meeting related to PT PPA's business transformation

Mei MAY



21

Kunjungan dan Konsultasi Komisi III DPRD Nusa Tenggara Timur
 Visit and Consultation of Commission III of DPRD of East Nusa Tenggara

Agustus AUGUST



18

PPA Salurkan Total Rp400 Juta Dukungan Penanggulangan COVID-19 dan Dampak Pandemi
 PPA Distributes a Total of Rp400 Million in Support for COVID-19 Response and the Impact of the Pandemic

November NOVEMBER



15

Penandatanganan Kerja Sama Pengelolaan Aset dan Penguatan Struktur Permodalan antara BMI, PT PPA, dan BPKH
 Signing of Asset Management and Strengthening of Capital Structure Cooperation between BMI, PT PPA, and BPKH

Juni JUNE



14

Rapat Dengar Pendapat ("RDP") Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT PPA
 Hearing ("RDP") between Commission VI of DPR RI with the Board of Directors of PT PPA

September SEPTEMBER



10

Lakukan Restrukturisasi, PT PPA Bantu PT Iglas Selesaikan Pesangon Eks Karyawan
 Restructuring, PT PPA Assists PT Iglas to Pay-Off the Severance Pay for Ex-Employees

Desember DECEMBER



8

Kunjungan Kerja PT PPA ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
 Work Visit of PT PPA to PT Prasadha Pamunah Limbah Industri

Juli JULY



29

Pelatihan Guru dan Workshop Produksi bagi Insan Berkebutuhan Khusus (disabilitas)
 Training for Teacher and Workshops on Production for Persons with Special Ability

Oktober OCTOBER



14

Dukung Pemberdayaan Masyarakat, PT PPA Raih TJSL dan CSR Award 2021
 In Support of Community Empowerment, PT PPA Received the 2021 TJSL and CSR Award

26 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Report

38 Laporan Direksi
Report of The Board of
Directors

**55 Surat Pernyataan Dewan
Komisaris dan Direksi
tentang Tanggung Jawab
atas Laporan Tahunan 2021
PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero)**
Statement of Board
of Commissioners and
Board of Directors on the
Responsibility for the 2021
Annual Report of
PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero)

Laporan Manajemen

MANAGEMENT REPORT

02







Laporan Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



KRISNA WIJAYA

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
President Commissioner concurrently
as Independent Commissioner

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Manajemen telah menunjukkan kapabilitasnya dengan sangat baik. Perusahaan bukan sekadar mampu bertahan dalam situasi yang penuh tantangan pada tahun 2021, namun kinerjanya juga tumbuh dengan baik.

The management has demonstrated its capabilities remarkably well. The Company was not only able to survive in the challenging situations in 2021, furthermore, its performance was also improving well.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA", "Perusahaan") dapat melalui tahun 2021 dengan capaian kinerja yang baik.

Perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Dewan Komisaris, yaitu pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola PPA untuk tahun buku 2021. Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi dan peranan Dewan Komisaris dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam hal transparansi informasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Perseroan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melakukannya secara independen, berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to the presence of God Almighty, who has bestowed His grace and gifts on all of us, so that PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA," "the Company") can navigate through 2021 with good performance achievements.

Please allow us to submit a report on the implementation of the duties and functions attached to the Board of Commissioners, i.e., supervising and advising the Board of Directors in managing PPA for the fiscal year 2021. This report is an inseparable part of the functions and roles of the Board of Commissioners in implementing the principles of good corporate governance, particularly in terms of transparency of information for all stakeholders.

The Board of Commissioners has carried out the duties of supervising and providing advice to the Board of Directors in good faith, responsibly, and prudently for the benefit of the Company. The Board of Commissioners acts independently in carrying out its duties and activities, governed by the terms of the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and the principles of Good Corporate Governance.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Fokus pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2021 meliputi pelaksanaan, evaluasi dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021, review Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024, tindak lanjut atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal dan penerapan budaya perseroan, serta pelaksanaan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari, tahun buku 2021 merupakan masa yang sangat penting bagi Perusahaan, sehingga peran Direksi menjadi sangat krusial. Pada tahun ini, Perusahaan memulai transformasinya menjadi *National Asset Management Company* (NAMCO), setelah menetapkan fondasinya pada tahun 2020.

Tahun 2021 juga menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemegang Saham dengan melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp2.955.935.000.000 yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia. Dari pengelolaan saham minoritas tersebut PPA memperoleh hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian target-target dalam RKAP Tahun 2021.

Sesuai Arahan Pemegang Saham, PPA diharapkan menjadi perusahaan dengan spesialisasi *turn around* terbesar di Indonesia. Perusahaan juga diharapkan dapat menciptakan solusi atas penyelesaian kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) di perbankan. Selain itu Perusahaan melakukan restrukturisasi, transformasi perusahaan dan pengelolaan aset.

Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan diharapkan dapat merealisasikan langkah strategis sebagai berikut:

1. Turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui pengelolaan NPL perbankan.
2. Memperkuat posisi PPA sebagai NAMCO serta mengoptimalkan manfaat melalui pengelolaan NPL untuk memberikan nilai bagi pemangku kepentingan.
3. Menciptakan sinergi dengan mitra strategis pada sektor keuangan.
4. Menciptakan nilai ekonomi yang optimal dan terus tumbuh.
5. Mencapai pengelolaan aset yang optimal melalui, namun tidak terbatas pada, program *special situation fund* (SSF).
6. Mengoptimalkan kapasitas pendanaan dan struktur modal.
7. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, serta mencerminkan budaya AKHLAK.

The focus of supervising and providing advice by the Board of Commissioners in 2021 includes implementation, evaluation, and adjustment of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021, reviewing the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024, following up on the decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2021 Financial Year, implementation of good corporate governance, increasing the effectiveness of the internal control system and implementing corporate culture, as well as implementing and complying with applicable laws and regulations.

We recognize that the fiscal year 2021 is a very important period for the Company, and hence the Board of Directors' involvement becomes critical. The Company began its transformation into a National Asset Management Company (NAMCO) this year, following the establishment of a foundation back in 2020.

The year 2021 also demonstrated a high level of commitment from shareholders, with an additional Rp2,955,935,000,000 in equity participation in the Company's share capital, resulting from the transfer of all state-owned shares in PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Waste Industri, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, and PT Socfin Indonesia. By managing these minority interests, PPA achieved the best outcome that helped with the attainment of the 2021 RKAP targets.

In line with the directions of the shareholders, PPA is expected to become the largest turnaround specialist company in Indonesia. The Company is also expected to be able to create solutions for the settlement of non-performing loans (NPLs) in the banking industry. In addition, the Company carries out initiatives in company restructuring, corporate transformation, and asset management.

To achieve this, the Company is expected to realize the following strategic steps:

1. Contribute to Indonesia's economic stability by managing non-performing loans (NPL) in the banking sector.
2. Strengthen PPA's position as a NAMCO and optimize benefits through NPL management in order to create value for stakeholders.
3. Creating synergies with strategic partners in the financial sector.
4. Creating optimal economic value that continue to grow.
5. Achieve optimal asset management through, but not limited to, special situation fund (SSF) programs.
6. Optimize funding capacity and capital structure.
7. Develop quality, productive human resources with an AKHLAK culture.

Pada saat bersamaan menjalankan amanat besar tersebut, Perusahaan juga dihadapkan pada kondisi eksternal yang memberikan tantangan, yaitu dinamika kondisi perekonomian akibat belum pulihnya pandemi COVID-19 secara keseluruhan. Pada pertengahan tahun, muncul varian baru dari COVID-19, yaitu varian Delta, sehingga membuat pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial.

Kondisi tersebut, setidaknya memberikan dampak pada Perusahaan, terutama berkenaan dengan proses restrukturisasi dan revitalisasi aset dalam kelolaan. Kendati demikian, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi serta organisasi di bawah koordinasinya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.

Hasilnya, bukan sekadar mampu bertahan dalam situasi yang penuh tantangan, namun kinerja Perusahaan juga tumbuh dengan baik. Pencapaian Perusahaan, seperti ditunjukkan melalui indikator keuangan, pada umumnya berhasil meraih pencapaian jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya serta berada di atas target.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perusahaan yang isinya adalah: Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, pemenuhan aspirasi pemegang saham yang tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta pengawasan atas pelaksanaan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan.

Dasar Penilaian

Penilaian kinerja Direksi setidaknya mempertimbangkan pada 3 (tiga) aspek. Pertama, pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditetapkan melalui Kontrak Manajemen tahun 2021. Kedua, pencapaian kinerja operasional dan keuangan. Ketiga, pelaksanaan implementasi GCG pada tahun buku.

Pencapaian KPI tertuang dalam Kontrak Manajemen antara Direksi dengan Pemegang Saham Perusahaan yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021. Kontrak tersebut memuat 5 (lima) aspek yang menjadi penilaian KPI, yaitu nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia; inovasi model bisnis; kepemimpinan teknologi; peningkatan investasi; dan pengembangan talenta.

Selain itu, penilaian terhadap Direksi juga terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal ini mengacu pada keputusan Sekretaris Menteri BUMN

Simultaneously with the fulfillment of this great mandate, the Company is confronted by highly challenging external variables, i.e., the dynamics of economic conditions as a result of the overall lack of recovery from the COVID-19 pandemic. In addition, in the middle of the year, a new variety of COVID-19, called the Delta variant, came out, compelling the government to pursue a policy of social activity restriction.

At the very least, these conditions have an effect on the Company, particularly in terms of the restructuring and revitalization of assets under management. Nonetheless, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors and the entities they oversee have good capacity and capability.

As a result, not only was the Company able to survive in a difficult situation but its performance was also improved. Financial indicators showed that the Company had significantly better results than the previous year and exceeded the target.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners' implementation of the supervisory function is governed by Article 15 of the Company's Articles of Association. The contents are as follows: Supervisory policies, the general course of management for the company and its business as carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), RKAP, and compliance with shareholder aspirations as expressed in General Meeting of Shareholders (GMS) decisions, as well as supervision of the implementation of GCG principles.

Assessment Criteria

The Board of Directors' performance evaluation should at least consider 3 (three) aspects. First, the achievement of Key Performance Indicators (KPI) set out in the 2021 Management Contract. Second, the achievement of operational and financial performance. Third, the implementation of GCG in the fiscal year.

KPI targets are detailed in the Management Contract signed on January 29, 2021 by the Board of Directors and the Company's Shareholders. The management contract includes 5 (five) KPI aspects: economic and social value for Indonesia; business model innovation; technological leadership; increased investment; and talent development.

In addition, the assessment of the Board of Directors is also related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG). According to the decision of the

Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

KRISNA WIJAYA

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

President Commissioner concurrently
as Independent Commissioner



MARWANTO HARJOWIRYONO

Komisaris
Commissioner



Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

No. SK-16/S.MBU/2012 pada 6 Juni 2012 dimana Dewan Komisaris dan Direksi memiliki porsi tersendiri terkait sejauh mana Dewan Komisaris memenuhi standar penerapan GCG.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi dasar penilaian ini, Direksi memiliki hubungan yang harmonis dengan Dewan Komisaris. Dengan demikian, walaupun secara struktur, tugas dan tanggung jawab berbeda, Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan 2 (dua) organ dalam struktur Perusahaan dan GCG berjalan sebagai tim. Tujuannya sama, yaitu mengelola Perusahaan agar tumbuh lebih baik dan berkelanjutan.

Pengawasan terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Perumusan strategi Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi melalui pengawasan Dewan Komisaris dengan rujukan Surat Kementerian BUMN No. S-949/MBU/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2021. Keputusan tersebut mewajibkan BUMN menyampaikan rancangan RKAP yang telah disusun berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham dan telah ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris selambat-lambatnya sebulan sejak ditatangannya Aspirasi Pemegang Saham tersebut.

RKAP 2021 antara lain memuat strategi, kebijakan dan kegiatan atau program kerja Perusahaan yang akan menjadi pedoman dan arah untuk mencapai sasaran-sasaran hingga akhir tahun 2021. Rencana strategis tersebut diharapkan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sasaran dan program kerja yang akan dicapai oleh Perusahaan pada tahun 2021.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, PPA fokus pada kegiatan utama, yaitu menciptakan nilai dari pengelolaan restrukturisasi BUMN, pengelolaan NPL perbankan, dan mengoptimalkan neraca dan sumber daya (melalui investasi *existing* maupun SSF, pengelolaan aset dan inisiatif lainnya).

Kegiatan pengelolaan aset yang dilakukan oleh Perusahaan dapat diwujudkan melalui skema atau bentuk Perusahaan sebagai NAMCO. Untuk merealisasikannya, Perusahaan akan terus melakukan pendekatan dan kerja sama pengelolaan *distressed asset* yang berasal dari perbankan nasional. Hal ini sejalan dengan kapabilitas dan kompetensi yang secara spesifik menjadi keunggulan kompetitif PPA dibanding dengan pesaing. Pengelolaan *distressed asset* tersebut juga dapat dilakukan, baik melalui skema investasi maupun *advisory*.

Rancangan perumusan strategi dan kebijakan tersebut merupakan kontribusi besar dari Direksi, yang dibahas bersama Dewan Komisaris. Kami menilai bahwa Direksi telah

Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, the Board of Commissioners and the Board of Directors have separate portions on the extent to which the Board of Commissioners meets the standards of GCG implementation.

In carrying out the duties and functions that are the basis of this assessment, the Board of Directors has a harmonious relationship with the Board of Commissioners. Thus, although structurally, duties, and responsibilities are different, the Board of Commissioners and the Board of Directors, which are 2 (two) organs in the structure of the Company and GCG, work as a team. The objective is the same, i.e., to manage the Company to grow better and sustainably.

Supervision of the Formulation and Implementation of Strategies

The Board of Directors formulates the Company's strategy under the supervision of the Board of Commissioners, in accordance with the Ministry of SOEs' Letter No. S-949/MBU/10/2020 dated October 23, 2020 on Shareholders' or Capital Owners' Aspirations for the development of Company's Work Plans and Budgets (RKAP) of State-Owned Enterprises (BUMN) in 2021. The decision requires SOEs to submit a draft RKAP no later than one month after the Shareholders' Aspirations have been signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The 2021 RKAP contains, among others, the Company's strategies, policies, or work programs that will serve as guides and directions for achieving the targets through the end of 2021. The strategic plan is expected to provide a comprehensive picture of the Company's objectives and work activities for 2021.

To accomplish the established targets, PPA focuses on its main activities, which include producing value through SOE restructuring, management of banking non-performing loans, and improving balance sheets and resources (through existing and SSF investments, asset management, and other initiatives).

The Company's asset management activities may be carried out through a scheme or in the form of NAMCO. To realize this, the Company continued to approach and cooperate in managing distressed assets from national banks. This is in line with the capabilities and competencies that have made PPA a better company than its competitors. Distressed asset management can also be accomplished through investment or advisory schemes.

The Board of Directors' key contribution is the draft strategy and policy formation, which is discussed with the Board of Commissioners. We believe the Board of Directors did an

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

merumuskan rencana strategis Perusahaan dengan sangat baik, karena berpijak pada kapabilitas dan kompetensi internal, diferensiasi, serta peluang bisnis ke depan.

Selain itu, dalam implementasinya, kami juga memandang bahwa Direksi telah menjalankannya dengan baik, dan progresnya nyata. Jika pada tahun 2020 Perusahaan dalam fase menyiapkan fundamental, pada tahun 2021 ini Perusahaan telah melangkah maju. Saat ini, Perusahaan sudah berada di jalur yang tepat sebagai NAMCO.

Pencapaian Hasil Usaha

Pencapaian kinerja yang positif dari pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, terutama ditunjukkan melalui pencapaian indikator keuangan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2021 jauh berada di atasnya. Begitu juga terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Kinerja positif Perusahaan, antara lain pada pencapaian laba bersih yang sebesar Rp165,13 miliar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang Rp105,8 miliar, terjadi kenaikan 56%. Kami memandang pencapaian tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi yang tepat, yaitu fokus pada 3 (tiga) pilar bisnis yang telah ditetapkan.

Pilihan tepat untuk fokus pada 3 (tiga) pilar bisnis juga ditunjukkan melalui kesepakatan pengelolaan NPL PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pengelolaan aset berkualitas rendah ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan *Master Restructuring Agreement* (MRA) yang seremoninya dilaksanakan di Kementerian BUMN pada tanggal 15 September 2021.

Pilar bisnis pengelolaan NPL perbankan merupakan salah satu komitmen PPA untuk berkontribusi dalam penguatan sistem perbankan di Indonesia. Karena itu, PPA membuka peluang kerja sama serupa dengan industri perbankan, khususnya bank BUMN. Dalam mengelola NPL, Perusahaan menggunakan sejumlah skema restrukturisasi berdasarkan uji tuntas yang seksama serta manajemen risiko yang terukur.

Perusahaan juga menorehkan pencapaian penting pada pilar bisnis BUMN Titip Kelola, melalui penyelesaian salah satu langkah restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan keputusan homologasi atau persetujuan PKPU pada 6 Desember 2021.

Dewan Komisaris menilai, pencapaian yang terjadi pada Perusahaan sepanjang tahun 2021 menjadi bukti bahwa PPA telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi NAMCO yang kokoh sesuai dengan harapan Pemegang Saham. Kami berharap pencapaian ini akan tercipta secara berkelanjutan, sehingga Perusahaan mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional serta para pemangku kepentingan.

excellent job developing the Company's strategic plan, as it is based on internal capabilities and competencies, distinction, and future business potential.

Additionally, we believe that the Board of Directors implemented it effectively and that the progress is real. If in 2020 the Company was in the phase of preparing the fundamentals, in 2021 the Company has stepped forward. Currently, the Company is on the right track as NAMCO.

Achievement of Operating Results

The achievement of positive performance from the management of the Company by the Board of Directors is mainly demonstrated through the achievement of financial indicators. Compared to the previous year, 2021's achievements are significantly greater. Likewise, with the targets established at the beginning of the year.

Among the positive aspects of the Company's performance was the realization of a net profit of Rp165.132 billion. Compared to the previous year, which was Rp105.8 billion, there was an increase of 56%. This achievement, we believe, is the outcome of adopting the right strategy, specifically focusing on the 3 (three) established business pillars.

The right choice to focus on the 3 (three) business pillars was also demonstrated through the agreement on the NPL management of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. The management of these low-quality assets is a follow-up to the signing of the Master Restructuring Agreement (MRA), which was held at the Ministry of SOEs on September 15, 2021.

The business pillar of banking non-performing loans management is one of PPA's commitments to contribute to strengthening the Indonesian banking system. Therefore, PPA opens up opportunities for similar cooperation with the banking industry, especially state-owned banks. The Company manages NPLs through a variety of restructuring strategies that are based on thorough due diligence and measurable risk management.

Additionally, the Company made significant contributions to the SOE Under Management business pillar by successfully completing one of the restructuring processes of PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") through the Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) program. On December 6, 2021, the Surabaya District Court issued a homologation decision, or PKPU approval.

The Board of Commissioners believes that the Company's accomplishments in 2021 demonstrated that PPA was on track to become a strong NAMCO in accordance with shareholder expectations. We hope that this accomplishment will be sustained, allowing the Company to maximize benefits to the national economy and stakeholders.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Pandangan terhadap Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dalam merumuskan prospek usaha, Direksi meyakini bahwa kondisi perekonomian pada tahun depan akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Asumsi tersebut sejalan dengan proyeksi pemerintah. Mengacu pada pertimbangan tersebut, Direksi menyusun rencana strategis dan proyeksi usaha ke depan.

Dalam dokumen prospek usaha tersebut, Direksi menegaskan untuk terus fokus pada 3 (tiga) pilar bisnis yang telah dijalankan pada tahun 2021. Dewan Komisaris merespons positif pertimbangan serta pilihan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Kendati demikian, Dewan Komisaris mengingatkan agar dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan manajemen risiko yang baik. Dengan cara seperti itu, Perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan serta dapat memitigasi potensi risiko dengan baik.

Karena itulah Dewan Komisaris akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan prospek usaha yang telah ditetapkan tersebut. Kami juga meyakini bahwa Direksi dapat merealisasikannya dengan baik, seperti yang telah dibuktikan pada pencapaian kinerja tahun 2021.

Penyusunan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris

Sebagai bentuk penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris yang dilaksanakan di tahun 2021. Perangkat Dewan Komisaris ikut terlibat pula dalam penyusunan program kerja tahunan tersebut.

Program kerja tahunan Dewan Komisaris digunakan sebagai bahan pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan penyusunan laporan Dewan Komisaris yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu, Komite-komite Dewan Komisaris juga menyusun Program Kerja Tahunan Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pembagian Tugas dan Mekanisme Pengawasan Dewan Komisaris

Pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Oktober 2020 dan Berita Acara Dewan Komisaris No.BA-02/PPA/KOM/1020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PPA

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan mengacu pada program kerja tahunan Dewan Komisaris, yang ditetapkan

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

When evaluating business prospects, the Board of Directors anticipates that the economic environment will be better next year than it is this year. This assumption corresponds to the government's forecasts. The Board of Directors develops a strategic plan and future business projections based on these considerations.

The Board of Directors stated in the business prospect that they would continue to focus on the 3 (three) business pillars that were established in 2021. The Board of Commissioners responded positively to the Board of Directors' considerations and strategic choices.

Nonetheless, the Board of Commissioners underlines that it is implemented in accordance with good corporate governance principles and sound risk management. This will enable the Company to maintain a sustainable level of performance growth while appropriately mitigating potential risks.

For this reason, the Board of Commissioners will provide full support for the implementation of the business prospects that have been determined. We also believe that the Board of Directors can realize these targets, similar to the achievement of performance in 2021.

Preparation of Annual Work Program of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners develops an annual work program for the Board of Commissioners to implement in 2021 as a means of implementing Good Corporate Governance. The Board of Commissioners' organs also participate in the development of the annual work program.

The Board of Commissioners' annual work program serves as the basis for evaluating board performance and preparing a report to the General Meeting of Shareholders (GMS).

Additionally, the Board of Commissioners' Committees produce an Annual Work Program, which is submitted to the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' Responsibilities and Supervision Mechanism

Arrangements for the division of the Board of Commissioners members' duties and responsibilities based on the Minutes of the Board of Commissioners Meeting held on October 13, 2020 and Minutes of the Board of Commissioners No.BA-02/PPA/KOM/1020 held on October 13, 2020 concerning the Division of Duties of the PPA's Board of Commissioners.

As in previous years, the implementation of supervision and advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors in managing the company refers to the Board of Commissioners' annual work program, which is set at the

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

pada awal tahun buku berjalan. Hal-hal yang membutuhkan keputusan segera diagendakan dalam agenda lain-lain dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat khusus Dewan Komisaris-Direksi. Setiap keputusan rapat dipantau dan dievaluasi tindak lanjutnya.

Sepanjang tahun 2021 telah diselenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata sebesar 100% dan rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata sebesar 100%. Keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan belum pernah terjadi proses pengambilan keputusan rapat secara "*dissenting opinion*". Sampai dengan akhir 2021 hampir seluruh keputusan rapat telah selesai ditindaklanjuti.

PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan GCG sangat penting bagi Perusahaan, karena bagian dari upaya menciptakan kinerja yang berkelanjutan. Komitmen penerapan GCG di lingkungan Perusahaan berpedoman pada asas: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan GCG merupakan strategi fundamental untuk mencapai sasaran dan visi Perusahaan. Melalui penerapan GCG, PPA diharapkan menjadi perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable company*).

Untuk mendukung penerapan tersebut, setiap tahun Perusahaan telah melakukan evaluasi. Penilaian tersebut mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Pada tahun 2021, penilaian GCG Perusahaan mencapai skor 91,73. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada tahun 2021 telah mencapai kualifikasi SANGAT BAIK

Dewan Komisaris berharap agar manajemen tetap menjadikan penerapan prinsip GCG di Perusahaan sebagai prioritas. Sehingga, tujuan penerapan GCG seperti Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta citra dan reputasi Perusahaan dalam rangka mendorong kinerja Perusahaan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Penerapan Whistleblowing System

Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan merupakan bagian penting dari penerapan prinsip GCG. Karena itu, kebijakan WBS Perusahaan senantiasa dilakukan pemutakhiran untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

beginning of the current fiscal year. Matters that require immediate decisions are scheduled on other agendas at Board of Commissioners meetings and/or special meetings of the Board of Commissioners-Directors. Each meeting decision is monitored and evaluated in its implementation.

Throughout 2021, the Board of Commissioners held 12 (twelve) internal meetings with an average attendance rate of 100%, as well as 12 (twelve) joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors with an average attendance rate of 100%. Decisions in meetings are made through deliberation to achieve consensus, and there has never been a meeting decision with a dissenting opinion. Until the end of 2021, most of the meeting decisions have been followed up.

AN OPINION ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners believes that implementing GCG is critical for the Company, as it is a component of the overall endeavor to achieve sustainable performance. The Company's commitment to implement GCG is guided by the following principles: Transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, all of which are applied in a systematic, consistent, and sustainable manner.

The Board of Commissioners believes that implementing GCG is a fundamental strategy to accomplish Company's goals and visions. Through the implementation of GCG, PPA is expected to become a sustainable company.

Each year, the Company undertakes an evaluation to support this implementation. The assessment refers to the copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.

In 2021, the Company's GCG assessment resulted in a score of 91.73. This proves that the implementation of GCG at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2021 has achieved EXCELLENT qualifications.

The Board of Commissioners hopes that management will continue to prioritize GCG principles' implementation in the Company. Thus, the objectives of implementing GCG, such as increasing stakeholder trust and the company's image and reputation, in order to encourage the company's performance, can be achieved as expected.

Implementation of the Whistleblowing System

Implementing a whistleblowing system (WBS) for reporting possible violations in the company's environment is an important part of putting GCG principles into practice. As a result, the Company's WBS policy is constantly updated to ensure its effectiveness.

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

Pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya yang ditetapkan mengacu pada Keputusan Direksi: SK-49/PPA/0620 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System-WBS*). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi WBS, Perusahaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 74 Tahun 2021.

Dewan Komisaris sangat mendukung pelaksanaan WBS dengan segala perkembangannya yang telah diterapkan oleh manajemen. Bahkan Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasannya, dengan harapan agar WBS dapat ditegakkan dengan baik, karena mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi Perusahaan.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit; Komite Pemantau Risiko dan GCG; serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Ruang lingkup kerja Komite Audit yaitu membantu Dewan Komisaris mengawasi hal-hal terkait informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko dan GCG membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pemantauan atas implementasi *Enterprise Risk Management (ERM)* dan GCG di Perusahaan. Sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung yang berfungsi menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Mengingat pentingnya keberadaan komite-komite tersebut, setiap tahun Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerjanya. Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja komite pendukung tersebut mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 tentang Indikator Metode Evaluasi Kinerja Tahunan Komite Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Dewan Komisaris melakukan penilaian realisasi atas kinerja Komite pendukung berdasarkan sejumlah indikator, yaitu: realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh komite serta tingkat kehadiran rapat.

Mengacu pada indikator-indikator tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik.

The guidelines for reporting violations and their handling are determined by referring to the decision of the Board of Directors: SK-49/PPA/0620 dated June 30, 2020 concerning Whistleblowing System (WBS) Policy. To enhance WBS's effectiveness and efficiency, the Company collaborates with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK-RI) under the Cooperation Agreement on Handling Complaints in Efforts to Combat Corruption No. 74 of 2021.

The Board of Commissioners strongly supports the implementation of WBS with all its developments that have been implemented by the management. The Board of Commissioners is actively involved in its supervision, hoping that WBS will be properly enforced because it has the potential to provide enormous benefits to the Company.

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Until the end of the 2021 financial year, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees, i.e., the Audit Committee; the Risk Monitoring and GCG Committee; and the Nomination and Remuneration Committee. These committees are part of the implementation of the supervisory function on the management of the Company that is carried out by the Board of Commissioners.

The scope of work of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in overseeing matters related to financial information, internal control systems, the effectiveness of audits by external and internal auditors, and compliance with applicable laws and regulations. Risk Monitoring and GCG Committee Assisting the Board of Commissioners in carrying out the task of monitoring the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) and GCG in the Company. The Nomination and Remuneration Committee, on the other hand, is a supporting organ that serves to carry out the Nomination and Remuneration function.

Given the importance of these committees, the Board of Commissioners evaluates their performance each year. The evaluation of the performance of the supporting committee is carried out in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 relating to the Indicators of Annual Performance Evaluation Methods of Company's Committee of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

The Board of Commissioners conducts an assessment of the supporting committee's performance based on a number of indicators, including the realization and completion of work programs established in the annual work plan and budget (RKA), suggestions, recommendations, and inputs provided by the committee, and meeting attendance.

In light of these indicators, the Board of Commissioners believes that the committees reporting to the Board of Commissioners have performed their duties well. All of them

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Seluruhnya telah memberikan kontribusi serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan.

have contributed to and supported the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners, particularly related to the supervisory function.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION AND THE REASONS FOR THE CHANGES

Pada tahun 2021 tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris yang berlaku hingga berakhirnya tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners remains unchanged in 2021. As a result, the following are the members of the Board of Commissioners who serve until the end of the fiscal year 2021:

Nama Name	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Krisna Wijaya Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 The resolution of GMS No.SK-326/MBU/10/2020, dated October 9, 2020
Marwanto Harjowirjono Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 The resolution of GMS No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020

PENUTUP DAN APRESIASI

CLOSING WORDS OF APPRECIATION

Kami menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan untuk mengawasi jalannya pengelolaan Perusahaan. Begitu juga dengan regulator atas bimbingannya melalui regulasi yang diterbitkan serta.

We would like to express our gratitude to the shareholders for their confidence in our ability to manage the Company. Similarly, with the regulator for the guidance through the issuance of regulations.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada direksi dan karyawan atas kontribusinya yang sangat besar dalam mewujudkan pencapaian usaha pada tahun buku 2021. Kami berharap pencapaian yang sangat baik pada tahun ini akan menjadi permulaan untuk pencapaian lebih tinggi lagi ke depan, sehingga Perusahaan dapat menjadi NAMCO, sesuai yang ditargetkan.

The Board of Commissioners expresses its gratitude to the Board of Directors and Company employees for their significant contributions to achieving business objectives in the fiscal year 2021. We hope that the outstanding accomplishments serve as a platform for even greater achievements in the future, enabling the Company to achieve its goal of becoming a NAMCO.

Kami berharap agar hubungan yang harmonis antar Dewan Komisaris dengan segenap organisasi di lingkungan Perusahaan mampu menjadi dasar bagi Perusahaan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, tentu saja, mampu terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

We hope that the harmonious relationship between the Board of Commissioners and all units within the Company will serve as the foundation for the Company's continued sustainable growth. In addition, of course, we should be able to continue to provide added value to shareholders and all stakeholders.

Jakarta, Mei 2022 | May 2022

Atas nama Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
 On behalf of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Krisna Wijaya
 Komisaris Utama merangkap
 Komisaris Independen
 President Commissioner concurrently
 as Independent Commissioner



Laporan Direksi

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



YADI JAYA RUCHANDI
Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi Report of the Board of Directors

Proses transformasi yang telah dijalankan memberikan hasil positif terhadap kinerja usaha Perusahaan. PPA mencatatkan laba bersih secara konsolidasi yang lebih tinggi 34,74% dari target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lebih tinggi 56,12% dibandingkan laba bersih tahun 2020.

The ongoing transformation process has given positive results to the Company's business performance. PPA recorded a consolidated net income that was 34.74% higher than the target stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and 56.12% higher than net income in 2020.

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan perkembangan usaha PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA" atau "Perusahaan") untuk tahun buku 2021. Laporan Tahunan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perusahaan, serta pelaksanaan keterbukaan informasi yang merupakan bagian penting dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup menantang sekaligus membanggakan bagi PPA karena Perusahaan menorehkan berbagai prestasi dan *milestone* dalam rangka mencapai visi sebagai perusahaan nasional di bidang pengelolaan aset atau *National Asset Management Company* (NAMCO). Transformasi model bisnis yang telah dilakukan oleh Perusahaan sejak akhir tahun 2020 mulai membuahkan hasil.

Transformasi secara fundamental tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Dalam bertransformasi, PPA fokus pada 3 (tiga) pilar bisnis sebagai solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi korporasi, memberikan nilai bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta membantu bisnis berakselerasi secara berkesinambungan. Tiga pilar tersebut adalah: BUMN Titip Kelola, Pengelolaan NPL, serta *Special Situations Fund* (SSF).

Sepanjang tahun 2021, 3 (tiga) pilar bisnis Perusahaan mulai dapat diimplementasi. Dengan demikian, Perusahaan telah menciptakan satu lagi *milestone*. Perkembangan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, yaitu di saat Perusahaan baru memulai untuk menyiapkan landasan

Dear esteemed shareholders and stakeholders,

Kindly allow us to convey a report on the development of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA" or "Company") business for the 2021 financial year. This Annual Report is part of the Board of Directors' responsibility in managing the Company as well as in the implementation of information disclosure, an important aspect of good corporate governance implementation.

2021 was a challenging yet rewarding year for PPA, as the Company has made various achievements and milestones in achieving its vision as a National Asset Management Company (NAMCO). The business model transformation that has been undertaken by the Company since the end of 2020 begins to thrive.

The fundamental transformation was carried out by building capacity and capability. Through the transformation, PPA focuses on 3 (three) business pillars as solutions to various challenges faced by corporations, providing value for State-Owned Enterprises (SOEs), and assisting businesses to accelerate in a sustainable manner. The three pillars cover Under Management SOEs, NPL Management, and Special Situations Fund (SSF).

In 2021, the Company's 3 (three) business pillars started to be implemented, marking another milestone for the Company. This development was a continuation of the previous year, when the Company had just started to prepare the foundation for its business transformation. In April

Laporan Direksi Report of The Board of Directors

atau fondasi dalam rangka melakukan transformasi bisnisnya. Pada April 2021, sebagai bentuk dukungannya, pemerintah telah mengalihkan hak atas kepemilikan saham minoritas negara pada 5 (lima) perusahaan senilai Rp2,95 triliun, yaitu PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia. Kepemilikan saham minoritas pada kelima perusahaan tersebut akan memperkuat struktur permodalan PPA.

Perusahaan berkomitmen akan menjalankan fungsinya sebagai instrumen strategis pemerintah dengan baik. PPA akan mengoptimalkan aset negara guna memberikan nilai ekonomi dan sosial termasuk namun tidak terbatas pada penguatan BUMN Titip Kelola dan sistem perbankan nasional.

Proses transformasi yang telah dijalankan memberikan hasil positif terhadap kinerja usaha Perusahaan. PPA mencatatkan laba bersih secara konsolidasi yang lebih tinggi 34,74% dari target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lebih tinggi 56,12% dibandingkan laba bersih tahun 2020.

Pencapaian kinerja tersebut didorong oleh strategi yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu penurunan aset non produktif yang signifikan, pengelolaan risiko, serta perbaikan kualitas portofolio aset guna meningkatkan likuiditas Perusahaan. Penguatan kinerja PPA ini semakin meningkatkan kepercayaan lembaga pemeringkat, di mana pada tahun 2021 PPA berhasil meningkatkan peringkat *rating* sebesar 3 *notch* yakni *Fitch Rating* memberikan peringkat AA, di mana sebelumnya Pefindo pada tahun 2020 masih memberikan rating A.

PENCAPAIAN PENTING

Dalam pandangan Direksi, tahun 2021 patut dicatat sebagai tahun yang menandakan bahwa PPA sedang dalam proses transformasi model bisnis. Bukan sekadar persiapan seperti tahun sebelumnya, melainkan sudah bergerak dan memiliki pencapaian. Sepanjang tahun 2021, PPA meraih pencapaian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan usaha Perusahaan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penyempurnaan Kerangka Manajemen Risiko
Transformasi PPA membutuhkan rencana mitigasi yang menyeluruh terhadap potensi risiko yang dihadapi PPA, dengan tetap mengedepankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik. Saat ini pengawasan manajemen risiko PPA dilakukan oleh Direksi melalui Komite Investasi dan Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Good Corporate Governance ("GCG").

Guna mencapai kerangka manajemen risiko yang komprehensif, Perusahaan melakukan perubahan struktur organisasi pada Divisi Manajemen Risiko yang dipimpin oleh *Senior Executive Vice President* (SEVP) yang berperan sebagai Chief Risk Officer (CRO). Perusahaan juga mengimplementasikan *Enterprise*

2021, as a manifestation of its support, the government had transferred the rights of minority share ownership in 5 (five) companies amounting to a total of Rp2.95 trillion, namely PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, and PT Socfin Indonesia. Minority share ownership in these five companies will strengthen PPA's capital structure.

The Company is committed to carrying out its function as a government strategic tool. PPA will optimize the state assets to deliver economic and social values including but not limited to the strengthening of SOEs Under Management and the national banking system.

The ongoing transformation process has given positive results to the Company's business performance. PPA recorded a consolidated net income that was 34.74% higher than the target stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and 56.12% higher than net income in 2020.

This performance was driven by a strategy that focuses on good corporate governance, namely a significant reduction in non-earning assets, risk management, and improvement of asset portfolio quality to increase the Company's liquidity. The strengthening performance of PPA was then acknowledged by the rating agencies with 3-notch rating upgrades, namely Fitch Rating with an AA rating and Pefindo, from an A rating in 2020.

KEY ACHIEVEMENTS

In the Board of Directors' view, 2021 was a year that reflected PPA's business model transformation journey. Beyond a year of preparation like the previous one, it was a year of progress and achievements. Throughout 2021, PPA achieved notable achievements that became an important part of the Company's milestones, among others:

1. Improvement of the Risk Management Framework
PPA's transformation requires a comprehensive mitigation plan to manage the potential risks it faces, while prioritizing good corporate governance practices. Currently, oversight of PPA risk management is carried out by the Board of Directors through the Investment and Risk Management Committee and the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee and Good Corporate Governance ("GCG").

To develop a comprehensive risk management framework, the Company made changes to the organizational structure of the Risk Management Division, which is led by a Senior Executive Vice President (SEVP) who serves as Chief Risk Officer (CRO). The Company also implements the Enterprise Risk

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Risk Management Framework and Policies yaitu mengevaluasi performa manajemen risiko perusahaan dan mengukur tingkat maturitas manajemen risiko yang bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya pengembangan bisnis baru PPA yang didukung pengawasan manajemen risiko serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG)
- b. Mengoptimalkan *value* perusahaan melalui penerapan manajemen risiko secara aktif
- c. Risiko yang berhasil terantisipasi dan dikelola dengan baik

Saat ini, PPA berpedoman pada kerangka kerja Manajemen Risiko ISO 31000:2018 dan berkomitmen dalam mengimplementasikan manajemen risiko yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan serta penentuan *risk appetite* perusahaan.

Ke depannya terdapat 3 garis besar pengembangan yang diperlukan dalam manajemen risiko, yaitu:

- a. Penajaman definisi risiko yang dikelola oleh PPA khususnya dalam pengelolaan risiko reputasi, keuangan, investasi, pengelolaan restrukturisasi dan revitalisasi, kredit, likuiditas, hubungan pihak ketiga, hukum, *Environmental, Social, and Governance* (ESG), Cyber dan Teknologi Informasi.
- b. Atas risiko yang dikelola, perusahaan melakukan pengkinian atas kebijakan, *risk appetite*, *risk tolerance*, *Key Risk Indicator* (KRI), parameter, dan *risk register*.
- c. *Cascading* atas definisi risiko, *risk appetite*, *tolerance*, KRI, parameter kepada anak perusahaan dan portofolio investasi diperlukan agar *monitoring* dan pelaporan dapat dilakukan secara konsisten di seluruh lini perusahaan.

2. Progres Signifikan dalam Restrukturisasi BUMN Titip Kelola

Untuk pilar bisnis BUMN Titip Kelola, hingga akhir tahun 2021 Perusahaan memperoleh mandat SKK dari Menteri BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham untuk mengelola 20 BUMN dan 1 anak usaha BUMN. Melalui SKK tersebut, Menteri BUMN memberikan kewenangan dan/atau hak untuk melakukan tindakan penanganan termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

Selama tahun 2021 PPA menorehkan pencapaian penting yaitu penyelesaian restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditandai dengan putusan homologasi Pengadilan Negeri Surabaya pada 6 Desember 2021. PKPU PT Barata Indonesia (Persero) merupakan langkah awal bagi Barata untuk kembali fokus pada bisnis utama di industri manufaktur Indonesia.

Dalam rangka menciptakan nilai dan optimalisasi aset BUMN, PPA mendapatkan mandat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini masih

Management Framework and Policies to evaluate the performance of the company's risk management and measure the maturity level of risk management, with the aim of:

- a. Realizing PPA's new business development supported by risk management supervision and good corporate governance (GCG) principles
- b. Optimizing company value through the active implementation of risk management
- c. Anticipate and manage risks well.

Currently, PPA refers to the ISO 31000:2018 Risk Management framework and is committed to implementing risk management as demonstrated through the establishment of policies and the determination of the company's risk appetite.

In the future, there are 3 outlines of development needed in risk management, namely:

- a. Affirming the definition of risk managed by PPA, especially in managing reputational risk, finance, investment, restructuring and revitalization management, credit, liquidity, third party relations, law, Environmental, Social, and Governance (ESG), Cyber and Information Technology.
- b. For the risk being managed, the Company updates its policies, risk appetite, risk tolerance, Key Risk Indicator (KRI), parameters, and risk register.
- c. Cascading of the definition of risk, risk appetite, tolerance, KRI, parameters to subsidiaries and investment portfolio is required so that monitoring and reporting can be carried out consistently across all lines of the Company.

2. Significant Progress in the Restructuring of SOEs Under Management

In the SOEs Under Management business pillar, until the end of 2021 the Company received a Special Power of Attorney (SKK) mandate from the Minister of SOEs as the Shareholder's Proxy to manage 20 SOEs and 1 SOE subsidiary. Through the SKK, the Minister of SOEs granted the authority and/or the right to take action, including but not limited to the implementation of Restructuring and/or Revitalization activities.

In 2021, PPA made an important achievement, namely the completion of PT Barata Indonesia (Persero) restructuring through the Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) scheme, marked by the homologation decision of the Surabaya District Court on December 6, 2021. PKPU of PT Barata Indonesia (Persero) was an initial step for Barata to refocus on its core business in the Indonesian manufacturing industry.

In terms of creating value and optimizing the assets of SOEs, PPA has the mandate to deal with long unresolved issues related to the dissolution of several SOEs that

Direksi

BOARD OF DIRECTORS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

RIZWAN RIZAL ABIDIN
Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi
Director of Investment 1 & Restructuring

JF HASUDUNGAN
Direktur Special Asset Management
Director of Special Asset Management



YADI JAYA RUCHANDI
Direktur Utama
President Director

ADI PAMUNGKAS DASKIAN
Direktur Investasi 2
Director of Investment 2



Laporan Direksi Report of The Board of Directors

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

terkatung-katung dengan membantu penyelesaian pembubaran beberapa BUMN yang sudah tidak sehat dan sudah tidak dapat memberikan kontribusi kepada negara. Pada tahun 2021 PPA membantu penyelesaian pembayaran pesangon 429 eks karyawan PT Industri Gelas (Persero) yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2015. Selain itu guna mengoptimalkan peran dan fungsi sumber daya manusia (SDM) PPA juga telah berhasil mengalihkan sejumlah karyawan PT Istaka Karya (Persero) yang saat ini juga tengah dalam proses pembubaran, ke PT Nindya Karya (Persero) agar tetap dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

3. Kesuksesan Pengelolaan Aset Berkualitas Rendah
Tonggak pencapaian penting Perusahaan lainnya adalah pengelolaan aset berkualitas rendah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Aset dan Penguatan Struktur Permodalan Bank Muamalat pada 15 November 2021. Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha ini, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bank Muamalat serta PPA.

Pengelolaan aset berkualitas rendah Bank Muamalat ini merupakan tonggak sejarah bagi PPA dalam mendukung penguatan sistem perbankan di Indonesia. PPA menerapkan solusi inovatif, yaitu skema penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (asset swap) dalam pengelolaan aset berkualitas rendah di Bank Muamalat senilai Rp10 triliun. Skema asset swap ini diharapkan dapat menjadi solusi dan membuka peluang yang luas untuk bersinergi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta.

Terobosan yang dilakukan PPA dalam Pengelolaan NPL berhasil mendapatkan 2 (dua) kategori penghargaan internasional dari *Islamic Finance News* (IFN) yang menyelenggarakan IFN Awards Deals of the Year 2021, yaitu "IFN Restructuring Deal of The Year 2021" dan "IFN Indonesia Deal of The Year 2021". Kedua penghargaan ini merupakan pengakuan publik internasional atas solusi inovatif asset swap dalam pengelolaan aset berkualitas rendah di PT Bank Muamalat Tbk (Bank Muamalat) senilai Rp10 triliun.

Selain pengelolaan aset berkualitas rendah Bank Muamalat, PPA juga telah melakukan inisiasi pengelolaan aset berkualitas rendah beberapa bank Himbara seperti BTN, BRI, dan BNI.

4. Reposisi Solusi Inovatif dan Efektif *Special Situations Fund* (SSF)
PPA melakukan *rebranding* pada lini bisnis investasi menjadi *Special Situations Fund* (SSF) dengan berfokus pada investasi yang terstruktur dan terukur serta manajemen risiko yang *prudent*. SSF menawarkan layanan *advisory* sekaligus solusi pembiayaan alternatif yang tidak tersedia dalam layanan perbankan konvensional atau produk pasar modal. Pada tahun 2021, PPA melalui lini bisnis SSF telah menyalurkan

are unhealthy and are no longer able to contribute to the state. In 2021, PPA assisted with the settlement of severance pay for 429 former employees of PT Industri Gelas (Persero) which has not been in operation since 2015. In addition, in order to optimize the existing human resources, PPA has also reassigned a number of skilled employees of PT Istaka Karya (Persero), currently in the process of being dissolved, to continue pursue their career potential with PT Nindya Karya (Persero).

3. Successful Management of Low Quality Assets
Another important milestone for the Company was the management of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") low quality assets, marked by the signing of Bank Muamalat Asset Management and Capital Structure Strengthening Cooperation Agreement on November 15, 2021. There were 3 (three) parties involved in this business activity, namely the Hajj Financial Management Agency (BPKH), Bank Muamalat, and PPA.

The management of Bank Muamalat's low-quality assets was a milestone for PPA in strengthening the banking system in Indonesia. PPA carried out an innovative solution, namely by exchanging low-quality assets with productive assets (asset swap) to manage low-quality assets that amounted to Rp10 trillion at Bank Muamalat. This asset swap scheme is expected to become a solution and open up wide opportunities to synergize with the Association of State-Owned Banks (Himbara) as well as banks in the private sector.

The breakthrough made by PPA in the NPL Management business pillar has won 2 (two) international award categories from the IFN Awards Deals of the Year 2021 organized by Islamic Finance News (IFN), namely on "IFN Restructuring Deal of The Year 2021" and "IFN Indonesia Deal of The Year 2021" category. These two awards were international recognitions for innovative asset swap solutions in managing low-quality assets that amounted to Rp10 trillion at PT Bank Muamalat Tbk (Bank Muamalat).

In addition to Bank Muamalat, PPA has also begin with low-quality asset management initiatives with a number of Himbara banks such as BTN, BRI, and BNI.

4. Repositioning of Innovative and Effective Solutions *Special Situations Fund* (SSF)
PPA rebranded its investment business line into a *Special Situations Fund* (SSF) by focusing on structured and measurable investments as well as prudent risk management. SSF offers advisory services as well as alternative financing solutions that are not available in conventional banking services or capital market products. In 2021, PPA through the SSF business line has distributed a shares-backed financing facility to PT

fasilitas *shares-backed financing* kepada PT Widodo Makmur Perkasa (Tbk) ("WMP"), perusahaan holding dengan total aset lebih dari Rp5,6 Triliun yang bergerak di bidang peternakan ayam, sapi, dan komoditas lainnya. Pembiayaan yang diberikan oleh PPA memiliki struktur agunan berupa saham yang dimiliki oleh WMP.

5. Performa Keuangan yang Solid dan Sehat

- PPA mencatatkan laba bersih secara konsolidasi yang lebih tinggi 34,74% dari target yang tercantum dalam RKAP dan lebih tinggi 56,12% dibandingkan laba bersih tahun 2020
- PPA berhasil menurunkan aset non-produktif menjadi sebesar Rp2,2 triliun atau 37% dari total aset pada tahun 2021 (2020: Rp5,6 triliun atau 89% dari total aset). PPA juga telah mengurangi *balance sheet risk* melalui peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi Rp2,9 triliun atau 129% dari total aset non-produktif (2020: Rp1,8 triliun atau 32% dari total aset non-produktif).
- Perbaikan kualitas aset portofolio juga memberikan dampak positif, sehingga likuiditas PPA per akhir 2021 mengalami peningkatan signifikan, menjadi sebesar Rp(921) miliar, dibandingkan dengan Rp(2,43) triliun di akhir tahun 2020. *Cumulative gap* juga turun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun menjadi Rp151 miliar dari sebelumnya Rp3,5 triliun.

6. Inovasi Teknologi

Untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan, PPA memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) di seluruh lini organisasi. Di antaranya, penerapan konsep *mobile office*-implementasi Office 365, peremajaan infrastruktur wifi dan perangkat pendukungnya serta *collocation* yang telah diimplementasikan tahun sebelumnya. Untuk melengkapi layanan *mobile office*, saat ini telah diimplementasikan layanan telepon *extension* meja secara *cloud* yang dapat diakses melalui *smartphone*, *gadget*, serta *laptop*.

7. Beragam Penghargaan

- "Juara I Pilar Ekonomi" dalam penghargaan TJSL dan CSR Award yang diselenggarakan oleh BUMN Track.
- "Best TJSL 2021" with Outstanding Community Entrepreneurship Training program yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.
- Penghargaan internasional dalam IFN Awards Deals of the Year 2021 yang diselenggarakan oleh Islamic Finance News (IFN). Penghargaan tersebut merupakan pengakuan publik internasional atas solusi inovatif *asset swap* dalam pengelolaan aset berkualitas rendah di PT Bank Muamalat Tbk (Bank Muamalat) senilai Rp10 triliun. Dua penghargaan tersebut adalah "IFN Restructuring Deal of The Year 2021" dan "IFN Indonesia Deal of The Year 2021."

8. Pengembangan Talenta Unggul

PPA membangun sumber daya manusia, baik dari sisi kompetensi maupun kapasitas, yang sesuai dengan kebutuhan di organisasi dan sejalan dengan rencana

Widodo Makmur Perkasa (Tbk) ("WMP"), a holding company with total assets of more than Rp. 5.6 Trillion, which is engaged in chicken and cattle farming, and other commodities. The financing provided by PPA has a collateral structure in the form of shares owned by WMP.

5. Solid and Healthy Financial Performance

- PPA recorded a consolidated net income that was 34.74% higher than the target stated in the RKAP and 56.12% higher than net income in 2020
- PPA successfully reduced non-earning assets to Rp2.2 trillion or 37% of total assets in 2021 (in 2020 it was Rp5.6 trillion or 89% of total assets). PPA has also reduced balance sheet risk by increasing the Allowance for Impairment Losses (CKPN) to Rp2.9 trillion or 129% of total non-earning assets (in 2020 it was Rp1.8 trillion or 32% of total non-earning assets).
- Improvements in the quality of portfolio assets also delivered a positive impact, so that PPA liquidity at the end of 2021 experienced a significant increase to Rp(921) billion, from Rp(2.43) trillion at the end of 2020. The cumulative gap has also decreased over a period of 5 (five) years, from Rp3.5 trillion to Rp151 billion.

6. Technology Innovation

To support the Company's business activities, PPA maximized the use of information technology (IT) across all lines of the organization. Among others, the application of mobile office concept - implementation of Office 365, rejuvenation of wi-fi infrastructures and its supporting devices, as well as collocation that was implemented in the previous year. To complement the mobile office service, the Company also implemented a cloud desk extension phone service that can be accessed via smartphones, gadgets, and laptops.

7. Various Awards

- "First Winner of Economic Pillar" in the TJSL and CSR Award, organized by BUMN Track.
- "Best TJSL 2021" with Outstanding Community Entrepreneurship Training program, organized by Warta Ekonomi.
- International award of 2021 IFN Awards Deals of the Year, organized by Islamic Finance News (IFN). The award was international recognition for innovative *asset swap* solutions in managing low-quality assets that amounted to Rp10 trillion at PT Bank Muamalat Tbk (Bank Muamalat). The awards were "IFN Restructuring Deal of The Year 2021" and "IFN Indonesia Deal of The Year 2021."

8. Development of Superior Talent

PPA has built its human capital, both in terms of competence and capacity, in accordance with the needs of the organization and in line with the Company's

Laporan Direksi Report of The Board of Directors

strategis Perusahaan untuk menjadi NAMCO. Kualitas SDM di PPA dilandasi dengan tata nilai AKHLAK. Sementara pengembangannya, antara lain dilakukan melalui pelatihan publik, pelatihan internal, keikutsertaan atau keanggotaan karyawan pada lembaga yang relevan dengan tugasnya, serta mendukung karyawan berbagi pengetahuan sebagai narasumber.

KONDISI PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian baik di tingkat global maupun nasional pada tahun 2021 yang mulai memasuki tahap pemulihan masih menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19 yang belum pulih seutuhnya. Keberadaan varian baru COVID-19, yaitu varian Delta dan Omicron, membuat penyebaran pandemi meluas kembali.

Pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia mampu merespons dengan cepat. Di Indonesia, saat pandemi meluas kembali di awal kuartal III-2021, pemerintah memberlakukan kembali kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Program vaksinasi juga kian masif. Kebijakan yang tanggap dan konsisten tersebut memberikan hasil positif. Penyebaran pandemi dapat dikendalikan dengan cepat, sehingga Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif sejak kuartal II-2021.

Pada kuartal tersebut, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% year on year (YoY). Seiring dengan tantangan COVID-19 yang menanjak kembali, pertumbuhan pada kuartal III-2021 mengalami perlambatan, walaupun tetap tumbuh positif, yaitu 3,51% YoY dan menjadi 5,02% di kuartal berikutnya.

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi nasional seperti diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 3,69% YoY. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih terkontraksi. Seluruh sektor usaha juga telah tumbuh positif, kecuali administrasi pemerintahan.

BERAGAM INISIATIF STRATEGIS Mendukung KINERJA USAHA

Kendala dan Tantangan

Kondisi yang terjadi pada tahun 2021 tentu memberikan tantangan bagi PPA, begitu juga dengan dunia usaha pada umumnya. Pandemi COVID-19 yang belum pulih seluruhnya berdampak terhadap pemulihan aset dalam kelolaan Perusahaan. Kendati demikian, kegiatan usaha PPA tetap berjalan dengan baik.

Perusahaan memiliki kompetensi dalam melakukan restrukturisasi dan revitalisasi korporasi atau aset non-produktif, termasuk dalam kondisi tekanan atau tantangan yang terjadi pada tahun 2021.

strategic plan to become NAMCO. The quality of human capital in PPA adheres to AKHLAK values. Meanwhile, human capital development was carried out through, among others, public training, internal training, employee participation or membership in institutions relevant to their duties, as well as supporting employees to share their knowledge as resource persons.

ECONOMIC CONDITIONS

Despite commencing with the recovery state, global and domestic economic conditions in 2021 remained challenged by the COVID-19 pandemic, which has not fully recovered yet. The new variants of COVID-19, namely Delta and Omicron variants, have resulted in another outbreak of the pandemic.

Governments in many countries including Indonesia responded quickly. In Indonesia, when the new variants infected widely at the beginning of the third quarter of 2021, the government re-imposed a social restriction policy. The vaccination program was then rolled out extensively. This responsive and consistent policy yielded positive results. The spread of the pandemic could be controlled quickly, so that Indonesia was able to maintain positive economic growth since the second quarter of 2021.

In the respective quarter, the economic growth reached 7.07% year on year (YoY). In line with the rising challenges of COVID-19, growth in the third quarter of 2021 experienced a slowdown, although it continued to grow positively to 3.51% YoY, and to 5.02% in the following quarter.

Overall, the domestic economic growth reached 3.69% YoY, as revealed by the Central Statistics Agency (BPS). It was positive progress compared to the previous year, which recorded a contraction. All business sectors have shown positive growth, except government administration.

STRATEGIC INITIATIVES TO SUPPORT BUSINESS PERFORMANCE

Obstacles and Challenges

Circumstances in 2021 certainly presented challenges for PPA, as well as the business landscape in general. The COVID-19 pandemic that has not fully recovered also impacted the recovery of assets under the Company's management. Nevertheless, PPA's business activities continued apace.

The Company has specific competencies in the restructuring and revitalizing corporations or non-earning assets, including amidst the pressure and challenges that occurred in 2021.

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Ke depan, aset non-produktif yang telah direstrukturisasi tersebut akan terus diperbesar. Untuk itu, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sejalan dengan bisnis Perusahaan juga menjadi tantangan.

Karakter SDM di PPA umumnya berbeda dengan perusahaan lain, begitu juga perbankan, walaupun ada beberapa lini bisnis yang hampir sama. SDM di Perusahaan harus memiliki pengetahuan lengkap mulai dari sebagai penasihat (*advisor*) restrukturisasi dan revitalisasi, penyalur investasi (*lender*), sekaligus sebagai pemegang saham khususnya bagi berbagai BUMN yang dititipkelola kepada PPA.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada 2 (hal) utama yang dilakukan. Pertama, Perusahaan mengakuisisi para talenta internal, mengingat PPA telah memiliki program pengembangan kompetensi SDM secara internal. Pengembangan kompetensi tersebut termasuk yang menjadi perhatian utama Perusahaan. Dalam mendukung pengembangan talenta, Perusahaan lebih fokus pada model *on the job training*, bukan sekadar proses belajar di kelas.

Kedua, PPA juga mengakuisisi talenta dari eksternal. Dengan perkembangan Perusahaan seperti saat ini, yang memiliki kinerja dan fokus bisnis yang lebih terarah guna menjadi NAMCO, semakin banyak talenta unggul dibutuhkan oleh Perusahaan. Dengan adanya pengembangan kompetensi dan akuisisi talenta tersebut, ketersediaan talenta kian bertambah sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis Perusahaan.

Namun demikian, tantangan tidak berhenti di situ. Perlu ada upaya integrasi kultur antara SDM yang lama dengan para talenta baru. Proses integrasi berjalan lancar di Perusahaan karena dilakukan melalui strategi bersifat implementatif. Para talenta baru dan lama bergabung menghadapi situasi yang sama, menjadi tim kerja yang solid, sehingga tercipta perilaku yang saling mendukung. Perusahaan terus berusaha untuk menyiapkan nilai-nilai serta “*game*” atau ruang yang mendukung terciptanya perpaduan kultur-kultur tersebut.

Inisiatif Strategis dan Kebijakan Strategis

Penerapan 3 (tiga) pilar bisnis yang saat ini menjadi fokus PPA memang bukan penugasan baru, melainkan inisiatif untuk memperkuat posisi Perusahaan sebagai NAMCO. Upaya ini sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, yaitu: Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi.

Sesuai dengan visi tersebut, bisnis Perusahaan tidak terbatas pada BUMN, tetapi juga dapat dilakukan dengan korporasi swasta. Namun hingga tahun buku 2021, Perusahaan masih fokus pada pengelolaan BUMN, seiring dengan keterbatasan sumber daya.

Di bidang restrukturisasi dan revitalisasi, Perusahaan melaksanakannya melalui kuasa khusus pemegang saham. Peran strategis Perusahaan dilakukan secara aktif, yaitu terlibat langsung dalam pengelolaan, tidak terbatas sebagai

In the future, the non-earning assets that have been restructured will be continuously expanded. Therefore, the Company faces another challenge in preparing superior human capital (HC) in line with the Company's business growth.

The character of HC in PPA is generally different from other companies, such as in banking, despite similar business lines. The Company's HC must have end-to-end comprehension as an advisor on restructuring and revitalization, channelling investment (as a lender), and also as a shareholder, especially for various SOEs under PPA's SOEs restructuring scheme.

To overcome these challenges, there were 2 key strategies. First, the Company acquired internal talents, considering that PPA already has an internal HC competency development program. Talent competence development was one of the main focuses of the Company. In supporting talent development, the Company prioritized the on-the-job training model, not only classroom learning.

Second, PPA also acquired talent from external sources. With the current state of development that directs the Company to focus its business performance towards becoming a NAMCO, support from excellent talents was hugely needed by the Company. Having competency development and talent acquisition programs, the Company ensured the availability of talent to support its business activities.

However, the challenges did not stop there. Initiative on integrating culture between the existing human capital and the new talent was required. Implementing strategies were carried out so that the integration process ran smoothly. The existing and new talents joint forces to face the commonly shared situation, became a solid work team, thus fostering supportive behaviour. The Company strived to provide values and “*game*” or spaces supporting the melting pot of these cultures.

Strategic Policies and Initiatives

The implementation of 3 (three) business pillars under PPA focus was not a new assignment, but an initiative to strengthen the Company's position toward becoming a NAMCO. It was in line with the established vision, namely: To become a leading investment company and a trusted partner in corporate restructuring.

In accordance with this vision, the Company's business is not only limited to SOEs, but also applicable to private corporations. However, until the 2021 financial year, constrained by limited resources, the Company remained focused on managing SOEs.

In corporate restructuring and revitalization, the Company performed these activities through a special power of attorney of the shareholders. The Company's strategic role was carried out actively, by being directly involved in

Laporan Direksi Report of The Board of Directors

penasihat (*advisor*) atau kreditur seperti sebelumnya. Untuk mewujudkan hal itu, Perusahaan membuat *roadmap* pengembangan entitas yang direstrukturasikan dan direvitalisasi.

Sebagai bagian dari strategi revitalisasi aset yang telah berjalan adalah lahirnya kesepakatan sentralisasi pengadaan baja dalam rangka peningkatan kinerja aset dalam kluster manufaktur. Sentralisasi tersebut dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan dari 5 (lima) perusahaan BUMN Titip Kelola yang memiliki kesamaan kebutuhan bahan baku produksi, seperti *plate*, *steel pipe*, *structure*, *round bar*.

Terkait pengelolaan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL), jika sebelumnya PPA membeli aset tersebut melalui dana pinjaman kemudian asetnya dikelola oleh Perusahaan. Kini, pembiayaannya tidak melalui perbankan. Proses pengelolaan asetnya melalui entitas tersendiri, yaitu *special purpose vehicle* (SPV). Dengan demikian, risikonya terkelola dengan lebih baik dan tidak mempengaruhi kinerja keuangan PPA.

Untuk pilar bisnis investasi, perbedaan yang paling kentara terletak pada klien. Saat ini, yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih klien adalah kredibilitasnya dalam memenuhi kewajiban. Walaupun imbal hasil (*yield*) yang diterima Perusahaan lebih rendah dibandingkan sebelumnya, namun tercipta kesinambungan investasi.

Dalam pembiayaan, Perusahaan dapat menyalurkan investasi tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada proyek. Namun, sponsor atau pemilik proyek tersebut merupakan entitas yang *bankable* atau yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas dari perbankan. Selain itu, Perusahaan memilih investasi *brown-field*, yakni proyek atau infrastrukturnya sudah ada. Dengan demikian, Perusahaan dapat menurunkan risiko, seperti risiko saat proses konstruksi.

Dari sisi *exit strategy*, dalam arti selesainya pengelolaan aset hingga akhirnya memiliki nilai lebih baik dan menjadi produktif, Perusahaan telah memiliki sejumlah opsi. Dari membuka peluang menawarkan saham perdana ke publik (IPO), kerja sama strategis dengan pihak lain, atau dikelola sendiri. Pilihan tersebut sangat bergantung pada perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memiliki peran penting dalam perumusan strategi. Pada tahap awal, strategi umum ditetapkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") yang ditetapkan oleh Direksi bersama Dewan Komisaris pada akhir tahun buku sebelumnya.

RKAP merupakan realisasi dari Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal yang dituangkan dalam bentuk rencana dan target kerja. RKAP memuat strategi, kebijakan dan kegiatan atau program kerja Perusahaan yang menjadi pedoman dan arah untuk mencapai sasaran pada tahun buku.

management, not only as an advisor or creditor as it was before. To achieve this, the Company established a roadmap for the development of the entity under restructuring and revitalization.

As part of the asset revitalization strategy that has been implemented, the Company initiated a centralized steel procurement to improve asset performance in the manufacturing cluster. The centralization was driven by the need from the 5 (five) SOEs Under Management that have the same demand of raw materials for their production process, such as plate, steel pipe, structure, round bar.

In non-performing loan (NPL) management, previously PPA purchased the assets using a loan facility and then the assets were managed by the Company. Now, the financing is not channeled through banks but through a separate entity, namely a special purpose vehicle (SPV), to manage the asset. Thus, the corresponding risk is better managed and does not affect PPA's financial performance.

In the investment business, the notable difference lies in the client. Currently, the main consideration in selecting customers is their credibility in fulfilling obligations. Although the yield received by the Company is lower than that of before, it fosters sustainability in the investment.

In terms of financing, the Company could channel investment not only to companies, but also to projects. However, the sponsor or owner of the project should be a bankable entity or those who meet the requirements for obtaining facilities from banks. In addition, the Company prefers brown-field investments, namely those whose project or infrastructure is already established. Therefore, the Company can reduce risks, such as risks during the construction process.

In terms of the exit strategy, such as the completion of asset management as indicated by improved valuation and productivity, the Company held several options. There were options to offer shares to the public (IPO), strategic partnership with other parties, or continuing the asset management. The final option depended on the development of the arising situation and conditions.

The Board of Directors' Role in Formulating Strategies and Strategic Policies

The Board of Directors played an important role in strategy formulation. At the initial stage, the general strategy was set out through the Company Work Plan & Budget (RKAP) stipulated by the Board of Directors together with the Board of Commissioners at the end of the previous financial year.

RKAP was the realization of Shareholders'/Capital Holders' Aspirations as outlined in the form of work plans and targets. The RKAP contains the Company's strategies, policies and activities or work programs that serve as guidelines and direction for achieving the financial year targets.

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

RKAP tersebut, antara lain berisi tentang perkembangan terakhir organisasi Perusahaan; Rencana Kerja Perusahaan; Anggaran Perusahaan dan Sumber Pendanaan; Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan; Proyeksi Keuangan Pokok dan Induk Perusahaan; Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan; serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Selain itu, pada tahun berjalan Direksi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi. Hasilnya merupakan penyesuaian dan arahan dari hasil evaluasi untuk dijalankan oleh organisasi di bawah Direksi.

Hal ini memperlihatkan peran dan fungsi strategis Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Perannya sejak perumusan strategi dan kebijakan, implementasi, hingga pertanggungjawaban.

Proses Direksi Memastikan Implementasi Strategi

Direksi memiliki banyak pilihan untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai harapan. Salah satunya adalah turun langsung ke bawah, menjadi bagian dari proses, atau melakukan pemantauan langsung.

Bagi kami, proses tersebut bukan sekadar pengawasan. Di dalamnya juga ada proses pembelajaran atau pelatihan. Dengan demikian, Direksi memberikan pemahaman kepada organisasi di bawahnya tidak berhenti sampai memberikan gagasan dan keputusan, melainkan juga menunjukkan dan memperlihatkan hingga ke *level of detail*.

Dengan demikian, Direksi juga dapat langsung memahami dengan baik masalah yang dihadapi tim, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak. Proses pengawasan dan pembelajaran ini akan membuat organisasi bekerja secara berkesinambungan, karena hubungan yang tercipta bukan sekadar antara atasan yang memberikan perintah dengan bawahan yang menjalankan tugas.

Perbandingan Target dan Realisasi

Secara umum, pencapaian target usaha Perusahaan pada tahun 2021 berada di atas target yang ditetapkan dalam RKAP. Bahkan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut didukung oleh penerapan strategi yang tepat oleh Perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, Perusahaan juga mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu pengelolaan aset non produktif secara signifikan, pengelolaan risiko, dan perbaikan kualitas portofolio aset. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan likuiditas Perusahaan.

Pencapaian kinerja usaha yang positif tersebut, misalnya dapat dilihat dari laba bersih tahun berjalan yang berhasil dibukukan pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp165,1 miliar.

The RKAP, among others, contained the latest developments in the Company's organization; Company Work Plan; Company Budget and Sources of Funding; Principal Financial Projection of the Company; Principal and Parent Company Financial Projections; Key Performance Indicators and Health Level Assessment Indicators; and Corporate Social and Environmental Responsibility.

In addition, the Board of Directors also evaluated the implementation of the strategy throughout the current year. The result of the assessment was then cascaded as adjustments and directions to be carried out by organizations under the Board of Directors.

This flow shows the strategic roles and functions of the Board of Directors in managing the Company, ranging from formulation of strategy and policy, implementation, to accountability.

The Board of Directors Activities in Ensuring Strategy Implementation

The Board of Directors had many options to ensure that the strategies, which have been set out, were implemented as expected. One of them was to go directly to the floor to be part of the process or perform direct monitoring.

These activities were way beyond monitoring. It also involved a learning or training process. Thus, the Board of Directors directed the activities to the lower organization not only by providing ideas and decisions, but also by showing and going through them to the level of detail.

Therefore, the Board of Directors could also immediately understand the problems faced by the team, to come up with accurate and prudent decisions. This supervision and learning process would enable the organization to work continuously, beyond the mere relationship between superiors who gave orders and subordinates who carried out tasks.

Comparison of Target and Realization

Overall, the achievement of the Company's business targets in 2021 was above the target initially set in the RKAP, even much improved compared to that of the previous year.

This achievement was supported by the implementation of the right strategy by the Company, resulting in outstanding performance. In addition, the Company also prioritized good corporate governance, by performing non-earning asset management, risk management, and improvement of asset portfolio quality. All of these were aimed at increasing the Company's liquidity.

The positive business performance could be seen in the net income for the current year, recorded at Rp165.1 billion in 2021. Compared to 2020, which amounted to Rp105.8

Laporan Direksi Report of The Board of Directors

Dibandingkan dengan tahun 2020 yang Rp105,8 miliar, terjadi kenaikan 56,12%. Bahkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKAP, yaitu Rp122,5 miliar, pencapaiannya adalah 134,74%.

Sementara dari sisi pendapatan usaha, pencapaiannya adalah sebesar Rp6,6 triliun atau 97,06% dari target RKAP yang Rp6,8 triliun. Dibandingkan kinerja tahun lalu, yaitu Rp4,4 triliun, kinerja tahun buku 2021 lebih tinggi 48,61%.

Total aset yang berhasil dibukukan Perusahaan juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 36,34%. Jika pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp13,0 triliun, di tahun 2021 menjadi Rp17,7 triliun.

Pencapaian Perusahaan lebih rinci yang membandingkan antara realisasi dengan target RKAP disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi dan Proyeksi (Konsolidasian) Comparison of Realization and Projection (Consolidated)

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

(Rp Million, unless stated otherwise)

No.	Uraian Description	Target RKAP 2021 2021 RKAP Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Persentase Pencapaian Achievement Percentage
1	Total Aset Total Assets	21.839.792	17.662.501	80,87%
2	Total Liabilitas Total Liabilities	15.071.146	8.293.690	55,03%
3	Total Ekuitas Total Equity	6.768.646	9.368.811	138,41%
4	Pendapatan Usaha Operating Revenues	6.774.942	6.535.658	96,47%
5	Beban Usaha Operating Expenses	6.374.913	6.368.336	99,90%
6	Laba Usaha Operating Profit	400.029	167.322	41,83%
7	Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	122.551	165.125	134,74%

PROSPEK USAHA

Dalam menyusun prospek usaha Perusahaan, selain mempertimbangkan kapasitas internal, Direksi juga mempertimbangkan kondisi eksternal. Perusahaan memandang bahwa kondisi tahun depan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan proyeksi pemerintah, seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun 2022. Seperti tertuang dalam Nota Keuangan yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, target Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0-5,5%, jauh lebih baik dibandingkan pencapaian tahun 2021 yang 3,69%. Asumsi tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian telah kembali normal.

Bahkan dalam pertimbangan Perusahaan, setelah melalui 2 (dua) tahun pandemi, tingkat permintaan akan pulih. Hal ini akan mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh.

BUSINESS PROSPECT

In preparing the Company's business prospects, apart from considering internal capacity, the Board of Directors also pays attention to external conditions. The Company views that the following year will be better than 2021.

This is in line with the government's projections, as stated in the 2022 State Budget (APBN). As stated in the Indonesia Note published by the Ministry of Finance, the target for economic growth reaches 5.0-5.5%, higher than that of 2021 at 3.69%. This assumption shows that the economy has returned to normal.

Under the Company's projection, demand will recover following 2 (two) years of the pandemic. This will boost Indonesia's economic growth.

Kendati demikian, Perusahaan juga tidak menafikan kemungkinan adanya pemulihan yang tidak merata dari sisi sektor usaha. Dalam arti, ada yang pulih lebih cepat sehingga kembali seperti kondisi sebelum krisis dan ada juga yang memerlukan waktu lebih lama.

Perusahaan akan melihat situasi ke depan secara positif. Selain mempertimbangkan peluang bisnis, perbaikan kondisi perekonomian juga akan mendukung kinerja Perusahaan yang sedang berjalan, terutama di bidang restrukturisasi dan revitalisasi aset. Karena itu, pilihan strategi akan sangat menentukan perkembangan kinerja.

Apalagi saat ini, dengan posisi PPA yang semakin baik di mata para pemangku kepentingan maka akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi Perusahaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk itu, penetapan fokus dan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi penting yang akan diterapkan Perusahaan pada tahun 2022 adalah berfokus pada 3 (tiga) pilar bisnis, yang saat ini telah berjalan dengan baik. Seluruhnya harus berjalan dengan baik dan berkelindan, tidak bisa separuh-separuh. Bersamaan dengan itu, Perusahaan juga fokus pada efisiensi di bidang operasional atau kegiatan usaha, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan harapan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan usaha. Upaya tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menjaga kesinambungan dalam mengimplementasikan GCG, Perusahaan mengembangkannya selaras dengan praktik terbaik dalam memaksimalkan nilai Perusahaan, melaksanakan kegiatan usaha yang efektif dan efisien, pengelolaan Perusahaan yang profesional dan mandiri, serta menciptakan pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan berdasarkan pada nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara maksimal.

Selain itu, Perusahaan juga telah melengkapi organisasi tata kelola perusahaan dengan perangkat norma yang diperlukan. Termasuk di dalamnya berkenaan dengan penerapan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan mengacu pada standar ISO 31000 : 2018 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko.

Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasional dan dapat mempengaruhi kinerja usaha Perusahaan. Karena itu,

However, the Company does not rule out the possibility of an uneven recovery across the business sector. Some sectors will recover to the pre-crisis state faster, while others may take longer.

The Company views the future positively. In addition to prevailing business opportunities, an improvement in the economic environment will also support the Company's ongoing performance, particularly in Indonesia's restructuring and revitalization. Therefore, decisions on strategy will greatly determine performance.

Especially now, at the time when PPA is better positioned in the eyes of stakeholders, the Company will be exposed to wider opportunities to collaborate with various parties. For this reason, setting the right focus and strategy becomes crucial.

The key strategy that will be implemented by the Company in 2022 is to focus on 3 (three) business pillars, which have been operating well. All of them should go hand in hand and be interconnected, not partial. At the same time, the Company also focuses on efficiency in operations or business activities, so that all run well as planned.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company realizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) in running its business. These efforts are carried out systematically and continuously, with the main objective of protecting the interests of the Company, shareholders, and other stakeholders.

To maintain continuity, the Company implements GCG in line with best practices to maximize the Company's value, carrying out effective and efficient business activities, professional and independent management of the Company, as well as decision making by all Company bodies based on moral values and compliance with prevailing laws and regulations. In addition, the Company also provides fair protection and treatment to shareholders and other stakeholders optimally.

In addition, the Company has also equipped the corporate governance organization with the required set of norms, including the implementation of risk management. The Company's risk management policy refers to the ISO 31000 : 2018 standard on "*Risk Management-Principles and Guideline*" and becomes a guideline for all Company personnel in carrying out risk management activities.

The Company realizes that risk is an integral part of every operational activity and can affect the Company's business performance. Therefore, the implementation of

Laporan Direksi Report of The Board of Directors

penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dalam mengelola risiko secara efektif, efisien, dan konsisten sebagai perwujudan dari penerapan GCG.

Comprehensive risk management is an important aspect of managing risk effectively, efficiently, and consistently as a reflection of GCG implementation.

Guna memastikan penerapan tata kelola dapat berjalan dengan baik, PPA melakukan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola di Perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip CGG telah diimplementasikan. Evaluasi terhadap penerapan GCG di tahun buku 2021 dilakukan melalui proses *assessment* oleh penilai independen Indonesia Adikarya Gemilang Solusindo. *Assessment* tersebut berpedoman pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Indonesia. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

To ensure that the implementation of good governance runs well, PPA performs an evaluation of the GCG implementation within the Company to obtain a description of the extent to which GCG principles have been implemented. Evaluation of GCG implementation throughout 2021 Indonesia year was carried out through an assessment by external parties based on a Copy of the Secretary of the Ministry of SOEs Decree Indonesia. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs. The assessment was carried out by an independent appraiser, Indonesia Adikarya Gemilang Solusindo.

Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan pada bulan Indonesia 2022, PPA berhasil meraih skor 91,73 atau dengan predikat "Sangat Baik". Implementasi GCG PPA selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa GCG telah menyatu dalam budaya kerja Perusahaan serta menunjukkan komitmen seluruh Insan PPA dalam menerapkan GCG.

Based on the results of the assessment conducted in Indonesia 2022 on the implementation of governance in 2021 Indonesia year, PPA managed to achieve a score of 91.73 or "Very Good". PPA's GCG implementation always shows an upward throughout the year. It indicates that GCG has been integrated into the Company's work culture, and shows the commitment of all PPA Personnel to implementing GCG.

Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PPA juga mendapat apresiasi yang dari pemangku kepentingan, seperti ditunjukkan melalui penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), yaitu: Badan Publik "Cukup Informatif" untuk kategori Badan Usaha Milik Negara. Penghargaan tersebut disampaikan dalam ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang disampaikan secara virtual oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada 26 Oktober 2021.

In addition, the implementation of good corporate governance within the PPA has also received appreciation from the stakeholders, as shown by the award given by the Central Information Commission (KIP), namely: Public Agency with "Fairly Informative", under the category of State-Owned Enterprises. The award was presented at the 2021 Public Information Disclosure Award event, which was delivered virtually by the Indonesian Vice President Ma'ruf Amin on 26 October 2021.

Predikat "Cukup Informatif" yang diterima PPA berada pada posisi kedua dengan skor sebesar 77,37. Pencapaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya di tahun 2020, yaitu sebesar 69,55.

The title "Fairly Informative" received by PPA was in second place with a score of 77.37. This achievement increased from that of the previous year, which was 69.55 in 2020.

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi KIP tahun 2021 diikuti oleh 337 Badan Publik yang terdiri dari sektor Pemerintah Provinsi, Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

The monitoring and evaluation of KIP in 2021 were participated by 337 Public Agencies consisting of Provincial Government, Ministries, State Institutions and Non-Ministerial Government Institutions, Non-Structural Institutions, State-Owned Enterprises, State Universities, and Political Parties.

KOMITMEN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Implementasi komitmen berkelanjutan PPA, terutama diwujudkan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Pelaksanaan program tersebut setidaknya mengacu pada 2 (dua) regulasi, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017

COMPANY COMMITMENT ON SUSTAINABILITY

PPA's commitment to sustainability is primarily reflected through the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities. The implementation of the program refers to at least 2 (two) regulations, namely the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises and the Indonesia Services Authority

tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Dalam pelaksanaan TJSL, Perusahaan juga memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui komitmen tersebut, Perusahaan berharap dapat berkontribusi secara maksimal kepada pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

Selain itu, program TJSL juga diwujudkan melalui kemitraan dengan usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui program tersebut, Perusahaan berupaya untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dengan menyalurkan dana bergulir dalam bentuk pinjaman berbunga rendah. Melalui dukungan, kapabilitas usaha kecil yang menjadi mitra diharapkan dapat meningkat, sehingga menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Pelaksanaan TJSL Perusahaan mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan. Perusahaan meraih "Juara I Kategori Pilar Ekonomi" pada Penghargaan TJSL & CSR Award 2021 yang diselenggarakan majalah BUMN Track.

Penghargaan ini adalah apresiasi atas komitmen dan peran PPA dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program TJSL. Komitmen tersebut telah direalisasikan sejak tahun 2009 melalui penyaluran Pendanaan UMK senilai total Rp79 miliar kepada 318 mitra yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASANNYA

Pada tahun 2021 terjadi perubahan susunan Direksi. Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham menunjuk JF Hasudungan sebagai Direktur Special Asset Management melalui surat keputusan tertanggal 14 September 2021.

Sesuai surat keputusan tersebut, penambahan anggota Direksi ini bertujuan untuk mengefektifkan pengurusan Perusahaan. Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Perusahaan.

Adapun susunan Direksi hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Dasar Pengangkatan The Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Yadi Jaya Ruchandi Direktur Utama President Director	- Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. Sk-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. - Sebagai Direktur Utama: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. - As Board of Directors: The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. Sk 265/MBU/08/2020 dated August 6, 2020. - As President Director: The Decree of The Minister of State-Owned Enterprises as The GMS No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020.	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025. August 6, 2020 – The Closing of The GMS for 2024 Fiscal Year which will be held in 2025.	Ke-1 1 st

Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Indonesia Service Institutions, Issuers and Public Companies.

In implementing TJSL, the Company also pays attention to the Sustainable Development Goals (SDGs), which have been ratified through Presidential Regulation Indonesia Number 59 of 2017 concerning the Implementation of Sustainable Development Goals. Through this commitment, the Company hopes to contribute optimally to stakeholders, especially the community.

In addition, the TJSL program is also reflected through partnerships with micro and small enterprises (MSEs). Through this program, the Company seeks to contribute to improving the welfare of small communities by distributing revolving funds of low-interest loans. Through this assistance, it is expected that the small businesses under the partnership would improve their capabilities, fostering their resilience and independence.

The implementation of the Company's TJSL received positive responses from the stakeholders. The Company won "First Winner of the Economic Pillar Category" at the 2021 TJSL & CSR Award organized by BUMN Track magazine.

The award was an appreciation of PPA's commitment and role in supporting community empowerment through the TJSL program. This commitment has been realized since 2009 through the distribution of SME Funding totaling Rp79 billion to 318 partners spread across 17 provinces in Indonesia.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE REASONING

There was a change in the composition of the Board of Directors in 2021. The Minister of SOEs as the Shareholder appointed JF Hasudungan as Director of Special Asset Management through a decree dated 14 September 2021.

As stipulated in the decree, the addition of members of the Board of Directors aimed to streamline the management of the Company and meet the needs of the Company's organization.

The composition of the Board of Directors as of December 31, 2021 was as follows:

Laporan Direksi Report of The Board of Directors

Nama Name	Dasar Pengangkatan The Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Rizwan Rizal Abidin Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 and Restructuring	- Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. Sk-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. - Sebagai Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. - As Board of Directors: The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. Sk-265/MBU/08/2020 dated August 6, 2020. - As Director of Investment 1 and Restructuring: The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020.	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025. August 6, 2020 - The Closing of The GMS for 2024 Fiscal Year which will be held in 2025.	Ke-1 1 st
Adi Pamungkas Daskian Direktur Investasi 2 Director of Investment 2	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020.	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025. October 9, 2020 - The Closing of the GMS for 2024 Fiscal Year which will be held in 2025.	Ke-1 1 st
JF Hasudungan Direktur Special Asset Management Director of Special Asset Management	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor SK-309/MBU/09/2021 tanggal 14 September 2021. The Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No SK-309/MBU/09/2021 dated September 14, 2021.	14 September 2021 – Penutupan RUPS Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026 September 14, 2021 – Closing of the Annual GMS for 2025 fiscal year to be held in 2026	Ke-1 1 st

PENUTUP DAN APRESIASI

Direksi menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengelola PPA. Pada tahun buku 2021 ini, kinerja Perusahaan sangat baik, begitu juga dengan pelaksanaan 3 (tiga) pilar bisnis yang akan mengukuhkan PPA sebagai NAMCO.

Pencapaian positif tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan serta menjadi mitra strategis Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kepada seluruh karyawan Insan PPA, izinkan Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan.

CLOSING AND APPRECIATION

The Board of Directors would like to thank the shareholders for the trust given to manage PPA. In the 2021 financial year, the Company's performance was very satisfactory, so was the implementation of the 3 (three) business pillars that will strengthen PPA as a NAMCO.

This positive achievement cannot be separated from the role of the Board of Commissioners, who has provided direction and become the strategic partner of the Board of Directors in carrying out the business activities.

To all PPA employees, allow the Board of Directors to express our highest appreciation for your utmost dedication.

Jakarta, Mei 2022 | May 2022

Atas nama Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
On behalf of the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)



Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Statement of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2021 Annual Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby state that all information contained in the 2021 Annual Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) has been comprehensively presented and we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, Mei 2022 | May 2022

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



KRISNA WIJAYA

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently as Independent
Commissioner



MARWANTO HARJOWIRYONO

Komisaris
Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



YADI JAYA RUCHANDI

Direktur Utama
President Director



RIZWAN RIZAL ABIDIN

Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi
Director of Investment 1 & Restructuring



ADI PAMUNGKAS DASKIAN

Direktur Investasi 2
Director of Investment 2



JF HASUDUNGAN

Direktur Special Asset Management
Director of Special Asset Management

- 
- | | |
|---|---|
| 58 Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
General Informations and Company Identity | 94 Pendidikan dan Pelatihan: Program Pengembangan Kompetensi Karyawan
Education and Training: Employee Competency Development Program |
| 59 Riwayat Singkat PPA
Brief History | 106 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition |
| 66 Jejak Langkah
Milestones | 107 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure |
| 68 Visi, Misi, Budaya dan Nilai Perusahaan
The Company's Vision, Mission, Culture, and Values | 108 Entitas Induk, Entitas Anak dan Ventura Bersama
Parent Entity, Subsidiary, and Joint Venture |
| 71 Makna Logo Perusahaan
The Meaning of The Company Logo | 111 Sekilas tentang Entitas Anak
Overview of Subsidiaries |
| 72 Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang Dilayani
Lines of Business, Products and Services, and Market Served | 119 Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing |
| 80 Struktur Organisasi
Organization Structure | 119 Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing and Issuance |
| 82 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profile | 121 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Institutions and Professions That Support The Capital Market |
| 84 Profil Direksi
Board of Directors Profile | 124 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications |
| 88 Profil Manajemen Senior
Senior Managements' Profile | 125 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on Company's Website |
| 90 Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi
Employee Demographics and Competency Development | |

Profil Perusahaan

COMPANY PROFILE

03





Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

GENERAL INFORMATIONS AND COMPANY IDENTITY

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Nama Perusahaan
Company's Name

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

Status dan Badan Hukum
Status and Legal Entity

Dasar Hukum Pembentukan
Basic Law of Formation

Maksud dan Tujuan Pendirian
Purposes and Objectives of
Establishment

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Modal Dasar
Authorized Capital

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-in Capital

Rating Perusahaan
Company Rating

Obligasi
Bonds

Jumlah Karyawan
Number of Employees

Entitas Anak dan Asosiasi
Subsidiaries and Associations

Alamat
Address

Telepon
Phone

Faksimili
Faximilie

Surel
E-mail

Situs Web
Website

Media Sosial
Social Media

Kontak Perusahaan
Company Contact

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

27 Februari 2004
February 27, 2004

Perseroan Terbatas (PT) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Limited Liability Company (PT)/State-Owned Enterprise (SOE)

1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004.
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008.
1. Government Regulation Number 10 of 2004 regarding the Establishment of a Company (Persero) in Asset Management Sector, dated February 27, 2004.
2. Government Regulation Number 61 of 2008 as Amendment to Government Regulation Number 10 of 2004 regarding The Establishment of a Company (Persero) in Asset Management Sector, dated September 4, 2008

Pengelolaan Aset eks. BPPN, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset BUMN
Ex-IBRA Asset Management, Restructuring and/or Revitalization (R/R) of State-Owned Enterprises (SOEs), investment activities, and Asset Management activities of SOEs

Pemerintah Republik Indonesia, 100,00%
Government of the Republic of Indonesia, 100.00%

Rp20.000.000.000.000

Rp5.952.623.000.000

Fitch Ratings: AA (idn) ; Pefindo: idAA

Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Seri A, Seri B dan Seri C; kode obligasi: PPAP
peringkat: idAA dari PEFINDO
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2020 Bonds I Series A, Series B, and Series C; Bond code: PPAP
Rating: idAA from PEFINDO

166 orang / people

PT PPA Finance, PT PPA Kapital, PT Nindya Karya

Menara Mandiri II Lantai 7-9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Pusat 12190, DKI Jakarta
Indonesia
Mandiri Tower II Floors 7-9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Central Jakarta 12190, DKI Jakarta
Indonesian

+61 21 5798 2222

+61 21 577 2443

corpsec@ptppa.com

www.ptppa.com

Facebook: @ptppapersero
Twitter: @ptppapersero
Instagram: @ptppapersero

Sekretaris Perusahaan: Agus Widjaja
Surel: agus.widjaja@ptppa.com
Corporate Secretary: Agus Widjaja
E-mail: agus.widjaja@ptppa.com

Riwayat Singkat PPA

BRIEF HISTORY

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga dengan “Perusahaan” atau “PPA” didirikan berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Pada awalnya, tujuannya adalah untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum. Perusahaan didirikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

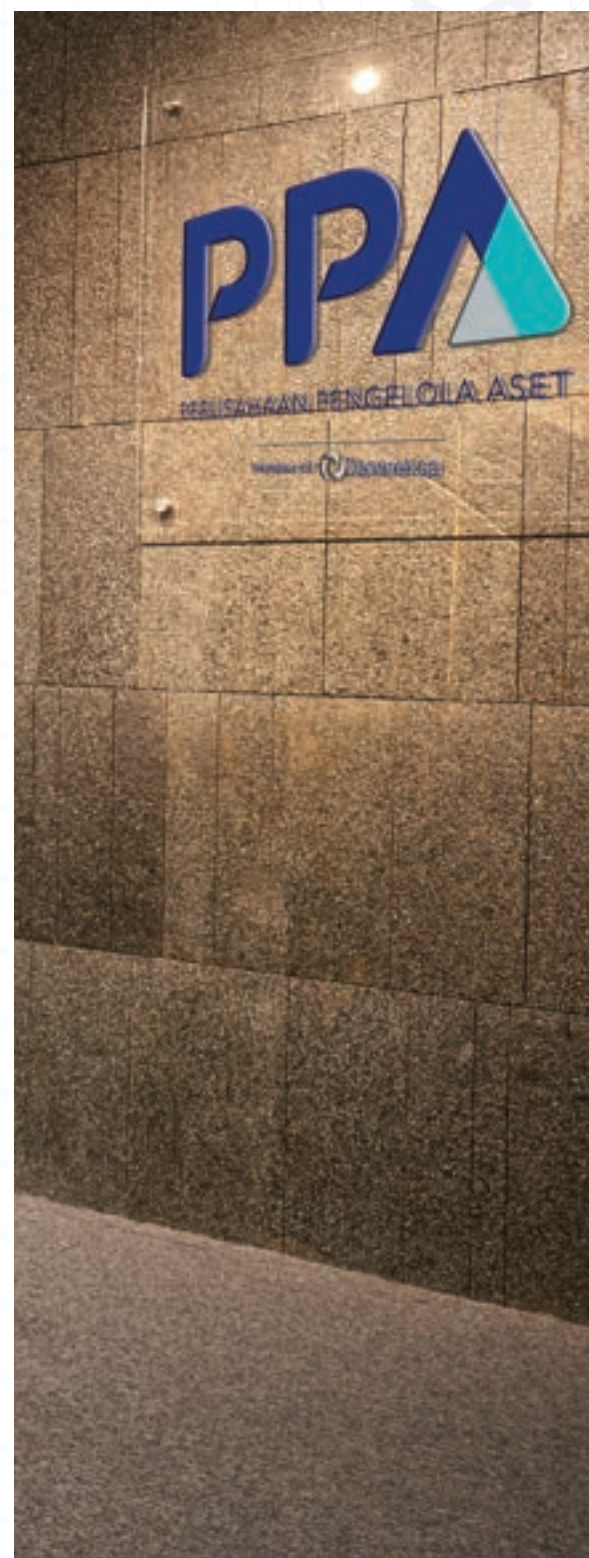
Pendirian Perusahaan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004. Selanjutnya Perusahaan menerima tugas dari Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan aset eks BPPN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan Perusahaan.

Melihat kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset eks BPPN, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas tambahan kepada Perusahaan, terutama untuk membantu pemerintah dalam upaya penyehatan BUMN yang bermasalah. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perusahaan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), also known as “the Company” or “PPA,” was established based on Government Regulation No. 10 of 2004, dated February 27, 2004, regarding the Establishment of a Company (Persero) in the Asset Management Sector. Initially, the objective was to manage the non-litigant assets of the ex-Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA). The Company was established for a five-year period, which can be extended with the agreement of the General Meeting of Shareholders (GMS).

The Company was established on February 27, 2004, under Deed of Establishment No.7 before Notary Lenny Janis Ishak, S.H., in Jakarta, and has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights under No.C-05780 HT.01.01.TH.2004, dated March 9, 2004. Furthermore, the Minister of Finance assigned the Company to manage the assets of ex-IBRA, as indicated in the Asset Management Agreement signed by the Minister of Finance and the Company on March 24, 2004.

The Company’s ability to manage ex-IBRA’s assets preceded the necessity to entrust the Company with new assignments, primarily to assist the government in revitalizing distressed SOEs. Accordingly, the government took this into consideration when assessing the strategy and reformulating the Company’s goals and objectives.



Ruang lingkup Perusahaan bertambah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sehingga maksud dan tujuan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Negara eks BPPN;
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN;
3. Kegiatan investasi; serta
4. Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perusahaan menerbitkan Keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) pada tanggal 10 September 2008. Keputusan tersebut mengubah masa tugas Perusahaan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha PPA, Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham telah menetapkan perubahan Struktur Permodalan dan Anggaran Dasar Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2021. Keputusan ini telah disahkan oleh notaris dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham pada tanggal 26 Juni 2021.

PASAL 4

1. Modal dasar Perusahaan ini ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah), terbagi atas 20.000.000 (dua puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 5.952.623 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau seluruhnya sebesar Rp5.952.623.000.000 (lima triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp5.952.623.000.000 (lima triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (pemegang saham) dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp2.996.688.000.000 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) merupakan setoran modal lama sesuai dengan akta Nomor 27 tanggal 15-02-2016 (lima belas Pebruari dua ribu enam belas) yang dibuat di hadapan Notaris Desman, Sarjana Hukum, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0029777

Furthermore, pursuant to Government Regulation No. 61 of 2008, dated September 4, 2008, as an amendment to Government Regulation No. 10 of 2004 regarding the Establishment of a Company (Persero) in the Assets Management Sector, the Company's aims and objectives were expanded into the following:

1. Ex-IBRA Assets Management;
2. SOEs Restructuring and/or Revitalization;
3. Investment Activities; and
4. SOEs Assets Management Activity.

On September 10, 2008, in response to the government regulation, the Company's shareholders made a shareholders' decision (in lieu of GMS). The decision extended the term of office of the Company from five years to an indeterminate period (going concern).

To facilitate the growth of the PPA business, the Minister of SOEs, acting as a proxy for shareholders, has determined that the Company's capital structure and articles of association will be amended on May 28, 2021. This decision was confirmed by a notary and notified to the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). Accordingly, on June 26, 2021, the Ministry of Law and Human Rights received a letter notification of the revision to the Articles of Association.

ARTICLE 4

1. The Company's authorized capital is set at Rp20,000,000,000,000 (twenty trillion Rupiah), divided into 20,000,000 (twenty million) shares with a nominal value of Rp1,000,000 each (one million Rupiah).
2. The Republic of Indonesia has issued and subscribed for 5,952,623 (five million nine hundred fifty-two thousand six hundred twenty-three) shares, or a total of Rp5,952,623,000,000 (five trillion nine hundred fifty-two billion) shares from the authorized capital.
3. The Republic of Indonesia (shareholders) have fully paid of Rp5,952,623,000,000 (five trillion nine hundred and fifty-two billion six hundred and twenty-three million Rupiah) of the nominal of each share issued above in the following manner:
 - a. Rp2,996,688,000,000 (two trillion nine hundred and ninety-six billion six hundred and eighty-eight million Rupiah) is the previous paid-up capital pursuant to deed No. 27 dated 15-02-2016 (fifteen February two thousand sixteen) made before Notary Desman, Bachelor of Law, which has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0029777 dated 8-03-2016 (eight March two thousand sixteen), and has been announced in

tanggal 8-03-2016 (delapan Maret dua ribu enam belas), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 8-10-2019 (delapan Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor 81, Tambahan Nomor 35587/2019;

- b. Sebesar Rp2.955.935.000.000 (dua triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) disetorkan dalam bentuk pengalihan:
 - 1) seluruh saham Seri B milik Negara RI pada PT Indosat Tbk.
 - 2) seluruh saham milik Negara RI pada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri.
 - 3) seluruh saham seri A dan seri B milik Negara RI pada PT Bank KB Bukopin Tbk.
 - 4) seluruh saham milik Negara RI pada PT Kawasan Industri Lampung.
 - 5) seluruh saham seri B, seri C, dan seri D milik Negara RI pada PT Socfin Indonesia.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021.

Pada tanggal 19 November 2021 Menteri BUMN melalui surat Nomor S-886/MBU/11/2021 tentang Perubahan Maksud dan Tujuan, Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan dimaksud telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 1 Desember 2021 dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("KemenKumHam") dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari KemenKumHam berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0482423 pada tanggal 7 Desember 2021 serta telah memperoleh Keputusan KemenKumHam Nomor AHU-0216068.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Perubahan tersebut antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), menambah satu ayat pada Pasal 4 yaitu ayat (11).
 - a. Modal Dasar Perusahaan ini sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yang terbagi atas:
 - b. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
 - c. 19.999.999 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp19.999.999.000.000,00 (sembilan belas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

the State News of the Republic of Indonesia dated 8-10-2019 (eight October two thousand nineteen) Number 81, Supplement Number 35587/2019;

- b. Rp2,955,935,000,000 (two trillion nine hundred fifty-five billion nine hundred thirty-five million Rupiah) paid in the form of a transfer:
 - 1) All Series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Indosat Tbk.
 - 2) the Republic of Indonesia entire shares in PT Prasadha Pamunah Limbah Industri.
 - 3) All series A and series B owned by the Republik of Indonesia in PT Bank KB Bukopin Tbk.
 - 4) the Republic of Indonesia entire shares in PT Kawasan Industri Lampung.
 - 5) All series B, series C, and series D owned by the Republik of Indonesia in PT Socfin Indonesia.

As stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2021.

On November 19, 2021, the Minister of SOEs stipulated changes to the Company's Articles of Association in letter Number S-886/MBU/11/2021 on Changes in Intent and Purpose, Changes in Capital Structure, and Changes in the Articles of Association of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). The amendment is detailed in the Deed of Decision of Meeting No. 10 dated December 1, 2021, which was signed before Desman, S.H., M.Hum, Notaries in the Administrative City of North Jakarta. Furthermore, it was reported to the Ministry of Law and Human Rights, which received a letter from the Ministry of Law and Human Rights on December 7, 2021, based on a letter with the number AHU-AH.01.03-0482423. It obtained the Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0216068.AH.01.11.Year 2021, dated December 7, 2021, concerning the Approval of Amendments to the Articles of Association of The Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

These changes include:

1. Article 4, paragraphs (1) and (2), with the addition of one paragraph to Article 4, i.e., paragraph (11),
 - a. The Company's Authorized Capital was Rp20,000,000,000,000.00 (twenty trillion rupiah), which was divided as follows:
 - b. 1 (one) Dwiwarna A series share; and
 - c. 19,999,999 (nineteen million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) series B shares, with a nominal value for each of Rp1,000,000.00 (one million rupiah) or entirely with a nominal value of Rp19,999,999,000,000.00 (nineteen trillion nine hundred ninety-nine billion nine hundred and ninety-nine million rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 5.952.623 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.952.623.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. 5.952.622 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.952.622.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh dua juta rupiah).
 3. Ayat 11: Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 4. Mengubah keseluruhan Pasal 5:
 1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdafil dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:
 - a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia, dan
 - b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh masyarakat.
 2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
 3. Perusahaan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
 4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara;
b. Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
c. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - c.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - c.2. Persetujuan perubahan Permodalan;
 - c.3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Of the authorized capital, 5,952,623 (five million nine hundred fifty-two thousand six hundred twenty-three) shares have been issued, and the Republic of Indonesia has paid for a total nominal value of Rp5,952,623,000,000.00 (five trillion nine hundred fifty-two billion, six hundred and twenty-three million rupiahs), comprised of the following:
 - a. 1 (one) share of Dwiwarna Series A with a nominal value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah); and
 - b. Rp5,952,622,000.00 (five trillion nine hundred fifty-two billion, six hundred and twenty-two million rupiah) series B shares with a total nominal value of Rp5,952,622,000.00 (five trillion nine hundred fifty-two billion, six hundred and twenty-two million rupiah).
 3. Paragraph 11: The shareholders of Series A Dwiwarna shares shall attend the General Meeting of Shareholders referred to in this Article, and the Meeting's decision shall be approved by the shareholders of Series A Dwiwarna shares.
 4. Amend the entirety of Article 5:
 1. The Company's shares are those held and issued on behalf of its owners, as identified in the List of Shareholders, which includes the following:
 - a. Dwiwarna Series A share that is only owned by the Republic of Indonesia, and
 - b. Series B shares that are owned by the general public.
 2. Unless otherwise specified in the Articles of Association, the terms "shares" refer to Series A and series B Dwiwarna shares, and "shareholders" refer to series A and series B Dwiwarna shareholders.
 3. The Company only recognizes a person or a legal entity as the party authorized to exercise the rights granted by law to shares.
 4. a. Unless otherwise specified in the Articles of Association, the shareholders of series A Dwiwarna and series B have the same rights, and each 1 (one) share provides 1 (one) voting right.
b. According to these Articles of Association, Series A Dwiwarna Shares are shares that provide special rights to the holder as stipulated in the Articles of Association and are owned exclusively by the Republic of Indonesia as the Holder of Series A Dwiwarna Shares.
c. The rights of the Series A Dwiwarna Shareholders referred to in letter b are the rights to approve in the GMS the following matters:
 - c.1. Approval of amendments to the Articles of Association;
 - c.2. Capital changes approval;
 - c.3. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

- c.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
- c.5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan;
- c.6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c.7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
- c.8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
- c.9. Persetujuan penggunaan laba
- c.10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
- c.11. Pengusulan agenda RUPS;
- c.12. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

- d. Kecuali Hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf c Pasal ini, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26.
 - e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagaimana huruf c ayat ini dapat dikuasakan, kecuali pelaksanaan hak istimewa pada huruf c.2. dan huruf c.4.
5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
 6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perusahaan memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
 7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan.

- c.4. Approval of mergers, consolidations, acquisitions, separation, and liquidation;
- c.5. Submit requests for and obtain access to Company data and documents;
- c.6. Approval of remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners members;
- c.7. Approval of the transfer of assets, which, based on the Articles of Association, requires the approval of the GMS;
- c.8. Approval of participation and reduction in the percentage of equity participation in other companies, which, based on the Articles of Association, requires the approval of the GMS;
- c.9. Approval of the use of profits;
- c.10. Approval of long-term investment and financing, which, based on the Articles of Association, requires the approval of the GMS;
- c.11. Proposing the GMS agenda;
- c.12. Nomination of candidates for members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners;

with the mechanism for the use of the rights set forth in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

- d. Except for the special rights set forth in this Article's paragraph 4 letter c, Series B shareholders have the same rights under Article 26.
 - e. The exercise of the privileges of the series A Dwiwarna shareholder as referred to in letter c of this paragraph may be authorized, except for the exercise of privileges referred to in letter c.2 and the letter c.4.
5. If a share is transferred to more than one person as a result of an inheritance or for any other reason, those who jointly own it must appoint one of them as their representative, and the appointed person is registered as their representative in the List of Shareholders, who are entitled to exercise the rights granted by law on the shares.
 6. If the joint owners fail to notify the Company in writing of the appointed representative, the Company will treat the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders as the sole legal holders of the shares.
 7. Each shareholder is required by law to comply with the Company's Articles of Association and all legally binding decisions taken at the General Meeting of Shareholders, as well as all applicable laws and regulations.

8. Mengubah Pasal 10 ayat (7), ayat (10) dan ayat (25).
9. Menambah satu butir pada Pasal 11 ayat (2) butir b yaitu angka (19).
10. Mengubah Pasal 11 ayat (10) butir b dan butir h, dan menambah dua butir pada Pasal 11 ayat (10) yaitu butir p dan q.
11. Mengubah Pasal 14 ayat (10), ayat (11) dan ayat (23).
12. Menambah satu ayat pada Pasal 20 yaitu ayat (5).
13. Mengubah Pasal 23 ayat (5).
14. Mengubah Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).
15. Mengubah Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5), menambah satu ayat pada Pasal 28 yaitu ayat (12).
16. Menambah satu ayat pada Pasal 29 yaitu ayat (7).
17. Mengubah Pasal 30 ayat (13), dan menambah satu ayat pada Pasal 30 yaitu ayat (14).

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sejak berdiri hingga tahun buku 2021, Perusahaan tidak pernah mengalami perubahan nama.

8. Amending Article 10 (7), (10), and (25),
9. Adding a new item to Article 11 (2) point b, i.e. number (19),
10. Amending Article 11 (10.b) and (10.h), and insert two new points in article 11 (10), i.e. (10.p) and (10.q),
11. Amending Article 14 (10), (11), and (23),
12. Adding Article 20 by adding a new paragraph, i.e. paragraph (5),
13. Amending paragraph 5 of Article 23,
14. Amending Article 26 (1), (2), (3), and (5),
15. Amending Article 28 (3) and (5), and add a new paragraph to Article 28, i.e., paragraph (12),
16. Article 29 is amended by adding one paragraph, i.e., paragraph (7),
17. Amending Article 30 (13), and add one paragraph, i.e., paragraph (14).

THE INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPANY'S NAME

The Company's name has never been changed since its establishment until the 2021 fiscal year.





Jejak Langkah

MILESTONES

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

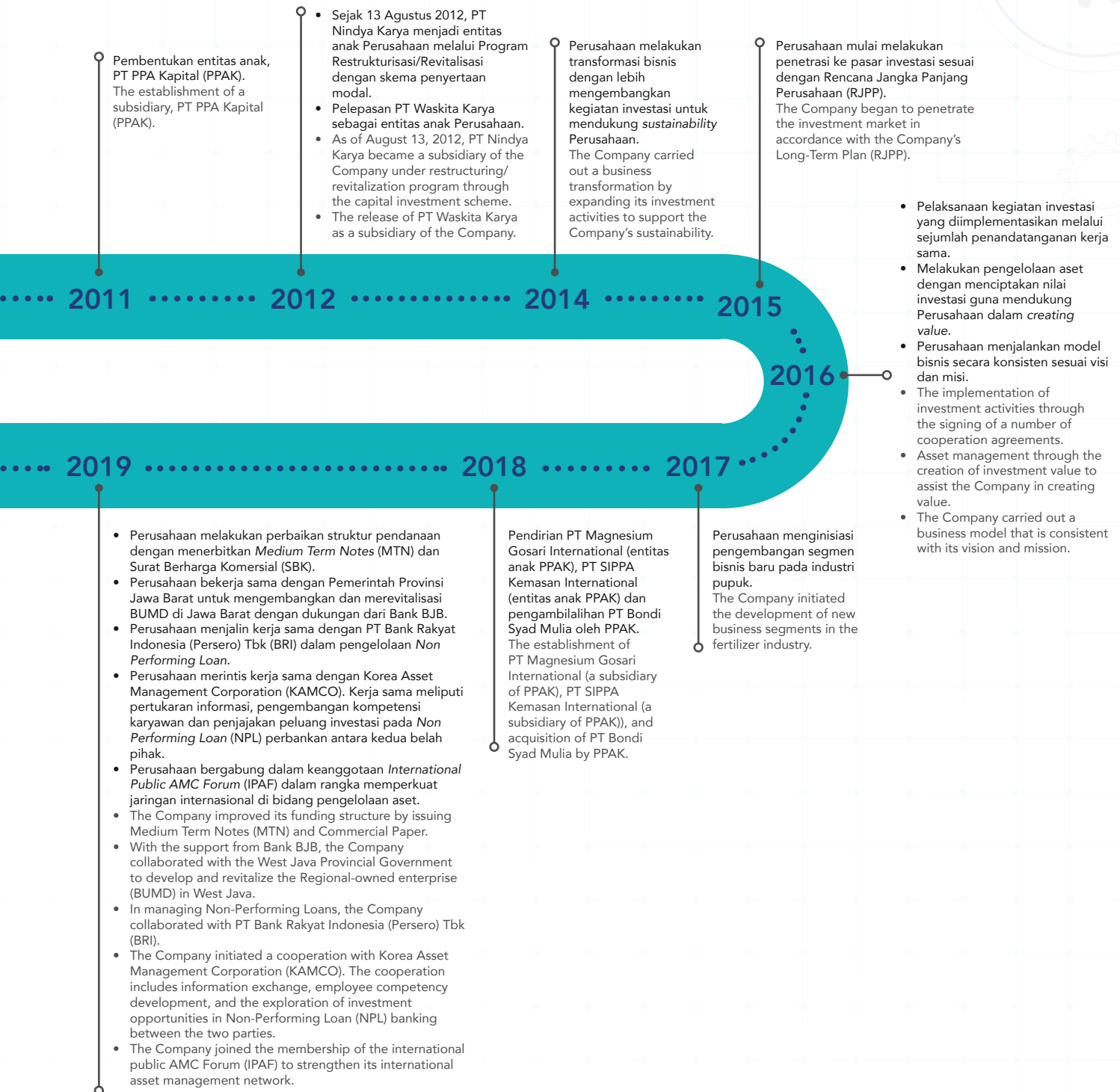


2021

2020

- Progress Signifikan dalam Restrukturisasi BUMN Titip Kelola PPA telah berhasil membantu restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) melalui proses PKPU. Selain itu, PPA juga telah membantu penyelesaian pembayaran pesangon 429 eks karyawan PT Industri Gelas (Persero). Dari sisi mobilitas karyawan, PPA berhasil menginisiasi pengalihan sejumlah karyawan PT Istaka Karya (Persero) yang memiliki keterampilan pada bidangnya untuk tetap dapat mengembangkan potensi yang dimiliki ke PT Nindya Karya (Persero).
- Kesuksesan Pengelolaan Aset Berkualitas Rendah Bank Muamalat PPA berhasil menerapkan skema inovatif pengelolaan aset berkualitas rendah di Bank Muamalat senilai Rp10 triliun melalui penukaran aset berkualitas rendah dengan aset produktif (asset swap). Skema ini menjadi kunci dalam upaya turnaround dan penguatan permodalan di Bank Muamalat. Transaksi ini meraih 2 penghargaan internasional dari Islamic Finance News (IFN), yaitu "Restructuring Deal of the Year 2021" dan "Indonesia Deal of the Year 2021."
- Reposisi Solusi Inovatif dan Efektif *Special Situations Fund* (SSF) PPA melakukan rebranding lini bisnis investasi menjadi 'Special Situations Fund (SSF)' dengan berfokus pada investasi yang terstruktur dan terukur serta manajemen risiko yang prudent. SSF menawarkan solusi pembiayaan alternatif yang tidak tersedia di perbankan konvensional atau produk pasar modal dan juga memberikan layanan advisory.
- Significant Progress in SOEs Restructuring (BUMN Titip Kelola) PPA has succeeded in assisting the restructuring of PT Barata Indonesia (Persero) through the Postponement of Debt Settlement Obligation (PKPU) process. In addition, PPA has also assisted in settlement of severance payments for 429 former employees of PT Industri Gelas (Persero). Furthermore, in talent mobility, PPA has initiated the transfer of PT Istaka Karya (Persero), skilled employees, to PT Nindya Karya (Persero) to keep them growing their skills and reaching potential.
- Bank Muamalat's Low-Quality Asset Management Success PPA has successfully implemented an innovative scheme at Bank Muamalat, worth Rp10 trillion, for managing low-quality assets through exchanging low-quality assets with productive assets (asset swap). This scheme is critical to Bank Muamalat's turnaround and capital strengthening efforts. As a result, this transaction was recognized by Islamic Finance News (IFN) with two international awards, including "Restructuring Deal of the Year 2021" and "Indonesia Deal of the Year 2021."
- Repositioning of the Special Situations Fund (SSF) for Innovative and Effective Solutions PPA rebranded its investment business line as "Special Situations Fund (SSF)," emphasizing structured and quantifiable investments and prudent risk management. SSF provides alternative financing solutions that are not available through traditional banking or capital market products, as well as provides advisory services.
- Untuk memperkuat struktur pendanaannya, pada tanggal 19 Agustus 2020, PT PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terbagi 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, B dan C.
- Melalui Surat Kuasa Khusus ("SKK") Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
- To strengthen its funding structure, PT PPA issued Bonds I of 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) worth Rp642.10 billion on August 19, 2020, divided into three (three) series, namely Series A, B, and C.
- The PPA's role in SOE restructuring and/or revitalization is becoming increasingly broad as a result of the Special Power of Attorney ("SKK") granted by the Minister of SOEs to the PPA on September 30, 2020. PPA has been granted authority and/or shareholder rights over 23 SOEs restructuring, including but not limited to restructuring and/or revitalization activities.

Jejak Langkah Milestones



Visi, Misi, Budaya, dan Nilai Perusahaan

THE COMPANY'S VISION, MISSION, CULTURE, AND VALUES

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

VISI Vision |

Menjadi **Perusahaan investasi terkemuka** dan **mitra** terpercaya dalam restrukturisasi korporasi.

To be a **leading investment Company** and be a trusted **partner** in corporate restructuring.

MISI Mission |

1. Memberikan **pertumbuhan yang berkesinambungan** bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset, dan *advisory*.
 2. Menciptakan **sumber daya manusia yang unggul**, profesional dan memiliki integritas tinggi.
 3. Menerapkan **manajemen yang terbuka** sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
 4. Memberikan **kontribusi** kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.
1. Providing **sustainable growth** for all stakeholders through investment, restructuring, asset management, and advisory activities.
 2. Developing **high quality**, professional, and integrity human resources.
 3. Implementing **open management** in accordance with the principles of good corporate governance, risk management, and compliance in an integrated manner.
 4. **Contributing** to the growth of the environment and the community.

PENINJAUAN ATAS VISI MISI

Visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RJPP tahun 2020-2023 merupakan peninjauan atas visi dan misi sebelumnya sebagaimana tertuang dalam RJPP tahun 2018-2022.

BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki Budaya Kerja yang baik. Demi terbentuk budaya kerja yang baik, Perusahaan secara berkelanjutan dan terstruktur menanamkan nilai-nilai (*Core Values*) Perusahaan yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Agar AKHLAK menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh insan PPA, maka telah dilaksanakan program internalisasi *Core Values*, sebagai berikut:

1. Sosialisasi *Core Values*;
2. Pembentukan Tim *Core Values* yang bertugas menyusun program kerja internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada seluruh insan Perusahaan.

NILAI PERUSAHAAN

Nilai-nilai Perusahaan merupakan fondasi dan panduan dari setiap insan Perusahaan dalam melakukan pekerjaan untuk mendorong tercapainya tujuan Perusahaan. Nilai-nilai Perusahaan harus dapat memotivasi insan Perusahaan guna mencapai tujuan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misi Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan sangat berkaitan dengan tujuan Perusahaan. Untuk itu, setiap individu dalam Perusahaan harus memahami tujuan Perusahaan dengan baik. Adanya pemahaman yang sama di antara manajemen dan karyawan, akan membentuk budaya kerja Perusahaan yang kondusif dan inovatif. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan dedikasi dan semangat yang tinggi serta berorientasi pada hasil (*result oriented*). Berdasarkan keputusan Direksi No. SK-73/PPA/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tata Nilai Perusahaan adalah sebagai berikut:

REVIEW ON VISION AND MISSION

The vision and mission as stipulated in the Company's long-term plan 2020-2023 are the outcome of a review of the previous vision and mission in the Company's long-term plan 2018-2022.

CORPORATE CULTURE

To achieve the Company's vision and mission, human capital is equipped with the proper corporate culture. In order to create a good work culture, the Company continuously and structurally embeds Corporate Core Values, named AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative). In order to actualize AKHLAK in employees' daily lives, the Core Values Internalization program has been implemented, such as:

1. Core Values Socialization;
2. Establishment of the Core Values Team, responsible for designing a work plan for all employees to internalize corporate values.

CORPORATE VALUES

Corporate Values serve as a foundation and guide for all employees to work to achieve the Company's objectives. Therefore, the values must be able to motivate all employees to achieve the goals outlined in the Company's Vision and Mission statements.

Corporate values are closely related to the Company's objectives. Therefore, individuals within the Company must truly understand the Company's goals. A conducive and innovative corporate culture can be formed through mutual understanding between the management and employees. Hence, work is carried out through high dedication and is result-oriented. Based on the Board of Directors Decree No. SK-73/PPA/2020, dated October 14, 2020, the Corporate Values are as follows:

AKHLAK

AMANAH Trustworthy

Memegang teguh
kepercayaan yang diberikan
Upholding the trust given

KOMPETEN Competent

Terus belajar dan
mengembangkan kapabilitas
Continuously learning and
developing capabilities

HARMONIS Harmonious

Saling peduli dan menghargai
perbedaan
Caring of each other and
respecting diversity

LOYAL Loyal

Berdedikasi dan
mengutamakan kepentingan
Bangsa dan Negara
Being dedicated and
prioritizing the interest of the
Nation and the country

ADAPTIF Adaptive

Terus berinovasi dan antusias
dalam menggerakkan
ataupun menghadapi
perubahan
Continuously innovating and
being eager to drive or
overcome change

KOLABORATIF Collaborative

Membangun kerja sama yang
sinergis
Building synergistic
collaboration

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS VISI, MISI, BUDAYA KERJA, SERTA NILAI PERUSAHAAN

Seluruh hal yang tercantum dalam visi, misi, dan nilai budaya atau filosofi Perusahaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Relevansi Visi, Misi dan Budaya Perusahaan tahun 2021 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2021.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS APPROVAL ON VISION, MISSION, WORK CULTURE, AND CORPORATE VALUES

The Board of Commissioners and Board of Directors have agreed to and signed the whole explanation of the Company's vision, mission, and corporate values or philosophy. The relevance of the Vision, Mission, and Corporate Culture is outlined in the 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

Makna Logo Perusahaan

THE MEANING OF THE COMPANY LOGO

Logo PPA yang cukup tegas namun ramah pada huruf A mencerminkan karakter PPA yang “dekat” dan dapat diandalkan, namun tegas dalam pendirian karena senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap pengambilan keputusan.

The firm yet friendly letter A on the PPA logo reflects the character of PPA, which is “close” and reliable, but firm in its stance, as it always applies the principles of *Good Corporate Governance* in every decision making.



PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

Member of  Danareksa

Di dalam huruf A terdapat segitiga dalam bentuk kecil hingga besar, yang menggambarkan bahwa PPA memiliki pondasi yang kuat sehingga dapat tumbuh berkelanjutan dalam mencapai visi dan misinya.

Penggunaan warna biru dengan penambahan aksesoris warna abu-abu mencerminkan karakter PPA yang profesional, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bisnis (*prudent*), penuh integritas, bertanggung jawab (*accountable*), dapat dipercaya, dan dapat diandalkan.

Sedangkan warna toska mencerminkan PPA sebagai perusahaan yang modern, kreatif, dan inovatif dalam menghadirkan layanan yang berkualitas sehingga dapat terus tumbuh/ berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan mampu bertransformasi menjadi *National Asset Management Company* (NAMCO) yang memberikan nilai dan kebermanfaatannya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (*purposeful*).

Inside the letter A there are triangles from small to large size, which symbolizes that PPA has a strong foundation, enabling it to grow in a sustainable manner in order to achieve its vision and mission.

The use of the color blue with an addition of gray accents reflects the characters of PPA, namely professional, applying the prudent principle in conducting business, full of integrity, accountable, trustworthy, and reliable. Furthermore, the color toska reflects PPA as a modern, creative, and innovative company in providing high-quality services, which allows it to continue to grow/ develop along with the development of times, as well as able to transform itself into a *National Asset Management Company* (NAMCO) that generates values and benefits for the economic growth of Indonesia (*purposeful*).

Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani

LINES OF BUSINESS, PRODUCTS AND SERVICES, AND MARKET SERVED

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

KEGIATAN USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perubahan tahun 2021, kegiatan usaha Perusahaan adalah:

- Berusaha dalam bidang pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan
- Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Investasi
- Pengelolaan Aset BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLE OF ASSOCIATION

According to the latest Articles of Association of 2021, the Company's business activities are:

- Manage the state's assets derived from the Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) for and on behalf of the Minister of Finance.
- State-Owned Enterprises (SOEs) Restructuring and/or Revitalization
- Investment
- Manage the Regional-owned Enterprises' Asset Management in accordance with applicable laws and regulations.
- Supporting business activities that support the main business activities as long as they do not conflict with laws and regulations.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT DURING THE FISCAL YEAR

Business activities that were carried out during the fiscal year were in accordance with the Articles of Association of the Company.

PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN

Kegiatan Usaha Utama

1. Melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), antara lain:

Penjualan aset properti, saham dan piutang, penyewaan aset properti, penagihan piutang, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset, melakukan restrukturisasi atas aset properti, saham dan piutang guna meningkatkan nilainya.

2. Melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, antara lain restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN, revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN.
3. Melakukan kegiatan investasi, antara lain pemberian pinjaman untuk pembiayaan proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset, melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai

PRODUCTS AND SERVICES PRODUCED

Core Business

1. The management of state assets derived from the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), which includes:

Sale of property assets, shares, receivables, lease of property assets, collection of receivables, collaboration with other parties to increase asset value, restructuring property assets, shares, and receivables to increase value.

2. Restructuring and/or revitalizing SOEs, including corporate restructuring and Company revitalization to improve SOE performance.
3. Carrying out investment activities such as the provision of loans to fund projects and/or other business activities, fund placement in a project and/or other business activity, purchasing, development, and/or selling/leasing of assets, temporary investment (in terms of establishment, purchase of issued/portfolio shares) in Company in order to enhance its value for resale, investment in Marketable Securities in the form of purchasing of debt securities, including quasi-equity listed or not listed on the Stock Exchange, purchasing

untuk dijual kembali, investasi pada instrumen Surat Berharga berupa pembelian surat utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di bursa efek atau yang tidak tercatat di bursa efek, pembelian saham, *warrant* dan produk derivatif lainnya melalui bursa efek.

of stock, warrant, and other derivative products through the Stock Exchange.

4. Melakukan pengelolaan aset BUMN, antara lain pengembangan dan pendayagunaan aset untuk meningkatkan nilainya, pengembangan dan pendayagunaan aset dengan bekerja sama dengan pihak lain, jasa pengelolaan aset.

4. Manage State-Owned Enterprises' assets, including asset development and utilization to increase their value, asset development and utilization in collaboration with other parties, and asset management services.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Jasa konsultasi, antara lain konsultasi bisnis dan manajemen penjualan dan/atau pengembangan aset.
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset negara yang berasal dari BPPN; pemerintah daerah badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh negara selain BUMN, BUMN dan swasta, termasuk anak perusahaan BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan antara lain penjualan aset termasuk saham dan piutang, penyewaan aset, restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang, restrukturisasi perusahaan, pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain serta kegiatan dan/atau pengambilalihan *non performing loan* (NPL)/kredit bermasalah.

Supporting Business Activities

1. Advisory services, such as business consulting, and sale and/or asset development management
2. Assets Management of: Non-IBRA State Assets; Regional Government; legal entities owned and/or established by the State excluded State-Owned Enterprise; Regional- Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises, including SOE's subsidiaries, joint ventures, including the following activities: asset trading, including stock and receivables; asset leasing; receivables restructuring, including receivables collection; Company restructuring; asset development and utilization, including cooperation with other parties, as well as activities and/or take over of non-performing loans (NPLs).

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HINGGA TAHUN 2021

REALIZATION OF IMPLEMENTATION OF BUSINESS ACTIVITIES UNTIL 2021

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has been/ Has not yet been Conducted	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2021 Activities Conducted Until December 31, 2021
Kegiatan Usaha Utama Core Business		
Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan The management of state assets derived from the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) after the expiration and dissolution of IBRA, for and on behalf of the Ministry of Finance	√	Perusahaan melakukan pengelolaan aset eks BPPN antara lain: 1. Melakukan divestasi saham bank, di antaranya Saham Bank Permata, saham Bank Danamon, saham Bank BCA, saham Bank BII, saham Bank Niaga, saham Bank BTPN dan saham Bank Maybank Indonesia; 2. Melakukan divestasi saham non bank, di antaranya saham PT Bali Nirwana Resort dan saham PT Dipasena Citra Darmaja; 3. Melakukan pengamanan, pemutakhiran dokumen dan penjualan aset properti; 4. Melakukan pengelolaan Grup Texmaco; 5. Melakukan pengelolaan dan restrukturisasi Grup Tuban Petro; 6. Melakukan pengelolaan Grup Sejahtera Eka Graha. The Company carried out ex-IBRA's asset management, including: 1. conducted the divestment of bank shares, including shares of Permata Bank, Danamon Bank, BCA Bank, BII Bank, Niaga Bank, BTPN Bank, and Maybank Indonesia Bank; 2. conducted the divestment of non-bank shares, including shares of PT Bali Nirwana Resort and PT Dipasena Citra Darmaja; 3. carried out the safeguarding, updating of documents, and sale of property assets; 4. carried out the management of Texmaco Group; 5. carried out the management and restructuring of Tuban Petro Group; 6. carried out the management of Sejahtera Eka Graha Group.

Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani

Lines of Business, Products and Services, and Market Served

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has been/ Has not yet been Conducted	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2021 Activities Conducted Until December 31, 2021
Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	√	Perusahaan melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN antara lain: - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) - Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; - Setelah sehat WIKA dikembalikan ke Pemerintah dan kemudian melakukan <i>Initial Public Offering</i> ("IPO"); - PT Nindya Karya (Persero) (PT NK) - Melakukan restrukturisasi keuangan termasuk memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal sehingga ekuitas kembali menjadi positif; - Saat ini kondisi PT NK sudah sehat dan siap dikembalikan ke Pemerintah. - Melakukan R/R terhadap PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PT DI) termasuk memberikan pembiayaan modal kerja dan memfasilitasi kerja sama antara PT DI dengan Airbus Military, Spanyol. - Melakukan R/R terhadap PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (PT IKI) termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. - Melakukan R/R terhadap PT PAL Indonesia (Persero), termasuk memberikan pembiayaan modal kerja. - PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (PT MNA) - Membantu penyelesaian permasalahan karyawan dengan melakukan pembayaran atas hak-hak normatif karyawan; - Melakukan pendampingan PT MNA pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"); - Penyelesaian Kajian Aspek Bisnis, Kajian Hukum, dan Kajian Dampak Sosial dalam kaitannya dengan rencana pembubaran PT MNA - PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (PT KKA) - Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; - Membantu upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas PT KKA dengan tahap awal restrukturisasi melakukan optimalisasi fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dioperasikan kombinasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dalam rangka sinergi BUMN dengan Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN). - Penyelesaian Kajian Aspek Bisnis, Kajian Hukum, dan Kajian Dampak Sosial dalam kaitannya dengan rencana pembubaran PT KKA - PT Kertas Leles (Persero) - Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; - Melakukan pendampingan dalam proses PKPU. - Koordinasi dengan Kurator untuk kemungkinan harta pailit PT KL dapat dilelang keseluruhan secara paket (bulk sale) untuk mempercepat proses pemberesan harta pailit - PT Iglas (Persero) - Membantu penyelesaian permasalahan karyawan termasuk memberikan bantuan pinjaman; - Melakukan pendampingan dalam penanganan aset berstatus sengketa dengan Pemerintah Kota Surabaya; - Penyelesaian Kajian Aspek Bisnis, Kajian Hukum, dan Kajian Dampak Sosial dalam kaitannya dengan rencana pembubaran PT Iglas - Melakukan kajian transformasi bisnis. - PT Survai Udara Penas (Persero), membantu program restrukturisasi SDM dan keuangan, serta organisasi dan manajemen. - PT Boma Bisma Indra (Persero), melakukan R/R dan pembiayaan modal kerja. - PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) (PT PANN), menyusun kajian restrukturisasi dan penanganan PT PANN secara menyeluruh, baik keuangan maupun operasional.
Restructuring and/or Revitalization (R/R) of State-Owned Enterprises (SOE)		The Company carried out restructuring and/or revitalization of SOEs, including: - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) - Restructuring the financial system, including injecting capital in the form of equity participation, to ensure that equity returns were positive; - WIKA was returned to the government after being deemed healthy, and then an Initial Public Offering ("IPO") was held; - PT Nindya Karya (Persero) (PT NK) - Restructuring the financial system, including injecting capital in the form of equity participation, to ensure that equity returns were positive; - Currently, PT NK's condition has been revitalized and is ready to be returned to the Government. - R/R on PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PT DI), including providing the working capital financing and facilitating cooperation between PT DI and Airbus Military, Spain. - Carried out R/R on PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (PT IKI), which included providing the working capital financing. - Carried out R/R on PT PAL Indonesia (Persero), which included providing the working capital financing.

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has been/ Has not yet been Conducted	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2021 Activities Conducted Until December 31, 2021
Restructuring and/or Revitalization (R/R) of State-Owned Enterprises (SOE) (Continued)	√	6. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (PT MNA) • assisted in resolving employee issues by compensating employees for their normative rights; • Assisted PT MNA during the Postponement of Debt Settlement Obligations ("PKPU"); • Completion of Business Aspects Studies, Legal Studies, and Social Impact Studies in relation to the dissolution of PT MNA plan 7. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (PT KKA) • Assisted in resolving the employee problems that included providing loans; • Assisted in re-operating PT KKA paper mill. The early stage of restructuring was to optimize steam power plant facilities (PLTU), which were operated in combination with gas engine power plants (PLTMG), in the context of synergy of SOEs with state-owned power companies (Persero) (PT PLN). • Completion of Business Aspects Studies, Legal Studies, and Social Impact Studies in relation to the dissolution of PT KKA plan 8. PT Kertas Leces (Persero) • Assisted in resolving the employee problems that included providing loans; • Assisted in the PKPU process. • Coordination with Curators for the possibility that PT KL's bankruptcy estate can be auctioned off in bulk (bulsale) to accelerate the bankruptcy estate settlement process 9. PT Iglas (Persero) • Assisted in resolving the employee problems that included providing loans; • Assisted in the handling of disputed assets with the Surabaya City Government; • Completing the Business Study, Legal Study, and Social Impact Study in relation to the plan for the dissolution of PT Iglas • Conducted business transformation studies. 10. PT Survei Udara Penas (Persero), assisted with HR and financial restructuring, as well as organizational and managerial restructuring. 11. PT Boma Bisma Indra (Persero), conducted R/R and working capital financing. 12. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) (PT PANN), compiling a comprehensive review of PT PANN's restructuring and handling, both financial and operational.
Kegiatan investasi	√	Kegiatan investasi Perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa: • Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya; • Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya; • Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset; • Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali. 2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa: • Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan • Pembelian saham, warrant dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek. Kegiatan investasi yang dilakukan Perusahaan antara lain pada: 1. PT Magnesium Gosari International, bidang usaha industri pupuk berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp203.557 juta. 2. PT Alim Investindo, non-operating holding Company berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp190.000 juta. 3. PT Varia Intra Finance, bidang usaha pembiayaan multi finance berdomisili di Jakarta. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp160.000 juta. 4. PT Polowijo Gosari, bidang usaha industri pupuk di Gresik, Jawa Timur. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp131.742 juta. 5. PT National Utility Helicopters bidang jasa sewa helikopter di Kalimantan. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp174.293 juta. 6. PT Bondi Syad Mulia, bergerak di bidang jasa galvanizing untuk produk besi dan baja di daerah Rungkut Surabaya. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp167.874 juta. 7. PT Rejeki Inti Logam Jaya, bidang usaha produsen dan pengolahan aluminium di daerah Tangerang, Banten. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp132.684 juta. 8. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, induk perusahaan dari PT Widodo Makmur Unggas yang bergerak di bidang usaha peternakan ayam di daerah Jawa Barat. Total investasi s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp98.692 juta.

Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani

Lines of Business, Products and Services, and Market Served

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has been/ Has not yet been Conducted	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2021 Activities Conducted Until December 31, 2021
Investment Activities		The Company's investment activities are as follows: - Direct and indirect investment in the form of: - The provision of loans to fund projects and/or other business activities. - The fund placement in a project and/or other business activity. - The purchasing, development, and/or selling/leasing of assets. - The temporary Investment (in terms of establishment, purchase of issued/portfolio shares) in Company in order to enhance its value for resale. - Investment in Marketable Securities in the form of: - Purchasing of bonds, including quasi-equity listed or not listed on the Stock Exchange. - Purchasing of stock, warrant, and other derivative products through the Stock Exchange. The investment activities carried out by the Company include: - PT Magnesium Gosari International, a fertilizer industry Company, located in Gresik, East Java. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp203,557 million. - PT Alim Investindo, a non-operating holding Company, located in Surabaya, East Java. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp190,000 million. - PT Varia Intra Finance, a multi-finance Company, located in Jakarta. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp160,000 million. - PT Polowijo Gosari, a fertilizer industry Company, located in Gresik, East Java. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp131,742 million. - PT National Utility Helicopters, a helicopter leasing services in Kalimantan. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp174,293 million. - PT Bondi Syad Mulia, engaged in galvanizing services for iron and steel products in the Rungkut area of Surabaya. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp167,874 million. - PT Rejeki Inti Logam Jaya, an aluminum producer and processing business in the Tangerang area, Banten. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp132,684 million. - PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, the parent Company of PT Widodo Makmur Unggas, which is engaged in the chicken farming business in West Java. The total investment as of December 31, 2021 amounting to Rp98,692 million.
Kegiatan pengelolaan aset BUMN SOE's asset management activities	√	PT Pertamina (Persero), di mana Perusahaan melaksanakan pengelolaan aset properti milik PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero), for which the Company managed property assets owned by PT Pertamina (Persero).
Kegiatan Usaha Penunjang Supporting Business Activities		
- Jasa Konsultansi, berupa jasa konsultansi: - Bisnis dan manajemen - Penjualan dan/atau pengembangan aset.	√	- Pemberian Jasa Penasehat Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero). - Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pencarian Investor dalam rangka Kerja Sama Pendayagunaan Aset Area Non Pabrik Milik PT Pupuk Kujang, anak usaha dari PT Pupuk Indonesia (Persero). - Pemberian Jasa Kajian Restrukturisasi Hutang PT Petro Energy. - Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi dan Optimalisasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). - Pemberian Jasa kepada PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia dalam Rangka Restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero). - Pemberian Jasa Konsultasi Penyusunan Draft SOP Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Pendampingan Pelaksanaan Pendayagunaan Lahan PT KS Tahap II. - Program Penjualan Aset Milik Pertamina Foundation. - Jasa Konsultasi Kajian Alternatif Pengelolaan Aset Melalui Pihak Ketiga dan Perusahaan Manajemen Aset Yang didirikan oleh LPS. - Pemberian Jasa Kajian Kelayakan atas Rencana Pembangunan Pabrik Katalis PT Pupuk Kujang. - Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi Hutang PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. - Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi Hutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor. - Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi Hutang kepada PT Barata Indonesia (Persero) - Pemberian Jasa Konsultasi Restrukturisasi Hutang kepada PT Ade Textile Industries

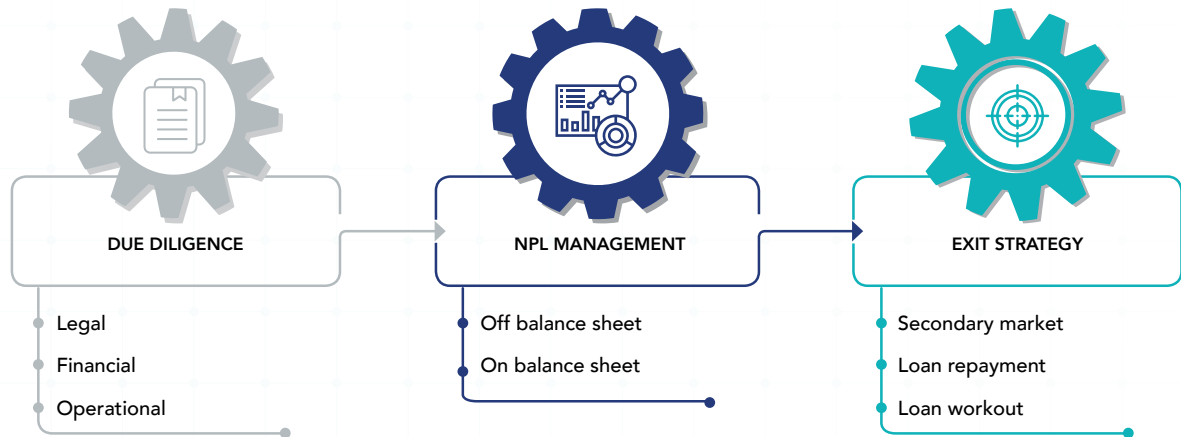
Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has been/ Has not yet been Conducted	Kegiatan yang Dijalankan Hingga 31 Desember 2021 Activities Conducted Until December 31, 2021
1. Advisory services, in the form of consulting for: - Business and management - Assets sales and/or development		- Financial Advisory Services for PT Hotel Indonesia Natour (Persero). - Consultancy and Assistance in Identifying Investors in the Cooperation in the Utilization of PT Pupuk Kujang's Non-Factory Area Assets, a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero). - Debt Restructuring Study Services for PT Petro Energy. - Restructuring and Optimization Consulting Services for PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). - Providing Services for PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia in the Restructuring of PT Perkebunan Nusantara III (Persero). - Providing a Consultation Services drafting SOP Cooperation on The Utilization of Fixed Assets of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk and the Assistance in the Implementation of PT KS Phase II's land utilization. - Pertamina Foundation's Asset Sales Program. - Consulting Services of Alternative Asset Management Through Third Parties and Asset Management Companies established by LPS. - Feasibility Study Services for PT Pupuk Kujang's Catalyst Plant Development Plan. - Debt Restructuring Consulting Services for PT Dua Putra Utama Makmur, Tbk. - Debt Restructuring Consulting Services for Import Export Financing Institutions. - Debt Restructuring Consulting Services for PT Barata Indonesia (Persero). - Debt Restructuring Consulting Services for PT Ade Textile Industries
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut: - Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang - Melakukan penyewaan aset - Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang - Melakukan restrukturisasi perusahaan - Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain	√	- Restrukturisasi utang PT Prabu Wahana International. - Restrukturisasi utang PT Carpediem Mandiri. - Restrukturisasi atas PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) - Restrukturisasi utang PT Magnesium Gosari Internasional
2. Management of: State-owned assets which is Non-IBRA State Assets; Regional Government; legal entities owned and/or established by the State excluded State-Owned Enterprise; Regional-Owned Enterprises and Private-Owned Enterprises, including SOE's subsidiaries, joint ventures, including the following activities: - Asset trading, including stock and receivables; - Asset leasing; - Receivables restructuring, including receivables collection; - Company restructuring; and - Asset development and utilization, including cooperation with other parties.		- Debt restructuring of PT Prabu Wahana International - Debt restructuring of PT Carpediem Mandiri - Debt restructuring of PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata") through the Postponement of Debt Settlement Obligation (PKPU) - Debt restructuring of PT Magnesium Gosari International.

Bidang Usaha, Produk dan Jasa, serta Pasar yang Dilayani
Lines of Business, Products and Services, and Market Served

PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA

PRODUCT AND SERVICES DEVELOPMENT

BUMN Titip Kelola
SOEs Restructuring



Penanganan Non-Performing Loan
Management Of Non- Performing Loan



Special Situations Fund
Special Situations Fund

Key Features of PPA SSF Investments & Advisory

Products:

All level of capital structures



Clients:

All Business Enterprises with good track record and bankable, with preference to Indonesian State-Owned Enterprises ecosystem



Investment Horizon:

Short to Medium Term



INISIASI STRATEGIS

Perusahaan memperoleh mandat SKK dari Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") selaku Kuasa Pemegang Saham untuk mengelola 20 BUMN dan 1 anak usaha BUMN melalui 3 (tiga) strategi skema Titip Kelola, yaitu:

1. Restrukturisasi sebanyak 9 (sembilan) BUMN, melalui langkah revitalisasi alat produksi dan pengembangan SDM.
2. Divestasi sebanyak 5 (lima) BUMN.
3. Pembubaran sebanyak 7 (tujuh) BUMN, di mana dalam hal prospek usaha, kemampuan perusahaan, kinerja keuangan, persepsi pasar, dan/atau keunggulan komparatif dinilai tidak layak dipertahankan. Kajian komprehensif telah disusun mencakup aspek bisnis dan keuangan, hukum, serta dampak sosial terkait langkah tersebut. Hingga laporan ini disusun, Perusahaan sedang mengkaji bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terkait dengan mekanisme pembubaran 7 (tujuh) BUMN yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

PASAR YANG DILAYANI

Sesuai dengan uraian bidang usaha dan layanan di atas, Perusahaan memberikan layanan kepada korporasi di Indonesia, baik BUMN maupun swasta.

WILAYAH OPERASIONAL

Perusahaan berkantor di Jakarta Selatan dan tidak memiliki kantor cabang.

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI Keanggotaan Asosiasi

PPA bergabung dengan sejumlah asosiasi yang relevan dengan bidang usaha yang dijalankan Perusahaan sehingga dapat mengikuti perkembangan isu atau topik-topik terkini, sekaligus berkesempatan untuk menyampaikan berbagai pendapat terkait isu atau topik tersebut. Asosiasi yang diikuti Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

STRATEGIC INITIATIVES

The Company obtained the Special Power of Attorney (SKK) mandate from the Minister of State-owned Enterprises ("SOEs") as the shareholder's proxy to manage 20 SOEs and one SOE subsidiary through 3 (three) strategic scheme of restructuring, namely:

1. Restructuring of 9 (nine) SOEs through the revitalization of production tools and the development of human resources.
2. The divestment of 5 (five) SOEs
3. Liquidation of 7 (seven) SOEs, which in terms of business prospects, Company capabilities, financial performance, market perception, and/or comparative advantage are deemed unfit to be maintained. A comprehensive study has been conducted covering the business and financial aspects, legal, and social impacts of the move. Until this report was prepared, the Company was reviewing with the Ministry of SOEs and the Ministry of Finance regarding the mechanism for the dissolution of 7 (seven) SOEs, which are PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga (Persero), and PT Kertas Leces (Persero).

MARKET SERVED

In accordance with the description of the lines of business and services above, the Company provides services to corporations in Indonesia, both SOE and private.

AREA OF OPERATIONS

The Company is based in South Jakarta and does not have any branch offices.

ASSOCIATION MEMBERSHIP The Association Membership

PPA joins a number of associations that are relevant to its line of business in order to be able to keep abreast of latest issues or topics development, as well as have the opportunity to express various opinions related to these issues or topics. The associations that the Company participated in during 2021 are as follows:

Nama Asosiasi Name of Association	Status Keanggotaan Membership Status
Forum Humas BUMN SOE Public Relations Forum	Aktif Active
Forum IT BUMN SOE IT Forum	Aktif Active
Member of International Public AMC Forum (IPAF)	Aktif Active

Struktur Organisasi

ORGANIZATION STRUCTURE

Ikhtisar
Utama

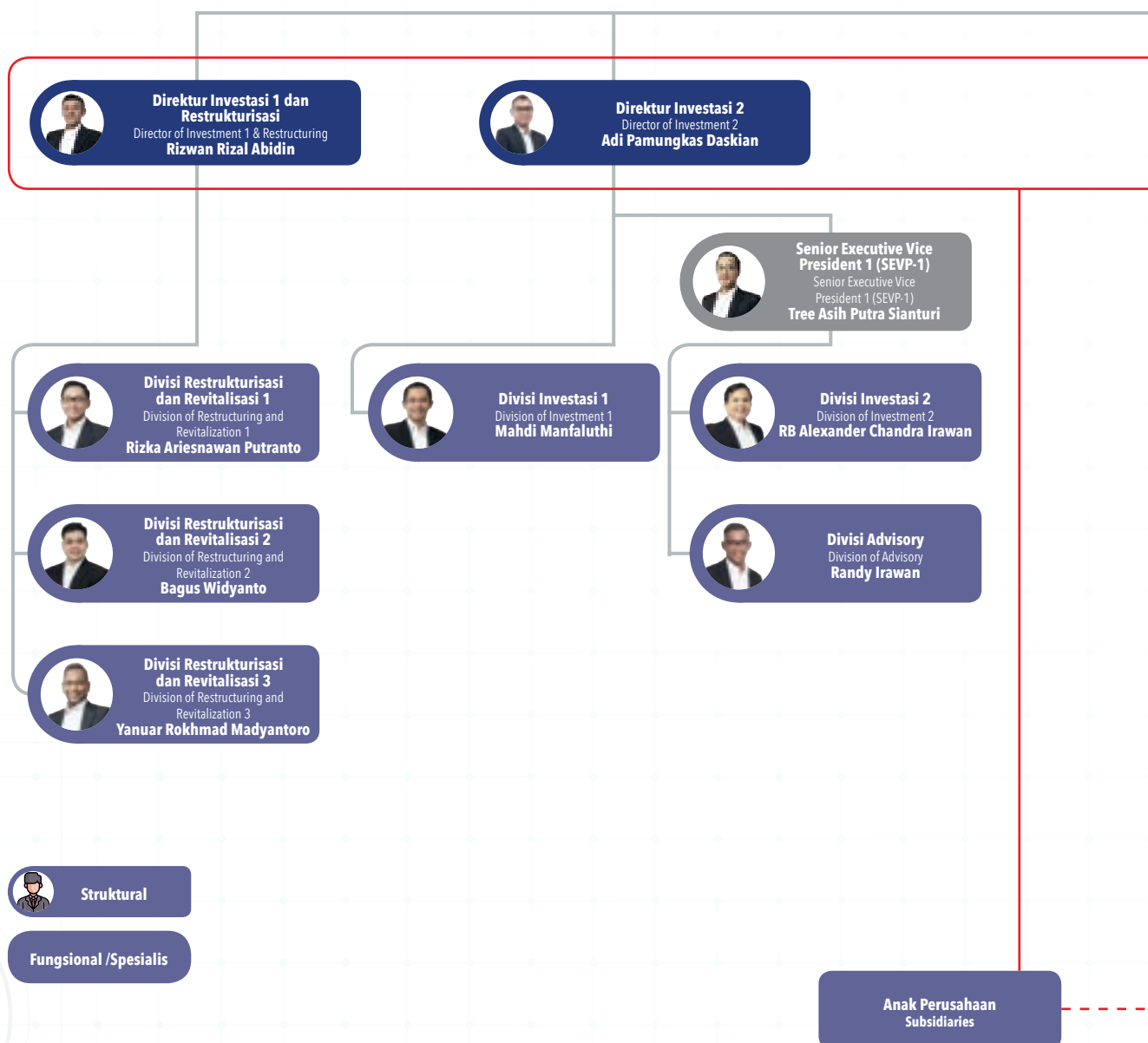
Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

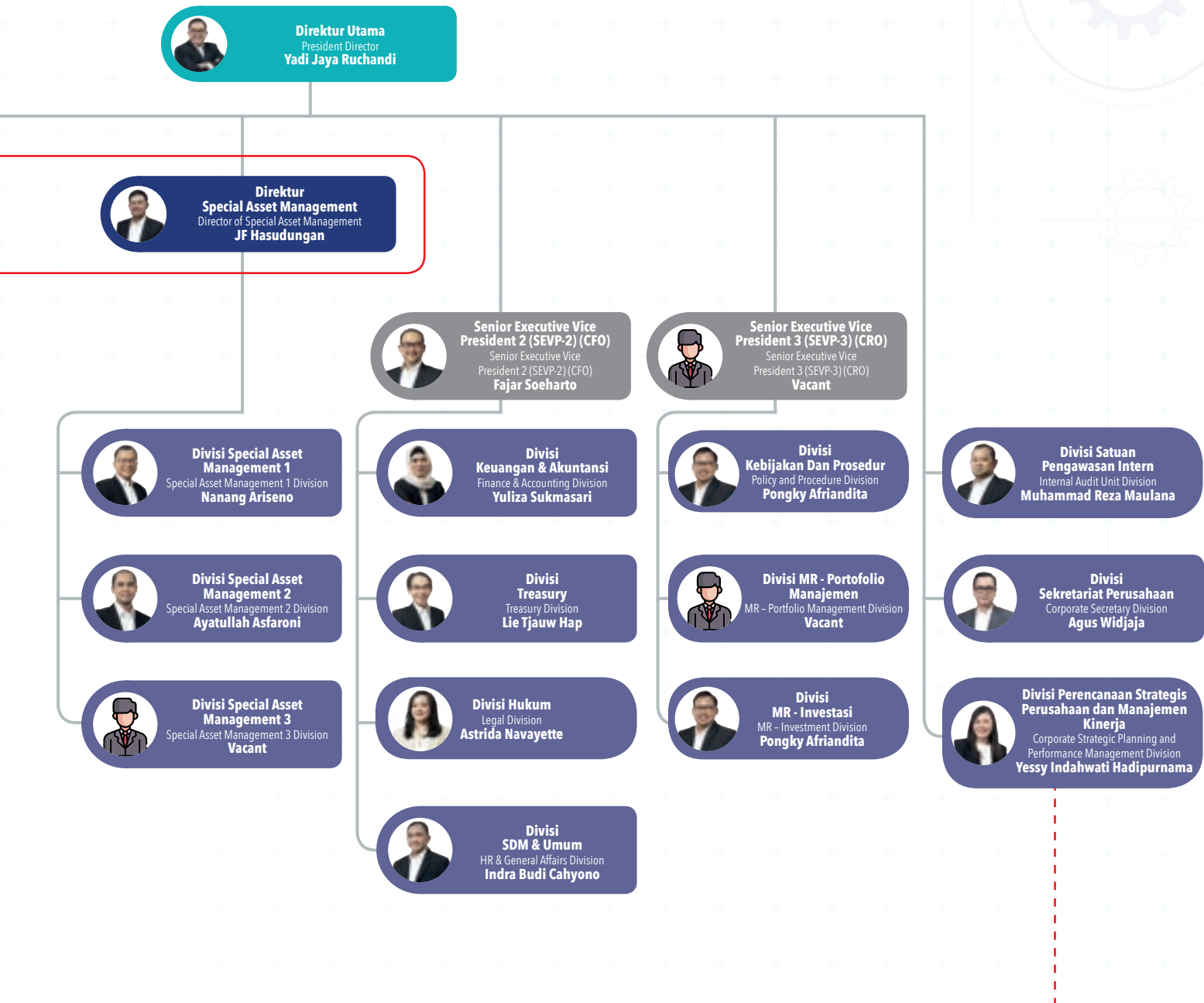
Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Struktur Organisasi Organization Structure



Profil Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

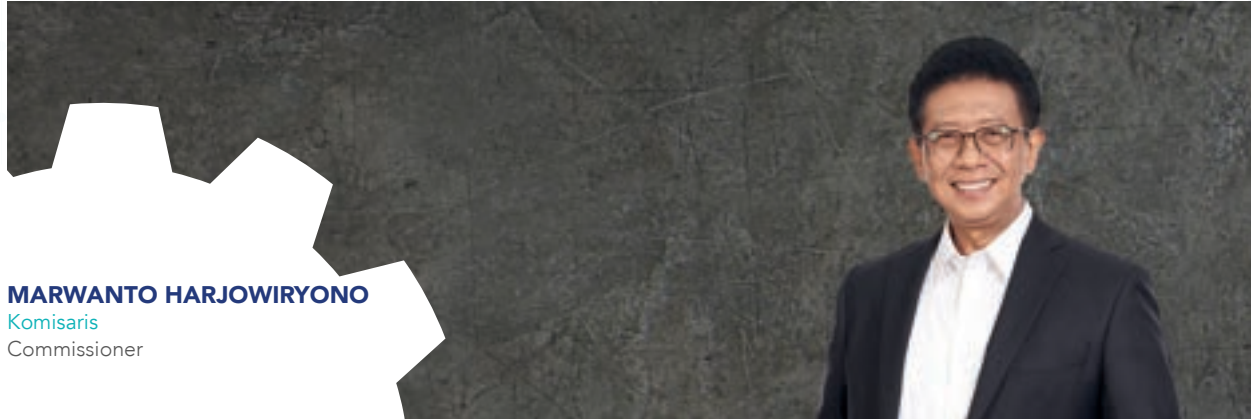


KRISNA WIJAYA
Komisaris Utama/Komisaris
Independen
President Commissioner/
Independent Commissioner

Periode Jabatan: 9 Oktober 2020-RUPS Tahun 2025, Periode ke-1
Service Period: October 9, 2020 to AGMS 2025, 1st period

Warga Negara Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia Age	66 tahun pada tahun buku 2021	66 years old in 2021
Kelahiran Place and Date of Birth	Jakarta, 22 Juli 1955	Jakarta, July 22, 1955
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).	Appointed for the First time as President Commissioner and Independent Commissioner concurrently, based on GMS Resolution No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Board of Commissioners Members PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris Assignments within the Scope of the Board of Commissioners	Koordinator anggota Dewan Komisaris serta membidangi terkait organisasi dan Corporate Strategic Planning and Monitoring, Dukungan Kerja, Divisi Hukum dan Divisi Sekretariat Perusahaan.	Coordinator of Board of Commissioners Members and in charge of organization and Corporate Strategic Planning and Monitoring, Work Support, Legal Division and Corporate Secretary Division.
Riwayat Pendidikan Education's History	- Doktor (S3) Studi Antar Bidang dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009) - Magister (S2) Manajemen bidang Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta - Sarjana (S1) Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1980)	- Doctor in Inter-Sectoral Studies from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2009). - Master in Agribusiness Management from Gadjah Mada University Yogyakarta, - Bachelor of Agriculture from Bogor Agricultural University (1980).
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian di bidang Pemasaran, Manajemen Risiko, Audit, dan Keuangan Mikro.	Has expertise in Marketing, Risk Management, Audit, and Microfinance
Riwayat Pekerjaan Work Experience	- Direktur LPPI (2014-sekarang) - Komisaris Utama/Independen PT Danareksa (Persero) (Mei 2020-Oktober 2020) - Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia Life (2015-2018) - Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2015) - Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2008-2010) - Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2005-2007) - Direktur Bisnis Mikro dan Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2005) - Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Republik Indonesia (2003-2004) - Direktur Operasional PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk (20002003).	- Director of LPPI (2014-present) - President Commissioner/Independent of PT Danareksa Persero (May 2020-October 2020) - President Commissioner/Independent of PT Bank Negara Indonesia Life (2015-2018) - Independent Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010- 2015) - Commissioner of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2008-2010), - Chief Executive (CEO) of Deposit Insurance Corporation (LPS) (2005-2007) - Director of Micro and Retail Business of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2005) - Member of Assistance Team for the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (2003-2004) - Director of Operations of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2000-2003).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Merangkap sebagai: - Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PPA - Direktur LPPI - Rangkap jabatan ini tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.	Merangkap sebagai: - Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PPA - Director of LPPI. - This concurrent position does not violate the applicable rules and regulations.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.	Has no affiliation with the Government of Indonesia as the major/controlling shareholder or affiliation with other Commissioners and Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company's Share Ownership	Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.	The Company does not trade its shares to the public, and does not have Management Share Ownership Program.

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile



MARWANTO HARJOWIRYO

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 9 Oktober 2020-RUPS Tahun 2025, Periode ke-1
Service Period: October 9, 2020 to AGMS 2025, 1st period

Warga Negara Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia Age	62 tahun pada tahun buku 2021	62 years in 2021
Kelahiran Place and Date of Birth	Yogyakarta, 6 Juni 1959	Yogyakarta, June 6, 1959
Domisili Domicile	Kota Tangerang, Banten, Indonesia.	Tangerang City, Banten, Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).	Appointed for the First time as Commissioner based on the Resolution of GMS No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 regarding The Dismissal and Appointment of Board of Commissioners Members PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris Assignments within the Scope of the Board of Commissioners	Koordinasi terkait fungsi Keuangan dan Investasi, serta unit Internal Auditor/SPI, unit Bisnis, serta unit Manajemen Risiko.	Coordination related to Finance and Investment function, as well as Internal Auditor/SPI units, Business Unit and Risk Management unit.
Riwayat Pendidikan Education's History	- Doktor (S3) bidang Konsentrasi Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Fiskal dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009) - Master (S2) of Arts (M.A.) bidang Economic Development and Fiscal Policy dari Vanderbilt University, Amerika Serikat (1991) - Sarjana (S1) Ekonomi dari Gadjah Mada Yogyakarta (1983)	- Doctor (S3) in Development Economics and Fiscal Policy from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2009). - Master (S2) of Arts (M.A.) in Economic Development and Fiscal Policy from Vanderbilt University, The United States (1991) - Bachelor in Economics from Gadjah Mada Yogyakarta (1983)
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian di bidang audit dan keuangan.	Has expertise in Audit and Finance
Riwayat Pekerjaan Work Experience	- Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2020) - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (2013-2019) - Komisaris PT Sucofindo (Persero) (2003-2018) - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2014-2017) - Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2017) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2011-2013) - Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) (2009-2012) - Ketua Komite Etik Asian Development Bank (ADB) (2009-2012) - Anggota Panitia Penelaah Anggaran Asian Development Bank (ADB) (2009-2011) - Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI (2007-2009) - Senior Advisor Menteri Keuangan RI (2006-2009) - Direktur Hubungan Anggota The National Social Security Council (2006-2008) - Masyarakat Kementerian Keuangan RI (2004-2006) - Direktur Kerja sama Internasional (2003-2005) - Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (1999-2003) - Direktur Anggaran Kementerian Keuangan RI (1998-2003)	- Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016- 2020) - Director General of Treasury in Ministry of Finance Republic of Indonesia (2013-2019) - Commissioner of PT Sucofindo (Persero) (2003- 2018) - Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2014-2017) - Commissioner of PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2017) - Director General of Fiscal Balance in Ministry of Finance Republic of Indonesia (2011- 2013) - Executive Director of Asian Development Bank (ADB) (2009-2012) - Chairman of Asian Development Bank (ADB) Ethics Committee (2009 -2012) - Member of Asian Development Bank (ADB) Budget Review Committee (2009- 2011) - Chief Executive of Bureaucratic Reform in Ministry of Finance Republic of Indonesia (2007-2009) - Senior Advisor to Minister of Finance Republic of Indonesia (2006-2009) - Director of Member Relations in The National Social Security Council (2006-2008) - Society in Ministry of Finance Republic of Indonesia (2004-2006) - Director of International Cooperation (2003-2005), - Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XIII (1999-2003), and - Director of Budget in Ministry of Finance Republic of Indonesia (1998-2003).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG PPA	Concurrently, as Chair of the Risk Monitoring and GCG Committees of the PPA.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.	Has no affiliation with the Government of Indonesia as the major/controlling shareholder or affiliation with other Commissioners and Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company's Share Ownership	Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.	The Company does not trade its shares to the public, and does not have Management Share Ownership Program.

Profil Direksi

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Ikhtisar
Utama

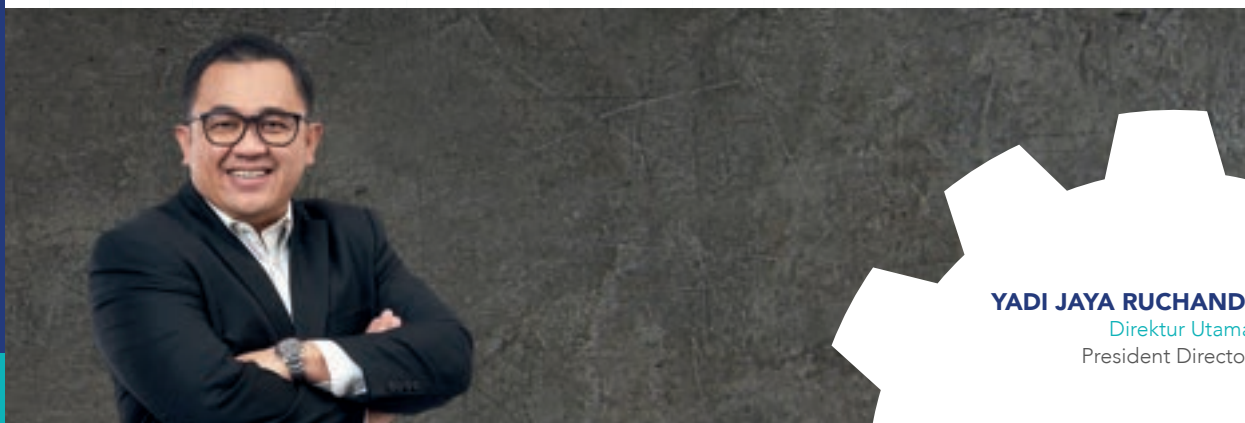
Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

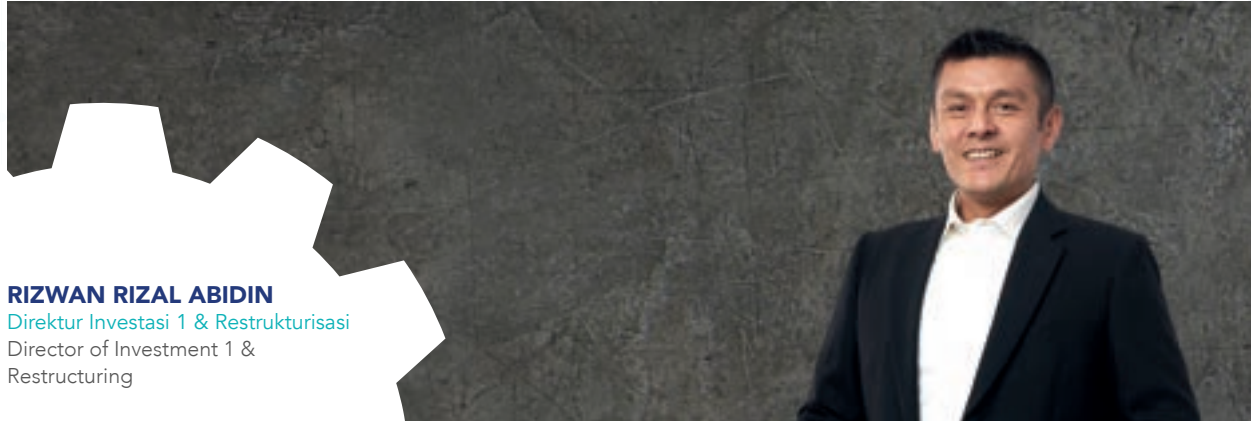


YADI JAYA RUCHANDI
Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 6 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode ke-1
Service Period: August 6, 2020 to AGMS 2025, 1st period

Warga Negara Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia Age	50 tahun pada tahun buku 2021	50 years in 2021
Kelahiran Place and Date of Birth	Biak, 27 Mei 1971	Biak, May 27, 1971
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	- Pertama kali menjabat dalam jajaran Direksi sebagai Direktur Investasi 2 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Perusahaan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, dengan masa jabatan 6 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025. - Kemudian menjabat sebagai Direktur Utama untuk masa jabatan meneruskan masa jabatan sebelumnya melalui Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-325/MBU/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Jabatan ini merupakan periode pertama	- Appointed for the First time as member of Board and Directors as Director of Investment 2 based on the Decree of Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders No. SK-265/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 regarding Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, with a term of office August 6, 2020 – AGMS 2025. - Then served as President Director for a term of office continuing the previous term through the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. This position is the first period.
Riwayat Pendidikan Education's History	- Master (S2) of International Management (MBA) dengan fokus International Finance and International Operation, dari Thunderbird-The American Graduate School of International Management, Arizona, Amerika Serikat (1997) - Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1995)	- Master of International Management (MBA) with a focus on International Finance and International Operations, from Thunderbird - the American Graduate School of International Management, Arizona, The United States (1997). - Bachelor of Engineering majoring in Mechanical Engineering from the University of Indonesia (1995)
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan manajemen bisnis.	Has expertise in finance, investment, and business management.
Riwayat Pekerjaan Work Experience	- Senior Executive Vice President Indonesia Eximbank (2019-2020) - Chief Financial Officer PT Tuban Petrochemicals Industries (2016-2019) - Chief Operating Officer pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2010-2016) - Executive Vice President Pengembangan Proyek pada PT Cardig International Aviation (2009) - Corporate Finance Group Head (Deputy CFO) pada PT Cardig International (2004-2006) - Senior Investment Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000- 2004) - Capital Market Dealer pada American Express Bank Jakarta (1999-2000) - Assistant Manager Treasury Analyst pada American Express Bank Jakarta (1997-1999)	- Senior Executive Vice President of Indonesia Eximbank (2019-2020) - Chief Financial Officer of PT Tuban Petrochemicals Industries (2016-2019) - Chief Operating Officer of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2010-2016) - Executive Vice President of Project Development at PT Cardig International Aviation (2009) - Corporate Finance Group Head (Deputy CFO) at PT Cardig International (2004-2006) - Senior Investment Officer at the Indonesian Bank Restructuring Agency (2000-2004) - Capital Market Dealer at American Express Bank Jakarta (1999-2000), and - Assistant Manager of Treasury Analyst at American Express Bank Jakarta (1997-1999).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not hold concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.	Has no affiliation with the Government of Indonesia as the major/controlling shareholder or affiliation with other Commissioners and Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company's Share Ownership	Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.	The Company does not trade its shares to the public, and does not have Management Share Ownership Program.

Profil Direksi Board of Directors Profile



RIZWAN RIZAL ABIDIN

Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi

Director of Investment 1 & Restructuring

Periode Jabatan: 6 Agustus 2020-RUPS Tahun 2025, Periode ke-1
Service Period: August 6, 2020 to AGMS 2025, 1st period

Warga Negara Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia Age	49 tahun pada tahun buku 2021	49 years in 2021
Kelahiran Place and Date of Birth	Jakarta, 6 November 1972	Jakarta, November 6, 1972
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	- Pertama kali menjabat dalam jajaran Direksi Direktur Restrukturisasi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK- 265/MSU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Perusahaan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, dengan masa jabatan 6 Agustus 2020 - RUPS Tahun 2025. - Kemudian menjabat sebagai Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi untuk masa jabatan meneruskan masa jabatan sebelumnya melalui Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-325/MBU/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Jabatan ini merupakan periode pertama.	
Riwayat Pendidikan Education's History	- Master (S2) Business & Administration (MBA) bidang Finance and Artificial Intelligence dari Southern New Hampshire University Graduate School USA (1999) - Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Trisakti (1996).	- Appointed for the First time as member of Board and Directors as Director of Restructuring based on The Decree of Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders No. SK- 265/MSU/08/2020 dated August 6, 2020 regarding Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duty, and Appointment of Members of Board of Directors of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, with a term of office August 6, 2020 – AGMS 2025. - Then served as Director of Investment 1 and Restructuring for a term of office continuing the previous term through the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-325/MBU /10/2020 dated October 9, 2020 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. This position is the first period.
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan restrukturisasi perusahaan.	Has expertise in finance, investment, and corporate restructuring.
Riwayat Pekerjaan Work Experience	- Managing Director IndoSterling Capital (2019-2020) - Direktur Investasi NWP Retail Warburg Pincus (2017-2019) - Direktur Merger & Akuisisi CIMB (2015-2017) - Direktur Corporate Client Solution CIMB (2013-2015) - Vice President Corporate Client Solutions CIMB (2009-2013) - Vice President Investment Banking (2007-2009) - Vice President Corporate Finance CIMB (2005-2007) - Associate Director Corporate Finance Noble Capital (2004-2005) - Investment Officer Badan Penyehatan Perbank Nasional (BPPN) (2000-2004) - Relationship Manager Citibank (1999-2000).	- Managing Director of IndoSterling Capital (2019-2020) - Investment Director of NWP Warburg Pincus (2017-2019) - Mergers & Acquisition Director of CIMB (2015-2017) - Corporate Client Solutions Director of CIMB (2013-2015) - Vice President Corporate Client Solutions of CIMB (2009 -2013) - Vice President Investment Banking (2007-2009) - Vice President Corporate Finance of CIMB (2005-2007) - Associate Director Corporate Finance of Noble Capital (2004-2005) - Investment Officer of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (2000-2004), and - Relationship Manager of Citibank (1999-2000).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not hold concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.	Has no affiliation with the Government of Indonesia as the major/controlling shareholder or affiliation with other Commissioners and Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company's Share Ownership	Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.	The Company does not trade its shares to the public, and does not have Management Share Ownership Program.

Profil Direksi Board of Directors Profile

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

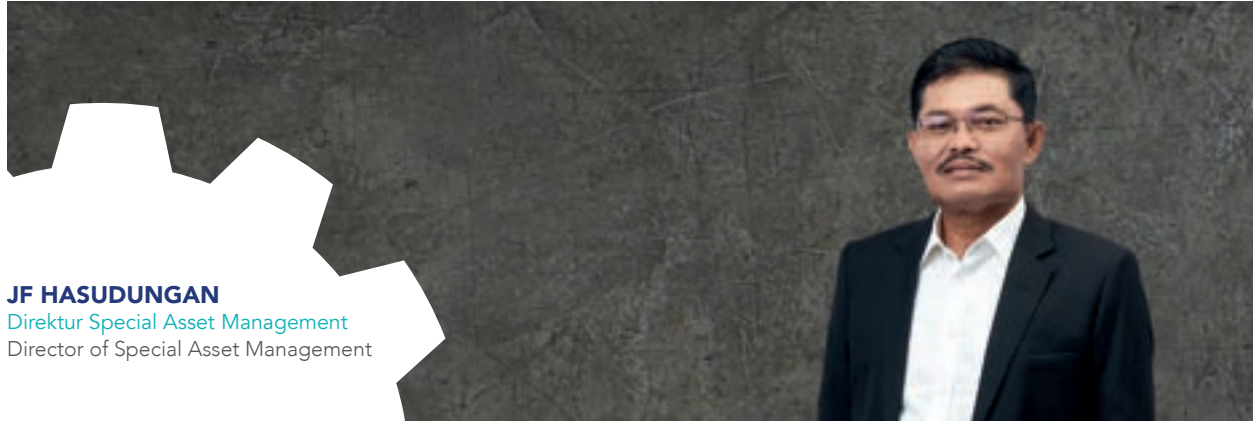
Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



ADI PAMUNGKAS DASKIAN
Direktur Investasi 2
Director of Investment 2

Periode Jabatan: 9 Oktober 2020 - RUPS Tahun 2025, Periode ke-1
Service Period: October 9, 2020 to AGMS 2025, 1st period

Warga Negara Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia Age	40 tahun pada tahun buku 2021	40 years in fiscal year 2021
Kelahiran Place and Date of Birth	Semarang, 22 Mei 1981	Semarang, May 22, 1981
Domisili Domicile	Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia	Depok City, West Java, Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Investasi 2 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, untuk masa jabatan 9 Oktober 2020-RUPS Tahun 2025. Jabatan ini merupakan periode pertama.	Appointed for the First time as Director of Investment 2 in accordance with The Decree of Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 regarding Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duty, and Appointment of Members of Board of Directors of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, for the term of office October 9, 2020 to AGMS 2025. This position is the first period.
Riwayat Pendidikan Education's History	- Master (S2) of International Management (MBA) bidang Business Administration dari Nyenrode Business University, Belanda (2008). - Sarjana (S1) Teknik jurusan Electrical and Electronics Engineering dari Nanyang Technological University, Singapura (2003).	- Master of International Management in Business Administration from Nyenrode Business University, The Netherlands (2008). - Bachelor of Engineering majoring in Electrical and Electronics Engineering from Nanyang Technological University, Singapore (2003).
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi dan bisnis manajemen.	Has expertise in finance, investment and business management.
Riwayat Pekerjaan Work Experience	- Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Juli-Oktober 2020) - Independent Financial Advisor Singapura dan Indonesia (2015-2020) - Direktur PT Meranti Putra Indonesia (2009-2015) - Business Development Manager PT Rizki Kacida Reana (2009-2015) - Thesis Project Mercurious (September 2008-Desember 2008) - Sales Manager Wavelength Technology Pte Ltd (2006-2007) - Financial Analyst PT Delta Advisory Indonesia (2004-2006)	- Corporate Deputy Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (July- October 2020) - Independent Financial Advisor of Singapore and Indonesia (2015-2020) - Director of PT Meranti Putra Indonesia (2009-2015) - Business Development Manager of PT Rizki Kacida Reana (2009- 2015) - Thesis Project Mercurious (September 2008-December 2008) - Sales Manager for Wavelength Technology Pte Ltd (2006-2007) - Financial Analyst PT Delta Advisory Indonesia (2004-2006).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not hold concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.	Has no affiliation with the Government of Indonesia as the major/controlling shareholder or affiliation with other Commissioners and Directors
Kepemilikan Saham Perusahaan Company's Share Ownership	Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.	The Company does not trade its shares to the public, and does not have Management Share Ownership Program.



JF HASUDUNGAN

Direktur Special Asset Management

Director of Special Asset Management

Periode Jabatan: 14 September 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode ke-1
Service Period: September 14, 2021 to AGMS 2026, 1st period

Warga Negara Citizen	Indonesia	Indonesian
Usia Age	56 tahun pada tahun buku 2021	56 years in 2021
Kelahiran Place and Date of Birth	Medan, 21 Agustus 1965	Medan, August 21, 1965
Domisili Domicile	Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia	Depok City, West Java, Indonesia
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Special Asset Management sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor SK-309/MBU/09/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, untuk masa jabatan 14 September 2021- RUPS Tahun 2026. Jabatan ini merupakan periode pertama.	Appointed for the First time as Director of Special Asset Management in accordance with the Decree of Minister of SOE as the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. SK-309/MBU/09/2021 dated September 14, 2021 regarding the Appointment of Members of the Board of Directors of Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, for the term of office September 14, 2021 to AGMS 2026. This position is the first period.
Riwayat Pendidikan Education's History	- Magister Manajemen (S2) bidang Keuangan Universitas Sumatera Utara (2005) - Sarjana (S1) bidang Ekonomi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen (1989)	- Master of Management in Finance, University of North Sumatera (2005) - Bachelor in Accounting Economics, HKBP Nommensen University (1989)
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian di bidang pengelolaan aset berkualitas rendah.	Has expertise in low quality asset management
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Sebelumnya beliau bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Senior Executive Vice President, Special Asset Management. Beliau telah bekerja di Bank Mandiri (sebelumnya Bank Export Import Indonesia) sejak 1991, dimana beliau bertanggung jawab atas pengelolaan dan restrukturisasi aset.	He previously worked at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Senior Executive Vice President, Special Asset Management. He has worked at Bank Mandiri (formerly Bank Export Import Indonesia) since 1991, where he was responsible for asset management and restructuring.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak memiliki rangkap jabatan	Does not hold concurrent positions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama/pengendali maupun hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.	Has no affiliation with the Government of Indonesia as the major/controlling shareholder or affiliation with other Commissioners and Directors.
Kepemilikan Saham Perusahaan Company's Share Ownership	Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.	The Company does not trade its shares to the public, and does not have Management Share Ownership Program.

Profil Manajemen Senior

SENIOR MANAGEMENTS' PROFILE

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Tree Asih Putra Sianturi
Senior Executive Vice President 1
Senior Executive Vice President 1

Menjabat sejak | Served since
1 Januari 2021
January 1, 2021
Bergabung sejak | Joined since
1 Januari 2021
January 1, 2021



Bagus Widyanto
Kepala Divisi Restrukturisasi dan Revitalisasi 2
Head of Restructuring and Revitalization 2
Division

Menjabat sejak | Served since
9 Juni 2021
June 9, 2021
Bergabung sejak | Joined since
9 Juni 2021
June 9, 2021



Fajar Soeharto
Senior Executive Vice President 2
Senior Executive Vice President 2

Menjabat sejak | Served since
16 November 2020
November 16, 2020
Bergabung sejak | Joined since
16 November 2020
November 16, 2020



Indra Budi Cahyono
Kepala Divisi SDM dan Umum
Head of HC and General Affairs Division

Menjabat sejak | Served since
14 Maret 2019
March 14, 2019
Bergabung sejak | Joined since
14 Juni 2019
June 14, 2019



Agus Widjaja
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretariat Division

Menjabat sejak | Served since
1 Oktober 2020
October 1, 2020
Bergabung sejak | Joined since
1 Juni 2009
June 1, 2009



Lie Tjauw Hap
Kepala Divisi Treasury
Head of Treasury Division

Menjabat sejak | Served since
1 Mei 2020
May 1, 2020
Bergabung sejak | Joined since
15 Juni 2007
June 15, 2007



Astrida Navayette
Kepala Divisi Hukum
Head of Legal Division

Menjabat sejak | Served since
16 Desember 2021
December 16, 2021
Bergabung sejak | Joined since
15 Februari 2022
February 15, 2022



Mahdi Manfaluthi
Kepala Divisi Investasi 1
Head of Investment 1 Division

Menjabat sejak | Served since
16 April 2021
April 16, 2021
Bergabung sejak | Joined since
16 April 2021
April 16, 2021



Ayatullah Asfaroni
Kepala Divisi Special Asset Management 2
Head of Special Asset Management 2 Division

Menjabat sejak | Served since
1 Mei 2009
May 1, 2009
Bergabung sejak | Joined since
1 Mei 2009
May 1, 2009



Muhammad Reza Maulana
Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit Division

Menjabat sejak | Served since
25 Oktober 2021
October 25, 2021
Bergabung sejak | Joined since
25 Oktober 2021
October 25, 2021

Profil Manajemen Senior Senior Managements' Profile



Nanang Ariseno
Kepala Divisi Special Asset Management 1
Head of Asset Management 1 Division

Menjabat sejak | Served since
1 Juli 2011
July 1, 2011
Bergabung sejak | Joined since
1 Oktober 2019
October 1, 2019



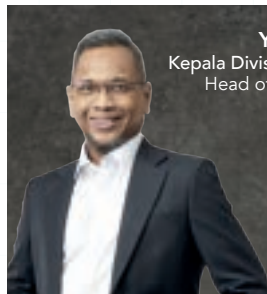
Rizka Ariesnawan Putranto
Kepala Divisi Restrukturisasi dan Revitalisasi 1
Head of Restructuring and Revitalization 1 Division

Menjabat sejak | Served since
25 Oktober 2021
October 25, 2021
Bergabung sejak | Joined since
25 Oktober 2021
October 25, 2021



Pongky Afriandita
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

Menjabat sejak | Served since
5 Januari 2022
January 5, 2022
Bergabung sejak | Joined since
15 Februari 2022
February 15, 2022



Yanuar Rokhmad Madyantoro
Kepala Divisi Restrukturisasi dan Revitalisasi 3
Head of Restructuring and Revitalization 3 Division

Menjabat sejak | Served since
2 Agustus 2021
August 2, 2021
Bergabung sejak | Joined since
2 Agustus 2021
August 2, 2021



Randy Irawan
Kepala Divisi Advisory
Head of Advisory Division

Menjabat sejak | Served since
5 April 2021
April 5, 2021
Bergabung sejak | Joined since
5 April 2021
April 5, 2021



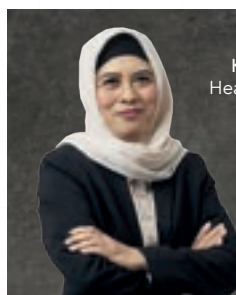
Yessy Indahwati Hadipurnama
Kepala Divisi Perencanaan Strategis
Perusahaan dan Manajemen Kinerja
Head of Corporate Strategic Planning and
Performance Management

Menjabat sejak | Served since
18 Agustus 2021
August 18, 2021
Bergabung sejak | Joined since
18 Agustus 2021
August 18, 2021



RB Alexander Chandra Irawan
Kepala Divisi Investasi 2
Head of Investment 2 Division

Menjabat sejak | Served since
29 September 2014
September 29, 2014
Bergabung sejak | Joined since
1 Oktober 2019
October 1, 2019



Yuliza Sukmasari
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Finance and Accounting Division

Menjabat sejak | Served since
15 Maret 2004
March 15, 2004
Bergabung sejak | Joined since
7 Januari 2020
January 7, 2020

Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan perusahaan sebanyak 166 orang, menurun 1,61% dibandingkan posisi tahun 2020 yang mencapai 169 orang. Rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

STRATEGIC INITIATIVES

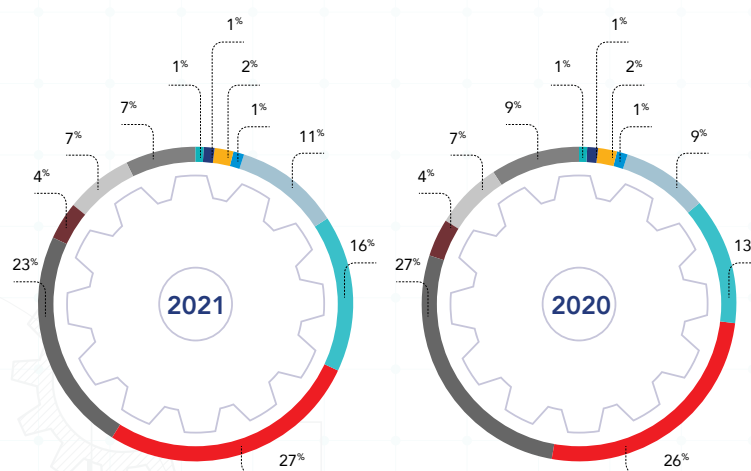
As of December 31st, 2021, the Company employed 166 employees, a decrease of 1.61% from the 169 employees in 2020. The following table summarizes the details:

Komposisi Karyawan berdasarkan Level Organisasi/Jabatan
Employee Composition By Organizational Level/Position

Level Organisasi/ Jabatan Organizational/ Position Level	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	0	2	1	2	0	2	1	0	-	↑↓
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	0	1	1	1		1	1	1	0	-	↑↓
Direksi Board of Directors	4	0	4	2	3	0	3	2	1	33	↑
SEVP SEVP	2	0	2	1	1		1	1	1	100	↑
Kepala Divisi Head of Division	15	3	18	11	11	5	16	9	2	13	↑
Kepala Grup Head of Group	19	8	27	16	15	7	22	13	5	23	↑
Kepala Unit Head of Unit	27	18	45	27	23	21	44	26	1	2	↑
Officer Officer	24	14	38	23	29	17	46	27	-8	(17)	↑
Sekretaris Secretary	0	6	6	4	0	7	7	4	-1	(14)	↑
Staf Staff	5	6	11	7	7	5	12	7	-1	(8)	↑
Penugasan Assignment	11	1	12	7	13	2	15	9	-3	(20)	↓
Jumlah Total	109	57	166	100	104	65	169	100	-3	(2)	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kepala Grup Head of Group
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	Kepala Unit Head of Unit
Direksi Board of Directors	Officer Officer
SEVP SEVP	Sekretaris Secretary
Kepala Divisi Head of Division	Staf Staff
	Penugasan Assignment



Komposisi Karyawan berdasarkan Penugasan Employee Composition By Assignment

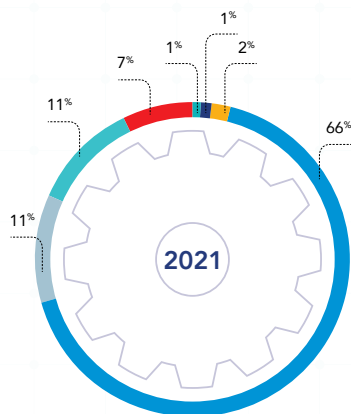
Penugasan Assignment	2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	0	2	1
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	0	1	1	1
Direksi Board of Directors	4	0	4	2
Direktorat Utama Chief Directorate	68	42	110	66
Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi Directorate of Investment 1 and Restructuring	16	3	19	11
Direktorat Investasi 2 Directorate of Investment 2	12	6	18	11
Direktorat Special Asset Management Directorate of Special Asset Management	7	5	12	7
Jumlah Total	109	57	166	100

Penugasan Assignment	2020			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	0	2	1
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	0	1	1	1
Direksi Board of Directors	3	0	3	2
Direktorat Utama Main Directorate	68	44	112	66
Direktorat Investasi Investment Directorate	24	14	38	22
Direktorat Konsultasi Bisnis & Aset Manajemen Business Advisory and Asset Management	7	6	13	11
Jumlah Total	104	65	169	100

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

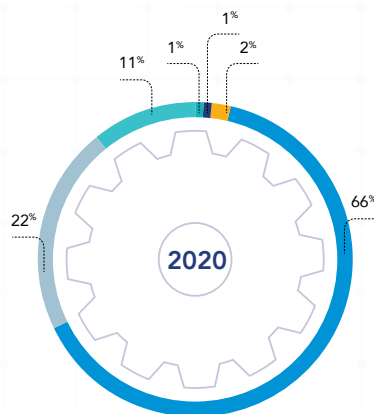
2021

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	
Direksi Board of Directors	
Direktorat Utama Chief Directorate	
Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi Directorate of Investment 1 and Restructuring	
Direktorat Investasi 2 Directorate of Investment 2	
Direktorat Special Asset Management Directorate of Special Asset Management	



2020

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	
Direksi Board of Directors	
Direktorat Utama Main Directorate	
Direktorat Investasi Investment Directorate	
Direktorat Konsultasi Bisnis & Aset Manajemen Business Advisory and Asset Management	



Komposisi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition By Employment Status

Status Status	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Tetap Permanent	105	55	160	96	101	61	162	96	-2	(1)	↓
Tidak Tetap Contract	4	2	6	4	3	4	7	4	-1	(14)	↓
Jumlah Total	109	57	166	100	104	65	169	100	-3	(2)	↓

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Tetap Permanent	
Tidak Tetap Contract	



Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition By Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Strata 3 Doctorate Degree	2	0	2	1	1	0	1	1	1	100	↑
Strata 2 Master Degree	38	9	47	28	27	10	37	22	10	27	↑
Strata 1 Bachelor Degree	67	42	109	66	71	46	117	69	-8	(7)	↓
Diploma 3 Diploma Degree	0	5	5	3	1	7	8	5	-3	(38)	↓
SMA Senior High School	2	1	3	2	4	2	6	4	-3	(50)	↓
Jumlah Total	109	57	166	100	104	65	169	100	-3	(2)	↓

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia Employee Composition By Age

Rentang Usia Age Range	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
	M	F			M	F					
> 55 Tahun > 55 Years Old	6	1	7	4	5	1	6	4	1	17	↑
46-55 Tahun 46-55 Years Old	39	18	57	34	47	22	69	41	-12	(17)	↓
36-45 Tahun 36-45 Years Old	33	17	50	30	20	16	36	21	14	39	↑
26-35 Tahun 26-35 Years Old	31	15	46	28	30	19	49	29	-3	(6)	↓
<25 Tahun <25 Years Old	6	0	6	4	2	7	9	5	-3	(33)	↓
Jumlah Total	115	51	166	100	104	65	169	100	-3	-2	↓

Komposisi Karyawan berdasarkan Masa Kerja Employee Composition By Service Period

Masa Kerja Service Period	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
	M	F			M	F					
> 1 tahun >1 Years	29	10	39	23	10	6	16	9	23	144	↑
1 - 3 tahun 1-3 Years	23	10	33	20	26	13	39	23	-6	(15)	↓
4 - 6 tahun 4-6 Years	20	8	28	17	18	9	27	16	1	4	↑
7 - 10 tahun 7-10 Years	7	5	12	7	13	14	27	16	-15	(56)	↓
11 - 13 tahun 11-13 Years	14	21	35	21	16	17	33	20	2	6	↑
14 - 16 tahun 14-16 Years	2	0	2	1	21	6	27	16	-25	(93)	↓
> 17 tahun >17 Years	14	3	17	10	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Total	109	57	166	100	104	65	169	100	-3	(2)	↓

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)	
Laki-laki Male	109	66	104	62	5	5	↑
Perempuan Female	57	34	65	38	-8	-12	↓
Jumlah Total	166	100	169	100	-3	-2	↓

Pendidikan dan Pelatihan: Program Pengembangan Kompetensi Karyawan

EDUCATION AND TRAINING: EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Peningkatan kompetensi karyawan direncanakan dan dilaksanakan sejalan dengan rencana usaha Perusahaan. Pelaksanaannya tidak terbatas yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan, tetapi juga pihak eksternal.

Employee competency development is planned and implemented in accordance with the business plan of the Company. Not only are those held internally by the Company included in the implementation, but also those held by third parties.

Kebijakan pengembangan kompetensi ini juga untuk memotivasi karyawan agar dapat meningkatkan kinerja. Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada tahun 2021 dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

Additionally, this competency development policy aims to motivate employees to improve their performance. In 2021, the Company's training and development efforts were divided into five (five) categories:

- 1. Pelatihan Publik**
Pelatihan yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh sumber eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll).
- 2. Pelatihan Internal**
Pelatihan teknis maupun non teknis yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll).
- 3. Sharing Session/Friday Afternoon**
Sarana memberikan pengetahuan secara singkat, minimal 1 (satu) jam yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll).
- 4. Keanggotaan**
Penggantian biaya keanggotaan (*membership*) karyawan pada suatu lembaga yang terkait dengan pekerjaannya.
- 5. Karyawan menjadi Narasumber**
Karyawan memberikan sharing pengetahuan atau berpartisipasi aktif menjadi pembicara/narasumber.
- 1. Public Training**
Employee training, which was organized by external sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.).
- 2. Internal training**
The Company provides technical and non-technical training to its employees, which is sourced both internally and externally (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.).
- 3. Sharing Session/Friday Afternoon**
A method of imparting knowledge in a concise manner, at least 1 (one) hour, organized by the Company using internal and external sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.).
- 4. Membership**
The reimbursement of employee membership fees at a work-related institution.
- 5. Employees become resource persons**
Employees share knowledge or actively participate as speakers/resource persons.

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Recapitulation

No.	Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Subyek Number of Subjects	Jumlah Peserta Number of Participants	Komposisi Karyawan yang Telah Mengikuti Pelatihan Composition of Employees Attending Training	Total Biaya Total Costs
1	Pelatihan Publik Public Training	57	107	Direktorat Investasi 1 & Restrukturisasi : 0,94% Direktorat Investasi 2: 6,54% Direktorat Special Asset Management: 1,87% Direktorat Utama : 90,65% Directorate of Investment 1 & Restructuring: 0.94% Directorate of Investment 2: 6.54% Directorate of Special Asset Management: 1.87% Main Directorate: 90.65%	326.484.408
2	Pelatihan Internal Internal Training	11	340	Direktorat Investasi 1 & Restrukturisasi: 16,47% Direktorat Investasi 2: 13,82% Direktorat Special Asset Management: 10,59 % Direktorat Utama: 59.12% Directorate of Investment 1 & Restructuring: 16.47% Directorate of Investment 2: 13.82% Directorate of Special Asset Management: 10.59 % Main Directorate: 59.12%	869.733.375
3	Sharing Session/ Friday Afternoon Sharing Session/ Friday Afternoon	15	796	Direktorat Investasi 1 & Restrukturisasi : 13,44% Direktorat Investasi 2 : 8,29% Direktorat Special Asset Management: 6,54% Direktorat Utama : 71,73% Directorate of Investment 1 & Restructuring: 13.44% Directorate of Investment 2: 8.29% Directorate of Special Asset Management: 6.54% Main Directorate: 71.73%	33.645.000
4	Keanggotaan Membership	5	4	Direktorat Investasi 1 & Restrukturisasi : 0 % Direktorat Investasi 2 : 0 % Direktorat Special Asset Management: 0 % Direktorat Utama : 100 % Directorate of Investment 1 & Restructuring: 0 % Directorate of Investment 2: 0 % Directorate of Special Asset Management: 0 % Main Directorate: 100 %	31.194.778
5.	Karyawan menjadi Narasumber Employee become Resource Person	3	5	Direktorat Investasi 1 & Restrukturisasi: 0 % Direktorat Investasi 2: 0 % Direktorat Special Asset Management: 0 % Direktorat Utama: 100 % Directorate of Investment 1 & Restructuring: 0 % Directorate of Investment 2: 0 % Directorate of Special Asset Management: 0 % Main Directorate: 100 %	2.000.000
Total					1.263.057.561

Perusahaan telah merencanakan program pengembangan kompetensi karyawan tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp8.020 juta. Sedangkan realisasi investasi dalam program pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.263 juta, mengalami kenaikan 20,29% atau setara dengan Rp417 juta dibandingkan tahun 2020 yang Rp1.050 juta.

The Company has planned an employee competency development program in 2021 with a budget of Rp8,020 million. Meanwhile the realization of investment in employee competency development programs in 2021 was recorded at Rp1,263 million, an increase of 20.29% or equivalent to Rp417 million compared to 2020, which was Rp1,050 million.

	Realisasi 2021 (Rp Juta) 2021 Realization (Rp-million)	Target 2021 (Rp Juta) 2021 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 Achievement of 2021 Realization against Target(%)	Realisasi 2020 (Rp Juta) 2020 Realization (Rp-million)	Target 2020 (Rp Juta) 2020 Target (Rp-million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2020 Achievement of 2020 Realization against Target(%)
Investasi Pelatihan dan Pendidikan	1.263	8.020	15,74%	846	1.500	56,40%
Investment in Education and Training						

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris Education and Training of Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Krisna Wijaya, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Krisna Wijaya, President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Pelatihan Publik	Sosialisasi Updating Talent Pool Direksi BUMN	Online, 17 Februari 2021	Kementerian BUMN
	Public Training	Socialization of the SOE Directors' Talent Pool Update	Online, February 17, 2021	Ministry of SOEs
	Pelatihan Publik	Webinar Peningkatan Kapabilitas Satuan Pengawas Internal dengan tema <i>Enhancing Internal Audit Capability; A Strategy Safeguard Goals Of State And Regionally-Owned Corporations</i>	Online, 10 Maret 2021	BPKP
	Public Training	Webinar on Improving the Capability of the Supervisory Unit Internal with the theme <i>Enhancing Internal Audit Capability; A Strategy To Safeguard The Goals Of State And Regionally-Owned Corporations</i>	Online, March 10, 2021	BPKP
	Pelatihan Publik	Sosialisasi Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU.03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara dan Perseroan Terbatas	Online, 25 Maret 2021	Pelatihan Publik
	Public Training	Socialization of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU.03/2021 on Guidelines for Proposing, Reporting, Monitoring, and Changing the Use of Additional State Equity Participation and Limited Liability Companies.	Online, March 25, 2021	Public Training
	Pelatihan Publik	Kick off Meeting Cluster Talent Committee (CTC) BUMN	Online, 23 April 2021	Kementerian BUMN
	Public Training	Kick off Meeting Cluster Talent Committee (CTC) SOEs	Online, April 23, 2021	Ministry of SOEs

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris
Education and Training of Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
	Pelatihan Publik	Sosialisasi <i>Cluster Talent Committee (CTC)</i> BUMN Anggota Klaster Danareksa-PPA Cluster	Online, 10 Mei 2021	PT Danareksa
	Public Training	Socialization of Cluster Talent Committee (CTC) of SOEs Member of Danareksa-PPA Cluster	Online, May 10, 2021	PT Danareksa
	Pelatihan Publik	Sharing Session Manajemen Risiko BUMN Karya, <i>Sharing Session</i> Manajemen Risiko Minerba dan <i>Sharing Session</i> BoC Charter pada BUMN Perbankan	Online, 24 Mei 2021	Kementerian BUMN
	Public Training	SOEs Karya Risk Management Sharing Session, Minerba Risk Management Sharing Session, and BoC Charter Sharing Session in SOEs Banking	Online, May 24, 2021	Ministry of SOEs
	Pelatihan Publik	Sosialisasi Penguatan Peran Satuan Kerja Audit Internal Klaster BUMN Danareksa-PPA Tahap 1	Online, 7 Juni 2021	PT Danareksa
	Public Training	Socialization of strengthening the role of the Internal Audit Work Unit of the State-Owned Enterprises Cluster Danareksa-PPA Phase 1	Online, June 7, 2021	PT Danareksa
	Pelatihan Publik	Sosialisasi Surat Keputusan Nomor: SK-103/MBU/03/2021 tentang Kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara	Online, 14 September 2021	Kementerian BUMN
	Public Training	Socialization of Decree No. SK-103/MBU/03/2021 on Standards for Public Accounting Firms, Public Appraisal Services Firms, and Actuarial Consulting Firms in State-Owned Enterprises	Online, September 14, 2021	Ministry of SOEs
	Pelatihan Internal	Tantangan Pengelolaan Fiscal di Masa Pandemi COVID-19	Online, 5 November 2021	PPA
	Inhouse Training	Fiscal Management Challenges in the COVID-19 Pandemic	Online, November 5, 2021	PPA

Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris
Education and Training of Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Marwanto Harjowiryo, Komisaris Commissioner	Pelatihan Internal	Risk Matrix Lembaga Jasa Keuangan Non Bank	Online, 19 Maret 2021	PPA
	Inhouse Training	Risk Matrix of Non-Bank Financial Services Institutions	Online, March 19, 2021	PPA
	Pelatihan Publik	Sosialisasi Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU.03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara dan Perseroan Terbatas.	Online, 25 Maret 2021	Kementerian BUMN
	Public Training	Socialization of Regulation of the Minister of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU.03/2021 concerning Guidelines for Proposing, Reporting, Monitoring, and Changes in the Use of Additional State Equity Participation and Limited Liability Companies.	Online, March 25, 2021	Ministry of SOEs
	Pelatihan Publik	Sosialisasi Manajemen Risiko	Online, 29 April 2021	Kementerian BUMN
	Public Training	Risk Management Socialization	Online, April 29, 2021	Ministry of SOEs
	Pelatihan Publik	Seminar Update dan Prospek Ekonomi 2021 dan 2022	Online, 7 Juli 2021	PT Danareksa
	Public Training	Seminar on Updates and Economic Prospects for 2021 and 2022	Online, July 7, 2021	PT Danareksa
	Pelatihan Publik	ATMR Operasional dan Budaya Manajemen Risiko <i>Operational of Risk</i>	Online, 9 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
	Public Training	Weighted Asset (RWA) and Risk Management Culture	Online, August 9, 2021	Indonesian Banking Development Institute
	Pelatihan Internal	Retired Not Expired-Aspek Non Finansial Pensiun	Online, 20 Agustus 2021	PPA
	Inhouse Training	Retired Not Expired - NonFinancial Aspects of retirement	Online, August 20, 2021	PPA
	Pelatihan Publik	Business Judgment Rule	Online, 26 Oktober 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)
	Public Training	Business Judgment Rule	Online, October 26, 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)
	Pelatihan Publik	Webinar Online Series Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices - Business Judgment Rule	Online, 26-28 Oktober 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)
	Public Training	Online Webinar Series Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices - Business Judgment Rule.	Online, October 26-28, 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)

Pendidikan dan Pelatihan Direksi

Education and Training of The Board of Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Yadi Jaya Ruchandi, Direktur Utama President Director	Pelatihan Publik	<i>On Boarding Directorship Program</i>	Online, 9 Juni – 29 Juli 2021	Forum Human Capital Indonesia
	Public Training	On Boarding Directorship Program	Online, June 9 – July 29, 2021	Forum Human Capital Indonesia
Adi Pamungkas Daskian, Direktur Investasi 2 Director of Investment 2	Pelatihan Publik	<i>On Boarding Directorship Program</i>	Online, 1 Oktober – 25 November 2021	FHCI
	Public Training	On Boarding Directorship Program	Online, October 1 – November 25, 2021	FHCI

Kontribusi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Narasumber

The Board of Commissioners and Directors' contribution as a resource person

No.	Nama Name	Topik Topic	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
1	Krisna Wijaya, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Commissioner concurrently Independent Commisisoner	<i>Risk Matrix</i> Lembaga Jasa Keuangan Non Bank	Online, 19 Maret 2021	PPA
		Risk Matrix of Non-Bank Financial Services Institutions	Online, March 19, 2021	PPA
		<i>Retired Not Expired</i> -Aspek Non Finansial Pensiun	Online, 20 Agustus 2021	PPA
		Retired Not Expired - Non-Financial Aspects of Retirement	Online, August 20, 2021	PPA
2	Marwanto Harjowiryo	Tantangan Pengelolaan Fiskal di Masa Pandemi COVID-19	Online, 5 November 2021	PPA
		Fiscal Management Challenges in the COVID-19 Pandemic	Online, November 5, 2021	PPA
3	Yadi Jaya Ruchandi, Direktur Utama President Director	<i>Corporate Restructuring - Enhancing Economic and social Value</i>	Online, 28 Januari 2021	LPPI
		Corporate Restructuring - Enhancing Economic and social Value	Online, January 28, 2021	LPPI
		Workshop Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 PPA dengan Konsultan KPMG	Online, 27 Maret 2021	PPA
		Workshop of PPA with KPMG Consultants on the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024	Online, March 27, 2021	PPA
		<i>Chief Editors Gathering</i> PPA - Transformasi Bisnis PPA dengan Forum Pemimpin Redaksi	Online, 29 April 2021	PPA
		Chief Editors Gathering of PPA - PPA Business Transformation with Editor-in-Chief Forum	Online, April 29, 2021	PPA

Kontribusi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Narasumber

The Board of Commissioners and Directors' contribution as a resource person

No.	Nama Name	Topik Topic	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
4	Rizwan Rizal Abidin, Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Investment 1 and Restructuring Director	Restrukturisasi Korporasi di era Society 5.0	Online, 5 Mei 2021	Universitas Trisakti
		Corporate Restructuring in the era of Society 5.0	Online, May 5, 2021	Trisakti University
		Workshop dalam rangka pembahasan Penanganan BUMN Titip Kelola dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN)	Online, 21 Mei 2021	PPA
		Workshop in the context of discussing the handling of SOEs restructuring with the Directorate General of State Assets Management (DJKN), Ministry of Finance	Online, May 21, 2021	PPA
		Webinar Internasional Singapore Insolvency Conference 2021	Online, 13 Oktober 2021	Insolvency Practitioners Association of Singapore (IPAS)
5	Adi Pamungkas Daskian, Direktur Investasi 2 Investment 2 Director	Singapore Insolvency Conference International Webinar 2021	Online, October 13, 2021	Insolvency Practitioners Association of Singapore (IPAS)
		Workshop rencana Penerbitan Global Bond dan Pelaksanaan Project Paris PPA bersama Konsultan dan Kementerian BUMN	Online, 1 April 2021	PPA
		Workshop with Consultants and the Ministry of SOEs on the Global Bond Issuance Plan and the PPA's Paris Project Implementation	Online, April 1, 2021	PPA

Pendidikan dan Pelatihan Komite Audit

Education and Training of Audit Committee

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Ahmad Malkan Lubis, Anggota Komite Audit Member Audit Committee	Pelatihan Publik	ATMR Operasional dan Budaya Manajemen Risiko	Online, 9 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
	Public Training	Operational Risk Weighted Asset (RWA) and Risk Management Cultur	Online, August 9, 2021	Indonesian Banking Development Institute
	Pelatihan Publik	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perusahaan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	Online, 23 September 2021	Indonesian Institute of Audit Committee
	Public Training	The Audit Committee's Responsibilities When the Company Is Involved in Legal Proceedings Related to Financial Statements	Online, September 23, 2021	Indonesian Institute of Audit Committee
	Pelatihan Publik	Business Judgment Rule	Online, 26-28 Oktober 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)
	Public Training	Business Judgment Rule	Online, October 26-28, 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)

Pendidikan dan Pelatihan Komite Pemantau Risiko dan GCG Education and Training of Risk Monitoring and GCG Committee

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Iko Marita Mustokoweni, Anggota Komite Pemantau Risiko & GCG Member of Risk Monitoring and GCG Committee	Pelatihan Publik	ATMR Operasional dan Budaya Manajemen Risiko	Online, 9 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
	Public Training	Operational Risk Weighted Asset (RWA) and Risk Management Culture	Online, August 9, 2021	Indonesian Banking Development Institute
	Pelatihan Publik	<i>Business Judgment Rule</i>	Online, 26-28 Oktober 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)
	Public Training	Business Judgment Rule	Online, October 26-28, 2021	Pertamina Training & Consulting (PTC)

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan Education and Training of Corporate Secretary

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Agus Widjaja, Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Publik	Rencana Penerbitan <i>Global Bond</i> dan Pelaksanaan <i>Project Paris</i> PPA bersama Konsultan dan Kementerian BUMN	Online, 1 April 2021	PPA
	Public Training	Workshop with Consultants and the Ministry of SOEs on the Global Bond Issuance Plan and the PPA's Paris Project Implementation	Online, April 1, 2021	PPA
	Pelatihan Publik	Penanganan BUMN Titip Kelola dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN)	Online, 21 Mei 2021	PPA
	Public Training	The handling of SOEs restructuring with the Directorate General of State Assets Management (DJKN), Ministry of Finance	Online, May 21, 2021	PPA
Muhammad Iqbal, Kepala Grup Head of Group	Pelatihan Internal	<i>Business Process Management</i>	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	Inhouse Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	BIMTEK INDI 4.0	Online, 18 – 21 Oktober 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Inhouse Training	BIMTEK INDI 4.0	Online, October 18 – October 21, 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Pelatihan Internal	<i>Transformational Leadership Training</i>	Online, 17-18 November 2021	Indonesia Professional Development Center
	Inhouse Training	Transformational Leadership Training	Online, November 17-18, 2021	Indonesia Professional Development Center
	Pelatihan Publik	Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat)	Online, 20 Desember 2021	Kominfo RI
	Public Training	The operator of a Private Scope Electronic System	Online, December 20, 2021	Kominfo RI

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan
Education and Training of Corporate Secretary

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Smitha Anjani, Kepala Grup Head of Group	Pelatihan Publik	Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat)	Online, 20 Desember 2021	Kominfo RI
	Public Training	The operator of a Private Scope Electronic System	Online, December 20, 2021	Kominfo RI
Johana Alva Orchita, Kepala Unit Head of Unit	Pelatihan Publik	Bond Issuance PHEI	Online, 2–5 Agustus 2021	PT Penilai Harga Efek Indonesia
	Public Training	Bond Issuance PHEI	Online, August 2-5, 2021	PT Penilai Harga Efek Indonesia
	Pelatihan Internal	Leadership Challenges	Online, 24-25 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Leadership Challenges	Online, November 24-25, 2021	IPDC Training
Agung Yulianto, Kepala Unit Head of Unit	Pelatihan Publik	Bond Issuance PHEI	Online, 2-5 Agustus 2021	PT Penilai Harga Efek Indonesia
	Public Training	Bond Issuance PHEI	Online, August 2-5, 2021	PT Penilai Harga Efek Indonesia
	Pelatihan Internal	Agile Leadership	Online, 9-10 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Agile Leadership	Online, November 9-10, 2021	IPDC Training
Prayogo Witjaksono, Kepala Unit Head of Unit	Pelatihan Publik	Bond Issuance PHEI	Online, 2–5 Agustus 2021	PT Penilai Harga Efek Indonesia
	Public Training	Bond Issuance PHEI	Online, August 2-5, 2021	PT Penilai Harga Efek Indonesia
	Pelatihan Internal	Agile Leadership	Online, 9-10 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Agile Leadership	Online, November 9-10, 2021	IPDC Training
Amanda Felicia, Staf Staff	Pelatihan Publik	Writing Skills for PR	Online, 17-18 Juni 2021	Media Edutama Indonesia
	Public Training	Writing Skills for PR	Online, June 17-18, 2021	Media Edutama Indonesia
Indira Shinta Dewi, Staf Staff	Pelatihan Publik	Writing Skills for PR	Online, 17-18 Juni 2021	Media Edutama Indonesia
	Public Training	Writing Skills for PR	Online, June 17-18, 2021	Media Edutama Indonesia
Elisa Josephine Syekhina, Staf Staff	Pelatihan Publik	Basic Financial Accounting	Online, 30 September – 23 Desember 2021	Ikatan Akuntan Indonesia
	Public Training	Basic Financial Accounting	Online, September 30 – December 23, 2021	Institute of Indonesia Chartered Accountants
	Pelatihan Internal	Awareness ISO 37001:2016	Online, 30 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Online, July 30, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
Nova Arhansyah, Staf Staff	Pelatihan Publik	Humas dan Protokol	Online, 27–28 Agustus 2021	Expertindo Training and Consulting
	Public Training	Public Relations and Protocol	Online, August 27-28, 2021	Expertindo Training and Consulting
Gina Agustina, Staf Staff	Pelatihan Publik	Writing Skills for PR	Online, 17-18 Juni 2021	Media Edutama Indonesia
	Public Training	Writing Skills for PR	Online, June 17-18, 2021	Media Edutama Indonesia

Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengawas Internal Education and Training of Internal Audit Unit

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Muhammad Reza Maulana, Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Audit Unit	Pelatihan Internal	<i>Transformational Leadership</i>	Online, 17-18 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Transformational Leadership	Online, November 17-18, 2021	IPDC Training
Erwin Adiyatno, Kepala Grup Head of Group	Pelatihan Publik	<i>Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan</i>	Online, 15-27 Maret 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit
	Public Training	Qualified Internal Auditor Advanced	Online, March 15-27, 2021	Internal Audit Education Foundation
	Pelatihan Publik	<i>Hedging</i>	Online, 28 April 2021	BNP Paribas
	Public Training	Hedging	Online, April 28, 2021	BNP Paribas
	Pelatihan Internal	<i>Agile Leadership</i>	Online, 9-10 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Agile Leadership	Online, November 9-10, 2021	IPDC Training
	Pelatihan Internal	<i>Leadership Challenges</i>	Online, 24-25 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Leadership Challenges	Online, November 24-25, 2021	IPDC Training
Dady Atma Priyagi, Kepala Unit Head of Unit	Pelatihan Internal	<i>Business Process Management</i>	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	Inhouse Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Publik	<i>Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan</i>	Online, 11-25 Oktober 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit
	Public Training	Advanced Qualified Internal Auditor	Online, October 11-25, 2021	Internal Audit Education Foundation
Fajar Setianto, Kepala Unit Head of Unit	Pelatihan Publik	<i>Online Workshop : Assesing Internal Control - COSO (AIC)</i>	Online, 19-20 April 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit
	Public Training	Online Workshop : Assesing Internal Control - COSO (AIC)	Online, April 19-20, 2021	Internal Audit Education Foundation
	Pelatihan Internal	Bimtek INDI 4.0	Online, 18 – 21 Oktober 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Inhouse Training	Bimtek INDI 4.0	Online, October 18-21, 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Hidayah Widyaningrum, Kepala Unit Head of Unit	Pelatihan Internal	Bimtek INDI 4.0	Online, 18 – 21 Oktober 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Inhouse Training	Bimtek INDI 4.0	Online, October 18-21, 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Pelatihan Publik	<i>Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan</i>	Online, 6-18 Desember 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit
	Public Training	Advanced Qualified Internal Auditor	Online, December 6-18, 2021	Internal Audit Education Foundation

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko
Education and Training of Risk Management

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Ikhtisar Utama	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Awareness ISO 37001:2016	Online, 30 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Online, July 30, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Risk Analysis in Corporate Finance	Online, 1-24 September 2021	Pimley & Pimley Inc
	Inhouse Training	Risk Analysis in Corporate Finance	Online, September 1-24, 2021	Pimley & Pimley Inc
	Pelatihan Internal	APLMA & Penyusunan Perjanjian Kredit	Online, 8-9 September 2021	Ginting & Reksodiputro
	Inhouse Training	APLMA & Credit Agreement Preparation	Online, September 8-9, 2021	Ginting & Reksodiputro
Laporan Manajemen	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	Inhouse Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	APLMA & Penyusunan Perjanjian Kredit	Online, 8-9 September 2021	Ginting & Reksodiputro
	Inhouse Training	APLMA & Credit Agreement Preparation	Online, September 8-9, 2021	Ginting & Reksodiputro
	Pelatihan Internal	BIMTEK INDI 4.0	Online, 18-21 Oktober 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Inhouse Training	BIMTEK INDI 4.0	Online, October 18 – 21, 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
Profil Perusahaan	Pelatihan Internal	Transformational Leadership	Online, 17-18 November 2021	IPDC Training
	In-house Training	Transformational Leadership	Online, November 17-18, 2021	IPDC Training
	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
Pembahasan dan Analisa Manajemen	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
Tata Kelola Perusahaan	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Business Process Management	Jakarta, 4 Agustus – 6 November 2021	Pungky Purnadi Academy
	In-house Training	Business Process Management	Jakarta, August 4 – November 6, 2021	Pungky Purnadi Academy
	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 1-2 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, July 1-2, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko Education and Training of Risk Management

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Patar Jossi, Kepala Unit Head of Unit	Pelatihan Internal	Awareness ISO 37001:2016	Online, 30 Juli 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Awareness ISO 37001:2016	Online, July 30, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Risk Analysis in Corporate Finance	Online, 1-24 September 2021	Pimley & Pimley Inc
	Inhouse Training	Risk Analysis in Corporate Finance	Online, September 1-24, 2021	Pimley & Pimley Inc
	Pelatihan Internal	APLMA & Penyusunan Perjanjian Kredit	Online, 8-9 September 2021	Ginting & Reksodiputro
	Inhouse Training	APLMA & Credit Agreement Preparation	Online, September 8-9, 2021	Ginting & Reksodiputro
	Pelatihan Internal	BIMTEK INDI 4.0	Online, 18 – 21 Oktober 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Inhouse Training	BIMTEK INDI 4.0	Online, October 18–21, 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Pelatihan Internal	Agile Leadership	Online, 9-10 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Agile Leadership	Online, November 9-10, 2021	IPDC Training
	Pelatihan Internal	Leadership Challenges	Online, 24-25 November 2021	IPDC Training
	Inhouse Training	Leadership Challenges	Online, November 24-25, 2021	IPDC Training
Martina Trisiskawati, Staf Staff	Pelatihan Internal	Internal Audit ISO 37001:2016 Berdasarkan Standar ISO 19011:2018	Online, 24-25 Juni 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Inhouse Training	Internal Audit of ISO 37001:2016 Based on ISO 19011:2018 Standard	Online, June 24-25, 2021	PT Aurora Bisnis Internasional
	Pelatihan Internal	Risk Analysis in Corporate Finance	Online, 1-24 September 2021	Pimley & Pimley Inc
	Inhouse Training	Risk Analysis in Corporate Finance	Online, September 1-24, 2021	Pimley & Pimley Inc
	Pelatihan Internal	APLMA & Penyusunan Perjanjian Kredit	Online, 8-9 September 2021	Ginting & Reksodiputro
	Inhouse Training	APLMA & Credit Agreement Preparation	Online, September 8-9, 2021	Ginting & Reksodiputro
	Pelatihan Internal	BIMTEK INDI 4.0	Online, 18 Oktober 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Inhouse Training	BIMTEK INDI 4.0	Online, October 18, 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

Komposisi Pemegang Saham

SHAREHOLDERS COMPOSITION

KEPEMILIKAN SAHAM PPA DAN INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI

PPA'S SHARE OWNERSHIP AND INFORMATION ON MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Par Value per Share = Rp1,000,000/share			
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	5.952.623	5.952.623.000.000	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2021 COMPOSITION OF COMPANY'S SHAREHOLDERS AS OF DECEMBER 31, 2021

Seluruh saham PPA dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
All PPA Shares are owned by The Republic of Indonesia



100%
Seluruh Saham PPA dimiliki
oleh Negara Republik
Indonesia

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM LAINNYA

Sejak berdiri hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kepemilikan saham masyarakat, baik berdasarkan klasifikasi maupun daftar 20 pemegang saham terbesar selain daftar pemegang saham seperti yang telah disampaikan di atas.

Perusahaan juga tidak pernah melakukan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

(Langsung dan Tidak Langsung)

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi PPA tidak ada yang memiliki saham di Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

OTHER SHARE OWNERSHIP INFORMATION

Since its establishment until the end of 2021, the Company has never made a public offering of shares and has never issued its shares to be owned by the public. The Company also did not list shares on any stock exchange, hence there is no information related to public share ownership, either based on the classification or a list of the 20 largest shareholders other than the list of shareholders as stated above.

The Company has also never conducted a Management Stock Ownership Program or a Management Stock Option Program (MSOP). Thus, there is no Board of Commissioners and Board of Directors that owns the Company's shares.

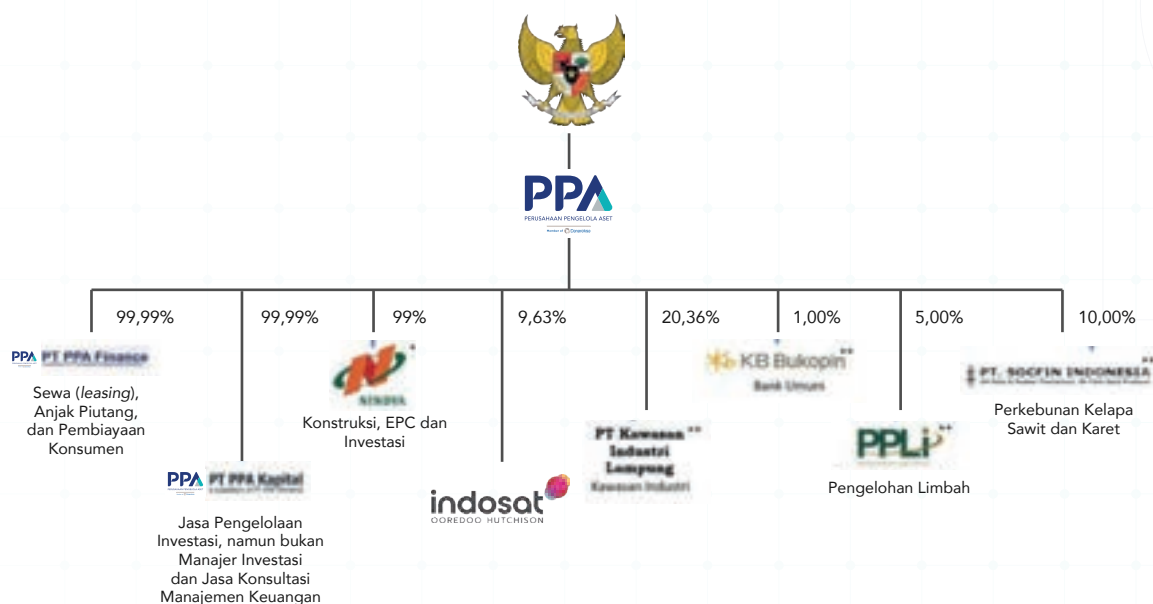
SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

(Direct and Indirect)

The entire Board of Commissioners and Board of Directors of PPA do not own shares in the Company, either directly or indirectly.

Struktur Grup Perusahaan

COMPANY GROUP STRUCTURE



* Kepemilikan sementara berdasarkan PP No.69 Tahun 2012, 1% lainnya dimiliki oleh Pemerintah

** Kepemilikan berdasarkan PP No.51 Tahun 2021

Entitas Induk, Entitas Anak, dan Ventura Bersama

PARENT ENTITY, SUBSIDIARY, AND JOINT VENTURE

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

ENTITAS INDUK

Seluruh saham Perusahaan atau sebanyak 100,00% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; maka Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PARENT ENTITY

The government of the Republic of Indonesia owns all of the Company's shares, or up to 100.00%. Thus, the government of the Republic of Indonesia serves as the Company's primary/controlling shareholder and ultimate owner.

In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 regarding the Delegation of Position, Duties, and Authorities of the Minister of Finance to a Limited Liability Company (Persero), Public Company (PERUM), and Service Agency (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises and the Republic of Indonesia State Gazette, the Power of Attorney of the Company's Shareholders is the Ministry of State Owned Enterprises (SOE).

Pemerintah Republik Indonesia Republic of Indonesia's Government	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.2/RW.3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia
	National Palace Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.2/RW.3, Urban village Gambir, Gambir Sub-District, Central Jakarta, DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id
	The Office of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Central Jakarta 10110 DKI Jakarta, Indonesia Tel. +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of State-Owned Enterprises	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id
	The Office of the Ministry of SOEs Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta 10110 DKI Jakarta, Indonesia Tel. +62 21 29935678 Facsimile. +62 21 29935740 www.bumn.go.id

ENTITAS ANAK

Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Modal Dasar (Rp Juta) Authorized Capital (Rp Million)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp Juta) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp Million)	Total Aset 2021 (Rp Juta) Total Assets 2021 (Rp Million)	Tahun Penyertaan Modal Year of Equity Participation	Persentase Kepemilikan Perusahaan (%) The Company's Ownership (%)
A. Kepemilikan Langsung Direct Ownership							
1. PT PPA Finance							
Sewa (Leasing); Anjak Piutang (Factoring); dan Pembiayaan Konsumen (Consumer Financing) Leasing; Factoring; and Consumer Financing	Jakarta	2009	400.000	150.000	999.485	2009	99,99%
2. PT PPA Kapital							
Jasa pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi); jasa konsultasi manajemen; dan jasa konsultasi keuangan. Investment management services of purchasing and selling securities (not as Investment Manager); management consulting services; and financial consultancy services.	Jakarta	2012	100.000	100.000	808.342	2012	99,99%
3. PT Nindya Karya							
Konstruksi; EPC (Engineering, Procurement, dan Construction); dan Investasi Construction; EPC (Engineering, Procurement, and Construction); and investment	Jakarta	1961	7.738.000	5.950.000	4.899.999	2012	99,00%
B. Kepemilikan Tidak Langsung – Melalui PT PPA Kapital Indirect Ownership - through PT PPA Kapital							
1. PT Duta Mentari Raya							
Pabrikasi Fabrication	Jakarta	2014	66.000	33.055	73.850	2015	99,98%
2. PT Sipra Kemasan Internasional							
Pabrikasi Fabrication	Jakarta	2018	55.000	5.000	107.368	2018	99,98%
3. PT Magnesium Gosari Internasional							
Pabrikasi Fabrication	Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java	2018	400.000	100.000	315.418	2018	51,00%



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Modal Dasar (Rp Juta) Authorized Capital (Rp Million)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp Juta) Issued and Fully Paid-in Capital (Rp Million)	Total Aset 2021 (Rp Juta) Total Assets 2021 (Rp Million)	Tahun Penyertaan Modal Year of Equity Participation	Persentase Kepemilikan Perusahaan (%) The Company's Ownership (%)
4. PT Bondi Syad Mulia							
Pabrikasi Fabrication	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java	1981	200.000	18.042	285.561	2018	75,00%
5. PT Matoa Kidung Samudera							
Kapal Isap Timah Tin Suction Ship	Jakarta	2017	50.000	31.250	58.515	2019	60,00%
6. PT Matoa Kidung Bahtera							
Kapal Isap Timah Tin Suction Ship	Jakarta	2017	50.000	31.250	62.961	2019	60,00%
7. PT Rejeki Inti Logam Jaya							
Pabrikasi Fabrication	Tangerang	1997	2.580	60.000	107.328	2019	73,53%
C. Kepemilikan Tidak Langsung -Melalui PT Nindya Karya Indirect Ownership - through PT Ninda Karya							
1. PT Nindya Beton							
Manufaktur Beton Precast Precast Concrete Manufacturing	Jakarta	2013	400.000	100.000	173.617	2013	Langsung: 49,00% Tidak Langsung: 51,00% Direct: 49.00% Indirect: 51.00%

Sekilas tentang Entitas Anak

OVERVIEW OF SUBSIDIARIES

PT PPA FINANCE ("PT PPAF")

Berdasarkan persetujuan Menteri BUMN melalui surat No. S360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk entitas anak dengan nama PPAF, berkedudukan di Jakarta dengan kepemilikan saham sebesar 99,999% dan sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan PPA. PPAF didirikan pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Akta No. 03 dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00096.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

Anggaran Dasar PT PPAF telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 67 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal disetor Perusahaan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063061.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017

PPAF didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang pembiayaan, dengan kegiatan usaha yang mencakup:

1. Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik berupa sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran atau berkala;
2. Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Anjak Piutang (*factoring*);
3. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

PEMEGANG SAHAM

PT PPA (Persero):
Koperasi Karyawan PT PPA (Persero):
The Company's employee cooperative

PT PPA FINANCE ("PT PPAF")

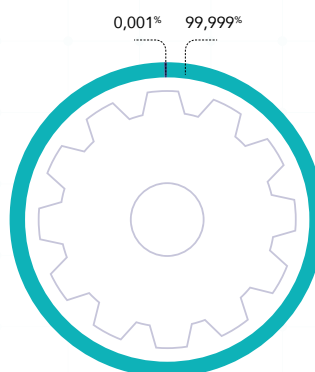
Based on the approval of the Minister of SOE through the letter No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established a subsidiary under the name of PPAF, domiciled in Jakarta, with a share ownership of 99.999%. The remaining 0.001% share was owned by the Company's employee cooperative. PPAF was established on December 21, 2009 based on Deed No. 03, made before Lindawati Wiranata, S.H., Notary in West Jakarta and authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-00096.AH.01.01 year 2010, dated January 5, 2010.

PT PPAF's Articles of Association have been amended, most recently with Deed No. 67 dated April 20, 2017, made before Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, relating to an increase in the Company's paid-up capital. The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia authorized this amendment through Decree No. AHU-0063061. AH.01.11 year 2017, dated May 17, 2017.

PT PPAF was established with the intention and purpose of striving in the field of financing, with business activities that include:

1. Capital goods financing in the form of business leases with option rights (*financial leases*) or leases without option rights (*operating leases*) to be used by tenants (*lessees*) for a set period of time with instalments or periodic payments;
2. Working Capital Financing with Factoring scheme;
3. Consumer Finance.

SHARE OWNERSHIP



ALAMAT

Gedung Plaza BP Jamsostek Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12940 – Indonesia
Telp: +62 21 57951419
Faksimili: +62 21 57951420
Surel: customerservice.ppafinance@ptppa.com

ADDRESS

Plaza BP Jamsostek Building 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Block B
Jakarta 12940 – Indonesia
Phone: +62 21 57951419
Facsimile: +62 21 57951420
E-mail: customerservice.ppafinance@ptppa.com

MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Plt. Komisaris Utama | Acting President Commissioner^{*)}

R. M. Irwan

Komisaris | Commissioner

Heru Djojo Adhiningrat

^{*)} Sampai dengan saat ini, dokumen legal atas perubahan susunan Komisaris masih dalam proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
The legal documents on the changes to the Commissioner's composition are still in the fit and proper test process by the Financial Services Authority..

Direksi

Board of Directors

Direktur Utama | President Director

Safei

Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja | Finance and Support Director

Dicky Henria Nugraha

KINERJA USAHA

BUSINESS PERFORMANCE

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Usaha (Rp juta) Revenue (Rp million)	77.254	136.797	(59.543)	(43,5%)	Pendapatan usaha mengalami penurunan sebagian besar dikarenakan penyaluran pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 Revenue decreased mainly due to lower financing disbursements compared to 2020.
Beban Usaha (Rp juta) Operating Expenses (Rp million)	(135.480)	(136.175)	695	(0,5%)	Kenaikan Beban Usaha tertinggi berasal dari Beban Pencadangan Piutang sebesar Rp23,16 miliar ditahun 2021, sedangkan Beban Bunga mengalami penurunan sebesar Rp26 miliar karena relaksasi dari Kreditur PPAF The largest increase in operating expenses in 2021 came from the increase in allowance for receivables of Rp23.16 billion, while interest expenses decreased by Rp26 billion as a result of PPAF creditors' relaxation.
Laba Bersih (Rp juta) Net Profit (Rp million)	11.579	11.202	376	3,4%	Laba bersih mengalami kenaikan karena adanya efisiensi biaya Net profit increased due to cost efficiency

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset (Rp juta) Assets (Rp million)	999.485	1.389.152	(389.668)	(28,1%)	Penurunan aset terjadi karena adanya pelunasan dari debitur dan rendahnya penyaluran pembiayaan dibandingkan tahun 2020 Assets decreased due to debtor repayments and a low level of financing disbursement compared to 2020.
Liabilitas (Rp juta) Liabilities (Rp million)	569.277	1.220.696	(651.419)	(53,4%)	Penurunan liabilitas karena adanya konversi pinjaman pemegang saham sebesar Rp250 miliar menjadi instrumen keuangan bersifat ekuitas Reduced liabilities as a result of the conversion of Rp250 billion in shareholder loans into equity financial instruments.
Ekuitas (Rp juta) Equity (Rp million)	430.207	168.456	261.751	155,4%	Penurunan liabilitas karena adanya konversi pinjaman pemegang saham sebesar Rp250 miliar menjadi instrumen keuangan bersifat ekuitas Reduced liabilities as a result of the conversion of Rp250 billion in shareholder loans into equity financial instruments.

PT PPA KAPITAL ("PT PPAK")

Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, Perusahaan membentuk entitas anak dengan nama PT PPAK, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%. Sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan PPA. PT PPAK didirikan pada tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Akta No. 17 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-02691.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.

PT PPAK didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang aktivitas penunjang jasa keuangan, aktivitas konsultasi bisnis dan *broker* bisnis, aktivitas konsultan manajemen lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT PPAK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas penunjang jasa keuangan
2. Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis
3. Aktivitas konsultan manajemen
4. Aktivitas perdagangan besar berbagai macam barang

PT PPA KAPITAL ("PT PPAK")

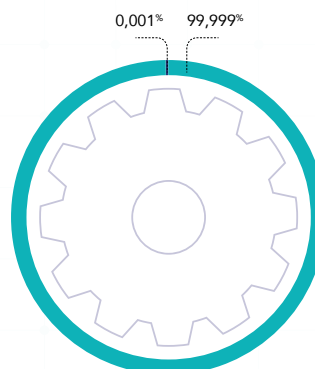
Based on the approval of the Minister of SOE through the letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, the Company established a subsidiary under the name of PT PPAK, domiciled in Jakarta, with a share ownership of 99.999%. The remaining 0.001% share was owned by the Company's employee cooperative. PT PPAK was established on December 17, 2011 based on Deed No. 17, made before Surjadi, S.H., Notary in Central Jakarta and authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-02691.AH.01.01 year 2012, dated January 17, 2012.

PT PPAK was established with the intention and purpose of striving in the areas of financial services support activities, business consulting and brokerage, other management consultant, wholesale trading of various goods. To achieve these goals and objectives, PT PPAK can carry out the following business activities:

1. Financial services support activities
2. Business consulting and brokerage activities
3. Management consultant activities
4. Wholesale trading of various kinds of goods activities

PEMEGANG SAHAM

SHARE OWNERSHIP



PT PPA (Persero):
Koperasi Karyawan PT PPA (Persero):
The Company's employee cooperative

ALAMAT

Jl. Radio IV No.5
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp: +62 21 5798 2288
Faksimili: +62 21 5798 2289
Surel: oss.ppak@ptppa.com

ADDRESS

Jl. Radio IV No.5
Kebayoran Baru, South Jakarta 12130
Phone: +62 21 5798 2288
Facsimile: +62 21 5798 2289
E-mail: oss.ppak@ptppa.com

MANAJEMEN KUNCI

KEY MANAGEMENT

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris Utama | President Commissioner

Yadi Jaya Ruchandi

Direksi

Board of Directors

Direktur Utama | President Director

Stanley Iriawan

Direktur | Director

Theo Satria

KINERJA USAHA

BUSINESS PERFORMANCE

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Usaha (Rp juta) Revenue (Rp million)	24.273	93.625	(69.352)	(74%)	Pendapatan usaha menurun sebesar 74% sebagian besar dikarenakan tidak terdapat kenaikan nilai wajar saham entitas investasi dibandingkan dengan tahun 2020. Revenue decreased by 74% compared to 2020, mainly due to the fact that there was no increase in the fair value of investment entity shares.

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)	
Beban Usaha (Rp juta) Operating Expenses (Rp million)	(107.871)	(67.325)	(40.546)	60%	Beban usaha meningkat sebesar 60% sebagian besar dikarenakan terdapat beban penurunan nilai wajar saham atas entitas investasi di tahun 2021. Operating expenses increased by 60% in 2021, mainly due to a decline in the fair value of shares in the entity's investment.
Laba Bersih (Rp juta) Net Profit (Rp million)	(107.342)	(42.459)	(64.883)	(153%)	Penurunan laba bersih sebesar 153% sebagian besar dikarenakan pada tahun 2021 terdapat penurunan nilai wajar saham entitas investasi. The decrease in net profit by 153% in 2021 was mainly due to a decrease in the fair value of shares in the entity's investment.
Aset (Rp juta) Assets (Rp million)	808.342	829.585	(21.243)	(2,6%)	Aset menurun sebesar 2,6% sebagian besar dikarenakan adanya penurunan investasi pada Efek Ekuitas akibat penurunan nilai wajar entitas investasi, meskipun terdapat kenaikan pada akun Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Properti investasi tetapi tidak signifikan The assets decreased by 2.6%, mainly due to a decrease in equity securities investments due to a decrease in the entity's investment fair value, although there was a slight increase in accounts receivable, other receivables, and property investments.
Liabilitas (Rp juta) Liabilities (Rp million)	638.930	913.906	(274.975)	(30,1%)	Liabilitas menurun sebesar 30% sebagian besar dikarenakan adanya konversi pinjaman pihak berelasi menjadi perpetual loan Liabilities decreased by 30%, mainly due to related party loan conversions to perpetual loans.
Ekuitas (Rp juta) Equity (Rp million)	169.411	(84.321)	253.732	300,9%	Ekuitas meningkat 300,9% sebagian besar dikarenakan adanya konversi sebagian pinjaman kepada PPA menjadi perpetual loan yang diakui sebagai ekuitas. Equity increased by 300.9%, mainly due to a conversion of a portion of the loan to PPA into a perpetual loan that was recognized as equity.

PT NINDYA KARYA ("PT NK")

PT NK melakukan usaha di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang terdiri dari konstruksi sipil, mekanikal elektrik termasuk jaringannya, radio, telekomunikasi dan instrumentasi perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan; perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; layanan jasa konsultan manajemen dan rekayasa industri; building management; pabrikan bahan komponen bangunan, komponen dan peralatan konstruksi, barang logam, kayu, karet dan plastik; agro industri; keagenan bahan bangunan dan konstruksi; keagenan penjualan ruangan perkantoran dan hunian (*condominium*); perdagangan umum; penyewaan peralatan komunikasi; pengelolaan kawasan; *system development*; jasa bidang teknologi informasi; peningkatan bidang jasa konstruksi; pengembang.

Kepemilikan saham PT PPA pada PT NK sebesar 99,00%. Sisanya sebesar 1,00% saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

PEMEGANG SAHAM

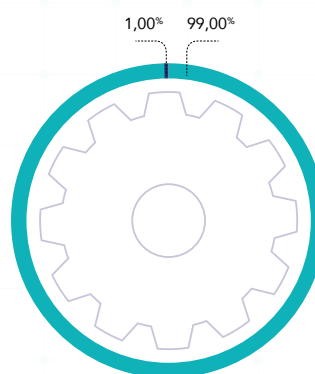
PT PPA (Persero)
Negara Republik Indonesia
Government of the Republic of
Indonesia

PT PPA KAPITAL ("PT PPAK")

PT NK conducts business in the field of implementation of construction services consisting of civil construction, electrical mechanics including network, radio, telecommunications and instrumentation of building repair/maintenance/renovation; planning and supervision of construction work; management consultant services and industrial engineering; building management; fabrication of building component materials, construction components and equipment, metal goods, wood, rubber, and plastics; agro industry; agency of building materials and construction; sales agency for office and residential space (*condominium*); general trade; rental of communication equipment; regional management; system development; information technology services; improvement construction services; developer.

PT PPA owns 99.00% of PT NK. The Republic of Indonesia owns the remaining 1.00% of the shares.

SHARE OWNERSHIP



ALAMAT

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22 Jakarta 13630, Indonesia
Telp: +62 21 8093276
Faksimili: +62 21 8093276
Surel: nindyakarya@nindyakarya.co.id
Situs Web: www.nindyakarya.co.id

ADDRESS

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 22 Jakarta 13630, Indonesia
Tel: +62 21 8093276
Facsimile: +62 21 8093276
E-mail: nindyakarya@nindyakarya.co.id
Website: www.nindyakarya.co.id

MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Sugiyartanto
Komisaris Commissioner	Rika Kiswardani
Komisaris Commissioner	Andar Perdana Widiastono

KEY MANAGEMENT

Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Haedar A. Karim
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Finance, HC, and Risk Management Director	Sri Haryanto
Direktur Produksi, dan Health, Safety dan Environment Production and HSE Director	Firmansyah
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Marketing and Development Director	Moeharmein Zein Chaniago

KINERJA USAHA

BUSINESS PERFORMANCE

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)	
Operasional Operational					
Tender yang Diikuti Followed tenders	25.668.429	28.211.167	(2.542.738)	-9,01%	
Tender yang Dimenangkan Won tenders	4.896.307	5.514.483	(618.176)	-11,21%	
Nilai Kontrak Tersedia Available Contract Value	13.010.792	12.745.005	265.787	2,09%	
Keuangan Finance					
Pendapatan Usaha (Rp juta) Revenue (Rp million)	4.415.364	3.616.483	798.881	22,09%	Pendapatan usaha meningkat sebesar 22% sebagian berasal dari pendapatan bersih dari pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat yang meningkat sebesar 47,5% dibandingkan tahun 2020. Revenue increased by 22% compared to 2020, partly from a 47.5% increase in net income from the work of the Ministry of Public Works and Public Housing.
Beban Usaha (Rp juta) Operating Expenses (Rp-million)	(4.053.477)	(3.299.319)	(754.158)	22,86%	Beban usaha meningkat sebesar 23% sebagian besar berasal dari beban bahan baku yang meningkat 55% dibandingkan tahun 2020. Operating expenses increased by 23%, mainly due to a 55% increase in raw material costs compared to 2020.
Laba Bersih (Rp juta) Net Profit (Rp million)	65.793	42.822	22.972	53,65%	Peningkatan laba bersih dikarenakan pendapatan usaha yang lebih tinggi dibandingkan 2020. Net profit increased due to higher revenue compared to 2020.

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Selisih Difference	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset (Rp juta) Assets (Rp million)	4.900.000	5.486.818	(586.819)	-10,70%	Aset menurun sebesar 10,70% sebagian besar dikarenakan adanya penurunan tagihan bruto pemberi kerja pihak ketiga sebesar 50,9% dibandingkan tahun 2020 Assets decreased by 10.70%, mainly due to a 50.9% decrease in gross receivables from third-party employers compared to 2020.
Liabilitas (Rp juta) Liabilities (Rp million)	3.301.697	3.968.743	(667.046)	-16,81%	Liabilitas menurun sebesar 16,81% sebagian besar dikarenakan adanya pelunasan pinjaman NK Liabilities decreased by 16.81%, mostly due to the repayment of NK loans
Ekuitas (Rp juta) Equity (Rp million)	1.598.302	1.518.075	80.227	5,28%	Ekuitas meningkat 5,28% sebagian besar berasal dari peningkatan jumlah ekuitas yang diatribukan kepada pemilik entitas induk Equity increased by 5.28%, mainly due to an increase in the amount of equity attributable to parent entity owners.



Kronologi Pencatatan Saham

CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

Sejak berdiri hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

Since its establishment until the end of 2021, the Company has never made a public offering of shares and has never issued its shares to be owned by the public. The Company also did not list shares on any stock exchange, hence there is no information about when the shares were issued and when they were listed.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING AND ISSUANCE

Sejak berdiri hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

Since its establishment until the end of 2020, the Company has never made a public offering of shares and has never issued its shares to be owned by the public. The Company also did not list shares on any stock exchange, hence there is no information about when the shares were issued and when they were listed.

Daftar Obligasi yang Diterbitkan Perusahaan (Bursa Perdagangan: Bursa Efek Indonesia) List of Bonds Issued by the Company (Trading Exchange: Indonesia Stock Exchange)

Tahun Penerbitan Issuance Year	Kode Obligasi Bond Code	Nama Obligasi Bond Name	Nilai Emisi (Rp. Juta) Emission Value (Rp-million)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jangka Waktu (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating		Status Status
								2021	2020	
2020	PPAP	Obligasi I tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2020 Bond I								
		Seri A	100.000	9,95%	1 September 2020	3	31 Agustus 2023	idAA	idA	Aktif
					September 1, 2020		August 31, 2023			Active
		Seri B	345.000	10,55%	1 September 2020	5	31 Agustus 2025	idAA	idA	Aktif
					September 1, 2020		August 31, 2025			Active
		Seri C	197.100	11,00%	1 September 2020	7	31 Agustus 2027	idAA	idA	Aktif
					September 1, 2020		August 31, 2027			Active

Surat Utang Lainnya Other Debt Securities

Surat Utang Lainnya Other Debt Securities	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jangka Waktu (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate per Year	Peringkat Rating		Status
						2021	2020	
MTN I PPA Tahun 2019 Seri A	300.000	8 November 2019	2 tahun	7 November 2021	10,05%	idA	idA	Telah dilunasi pada 8 November 2021
PPA 2019 MTN I Series A		November 8, 2019	2 Years	November 7, 2021	10.05%			Paid-off November 8, 2021
MTN I PPA Tahun 2019 Seri B	450.000	8 November 2019	3 tahun	7 November 2022	10,30%	idA	idA	Aktif
PPA 2019 MTN I Series B		November 8, 2019	3 years	November 7, 2022				Active

Daftar Akuntan Publik 5 Tahun Terakhir List of Public Accountants of the Last 5 Years

Tahun Audit Audit Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Opini Opinion	Biaya Jasa (Rp) Service Fee (Rp)
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181	Benny Andria No. Izin: AP.0181	Wajar Tanpa Pengecualian	410.000.000
	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Benny Andria License Number: AP.0181	Unqualified	
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181	Benny Andria No. Izin: AP.0181	Wajar Tanpa Pengecualian	627.000.000
	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Benny Andria License Number: AP.0181	Unqualified	
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181	Benny Andria No. Izin: AP.0181	Wajar Tanpa Pengecualian	594.000.000
	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Benny Andria License Number: AP.0181	Unqualified	
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0499	Saptoto Agustomo No. Izin: AP.0499	Wajar Tanpa Pengecualian	500.000.000
	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0499	Saptoto Agustomo License Number: AP.0499	Unqualified	
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0499	Saptoto Agustomo No. Izin: AP.0499	Wajar Tanpa Pengecualian	528.000.000
	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0499	Saptoto Agustomo License Number: AP.0499	Unqualified	

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

INSTITUTIONS AND PROFESSIONS THAT SUPPORT THE CAPITAL MARKET

Kustodian Custodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
www.cimbniaga.co.id
Telp. +6221-2505151
Faks. +6221-2505206
Bentuk Jasa: Jasa Kustodian
Periode Penugasan: 2019
Biaya: 0,035% p.a

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
www.cimbniaga.co.id
Tel. +6221-2505151
Facsimile. +6221-2505206
Type of Service: Custodian Service
Assignment Period: 2019
Fee: 0.035% p.a

Wali Amanat Trustee

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Telp. 14017 / 1500017
Gedung BRI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
www.bri.co.id
Bentuk Jasa: Perbankan
Jasa Lainnya: wali amanat Obligasi
Periode Penugasan: 2021
Biaya: Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Tel. 14017 / 1500017
BRI Building Jl. General Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
www.bri.co.id
Type of Service: Banking
Other Services: Bond trustee
Assignment Period: 2021
Fee: Rp700,000,000 (seven hundred million rupiah)

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(RSM-AAJ)
Gedung Plaza ASIA, Lantai 10-11,
Jalan Jenderal Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Bentuk Jasa: Audit umum atas Laporan Keuangan
Konsolidasian tahun 2021
Periode Penugasan: 2021
Biaya: Rp410.000.000,-
(empat ratus sepuluh juta Rupiah)

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(RSM-AAJ)
Plaza ASIA Building, Floors 10-11,
Jalan Jenderal Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Type of Service: General audit of Consolidated Financial
Statements for 2021
Assignment Period: 2021
Fee: Rp410,000,000,-
(four hundred and ten million Rupiah)

Pemeringkat Efek Securities Rating

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) 014
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telp. +6221- 50968469
www.pefindo.com
Bentuk Jasa : Pemeringkat Efek
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta
rupiah)

Indonesian Securities Rating Agency (PEFINDO) 014
Plaza Mandiri, 22nd Fl.
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. +6221- 50968469
www.pefindo.com
Type of Service: Securities Rating Assignment
Period: 2020
Fee: Rp135,000,000,- (one hundred and thirty
five million rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Managing Underwriter

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Telp. +6221-29249088
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
www.trimegah.com
Bentuk Jasa: Penjamin Emisi (*underwriter*)
Periode Penugasan: 2020
Biaya: Imbalan Jasa sebagai Penjamin Emisi ("Underwriter") sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) sudah termasuk biaya jasa profesi penunjang (Konsultan Hukum, Notaris dan Wali Amanat), out of pocket expenses ("OPE") dan PPN 10% serta akan dipotong PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tel. +6221-29249088
Artha Graha Building, 18th & 19th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
www.trimegah.com
Type of Service: Underwriter
Assignment Period: 2020
Fee: The fee for services as an underwriter ("Underwriter") is 0.35% (zero comma three-five percent), including the cost of supporting professional services (Legal Consultant, Notary, and Trustee), out of pocket expenses ("OPE"), and 10% VAT, and is subject to withholding tax in accordance with the prevailing tax regulations.

Konsultan Hukum Legal Consultant

Tjajo & Partners
Telp. 0818-761890
Satrio Tower, Lantai 15,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Jakarta 12950
Bentuk Jasa: Konsultan Hukum
Periode Penugasan: 2021
Biaya:
a) Biaya *Retainer* sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) per bulan ("Biaya Retainer"); dan
b) Biaya atas pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ("Biaya Pekerjaan").

Tjajo & Partners
Tel. 0818-761890
Satrio Tower, 15th Floor,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Jakarta 12950
Type of Service: Legal Consultant Assignment
Period: 2021
Fee:
a) Retainer Fee of Rp55,000,000,- (fifty-five million Rupiah) per month ("Retainer Fee"); and
b) The cost for the implementation of the scope of work of Rp750,000,000,- (seven hundred and fifty million Rupiah) ("Cost of Work").

Penilai Appraiser

KJPP Jimmy Prasetyo dan Rekan
Telp. 0811-9911180
Jl. Rawa Kepa Utama No. 23 Jakarta Barat
Bentuk Jasa: Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP
Periode Penugasan: 2021
Biaya: Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah).

KJPP Jimmy Prasetyo and Partners
Tel. 0811-9911180
Jl. Rawa Kepa Utama No. 23 West Jakarta
Type of Service: Public Appraisal Service Office/KJPP
Assignment Period: 2021
Fee: Rp85,000,000,- (eighty five million Rupiah).

Notaris Notary

Notaris Desman, SH, Mhum, MM
Jl. Muara Karang Raya No.10
Jakarta Utara 14450
Bentuk Jasa: Notaris
Periode Penugasan: 2021
Biaya: Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Notary Desman, SH, Mhum, MM
Jl. Muara Karang Raya No.10
North Jakarta 14450
Type of Service: Notary
Assignment Period: 2021
Fee: Rp7,500,000,- (seven million five hundred thousand rupiah)

Pemeringkat Obligasi Bond Rating

PT Fitch Rating Indonesia
DBS Bank Tower, Lanta 24, Suite 2403
Jl.Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Bentuk Jasa: Pemeringkat Obligasi
Periode Penugasan: 2020
Biaya:
1. Nilai Imbalan Jasa untuk biaya pemeringkatan obligasi yang akan diterbitkan adalah sebesar 5,00 Basis dari nilai realisasi penerbitan.

PT Fitch Rating Indonesia
DBS Bank Tower, 24th floor, Suite 2403
Jl.Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Type of Service: Bond Rating Assignment Period: 2020

Fees:
1. The rating fee for bonds to be issued is 5.00 basis points of the value of the realized issuance.

Nilai Imbalan Jasa tersebut diatas belum termasuk PPN 10% dan akan dipotong PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

The service fee stated above doesn not include 10% VAT and is subject to withholding tax in accordance with applicable tax regulations.



Penghargaan dan Sertifikasi

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Penghargaan Awards

No.	Nama Penghargaan Award Description	Event	Pemberi Penghargaan Awarded By
1	Peringkat ke-1 Kategori Pilar Ekonomi First place in the Economic Pillar Category	TJSL & CSR AWARDS 2021	BUMN Track
2	BUMN Klasifikasi "Cukup Informatif" SOEs Classification "Quite Informative"	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2021 2021 Public Information Disclosure Award	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia The Central Information Commission of the Republic of Indonesia
3	TJSL 2021 Terbaik dengan Program Pelatihan Kewirausahaan Komunitas Best TJSL 2021 with Training Program Community Entrepreneurship	Indonesia TJSL AWARDS 2021	Warta Ekonomi
4	The IFN Restructuring Deal of The Year 2021	IFN Deals of The Year 2021	Islamic Finance News
5	The IFN Indonesia Deal of The Year 2021	IFN Deals of The Year 2021	Islamic Finance News

Sertifikasi Certifications

Nama Sertifikasi Certification Name	Pemberi Sertifikasi Certified By	Tanggal Penerimaan Certification Receipt Date	Masa Berlaku Validity Period
Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	TUV NORD Indonesia	10 Agustus 2020	9 Agustus 2023
ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification	TUV NORD Indonesia	August 10, 2020	August 9, 2023

Informasi pada Situs Web Perusahaan

INFORMATION ON COMPANY'S WEBSITE

INFORMASI INFORMATION	LINK LINK
Informasi Pemegang Saham hingga Pemilik Akhir Individu	Ditampilkan dalam menu "Hubungan Investor" dan dilanjutkan pada sub menu "Laporan Tahunan"
Shareholder Information up to Individual End Owners	Presented on the "Investor Relations" menu and continued in the sub-menu "Annual Report."
Kode Etik	Ditampilkan dalam menu "Tentang PPA" dilanjutkan pada sub menu "Tata Kelola Perusahaan"
Code of Ethics	Presented on "About PPA" menu and continued in the sub-menu "Corporate Governance"
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	Ditampilkan dalam menu "Hubungan Investor" dan dilanjutkan pada sub menu "Laporan Tahunan"
The General Meetings of Shareholders (GMS) Information Section contains the minimum covering agenda for the GMS, a summary of the GMS minutes, and information about significant dates such as the GMS announcement date, the GMS invitation date, the GMS date, and the date of the GMS minutes announcement.	Presented on "Investor Relations" menu and continued in the sub-menu "Annual Report"
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Ditampilkan dalam menu "Hubungan Investor" dan dilanjutkan pada sub menu "Laporan Keuangan"
Separate annual financial statements (for the last five years)	Presented on "Investor Relations" menu and continued in the sub-menu "Financial Report"
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Ditampilkan dalam menu "Tentang PPA" dan dilanjutkan pada sub menu "Manajemen"
The Profile of Board of Commissioners and Board of Directors	Presented on "About PPA" menu and continued in the sub-menu "Management"
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Ditampilkan dalam menu "Tentang PPA" dilanjutkan pada sub menu "Tata Kelola Perusahaan"
Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	Presented on "About PPA" menu and continued in the sub-menu "Corporate Governance"

- 128 Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industry Review
- 134 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment
- 141 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
- 144 Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya
Financial Review and Other Material Information

Pembahasan dan Analisa Manajemen

MANAGEMENT
DISCUSSION AND
ANALYSIS

04





Tinjauan Perekonomian dan Industri

ECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Perekonomian global pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan setelah mengalami tekanan pada awal pandemi COVID-19, terutama pada tahun 2020. Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dalam *World Economic Outlook* edisi Oktober 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 5,9%. Pemulihan ekonomi tersebut, terutama didorong oleh akses vaksin yang kian terbuka dan dukungan kebijakan dari pemerintahan.

Seiring dengan pemulihan tersebut, perekonomian global mulai bergairah. Tingkat permintaan terhadap komoditas ikut terdorong, sementara pasokannya terbatas. Akibatnya, terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi pada tahun 2021.

Indonesia sebagai salah satu pemasok utama komoditas, seperti minyak sawit mentah dan batu bara ke pasar internasional, di satu sisi mendapatkan manfaat dari kondisi tersebut. Kinerja ekspor ikut menopang pertumbuhan ekonomi, seperti terjadi pada kuartal II-2021.

Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan (*year on year/YoY*) mencapai 7,07%, setelah terkontraksi pada kuartal sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sisi pengeluaran, pertumbuhan

The global economy in 2021 showed a recovery following COVID-19 pressure since the beginning of 2020. In the October 2021 edition of the *World Economic Outlook*, the International Monetary Fund (IMF) estimated that global economic growth would reach 5.9%. The economic recovery was mainly driven by an increasingly wider roll-out of vaccination and policy support from the government.

Along with the recovery, the global economy began to thrive. As a result, demand for commodities was also boosted, while supply was limited. As a result, there was a relatively high price increase in 2021.

Indonesia, as one of the main suppliers of commodities such as crude palm oil and coal to the international market, on the one hand, has benefited from this condition. Export performance sustained the economic growth, as occurred in the second quarter of 2021.

During that period, Indonesia's economic growth year on year (*YoY*) hit 7.07% after the contraction in the previous quarter. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), in terms of expenditure, the highest growth

tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang meningkat 31,78%.

Pada kuartal III-2021, kinerja perekonomian nasional sempat mengalami tekanan akibat varian baru COVID-19, yaitu varian Delta. Penyebaran virus yang masif membuat pemerintah merespons dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi kegiatan sosial masyarakat.

Kebijakan tersebut mampu menekan daya sebar pandemi. Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah juga makin luas, sehingga sangat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hingga akhir tahun 2021, secara keseluruhan ekonomi nasional tumbuh 3,69%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor yang mencapai 24,04%, diikuti oleh konsumsi pemerintah yang naik 4,17%. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto tumbuh 3,80% dan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional, tumbuh 2,02%.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Quarterly Economic Growth 2019-2021 (YoY, %)

2021	Pertumbuhan Growth Rate	2020	Pertumbuhan Growth Rate	2019	Pertumbuhan Growth Rate
Q4	5,02	Q4	-2,19	Q4	4,96
Q3	3,51	Q3	-3,49	Q3	5,01
Q2	7,07	Q2	-5,32	Q2	5,05
Q1	-0,74	Q1	2,97	Q1	5,06

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh sektor. Hanya sektor administrasi pemerintahan yang secara kumulatif tahun 2021 masih mengalami kontraksi, yaitu sebesar 0,33%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 10,46%. Kemudian, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,81%.

Sementara industri pengolahan yang memiliki peran dominan dalam PDB tumbuh 3,39%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta Perdagangan besar dan eceran, masing-masing tumbuh 1,84% dan 4,65%.

was posted by exports of goods and services, which increased by 31.78%.

In the third quarter of 2021, domestic economy performance was under pressure due to the new variant of COVID-19, namely the Delta variant. In addition, the massive spread of the virus prompted the government to respond with a policy of Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) to limit social activities.

This policy successfully suppressed the spread of the pandemic. In addition, the government's vaccination program was increasingly extensive, supporting the domestic economic recovery. By 2021, the domestic economy had grown by 3.69%.

In terms of expenditure, the highest growth was posted by export, which reached 24.04%, followed by government consumption, which increased by 4.17%. Meanwhile, gross fixed capital formation grew by 3.80%, and household consumption, the largest contributor to the national gross domestic product (GDP), grew by 2.02%.

In terms of business sectors, growth occurred in almost all sectors. Government administration was the only sector experiencing a contraction in 2021, cumulatively at 0.33%.

The highest growth sector was health services and social activities, which reached 10.46%, followed by the information and communication sector, which grew by 6.81%.

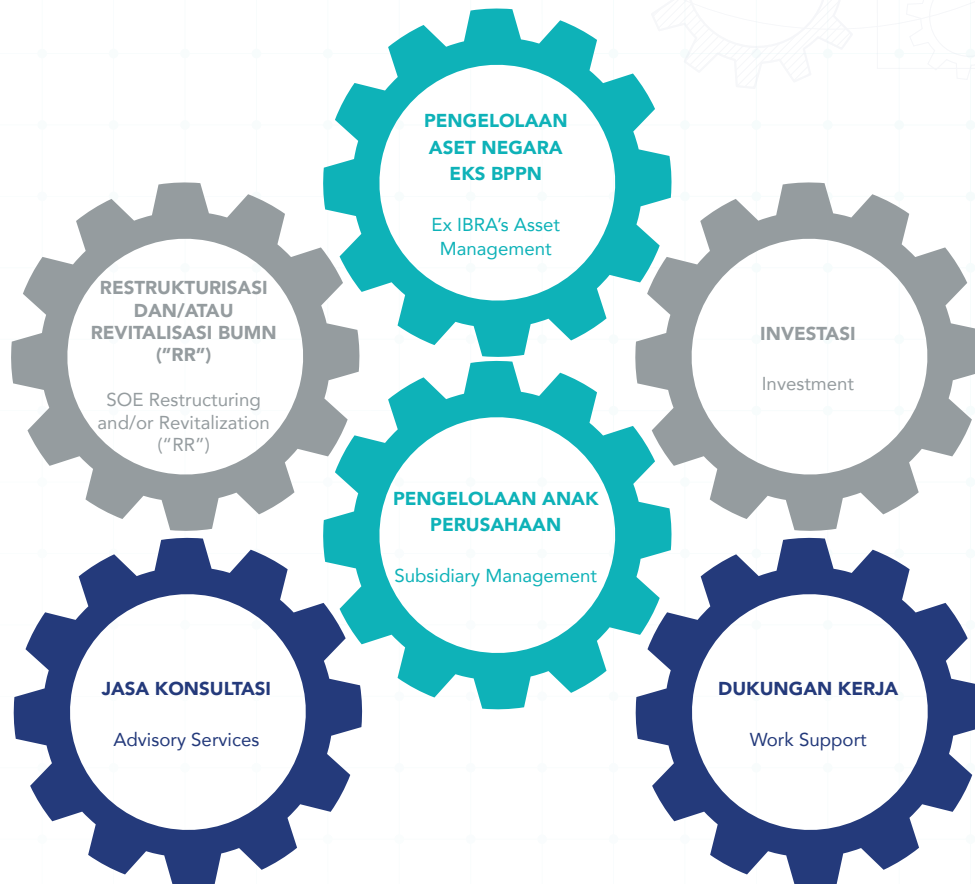
On the other hand, the manufacturing industry, the predominant sector in GDP formation, grew by 3.39%. The agriculture, forestry, and fishery sector, as well as wholesale and retail trade, grew by 1.84% and 4.65%, respectively.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Economic Growth by Sectors
 (YoY, %)

	Q1-2021	Q2-2021	Q3-2021	Q4-2021	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry and Fisheries	2,95	0,38	1,43	2,28	1,84
Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	-2,02	5,22	7,78	5,15	4,00
Industri Pengolahan Manufacturing	-1,38	0,38	3,68	4,92	3,39
Pengadaan Listrik dan Gas Electricity and Gas Supply	1,68	9,09	3,85	7,81	5,55
Pengadaan Air Water Supply	5,49	5,78	4,56	4,14	4,97
Konstruksi Construction	-0,79	4,42	3,84	3,91	2,81
Perdagangan Trading	-1,23	9,44	5,15	5,56	4,65
Transportasi dan Pergudangan Transportation and Warehousing	-13,12	25,10	-0,72	7,93	3,24
Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food & Beverages	-7,26	21,58	-0,14	4,95	3,89
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	8,72	6,87	5,54	6,21	6,81
Jasa Keuangan dan Asuransi Financial Services and Insurance	-2,99	8,35	4,29	-2,59	1,56
Real Estat Real Estate	0,94	2,82	3,42	3,94	2,78
Jasa Perusahaan Corporate Services	-6,10	9,94	-0,59	0,89	0,73
Administrasi Pemerintahan Government Administration	-2,94	9,49	-9,95	0,98	-0,33
Jasa Pendidikan Education Services	-1,61	5,72	-4,42	0,70	0,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	3,64	11,62	14,06	12,16	10,46
Jasa Lainnya Other Services	-5,15	11,97	-0,30	3,35	2,12
Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Source: Official News of Central Statistics Agency (BPS)					

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2021

STRATEGIC POLICIES IN 2021



Berikut penjelasan dari masing-masing kegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Aset Negara Eks BPPN
Kerja sama Investasi atas aset-aset Kementerian Keuangan yang berpotensi untuk dikembangkan baik dilakukan sendiri dan/atau kerja sama dengan mitra strategis.
2. Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN ("RR")
 - a. Melaksanakan implementasi program restrukturisasi dan/atau revitalisasi secara menyeluruh pada masing-masing BUMN berdasarkan persetujuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan kerja sama melalui sinergi BUMN dan/atau mitra strategis untuk mendukung pelaksanaan program restrukturisasi dan/atau revitalisasi;
 - c. Memberikan pendanaan jangka pendek/jangka panjang baik melalui perbankan, mitra strategis atau melalui instrumen keuangan lain;
 - d. Melakukan penagihan, mengupayakan pengurangan *impairment* dan melakukan restrukturisasi pinjaman terkait kegiatan RR.
3. Kegiatan Investasi
 - a. Pengelolaan dan/atau pembelian *distressed asset* terutama melalui perbankan, dari Bank BUMN atau Himpunan Bank milik Negara ("Himbara");

The following is the explanation of each activities:

1. Ex-IBRA Asset Management
The Investment Cooperation on assets of the Ministry of Finance that have the potential to be developed, either alone and/or in collaboration with strategic partners.
2. SOE Restructuring and/or Revitalization Activities ("RR")
 - a. Carrying out a comprehensive restructuring and/or revitalization program at each SOE based on the approval in accordance with the prevailing rules and regulations;
 - b. Cooperating through the synergy of SOE and/or strategic partners to support the restructuring and/or revitalization program;
 - c. Providing the short term/long term funding either through banking, strategic partners, or through other financial instruments;
 - d. Performing collections, seeking impairment reduction, and restructuring loans related to RR activities.
3. Investment
 - a. Management and/or purchase of distressed assets, especially through banking, from state-owned banks, or state-owned bank associations ("Himbara");

- b. Investasi melalui penyertaan modal, kerja sama dan *trading*;
 - c. Melakukan kerja sama dalam pengelolaan NPL Bank Pemerintah/Swasta dan afiliasinya;
 - d. Melakukan kerja sama investasi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta untuk pembiayaan;
 - e. Melakukan kerja sama investasi dalam bentuk *Joint Venture*, KSO, dan lain-lain;
 - f. Investasi langsung dan tidak langsung untuk properti.
4. Kegiatan Jasa Konsultasi
 - a. Melakukan komunikasi intensif dengan *existing Client* untuk memperoleh proyek baru (*repeat order*);
 - b. Melakukan kerja sama dengan konsultan lain baik *team-up* maupun sebagai *coadvisor* dalam pemberian jasa *advisory* kepada pihak ketiga;
 - c. Melakukan *mapping* dan pengembangan atas jasa konsultasi yang dapat diberikan kepada calon klien.
5. Kegiatan Pengelolaan Anak Perusahaan
 - a. Memberikan arahan dan persetujuan dalam penyusunan RKAP anak perusahaan, untuk diselaraskan dengan kepentingan PT PPA selaku induk usaha;
 - b. Melakukan *monitoring* secara berkala atas pencapaian kinerja sesuai target baik jangka pendek maupun jangka panjang anak perusahaan;
 - c. Melakukan *monitoring* secara berkala atas penerapan *good corporate governance* pada aktivitas usaha anak perusahaan;
 - d. Menerapkan sistem deteksi dini, salah satunya berdasarkan laporan kinerja anak perusahaan yang secara berkala disampaikan;
 - e. Menindaklanjuti hasil *monitoring* dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - f. Menempatkan wakil PPA sebagai Direksi/Manajemen dan Komisaris pada anak perusahaan;
 - g. Memberikan pinjaman untuk pengembangan usaha dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pendanaan.
6. Kegiatan Dukungan Kerja
 - a. Menjaga *brand image* PPA, memelihara dan mengembangkan hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
 - b. Menyusun dan memastikan tersedianya Kebijakan dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan penerapan manajemen risiko termasuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah ada dalam rangka memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kegiatan Perusahaan;
 - c. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan, antara lain melalui:
 - Pelaksanaan kajian risiko atas setiap usulan kegiatan/proyek yang akan dilakukan;
- b. Investment through equity participation, cooperation, and trading;
 - c. Cooperating in the management of NPL of Public/Private Banks and their affiliates;
 - d. Conducting investment cooperation with SOEs, Subsidiaries of SOEs, ROEs, and private companies for financing;
 - e. Conducting investment cooperation in the form of Joint Venture, JO, etc;
 - f. Direct and indirect investment in property.
4. Advisory Service
 - a. Conducting the intensive communication with existing clients to obtain new project (repeat order);
 - b. Cooperating with other consultants, both team-up and as coadvisor in providing advisory services to third parties;
 - c. Conducting the mapping and development of advisory services that can be provided to prospective clients.
5. Subsidiary Management
 - a. Providing direction and approval in the preparation of subsidiary's RKAP, to be aligned with the interests of PT PPA as the parent company;
 - b. Conducting regular monitoring on subsidiary's performance achievement according to targets, both in the short and in the long term;
 - c. Conducting regular monitoring on the implementation of good corporate governance in subsidiary's business activities;
 - d. Applying an early detection system, one of which is based on the performance reports of subsidiary which are regularly submitted;
 - e. Following up the monitoring results by taking the necessary actions;
 - f. Assigning PPA's representatives as Director/Management and Commissioner in subsidiaries;
 - g. Providing loans for business development as an effort to increase the independence of funding.
6. Work Support
 - a. Maintaining PPA's brand image, sustaining, and developing relationships with stakeholders;
 - b. Formulating and ensuring the availability of Policies and SOPs as guidelines for the implementation of business activities and the application of risk management, including the evaluating of existed policies in order to ensure their compatibility with the development of Company's activities;
 - c. Integrating risk management processes into the Company's business processes, including through:
 - Conducting a risk assessment for each proposed activity/project to be carried out;

- Melakukan asesmen risiko secara berkala dan menyusun laporan profil risiko.
- d. Melakukan fasilitasi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan budaya risiko;
- e. Memperoleh pendanaan jangka pendek dan/atau jangka panjang baik melalui perbankan dan/atau *strategic investor* dan/atau penerbitan Surat Utang (MTN dan/atau Obligasi dan/atau Surat Utang Lainnya);
- f. Mendukung kegiatan bisnis dan operasional PPA melalui *Mobile Office* dan *Mobile Platform*;
- g. Penambahan portofolio *shared service* kepada anak perusahaan dan perusahaan kelolaan;
- h. Mendukung kegiatan bisnis PPA melalui pengadministrasian data, dokumen dan kepatuhan bagi debitur/klien;
- i. Pengembangan *Decision Support System* (DSS) yang diperlukan bagi manajemen dengan mengolah data antara lain data kinerja keuangan perusahaan, data *profile* masing-masing debitur/klien, data kewajiban debitur/klien, data progres proyek dan data lain yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan;
- j. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada untuk memenuhi kegiatan bisnis perusahaan;
- k. Membangun *Talent Pool* yang diyakini dapat membangun mewujudkan tujuan Perusahaan;
- l. Membangun *Pool of Resources* untuk mendukung kegiatan bisnis Perusahaan;
- m. Meningkatkan *Salary Structure* yang bersaing dalam industri dan menerapkan pengukuran kinerja yang berbasis KPI, serta pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan Karyawan yang berfokus pada kebutuhan bisnis;
- n. Meningkatkan terus nilai indikator KPI yang belum maksimal yakni dengan mendapatkan nilai lebih baik untuk penilaian pengguna terhadap kinerja *internal/external service* dan *procurement*;
- o. Optimalisasi aset gedung ex PT EMI dengan menyewakan kepada pihak ketiga;
- p. Memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh Perusahaan sejalan dengan ketentuan perundangan;
- q. Memberikan dukungan aspek hukum atas kegiatan Perusahaan melalui:
 - Penyusunan dan/atau *review* dokumen perjanjian transaksi dan dokumen hukum lainnya;
 - Pemberian konsultasi mengenai aspek hukum dalam seluruh aktivitas Perusahaan;
 - Pendampingan dan/atau penanganan aspek hukum dalam hal Perusahaan menghadapi permasalahan hukum.
- r. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian/komitmen yang telah dibuat oleh Perusahaan.
- Conducting regular risk assessment and compiling risk profile report.
- d. Facilitating the implementation of risk management on an ongoing basis in order to enhance a risk culture;
- e. Obtaining short-term and/or long-term funding through banking and/or strategic investors and/or issuance of debt securities (MTN and/or bonds and/or other debt securities);
- f. Supporting PPA's business and operational activities through the Mobile Office and Mobile Platform;
- g. Adding the shared service portfolios to subsidiaries and managed companies;
- h. Supporting PPA's business activities through data administration, documents, and compliance for debtors/clients;
- i. Developing the Decision Support System (DSS) which is required by the management in processing data such as company financial performance data, profile data of each debtor/client, debtor/client liability data, project progress data, and other data required in the decision-making process;
- j. Optimizing the existing of human capital to meet the Company's business activities;
- k. Building Talent Pool that is believed to be able to achieve the Company's goals;
- l. Building Pool of Resources to support the Company's business activities;
- m. Improving Salary Structure that is competitive in the industry and implementing KPI-based performance measurement, as well as organizing the employee training and development programs that focus on business needs;
- n. Continuously increasing the value of KPI indicators that have not been maximized, namely by obtaining higher scores for user assessment toward internal/external service and procurement performance;
- o. Optimizing the assets of ex PT EMI building by renting out to third parties;
- p. Ensuring that every activity and decision made by the Company is in line with the statutory provisions;
- q. Providing legal support for the Company's activities through:
 - Preparing and/or reviewing the transaction agreement documents and other legal documents;
 - Providing consultations regarding legal aspects in all activities of the Company;
 - Accompanying and/or handling legal aspects in the event that the Company faces legal problems.
- r. Ensuring Company's compliance with laws and regulations and agreements/commitments made by the Company.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Sejak Perusahaan mencatat perdagangan surat utang obligasi di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020, Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2021 menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi yang menggambarkan:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari Perusahaan);
2. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh manajemen untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
3. Tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan;
4. Segmen operasi Perusahaan terdiri dari Investasi, Pembiayaan, Fabrikasi Beton, dan Konstruksi.

Since the Company has been listed its bond trading on the Indonesia Stock Exchange in 2020, the Company's Financial Statements for the 2021 fiscal year adopted PSAK 5 regarding Operating Segments, which describes:

1. What is involved in business activities to generate income and incur expenses (including the income and the expenses that are related to transactions with other components of the Company);
2. For which the operational results are regularly reviewed by the management to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance;
3. The availability of discrete financial information;
4. The Company's operating segments consist of Investment, Financing, Concrete Fabrication, and Construction.

Jumlah dan Kontribusi Segmen terhadap Pendapatan Usaha Konsolidasian

The Amount and Contribution of Segments to Consolidated Revenues

Segmen Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4 = 3-1)	(5 = 4/3)	
Investasi Investment	2.139.954	32,74%	768.052	17,46%	1.371.902	178,62%	↑
Pembiayaan Financing	77.254	1,18%	136.797	3,11%	(59.543)	-43,53%	↓
Fabrikasi Beton Concrete Fabrication	108.251	1,66%	155.796	3,54%	(47.545)	-30,52%	↓
Konstruksi Construction	4.306.842	65,90%	3.460.687	76,69%	846.155	24,45%	↑
Eliminasi ^{*)} Elimination ^{*)}	(96.913)	-1,48%	(123.488)	-2,81%	26.575	21,52%	↑
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	6.535.658	100,00%	4.397.844	100,00%	2.137.814	48,61%	↑

^{*)} Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.
All intra-group transactions, balances, profits, expenses, and cash flows related to inter-group transactions are eliminated in full to reflect the financial position as a single business entity.

Jumlah dan Kontribusi Segmen terhadap Aset Konsolidasian

Amount and Contribution of Segments to Consolidated Assets

Segmen Segment	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4 = 3-1)	(5 = 4/3)	
Investasi Investment	13.801.346	78,14%	8.382.523	64,71%	5.418.823	64,64%	↑
Pembiayaan Financing	999.485	5,66%	1.389.152	10,72%	(389.667)	-28,05%	↓
Fabrikasi Beton Concrete Fabrication	173.616	0,98%	194.718	1,50%	(21.102)	-10,84%	↓
Konstruksi Construction	4.726.382	26,76%	5.292.101	40,85%	(565.719)	-10,69%	↓
Eliminasi ^{*)} Elimination ^{*)}	(2.038.328)	-11,54%	(2.304.051)	-17,79%	265.723	11,53%	↑
Jumlah Aset Total Assets	17.662.501	100,00%	12.954.443	100,00%	4.708.058	36,34%	↓

^{*)} Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.
All intra-group transactions, balances, profits, expenses, and cash flows related to inter-group transactions are eliminated in full to reflect the financial position as a single business entity.

Dari tabel dan bagan bagian Pendapatan Usaha, segmen Konstruksi memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Usaha konsolidasian Perusahaan, yang mencapai masing-masing sebesar 65,90% dan 76,69% di tahun 2021 dan 2020. Sedangkan pada tabel dan bagan Aset di atas, terlihat bahwa segmen Investasi berperan besar terhadap kinerja nilai Aset Perusahaan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 78,14% dan 64,71% di tahun 2020 dan 2021.

Berikut disampaikan kinerja masing-masing segmen.

INVESTASI

Kegiatan Usaha dan Kinerja Operasi Segmen Investasi

Segmen usaha Investasi didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan, mencakup kegiatan:

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:
 - a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya;
 - c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset;
 - d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.
2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:
 - a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan
 - b. Pembelian saham, *warrant* dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

Di tahun 2021, Perusahaan melakukan investasi berupa pemberian pinjaman investasi jangka pendek kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga lainnya.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Investasi

Profitabilitas segmen Investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

From the table and chart of Revenues, the Construction segment has the largest contribution to the Company's consolidated Revenues, which reached 65.90% and 76.79%, respectively, in 2021 and 2020. Meanwhile, in the table and chart of Assets, it can be seen that the Investment segment plays a significant role in the value of the Company's assets performance, with a contribution of 78.14% and 64.71% in 2021 and 2020, respectively.

The following shows the performance of each segment.

INVESTMENT

Business Activities and Operational Performance of Investment Segment

The investment segment is obtained from the business activities carried out by the Company, which includes the following activities:

1. Direct or indirect investment in the form of:
 - a. Providing loans to finance projects and/or other business activities;
 - b. The placement of funds in a project or other business activities;
 - c. Purchasing, developing, and/or the sale/lease of assets;
 - d. Investing (for establishment, purchasing shares that have been issued or shares in savings) in companies that are temporary, aiming to increase the value for resale.
2. Investments in Securities in the form of:
 - a. The purchase of Debt Securities, including quasi-equity listed on the Stock Exchange or not listed on the Stock Exchange; and
 - b. The purchase of shares, warrants, and other derivative products through the Stock Exchange.

In 2021, the Company made investments in the form of providing short-term investment loans to related parties and other third parties.

Financial Performance and Profitability of Investment Segment

The profitability of Investment segment can be seen in the table below.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Investasi

Financial Performance and Profitability of Investment Segment

	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Usaha Revenues	2.139.954	768.052	1.371.902	178,62%	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(2.073.579)	(648.179)	(1.425.400)	-219,91%	↓
Laba Usaha Operating Income	66.375	119.873	(53.498)	-44,63%	↓
Pendapatan Bunga Interest income	20.518	14.419	6.099	42,30%	↑
Keuntungan Penjualan Aset Tetap Gain on Sales of Fixed Assets	241	-	241	100,00%	↑
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expense and Financial Charge	(4.045)	(2.693)	(1.352)	-50,20%	↓
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Fair Value Increase of Investment Properties	(1.040)	7.445	(8.485)	-113,97%	↓
Bagian Laba/(Rugi) Ventura Bersama Share of Profit/(Loss) of Joint Ventures	(642)	(3.437)	27.95	81,32%	↑
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(2.687)	(45.522)	42.835	94,04%	↑
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income Before Tax	78.720	90.085	(11.365)	-12,62%	↓
Jumlah Pajak Penghasilan Income Taxes	3.880	(41.792)	45.672	109,28	↑
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	82.600	48.293	34.307	71,04%	↑
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	13.801.346	8.382.523	5.418.823	64,64%	↑
Total Liabilitas Total Liability	5.035.788	5.596.417	(560.629)	-10,02%	↓
Total Ekuitas Total Equity	8.765.558	2.786.106	5.979.452	214,62%	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	13.801.346	8.382.523	5.418.823	64,64%	↑

Di tahun 2021, pendapatan usaha dari segmen Investasi tercatat sebesar Rp2.139.954 juta, mengalami kenaikan 178,62% bila dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp768.052 juta. Sedangkan Laba Tahun Berjalan segmen Investasi mencatat kenaikan yang terutama disebabkan adanya Keuntungan Penjualan Aset Tetap.

In 2021, revenues from the investment segment were recorded at Rp2.139.954 million, an increase of 178,62% compared to 2020 at Rp768.052 million. Meanwhile, net income for the investment segment recorded an increase mainly caused by Gain on Sales of Fixed Assets.

Rencana Pengembangan

Perusahaan melakukan kegiatan investasi dalam bentuk kerja sama pembiayaan pada perusahaan/aset dalam bidang industri yang menjadi target, baik dari portofolio *existing* maupun *special situation fund*. Dalam melakukan investasi Perusahaan secara periodik akan melakukan *review* dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, domestik dan faktor lain sesuai dengan target dan membuat batasan industri yang tidak dapat dijadikan target investasi (*negative list*) dalam berinvestasi. Program kerja atau kegiatan dari investasi ditargetkan akan memberikan kontribusi pendapatan kepada PT PPA sebesar Rp419.953 juta.

Development Plan

The Company carries out investment activities in the form of financing cooperation with companies/assets in the target industry, both from existing portfolios and special situation funds. In making investments, the Company periodically conducts a review from time to time, taking into account global, domestic, and other factors in accordance with the target and setting industry boundaries that cannot be used as investment targets (*negative list*) in investing. The investment work programs or activities are targeted to contribute revenue to PT PPA amounting to Rp419,953 million.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Pembiayaan Financial Performance and Profitability of Financing Segment

	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Usaha Revenues	77.254	136.797	(59.543)	-43,53%	↓
Beban Usaha Operating Expenses	(135.480)	(136.227)	(747)	0,55%	↑
Laba Usaha Operating Income	(58.226)	570	(58.796)	-10.315,09%	↓
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	83.841	18.806	65.035	345,82%	↑
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income Before Tax	25.615	19.376	6.239	23,20%	↑
Beban Pajak Penghasilan Income Taxes	(14.036)	(8.173)	(5.863)	-71,74%	↑
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	11.579	11.203	376	3,36%	↑
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	999.485	1.389.152	(389.667)	-28,05%	↓
Total Liabilitas Total Liability	569.278	1.220.697	(651.419)	-53,36%	↓
Total Ekuitas Total Equity	430.207	168.455	261.752	155,38%	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	999.485	1.389.152	(389.667)	-28,05%	↓

Di tahun 2021, pendapatan usaha dari segmen Pembiayaan tercatat sebesar Rp77.254 juta, mengalami penurunan 43,53% bila dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp136.797 juta. Sedangkan Laba Tahun Berjalan segmen Pembiayaan mencatat kenaikan yang terutama disebabkan adanya Penghasilan Lain-lain.

In 2021, revenues from the Financing segment was recorded at Rp77,254 million, a decrease of 43.53% compared to 2020 at Rp136,797 million. Meanwhile, net income for the Financing segment recorded an increase mainly caused by Other Income.

Rencana Pengembangan

Perusahaan melalui PT PPAF akan tetap fokus pada produk pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna yang akan disalurkan dalam bentuk produk sebagai berikut:

1. *Leasing* terutama untuk pembiayaan investasi dan modal kerja,
2. *Factoring* untuk pembiayaan modal kerja,
3. *Consumer Finance* untuk pembiayaan konsumtif antara lain kendaraan roda 4 baik untuk kendaraan operasional atau kendaraan pribadi,
4. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta pembiayaan dengan agunan berupa Sertifikat BPJS-TK.

Program kerja atau kegiatan dari Pembiayaan ditargetkan akan memberikan kontribusi pendapatan kepada PT PPA amounting to Rp323.986 juta.

Development Plan

Through PT PPAF, the Company will continue to focus on investment, work capital, and multipurpose financing products that will be distributed in the form of the following products:

1. Leasing, particularly for investment and working capital financing.
2. Factoring for working capital financing,
3. Consumer Finance for consumptive financing, such as 4-wheeled vehicles, both for operational or private vehicle,
4. Social and Environmental Responsibility programs, as well as financing with BPJS-TK Certificate as collateral.

The Financing work programs or activities is targeted to contribute revenue to PT PPA amounting to Rp323,986 million.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Fabrikasi Beton Financial Performance and Profitability of Concrete Fabrication Segment

	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Usaha Revenues	108.521	155.796	(47.275)	-30,34%	↓
Beban Usaha Operating Expenses	(119.135)	(154.472)	35.607	-23,05%	↑
Laba/(Rugi) Usaha Operating Income/(Loss)	(10.614)	1.324	(11.938)	-901,66%	↓
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expense and Financial Charge	(1.708)	(1.290)	(418)	32,40%	↓
Beban Pajak Final Gain on Sales of Property, Plant, and Equipment	-	(1.502)	(1.502)	-	
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(9.192)	(13.125)	3.933	-29,96%	↑
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Income/(Loss) Before Tax	(21.514)	(14.593)	(6.921)	47,43%	↑
Jumlah Pajak Penghasilan Income Taxes	1.690	(1.883)	3.573	-189,75%	↑
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Income/(Loss) for the Year	(19.824)	(16.476)	(3.348)	20,32%	↑
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	173.616	194.718	(21.102)	-12,08%	↓
Total Liabilitas Total Liability	169.758	172.374	(2.616)	-1,51%	↓
Total Ekuitas Total Equity	3.858	22.344	(18.486)	-82,73%	↓
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	173.616	194.718	(21.102)	-12,08%	↓

Di tahun 2021, pendapatan usaha dari segmen Fabrikasi Beton tercatat sebesar Rp108.521 juta, menurun 30,34% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp155.796 juta. Sedangkan Laba Tahun Berjalan segmen Fabrikasi Beton mencatat kenaikan, terutama disebabkan adanya Penghasilan Lain-lain.

In 2021, revenues from the Financing segment was recorded at Rp108,521 million and had decreased to 30.34% when compared to 2020 at Rp155,796 million. Meanwhile, net income for the Financing segment recorded has increased mainly due caused by Other Income.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Konstruksi

Financial Performance and Profitability of Construction Segment

	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Usaha Revenues	4.306.842	3.460.687	846,155	24,45%	⬆️
Beban Usaha Operating Expenses	(4.148.207)	(3.348.670)	(799,537)	-23.88%	⬆️
Laba Usaha Operating Income	158,635	112.017	46,618	41.61%	⬆️
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expense and Financial Charge	(73,893)	(87.821)	13,928	-15.86%	⬆️
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Increase in Fair Value of Investment Property	19.792	18.724	1,068	5.70%	
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(127.886)	(100.207)	(27,679)	27.62%	⬇️
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit of Joint Venture	153.418	91.342	62,076	67.96%	⬆️
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(42.852)	30.641	(73,493)	-239.85	⬇️
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income Before Tax	87.214	64.695	22,519	34.81%	⬆️
Jumlah Pajak Penghasilan Income Taxes	(1.596)	(5.396)	3,800	-70.42%	⬆️
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	85.618	59.299	26,319	44.38%	⬆️
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	4.726.382	5.292.101	(565,719)	-10.69%	⬇️
Total Liabilitas Total Liability	3.131.938	3.796.370	(664,432)	-17.50%	⬇️
Total Ekuitas Total Equity	1.594.444	1.495.731	98,713	6.60%	⬆️
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.726.382	5.292.101	(565,719)	-10.69%	⬇️

Di tahun 2021, pendapatan usaha dari segmen Konstruksi tercatat sebesar Rp4.306.842 juta, mengalami Kenaikan 24,45% bila dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3.460.687 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya Bagian Laba Ventura Bersama.

In 2021, revenues from the Financing segment was recorded at Rp4.306.842 million and had increased to 24,45% compared to 2020 at Rp3.460.687 million. Net income for the Construction segment recorded an increase mainly caused by the Share of Profit of the Joint Venture.

Aspek Pemasaran

MARKETING ASPECT

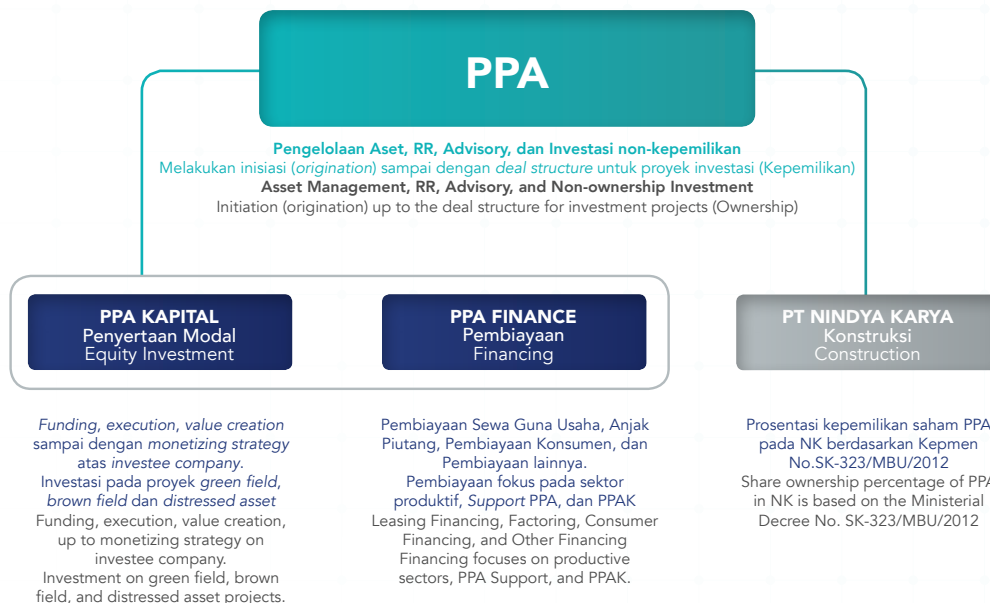


STRATEGI PEMASARAN

MARKETING STRATEGY

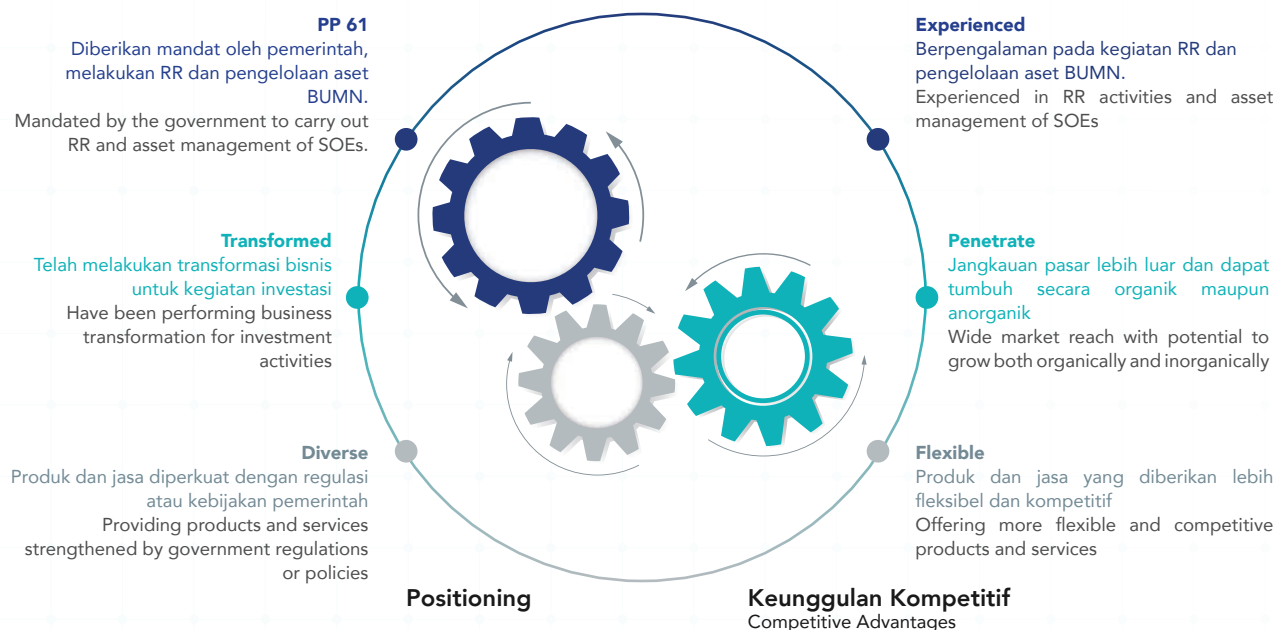
RUANG LINGKUP BISNIS PPA

PPA Scope of Business



Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya, terutama karena PPA adalah satu-satunya BUMN yang mendapatkan penugasan dari Kementerian BUMN untuk melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Kompetensi tersebut akan menjadi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan klien potensial, baik dari pemerintahan, BUMN, BUMD, maupun swasta.

The Company has a competitive advantage over its competitors, mainly because PPA is the only SOE mandated by the Ministry of SOEs to carry out a restructuring and revitalization program for SOEs. These competencies will become an advantage in acquiring potential clients from the government, SOEs, regional-owned enterprises, and private sectors.



Pangsa Pasar

Sejalan dengan kompetensi inti Perusahaan di bidang restrukturisasi, target pasar yang dituju oleh Perusahaan adalah distressed asset yang dimiliki oleh BUMN dan swasta. Perusahaan dapat melakukan pengambilalihan distressed asset, pemberian financing ataupun memberikan jasa advisory dan pengelolaan aset ataupun kombinasinya.

Market share

In line with the Company's core competence in restructuring, the Company's target market is distressed assets owned by SOEs and private sectors. The Company can take over distressed assets, provide financing or provide advisory and asset management services, or a combination thereof.



Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya

FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

STANDARDS FOR THE PRESENTATION OF INFORMATION AND CONFORMITY TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refer to the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2021, and December 31, 2020, which had been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with a fair opinion in all material aspects. The Company's Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("FASB") of the Indonesian Institute of Accountants and the applicable capital market regulations.

KINERJA KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Posisi Keuangan Consolidated Financial Position	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Asset				
Aset Lancar Current Asset	7.820.946	8.020.825	(199.879)	(2,49)
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	9.841.555	4.933.618	4.907.937	99,48
Total Aset Total Asset	17.662.501	12.954.443	4.708.058	36,34
Liabilitas dan Ekuitas Liability and Equity			-	
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liability	5.170.818	6.462.255	(1.291.437)	(19,98)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liability	3.122.872	2.834.084	288.788	10,19
Total Liabilitas Long-term Liability	8.293.690	9.296.339	(1.002.649)	(10,79)
Total Ekuitas Total Equity	9.368.811	3.658.104	5.710.707	156,11
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liability and Equity	17.662.501	12.954.443	13.121.525	36,34

*: Direklasifikasi | Reclassified

FINANCIAL PERFORMANCE

Statements of Consolidated Financial Position

ASET

Posisi aset Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp17,66 triliun, naik 36,34% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp12,95 triliun. Laju pertumbuhan majemuk tahunan atau CAGR aset Perusahaan periode 2017-2021 sebesar 16,83%.

Kinerja aset dipengaruhi oleh kondisi aset tidak lancar yang mengalami kenaikan hingga 99,48%, walaupun aset lancar sedikit mengalami penurunan, yaitu 2,49%.

ASSETS

The Company's asset position as of December 31, 2021, reached Rp17.66 trillion, an increase of 36.34% compared to Rp12.95 trillion on December 31, 2020. The compound annual growth rate or CAGR of the Company's assets for the 2017-2021 period was 16.83%.

Asset performance was influenced by the condition of non-current assets, which increased by 99.48%, compensating for a slight decrease of 2.49% in the current asset.

Total Aset 2021-2020 Total Asset 2021-2020

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Posisi Keuangan Consolidated Financial Position	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Aset				
Asset				
Aset Lancar Current Asset	7.820.946	8.020.825	(199.879)	(2,49)
Aset Tidak Lancar Non-current Asset	9.841.555	4.933.618	4.907.937	99,48
Total Aset Total Asset	17.662.501	12.954.443	4.708.058	36,34

*: Direklasifikasi | Reclassified

ASET LANCAR

CURRENT ASSET

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Aset Lancar Current Assets	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	2.627.328	774.100	1.853.228	239,40
Pinjaman Investasi Jangka Pendek Short-term Investment Loan	575.119	1.531.707	(956.588)	(62,45)
Aset Keuangan Diperdagangkan Trading Financial Asset	280.522	-	280.522	100,00
Piutang Usaha Account Receivables	1.118.654	1.435.385	(316.731)	(22,07)
Piutang Retensi Retention Receivables	163.022	151.012	12.010	7,95
Piutang Ventura Bersama Konstruksi Joint Venture Construction Receivables	251.106	306.082	(54.976)	(17,96)
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Loan Receivables - Bailout Funds	252.304	340.087	(87.783)	(25,18)
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers	1.504.552	2.331.224	(826.672)	(35,46)
Persediaan Inventories	227.777	146.770	81.007	55,19
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	99.725	149.655	(49.930)	(33,36)

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Aset Lancar Current Assets	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	599.663	662.391	(62.728)	(9,47)
Cessie Piutang Jangka Pendek Short-term Receivable Cessie	55.810	125.070	(69.260)	(55,38)
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	65.364	67.342	(1.978)	(2,94)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	7.820.946	8.020.825	(199.879)	(2,49)

*: Direklasifikasi | Reclassified

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp7,82 triliun, turun 2,49% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp8,02 triliun. Penyebabnya, antara lain karena ada penurunan pada 2 (dua) komponen yang cukup besar pada aset lancar, yaitu Pinjaman Investasi Jangka Pendek dan Cessie Piutang Jangka Pendek.

As of December 31, 2021, total current assets stood at Rp7.82 trillion, down 2.49% compared to Rp8.02 trillion on December 31, 2020, which was contributed by the decline in 2 (two) sizable components of current assets, Short-Term Investment Loans, and Short-term Receivable Cessie.

Kas dan Setara Kas

Perusahaan membukukan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2,63 triliun, mengalami kenaikan 239,40% dari tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp774,10 miliar. Peningkatan kas dan setara kas ini, terutama didukung oleh penambahan pada deposito berjangka Perusahaan, baik yang ditempatkan pada pihak berelasi maupun pihak ketiga.

Cash and Cash Equivalents

The Company recorded cash and cash equivalents as of December 31, 2021, at Rp2.63 trillion, an increase of 239.40% from Rp774.10 billion on December 31, 2020. The increase in cash and cash equivalents was mainly supported by the addition of the Company's time deposits, placed at both related parties and third parties.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Pinjaman investasi jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp575,12 miliar, turun 62,45% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp1,5 triliun. Penurunan pada pinjaman investasi jangka pendek, terutama dipengaruhi oleh penurunan pokok pinjaman dari pihak ketiga, dari Rp1,30 triliun pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp749,77 miliar.

Short Term Investment Loans

As of December 31, 2021, short-term investment loans amounted to Rp575.12 billion, a decrease of 62.45% compared to Rp1.5 trillion on December 31, 2020. The decrease in short-term investment loans was mainly due to a decrease in principal loans from third parties, from Rp1.30 trillion as of December 31, 2020, to Rp749.77 billion.

Piutang Usaha

Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat turun 22,07%, dari Rp1,44 triliun tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1,12 triliun pada tahun 2021. Penurunan piutang usaha, terutama akibat berkurangnya piutang usaha pihak berelasi bersih, dari Rp543,09 miliar menjadi Rp224,82 miliar.

Accounts Receivable

As of December 31, 2021, trade receivables were recorded to have decreased by 22.07%, from Rp1.44 trillion on December 31, 2020, to Rp1.12 trillion in 2021. The decrease in trade receivables was mainly due to decreased net trade receivables from related parties, from Rp543.09 billion to Rp224.82 billion.

Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan dan entitas anak kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

Retention Receivable

Retention receivables represent receivables of the Company and its subsidiaries from the customer, which will be repaid upon the completion of the contract or fulfillment of contractual conditions. Retention receivables are recorded when a certain percentage of each term claim is deducted to be held by the customer until a condition after the contract completion is fulfilled.

Pada akhir tahun buku 2021, piutang retensi Perusahaan tercatat Rp163,02 miliar, naik 7,95% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp151,01 miliar. Kenaikan ini terjadi pada piutang retensi, baik terhadap pihak berelasi maupun pada pihak ketiga.

Piutang Ventura Bersama Konstruksi

Piutang ventura bersama konstruksi merupakan piutang kepada ventura bersama atau *joint venture* (JV) untuk pembelian material, biaya bank, *overhead*, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ventura bersama. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilainya sebesar Rp251,11 miliar, mengalami penurunan 17,96% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang Rp306,08 miliar. Akun yang mengalami penurunan, antara lain piutang terhadap Bangun Bejana Baja, Adhi dan Karya Sarana.

Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan

Pinjaman yang diberikan - dana talangan mengalami penurunan 25,18%, dari Rp340,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp252,3 pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai dari sebesar Rp215,47 miliar pada tanggal 31 Desember 2020, menjadi sebesar Rp365,04 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.

Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Per 31 Desember 2021, posisinya mencapai Rp1,50 triliun, turun 35,46% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp2,33 triliun, akibat menurunnya tagihan kepada pihak ketiga, seperti telah lunasnya tagihan terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Bank Indonesia.

Persediaan

Persediaan antara lain bahan konstruksi berupa perlengkapan proyek dan aset real estat milik PT NK serta material beton pracetak milik PT NB. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilainya mencapai Rp227,78 miliar, naik 55,19% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang Rp146,77 miliar pada tanggal 31 Desember 2020. Penambahan tersebut berasal dari kenaikan persediaan jasa konstruksi maupun aset real estat.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka dan biaya dibayar di muka terdiri atas uang muka pihak ketiga yang merupakan uang muka kepada *supplier* dan subkontraktor. Sementara biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi.

At the end of the 2021 financial year, the Company recorded retention receivables of Rp163.02 billion, an increase of 7.95% from Rp151.01 billion on December 31, 2020. The increase occurred in retention receivables, both from related and third parties.

Joint Venture Construction Receivables

Joint venture construction receivables represent receivables from joint ventures (JV) for the purchase of materials, bank fees, overheads, etc., which are incurred for the benefit of joint ventures. As of December 31, 2021, it reached Rp251.11 billion, a decrease of 17.96% compared to Rp306.08 billion on December 31, 2020. Some of the accounts that experienced a decline were receivables from Bangun Bejana Baja, Adhi and Karya Sarana.

Loans Receivables - Bailout Funds

Loans receivables - bailouts decreased by 25.18%, from Rp340.1 billion on December 31, 2020, to Rp252.3 on December 31, 2021. The decrease was mainly due to an increase in the allowance for impairment losses from Rp215.47 billion as of December 31, 2020, to Rp365.04 billion as of December 31, 2021.

Gross Amount Due from Customers

The Gross amount due from customers represents receivables of the Company and its subsidiaries from construction contract work that has been carried out, but the work is still in progress. As of December 31, 2021, the position reached Rp1.50 trillion, down 35.46% compared to the position on December 31, 2020, at Rp2.33 trillion, due to a decrease in receivables to third parties, such as the settlement of all receivables to the Ministry of Youth and Sports, the Dharmasraya Regency Government, and Bank Indonesia.

Inventories

Inventories include construction materials in the form of project equipment and real estate assets owned by PT NK, as well as precast concrete materials owned by PT NB. As of December 31, 2021, the amount reached Rp227.78 billion, an increase of 55.19% compared to Rp146.77 billion on December 31, 2020. The increase came from the increase in construction services and real estate assets inventories.

Advances and Prepaid Expenses

Advances and prepaid expenses consist of third-party advances, which represent advances to suppliers and subcontractors. Meanwhile, prepaid expenses represent expenses for building rental and insurance.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlahnya mencapai Rp99,73 miliar, mengalami penurunan 33,36% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp149,66 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada uang muka pihak ketiga, dari Rp92,98 miliar menjadi Rp69,10 miliar.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka terdiri dari pajak Perusahaan dan pajak entitas anak, yang pada tanggal 31 Desember 2021 jumlahnya Rp599,66 miliar, turun 9,47% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp662,39 miliar. Penurunan ini, antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Perusahaan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 entitas anak.

Cessie Piutang Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah cessie piutang jangka pendek tercatat sebesar Rp55,81 miliar, turun 55,38% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yang Rp125,07 miliar. Penurunan ini terutama karena peningkatan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp66,05 miliar, yaitu dari sebesar Rp156,20 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp223,15 miliar pada tanggal 31 Desember 2021. Di samping itu, terdapat penurunan jumlah cassie piutang KPR eks PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dari Rp8,27 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp35,96 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Lainnya

Jumlah aset lancar lainnya setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp65,36 miliar, turun 2,94% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp67,34 miliar. Penurunan ini, antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya piutang proyek dari Rp64,49 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp41,27 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.

As of December 31, 2021, the amount reached Rp99.73 billion, a decrease of 33.36% compared to Rp149.66 billion on December 31, 2020. The largest decrease occurred in advances from third parties, from Rp92.98 billion to Rp69.10 billion.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes consist of corporate tax and subsidiary tax, which as of December 31, 2021, reached Rp599.66 billion, a decrease of 9.47% compared to Rp662.39 billion on December 31, 2020. The decrease was influenced, among other things, by the reduction in the Company's Article 23 Income Tax and Article 22 Income Tax of subsidiaries.

Short-term Receivables Cessie

As of December 31, 2021, the total short-term receivables cessie was recorded at Rp55.81 billion, a decrease of 55.38% compared to Rp125.07 billion on December 31, 2020. The decrease was mainly due to an increase of Rp66.05 billion in the allowance for impairment losses, from Rp156.20 billion on December 31, 2020, to Rp223.15 billion as of December 31, 2021. In addition, there was a decrease in the amount of cassie of mortgage receivables to former PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, from Rp8.27 billion on December 31, 2020, to Rp35.96 billion on December 31, 2021.

Other Current Assets

After deducting the allowance for impairment of receivables as of December 31, 2021, the total other current assets reached Rp65.36 billion, a decrease of 2.94% compared to Rp67.34 billion on December 31, 2020. The decrease was, among others, influenced by a decrease in project receivables from Rp64.49 billion on December 31, 2020, to Rp41.27 billion on December 31, 2021.

ASET TIDAK LANCAR

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income	5.234.999	38.944	5.196.055	13.342,38
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Loan Receivables - Restructuring and/or Revitalization	402.763	536.683	(133.920)	(24,95)
Pinjaman Investasi Jangka Panjang Long-term Investment Loans	607.338	681.689	(74.351)	(10,90)

NON-CURRENT ASSETS

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Properti Investasi Investment Property	1.005.982	816.998	188.984	23,13
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	67.254	73.457	(6.203)	(8,44)
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	433.269	344.740	88.529	25,68
Piutang Lain-lain Other Receivables	238	238	-	100,00
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-term Investments	546.711	546.776	935	0,17
Investasi pada Efek Ekuitas Investment in Equity Securities	185.198	220.626	(35.428)	(16,06)
Aset Tetap Fixed Assets	452.775	564.701	(111.926)	(19,82)
Cessie Piutang Jangka Panjang Long-term Receivable Cessie	246.430	247.441	(1.011)	(0,40)
Aset Hak Guna Right of Use Assets	46.499	11.714	34.785	296,95
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Concession Project Financial Asset	13.321	-	13.321	100,00
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	598.778	849.611	(250.833)	(29,52)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	9.841.555	4.933.618	4.687.150	95,00

*: Direklasifikasi | Reclassified

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp9,84 triliun, mengalami kenaikan 95% dibandingkan 31 Desember 2020 yang Rp4,93 triliun. Kontribusi kenaikan tersebut, terutama karena peningkatan yang signifikan pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya yaitu sebesar Rp5,20 triliun atau 13.342,38%.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya

Total aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya terdiri atas saham dan investasi dengan jumlah nilai wajar per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp5,23 triliun, naik 13.342,38% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 yang Rp38,94 miliar.

Peningkatan yang cukup signifikan tersebut karena pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT PPA pada PT Bank Bukopin, Tbk. Selain itu, PT PPA juga menerima saham-saham PT Indosat, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, dan PT Kawasan Industri Lampung, selain dari yang telah dimiliki oleh PT PPA yaitu saham-saham PT Waskita Karya dan PT Pratama Persada Airborne.

Total Non-Current Assets, as of December 31, 2021, stood at Rp9.84 trillion, an increase of 95% compared to Rp4.93 trillion on December 31, 2020. The increase was mainly a significant increase of Rp5.20 trillion or 13,342.38% in financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income

Total financial assets measured at fair value through other comprehensive income consist of shares and investments with a total fair value as of December 31, 2021, at Rp5.23 trillion, an increase of 13,342.38% compared to the position on December 31, 2020, at Rp38.94 billion.

The significant increase occurred on February 15, 2021, based on Government Regulation number 51 of 2021 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into PT PPA's Share Capital at PT Bank Bukopin, Tbk. In addition, PT PPA also received shares of PT Indosat, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, and PT Kawasan Industri Lampung, in addition to the shares PT PPA had already owned of PT Waskita Karya and PT Pratama Persada Airborne.

Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pinjaman yang diberikan - restrukturisasi dan/atau revitalisasi terdiri dari pokok pinjaman dan piutang bunga pinjaman dana restrukturisasi dan/atau revitalisasi, yang dikurangi penyisihan penurunan nilai pinjaman dan biaya perolehan yang belum diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlahnya sebesar Rp402,76 miliar, turun 24,95% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang Rp536,68 miliar. Penurunan ini, antara lain karena berkurangnya jumlah pokok pinjaman dana restrukturisasi/revitalisasi kepada PT Penataran Angkatan Laut (Persero) sebesar Rp5,49 miliar, serta adanya peningkatan jumlah penyisihan penurunan nilai pinjaman sebesar Rp134,56 miliar.

Pinjaman Investasi Jangka Panjang

Posisi pinjaman investasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp607,34 miliar, mengalami penurunan 10,90% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp681,69 miliar. Penurunan ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai, sehingga saldo pinjaman akhir menjadi berkurang.

Properti Investasi

Properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1,01 triliun, tumbuh 23,13% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang Rp817,00 miliar. Kenaikan tersebut, antara lain disebabkan adanya peningkatan pada biaya perolehan tanah dan bangunan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp67,25 miliar, mengalami penurunan 8,44% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang Rp73,46 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh turunnya Piutang Sewa Pembiayaan pada PT PPA Finance.

Investasi pada Ventura Bersama

Posisi investasi pada ventura bersama hingga akhir tahun buku 2021 mencapai Rp433,27 miliar, naik 25,68% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp344,74 miliar. Peningkatan itu, antara lain karena ada investasi pada proyek Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan Paket 3 serta proyek pengendalian banjir dan rob Semarang – Demak Paket II.

Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp238 juta.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi jangka panjang lainnya setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai pinjaman dana pada posisi

Loan Receivables - Restructuring and/or Revitalization

Loan receivables - restructuring and/or revitalization consist of principal and interest receivables from restructuring and/or revitalization funds, minus the allowance for impairment of loans and unamortised cost. As of December 31, 2021, the amount was Rp402.76 billion, a decrease of 24.95% compared to Rp536.68 billion on December 31, 2020. The decrease was partly due to a decrease of Rp5.49 billion in the principal amount of the restructuring/revitalization loan to PT Penataran Laut (Persero), as well as an increase of Rp134.56 billion in allowance for impairment of loans.

Long Term Investment Loan

As of December 31, 2021, the position of long-term investment loans reached Rp607.34 billion, a decrease of 10.90% compared to Rp681.69 billion on December 31, 2020. The decrease was partly due to an increase in the allowance for impairment losses, resulting in a decrease in the final loan balance.

Investment Property

As of December 31, 2021, investment property was recorded at Rp1.01 trillion, up 23.13% compared to Rp817.00 billion on December 31, 2020. The increase was, among other factors, due to an increase in the purchases of land and buildings.

Deferred Tax Assets

As of December 31, 2021, deferred tax assets reached Rp67.25 billion, a decrease of 8.44% compared to Rp73.46 billion on December 31, 2020. The decrease was mainly due to a decrease in Financing Lease Receivables to PT PPA Finance.

Investment in Joint Venture

The investment in joint ventures position until the end of the 2021 financial year reached Rp433.27 billion, an increase of 25.68% compared to the position on December 31, 2020, at Rp344.74 billion. The increase was partly due to investments in the Temef Dam project in the South Central Timor Regency Package 3 and the Semarang – Demak flood and tidal control project Package II.

Other Receivables

As of December 31, 2021, the Company's other receivables did not change from December 31, 2020, remaining at Rp238 million.

Other Long-Term Investments

After deducting the allowance for impairment in loan value, other long-term investments were recorded at Rp546.71

31 Desember 2021 sebesar Rp546,71 miliar, mengalami sedikit penurunan atau 0,01% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang Rp546,78 miliar.

Aset Tetap

Aset tetap Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan proyek, peralatan kantor, prasarana umum, dan aset dalam penyelesaian. Hingga akhir tahun 2021, jumlahnya tercatat sebesar Rp452,77 miliar, lebih rendah 19,82% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp564,70 miliar. Penurunan ini, terutama karena adanya reklasifikasi aset tanah milik PT NK menjadi properti investasi dan bertambahnya nilai penyusutan.

Cessie Piutang Jangka Panjang

Jumlah keseluruhan cessie piutang jangka panjang Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp246,43 miliar, turun 0,40% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp247,44 miliar. Penyebabnya adalah akibat adanya peningkatan pada penyisihan kerugian penurunan nilai.

Aset Hak Guna

Jumlah Aset Hak Guna per 31 Desember 2021 sebesar Rp46,50 miliar, mengalami kenaikan 296,95% dibandingkan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp11,71 miliar. Kontribusi kenaikan tersebut, antara lain berasal dari properti Tanah dan Bangunan, Kendaraan Bermotor serta Laptop yang terdapat penambahan selama periode berjalan.

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi

Aset keuangan dari Proyek Konsesi pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13,32 miliar, yang pada tanggal 31 Desember 2020 belum terdapat akun tersebut, karena Perusahaan memulai pelaksanaan konstruksi untuk proyek konsesi ini pada bulan Oktober 2021.

Akun ini merupakan piutang jangka panjang dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum sehubungan dengan pembayaran ketersediaan layanan di masa depan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pengelolaan Unit Produksi di Kesugihan (Bangun, Kelola, Alih Milik) yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya terdiri dari persediaan properti, uang jaminan, dana yang dibatasi penggunaannya, deposito berjangka yang dijamin, aset tak berwujud – *software*, dan lain-lain. Posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp598,78 miliar, menurun 29,52% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat Rp849,61 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Deposito Berjangka yang Dijamin.

billion on December 31, 2021, a slight decrease of 0.01% compared to Rp546.78 billion on December 31, 2020.

Fixed Assets

The Company's fixed assets consist of land, buildings, vehicles, project equipment, office equipment, public infrastructure, and construction in progress. As of 2021, the amount was recorded at Rp452.77 billion, 19.82% lower than the position on December 31, 2020, at Rp564.70 billion. The decrease was mainly due to the reclassification of land assets owned by PT NK into investment properties and an increase in depreciation value.

Long-term Receivables Cessie

The Company's total long-term receivables cessie as of December 31, 2021, reached Rp246.43 billion, a decrease of 0.40% compared to Rp247.44 billion on December 31, 2020. This was primarily contributed by an increase in the allowance for impairment losses.

Right of Use Assets

As of December 31, 2021, Total Right of Use Assets reached Rp46.50 billion, an increase of 296.95% compared to Rp11.71 billion on December 31, 2020. Among other factors contributing to the increase were Land and Building properties, Motor Vehicles, and Laptops, which were added during the current period.

Concession Project Financial Assets

Concession Project Financial assets as of December 31, 2021, were recorded at Rp13.32 billion. However, no corresponding figure was available on December 31, 2020, since the Company had only started construction for this concession project in October.

This account represents long-term receivables to the Regional Public Water Company in connection with payments for future service as stated under the Investment Cooperation Agreement and Production Unit Management in Kesugihan (Build, Manage, and Transfer of Ownership), which have been classified as financial assets as a result of the implementation of ISAK 16.

Other Non-Current Assets

Other non-current assets include property inventories, security deposits, restricted funds, guaranteed time deposits, intangible assets - *software*, and others. As of December 31, 2021, its position reached Rp598.78 billion, a decrease of 29.52% compared to Rp849.61 billion on December 31, 2020. The decrease was mainly due to a decrease in Guaranteed Time Deposits.

Liabilitas

Liabilitas Perusahaan tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan 10,79%, dari Rp9,30 triliun pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp8,29 triliun. Penurunan ini, terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas jangka pendek yang mencapai 19,98%.

Total Liabilitas 2020-2021 Total Liability 2020-2021

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Liabilitas Liability	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	5.170.818	6.462.255	(1.291.437)	(19,98)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	3.122.872	2.834.084	288.788	10,19
Total Liabilitas Total Liability	8.293.690	9.296.339	(1.002.649)	(10,79)

*: Direklasifikasi | Reclassified

Kinerja Liabilitas dipengaruhi oleh liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan 10,79%. Sedangkan total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan 10,19 dan liabilitas jangka pendek turun 19,98%, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Liability

The Company's liabilities as of December 31, 2021 decreased 10.79%, from Rp9.30 trillion in December 31, 2020 to Rp8.29 trillion. The decrease was mainly due to a decrease of 19.98% in current liabilities.

Liability performance is influenced by short-term liabilities and long-term liabilities. Compared to the position as of December 31, 2020, total liabilities as of December 31, 2021, decreased by 10.79%. Meanwhile, total long-term liabilities increased by 10.19, and current liabilities decreased by 19.98%, as described below.

Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Utang Usaha Accounts Payable	1.300.026	1.467.445	(167.419)	(11,41)
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Bank and Financial Institution Loans	2.216.614	3.529.869	(1.313.255)	(37,20)
Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Current Maturities of Long Term Notes	175.000	175.651	(651)	(0,37)
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga Gross Amount Due to Third Parties	967.581	929.472	38.109	4,10
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek Short-term Advances from Customers	143.275	165.112	21.637	(13,10)
Utang Pajak Payable	23.803	22.122	1.678	7,59
Beban Akrua dan Utang Lain-lain Accrued Expenses and Other Payables	344.519	172.584	171.935	99,62
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-term Liabilities	5.170.818	6.462.266	(1.291.448)	(19,98)

*: Direklasifikasi | Reclassified

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp5,17 triliun, lebih rendah 19,98% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp6,46 triliun. Penurunan ini, antara lain berkurangnya pinjaman bank dan lembaga keuangan, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga.

Utang Usaha

Utang usaha Perusahaan terdiri atas utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlahnya Rp1,30 triliun, turun 11,41% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat Rp1,46 triliun. Penurunan tersebut terutama karena adanya pelunasan utang usaha yang bersumber dari penerimaan pembayaran termin pada masing-masing proyek yang masih berjalan di tahun 2021.

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2,22 triliun, menurun 37,20% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3,53 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada pinjaman, antara lain pembayaran kewajiban pada PT Bank BTN, serta lunasnya pinjaman di PT Bank Mega Tbk maupun PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam satu Tahun

Jumlah pinjaman bank dan Lembaga keuangan jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp175,00 miliar, menurun 0,37% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp175,65 miliar.

Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilainya sebesar Rp967,58 miliar, mengalami kenaikan 4,10% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp929,47 miliar. Kenaikan tersebut, antara lain munculnya utang oleh Divisi Infrastruktur II dan I serta Divisi Gedung.

Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

Uang muka pemberi kerja jangka pendek hingga akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp143,27 miliar, mengalami penurunan 13,10% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp165,11 miliar. Penyebabnya, antara lain selesainya uang muka dari sejumlah mitra pihak ketiga seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga.

As of December 31, 2021, total short-term liabilities were Rp5.17 trillion, 19.98% lower than Rp6.46 trillion on December 31, 2020. The decrease was, among other factors, due to reduced loans from banks and financial institutions, both with related parties and third parties.

Accounts Payable

The Company's account payables consist of accounts payable to both related and third parties. As of December 31, 2021, the amount was Rp1.30 trillion, a decrease of 11.41% compared to Rp1.46 trillion on December 31, 2020. The decrease was mainly due to the payment of account payables from receipt of term payments for each ongoing project in 2021.

Bank and Financial Institution Loans

Total short-term bank and financial institution loans, as of December 31, 2021, reached Rp2.22 trillion, a decrease of 37.20% compared to the position on December 31, 2020, at Rp3.53 trillion. The largest decline occurred in loans, including payment of obligations to PT Bank BTN, as well as the repayment of loans to PT Bank Mega Tbk and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Current Maturities of Long-term Bank and Financial Institutional Loans

The amount of Current Maturities of Long-term Bank and Financial Institutional Loans as of December 31, 2021, was Rp175.00 billion, a decrease of 0.37% compared to the position on December 31, 2020, at Rp175.65 billion.

Gross Amount Due to Third Parties

The Gross amount due to third parties represents the subcontractor's work achievement payables that have not been reported, either from the sub-contractor or material, which is recognized as an achievement because it has not met the payment requirements according to the contract. As of December 31, 2021, the amount reached Rp967.58 billion, an increase of 4.10% compared to Rp929.47 billion on December 31, 2020. The increase was, among other factors, due to loans received by the Infrastructure Division II and I and the Building Division.

Short-term Advances from Customers

Short-term advances from short-term employers as of the end of 2021 were recorded at Rp143.27 billion, a decrease of 13.10% compared to Rp165.11 billion on December 31, 2020. Among the causes was the settlement of advances from some third-party partners such as the Ministry of Youth and Sports.

Uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi akan dikompensasi dengan kemajuan pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan kemajuan di lapangan

Advances for the project received from customers as agreed in the construction work contract will be compensated with the progress of work, and the payment terms are in accordance with progress in the field.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp23,80 miliar, lebih tinggi 7,59% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp22,12 miliar. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh naiknya PPh Pasal 4 (2).

Tax Payable

The total tax payable of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021, reached Rp23.80 billion, 7.59% higher than Rp22.12 billion on December 31, 2020. The increase was mainly due to the increase in Income Tax Article 4 (2).

Beban Akrua dan Utang Lain-lain

Beban akrual dan utang lain-lain terdiri dari akrual biaya apresiasi karyawan, akrual biaya tantiem, utang operasional proyek, akrual bunga surat jangka menengah, akrual bunga bank, akrual gaji dan upah, akrual beban kantor dan umum, serta utang lain-lain. Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Sementara akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Accrued Expenses and Other Payables

Accrued expenses and other payables include accruals for employee appreciation costs, tantiem cost accruals, project operational payables, medium-term debt securities accruals, bank interest accruals, salaries and wages, accruals for office and general expenses, and other payables. Project operational payables represent payables for joint venture expenses incurred on temporary loans to cooperated projects. Meanwhile, accrual of tantiem costs and employee appreciation costs is the recording of expenses on an accrual basis based on the budget that has been approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pada tanggal 31 Desember 2021, posisinya mencapai Rp344,52 miliar, naik 99,62% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp172,58 miliar. Kenaikan ini, antara lain karena timbulnya utang bagi hasil sukuk sebesar Rp21,8 miliar yang pada tahun sebelumnya tidak ada.

As of December 31, 2021, the position reached Rp344.52 billion, an increase of 99.62% compared to December 31, 2020, at Rp172.58 billion. Among the causes was the debt sharing of Rp21.8 billion of Sukuk, for which no corresponding figure was available in the previous year.

Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Employee Benefit Liabilities	23.965	13.104	10.861	82,88
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Long-term Bank Loans	1.184.754	1.105.288	79.466	7,19
Surat Utang Jangka Menengah Long-term Medium Term Notes	449.545	748.545	(299.000)	(39,94)
Utang Obligasi Bond Payables	640.740	640.360	380	0,06
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang Long-term Advances from Customers	199.470	312.608	(113.138)	(36,19)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	35.854	14.179	21.675	152,87
Utang Sukuk -Neto Other Non-current Liabilities	588.544	-	588.544	100,00
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	3.122.872	2.834.084	288.797	10,19

*: Direklasifikasi | Reclassified

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp3,12 triliun, mengalami kenaikan 10,19% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp2,83 triliun. Kenaikan itu, antara lain didorong oleh peningkatan jumlah liabilitas sewa sebesar 152,87%, liabilitas jangka panjang lainnya dengan pertumbuhan 100,00%, dan liabilitas imbalan kerja karyawan 82,88%.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri atas imbalan kerja karyawan Perusahaan dan entitas anak. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlahnya Rp23,97 miliar, naik 82,88% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp13,10 miliar. Kenaikan tersebut, terutama berasal dari meningkatnya imbalan kerja karyawan pada sejumlah entitas anak, seperti PT NK dan PT PPA Finance.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1,18 triliun, bertambah 7,19% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1,11 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang – Pihak Ketiga

Surat Utang Jangka Menengah

Pada tanggal 31 Desember 2021, surat utang jangka menengah tercatat sebesar Rp449,55 miliar, turun 39,94% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp748,55 miliar. Hal itu disebabkan oleh adanya pelunasan yang dilakukan pada tahun 2021.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 No. 1 tanggal 1 November 2019 dari Notaris Lenny Jannis Ishak S.H., Perusahaan menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) dengan cara penawaran terbatas untuk penambahan modal kerja dan/atau *refinancing*. Nilai pokok keseluruhan MTN sebesar Rp750,00 miliar.

Perusahaan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai Arranger dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau.

Utang Obligasi

Posisi utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat Rp640,74 miliar, naik 0,06% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp640,36 miliar. Kenaikan ini sebagai implikasi dari penurunan pada biaya yang dapat diatribusikan.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perusahaan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

As of December 31, 2021, total long-term liabilities were Rp3.12 trillion, an increase of 10.19% compared to Rp2.83 trillion recorded on December 31, 2020. The increase was, among other factors, driven by an increase of 152% in total rental liabilities, an increase of 100% in other long-term liabilities, and an increase of 82.88% in employee benefits liabilities.

Employee Benefits Liability

Employee benefit liabilities consist of employee benefits for the Company and its subsidiaries. As of December 31, 2021, they reached Rp23.97 billion, an increase of 82.88% compared to Rp13.10 billion on December 31, 2020. The increase was mainly due to the increase in employee benefits for a number of subsidiaries, such as PT NK and PT PPA Finance.

Long Term Bank Loans

As of December 31, 2021, long-term bank loans were recorded at Rp1.18 trillion, an increase of 7.19% compared to the position on December 31, 2020, at Rp1.11 trillion. The increase was due to an increase in Bank Loans and Long-Term Financial Institutions – Third Parties.

Medium Term Notes

As of December 31, 2021, medium-term notes were recorded at Rp449.55 billion, a decrease of 39.94% compared to Rp748.55 billion posted in December 2020. This was due to the payment made in 2021.

Based on the Deed of Issuance of Medium Term Notes I of Perusahaan Pengelola Aset Year 2019 No. 1 dated November 1, 2019, from Notary Lenny Jannis Ishak S.H., the Company issued medium-term debt securities (MTN) by means of a limited offering for additional working capital and/or *refinancing*. The overall principal of MTN was Rp750.00 billion.

The company has appointed PT Danareksa Sekuritas as Arranger and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Monitoring Agent.

Bond Payables

As of December 31, 2021, the position of bonds payable was recorded at Rp640.74 billion, an increase of 0.06% compared to Rp640.36 billion posted on December 31, 2020. The increase was an implication of a decrease in attributable costs.

In accordance with the provisions contained in the Trustee Agreement, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has been appointed by the Company as the Trustee who represents the interests of the Bondholders.

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp642,10 miliar, yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sejak tanggal 8 Desember 2021, Pefindo meningkatkan *rating* Perusahaan menjadi idAA (Double A) yang berlaku sampai dengan 1 Maret 2022.

Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

Uang muka pemberi kerja jangka panjang merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan (*bouwheer*) yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlahnya sebesar Rp199,47 miliar, turun 36,19% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp312,61 miliar. Penurunan ini, antara lain karena berkurangnya uang muka dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari Rp276,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp169,18 miliar di tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa per 31 Desember 2021 berjumlah Rp35,85 miliar, naik 152,87% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp14,18 miliar. Peningkatan tersebut terutama terjadi karena adanya penambahan liabilitas sewa tahun 2021

Utang Sukuk – Neto

Utang Sukuk – Neto per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp588,54 miliar, yang baru terjadi pada tahun 2021.

Berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk *Wakalah Bi Al-Istitsmar* Nomor 19 tanggal 15 November 2021, Perusahaan telah menerbitkan sukuk *wakalah* dengan nilai penerbitan sukuk Rp3,05 triliun dan dengan nilai nominal Rp13,05 triliun. Jangka waktu sukuk selama 20 tahun dan jatuh tempo sukuk adalah 15 November 2041. Sukuk *wakalah* ini memiliki imbal hasil indikatif setara 1% (satu persen) per tahun dari akumulasi keuntungan dan nilai penerbitan sukuk sampai dengan tanggal jatuh tempo ("Imbal Hasil") yang akan dibayarkan setiap tahun oleh Perusahaan sebagai penerbit.

Dalam akad ini, Perusahaan selaku penerbit akan mengelola dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk ini untuk melakukan beberapa kegiatan usaha antara lain berupa pembiayaan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan kegiatan investasi pada perusahaan kendaraan elektrik.

The bonds were issued with a principal of Rp642.10 billion, which is guaranteed with full commitment. The bonds were issued scrippless, except for the Jumbo Bond Certificates, issued on behalf of the Indonesian Central Securities Depository.

On December 8, 2021, Pefindo upgraded the Company's rating to idAA (Double A), which is valid until March 1, 2022.

Long-Term Advances from Customers

Long-term advances from customers represent the balance of advances that have been received from the *bouwheer* whose payment is deducted by invoices for each completed work. As of December 31, 2021, the amount reached Rp199.47 billion, a decrease of 36.19% compared to Rp312.61 billion posted on December 31, 2020. The decrease was partly due to a decrease in advances from the Ministry of Public Works and Public Housing Affairs, from Rp276.01 billion on December 31, 2020, to Rp169.18 billion on December 31, 2021.

Lease Liabilities

As of December 31, 2021, lease liabilities was Rp35.85 billion, an increase of 152.87% compared to Rp14.18 billion posted on December 31, 2020. The increase was mainly due to the addition of the lease liability in 2021

Sukuk Payables – Net

Sukuk Payables – Net, an account just recently posted, as of December 31, 2021 was recorded at Rp588.54 billion.

Based on the *Bi Al-Istitsmar Wakalah Sukuk Issuance Deed* No. 19, dated November 15, 2021, the Company has issued a *wakalah sukuk* with a sukuk issuance value of Rp3.05 trillion and a nominal value of Rp13.05 trillion. The Sukuk has a term of 20 years with a maturity date of November 15, 2041. This *wakalah sukuk* has an indicative yield equivalent to 1% (one percent) per annum of the accumulated profits and the value of the issuance of the sukuk until the maturity date ("yield"), which will be paid annually by the Company as per the issuer.

Under the contract, as the issuer, the Company will manage the proceeds from the issuance of this Sukuk to carry out several business activities, including financing to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and investment activities in electric vehicle companies.

Perkembangan Ekuitas Changes in Equity

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Ekuitas Equity	2021	2020*	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to the owner of the parent entity				
Modal Saham Share Capital	5.952.623	2.996.688	2.955.935	98,64
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(308.059)	(308.059)	-	100,00
Saldo Laba: Retained Earning				
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	299.350	299.350	-	100,00
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	576.377	312.384	263.993	84,51
Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities – Net	2.594.190	20.800	2.573.390	12.372,07
Surplus Revaluasi Aset Tetap Revaluation Surplus of Fixed Assets	249.634	333.863	(84.229)	(25,23)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Total equity attributable to owner of the parent entity	9.364.115	3.655.026	5.709.089	156,20
Kepentingan non-pengendali Equity attributable to non-controlling interests	4.696	3.078	1.618	52,27
Jumlah Ekuitas Total Equity	9.368.811	3.658.104	5.710.707	156,11

*: Direklasifikasi | Reclassified

Ekuitas

Total Ekuitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9,37 triliun, lebih tinggi 156,11% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp3,66 triliun. Kenaikan tersebut, terutama didukung oleh penambahan modal saham dan pertumbuhan pada laba bersih yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual.

Modal Saham

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal saham Perusahaan adalah sebesar Rp1.000.000 per saham. Pada tanggal 31 Desember 2021, modal saham Perusahaan sebesar Rp5,95 triliun, meningkat 98,64% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp3,00 triliun.

Penambahan penyertaan modal Negara RI sebesar Rp2,96 triliun berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara RI pada 5 (lima) Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 135/KMK.06/2021 tanggal 1 April 2021.

Equity

As of December 31, 2021, the Company's Total Equity stood at Rp9.37 trillion, 156.11% higher than the Rp3.66 trillion posted on December 31, 2020. The increase was mainly supported by additional share capital and growth in unrealized net income from available-for-sale securities.

Share Capital

The Company is fully owned by the Republic of Indonesia, with a nominal value of the Company's shares standing at Rp1,000,000 per share. As of December 31, 2021, the Company's share capital reached Rp5.95 trillion, an increase of 98.64% compared to Rp3.00 trillion posted on December 31, 2020.

The addition of Rp2.96 trillion from the Republic of Indonesia's capital investment resulted from the transfer of shares owned by the Republic of Indonesia in 5 (five) Companies pursuant to the Decree of the Minister of Finance No135/KMK.06/2021 dated April 1, 2021.

Tambahan Modal Disetor

Jumlah tambahan modal disetor Perusahaan pada tahun 2021 bernilai sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp308,1 miliar.

Tambahan modal disetor tersebut merupakan saham baru yang diambil bagian oleh Perusahaan untuk melaksanakan program restrukturisasi PT NK, dan mengakibatkan kepemilikan saham Negara secara langsung pada PT NK menjadi 1% (satu persen) dan kepemilikan saham Perusahaan pada PT NK menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen). Perusahaan yang menerima bisnis tersebut, dalam PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Pada tahun 2018, Perusahaan melalui anak usahanya PPAK melepas bisnis dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali yaitu PT Pratama Persada Airbone ke PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survei Udara Penas (Persero) dan sesuai PSAK 38 mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas divestasi dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Saldo Laba

Saldo Laba pada tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dengan jumlah masih sama dengan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp299,35 miliar dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan 45,80% dari posisi tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp312,38 miliar menjadi Rp576,38 miliar.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 29 Juni 2020 para pemegang saham memutuskan tidak ada pembagian dividen dan seluruh laba bersih tahun berjalan sebagai saldo laba.

Labarugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual – Bersih

Labarugi belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual bersih pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp2,59 triliun, meningkat 12,372,07% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang berada di posisi Rp20,80 miliar.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan 25,23%, dari Rp333,86 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp249,63 miliar. PT NK telah melakukan revaluasi atas aset tanah, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya yang disampaikan pada tanggal 21 September 2021.

Additional Paid-in Capital

The Company's additional paid-in capital in 2021 was the same as the previous year, Rp308.1 billion.

The additional paid-in capital represents new shares subscribed by the Company to implement the restructuring program of PT NK and resulted in the State's direct share ownership in PT NK being 1% (one percent) and the Company's share ownership in PT NK being 99% (ninety-nine percent). The Company, which received the business in PSAK 38 business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount transferred and the carrying amount of each business transaction of entities under common control in equity and posts it in additional paid-in capital.

In 2018, the Company, through its subsidiary PPAK divested its business under divesting the business of entities under common control, ly PT Pratama Persada Airbone to PT Aviastri Wisata Indonesia (Persero), formerly PT Survey Udara Penas (Persero) and in accordance with PSAK 38 recognizes the difference between the reward received and the carrying amount of the business being divested and posts it as additional paid-in capital.

Retained Earning

As of December 31, 2021, Retained Earnings consist of appropriated retained earnings with the same amount as of December 31, 2020, which was Rp299.35 billion, while unappropriated retained increased 45.80% from the position on December 31, 2020, at Rp312.38 billion, to Rp576.38 billion.

Pursuant to the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 29, 2020, shareholders decided not to distribute dividends, and all of the net profit for the current year was posted as retained earnings.

Unrealized Gain (Loss) on Available for Sale Securities – Net

Unrealized gain (loss) on Available-for-sale securities – net as of December 31, 2021, stood at Rp2.59 trillion, an increase of 12,372.07% compared to Rp20.80 billion posted on December 31, 2020.

Revaluation Surplus of Fixed Assets

Revaluation Surplus of Fixed Assets as of December 31, 2021, decreased 25.23%, from Rp333.86 billion as of December 31, 2020, to Rp249.63 billion. This is because PT NK has revalued its land assets, which was carried out by the Public Appraisal Service Office Jimmy Prasetyo and Partners, as stated in their report submitted on September 21, 2021.

Tidak ada dampak perpajakan dari revaluasi aset tanah tersebut, karena revaluasi ini tidak memenuhi persyaratan penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan sehingga secara fiskal, tidak ada perubahan atas nilai buku aset.

There is no tax impact from the revaluation of land assets. This revaluation did not meet the requirements for revaluing the Company's fixed assets, plant, and equipment for tax purposes, so fiscally, there was no change in the book value of the assets.

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Posisi ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp9,36 triliun, naik 156,20% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp3,66 triliun.

Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity

Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity as of December 31, 2021, reached Rp9.36 trillion, an increase of 156.20% compared to Rp3.66 trillion posted on December 31, 2020.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali mengalami kenaikan 52,57%, dari Rp3,08 miliar pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4,70 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.

Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Equity attributable to non-controlling interests increased 52.57%, from Rp3.08 billion as of December 31, 2020, to Rp4.70 billion as of December 31, 2021.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Statements of Consolidated Profit Loss and Other Comprehensive Income

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Usaha Revenue	6.535.658	4.397.844	2.137.814	48,61
Beban Usaha Operating Expenses	(6.368.336)	(4.154.610)	(2.213.726)	53,28
Laba Usaha Operating Income	167.322	242.234	(74.913)	(30,93)
Pendapatan Bunga Interest Income	20.518	14.419	6.099	42,30
Keuntungan Penjualan Aset Tetap Gain on Sales of Fixed Asset	241	-	241	100,00
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expense and Financial Charges	(79.646)	(91.805)	12.159	(13,22)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Increase in Fair Value of Investment Property	18.752	26.169	(7.417)	(28,34)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(127.886)	(101.709)	(26.177)	25,74
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Profit of Joint Venture	152.776	87.905	64.871	73,80
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	23.110	(15.200)	38.310	(252,04)
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	175.187	163.013	12.174	7,47
Pajak Penghasilan Income Taxes				
Manfaat (Beban) Pajak Kini Current Tax Benefit (Expense)	(3.976)	(38.319)	21.119	(55,11)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefit (Expense)	(6.086)	(18.925)	4.150	(21,93)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Total Income Tax Expenses	(10.062)	(57.244)	47.182	(82,42)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	165.125	105.769	59.356	56,12

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Statements of Consolidated Profit Loss and Other Comprehensive Income

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items that will not be reclassified to profit or loss				
Surplus Revaluasi Aset Tetap Surplus of Fixed Asset Reevaluation	10.717	-	10.717	100,00
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities	3.467	4.802	(1.335)	(27,80)
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Financial Assets Available for Sale	2.574.638	(1.352)	2.575.990	(190.531,80)
Jumlah pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Available-for-Sale Financial Assets	2.588.822	3.450	2.585.372	74.938,32
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	2.753.947	109.219	2.644.728	2.421,49
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Distribusikan Kepada Income for the Year Attributable To				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	164.468	105.341	59.127	56,13
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Shareholders	657	428	239	55,84
Jumlah Total	165.125	105.769	59.366	56,13
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Income for the Year Attributable To:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	2.753.154	108.749	2.644.405	2.431,66
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Shareholders	793	470	323	68,72
Jumlah Total	2.753.947	109.219	2.644.728	2.421,49
Laba per Saham (dalam rupiah penuh) Earnings per Share	32.860	35.152	(2.292)	(6,52)

Pendapatan Usaha Konsolidasian Consolidated Revenues

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021		2020		Kenaikan (Pernurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Kontribusi (%)	Jumlah Total	Kontribusi (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage
Pendapatan Jasa Konstruksi Construction Service Revenue	4.259.315	65,17%	3.496.210	79,50%	763.105	21,83%
Pendapatan Hasil Investasi Investment Revenue	2.025.952	31,00%	492.371	11,20%	1.533.581	311,47%
Pinjaman yang Diberikan Loan Receivables	117.443	1,80%	184.829	4,20%	(67.386)	-36,46%

Pendapatan Usaha Konsolidasian Consolidated Revenues

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Kontribusi Contribution	Jumlah Total	Kontribusi Contribution	Jumlah Total	Persentase Percentage
		(%)		(%)		
Pendapatan Manufaktur Manufacturing Revenue	103.462	1,58%	96.549	2,20%	6.913	7,16%
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi Advisory Service	34.466	0,53%	46.243	1,05%	(11.777)	-25,47%
Pendapatan Properti Property Revenue	30.039	0,46%	17.487	0,40%	12.552	71,78%
Pendapatan Investasi Infrastruktur Infrastructure Investment Revenue	14.429	0,22%	-	0,00%	14.429	100,00%
Pendapatan Sewa Alat Lease Revenue	8.119	0,12%	6.237	0,14%	1.882	30,17%
Pendapatan Penggantian Biaya Reimbursement Cost Revenue	4.424	0,07%	2.700	0,06%	1.724	63,85%
Keuntungan/(Kerugian) atas Investasi pada Efek Ekuitas Gain on Investment in Equity Securities	(61.991)	-0,95%	55.218	1,26%	(117.209)	-212,27%
Jumlah Total	6.535.658	100,00%	4.397.844	100,00%	2.137.814	48,61%

Pendapatan usaha Perusahaan tahun 2021 mencapai Rp6,54 triliun, tumbuh 48,61% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp4,40 triliun. Kenaikan tersebut, terutama didukung oleh pendapatan dari hasil investasi dan jasa konstruksi yang masing-masing naik 311,47% dan 21,83%.

The Company's operating revenues in 2021 reached Rp6.54 trillion, growing 48.61% compared to Rp4.40 trillion in 2020. The increase was mainly supported by income from investment and construction services, which grew by 311.47% and 21.83%, respectively.

Beban Usaha Operating Expenses

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Beban Proyek Project Expenses	4.053.477	3.299.319	754.158	22,86%
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai Allowance (Recovery) for Impairment.	1.170.777	(63.004)	1.233.781	-1.958,26%
Beban Bunga Interest Expenses	428.582	446.080	(17.498)	-3,92%
Pegawai Employee	325.725	295.303	30.422	10,30%
Jasa Konsultan Consulting Fee	58.115	16.136	41.979	260,16%
Keperluan Kantor Inventory Expense	42.546	38.931	3.615	9,29%
Penurunan Nilai Wajar Entitas Investasi Impairment of Fair Value of Investment Entity	37.466	-	37.466	100,00%

Beban Usaha Operating Expenses

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Sewa dan Asuransi Lease and Insurance	33.911	28.093	5.818	20,71%
Investasi Investment	25.343	11.357	13.986	123,15%
Penyusutan Aset Tetap Fixed Asset Depreciation	14.627	12.582	2.045	16,25%
Pemasaran dan Penjualan Sales and Marketing	-	11.009	(11.009)	-100,00%
Perjalanan Dinas Business Travel	11.032	12.459	(1.427)	-11,45%
Imbalan Pasca Kerja - Bersih Post Employment Benefit - Net	7.801	7.343	458	6,24%
Lain-lain (di bawah Rp1.000) Other expenses (less than Rp1,000)	158.934	39.002	119.932	307,50%
Jumlah Total	6.368.336	4.154.610	2.213.726	53,28%

Beban usaha pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp6,37 triliun, mengalami kenaikan 53,28% dari tahun 2020 yang sebesar Rp4,15 triliun. Kenaikan tersebut terutama karena peningkatan beban penyisihan penurunan nilai sebesar Rp1,23 triliun atau 1.958,26%.

Operating expenses in 2021 were recorded at Rp6.37 trillion, an increase of 53.28% from Rp4.15 trillion in 2020. This was mainly due to an increase of Rp1.23 trillion or 1,958.26% in allowance for impairment losses.

Laba Usaha

Laba usaha didapatkan dari akun pendapatan usaha yang diakumulasi dengan beban usaha. Perusahaan membukukan laba usaha tahun 2021 sebesar Rp167,32 miliar, turun 30,93% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp243,23 miliar. Penurunan ini, terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan usaha.

Operating Profit

Operating income is obtained from operating income accounts accumulated with operating expenses. The company posted an operating profit in 2021 of Rp167.32 billion, a decrease of 30.93% compared to Rp243.23 billion in 2020. The decrease was mainly due to an increase in operating expenses higher than the growth in operating income.

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun 2021 mengalami kenaikan 42,30% dari tahun 2020, sehingga menjadi Rp20,52 miliar dari Rp14,42 miliar di tahun 2020.

Interest Income

Interest Income in 2021 increased 42.30% from 2020, to Rp20.52 billion from Rp14.42 billion in 2020.

Keuntungan Penjualan Aset Tetap

Pada tahun 2021, Perusahaan membukukan keuntungan penjualan aset tetap sebesar Rp241 juta yang tidak diperoleh pada tahun 2020.

Fixed Asset Sales Profit

In 2021, the Company posted a gain on sale of fixed assets of Rp241 million, for which no corresponding figure was available in 2020.

Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan tahun 2021 sebesar Rp79,65 miliar, menurun 13,22% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp91,81 miliar. Penurunan ini, antara lain disebabkan oleh berkurangnya beban administrasi serta beban bunga.

Interest Expense and Financial Charges

Interest expense and financial charges in 2021 reached Rp79.65 billion, a decrease of 13.22% compared to Rp91.81 billion in 2020. The decrease was partly due to reduced administrative expenses and interest expenses.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi

Pada tahun 2021, kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp18,75 miliar, turun 28,34% dari tahun 2020 yang sebesar Rp26,17 miliar.

Beban Pajak Final

Beban pajak final tahun 2021 sebesar Rp127,89 miliar, bertambah 25,74% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp101,71 miliar. Kenaikan ini, antara lain akibat bertambahnya jumlah pendapatan Perusahaan yang terkena pajak final.

Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian laba ventura bersama tahun 2021 tercatat sebesar Rp152,78 miliar, tumbuh 73,80% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp87,91 miliar. Kenaikan ini, antara lain didukung oleh penambahan dari PT NK, seperti pendapatan ventura bersama PT Adhi Karya dan PT Bina Nusa Sarana.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Jumlah pendapatan lain-lain bersih tahun 2021 mencapai Rp23,11 miliar, mengalami peningkatan 252,04%, setelah pada tahun 2020 membukukan beban lain-lain bersih Rp15,20 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena adanya peningkatan pendapatan lain-lain berupa pemulihan piutang

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak didapatkan dari akun laba usaha yang diakumulasi dengan pendapatan bunga, beban bunga dan keuangan, kenaikan nilai wajar atas properti investasi, beban pajak final, bagian laba ventura bersama, serta pendapatan (beban) lain-lain. Pada tahun 2021, nilainya mencapai Rp175,19 miliar, meningkat 7,47% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp163,01 miliar.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan. Tahun 2021, pajak penghasilan Perusahaan sebesar Rp10,06 miliar, menurun 82,42% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp57,24 miliar. Penurunan itu, terutama akibat berkurangnya pajak kini, dari Rp38,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3,98 miliar di tahun 2021.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba bersih Perusahaan yang didapatkan dari akun laba sebelum pajak yang diakumulasi dengan pajak penghasilan. Pada tahun 2021, nilainya mencapai Rp165,13 miliar, lebih tinggi 56,12% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp105,77 miliar.

Increase in Fair Value of Investment Property

In 2021, the fair value of investment properties increased to Rp18.75 billion, down 28.34% from Rp26.17 billion in 2020.

Final Tax Expense

The final tax expense in 2021 was Rp127.89 billion, an increase of 25.74% compared to Rp101.71 billion in 2020. The increase was partly due to an increase in the Company's total income, which was subject to final tax.

Share of Profit of Joint Venture

Share of profits of the joint venture in 2021 was recorded at Rp152.78 billion, growing 73.80% compared to Rp87.91 billion in 2020. The increase was, among other factors, supported by the additions from PT NK, such as joint venture revenues from PT Adhi Karya and PT Bina Nusa Sarana.

Other Income (Expenses)

Total net other income in 2021 reached Rp23.11 billion, an increase of 252.04%, after posting other expenses (net) of Rp15.20 billion in 2020. The increase was mainly due to an increase in other income in the form of recovery of receivables.

Income Before Tax

Profit before tax is obtained from the operating profit account, accumulated with interest income, interest expense and finance, increase in fair value of investment property, final tax expense, joint venture profit share, and other income (expenses). In 2021, the amount reached Rp175.19 billion, an increase of 7.47% compared to Rp163.01 billion in 2020.

Income Tax

Income Tax is the combined amount of current tax and deferred tax. In 2021, the Company's income tax was Rp10.06 billion, a decrease of 82.42% compared to Rp57.24 billion in 2020. The decrease was mainly due to the reduction in current taxes, from Rp38.32 billion in 2020 to Rp3.98 billion in 2021.

Income for the Year

Income for the year is the Company's net income derived from the income before tax account, which is accumulated with income tax. In 2021, the amount reached Rp165.13 billion, 56.12% higher than Rp105.77 billion in 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain

Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan didapatkan dari akun laba tahun berjalan yang diakumulasi dengan penghasilan komprehensif lain. Jumlahnya pada tahun 2021 mencapai Rp2,75 triliun, meningkat hingga 2.421,49% jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp109,22 miliar. Kenaikan ini, antara lain karena adanya penambahan pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar yang mencapai Rp2,57 triliun, dari sebelumnya minus Rp1,35 miliar.

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Penghasilan berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2021 tercatat sebesar Rp164,47 miliar, naik 56,13% dari tahun 2020 yang sebesar Rp105,34 miliar.

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Penghasilan berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2021 mencapai Rp657 juta, naik 55,84% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp428 juta.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2021 mencapai Rp2,75 triliun, lebih tinggi 2.431,66% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat Rp108,75 miliar.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2021 mencapai Rp793 juta, naik 68,72% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp470 juta.

Laba per Saham

Laba per saham dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang dibagi dengan jumlah lembar saham dalam modal saham Perusahaan. Laba per saham tahun 2021 mencapai Rp32.860, turun 6,52% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat Rp35.152 per lembar saham.

Other Comprehensive Income

Other Comprehensive Income for the Year is obtained from the income for the year account, which is accumulated with other comprehensive income. The amount in 2021 reached Rp2.75 trillion, an increase of 2,421.49% compared to Rp109.22 billion in 2020. The increase was partly due to the addition of financial assets measured at fair value, which reached Rp2.57 trillion, from previously minus Rp1.35 billion.

Income for the Year Attributable to Owner of the Parent Entity

Income for the year attributable to owner of the parent entity in 2021 was recorded at IRp164.47 billion, an increase of 56.13% from Rp105.34 billion in 2020.

Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

Income for the year attributable to non-controlling interests in 2021 reached Rp657 million, an increase of 55.84% compared to Rp428 million in 2021.

Comprehensive Income for the Year Attributable to Owner of the Parent Entity

Comprehensive income for the year attributable to owner of the parent entity in 2021 was Rp2.75 trillion, 2,431.66% higher than in Rp108.75 billion in 2020.

Comprehensive Income for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

Comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests reached 2021 Rp793 million, an increase of 68.72% compared to Rp470 million in 2020.

Earnings per Share

Earnings per share is calculated from income for the year attributable to owner of the parent company divided by the number of shares in the Company's share capital. Earnings per share in 2021 reached Rp32,860, a decrease of 6.52% compared to Rp35,152 per share in 2020.

Uraian Description	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp Juta) Income for the Year Attributable to The Owner of the Parent Entity (Rp Million)	164.467.837.285	105.340.636.040	59.127.201.245	56,13
Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheets)	5.005.104	2.996.688	2.008.416	67,02
Laba per Saham (Rp) Earnings per Share (Rp)	32.860	35.152	(2.292)	(6,52)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus kas menggambarkan pemasukan dan pengeluaran kas Perusahaan dalam periode tertentu. Arus Kas Perusahaan terdiri dari kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, kas bersih digunakan aktivitas investasi, dan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan. Kinerja arus kas Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flows	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	1.917.614	(1.006.007)	2.923.621	(283,97)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	(1.564.826)	(636.511)	928.315	145,84
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	1.500.422	1.326.525	173.897	13,10
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	1.853.210	(315.993)	2.169.203	(686,47)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	774.116	1.107.636	(333.520)	(30,11)
Keuntungan (kerugian) Selisih Kurs yang Belum Direalisasi Unrealized Gain (Loss) on Foreign Exchange	2	-	2	100,00
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun dari entitas yang konsolidasi (tidak dikonsolidasi) The balance of cash and cash equivalents at the beginning of the year from the consolidated entity (unconsolidated)	-	(17.527)	17.527	100,00
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	2.627.328	774.116	1.853.212	239,40

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp1,92 triliun, tumbuh 283,97% dibandingkan tahun 2020 yang minus sebesar Rp1,0 triliun. Kenaikan tersebut, terutama didukung oleh penerimaan dividen yang mencapai Rp1,45 triliun, yang tidak terjadi pada tahun sebelumnya.

STATEMENTS OF CONSOLIDATED CASH FLOWS

Cash flow represents the Company's cash income and expenditure in a certain period. The Company's Cash Flows consist of net cash used for operating activities, net cash used for investing activities, and net cash provided by financing activities. The Company's cash flow performance can be explained as follows.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash used in operating activities in 2021 reached Rp1.92 trillion, growing 283.97% compared to minus Rp1.0 trillion in 2020. The increase was mainly supported by dividends received that reached Rp1.45 trillion, for which no corresponding figure was not available in the previous year.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	5.972.746	5.050.817	921.929	18,25
Penyaluran Pembiayaan Konsumen Disbursement for Financing	(153.191)	(564.728)	411.537	72,87
Penerimaan Restitusi Pajak Cash Receipts from Tax Refund	241.564	24.258	217.306	895,81
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Cash Paid to Suppliers and Third Parties	(4.949.926)	(4.811.959)	(137.967)	2,87
Pembayaran Beban Bunga Payment of Interest	(516.828)	(551.619)	34.791	(6,31)
Pembayaran Pajak Payment of Tax	(202.862)	(171.918)	(30.944)	18,00
Penerimaan Dividen Dividend Received	1.451.339	-	1.451.339	100,00
Penerimaan (Pengeluaran) Lainnya Other Receipts (Disbursements)	74.772	19.142	55.630	290,62
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi Net Cash Used In Operating Activities	1.917.614	(1.006.007)	2.923.621	290,62

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 mencapai Rp1,56 triliun, meningkat 145,84% dibandingkan tahun 2020 yang Rp636,51 miliar. Penambahan tersebut, antara lain karena adanya pengeluaran investasi pada sukuk.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash used for investment activities in 2021 reached Rp1.56 trillion, an increase of 145.84% compared to Rp636.51 billion in 2020. The increase was partly due to investment spending in sukuk.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Investasi Receipt from Investment	350.199	-	350.199	100,00
Pengeluaran Investasi Disbursement from Investment	(120.909)	(499.179)	378.270	(75,78)
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan Proceeds from Investment Loans	1.432.698	1.927.179	(494.481)	(25,66)
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan Disbursement from Investment Loans	(838.160)	(2.112.652)	2.028.836	(96,03)
Penerimaan Pencarian Laba Ventura Bersama Cash Received from Share in Joint Profit of Joint Venture	64.247	64.973	(726)	(1,12)
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets	(12.045)	(16.832)	4.787	(28,44)
Pengeluaran Investasi pada Sukuk Investment Expenditure on Sukuk	(2.440.856)	-	2.440.856	100,00
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows Used in Investing Activities	(1.564.826)	(636.511)	(928.315)	145,84

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2021 sebesar Rp1,50 triliun, meingkat 10,12% dari tahun 2020 sebesar Rp1,33 triliun. Kenaikan tersebut terutama didukung oleh penerimaan dari penerbitan surat utang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Pinjaman Receipts from Loan	5.784.499	7.825.940	(2.041.441)	(26,09)
Pembayaran Pinjaman Payment for Loan	(7.025.561)	(6.664.347)	(361.214)	5,42
Penerimaan Penerbitan Surat Utang Receipts from Bonds	3.051.069	-	3.051.069	100,00
Pembayaran Penerbitan Surat Utang Receipts from Securities	(300.000)	(460.000)	16.000	3,47
Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Berelasi Payment for Securities	-	642.100	(642.100)	(100,00)
Penerimaan Setoran Modal Receipt of Capital Deposit	825	-	825	100,00
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment for Lease Liability	(10.410)	(17.168)	6.758	39,36
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided By (Used In) Financing Activities	1.500.422	1.326.525	173.897	13,10

Cash Flows from Financing Activities

Net cash obtained from financing activities in 2021 was Rp1.50 trillion, an increase of 10.12% from Rp1.33 trillion in 2020. The increase was mainly supported by receipts from the issuance of debt securities.

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas Perusahaan pada akhir tahun mencapai Rp2,63 triliun, meningkat 239,40% dibandingkan posisi tahun 2020 yang sebesar Rp774,12 miliar.

Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

At the end of the year, the company's cash and cash equivalents reached Rp2.63 trillion, an increase of 239.40% compared to the position in 2020 at Rp774.12 billion.

Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas

Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas Amount as reported in statement of cash flows	2.627.328	774.116	1.853.212	239,40
Penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas Allowance for impairment loss	-	(16)	-	-
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan Amount as reported in statement of financial position	2.627.328	774.100	1.853.228	239,40

KEMAMPUAN PERUSAHAAN DALAM MENGHASILKAN LABA ATAU KEUNTUNGAN

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan ditunjukkan melalui rasio profitabilitas yang terdiri dari tingkat imbal hasil atas aset atau *return on asset* (ROA), tingkat imbal hasil atas modal atau *return on equity* (ROE), margin laba usaha, margin laba bersih, beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), serta produktivitas tenaga kerja; dan rasio pertumbuhan yang memberikan gambaran kenaikan dan/atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari pendapatan usaha, beban usaha, laba usaha, laba bersih, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, laba per saham, aset, liabilitas, dan ekuitas.

THE COMPANY'S ABILITY TO GENERATE OR TO GAIN PROFIT

The Company's ability to generate or gain profit can be seen from the Profitability Ratio, which consists of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Operating Margin, Net Margin, Operating Expenses to Operating Income (BOPO), as well as Labor Productivity; and Growth Ratio, which illustrates the increase and/or decrease compared to the previous year of Revenues, Operating Expenses, Operating Income, Net Profits, Net Income Attributable to Owners of the Parent Entity, Earnings per Share, Assets, Liabilities, and Equity.

	Satuan Unit	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio Laba Bersih terhadap Aset Return On Asset (ROA) (%)	%	0,85	0,82	0,03	3,66
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas Return On Equity (ROE) (%)	%	1,79	2,89	(1,1)	38,06
Marjin Laba Usaha Operating Margin (%)	%	2,68	5,53	(2,85)	51,54
Marjin Laba Bersih Net Margin (%)	%	2,53	2,41	0,12	4,98
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO) (%)	%	97,44	94,47	2,97	3,14
Produktivitas Tenaga Kerja Labor Productivity	Rp Juta (Rp-million)	18,11	5.049	(5.030,89)	(99,64)
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio					
Pendapatan Usaha Revenues	Rp Juta (Rp-million)	6.535.658	4.397.844	2.137.814	48,61
Beban Usaha Operating expenses	Rp Juta (Rp-million)	(6,368,336)	(4,154,610)	2.213.726	53,28
Laba Usaha Operating income	Rp Juta (Rp-million)	167.322	243.234	(75.912)	-31,20
Laba Tahun Berjalan Net income	Rp Juta (Rp-million)	165.125	105.769	1.718,91	56,11
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Net Income Attributable to The Owners of the Parent Entity	Rp Juta (Rp-million)	164.468	105.341	59.127	56,12
Laba per Saham Earnings per Share	Rp	32.860	35.152	(2.292)	(6,52)
Aset Asset	Rp Juta (Rp-million)	17.662.501	12.954.443	4.708.058	36,34
Liabilitas Liability	Rp Juta (Rp-million)	8.293.690	9.296.339	(1.002.649)	(10,79)
Ekuitas Equity	Rp Juta (Rp-million)	9.368.811	3.658.104	5.710.707	156,11

Rasio-rasio keuangan Perusahaan yang menggambarkan profitabilitas dan pertumbuhan usaha di tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut menggambarkan kinerja perusahaan di tahun 2021 yang semakin meningkat dan bertumbuh dibandingkan dengan tahun 2020.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan membayar seluruh utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

Rasio Likuiditas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

- Rasio Lancar = Aset Lancar: Liabilitas Jangka Pendek
- Rasio Kas = Kas dan Setara Kas+Efek: Liabilitas Jangka Pendek

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents (Rp-million)	2.627.328	774.100	1.853.228	239,40
Efek/Aset keuangan diperdagangkan Securities/Financial Assets Traded (Rp-million)	280.522	-	280.522	100,00
Aset Lancar Current Assets	7.820.946	8.020.825	(199.879)	(2,49)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.170.818	6.462.255	(1.291.437)	19,98
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio Lancar Current Ratio	151,25%	124,11%	27,14	21,86
Rasio Kas Cash Ratio	50,81%	11,97%	38,84	324,47

Kemampuan membayar utang jangka pendek Perusahaan dicerminkan dengan rasio likuiditas, yang dapat dilihat dari rasio lancar dan rasio kas. Rasio lancar mengalami penurunan 30,83% dibandingkan tahun 2020 sementara rasio kas naik sebesar 574,65% pada tahun 2021.

Rasio Solvabilitas: Mengukur Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek dan Jangka Panjang

- *Debt Interest Bearing to Equity Ratio* = Total Debt Interest Bearing: Total Ekuitas
- *Debt Interest Bearing to Asset Ratio* = Total Debt Interest Bearing: Total Aset

The Company's financial ratios representing profitability and business growth in 2021 have increased compared to 2020. This illustrates how the Company's performance in 2021 has improved and grown more robust compared to 2020.

THE ABILITY TO PAY DEBT

The Company's ability to pay the debt is measured using the solvency and liquidity ratios. The solvency ratio is the ratio to measure the ability of the Company to pay all of its debts, both short and long-term. In contrast, the liquidity ratio is the ratio to measure the ability of the Company to pay its short-term debt.

Liquidity Ratio: The Ability to Pay Short-Term Debt

- Current Ratio = Current Assets: Current Liabilities
- Cash Ratio = Cash and Cash Equivalents : Current Liabilities

The Company's ability to pay the short-term debt is reflected by the liquidity ratio, where the level of liquidity can be seen from the current ratio and cash ratio. The current ratio decreased by 30.83% compared to 2020, while the cash ratio increased by 574.65% in 2021.

Solvency Ratio: Measuring Ability to Pay Short-Term and Long-Term Debt

- *Debt Interest Bearing to Equity Ratio* = Total Debt Interest Bearing : Total Equity
- *Debt Interest Bearing to Asset Ratio* = Total Debt Interest Bearing : Total Assets

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung lama penagihan rata-rata atau *collection period* serta rasio perputaran piutang. Semakin kecil nilainya, menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Company's ability to collect receivables can be determined by calculating the Average Collection Period or Receivable Turnover Ratio. The smaller the value of the Collection Period shows, the faster the Company's ability to collect receivables.

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}}$$

Receivables Turnover Ratio = Account Receivables / Revenues

$$\text{Lama Penagihan Rata-rata} = \text{Rasio Perputaran Piutang} \times 365 \text{ hari}$$

Average Collection Period = Receivables Turnover Ratio x 365 days

Rasio Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility Ratio

	Satuan Unit	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Piutang Usaha Accounts Receivable	Rp Juta Rp Million	1.118.654	1.435.385	(316.731)	22,06
Pendapatan Usaha Revenues	Rp Juta Rp Million	6.535.658	4.397.844	2.137.814	48,61
Lama Penagihan Rata-rata Average Collection Period	Hari Day	62,05	116,80	(54,75)	(46,87)
Rasio Perputaran Piutang Receivables Turnover Ratio	Kali Times	0,17	0,33	(0,16)	(48,49)

Lama penagihan rata-rata tahun 2021 adalah 62,05 hari, mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2020 yang 116,80 hari.

The average collection period in 2021 was 62.05 days, a decrease compared to 116.80 days in 2020.

Umur Piutang Usaha Age of Accounts Receivable

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Umur Piutang Usaha yang belum diturunkan nilainya Age of Accounts Receivable that has not been impaired				
Belum Jatuh Tempo Not due	990.069	989.660	409	0,04
Lewat Jatuh Tempo: Over due				
1 – 90 hari days	202.112	457.052	(254.940)	(55,78)
91 – 120 hari days	18.185	11.027	7.158	64,91
121 – 180 hari days	3.976	137.895	(133.919)	(3.368,18)
>180 hari days	170.662	90.998	79.664	87,54
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Allowance for Receivables Impairment Losses	(266.350)	(251.247)	(15.103)	6,01
Jumlah Piutang Usaha Total Accounts Receivable	1.118.654	1.435.385	(316.731)	(22,06)

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

The management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Kebijakan Manajemen Perusahaan atas Struktur Modal dan Dasar Kebijakan

Management Policy on Capital Structure and Basis of Policy

Kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan bertujuan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Perusahaan berharap dapat memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya.

The objectives of the Company and subsidiaries in managing capital are to protect the Company's ability to maintain business continuity; therefore, the entity can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders.

Pengelolaan struktur modal yang optimal menjadi sangat penting untuk meminimalisasi biaya modal secara efektif. Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyelaraskan dengan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

An optimal capital structure is essential to minimize the cost of capital effectively. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares to reduce borrowing.

Perusahaan memantau modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung dengan membagi utang neto dengan jumlah ekuitas. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

The Company monitors the capital based on debt to adjust the capital ratio. This ratio is calculated as the following: net debt is divided by total equity. Net debt comprises the deduction of total debts (as stated in the financial position statements) with cash and cash equivalents.

Manajemen Permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure Management

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Total Liabilitas Total Liabilities	8.293.690	9.299.877	(1.002.649)	(10,79)
dikurangi Minus:				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	2.627.328	774.100	1.853.228	239,40
Liabilitas Neto Liability - Net	5.666.362	8.525.777	(2.859.415)	33,54
Total Ekuitas Total Equity	9.368.811	3.658.104	5.710.707	156,11
Rasio Liabilitas Neto terhadap Modal Net Debt to Equity Ratio (times)	0,60 kali 0.60 times	2,33 kali 2.33 times	(1,73) kali	(74,05)

Struktur Permodalan Perusahaan

Komposisi struktur modal Perusahaan yang terdiri dari utang/modal berbasis bunga dan permodalan sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Company Capital Structure

The composition of the Company's capital structure consisting of interest-based debt/capital and equity can be seen in the table below.

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Struktur Modal Capital Structure	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal Nominal	Persentase Percentage
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-1)	(6=1/3)
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Bank and Financial Institution Loans	2.216.614	25,48	3.529.869	48,80	1.313.255	37,20
Surat Utang Debt Securities	1.090.285	7,77	1.388.905	14,08	(298.620)	(21,50)
Sub Jumlah Utang Berbunga Debt Interest Bearing	4.666.653	33,25	6.199.713	62,89	(1.533.060)	(24,73)
Ekuitas Equity	9.368.811	66,75	3.658.104	37,10	5.710.707	156,11
Jumlah Total	14.035.464	100,00	9.857.817	100,00	4.177.647	42,38

Seperti terlihat pada tabel dan bagan di atas, struktur modal di tahun 2021 naik sebesar 42,38% dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan tersebut berasal dari Ekuitas.

As shown in the table and chart above, the capital structure in 2021 increased by 42.38% compared to 2020. The increase came from equity.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan dengan Perusahaan Party which has Commitment with the Company	Tujuan Ikatan Commitment Purpose	Sumber Dana Source of Fund	Mata Uang Currency	Mitigasi Risiko Mata Uang Asing Foreign Currency Risk Mitigation
PT Merpati Nusantara Airlines ("PT MNA")	pinjaman dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp300 miliar dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku pada awal periode pembayaran bunga. A loan with a maximum credit limit of Rp300 billion with an interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) valid at the beginning of the interest payment period.	Struktur permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure	Rupiah	-
PT PAL Indonesia (Persero)	Utang pokok sebesar Rp151.841 juta direstrukturisasi menjadi Fasilitas <i>Tranche A</i> , utang bunga sebesar Rp88.742 juta dan denda pokok sebesar Rp4.465 juta direstrukturisasi menjadi Fasilitas <i>Tranche B</i> . Principal debt of Rp151,841 million was restructured into <i>Tranche A Facility</i> , interest payable of Rp88,742 million and principal penalty of Rp4,465 million was restructured into <i>Tranche B Facility</i> .	Struktur permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure	Rupiah	-

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan dengan Perusahaan Party which has Commitment with the Company	Tujuan Ikatan Commitment Purpose	Sumber Dana Source of Fund	Mata Uang Currency	Mitigasi Risiko Mata Uang Asing Foreign Currency Risk Mitigation
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Atas sisa pinjaman PT KKA yang tidak terbayarkan dibuat suatu perjanjian Pengubahan Perjanjian Restrukturisasi Dana Talangan PT KKA dalam Rangka Penyelesaian Utang No. PP- 16/PPA/0719 tanggal 31 Juli 2019. For the remaining unpaid loan of PT KKA, an agreement was made to amend the Agreement for the Bailout Fund Restructuring for PT KKA to Settle its Debt with Agreement No. PP-16/PPA/0719 dated 31 July 2019.	Struktur permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure	Rupiah	-
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Akta perubahan XI (keselabel) tersebut mengatur jatuh tempo fasilitas pinjaman pada tanggal 29 Desember 2021 The eleventh deed of amendment regulates that the maturity date of the loan facility will be on December 29, 2021	Struktur permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure	Rupiah	-
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Utang pokok sebesar Rp31.639 juta direstrukturisasi menjadi <i>Tranche A</i>, utang bunga sebesar Rp2.061 juta direstrukturisasi menjadi <i>Tranche B</i>. Principal debt of Rp31,639 million was restructured into <i>Tranche A</i>, interest payable of Rp 2,061 million was restructured into <i>Tranche B</i>.	Struktur permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure	Rupiah	-
PT Industri Gelas (Persero)	Perubahan VIII Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 43 tanggal 20 Desember 2019 perihal penambahan pagu kredit fasilitas pinjaman <i>Tranche A</i> maksimal Rp50 miliar dan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Desember 2021 perihal penambahan pagu kredit fasilitas pinjaman <i>Tranche A</i> maksimal Rp50 miliar dan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Desember 2021. Amendment VIII on Loan Agreement No. 43 dated 20 December 2019 regarding the addition of the credit limit for the <i>Tranche A</i> loan facility with a maximum of Rp50 billion and the extension of the term of the loan facility until 31 December 2021 regarding the addition of the credit limit for the <i>Tranche A</i> loan facility to a maximum of Rp50 billion and the extension of the term of the loan facility until 31 December 2021.	Struktur permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure	Rupiah	-

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan dengan Perusahaan Party which has Commitment with the Company	Tujuan Ikatan Commitment Purpose	Sumber Dana Source of Fund	Mata Uang Currency	Mitigasi Risiko Mata Uang Asing Foreign Currency Risk Mitigation
PT Kertas Leces (Persero)	Permintaan kepada kepada Tim Kurator agar dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan eksekusi pembagian jaminan dari Kertas Leces	Struktur permodalan Perusahaan	Rupiah	-
	Request to the Curator Team to implement the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the execution of the distribution of guarantees from Kertas Leces	The Company's Capital Structure		
PT Barata Indonesia (Persero)	Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pembiayaan Talangan Proyek, dan Modal Kerja dengan PT Barata Indonesia dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp295.000 juta dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2022.	Struktur permodalan Perusahaan	Rupiah	-
	The Company provides Loan Facilities in the form of Project Bailout Financing, and Working Capital with PT Barata Indonesia with a maximum principal of Rp295,000 million with an interest rate of 15% per annum. Mature on August 11, 2022.	The Company's Capital Structure		
Perum Perumnas	Tujuan perpanjangan Jatuh Tempo pinjaman Perumnas kepada Perseroan sampai dengan 21 April 2022.	Struktur permodalan Perusahaan	Rupiah	-
	To extend the Maturity date of Perumnas loan to the Company until April 21, 2022.	The Company's Capital Structure		
PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survai Udara Panas (Persero)	Untuk mendukung proses pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung serta penerimaan pinjaman baru dari Bank BTN, Perusahaan memberikan 2 (dua) fasilitas pinjaman baru kepada PT Panas	Struktur permodalan Perusahaan	Rupiah	-
	To support the process of establishing the Tourism and Supporting BUMN Holding and receiving new loans from Bank BTN, the Company provided 2 (two) new loan facilities to PT Panas	The Company's Capital Structure		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Badan Pengelola Keuangan Haji	kerja sama dalam rangka pengelolaan aset tagihan milik PT BMI ("Tagihan BMI")	Struktur permodalan Perusahaan	Rupiah	-
	cooperation to manage receivable assets of PT BMI (BMI Receivables)	The Company's Capital Structure		

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan dengan Perusahaan Party which has Commitment with the Company	Tujuan Ikatan Commitment Purpose	Sumber Dana Source of Fund	Mata Uang Currency	Mitigasi Risiko Mata Uang Asing Foreign Currency Risk Mitigation
PT AMC Indonesia Sukses	Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tagihan BMI yang dialihkan kepada PT AMC ("Aset yang Dikelola"). To optimize the management of BMI receivables that have been transferred to PT AMC ("Managed Assets").	Struktur permodalan Perusahaan The Company's Capital Structure	Rupiah	-

SALDO AKHIR ASET TETAP

THE ENDING BALANCE OF FIXED ASSETS

Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	Tujuan Purposes	Nilai (Rp Juta) Amount (Rp-million)
Tanah Land	Pendukung Operasional Perusahaan Support the Company's Operations	380.120
Bangunan Building	Pendukung Operasional Perusahaan Support the Company's Operations	137.645
Kendaraan Bermotor Motorized Vehicle	Pendukung Operasional Perusahaan Support the Company's Operations	9.131
Peralatan Proyek Project Equipment	Pendukung Operasional Perusahaan Support the Company's Operations	181.425
Peralatan Kantor Office Equipment	Pendukung Operasional Perusahaan Support the Company's Operations	27.377
Prasarana Umum Public Infrastructure	Pendukung Operasional Perusahaan Support the Company's Operations	2.214
Aset dalam Penyelesaian Assets in Construction	Pendukung Operasional Perusahaan Support the Company's Operations	7.605
Jumlah Total		745.517

Saldo akhir aset tetap yang merupakan akumulasi sejak Perusahaan berdiri hingga tahun 2021 sebesar Rp745,517 juta yang seluruhnya digunakan untuk mendukung operasional Perusahaan. Perbandingan Saldo akhir aset tetap dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The accumulated ending balance of fixed assets since the Company was founded until 2021 is Rp745.517 million, which is entirely used to support the Company's operations. The table below lists the comparison of the Company's ending balance of fixed assets compared to the previous year.

	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Saldo Akhir Aset Tetap The Ending Balance of Fixed Assets	745,517	1.883.907	(1.138.390)	(60,43) ↓

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERUSAHAAN

Risiko nilai tukar mata uang asing terjadi apabila Perusahaan memiliki posisi mata uang asing yang timbul dari transaksi. Mitigasi risiko atas posisi mata uang asing ini, antara lain melalui penetapan kebijakan *natural hedging*, yaitu pemberian pembiayaan dalam mata uang asing menggunakan sumber dana dalam mata uang asing juga.

THE IMPACT OF FOREIGN CURRENCY FOR COMPANY PERFORMANCE

Foreign exchange rate risk occurs when the Company has a foreign currency position arising from transactions in foreign currencies with debtors. This risk is mitigated mainly by establishing a natural hedging policy, namely the provision of financing in foreign currencies using sources of funds denominated in foreign currencies.

Berikut disampaikan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat pada denominasi aset dan liabilitas Perusahaan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The following describes the sensitivity to changes in the exchange rate of the US Dollar currency denominated in the Company's assets and liabilities, with all other variables held constant as of December 31, 2021, and 2020.

	Kenaikan (Penurunan) dalam Mata Uang Asing dalam Basis Poin Increase (Decrease) in Foreign Currency in Point Basis	Dampak terhadap Laba Sebelum Pajak Impact on Profit Before Tax
31 Desember 2021 December 31, 2021	+100	16.023.990
	-100	(16.023.990)
31 Desember 2020 December 31, 2020	+100	25.977.514
	-100	(25.977.514)

Berikut ini disampaikan instrumen keuangan Perusahaan dalam mata uang asing.

The following table gives the Company's financial instruments in foreign currencies.

	2021		2020	
	Nilai Penuh Full Amount	Setara Rupiah Rupiah Equivalent	Nilai Penuh Full Amount	Setara Rupiah Equivalent Rupiah
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	160.240	2.286.463.934	259.775	3.664.128.350
Aset Keuangan Financial Asset	160.240	2.286.463.934	259.775	3.664.128.350

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN

Pada segmen Konstruksi yang dikembangkan entitas anak, PT Nindya Karya, proyek-proyek yang dibangun oleh PT NK memiliki bahan baku material dengan harga yang berfluktuatif; baik disebabkan oleh ketersediaan stok barang, maupun situasi dan kondisi ekonomi politik yang berpengaruh terhadap stabilitas rantai pasokan bisnis di sektor konstruksi.

THE IMPACT OF PRICE CHANGES FOR THE COMPANY'S INCOME AND PERFORMANCE

In the Construction Services business segment developed by a subsidiary, PT Nindya Karya, projects built by PT NK have raw materials with fluctuating prices, both due to the availability of stocks, as well as the situation and political-economic conditions that affect the stability of the business supply chain in the construction sector.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2021

Asumsi yang Mendasari Penentuan Target Tahun 2021

Rencana kerja dan target kinerja PPA tahun 2021 tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Rincian asumsi yang digunakan dalam RKAP Tahun 2021, antara lain:

1. Dimungkinkan adanya program-program baru dalam rangka melakukan investasi atau kegiatan bisnis lainnya untuk dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketersediaan dana dan strategi investasi.
2. RKAP 2021 ini telah memperhitungkan adanya program-program baru diantaranya perubahan skema pembiayaan (*program special situation fund*) dalam rangka melakukan perubahan *business model* dan program lainnya.

2021 TARGET ACHIEVEMENT

Assumptions Underlying the Determination of 2021 Target

PPA's work plan and performance targets for 2021 are contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

Elaborated below are details of the assumptions used in the 2021 RKAP:

1. The Company will make all possible efforts to run new programs in the context of investing or running other lines of business with due regards to fund availability and consistent with investment strategy.
2. This 2021 RKAP has been made after the existence of new programs including changes to the financing scheme (*special situation fund program*) to make changes to the business model and other programs were rigorously made.

3. Apabila dalam pelaksanaan program kerja atau kegiatan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan program kegiatan tidak dapat berjalan maka program kegiatan tersebut dapat digantikan dengan program kegiatan lain berikut alokasi dananya.
4. Rencana penggunaan dana PMN yang belum terealisasi termasuk perubahan jumlah Alokasi Dana PMN dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi ("RR") BUMN akan dilakukan sesuai persetujuan Kementerian BUMN/Kementerian Keuangan atas kajian yang telah disampaikan oleh PT PPA, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Dana PMN yang tersedia dan belum digunakan atau disalurkan akan dioptimalkan sehingga dapat memberikan pendapatan bagi Perusahaan.
3. Should there be some factors that may keep it from running its already planned work programs or activities, the Company will have them immediately replaced with other activity programs along with their fund allocation.
4. The plan to use PMN funds that have not been realized, including changes in the amount of PMN Fund Allocation for SOE restructuring and/or revitalization ("RR") will be realized in accordance with the approval of the Ministry of BUMN/Ministry of Finance on the study submitted by PT PPA, in accordance with the provisions and in compliance with all regulatory provisions.
5. PMN funds that are available and have not been used or distributed will be optimized to generate more income for the Company.

Selain itu, Perusahaan juga menggunakan asumsi eksternal dalam penyusunan RKAP, yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

The Company also uses external assumptions in the preparation of the RKAP, the details of which are presented in the table below:

Asumsi Eksternal External Assumptions	RKAP Tahun 2021 2021 RKAP
Pertumbuhan Ekonomi Nasional National Economic Growth	5,0%
Inflasi Inflation	3,0%
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Rupiah Exchange Rate against US Dollar	Rp14.600/USD
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Indonesian Crude Oil Price (ICP)	USD45 per barrel

Perbandingan Target dengan Realisasi

Realization Vs Target

Pencapaian Target Bisnis Tahun 2021 2021 Business Target Achievement

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Pendapatan Usaha per Entitas Revenues per Entity	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 (%) 2021 Realization Vs Target (%)
	1	2	(1:2)
PT PPA (Induk) PT PPA (Holding)	2.115.681	1.281.281	165
Entitas Anak Subsidiaries			
• PT Nindya Karya	4.415.364	5.377.790	82
• PT PPA Finance	77.254	134.137	58
• PT PPA Kapital	24.273	44.616	52

Berikut disampaikan penjelasan pencapaian realisasi dibanding target tahun 2021 untuk entitas anak:

- Pendapatan PT Nindya Karya yang hanya mencapai 82% dari RKAP 2021 yang disebabkan oleh perolehan proyek di bawah target,
- Pendapatan PPAF tercapai 58% dari RKAP dikarenakan penghentian pengakuan pendapatan atas debitur tidak produktif yang mencapai 60% dari total portfolio,

The following elaborates on the subsidiaries' realized achievement vs their 2021 targets:

- PT Nindya Karya's revenue which only reached 82% of its 2021 RKAP caused by the project's acquisition to lower than the target,
- PPAF's income reached 58% of its RKAP due to the termination of revenue recognition for unproductive debtors which represented 60% of the total portfolio,

- Pendapatan PPAK tercapai 52% dari RKAP 2021 dikarenakan belum tercapainya target advisory serta realisasi penurunan nilai saham entitas investasinya.

- PPAK revenue reached 52% of its 2021 RKAP due to the failure to achieve the targets in advisory services and the realized decline in the value of the investment entity's shares.

Pencapaian Target Operasi Tahun 2021 Operational Target Achievement in 2021

Operasi Operations	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 (%) 2021 Realization Vs Target
	1	2	(1:2)
Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR Khusus (%) Government Assignment/Special Assignment/Special RR (%)	100,00 %	15	100,00
Jumlah layanan/produk baru Number of new services/products	5	15	6
Jumlah Perusahaan Diakuisisi/Dilepas Number of Companies Acquired/Released	2	10	1
Realisasi Program Pelatihan Karyawan Realized Employee Training Programs	100,00 %	5	100,00

Pencapaian Target Pemasaran Tahun 2021 2021 Marketing Target Achievement

	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 (%) 2021 Realization Vs Target (%)
	1	2	(1:2)
Pemasaran Jasa Konstruksi (Lelang dan Nilai Pekerjaan PT Nindya Karya) Marketing of Construction Services (Auction and Contract Value of PT Nindya Karya)			
Lelang Diikuti (Rp Juta) Auction Participated (Rp-million)	25.668.429	27.559.386	93
Lelang Dimenangkan (Rp Juta) Auction Won (Rp-million)	4.896.307	7.564.428	65
Tanpa Lelang/Penunjukan Langsung (Rp Juta) No Auction/Direct Appointment	604.719	182.178	332
% Lelang dimenangkan (%) % of Won Auction	19,08%	27,45%	
Nilai Pekerjaan Tersedia Contract Value Available	13.010.792	13.946.114	102
Sisa Pekerjaan Proyek Lama (Rp Juta) Remaining Old Projects (Rp-million)	7.509.767	6.199.508	121
Perolehan Proyek Baru (Rp Juta) New Projects Acquisition	5.501.025	7.746.606	71
Jumlah Nilai Pekerjaan Tersedia (Rp Juta) Total Contract Value Available	13.010.792	13.946.114	93

Realisasi jumlah tender yang diikuti tahun 2021 mencapai sebesar Rp25,67 triliun. Dari realisasi tender yang diikuti tahun 2021 sebesar Rp25,67 triliun, jumlah perolehan proyek baru tahun 2021 sebesar Rp5,50 triliun atau senilai 21,34%. Jumlah proyek baru sebesar Rp5,50 triliun terdiri atas lelang yang dimenangkan tahun 2021 sebesar Rp4,90 triliun dan tanpa lelang tahun 2021 sebesar Rp605 miliar.

The realized value of tenders participated in in 2021 reached Rp25.67 trillion. Of the realized tender participated in 2021, Rp5.50 trillion or 21.34% was obtained from new projects acquisition. The Rp5.50 trillion worth of new projects consisted of auctions won in 2021 with a total value of Rp4.90 trillion and direct assignments with a total value of Rp605 billion.

Realisasi nilai kontrak tersedia Tahun 2021 mencapai sebesar Rp13,01 triliun. Realisasi nilai kontrak tersedia pada Tahun 2021 sebesar Rp13,01 triliun terdiri dari sisa pekerjaan proyek lama yang diperoleh pada Tahun 2021 sebesar Rp7,51 miliar atau senilai 57,72% dan perolehan proyek baru pada Tahun 2021 sebesar Rp5,50 triliun atau senilai 42,28%.

The realized contract value available in 2021 reached Rp13.01 trillion. The Rp13.01 trillion worth of contract value consisted of the remaining work on old projects obtained in 2021 with a total value of Rp7.51 billion or 57.72%, and the acquisition of new projects in 2021 with a total value of Rp5.50 trillion or 42.28%.

Pencapaian Target Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 2021 Human Capital Management Target Achievement

	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 (%) 2021 Realization Vs Target (%)
	1	2	(1:2)
Jumlah Karyawan (orang) Headcount (person)	166	195	85,13
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp Miliar) Training and Education Expenses (Rp Billion)	1,26	8,02	15,71

Pencapaian Target Keuangan Tahun 2021: Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 2021 Financial Target Achievement: Consolidated Performance of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 (%) 2021 Realization Vs Target (%)
	1	2	(1:2)
Pendapatan Usaha Revenue	6.535.658	6.774.942	96,47
Beban Usaha Operating Expense	(6.368.336)	(6.374.913)	99,90
Laba Usaha Operating Income	167.322	400.029	41,83
Laba Sebelum Pajak Income before Tax	175.187	150.512	116,39
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Current Year	165.125	122.551	134,74
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Current Year	2.753.947	122.551	2.247,18

Secara umum, kinerja usaha Perusahaan seperti ditunjukkan melalui laba sangat baik. Pencapaian laba bersih 134,74% dari target yang telah ditetapkan.

In general as indicated by profitability, the Company's business performance was generally strong. As a result, net income accounted for 134.74% of the target.

Pencapaian Target Keuangan Tahun 2021: Kinerja Posisi Keuangan Konsolidasian 2021 Financial Target Achievement: Consolidated Performance of Financial Position

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 (%) 2021 Realization Vs Target (%)
	1	2	(1:2)
Aset Lancar Current Asset	7.820.946	10.821.760	72,27
Aset Tidak Lancar Non-Current Assett	9.841.555	11.018.032	89,92
Total Aset Total Asset	17.662.501	21.839.792	80,87
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liability	5.170.818	8.144.040	63,49
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liability	3.122.872	6.927.106	45,08
Total Liabilitas Total Liability	8.293.690	15.071.146	55,03
Total Ekuitas Total Equity	9.368.811	6.768.646	138,41

Pencapaian Rasio-rasio Tahun 2021 2020 Ratio Achievement

(%)

	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2021 (%) 2021 Realization Vs Target (%)
	1	2	(1:2)
Return on Asset Return on Asset	0,85	0,56	151,78
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	97,43	94,00	103,65
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Asset	53,04	31	171,10
Rasio Lancar Current Ratio	151,25	132,88	113,82
Rasio Kas Cash Ratio	50,81	11,69	434,64

Prospek Usaha dan Target Tahun 2022

Penyusunan prospek usaha dan RKAP Tahun 2022 mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Business Prospects and Targets for 2022

The Company prepared its 2022 business prospects and RKAP based on macroeconomic assumptions used in the preparation of the State Revenue and Budget for Fiscal Year 2022, listed below:

Asumsi Eksternal External Assumption	RKAP Tahun 2022 2022 RKAP
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth	5,0 – 5,5
Inflasi (%) Inflation	3,0
Suku Bunga SBN (%) SBN Interest Rate (%)	6,82
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Rupiah Exchange Rate (Rp/USD)	14.350
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel) Indonesian crude oil price (USD/barrel)	63
Lifting Minyak (barell per hari) Oil Lifting (barrels per day)	703.000
Lifting Gas (barell setara minyak per hari) Lifting Gas (barrels of oil equivalent per day)	1.036.000

Proyeksi Bisnis Tahun 2022

Business Project in 2022

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Pendapatan per Entitas Usaha Revenue per Entity	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection
PT PPA (Induk) PT PPA (Holding)	2.115.681	1.400.244
Entitas Anak Subsidiaries		
• PT Nindya Karya*	4.415.364	-
• PT PPA Finance	77.254	161.529
• PT PPA Kapital	24.273	99.066

* Per tahun 2022, PT Nindya Karya sudah dikembalikan kepada Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
As of 2022, PPH has returned PT Nindya Karya to the State pursuant to Government Regulation No. 6 of 2022 concerning the Reduction of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Proyeksi Operasi Tahun 2022

2022 Operational Target Achievement

Operasi Operation	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection
	1	2
Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR Khusus (%) Government Assignment/Special Assignment/Special RR (%)	100%	100%
Jumlah produk/layanan baru Number of new services/products	6	5
Jumlah Perusahaan Diakuisisi/Dilepas Number of Companies Acquired/Released	1	1
Realisasi Program Pelatihan Karyawan Realization of Employee Training Programs	100%	100%
Tingkat Kesehatan Perusahaan (Skor) Company Soundness Level (Score)	85,5	80

Proyeksi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Human Resource Management Projection in 2022

	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection	Perbandingan Proyeksi 2022 Terhadap Target 2021 2022 Projection Vs 2021 Target
	1	2	(1:2)
Jumlah Karyawan (orang) Headcount (employees)	166	195	85,13
Biaya Pelatihan dan Pendidikan (Rp Miliar) Training and Education Expense (Rp Billion)	1,26	8,02	15,71

Proyeksi laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2022

2022 Financial Projection: Consolidated Performance of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection
	1	2
Pendapatan Usaha Revenue	6.535.658	6.774.942
Beban Usaha Operating Expense	6.368.336	(6.374.913)
Laba Usaha Operating Income	167.322	400.029
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	7.865	87
Laba Sebelum Pajak Income before tax	175.187	150.512
Manfaat (Beban) Pajak - Bersih Tax Benefit (Expense) - Net	(10.062)	-
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	165.125	122.551
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expenses)	2.588.822	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	2.753.947	122.551

Proyeksi Posisi Keuangan Konsolidasian Tahun 2022

2022 Consolidated Performance Projection

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection
	1	2
Aset Lancar Current Asset	7.820.946	10.821.760
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	9.841.555	11.018.032
Total Aset Total Asset	17.662.501	21.839.792
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liability	5.170.818	8.144.040
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liability	3.122.872	6.927.106
Total Liabilitas Total Liability	8.293.690	15.071.146
Total Ekuitas Total Equity	9.368.811	6.768.646

Proyeksi Rasio-rasio Tahun 2022

2022 Ratio Projection

(%)

	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection
	1	2
Return on Asset Return on Asset	0,85	0,56
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	97,44	93,00
Yield on Investment (YOI) Yield on Investment (YOI)	26,00	4,00
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Asset	53,04	46,80
Rasio Lancar Current Ratio	88,23	188,40
Rasio Kas Cash Ratio	83,05	23,70

Proyeksi Dividen Tahun 2022

2022 Dividend Projection

	Realisasi 2021 2021 Realization	Proyeksi 2022 2022 Projection
Dividen Dividend	1.450.814	37.403

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara tanggal laporan akuntan 25 Februari 2022 hingga disahkannya laporan tahunan ini tanggal April 2022.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perusahaan memiliki saldo laba positif, dengan besaran paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana diputuskan oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan melaksanakan pembayaran dividen setiap tahun berdasarkan keputusan RUPS, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen. Pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang saham, jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) Perusahaan yang diatribusikan kepada Pemegang saham.

Pembagian Dividen Tahun 2021

Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2021, Pemegang Saham memutuskan tentang penggunaan laba Perusahaan untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut: menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perusahaan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2020 sebesar Rp105.341 juta seluruhnya sebagai laba ditahan.

Realisasi pembagian Dividen Saham tunai untuk hasil usaha tahun buku 2020 yang dibagikan di tahun 2021 serta untuk hasil usaha tahun buku 2019 yang dibagikan di tahun 2020 dan Dividen Saham adalah sebagai berikut:

THE MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

No material information and facts occurred between the date of the accountant's report on February 25, 2022, and the date of ratification of this annual report on April 2022.

DIVIDEND POLICY AND PAYMENT

Basis for Dividend Distribution Policy

Referring to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company must set aside a proportion of its net income each financial year for reserves on the condition that the Company has positive retained earnings, with a minimum amount of 20% of the total issued and paid-up capital. The use of net income includes determining the amount of provision for reserves as decided by the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). After deducting an allowance for reserves, all net income shall be distributed to shareholders as dividends unless otherwise specified in the GMS.

Based on the Company's Articles of Association, the Company pays dividends annually based on the resolutions of the GMS, in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 05/PMK.02/2013 concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenue from Dividends. The dividend shall be paid no later than 1 (one) month after the dividend is determined by the shareholders. The dividend amount determined is a certain percentage of the Company's net income (after-tax) attributable to shareholders.

Dividend Distribution in 2021

Based on the Annual GMS for the financial year 2020 held on June 3, 2021, Shareholders decided on the use of the Company's profit for the financial year 2020 as follows: determine the use of the Company's consolidated net income attributable to owners of the parent entity for the financial year 2020 of Rp105,341 million in total as retained earnings.

The following are the realized distribution of cash Stock Dividends for the 2020 financial year operating results distributed in 2021 as well as for the 2019 financial year operating results distributed in 2020 and Stock Dividends:

Dividen Saham Dividend	2021 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2020): (for Dividend of Fiscal Year 2020):	2020 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2019): (for Dividend of Fiscal Year 2019)
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp Juta) Cash Dividend Distributed (Rp Million)	Sesuai keputusan RUPS, PPA tidak membagikan dividen saham tunai di tahun 2021 Based on GMS Resolution, PPP did not distributed cash dividend in 2021.	Sesuai keputusan RUPS, PPA tidak membagikan dividen saham tunai di tahun 2020 Based on GMS Resolution, PPP did not distributed cash dividend in 2020.
Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividen per Shares (Rp/per saham)	-	-
Rasio Pembayaran Dividen Dividend Payment Ratio	-	-
Tanggal Pengumuman Date of Announcement	3 Juni 2021 June 30, 2021	29 Juni 2020 June 29, 2020
Tanggal Pembayaran Date of Payment	-	-

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA: PAJAK YANG DIBAYARKAN

Sebagai Perusahaan yang patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, Perusahaan telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Perusahaan kepada negara. Berikut rincian kewajiban Perusahaan terkait kewajiban perpajakan di tahun 2021.

(Rp Juta | Million)

Jenis Pajak Type of Tax	Jumlah Total
PPh Badan (Pasal 25 dan 29) Corporate Income Tax (Articles 25 and 29)	1.363
PPh Pasal 21-Karyawan Income Tax Article 21-Employees	27.813
PPh Pasal 21-Pihak Luar Income Tax Article 21-External Parties	2.518
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	4.718
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	15.355
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	754
PPh 26 Income Tax 26	194
PPh Pasal 4 (2) Income Tax Article 4 (2)	21.936
PPN VAT	108.989
Pajak Lain Other Taxes	325
Pajak Daerah Local Tax	-
Jumlah Pajak yang Dibayarkan Total Tax Paid	183.964

CONTRIBUTIONS TO THE COUNTRY: TAX PAID

As a company that complies with all applicable regulations, the Company has fulfilled its obligations in paying taxes which is a form of the Company's contribution to the country. The following details are the Company's obligations related to tax in 2021.

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP), dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employees Stock Option Program* (ESOP).

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, Seri B dan Seri C. Penerbitan obligasi ini telah sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020, di mana pemegang saham telah menyetujui penerbitan surat utang obligasi dengan nilai Rp1 triliun.

Pada tanggal 1 September 2020 Perusahaan telah menerima dana dari hasil penerbitan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seri A sebesar Rp100 miliar dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 1 September 2020, kupon 9,95% p.a;
2. Seri B sebesar Rp345 miliar dengan tenor 5 tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 1 September 2020, kupon 10,55% p.a;
3. Seri C sebesar Rp197,10 miliar dengan tenor 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 1 September 2020, kupon 11,00% p.a.

Berikut disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

(Rp Juta | Million)

No.	Uraian Penggunaan Description of use	Nilai Value
1	Pelunasan SBK Repayment of Commercial Paper (SBK)	100.000
2	Pembiayaan Penerbitan Obligasi & MTN Financing for the Issuance of Bonds & MTN	2.796
3	Pembiayaan Investasi Investment Financing	263.880
4	Pembiayaan Operasional Operational Financing	274.887
	Total	641.563

THE INFORMATION ON EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (ESOP/MSOP)

Until 2021, the Company has never executed a Management Stock Option Plan (MSOP) and an Employee Stock Option Program (ESOP).

INFORMATION ABOUT THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

On August 19, 2020, the Company issued PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2020 Bonds I, divided into 3 (three) series, i.e., Series A, Series B, and Series C. The issuance of these bonds is in accordance with the resolution of Extraordinary GMS on January 22, 2020, concerning the Ratification of the Company's 2020 Work Plan & Budget (RKAP), in which shareholders have approved the issuance of bonds with a value of Rp1 trillion.

On September 1, 2020, the Company received funds as the proceeds from the issuance of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2020 Bonds I amounting to Rp642.10 billion consisting of 3 (three) series with the following provisions:

1. Series A amounting to Rp100 billion with a tenor of 3 years from the date of issuance, i.e. September 1, 2020, coupon 9.95% p.a;
2. Series B amounting to Rp345 billion with a tenor of 5 years from the date of issuance, i.e. September 1, 2020, coupon 10.55% p.a;
3. Series C amounting to Rp197.10 billion with a tenor of 7 (seven) years from the date of issuance, i.e. September 1, 2020, coupon 11.00% p.a.

The following conveys the realization of the use of proceeds from the issuance of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Berikut disampaikan informasi material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/Modal yang terjadi di tahun 2020, khususnya yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Informasi Material Mengenai Investasi

Target Investasi sebagaimana tercantum pada RKAP 2021 adalah sebanyak 5 (lima) proyek. Sampai dengan 31 Desember 2021, PT PPA (Persero) telah merealisasikan 6 (enam) proyek yaitu:

1. PT Widodo Makmur Perkasa
2. PT Indah Karya (Persero)
3. PT Barata Indonesia (Persero)
4. PT Semen Indonesia (Persero)
5. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
6. PT Bank Muamalat Tbk

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Tidak terdapat informasi material mengenai ekspansi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2021.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Tidak terdapat informasi material mengenai divestasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2021.

Informasi Material Mengenai Penggabungan Usaha

Tidak terdapat informasi material mengenai divestasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2021.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Pada Januari 2021, Perusahaan memperoleh 90% saham PT Pratama Persada Airborne sebagai pelunasan kewajiban PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survai Udara Penas (Persero).

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Tidak terdapat informasi material mengenai restrukturisasi utang/modal yang dilakukan Perusahaan di tahun 2021.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Informasi Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, transaksi 376 kepentingan afiliasi. Transaksi

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

The following is material information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/ Capital Restructuring that occurred in 2021, specifically the ones that affect the company's financial performance.

Material Information About Investment

The investment target as stated in the 2021 RKAP is 5 (five) projects. As of December 31, 2021, PT PPA (Persero) had realized 6 (six) projects, namely:

1. PT Widodo Makmur Perkasa
2. PT Indah Karya (Persero)
3. PT Barata Indonesia (Persero)
4. PT Semen Indonesia (Persero)
5. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
6. PT Bank Muamalat Tbk

Material Information Regarding Expansion

There was no material information regarding the expansion carried out by the Company in 2021.

Material Information Regarding Divestment

There was no material information regarding the divestment carried out by the Company in 2021.

Material Information Regarding Business Merger

There was no material information regarding the divestment carried out by the Company in 2021.

Material Information Regarding Acquisition

In January 2021, the Company acquired 90% shares of PT Pratama Persada Airborne as a settlement of the obligations of PT Aviati Wisata Indonesia (Persero), formerly PT Survai Air Penas (Persero).

Material Information Regarding Debt/Capital Restructuring

There was no material information regarding the debt/ capital restructuring carried out by the Company in 2021.

INFORMATION ON AFFILIATED TRANSACTIONS, TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES, AND TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST

Affiliate Transaction Information

Based on the provisions of POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, 376 transactions of affiliated interests.

dengan pihak-pihak terafiliasi memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan berdampak pada integritas pasar. Pihak Terafiliasi Perusahaan dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, serta dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi di Perusahaan. selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi Afiliasi dilakukan dengan metode, proses dan/atau cara sedemikian rupa sehingga Perusahaan atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada/dari Pihak Terafiliasi Perusahaan yang membuat transaksi afiliasi terlihat dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar.

Ketentuan Pihak Berelasi

Pemenuhan kebijakan terkait transaksi pihak berafiliasi/berelasi dan transaksi benturan kepentingan mengacu kepada Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Selain itu, mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam Laporan Keuangan tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Perusahaan mendefinisikan Pihak-pihak Berelasi sebagai orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan Perusahaan, yaitu pihak yang:

1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
2. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan;
3. Merupakan personel manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- a. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika

Transactions with affiliated parties carry the potential risk of misuse by related parties that can harm minority shareholders and impact market integrity. The Company's Affiliated Parties shall refrain from using the Company for their own, their families, and/or other parties' interests that may harm or reduce the Company's profits and from taking and/or receiving personal benefits in the Company other remuneration and other facilities determined based on the decision of the General Meeting of Shareholders. Affiliated Transactions are carried out with methods, processes, and/or means so that the Company or Controlled Company does not give/get special or preferential treatment to/from the Company's Affiliated Parties, so affiliate transactions are carried out based on normal and reasonable commercial terms.

Related Party Terms

The compliance of policies related to affiliated/related party transactions and conflict of interest transactions refers to OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding The Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 7 "Related Party Disclosures" in the 2020 Financial Statements, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners.

The Company defines Related Parties as people or immediate family members who have a relationship with the Company if they:

1. Has joint control or control over the Company;
2. Has significant influence over the Company;
3. Is a key management personnel of the Company or the parent entity of the Company.

A party is considered to be related to the Company if:

- a. The entity and the Company are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary, and subsequent subsidiary are related to each other);
- b. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);
- c. The two entities are joint ventures of the same third party;
- d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits from the Company or an entity that is related to the Company. If the Company is an

Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;

- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

entity that carries out the program, the sponsoring entity is also related to the Company;

- f. Entities that are controlled or jointly controlled by people identified in letter (a); or
- g. The person identified in letter (a) (i) has significant influence over the entity or is an entity's key management personnel (or the parent entity of the entity); or
- h. The entity, or a member of a group in which the entity is part of the group, provides the services of key management personnel to the reporting entity or to the parent entity of the Company.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to the government, government agencies, and similar bodies, whether local, national, or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entities may be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or the Regional Government, which is a Shareholder of the entity, or entities controlled by the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the Shareholder's proxy.

Nama Pihak Berelasi yang Melakukan Transaksi, Sifat Hubungan Berelasi dan Tujuan Transaksi

Berikut tabel yang menginformasikan nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan dan sifat transaksi yang dilakukan.

Names of Related Parties Conducting Transactions, the Nature of Related Relations, and Purpose of Transactions

The following table informs the name of parties conducting the transaction, the nature of relationship, and the nature of transaction.

Pihak yang Transaksi Transacting Party	Hubungan Relationship	Sifat/Tujuan Transaksi Nature of Transaction
JV Nindya-Sarana	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya-Sejahtera	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya - Adhi Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha Investment in Joint Venture, Account Receivables
JV Nindya - Abel	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Adhi - Basuki	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Adhi - Penta	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture

Pihak yang Transaksi Transacting Party	Hubungan Relationship	Sifat/Tujuan Transaksi Nature of Transaction
JV Nindya - Andesmont	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Bahagia Bangunnusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Bangun Bejana Baja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Bina Nusa Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Bumi Agung	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya - Bumi Agung Annusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Bumi Karsa	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya - Bunga Raya Lestari	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Cipuga	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Citra - Kharisma	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha Investment in Joint Venture, Account Receivables
JV Nindya - Damai	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Dewa Ruci	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Retensi Retention Receivables
JV Nindya - Gerbang Saranabaja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Utama Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha Investment in Joint Venture, Account Receivables
JV Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Inti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Jaya Konstruksi	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya - Karya Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture

Pihak yang Transaksi Transacting Party	Hubungan Relationship	Sifat/Tujuan Transaksi Nature of Transaction
JV Nindya - Kencana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - MCC - Wika - Waskita	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha Investment in Joint Venture, Account Receivables
JV Nindya - Mettana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Modern Widya Tehnical	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Modern WT	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Passokkorang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - PDKA	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - PP	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha Investment in Joint Venture, Account Receivables
JV Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha Investment in Joint Venture, Account Receivables
JV Nindya - Rudy Jaya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Sacna	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha Investment in Joint Venture, Account Receivables
JV Nindya - Sarana	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya - Surya	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
JV Nindya - Surya Mataram Sakti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Tamiang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Waskita Jaya Purnama	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture

Pihak yang Transaksi Transacting Party	Hubungan Relationship	Sifat/Tujuan Transaksi Nature of Transaction
JV Nindya - Wijaya - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture
JV Nindya - Wijaya Karya (Persero)	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Association Entity and Joint Venture	Investasi pada Ventura Bersama, Penagihan atas Jasa Konstruksi Investment in Joint Venture, Billing for Construction Services
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Dikendalikan oleh PT Jasa Marta (Persero) Tbk Controlled by PT Jasa Marta (Persero) Tbk	Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long-term Investment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro, Uang Muka Jangka Pendek Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans, Current Account Placements, Short Term Advances
PT Bank Bukopin Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans, Current Account Placements
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans, Current Account Placements
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans, Current Account Placements
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro Cash and Cash Equivalents, Bank and Financial Institution Loans, Current Account Placements
Perum LPPNPI (Ainav Indonesia)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
Perum Perumnas	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Billing for Services
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services

Pihak yang Transaksi Transacting Party	Hubungan Relationship	Sifat/Tujuan Transaksi Nature of Transaction
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pertamina Geothermal Energy	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT PTPN IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Waskita Beton Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Billing for Construction Services
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro Current Account Placement
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non-Bank Current Account Placement, Bank and Non-Bank Loans
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Bank dan Non Bank, Penagihan atas Jasa Konstruksi Bank and Non-Bank Loans, Billing for Construction Services
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi Receivable Retention, Billing for Construction Services
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi Receivable Retention, Billing for Construction Services
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi Retention Receivables, Gross amount from customers, Billing for Construction Services
PT PLN (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Penagihan atas Jasa Konstruksi Retention Receivables, Gross Amount From Customers, Billing for Construction Services
Perum Perumnas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Retensi Retention Receivables

Pihak yang Transaksi Transacting Party	Hubungan Relationship	Sifat/Tujuan Transaksi Nature of Transaction
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Retensi Retention Receivables
PTPP Presisi	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Retensi Retention Receivables
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT Hakaaston	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT Utama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT Survai Udara Panas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT Yodya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT Bukit Asam Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Billing for Construction Services
PT Utama Karya Infrastruktur	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Retention Receivable, Billing for Construction Services
PT Krakatau Engineering & Construction	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Retention Receivable, Billing for Construction Services
PT Magnesium Gosari Internasional	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Piutang Retensi Accounts Receivable, Retention Receivable
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Gross Amount From Customers, Billing for Construction Services
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi Accounts Receivable, Gross Amount From Customers, Billing for Construction Services
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jangka Pendek Accounts Receivable, Gross Amount From Customers, Short Term Advances
PT PP Presisi	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Accounts Receivable, Gross Amount From Customers

Pihak yang Transaksi Transacting Party	Hubungan Relationship	Sifat/Tujuan Transaksi Nature of Transaction
PT Adhi Persada Gedung	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
PT Perkebunan Nusantara IV	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
PT Telekomunikasi Selular	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
PT Telkom	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Account Receivables
PT Pertamina Bina Medika IHC	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi Gross Billiing, Billing for Construction Services
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Uang Muka Jangka Pendek, Penagihan atas Jasa Konstruksi Short Term Advances, Billing for Construction Services
PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah RI Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Duta Mentari Raya	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Bondi Syad Mulia	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT MagnesiumGosari International	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT National Utility Helicopters	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Rejeki IntilogamJaya	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Matoa Kidung Samudera	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Matoa Kidung Bahtera	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT Pratama Persada Airbone	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan
PT SIPPA Kemasan Internasional	Entitas Investasi Perseroan The Company's Investment Entity	Pinjaman Investasi Investment Loan

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Explanation on Fairness of Transactions

The fairness of all transactions conducted by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements. It is in accordance with the PSAK 7 standard on "Disclosure of Related Parties." All transactions with related parties are carried out at regular prices, terms, and conditions as those done with third parties and disclosed in the Company's consolidated financial statements.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

Reasons for Transaction

Similar to transactions with third parties, the Company's transactions with Related Parties are carried out in line with the needs of the Company's operational and business development, as well as the principle of reciprocal business between the Company and Related Parties.

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Aset

Realization of Balance of Related Parties in Assets

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Saldo Pihak Berelasi dalam Aset	2021	2020	Persentase dari Aset Persentase dari Aset		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2021	2020	Nominal Nominal	Persentase Percentage
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	1.294.783	711.077	7,33%	5,58%	583.706	82,09%
Piutang Usaha Account Receivables	224.824	543.091	1,27%	3,98%	(318.267)	(58,60)%
Piutang Retensi Retention Receivables	46.328	42.186	0,26%	0,33%	4.142	9,8%
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Loan Receivables - Bailout Funds	252.304	340.087	1,43%	2,62%	(278.382)	(81,86)%
Tagihan Bruto Gross Amount Due from Customers	620.724	530.686	3,51%	4,10%	59.861	11,28%
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Loan Receivables - Restructuring and/or Revitalization	402.763	536.683	2,28%	4,14%	(133.920)	(24,95)%
Total Aset dari Pihak-pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	2.841.726	2.687.862	16,09 %	20,74%	153.864	5,72%
Total Aset Total Asset	17.662.501	12.954.443	100,00%	100,00%	4.708.058	36,34%

Sebagian besar saldo aset Perusahaan yang didapatkan dari pihak berelasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 utamanya pada Kas dan Setara Kas.

Most of the Company's assets obtained from related parties experienced a decrease, including Loan Receivables – Bailout Funds and Loan Receivables – Restructuring and/or Revitalization.

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Liabilitas

Realization of Balances and Transactions with Related Parties on Liabilities

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

(Rp Million, unless otherwise stated)

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balance of Related Parties in Liabilities	2021	2020	Persentase dari Liabilitas Percentage of Liabilities		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2021	2020	Nominal Nominal	Persentase Percentage
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)
Utang Usaha Account Receivables	46.010	18.264	0,26%	0,14%	27.746	151,91%
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Bank and Financial Institution Loans	2.221.693	2.947.238	12,58%	23,82%	(725.545)	(24,62)%
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek Short-term Advances from Customers	21.495	13.588	0,12%	0,10%	7.907	58,19%
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang Long-term Advances from Customers	10.943	23.300	0,06%	0,18%	(12.357)	(53,03)%
Total Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi Total Liabilities from Related Parties	2.300.141	3.142.215	27,73%	33,79%	(842.074)	(26,80)%
Total Liabilitas Total Liabilities	8.293.690	9.296.339			(1.002.649)	(10,76)%

Sebagian besar saldo Liabilitas Perusahaan yang didapatkan dari pihak berelasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 utamanya pada Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

Most of the Company's Liability balances obtained from related parties in 2021 decreased compared to 2020, mainly in Bank and Financial Institution Loans.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi pada Pendapatan Usaha

Realization of Transactions of Related Parties in Revenues

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

(Rp Million, unless otherwise stated)

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha Transactions of Related Parties in Revenues	2021	2020	Persentase dari Pendapatan Usaha Percentage of Revenue		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			2021	2020	Nominal Nominal	Persentase Percentage
	(1)	(2)			(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan Usaha dari Pihak Berelasi Sales from Related Parties	117.443	184.829	0,66%	4,20%	(67.386)	(36,46)%
Total Pendapatan Usaha dari Pihak-pihak Berelasi Total Revenues from Related Parties	117.443	184.829	0,66%	4,20%	(67.386)	(36,46)%
Total Pendapatan Usaha Total Revenues	6.535.658	4.397.844			2.137.814	48,61%

Sebagian besar saldo Pendapatan Usaha Perusahaan yang didapatkan dari pihak berelasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.

Most of the balances of the Company's revenues generated from related parties in 2021 decreased compared to 2020.

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme review Perusahaan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, di mana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku umum, yang antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*)

Rujukan Informasi Transaksi dengan Pihak Berelasi pada Laporan Keuangan

Informasi tentang transaksi dengan pihak berelasi diuraikan juga pada Laporan Keuangan halaman 218 sampai dengan 223 yang telah diaudit dan terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Pada awal tahun 2021, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa penyebaran COVID-19 pada awal tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai puncak pertama. Bahkan penambahan kasus minggu pertama tahun 2021 mencapai 52.694 kasus positif.

Kondisi darurat ini bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi COVID-19, menyebabkan penurunan perekonomian nasional di awal tahun 2021, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2021 disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan

Company Policy on Transaction Review Mechanism

The Company's review mechanism for transactions with Related Parties is carried out through an audit process, especially an audit that has been carried out by a public accountant and published, where this mechanism is contained in PSAK 7 concerning "Disclosure of Related Parties."

Compliance with Regulations and Related Terms

Compliance with relevant regulations and provisions, namely OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, is carried out through the disclosure of PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures" in the 2020 Company's financial statements audited by Amir Abadi Jusuf Public Accounting Firm, Aryanto, Mawar & Partners.

Statement of the Board of Directors that the Transaction has complied with Adequate Procedures and is in Accordance with Generally Accepted Business Practices

The role of the Board of Commissioners and the Audit Committee is to Ensure Transactions are Made in accordance with Generally Accepted Business Practices, which among other things are carried out by complying with the arms-length principle.

Reference Information on Transactions with Related Parties in Financial Statements

The information on transactions with related parties is also described in the Financial Statements, which have been audited and presented on pages 218 to 223 of the Annual Report.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

In early 2021, the spokesman for the COVID-19 Task Force, Wiku Adisasmito, said that the spread of COVID-19 in early 2021 surged significantly and reached its first peak. There was even an increase in cases in the first week of 2021, reaching 52,694 positive cases.

This emergency and the hostile global economic landscape that ensued due to the COVID-19 pandemic led to a decline in the nation's economy in early 2021, as marked by, e.g., a weaker Rupiah exchange rate and a decline in securities prices in the capital market.

The 2021 financial statements and annual reports are prepared with the assumption that the Company has the ability to maintain its business continuity. The Management

usahanya. Manajemen berpendapat bahwa rencana – rencana sebagaimana tertuang dalam RKAP 2021 secara efektif dapat dilaksanakan dan Perusahaan tetap beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai di masa mendatang.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perusahaan di sepanjang tahun 2021.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perusahaan melakukan amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Alasan Perubahan

Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi tersebut merupakan bagian dari wujud kepatuhan Perusahaan terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Karena itu, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, yang meliputi:

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK");
- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI); serta

believes that the plans stated in the 2021 RKAP can be effectively implemented. Therefore, the Company will continue to operate according to the business sustainability principle for the foreseeable future.

REGULATORY CHANGES THAT AFFECTED THE COMPANY

There were no changes to laws and regulations that affected the Company throughout 2021.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Information on Changes in Accounting Policies

The Company made amendments and adjustments to the financial accounting standards (SAK) for the financial year effective January 1, 2021 onward, namely:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combination on Definition of Business;
- Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment to PSAK 60, Amendment to PSAK 62 and Amendment to PSAK 73 concerning Reform of Interest Rate Reference – Phase 2;
- PSAK 110 (Adjustment 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Adjustment 2020): Wa'd Accounting;
- PSAK 112: Waqf Accounting;
- PSAK 1 (Annual Adjustment 2021): Presentation of Financial Statements;
- PSAK 13 (Annual Adjustment 2021): Investment Property;
- PSAK 48 (Annual Adjustment 2021): Impairment of Asset Value;
- PSAK 66 (Annual Adjustment 2021): Joint Arrangements; and
- ISAK 16 (Annual Adjustment 2021): Service Concession Agreement.

The implementation and these standards do not significantly impact the amounts reported in the current period or the previous year.

Reason for Change

The adjustment to the accounting policy is part of the Company's compliance with the implementation of Financial Accounting Standards (SAK). Therefore, the Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with SAK in Indonesia, which include:

- Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK");
- Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants (FASB – IAI); and

- Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

- Applicable Capital Market Regulations, including Regulation of the Financial Services Authority/Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 on guidelines for presenting financial statements, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep- 347/BL/2012 on the presentation and disclosure of the financial statements of issuers or public companies.

Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan. Baik untuk laporan tahun buku 2021 maupun tahun sebelumnya.

The Impacts on Financial Statements

The adjustment to the accounting policy did not significantly impact the Company's financial statements in both the 2021 and the previous financial years.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Dalam melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan, PPA mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, di mana Tingkat Kesehatan Perusahaan diukur melalui beberapa indikator, yakni aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Berikut disampaikan Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 dibandingkan target RKAP 2020.

COMPANY SOUNDNESS LEVEL

In measuring the Company's Soundness Index, PPA refers to the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002, concerning the Soundness Level Assessment of State-Owned Enterprises, where the Company's Soundness Index is measured through several indicators, i.e., financial aspect, operational aspect, and administrative aspect. The following is the Company's Soundness Index for 2021, compared to the 2021 RKAP target.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020 The Company's Soundness Level in 2020

Indikator Indicator		RKAP 2021	Target Skor Target Score	Realisasi Realization	Skor Score
Aspek Keuangan Financial Aspect	1. Yield on Investment (YOI) Yield on Investment (YOI)	4,0%	7	26,00%	10
	2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	94,10%	2	97,40%	2
	3. Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Asset	30,99%	10	53,00%	8,5
	4. Rasio Lancar (Current Ratio) Current Ratio	132,90%	5	151,30%	5
	5. Rasio Kas Cash Ratio	11,30%	2	56,20%	5
Aspek Operasional Operational Aspect	1. Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR Government Assignment/Special Assignment/Special RR	100,00%	15	100,00%	15
	2. Number of new services/products Number of new services/products	5	15	6	15
	3. Jumlah Perusahaan diakuisisi/Dilepas Number of Companies Acquired/Released	2 Perusahaan 2 Companies	10	1	5
	4. Realisasi Program Pelatihan Karyawan Realization of Employee Training Programs	100%	5	100,00%	5

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020 The Company's Soundness Level in 2020

Indikator Indicator		RKAP 2021	Target Skor Target Score	Realisasi Realization	Skor Score
Aspek Administrasi Administrative Aspect	1. Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan Submission of Yearly Calculation Report	Tepat waktu On Time	3	Tepat Waktu On Time	3
	2. Penyampaian Rancangan RKAP Submission of RKAP Draft	Tepat waktu On Time	3	Tepat Waktu On Time	3
	3. Penyampaian Laporan Periodik Submission of Periodic Report	Tepat waktu On Time	3	Tepat Waktu On Time	3
	4. Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan Effectiveness of Partnership Program Distribution	>90%	3	91,05%	3
	5. Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan Collectability of Partnership Program Fund	>70%	3	98,56%	3
Total			86		85,5

Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2021 mendapatkan jumlah skor sebesar 85,5 dari target 86, maka Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "AA".

The Company's Health Level for 2021 obtained a total score of 85.5 out of the target of 86. Hence the Company can be categorized as a "Healthy" SOE company with an "AA" classification.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Keberadaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai satu-satunya agen restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN semakin kokoh. Hingga tahun 2021, Perusahaan memiliki pengendalian atas 3 entitas anak dan berhasil membukukan kinerja positif. Pencapaian ini sangat bermakna karena pada tahun pelaporan, situasi dan kondisi perekonomian nasional penuh tantangan, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Kemampuan Perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang tak terlepas dari ketepatan dalam merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target tersebut, PT PPA berfokus pada kegiatan utama, yaitu restrukturisasi BUMN Titip Kelola, pengelolaan NPL, dan mengoptimalkan neraca dan sumber daya (melalui investasi existing maupun SSF, pengelolaan aset dan inisiatif lainnya).

Kegiatan pengelolaan aset yang dilakukan oleh PT PPA dapat diwujudkan melalui skema atau bentuk PT PPA menjadi National Asset Management Company ("NAMCO"). Untuk mewujudkan PT PPA menjadi NAMCO, PT PPA telah dan akan terus melakukan pendekatan dan kerja sama pengelolaan distressed asset yang berasal dari perbankan nasional. Hal ini sejalan dengan kapabilitas dan kompetensi yang secara spesifik menjadi keunggulan kompetitif PT PPA dibanding dengan pesaing. Pengelolaan *distressed asset* tersebut juga dapat dilakukan baik melalui skema investasi maupun *advisory*.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

The existence of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as the only agency for SOEs restructuring and/or revitalizing (R/R) is getting stronger. Until 2021, the Company controlled 3 subsidiaries and managed to record positive performance. This achievement is significant because, in the reporting year, the situation and conditions of the national economy were full of challenges, and even Indonesia's economic growth experienced a slowdown compared to the previous year.

The Company's ability to continue growing and developing cannot be separated from the accuracy in formulating and implementing several strategic policies to achieve the stated targets. To achieve the targets, PT PPA focuses on its main activities, namely creating value from managing SOE restructuring (restructuring of SOEs Entrusted and its NPL), managing banking NPLs, and optimizing balance sheets and resources (through existing and SSF investments, asset management other initiatives).

Asset management activities carried out by PT PPA can be realized through a scheme or form of PT PPA to become a National Asset Management Company ("NAMCO"). To realize PT PPA into NAMCO, PT PPA has and will continue to approach and cooperate in managing distressed assets from national banks. This is in line with its capabilities and competencies, which are explicitly PT PPA's competitive advantages compared to competitors. In addition, the management of distressed asset can also be carried out either through investment or advisory schemes.

Sebagai korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berkomitmen untuk mengimplementasikan semua kebijakan strategis yang telah disepakati tersebut. Tak hanya diimplementasikan pada aspek ekonomi, tapi juga diselaraskan dengan aspek lingkungan dan sosial. Komitmen untuk menciptakan keselarasan antar ketiga aspek merupakan spirit operasional dan membawa hasil dengan semakin kokohnya kinerja perusahaan.

Asesmen Manajemen

Perusahaan telah memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan kegiatan usaha yang dijalankan, seperti restrukturisasi dan revitalisasi korporasi atau aset bermasalah. Ke depan, aset produktif yang telah direstrukturisasi tersebut akan terus diperbesar.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kebutuhan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sejalan dengan bisnis Perusahaan menjadi sangat penting. Karakter SDM di PPA umumnya berbeda dengan perusahaan lain. SDM di Perusahaan harus memiliki pengetahuan lengkap. Dari sebagai penasihat (*advisor*) restrukturisasi dan revitalisasi, penyalur investasi (*lender*), sekaligus sebagai pemegang saham.

Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, Perusahaan mengakuisisi para talenta internal, mengingat PPA telah memiliki program pengembangan kompetensi SDM secara internal. Selain itu, PPA juga mengakuisisi talenta dari eksternal.

Dengan perkembangan Perusahaan seperti sekarang, baik dari sisi kinerja dan fokus bisnis yang lebih terarah, yaitu menjadi NAMCO, makin banyak talenta unggul di Perusahaan. Dengan demikian, ketersediaan talenta makin besar untuk mendukung bisnis Perusahaan.

Asumsi yang Digunakan dalam Melakukan Asesmen

Perusahaan menyadari bahwa keberadaan SDM yang unggul memiliki hubungan yang sangat kuat dalam rangka menjaga kesinambungan usaha Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menyiapkan program pengembangan kompetensi yang relevan. Kebijakan ini menjadi perhatian utama Perusahaan.

Dalam mendukung pengembangan talenta tersebut, Perusahaan lebih fokus pada model *on the job training*. Bukan sekadar proses belajar di kelas. Dengan demikian, SDM Perusahaan akan lebih cepat berkembang, karena memiliki pengalaman secara langsung, bukan sekadar teori.

Upaya ini akan terus dilakukan, sehingga Perusahaan memiliki kesinambungan usaha, sekaligus fondasi yang kuat untuk terus berkembang. Keberhasilan itu, tentunya ditopang oleh keberadaan SDM yang unggul.

As a sustainability-oriented corporation, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) is committed to implementing all the agreed strategic policies. Not only on the economic aspect but also harmonized with environmental and social aspects. The commitment to create harmony between the three aspects is the Company's operational spirit and has brought results with the stronger performance shown by the Company.

Management Assessment

The Company has built a long experience running its core business, such as restructuring and revitalizing corporations or non-performing assets. The Company's future plan is to enlarge the restructured productive assets.

To realize this plan, the Company must have excellent human resources (HR) in line with the Company's business. Our HR has uniquely distinct characters. Each one of them must have complete knowledge. From being an advisor on restructuring and revitalization, as an investment distributor (*lender*), and as a shareholder.

To meet this particular need, the Company acquires internal talents, considering that PPA already has an internal HR competency development program. In addition, PPA also acquires talent from external sources.

As its business progresses both in terms of performance and its more focused business by becoming NAMCO, the Company has increasingly more excellent talents. This has enlarged the Company's talent pool to support the Company's business.

Assumptions Used in Conducting the Assessment

The Company realizes that the existence of excellent HR is closely linked to the sustainability of its business. To that end, the Company prepares and runs relevant competency development programs. As a result, this policy has become the Company's primary concern in HR development.

In supporting the development of its talents, the Company focuses more on the job training model. Therefore, the learning process is beyond classroom lectures. In this way, the Company's HR will develop faster since they have a direct experience rather than only theory.

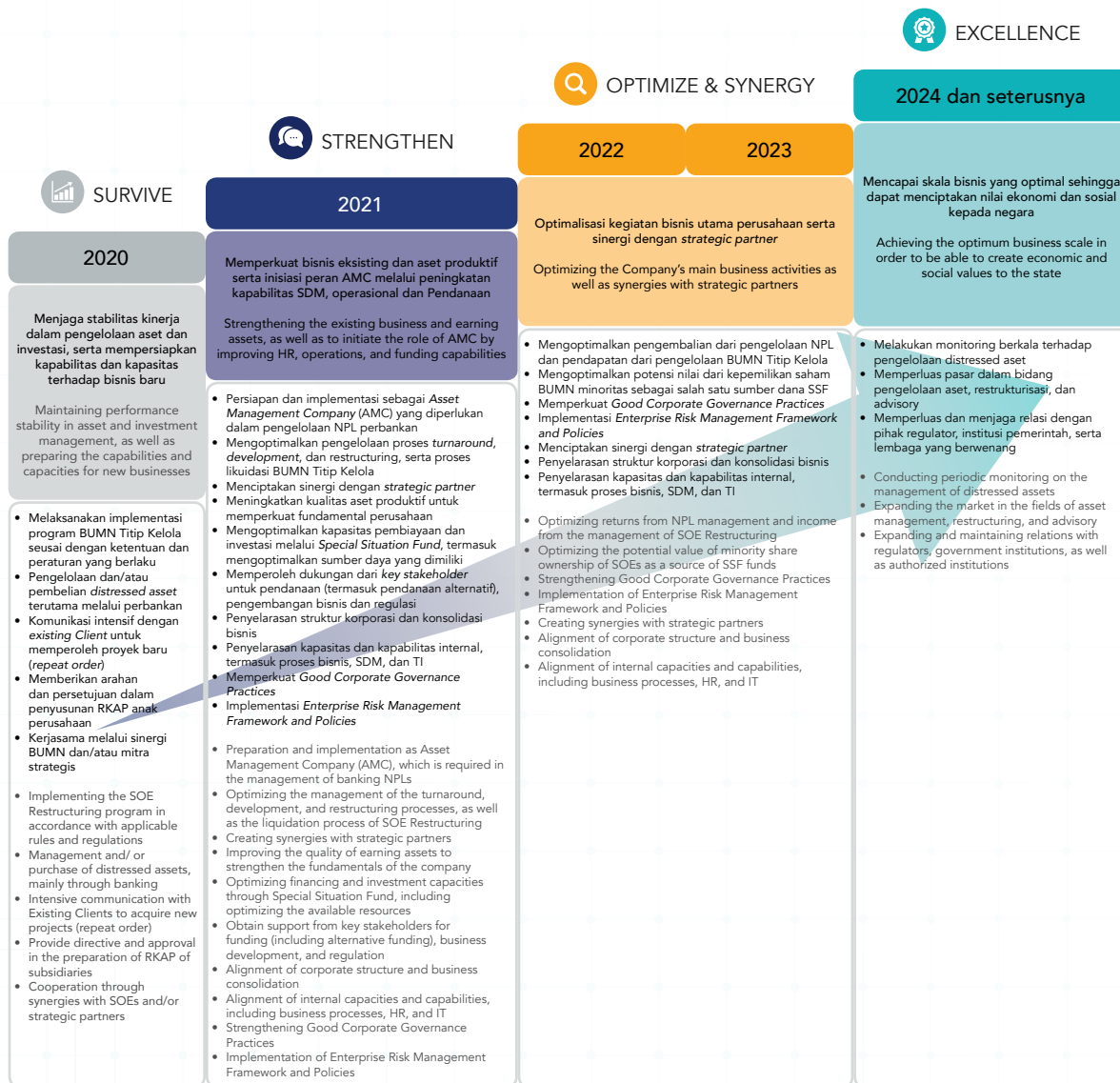
The Company will continue this effort to sustain the business and have a strong foundation on which it can continue to grow. That kind of success would be impossible to achieve without excellent human resources.

PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

Sesuai dengan RJPP Perusahaan Tahun 2020 – 2024, perusahaan telah Menyusun Peta Jalan dalam 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

BUSINESS ROAD MAP: LONG TERM DEVELOPMENT PLAN

In accordance with its 2020 – 2024 RJPP, the company has mapped out its a Roadmap for the next 5 years, as illustrated below:



Sumber: Analisis Manajemen
Source: Management Analysis

Pada tahun 2020, perusahaan fokus dalam menjaga stabilitas kinerja dalam pengelolaan aset dan investasi, serta mempersiapkan kapabilitas dan kapasitas terhadap bisnis baru.

Pada tahun 2021, yang menjadi fokus utama perusahaan adalah memperkuat bisnis eksisting dan aset produktif serta inisiasi peran *Asset Management Company* (AMC) melalui peningkatan kapabilitas SDM, operasional dan pendanaan, optimalisasi kapasitas pembiayaan dan investasi melalui *Special Situation Fund*, dukungan dari *key stakeholders*, serta optimalisasi pertumbuhan anorganik maupun organik baik di entitas induk maupun di perusahaan anak.

Tahap selanjutnya selama tahun 2022 hingga 2023 adalah optimalisasi kegiatan bisnis utama perusahaan serta sinergi dengan *strategic partner*. Inisiatif utama yang dilakukan berupa optimalisasi pengembalian dari pengelolaan NPL dan pendapatan dari pengelolaan BUMN Titip Kelola, serta potensi nilai dari kepemilikan saham BUMN minoritas. Pada tahap ini, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko juga perlu diperkuat melalui penguatan *Good Corporate Governance Practices* dan implelementasi *Enterprises Risk Management Framework and Policies*.

Dengan pemantapan internal perusahaan dan peningkatan daya saing perusahaan, tahun 2024 dan seterusnya perusahaan akan terus mencapai pertumbuhan yang *sustainable* sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi dan sosial kepada negara.

In 2020, the Company focused on maintaining stable performance in asset and investment management, as well as preparing capabilities and capacities for new businesses.

In 2021, the main focus of the Company was to strengthen existing business and productive assets while initiating the role of the *Asset Management Company* (AMC) through improvements in HR, operational and funding capabilities, financing and investment capacity optimization through the *Special Situation Fund*, securing support from *key stakeholders*, and the optimization of inorganic and organic growths in both the parent entity and subsidiaries.

The next stage in 2022 to 2023 will be to optimize the Company's core business activities and the synergies with strategic partners. The main initiatives will be to optimize returns from NPL management and income from the management of *Entrusted SOE* and optimize the potential value of share ownership in minority *SOE*. In addition, during this stage, corporate governance and risk management will be strengthened by strengthening *Good Corporate Governance Practices* and running the *Enterprises Risk Management Framework and Policies*.

With internal consolidation and by enhancing its competitive edges in 2024 and beyond, the Company will continue to achieve sustainable growth to create economic and social value for the country.

- 207 **Pencapaian Penerapan GCG PPA Tahun 2021**
Achievements of Application of GCG PPA Year 2021
- 209 **Komitmen Penerapan GCG secara Berkelanjutan**
Commitment to Sustainable GCG Implementation
- 211 **Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG**
Objectives and Benefits of GCG Implementation
- 213 **Standar Kualitas Implementasi GCG**
Standards of GCG Implementation Quality
- 216 **Sinergi Penerapan GCG di PPA Group (*Subsidiary Governance*)**
Synergy of GCG Implementation in PPA Group
- 223 **Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)**
Criteria of Assessment on Excellent Performance (KPKU)
- 228 **Struktur dan Mekanisme GCG**
GCG Structure and Mechanism
- 232 **Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham**
Shareholders and General Meeting of Shareholders
- 266 **Dewan Komisaris**
Board of Commissioners
- 279 **Komisaris Independen**
Independent Commissioner
- 281 **Direksi**
Board of Directors
- 291 **Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi**
Transparency of Information about The Board of Commissioners and Board of Directors
- 336 **Organ Pendukung Dewan Komisaris**
The Supporting Organs of Board of Commissioners
- 377 **Organ Pendukung Direksi**
The Supporting Organs of Board of Directors
- 409 **Audit Independen/Akuntan Publik**
The Supporting Organs of Board of Directors
- 424 **Tata Kelola Teknologi dan Informasi**
Technology And Information Governance
- 434 **Kode Etik**
Code of Ethics
- 438 **Pengendalian Gratifikasi**
Gratification Control
- 442 **Kebijakan Anti Korupsi**
Anti-Corruption Policy
- 443 **Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa**
The Policy of Goods and Services Procurement
- 444 **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**
State Official Wealth Report (LHKPN)
- 447 **Whistle Blowing System**
Whistle Blowing System
- 452 **Transparansi Praktik *Bad Governance***
Transparency of Bad Governance Practices

Tata Kelola Perusahaan

CORPORATE GOVERNANCE

05







Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA" atau "Perusahaan") memiliki komitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan organisasi Perusahaan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan GCG merupakan hal yang mutlak bagi PPA.

Upaya tersebut telah dijalankan secara berkesinambungan sejak PPA berdiri, yaitu pada tahun 2004. Penerapan GCG dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA" or the "Company") has a commitment to consistently, systematically and sustainably apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) within the Company's organization. As a State Owned Enterprise (SOE), the commitment to GCG implementation is an absolute must for PPA.

The effort has been sustainably applied since PPA's establishment in 2004. The principles of GCG are consistently and sustainably applied with the main objective to safeguard the interests of the Company, Shareholders, and other stakeholders.

Pencapaian Penerapan GCG PPA Tahun 2021

ACHIEVEMENTS OF APPLICATION OF GCG PPA YEAR 2021

Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan pada bulan Januari 2022 atas penerapan tata kelola di tahun buku 2021, PPA berhasil meraih skor 91,73 atau dengan predikat "Sangat Baik". Implementasi GCG PPA selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa GCG telah menyatu dalam budaya kerja Perusahaan serta menunjukkan komitmen seluruh Insan PPA dalam menerapkan GCG.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PPA juga mendapat apresiasi yang dari pemangku kepentingan, seperti ditunjukkan melalui penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), yaitu: Badan Publik "Cukup Informatif" untuk kategori Badan Usaha Milik Negara. Penghargaan tersebut disampaikan dalam ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang disampaikan secara virtual oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada 26 Oktober 2021.

Predikat "Cukup Informatif" yang diterima PPA berada pada posisi kedua dengan skor sebesar 77,37. Pencapaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 Perusahaan mendapatkan nilai 69,55.

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi KIP tahun 2021 diikuti oleh 337 Badan Publik yang terdiri dari sektor Pemerintah Provinsi, Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Based on the results of the assessment conducted in January 2022 on the implementation of governance for the fiscal year of 2021, PPA earned a score of 91.73 or falling under "Very Good" category. For its GCG implementation, PPA has shown a constant improvement from year to year. This proves that GCG has been integrated into the Company's work culture and shows the commitment of all PPA Personnel in implementing GCG.

The implementation of good corporate governance at PPA has received appreciation from stakeholders, as shown by the award it received from Central Information Commission (KIP), namely: "Informative Enough" Public Agency for the category of State-Owned Enterprises. The award was granted at the 2021 Public Information Disclosure Award held virtually by the Indonesian Vice President Ma'ruf Amin on October 26, 2021.

This "Quite Informative" predicate ranked second with a score of 77.37. The achievement constitutes an improvement from the previous year, whereby in 2020 the Company obtained score of 69.55.

The KIP monitoring and evaluation in 2021 was participated by 337 public bodies consisting of the Provincial Government sector, Ministries, State Institutions and Non-Ministerial Government Institutions, Non-structural Institutions, State-owned Enterprises, State Universities, and Political Parties.

ROADMAP GCG PPA PPA GCG ROADMAP

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



2012-2014

Pemutakhiran ketentuan terkait GCG dan melakukan upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi penilai GCG:

1. Internalisasi dan penguatan pelaksanaan GCG;
2. Terbentuknya sistem pengendalian intern yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko.

Updating provisions related to GCG and making improvements based on GCG assessor's recommendations:

1. The internalization and strengthening of GCG implementation;
2. The establishment of an internal control system that is based on information technology and risk management.



2015-2017

Penguatan sistem GCG:

1. Peningkatan operasional yang baik melalui *control* internal, pengendalian risiko dan penerapan *whistleblowing system*;
2. Penguatan sistem pengendalian internal yang berbasis teknologi informasi dan manajemen risiko.

Strengthening GCG systems:

1. Improving operations through internal control, controlling risks and the whistleblowing system;
2. Strengthening the internal control system that is based on information technology and risk management.



2021-2023

GCG terintegrasi: Pelaksanaan GCG telah menjadi budaya organisasi di Entitas Induk dan Entitas Anak sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Integrated GCG: The implementation of GCG has become an organizational culture in the Parent Entity and Subsidiaries so it could support the improvement of Company performance.



2018-2020

Terbentuknya budaya GCG:

1. Terbentuknya kesadaran akan budaya GCG;
2. Terbentuknya BUMN sebagai korporasi yang menjadi bagian masyarakat melalui pendekatan *Corporate Social Responsibility*.

Creating GCG culture:

1. Building GCG culture awareness;
2. The establishment of SOE as a corporation that is part of the community through the Corporate Social Responsibility approach.

Komitmen Penerapan GCG Secara Berkelanjutan

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION

Komitmen penerapan GCG di lingkungan Perusahaan berpedoman pada asas: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran, yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.

The GCG implementation commitment within the Company is guided by the principles of: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness, which are implemented in a systematic, consistent and sustainable manner.

Penerapan GCG merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan Perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta patuh pada norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai Perusahaan yang dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran Perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) is a series of mechanisms or systems that direct the Company to be in accordance with the expectations of stakeholders, in line with applicable laws and regulations, and comply with universally applicable business ethical norms and corporate values that are upheld by all levels of the Company.

Mekanisme atau sistem ini mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan Perusahaan. Selain itu, pemantauan dan penilaian risiko usaha juga dilakukan guna meningkatkan kinerja Perusahaan.

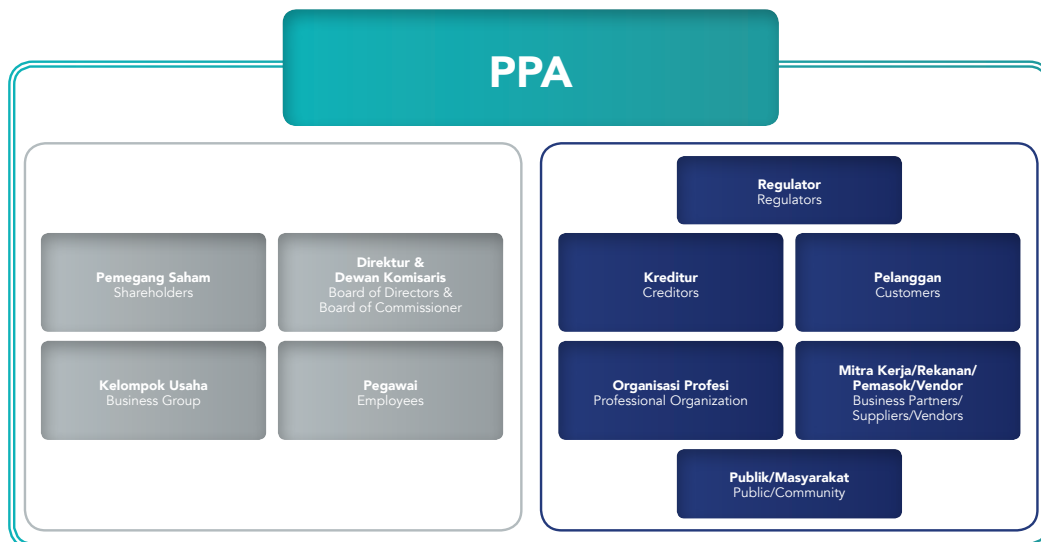
This mechanism or system influencing the determination and achievement of company's objectives. The monitoring and assessment of business risks are also conducted to improve performance of the Company.

Untuk menjaga kesinambungan dalam mengimplementasikan GCG, Perusahaan mengembangkannya selaras dengan praktik terbaik dalam memaksimalkan nilai Perusahaan, melaksanakan kegiatan usaha yang efektif dan efisien, pengelolaan Perusahaan yang profesional dan mandiri, serta menciptakan pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan berdasarkan pada nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara maksimal.

To implement good corporate governance thoroughly and sustainably, the Company continues to develop the implementation of GCG in line with the best practices in maximizing the Company's value, carrying out effective and efficient business activities, professional, and independent management of the Company, and creating decision-making by all Corporate organs based on moral values and compliance with applicable laws and regulations. In addition, the Company also provides maximum protection and fair treatment to shareholders and other stakeholders.

Selain itu, dalam menghadapi dinamika dan tantangan usaha, PPA menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab. Hal itu bertujuan agar Perusahaan mampu bertahan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

In addition, in facing business dynamics and challenges, a sound and responsible corporate governance is required in order for the Company to be able to survive and to grow sustainably.



IMPLEMENTASI PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN DI PPA

Rangkaian upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip GCG secara berkelanjutan, digambarkan melalui siklus seperti tergambar di bawah ini:

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION AT PPA

The series of efforts made by the Company in sustainably implementing the principles of GCG is described as a cycle as illustrated below:



Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG

OBJECTIVES AND BENEFITS OF GCG IMPLEMENTATION

Penerapan GCG bagi PPA, merupakan strategi fundamental untuk mencapai target dan visi Perusahaan. Melalui penerapan GCG, PPA berharap menjadi Perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable company*).

To the Company the implementation of GCG constitutes a fundamental strategy to achieve the Company's target and vision. Through the implementation of GCGPPA is expected to become a sustainable company.

Tujuan penerapan GCG adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

The objectives of the GCG implementation are as follow:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Membangun mekanisme *Check and Balances* antar organ Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan dan komunikasi antar organ Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta citra dan reputasi Perusahaan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perusahaan;
4. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
5. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
6. Mendorong agar organ Perusahaan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perusahaan;
7. Memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional yang dapat dicapai melalui restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, serta kegiatan investasi; dan
8. Membantu meningkatkan iklim investasi nasional melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

1. Support achievement of the Company's sustainability through a management that is based on transparency, accountability, responsibility, independency as well as fairness and equality principles;
2. Build Check and Balances mechanism between Corporate organs and other Stakeholders, so it can improve the Company's performance and communication between Corporate organs and other Stakeholders.
3. Increase the stakeholders' trusts as well as the Company image and reputation to encourage the improvement of Company's business relation and performance;
4. Optimize the Company's value by improving transparency, accountability, reliability, responsibility, and fairness principles so that the Company posses strong competitiveness;
5. Support professional, transparent, and efficient management of the Company and empower function and improve independency of the Company's organs;
6. Support the Company's organs to make decision and action based on high moral value and compliance to prevailing laws, as well as awareness on the corporate social responsibility of the Company to the Stakeholders and environmental sustainability particularly in the Company's operational area;
7. Contribute for national economy that is achieved through SOEs restructuring and revitalization, assets management and investment activities; and
8. Support national investment climate improvement through the programs/activities carried out by the Company.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

Penerapan GCG Perusahaan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The implementation of the Company's GCG is based on:

1. Law of Republic of Indonesia, among others:
 - a. Law of Republic of Indonesia No. 20 of 2001 regarding The Corruption Crime Eradication as Amended under Law of Republic of Indonesia No. 31 of 1999.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya:
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/06/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- b. Law of Republic of Indonesia No. 15 of 2002 regarding Money Laundering Crime as Amended under Law of Republic of Indonesia No. 25 of 2003 as Amendment on Law Number 15 of 2002 regarding Money Laundering Crime.
 - c. Law of Republic of Indonesia No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprise
 - d. Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.
 - e. Law of Republic of Indonesia No. 14 of 2008 regarding Information Disclosure.
 - f. Law of Republic of Indonesia No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction.
2. The Minister of State-Owned Enterprise Regulation, among others:
 - a. The Minister of SOE Regulation No. PER-05/MBU/2006 regarding The Audit Committee for State-Owned Enterprise.
 - b. The Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 regarding The Board of Commissioners Members Appointment and Procedure in State-Owned Enterprise.
 - c. The Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 regarding The Supporting Structure of Board of Commissioners/Supervisory Board in State-Owned Enterprise.
 - d. The Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 regarding Board of Directors Members Appointment and Dismissal Requirements and Procedure in State-Owned Enterprise.
 - e. The Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise with the latest Amendment under No. PER-09/MBU/2012 regarding Amendment to The Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise.
 - f. The Minister The Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 regarding Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board Remuneration Procedure in State-Owned Enterprise with the latest amendment through the Minister of SOE Regulation No. PER-06/MBU/06/2018 as the Third Amendment on The Minister of SOE Regulation Number PER04/MBU/2014 regarding Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board Remuneration Procedure in State-Owned Enterprise.

g. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN; h. Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> Tahun 2006.	g. The Decree of Secretary Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding The Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. h. The General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National on Governance Policy in 2006.
3. Peraturan di bidang pasar modal yang berlaku bagi Perusahaan sebagai emiten obligasi.
3. Capital market regulations which are applicable to the Company as a bond issuer.

Standar Kualitas Implementasi GCG

STANDARDS OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY

Kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan BUMN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Perusahaan juga menjadikan *best practice* yang berlaku di dunia usaha sebagai pertimbangan.

Pemerintah dan regulator telah memberikan penekanan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar sebagai hal yang dapat menjadi fondasi bagi pelaku usaha.

Standar implementasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, mencakup 6 (enam) aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Aspek Direksi.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perusahaan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.

The Compliance with Corporate Governance Guidelines for SOE

As a State-Owned Enterprise (SOE), the standards of GCG implementation in PPA refer to the Regulation of The Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, regarding changes to SOE regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, the Decree of Secretary Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, regarding The Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs, as well as best practices applicable in the business world.

The Government and the regulators have emphasized the aspects of transparency, accountability, and fair disclosure of information as fundamental matters for a business player.

The implementation standards are based on the Decree of Secretary Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, covers 6 (six) aspects that must be fulfilled as below:

1. The Commitment Towards The Sustainable Implementation of Good Corporate Governance.
2. Shareholders and GMS/Capital Owners.
3. Board of Commissioners/Supervisory Board.
4. Board of Directors.
5. Information Disclosure and Transparency.
6. Other aspects which include the sustainability reporting and company's ability to be a benchmark in its field.

Penjabaran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan, diuraikan sebagai berikut:

The following is the description of the implementation of GCG within the Company:

Pendekatan Approach	Penerapan di PPA Implementation at PPA
Prinsip: Transparansi Transparency Principle	
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Transparency in decision-making process, and transparency in disclosing material and relevant information about the Company.	Perusahaan menyediakan informasi terkait kegiatan usahanya kepada <i>stakeholders</i> melalui penyediaan informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala antara lain melalui <i>website</i> Perusahaan, penerbitan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan serta laporan lainnya sesuai keperluan. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The Company disclose information related to its business activities to stakeholders through the provision of relevant, adequate, and reliable Corporate information in a timely and periodical manner, including through the Company's website, the publication of Annual Reports, and Quarterly Reports and other reports as needed. The Company discloses important information in the Annual Report and Financial Statements in accordance with statutory regulations.
Prinsip: Akuntabilitas Accountability Principle	
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of function, implementation and accountability of the organs to carry out the effective management of the Company.	Perusahaan memiliki mekanisme yang kuat dalam proses penerapan GCG. Mekanisme tersebut dirancang dalam bentuk kebijakan, pedoman, prosedur dan hubungan yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Perusahaan senantiasa mengkaji dan menyempurnakan <i>soft-structure</i> GCG secara berkala guna memastikan penerapan GCG sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun peraturan yang berlaku. Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance Code</i>), Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>), Pedoman Kerja/ Piagam (<i>Charter</i>) untuk organ Perusahaan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris serta organ-organ Penunjang Dewan Komisaris Perusahaan. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, jika sudah menjadi budaya yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. The Company has a strong mechanism in the process of implementing GCG. The mechanism is designed in the form of policies, guidelines, procedures, and clear relationship between Board of Commissioners and Board of Directors in making decisions in accordance with their duties, functions, and responsibilities. The Company constantly reviews and updates the GCG soft-structure periodically, to ensure the implementation of GCG is in line with the needs of business processes and applicable regulations. The Company has a Good Corporate Governance Code, Code of Conduct, Charter for Corporate organs, both Board of Directors and Board of Commissioners, and Supporting organs of Board of Commissioners. Therefore, the implementation of GCG principles will have a significant impact in the long run if it has become a culture that is manifested in daily behavior.
Prinsip: Responsibilitas Responsibility Principle	
Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Conformity of the Company's management to laws and regulations as well as the healthy corporate principles.	Perusahaan dalam memenuhi kesesuaian pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, dilakukan melalui pelaksanaan audit terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya. The Company's effort to fulfill the conformity of the management with applicable laws and regulations and the healthy corporate principles are carried out through auditing the compliance with laws and regulations and internal control, which are conducted annually by Public Accounting Firm.

Pendekatan Approach	Penerapan di PPA Implementation at PPA
Prinsip: Independensi Independency Principle	
Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The condition where the Company is managed professionally without any conflict of interest and influence/pressure from any parties that may violate the law and the healthy corporate principles.	1. Penerapan Independensi Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris harus bertindak secara independen. Independensi merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas semata-mata untuk kepentingan Perusahaan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan Perusahaan. Pemenuhan independensi Dewan Komisaris diukur berdasarkan kriteria antara lain bahwa anggota Dewan Komisaris: • Bukan merupakan anggota Manajemen Perusahaan; • Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; • Bukan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan; • Bukan pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota Perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan komisaris; • Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan komisaris; • Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. 2. Penerapan independensi Direksi dalam menjalankan segala tindakan kepengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain harus bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 1. The Independency of Board of Commissioners Each member of Board of Commissioners must act independently. The independency is an aspect that needs to be considered to minimize the possibility of conflicts of interest. Board of Commissioners carries out the duties solely for the benefit of the Company and is not affected by parties having different interests from the interests of the Company. The fulfillment of Board of Commissioners' independence is measured based on the criteria that a member of Board of Commissioners is: • Not a member of Company Management; • Free from business relationships and other relationships that can influence the decision making; • Not a major Shareholder of the Company or an employee who deals directly with the major Shareholders of the Company; • Not an employee or had worked as an executive at the Company or a member of affiliation, at least 3 (three) years before becoming a member of Board of Commissioners; • Not a professional main advisor or a consultant for the Company or affiliated companies, or an employee who directly deals with service providers, at least 3 (three) years before becoming a member of Board of Commissioners; • Not a main supplier or a customer of the Company or an affiliated company or employee of/or who has direct or indirect contact with the main supplier or customer. 2. The Independency of Board of Directors Board of Directors in carrying out all Corporate management actions or relations with other parties must be independent without interference from any party that is contrary to the laws and regulations and the Articles of Association of the Company, which can materially interfere with the objectivity and the independence of Board of Directors' duties that are performed solely for the interests of the Company. In accordance with the Company's Articles of Association, between members of Board of Directors as well as between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall not have family relations up to the third degree, either in a straight-up or sideways line, including relationships arising from marriage.



Pendekatan Approach	Penerapan di PPA Implementation at PPA
Prinsip: Kewajaran dan Kesetaraan Fairness Principle	
Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta asas kesetaraan dalam menjalankan bisnis.	Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan anggota Direksi, Pemegang Saham telah mempertimbangkan pemenuhan aspek keberagaman usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan gender. Dengan keberagaman tersebut diharapkan Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan tugasnya secara lebih efektif dalam mencapai target dan kinerja Perusahaan.
The fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders, both the shareholders and other stakeholders, which are arising based on agreement and law as well as the fairness principle in running the business.	In determining the composition of Board of Commissioners and members of Board of Directors, Shareholders have considered the fulfillment of age, education, work experience, and gender diversity aspect. With this diversity, it is hoped that Board of Commissioners and Board of Directors can carry out their duties more effectively in achieving the Company's targets and performance.

Sinergi Penerapan GCG di PPA Group (*Subsidiary Governance*)

SYNERGY OF GCG IMPLEMENTATION IN PPA GROUP (SUBSIDIARY GOVERNANCE)

Penerapan GCG yang dijalankan oleh PPA juga berlaku untuk kelompok usaha (grup), yang di dalamnya termasuk entitas anak, yang indikator kinerjanya, antara lain diukur melalui implementasi GCG. Tujuan Perusahaan membentuk entitas anak adalah untuk bersinergi agar mendapatkan lompatan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian, dalam hubungan kerja Perusahaan dan entitas anak selaras dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Kendati demikian, setiap entitas anak dalam kelompok usaha PPA merupakan entitas hukum terpisah dan mandiri dalam menjalankan kebijakan bisnis berdasarkan Anggaran Dasar, RJPP, dan RKAP masing-masing. Dengan demikian, kewenangan dan kebijakan pengurusan tiap entitas berada pada Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing. Perusahaan dapat memberikan arahan kepada entitas anak melalui jalur kepemilikan saham, yaitu mekanisme RUPS, sehingga tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

Untuk memastikan bahwa tata kelola hubungan Perusahaan dan entitas anak terjadi dalam kerangka GCG, PPA mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya:

1. Surat Keputusan Direksi No. SK-61/PPA/0916 tanggal 22 September 2016 tentang Kebijakan Penanganan Anak Perusahaan di mana di dalamnya mengatur mengenai pemberian persetujuan Perusahaan atas kegiatan Entitas Anak, baik yang terkait penyusunan dan persetujuan RKAP maupun pengkajian aksi korporasi Anak Perusahaan, kemudian juga mengatur mengenai pengangkatan dan penempatan wakil Perusahaan pada Entitas Anak, serta mekanisme pengawasan Entitas

All GCG policies implemented by PPA also apply to the group, including subsidiaries, in which the measurement of GCG implementation is one of the performance indicators of Subsidiaries. The Company's objective in establishing a Subsidiary is to synergize the activities of the parent entity and all Subsidiaries in order to obtain a better performance. Thus, managing the working relationship between Company and its Subsidiaries is in line with the Company's Articles of Association, RJPP, and RKAP.

However, each of the Subsidiaries in PPA Group is a separate and independent legal entity in carrying out business policies based on their respective Articles of Association, RJPP, and RKAP. Therefore, the authority and the management policy of each Subsidiary are held by the respective Board of Directors and Board of Commissioners of each of the Subsidiaries. The Company can provide directives to Subsidiaries with its share ownership, which is carried out through the GMS mechanism; hence it still complies with laws, regulations, and GCG principles.

To ensure that the governance of the relationship between the Company and its Subsidiaries occurs within the GCG framework, the Company issues various policies, including:

1. Board of Directors Decree No. SK-61/PPA/0916 dated September 22, 2016 regarding the Policy for Handling Subsidiaries, which regulates the Company's approval upon its Subsidiaries' activities, both related to the preparation and approval of RKAP as well as the review of corporate actions of Subsidiaries, and also regulates the appointment and placement of Company representatives in Subsidiaries, as well as the oversight mechanism of Subsidiaries, in which Subsidiaries are

Anak, di mana Entitas Anak diwajibkan memberikan laporan baik bulanan, triwulanan, semester maupun laporan tahunan. Dengan demikian kontrol atas pengelolaan Entitas Anak dapat berjalan efektif;

2. Surat Keputusan Direksi SK-69/PPA/1118 tanggal 9 November 2018 tentang Kebijakan Penunjukan Pengurus Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan. Dalam keputusan ini, Perusahaan mengatur ketentuan penunjukan pengurus Entitas Anak baik langsung maupun tidak langsung, sehingga terdapat kepastian dan ketetapan dalam mekanisme penunjukan pengurus dengan landasan *merit system*.

Mengacu pada kebijakan tersebut, Perusahaan telah menjalankan tata kelola hubungan antara Perusahaan dan entitas anak dengan landasan prinsip-prinsip GCG, baik dalam mekanisme pengawasan jalannya kegiatan entitas anak, penempatan Direksi dan Komisaris entitas anak, serta mekanisme penempatan pejabat lainnya pada entitas anak.

MONITORING PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di Perusahaan dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Satuan Pengawasan Internal. Kedua organ tersebut memiliki fungsi *monitoring* prinsip-prinsip GCG di Perusahaan dan selama ini, telah diimplementasikan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan.

PENGUKURAN IMPLEMENTASI GCG

Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan penerapan GCG, sehingga terjadi peningkatan dan penyesuaian terhadap situasi yang berkembang. Pelaksanaan *assessment* atau evaluasi/penilaian terhadap penerapan GCG itu bertujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan prinsip GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan;
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan prinsip GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian;
3. Memantau konsistensi penerapan prinsip GCG di lingkungan organisasi Perusahaan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG;
4. Mendorong pengelolaan Perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

required to provide reports either monthly, quarterly, semester, or annual reports. By doing these, the control over the management of Subsidiaries can run effectively;

2. Board of Directors Decree SK-69/PPA/1118 dated November 9, 2018 regarding The Policy for Appointing Managers of Subsidiaries and Subsidiaries of Subsidiary Company. In this decree, the Company regulates the provisions for appointing Subsidiaries' management, either directly or indirectly, so that there is certainty and determination in the mechanism for appointing the management on the basis of a merit system.

Based on the regulations, the Company has carried out the governance of the relationship between the Company and its Subsidiaries based on GCG principles, both in the mechanism for overseeing the Subsidiaries' operations, the placement of Directors and Commissioners of the Subsidiaries as well as the mechanism for the placement of other officials in the Subsidiaries.

MONITORING GCG IMPLEMENTATION

The GCG implementation in the Company is managed by the Corporate Secretariat Division and the Internal Audit Unit Division, which has the function of monitoring the GCG principles in PPA that have been implemented consistently, systematically, and sustainably.

THE ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

The Company conducts GCG implementation evaluations periodically to strive for the best practice. The assessment of the Company's GCG implementation is performed with the objectives:

1. To assess and evaluate GCG principles implementation through the elaboration of GCG implementation condition and the comparison with stipulated assessment indicators and parameters.
2. To provide description on the results of assessment through scoring on GCG principles implementation, altogether with the proposed improvement recommendation, to reduce the gap between the practical level with the assessment indicators and parameters.
3. To monitor the consistency of GCG principles implementation in the Company's organization, as well as to obtain input for the improvement and development of GCG policies.
4. To encourage more professional, transparent, and efficient management of the Company and empower the function and increase independency of the Company's Organs.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN

Dasar Penilaian

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN menjelaskan:

1. Pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan/*assessment* GCG dilakukan secara berkala oleh Perusahaan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh *assessor* eksternal, dengan diselingi oleh *self-assessment* yang dilakukan oleh *assessor* internal Perusahaan;
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada poin pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Metode pengukuran penerapan GCG Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut, terdiri dari 6 (enam) aspek, 43 indikator penerapan Tata Kelola Perusahaan dan 153 parameter pengujian.

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan

Perusahaan secara umum memiliki komitmen yang baik untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan, antara lain didukung dengan adanya Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan dan panduan tambahan di antaranya seperti Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Pengadaan barang dan jasa, Kebijakan PKBL, dan Kebijakan pendukung lainnya.

Sebagai perwujudan atas komitmen pelaksanaan GCG, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengungkapan informasi, pertanggungjawaban terhadap penegakkan peraturan, akuntabilitas pembagian tanggung jawab, kemandirian profesional tanpa benturan kepentingan, dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan di lingkungan Perusahaan serta melakukan pengelolaan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

ASSESSMENT BASIS AND METHODS

1. Based on the Regulation of the Minister of SOEs

Basis of Assessment

Article 44 paragraph (1) of The Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011, dated August 1, 2011, regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, provides:

1. Corporate Governance/GCG assessment is carried out regularly by the Company every 2 (two) years by external assessor, interspersed with self-assessment carried out by the Company's internal assessor;
2. Evaluation (review), which is a program to describe the follow-up of GCG implementation in the Company conducted the following year after the assessment as referred to in the first point, which includes evaluating the results of assessment and following up on recommendations for improvement.

The Company's measurement method of GCG implementation refers to a copy of the Decree of the Secretary Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, regarding The Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. This assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in the Copy of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises Decree No. SK-16/S.MBU/2012 consists of 6 (six) aspects, 43 indicators of Corporate Governance implementation, and 153 testing parameters.

1. The Commitment on Sustainable Governance Implementation Aspect

The Company generally has a good commitment to implement GCG continuously, namely supported by the availability of the Code of Corporate Governance and Code of Conduct. In addition, the Company has issued additional policies and guidelines, such as the Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners, Whistleblowing System Management Policy, Gratification Guideline, Goods and Services Procurement Guideline, Partnership and Environmental Guidance Program Policy, and other supporting policies.

As a manifestation of the GCG implementation commitment, the Company consistently implements the transparency principle in information disclosure, accountability on law enforcement, accountability of responsibility division, professional independency without conflict of interest, and fairness in fulfillment of stakeholders' rights in the Company as well as management of Whistleblowing System and State Official Wealth Report.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Perusahaan berupaya secara konsisten untuk memastikan hak-hak Pemilik/Pemegang Saham terpenuhi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan kebijakan Perusahaan. Pemenuhan hak-hak Pemilik/Pemegang Saham dilakukan antara lain melalui pemberian informasi terkini atas kondisi Perusahaan, pengambilan keputusan dalam RUPS serta Dewan Komisaris beserta perangkat pendukungnya (Komite dan Sekretaris) menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas bisnis dan operasional.

3. Aspek Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan Perusahaan yang efisien dan efektif sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Latar belakang anggota Dewan Komisaris dengan kompetensi dan kualifikasi (latar belakang teknis dan regulator) yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan cukup memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, antara lain melalui pemberian masukan kepada Manajemen Perusahaan.

4. Aspek Direksi

Direksi Perusahaan sebagai fungsi pelaksana/ pengurus bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Komitmen Direksi beserta jajaran Manajemen terhadap penerapan GCG dirasakan cukup baik, dengan menciptakan budaya dan etika Perusahaan, struktur, proses dan kinerja Perusahaan.

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Perusahaan senantiasa berupaya mewujudkan kemudahan akses atas informasi dan data perusahaan dengan menyediakan media-media informasi seperti intranet dan *website*.

6. Aspek lainnya

Perusahaan memastikan aspek-aspek penyusunan Laporan Tahunan yang sesuai dengan ketentuan.

Pengukuran dilakukan melalui penelusuran kelengkapan dokumen pedoman/peraturan/kebijakan terkait mekanisme tata kelola seperti yang telah dijelaskan di atas, serta wawancara kepada pihak-pihak terkait di internal Perusahaan.

2. Shareholders and GMS/Capital Owners Aspect

The Company attempts to consistently ensure the rights of the Capital Owner/Shareholders, which are fulfilled as regulated in the Company's Articles of Association and Corporate Policy. The fulfillment of the Capital Owner/Shareholders' rights is done by providing up-to-date information on the Company's condition, decision-making in the GMS and Board of Commissioners, and the supporting organs (the Committees and Secretary) to perform supervisory function over the business and operational activities.

3. Board of Commissioners Aspect

The supervisory function is done to ensure more efficient and effective management of the Company according to the interests of all stakeholders. The background of the Board of Commissioners members with competency and qualification (technical and regulatory background) based on the Company's business line are sufficient to provide added value for the Company, namely through recommendations submitted to the Company's Management.

4. Board of Directors Aspect

The Board of Directors holds the executive/manager function who is in charge of daily activities to achieve the Company's vision and mission. The commitment of the Board of Directors and the Management to the GCG implementation is seen as appropriate by creating corporate culture and ethics, structure, process, and performance.

5. The Information Disclosure and The Transparency Aspect

The Company attempts to establish corporate information and data access convenience by providing information media such as internet and website.

6. Other Aspect

The Company ensures the Annual Report preparation aspects based on regulation.

Measurement is carried out through examining the completeness of guideline/regulatory/policy documents related to the Governance Process as described above, as well as interviews with related parties within the Company.

6 Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

(DECREE OF THE SECRETARY OF THE MINISTRY OF SOE NO. SK-16/S.MBU/2012)

No.	Aspek Aspect	Bobot (%) Weight
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35
4	Direksi The Board of Directors	35



No.	Aspek Aspect	Bobot (%) Weight
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9
6	Aspek lainnya Other aspects	5

2. Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020: Hasil, Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2021

Penilaian penerapan GCG tahun 2020 yang merupakan wujud dari kepatuhan terhadap ketentuan dalam PER-01/MBU/2011, diuraikan sebagai berikut:

2. Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2020: Results, Recommendations and Follow-ups in 2021

The assessment of the implementation of GCG in 2020 as a manifestation of compliance with the provisions in PER-01/MBU/2011, is described below:

Jenis Penilaian Type of Assessment	: Self-Assessment
Assessor/Penilai	: Internal Perusahaan Internal
Periode Penerapan Assessment Period	: 2020
Tahun Buku Fiscal Year	: 2020
Waktu Pengukuran Timeframe	: 1 Januari – 25 Februari 2021 January 1 – February 25, 2021
Waktu Terbit Laporan Report Publication	: 25 Februari 2021 February 25, 2021

Berdasarkan hasil *assessment*, Perusahaan memperoleh nilai sebesar 90,065 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100,00 atau mencapai kualifikasi “Sangat Baik”. Perolehan skor tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil *assessment* untuk penerapan GCG tahun 2019 sebesar 88,53. Rincian hasil penilaian penerapan GCG adalah sebagai berikut:

Based on GCG Assessment, the score obtained by the Company is 90.065 out of the maximum total score of 100 or achieving a “Very Good” qualification. The score has increased compared to the results of the GCG Assessment in 2019 of 88.53%. The details of this score achievement are as follows.

Aspek Aspect	Bobot Weight	Skor Score	% Capaian Achievement
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,455	92,21
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,466	94,07
III. Dewan Komisaris The Board of Commissioners	35,00	33,673	96,21
IV. Direksi The Board of Directors	35,00	31,605	90,30
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,367	81,85
VI. Aspek lainnya Other aspects	5,00	2,500	50,00
Skor Keseluruhan Overall Score	100,00	90,065	90,065

**Peringkat Kualitas Penerapan GCG
GCG Implementation Quality Rating**

**SANGAT BAIK
VERY GOOD**

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Note:

0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 :

Sufficient | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Hasil *assessment* juga menyampaikan rekomendasi terkait area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (AoI) sebagai rencana aksi perbaikan di tahun 2021. Tindak lanjut dari rekomendasi hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The assessment results also contain recommendations for Area of Improvement (AoI) as an action plan for improvement in 2021. The follow-up actions of the recommendations up to December 31, 2021, are as follows:

Rekomendasi *Assessment* GCG Tahun 2020 dan Tindak Lanjutnya

Recommendation on GCG Assessment in 2021 and Follow Up

No.	Aspek Aspect	AoI Awal Beginning AoI	Sudah Ditindak Lanjuti Has been Followed Up	Akan Ditindak Lanjuti pada 2022 Will be followed up in 2022	Tidak Dapat Ditindaklanjuti Cannot be followed Up
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	4	3	1	0
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	6	6	0	0
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	7	5	2	0
4	Direksi Board of Directors	20	8	7	5
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	2	2	0	0
6	Aspek Lainnya Other Aspects	1	1	0	0
Total Total		40	25	10	5

3. *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2021

3. *Assessment* of GCG Implementation for fiscal Year 2021

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2021

Assessment of GCG Implementation for the Measuring Year 2021

Jenis Penilaian Type of Assessment	: Eksternal <i>Assessment</i> External
Assessor/Penilai	: PT AGS
Periode Penerapan Assessment Period	: 1 Januari - 31 Desember 2021 January 1 – December 31, 2021
Tahun Buku Fiscal Year	: 2020
Tempat Pengukuran Place	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Jakarta
Waktu Pengukuran Timeframe	: 1 Januari – 21 Februari 2022 January 1 – February 21, 2022
Waktu Terbit Laporan Report Publication	: 21 Februari 2021 February 21, 2021

Rincian hasil *assessment* disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Details of the results of the assessment are presented in the table below:

	Aspek Aspect	Bobot Weight	Skor Score	% Capaian Achievement
I.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,84	97,76
II.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,67	94,87



	Aspek Aspect	Bobot Weight	Skor Score	% Capaian Achievement
III.	Dewan Komisaris The Board of Commissioners	35,00	33,40	94,14
IV.	Direksi The Board of Directors	35,00	33,56	94,69
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,63	94,48
VI.	Aspek lainnya Other aspects	5,00	0,63	12,50
	Skor Keseluruhan Overall Score	100,00	91,73	91,73
Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Rating			SANGAT BAIK VERY GOOD	

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Note:

0-50 : Very Poor | 50-60 : Poor | 60-75 :

Sufficient | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Rekomendasi Hasil Penilaian

Dari hasil *Assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2021, terdapat 31 rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* (AoI) untuk dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices* yang terus berkembang.

GCG Implementation Assessment Results

Recommended Assessment Results

From the results of the Assessment of GCG implementation for the 2021 financial year, there are 31 recommendations on Areas of Improvement (AoI) to make an action plan for improvement/improvement based on the commitment of all relevant parties to improve the implementation of good GCG practices as having been referred to continuously developing best practices.

Tahun Year	Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilai Assessor	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score						Skor Akhir Final Score	Kategori Category
			Aspek I Aspect I	Aspek II Aspect II	Aspek III Aspect III	Aspek IV Aspect IV	Aspek V Aspect V	Aspek VI Aspect VI		
2021	Assessment	PT Adikarya Gemilang Solusindo (Independen) (Independent)	6,84	8,67	33,40	33,56	8,63	0,63	91,73	"Sangat Baik" "Very Good"
2020	Self-Assessment	Tim Internal Internal Team	6,455	8,466	33,673	31,605	7,367	2,500	90,065	"Sangat Baik" "Very Good"
2019	Assessment	PT Adikarya Gemilang Solusindo (Independen) (Independent)	6,63	8,68	32,74	32,41	7,46	0,63	88,53	"Sangat Baik" "Very Good"
2018	Self-Assessment	Tim Internal Internal Team	6,550	8,481	32,291	31,869	6,441	2,500	88,13	"Sangat Baik" "Very Good"
2017	Assessment	PT Icon Global Solusi (Independen) (Independent)	6,6577	8,3798	32,1671	31,8844	6,4522	2,5000	88,04	"Sangat Baik" "Very Good"

Keterangan:

Aspek I: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

Aspek II: Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Aspek III: Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Aspek IV: Direksi

Aspek V: Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Aspek VI: Aspek Lainnya

Note:

Aspect I: Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Aspect II: Shareholders and GMS

Aspect III: Board of Commissioners

Aspect IV: Board of Directors

Aspect V: Information Disclosure and Transparency

Aspect VI: Other Aspect

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

CRITERIA OF ASSESSMENT ON EXCELLENT PERFORMANCE (KPKU)

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai alat ukur kinerja BUMN mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Kebijakan itu menyatakan bahwa evaluasi BUMN menggunakan kriteria KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN, mengadopsi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*."

Terkait dengan penilai atau tim evaluator, acuannya adalah surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-272/S.MBU/09/2014 tanggal 18 September 2014 yang menyebutkan bahwa tim evaluator terdiri dari minimal 5 (lima) orang dengan sertifikat evaluator KPKU. Evaluator dapat berasal dari eksternal BUMN atau kombinasi dengan melibatkan minimal 1 (satu) orang dari internal BUMN.

Proses evaluasi ini melalui 2 (dua) tahapan besar yaitu tahap "Ondesk Review" yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU tahun sebelumnya dan informasi pendukung ADLI (*Approach, Deployment, Learning, dan Integration*). Tahap berikutnya adalah "Site Visit" untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta pejabat eksekutif lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi. Laporan atas pemenuhan persyaratan pada suatu subkategori dinilai dengan mempertimbangkan:

1. Persyaratan subkategori tersebut;
2. Faktor-faktor bisnis utama yang dilaporkan dalam profil perusahaan;
3. Kesempurnaan sistem yang diterapkan di perusahaan;
4. Keluasan cakupan penerapan sistem;
5. Konsistensi peningkatan kualitas proses dan kinerja sebagaimana diatur dalam sistem pemberian skor.

The KPKU assessment is based on the letter of the Secretary Minister of SOE No. S-08/S.MBU/2013, dated January 16, 2013, regarding The Submission of Guidelines for Determining Key Performance Indicators (KPI) and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) of SOE.

This policy states that SOE evaluation uses KPKU criteria as determined by The Ministry of SOE through The Letter of Secretary Minister of SOE No. S-153/S.MBU/2012 dated July 19, 2012, regarding Performance Reporting Based on SOE Superior Performance Assessment Criteria Approach, which adopted and adapted the "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*."

The KPKU assessment by an evaluator team refers to the letter of the Secretary Minister of SOE No. S-272/S.MBU/09/2014, dated September 18, 2014, states that the evaluator team consists of at least 5 (five) evaluators who have KPKU Evaluator certificates, and all may consist of external SOEs or a combination involving at least 1 (one) person from internal SOE.

This evaluation process is through 2 (two) major stages, namely the "Ondesk Review" stage, which is an assessment on paper based on the KPKU's response from the previous year and supporting information of ADLI (*Approach, Deployment, Learning, and Integration*). The next stage is the "Site Visit"

for interviews and clarification of the KPKU's response to the Board of Directors and other executive officials appointed by the Company, as well as verification of various data and information. Report on compliance with requirements in a subcategory is assessed by taking into account:

1. Requirements of the subcategory;
2. Main business factors reported in the Company profile;
3. The perfection of system implemented in the Company;
4. Extensive scope of system implementation;
5. Consistency in improving process quality and performance as stipulated in the scoring system.

Dasar Faktor Penilaian KPKU Basis Factor of KpKU Assessment



1. Faktor Penilaian Proses

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah metode/ sistem (*approach*), penerapan (*deployment*), pembelajaran (*learning*), dan integrasi (*integration*) atau disingkat ADLI, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Metode/Sistem (*approach*) adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada:
 - Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi perusahaan;
 - Efektifitas dari penggunaan metode/sistem tersebut;
 - Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).
- b. Penerapan (*Deployment*) mengacu pada sejauh mana:
 - Metode/sistem diterapkan sesuai dengan desainnya;
 - Metode/sistem diterapkan secara konsisten;
 - Metode/sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/ unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya.
- c. Pembelajaran (*Learning*) mengacu pada:
 - Penyempurnaan metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan;
 - Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan;
 - Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam perusahaan.
- d. Integrasi (*Integration*) mengacu pada:
 - Keselarasan metode/sistem dengan kebutuhan perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya;
 - Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses;
 - Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran perusahaan.

Subkategori pada faktor proses yang terdiri dari ADLI tersebut dilakukan klarifikasi, saling dihubungkan untuk menekankan bahwa deskripsi *approach* harus selalu menunjukkan penerapan yang konsisten dengan persyaratan spesifik suatu subkategori dan Perusahaan. Seiring dengan semakin matangnya proses, maka deskripsinya juga harus menunjukkan bagaimana siklus pembelajaran (termasuk inovasi) dan juga integrasi dengan proses kerja lainnya dan dengan unit kerja lainnya.

2. Faktor Penilaian Hasil

Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LeTCI), yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Level** mengacu pada tingkat pencapaian kinerja saat ini;

1. Process Assessment Factor

Factors used to assess the process are approach (method/ system), deployment, learning, and integration or abbreviated as ADLI, which is described as follows:

- a. Approach is a method/system designed to carry out works. Assessment refers to:
 - The suitability of method/system with the requirements in SOE KPKU and the Company's operating environment.
 - Effectiveness of the method/system usage.
 - The extent to which the method/system is repeated and is based on reliable data and information (for example, structured and systematic).
- b. Deployment refers to the extent to which:
 - The method/system is applied according to the design.
 - The method/system is applied consistently.
 - The method/system is implemented by all relevant functions/work units in accordance with the design.
- c. Learning refers to:
 - Method/system improvement through evaluation and improvement cycles.
 - Method/system innovation to drive breakthrough change.
 - Share the results of method/system improvements and innovations with other work units and other relevant process owners in the Company.
- d. Integration refers to:
 - Alignment of method/system with Company's requirements described in the Company Profile and in other process subcategories.
 - Size, information, and improvement systems have been complementary/mutually compatible across work units and across processes.
 - Work programs, processes, outcome, analysis, learning, and actions are harmonized across processes and across work units to support the achievement of Company's goals.

Subcategories on the process factor, which consists of ADLI, are clarified and interconnected to emphasize that the Approach description must always show consistent application with the specific requirements of a subcategory and the Company. In addition, as the process matures, the description must also show how the learning cycle (including innovation) and integration with other work processes and with other work units.

2. Outcome Assessment Factor

Factors used to evaluate Company's outcome are Level, Trend, Comparison, and Integration (LeTCI), which are described as follows:

- a. **Level** refers to the level of achievement of current performance.

- b. **Trend** mengacu pada tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan keluasan tingkat penerapan dari hasil-hasil kinerja;
 - c. **Comparison** mengacu pada perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap pembanding yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis, dan perbandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia;
 - d. **Integration** mengacu pada ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam profil perusahaan dan sub kategori serta hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang kemudian hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran perusahaan.
- b. **Trend** refers to the level of performance improvement or ability to maintain good performance at a minimum in the last 3 (three) years and the extent of application of performance outcome.
 - c. **Comparison** refers to a comparison of Company's performance relative to appropriate comparison, for example, competitors or companies in similar industries, and comparison of Company's performance relative to benchmarks or industry leaders, or with world-class companies.
 - d. **Integration** refers to the measurement of outcome related to the performance requirements of customers, products, markets, processes, and main work programs, which are explained in the Company profile and subcategories and the outcome covering valid indicators of future performance, in which afterward the outcome are harmonized across processes and cross-units to support Company's goals.

Subkategori pada faktor hasil tersebut diklarifikasi oleh data yang menunjukkan level kinerja, tren dan pembandingan yang relevan untuk ukuran dan indikator utama kinerja perusahaan serta terintegrasi dengan persyaratan utama Perusahaan. Subkategori pada faktor hasil juga diklarifikasi oleh data tentang luasnya cakupan hasil kinerja yang dilaporkan. Secara langsung, hal ini terkait dengan penerapan dan pembelajaran Perusahaan; jika proses perbaikan disebarkan secara luas maka harusnya ada hasilnya yang sesuai.

Subcategories on this outcome factor are clarified with data showing the level of performance, trends, and relevant comparisons for the size and key indicators of company performance and integrated with the Company's main requirements. Subcategories on outcome factors are also clarified with data on the scope of reported performance outcomes. This directly relates to the application and learning of the Company; if the improvement process is widely distributed, then there should be an appropriate result.

Selain kedua faktor penting dalam evaluasi dan umpan balik yaitu proses dan hasil, terdapat pertimbangan yang kritikal dan sangat penting dalam evaluasi dan umpan balik yang dilaporkan. Faktor dimaksud adalah bisnis utama yang harus diidentifikasi dalam profil perusahaan, persyaratan pelanggan utama, lingkungan kompetitif, kebutuhan tenaga kerja, tujuan strategis utama, dan program kerja.

In addition to the two important factors in evaluation and feedback, namely process and outcome, there are critical and crucial considerations in the evaluation and feedback reported, namely the main business factors that must be identified in the Company profile, key customer requirements, competitive environment, labor requirements work, main strategic goals, and work programs.

Penetapan Skor

Penetapan skor secara umum dilakukan berdasarkan agregat pandangan holistik dari ke-4 (empat) faktor dimensi penilaian ADLI untuk "Proses" atau LeTCI untuk "Hasil." Dalam menetapkan asumsi kisaran rentang nilai awal, disarankan untuk tidak memudahkan dengan cara membandingkan atau merata-ratakan hasil penilaian dari masing-masing dimensi penilaian A, D, L pada penilaian PROSES dan I atau Le,T,C dan I pada penilaian HASIL.

Scoring

Scoring is generally done based on an aggregate holistic view of the 4 (four) factor dimensions of ADLI assessment for "Process" or LeTCI for "Outcome." Therefore, in setting assumptions for the range of initial scores, it is recommended not to make it easy by comparing or averaging the assessment results from each of the dimensions of assessments A, D, L in the PROCESS assessment and I or Le, T, C and I in the OUTCOME assessment.

Proses Process	Hasil Result
Skor 50%: Mencerminkan adanya cara/metode/sistem yang menjawab seluruh pertanyaan pada kriteria persyaratan umum (<i>Overall Requirement</i>), telah dijalankan secara konsisten cara tersebut pada sebagian besar unit kerja yang harus menerapkannya, telah dilakukan beberapa kali proses perbaikan dan pembelajaran yang mengarah kepada kebutuhan utama perusahaan. Score 50%: Reflects the existence of an approach that answers all questions in the general requirements criteria (<i>Overall Requirements</i>), has been carried out consistently in most work units that have to implement it, the process of improvement and learning has been done several times that leads to the Company's main needs.	Skor 50%: Mencerminkan adanya pencapaian tingkat kinerja yang baik, <i>trend</i> yang positif, dibandingkan dengan pembanding (<i>benchmark</i>) yang sesuai untuk setiap indikator kinerja sesuai persyaratan di setiap item kategori yang keberadaannya penting bagi bisnis atau misi organisasi. Score 50%: Reflects the achievement of a good level of performance, a positive trend, compared to the appropriate benchmark for each performance indicator according to the requirements in each category item whose existence is important to the organization's business and mission.
Skor >50%: Harus dapat ditunjukkan proses yang berkualitas tinggi, ditunjukkan penerapannya yang lebih baik dan tidak ditemukan kendala dalam penerapan, terjadi pembelajaran organisasi yang signifikan dan terintegrasi dengan proses-proses lainnya dan mengarah pada keberhasilan kinerja. Score >50%: High quality processes must be demonstrated, better implementation and no obstacles found in implementation, significant organizational learning takes place and is integrated with other processes and leads to successful performance.	Skor >50%: Skor lebih dari 50% harus dapat ditunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang lebih baik juga <i>trend</i> yang lebih tinggi, dibandingkan kinerjanya dengan kinerja pembanding yang lebih kuat maknanya bagi perusahaan dan memiliki jangkauan lebih luas dan integrasi dengan persyaratan atau misi organisasi. Scores >50%: Scores of more than 50% should be able to show a better level of performance achievement as well as a higher trend, compared to performance with comparative performance that is stronger in meaning for the Company and has wider reach and integration with the organization's requirements or mission.

Hasil Evaluasi dan Penilaian KPKU

Penilaian KPKU terakhir dilaksanakan untuk tahun buku 2019. Pada tahun 2020 dan 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara tidak menyelenggarakan penilaian KPKU.

Kendati demikian, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara terus menerus, baik pada proses maupun hasil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Perusahaan, sehingga dapat menciptakan nilai tambah Perusahaan sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Karena itulah, PPA secara konsisten telah melaksanakan penilaian KPKU bersama Forum Ekselen BUMN (FEB), karena sejalan dengan tujuan Perusahaan, yaitu menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi. Melalui penilaian KPKU, maka dapat diketahui posisi Perusahaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan *improvement* baik pada proses maupun hasil-hasil bisnis Perusahaan serta diharapkan dapat meningkatkan skor KPKU di tahun berikutnya.

KPKU Evaluation and Assessment Results

The Company carried out the last KPKU assessment for the 2019 fiscal year. In 2020 and 2021, the Ministry of State-Owned Enterprises decided not to carry out the KPKU assessment.

However, the Company is committed to continuously making persistent improvements both in processes and results to increase the Company's competitiveness to create added value for the Company in accordance with the expectations of Shareholders and other Stakeholders.

Therefore, PPA has consistently implemented KPKU assessments with the BUMN Excellence Forum (FEB) because it is in line with the Company's goal to become a leading investment company and a trusted partner in corporate restructuring. Through the KPKU assessment, the Company will know its position and can make improvements both to the Company's business processes and results and increase the KPKU score in the following year.

Resume Hasil Skor KPKU

Resume of KPKU Score

No.	Kategori / Sub Kategori Category/Subcategory	Skor Maksimal Maximum Score	Skor Pencapaian Achievement Score				
			2021	2020	2019	2018	2017
1	Kepemimpinan Leadership						
1.1	Kepemimpinan Senior Senior Leadership	70,00	-	-	35,00	-	38,50
1.2	Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat Governance and Community Responsibility	50,00	-	-	27,50	-	30,00
2	Perencanaan Strategis Strategic Planning						

No.	Kategori / Sub Kategori Category/Subcategory	Skor Maksimal Maximum Score	Skor Pencapaian Achievement Score				
			2021	2020	2019	2018	2017
2.1	Pengembangan Strategi Strategy Development	40,00	-	-	22,50	-	24,75
2.2	Implementasi Strategi Strategy Implementation	45,00	-	-	20,00	-	20,00
3	Fokus Pelanggan Customer Focus		-	-			
3.1	Suara Pelanggan Customer Voice	45,00	-	-	20,00	-	22,00
3.2	Keterikatan Pelanggan Customer Engagement	40,00	-	-	24,75	-	24,75
4	Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan Measurement, Analysis, and Knowledge Management						
4.1	Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan Kinerja Perusahaan Measurement, Analysis, and Improvement of Company Performance	45,00	-	-	22,50	-	22,50
4.2	Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi Management of Information, Knowledge, and Information Technology	45,00	-	-	22,50	-	22,50
5	Fokus Tenaga Kerja Employee Focus						
5.1	Lingkungan Tenaga Kerja Employee Environment	40,00	-	-	22,00	-	22,00
5.2	Keterikatan Tenaga Kerja Employee Engagement	45,00	-	-	22,50	-	22,50
6	Fokus Operasi Operations Focus		-	-		-	
6.1	Sistem Kerja Work System	45,00	-	-	22,50	-	24,75
6.2	Proses Kerja Work Process	40,00	-	-	20,00	-	22,00
	Skor Proses Process Score	550,00	-	-	281,75	-	296,25
7	Hasil-hasil Outcome						
7.1	Hasil-hasil Produk dan Proses Product and Process Outcome	110,00	-	-	60,00	-	49,50
7.2	Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan Customer Focus Outcome/Performance	85,00	-	-	40,00	-	42,50
7.3	Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja Employee Focus Outcome/Performance	85,00	-	-	40,00	-	38,25
7.4	Hasil-hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance Outcome	80,00	-	-	40,00	-	36,00
7.5	Hasil-hasil Keuangan dan Pasar Financial and Market Outcome	90,00	-	-	49,50	-	45,00
	Skor Hasil Outcome Score	450,00	-	-	229,50	-	211,25
	Jumlah Total	1.000,00	-	-	511,25	-	507,50

Evaluasi Hasil Penilaian

Dari hasil penilaian tersebut, Tim Evaluator KPKU mengeluarkan umpan balik yang menghasilkan peluang perbaikan (*Opportunity for Improvements*) dan kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan *improvement* baik proses maupun *improvement* hasil-hasil bisnis Perusahaan serta diharapkan meningkatnya skor KPKU di tahun berikutnya.

Evaluation of Results

From the report, KPKU Evaluator Team issued feedback that resulted in the Opportunity for Improvements and Strengths of the Company to be used as a basis for making improvements both in the process and business outcome of the Company and expected to increase the KPKU score in the following year.

Struktur dan Mekanisme GCG

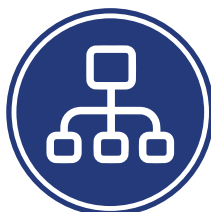
GCG STRUCTURE AND MECHANISM

Perusahaan menerapkan GCG secara sistematis dan berkesinambungan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam implementasinya, penerapan tersebut dilengkapi dengan struktur tata kelola (*governance structure*) serta mekanisme atau proses tata kelola (*governance process*). Kedua aspek ini saling berkesinambungan untuk mewujudkan komitmen sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*.

The implementation of corporate governance is carried out systematically and continuously, in which the GCG principles are made as a reference in daily activities. GCG implementation in the Company consists of Governance Structure and Governance Process. These two aspects are mutually sustainable to embody the commitments so that the governance outcomes can be achieved in accordance with the principles of Good Corporate Governance.



Prinsip Tata Kelola
Governance Principles



Struktur Tata Kelola
Governance Structure



Mekanisme Tata Kelola
Governance Process



Hasil Tata Kelola
Governance Outcome

Struktur tata kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan mekanisme tata kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

The Governance Structure is the organs or devices owned by the Company, either organ or device that was formed due to compliance with applicable laws and regulations, as well as an organ or device formed due to internal needs to improve GCG implementation. While the Governance Process is a series of processes, practices, rules, and institutions that affect the Company's overall management. The Governance Process includes rules and legislation that apply to the Company, Permanent Procedures, a Charter, documents, and rules that govern the relationship between organs or devices.

THE CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

According to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies Chapter I on General Regulation Article 1, the Company's structure consists of General Meetings of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Implementasi GCG Perusahaan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam perkembangannya, ketiga organ tersebut membutuhkan dukungan dari infrastruktur tambahan tata kelola Perusahaan, baik berupa sistem/mekanisme (*soft structure*) maupun unit kerja (*hard structure*).

Pelaksanaan GCG Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengurusan Perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite-Komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan adalah:

1. Komite Audit

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya, seperti Laporan Keuangan, Laporan Manajemen, Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara, dan Laporan Tahunan Perusahaan.

1. General Meetings of Shareholders, or later stated as GMS is the Company's Structure with distinctive authority that is neither delegated to Board of Directors or Board of Commissioners in limit as set forth in the Law and/or Articles of Association.
2. Board of Directors is part of the Company's structure with full authority and responsibility on the Company's management for the Company's interest, according to purposes and objectives of the Company and represents the Company on and off the court according to provisions in the Articles of Association.
3. Board of Commissioners is part of the Company's Structure with the duty to perform general and/or specific supervision according to Articles of Association and provide advice to Board of Directors.

GCG implementation in the Company refers to the optimization of roles and relationships among the Company's Structures, including General Meetings of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In the actual condition, those three structures require support from Corporate Governance additional infrastructures, both system/mechanism (*soft structure*) and working unit (*hard structure*).

GCG implementation in the Company also refers to provisions in the Law, Articles of Association, and other regulations based on the principle that each structure has independency in carrying out the duty, function, and responsibility for the Company's interest. Accordingly, the GMS, the Board of Directors, and the Board of Commissioners respect each others' duty, responsibility, and authority according to the Company's Law and Articles of Association.

In carrying out the Company's managerial duty, the Board of Directors is assisted by Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Strategic Planning and Performance Management, Risk Management Function, Investment and Risk Management Committee, and other working units that perform the Company's managerial function.

While carrying out the supervisory duty, the Board of Commissioners may establish committees with one member or more appointed by the Board of Commissioners and be responsible to the Board of Commissioners. Accordingly, the Board of Commissioners has established Committees as follows:

1. Audit Committee

Committee that is established by Board of Commissioners to help Board of Commissioners in fulfilling its duty and obligation to review effectiveness of internal control system, external and internal auditor's duty implementation, as well as to review and to grant approval on every information and recommendation that is prepared and proposed by other parties such as Financial Statements, Government Investment Proceeds Realization Report, and Annual Report of the Company.

2. Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap implementasi GCG dan manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berkaitan dalam transparansi proses nominasi dan remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Risk Oversight and GCG Committee

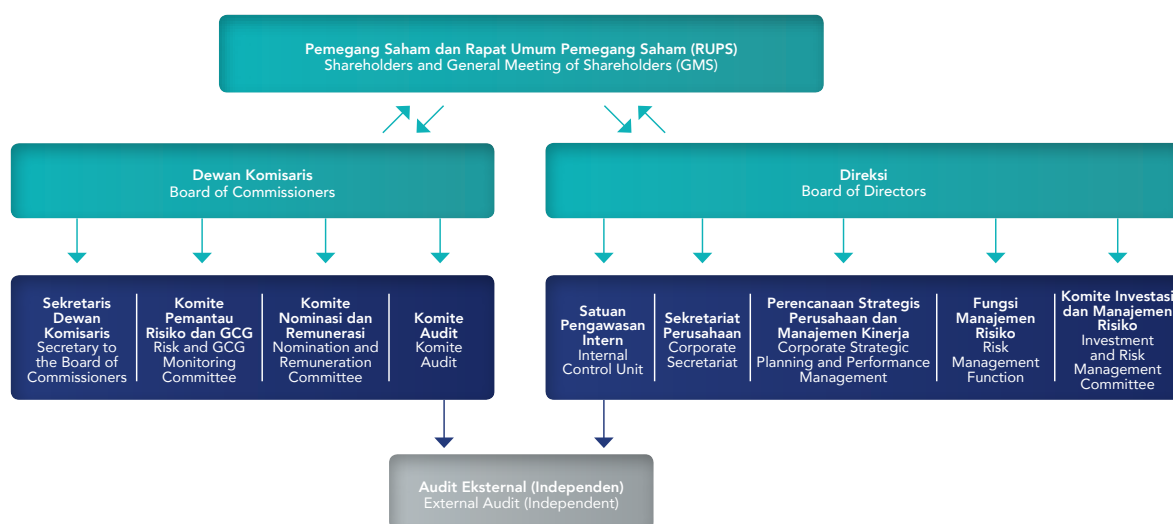
Committee that is established by Board of Commissioners to help Board of Commissioners' duty and function to regularly oversee and recommend improvement on GCG and risk management implementation that are carried out and developed by the Company.

3. Nomination and Remuneration Committee

Committee that is formed by Board of Commissioners in order to improve the implementation of Good Corporate Governance principles related to the transparency of nomination and remuneration process as well as to improve the quality, competencies, and responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners.

STRUKTUR TATA KELOLA PPA

PPA Governance Structure

**Mekanisme Tata Kelola Perusahaan**

Mekanisme tata kelola dalam implementasi GCG tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur pemerintahan, melainkan dibutuhkan adanya peraturan yang jelas dalam bentuk mekanisme. Mekanisme tata kelola dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Corporate Governance Mechanism

Governance mechanism is a GCG implementation mechanism that is reflected in a strong system. This is important as the GCG implementation will be not sufficient if only relying on governance structure pillar but also requiring clear regulation as a mechanism. Governance mechanism can be defined as a clear rule of the game, procedure, and relationship between the decision-maker with the controller (supervisor) of the decision.



Undang-undang dan Peraturan yang berlaku
Applicable Laws and Regulations



Anggaran Dasar Perusahaan
The Company's Articles of Association



Kebijakan, Aturan dan Prosedur Tetap
Policies, Rules, and Permanent Procedures

Perusahaan telah menyusun dan melakukan kajian secara periodik terhadap Kebijakan, Aturan dan Prosedur Tetap, meliputi antara lain:

The Company has compiled and conducted periodic reviews of its Policies, Rules and Procedures, which include:

No.	Nomor SK SK No	Tanggal Date	Perihal Subject
1	SK-16/PPA/0421	6 April 2021 April 6, 2021	Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Training and Development Policy of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2	SK-17/PPA/0421	6 April 2021 April 6, 2021	Kebijakan Beasiswa Karyawan Berprestasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Scholarship Policy for Outstanding Employees of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
3	SK-22/PPA/0521	5 Mei 2021 May 5, 2021	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor Sk-35/PPA/0615 tentang Kebijakan Penerbitan dan Pengamanan Dokumen Perusahaan Second Amendment to the Decree of the Board of Directors Number Sk-35/PPA/0615 concerning Policy on Issuance and Security of Company Documents
4	SK-23A/PPA/0521	23 Mei 2021 May 23, 2021	Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Financial Accounting Policy of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
5	SK-02/KEP.KOM/PPA/VI/2021 SK-25/PPA/0621	2 Juni 2021 June 2, 2021	Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Policy) Good Corporate Governance Policy
6	SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021 SK-45/PPA/0821	24 Agustus 2021 August 24, 2021	Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) Code of Conduct
7	SK-63/PPA/0921	29 September 2021 September 29, 2021	Pembentukan Tim Perwakilan Karyawan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Formation of the Employee Representative Team of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
8	SK-64/PPA/1021	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
9	SK-66/PPA/1021	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Penetapan Jabatan Karyawan pada Satuan Kerja Determination of Employee Positions in Work Units
10	SK-74/PPA/1121	2 November 2021 November 2, 2021	Kebijakan Penerimaan Karyawan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Employment Policy of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
11	SK-75/PPA/1121	2 November 2021 November 2, 2021	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor SK-16/PPA/0421 tentang Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Amendment to the Decree of the Board of Directors Number SK-16/PPA/0421 Regarding Training and Development Policy
12	SK-80/PPA/1121	5 November 2021 November 5, 2021	Kebijakan Lindung Nilai Hedging Policy

Upaya Sosialisasi Keberadaan Struktur dan Mekanisme Tata Kelola kepada Pemangku Kepentingan

Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi mengenai tata kelola secara berkesinambungan dengan melakukan pemutakhiran aturan terkait tata kelola, antara lain berupa Keputusan Direksi pada *website* Perusahaan.

The Socialization of Governance Structure and Process to Stakeholders

The Company continuously conducts the socialization on an ongoing basis by updating the rules related to governance, including the Decree of the Board of Directors on the Company's website.

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

Sebagai salah satu organ utama Perusahaan, RUPS diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Per 31 Desember 2021, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki seluruh saham Perusahaan atau sebesar 100,00%. Negara Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

General Meeting of Shareholders (GMS) is a Corporate Structure with the authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within limits specified in the Law and/or Articles of Association. Such authority includes holding the Board of Commissioners and Board of Directors accountable in relation to the management of the Company, amending the Articles of Association, appointing and dismissing the Board of Directors and/or Board of Commissioners, deciding on the division of duties and management authority among the Board of Directors and others.

As one of the Company's main structures, it is regulated in Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, and Regulation of the Minister of SOE No: Per-01/MBU/2011 regarding The Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise, as amended with Regulation of the Minister of SOEs No: Per-09/MBU/2012 regarding Amendment to Regulation of the Minister of SOE No: Per-01/MBU/2011 regarding The Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

SHAREHOLDERS

In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 regarding the Delegation of Position, Duties, and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Company (Persero), Public Company (PERUM), and Service Company (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 regarding The State-Owned Enterprises and the State Gazette of the Republic of Indonesia; the Proxy of Shareholders of the Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

As of December 31, 2021, the Company's Major/Controlling Shareholder is the Republic of Indonesia, which owned the Company's total shares or amounting to 100.00%. Accordingly, the Republic of Indonesia is, at the same time, the Company's ultimate owner entity.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PER DESEMBER 2021

Shareholder Compositions as per December 2021



100%

**Seluruh Saham PPA dimiliki
oleh Negara Republik
Indonesia**

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur hak Pemegang Saham pada RUPS meliputi:

1. Mengusulkan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau 1/10 (1 orang atau lebih) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perusahaan;
2. Pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat mengusulkan agenda RUPS;
3. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
4. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi;
5. Menjalankan hak-hak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Akses informasi kepada Pemegang Saham

Perusahaan memberikan jaminan akses informasi yang setara kepada seluruh Pemegang Saham, yang antara lain melalui laporan yang disampaikan atau melalui saluran informasi Perusahaan, seperti *website*: <https://www.ptppa.com>. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham Perusahaan antara lain:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perusahaan;
3. Laporan Manajemen Perusahaan yang disampaikan setiap triwulan; dan
4. Publikasi laporan kegiatan Perusahaan melalui media massa dan *website* Perusahaan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepemilikan saham Perusahaan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kebijakan hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Tata Aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Rights of Shareholders

Shareholders as capital owners have rights and responsibilities in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies has regulated the rights of Shareholders at the GMS, including:

1. Propose the convention of the GMS by the Shareholders of Series A Dwiwarna or 1/10 (1 person or more) of the number of shares issued by the Company;
2. Holders of Series A Dwiwarna share may propose the agenda of the GMS;
3. Attend and voting in GMS;
4. Receive dividend payment and the remaining wealth from liquidation;
5. Exercise other rights as what have been disclosed in Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Articles of Association.

The Information Access for Shareholders

The Company guarantees equal access to information to all Shareholders, among others, through the submitted reports or the Company's information channels, such as the *website*: <https://www.ptppa.com>. The access that the Company owns and operates that is easily accessible to all of its Shareholders include:

1. Audited Annual Financial Statements;
2. Annual Report;
3. Quarterly Management Report; and
4. The Publication of Corporate Activity Report through Mass Media and the Company *website*.

The Shareholders Relation Policy

The Company's share ownership is 100% held by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises. The relationship policy between the Company and Shareholders is regulated under Article 14 of Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprise and the provisions as disclosed in The Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise.

JENIS RUPS

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan ketentuan tersebut, RUPS terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, Laporan Tahunan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukan Akuntan Publik serta hal lainnya demi kepentingan Perusahaan.

Sedangkan RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Pelaksanaannya dapat berbentuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB) atau RUPS Sirkuler.

Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur GCG sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perusahaan.

WEWENANG RUPS

Wewenang RUPS yang dimaksud, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan;
2. Menetapkan pembatasan kewenangan Direksi berdasarkan jumlah dan/atau jangka waktu atas kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. Berdasarkan usulan/permintaan Direksi, RUPS dapat menyetujui pengalihan lebih dari 50% kekayaan bersih Perusahaan sebagai jaminan hutang;
4. Mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar;
5. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
6. Menyetujui laporan tahunan dan penggunaan laba bersih Perusahaan dalam RUPST;
7. Menyetujui RKAP serta RJPP; dan
8. Menetapkan Auditor Eksternal dengan mempertimbangkan pendapat Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Kewenangan tersebut harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

TYPE OF GMS

The convention of the Company's GMS refers to the Articles of Association, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Under these provisions, the GMS is divided into 2 (two) types, Annual GMS and Other GMS.

The Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the end of the financial year. At Annual GMS, the Board of Directors' report on the annual calculation, Annual Report on the condition and operation of the Company, plans for the use of profits and the amount of dividends to be paid, requests for the appointment of a Public Accountant and other matters for the best interest of the Company.

Other GMS may be held at any time based on the Company's need and best interest. A GMS can be convened as Extraordinary GMS (EGMS) or a Circular GMS.

Both the Annual GMS and Other GMS have the highest authority in the GCG structure and is a forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the Company's Management.

GMS AUTHORITY

The referred GMS Authorities, are as follows:

1. To appoint and to dismiss Board of Directors and Board of Commissioners members. Board of Commissioners and Board of Directors members who are appointed in the GMS shall be appointed from fit and proper candidates for the Company.
2. To determine the limit of Board of Directors' authority based on the number and/or the period of certain activities as stated in the Articles of Association
3. To approve for transferring more than 50% of the Company's net assets as collateral as per Board of Directors' suggestions/demands;
4. To reduce the limit on Board of Directors' actions as regulated in the Articles of Association or to determine other limits on Board of Directors outside the stipulations in the Articles of Association;
5. To determine the division of duties and authorities of Board of Directors members;
6. To give approval for the annual report and the utilization of Company's net profit in the Annual General Meeting Shareholder;
7. To give approval for the Company's budget plan and the Company's long term plan; and
8. To determine the external auditor by considering opinions from the Audit Committee submitted to the Board of Commissioners.

The authorities shall be implemented fairly and transparently by concerning necessary aspects to maintain the Company's long-term business interest.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, penyelenggaraan RUPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di mana pun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS;
5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan: a) seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah; atau b) Dewan Komisaris;
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;
7. Surat tercatat yang dimaksud disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
8. Alasan permintaan penyelenggaraan RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada: a) Direksi tidak melaksanakan RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau c) dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan;
9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: a) permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
12. RUPS yang diselenggarakan Direksi hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Direksi dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Dewan Komisaris;
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu masing-masing 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat izin

Provisions of GMS Convention

According to the Company's Articles of Association, GMS' provisions are as follows:

1. All GMS are convened on the location of the Company or on which the Company's operations within the territory of the Republic of Indonesia;
2. If in the GMS all shareholders attend and/or are represented, and all shareholders approved for the GMS convention, then the GMS can be convened at any place within the territory of the Republic of Indonesia;
3. GMS shall make a resolution if it has been approved unanimously;
4. Board of Directors convenes Annual GMS and Extraordinary GMS by conducting the summons first for GMS;
5. GMS can be convened upon the request from: a) one or more shareholders who represent, at the least, 1/10 (one tenths) of total outstanding shares of the Company with valid voting rights; or b) Board of Commissioners;
6. Such request for holding the GMS is proposed to Board of Directors with a registered letter stating the reason;
7. The registered letter is submitted to the shareholders and forwarded to Board of Commissioners;
8. The reasons of the request for holding GMS are, but not limited to the following: a) Board of Directors does not convene an Annual GMS based on the prevailing regulations; b) the tenure for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners will expire; or c) in the event Board of Directors is absent or there is a dissenting opinion or conflict of interest among the Company's Board of Directors;
9. Board of Directors is obliged to announce the summons for GMS within the period of 15 (fifteen) days since the date of the request for GMS convention is received, at the latest;
10. In terms that Board of Directors does not make the summons, then: a) the requested for GMS convention by the shareholders is requested to the Board of Commissioners; or b) Board of Commissioners makes the summons;
11. Board of Commissioners is obliged to announce the summons for GMS within the period of 15 (fifteen) days since the date of the request for GMS convention is received, at the latest;
12. The GMS that is convened by Board of Directors shall discuss only the issues related to the agenda of Board of Directors and other agenda deemed significantly by Board of Directors;
13. The GMS that is convened by Board of Commissioners shall discuss only the issues related to the agenda of Board of Commissioners.
14. In terms that neither Board of Directors nor Board of Commissioners does not make the summons for GMS within period of 15 (fifteen) days since the date of the request for GMS convention is received, the shareholders demanding the convention of GMS may make the summons after the decree approval from the

dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan;

15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
18. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta; dan
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan isi dalam media penyampaian yang dimaksud, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

head of the District Court whose legal area covers the location of the Company;

15. GMS' summon are conducted within the period of 14 (fourteen) days prior to the convention date of GMS, excluding the date of the summons and the date of the GMS;
16. The summons for GMS is announced through the registered letter and/or the advertisement in newspaper;
17. In the announcement, the date, place, and agenda of the GMS shall be disclosed, and that the material to be discussed in the GMS is available at the Company's office since the summons date of GMS until the date of GMS convention;
18. The Company is obliged to provide the copy of GMS' material; to the Shareholders freely upon demand; and
19. In the event that the summons are not made in accordance with the provisions of time limit and contents in the above-mentioned media or that the summons are not made in accordance with the prevailing requirements, GMS is able to make the valid resolutions if all shareholders with valid the attended voting rights or are represented in the GMS and the resolution is made unanimously.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2021

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021
2. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Selain itu, Perusahaan juga menerima Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang terkait dengan:

1. Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham
2. Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
3. Perubahan jenis saham dan perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

THE CONVENTION OF ANNUAL GMS IN 2021

Throughout 2021, the Company held 2 (two) GMS, namely:

1. Annual GMS to Approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021
2. Annual GMS for Fiscal Year 2020

In addition, the Company also accepted the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of the Company related to:

1. Approval of Acceptance of Transfer of Shares
2. Appointment of members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.
3. Changes in types of shares and changes in the Articles of Association of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) 2021

ANNUAL GMS APPROVAL OF CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET (RKAP) 2021

Hari/Tanggal Day/Date	Jumat, 29 Januari 2021 Friday, January 29, 2021
Waktu Time	13:36-14:24 WIB 1:36 PM – 2:24 PM WIB
Tempat Place	Zoom Meeting Zoom Meeting
Kehadiran Attendance	Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia: Yohanes Babtista Priyanto Hadi, Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Yohanes Babtista Priyanto Hadi, Assistant Deputy for Transportation Facilities and Infrastructure, Ministry of SOEs Dewan Komisaris Board of Commissioner Krisna Wijaya Marwanto Harjowiryo Direksi: Board of Directors Yadi Jaya Ruchandi Rizwan Rizal Abidin Adi Pamungkas Daskian

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Pelaksanaan penghitungan suara dalam RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham

Involvement of Independent Parties in Vote Counting

Voting in the GMS was conducted by Shareholders.

Agenda, Keputusan, dan Tindak Lanjut

Agenda, Decision, and Follow-up

Agenda Agenda	Keputusan Decision	Resolution																											
Agenda 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris tahun 2021.	Mengesahkan RKAP dan RKA tahun 2021, dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Laporan Laba/Rugi Konsolidasian (Rp Miliar)	Ratify the 2021 RKAP and RKA with the following points: a. Consolidated Profit/Loss Statement (Billion Rupiah)																											
Agenda 1: Ratification of the 2021 Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners.	<table> <tr> <th>Uraian</th><th>RKAP 2021</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Pendapatan Usaha</td><td>6.774,94</td><td>Revenue</td></tr> <tr> <td>Beban Pokok Pendapatan</td><td>4.798,21</td><td>Cost of goods Sold</td></tr> <tr> <td>Laba Kotor</td><td>1.976,73</td><td>Gross Profit</td></tr> <tr> <td>Beban Usaha</td><td>1.578,70</td><td>Operating Expense</td></tr> <tr> <td>Laba Usaha</td><td>400,03</td><td>Operating Income</td></tr> <tr> <td>Laba Sebelum Pajak</td><td>150,51</td><td>Income before tax</td></tr> <tr> <td>Laba Bersih</td><td>122,55</td><td>Net Profit</td></tr> <tr> <td>EBITDA</td><td>1.275,86</td><td>EBITDA</td></tr> </table>	Uraian	RKAP 2021	Description	Pendapatan Usaha	6.774,94	Revenue	Beban Pokok Pendapatan	4.798,21	Cost of goods Sold	Laba Kotor	1.976,73	Gross Profit	Beban Usaha	1.578,70	Operating Expense	Laba Usaha	400,03	Operating Income	Laba Sebelum Pajak	150,51	Income before tax	Laba Bersih	122,55	Net Profit	EBITDA	1.275,86	EBITDA	
Uraian	RKAP 2021	Description																											
Pendapatan Usaha	6.774,94	Revenue																											
Beban Pokok Pendapatan	4.798,21	Cost of goods Sold																											
Laba Kotor	1.976,73	Gross Profit																											
Beban Usaha	1.578,70	Operating Expense																											
Laba Usaha	400,03	Operating Income																											
Laba Sebelum Pajak	150,51	Income before tax																											
Laba Bersih	122,55	Net Profit																											
EBITDA	1.275,86	EBITDA																											



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Agenda Agenda	Keputusan	Resolution																								
	b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp Miliar)	b. Consolidated Statement of Financial Position (Billion rupiah)																								
	<table><tr><th>Uraian</th><th>RKAP 2021</th><th>Description</th></tr><tr><td>Aset Lancar</td><td>10.821,76</td><td>Current Asset</td></tr><tr><td>Aset Tidak Lancar</td><td>11.018,03</td><td>Non Current Asset</td></tr><tr><td>Jumlah Aset</td><td>21.839,79</td><td>Total Asset</td></tr><tr><td>Liabilitas Jangka Pendek</td><td>8.144,04</td><td>Short Term Liability</td></tr><tr><td>Liabilitas Jangka Panjang</td><td>6.927,10</td><td>Long Term Liability</td></tr><tr><td>Jumlah Liabilitas</td><td>15.071,14</td><td>Total Liability</td></tr><tr><td>Ekuitas</td><td>6.768,65</td><td>Equity</td></tr></table>	Uraian	RKAP 2021	Description	Aset Lancar	10.821,76	Current Asset	Aset Tidak Lancar	11.018,03	Non Current Asset	Jumlah Aset	21.839,79	Total Asset	Liabilitas Jangka Pendek	8.144,04	Short Term Liability	Liabilitas Jangka Panjang	6.927,10	Long Term Liability	Jumlah Liabilitas	15.071,14	Total Liability	Ekuitas	6.768,65	Equity	
Uraian	RKAP 2021	Description																								
Aset Lancar	10.821,76	Current Asset																								
Aset Tidak Lancar	11.018,03	Non Current Asset																								
Jumlah Aset	21.839,79	Total Asset																								
Liabilitas Jangka Pendek	8.144,04	Short Term Liability																								
Liabilitas Jangka Panjang	6.927,10	Long Term Liability																								
Jumlah Liabilitas	15.071,14	Total Liability																								
Ekuitas	6.768,65	Equity																								
	c. Laporan Arus Kas Konsolidasian (Rp Miliar)	c. Consolidated Statement of Cash Flows (Rp Billion)																								
	<table><tr><th>Uraian</th><th>RKAP 2021</th><th>Description</th></tr><tr><td>Aset Lancar</td><td>10.821,76</td><td>Current Asset</td></tr><tr><td>Aset Tidak Lancar</td><td>11.018,03</td><td>Non Current Asset</td></tr><tr><td>Jumlah Aset</td><td>21.839,79</td><td>Total Asset</td></tr><tr><td>Liabilitas Jangka Pendek</td><td>8.144,04</td><td>Short Term Liability</td></tr><tr><td>Liabilitas Jangka Panjang</td><td>6.927,10</td><td>Long Term Liability</td></tr><tr><td>Jumlah Liabilitas</td><td>15.071,14</td><td>Total Liability</td></tr><tr><td>Ekuitas</td><td>6.768,65</td><td>Equity</td></tr></table>	Uraian	RKAP 2021	Description	Aset Lancar	10.821,76	Current Asset	Aset Tidak Lancar	11.018,03	Non Current Asset	Jumlah Aset	21.839,79	Total Asset	Liabilitas Jangka Pendek	8.144,04	Short Term Liability	Liabilitas Jangka Panjang	6.927,10	Long Term Liability	Jumlah Liabilitas	15.071,14	Total Liability	Ekuitas	6.768,65	Equity	
Uraian	RKAP 2021	Description																								
Aset Lancar	10.821,76	Current Asset																								
Aset Tidak Lancar	11.018,03	Non Current Asset																								
Jumlah Aset	21.839,79	Total Asset																								
Liabilitas Jangka Pendek	8.144,04	Short Term Liability																								
Liabilitas Jangka Panjang	6.927,10	Long Term Liability																								
Jumlah Liabilitas	15.071,14	Total Liability																								
Ekuitas	6.768,65	Equity																								
	d. Investasi (Rp Miliar)	d. Investment (Rp Billion)																								
	<table><tr><th>Uraian</th><th>RKAP 2021</th><th>Description</th></tr><tr><td>Penyertaan</td><td>438,75</td><td>Inclusion</td></tr><tr><td>Properti Investasi</td><td>10,00</td><td>Investment Property</td></tr><tr><td>Investasi Lainnya</td><td>268,04</td><td>Other Investments</td></tr><tr><td>Total</td><td>716,79</td><td>Total</td></tr></table>	Uraian	RKAP 2021	Description	Penyertaan	438,75	Inclusion	Properti Investasi	10,00	Investment Property	Investasi Lainnya	268,04	Other Investments	Total	716,79	Total										
Uraian	RKAP 2021	Description																								
Penyertaan	438,75	Inclusion																								
Properti Investasi	10,00	Investment Property																								
Investasi Lainnya	268,04	Other Investments																								
Total	716,79	Total																								
	Sumber pendanaan investasi berasal dari pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya serta modal sendiri.	Investment funding was sourced from bank loans and other financial institutions as well as own capital.																								
	e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	e. Work Plan and Budget of The Board of commissioner																								
	RKA Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam buku RKAP 2021.	Board of commissioner RKA as stated in the 2021 RKAP																								

Tindak Lanjut:
Target pada tabel tersebut di atas telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.

Follow up
Targets in the table above have been achieved, as can be seen in the Performance Evaluation Report for the Year Ended December 31, 2021.

Agenda Agenda	Keputusan	Resolution
Agenda 2: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2021 Agenda 2 : Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) 2021 Tindak Lanjut: Target pada tabel tersebut di atas telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021. Follow Up Targets in the table above have been achieved, as can be seen in the Performance Evaluation Report for the Year Ended December 31, 2021.	Mengesahkan RKA-TJSL Tahun 2021 dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. RKA pelaksanaan program TJSL tahun 2021 dengan besaran pelaksanaan program TJSL yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya ada laporan RKAP Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000. b. Rencana pelaksanaan program pendanaan UMK pada RKA 2021 sebesar Rp7.260.000.000 yang bersumber dari dana bergulir program pendanaan UMK.	Ratified the 2021 RKA-TJSL with the following points: a. The RKA for the implementation of the TJSL program in 2021 with the extent of implementation of the TJSL program that were sourced from the budget and calculated as a cost according to the Company's 2021 RKAP report of IDR 2,000,000,000. b. The implementation plan of the UMK funding program in RKA 2021 is IDR 7,260,000,000 sourced from revolving funds of the UMK funding program.
Agenda 3: Penetapan Key Performance Indicator (KPI) Direksi tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Agenda 3: Stipulation of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2021 as stated in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders. Tindak Lanjut: KPI Direksi telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021. Follow Up: The KPI of the Board of Directors has been achieved, as stated in the Performance Evaluation Report for the Year Ended December 31, 2021.	Menetapkan KPI Direksi tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.	Stipulated the 2021 Board of Directors KPI as stated in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders.



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Agenda Agenda	Keputusan	Resolution																																				
Agenda 4: Penetapan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Agenda 4: Stipulation of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2021 as stated in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.	Menetapkan KPI Dewan Komisaris tahun 2021 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.	Stipulated the 2021 KPI for the Board of Commissioners as stated in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and the Shareholders.																																				
Tindak Lanjut: KPI dewan Komisaris telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021. Follow up The Board of Commissioners' KPI has been achieved, as stated in the Performance Evaluation Report for the Year Ended December 31, 2021.																																						
Agenda 5: Penetapan indikator aspek operasional untuk pengukuran tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2021. Agenda 5: Stipulation of operational aspect indicators to measure the Company's health level in 2021.	Menetapkan indikator aspek operasional untuk pengukuran tingkat kesehatan tahun 2021, sebagai berikut: <table> <tr> <th>Indikator Aspek Operasional</th><th>Bobot Weight</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR</td><td>15</td><td>Government Assignment/Special Assignment/RR</td></tr> <tr> <td>Number of New Services/Project</td><td>15</td><td>Number of New Services/Project</td></tr> <tr> <td>Jumlah perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas</td><td>10</td><td>Number of companies acquired and/or disposed of</td></tr> <tr> <td>Realisasi program pelatihan karyawan</td><td>5</td><td>Employee training program realization</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>45</td><td>Total</td></tr> </table>	Indikator Aspek Operasional	Bobot Weight	Description	Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR	15	Government Assignment/Special Assignment/RR	Number of New Services/Project	15	Number of New Services/Project	Jumlah perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas	10	Number of companies acquired and/or disposed of	Realisasi program pelatihan karyawan	5	Employee training program realization	Total	45	Total	Stipulated operational aspects indicators to measure the level of health in 2021, as follows: <table> <tr> <th>Indikator Aspek Operasional</th><th>Bobot Weight</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR</td><td>15</td><td>Government Assignment/Special Assignment/RR</td></tr> <tr> <td>Number of New Services/Project</td><td>15</td><td>Number of New Services/Project</td></tr> <tr> <td>Jumlah perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas</td><td>10</td><td>Number of companies acquired and/or disposed of</td></tr> <tr> <td>Realisasi program pelatihan karyawan</td><td>5</td><td>Employee training program realization</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>45</td><td>Total</td></tr> </table>	Indikator Aspek Operasional	Bobot Weight	Description	Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR	15	Government Assignment/Special Assignment/RR	Number of New Services/Project	15	Number of New Services/Project	Jumlah perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas	10	Number of companies acquired and/or disposed of	Realisasi program pelatihan karyawan	5	Employee training program realization	Total	45	Total
Indikator Aspek Operasional	Bobot Weight	Description																																				
Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR	15	Government Assignment/Special Assignment/RR																																				
Number of New Services/Project	15	Number of New Services/Project																																				
Jumlah perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas	10	Number of companies acquired and/or disposed of																																				
Realisasi program pelatihan karyawan	5	Employee training program realization																																				
Total	45	Total																																				
Indikator Aspek Operasional	Bobot Weight	Description																																				
Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR	15	Government Assignment/Special Assignment/RR																																				
Number of New Services/Project	15	Number of New Services/Project																																				
Jumlah perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas	10	Number of companies acquired and/or disposed of																																				
Realisasi program pelatihan karyawan	5	Employee training program realization																																				
Total	45	Total																																				

Arahan Pemegang Saham

Shareholder Directive

No.	Arahan RUPS GMS Directive	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2021 Follow up as of December 31, 2021
1	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar berkomitmen untuk mengusahakan pencapaian target RKAP Tahun 2021 dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Tahun 2021 dengan berpedoman pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta menyiapkan langkah antisipasi (<i>contingency plan</i>) agar target RKAP tercapai. In conjunction with the supervision of the Board of Commissioners, The Board of Directors is committed to deliver the achievement of the 2021 RKAP target and Key Performance Indicators (KPI), guided by the principles of Good Corporate Governance (GCG) and professionalism in accordance with the provisions of the legislation and prepare contingency plans to assure the RKAP target achievement.	Komitmen Direksi untuk mengusahakan pencapaian target RKAP Tahun 2021 dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Tahun 2021 dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: a. Perusahaan memperoleh Pendapatan Usaha Konsolidasian pada Tahun 2021 sebesar Rp6.559.884 juta atau 97% dari target RKAP tahun 2021 sebesar Rp6.774.942 juta. b. Realisasi Beban Usaha Konsolidasian pada Tahun 2021 sebesar Rp6.264.226 juta atau 98% dari target RKAP tahun 2021 sebesar Rp6.374.913 juta (realiasi Beban Usaha lebih kecil dari yang ditargetkan). c. Pencapaian KPI sebesar 100,91. The commitment of the Board of Directors to deliver the 2021 RKAP target and Key Performance Indicators (KPI) can be seen from the following: a. In 2021, the Company has obtained a Consolidated Operating Revenues of IDR 6,559,884 million or 97% of the 2021 RKAP target of IDR 6,774,942 million b. Realization of Consolidated Operating Expenses in 2021 reached IDR 6,264,226 million or 98% of the 2021 RKAP target of IDR 6,374,913 million (The realization of Operating Expenses were smaller than the target). c. KPI achievement of 100.91.
2	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di semua lini usaha (<i>cost effectiveness program</i>) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, baik di induk perusahaan maupun di anak perusahaan. The Board of Director with supervision of the Board of Commissioners, strive to increase revenue and control costs in all lines of business (<i>cost effectiveness program</i>) in order to realize a more effective and efficient company's management, both in the holding company and in the subsidiaries.	
3	Direksi agar memprioritaskan anggaran investasi pada program kerja yang menghasilkan <i>return optimal</i> dalam waktu yang relatif singkat hingga mampu mendatangkan kontribusi positif bagi Perusahaan. The Board of Directors is to prioritize investment budgets on work programs that generate optimal returns in a relatively short time in order to make a positive contribution to the Company.	Direksi selalu berusaha memprioritaskan anggaran investasi pada program kerja yang menghasilkan <i>return optimal</i> dalam waktu yang relatif singkat hingga mampu mendatangkan kontribusi positif bagi Perusahaan. The Board of Directors has made continuous effort to prioritize investment budgets on work programs that generate optimal returns in a relatively short time in order to make a positive contribution to the Company.
4	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk memperkuat proses bisnis internal melalui perbaikan sistem kerja, termasuk tata kelola induk dan anak, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta memperkuat peran manajemen risiko dan pengembangan SDM untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien. In conjunction with the supervision of the Board of Commissioners, the Board of Directors shall strengthen the internal business processes through improving work systems, including holding and subsidiary governance, by utilizing information technology and strengthening the role of risk management and human resource development to encourage improved company performance in order to realize more effective and efficient company management.	Direksi terus berupaya meningkatkan kualitas bisnis proses agar semakin efektif dan efisien. Terutama yang terkait manajemen risiko dan tata kelola, penguatan dilakukan sejalan dengan <i>roadmap</i> yang telah disusun sebelumnya, antara lain dengan pengembangan SDM dan organisasi manajemen risiko, serta pengkinian kebijakan dan prosedur sesuai dengan arah bisnis PPA. The Board of Directors has made continuous effort to improve the quality of business processes in order to make it more effective and efficient. Especially, those related to risk management and governance, strengthening is carried out in line with the predetermined roadmap, including human resources development and risk management organizations, as well as updating policies and procedures in accordance with the PPA's business direction.

No.	Arahan RUPS GMS Directive	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2021 Follow up as of December 31, 2021
5	Direksi agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi program mitigasi risiko guna memastikan keberlangsungan perusahaan, baik di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maupun di BUMN Titip Kelola. The Board of Directors shall carry out regular monitoring and evaluation of the implementation of risk mitigation programs to ensure the sustainability of the company, both at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and in SOE restructuring.	PPA secara berkesinambungan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi program mitigasi risiko, antara lain melalui pembahasan kinerja dan manajemen aset liabilitas di dalam rapat Direksi bulanan termasuk pemantauan atas penanganan aset tidak produktif, serta pemantauan risiko melalui <i>risk register</i> dan profil risiko yang dilaporkan kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko & GCG. Regularly, PT. PPA has continuously monitored and evaluated the implementation of risk mitigation program through i.e. discussion of performance and asset and liability management in monthly Board of Directors meetings including monitoring how unproductive assets is handled, as well as risk monitoring through risk registers and risk profiles that are reported to the Board of Directors and the Risk Monitoring & GCG Committee.
6	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar berkomitmen untuk mendukung penyelesaian proses Holding Danareksa – PPA sehingga dapat terwujud sesuai target waktu yang telah disepakati Bersama. In conjunction with the supervision of the Board of Commissioners, the Board of Directors is committed to support the completion of the Danareksa Holding – PPA process in order to be actualized according to the mutually agreed time target.	Dalam rangka mendukung penyelesaian proses Holding Danareksa – PPA, Direksi Danareksa dan PPA bersama dengan Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, melakukan meeting secara mingguan guna membahas perkembangan proses Holding dan mencari solusi apabila terdapat kendala. In order to support the completion of the Danareksa Holding process - PPA, the Board of Directors of Danareksa and PPA together with the Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services, has held weekly meetings to discuss the development of the Holding process and find solutions for any visible obstacles.
7	Direksi diminta mengoptimalkan dana PMN dalam rangka Restrukturisasi dan Revitalisasi (R/R) BUMN, sehingga dapat mendukung penyehatan BUMN serta mencari sumber alternatif pendanaan yang baru. The Board of Directors is asked to optimize PMN funds in the context of Restructuring and Revitalizing (R/R) SOEs, so they can support the restructuring of SOEs and seek new alternative sources of funding.	Direksi senantiasa berusaha mengoptimalkan dana PMN dalam rangka Restrukturisasi dan Revitalisasi (R/R) BUMN, sehingga dapat mendukung penyehatan BUMN serta mencari sumber alternatif pendanaan yang baru. The Board of Directors has been consistent in optimizing PMN funds in the context of Restructuring and Revitalizing (R/R) SOEs, in order to support the health of SOEs and seek new alternative sources of funding.
8	Direksi diminta melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengelola BUMN Titip Kelola (SKK) sehingga dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional Perusahaan serta membangun kompetensi-kompetensi BUMN tersebut. The Board of Directors is asked to make the best efforts to manage the SOE Custody of Management (SKK) so that it can improve the company's financial and operational performance and build the competencies of the SOE.	Untuk mendukung pengelolaan BUMN Titip Kelola ini, Perusahaan melakukan beberapa tindakan strategis khususnya dalam hal restrukturisasi. Pertama, Perusahaan mengkaji bidang usaha BUMN untuk menemukan potensi unggul dari setiap BUMN. Selanjutnya, Perusahaan juga melaksanakan klasifikasi BUMN per sektor dan melihat peluang apakah BUMN tersebut dapat dikerjasamakan dengan BUMN lain yang bergerak di dalam sektor usaha serupa. Selain itu, Perusahaan mengajak BUMN untuk mengoptimalkan <i>core business</i> yang merupakan potensi unggul dari BUMN. Dalam perkembangannya dan berdasarkan analisa internal, BUMN Restrukturisasi ditangani melalui 2 (dua) strategi yaitu <i>Turn Around & Restructuring</i> serta Divestasi dan/atau Penutupan Usaha sesuai kondisi BUMN terkait. To support the management of this SOE Custody of Management, the Company has taken strategic actions, especially in terms of restructuring. First, the Company examined the business fields of SOEs to find the superior potential of each SOE. Furthermore, the Company also did classification of SOEs by sector and looked at opportunities whether these SOEs can be collaborated with other SOEs engaged in similar business sectors. In addition, the Company has appealed to SOEs to optimize their core business which is the superior potential of SOEs. In its development and based on internal analysis, SOE Restructuring has been handled through 2 (two) strategies; the Turn Around & Restructuring and the Divestment and/or Business Closure according to the conditions of the related SOE.

No.	Arahan RUPS GMS Directive	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2021 Follow up as of December 31, 2021
9	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal. The Board of Directors shall follow up and complete the findings and recommendations of the results of the examination by internal and external auditors.	Direksi senantiasa berupaya menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal antara lain temuan dan rekomendasi terkait <i>Good Corporate Governance</i> yang diajukan oleh auditor internal. The Board of Directors has made consistent effort to follow up and complete the findings and recommendations of the audit results by internal and external auditors, including findings and recommendations related to Good Corporate Governance submitted by the internal auditors.
10	Dewan Komisaris diminta memberikan masukan dan arahan kepada Direksi untuk setiap isu terkait perubahan dan perkembangan kondisi bisnis yang dapat berakibat pada penurunan kinerja Perusahaan. The Board of Commissioners is asked to provide input and direction to the Board of Directors for any issues related to changes and developments in business conditions that may result in a decline in the company's performance.	Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada Direksi untuk setiap isu terkait perubahan dan perkembangan kondisi bisnis yang dapat berakibat pada penurunan kinerja Perusahaan, baik melalui rapat gabungan Dewan Komisaris & Direksi, rapat update maupun dengan bersurat kepada Direksi. The Board of Commissioners has given inputs input and direction to the Board of Directors for any issues related to changes and developments in business conditions that may have otherwise resulted in a weaker company performance, either through joint meetings of the Board of Commissioners & Directors, update meetings or by writing to the Board of Directors.
11	Direksi agar memperkuat fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka <i>early warning system</i>. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang baik, agar dibentuk unit manajemen risiko secara tersendiri yang menjadi bagian dari Fungsi Direksi untuk melakukan <i>assessment</i> dan mitigasi risiko, termasuk dalam hal <i>credit risk</i>, khususnya untuk mengawal tiga pilar bisnis PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang akan diterapkan. The Board of Directors shall strengthen the function of the Internal Audit Unit (SPI) and corporate risk management in the context of an early warning system. In order to implement good risk management, a separate risk management unit shall be formed as part of the Board of Directors' function to conduct risk assessment and mitigation, including in terms of credit risk, in particular to oversee the three business pillars of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) which will be implemented. .	Direksi berupaya memperkuat fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) diantaranya melalui: - Pengembangan kompetensi personil SPI melalui pelatihan dan sertifikasi terkait dengan internal audit. - Menyetujui penambahan personil SPI. - Meningkatkan peran <i>consulting</i> SPI dalam proses bisnis Perusahaan (antara lain menjadi anggota <i>Task Force</i> Percepatan Penanganan Aset Non Produktif dan <i>Task Force</i> Kegiatan Pendanaan melalui Pasar Modal serta memberi saran terkait perbaikan kebijakan internal di Perusahaan). Direksi sebelumnya telah membentuk Divisi Manajemen Risiko yang bertugas antara lain melakukan <i>assessment</i> dan mitigasi risiko, termasuk dalam hal <i>credit risk</i>, khususnya untuk mengawal tiga pilar bisnis Perusahaan. The Board of Directors has sought to strengthen the function of the Internal Audit Unit (SPI), including through: - SPI personnel competency development through training and certification related to internal audit. - Approved the addition of SPI personnel. - Increasing the role of SPI consulting in the company's business processes (e.g. by being a member of the Task Force for the Acceleration of Handling of Non-Earning Assets and the Task Force for Funding Activities through the Capital Market as well as providing advice on improving internal policies in the Company). The Board of Directors had previously established a Risk Management Division tasked with running risk assessment and mitigation, including in terms of credit risk, in particular to oversee the three pillars of the Company's business.

No.	Arahan RUPS GMS Directive	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2021 Follow up as of December 31, 2021
12	Direksi agar memprioritaskan penyaluran program TJSL pada wilayah usaha Perusahaan, sehingga masyarakat sekitar dapat secara langsung merasakan manfaat keberadaan Perusahaan. The Board of Directors shall prioritize the distribution of the CSR program in the company's business areas, so the surrounding community can directly feel the benefits of the company's existence	Direksi berupaya memprioritaskan penyaluran program TJSL pada wilayah usaha Perusahaan, sehingga masyarakat sekitar dapat secara langsung merasakan manfaat keberadaan Perusahaan. Sebagai contoh program TJSL PT PPA yang memprioritaskan pada wilayah usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: - Bantuan dukungan pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada tenaga supporting (<i>outsourcing</i>). - Bantuan penanggulangan pandemi yang diberikan kepada tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet. - Bantuan pelatihan kemandirian Insan Berkemampuan Khusus atau penyandang disabilitas. Seluruh program bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat umum di wilayah Jabodetabek. The Board of Directors has sought to prioritize the distribution of the CSR program in the company's business areas, so the surrounding community can directly feel the benefits of the company's existence. For example, PT PPA's CSR program that prioritizes the company's business areas is as follows: - Education and health support assistance provided to supporting (<i>outsourced</i>) staff. - Pandemic relief assistance provided to health workers at the Wisma Atlet Hospital. - Assistance for training on the independence of Specially Capable Persons or persons with disabilities. All of these assistance programs have been provided to the general public in the Greater Jakarta area.
13	Direksi diminta memperhatikan saran Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor: S-04/PPA/KOM/0121 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pendapat dan Saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2021. The Board of Directors is asked to attend closely to the recommendations of the Board of Commissioners as submitted by letter Number: S-04/PPA/KOM/0121 dated January 25, 2021 regarding Opinions and Suggestions on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2021.	Direksi selalu memperhatikan saran Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor: S-04/PPA/KOM/0121 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pendapat dan Saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2021. The Board of Directors has always attended closely to the advice of the Board of Commissioners as submitted by letter Number: S-04/PPA/KOM/0121 dated January 25, 2021 regarding Opinions and Suggestions on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 2021.
14	Buku RKAP 2021, tanggapan tertulis Dewan Komisaris Nomor: S-03/DK-DR/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, Key Performance Indicators (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Kontrak Manajemen, Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2021 Nomor: RIS-38/DSI.MBU.B/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, dan Risalah RUPS RKAP Tahun 2021 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS RKAP Tahun 2021. Book of RKAP 2021, written response of the Board of Commissioners Number: S-03/DK-DR/I/2021 dated January 28, 2021, Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors and the Board of Commissioners contained in the Management Contract, Minutes of the Work Plan and Budget Discussion Meeting for Social and Environmental Responsibility Program 2021 Number: RIS-38/DSI.MBU.B/01/2021 dated January 19, 2021, where the Minutes of the 2021 RKAP GMS are an integral part of the 2021 RKAP GMS Resolutions.	---

RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

Annual GMS for Fiscal Year 2020

Hari/Tanggal Day/Date	3 Juni 2021	June 3, 2021
Waktu Time	11:45 – 12:45 WIB	11:45 – 12:45 WIB
Tempat Place	Ruang Rapat New York, Gedung Menara Mandiri II Lantai 7, Jakarta	New York Meeting Room, Menara Mandiri II Building 7 th Floor, Jakarta
Kehadiran Attended by	Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: Yohanes Babtista Priyanto Hadi, Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Dewan Komisaris - Krisna Wijaya, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen - Marwanto Harjowiryo, Komisaris Direksi: - Yadi Jaya Ruchandi, Direktur Utama - Rizwan Rizal Abidin, Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi - Adi Pamungkas Daskian, Direktur Investasi 2 PT Danareksa selaku Klaster Danareksa-PPA: Arisudono Soerono, Direktur Utama PT Danareksa Undangan: Romy Marcandi	Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia: Yohanes Babtista Priyanto Hadi, Assistant Deputy for Transportation Facilities and Infrastructure, Ministry of SOEs Board of Commissioners - Krisna Wijaya, President Commissioner and Independent Commissioner - Marwanto Harjowiryo, Commissioner Board of Directors: - Yadi Jaya Ruchandi, President Director - Rizwan Rizal Abidin, Director of Investment 1 and Restructuring - Adi Pamungkas Daskian, Investment Director 2 PT Danareksa as the Danareksa-PPA Cluster: Arisudono Soerono, President Director of PT Danareksa Invitation: Romy Marcandi

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Pelaksanaan penghitungan suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak independen, yaitu Desman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Involvement of Independent Parties in Vote Counting

Voting in the GMS was conducted by an independent party, namely Desman, Bachelor of Law, Master of Humanities, Notary domiciled in North Jakarta Administrative City.

Agenda, Keputusan, dan Tindak Lanjut

Agenda, Resolution, and Follow-up

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Agenda 1: Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2020. Agenda 1: Approval of the annual report and ratification of the 2020 consolidated financial statements.	Menyetujui laporan tahunan tahun buku 2020 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia). Approved the 2020 financial year annual report including the supervisory task report of the Board of Commissioners and ratified the Company's consolidated financial statements for the 2020 financial year which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).
Tindak Lanjut: Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 telah diterima oleh Pemegang Saham Follow up Shareholders have received the Annual Report for Fiscal Year 2020 and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2017	

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Agenda 2: Pengesahan laporan tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tahun buku 2020. Agenda 2: Ratification of the Company's annual report on Social and Environmental Responsibility for the 2020 financial year.	Mengesahkan laporan tahunan PKBL tahun buku 2020 dan mengesahkan laporan keuangan TJSL tahun 2020 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia). Ratified the TJSL annual report for the 2020 financial year and ratified the 2020 PKBL financial report which had been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia).
Tindak Lanjut: laporan tahunan PKBL tahun buku 2020 dan laporan keuangan PKBL tahun 2020 telah diterima oleh Pemegang Saham Follow Up Shareholders have received the PKBL annual report for fiscal year 2020 and financial report for 2020 PKBL	
Agenda 3: Penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2020. Agenda 3: Determination of the use of the Company's net profit for the 2020 financial year.	Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perusahaan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku tahun 2020 sebesar Rp105.341 juta seluruhnya sebagai laba ditahan. Determined the use of the Company's consolidated net income attributable to owners of the parent entity for the financial year 2020 to the amount of Rp105,341 million in total as retained earnings
Tindak Lanjut: Laba bersih untuk tahun buku 2020 telah digunakan sesuai keputusan. Follow Up The net profit for the financial year 2020 has been allocated according to the decision.	
Agenda 4: Penetapan tantiem tahun buku 2020, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021. Agenda 4: Determination of tantiem for the financial year 2020, salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for 2021.	Penetapan tantiem tahun buku 2020, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021 akan ditetapkan secara tersendiri. Determination of bonuses for the financial year 2020, salaries for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for 2021 are to be determined in a different session.
Tindak Lanjut: Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2021 telah dibayarkan sesuai dengan keputusan. Follow up: Tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year 2020 and the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Year 2021 have been paid in accordance with the decision.	

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Agenda 5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan serta laporan keuangan dan dan pelaksanaan program pendanaan usaha mikro dan kecil tahun buku 2021. Agenda 5: Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's consolidated financial statements as well as financial reports and implementation of micro and small business funding programs for the 2021 financial year.	Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai auditor yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian serta laporan keuangan dan pelaksanaan program pendanaan usaha mikro dan kecil (UKM) tahun buku 2021. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan periode lainnya pada tahun buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan serta laporan keuangan dan pelaksanaan program pendanaan UMK tahun buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut. Reappointed the Public Accounting Firm (KAP) of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) to audit the consolidated financial statements as well as the financial statements and implementation of the micro and small business funding program (UKM) for the 2021 financial year. Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm to audit the consolidated financial statements of the Company for other periods in the 2021 financial year for the purposes and interests of the Company. Delegated authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the fee for the audit service and other terms of appointment that are reasonable for the KAP, and appointed a replacement Public Accounting Firm in the case of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), for whatsoever reasons fail to complete the audit on the Company's consolidated financial statements as well as the financial statements and implementation of the UMK funding program for the 2021 financial year, including determining the audit fee and other requirements for the replacing KAP.
Tindak Lanjut: Tidak ada pergantian KAP, masih menunjuk KAP yang sama yaitu Amir Abadi Jusuf dan Rekan Follow up: There was no change in KAP, the same KAP was appointed, namely Amir Abadi Jusuf and Partners	
Agenda 6: Pengesahan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dan penyertaan modal negara. Agenda 6: Ratification of the accountability report on the realization of the use and participation of state capital.	Mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana Penyertaan Modal negara (PMN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015. Ratified the report on the realization of the use of the elong overdue state Equity Participation (PMN) funds from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for the 2015 fiscal year.
Tindak Lanjut: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN 2015 Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Follow up: The accountability Report on the Realization of Additional Use of 2015 PMN Funds for Q1 to Q4 of 2020 has been approved by the Shareholders at the Meeting	

Arahan Pemegang Saham

Shareholders Directive

No.	Arahan RUPS GMS Directive	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2021 Follow Up until December 31, 2021
1	Sehubungan dengan belum pulihnya kondisi pandemi COVID-19, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan diminta: - Mengupayakan efisiensi biaya, pemangkasan dan penyederhanaan proses bisnis dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. - Memprioritaskan pada <i>sustainability</i> perusahaan antara lain melalui pengelolaan <i>cash flow</i> yang baik berdasarkan skala prioritas. In connection with the COVID-19 pandemic that has not yet recovered, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are requested to: - Strive for cost efficiency, trimming and simplifying business processes by optimizing the use of information technology. - Prioritizing the company's sustainability, among others, through good cash flow management based on a priority scale	Pemantauan kondisi keuangan maupun bisnis Perusahaan selalu dilaporkan secara bulanan kepada Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Salah satu upaya untuk memangkas <i>cost of fund</i> yang tinggi dari perbankan, Perusahaan berencana menerbitkan Obligasi Nasional dan Obligasi Global pada bulan Oktober atau November tahun 2021. Monitoring of the Company's financial and business conditions has always been reported monthly to the Board of Commissioners through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. One of the efforts to cut the high cost of funds from banks, the Company plans to issue National Bonds and Global Bonds in October or November 2021.
2	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi terhadap rencana investasi agar lebih realistis dan <i>prudent</i> sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha. The Board of Directors with the supervision of the Board of Commissioners is asked to evaluate the investment plan to make more realistic and prudent in order to support increased productivity and business development	Terhadap setiap usulan/rencana investasi dikonsultasikan dulu bersama dengan Komite Investasi dan Manajemen Risiko, apabila dianggap memiliki prospek yang bagus selanjutnya diajukan persetujuannya melalui rapat Direksi. Each investment proposal/plan had initially been consulted with the Investment and Risk Management Committee, and if it is considered to have good prospects, then the approval is submitted through the Board of Directors meeting.
3	Direksi dan Dewan Komisaris agar terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada anak perusahaan sehingga mampu meningkatkan kinerjanya dan mencapai target RKAP, serta berkontribusi optimal bagi Perusahaan. The Board of Directors and the Board of Commissioners should continue to improve the development and supervision of subsidiaries so that they are able to improve their performance and achieve RKAP targets, as well as contribute optimally to the Company.	Pemantauan kinerja anak perusahaan selalu dilaporkan secara bulanan kepada Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu Perusahaan rutin melakukan monitor terhadap kinerja dan pencapaian target RKAP anak perusahaan melalui Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kerja ("Divisi PSPMK"). Monitoring the performance of subsidiaries had always been reported monthly to the Board of Commissioners through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition, the Company has routinely monitored the performance and achievement of the subsidiaries' RKAP targets through the Corporate Strategic Planning and Work Management Division ("PSPMK Division")
4	Sehubungan dengan rencana pembentukan <i>Holding</i> Danareksa – PPA, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar berkomitmen untuk mendukung penyelesaian proses <i>Holding</i> Danareksa – PPA sehingga dapat terwujud sesuai target waktu Pemantauan kondisi keuangan maupun bisnis Perusahaan selalu dilaporkan secara bulanan kepada Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disepakati bersama. In relation to the plan to establish Holding Danareksa – PPA, the Board of Directors under the the supervision of the Board of Commissioners is committed to supporting the completion of the Holding Danareksa – PPA process so that it can be realized according to the agreed timeline.	Dalam rangka mendukung penyelesaian proses <i>Holding</i> Danareksa – PPA, Direksi Danareksa dan PPA bersama dengan Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, melakukan <i>meeting</i> secara mingguan guna membahas perkembangan proses <i>Holding</i> dan mencari solusi apabila terdapat kendala. In order to support the completion of the Danareksa Holding process - PPA, the Board of Directors of Danareksa and PPA together with the Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services, has held weekly meetings to discuss the development of the Holding process and find solutions for any obstacle encountered.
5	Dalam rangka mencapai target pendapatan Perusahaan, terhadap program <i>Special Situation Fund</i> dan penanganan <i>Non-Performing Loan</i>, kiranya agar segera direalisasikan namun dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko dan peraturan perundangan. In order to achieve the company's revenue target, the Special Situation Fund program and the handling of Non-Performing Loans shall be realized immediately with due attention to risk management and laws and regulations.	Terhadap program penanganan <i>Non-Performing Loan</i> PT Bank Muallamat Indonesia ("BMI"), Perusahaan telah menandatangani MOU dan <i>Master Restructuring Agreement</i> yang mengatur keseluruhan tahapan dan rangkaian transaksi dengan BMI dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Regarding PT Bank Muallamat Indonesia's ("BMI") Non-Performing Loan handling program, the Company has signed an MOU and Master Restructuring Agreement which regulate all stages and series of transactions with BMI and the Hajj Financial Management Agency.

No.	Arahan RUPS GMS Directive	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2021 Follow Up until December 31, 2021
6	Terhadap 26 BUMN yang telah dititipkelola melalui Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN kepada Perusahaan, Direksi agar memberikan <i>best effort</i> guna memastikan keberhasilan proses restrukturisasi dan peningkatan skala bisnis. For the 26 SOEs that have been entrusted with management through a Special Power of Attorney from the Minister of SOEs to the Company, the Board of Directors shall do the best to ensure the success of the restructuring process and increase business scale.	Direksi senantiasa melakukan yang terbaik guna memastikan keberhasilan proses restrukturisasi dan peningkatan skala bisnis. Selain itu melalui Divisi PSPMK Perusahaan juga melakukan <i>activities/project tracking</i> untuk memastikan program restrukturisasi berjalan dengan baik. The Board of Directors has always done the best it could to ensure the success of the restructuring process and increase business scale. In addition, through the PSPMK Division, the Company also done activities/project tracking to ensure effective process off restructuring.
7	Dalam rangka implementasi transformasi manajemen risiko dan manajemen talenta pada BUMN, Direksi Perusahaan agar melakukan koordinasi dengan PT Danareksa (Persero) selaku Ketua Klaster Danareksa – PPA untuk menyusun perencanaan manajemen risiko dan manajemen talenta di Klaster Danareksa – PPA. In order to implement the transformation of risk management and talent management in SOEs, the Board of Directors of the Company shall coordinate with PT Danareksa (Persero) as the Head of the Danareksa Cluster – PPA to develop a risk management plan and talent management in the Danareksa Cluster – PPA.	Secara berkala Direksi Perusahaan melakukan pertemuan dengan Direksi PT Danareksa (Persero) guna menyusun perencanaan manajemen risiko dan manajemen talenta di Klaster Danareksa – PPA. Terkait dengan manajemen talenta, saat ini telah disusun program <i>Integrated Talent Management</i> untuk Klaster Danareksa-PPA. The Board of Directors of the Company has had regular meetings with the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) to prepare risk management and talent management plans in the Danareksa Cluster – PPA. In relation to talent management, an Integrated Talent Management program has been prepared for the Danareksa-PPA Cluster.
8	Terkait kegiatan PKBL (ke depannya TJSL), Direksi diminta untuk menindaklanjuti arahan sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2020 Nomor: RIS-46/DSI.MBU.B/4/2021 tanggal 21 April 2021. Regarding PKBL activities (or TJSL in the future), the Board of Directors has been asked to follow up on the directives as stated in the Minutes of Meeting of Financial Report Discussion and PKBL Implementation for the Financial Year 2020 No: RIS-46/DSI.MBU.B/4/2021 dated April 21, 2021.	a. Terkait arahan mengenai piutang macet, hingga 31 Desember 2021 masih terdapat piutang bermasalah senilai Rp41.394.444 yang merupakan piutang macet yang telah diupayakan penagihan melalui <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i>, namun belum dapat dipulihkan. Piutang macet tersebut merupakan Mitra Binaan (MB) atas nama Bapak Dadan Herdiawan. Telah dilakukan kunjungan langsung ke MB untuk upaya penagihan melalui <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> pada akhir Desember 2021. Setelah dilakukannya upaya <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> dan di mana hingga saat ini masih tidak ada itikat baik dari MB untuk menyelesaikan hutangnya, maka Perusahaan saat ini sedang mengupayakan opsi penerapan pencatatan akuntansi <i>off balance sheet</i>, untuk piutang macet tersebut, agar kolektibilitas piutang pada program pendanaan UMK dapat mencapai nilai maksimal. Sebagai informasi, meski terdapat satu akun piutang bermasalah tersebut, saat ini kolektibilitas piutang PPA masih dalam nilai maksimal yaitu 95% (lebih dari 70% memiliki skor 3); b. Terkait penyampaian laporan secara berkala, sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan TJSL yang memenuhi Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Perusahaan selalu menyampaikan laporan berkala kegiatan TJSL secara tepat waktu. a. Regarding the directive on bad debts, as of December 31, 2021, there was an outstanding receivable of worth Rp. Rp41.394.444 The bad debt is owed by a foster partner (MB) on behalf of Mr. Dadan Herdiawan. Direct visits have been made to MB for collection efforts through <i>rescheduling</i> and <i>reconditioning</i> at the end of December 2021. After <i>rescheduling</i> and <i>reconditioning</i> efforts, Mr Herdiawan has not shown any good intention that he would settle his debts, the Company is currently seeking to apply the off balance accounting option, so the collectibility of receivables in the MSE funding program is represented in its maximum value. For information, despite that non-performing loan in the receivable account, the current the collectibility of PPA's receivables is still at the maximum value of 95% (more than 70% has a score of 3); b. Regarding the submission of periodic reports, as a form of implementing CSR activities that meet the Good Corporate Governance (GCG) principles, the Company has always submitted timely periodic reports on CSR activities.

No.	Arahan RUPS GMS Directive	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2021 Follow Up until December 31, 2021
9	Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal yakni BPK RI dan/atau KAP maupun auditor internal (SPI) tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor eksternal agar dilaporkan secara tertulis kepada RUPS. The Board of Directors and the Board of Commissioners are asked to follow up on the findings and suggestions of the external auditors, namely BPK RI and/or KAP as well as the internal auditors (SPI) in 2020 and previous years, and complete them to prevent reoccurring in the future of the auditor's findings. Follow-up to the completion of the external auditor's findings/suggestions to be reported in writing to the GMS.	Direksi terus berupaya menindaklanjuti seluruh temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal yakni BPK RI dan/atau KAP maupun auditor internal (SPI) tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. <i>Monitoring</i> tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal maupun auditor internal dilakukan secara berkala (triwulan). The Board of Directors has made continuous effort to follow up on all findings, suggestions from external auditors, namely BPK RI and/or KAP as well as internal auditors (SPI) in 2020 and previous years. Monitoring of follow-up on recommendations of external auditors and internal auditors has been periodically (quarterly) carried out.
10	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS ini. The Board of Directors shall pay attention to and follow up on the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners submitted at this GMS.	Direksi senantiasa memberi perhatian dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS ini. The Board of Directors has always attended to and follows up on the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners presented at this GMS.

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

DECREE OF THE MINISTER OF STATE-OWNED BUSINESS AS A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Keputusan Tanggal 27 April 2021

1. Decision on April 27, 2021

No.	Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow Up
	Perihal: Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham Matter: Approval for Acceptance of Transfer of Shares	
1	Menyetujui penerimaan pengalihan: - Seluruh saham Seri B milik Negara RI pada PT Indosat Tbk - Seluruh saham milik Negara RI pada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri - Seluruh saham seri A dan seri B milik Negara RI pada PT Bank Bukopin Tbk - Seluruh saham milik Negara RI pada PT Kawasan Industri Lampung - Seluruh saham seri B, seri C, dan seri D milik Negara RI pada PT Socfin Indonesia. Pengalihan saham ini dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara RI pada Perusahaan. Approved acceptance of the transfer: - All Series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Indosat Tbk - All shares owned by the Republic of Indonesia in PT Prasadha Pamunah Waste Industri - All series A and series B shares owned by the Republic of Indonesia in PT Bank Bukopin Tbk - All shares owned by the Republic of Indonesia in PT Kawasan Industri Lampung - All series B, series C, and series D shares owned by the Republic of Indonesia in PT Socfin Indonesia. The transfer of shares is in the context of increasing the capital participation of the Republic of Indonesia in the Company.	Telah ditindaklanjuti melalui penerbitan akta nomor: 22 oleh Ashoya Ratam, notaris di Jakarta Selatan, pada 10 Juni 2021. The transfer has been followed up through the issuance of deed number: 22 by Ashoya Ratam, a notary in South Jakarta, on June 10, 2021.
2	Atas pengalihan saham sebagai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud Negara RI mendapatkan saham baru pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan jumlah sesuai dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.06/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). For the transfer of shares as additional equity participation as referred to in the State of the Republic of Indonesia, the Republic of Indonesia shall obtain new shares in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) with the amount in accordance with the value as referred to in the Decree of the Minister of Finance Number 135/KMK.06/2021 dated April 1, 2021 concerning Determination of the Value of Additional Participation State Capital of the Republic of Indonesia Into Share Capital of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).	Telah ditetapkan melalui akta nomor: 22 oleh yang diterbitkan oleh Ashoya Ratam, notaris di Jakarta Selatan, pada 10 Juni 2021. The transfer has been determined through deed number: 22 by Ashoya Ratam, a notary in South Jakarta, on June 10, 2021.

No.	Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow Up
3	Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat keputusan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat berwenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat ini. Authorized with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to express and state everything decided in this GMS decision in the form of a notarial deed and appear before a Notary or other authorized official, and make necessary adjustments or improvements if required by the competent authorities for the purposes of implementation of the contents of the decision in this letter	Telah diterbitkan akta nomor: 22 oleh Ashoya Ratam, notaris di Jakarta Selatan, pada 10 Juni 2021. Deed No: 22 has been issued by Ashoya Ratam, notary in South Jakarta, on June 10, 2021.
4	Mewajibkan Direksi Perusahaan untuk melaporkan secara tertulis kepada kami atas pelaksanaan keputusan ini. Required the Board of Directors of the Company to report in writing to us on the implementation of this decision.	Telah dilaksanakan. Already implemented

2. Keputusan Tanggal 14 September 2021 Nomor: SK-309/MBU/09/2021 2. Decision on September 14, 2021 No: SK-309/MBU/09/2021

No.	Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow Up
	Perihal: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: SK-309/MBU/09/2021 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Matter: Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No: SK-309/MBU/09/2021 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).	
1	Mengangkat J.F. Hasudungan sebagai Direktur Special Asset Management Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Appointed J.F. Hasudungan as Director of Special Asset Management for the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	-
2	Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. The members of the Board of Directors who are appointed as referred above who are still assuming other positions that are prohibited by laws and regulations from being concurrently with the position of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise, must resign or be dismissed from their positions.	-

Ikhtisar
UtamaLaporan
ManajemenProfil
PerusahaanPembahasan
dan Analisa
ManajemenTata Kelola
PerusahaanTanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

No.	Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow Up
3	Memberi kuasa kepada Direksi PT PPA (Persero) dengan hak substitusinya untuk menyatakan yang diputuskan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Authorized the Board of Directors of PT PPA (Persero) with the right of substitution to state what is decided in this decision in authentic form before a notary or authorized official.	Telah ditetapkan berdasarkan akta nomor: 84 yang diterbitkan oleh Desman, Notaris di Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2021 dengan penetapan susunan Direksi sebagai berikut: - Direktur Utama: Yadi Jaya Ruchandi - Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi: Rizwan Rizal Abidin - Direktur Investasi 2: Adi Pamungkas Daskian, - Direktur Special Asset Management: Jahumbang Frenando Hasudungan The authorization has been determined based on deed No: 84 issued by Desman, Notary in North Jakarta on September 23, 2021 with the determination of the composition of the Board of Directors as follows: - President Director: Yadi Jaya Ruchandi - Director of Investment 1 and Restructuring: Rizwan Rizal Abidin - Director of Investment 2: Adi Pamungkas Daskian, - Director of Special Asset Management: Jahumbang Frenando Hasudungan
4	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. This decision shall come into effect on the date of issuance, on condition that a correction shall be made to the stipulation that if it is later proven to have contained mistakes.	Telah diberlakukan. Already implemented

3. Keputusan Tanggal 19 November 2021

3. Decision on November 19, 2021

No.	Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow Up
Perihal: Perubahan jenis saham dan perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Matter: Changes in types of shares and changes to the Articles of Association of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).		
1	Menetapkan perubahan jenis saham pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B. To stipulate a change in the type of shares in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) which was originally without series to consist of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.	Telah ditindaklanjuti melalui akta nomor: 10 yang diterbitkan oleh Desman, Notaris di Jakarta Utara tanggal 1 Desember 2021. It has been followed up through deed number: 10 issued by Desman, Notary in North Jakarta on December 1, 2021.

No.	Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow Up
2	Menetapkan hak-hak saham Seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan: - Perubahan Anggaran Dasar; - Perubahan struktur permodalan; - Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; - Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran. - Permintaan dan akses data dan dokumen Perusahaan; - Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; - Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; - Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; - Persetujuan rencana penggunaan laba yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; - Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang sepanjang dalam anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; - Pengusulan agenda RUPS; - Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris. To determine the rights of Series A Dwiwarna shares which are not owned by Series B shares, namely the right to: - Amendment to the Articles of Association; - Changes in capital structure; - Appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners; - Approval regarding merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution. - Request and access to company data and documents; - Approval of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners; - Approval of the transfer of assets based on the articles of association requires the approval of the GMS; - Approval of participation and reduction in the percentage of equity participation in other companies based on the articles of association requires the approval of the GMS; - Approval of the plan to use the profits based on the articles of association requires the approval of the GMS; - Approval on long-term investment and financing as long as the articles of association need approval from the GMS; - Proposing the GMS agenda; - Nomination of candidates for members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners.	Telah ditindaklanjuti melalui akta nomor: 10 yang diterbitkan oleh Desman, Notaris di Jakarta Utara tanggal 1 Desember 2021. The determination has been followed up through deed number: 10 issued by Desman, Notary in North Jakarta on December 1, 2021.
3	Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Amendement to the Articles of Association of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Telah ditindaklanjuti melalui akta nomor: 10 yang diterbitkan oleh Desman, Notaris di Jakarta Utara tanggal 1 Desember 2021. The change has been followed up through deed number: 10 issued by Desman, Notary in North Jakarta on December 1, 2021.

KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUT RUPS TAHUN SEBELUMNYA

DECISION AND FOLLOW-UP ON THE PREVIOUS YEAR'S GMS

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2020

Annual GMS on The Ratification of 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) On January 22, 2020

Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow-up																																														
Agenda 1: Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2020. Agenda 1 (RKAP) and the 2020 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan (RKA PKBL).																																															
Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020, dengan pokok-pokok sebagai berikut: Keuangan: 1. Perhitungan Laba (Rugi) Laba Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun Rp531.988 Juta dengan rincian sebagai berikut: <table> <tr> <td>Pendapatan Usaha</td><td>: Rp10.657.914 Juta</td></tr> <tr> <td>Beban Usaha</td><td>: Rp(9.468.742) Juta</td></tr> <tr> <td>Laba/(Rugi) Usaha</td><td>: Rp1.189.172 Juta</td></tr> <tr> <td>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</td><td>: Rp(556.302) Juta</td></tr> <tr> <td>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</td><td>: Rp632.870 Juta</td></tr> <tr> <td>Pajak-Pajak</td><td>: Rp(100.882) Juta</td></tr> <tr> <td>Laba/(Rugi) Bersih</td><td>: Rp531.988 Juta</td></tr> </table> 2. Proyeksi Neraca Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2020 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar Rp20.188.721 Juta dengan rincian sebagai berikut: Aset: <table> <tr> <td>Aset Lancar</td><td>: Rp10.343.533 Juta</td></tr> <tr> <td>Aset Tidak Lancar</td><td>: Rp9.845.188 Juta</td></tr> <tr> <td>Total Aset</td><td>: Rp20.188.721 Juta</td></tr> </table> Liabilitas: <table> <tr> <td>Liabilitas Jangka Pendek</td><td>: Rp4.967.622 Juta</td></tr> <tr> <td>Liabilitas Jangka Panjang</td><td>: Rp9.709.661 Juta</td></tr> <tr> <td>Total Liabilitas</td><td>: Rp14.677.283 Juta</td></tr> <tr> <td>Ekuitas</td><td></td></tr> <tr> <td>Ekuitas</td><td>: Rp5.511.438 Juta</td></tr> <tr> <td>Total Liabilitas dan Ekuitas</td><td>: Rp20.188.721 Juta</td></tr> </table> 3. Arus Kas Arus Kas Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2020 dianggarkan sebagai berikut: <table> <tr> <td>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</td><td>: Rp (1.154.175) Juta</td></tr> <tr> <td>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</td><td>: Rp (3.376.906) Juta</td></tr> <tr> <td>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</td><td>: Rp4.673.869 Juta</td></tr> <tr> <td>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara</td><td>: Rp142.788 Juta</td></tr> </table> 4. Investasi Anggaran Investasi PT PPA (Persero) Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.108.490 juta, terdiri dari: <table> <tr> <td>Aset Tetap</td><td>: Rp636.990 Juta</td></tr> <tr> <td>Penyertaan</td><td>: Rp416.500 Juta</td></tr> <tr> <td>Properti Investasi</td><td>: Rp55.000 Juta</td></tr> </table>	Pendapatan Usaha	: Rp10.657.914 Juta	Beban Usaha	: Rp(9.468.742) Juta	Laba/(Rugi) Usaha	: Rp1.189.172 Juta	Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp(556.302) Juta	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp632.870 Juta	Pajak-Pajak	: Rp(100.882) Juta	Laba/(Rugi) Bersih	: Rp531.988 Juta	Aset Lancar	: Rp10.343.533 Juta	Aset Tidak Lancar	: Rp9.845.188 Juta	Total Aset	: Rp20.188.721 Juta	Liabilitas Jangka Pendek	: Rp4.967.622 Juta	Liabilitas Jangka Panjang	: Rp9.709.661 Juta	Total Liabilitas	: Rp14.677.283 Juta	Ekuitas		Ekuitas	: Rp5.511.438 Juta	Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp20.188.721 Juta	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	: Rp (1.154.175) Juta	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	: Rp (3.376.906) Juta	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	: Rp4.673.869 Juta	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara	: Rp142.788 Juta	Aset Tetap	: Rp636.990 Juta	Penyertaan	: Rp416.500 Juta	Properti Investasi	: Rp55.000 Juta	Perusahaan telah melakukan revisi RKAP tahun 2020 sesuai surat Wakil Menteri BUMN II Nomor S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 yang menginstruksikan seluruh BUMN harus melakukan penyesuaian dalam RKAP Tahun 2020 dikarenakan pengaruh pandemi COVID-19.
Pendapatan Usaha	: Rp10.657.914 Juta																																														
Beban Usaha	: Rp(9.468.742) Juta																																														
Laba/(Rugi) Usaha	: Rp1.189.172 Juta																																														
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp(556.302) Juta																																														
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp632.870 Juta																																														
Pajak-Pajak	: Rp(100.882) Juta																																														
Laba/(Rugi) Bersih	: Rp531.988 Juta																																														
Aset Lancar	: Rp10.343.533 Juta																																														
Aset Tidak Lancar	: Rp9.845.188 Juta																																														
Total Aset	: Rp20.188.721 Juta																																														
Liabilitas Jangka Pendek	: Rp4.967.622 Juta																																														
Liabilitas Jangka Panjang	: Rp9.709.661 Juta																																														
Total Liabilitas	: Rp14.677.283 Juta																																														
Ekuitas																																															
Ekuitas	: Rp5.511.438 Juta																																														
Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp20.188.721 Juta																																														
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	: Rp (1.154.175) Juta																																														
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	: Rp (3.376.906) Juta																																														
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	: Rp4.673.869 Juta																																														
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara	: Rp142.788 Juta																																														
Aset Tetap	: Rp636.990 Juta																																														
Penyertaan	: Rp416.500 Juta																																														
Properti Investasi	: Rp55.000 Juta																																														

Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow-up																																												
Approving and ratifying the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), with the following points: Finance: 1. Profit (Loss) Calculation Consolidated Net Income of PT PPA (Persero) in 2020 is targeted at Rp531,988 Million with details as follows: <table> <tr><td>Revenues</td><td>: Rp10,657,914 Million</td></tr> <tr><td>Operating Expenses</td><td>: Rp(9,468,742) Million</td></tr> <tr><td>Operating Income</td><td>: Rp1,189,172 Million</td></tr> <tr><td>Other Income (Expenses)</td><td>: Rp(556,302) Million</td></tr> <tr><td>Income Before Tax</td><td>: Rp632,870 Million</td></tr> <tr><td>Tax</td><td>: Rp(100,882) Million</td></tr> <tr><td>Net Income</td><td>: Rp531,988 Million</td></tr> </table> 2. Balance Projection PT PPA (Persero) Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2020 is targeted to be closed with total assets of Rp20,188,721 Million with the following details: Assets: <table> <tr><td>Current Assets</td><td>: Rp10,343,533 Million</td></tr> <tr><td>Non-current Assets</td><td>: Rp9,845,188 Million</td></tr> <tr><td>Total Assets</td><td>: Rp20,188,721 Million</td></tr> </table> Liabilities: <table> <tr><td>Current Liabilities</td><td>: Rp4,967,622 Million</td></tr> <tr><td>Non-current Liabilities</td><td>: Rp9,709,661 Million</td></tr> <tr><td>Total Liabilities</td><td>: Rp14,677,283 Million</td></tr> </table> Equity: <table> <tr><td>Equity</td><td>: Rp5,511,438 Million</td></tr> <tr><td>Total Liabilities and Equity</td><td>: Rp20,188,721 Million</td></tr> </table> 3. Cash Flows PT PPA (Persero) Consolidated Cash Flows in 2020 is budgeted as follows: <table> <tr><td>Cash Flows from Operating Activities</td><td>: Rp(1,154,175) Million</td></tr> <tr><td>Cash Flows from Investing Activities</td><td>: Rp(3,376,906) Million</td></tr> <tr><td>Cash Flows from Financing Activities</td><td>: Rp4,673,869 Million</td></tr> <tr><td>The Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents</td><td>: Rp142,788 Million</td></tr> </table> 4. Investment The Investment Budget of PT PPA (Persero) in 2020 is budgeted at Rp1,108,490 million, consisting of: <table> <tr><td>Fixed Assets</td><td>: Rp636.990 Million</td></tr> <tr><td>Participation</td><td>: Rp416.500 Million</td></tr> <tr><td>Investment Property</td><td>: Rp55,000 Million</td></tr> </table>	Revenues	: Rp10,657,914 Million	Operating Expenses	: Rp(9,468,742) Million	Operating Income	: Rp1,189,172 Million	Other Income (Expenses)	: Rp(556,302) Million	Income Before Tax	: Rp632,870 Million	Tax	: Rp(100,882) Million	Net Income	: Rp531,988 Million	Current Assets	: Rp10,343,533 Million	Non-current Assets	: Rp9,845,188 Million	Total Assets	: Rp20,188,721 Million	Current Liabilities	: Rp4,967,622 Million	Non-current Liabilities	: Rp9,709,661 Million	Total Liabilities	: Rp14,677,283 Million	Equity	: Rp5,511,438 Million	Total Liabilities and Equity	: Rp20,188,721 Million	Cash Flows from Operating Activities	: Rp(1,154,175) Million	Cash Flows from Investing Activities	: Rp(3,376,906) Million	Cash Flows from Financing Activities	: Rp4,673,869 Million	The Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	: Rp142,788 Million	Fixed Assets	: Rp636.990 Million	Participation	: Rp416.500 Million	Investment Property	: Rp55,000 Million	The Company has revised the 2020 RKAP according to the letter of the Deputy Minister of SOE II Number S-46/Wk2.MBU/06/2020 dated June 4, 2020 regarding the 2020 RKAP Revision, which is instructed that all SOEs have to make adjustments in the 2020 RKAP due to the influence of the COVID-19 pandemic.
Revenues	: Rp10,657,914 Million																																												
Operating Expenses	: Rp(9,468,742) Million																																												
Operating Income	: Rp1,189,172 Million																																												
Other Income (Expenses)	: Rp(556,302) Million																																												
Income Before Tax	: Rp632,870 Million																																												
Tax	: Rp(100,882) Million																																												
Net Income	: Rp531,988 Million																																												
Current Assets	: Rp10,343,533 Million																																												
Non-current Assets	: Rp9,845,188 Million																																												
Total Assets	: Rp20,188,721 Million																																												
Current Liabilities	: Rp4,967,622 Million																																												
Non-current Liabilities	: Rp9,709,661 Million																																												
Total Liabilities	: Rp14,677,283 Million																																												
Equity	: Rp5,511,438 Million																																												
Total Liabilities and Equity	: Rp20,188,721 Million																																												
Cash Flows from Operating Activities	: Rp(1,154,175) Million																																												
Cash Flows from Investing Activities	: Rp(3,376,906) Million																																												
Cash Flows from Financing Activities	: Rp4,673,869 Million																																												
The Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	: Rp142,788 Million																																												
Fixed Assets	: Rp636.990 Million																																												
Participation	: Rp416.500 Million																																												
Investment Property	: Rp55,000 Million																																												



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Keputusan
Decision

Tindak Lanjut
Follow-up

Agenda 2:
Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2020.
Agenda 2
Giving the approval and ratification of the 2020 Social and Environmental Responsibility Work Plan and Budget.

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2020 sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan No. RIS61/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 27 November 2019 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan (PK)

Keterangan	Rp Juta
Data Tersedia	9.209
Saldo Dana Awal Tahun	705
Pendapatan Jasa Administrasi	45
Pengembalian Pokok Pinjaman	8.400
Pendapatan Bunga Jasa Giro	59
Penyaluran Dana	9.209
Pinjaman Program Kemitraan	9.000
Dana Pembinaan Kemitraan	209
Saldo Akhir	0

2. Dana Program Bina Lingkungan (BL)

Keterangan	Rp Juta
Data Tersedia	3.000
Alokasi Dana Perusahaan	3.000
Penyaluran Dana	3.000
Penyaluran Dana BL	3.000
Saldo Akhir	0

Perusahaan telah melakukan revisi RKAP tahun 2020 sesuai surat Wakil Menteri BUMN II Nomor S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 yang menginstruksikan seluruh BUMN harus melakukan penyesuaian dalam RKAP Tahun 2020 dikarenakan pengaruh pandemi COVID-19.

Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow-up

The Resolution of Agenda 2:
Approving and ratifying the 2020 Social and Environmental Responsibility Work Plan (RKA PKBL) in accordance with the Minutes of Discussion Meeting with the Deputy Assistant of Social and Environmental Responsibility No. RIS61/D7.MBU.3/12/2019 dated November 27, 2019 with the following points:

1. The Partnership Program Fund (PK)

Descriptions	Amount (Rp Million)
Available Funds	9,209
The Beginning of The Year Fund Balance	705
Administration Services Revenue	45
Loan Principal Returns	8,400
Interest Income from Giro Services	59
Fund Distribution	9,209
Partnership Program Loans	9,000
Partnership Development Fund	209
Ending balance	0

The Community Development Program Fund (BL)

Descriptions	Amount (Rp Million)
Available Funds	3,000
Allocation of Company Funds	3,000
Fund Distribution	3,000
Community Development Fund Distribution	3,000
Ending balance	0

Agenda 3:
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020

Agenda 3:
The Establishment of Operational Aspect Indicators for Assessing Company's Soundness Index in 2020

Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020.
Establishing The Operational Aspect Indicators for assessing Company's Soundness Index in 2020.

Target pada tabel tersebut di atas telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Indikator Indicator	Bobot Weight	Target
Penugasan Pemerintah/Penugasan Khusus/RR The Government Assignments Special/RR Assignments	15	100%
Number of New Services/Product	15	5
Jumlah Perusahaan yang diakuisisi dan/atau dilepas The Number of Companies acquired and/or released	10	2 Perusahaan 2 Companies
Realisasi Program Pelatihan Karyawan The Realization of Employee Training Program	5	100%

Follow-up on Resolution:
The targets in the table above have been achieved, as stated in the Performance Evaluation Report for the Year Ended on December 31, 2020.

Keputusan Decision	Tindak Lanjut Follow-up
Agenda 4: Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Agenda 4: Giving The Approval and Ratification of Key Performance Indicators (KPI) as set out in the 2020 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders.	
Menyetujui dan mengesahkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.	KPI Direksi telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.
Approving and ratifying Key Performance Indicators (KPI) as set out in the 2020 Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholders as proposed in the GMS and become an integral part of this GMS resolution.	The Board of Directors' KPIs have been achieved, as stated in the Performance Evaluation Report for the Year Ended December 31, 2020.
Agenda 5: Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020. Agenda 5: Giving The Approval and Ratification of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2020.	
Menyetujui dan mengesahkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020 dengan Pemegang Saham PT PPA sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.	KPI Dewan Komisaris telah tercapai, sebagaimana tercantum dalam Laporan Evaluasi Kinerja Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.
Approving and ratifying the 2020 Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) with the Shareholders of PT PPA as proposed in the GMS and became an integral part of this GMS resolution.	The Board of Commissioners' KPIs have been achieved, as stated in the Performance Evaluation Report for the Year Ended December 31, 2020.
Agenda 6: Persetujuan Penerbitan Surat Utang Obligasi dengan nilai Rp1 Triliun. Agenda 6: Giving the Approval of Bond Issuance with a Value of Rp1 Trillion.	
Menyetujui penerbitan obligasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk mendukung kegiatan investasi dan pembiayaan dengan total maksimal sebesar Rp1 triliun yang akan diterbitkan pada Semester I tahun 2020 dengan rincian:	Obligasi PPA telah terbit 1 September 2020 dengan total perolehan Rp642 miliar.
- Seri A maksimal sebesar Rp100 miliar (seratus miliar rupiah) dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan; - Seri B maksimal sebesar Rp600 miliar (enam ratus miliar rupiah) dengan tenor 5 tahun sejak tanggal penerbitan; - Seri C maksimal sebesar Rp300 miliar (tiga ratus miliar rupiah) dengan tenor 7 tahun sejak tanggal penerbitan.	PPA bonds have been issued on September 1, 2020 with a total acquisition of Rp642 billion
Approving the issuance of bonds of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to support investment and financing activities with a maximum total of Rp1 trillion to be issued in the first semester of 2020 with details:	
- Series A maximum of Rp100 billion (one hundred billion rupiah) with a tenor of 3 years from the date of issue; - Series B maximum of Rp600 billion (six hundred billion rupiah) with a tenor of 5 years from the date of issue; - Series C maximum of Rp300 billion (three hundred billion rupiah) with a tenor of 7 years from the date of issue	
Arahan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RKAP Selain menghasilkan keputusan RUPS, RUPS Tahunan RKAP juga menghasilkan arahan Pemegang Saham. Penjelasan arahan Pemegang Saham dan tindak lanjut oleh Manajemen hingga 31 Desember 2020,	
Shareholders' Directives in the Annual GMS on RKAP Besides producing the GMS resolutions, the Annual GMS on RKAP also producing the directives from Shareholders. The explanation regarding the Shareholders' directives and the follow-up by the Management until December 31, 2020, are as follows:	

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow-up until December 31, 2020
1	Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris, KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2020 serta sebagai sarana pengawasan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Target-target RKAP dan KPI Korporat agar dilakukan <i>cascading & deployment</i> ke pejabat/karyawan level bawah, seluruh wilayah, dan unit kerja termasuk anak perusahaan. The book of RKAP, RKA-PKBL, RKA Board of Commissioners KPA, KPI (<i>Key Performance Indicator</i>) 2020 which has been approved and ratified by the GMS is an integral part of the Minutes of the GMS Resolution and serves as a guide for Board of Directors in implementing the work programs and performance targets in 2020 as well as a means of supervision for Board of Commissioners. The targets of RKAP and Corporate KPI to be followed-up by cascading & deployment to lower level officials/employees, all regions, and work units including subsidiaries.	---
2	Direksi dan Dewan Komisaris agar bekerja dengan sungguh-sungguh demi memajukan Perusahaan dan mengupayakan (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target RKAP dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaksanakan RKAP dengan efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap baik hati, beritikad baik, kewajaran serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan. Direksi agar memiliki rencana antisipasi (<i>contingency plan</i>) sehingga dalam hal terjadi perubahan asumsi dan kondisi bisnis, RKAP target tetap dapat tercapai. Board of Directors and Board of Commissioners should work sincerely for the Company's advancement and strive (showing best effort) in achieving the RKAP targets by referring to the principles of GCG and professionalism, and in accordance with the laws and regulations. Board of Directors and the Board of Commissioners are obliged to carry out the RKAP effectively and in efficient cost and always be kind, have good intentions, be fair and full of responsibility for the interests of the company. Board of Directors must have a contingency plan so that in the event of changes in assumptions and business conditions, the RKAP targets can still be achieved.	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh demi memajukan Perusahaan dan mengupayakan yang terbaik (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target RKAP dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Board of Directors and Board of Commissioners always work earnestly for the Company's advancement and strive for the best (show best effort) in achieving the RKAP targets by referring to the principles of GCG and professionalism, as well as in accordance with the laws and regulations.
3	Berkenaan dengan adanya rencana penerbitan surat utang berupa obligasi, Direksi dan Dewan Komisaris diminta: - Tetap mempertimbangkan aspek <i>timing</i>, <i>sizing</i>, dan <i>pricing</i> serta skema dan proses yang terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (<i>cost of fund</i>) agar tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. - Mengupayakan besaran tingkat bunga yang efisien serta memastikan efektivitas penggunaan dana hasil penerbitan surat utang berupa obligasi sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Perusahaan. - Melaksanakan penerbitan surat utang obligasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Pemegang Saham. With regard to the plan to issue debt securities in the form of bonds, Board of Directors and Board of Commissioners are requested to: - Continue to consider the timing, sizing, and pricing aspects as well as the best schemes and processes so that the cost of funds can be efficient and not to burden the company's financial performance in the future - Strive for an efficient interest rate and ensure the effective use of proceeds from the issuance of debt securities in the form of bonds so as to provide maximum benefits for the Company. - Carry out the issuance of bonds in accordance with the applicable laws and regulations and the implementation is reported to the Shareholders.	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan ketiga arahan Pemegang Saham dimaksud pada penerbitan obligasi. Board of Directors and Board of Commissioners constantly make every efforts to carry out the three directives from the Shareholders referred to in the issuance of bonds.

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow-up until December 31, 2020
4	Dalam rangka mendukung operasional dan pengembangan perusahaan, Direksi agar terus meningkatkan kualitas SDM yang profesional, serta membenahan sistem dan prosedur operasional. Direksi diminta menerapkan mekanisme <i>reward & punishment</i> secara objektif dan sistem remunerasi berbasis kinerja yang dapat memacu produktivitas karyawan, serta kebijakan pension yang tepat dan tidak memberatkan perusahaan. In order to support the Company's operations and development, Board of Directors should continue to improve the quality of professional human capital, as well as to improve operational systems and procedures. Board of Directors is requested to implement an objective reward & punishment mechanism and a performance-based remuneration system in order to boost employee productivity, as well as a pension policy that is appropriate and does not burden the Company.	Direksi senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang profesional, serta membenahan sistem dan prosedur operasional. Board of Directors always makes every efforts to continuously improve the quality of professional human capital, as well as to improve the operational systems and procedures.
5	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan terhadap perbaikan bisnis proses dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan pengembangan usaha anak perusahaan secara berkala. Dalam hal kinerja anak perusahaan tidak sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan induk, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk menyusun strategi baru pengembangan bisnis anak perusahaan maupun pelaksanaan <i>exit</i> strategi terhadap kepemilikan pada anak perusahaan tersebut. Board of Directors under Board of Commissioners' supervision is requested to optimize the role and contribution of subsidiary to business process improvement and performance improvement of the parent company through periodic performance evaluation and business development of the subsidiary. In case that the subsidiary's performance is not in line with the business development of the parent company, Board of Directors under Board of Commissioners' supervision is requested to formulate a new strategy for developing the subsidiary's business as well as implementing an exit strategy for ownership in the subsidiary.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris berupaya mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan/perusahaan afiliasi terhadap perbaikan proses bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan monitoring pengembangan usaha anak perusahaan/perusahaan afiliasi secara berkala. Secara berkala Direksi melakukan pertemuan dengan pengurus anak perusahaan guna mengetahui perkembangan usaha anak perusahaan. Board of Directors under Board of Commissioners' supervision seeks to optimize the role and contribution of subsidiaries/affiliated companies to business process improvement and performance improvement of the parent company through the performance evaluation and business development monitoring of subsidiaries/affiliated companies on a regular basis. Board of Directors regularly holds meetings with the management of the subsidiaries to find out the development of the subsidiaries' businesses.
6	Direksi agar mengupayakan dan mempersiapkan aset <i>recovery</i> Perusahaan untuk menjaga kapasitas Perusahaan, apabila proses restrukturisasi pada PT Nindya Karya telah berakhir. Board of Directors should seek and prepare the Company's asset recovery to maintain the Company's capacity, if the restructuring process at PT Nindya Karya has ended.	Guna mengantisipasi berakhirnya proses restrukturisasi PT Nindya Karya, Direksi selalu mengupayakan dan mempersiapkan aset <i>recovery</i> perusahaan untuk menjaga kapasitas perusahaan. To anticipate the end of the restructuring process of PT Nindya Karya, Board of Directors strives and prepares the Company's asset recovery to maintain the Company's capacity.
7	Direksi agar arahan umum instruksi Surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Board of Directors should refer to the general instruction contained in the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. S-574/MBU/08/2019 dated August 30, 2019 regarding the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the preparation of the 2020 Company Work Plan and Budget.	Perusahaan Direksi Kelembagaan Surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus perihal Aspirasi Aspirasi Saham/Pemilik Modal untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020. Company's Board of Directors refer to the Letter of the Minister of SOEs No. S-574/MBU/08/2019 dated August 30, regarding the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the preparation of the 2020 Company Work Plan and Budget.
8	Direksi diminta untuk mengendalikan nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) baik di induk maupun anak perusahaan pada angka di bawah 5% dengan melakukan upaya pengembangan bisnis portofolio dan perbaikan sistem seleksi debitur sehingga likuiditas perusahaan secara konsolidasi maupun entitas dapat terjaga. Board of Directors is asked to control the value of Non Performing Loans (NPL) in both the parent and subsidiary companies at a rate below 5% by making efforts to develop business portfolio and to improve the debtor selection system so that the liquidity of the company on a consolidated and entity basis can be maintained.	Direksi senantiasa berupaya untuk mengendalikan nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) baik di induk maupun anak perusahaan pada angka di bawah 5%. Board of Directors strives to control the value of Non-Performing Loans (NPL) in both the parent and subsidiary companies at a rate below 5%.

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow-up until December 31, 2020
9	Direksi diminta untuk memperhatikan pencatatan transaksi keuangan Perusahaan harus sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku dan menerapkan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 pada Tahun Buku 2020. Board of Directors is asked to pay attention to the recording of the Company's financial transactions in accordance with applicable bookkeeping standards and to apply PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73 in the 2020 Fiscal Year.	Direksi senantiasa memperhatikan pencatatan transaksi keuangan Perusahaan harus sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku dan menerapkan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 pada Tahun Buku 2020. Board of Directors always pays attention to the recording of the Company's financial transactions in accordance with applicable accounting standards and applies PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73 in the 2020 Fiscal Year.
10	Direksi diminta melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana tambahan PNM secara berkala dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08-MBU-06-2015 tanggal 3 Juni 2015. Board of Directors is asked to report on the realization of the use of additional PNM funds on a regular basis by referring to the Minister of SOE Regulation No. PER-08-MBU-06-2015 dated June 3, 2015.	Direksi telah melaporkan realisasi penggunaan dana tambahan PMN periode I, II, III dan III tahun 2020 melalui surat kepada Menteri BUMN dan telah di-upload secara elektronik pada portal Silaba. Board of Directors has reported the realization of the use of additional PMN funds for the period I, II, III and III in 2020 through a letter to the Minister of SOEs and has been uploaded electronically on the Silaba portal.
11	Direksi mengorganisasi dana Restrukturisasi dan Revitalisasi (R/R) dengan memperhatikan prinsip GCG dan melakukan optimalisasi penggunaannya sesuai dengan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2009 jo. PER-05/MBU/2012 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT PPA (Persero). Pengelolaan dan optimalisasi dana R/R tersebut agar dilaporkan secara berkala kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah rekomendasi Dewan Komisaris. Board of Directors should organize the Restructuring and Revitalization (R/R) funds by taking into account the GCG principles and optimizing its use in accordance with the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2009 jo. PER-05/MBU/2012 regarding The Guidelines for SOE Restructuring and Revitalizing by PT PPA (Persero). The management and optimization of the R/R funds should be reported periodically to the General Meeting of Shareholders after the recommendation of Board of Commissioners.	Direksi senantiasa membantu dana Restrukturisasi dan Revitalisasi (R/R) dengan memperhatikan prinsip GCG dan melakukan optimalisasi pemanfaatannya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2009 jo. PER-05/MBU/2012. Board of Directors always assists the Restructuring and Revitalization (R/R) funds by taking into account the principles of GCG and optimizing its utilization in accordance with the Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2009 jo. PER-05/MBU/2012.
12	Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan RKAP Tahun 2020, yang meliputi laporan, laporan semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan penyampaian laporan berkala secara elektronik melalui portal Silaba. Board of Directors and Board of Commissioners are requested to submit periodic reports to Shareholders in a timely manner on the implementation of the 2020 RKAP, which includes reports, semi-annual reports, and other periodic reports in accordance with applicable regulations, including provisions for submitting periodic reports electronically through the Silaba portal.	Perusahaan senantiasa menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu secara elektronik. Laporan berkala yang disampaikan pada tahun 2020 adalah penyampaian Laporan Manajemen I, II, dan III Tahun 2020 melalui surat kepada Menteri BUMN dan telah di-upload secara elektronik pada portal Silaba. The Company always submits periodic reports in a timely manner electronically. The periodic reports submitted in 2020 were the Management Report I, II, and III of 2020 through a letter to the Minister of SOEs and have been uploaded electronically on the Silaba portal.
13	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan (<i>trusted entities</i>) dengan terus meningkatkan kualitas SDM, bisnis proses, dan budaya perusahaan. Board of Directors under the supervision of Board of Commissioners is required to maintain the integrity and credibility of the Company (trusted entity) by continuously improving the quality of human capital, business processes, and corporate culture.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris senantiasa menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan (<i>trusted entities</i>) dengan terus meningkatkan kualitas SDM, bisnis proses, dan budaya Perusahaan. Board of Directors under the supervision of Board of Commissioners always maintains the integrity and credibility of the company (trusted entity) by continuously improving the quality of human capital, business processes, and corporate culture.

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow-up until December 31, 2020
14	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris mengawasi untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi anak terhadap perbaikan bisnis proses dan peningkatan kinerja Perusahaan dalam evaluasi kinerja dan pengembangan usaha anak perusahaan secara berkala. Dalam hal kinerja anak perusahaan tidak sejalan dengan pengembangan bisnis perusahaan induk, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk menyusun strategi baru pengembangan bisnis anak perusahaan maupun pelaksanaan <i>exit strategy</i> terhadap kepemilikan pada anak perusahaan tersebut. Board of Directors under the supervision of Board of Commissioners should oversee the optimization of subsidiaries' role and contribution to the improvement of business processes and the improvement of the Company's performance in evaluating the performance and business development of subsidiaries on a regular basis. In the event that the subsidiary's performance is not in line with the business development of the parent company, Board of Directors under the supervision of Board of Commissioners is requested to formulate a new strategy for developing the subsidiary's business as well as implementing an exit strategy for ownership in the subsidiary.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris berupaya mengoptimalkan peran dan kontribusi anak perusahaan/perusahaan afiliasi terhadap perbaikan proses bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan induk melalui evaluasi kinerja dan <i>monitoring</i> pengembangan usaha anak perusahaan/perusahaan afiliasi secara berkala. Secara berkala Direksi melakukan pertemuan dengan pengurus anak perusahaan guna mengetahui perkembangan usaha anak perusahaan. Board of Directors under the supervision of Board of Commissioners seeks to optimize the role and contribution of subsidiaries/affiliated companies to business process improvement and performance improvement of the parent company through performance evaluation and business development monitoring of subsidiaries/affiliated companies on a regular basis. Board of Directors regularly holds meetings with the management of the subsidiaries to find out the development of the subsidiaries' businesses.
15	Direksi bersama Dewan Komisaris agar menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2020. Board of Directors and Board of Commissioners are required to submit Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2020.	Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AAJ (RSM Indonesia) telah disampaikan secara elektronik pada portal Silaba sesuai Bukti Penerimaan Pelaporan Elektronik No. SPE-0803/3/2020 tanggal 3 Maret 2020. The Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which has been audited by AAJ Public Accounting Firm (RSM Indonesia) have been submitted electronically on the Silaba portal according to The Evidence of Electronic Reporting Receipt No. SPE-0803/3/2020 on March 3, 2020.
16	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk menyesuaikan strategi perusahaan dengan RPJMN Kementerian BUMN Tahun 2020-2024. Board of Directors with the supervision of Board of Commissioners is asked to adjust the Company's strategy with the RPJMN of the Ministry of SOE for 2020-2024.	Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris selalu berusaha menyesuaikan strategi perusahaan dengan RPJMN Kementerian BUMN Tahun 2020-2024. Board of Directors with the supervision of Board of Commissioners tries to adjust the Company's strategy with the RPJMN of the Ministry of SOEs for 2020-2024.
17	Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi agar memperhatikan catatan dalam Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No. RIS-61/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 27 November 2019. With regard to the implementation of the Social and Environmental Responsibility, Board of Directors should pay attention to the notes in the Minutes of Joint Discussion Meeting with the Deputy for Social and Environmental Responsibility No. RIS-61/D7.MBU.3/11/2019 dated November 27, 2019.	Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi selalu memperhatikan catatan dalam Risalah Rapat Pembahasan bersama Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No. RIS-61/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 27 November 2019. With regard to the implementation of the Social and Environmental Responsibility, Board of Directors always pays attention to the notes in the Minutes of Joint Discussion Meeting with the Deputy for Social and Environmental Responsibility No. RIS-61/D7.MBU.3/11/2019 dated November 27, 2019.
18	Tanggapan dan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat No. S-63/PPA/KOM/1119 tanggal 6 November 2019 merupakan satu kesatuan dengan Keputusan RUPS ini. The response and directive of Board of Commissioners submitted through letter No. S-63/PPA/KOM/1119 dated November 6, 2019 is an integral part of this GMS Resolution.	---

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

Annual GMS on The Approval of Annual Report and The Ratification of Financial Statements for 2020 Fiscal Year

Tanggal 29 Juni 2020

On June 29, 2020

Keputusan Decision		Tindak Lanjut Follow-up
Agenda 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 Agenda 1: Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for Fiscal Year 2019		
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut: Meeting resolutions are taken based on deliberation for consensus. The resolutions of the GMS and their follow-up actions by the Company's Management until the end of 2020 are as follows:		
No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow-up until December 31, 2020
1	Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional perusahaan, Direksi beserta jajaran diminta berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara konsisten. In carrying out each operational activities of the Company, Board of Directors and all management are requested to refer to the laws and regulations and apply the principles of Good Corporate Governance consistently.	Direksi beserta jajaran senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara konsisten. Board of Directors and all management are always guided by the laws and regulations and consistently apply the principles of Good Corporate Governance.
2	Semua temuan, catatan, dan saran/rekomendasi dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal (KAP dan BPK-RI) pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, agar menjadi prioritas penyelesaian oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2020. All findings, notes, and suggestions/recommendations from the Internal Auditors and External Auditors (KAP and BPK-RI) in 2019 and previous years that have not been followed up, should become a priority for completion by Board of Directors and Board of Commissioners in 2020.	Direksi dan Dewan Komisaris memprioritaskan semua temuan, catatan, dan saran/rekomendasi dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal (KAP dan BPK-RI) pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti. Board of Directors and Board of Commissioners prioritize all findings, notes, and suggestions/recommendations from the Internal Auditors and External Auditors (KAP and BPK-RI) in 2019 and previous years that have not been followed up.
3	Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, Direksi dan Dewan Komisaris diminta mengimplementasikan <i>business continuity plan</i> yang telah disusun untuk memastikan keberlangsungan layanan dalam situasi <i>new normal</i> serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. In connection with the COVID-19 pandemic, Board of Directors and Board of Commissioners are asked to implement a business continuity plan that had been prepared to ensure the service continuity in the new normal situation and optimize the Company's financial and operational management.	Direksi dan Dewan Komisaris berusaha untuk mengimplementasikan <i>business continuity plan</i> yang telah disusun untuk memastikan keberlangsungan layanan dalam situasi <i>new normal</i> serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. Board of Directors and Board of Commissioners strive to implement the business continuity plan that has been prepared to ensure service continuity in the new normal situation and optimize the Company's financial and operational management.
4	Direksi agar mengupayakan pencapaian efisiensi biaya pada semua aspek operasional Perusahaan, melakukan pemangkasan dan penyederhanaan proses bisnis, serit mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Board of Directors should strive to achieve the cost efficiency in all aspects of the company's operations, cutback and simplify business processes, and optimize the use of information technology.	Direksi senantiasa mengupayakan pencapaian efisiensi biaya pada semua aspek operasional Perusahaan, melakukan pemangkasan dan penyederhanaan proses bisnis, serit mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Board of Directors strives to achieve the cost efficiency in all aspects of the Company's operations, cutback and simplify business processes, and optimize the use of information technology.



No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow-up until December 31, 2020
5	Dalam upaya mencukupi kebutuhan pendanaan, agar mempertimbangkan skema terbaik yang dapat memberikan efisiensi beban bunga (<i>cost of fund</i>), serta tidak memberatkan kinerja keuangan ke depan. In the effort to meet funding needs, the best scheme that can provide cost of fund efficiency, and does not burden future financial performance should be considered.	Dalam upaya mencukupi kebutuhan pendanaan, Direksi selalu mempertimbangkan skema terbaik yang dapat memberikan efisiensi beban bunga (<i>cost of fund</i>), serta tidak memberatkan kinerja keuangan ke depan. In the effort to meet funding needs, Board of Directors always considers the best scheme that can provide cost of fund efficiency, and does not burden future financial performance.
6	Direksi agar melakukan penjajakan sumber pendapatan usaha baru yang dapat meningkatkan profitabilitas, memperbaiki <i>cash flow</i> dan melakukan pemangkasan biaya yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas Perusahaan. Board of Directors should explore new sources of income that can increase the profitability, improve cash flow and cut costs that do not directly contribute to increase the Company's productivity.	Direksi berupaya untuk melakukan penjajakan sumber pendapatan usaha baru yang dapat meningkatkan profitabilitas, memperbaiki <i>cash flow</i> dan melakukan pemangkasan biaya yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas Perusahaan. Board of Directors seeks to explore new sources of income that can increase the profitability, improve cash flow and cut costs that do not directly contribute to increasing Company's productivity.
7	Dalam upaya penyelesaian permasalahan piutang usaha dan <i>asset recovery</i>, Direksi perlu menyusun langkah strategi untuk mengoptimalkan <i>collection</i> dan keuntungan yang dapat diterima oleh Perusahaan. In the effort to resolve trade receivables and asset recovery problems, Board of Directors needs to develop strategic measures to optimize collection and profit that can be received by the Company.	Dalam upaya penyelesaian permasalahan piutang usaha dan <i>asset recovery</i>, Direksi akan menyusun langkah strategi untuk mengoptimalkan <i>collection</i> dan keuntungan yang dapat diterima oleh Perusahaan. In the effort to resolve trade receivables and asset recovery problems, Board of Directors will develop strategic measures to optimize collection and profit that can be received by the Company.
8	Menyusun arah pengembangan, penyesuaian visi misi dan mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan anak sehingga dapat memberikan kontribusi dan menunjang kinerja Perusahaan secara konsolidasi. Prepare the development directions, align vision and mission and seek to improve the performance of subsidiaries so that they can contribute and support the Company's performance on a consolidated basis.	Direksi secara terus-menerus menyusun arah pengembangan penyesuaian visi misi dan mengupayakan peningkatan kinerja perusahaan anak sehingga dapat memberikan kontribusi dan menunjang kinerja Perusahaan secara konsolidasi. Board of Directors continuously develops directions for the development of the alignment of vision and mission and seeks to improve the performance of subsidiaries so that they can contribute and support the Company's performance on a consolidated basis.
9	Dalam proses penyaluran pembiayaan dan akuisisi aset investasi baru baik di induk maupun anak perusahaan, agar proses <i>due diligence</i> dan penyusunan kajian <i>feasibility study</i> disertai dengan perhitungan analisa profitabilitas dan manajemen risiko yang memadai. In the process of disbursing financing and acquiring new investment assets, both in the parent and subsidiary companies, the due diligence process and preparation of feasibility study must be accompanied by an adequate calculation of profitability analysis and risk management.	Dalam proses penyaluran pembiayaan dan akuisisi aset investasi baru baik di induk maupun anak perusahaan, Direksi senantiasa melaksanakan proses <i>due diligence</i> dan penyusunan kajian <i>feasibility study</i> disertai dengan perhitungan analisa <i>profitability</i> dan manajemen risiko yang memadai. In the process of disbursing financing and acquiring new investment assets, both in the parent and subsidiary companies, Board of Directors continues to carry out the due diligence process and prepare the feasibility study, accompanied by adequate profitability analysis and risk management calculations.

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow-up until December 31, 2020
10	Anak perusahaan harus didorong agar mampu berkinerja semakin meningkat dan mencapai target RKAP serta berkontribusi optimal bagi perusahaan induk. Untuk itu kepada Direksi diminta agar memberikan dukungan asistensi dan melakukan pengawasan secara intensif kepada manajemen anak perusahaan. Subsidiaries must be encouraged to improve their performance and to achieve RKAP targets and optimally contribute to the parent company. For this reason, Board of Directors is requested to provide assistance and support intensive supervision to the management of subsidiaries.	Anak perusahaan harus didorong agar mampu berkinerja semakin meningkat dan mencapai target RKAP serta berkontribusi optimal bagi perusahaan induk. Untuk itu kepada Direksi secara terus-menerus memberikan dukungan asistensi dan melakukan pengawasan secara intensif kepada manajemen anak perusahaan. Subsidiaries must be encouraged to improve their performance and to achieve RKAP targets and optimally contribute to the parent company. For this reason, Board of Directors continuously provides assistance and provides intensive supervision to the management of subsidiaries.
11	Melakukan evaluasi dan memastikan program sinergi BUMN dapat berjalan sesuai target dengan menjaga peran masing-masing BUMN sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, serta memastikan manfaat sinergi tersebut dapat dirasakan bagi para <i>stakeholder</i>. Evaluating and ensuring that the SOE synergy program can run according to the target by maintaining the role of each SOE in accordance with their functions and responsibilities, as well as ensuring that the benefits of the synergy can be felt by the stakeholders.	Direksi selalu melakukan evaluasi dan memastikan program sinergi BUMN dapat berjalan sesuai target dengan menjaga peran masing-masing BUMN sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, serta memastikan manfaat sinergi tersebut dapat dirasakan bagi para <i>stakeholder</i>. Board of Directors always evaluates and ensures that the SOE synergy program can run according to the target by maintaining the role of each SOE in accordance with their functions and responsibilities, as well as ensuring the benefits of the synergy can be felt by the stakeholders.
12	Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi agar melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. To support the improvement of the quality of supervision and the development of SOEs, Board of Directors is required to fill out and to update data on Silaba portal, Asset portal, HR portal, PKBL portal, and public portal accurately and in a timely manner according to applicable regulations.	Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi selalu berupaya melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. To support the improvement of the quality of supervision and the development of SOEs, the Board of Directors always tries to fill out and to update the data on Silaba portal, Asset portal, HR portal, PKBL portal, and public portal in an accurate and timely manner in accordance with applicable regulations.
13	Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh KAP, Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang telah ditelaah Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2019, dan arahan Dewan Komisaris dalam surat Tanggapan atas Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun Buku 2019 No. S-16/PPA/KOM/0320 tanggal 26 Maret 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini. Financial Reports, Implementation Reports, Performance Evaluation Reports, Compliance Reports on Legislation and Internal Controls that have been audited by KAP, Key Performance Indicators (KPI) Assessment Reports that have been reviewed by Board of Commissioners through Audit Committee, Minutes of Annual Report Discussion Meetings of the Social and Environmental Responsibility for the 2019 Fiscal Year, and the Board of Commissioners' Directives in the Response to the 2019 Fiscal Year Audited Financial Report No. S-16/PPA/KOM/0320 dated March 26, 2020 is an integral part of this treatise.	

Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan GCG secara efektif dan berkelanjutan.

Dasar Peraturan

Organisasi Dewan Komisaris dalam lingkungan Perusahaan berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 6 yang mewajibkan Dewan Komisaris untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 108 hingga Pasal 121 yang mengatur seluruh aspek mengenai Dewan Komisaris Perusahaan Terbatas;
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

Board Manual: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris telah memiliki *board manual* sebagai pedoman. *Board manual* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini selalu ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. Landasan hukum yang menjadi acuan *board manual* adalah:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Pedoman GCG Perusahaan.

Board Manual mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Jabatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
 - c. Kewajiban Dewan Komisaris;
 - d. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;

Board of Commissioners is a Company organ in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations as well as advising the Board of Directors and ensuring that the Company has implemented GCG effectively and sustainably.

Regulatory Framework

The Company implements sustainable GCG, in stipulating the duty, authority and obligation, the Board of Commissioners refers to manual and policy, as follows:

1. Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprise in Article 6 that obliges the Board of Commissioners to implement GCG principles, such as Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, and Equality;
2. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company in Articles 108 until 121 that regulates all aspects about Board of Commissioners in Limited Liability Company;
3. Articles of Association

Board Manual: Guidelines and Work Order of Board of Commissioners

Besides in being stipulated in the Company's Articles of Association, the duties and the authorities of Board of Commissioners and Board of Directors are affirmed and detailed in the Board Manual governing the GCG practices specifically for the Board of Commissioners. The Board Manual is prepared based on the prevailing law and regulation and always be reviewed and updated periodically. Legal framework as Board Manual's reference is as follows:

1. Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company;
3. Articles of Association;
4. GCG Code.

Board Manual regulates various aspects with regard to the Board of Commissioners, among others:

1. Board of Commissioners, including:
 - a. General provision of Board of Commissioners position;
 - b. Board of Commissioners duty and authority;
 - c. Obligation Board of Commissioners
 - d. Board of Commissioners responsibility;

- e. Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
 - f. Prinsip-prinsip Pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
 - g. Etika jabatan Dewan Komisaris;
 - h. Rapat Dewan Komisaris;
 - i. Organ pendukung Dewan Komisaris.
2. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi, meliputi:
- a. Pertemuan Formal;
 - b. Pertemuan Informal;
 - c. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Program Pengenalan Perusahaan;
 - e. Pelaporan Berkala.

- e. Division of Duties and Authority of the Board of Commissioners
- f. Board of Commissioners decision-making principles;
- g. Board of Commissioners ethics;
- h. Board of Commissioners Meeting;
- i. Board of Commissioners Supporting Structure.

2. Board of Commissioners and Board of Directors working Relation, including:
- a. Formal Meeting;
 - b. Non-Formal Meeting;
 - c. General Meetings of Shareholders Implementation;
 - d. Company's Orientation Program;
 - e. Periodic Report.

Proses Pengangkatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Proses pengangkatannya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali. Calon Anggota Dewan Komisaris harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan Pemegang Saham dalam RUPS.

Selain itu, Dewan Komisaris harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- 2. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2021

Dewan Komisaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. SK-326/MBU/10/2020 tertanggal 9 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris. Berikut disampaikan susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021.

Board of Commissioners Appointment Process

Board of Commissioners is appointed based on a mechanism stipulated by Controlling Shareholders. The Board of Commissioners Candidate Member shall pass several selection stages before nominated by the Shareholders in General Meeting of Shareholders.

In addition, the Board of Commissioners must pay attention to the applicable provisions, namely:

- 1. Not serving as a member of the Board of Commissioners of the company concerned for 2 (two) consecutive periods;
- 2. Physically and mentally healthy, not suffering from an illness that can keep them from discharging duties as a member of the Board of Commissioners as evidenced by a health certificate from a government hospital.

Terms of Tenure

The tenure of Board of Commissioners members is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Board of Commissioners members can be dismissed at any time based on a GMS resolution by stating the reasons.

Number, Composition, and Structure of the Board of Commissioners in 2021

The Company's incumbent Board of Commissioners complies with the Decree of the Minister of SOE as the GMS of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2010 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Thus, the Board of Commissioners as of December 31, 2021 has 2 (two) members, 1 (one) President Commissioner and 1 (one) Commissioner. The following is the composition of the membership of the Board of Commissioners as of December 31, 2021.



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period
Krisna Wijaya	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 GMS Decision No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020	9 Oktober 2020 – 8 Oktober 2025 October 9, 2020 – October 8, 2025	Ke-1 First
Marwanto Harjowirjono	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 GMS Decision No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020	9 Oktober 2020 - 8 Oktober 2025 October 9, 2020 – October 8, 2025	Ke-1 First

Penilaian Kelayakan dan Kepatan Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2021 telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Status	Pelaksana <i>Fit & Proper Test</i> Fit & Proper Text Giver
Krisna Wijaya	Lulus tahun 2020 Passed in 2020	Kementerian BUMN The Ministry of SOE
Marwanto Harjowirjono	Lulus tahun 2020 Passed in 2020	Kementerian BUMN The Ministry of SOE

Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan melalui proses yang transparan.

1. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut;
2. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Pemberhentian

Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Adapun alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar,
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/ atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri.

Board of Commissioners Fit and Proper Test

All of Board of Commissioners candidate members shall pass Fit and Proper Test by Shareholders prior being appointed as a member of Board of Commissioners in the Company. Board of Commissioners Fit and Proper Test Status in 2021 is as follows:

Terms of Board of Commissioners Appointment

Appointment

Board of Commissioners members are appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders by concerning the prevailing law and through a transparent process.

1. Not serving as Board of Commissioners member in the Company for 2 (two) consecutive periods;
2. Physically and mentally in a healthy condition, not suffering any disease that may constraint the implementation duties as Board of Commissioners member which is proven with health certificate from Public Hospital.

Dismissal

Based on the Board Manual, Board of Commissioners member can be dismissed any time under General Meeting of Shareholders resolutions. Reasons of the Board of Commissioners member dismissal are among others :

1. Not being capable to perform the duty appropriately;
2. Not complying with provisions of the law and/or Articles of Association;
3. Involved in action that caused loss to the Company and/ or Country;
4. Implement any action that violates ethics and/or appropriateness that shall be respected as Board of Commissioners member;
5. Declared guilty under permanent legal force Court Sentence;
6. Submitted resignation.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri selaku RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri selaku RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:

1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang ditembuskan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya serta Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Apabila sampai batas tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut. Dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan, pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang dilandasi oleh suatu mekanisme hubungan kerja yang baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu;
5. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

Besides the reasons of Board of Commissioners members dismissal as what have been mentioned above, referring to Minister of SOE Regulation number PER-02/MBU/02/2015, Board of Commissioners member can be dismissed by the Minister as GMS based on other reasons that are considered appropriate by the Minister as GMS on behalf of the SOEs' interest and objectives, such as but not limited to:

1. Restructuring the Company;
2. Entering the retirement age of Civil State Apparatus, for the Board of Commissioners/Supervisory Board assigned by Technical Ministry or other Government Institutions

Terms of Board of Commissioners Resignation

A member of the Board of Commissioners is eligible to resign from his/her position by submitting written notification with regard to the intention to the Company with a copy of the letter sent to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, maximum 30 days prior the resignation date. If the resignation letter states the effective resignation date is less than 30 days since the letter is received, the letter is considered not to mention the effective resignation date.

If until the date requested by the respective Board of Commissioners member or within 30 days since the acceptance of the resignation letter is received, in the case of not mentioning the effective resignation date, there is no General Meeting of Shareholders resolutions, the Board of Commissioners member is automatically resigned on the requested date as mentioned above or after passing 30 days since the date of resignation letter accepted without requiring the GMS approval.

Board of Commissioners and Board of Directors Working Relation

Board of Commissioners and Board of Directors working relation is based on basic principles, as follows:

1. Board of Commissioners respects the duty and authority of the Board of Directors in managing the Company as regulated in the law and Articles of Association.
2. Board of Directors respects the duty and authority of the Board of Commissioners to supervise and to provide advise the Company's managerial policy as regulated in the law and Articles of Association.
3. Every working relation between the Board of Commissioners and Board of Directors is a formal institutional relation based on standardized working relation mechanism or accountable correspondence.
4. Board of Commissioners has a right to acquire the corporate information accurately, completely, and on time.
5. Board of Directors is responsible on accuracy, completeness, and punctuality of the Company's information submission to the Board of Commissioners.

6. Hubungan kerja antara organ-organ di bawah Dewan Komisaris dengan organ-organ di bawah Direksi diatur berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan meningkatkan kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-masing sehingga dapat tercapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, yang tercermin pada:
 - a. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko;
 - b. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi Pemegang Saham;
 - c. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;
 - d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi Perusahaan;
 - e. Terpenuhinya pelaksanaan GCG di Perusahaan secara konsisten.
6. Working relation among structures under the Board of Commissioners with structures under the Board of Directors is based on the agreement between Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Working relation between Board of Commissioners and Board of Directors is check and balances relation with final purpose to develop and to improve the Company's soundness index. The Board of Commissioners and Board of Directors have a shared commitment to carry out each duty and to achieve the Company's long-term business sustainability as reflected from:
 - a. Good implementation of internal control and risk management.
 - b. Optimum return for Shareholders.
 - c. Fair protection on Stakeholders' interest.
 - d. Implementation of fair leadership succession for the management's continuity in all organization lines of the Company.
 - e. Fulfillment of GCG implementation in the Company consistently

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya dan semua fungsi ini dikoordinasikan oleh Komisaris Utama. Ketentuan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

The Duty and Responsibility of Board of Commissioners

Duties and Responsibility

In carrying out its function, the Board of Commissioners upholds its responsibility and the entire functions are coordinated by President Commissioner. Terms of the implementation of Board of Commissioners' duties and responsibilities are:

1. The Board of Commissioners is responsible for the implementation of supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the Company's interest in accordance with purpose and objective of the Company;
2. Every member of Board of Commissioners is responsible personally for the Company's loss if the concerned is guilty or negligent in carrying out his/ her duties;
3. In the event of the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, responsibility as mentioned in point 2 prevails is carried out jointly and severally for each member of Board of Commissioners;
4. Members of Board of Commissioners cannot be accounted for on loss as mentioned on point 2 if they can prove that he/she:
 - a. Has carried out supervision with good will and prudence for the Company's interest and in accordance with purpose and objective of the Company;
 - b. Does not have personal interest, both directly and indirectly on management action of the Board of Directors that causes loss; and
 - c. Has advised the Board of Directors to prevent the occurrence or continuity of the loss.

Adapun tanggung jawab yang melekat pada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan;
2. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
3. Membentuk Komite Audit;
4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi;
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai RJPP dan RKAP;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dan arahan RUPS dalam pengesahan RKAP serta RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan;
7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
8. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
9. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
12. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS

Wewenang

Berdasarkan *Board Manual*, Dewan Komisaris memiliki wewenang yang meliputi:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

While the Board of Commissioners' responsibilities are to:

1. Provide advice to the Board of Directors in running the Company's management.
2. Prepare Annual Work Program that is included in the RKAP.
3. Establish the Audit Committee.
4. Observe, review, and sign the Corporate Long-Term Plan (RJPP) and the Corporate Work Plan & Budget (RKAP) as prepared by the Board of Directors.
5. Provide recommendation and suggestion to the General Meetings of Shareholders with regard to RJPP and RKAP.
6. Supervise the implementation of GMS Resolutions and Directives on RKAP legalization and GMS on Annual Report Approval.
7. Follow the Company's activity progress; provide opinion and recommendation to the GMS concerning every issue that is considered necessary for the Company's management.
8. Report immediately to the GMS if there is any indication of the Company's performance decrease.
9. Observe and review periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.
10. Submit supervisory duty report as done in recent fiscal year to the GMS.
11. Provide explanation, opinion and suggestion to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
12. Submit the Public Accountant Recommendation to the GMS.
13. Do the other obligations in order to supervise and advise duties as long as they are not violating the Law, Articles of Association and/or GMS resolutions.

Authorities

Based on the *Board Manual*, the Board of Commissioners is authorized to:

1. Peruse books, letters, and other documents, examine the Company's cash for verification needs and other securities, and inspect the Company's assets;
2. Enter into the Company's environment, building, and offices;
3. Ask the explanation from the Board of Directors and/or other executive officials regarding all issues in the Company's management;
4. Understand all explanation and action that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Ask the Board of Directors and/or other executive officials under the Board of Directors, with the acknowledgement from the Board of Directors, to attend Board of Commissioners' meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary to the Board of Commissioners, if considered necessary;
7. Temporarily dismiss the members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
8. Establish the committees other than Audit Committee, if deemed necessary, by taking into account the Company's capacity;

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

9. Employ the expert service for certain matters and within certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Perform the Company's management function in a certain condition and for certain period in accordance with the provisions in Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide opinion on the matters discussed;
12. Conduct other supervisory authority as long as the authority does not violate the laws and regulations, Articles of Association and/or Resolutions of GMS;

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembagian tugas anggota Dewan berdasarkan Berita Acara Dewan Komisaris No. BA-02/PPA/KOM/1020 tanggal 13 Oktober 2020, tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris PPA adalah sebagai berikut:

The Division of Duties Between Board of Commissioners Members

In order to be more efficient and effective in carrying out their duties, the division of duties between Board of Commissioners members is carried out based on Minutes of Board of Commissioners No. BA-02/PPA/KOM/1020 October 13, 2020, the duties of each member of the PPA Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Task Division
Krisna Wijaya	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Koordinator anggota Dewan Komisaris, serta membidangi terkait organisasi dan <i>Corporate Strategic Planning and Monitoring</i> , Dukungan Kerja, unit <i>Legal & Corp. Secretary</i> Coordinating member of the Board of Commissioners in charge of organization and Corporate Strategic Planning and Monitoring, Work Support, Legal & Corp. units.
Marwanto Harjowirjono	Komisaris Commissioner	Koordinasi terkait fungsi Keuangan dan Investasi, serta unit <i>Internal Auditor/SPI</i> , Konsultasi Bisnis dan Aset Manajemen, serta unit <i>Risk Management</i> Coordination related to Finance and Investment functions, as well as Internal Auditor/SPI units, Business Consulting and Asset Management, and Risk Management units

Pembagian Tugas Pemantauan KPI

Di samping itu, berdasarkan Berita Acara yang sama, di antara anggota Dewan Komisaris dilakukan pembagian tugas pemantauan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris, sebagai berikut:

The Division of Task of Monitoring on KPI

In addition, based on the same decree, the duties to monitor the achievement of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) are divided among members of the Board of Commissioners as follows:

No	KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners KPI	Target	Person In Charge
1.	Aspek Pengawasan dan Pengarahan The Supervisory and Advisory Aspect		
	Review/analisis kinerja bulanan perusahaan Review/analysis of the Company's monthly performance	12x	Krisna Wijaya
	Pemberian nasihat/saran kepada Direksi Advice/recommendation to Board of Directors	12x	Krisna Wijaya
	Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal Monitoring the follow-up on internal/external audit results/findings	6x	Krisna Wijaya
	Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG Monitoring the follow-up on GCG assessment recommendations	2x	Marwanto Harjowirjono
	Monitoring Aset kelolaan atau perusahaan yang direstrukturisasi dan/atau direvitalisasi oleh Perusahaan melalui kunjungan berkala Monitoring the Assets under management of companies that are restructured and/or revitalized by the Company through periodic visit	3x	Krisna Wijaya

No	KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners KPI	Target	Person In Charge
2	Aspek Pelaporan The Reporting Aspect		
	Penyusunan dan penyampaian Program kerja Tahunan Preparation and submission of the Annual work program	1x	Marwanto Harjowiryo
	Penyampaian laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS Submission of reports/opinions/suggestions to the Shareholders/GMS	7x	Marwanto Harjowiryo
	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Submission of Supervisory Duty Report	4x	Marwanto Harjowiryo
3	Aspek Dinamis dan Lain-Lain The Dynamic and Other Aspects		
	Peningkatan kompetensi (masing-masing anggota Dewan Komisaris) Competency development (every member of Board of Commissioners)	1x	Marwanto Harjowiryo
	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi atas RKAP/RJPP Preparation and submission of recommendations on RKAP/RJPP	1x	Krisna Wijaya

Program Orientasi/Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru

Program pengenalan kepada pejabat baru dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan, sehingga Dewan Komisaris baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kondisi Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Dalam program pengenalan Dewan Komisaris ini pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan adalah Sekretaris Perusahaan.

Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, Kode Etik Perusahaan, SK Direksi tentang pedoman dan penerapan GCG, Laporan Hasil Penilaian Penerapan GCG Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-Komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya.

Pada tahun 2021 tidak ada pelaksanaan program orientasi, karena tidak ada anggota Dewan Komisaris baru.

The Orientation Program for New Board of Commissioners

The orientation program for new officials is intended to provide an understanding of the conditions in the Company so that the new Board of Commissioners obtains a comprehensive understanding of the Company's condition both organizationally and operationally. In the Board of Commissioners orientation program, the person in charge is the Corporate Secretary.

The material presented in Minutes of Meeting of Company's Orientation Program to Board of Directors that is signed directly by Corporate Secretary and Board of Commissioners, as follows:

1. Articles of Association, Board Manual, GCG Code, Risk Management Manual, WBS Manual, Code of Conducts, Board of Directors Decree on GCG Code and implementation, GCG Assessment report, and Annual Report;
2. Illustration about the Company related to purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues;
3. Implementation of GCG principles by the Company;
4. Explanation related to delegated authority, internal and external audits, internal control system and policy, as well as duty and role of Audit Committee and other Committees established by the Board of Commissioners;
5. Explanation on Board of Commissioners and Board of Directors' duty and responsibility.

The provided orientation program includes a presentation, meeting, or visit the Company's facility or other programs.

In 2021 no orientation program was held because the Board of Commissioners did not have any new members.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan

Perusahaan berkomitmen untuk terus mendorong aktivitas pengembangan kompetensi Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mencapai pertumbuhan Perusahaan. Perusahaan juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Realisasi

Rincian pengembangan kompetensi Dewan Komisaris disampaikan pada bab Profil Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development of the Board of Commissioners

Policy

The Company is committed to continuing to encourage the competency development activities of the Board of Commissioners to support the implementation of their duties in achieving the Company's growth. The company also allocates a budget for the activities.

Realization

Details of the competency development of the Board of Commissioners are presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2021

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Realisasinya
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2021 disampaikan kepada Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagaimana surat Nomor: S-37/PPA/KOM/0920 tanggal 14 September 2020 untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners in 2021

1. Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners and its Realization
The Board of Commissioners' 2021 Work and Budget Plan (RKA) was submitted to the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as stated in letter No: S-37/PPA/KOM/0920 dated September 14, 2020 as part of the Company's 2021 Work Plan and Budget.

Adapun target dan realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The following are targets and realization of the Board of Commissioners' 2021 Work Plan:

No.	Rencana Kerja Work Plan	Target	Realisasi Realization
I. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat Aspects of Supervision and Advice			
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2022 Preparing the Work Plan and Budget and KPI of the Board of Commissioners for 2022	1 dokumen document	1 dokumen Document
2	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Providing feedback/recommendations to Shareholders on		
a	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 2022 Company Work Plan and Budget	1 surat letter	1 surat letter
b	Laporan Tahunan Perusahaan (<i>Audited</i>) Tahun 2020 Company Annual Report (<i>Audited</i>) 2020	1 surat letter	1 surat Letter
c	Analisis Kinerja Triwulan Perusahaan Tahun 2021 Analysis of Company Quarterly Performance in 2021	3 surat Letters	3 surat letters
3	Persetujuan/tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas usulan aksi korporasi oleh Direksi Board of Commissioners' written approval/response to the proposed corporate action by the Board of Directors	100%	100%
4	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting		
a	Jumlah rapat dan tersedianya Risalah Rapat Number of meetings held and availability of Minutes of Meeting	12 kali times	12 kali times
b	Kehadiran rapat Meeting Attendance	100%	100%
5	Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal (KAP, SPI, GCG) Monitoring follow-ups to internal/external audit findings (KAP, SPI, GCG)	3 dokumen Documents	3 dokumen documents
6	Kunjungan kerja Dewan Komisaris Work visits of Board of Commissioners	3 kali times	3 kali times

No.	Rencana Kerja Work Plan	Target	Realisasi Realization
II. Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
1	Laporan Kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris atas pemenuhan portal ITMS Tahun 2021 Board of Directors Performance Report by the Board of Commissioners on the fulfillment of the 2021 ITMS portal	1 dokumen document	1 dokumen document
2	Laporan pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulanan Tahun 2021 Quarterly report of monitoring and realization of the implementation of the Board of Commissioners KPI in 2021	3 laporan reports	3 laporan reports
3	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020 Supervisory Report of the Board of Commissioners for 2020	1 laporan report	1 laporan report
4	Evaluasi hasil kinerja KAP Tahun 2020 Evaluation of KAP performance results in 2020	1 laporan report	1 laporan report
III. Aspek Dinamis dan Lain-lain Dynamic and other aspects			
1	Peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop, dll Competence enhancement through seminars, workshops, etc.	12 kali times	12 kali times
2	Target GCG Dewan Komisaris Board of Commissioners' GCG Targets	32,74 poin points	33,40 poin points

2. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021 Fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris juga dilakukan melalui kunjungan kerja, dan pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut disampaikan kunjungan kerja yang dilakukan Dewan Komisaris pada tahun 2021: 1. PT Alim Investindo – Tanggal 8 Juli 2021 2. PT Ade Textile Industries – Tanggal 16 September 2021 3. PT Pindad (Persero) – Tanggal 15 Desember 2021	2. Work Visit of the Board of Commissioners in 2021 The Board of Commissioners also pays work visits to support its oversight role, and in 2021, the Board of Commissioners did that on 3 (three) different occasions. The following are the work visits paid by the Board of Commissioners in 2021: 1. PT Alim Investindo – On July 8, 2021 2. PT Ade Textile Industries – On September 16, 2021 3. PT Pindad (Persero) – on December 15, 2021
3. Keputusan dan Tanggapan Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan keputusan yang bersifat pengawasan atas pengelolaan usaha Perusahaan. Rinciannya adalah:	3. Decisions and Responses of the Board of Commissioners Throughout 2021, the Board of Commissioners made supervisory decisions on the management of the Company's business with the following details:

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2021

Board of Commissioners Decision in 2021

No.	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Matter
1	SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2021 Tanggal, 4 Januari 2021 SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2021 Dated January 4, 2021	Penetapan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2021 Determination of the 2021 Risk Monitoring Committee and GCG Work Plan
2	SK-02/KEP.KOM/PPA/VI/2021 Tanggal, 2 Juni 2021 SK-02/KEP.KOM/PPA/VI/2021 Dated June 2, 2021	Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Policy
3	SK-03/KEP.KOM/PPA/VII/2021 SK-03/KEP.KOM/PPA/VII/2021 Tanggal, 15 Juli 2021 Dated July 15, 2021	Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Changes in the Composition of the Audit Committee Members of the Company PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
4	SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021 Tanggal, 24 Agustus 2021 SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021 Dated August 24, 2021	Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of conduct</i>) Dewan Komisaris dan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Code of conduct for the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Tanggapan Dewan Komisaris Tahun 2021

The Response of Board of Commissioners in 2021

No.	Tanggal Date	Perihal Matter
1	25 Januari 2021 January 25, 2021	Catatan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan RKAP Tahun 2021 dan Rencana Realokasi Dana PMN. Notes of the Board of Commissioners on the Proposed Changes to the 2021 RKAP and the Plan for the Reallocation of PMN Funds.
2	25 Januari 2021 January 25, 2021	Pendapat dan Saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2021 Opinions and Suggestions on the the Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) for Fiscal 2021
3	8 Februari 2021 February 8, 2021	Persetujuan atas Rencana Kerja Satuan Pengawasan Intern PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("SPI PT PPA") Tahun 2021. Approval of the Work Plan of the Internal Audit Unit of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("SPI PT PPA") for fiscal 2021.
4	3 Maret 2021 March 3, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT PPA (Persero) menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 Response of the Board of Commissioners to the Proposed Amendment to Article 3 of the Articles of Association of PT PPA (Persero) in accordance with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI)
5	12 Maret 2021 March 12, 2021	Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT PPA Tahun 2020 Results of Assessment and Follow-up on Recommendations for Improvement of PT PPA's Good Corporate Governance (GCG) Implementation in 2020
6	16 April 2021 April 16, 2021	Tanggapan Atas Rencana Pelaksanaan Program Restrukturisasi Aset Tidak Produktif PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Response to the Plan to Implement Unproductive Asset Restructuring Program of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
7	29 April 2021 April 29, 2021	Persetujuan Rencana Pemberian Apresiasi/ Insentif Kinerja Tahun 2020 dan Penyesuaian/ Kenaikan Upah Tahun 2021 bagi Karyawan PT PPA (Persero)/"PT PPA" Approval of Plans Awarding Appreciating Incentives for 2020 and Salary Adjustment/Increase in 2021 for Employees of PT PPA (Persero)/"PT PPA"
8	30 April 2021 April 30, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT PPA Tahun Buku 2020 Response of the Board of Commissioners to PT PPA's Management Report for Fiscal Year 2020
9	7 Mei 2021 May 7, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penerbitan Obligasi Global dan/atau Obligasi Nasional PT PPA Tahun 2021 Response of the Board of Commissioners on the Plan to the Issuance Global Bonds and/or PT PPA National Bonds in 2021
10	24 Mei 2021 May 24, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2021 Response of the Board of Commissioners to the Q1 r Management Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2021
11	28 Mei 2021 May 28, 2021	Laporan Hasil Audit Khusus atas Kegiatan Investasi PT PPA Kapital pada PT Asia Kaolin Raya ("PT AKR") Special Audit Report on PT PPA Kapital's Investment Activities at PT Asia Kaolin Raya ("PT AKR")
12	23 Juli 2021 July 23, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Pelaksanaan Pengelolaan Aset Non-Produktif PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Project 147") Response of the Board of Commissioners on the Implementation Plan for Non-Earning Asset Management of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Project 147")
13	28 Juli 2021 July 28, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Surat Direksi Nomor S-2780/PPA/DU/0721 tanggal 28 Juli 2021 Response of the Board of Commissioners to the Letter of the Board of Directors Number S-2780/PPA/ DU/0721 dated July 28 2021
14	9 Agustus 2021 August 9, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2021 Response of the Board of Commissioners to the Q2 Management Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2021
15	10 Agustus 2021 August 10, 2021	Penyampaian Hasil <i>Assessment</i> BOD dan <i>Assessment</i> Kompetensi BOD-1. Submission of BOD Assessment Results and BOD-1 Competency Assessment.
16	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2021 Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") as well as Financial Reports and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs (UMK) for Fiscal 2021
17	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Masukan atas Kandidat Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PPA (Persero) Input on the Candidate Head of the Internal Audit Unit of PT PPA (Persero)

No.	Tanggal Date	Perihal Matter
18	24 Agustus 2021 August 24, 2021	Evaluasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT PPA Tahun 2020 s/d Triwulan II Tahun 2021 Follow-up on Evaluation of Recommendations for Improvement of PT PPA's Good Corporate Governance (GCG) Implementation in 2020 up until Q2 2021
19	25 Agustus 2021 August 25, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penerbitan Obligasi Domestik II PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Response of the Board of Commissioners on the Plan for Issuing Domestic Bonds II PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
20	7 September 2021 September 7, 2021	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Satu Tingkat Di Bawah Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Approval of Changes in Organizational Structure One Level Below the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
21	16 September 2021 September 16, 2021	Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PPA (Persero) Approval for the Dismissal and Appointment of the Head of the Internal Audit Unit of PT PPA (Persero)
22	27 September 2021 September 27, 2021	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Penetapan Jasa Audit untuk Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Entitas Anak untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) and Appointment of Audit Services for the Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and its Subsidiaries for the 6 (six) month period ended June 30 2021
23	4 Oktober 2021 October 4, 2021	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Sampai Dengan Satu Tingkat Di Bawah Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Approval of Changes in Organizational Structure Up to One Level Below the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
24	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap dan Non Aktiva PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Approval of Write-off and Transfer of Fixed Assets and Non-Assets of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
25	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Tanggapan Komisaris dalam rangka Pembentukan Anak Perusahaan terkait Rencana Investasi pada <i>StreetScooter Engineering GmbH</i> (Project Odin) The Commissioners' Response to the Establishment of a Subsidiary regarding the Investment Plan in <i>StreetScooter Engineering GmbH</i> (Project Odin)
26	29 Oktober 2021 October 29, 2021	Persetujuan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Individu Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2021 Approval of Key Performance Indicators (KPI) of Individual Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2021
27	29 Oktober 2021 October 29, 2021	Pendapat dan Saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2022 Opinions and Suggestions on the Company's 2022 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
28	19 November 2021 November 19, 2021	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2021 Response of the Board of Commissioners to the Q3 Management Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2021
29	24 November 2021 November 24, 2021	Penetapan Imbalan Jasa Audit untuk Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) RSM Indonesia Determination of Audit Fees for General Audit on the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as well as Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs (UMK) for the 2021 Fiscal Year by the Public Accounting Firm (KAP) RSM Indonesia
30	30 Desember 2021 December 30, 2021	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners on the Quality and Service Policy of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Penilaian Kinerja Organ dan Komite Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Dasar dan Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Komite Pendukung Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 tentang Indikator Metode Evaluasi Kinerja Tahunan Komite PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Dewan Komisaris melakukan penilaian realisasi atas kinerja Komite pendukung berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran rapat. Berikut hasil penilaian masing-masing Komite Pendukung.

Hasil Penilaian

- **Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris**
Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat kesekretariatan dan komite Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian administrasi korespondensi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris mencapai 99,38% dengan kriteria Sangat Baik.
- **Penilaian Kinerja Komite Audit**
Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi audit/bisnis laporan keuangan/kajian aksi korporasi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Audit Dewan Komisaris mencapai 99,20% dengan kriteria Sangat Baik.
- **Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG**
Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi

The Performance Assessment of Supporting Organs And Committees under Board of Commissioners

Assessment Basis and Procedure

The Board of Commissioners assesses the performance of the Committees by referring to the Board of Commissioners Decree No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 regarding The Indicators of the Annual Performance Assessment Method of Committees of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

The Board of Commissioners assesses the committees' performance based on the realization and completion of the work program compiled in the annual RKA, suggestions, recommendations, and input provided by the committees of the Board of Commissioners, as well as the level of meeting attendance. Following are the results of the assessment of each Support Committee.

Assessment Result

- **The Performance Assessment of Board of Commissioners Secretary**
The assessment is done through the recapitulation and attendance towards the internal and joint meetings of Board of Commissioners, meetings of secretariat and committees of Board of Commissioners, mastery of assignment and administrative correspondence completion, work time flexibility, solid coordination with Board of Commissioners Committee, the compliance and loyalty to the development of the Company, as well as the contribution of other activities in order to assist the supervisory duty by Board of Commissioners. The performance achievement of Board of Commissioners Secretary was realized at 99.38% with Very Good criteria.
- **Performance Assessment of Audit Committee**
The assessment is done through the recapitulation and attendance towards internal and/or joint meetings of Board of Commissioners, meetings of committee and/or secretariat of Board of Commissioners, mastery of assignments and completion of evaluation on audit/business, financial statements, corporate action review, work time flexibility, solid coordination with Secretary and Committees of Board of Commissioners, the compliance and loyalty to the development of the Company, as well as the contribution of other activities in order to assist the supervisory duty of Board of Commissioners. Board of Commissioners' Audit Committee achievement performance was realized at 99.20% with Very Good criteria.
- **Performance Assessment of Risk Oversight and GCG Committee**
The assessment is done through the recapitulation and attendance towards internal and/or joint meetings of Board of Commissioners, meetings of committees and/or secretariat of Board of Commissioners, mastery of assignment and completion of evaluation

GCG/risiko/kepatuhan laporan manajemen/kajian aksi korporasi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Dewan Komisaris mencapai 98,40% dengan kriteria Sangat Baik.

- Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi GCG/risiko/kepatuhan laporan manajemen/kajian aksi korporasi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perusahaan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris mencapai 98,40% dengan kriteria Sangat Baik.

on GCG/risks/compliance of management reports/ review of corporate actions, work time flexibility, solid coordination with Secretary and Committees of Board of Commissioners, the compliance and loyalty to the development of the Company, as well as the contribution of other activities in order to assist the supervisory duty by Board of Commissioners. Board of Commissioners' Risk Oversight and GCG Committee performance achievement was realized at 98.40% with Very Good criteria.

- Assessment of the performance of the Nomination and Remuneration Committee

Assessment is made through recapitulation and assessment of attendance in internal and/or joint meetings of the Board of Commissioners, committee meetings and/or meetings of the secretariat of the Board of Commissioners, assignment and completion of GCG evaluation/risk/compliance with management reports/corporate action studies, flexibility of time work, cohesiveness of support for coordination between the Secretary and Committees of the Board of Commissioners, obedience/compliance and loyalty to the development of the Company, as well as the contribution of other activities in order to assist the supervision of the Company by the Board of Commissioners. The realization of the achievement of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners reached 98.40% or falling under Very Good criteria.

Komisaris Independen

INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan menciptakan iklim kerja yang lebih objektif dan independen, serta mampu menjaga prinsip "fairness." Hal ini bermakna memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, komposisi Komisaris Independen paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Di akhir tahun 2021, Perusahaan memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, atau 50% dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian, komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with companies that may obstruct or impede their position to act independently in accordance with GCG principles.

The existence of an Independent Commissioner is intended to create a more objective and independent climate as well as to maintain fairness. Independent Commissioner is expected to be able to balance the interests of majority shareholders and protect the interests of minority shareholders, including public shareholders and other stakeholders.

In accordance with SOE Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011, the composition of Independent Commissioner is at least 20% of the total members of the Board of Commissioners. Accordingly, at the end of 2020, the Company has 1 (one) Independent Commissioner or 50% of the total Board of Commissioners of 2 (two) persons. Therefore, this composition is in accordance with the provisions and/or regulations in force.

Komisaris Independen per 31 Desember 2021

Independent Commissioner per December 31, 2021

Komisaris Independen Independent Commissioner	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Krisna Wijaya	Keputusan RUPS No. SK-326/ MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 GMS Decision No. SK-326/ MBU/10/2020 dated October 9, 2020	9 Oktober 2020 – 8 Oktober 2025, Periode ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan) October 9, 2020 – October 8, 2025, 1st Period (has never served on the Company's Board of Commissioners)

Kriteria Penentuan dan Pemenuhan Independensi Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

The Criteria for the Determination and Fulfillment of Independency of Independent Commissioner

Independent Commissioner in the Company is always intended to ensure that the supervision mechanism runs effectively and in accordance with statutory regulations. The existence of an Independent Commissioner in the Company ensures that the supervisory mechanism always runs effectively and in accordance with all regulatory provisions.

Kriteria Independensi Independency Criteria	Krisna Wijaya
Merupakan anggota Manajemen Perusahaan Is a member of Company Management	x
Terikat dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Has business affiliation and other affiliations that may influence the decision making	x
Sebagai pemegang Saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan As the majority shareholder of the Company or an employee who is directly related to the majority shareholder of the Company	x
Sebagai pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota Perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris As an employee or working as executive at the Company or a member of an affiliated Company, at least 3 (three) years prior appointed as Board of Commissioners member	x
Sebagai penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris As a professional main advisor or consultant who is material for the Company or affiliated company, or employee who is directly engaged with service providers, at least 3 (three) years prior appointed as Board of Commissioners member	x
Sebagai pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama As a main supplier or customer of the Company or an affiliated company or employee from/or directly or indirectly engaged with main supplier or customer	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

Direksi

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran dan *master plan*, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penanganan risiko usaha sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha. Setiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Board Manual: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi telah memiliki *board manual* sebagai pedoman. *Board Manual* mengatur tata laksana kerja serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar prinsip GCG untuk mencapai visi misi Perusahaan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemegang saham serta praktik terbaik GCG. Tujuan dari *board manual* adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan yang terkait dengan tata kerja. Berbagai hal yang diatur dalam *Board Manual* di antaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi;
2. Tugas dan wewenang Direksi;
3. Kewajiban Direksi;
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
5. Etika jabatan;
6. Pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan oleh Direksi;
7. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi;
8. Rapat Direksi;
9. Organ Penunjang Direksi:
 - a. Divisi Satuan Pengawasan Intern;
 - b. Sekretaris Perusahaan.
10. Hubungan dengan anak perusahaan;
11. Benturan kepentingan.

The Board of Directors is a GCG organ with collective duty and responsibility to perform the Company management for the interests and objectives of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association and implementing GCG at all levels or levels of the organization.

The Board of Directors is responsible for preparing and implementing business strategy and policy, budget and master plan, Corporate Long-Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP), business risk mitigation according to the Company's Vision and Mission, as well as ensure achievement of business target and goals. Every Board of Directors member is eligible to perform the duty and decision-making based on the division of duty and authority.

Board Manual: Guidelines and Work Order of Board of Directors

Board Manual that is owned by Board of Directors regulates on Board of Commissioners and Board of Directors working procedure and explains the activity stages in a well-structured, systematic, easy to be understood, and practicable ways consistently as reference for Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties according to GCG principle standard to achieve the Company's vision mission.

Board Manual is drafted based on the corporate law principle, Articles of Association, prevailing law, Shareholder's aspiration, and GCG best practice. The purpose of the Board Manual is to ease the Board of Commissioners and Board of Directors in understanding the regulations related to the Board of Commissioners and Board of Directors' working mechanism. Provisions that are regulated in the Board Manual are, among others:

1. General Provision on Board of Directors Member Position;
2. Board of Directors duty and authority;
3. Board of Directors obligation;
4. Board of Directors members duty and authority division;
5. The Position Ethics;
6. The Implementation of Company's managerial duties by Board of Directors;
7. Board of Directors decision making principles;
8. Board of Directors Meeting;
9. Board of Directors Supporting Structure:
 - a. Internal Audit Division;
 - b. Corporate Secretary.
10. Relationship with Subsidiaries;
11. Conflict of Interest.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi juga mengacu pada Pedoman Kerja Direksi yang telah ditetapkan dalam keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Rapat Direksi;
3. Keputusan di Luar Rapat Direksi;
4. Komunikasi Hasil Keputusan Direksi;
5. Ketentuan Lain-lain;
6. Ketentuan Penutup.

Suksesi: Nominasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar dan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi dilakukan jika persyaratan formal, materiil dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentang suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam bab ini.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Komposisi

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, komposisi Direksi Perusahaan adalah:

Besides that, in carrying out the duties, the Board of Directors also refers to Board Manual for the Board of Directors as stipulated in Board of Directors Decree No. SK-58/PPA/1215 dated December 10, 2015, disclosing provisions as follows:

1. General Provision;
2. Board of Directors Meeting;
3. The Decisions taken outside Board of Directors Meeting;
4. The Communication of Board of Directors Resolutions;
5. Other Provisions;
6. Closing Provisions.

The Succession: Nomination, Appointment, and Dismissal of Board of Directors

The appointment and dismissal of Board of Directors members are carried out through the GMS in accordance with applicable laws and regulations as well as the Articles of Association and The Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 regarding The Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Board of Directors Members of State-Owned Enterprises. The appointment of the Board of Directors is carried out if formal, material, and other requirements are following existing provisions. Further details about the succession of the Board of Directors can be seen in the Nomination and Remuneration Functions section of this chapter.

Terms of Tenure

In accordance with the Company's Articles of Association, the tenure of Board of Directors members is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

Composition

The Board of Directors composition as of December 31, 2021, is as follows.

Nama Name	Dasar Pengangkatan The Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Yadi Jaya Ruchandi Direktur Utama President Director	• Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. Sk-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. • Sebagai Direktur Utama: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. • As Board of Directors: The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. Sk 265/MBU/08/2020 dated August 6, 2020. • As President Director: The Decree of The Minister of State-Owned Enterprises as The GMS No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020.	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025. August 6, 2020 – The Closing of The GMS for 2024 Fiscal Year which will be held in 2025.	Ke-1 1 st
Rizwan Rizal Abidin Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 and Restructuring	• Dalam jajaran Direksi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. Sk-265/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. • Sebagai Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi: Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. • As Board of Directors: The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. Sk-265/MBU/08/2020 dated August 6, 2020. • As Director of Investment 1 and Restructuring: The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020.	6 Agustus 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025. August 6, 2020 - The Closing of The GMS for 2024 Fiscal Year which will be held in 2025.	Ke-1 1 st

Nama Name	Dasar Pengangkatan The Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Adi Pamungkas Daskian Direktur Investasi 2 Director of Investment 2	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-325/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. The Decree of The Minister of SOEs as The GMS No. SK-325/MBU/10/2020 dated October 9, 2020.	9 Oktober 2020 - Penutupan RUPS Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan di tahun 2025. October 9, 2020 - The Closing of the GMS for 2024 Fiscal Year which will be held in 2025.	Ke-1 1 st
JF Hasudungan Direktur Special Asset Management	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor SK-309/MBU/09/2021 tanggal 14 September 2021. The Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No SK-309/MBU/09/2021 dated September 14, 2021.	14 September 2021 – Penutupan RUPS Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026 September 14, 2021 – Closing of the Annual GMS for 2025 fiscal year to be held in 2026	Ke-1 1 st

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain, Direksi harus bersifat independen. Tidak boleh ada campur tangan pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antara anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga. Hubungan dimaksud hingga derajat ketiga, baik menurut garis lurus keatas maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Tugas Direksi

Mengacu pada pedoman kerja, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan, di mana anggota Direksi tetap harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajiban.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Statement of Independency and Conflict of Interest Potential

In carrying out every managerial activity in the Company or relationship with other parties, the Board of Directors shall be independent without having intervention from any party or violating the law and Articles of Association of the Company that has the material potential to interfere with the objectiveness and independency of the Board of Directors' duties that are implemented solely for the Company's interest.

According to the Company's Articles of Association, among Board of Directors members and between Board of Directors and Board of Commissioners members are prohibited from having family affiliations until the third degree, both vertically and horizontally, including relationships by marriage.

Board of Directors Duties

Based on the Board Manual for Board of Directors, the duties of the Board of Directors are to carry out all actions related to the Company's management for the interest of the Company and to represent the Company, both in and out of the court on all matters and in any events with limitations as regulated in the laws and regulations, Articles of Association, and/or Resolutions of General Meeting of Shareholders.

In conducting its duties, the Board of Directors shall devote their energy, thought, attention, and dedication entirely to duties, responsibilities, and achievement of objectives of the Company in which all members of the Board of Directors shall comply with the Company's Articles of Association and the laws and regulations, and shall implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness.

Each member of the Board of Directors shall implement its duties responsibly and with good faith for the interest and business of the Company by complying with the prevailing laws and regulations.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Sesuai Surat Keputusan Direksi NO. SK-65/PPA/1021 tentang Penetapan Jabatan, dan Uraian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi diuraikan sebagai berikut:

Every Board of Directors member is personally responsible if the concerned is guilty or negligent in carrying out its duties for the interest and business of the Company unless the concerned can prove that:

1. The loss is not caused by his/her negligence;
2. He/she has carry out the management with good faith and prudence for the Company's interest and in accordance with the purpose and objective of the Company;
3. Not having conflict of interest, both directly and indirectly on management action which cause loss; and
4. Has taken actions to prevent the occurrence or continuity of the loss

Duties and Authority

According to the Decree of the Board of Directors NO. SK-65/PPA/1021 concerning Position Determination, and Description of Duties and Authorities of Members of the Board of Directors, responsibilities and authorities of members of the Board of Directors are described as follows:

Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
Direktur Utama President Director	1. Merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkomunikasikan, mengevaluasi arah dan strategi perusahaan serta memimpin jalannya Perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan. 2. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan monitoring kinerja anak Perusahaan. 1. Planning, determining, directing, communicating, evaluating the direction and strategy of the company and leading the company in order to achieve the vision and mission of the company. 2. Representing the Company in fostering and monitoring the performance of subsidiaries.	1. Menetapkan arah dan strategi Perusahaan bersama-sama dengan Direksi untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan. 2. Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. 3. Menetapkan peraturan dan kebijakan Perusahaan. 4. Mengkomunikasikan rencana jangka panjang, jangka pendek, arah serta strategi Perusahaan kepada seluruh jajaran. 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target Perusahaan. 6. Menciptakan peluang bisnis bagi Perusahaan. 7. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan Sekretariat Perusahaan termasuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Satuan Pengawasan Internal, Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Keuangan dan Akuntansi, Treasury, Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko, Hukum, dan SDM Dan Umum sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. 8. Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). 9. Bertanggung jawab terhadap implemantasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). 10. Bertanggung jawab terhadap implementasi asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). 11. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai pencapaian target dan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. 12. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan. 13. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan monitoring kinerja anak Perusahaan.

Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
		1. Determining the Company's directions and strategies together with Board of Directors to ensure the achievement of the Company's vision and mission; 2. Planing, determining and evaluating the Company's long-term and short-term plan in accordance with the Company's vision and mission; 3. Establishing the Company regulations and policies; 4. Communicating the Company's long-term, short-term plan, directions, and strategies to all levels; 5. Coordinating, directing, and overseeing the activity implementation and target achievement of the Company; 6. Creating business opportunities for the Company; 7. Developing, determining and evaluating long-term and short-term plan for the activities of Corporate Secretariat including the activities of Partnership and Community Development Program, Internal Audit Unit, and Corporate Strategic Planning and Performance Management in accordance with the direction and strategy of the Company determined by the Board of Directors; 8. Responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance; 9. Responsible for the implementation and monitoring of the anti-bribery management system (SMAP) 10. Responsible for the implementation of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU); 11. Approving and submitting the reports on the Company's target achievement and performance to the Shareholders and Board of Commissioners; 12. Ensuring the implementation of coaching and development of human capital in accordance with the direction and strategy of the Company; 13. Representing the Company in fostering and monitoring the performance of subsidiaries.
Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi Director of Investment 1 and Restructuring	1. Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. 2. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan. 1. Planning, determining, approving, communicating and evaluating the implementation of restructuring and/or revitalization activities, Asset Management and consulting services in accordance with the Company's targets and strategies in order to achieve the Company's vision and mission. 2. Representing the Company in fostering the performance of its subsidiaries.	1. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. 2. Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi. 3. Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi kepada seluruh jajarannya. 4. Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi peluang restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan. 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi dalam rangka mendukung pencapaian target Perusahaan. 6. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi kepada Direktur Utama dan/atau Direksi. 7. Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). 8. Bertanggung jawab terhadap implemementasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). 9. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan. 10. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan.



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
		1. Developing, determining and evaluating long-term and short-term plan for SOE restructuring/revitalizing, asset management, advisory, and investment services in accordance with the direction and strategy of the Company that have been determined by the Board of Directors; 2. Approving and proposing the policies related to SOE restructuring/revitalization, asset management, advisory, and investment services; 3. Communicating the strategy for implementing the long-term and short-term plan that have been determined within the Directorate of Investment 1 and Restructuring to all staffs; 4. Creating and under the President Director' approval, executing the opportunities for SOE restructuring/revitalizing, asset management, consulting, and investment services in accordance with the Company's established strategy; 5. Coordinating, directing, supervising, and evaluating the implementation of activities within the Directorate of Investment 1 and Restructuring in order to support the achievement of the Company's targets; 6. Approving and submitting the reports on the activities of the Directorate of Investment 1 and Restructuring to the President Director and/or the Board of Directors; 7. Responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance. 8. Responsible for the implementation and monitoring of the anti-bribery management system (SMAP) implementation. 9. Ensuring the implementation of human capital coaching and development at the Directorate of Investment 1 and Restructuring in accordance with the direction and strategy of the Company; 10. Representing the Company in fostering the performance of subsidiaries.
Direktur Investasi 2 Director of Investment 2	1. Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan <i>Special Situations Fund</i>, jasa konsultasi, NPL manajemen dan aset manajemen sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. 2. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan. 1. Planning, determining, approving, communicating, directing and evaluating the implementation of Special Situations Fund activities, consulting services, NPL management and asset management in accordance with the Company's targets and strategies in order to achieve the Company's vision and mission. 2. Representing the Company in fostering the performance of its subsidiaries.	1. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk <i>Special Situations Fund</i>, jasa konsultasi, NPL manajemen dan aset manajemen sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. 2. Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan <i>Special Situations Fund</i>, jasa konsultasi, NPL manajemen dan aset manajemen. 3. Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Investasi 2 kepada seluruh jajarannya. 4. Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi peluang <i>Special Situations Fund</i>, jasa konsultasi, NPL manajemen dan aset manajemen sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan. 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Investasi 2. 6. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Investasi 2 kepada Direktur Utama dan/atau Direksi. 7. Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). 8. Bertanggung jawab terhadap implelementasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). 9. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Investasi 2 sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan. 10. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan.

Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
		1. Developing, determining and evaluating long-term and short-term plan for investment activities, advisory services, and asset management in accordance with the direction and strategy of the Company determined by the Board of Directors; 2. Approving and proposing the policies related to investment, advisory services and asset management activities; 3. Communicating the implementation strategy of long-term and short-term plan that have been determined in the Investment Directorate to all levels; 4. Creating and based on the approval of President Director, executing opportunities related to investment, asset management, and advisory services in accordance with the established Company strategies; 5. Coordinating, directing, supervising, and evaluating the implementation of activities within the Investment Directorate; 6. Approving and submitting the reports on the activities of Investment Directorate to President Director and/or Board of Directors; 7. Responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance. 8. Responsible for the implementation and monitoring of the anti-bribery management system (SMAP) . 9. Ensuring the implementation of coaching and development of human capital at the Investment Directorate in accordance with the direction and strategy of the Company; 10. Representing the Company in fostering the performance of subsidiaries.
Direktur <i>Special Asset Management</i> Director of Special Asset Management	1. Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. 2. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan.	1. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. 2. Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen. 3. Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat <i>Special Asset Management</i> kepada seluruh jajarannya. 4. Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan. 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat <i>Special Asset Management</i>. 6. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat <i>Special Asset Management</i> kepada Direktur Utama dan/atau Direksi. 7. Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). 8. Bertanggung jawab terhadap implemantasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). 9. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat <i>Special Asset Management</i> sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan. 10. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan.
	1. Planning, determining, approving, communicating, directing and evaluating the implementation of activities in handling non-productive assets and management assets in accordance with the Company's targets and strategies in order to achieve the Company's vision and mission. 2. Representing the Company in fostering the performance of its subsidiaries.	1. Developing, determining and evaluating long-term and short-term plans in the handling of non-productive assets and asset management in accordance with the direction and strategy of the Company that have been determined by the Board of Directors. 2. Approving and proposing policies related to the handling of non-productive assets and asset management. 3. Communicating the strategy for implementing the long-term and short-term plans that have been established within the Special Asset Management Directorate to all staff. 4. Creating and based on the approval of the President Director, executing the handling of non-productive assets and management assets in accordance with the Company's established strategy. 5. Coordinating, directing, overseeing and evaluating the implementation of activities within the Directorate of Special Asset Management. 6. Approving and submitting reports on the activities of the Special Asset Management Directorate to the President Director and/or the Board of Directors. 7. Responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance. 8. Responsible for the implementation and monitoring of the anti-bribery management system (SMAP). 9. Ensuring the implementation of guidance and development of human resources at the Special Asset Management Directorate in accordance with the direction and strategy of the Company. 10. Representing the Company in fostering the performance of its subsidiaries.

Pendelegasian Wewenang

Dalam melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

Program Orientasi/Pengenalan Perusahaan untuk Anggota Direksi Baru

Perusahaan telah memiliki program orientasi atau pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi baru. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga Direksi yang baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kondisi Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional.

Program pengenalan Perusahaan kepada Direksi yang baru diangkat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi yang disampaikan dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perusahaan kepada Direksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Pemberian Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman WBS, kode Etik Perusahaan, SK Direksi tentang pedoman dan penerapan GCG, laporan hasil penilaian penerapan GCG Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris dan Direksi.
6. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya.

Delegation of Authority

In order to carry out the management policy of the Company, if not stated otherwise by Board of Directors, President Director is entitled and authorized to act and on behalf of Board of Directors as well as to represent the Company with the provision that all of the said actions of President Director have been approved by the Board of Directors meeting.

In case that President Director is absent or unavailable due to any reason whatsoever, then Board of Directors member with the longest tenure is authorized to act for and on behalf of Board of Directors and carries out duties of President Director. If President Director or Board of Directors member with the longest tenure is absent or unavailable due to any reason whatsoever, then one of Director appointed by President Director is authorized to act on behalf of Board of Directors.

In case that one of Board of Directors member aside from President Director is absent due to any reason whatsoever, of which it is not necessary to be proven to third party, then other members of Board of Directors appoint a member of Board of Directors to carry out duties of the absent Board of Directors.

Orientation Program for New Board of Directors

The orientation program for the new Board of Directors is intended to provide an understanding of the conditions in the Company so that the new Board of Directors obtains a comprehensive understanding of the Company's condition both organizationally and operationally.

In the Board of Directors orientation program, the person in charge is the Corporate Secretary. The materials as disclosed in the Minutes of Corporate Orientation Program for the Board of Directors assigned by the Corporate Secretary are as follows:

1. Articles of Association, Board Manual, GCG Code, Risk Management Manual, WBS Manual, Code of Conducts, Board of Directors Decree on GCG Code and Implementation, The GCG Assessment Report, and Annual Report;
2. Explanation about the Company related to purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term plan, competitive position, risk and other strategic issues;
3. The implementation of GCG principles by the Company;
4. Explanation related to delegated authority, internal and external audits, internal control system, and policy;
5. Explanation about duty and responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors;
6. The orientation program may be given as presentation, meeting, or visit to the Company's facilities or other programs.

Pada tanggal 15 September 2021 dilakukan program pengenalan Perusahaan kepada Direktur *Special Asset Management* yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor SK-309/MBU/09/2021 tanggal 14 September 2021.

Pengembangan Kompetensi Direksi Kebijakan

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Realisasi

Rincian pengembangan kompetensi Direksi disampaikan pada bab Profil Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2021

Pelaksanaan tugas Direksi tahun 2021 di luar tugas rutin dan bersifat teknis, dapat dilihat pada keputusan yang dikeluarkan. Berikut adalah rincian surat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

On September 15, 2021, an introduction program for the Company was held for the Director of Special Asset Management, who was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) No SK-309/MBU/09/2021 dated September 14, 2021.

Board of Directors Competency Development Policy

The Company has policies related to the competency development and improvement of the Board of Directors, conducted through various training and education with full funding being the Company's responsibility. The list of training and competency development activities undertaken by the Board of Directors throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Realization

Details of the competency development of the Board of Directors are presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Board of Directors' Duties Implementation in 2021

Throughout 2021, the implementation of duties of the Board of Directors other than its routine duties and technical duties can be seen in the decree issued. The following details of the decree related to the Board of Directors' duties implementation.

Keputusan Direksi Tahun 2021

Board of Directors Decision 2021

No	Nomor SK SK Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1	SK-16/PPA/0421	6 April 2021 April 6, 2021	Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Training and Development Policy of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2	SK-17/PPA/0421	6 April 2021 April 6, 2021	Kebijakan Beasiswa Karyawan Berprestasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Scholarship Policy for Outstanding Employees of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
3	SK-22/PPA/0521	5 Mei 2021 May 5, 2021	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor Sk-35/PPA/0615 tentang Kebijakan Penerbitan dan Pengamanan Dokumen Perusahaan Second Amendment to the Decree of the Board of Directors No. Sk-35/PPA/0615 concerning Policy on Issuance and Security of Company Documents
4	SK-23A/PPA/0521	23 Mei 2021 May 23, 2021	Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Financial Accounting Policy of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
5	SK-02/KEPKOM/PPA/VI/2021 SK-25/PPA/0621	2 Juni 2021 June 2, 2021	Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance Policy</i>) Good Corporate Governance Policy
6	SK-04/KEPKOM/PPA/VIII/2021 SK-45/PPA/0821	24 Agustus 2021 August 24, 2021	Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Code of Ethics and Conduct
7	SK-63/PPA/0921	29 September 2021 September 29, 2021	Pembentukan Tim Perwakilan Karyawan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Formation of the Employee Representative Team of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
8	SK-64/PPA/1021	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
9	SK-66/PPA/1021	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Penetapan Jabatan Karyawan Pada Satuan Kerja Stipulation of Employee Positions in Work Units
10	SK-74/PPA/1121	2 November 2021 November 2, 2021	Kebijakan Penerimaan Karyawan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Employment Policy of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)



No	Nomor SK SK Number	Tanggal Date	Perihal Subject
11	SK-75/PPA/1121	2 November 2021 November 2, 2021	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor SK-16/PPA/0421 tentang Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Amendment to the Decree of the Board of Directors No. SK-16/PPA/0421 concerning Training and Development Policy
12	SK-80/PPA/1121	5 November 2021 November 5, 2021	Kebijakan Lindung Nilai Hedging Policy

Penilaian Kinerja Komite dan Organ Di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direksi dibantu oleh Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang dibentuk sesuai SK No. SK-52/PPA/0919 tanggal 9 September 2019 dengan tugas dan tanggung jawab komite sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi Perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan Investasi atas:
 - a. Usulan kegiatan Investasi yang diajukan oleh Direktorat Investasi 1 dan Restrukturisasi dan Direktorat Investasi 2;
 - b. Usulan penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, antara lain pelampauan limit/batasan transaksi yang diatur dalam Pedoman.
2. Investasi, penyimpangan ketentuan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan, penyimpangan atas ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian transaksi (perjanjian pinjaman/penerbitan surat utang, dan lain-lain); melakukan pembahasan dan memberikan saran/masukan atas usulan kegiatan Investasi dari Entitas Anak;
3. Memberikan masukan/saran atas Kebijakan Investasi dan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Memberikan masukan/saran atas Pedoman Investasi antara lain tingkat pengembalian minimal Investasi, batas Investasi per sektor industri, dan *negative list* Investasi.

Namun, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung juga oleh beberapa organ pendukung seperti Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja dan Fungsi Manajemen Risiko.

Performance Assessment of Committees and Organs Under Board of Directors

In order to carry out its management duties, the Board of Directors is assisted by the Investment and Risk Management Committee in accordance with The Decree number SK-52/PPA/0919 dated September 9, 2019, with the Committee's duties and responsibilities as follows:

1. Evaluating and providing advice/recommendations to the Company's Board of Directors in the context of making investment decisions on:
 - a. Investment activity proposals submitted by the Investment Directorate ("D-Investment") and the Business Advisory and Asset Management Directorate ("D-KBAM");
 - b. Proposal for establishing policies and/or business decisions that deviate from normal procedures, including exceeding transaction limits set out in the Guidelines
2. Investment, deviation from the provisions stipulated in the Company's policies, deviation from the terms and conditions stipulated in the transaction agreement (loan agreement/issuance of debt securities, etc.); discussing and providing advice/input on the proposed investment activities of Subsidiaries;
3. Providing the input/advice on Investment Policy and Risk Management Policy;
4. Providing the input/advice on Investment Guidelines, including minimum investment returns, Investment limits per industry sector, and negative investment lists.

However, the implementation of duties and responsibilities of Board of Directors is also supported by several supporting organs such as Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Corporate Strategic Planning and Performance Management, and Risk Management Function.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

TRANSPARENCY OF INFORMATION ABOUT THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala, baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi. Rapat Dewan Komisaris sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Panggilan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis. Seorang anggota Dewan komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris yang asli disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan didokumentasikan, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir menandatangani surat kuasa dalam rangka pemenuhan GCG untuk kepastian pengambilan keputusan dalam setiap rapat.

Realisasi

Frekuensi dan risalah rapat internal Dewan Komisaris, sebagai berikut:

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners Meeting

Policy

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners shall hold regular meetings, both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors. Meetings of the Board of Commissioners shall be held at least once a month.

Invitation to the Board of Commissioners Meeting shall be delivered in writing by the President Commissioner or by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. The summon shall be delivered at the latest 3 (three) days prior to the meeting in a shorter time in an urgent situation, without considering the date of the summons and the date of the meeting.

The President Commissioner shall chair the Board of Commissioners meeting. If the President Commissioner is absent or unable to attend, then another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner shall chair the meeting. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting only by another member of the Board of Commissioners based on a written authorization. A member of the Board of Commissioners may only represent one other member of the Board of Commissioners.

In every meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting must be made. The meeting minutes are signed by the chairman of the meeting, and all members of the Board of Commissioners are present at the meeting. The original minutes of the Board of Commissioners' meeting are submitted to the Board of Directors to be stored and documented, while the Board of Commissioners keeps a copy. Members of the Board of Commissioners who are not present to sign a power of attorney in the context of fulfilling GCG for certainty in making decisions at each meeting.

Realization

The frequency and minutes of internal meetings of the Board of Commissioners are as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran
Frekuensi Kehadiran Rapat Internal Dewan Komisaris

Frequency and Attendance
Frequency of Attendance of the Board of Commissioners during Internal Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting			Kehadiran di RUPS Attendance in GMS		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance	Jumlah RUPS Total GMS held	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance
Krisna Wijaya	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	12	12	100%	2	2	100%
Marwanto Harjowirjono	Komisaris Commissioner	12	12	100%	2	2	100%

Risalah dan Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Minutes of Agenda of BoC Internal Meeting

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Number of Minutes of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	29 Januari 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom January 29, 2021 – <i>Video Conference</i> via Zoom App	RIS.INT-01/PPA/ KOM/0121	a. Membahas Jadwal Bulanan Radirkom 2021 (Rapat Direksi dan Komisaris) b. Membahas Jadwal Bulanan Rakom 2021 (Rapat Komisaris) c. Membahas Jadwal Kunjungan Nasabah a. Discussing the 2021 Radirkom Monthly Schedule (Meeting of Directors and Commissioners) b. Discussing the 2021 Rakom Monthly Schedule (Commissioner Meeting) c. Discussing Customer Visit Schedule	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowirjono 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowirjono 3. Organs of the Board of Commissioners
2	17 Februari 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom February 17, 2021- <i>Video Conference</i> via Zoom App	RIS.INT- 02/PPA/ KOM/0221	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Januari Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. January 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowirjono 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowirjono 3. Organs of the Board of Commissioners
3	17 Maret 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom March 17, 2021 - <i>Video Conference</i> via Zoom App	RIS.INT- 03/PPA/ KOM/0321	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Februari Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. February 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowirjono 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowirjono 3. Organs of the Board of Commissioners
4	21 April 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom April 21, 2021 – <i>Video Conference</i> via Zoom App	RIS.INT- 04/PPA/ KOM/0421	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Maret Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. March 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowirjono 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowirjono 3. Organs of the Board of Commissioners

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Number of Minutes of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
5	19 Mei 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom May 19, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS.INT- 05/PPA/ KOM/0521	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan April Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. April 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners
6	22 Juni 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom June 22, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS.INT- 06/PPA/ KOM/0621	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Mei Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. May 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners
7	28 Juli 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom July 28, 2021 - Video conference via Zoom App	RIS.INT- 07/PPA/ KOM/0721	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Triwulan II Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results b. Second Quarter of 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners
8	25 Agustus 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom August 25, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS.INT- 08/PPA/ KOM/0821	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Juli Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. July 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners
9	21 September 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom September 21, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS.INT- 09/PPA/ KOM/0921	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Agustus Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. August 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners
10	27 Oktober 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom October 27, 2021 – Video conference via Zoom App	RIS.INT- 10/PPA/ KOM/1021	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan September Tahun 2021 c. Pembahasan RKAP Tahun 2022 d. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. September 2021 Financial Performance Evaluation c. Discussion of the 2022 RKAP d. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners
11	16 November 2021- <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom November 16, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS.INT- 11/PPA/ KOM/1121	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Oktober Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. October 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Number of Minutes of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
12	20 Desember 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom December 20, 2021 – Video conference via Zoom App	RIS.INT- 12/PPA/ KOM/1221	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya; b. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan November Tahun 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results; b. November 2021 Financial Performance Evaluation c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Organ Dewan Komisaris 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Organs of the Board of Commissioners

Rapat Gabungan: Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi **Joint Meeting: Meeting of the Board of Commissioners where the Board of Directors is invited**

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting Held	Jumlah Kehadiran Meeting Attended	% Kehadiran Attendance
Krisna Wijaya	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	12	12	100%
Marwanto Harjowirjono	Komisaris Commissioners	12	12	100%
Yadi Jaya Ruchandi	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Rizwan Rizal Abidin	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	12	12	100%
Adi Pamungkas Daskian	Direktur Invetasi 2 Director of Investment 2	12	12	100%
JF Hasudungan	Direktur Special Asset Management Director of Special Asset Management	4	4	100%

Risalah dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi **Minutes of Joint Meeting of BoC and BoD**

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Number of Minutes of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	23 Januari 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom January 23, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-01/PPA/KOM/0121	a. Membahas Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya b. Membahas RKAP Tahun 2021 (Perubahan) c. Lain-lain. a. Discussion on the follow-up of the previous meeting results b. Discussion on the 2021 RKAP (amendment) c. Other agenda	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian
	18 Februari 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom February 18, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-02/PPA/KOM/0221	1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya 2. Evaluasi Kinerja Keuangan s.d Januari 2021 3. Rencana Proses Pemindahan Kantor PT PPA. 1. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results 2. Evaluation of Financial Performance Up to January 2021 3. PT PPA Office Relocation Process Plan.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Number of Minutes of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
3	18 Maret 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom March 18, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-03/PPA/KOM/0321	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya b. Evaluasi Kinerja Keuangan s.d Februari 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results b. Evaluation of Financial Performance up to February 2021 c. Other agenda.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian
4	22 April 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom April 22, 2021 - Video Conference via Zoom App	RIS-04/PPA/KOM/0421	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya b. Evaluasi Kinerja Keuangan s.d Triwulan 1 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results b. Evaluation of Financial Performance up to 1st quarter 2021 c. Other agenda	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian
5	20 Mei 2021 - Kantor PT PPA, Menara Mandiri II dan Video Conference dengan Aplikasi Zoom May 20, 2021 – PT PPA Office, Menara Mandiri II and Video Conference via Zoom App	RIS-05/PPA/KOM/0521	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya b. Evaluasi Kinerja Keuangan s.d April 2021 c. Pembahasan Skema Dividen PT Nindya Karya d. Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT PPA. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results b. Evaluation of Financial Performance up to April 2021 c. Discussion on PT Nindya Karya's Dividend Scheme d. Proposed Changes to the Organizational Structure of PT PPA.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian
6	24 Juni 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom June 24, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-06/PPA/KOM/0621	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya b. Evaluasi Kinerja Keuangan s.d Mei 2021 c. Update Project 147 & NPL Management a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results b. Evaluation of Financial Performance up to May 2021 c. Update Project 147 & NPL Management	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian
7	29 Juli 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom July 29, 2021 – Video Conference Via Zoom App	RIS-07/PPA/KOM/0721	a. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya b. Evaluasi Kinerja Keuangan s.d Triwulan II 2021 c. Lain-lain. a. Follow-up Evaluation of Previous Meeting Results b. Evaluation of Financial Performance up to 2nd quarter 2021 c. Other agenda	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Number of Minutes of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	26 Agustus 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom August 26, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-08/PPA/KOM/0821	a. Kinerja PT Nidya Karya Periode sampai dengan Juli 2021 (Oleh Direksi PT NK) b. Kinerja PT PPA Finance Periode sampai dengan Juli 2021 (Oleh Direksi PPAF) c. Kinerja PT PPA Kapital Periode sampai dengan Juli 2021 (Oleh Direksi PT PPAK) d. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Bulan Sebelumnya e. Kinerja Laporan Keuangan Bulan Juli 2021. a. Performance of PT Nidya Karya up to July 2021 period (By the Directors of PT NK) b. PT PPA Finance Performance up to July 2021 Period (By PPAF Directors) c. Performance of PT PPA Kapital up to July 2021 period (By the Directors of PT PPAK) d. Follow-up Evaluation of the Results of the Previous Month's Meeting e. July 2021 Financial Report Performance.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian
9	23 September 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom September 23, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-09/PPA/KOM/0921	a. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Agustus 2021 • <i>Update Management Letter</i> • <i>Update Tindak Lanjut Temuan BPK RI</i> b. Pembahasan Kinerja Laporan c. Keuangan PT PPA (Persero) s/d Agustus 2021 c. Lain-lain. a. Discussion on the Follow-up of August 2021 Meetings • <i>Update Management Letter</i> • <i>Follow-up Update on BPK RI Findings</i> b. Discussion on the Performance of the Financial Statements of PT PPA (Persero) until August 2021 c. Other agenda	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 6. Bapak JF. Hasudungan 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian 6. Mr. JF. Hasudungan
11	28 Oktober 2021- <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom October 28, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-10/PPA/KOM/1021	a. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan September 2021 b. Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA (Persero) s/d September (Triwulan III) Tahun 2021 c. Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALMA) PT PPA (Persero) s/d September (Triwulan III) Tahun 2021 d. Membahas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022. a. Discussion on the Follow-up of September 2021 Meetings b. Discussion on the Performance of the Financial Statements of PT PPA (Persero) up to September (3rd Quarter) 2021 c. Discussion on the Asset Liability Management (ALMA) of PT PPA (Persero) up to September (3rd Quarter) 2021 d. Discussion on the Proposed Work Plan and Company Budget (RKAP) for 2022.	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 6. Bapak JF. Hasudungan 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian 6. Mr. JF. Hasudungan
12	17 November 2021 - <i>Video Conference</i> dengan Aplikasi Zoom November 17, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-11/PPA/KOM/1121	a. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Oktober 2021 b. Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA (Persero) s/d 31 Oktober Tahun 2021 c. Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALMA) s/d 31 Oktober Tahun 2021 d. Lain-lain a. Discussion on the Follow-up of October 2021 Meetings b. Discussion on the Performance of the Financial Statements of PT PPA (Persero) up to October 31, 2021 c. Discussion on Asset Liability Management (ALMA) up to October 31, 2021 d. Other agenda	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 6. Bapak JF. Hasudungan 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian 6. Mr. JF. Hasudungan

No.	Tanggal dan Tempat Date and Place	Nomor Risalah Rapat Number of Minutes of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
13	21 Desember 2021 - Video Conference dengan Aplikasi Zoom December 21, 2021 – Video Conference via Zoom App	RIS-12/PPA/KOM/1221	a. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan November 2021 b. Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA (Persero) s/d November 2021 c. Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALMA) s/d November 2021 d. Lain-lain a. Discussion on the Follow-up of November 2021 Meetings b. Discussion on the Performance of PT PPA (Persero) Financial Reports up to November 2021 c. Discussion on Asset Liability Management (ALMA) up to November 2021 d. Other agenda	1. Bapak Krisna Wijaya 2. Bapak Marwanto Harjowiryo 3. Bapak Yadi Jaya Ruchandi 4. Bapak Rizwan Rizal Abidin 5. Bapak Adi Pamungkas Daskian 6. Bapak JF. Hasudungan 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Yadi Jaya Ruchandi 4. Mr. Rizwan Rizal Abidin 5. Mr. Adi Pamungkas Daskian 6. Mr. JF. Hasudungan

Rapat Direksi

Kebijakan

Sesuai Keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:

- Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Rapat Direksi harus diselenggarakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali sebulan.

Realisasi

Selama tahun 2021, Direksi menyelenggarakan 93 kali rapat. Kehadiran Direksi dalam rapat serta risalah rapat internal Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors Meeting

Policy

According to the Decree of the Board of Directors No. SK-58/PPA/1215 dated December 10, 2015 regarding the Work Guidelines for the Board of Directors, the Board of Directors Meeting shall be held with the following provisions:

- Meetings of the Board of Directors may be held at any time if:
 - Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
 - Upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners; or
 - Upon a written request from 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights.
- Meetings of the Board of Directors shall be held periodically, at least once a month.

Realization

During 2021, the Board of Directors held 93 meetings. The attendance and minutes of the Board of Directors internal meeting are as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi BoD Meeting			Kehadiran di RUPS Attendance in GMS		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance	Jumlah RUPS Total GMS held	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance
Yadi Jaya Ruchandi	Direktur Utama President Director	93	93	100	2	2	100
Rizwan Rizal Abidin	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	93	93	100	2	2	100
Adi Pamungkas Daskian	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2	93	93	100	2	2	100



Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi BoD Meeting			Kehadiran di RUPS Attendance in GMS		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance	Jumlah RUPS Total GMS held	Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance
JF Hasudungan	Direktur Special Asset Management Director of Special Asset Management	27	27	100	-	-	-

Catatan:

Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-309/MBU/09/2021, Direktur Special Asset Management mulai bergabung pada Perusahaan pada tanggal 14 September 2021.

Notes:

According to the Decree of the Minister of SOEs No. SK-309/MBU/09/2021, Director of Special Asset Management joined the Company effective September 14, 2021

Risalah dan Agenda Rapat Internal Direksi

Minutes and Agenda of Internal Meeting of the Board
of Directors

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
1	4-Jan-2021 January 4, 2021	MOM-01/PPA/ BOD/0121	1. Laporan Penggunaan PMN untuk Kegiatan RR 2. Rencana implementasi Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah 1. Report on the utilisation of PMN for RR Activities 2. The implementation plan of Government Regulation no. 63, 2019 concerning Government Investment	1	1		1
2	5-Jan-2021 January 5, 2021	MOM-02/PPA/ BOD/0121	1. Pembahasan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan PT Alim Investindo 2. Pembahasan RKAP 2021 1. Discussion on the ime extension proposal for the financing of PT Alim Investindo 2. Discussion on RKAP 2021	1	1		1
3	6-Jan-2021 January 6, 2021	MOM-03/PPA/ BOD/0121	1. <i>Reprofiling Liabilities</i> PT PPA 2. Pembahasan penyelesaian kewajiban PT National Utility Helicopters 3. Struktur NPL <i>Clean Up</i> 1. Liabilities Reprofiling of PT PPA 2. Discussion on the settlement of PT. National Utility Helicopters' obligation 3. NPL structure clean up	1	1		1
4	10-Jan-2021 January 10, 2021	MOM-04/PPA/ BOD/0121	<i>Budgeting</i> BUMN RR dalam RKAP 2021 SOE RR budgeting within the RKAP 2021	1	1		1
5	12-Jan-2021 January 12, 2021	MOM-05/PPA/ BOD/0121	1. <i>Budgeting</i> NPL; 2. Realokasi PMN; 3. Penjajakan Kerjasama Invetasi OIP; 4. Update laporan keuangan <i>un-audited</i> PT PPA Group 2020 1. NPL Budgeting 2. PMN reallocation 3. Study on OIP investment Cooperation 4. Update on 2020 un-audited financial report of PT PPA Group	1	1		1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
6	19-Jan-2021 January 19, 2021	MOM-06/PPA/ BOD/0121	1. Pembahasan PT Rejeki Intilogam Jaya 2. Pembahasan PT Magnesium Gosari Internasional 3. Pembahasan Pengambilalihan NPL KPR BTN 4. Pembahasan <i>Task Force</i> Investasi Non-Produktif 1. Discussion on PT Rejeki Intilogam Jaya 2. Discussion on PT Magnesium Gosari Internasional 3. Discussion on the Takeover of KPR BTN NPL 4. Discussion on the Non-Earning Investment Task Force	1	1		1
7	26-Jan-2021 January 26, 2021	MOM-07/PPA/ BOD/0121	1. Pembahasan <i>Project Paris</i> 2. Pembahasan HOA dengan China Communication Construction Indonesia 3. <i>Updates</i> Potensi Jerja Sama Kapal MKS MKB dengan Djakarta Lloyd 1. Discussion on the Paris Project 2. Discussion on HOA with China Communication Construction Indonesia 3. Updates on the potential cooperation between the MKS MKB Ship and PT Djakarta Lloyd	1	1		1
8	2-Feb-2021 February 2, 2021	MOM-08/PPA/ BOD/0221	1. <i>Update Project Paris</i> 2. Presentasi Profil Risiko 3. Presentasi <i>Asset Liabilities and Management</i> ("ALMA") 4. Presentasi Rencana Kerjasama Kapal MKS dan MKB dengan Djakarta Lloyd 5. Presentasi <i>Project Omega</i> 6. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Dekom No. 05 tanggal 25 Januari 2021 7. Perjanjian Kerja Sama ("PKS") Whistle Blowing System terintegrasi dengan KPK 1. Update on Project Paris 2. Risk Profile Presentation 3. Presentation of Asset Liabilities and Management ("ALMA") 4. Presentation of the MKS and MKB Ship Cooperation Plan with PT Djakarta Lloyd 5. Omega Project Presentation 6. Discussion on the response of the Board of Commissioners based on the Letter of the Board of Commissioners no. 05 January 25, 2021 7. Cooperation Agreement ("PKS") on Integrated Whistle Blowing System with KPK	1	1		1

Ikhtisar
UtamaLaporan
ManajemenProfil
PerusahaanPembahasan
dan Analisa
ManajemenTata Kelola
PerusahaanTanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
9	9-Feb-2021 February 9, 2021	MOM-09/PPA/ BOD/0221	- Pembahasan lanjutan Asset Swap meliputi hal-hal sebagai berikut: - Kajian Konsultan Hukum G&R yang memastikan mengenai: - Apakah pelaksanaan <i>asset swap</i> memerlukan persetujuan RUPS - Apakah masih diperlukan kebijakan internal untuk pelaksanaan <i>asset swap</i> (pasca diperolehnya kajian hukum dari G&R) - Usulan pengganti Akun BIM dalam <i>Project Paris</i> - Struktur dan Mekanisme SSF - Presentasi <i>Dashboard Analytical</i> - Pembahasan NPF (<i>Reprofiling</i> Kewajiban PPA) Sehubungan dengan NPL PPA yang telah mencapai 14%, maka diprioritaskan pembahasan akun-akun yang memiliki aging > 90 hari, <i>outstanding</i> besar dan tidak termasuk pada list 14 akun yang akan dikeluarkan melalui <i>Project Paris</i>, yakni: - Ade Textile	1	1		1
10	16-Feb-2021 February 16, 2021	MOM-010/PPA/ BOD/0221	- Continued discussion on Asset Swap which includes the following subjects: - The study of G&R Legal Consultants confirming: - Does the implementation of asset swap require GMS approval? - Is the internal policies still required for the implementation of asset swaps (after obtaining a legal review from G&R) - Replacement proposal of BIM Account in Project Paris - Structure and Mechanism of SSF - Analytical Dashboard Presentation - Discussion on NPF (Reprofiling of PPA Obligations) In relation to the NPL PPA which has reached 14%, priority is given to discussion on accounts that have aging > 90 days, large outstanding and not included in the list of the 14 accounts to be issued through the Project Paris, namely: - PT Ade Textile Industri	1	1		1
			- NPF (<i>Reprofiling</i> Kewajiban PPA) - Pembahasan Penyelesaian Ade Textile - Permohonan Persetujuan Direksi untuk Lelang Aset BIM - NPF (<i>Reprofiling</i> Kewajiban PPA) - Pembahasan Penyelesaian <i>National Utility Helicopters</i> - NPF (Reprofiling of PT. PPA's Obligations) – Discussion on the settlement of Ade Textile - Application for The Board of Directors Approval on BIM Asset Auction - NPF (Reprofiling of PT. PPA's Obligations) - Discussion on the settlement of PT National Utility Helicopters				

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
11	18-Feb-2021 February 18, 2021	MOM-011/PPA/ BOD/0221	1. Kinerja Keuangan Posisi Januari 2021 (Neraca, Laba Rugi dan Rasio) dan KPI 2. Pembahasan Pinjaman PPA Kepada PPAK: Skema Restrukturisasi Fasilitas PPA Kapital (Eks Novasi PT RILJ) 3. NPF (<i>Reprofiling</i> Kewajiban PPA) : a. Akun-akun yang memiliki aging > 90 hari, <i>outstanding</i> besar dan tidak termasuk pada list 14 akun yang akan dikeluarkan melalui <i>Project Paris</i> yakni Polowijo Gosari b. Akun-akun yang masuk kategori <i>loan at risk</i> yakni Bondi Syad Mulia 1. January 2021 Financial Performance (Balance Sheet, Profit and Loss and Ratio) and KPI 2. Discussion on PT. PPA Loans to PPAK: Restructuring Scheme of PT. PPA Capital Facilities (Ex-Novation PT RILJ) 3. NPF (Reprofiling of PT. PPA 's Obligations): a. Accounts with aging > 90 days, large outstanding and not included in the list of the 14 accounts that will be issued through the Project Paris, which is PT. Polowijo Gosari b. Accounts that fall into the loan at risk category which is PT. Bondi Syad Mulia	1	1		1
12	22-Feb-2021 February 22, 2021	MOM-012/PPA/ BOD/0221	1. Sistem Pencatatan Konsolidasi Anak Perusahaan (PIC: Ibu Rita Herawati (DTIOB)) 2. PT INTI – Permohonan Persetujuan Pemegang Saham terhadap Pembubaran PT Maleo Emtiga 1. Consolidated Subsidiary Listing System (PIC: Ibu Rita Herawati (DTIOB)) 2. PT INTI – Request for Shareholders' Approval on the liquidation of PT Maleo Emtiga	1	1		1
13	23-Feb-2021 February 23, 2021	MOM-013/PPA/ BOD/0221	1. NPF (<i>Reprofiling</i> Kewajiban PPA): Sehubungan dengan NPL PPA yang telah mencapai 14%, maka diprioritaskan pembahasan akun-akun yang memiliki <i>loan at risk</i> yakni: a. Perum Perumnas b. MKS/MKB c. Indah d. CDMS 2. SSF – Pemaparan <i>Project Solar</i> 1. NPF (Reprofiling PT. PPA's Obligations): In relation to the PT. PPA's NPL which has reached 14%, priority is given to discussion on accounts that have loan at risk, namely: a. Perumnas b. MKS/MKB c. Indah d. CDM 2. SSF – Solar Project Presentation	1	1		1
14	2-Mar-2021 March 2, 2021	MOM-014/PPA/ BOD/0321	1. <i>Update Rating Process Global Bond</i> 2. Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasi 3. <i>Update Project 147</i> 1. Update on Process Global Bond Rating 2. Consolidated Financial Statement Audit Progress 3. Update on Project 147	1	1		1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
15	4-Mar-2021 March 4, 2021	MOM-015/PPA/ BOD/0321	1. <i>Update Project Asset Swap – Project Paris</i> 2. Operator Investasi Pemerintah 3. Obligasi Global 2021	1	1		1
16	9-Mar-2021 March 9, 2021	MOM-016/PPA/ BOD/0321	1. Penanganan PT Lintas Samudera Sejahtera 2. BUMN RR: a. Presentasi Target Pencapaian atau <i>milestone</i> BUMN RR untuk 60 hari ke depan dan penentuan target b. Pengadaan Konsultan BUMN RR – <i>Scope of Work</i> dan Budget 3. Realokasi PMN 4. <i>SSF Run-Off – Run-Off</i> dari setiap <i>Pipeline</i> dilengkapi dengan <i>Time Line</i> dan sumber <i>funding</i>-nya disesuaikan dengan proforma-nya. 1. Handling of PT Lintas Samudera Sejahtera 2. SOE RR: a. Target determination and presentation of SOE RR Targets Achievement or milestones for the next 60 days b. Procurement of SOE RR Consultant – <i>Scope of Work</i> and Budget 3. Reallocation of PMN 4. <i>SSF Run-Off – Run-Off</i> from each Pipeline is equipped with a Time Line and funding source is adjusted to its pro forma.	1	1		1
17	10-Mar-2021 March 10, 2021	MOM-017/PPA/ BOD/0321	1. Pengelolaan Anak Usaha - Evaluasi kinerja bulanan 2. Kinerja Keuangan Februari 2021 1. Subsidiary Management - Monthly performance evaluation 2. February 2021 Financial Performance	1	1		1
18	14-Mar-2021 March 14, 2021	MOM-018/PPA/ BOD/0321	1. Laporan Kinerja Konsolidasi Februari 2021 2. ALMA Februari 2021 1. February 2021 Consolidated Performance Report 2. February 2021 ALMA	1	1		1
19	16-Mar-2021 March 16, 2021	MOM-019/PPA/ BOD/0321	1. Task Force Investasi Non Produktif 2. Skema Penyelesaian PT Prabu Wahana International dan PT Carpediem Mandiri 3. Tindak Lanjut Rencana Penarikan Pinjaman Modal Kerja PT Rejeki Intilogam Jaya 4. Jatuh tempo SPN PT Istaka Karya 1. Non-productive Investment Task Force 2. Settlement Scheme of PT Prabu Wahana International and PT Carpediem Mandiri 3. Follow-up on withdrawal plan of PT Rejeki Intilogam Jaya's Working Capital Loan 4. SPN maturity of PT Istaka Karya	1	1		1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
20	23-Mar-2021 March 23, 2021	MOM-020/PPA/ BOD/0321	1. Project Paris: a. Presentasi Konsultan G&R terkait dengan aspek hukum b. Presentasi Konsultan EY terkait dengan keuangan dan pajak 2. Presentasi <i>Project Patriot</i> (PT PN) 3. Skema Pembiayaan PT Dos Ni Ro Ha 1. Project Paris: a. Presentation of G&R Consultant related to legal aspects b. Presentation of EY consultant related to finance and tax 2. Presentation of <i>Project Patriot</i> (PT PN) 3. Financing Scheme of PT Dos Ni Ro Ha	1	1		1
21	30-Mar-2021 March 30, 2021	MOM-021/PPA/ BOD/0321	1. Akun yang dikerjasamakan dengan Firco Law Firm, yakni sebagai berikut: a. Niaga Bumi Energi b. Bintang Abadi Sempurna 2. Permohonan <i>Bridging Loan</i> PNRI untuk Pelunasan MTN jatuh tempo 3. Usulan kerjasama dengan Jamdatun dan BPKP terkait dengan penagihan NPL dan penjualan aset 4. Penunjukan Konsultan BUMN RR 1. Accounts in collaboration with Firco Law Firm, which includes the following: a. PT. Niaga Bumi Energi b. PT. Bintang Abadi sempurna 2. PNRI's <i>Bridging Loan</i> Application for MTN repayment maturity 3. Cooperation proposal with Jamdatun and BPKP related to NPL collection and asset sales 4. Appointment of SOE RR Consultant	1	1		1
22	6-Apr-2021 April 6, 2021	MOM-022/PPA/ BOD/0421	1. <i>Asset Liabilities Management</i> (ALMA) PPA 2. BUMN RR - <i>Milestone</i> 60 Hari 3. <i>Update</i> Penanganan PT Barata Indonesia (Persero) 4. <i>Project Blast</i> 5. <i>Exchangeable Bond</i> 1. PT. PPA's <i>Asset Liabilities Management</i> (ALMA) 2. SOE RR - 60 Day <i>Milestone</i> 3. <i>Update</i> on the Handling of PT Barata Indonesia (Persero) 4. <i>Project Blast</i> 5. <i>Exchangeable Bond</i>	1	1		1
23	13-Apr-2021 April 13, 2021	MOM-023/PPA/ BOD/0421	1. Kualitas Aset dan Liabilitas PPA (ALMA PPA) 2. Pengelolaan BUMN RR: a. Pembahasan Penanganan PT Barata Indonesia b. Presentasi Target Pencapaian atau <i>milestone</i> BUMN RR untuk 60 hari ke depan dan penentuan target c. Pembahasan Penyelesaian PT DPS 3. Hasil Tender <i>Underwriter Global Bond</i> 1. PT. PPA's Quality of Assets and Liabilities (ALMA PT. PPA) 2. Management of SOE RR: a. Discussion on handling of PT Barata Indonesia b. Target determination and presentation for the SOE RR targets achievement or milestones for the next 60 days c. Discussion on the settlement of PT DPS 3. Global Bond Underwriter Tender Results	1	1		1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
24	14-Apr-2021 April 14, 2021	MOM-024/PPA/ BOD/0421	1. NPF (<i>Reprofiling</i> Kewajiban PPA): a. LSS b. NUH c. Ade Tex 2. Kinerja Keuangan Konsolidasian Q1 3. Asuransi Direksi & Officer 1. NPF (<i>Reprofiling</i> of PT. PPA's Obligations): a. LSS b. NUH c. PT. Ade Textile Industri 2. 1 st Quarter Consolidated Financial Performance 3. Board of Directors and Officer Insurance	1	1		1
25	20-Apr-2021 April 20, 2021	MOM-025/PPA/ BOD/0421	1. Pengelolaan Anak Usaha - Tindak Lanjut <i>Workshop</i> PT PPA Kapital ("PPAK") 2. Pengelolaan Anak Usaha - Tindak Lanjut <i>Workshop</i> PT PPA Finance ("PPAF") 3. BUMN RR - Penanganan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) ("PANN") 1. Management of Subsidiaries - Follow Up on workshop of PT PPA Kapital ("PPAK") 2. Management of Subsidiaries - Follow Up on Workshop of PT PPA Finance ("PPAF") 3. SOE RR - Handling of PT Pembangunan Armada Niaga Nasional (Persero) ("PANN")	1	1		1
26	27-Apr-2021 April 27, 2021	MOM-026/PPA/ BOD/0421	1. BUMN RR - Usulan Pemberian <i>Bridging Loan</i> kepada PNRI untuk penyelesaian MTN Jatuh Tempo 2. Pembahasan <i>Website Revamp</i> PPA oleh Konsultan 3. Pembahasan <i>Roadmap Business Process</i> dan <i>Risk Management</i> PPA ke depan 1. SOE RR - <i>Bridging Loan</i> Proposal to PNRI for the settlement of MTN maturity 2. Discussion on PPA Website Revamp with Consultants 3. Discussion on the future of PT. PPA's Business Process and Risk Management Roadmap	1	1		1
27	4-May-2021 May 4, 2021	MOM-027/PPA/ BOD/0521	1. Monitoring Anak Perusahaan : PPAK - Pembahasan Penanganan MGI 2. Persiapan Wawancara dengan Lembaga Pemeringkat - Fitch dan S&P 3. Persiapan Penerbitan Obligasi (<i>Local Bond</i>) 4. Pengelolaan NPF - Restrukturisasi Ade Tex 5. Pembahasan <i>Framework</i> Hukum PPA 6. Pembahasan pembiayaan ke Indonesia Power - Pabrik Solar Panel 1. Monitoring of Subsidiaries: PPAK - Discussion on MGI Handling 2. Interview preparation with Rating Agencies - Fitch and S&P 3. Preparation of Bonds issuance (Local Bonds) 4. NPF Management – PT Ade Textile Restructuring 5. Discussion on PT. PPA's Legal Framework 6. Discussion on financing to PT Indonesia Power - Solar Panel Factory	1	1		1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
28	6-May-2021 May 6, 2021	MOM-028/PPA/ BOD/0521	1. SSF: a. Dukungan pendanaan untuk pembangkit listrik apung (PT PAL) b. Sentralisasi <i>procurement</i> produk baja 2. Pengelolaan BUMN RR - Tindak Lanjut Pertemuan dengan Kementerian Keuangan atas Penanganan PANN 3. KPI Triwulan I Tahun 2021: a. PPA Induk b. Anak Perusahaan PPA 1. SSF: a. Funding support for floating power plant (PT PAL) b. Centralisation of steel product procurement 2. Management of SOE RR - Follow-up meeting with the Ministry of Finance on the Handling of PANN 3. 1 st Quarter 2021 KPI: a. PT. PPA Holding b. PT. PPA Subsidiaries	1	1		1
29	10-May-2021 May 10, 2021	MOM-029/PPA/ BOD/0521	Penanganan PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero) Handling of PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero)	1	1		1
30	18-May-2021 May 18, 2021	MOM-030/PPA/ BOD/0521	1. Kinerja Keuangan April 2021 2. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan PT PPA 3. ALMA April 2021 4. <i>Risk Management Plan</i> PT PPA 2021 5. PKPU MGI: a. Penentuan ikut <i>voting</i> atau tidak b. Laporan hasil <i>meeting</i> dengan ADCO Law (Konsultan Hukum) 6. Tindak Lanjut Penanganan LSS 7. Perpanjangan Fasilitas Perumnas 1. April 2021 Financial Performance 2. PT PPA's Accounting and Financial Policy 3. April 2021 ALMA 4. 2021 Risk Management Plan of PT PPA 5. PT. MGI's PKPU: a. Decision whether to vote or not b. Report on the results of the meeting with ADCO Law (Legal Consultant) 6. Follow-up on LSS Handling 7. Extension of Perumnas Facilities	1	1		1
31	19-May-2021 May 19, 2021	MOM-031/PPA/ BOD/0522	1. Penanganan PT PAL Indonesia (Persero) 2. Pembahasan Penerbitan <i>Indicative Term Sheet</i> untuk PT Satria Antaran Prima (" <i>Project Sydney</i> ") 3. Pembahasan <i>Terms and Condition Global Bond</i> (" <i>Project Star</i> ") 1. Handling of PT PAL Indonesia (Persero) 2. Discussion on the issuance of <i>Indicative Term Sheet</i> for PT Satria Antaran Prima (" <i>Project Sydney</i> ") 3. Discussion on the <i>Terms and Conditions</i> of <i>Global Bond</i> (" <i>Project Star</i> ")	1	1		1
32	31-May-2021 May 31, 2021	MOM-032/PPA/ BOD/0521	1. Perkembangan Restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) 2. <i>Advisory Deals Pipeline</i> 3. Permohonan Persetujuan Pemberian <i>Bridging Loan</i> PT ISN (Persero) 1. Progress of Restructuration of PT Barata Indonesia (Persero) 2. <i>Advisory Deals Pipeline</i> 3. Application for the Approval of <i>Bridging Loans</i> grant for PT ISN (Persero)	1	1		1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
33	3-Jun-2021 June 3, 2021	MOM-033/PPA/ BOD/0521	Pembahasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT Magnesium Gosari International ("PT MGI") Discussion on the suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU") of PT Magnesium Gosari International ("PT MGI")				
34	8-Jun-2021 June 8, 2021	MOM-034/PPA/ BOD/0521	1. Penanganan PT Rejeki Inti Logam Jaya ("PT RILJ") - Permohonan Pencairan Kedua RILJ 2. Penanganan PT Industri Kapal Indonesia ("PT IKI") – Pembahasan Penyelesaian PT IKI sebagai Kreditur Kolektibilitas 5 pada BSM 3. Tindak Lanjut Penanganan PT Djakarta Lloyd ("PT DL") – Proses Pembelian Kapal MKS dan MKB 4. Penanganan PT Semen Kupang - Perpanjangan KSO 5. Pengelolaan NPL – Permohonan Persetujuan Penandatanganan MoU dengan BRI 6. Tindak Lanjut Penanganan PT Niaga Bumi Energi ("PT NBE") 7. Tindak Lanjut Penanganan Perum PNRI 8. Tindak Lanjut Penanganan PT Primissima	1	1		1
			1. Handling of PT Rejeki Inti Logam Jaya ("PT RILJ") - RILJ's Second Disbursement Request 2. Handling of PT Industri Kapal Indonesia ("PT IKI") – Discussion on the Settlement of PT IKI as Creditor Collectibility 5 at BSM 3. Follow-up on the Handling of PT Jakarta Lloyd ("PT DL") – Process of Purchasing MKS and MKB Vessels 4. Handling of PT Semen Kupang - Extension of KSO 5. NPL Management – Application for the Approval of Signing MoU with BRI Bank 6. Follow-up on the Handling of PT Niaga Bumi Energi ("PT NBE") 7. Follow-up on the handling of the PNRI Public Corporation 8. Follow-up on the handling of PT Primissima				
35	11-Jun-2021 June 11, 2021	MOM-035/PPA/ BOD/0521	1. Pembahasan Penanganan PT Lintas Samudera Sejahtera ("PT LSS") 2. Pembahasan Tindak Lanjut Sentralisasi Procurement Baja (Trading House Baja) 3. Pembahasan JV Properti dan Properti Investasi	1	1		1
			1. Discussion on the handling of PT Lintas Samudera Sejahtera ("PT LSS") 2. Discussion on the Follow-up of the centralization of Steel Procurement (Steel Trading House) 3. Discussion on JV Property and Investment Properties				

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
36	15-Jun-2021 June 15, 2021	MOM-036/PPA/ BOD/0521	1. Kinerja Keuangan Mei 2021 2. ALMA Mei 2021 3. Rencana Lindung Nilai <i>Global Bond</i> 4. Perpanjangan Perjanjian Pinjaman PT Inti Adhiyasa 5. Persiapan RUPST BUMN Titip Kelola 1. May 2021 Financial Performance 2. May 2021 ALMA 3. Global Bond Hedging Plan 4. Extension of Loan Agreement of PT Inti Adhiyasa 5. AGMS Preparation of SOE Trust Management	1	1		1
37	16-Jun-2021 June 16, 2021	MOM-037/PPA/ BOD/0521	1. <i>Monitoring</i> Kegiatan Anak Usaha PT PPAK - <i>Debt to Equity Swap</i> 2. <i>Monitoring</i> Kegiatan Anak Usaha PT PPAF - Skema Penyaluran TJSL dan Kebutuhan Penguatan Modal 1. Monitoring of PT PPAK's Subsidiaries activities - Debt to Equity Swap 2. Monitoring of PT PPAF's Subsidiaries activities - TJSL Distribution Scheme and the Need for Capital Strengthening	1	1		1
38	20-Jun-2021 June 20, 2021	MOM-038/PPA/ BOD/0521	1. Pembahasan <i>Revamp Website</i> PT PPA 2021 2. Proyeksi Keuangan s.d. Desember 2021 1. Discussion on the 2021 Website Revamp of PT PPA 2. December 2021 Financial Projection	1	1		1
39	22-Jun-2021 June 22, 2021	MOM-039/PPA/ BOD/0521	1. Pembahasan <i>Project 147</i> - Hasil <i>Highlevel Due Dilligence</i> Aspek Keuangan dan Legal 2. Monitoring Kegiatan Anak Usaha PPAK – Permohonan dana talangan untuk <i>working capital</i> dan gaji 3. Pengelolaan NPL BNI 4. Tindak Lanjut Penanganan PKPU PT MGI 5. Tindak Lanjut Penanganan Penas 1. Discussion on Project 147 - Results of High-level Due Diligence on Financial and Legal Aspects 2. Monitoring of PT. PPAK's Subsidiaries activities – Requests for bailouts of working capital and salaries 3. BNI Bank NPL Management 4. Follow-up on the handling of PT MGI's PKPU 5. Follow-up on the handling of Pens	1	1		1
40	23-Jun-2021 June 23, 2021	MOM-040/PPA/ BOD/0521	1. Tindak Lanjut PKPU MGI 2. Tindak Lanjut Penanganan Polyrama 3. Tindak Lanjut Penanganan RILJ 4. Permohonan Pendaftaran Obligasi dan Sukuk PT Polyrama 5. Tindak Lanjut Penanganan PT Barata Indonesia 1. Follow-up on PT. MGI's PKPU 2. Follow-up on the Handling of Polyrama 3. Follow-up on the handling of RILJ 4. Application for the registration of PT Polyrama Bonds and Sukuk 5. Follow-up on the handling of PT. Barata Indonesia	1	1		1
41	24-Jun-2021 June 24, 2021	MOM-041/PPA/ BOD/0521	1. Permohonan Persetujuan Pemberian Dana Talangan kepada PT Indah Karya 1. Application for the approval of the Bailout Funds grant to PT Indah Karya	1	1		1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
42	1-Jul-2021 July 1, 2021	MOM-042/PPA/ BOD/0721	1. Tindak lanjut proses penerbitan Obligasi Nasional 2. <i>Overview Project Troy</i> 3. Rencana Bank <i>inquiry</i> untuk <i>Share-Backed Financing</i> PPA 4. Permohonan <i>Creditor Consent</i> Pendaftaran OJK Obligasi dan Sukuk oleh PT Polytama Propindo 5. <i>Update Project Paris</i> - Potensi Penyesuaian Penerbit Sukuk 1. Follow-up on the process of the National Bonds issuance 2. Overview of Project Troy 3. Bank inquiry plan for PT. PPA's Share-Backed Financing 4. Application for the Creditor Consent registration of OJK Bonds and Sukuk by PT Polytama Propindo 5. Update on Project Paris - Potential Adjustment of Sukuk Issuers	1	1		1
43	6-Jul-2021 July 6, 2021	MOM-043/PPA/ BOD/0721	1. Tindak Lanjut PKPU MGI (skema penyelesaian dengan PG) 2. <i>Standard of Procedure</i> AMC Indonesia 3. Penghapusan aktiva tetap BUMN melalui pemindah tangan akibat penjualan 4. Pengelolaan NPL – <i>Master Restructuring Agreement Project 147</i> dan <i>Update MoU</i> dengan Bank BRI 5. Penanganan PT Bintang Abadi Sampurna dan PT Prabu Wahana Internasional dikerjasamakan dengan Firco Law Firm 1. Follow up on PT. MGI's PKPU (settlement scheme with PG) 2. Standard of Procedure of AMC Indonesia 3. Elimination of SOE's fixed assets through hand over due to sales 4. Management of NPL – <i>Master Restructuring Agreement</i> of Project 147 and <i>Update on MoU</i> with BRI Bank 5. Handling of PT Bintang Abadi Sampurna and PT Prabu Wahana Internasional in collaboration with Firco Law Firm	1	1		1
44	7-Jul-2021 July 7, 2021	MOM-044/PPA/ BOD/0721	1. Sentralisasi <i>Procurement</i> Baja - <i>Update MoU</i> dengan PT Krakatau Steel (PIC: Bapak Nanang Ariseno) 2. Pembahasan materi updates kepada Dewan Komisaris mengenai pengembalian saham NK dan status proses restrukturisasi & likuidasi BUMN RR 1. Centralization of Steel Procurement - <i>Update on MoU</i> with PT Krakatau Steel (PIC: Mr. Nanang Ariseno) 2. Discussion on material updates for the Board of Commissioners regarding the return of NK shares and the status of SOE RR restructuring & liquidation process	1	1		1
45	8-Jul-2021 July 8, 2021	MOM-045/PPA/ BOD/0721	<i>Project Troy</i>	1	1		1
46	13-Jul-2021 July 13, 2021	MOM-046/PPA/ BOD/0721	Permohonan Persetujuan Pelaksanaan <i>Project 147</i> Application for the approval of Project 147 implementation	1	1		1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
47	13-Jul-2021 July 13, 2021	MOM-047/PPA/ BOD/0721	1. Tindak lanjut Penanganan PT RILJ dan Rencana Addendum Perjanjian Modal Kerja Tambahan 2. Tindak lanjut Penanganan PT Persada Pratama <i>Airborne</i> 3. Tindak lanjut Penanganan PT Wirasada Sarana Aviassi (Wise Air) 1. Follow-up on the handling of PT RILJ and addendum plan for the Additional Working Capital Agreement 2. Follow-up on the handling of PT Persada Pratama Airborne 3. Follow-up on the handling of PT Wirasada Sarana Aviassi (Wise Air)	1	1		1
48	14-Jul-2021 July 14, 2021	MOM-048/PPA/ BOD/0721	Pembahasan Lanjutan <i>Project 147</i> Continued discussion on Project 147	1	1		1
49	16-Jul-2021 July 16, 2021	MOM-049/PPA/ BOD/0721	1. <i>Project Odin</i> 2. <i>Project Singasari</i> 1. Project Odin 2. Project Singasari	1	1		1
50	21-Jul-2021 July 21, 2021	MOM-050/PPA/ BOD/0721	1. Kinerja Konsolidasian Juni 2021 2. ALMA Juni 2021 1. June 2021 Consolidated Performance 2. June 2021 ALMA	1	1		1
51	27-Jul-2021 July 27, 2021	MOM-051/PPA/ BOD/0721	1. Permohonan Persetujuan Pemberian Fasilitas Baru atas nama PT Widodo Makmur 2. Tindak Lanjut Penanganan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) 3. Struktur Organisasi Bisnis (PIC: SEVP 1 dan Bapak Indra) 1. Application for the approval of New Facilities on behalf of PT Widodo Makmur 2. Follow-up on the Handling of PT Kertas Kraft Aceh (KKA) 3. Business Organizational Structure (PIC: SEVP 1 and Mr. Indra)	1	1		1
52	28-Jul-2021 July 28, 2021	MOM-052/PPA/ BOD/0721	<i>Project Alfa</i> Project Alfa	1	1		1
53	30-Jul-2021 July 30, 2021	MOM-053/PPA/ BOD/0721	<i>Overall Hedging Strategy</i> Overall Hedging Strategy	1	1		1
54	3-Aug-2021 August 3, 2021	MOM-054/PPA/ BOD/0821	1. Posisi P&L atas proyeksi bisnis baru terhadap RKAP 2. <i>Planning Refinancing</i> bila <i>Global Bond</i> efektif 3. Skema Modal Kerja PT Barata Indonesia 4. Skema <i>Hedging</i> dari Sisi Akuntansi oleh Konsultan 1. P&L position on the new business projections against RKAP 2. Refinancing Planning if the Global Bond is effective 3. Working Capital Scheme of PT Barata Indonesia 4. Hedging Scheme from the Accounting side by Consultants	1	1		1
55	5-Aug-2021 August 5, 2021	MOM-055/PPA/ BOD/0821	1. <i>Bridging Project</i> HIN 2. Barata Konsorsium Pabrik Gula Asembagoes 1. Bridging Project HIN 2. Consortium of PT Barata Indonesia – Pabrik Gula Asembagoes	1	1		1
56	6-Aug-2021 August 6, 2021	MOM-056/PPA/ BOD/0821	Penunjukkan Konsultan <i>Project Troy</i> The appointment of consultant for Project Tray	1	1		1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
57	10-Aug-2021 August 10, 2021	MOM-057/PPA/ BOD/0821	1. Sosialisasi ISO 37001:2016 SMAP oleh Konsultan 2. DES dan <i>Business Plan</i> – PPAK dan PPAF 3. Penawaran Umum Terbatas KB Bukopin 4. PT DPS: Pembiayaan Kapal Tanker 1. Socialization of ISO 37001:2016 SMAP by Consultants 2. DES and Business Plan – PT. PPAK and PT. PPAF 3. Limited Public Offering of KB Bukopin Bank 4. PT DPS: Tanker Financing	1	1		1
58	13-Aug-2021 August 13, 2021	MOM-058/PPA/ BOD/0821	1. <i>Kick-Off meeting</i> Percepatan Road Map Penanganan PPAF dan PPAK 2. Permohonan <i>Bridging Loan</i> PT Industri Sandang Nusantara ("PT ISN") 1. Kick-Off meeting for the acceleration on the Road Map of the handling of PPAF and PPAK 2. Application for the Bridging Loan of PT Industri Sandang Nusantara ("PT ISN")	1	1		1
59	19-Aug-2021 August 19, 2021	MOM-059/PPA/ BOD/0821	1. Kinerja Juli 2021 2. ALMA Juli 2021 3. Permohonan Pemberian Fasilitas Baru PT Widodo Makmur Perkasa (PIC: Bapak Budi dan Bapak Simson) 1. July 2021 Performance 2. July 2021 ALMA 3. Application for the grant of New Facilities for PT Widodo Makmur Perkasa (PIC: Mr. Budi and Mr. Samson)	1	1		1
60	24-Aug-2021 August 24, 2021	MOM-060/PPA/ BOD/0821	<i>Share Backed Financing</i> Share Backed Financing	1	1		1
61	24-Aug-2021 August 24, 2021	MOM-061/PPA/ BOD/0821	1. Penguatan Fungsi BO 2. Pemilihan Debitur BNI 1. Strengthening of BO Function 2. Selection of BNI Bank Debtors	1	1		1
62	25-Aug-2021 August 25, 2021	MOM-062/PPA/ BOD/0821	<i>Updates on Project Odin</i> Updates on Project Odin	1	1		1
63	31-Aug-2021 August 31, 2021	MOM-063/PPA/ BOD/0821	Usulan Pembiayaan BUMN RR: 1. INTI 2. PDIP Batam 3. Djakarta Lloyd SOE RR financing proposal: 1. PT. INTI 2. PDIP Batam 3. PT. Djakarta Lloyd	1	1		1
64	1-Sep-2021 September 1, 2021	MOM-064/PPA/ BOD/0921	1. Tujuan Penggunaan Dana Obligasi Domestik 2021 2. Usulan Pembiayaan BUMN RR: a) PT Boma Bisma Indra (Persero) b) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) 3. Rencana Penerapan <i>E-Procurement</i> 1. The Objective of the 2021 Domestic Bond Fund utilization 2. SOE RR Financing Proposal: a) PT Boma Bisma Indra (Persero) b) PT Industri Kapal Indonesia (Persero) 3. E-Procurement Implementation Plan	1	1		1
65	6-Sep-2021 September 6, 2021	MOM-065/PPA/ BOD/0921	Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK W/A PT PPA (Persero) kepada Bank BRI Approval for the extension of the KMK W/A Facility of PT PPA (Persero) to BRI Bank	1	1		1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
66	7-Sep-2021 September 7, 2021	MOM-066/PPA/ BOD/0921	1. <i>NPL Management BRI:</i> a. Presentasi oleh <i>Tracon Industri Solusindo</i> mengenai hasil kajian aspek teknis PT Artas Energi Petrogas. 2. Restrukturisasi NUH 3. Usulan Pemberian Dana Talangan bagi PPAK untuk MGI menyelesaikan proses PKPU 4. <i>Initiatives Project Tracking</i> 5. Tindaklanjuti Temuan BPK dan <i>Management Letter</i> 6. Proposal Persetujuan Restrukturisasi DPS 7. SSF – Permohonan Persetujuan Investasi Satria Antarana Prima 1. BRI Bank's NPL Management: a. Presentation by <i>Tracon Industri Solusindo</i> regarding the study results of the technical aspects of PT Artas Energi Petrogas. 2. NUH Restructuration 3. Bridging funds grant proposal of PT. PPAK for PT. MGI to complete the PKPU process 4. Project Initiatives Tracking 5. Follow-up on BPK Findings and Management Letter 6. Proposal for the approval of DPS Restructurisation 7. SSF – Application for the Approval of Satria Antar Prima investment	1	1		1
67	8-Sep-2021 September 8, 2021	MOM-067/PPA/ BOD/0921	NPL Management BRI – Pembahasan <i>MRA Project 147 (Pre-Signing)</i> BRI Bank's NPL Management – Discussion on MRA Project 147 (Pre-Signing)	1	1		1
68	14-Sep-2021 September 14, 2021	MOM-068/PPA/ BOD/0921	1. Lanjutan Presentasi Satria Antarana Prima - Persetujuan Investasi (Pak Randy dan Pak Ave) 2. Persetujuan Untuk Klausul Tambahan <i>Global Bond</i> 3. Skema kerjasama INTI dan PINDAD 4. Usulan Skema Restrukturisasi PT Wirasada Sarana Aviati 5. <i>Trading Baja</i> 6. Paparan Proposal Kerjasama Djakarta Lloyd dan BAG 1. Continued Presentation of Satria Antarana Prima - Investment Approval (Mr. Randy and Mr. Ave) 2. Approval for the Global Bond Additional Clause 3. PT. INTI and PT. PINDAD cooperation scheme 4. Proposal for the Restructuring Scheme of PT Wirasada Sarana Aviati 5. Steel Trading 6. Presentation of PT. Djakarta Lloyd and BAG's Cooperation Proposals	1	1	1	1
69	15-Sep-2021 September 15, 2021	MOM-069/PPA/ BOD/0921	NPL Management BRI - Presentasi oleh EY mengenai pendahuluan hasil <i>due diligence</i> aspek financial, aspek pajak, dan aspek <i>valuation, modelling & economics</i> PT Artas Energi Petrogas BRI Bank's NPL Management - Presentation by EY regarding the preliminary due diligence results on the aspects of financial, tax, valuation, modelling and economics of PT Artas Energi Petrogas	1	1	1	1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
70	21-Sep-2021 September 21, 2021	MOM-070/PPA/ BOD/0921	1. Proposal Perdamaian PKPU MGI (PIC: Bapak Nanang, Bapak Alex dan Ibu Eva) 2. Kinerja Keuangan Agustus 2021 (PIC: Ibu Yuliza) 3. ALMA Agustus 2021 (PIC: Bapak Pongky) 4. <i>Management Letter</i> mengenai Temuan BPK (PIC: Bapak Wahyu dan Bapak Erwin) 5. Pengelolaan dan Kinerja 5 Saham Minoritas (PIC: Ibu Yessy dan Ibu Nadia) 6. Struktur Organisasi (PIC: Bapak Indra)	1	1	1	1
71	28-Sep-2021 September 28, 2021	MOM-071/PPA/ BOD/0921	<i>Request for Approval</i> 1. Persetujuan Prinsip (<i>Non-Committed</i>) untuk Partisipasi Ekuitas pada <i>Project Odin</i> bersama IBC (PIC: SEVP 1) 2. Persetujuan Perpanjangan Fasilitas PT Bondi Syad Mulia (PIC: Pak Nanang, Ibu Eva dan Pak Alex) <i>Updates</i> 3. Perkembangan Isu Hukum Bondi Syad Mulia (PIC: Bapak Nanang, Bapak Alex, Ibu Astrida dan Ibu Wice) 4. Updates Penanganan PT Rejeki Inti Logam Jaya (RILJ) (PIC: Bapak Nanang dan Bapak Adit) 5. <i>Check Point Project Troy</i> (PIC: Bapak Randy) 6. <i>Update: Projects/Initiatives Tracking</i> dan <i>Dashboard</i> Anak Usaha (PIC: Ibu Yessy dan Ibu Nadia) 7. <i>Update</i> Negoosiasi PT Satria Antarana Prima (<i>Project Sydney</i>) (PIC: Bapak Randy dan Bapak Ave) <i>Request for Approval</i> 1. Principle Approval (<i>Non-Committed</i>) for Equity Participation in <i>Project Odin</i> with IBC (PIC: SEVP 1) 2. Facility Extension Approval of PT Bondi Syad Mulia (PIC: Mr. Nanang, Mrs. Eva and Mr. Alex) <i>Updates</i> 3. Legal Issues Development of PT Bondi Syad Mulia (PIC: Mr. Nanang, Mr. Alex, Mrs. Astrida and Mrs. Wice) 4. Updates on the handling of PT Rejeki Inti Logam Jaya (RILJ) (PIC: Mr. Nanang and Mr. Adit) 5. <i>Project Troy Check Point</i> (PIC: Mr. Randy) 6. <i>Update: Subsidiaries Projects/ Initiatives Tracking and Dashboard</i> (PIC: Ibu Yessy and Ibu Nadia) 7. <i>Update</i> on Negotiation of PT Satria Antarana Prima (<i>Project Sydney</i>) (PIC: Mr. Randy and Mr. Ave)	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
72	30-Sep-2021 September 30, 2021	MOM-072/PPA/ BOD/0921	<i>Request for Approval</i> 1. Pembiayaan <i>Project Sydney</i> (PT Satria Antrian Prima) 2. Permohonan Persetujuan Addendum II - Perjanjian Dana Talangan, Investasi dan Modal Kerja (Tambahan <i>Plafond</i> Untuk Talangan Gaji, Pesangon dan Tambahan Investasi Fasilitas Produksi) PT Dok dan Perkapalan Surabaya <i>Updates</i> 3. <i>Check Point Project Troy</i> 4. <i>Update: Projects/Initiatives Tracking dan Dashboard Anak Usaha</i> <i>Request for Approval</i> 1. Sydney Project Financing (PT Satria Antrian Prima) 2. Application for the Approval of Addendum II - Bailout Agreement, Investment and Working Capital (Additional Ceiling for Salary, Severance Pay and Additional Investment in Production Facilities) PT Dok dan Perkapalan Surabaya <i>Updates</i> 3. Project Troy Check Point 4. Update: Subsidiaries Projects/ Initiatives Tracking and Dashboard	1	1	1	1
73	5-Oct-2021 October 5, 2021	MOM-073/PPA/ BOD/0921	<i>Request for Approval</i> 1. Restrukturisasi PT Bina Patria Transmitra (PIC: Bapak Budi dan Bapak Simson) 2. Persetujuan Direksi terkait perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Project Pertamina (<i>SCF Other Projects</i> dan <i>Working Capital</i> menjadi <i>Committed</i>) (PIC: Bapak Nanang dan Bapak Randy) 3. Permohonan Persetujuan Perolehan Pinjaman dari Bank KB Bukopin <i>Updates</i> 4. <i>Project Eiffel</i> (PIC: Bapak Mahdi, Bapak Dicky, dan Bapak Theo) <i>Request for Approval</i> 1. Restructuring of PT Bina Patria Transmitra (PIC: Mr. Budi and Mr. Simson) 2. Board of Directors approval regarding the amendment and restatement of Pertamina's Project Facility Agreement (Other Projects SCF and committed Working Capital) (PIC: Mr. Nanang and Mr. Randy) 3. Application for the Approval of Loans from KB Bukopin Bank <i>Updates</i> 4. Project Eiffel (PIC: Mr. Mahdi, Mr. Dicky, and Mr. Theo)	1	1	1	1
74	5-Oct-2021 October 5, 2021	MOM-074/PPA/ BOD/0921	<i>Updates:</i> 1. <i>Management Review</i> Penerapan SMAP untuk Persiapan Audit Tahunan sertifikasi ISO 37001 (PIC: Bapak Pongky) <i>Updates:</i> 1. Management Review of SMAP Implementation for the Annual Audit Preparation of the ISO 37001 certification (PIC: Mr. Pongky)	1	1	1	1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
75	7-Oct-2021 October 7, 2021	MOM-075/PPA/ BOD/0921	<i>Request for Approval</i> 1. Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Pembiayaan PT Barata Indonesia (Persero) (PIC: Pak Randy dan Pak Nanang) 2. Perubahan Ketentuan Transaksi PT Widodo Makmur Perkasa (WMP) (PIC: Bapak Randy) <i>Updates</i> 1. Presentasi Hasil Kajian KPMG atas Kinerja Keuangan dan Rencana Restrukturisasi Barata (PIC: Pak Randy dan Pak Ave) 2. Perkembangan akun-akun yang dikerjasamakan dengan Firco Law Firm (PIC: Ibu Dida dan Ibu Wice) 3. <i>Share holders Action</i> atas Saham Nindya Beton terkait pengembalian Saham NK ke Negara (PIC: Ibu Yessy dan Ibu Nadia) <i>Request for Approval</i> 1. Application for the Addendum Approval of PT Barata Indonesia (Persero) Financing Agreement (PIC: Pak Randy and Pak Nanang) 2. Amendment to the terms of Transaction of PT Widodo Makmur Perkasa (WMP) (PIC: Mr. Randy) <i>Updates</i> 1. Presentation of KPMG's Study Results on the Financial Performance and Restructuring Plan of PT Barata Indonesia (PIC: Pak Randy and Pak Ave) 2. The Development of accounts in collaboration with Firco Law Firm (PIC: Ibu Dida and Ibu Wice) 3. Shareholders Action on PT. Nindya Beton Shares regarding the return of NK Shares to the State (PIC: Mrs. Yessy and Mrs. Nadia)	1	1	1	1
76	19-Oct-2021 October 19, 2021	MOM-076/PPA/ BOD/0921	<i>Request for Approval</i> 1. Permohonan Persetujuan <i>Indicative Offering Project Troy</i> 2. Permohonan Persetujuan Pembiayaan PT Djakarta Lloyd 3. Permohonan Persetujuan Skema Restrukturisasi PT National Utility Helicopters <i>Updates</i> 4. <i>Update</i> Pemaparan mengenai Merger Indosat dengan H3i oleh SKHA Consulting 5. Kinerja Keuangan sept 2021 <i>Request for Approval:</i> 1. Application for the Approval of Project Troy Indicative Offering 2. Application for the approval of PT Djakarta Lloyd Financing 3. Application for the Approval of the Restructuring Scheme of PT National Utility Helicopters <i>Updates:</i> 4. Presentation regarding the Merger of Indosat with H3i by SKHA Consulting 5. September 2021 Financial Performance	1	1	1	1
77	20-Oct-2021 October 20, 2021	MOM-077/PPA/ BOD/1021	Permohonan Persetujuan Pelaksanaan <i>Project Odin</i> Application for the approval of Project Odin implementation	1	1	1	1
78	21-Oct-2021 October 21, 2021	MOM-078/PPA/ BOD/1021	Penerimaan Pinjaman USD 75Juta dari KB Bank Bukopin The USD 75 Million Loan acceptance from KB Bukopin Bank	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
78	22-Oct-2021 October 22, 2021	MOM-078A/PPA/ BOD/1021	Workshop Project Troy	1	1	1	1
79	2-Nov-2021 November 2, 2021	MOM-079/PPA/ BOD/1021	1. Permohonan Persetujuan Restrukturisasi PT Ade Textile Industri 2. Permohonan Persetujuan Pembiayaan Djakarta Lloyd 3. Workshop RKAP PPA Group 4. Workshop RKAP BUMN RR 5. Presentasi dari Konsultan <i>Elliot Luther</i> mengenai Skema Proposal Perdamaian Barata Indonesia 6. Permohonan Persetujuan Strategi Hedging Fasilitas Bank KB Bukopin 1. Application for the Approval of the Restructuring of PT Ade Textile Industri 2. Application for the Approval of Djakarta Lloyd Financing 3. Workshop on PT. PPA Group's RKAP 4. Workshop on RR SOE RKAP 5. Presentation by Elliot Luther Consultant on the Peace Proposal Scheme of PT Barata Indonesia 6. Application for the Approval of the Facility Hedging Strategy of KB Bukopin Bank	1	1	1	1
80	2-Nov-2021 November 2, 2021	MOM-080/PPA/ BOD/1121	Penerimaan Pinjaman Rp200 miliar dari Bank BJB The 200 billion Rupiah loan acceptance from BJB Bank	1	1	1	1
81	9-Nov-2021 November 9, 2021	MOM-081/PPA/ BOD/1121	Request for Approval 1. Permohonan Persetujuan Pembiayaan Djakarta Lloyd 2. Permohonan Persetujuan Rencana Penyelesaian Utang PPAF Updates: 3. Update Merger Indosat dan H3I 4. Update Perkembangan Restrukturisasi MGI, PG dan RILJ 5. Update Kerjasama Dos Ni Ro Ha dengan SILOG Request for Approval 1. Application for the approval of Djakarta Lloyd Financing 2. Application for the Approval of the PT. PPAF's Debt Settlement Plan Updates: 3. Update on the Merger of Indosat and H3I 4. Update on the Progress of the Restructuring of PT. MGI, PT. PG and PT. RILJ 5. Update on PT Dos Ni Ro Ha's Collaboration with SILOG	1	1	1	1
82	16-Nov-2021 November 16, 2021	MOM-082/PPA/ BOD/1121	1. Kinerja Keuangan Oktober 2021 2. Asset Liabilities Management (ALMA) Oktober 2021 3. Kajian Bisnis terhadap PT Artas Energi Petrogas (Persero) oleh Konsultan Ernst and Young (EY) Indonesia 1. October 2021 Financial Performance 2. October 2021 Asset Liabilities Management (ALMA) 3. Business Study of PT Artas Energi Petrogas (Persero) by Ernst and Young Consultant (EY) Indonesia	1	1	1	1
83	17-Nov-2021 November 17, 2021	MOM-083/PPA/ BOD/1121	Penjualan Bukopin Rights Bukopin Rights Sale	1	1	1	1
84	24-Nov-2021 November 24, 2021	MOM-084/PPA/ BOD/1121	Permohonan Persetujuan Pembiayaan PT Dos Ni Ro Ha Application for the approval of PT Dos Ni Ro Ha Financing	1	1	1	1



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
85	30-Nov-2021 November 30, 2021	MOM-085/PPA/ BOD/1121	<i>Request for Approval:</i> 1. Permohonan Persetujuan Fasilitas Pinjaman PT Primissima <i>Updates:</i> 2. Hasil Penjualan Rights KB Bukopin 3. <i>Run through</i> RKAP dan KPI Perusahaan Tahun 2022 untuk Persiapan <i>Meeting</i> RKAP dengan Danareksa 4. Paparan terkait PPJ Global Bond <i>Request for approval:</i> 1. Application for the approval of PT Primissima's Loan Facility <i>Updates:</i> 2. Proceeds from the sale of Bukopin's Family Planning Rights 3. Run through the Company's 2022 RKAP and KPI for the Preparation of RKAP Meeting with Danareksa 4. Exposure related to PPJ Global Bond	1	1	1	1
86	7-Dec-2021 December 7, 2021	MOM-086/PPA/ BOD/1121	<i>Request for Approval:</i> 1. Permohonan Persetujuan Proposal Potensi Pembiayaan ke "<i>Restock</i>" (PT Cerita Teknologi Indonesia) 2. Permohonan Persetujuan Proposal Potensi Pembiayaan ke PT Amarta Nusantara Raya ("<i>Project Athens</i>") <i>Request for approval:</i> 1. Application for the Approval of Potential Financing Proposals to "<i>Restock</i>" (PT Story Teknologi Indonesia) 2. Application for the Approval of Potential Financing Proposals to PT Amarta Nusantara Raya ("<i>Project Athens</i>")	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
87	10-Dec-2021 December 10, 2021	MOM-087/PPA/ BOD/1121	<i>Request for Approval:</i> 1. Permohonan Persetujuan Pelaksanaan <i>Perpetual Loan</i> PPAK 2. Persetujuan Pelaksanaan PKPU PT Dok Perkapalan Surabaya ("DPS") dan Voting tanggal 20 Desember 2021; 3. Persetujuan Rencana Kerja dan <i>Budget Back Office Consolidation</i> 4. <i>Update</i> Penanganan PT Semen Kupang (Persero) ("SK") dan Permohonan Persetujuan Surat ke Menteri BUMN terkait dengan permohonan Hak Mewakili Penjualan Saham PT SK 5. Persetujuan Usulan Penyelesaian Pesangon Eks-Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) <i>Updates:</i> 6. <i>Update Progress</i> RKAP 2022 BUMN RR <i>Request for approval:</i> 1. Application for the Approval of PPAK's <i>Perpetual Loan</i> Implementation 2. Application for the Approval of PKPU Implementation of PT Dok Perkapalan Surabaya ("DPS") and Voting on December 20, 2021; 3. Application for the Approval of Office Consolidation Work Plan and Budget Back 4. Update on the Handling of PT Semen Kupang (Persero) ("SK") and Application for the Approval of Letters to the Minister of SOEs related to the application for the Right to Represent the Sale of PT SK's Shares 5. Application for the Approval of Proposal for the settlement of PT Merpati Nusantara Airlines' (Persero) Ex-Employees Severance Pay <i>Updates:</i> 6. Update on the Progress of 2022 SOE RR RKAP	1	1	1	1
88	15-Dec-2021 December 15, 2021	MOM-088/PPA/ BOD/1221	Penerimaan Pinjaman Rp250 miliar dari Bank Mandiri The 250 billion Rupiah Loan acceptance from Mandiri Bank	1	1	1	1
89	15-Dec-2021 December 15, 2021	MOM-089/PPA/ BOD/1221	Penerimaan Pinjaman Rp250 miliar dari Bank Mandiri The 250 billion Rupiah Loan acceptance from Mandiri Bank	1	1	1	1

Ikhtisar
UtamaLaporan
ManajemenProfil
PerusahaanPembahasan
dan Analisa
ManajemenTata Kelola
PerusahaanTanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda	Direktur Utama President Director	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	Direktur SAM Director of SAM	Direktur Investasi 2 Director of Investment 2
90	16-Dec-2021 December 16, 2021	MOM-090/PPA/ BOD/1221	<i>Request for Approval:</i> 1. Permohonan Persetujuan Restrukturisasi PT Varia Intra Finance 2. Permohonan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Baru PT INTI (Persero) 3. Permohonan Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Existing PT PINDAD <i>Updates:</i> 4. Update T&C Pembiayaan kepada PT Widodo Makmur Perkasa 5. Pembahasan Pembentukan Komite Kredit <i>Request for approval:</i> 1. Application for the approval of PT Varia Intra Finance Restructuring 2. Application for the Approval of PT INTI (Persero) New Financing Facility 3. Application for the Approval of Temporary Extension of PT PINDAD's Existing Facilities <i>Updates:</i> 4. Update on T&C Financing to PT Widodo Makmur Perkasa 5. Discussion on the Establishment of Credit Committee	1	1	1	1
91	19-Dec-2021 December 19, 2021	MOM-091/PPA/ BOD/1221	1. Kinerja Keuangan per November 2021 2. Asset Liability Management (ALMA) per November 2021 <i>1. November 2021 Financial Performance</i> <i>2. November 2021 Asset Liability Management (ALMA)</i>	1	1	1	1
92	21-Dec-2021 December 21, 2021	MOM-092/PPA/ BOD/1221	<i>Request for Approval</i> <i>Update Perkembangan PKPU PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ("DPS") dan Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Gaji Karyawan ke DPS</i> <i>Updates:</i> <i>Update Progres Penanganan Aset Tegal 1 & 2</i> <i>Request for Approval</i> <i>Update on PKPU Development of PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ("DPS") and Application for the Approval of Employee Salary Funds Disbursement to DPS</i> <i>Updates:</i> <i>Update on the progress of handling on Tegal 1 & 2 assets</i>	1	1	1	1
93	28-Dec-2021 December 28, 2021	MOM-093/PPA/ BOD/1221	<i>Request for Approval:</i> 1. Permohonan Persetujuan Rencana Penyelesaian Sebagian Kewajiban Secured Promissory Notes ("SPN") PT Istaka Karya Melalui Asset Settlement & Dana Talangan 2. Asset Settlement PT PPA Kapital ("PPAK") <i>Updates:</i> 3. Restrukturisasi PNRI <i>Request for approval:</i> 1. Application for the Approval of the Partial Settlement of PT Istaka Karya's Secured Promissory Notes ("SPN") Obligations through Asset Settlement & Bailout Funds 2. Asset Settlement of PT PPA Kapital ("PPAK") <i>Updates:</i> 3. Restructuring of PNRI	1	1	1	1

Catatan:

Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-309/MBU/09/2021, Direktur SAM mulai bergabung pada Perusahaan pada tanggal 14 September 2021

Note:

According to the Decree of the Minister of SOEs No. SK-309/MBU/09/2021, Director of SAM joined the Company on September 14, 2021

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, yang antara lain ditunjukkan melalui pendidikan, keahlian dan pengalaman, merupakan hal yang positif dan sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman komposisi juga dapat mengefektifkan tugas Dewan Komisaris dan Direksi yang diharapkan mampu memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tubuh manajemen, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

THE COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The diversity of education, expertise and experience is positive and indispensable for the decision-making process. The diversity composition of the Company's Board of Commissioners is part of the Company's efforts in streamlining the supervisory duties of Board of Commissioners and Board of Directors which is expected to enrich the point of view and the interest in the decisionmaking process in the management body, so as to provide the added value for the implementation of Corporate Governance within the Company.

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Krisna Wijaya (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	Indonesia Indonesian	• Sarjana Pertanian • Magister Manajemen bidang Agribisnis • Doktor Studi Antar Bidang • Bachelor Degree in Agriculture • Master of Management in Agribusiness • Doctor of Inter-Field Studies	• Direktur LPPI • Komisaris Utama/Independen PT Danareksa (Persero) • Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk • Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) • Direktur Bisnis Mikro dan Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Republik Indonesia • Direktur Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk • Director of LPPI (2014-present) • President Commissioner/ Independent of PT Danareksa Persero (May 2020-October 2020) • President Commissioner/ Independent of PT Bank Negara Indonesia Life (2015-2018) • Independent Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2015) • Commissioner of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2008-2010) • Chief Executive (CEO) Deposit Insurance Corporation (LPS) (2005-2007) • Director of Micro and Retail Business of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2005) • Member of the Assistance Team of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (2003-2004) • Director of Operations of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2000-2003).	Memiliki keahlian di bidang Pemasaran, Manajemen Risiko dan Audit serta Keuangan Mikro. Has expertise in Marketing, Risk Management and Audit as well as Microfinance.	66	Laki-laki Male



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Marwanto Harjowiryo (Komisaris) Commissioner	Indonesia Indonesian	• Sarjana Ekonomi • <i>Master of Arts</i> (M.A.) bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Fiskal • Doktor bidang Studi Kebijakan • Bachelor Degree in Economics • Master of Arts (M.A.) Degree in Development Economics and Fiscal Policy • Doctor of Policy Studies	• Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI • Komisaris PT Sucofindo (Persero) • Komisaris PT Indonesia <i>Infrastructure Finance</i> • Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk • Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI • Direktur Eksekutif <i>Asian Development Bank</i> (ADB) • Ketua Komite Etik <i>Asian Development Bank</i> (ADB) • Anggota Panitia Penelaah Anggaran <i>Asian Development Bank</i> (ADB) • Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI • Senior Advisor Menteri Keuangan RI • Anggota <i>The National Social Security Council</i> • Direktur Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan RI • Direktur Kerja sama Internasional Kementerian Keuangan RI • Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII • Direktur Anggaran Kementerian Keuangan RI • Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2020) • Director General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013-2019) • Commissioner of PT Sucofindo (Persero) (2003-2018) • Commissioner of PT Indonesia Infrastructure Finance (2011-2017), Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2014-2017) • Director General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2011-2013), Executive Director of the Asian Development Bank (ADB) (2009-2012) • Chair of the Asian Development Bank's Ethics Committee (ADB) (2009-2012) • Member of the Budget Review Committee of the Asian Development Bank (ADB) (2009-2011) • Chief Executive of Bureaucratic Reform of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2007-2009) • Senior Advisor to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (2006-2009) • Member of The National Social Security Council (2006-2008) • Director of Public Relations of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2004-2006) • Director of International Cooperation (2003-2005) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia • Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XIII (1999-2003) • Budget Director of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1998-2003).	Memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan kebijakan. Has expertise in economics and policy.	62	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Direksi Board of Directors						
Yadi Jaya Ruchandi (Direktur Utama) President Director	Indonesia Indonesian	• Sarjana Teknik jurusan Teknik Mesin • <i>Master International Finance and International Operation</i> • Bachelor Degree in Engineering majoring in Mechanical Engineering • Master Degree in International Finance and International Operations	• <i>Senior Executive Vice President Bank Exim</i> • <i>Chief Financial Officer</i> PT Tuban Petrochemicals Industries • <i>Chief Operating Officer</i> pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) • <i>Executive Vice President</i> Pengembangan Proyek pada PT Cardig International Aviation • <i>Corporate Finance Group Head</i> (Deputy CFO) pada PT Cardig International • <i>Senior Investment Officer</i> pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional • <i>Capital Market Dealer</i> pada <i>American Express Bank Jakarta</i> • <i>Assistant Manager Treasury Analyst</i> pada <i>American Express Bank Jakarta</i> • Senior Executive Vice President of Bank Exim (2019-2020) • Chief Financial Officer of PT Tuban Petrochemicals Industries (2016- 2019) • Chief Operating Officer of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2010-2016) • Executive Vice President of Project Development at PT Cardig International Aviation (2009) • Corporate Finance Group Head (Deputy CFO) at PT Cardig International (2004-2006) • Senior Investment Officer at the National Banking Restructuring Agency (2000-2004) • Capital Market Dealer at American Express Bank Jakarta (1999-2000), and Assistant Manager Treasury Analyst at American Express Bank Jakarta (1997-1999).	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan manajemen bisnis Has expertise in finance, investment, and business management	50	Laki-laki Male
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi) (Director of Investment 1 and Restructuring)	Indonesia Indonesian	• Sarjana Teknik Mesin • <i>Master Business & Administration (MBA) in Finance and Artificial Intelligence</i> • Bachelor Degree in Mechanical Engineering • Master of Business & Administration (MBA) in Finance and Artificial Intelligence	• <i>Managing Director</i> IndoSterling Capital • <i>Direktur Investasi</i> NWP Retail Warburg Pincus • <i>Direktur Merger & Akuisisi</i> CIMB • <i>Direktur Corporate Client Solution</i> CIMB • <i>Vice President Corporate Client Solutions</i> CIMB • <i>Vice President Investment Banking</i> • <i>Vice President Corporate Finance</i> CIMB • <i>Associate Director Corporate Finance</i> Noble Capital • <i>Investment Officer</i> Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) • <i>Relationship Manager</i> Citibank • Managing Director of IndoSterling Capital (2019-2020) • Investment Director of NWP Retail Warburg Pincus (2017-2019) • Director of CIMB Mergers & Acquisitions (2015-2017) • Director of CIMB Corporate Client Solutions (2013-2015) • Vice President of CIMB Corporate • Client Solutions (2009-2013), Vice President Investment Banking (2007-2009) • CIMB Vice President Corporate Finance (2005-2007) • Associate Director Corporate Finance Noble Capital (2004-2005) • Investment Officer of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA (2000-2004) and • Citibank Relationship Manager (1999-2000)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan restrukturisasi perusahaan Has expertise in finance, investment and business management	49	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Investasi 2) (Director of Investment 2)	Indonesia Indonesian	- Sarjana Teknik jurusan <i>Electrical and Electronics Engineering</i> <i>Master of Business Administration</i> - Bachelor Degree in Engineering majoring in Electrical and Electronics Engineering - Master of Business Administration	<i>Corporate Deputy Director</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) <i>Independent Financial Advisor</i> Singapura dan Indonesia - Direktur PT Meranti Putra Indonesia <i>Business Development Manager</i> PT Rizki Kacida Reana <i>Thesis Project Mercurious</i> <i>Sales Manager Wavelength Technology Pte Ltd</i> <i>Financial Analyst</i> PT Delta Advisory Indonesia - Corporate Deputy Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (July-October 2020) - Independent Financial Advisor Singapore and Indonesia (2015-2020) - Director of PT Meranti Putra Indonesia (2009-2015) - Business Development Manager of PT Rizki Kacida Reana (2009-2015) - Thesis Project Mercurious (September 2008-December 2008) - Sales Manager Wavelength Technology Pte Ltd (2006-2007), and - Financial Analyst PT Delta Advisory Indonesia (2004-2006)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi dan bisnis manajemen. Has expertise in finance, investment and business management.	40	Laki-laki Male
J.F. Hasudungan		- Magister Manajemen (S2) bidang Keuangan Universitas Sumatera Utara (2005) - Sarjana (S1) bidang Ekonomi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen (1989) - Master Degree in Finance Management, University of North Sumatra (2005) - Bachelor Degree in Accounting Economics from HKBP Nommensen University (1989)	<i>Senior Executive Vice President Special Asset Management</i> di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <i>Memiliki karier yang panjang di Bank Mandiri sejak tahun 1991 (sebelumnya Bank Ekspor Impor Indonesia) dengan membidangi pengelolaan dan restrukturisasi aset</i> - Senior Executive Vice President Special Asset Management at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Has an extensive career at Bank Mandiri since 1991 (formerly Bank Export Import Indonesia) in charge of asset management and restructuring	Memiliki keahlian di bidang pengelolaan aset berkualitas rendah. Has expertise in the management of low-quality asset.	56	Laki-laki Male

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki seluruh saham Perusahaan atau sebesar 100,00%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

THE DISCLOSURE OF AFFILIATION OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS.

The Information on Major/Controlling Shareholders to the Name of Ultimate Owner

The Major/Controlling Shareholder of the Company is the Republic of Indonesia which owns all of the Company's shares or 100.00%. In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 regarding the Delegation of Position, Duties, and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Company (Persero), Public Company (PERUM), and Service Company (PERJAN) to the State Minister for State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises and the Republic of Indonesia State Gazette; the Company's Shareholders' Proxy is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk di antaranya hutang-piutang, kerja sama bisnis, dan sebagainya; sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dan sebagainya

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali per 31 Desember 2021

The Disclosure of Affiliation of Board of Directors, Board of Commissioners, and Major/Controlling Shareholders

The controlling Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors uphold mutual respect on the implementation of duties, responsibilities, and authorities in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors have the Board Manual, which include, among others, their respective responsibilities, obligations, authority, and rights.

The disclosure of affiliation includes family relationships and financial relationships. The form of financial relationships is debt, business cooperation, etc. In contrast, the form of family relationships is special relationships mainly due to blood-related relations such as husband/wife/children/parents/siblings/brother/sister-in-law, etc.

Disclosure of Affiliate Relations of the Board of Commissioners, Directors and Major/Controlling Shareholders as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan: Financial Relationship with:			Hubungan Keluarga dengan: Familial Relationship with:		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major Controlling Shareholders
Krisna Wijaya	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	X	X	X	X	X	X
Marwanto Harjowirjono	Komisaris Commissioner	X	X	X	X	X	X
Yadi Jaya Ruchandi	Direktur Utama President Director	X	X	X	X	X	X
Rizwan Rizal Abidin	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	X	X	X	X	X	X
Adi Pamungkas Daskian	Direktur Invetasi 2 Director of Investment 2	X	X	X	X	X	X
JF Hasudungan	Direktur Special Asset Management Director of Special Asset Management	X	X	X	X	X	X

√: Memiliki Hubungan
X: Tidak Memiliki Hubungan
√: Has relation
X: Has no relation

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 15 ayat 17, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- Anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau;
- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, Pasal 10 ayat 15, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
- Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Concurrent Position Policy of Board of Commissioners

In accordance with the Company's articles of association, Article 15 paragraph 17, members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

- Members of Board of Directors of a State-Owned Enterprise, a Regional-Owned Enterprise, and a Private-Owned Business Entity, or other positions that may cause a conflict of interest and/or;
- Other positions in accordance with statutory provisions.

The Concurrent Position Policy Of Board Of Directors

In accordance with the Company's articles of association, Article 10 paragraph 15, members of Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

- Members of Board of Directors of a State-Owned Enterprises, a Regional-Owned Enterprise, and a Private-Owned Enterprise, or other positions that may cause a conflict of interest;
- Other structural and functional positions in the central and/or regional government agencies/institutions;
- Other positions in accordance with statutory provisions.

Recapitulation of Concurrent Positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	Jabatan di PPA Position at PPA	Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain Position at Other Company/Institution
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Krisna Wijaya	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Direktur LPPI Director of LPPI
Marwanto Harjowirjono	Komisaris Commissioner	-
Direksi Board of Directors		
Yadi Jaya Ruchandi	Direktur Utama President Director	Komisaris Utama PT PPA Kapital President Commissioner of PT PPA Kapital
Rizwan Rizal Abidin	Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi Director of Investment 1 & Restructuring	-
Adi Pamungkas Daskian	Direktur Invetasi 2 Director of Investment 2	-
JF Hasudungan	Direktur Special Asset Management Director of Special Asset Management	-

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Pelaporan

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya secara berkala melalui daftar khusus yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020

	Kepemilikan Saham Shareownership		
	Perusahaan Company	Entitas Anak dan Afiliasi Subsidiary and Affiliates	Perusahaan Lain (Lebih dari 5%) Other Company
Dewan Komisaris Board of Commissioner			
Krisna Wijaya (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Marwanto Harjowirjono (Komisaris) (Commissioner)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors			
Yadi Jaya Ruchandi (Direktur Utama)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Rizwan Rizal Abidin (Direktur Investasi 1 & Restrukturisasi)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Adi Pamungkas Daskian (Direktur Invetasi 2)	Nihil None	Nihil None	Nihil None
JF Hasudungan (Direktur Special Asset Management)	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Hingga akhir tahun buku 2021, Perusahaan dan Entitas Anak tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Perusahaan dan Entitas Anak juga tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Oleh karena itu, manajemen tidak memiliki saham baik saham Perusahaan maupun Entitas Anak.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dasar Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahunnya secara kolegial oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Penilaian realisasi kinerja Dewan Komisaris juga bersifat kolegial berdasarkan RKA dalam KPI yang dilakukan secara tahunan dan mandiri.

THE DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Reporting Policy

The Company requires members of the Board of Commissioners and Board of Directors to disclose their share ownership periodically through a special register containing information regarding share ownership, either directly or indirectly.

Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors as of December 31, 2020

Until the end of the 2021 financial year, the Company and its Subsidiaries had not traded their shares to the public. The Company and Subsidiaries also do not have a management share ownership program. Therefore, management does not own shares in either the Company or any of its Subsidiaries.

THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Performance Assessment of Board of Commissioners

Assessment Basis

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted annually and collegially by Shareholders at the GMS. The Board of Commissioners' performance assessment realization is collegial based on the RKA in KPI, conducted annually and independently.

Perusahaan telah memiliki kebijakan Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam Kontrak Manajemen *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris yang mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Berita Acara Pembagian Tugas Anggota-anggota Dewan Komisaris tahun 2021.

Kontrak Manajemen *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris tahun 2021 telah disetujui oleh RUPS tanggal 29 Januari 2021 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2021.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Dewan Komisaris juga melakukan penilaian independen terhadap pencapaian indikator penilaian kinerja.

Periode Penilaian

1 Januari 2021-31 Desember 2021

Pelaksana Penilaian

Dilaksanakan oleh Pemegang Saham.

Prosedur Penilaian

Proses penilaian terhadap Dewan Komisaris dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disepakati, yang kemudian dibandingkan dengan realisasi atau pencapaian pada akhir tahun buku. Penilaian Dewan Komisaris secara kolegal dilaksanakan oleh Pemegang Saham.

Kriteria dan Hasil Penilaian

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2021

The Company has a policy on the performance assessment of the Board of Commissioners listed in the Management Contract of Board of Commissioners' *Key Performance Indicator* which refers to:

1. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies;
2. The Company's Articles of Association;
3. Minutes of The Division of Duties of Board of Commissioners Members in 2021.

The Board of Commissioners' *Key Performance Indicators* Management Contract for 2021 has been approved by the GMS on January 29, 2021 and is an inseparable part of the Minutes of the 2020 RKAP Ratification GMS.

The performance assessment of Board of Commissioners is done collegially by Shareholders at the GMS. The Board of Commissioners also carries out an independent assessment of the achievement of performance assessment indicators.

Assessment Period

January 1, 2021-December 31, 2021

Assessor

Implemented by Shareholders.

Assessment Procedure

The Board of Commissioners' assessment is made against the Work Plan and Budget (RKA) and the agreed *Key Performance Indicators* (KPI), which are then compared with the realization or achievement at the end of the financial year. The assessment of the Board of Commissioners is collegially carried out by the Shareholders.

Assessment Criteria and Results

Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2021

No.	KPI	Target		Realisasi Realization	
		Satuan Unit	Bobot Weight	Satuan Unit	Skor Score
A. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat The Supervision and Direction Aspect					
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2022 Prepare the Work Plan and Budget and KPI of the Board of Commissioners for 2022	1 Dokumen Document	5,0	1 Dokumen Document	5,0
2	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Respond/give recommendations to Shareholders on:				
	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 2022 Company Work Plan and Budget	1 Surat Letter	5,0	1 Surat Letter	5,0
	Laporan Tahunan Perusahaan (<i>Audited</i>) Tahun 2020 Company Annual Report (Audited) 2020	1 Surat Letter	5,0	1 Surat Letter	5,0
	Analisis Kinerja Triwulan Perusahaan Tahun 2021 Company Quarterly Performance Analysis in 2021	3 Surat Letters	15,0	3 Surat Letters	15,0

No.	KPI	Target		Realisasi Realization	
		Satuan Unit	Bobot Weight	Satuan Unit	Skor Score
3	Persetujuan/Tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas usulan aksi korporasi oleh Direksi Written approval/response from the Board of Commissioners on the proposed corporate action by the Board of Directors	100%	10,0	100%	10,0
4.	Rapat Dewan Komisaris: Board of Commissioners Meeting:				
	Jumlah Rapat dan Tersedianya Risalah Rapat Number of Meetings and Availability of Meeting Minutes	12 Kali times	12,0	12 Kali times	12,0
	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	100%	5,0	100%	5,0
5	Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal (KAP, SPI, GCG) Follow-up monitoring of internal/external audit findings (KAP, SPI, GCG)	3 Dokumen Documents	6,0	3 Dokumen Documents	6,0
6	Kunjungan kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners working visit	3 Kali times	5,0	3 Kali times	5,0
Sub Total			68,0		68,0
B. Aspek Pelaporan Aspect of Reporting					
1	Laporan kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris atas pemenuhan portal ITMS Tahun 2020 Performance Report of the Board of Directors by the Board of Commissioners on the fulfillment of the ITMS portal in 2020	1 Dokumen Document	5,0	1 Dokumen Document	5,0
2	Laporan pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulanan Tahun 2021 Report on supervision and realization of the quarterly implementation of KPI the Board of Commissioners in 2021	3 Laporan Reports	6,0	3 Laporan Reports	6,0
3	Laporan pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020 2020 Board of Commissioners Supervisory Report	1 Laporan Report	10,0	1 Laporan Report	10,0
4	Evaluasi hasil kinerja KAP tahun 2020 Evaluation of KAP performance results in 2020	1 Laporan Report	5,0	1 Laporan Report	5,0
Sub Total			26,0		26,0
C. Aspek Dinamis/Lain-lain Dynamic/Other Aspect					
1	Peningkatan kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> , dll Competency improvement through seminars, workshops, etc.	3 kali times	3,0	11 kali times	12,0
2	Target GCG Dewan Komisaris GCG Targets of the Board of Commissioners	32,74 poin points	3,0	33,67 poin points	3,1
Sub Total			6,0		6,1
TOTAL			100		109,1

Penilaian Kinerja Direksi

Dasar Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegal maupun individual oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja oleh pemegang saham dilakukan dalam RUPS Tahunan tentang Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite of de charge*) kepada Direksi Perusahaan atas segala hasil pengurusan dan pengelolaan perusahaan yang telah dilakukan. Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

The Performance Assessment of Board of Directors

Assessment Basis

The assessment of the Board of Directors is made collegially and individually by the Shareholders. The performance assessment by the shareholders is carried out in the Annual General Meeting of Shareholders on the Accountability Report of Financial Statements. The GMS grants full discharge and releases the responsibility (*volledig acquite of de charge*) to The Company's Board of Directors for all the results of the Company's management that have been carried out. The Board of Directors' performance assessment indicators include the following aspects:

1. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Kontrak Manajemen tahun 2021;
2. Pencapaian Kinerja Operasional dan Keuangan tahun 2021;
3. Pelaksanaan implementasi GCG tahun 2021.

Pelaksana Penilaian

Dilaksanakan oleh Pemegang Saham.

Prosedur Penilaian

Proses penilaian terhadap Dewan Komisaris dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disepakati serta implementasi GCG. Ketiga indikator tersebut kemudian dibandingkan dengan realisasi atau pencapaian pada akhir tahun buku. Penilaian Direksi dilakukan secara kolektif dan individual oleh Dewan Komisaris.

1. Key Performance Indicators (KPI) Achievement for the 2021 Management Contract;
2. The Operational and Financial Performance Achievement in 2021;
3. The GCG implementation in 2021.

Assessor

Implemented by Shareholders.

Assessment Procedure

The Board of Commissioners' assessment was made against the Work Plan and Budget (RKA), the agreed Key Performance Indicators (KPI), and the implementation of GCG. The three indicators are then compared with the realization or achievement at the end of the financial year. The Board of Commissioners' assessment is carried out collegially and individually by the Board of Commissioners.

Kriteria dan Hasil Penilaian**Assessment Criteria and Results**

No	KPI	2021		2021 Audited	Proyeksi Skor Projected Score
		Bobot Weight	Target Target		
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia				
	A.1. Aspek Finansial A.1. Financial Aspect				
1	Interest Bearing Debt to Invested Capital Interest Bearing Debt to Invested Capital	2	64,20%	35,94%	2.20
2	Cash From Operation Cash From Operation	2	Rp115,2 M	Rp1,92T	2.20
3	Laba (rugi) tahun berjalan Income for the current year	2,5	Rp122,6M	Rp165,13M	2.75
4	ROIC dengan tingkat jangka panjang $ROIC \geq WACC$ ROIC with long term $ROIC \geq WACC$	2	-0,79%	-3.71%	0.43
	A.2. Aspek Operasional A.2. Operational Aspect				
5	Pelaksanaan program <i>asset swap</i> atau restrukturisasi aset Implementation of <i>asset swap</i> program or asset restructuring	2,5	Rp 200M	Rp268,9M	2.75
6	Porsi Laba Bersih dari NPL <i>recovery</i> sebesar 5% Net Profit Portion from NPL at%	2,5	5%	5,69%	2.75
7	Mendapatkan mandat <i>advisory</i> Acquiring <i>advisory</i> mandate	2,5	2 (dua Two)	3 (tiga Three)	2.75
	A.3. Aspek Sosial A.3. Social Aspect				
8	Jumlah NPL Total NPL	2	Rp 1 T	Rp 10 T	2.20
9	Penyelamatan lapangan kerja karyawan BUMN Titip Kelola Saving job opportunities for SOE employees	2	50 orang Employees	2 orang Employees	0.08
	Jumlah Total	20			18.11
B	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovattion				
10	Penerbitan PP Inbreng Publishing PP Inbreng	6	100%	90%	5.40

No	KPI	2021		2021 Audited	Proyeksi Skor Projected Score
		Bobot Weight	Target Target		
11	Konsolidasi Laporan Keuangan ke Danareksa dan penyerahan/konsolidasi kebijakan-kebijakan internal lainnya dalam hal investasi, Manajemen risiko, SDM Consolidated Financial Statements to Danareksa and submission/consolidation of other internal policies in terms of investment, risk management, HR	6	100%	100%	6.00
12	Business Plan BUMN Titip Kelola dan/atau Perolehan Perjanjian Restrukturisasi/ Investasi/Kerjasama Operasi SOE Business Plan to Manage and/or Obtain Restructuring/Investment/Cooperation Agreements	10	Min 10 BUMN Titip Kelola Min 10 SOEs Restructuring	21	11.00
13	Penyusunan Skema pengambilan NPL yang dapat dijalankan dan/atau Pilot project untuk NPL Perbankan Preparation of a feasible NPL taking scheme and/or Pilot project for Banking NPL	10	2 (dua)	3	11.00
14	MOU dengan calon investor MOU with prospective investors	8	2 (dua)	3	8.80
Jumlah Total		40			42.20
C Kepemimpinan Teknologi Leadership in Technology					
15	Diagnostic analytical	4	Dec-21	Nov-21	4.40
16	Pelaksanaan rencana konsolidasi sistem akuntansi dan sistem informasi ke Danareksa grup secara bertahap Gradual implementation of the plan to consolidate accounting systems and information systems to the Danareksa group	3	Triwulan IV 2021 4 th Quarter, 2021	Dec-21	3.00
17	Penyelesaian suatu roadmap/rancangan berupa sistem TI Completion of a roadmap/design in the form of an IT system	3	Triwulan IV 2021 4 th Quarter, 2021	Jan-21	3.30
Jumlah Total		10			10.70
D Peningkatan Investasi Increase in Investment					
18	Mendapatkan alternatif pendanaan untuk investasi, penyelesaian reprofiling kewajiban PPA Acquiring alternative funding for investment, completion of reprofiling of PPA obligations	10	Dec-21	Oct-21	11.00
19	Kesesuaian dengan pedoman investasi baru Adherence to new investment guidelines	10	Dec-21	Dec-21	10.00
Jumlah Total		20			21.00
E Pengembangan Talenta Talent Development					
20	Persetujuan Holding atas Standardisasi Model Kompetensi per sektor untuk pengembangan pegawai melalui Danareksa Learning Institute Approval from Holding for Standardization of Competency Models per sector for employee development through Danareksa Learning Institute	2	Jun-21	Dec-21	2.00
21	Training SDM pengembangan kompetensi Competency development HR training	3	Diikuti sekurang- kurangnya seluruh karyawan minimal 1 kali dalam 1 tahun Followed by all employees at least 1 time in 1 year	100%	3.00

No	KPI	2021		2021 Audited	Proyeksi Skor Projected Score
		Bobot Weight	Target Target		
22	% perempuan dalam <i>talent management</i> (BOD-1 dan direksi Anak Perusahaan) % of women in talent management (BOD-1 and directors of Subsidiaries)	2	Minimal 10% porsi perempuan dalam <i>talent management</i> Minimum 10% in talent management are women	16%	2.20
23	% milenial (<40 tahun) dalam <i>top talent</i> % of millennials (<40 years) in top talent	3	Minimal 10% porsi milenial (<40 Tahun) dalam <i>Top Talent</i> Minimum 10% in Top Talent is millennial (<40 Years)	42%	3.30
Jumlah		10			10.50
Total					102,51

Penilaian penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan melakukan *assessment* implementasi GCG untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada alat uji keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 pada 6 Juni 2012, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki porsi tersendiri terkait sejauh mana Dewan Komisaris memenuhi standar penerapan GCG.

GCG Assessment for Board of Commissioners and Board of Directors Aspect

The Company assesses the GCG implementation for the Board of Commissioners and Directors as referred to the Minister of SOEs Secretary Decree No. SK-16/S. MBU/2012, dated June 6, 2012, Board of Commissioners has a distinctive portion related to how far the Board of Commissioners fulfills GCG implementation standards.

Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2021

Jenis Penilaian Type of Assessment	: External Assessment External
Assessor/Penilai Assessor	: PT Adikarya Gemilang Solusindo
Periode Penerapan Implementation Period	: 1 Januari – 31 Desember 2021 January 1 – December 31, 2021
Tahun Buku Fiscal Year	: 2021
Tempat Place	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Jakarta
Waktu Pengukuran Time of Measurement	: 1 Januari – 21 Februari 2022 January 1 – December 21, 2022
Waktu Terbit Laporan Report Publication	: 21 Februari 2021 February 21 2021

Assessment of GCG Implementation for the Measuring Year 2021

Kriteria dan Hasil Penilaian

Criteria and Assessment Results

	Aspek Aspect	Bobot Weight	Skor Score	% Capaian Achievement
I.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,84	97,76%
II.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,67	96,32%
III.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Trusty	35,00	33,40	95,43%
IV.	Direksi Board of Directors	35,00	33,56	95,88%
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,63	95,90%
VI.	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,63	12,50%
SKOR KESELURUHAN OVERALL SCORE		100,00	91,73	91,73%
Peringkat Kualitas Penerapan Gcg GCG Implementation Quality Rating			Sangat Baik Very Good	

Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG tahun 2021

GCG Implementation Assessment Results in 2021

Tahun	Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilai Assessor	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score		
			Aspek Dewan Komisaris Board of Commissioners Aspect	Aspek Direksi Board of Directors Aspect	Kategori Category
2021	Assessment	PT Adikarya Gemilang Solusindo	33,40	33,56	"Sangat Baik" "Very Good"
2020	Self Assessment	Tim Internal Internal Team	33,673	31,605	"Sangat Baik" "Very Good"
2019	Assessment	PT Adikarya Gemilang Solusindo	32,74	32,41	"Sangat Baik" "Very Good"
2018	Self Assessment	Tim Internal Internal Team	32,291	31,869	"Sangat Baik" "Very Good"
2017	Assessment	PT Icon Global Solusi (Independen) (Independent)	32,1671	31,8844	"Sangat Baik" "Very Good"

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan

- Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan pada pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Policy

- Based on Article 27 paragraph (1) of Law No 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders, and in Article 27 paragraph (2), it is stated that in cases where the SOE Minister acts as the General Meeting of Shareholders, then it is the Minister that shall determine the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners.
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-10/MBU/10/2020 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Board Supervisor of State Owned Enterprises.

- c. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Nominasi

Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, prosedur pengangkatan Dewan Komisaris adalah:

- Penjaringan oleh Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputy;
- Penilaian persyaratan formal dan persyaratan lain oleh Deputy;
- Usulan pengangkatan bagi calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
- Penetapan melalui Keputusan Menteri BUMN atau RUPS, setelah calon menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap oleh Dewan Komisaris.

- c. Based on Article 15 paragraph (1) of Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is carried out by the GMS, and paragraph (2) states that in the event that the Minister of State-Owned Enterprises acts as the General Meeting of Shareholders, then the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be determined by the Minister.
- d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-11/MBU/07/2021 on the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Nomination Procedure

Board of Commissioners

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-10/MBU/10/2020 on Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the procedure for the appointment of the Board of Commissioners is:

- Selection by the Minister, Deputy Minister, Secretary of the Ministry, and/or Deputy;
- Formal requirement and other requirement assessment by the Deputy;
- Proposal of appointment for candidates declared to meet the requirements;
- Determination through the Decree of the Minister of SOEs or the GMS, after the candidate signs a statement to resign from other positions that are prohibited from being held concurrently by the Board of Commissioners.

Direksi

Board of Directors

Directors

Board of Directors

Prosedur Nominasi Direksi hingga Penetapan

Procedure for Nomination of Directors to Appointment

Pengajuan dan Penjaringan Bakal Calon Direksi

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari personal yang pernah menjabat Direksi BUMN namun tidak lagi menjabat, Dewan Komisaris, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN dan sumber lain. Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Submission and Selection of Prospective Directors

The nomination of the names of the candidates for the Board of Directors is based on the sources of the candidates consisting of personnel who have served as Directors of SOEs but are no longer serving, the Board of Commissioners, Talents of SOE, Talents of the Ministry of SOEs and other sources. The names of the Directors candidate are selected by the Ministry of SOEs.

Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

Fit and Proper Test (UKK)

A candidate who will be nominated as a candidate for a member of the Board of Directors is someone who has been declared to have met the Formal and other Criteria and has passed the Fit and Proper Test. The test will be given by professional institution appointed by the Minister.

Usulan Pengangkatan

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai UKK dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan.

Appointment Proposal

Candidates who have received a recommendation from the Fit and Proper Test team can be appointed as Directors of the Company.

Penetapan

Penetapan dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

Determination

The determination is made through the GMS mechanism as regulated under the Financial Services Authority Regulation and other related regulations.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

THE REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER- 04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/MBU/ 06/2018, PER-01/MBU/05/2019 dan PER-12/ MBU/11/2020 serta Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha atas nama Menteri BUMN No. S-496/ MBU/ D6/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 Hal: Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2019.

Policy

The remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors referred to SOE Ministerial Regulation No. PER04/MBU/2014 regarding Guidelines to Determine The Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended by PER-02/MBU/06/2016, PER-01/MBU/06/2017, PER-06/ MBU/06/2018 and PER-01/MBU/05/2019 and Letter of Deputy for Restructuring and Business Development on behalf of the Minister of SOE No. S-496/MBU/ D6/05/2019, dated May 31, 2019, regarding the Submission of The Income Determination for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) in 2019.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun, Perusahaan menganggarkan rencana kenaikan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya disesuaikan dengan pertumbuhan Perusahaan, besarnya target yang ditetapkan serta perkembangan *salary* bagi CEO di *market*.

1. Berdasarkan pencapaian kinerja dan KPI tahunan, kemampuan keuangan Perusahaan serta kewajaran besarnya penghasilan pada industri/perusahaan sejenis di *market* Direksi mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada RUPS;
2. Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris selanjutnya Dewan Komisaris mengusulkan besaran penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan dalam RUPS Laporan Tahunan;
3. RUPS/Menteri menetapkan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Jenis Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

The Procedure of Proposal Until The Determination of Board of Commissioners and Directors Remuneration

In the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) every year, the Company makes a budget plan to increase the income for the Board of Directors and Board of Commissioners, the amount of which is adjusted to the Company's growth, the amount of the target set and salary development for CEOs in the market.

1. Based on the achievement of performance and annual KPI, the Company's financial capability and the fairness of the amount on income in similar industries/companies in the market, the Board of Directors proposes to the Board of Commissioners to then proposes to the GMS.
2. Based on Board of Directors' proposal and Board of Commissioners' further consideration, the Board of Commissioners proposes the amount of income for Directors and Commissioners to the GMS/Minister to be determined in the GMS on Annual Report.
3. GMS/Minister determines income for Board of Directors and Board of Commissioners.

Types of Income of Directors and Board of Commissioners

No.	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners
1	Gaji yang besarnya ditetapkan oleh RUPS/Menteri. Salary, with the amount determined by the GMS/Minister.	Honorarium yang besarnya sesuai dengan komposisi faktor jabatan. Honorarium, in which the amount is in accordance with the composition of position factor.
2	Tunjangan: • Tunjangan hari raya sebesar 1 kali Gaji per tahun; • Tunjangan perumahan sebesar 40% dari Gaji maksimal Rp27.500.000; • Asuransi purna jabatan besarnya premi per tahun 25% kali Gaji setahun. Allowance: • Religious holiday allowance of 1 times annual Salary; • Housing allowance of 40% of salary at a maximum of Rp27,500,000; • Full-time insurance premium per year of 25% times of annual Salary.	Tunjangan • Tunjangan hari raya sebesar 1 kali Honorarium per tahun; • Tunjangan transportasi sebesar 20% dari Honorarium; • Asuransi purna jabatan besarnya premi per tahun 25% kali Honorarium setahun. Allowance • Religious Holiday allowance of 1 times annual Honorarium. • Transportation allowance of 20% of Honorarium. • Full-time insurance premiums per year of 25% times annual Honorarium.
3	Fasilitas: • Fasilitas kendaraan berupa 1 unit Toyota Alphard 2500 cc beserta biaya perbaikan dan operasional kendaraan; • Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan rawat inap, penggantian rawat jalan dan <i>medical check up</i>; • Fasilitas bantuan hukum berupa pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum. Facilities: • Vehicle facilities in the form of 1 unit of Toyota Alphard 2500 cc along with vehicle repair and operational costs; • Health facilities in the form of inpatient health insurance, outpatient reimbursement, and medical check-up; • Legal aid facilities in the form of legal services/legal consultant office financing.	Fasilitas • Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan rawat inap, penggantian rawat jalan dan <i>medical check up</i>; • Fasilitas bantuan hukum berupa pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum. Facilities • Health facilities in the form of inpatient health insurance, outpatient reimbursement and medical check-ups. • Legal aid facilities in the form of legal services/legal consultant office financing.
4	Tantiem/insentif kinerja yang besarnya ditetapkan RUPS/Menteri. Tantiem/performance incentives, in which the amount is determined by the GMS/Minister.	Tantiem/insentif kinerja besarnya sesuai dengan komposisi faktor jabatan. Tantiem/performance incentives, in which the amount is in accordance with the composition of occupational factor

No.	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners
5	Lain-lain: - Hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja; - Biaya operasional untuk biaya komunikasi, pakaian dinas, keanggotaan perkumpulan profesi, <i>club membership</i> dan biaya representasi yang besarnya sesuai dengan anggaran dalam RKAP; - Pajak atas Gaji dan Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja menjadi beban penerima; - Diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Others : - Annual leave entitlement of 12 working days; - Operational costs for communication, official clothing, membership of professional associations, club membership and representation fees, in which the amount is in accordance with the budget in the RKAP; - Taxes on Salaries and Benefits are borne by the Company, while taxes on tantiem/performance incentives are borne by the recipient; - Included in BPJS Employment and BPJS Health programs.	Lain-lain: Biaya operasional untuk pakaian dinas dalam perkumpulan profesi yang besarnya sesuai dengan anggaran dalam RKAP Others: Operational costs for official clothing in professional associations, in which the amount is in accordance with the budget in the RKAP.
6	Pajak atas Honorarium dan Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja menjadi beban penerima Taxes on Honorarium and Allowances are borne and become the Company's expense, while the taxes on Tantiem/Performance Incentives are borne by the recipient.	

Realisasi Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021 **Realized Income of Directors and Board of Commissioners in 2021**

Direksi (4 orang) Board of Directors (4 persons)	Nilai (Rp) Amount	Dewan Komisaris (2 orang) Board of Commissioners (2 persons)	Nilai (Rp) Amount
Gaji Salary	6.275.052.273	Honorarium	1.816.020.000
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	1.088.750.000	Tunjangan Transport Transport Allowance	363.204.000
THR Religious Allowance	477.900.000	THR Religious Allowance	151.335.000
Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	60.000.000	Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	40.000.000
Asuransi Purna Jabatan Full-time insurance premium	1.885.050.000	Asuransi Purna Jabatan Full-time insurance premium	455.625.000
Kesehatan Rawat Jalan Outpatient Reimbursement	48.759.499	Kesehatan Rawat Jalan Outpatient Reimbursement	81.244.378
Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan Inpatient Insurance and BPJS Health	87.180.825	Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan Inpatient Insurance and BPJS Health	50.740.450
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	254.398.078	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	72.329.846
Uang Saku dan Transport Perjalanan Dinas Pocket Money and Transport for Business Trip	179.947.000	Uang Saku dan Transport Perjalanan Dinas Pocket Money and Transport for Business Trip	48.382.000
Operasional Kendaraan Office Car	593.863.636	Operasional Kendaraan Office Car	-
Tantiem (Netto) Tahun Sebelumnya Tantiem (Net) Previous Year	5.993.474.382	Tantiem (Netto) Tahun Sebelumnya Tantiem (Net) Previous Year	2.378.775.809
Pajak Penghasilan Income Tax	6.833.999.993	Pajak Penghasilan Income Tax	1.927.156.916
Jumlah Penghasilan Direksi Total Earning of Board of Directors	23.778.375.686	Jumlah Penghasilan Direksi Total Earning of Board of Commissioners	7.384.813.399

Organ Pendukung Dewan Komisaris

THE SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

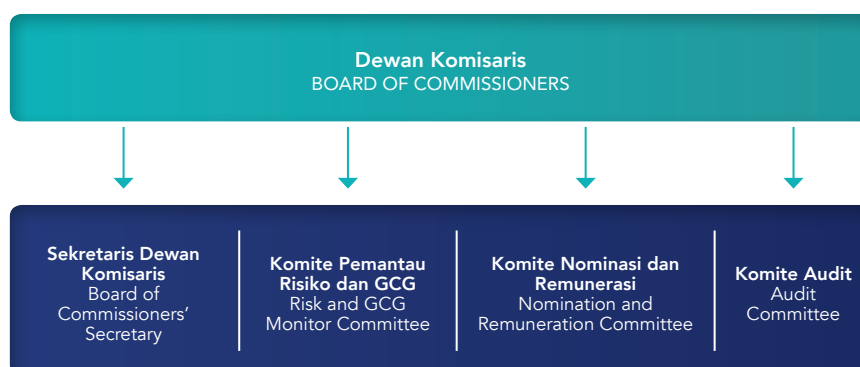
Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Dewan Komisaris membentuk organ pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organ pendukung tersebut terdiri Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Komite Pemantau Risiko dan GCG. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

The Board of Commissioners forms the supporting organs to assist in implementing its duties and functions. The supporting organs consist of the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Risk Monitoring and the GCG Committee. In implementing its duties and responsibilities, the Board of Commissioners also performs the remuneration function for the Board of Commissioners and Board of Directors.

DEWAN KOMISARIS DAN ORGAN PENDUKUNG

Board of Commissioners and Supporting Organs



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Amanat Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021

Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

The mandate of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Regulation of SOE Minister N: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 in conjunction No: PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 juncto No: PER-14/MBU/10/2021 October 29, 2021

The Requirements for Secretary of Board of Commissioners

The requirements that shall be fulfilled by Secretary of Board of Commissioners as Supporting Structure of the Board of Commissioners are among others:

1. Understanding the Company's managerial, supervisory, and development system;
2. Having good integrity;
3. Understanding the secretariat function;
4. Having good communication and coordination skills.

Terms of Tenure

The tenure of the Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board is determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board for a maximum of 3 (three) years. However, it can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without reducing the rights of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss him/her at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary to the Board of Commissioners

Diah Triana

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Periode Jabatan: 30 November 2020 - 30 November 2025, Periode Ke-1
Term of Office: November 30, 2020 - November 30, 2025, 1st Period

Warga Negara Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	54 tahun pada tahun buku 2021 54 years in the financial year 2021
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Bangkalan, 6 Januari 1968 Bangkalan, January 6, 1968
Domisili Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 17/KEP.KOM/PPA/XI/2020 tanggal 30 November 2020 Decree of the Board of Commissioners No. 17/KEP.KOM/PPA/XI/2020 on November 30, 2020
Pendidikan Educational Background	Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen Universitas Bangkalan (1990) Bachelor Degree in Management Economics from Bangkalan University (1990)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pengendalian Sub Kelompok Keasdepan Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian BUMN (9 Juni 2020 – April 2021) • Penata Kelola Perusahaan Negara Muda/Sub Koordinator pada Keasdepan Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian BUMN (April 2021 – Sekarang) • Control of the Keasdepan Sub-group in the Food and Fertilizer Industry, Ministry of SOEs (June 9 2020 – April 2021) • Young State Enterprise Governance/Sub Coordinator of the Keasdepan Food and Fertilizer Industry, Ministry of SOEs (April 2021 – Present)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak ada None

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

The Secretary of Board of Commissioners Duty and Function

The Secretary of the Board of Commissioners is in charge of helping the Board of Commissioners carry out its supervisory function. Detail explanation of the Secretary of the Board of Commissioners' functions is as follows:

1. Preparing Board of Commissioners meeting including the briefing sheet.
2. Preparing Board of Commissioners minutes of meeting according to the Company's Articles of Association.
3. Administering Board of Commissioners' documents including the incoming and outgoing letters, minutes of meeting of Board of Commissioners meeting and Management meeting, and other important documents.
4. Preparing Board of Commissioners' work and budget Plan.
5. Preparing Board of Commissioners' report drafts.
6. Implementing other duties assigned by the Board of Commissioners'

In addition to discharging the above duties, the Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board as the head of the Sekretariat, does the following tasks:

1. Ensure that the Board of Commissioners/Supervisory Board complies with the laws and regulations and applies the principles of GCG;
2. Provide information needed by the Board of Commissioners/Supervisory Board periodically and/or at any time if requested;

3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

3. Coordinate members of the Committees, if necessary in order to smoothen the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Serve as a liaison officer for the Board of Commissioners/Supervisory Board with other parties.

Competency Development of the Secretary of the Board of Commissioners

Throughout 2021, the Secretary to the Board of Commissioners participated in competency improvement programs as follows:

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Training and Education	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Diah Triana	Pelatihan Publik Public Training	Risk Matrix Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Risk Matrix of Non-Bank Financial Services Institutions	Online/19 Maret 2021 Online/ March 19, 2021	PT PPA
	Pelatihan Publik Public Training	Tantangan Pengelolaan Fiscal di Masa Pandemi COVID-19 Fiscal Management Challenges During the COVID-19 Pandemic	Online/5 November 2021 Online/ November 5, 2021	PT PPA

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Besaran dan jenis penghasilan yang diperoleh Sekretaris Dewan Komisaris adalah meliputi honorarium sebesar 15% dari gaji Direktur Utama, tunjangan *transport* maksimal 20% dari honorarium dan tunjangan komunikasi maksimal 5% dari honorarium serta diberikan fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan. Fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan diberikan dengan pertimbangan kemampuan Perusahaan dan kewajaran anggaran.

The Remuneration for Secretary of Board of Commissioners

The remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners is stipulated by the Board of Commissioners by considering the Company's condition according to Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 regarding The Supporting Organs under the Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs. The amount and the type of remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners include the honorarium that is paid 15% of the President Director's salary, transportation allowance maximum of 20% of honorarium, and communication allowance that is a maximum of 5% of honorarium and also receive the employment facilities and the annual performance incentives. The employment facilities and the annual performance incentives are granted by considering the Company's condition and budget fairness.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh organ pendukung Dewan Komisaris, realisasi pencapaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2021 mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

The Performance of Assessment by Board of Commissioners

With all the duties carried out by the supporting organs of Board of Commissioners, the realization of the Secretary of Board of Commissioners Performance in 2021 reached 100% with Very Good criteria.

KOMITE AUDIT

Amanat Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan ditekankan pembentukannya berdasarkan Penjelasan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

AUDIT COMMITTEE

The mandate of Article 70 paragraph (1) of Law No. 19 of 2003 concerning SOE with emphasis on its formation based on the Elucidation of Article 121 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of SOE No: PER-12/MBU/2012 dated August 24 2012 in conjunction with No: PER-06/MBU/04/2021 dated April 13 2021 juncto No: PER-14/MBU/10/ 2021 on October 29, 2021.

Pedoman Kerja Komite Audit

Perusahaan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja berupa Piagam Komite Audit yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Piagam Komite Audit Perusahaan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (Charter) Komite Audit dan Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko dan GCG, dan Piagam (Charter) Komite Audit Edisi 2014.

Dalam Piagam Komite Audit diatur struktur dan persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat Komite Audit, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas atau aktivitas Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup integritas, objektif dan independen, kerahasiaan, serta kompetensi.

Persyaratan Komite Audit

Mengacu pada pedoman kerja, anggota Komite Audit harus memiliki persyaratan:

1. Mempunyai kemampuan profesional dalam bidang akuntansi, manajemen operasional, sistem pengendalian internal, dan pemahaman mengenai prosedur audit secara umum.
2. Tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *Conflict of Interest* ataupun dampak negatif;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam hal melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif; dan
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Rincian ketentuan terkait dengan pengangkatan anggota Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Komite Audit Perusahaan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Profil Anggota Komite Audit dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Audit;
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama;

The Audit Committee Charter

The Company has Work Guideline and Mechanism in the form of an Audit Committee Charter that is continuously improved and updated based on the progress/amendment of the prevailing legal framework as well as the up-to-date condition. The Audit Committee Charter is prepared according to prevailing law and regulation and has been stipulated by the Board of Commissioners on December 19, 2014, according to Board of Commissioners Decree No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 regarding the Audit Committee Charter and The Risk Oversight and GCG, and the Audit Committee Charter 2014 Edition.

The Audit Committee Charter governs membership structure and requirements, terms of office, responsibility, authority, Audit Committee Meetings, reporting obligation, and implementation of Audit Committee duty or activity. In addition, audit Committee Ethical Codes include integrity, objectivity and independence, confidentiality, and competency.

The Audit Committee Requirements

The Audit Committee members shall fulfill the requirements, as follows:

1. Having professional capability in accounting, operational management, internal control system, and understanding on audit procedure generally.
2. Not having any personal interest or affiliation that may cause Conflict of Interest or any negative impact;
3. Having good communication skill, particularly in analyzing several issues and being capable to provide constructive suggestions; and
4. Being capable to allocate the sufficient time to complete the duties.

The Audit Committee Appointment and Dismissal

According to the Audit Committee Charter, the Audit Committee appointment and dismissal are done by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders. The appointment of Audit Committee members shall pass a fit and proper test process based on the prevailing law in order to ensure the capability to implement the role appropriately.

Education and career experience qualifications are as follows:

1. Audit Committee in the Company has sufficient education and career experience qualifications to support the implementation of duties as Audit Committee.
2. Audit Committee Members recruitment process is done by Board of Commissioners by considering competency, expertise and integrity, as well as team work capability.

3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris;
4. Seluruh Anggota Komite Audit Perusahaan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik;
5. Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perusahaan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai ketua Komite Audit, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perusahaan, masa jabatan Komite Audit Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun dengan periodisasi pertama maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode kedua paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Audit Tahun 2020

Anggota Komite Audit Perusahaan di tahun 2021 berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merupakan Komisaris Independen Perusahaan, 1 (satu) Wakil Ketua Komite yang merupakan Komisaris Perusahaan dan 2 (dua) anggota yang berasal dari luar manajemen.

3. Board of Commissioners conducted interview to further observe the Audit Committee member candidate. Next, the Board of Commissioners holds meeting to determine the appointed Audit Committee member candidate. Furthermore, the stipulation and the appointment of Audit Committee member candidate is done under Board of Commissioners Decree.
4. Every Audit Committee Member has integrity, competency, and good financial reputation.
5. According to the Company's Audit Committee Charter, the terms of Audit Committee member who is not appointed from the Company's Board of Commissioners members is maximum 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years terms, by not reducing rights of the Board of Commissioners to dismiss anytime.

The dismissal of Audit Committee members can be done if membership terms of the respective member has been ended and dismissed under the Board of Commissioners Decree, it is dismissed because of the consideration for not fulfilling the expected performance and/or being not competent in carrying out the duties. However, for the Company's Board of Commissioners Member who serves as Chairman of Audit Committee, the terms will be ended automatically if the term as Board of Commissioners member in the Company has been ended.

Terms of Tenure

According to the Company's Audit Committee Charter, the terms of the Audit Committee member who is not appointed by the Company's Board of Commissioners members is a maximum of 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years terms, by not reducing rights of the Board of Commissioners to dismiss anytime.

The dismissal of Audit Committee members can be done if membership terms of the respective member have been ended and dismissed under the Board of Commissioners Decree. It is dismissed because of the consideration for not fulfilling the performance and/or not being competent in carrying out the duties. However, for the Company's Board of Commissioners Member who serves as Chairman of the Audit Committee, the terms will be ended automatically if the term as Board of Commissioners member in the Company has been ended.

The Number, Composition, and Structure of Audit Committee in 2020

The number of members of the Company's Audit Committee in 2020 4 (four) persons, consisting of 1 (one) Chairman of the Committee who is also an Independent Commissioner of the Company, 1 (one) Audit Committee Deputy Chairman who is also Commissioner of the Company, and 2 (two) members who come from outside management.

Sesuai SK-03/KEP.KOM/PPA/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) terjadi perubahan untuk Anggota Komite Audit Perusahaan menjadi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merupakan Komisaris Independen Perusahaan dan 2 (dua) anggota yang berasal dari luar manajemen.

Komposisi dan susunan Komite Audit di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In accordance with SK-03/KEP.KOM/PPA/VII/2021 dated July 15, 2021, concerning Changes in the Composition of the Audit Committee Members of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), the composition of the Audit Committee changed with 3 (three) members, consisting of 1 (one) who was also an Independent Commissioner and 2 (two) members from outside the management.

The composition and structure of the Audit Committee throughout 2020 are as follows:

Susunan Komite Audit Tahun 2021

The Audit Committee Composition January 1 - December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Krisna Wijaya	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen Audit Committee Chairman Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14/ KEP.KOM/PPA/V/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Board of Commissioners Decree No. 14/ KEP. KOM/PPA/V/2020 dated October 13, 2020	13 Oktober 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris October 13, 2020 – the end of Board of Commissioners' tenure	Ke-1 1 st
Marwanto Wirjowiryo	Wakil Ketua Komite Audit/ Komisaris Audit Committee Deputy Chairman/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14/ KEP.KOM/PPA/V/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Board of Commissioners Decree No. 14/ KEP. KOM/PPA/V/2020 dated October 13, 2020	13 Oktober 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris October 13, 2020 – the end of Board of Commissioners' tenure	Ke-1 1 st
Awal Susmanto	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen Audit Committee Member/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/ KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Board of Commissioners Decree No. 08/ KEP. KOM/PPA/IV/2020 dated April 20, 2020	20 April 2020 – 20 April 2023 April 20, 2020 – April 20, 2023	Ke-1 1 st
Ahmad Malkan Lubis	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen Audit Committee Member/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/ KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Board of Commissioners Decree No. 08/ KEP. KOM/PPA/IV/2020 dated April 20, 2020	20 April 2020 – 20 April 2023 April 20, 2020 – April 20, 2023	Ke-1 1 st

Profil Komite Audit

Krisna Wijaya

Ketua Komite Audit/Komisaris Independen

Profil lengkap disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Marwanto Wirjowiryo

Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris

Profil lengkap disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Audit Committee Profile

Krisna Wijaya

Chairman of the Audit Committee/Independent Commissioner

His full profile is presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Marwanto Wirjowiryo

Deputy Chairman of the Audit Committee/Commissioner

His full profile is presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

**AWAL SUSMANTO**

Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Member of the Audit Committee/ Independent Party

20 April 2020-20 April 2023, Periode Ke-1
April 20, 2020-April 20, 2023, 1st Period

Warga Negara Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	38 tahun pada tahun buku 2021 38 years in fiscal 2021
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Kebumen, 11 Juli 1984 Kebumen, July 11, 1984
Domisili Domicile	Serang, Banten Serang, Banten
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Decree of the Board of Commissioners No. 08/KEP.KOM/PPA/IV/2020 April 20, 2020
Pendidikan Educational Background	Diploma (D IV) bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2010) Diploma (D IV) in Accounting from the State College of Accountancy (2010)
Sertifikasi Profesi Profession Certificate	• Sertifikasi CRMP,PPM tahun 2019 • Auditor Muda, BPKP tahun 2018 • Infografis, GCG, RM tahun 2017 • 2019 CRMP,PPM Certification • Young Auditor, BPKP 2018 • Infographics, GCG, RM in 2017
Pengalaman Kerja Work Experience	• Inspektorat Kementerian BUMN (2013-sekarang) • Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Agustus-November 2017) • Komite Audit PT PELNI (2012-Juli 2017) • Sekretariat Kementerian BUMN (2005-2013) • Inspectorate (2013-Present) at Ministry of SOEs • Risk Policy Committee (August-November 2017) at PT PELNI • Audit Committee (2012-July 2017) at PT PELNI • Secretariat (2005-2013) at Ministry of SOEs
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Merangkap sebagai Inspektorat Kementerian BUMN Concurrently as Inspectorate of the Ministry of SOEs
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Has affiliation with Major/Controlling Shareholders.



AHMAD MALKAN LUBIS

Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Member of the Audit Committee/Independent Party

20 April 2020-20 April 2022, Periode Ke-2
April 20, 2020 - April 20, 2022, 2nd Period

Warga Negara Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	68 tahun pada tahun buku 2021 68 years in fiscal 2021
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Medan, tanggal 15 Maret 1953 Medan, March 15, 1953
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat Depok, West Java
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Decree of the Board of Commissioners No. 08/KEP.KOM/PPA/IV/2020 April 20, 2020
Pendidikan Educational Background	• Doktor Ekonomi pada University of Maryland, Amerika Serikat (1993) • Master of Art Ekonomi dari Virginia Polytechnic Institute and State University di Virginia, Amerika Serikat (1988) • Sarjana bidang Ekonomi dari University of the District of Columbia, Amerika Serikat (1986) • Doctoral Degree in Economics from the University of Maryland, United States (1993) • Master of Art Degree in Economics from Virginia Polytechnic Institute and State University in Virginia, United States (1988) • Bachelor Degree in Economics from the University of the District of Columbia, United States (1986)
Sertifikasi Profesi Profession Certificate	• - • -
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Tim Sistem Investasi <i>Online Single Submission</i> (OSS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (September 2017 – Mei 2018) • Sekretaris Tim Nasional Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) (Januari 2014 – Desember 2014) • Penasihat ASEAN Connectivity Through Trade and Investment (ACTI) (September 2013 – Agustus 2014) • Penasihat Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI) (April 2013 – September 2013) • Member of the Online Single Submission Investment System (OSS) Team, Coordinating Ministry for Economic Affairs (September 2017 – May 2018) • Secretary of the National Logistics System National Team (SISLOGNAS) (January 2014 – December 2014) • Advisor to ASEAN Connectivity Through Trade and Investment (ACTI) (September 2013 – August 2014) • Advisor to Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI) (April 2013 – September 2013)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak ada None

Independensi Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris dan dua anggota profesional lainnya berasal dari luar Perusahaan serta mempunyai latar belakang keuangan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang industri Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Audit tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Audit pada saat pengangkatan tahun 2021 yang dijabarkan aspek independensi sebagai berikut:

Indikator Independensi Komite Audit

Aspek Independensi Independency Aspect	Krisna Wijaya	Marwanto Wirjowiryo	Awal Susmanto	Ahmad Malkan Lubis
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	X	X	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi Having managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated companies	X	X	X	X
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Having shares ownership in the Company	X	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Having family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Audit Committee members	X	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serving in a leadership position at a political party or local Government officials	X	X	X	X

√: Memiliki Hubungan | Has relation
X: Tidak Memiliki Hubungan | Has no relation

Audit Committee Independency

Audit Committee is chaired by one Member of Board of Commissioners and two professionals from external Company who have the Financial and Engineering background in accordance with the Company's industry. In performing their duties, the Audit Committee works professionally and independently.

Members of Audit Committee have fulfilled the requirements in terms of quantity, composition, criteria, competency, and independency in accordance with the prevailing laws and regulations. In order to strengthen/support the implementation of provisions on Audit Committee's independence as mentioned above, a Statement of Independency of Audit Committee at the time of appointment in 2018 is prepared that outlines the independency aspect as follows:

Audit Indicator of Independency of Audit Committee

Aspek Independensi Independency Aspect	Krisna Wijaya	Marwanto Wirjowiryo	Awal Susmanto	Ahmad Malkan Lubis
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	X	X	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi Having managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated companies	X	X	X	X
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Having shares ownership in the Company	X	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Having family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Audit Committee members	X	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serving in a leadership position at a political party or local Government officials	X	X	X	X

√: Memiliki Hubungan | Has relation
X: Tidak Memiliki Hubungan | Has no relation

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/ XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

Audit Committee Duty and Responsibility

According to provisions in The Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number PER-12/MBU/2012 regarding The Supporting Structure under Board of Commissioners/Supervisory Board in SOE, the main function of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory function, namely to ensure that the Company is effectively and efficiently managed. In implementing their duties and the reporting, the Audit Committee is independent and directly reports to the Board of Commissioners. Therefore, in performing their duties, the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners, which is a manifestation of their supervisory accountability to the Company's management within the context of GCG principles implementation.

The duties and responsibilities of the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter, validated by virtue of the Board of Commissioners' Decree No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014/Audit Committee Charter 2014 Edition, dated December 19, 2014, are as follows:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal;
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit dan Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta penerapannya;
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

1. Assisting Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system as well as the implementation of the internal and external auditors' duties.
2. Evaluating the results of audit conducted by Internal Audit unit and External Auditors.
3. Providing recommendations related to the improvement of management control system along with its implementation.
4. Analyzing, evaluating, making recommendations and delivering information on the audited and reviewed matters in line with their duties and responsibilities.
5. Maintaining the confidentiality of Company's documents, data and information from both external parties and internally within the Company.
6. Reporting the results of Audit Committee's duties implementation to the Board of Commissioners.
7. Preparing and submitting an annual work program to the Board of Commissioners to be approved before the beginning of the fiscal year.

Pembagian Tugas Komite Audit

Lingkup tugas masing-masing Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

The Division of Duties in Audit Committees Membership

The scope of duties of each Member of Audit Committee are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Division of Duties
Krisna Wijaya	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Audit Committee Chairman/Independent Commissioner	Bertanggung Jawab untuk Menangani bidang Umum Responsible for handling General field
Marwanto Harjowiryo*	Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris Audit Committee Deputy Chairman/Commissioner	Bertanggung Jawab untuk Menangani bidang Umum Responsible for handling General field
Awal Susmanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Bertanggung Jawab untuk menangani bidang Teknis Responsible for handling Technical field
Ahmad Malkan Lubis	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Bertanggung Jawab untuk menangani bidang Administrasi dan Keuangan Responsible for handling Administration and Finance field

^{*)} Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Pasal 7 huruf g, Sdr. Marwanto Harjowiryo (Komisaris) tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Audit PT PPA (Persero), dan sesuai SK Dewan Komisaris Nomor: SK-03/KEPKOM/PPA/VII/2021 tanggal, 15 Juli 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, maka Sdr. Marwanto Harjowiryo tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit. In accordance with the Financial Services Authority (POJK) Regulation No: 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee, Article 7 letter g, Mr. Marwanto Harjowiryo (Commissioner) can no longer be appointed as Deputy Chairman of the Audit Committee of PT PPA (Persero), and according to the Decree of the Board of Commissioners No: SK-03/KEPKOM/PPA/VII/2021 dated July 15, 2021 concerning Changes in the Composition of the Audit Committee Members of (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, then Mr. Marwanto Harjowiryo can no longer serve as Deputy Chairman of the Audit Committee.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Audit, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Audit Committee Competency Development

The Company has policies related to the development and improvement of the competence of the Audit Committee, conducted through various training and education. The list of training and competency development activities that the Audit Committee participated in throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Rapat Komite Audit

Kebijakan

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Audit. Pertemuan dengan auditor eksternal minimal sebulan sekali pada saat ada jadwal pemeriksaan audit. Dalam pelaksanaan rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Policy

The Audit Committee holds regular meetings in accordance with the Audit Committee Charter. In addition, meetings with the external auditor are held at least once a month with an audit schedule. In implementing the Audit Committee

dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Divisi SPI untuk memberikan informasi yang diperlukan.

meeting, the Company's Management gives the necessary information through the SPI Division.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Krisna Wijaya	Ketua Komite Audit/Komisaris Independen Audit Committee Chairman/Independent Commissioner	14	14	100%
Marwanto Harjowiryo	Wakil Ketua Komite Audit/Komisaris Audit Committee Deputy Chairman/Commissioner	6	6	100%
Awal Susmanto	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	26	26	100%
Ahmad Malkan Lubis	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	26	26	100%

Risalah Rapat

Minutes of Meeting

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	13 Januari 2021 January 13, 2021	RIS-01/PPA/ KA/0121	Pembahasan Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 oleh KAP RSM Indonesia Discussion on the progress of the 2021 Financial Statement Audit by KAP RSM Indonesia	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis
2	29 Januari 2021 January 29, 2021	RIS-01A/PPA/ KA/0121	Pembahasan Jadwal Rapat dan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Jadwal Kunjungan Kerja Dewan Komisaris beserta Organ Dekom Tahun 2021 Discussion on the 2021 Meeting Schedule and Work Plan as well as the Board of Commissioners Work Visit Schedule	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto 4. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis
3	3 Februari 2021 February 3, 2021	RIS-02/PPA/ KA/0121	Pembahasan Rencana Kerja (RK) Divisi Satuan Pengawasan Internal (DSPI) Tahun 2021. Discussion on the Work Plan (RK) of the 2021 Internal Control Unit (DSPI) Division	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis
4	17 Februari 2021 February 17, 2021	RIS-02A/PPA/ KA/0221	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Januari 2021 dan Pembahasan Progress Evaluasi Hasil Asesmen GCG Tahun 2020 dan Progress Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020. Discussion on the 2021 Financial Performance Evaluation and the Progress of Evaluation of the GCG Assessment Results in 2020 as well as the Progress of Auditing Financial Statements for the Financial Year 2020.	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto 4. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis
5	3 Maret 2021 March 3, 2021	RIS-03/PPA/ KA/0321	Pembahasan Tindak Lanjut hasil KAP RSM Indonesia. Discussion on the follow up of the result of KAP RSM Indonesia	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis
6	17 Maret 2021 March 17, 2021	RIS-03A/PPA/ KA/0321	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d Februari 2021 dan Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 Discussion on the Evaluation of the Performance and Cash Flows up to February 2021 as well as audit Results of the Financial Statements for Fiscal Year 2020	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto 4. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis
7	16 April 2021 April 16, 2021	RIS-03B/PPA/ KA/0421	Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern TW I Tahun 2021 dan Lain-lain Discussion on the 1 st quarter 2021 Internal Audit Unit Activity report and other agenda	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Hendy M. Fakhruddin 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Mr. Hendy M. Fakhruddin

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	21 April 2021 April 21, 2021	RIS-04/PPA/ KA/0421	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d Triwulan I Tahun 2021 dan Laporan Pengawasan Divisi SPI Triwulan I Tahun 2021, <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) Terintegrasi serta Evaluasi KAP Tahun 2020. Discussion on the Evaluation of Performance and Cash Flows up to the 1 st Quarter 2021 and Monitoring Report of the SPI Division for the 1 st quarter 2021, as well as Integrated Whistle Blowing System (WBS) and the Evaluation of KAP in 2020.	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto 4. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis
9	18 Mei 2021 May 18, 2021	RIS-04A/PPA/ KA/0521	Pembahasan Laporan Hasil Audit Khusus atas Kegiatan Investasi PT PPA Kapital pada PT Asian Kaolin Raya (PT AKR) dan <i>Update</i> Kegiatan DSPI Bulan April 2021 Discussion on the Special Audit Report of PT PPA Kapital's Investment Activities at PT Asian Kaolin Raya (PT AKR) and update on the April 2021 DSPI Activity	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokoweni 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
10	19 Mei 2021 May 19, 2021	RIS-05/PPA/ KA/0521	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d April Tahun 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to April 2021 and other agenda	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto 4. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis
11	21 Juni 2021 June 21, 2021	RIS-05A/PPA/ KA/0621	Pembahasan <i>Update</i> Kegiatan DSPI bulan Mei 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Update of DSPI Activities for May 2021 and other agenda	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Diah Triana 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Ms. Diah Triana
12	22 Juni 2021 June 22, 2021	RIS-06/PPA/ KA/0621	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d Mei Tahun 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to May 2021 and others agenda	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto 4. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis
13	27 Juli 2021 July 27, 2021	RIS-06A/PPA/ KA/0721	Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern TW II Tahun 2021 Discussion on the 2 nd quarter 2021 Internal Audit Unit Activity Report	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokowen 4. Hendy M. Fakhruddin 5. Diah Triana 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Ms. Diah Triana
14	28 Juli 2021 July 28, 2021	RIS- 07/PPA/ KA/0721	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d Triwulan II Tahun 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to the 2 nd Quarter 2021 and other agenda	1. Krisna Wijaya 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Awal Susmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis
15	16 Agustus 2021 August 16, 2021	RIS- 07A/PPA/ KA/0821	Pembahasan Inisiasi Penunjukan KAP Pembuatan Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2021 Discussion on the Initiation of the Appointment of KAP for PT PPA 2021 Financial Statements	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokowen 4. Hendy M. Fakhruddin 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Mr. Hendy M. Fakhrudin
16	25 Agustus 2021 August 25, 2021	RIS- 08/PPA/ KA/0821	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Juli Tahun 2021 dan Pengadaan KAP untuk Audit PT PPA Tahun 2021, isu-isu Penting, dan Informasi lain-lain. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to July 2021 and the Procurement of KAP for PT PPA 2021 Audit, Important issues, and other information.	1. Krisna Wijaya 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Awal SUSmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
17	20 September 2021 September 20, 2021	RIS-08A/PPA/ KA/0921	Pembahasan <i>Update</i> kegiatan DSPI sampai September 2021 Discussion on the update of DSPI activity up to September 2021	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Hendy M. Fakhruddin 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Mr., Hendy M, Fakhrudin
18	21 September 2021 September 21, 2021	RIS- 09/PPA/ KA/0921	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Agustus Tahun 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to August 2021 and other agenda	1. Krisna Wijaya 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Awal Susmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis
19	23 September 2021 September 23, 2021	RIS-09A/PPA/ KA/0921	Pembahasan terkait Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap & Non Aktiva (Barang Inventaris Kantor) PT PPA Tahun 2021 Discussion related to the Application for Approval of Write-off & Transfer of Fixed Assets & Non-Assets (Office Inventory Goods) of PT PPA in 2021	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Hendy M. Fakhruddin 5. Diah Triana 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Mr. Hendy M. Fakhrudin 5. Ms. Diah Triana
20	26 Oktober 2021 October 26, 2021	RIS-09B/PPA/ KA/1021	Pembahasan Draft Laporan RKAP Tahun 2022, Update terkait Laporan Keuangan s.d. Juni 2021 (untuk kepentingan Penerbitan Obligasi Domestik) dan <i>Update</i> Persiapan Penunjukan KAP RSM untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Discussion on the 2022 RKAP Report Draft, Updates related to the Financial Reports up to June 2021 (for the purpose of Issuing Domestic Bonds) and Update on the Preparation for the Appointment of KAP RSM for 2021 Financial Statement Audit	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Hendy M. Fakhruddin 5. Diah Triana 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Mr. Hendy M. Fakhrudin 5. Ms. Diah Triana
21	27 Oktober 2021 October 27, 2021	RIS- 10/PPA/ KA/1021	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. September Tahun 2021, Pembahasan RKAP Tahun 2022 dan Lain-lain. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to September 2021, Discussion on the 2022 RKAP and other agenda	1. Krisna Wijaya 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Awal Susmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis
22	15 November 2021 November 15, 2021	RIS-10A/PPA/ KA/1121	Pembahasan Pengawasan Kegiatan SPI Triwulan III Tahun 2021, Persiapan Penyusunan Program Pengawasan Tahun 2022 dan Lain-lain Discussion on the Supervision of SPI's Activities in the 3 rd Quarter 2021, Preparation for the Compilation of the 2022 Supervision Programs and other agenda	1. Awal Susmanto 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Hendy M. Fakhruddin 1. Mr. Awal Susmanto 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Mr. Hendy M. Fakhrudin
23	16 November 2021 November 16, 2021	RIS- 11/PPA/ KA/1121	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. Oktober Tahun 2021, Overview Laporan Keuangan Audited PT PPA per Juni 2 dan Update Kegiatan Pengawasan Divisi SPI. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to October 2021, Overview of PT PPA's Audited Financial Report as of 2 nd of June and Update on the Supervision Activities of SPI Division.	1. Krisna Wijaya 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Awal Susmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis
24	10 Desember 2021 December 10, 2021	RIS-11A/PPA/ KA/1221	Pembahasan Kegiatan DSPI sampai November 2021, RKAP DSPI Tahun 2021, <i>Progress</i> Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2021 oleh KAP dan Tindak lanjut <i>management letter</i> KAP Discussion on the Activities of DSPI up to November 2021, 2021 DSPI RKAP, Progress on the audit of PT PPA's 2021 Financial Statements by KAP and Follow-up on KAP's management letter	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto. 4. Ahmad Malkan Lubis. 5. Iko Marita Mustokoweni. 6. Hendy M. Fakhruddin 7. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis 5. Mr. Iko Marita Mustokoweni 6. Mr. Hendy M. Fakhrudin 7. Ms. Diah Triana

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
25	20 Desember 2021 December 20, 2021	RIS- 12/PPA/ KA/1221	Pembahasan Evaluasi Kinerja dan Arus Kas s.d. November Tahun 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Performance Evaluation and Cash Flow up to November 2021 and other agenda	1. Krisna Wijaya 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Awal Susmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis
26	28 Desember 2021 December 28, 2021	RIS-12/APPA/ KA/1221	Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021. Discussion on the Implementation of Policy for the Procurement of Goods and Services in 2021.	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Awal Susmanto. 4. Ahmad Malkan Lubis. 5. Iko Marita Mustokoweni. 6. Hendy M. Fakhruddin 7. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Awal Susmanto 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis 5. Mr. Iko Marita Mustokoweni 6. Mr. Hendy M. Fakhruddin 7. Ms. Diah triana

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021, Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Audit Committee Remuneration Policy

Minister of SOE Regulation No: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, in conjunction with No: PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021, No: PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan tugas-tugas Divisi Satuan Pengawas Intern (Divisi SPI)
Dilaksanakan melalui rapat bulanan dan masing-masing hasil rapat dilaporkan pada rapat internal bulanan komite dengan Dewan Komisaris, yang mencakup:
 - Melakukan pembahasan dan pemantauan atas Rencana Kerja DSPI Tahun 2021, antara lain:
 - Layanan *Assurance*: 6 (enam) penugasan (Evaluasi atas penerapan GCG (2 penugasan); Reviu atas Internal Control Perusahaan berbasis COSO; Reviu atas Rencana Perusahaan menjadi *National AMC*; Reviu atas kegiatan Manajemen Risiko; dan Verifikasi atas Kelengkapan Prosedur dan Dokumen Pengadaan).
 - Layanan *Consulting*: Konsultasi implementasi PSAK 71 (pertama kali pada PT PPA Group); Konsultasi implementasi Konsolidasi Laporan Keuangan via *Oracle* pada PT PPA Group; dan layanan atas permintaan (Dewan Komisaris dan/atau Direksi, Unit Bisnis dan/atau Anak Perusahaan).
 - Layanan Pendampingan: 4 layanan (Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2020; Badan Pemeriksa Keuangan; *Assessor GCG*; Pemeriksaan Pajak; dan Rencana Kerjasama *Whistleblowing System* dengan KPK).

Implementation of the Duties of the Audit Committee in 2021

Throughout 2021, the Audit Committee carried out the following duties and activities:

- In connection with the duties of the Internal Audit Division (SPI Division)
Carried out through monthly meetings and the results of each meeting were reported at the monthly internal committee meetings with the Board of Commissioners, which included:
 - Discussing and monitoring the 2021 DSPI Work Plan, including:
 - Assurance Services*: 6 (six) assignments (Evaluation of GCG implementation (2 assignments); Review of the Company's Internal Control based on COSO; Review of the Company's Plan to become *National AMC*; Review of Risk Management activities; and Verification of the Adequacy of Procurement Procedures and Documents).
 - Consulting Services*: Consultation on the implementation of PSAK 71 (first time at PT PPA Group); Consultation on the implementation of Consolidated Financial Statements via *Oracle* at PT PPA Group; and services upon request (Board of Commissioners and/or Directors, Business Units and/or Subsidiaries).
 - Assistance Services*: 4 services (Public Accountant Office for 2020 Financial Statements; Supreme Audit Agency; GCG Assessor; Tax Audit; and Planned Whistleblowing System Cooperation with KPK).

- 4) Rapat Bulanan Pembahasan Laporan Kegiatan Divisi SPI Triwulan Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
- 5) Pembahasan Laporan Hasil Audit Khusus DSPI atas Kegiatan Investasi PT PPA Kapital pada PT Asian Kaolin Raya, menyampaikan hasilnya pada rapat internal bulanan Dewan Komisaris.
- b. *Monitoring* pelaksanaan/penyelesaian Audit Laporan Keuangan
 - 1) Melakukan *monitoring* pelaksanaan/ penyelesaian Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
 - 2) Melakukan telaah atas Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2020 dan hasil telaah disampaikan pada rapat komite dengan Dewan Komisaris.
 - 3) Inisiasi penyiapan Laporan Keuangan Audit Januari – Juni 2021 untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Obligasi Domestik.
 - 4) Inisiasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk Pembuatan Laporan Keuangan Direksi Tahun Buku 2021, dan pengawasannya.
2. Kinerja Keuangan Konsolidasian Bulanan Melakukan telaah/kajian Laporan Kinerja Keuangan Bulanan yang disampaikan Manajemen dan hasil kajian disampaikan pada rapat internal bulanan Komite dengan Dewan Komisaris.
3. Laporan Kegiatan Tahun 2020 dan Triwulanan Tahun 2021
 - a. Menyiapkan telaah/evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja Perusahaan dalam bentuk konsep Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
 - b. Menyiapkan Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
 - c. Melakukan evaluasi atas Laporan Penggunaan PMN 2015 yang diajukan Direksi untuk Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021 sebelum ditandatangani Dewan Komisaris.
4. RKAP
 - a. Menyiapkan telaah atas Perubahan RKAP Perusahaan Tahun 2021.
 - b. Rapat dengan Divisi SPI dan Sekretariat Perusahaan mengenai *Draft* RKAP Tahun 2022.
5. Pembahasan/Rapat Lain-Lain
 - a. Pembahasan Rencana Penerbitan *Global Bond* dan Obligasi Rupiah dengan Manajemen dan Organ Dewan Komisari Persiapan Surat Tanggapan Komisaris.
 - b. Pembahasan/penyiapan telaah atas Rencana Penerbitan Penerbitan Obligasi Domestik II dengan Organ Dewan Komisaris dan Manajemen, serta penyiapan Surat Tanggapan Komisaris.
- 4) Monthly meeting to discuss the SPI Division Activity Report for Quarter I, II and III of 2021.
- 5) Discussion on DSPI’s Special Audit Report on Investment Activities of PT PPA Kapital at PT Asian Kaolin Raya, presenting the results at the monthly internal meeting of the Board of Commissioners.
- b. Monitoring of the implementation/ completion of the Financial Report Audit
 - 1) Monitoring of the implementation/ completion of the 2020 Financial Statement Audit.
 - 2) Conducted a review of the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the results of the review were submitted at the committee meeting with the Board of Commissioners.
 - 3) Initiation of the preparation of the January – June 2021 Audited Financial Statements to meet the requirements for Domestic Bonds Issuance.
 - 4) Initiation of Appointment of a Public Accounting Firm (“KAP”) for the Preparation of the Financial Report of the Board of Directors for the 2021 Fiscal Year, and its supervision.
2. Monthly Consolidated Financial Performance Conducted a review of the Monthly Financial Performance Report submitted by the Management and the results of the study were submitted at the Committee’s monthly internal meeting with the Board of Commissioners.
3. Activity Report for 2020 and Quarterly Report for 2021
 - a. Prepared a review/evaluation of the Board of Commissioners on the company’s performance in the form of a draft Supervisory Task Report of the Board of Commissioners for 2020, and Quarter I, II and III of 2021.
 - b. Prepared the Board of Commissioners’ Response Letter on the Management Report for 2020, and Quarter I, II and III of 2021.
 - c. Evaluated 2015 PMN Usage Report submitted by the Board of Directors for 2020, and for Quarter I, II and III of 2021 the reports were signed by the Board of Commissioners.
4. RKAP
 - a. Prepared a review of the Changes in the Company’s RKAP 2021.
 - b. Had meeting with the SPI Division and the Corporate Secretariat regarding the 2022 RKAP Draft.
5. Other Discussions/Meetings
 - a. Discussion on the Plan for Issuance of Global Bonds and Rupiah Bonds with the Management and Organs of the Board of Commissioners for the Preparation of the Board of Commissioners’ Response Letter.
 - b. Discussion/preparation of a review of the Plan for Issuance of Domestic Bonds II with the Organs of the Board of Commissioners and Management, as well as the preparation of the Board of Commissioners’ Response Letter.

- c. Pembahasan/penyiapan telaah atas Rencana Pengelolaan Aset Non-Produktif PT Bank Muamalat (Proyek 147).
 - d. Pembahasan/penyiapan telaah atas Perubahan Struktur Organisasi Satu Tingkat di bawah Direksi PT PPA.
 - e. Rapat Ketua dan Wakil Ketua Komite dengan Divisi SDM dan Umum dengan agenda Pembahasan *Man Power Plan* Tahun 2021.
 - f. Rapat dengan Direksi/Divisi SDMU: Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap & Non Aktiva (Barang Inventaris Kantor) Perusahaan Tahun 2021.
 - g. Rapat dengan Direksi: *Key Performance Indicator* (KPI) Individu Direksi PT PPA.
 - h. Rapat dengan Direksi: Paparan mengenai *Project Odin*.
 - i. Rapat dengan Divisi RM Pembahasan Laporan Profil Risiko Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
 - j. Rapat Komite dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi, DSPI dan Sekper mengenai *Draft* Laporan RKAP Tahun 2022, Update terkait Laporan Keuangan s.d Juni 2021 (untuk kepentingan Penerbitan Obligasi Domestik) dan Update Persiapan Penunjukan KAP RSM untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021.
 - k. Rapat Komite dengan Group Pengadaan mengenai Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021
 - l. Rapat internal dengan Dewan Komisaris dan Komite lainnya tentang rencana topik rapat dan kunjungan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 dan penyiapan dan penyampaian telaah tentang Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan dan hal-hal terkait lainnya.
6. Pembaharuan *Charter* Dewan Komisaris
 - a. Pembahasan Pembaharuan *Charter* Dewan Komisaris bersama Organ Dewan Komisaris dan dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern ("DSPI") Perusahaan.
 - b. Pembahasan Final Pembaharuan *Charter* Dewan Komisaris (Revisi 2021) bersama Organ Dewan Komisaris.
 7. Mendukung kegiatan Komite Pemantau Risiko & GCG dengan mengikuti dan berdiskusi secara aktif dalam pembahasan:
 - a. Tindak lanjut progress dan kelengkapan *assessment* GCG tahun 2020.
 - b. Bersama dengan Dewan Komisaris membahas Hasil Kerja Konsultan pada atas pemaparan Deloitte.
 - c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Penerapan GCG Tahun 2020.
 - d. Laporan Profil Risiko Perusahaan Tahun 2020, Triwulan I, III dan III Tahun 2021.
 8. Partisipasi pada Kunjungan Dewan Komisaris secara Virtual:
 - a. PT Alim Investindo pada tanggal 8 Juli 2021
 - b. PT Ade Textile Industries tanggal 16 September 2021
 - c. PT Pindad (Persero) tanggal 15 Desember 2021
- c. Discussion/preparation of a review of the Non-Earning Asset Management Plan of PT Bank Muamalat (Project 147).
 - d. Discussion/preparation of review on Changes in Organizational Structure One Level Below the Board of Directors of PT PPA.
 - e. Meeting of the Chair and Deputy Chair of the Committee with the HR and General Division with the agenda for the 2021 Man Power Plan Discussion.
 - f. Meeting with the Directors/Human Resources Division: Application for Approval of Write Off & Transfer of Fixed Assets & Non Assets (Office Inventory Items) of the Company in 2021.
 - g. Meeting with the Board of Directors: Key Performance Indicators (KPI) Individual Directors of PT PPA.
 - h. Meeting with the Board of Directors: Presentation on Project Odin.
 - i. Meeting with the RM Division to Discuss the 2020 Risk Profile Report, and Quarter I, II and III of 2021.
 - j. Committee meeting with Finance and Accounting Division, DSPI and Secretariat regarding Draft of RKAP Report for 2022, Update on Financial Statements up to June 2021 (for the Issuance of Domestic Bonds) and Update on Preparation for Appointment of RSM KAP for 2021 Financial Statement Audit.
 - k. Committee Meeting with the Procurement Group regarding Discussion on the Implementation of the Procurement of Goods and Services Policy in 2021
 - l. Internal meetings with the Board of Commissioners and other Committees regarding the planned topics of meetings and visits of the Board of Commissioners throughout 2021 and the preparation and submission of studies on the Company's Financial Performance Evaluation and other related matters.
6. Renewal of the Board of Commissioners Charter
 - a. Discussion on the renewal of the charter of the Board of Commissioners engaging the organs of the Board of Commissioners and with the Internal Audit Division ("DSPI") of the Company.
 - b. Final discussion on the renewal of the charter of the Board of Commissioners (Revised 2021) with the organs of the Board of Commissioners.
 7. Supported the activities of the Risk Monitoring & GCG Committee by participating in and actively discussing:
 - a. Follow-up on the progress and adequacy of the 2020 GCG assessment.
 - b. Together with the Board of Commissioners discussed the results of the Consultant's work on Deloitte's presentation.
 - c. Follow-up on the Recommendations of Evaluation Results on the Implementation of GCG in 2020.
 - d. Company Risk Profile Report 2020, and Quarter I, III and III of 2021.
 8. Virtual Participation in Board of Commissioners Visits:
 - a. PT Alim Investindo on July 8, 2021
 - b. PT Ade Textile Industries on September 16, 2021
 - c. PT Pindad (Persero) on December 15, 2021

9. Partisipasi pada *Training* dan *Seminar Online*:

- a. "Corporate Restructuring: Enhancing Economic and Social Value;" LPPI: 28 Januari 2021.
- b. "Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak;" Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Kementerian Keuangan; 17 Februari 2021.
- c. "How Indonesia's Financial Institutions & Stakeholders Respond to Climate-Related Financial Risks;" LPPI; 18 Februari 2021.
- d. "Sovereign Wealth Fund Strategi Pendanaan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;" LPPI; 25 Februari 2021
- e. "Serial Manajemen Risiko: Risk Matrix, Lembaga & Jasa Keuangan Non-Bank;" Krisna Wijaya; 19 Maret 2021.
- f. "Meningkatkan Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional;" LPPI; 3 Juni 2021.
- g. "Enhancing Internal Audit Role Dalam Rangka Sosialisasi Penguatan Peran Satuan Kerja Audit Internal Klaster BUMN Danareksa-PPA Tahap I;" Danareksa; 7 Juni 2021.
- h. "Sovereign Wealth Fund Utility: Allocation and Absorption;" LPPI; 10 Juni 2021.
- i. "Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional;" LPPI; 15 Juni 2021.
- j. "Kupas Tuntas Asuransi - Keseimbangan Bisnis, Perlindungan Konsumen dan Kepentingan Stakeholder;" LPPI; 24 Juni 2021.
- k. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional: Efisiensi dan Efektivitas Pada Stabilitas Sistem Keuangan;" LPPI; 1 Juli 2021.
- l. "ATMR Operasional dan Budaya Manajemen Risiko;" LPPI; 9 Agustus 2021.
- m. "Retired Not Expired - Aspek Non-Finansial Pensiun;" PT PPA; 20 Agustus 2021.
- n. "Sosialisasi Surat Keputusan Nomor: SK-103/MBU/03/2021 tentang Kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara;" Kementerian BUMN; 14 September 2021.
- o. "Penyertaan Modal Negara (PMN): Antara Kepentingan Sosial dan Finansial;" LPPI; 2 September 2021.
- p. "Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perusahaan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan;" Ikatan Komite Audit Indonesia; 23 September 2021.
- q. "Business Judgment Rule;" Pertamina Training & Consulting (PTC); 26-28 Oktober 2021.

9. Participation in Online Training and Seminars:

- a. "Corporate Restructuring: Enhancing Economic and Social Value;" LPPI: January 28, 2021.
- b. "Determinants of Government Treasurer Compliance in Depositing Tax Revenue;" BPPK Budget and Treasury Education and Training Center, Directorate General of Treasury, and the Indonesian Widyaiswara Professional Association, Ministry of Finance; February 17, 2021.
- c. "How Indonesia's Financial Institutions & Stakeholders Respond to Climate-Related Financial Risks;" LPPI; February 18, 2021.
- d. "Sovereign Wealth Fund – Funding Strategy for Sustainable Economic Growth;" LPPI; February 25, 2021
- e. "Risk Management Series: Risk Matrix, Non-Bank Financial Services & Institutions;" Krishna Wijaya; March 19, 2021.
- f. "How to make the National Economic Recovery Program more effective;" LPPI; June 3, 2021.
- g. "Enhancing the Internal Audit Role in the Framework of Socializing the Strengthening of the Role of the Internal Audit Work Unit for the Danareksa-PPA Cluster SOE Phase I;" Danareksa; June 7 2021.
- h. "Sovereign Wealth Fund Utility: Allocation and Absorption;" LPPI; June 10, 2021.
- i. "Sustainable Finance in National Economic Recovery;" LPPI; June 15, 2021.
- j. "Get into details Insurance - Business Balance, Consumer Protection and Stakeholder Interests;" LPPI; June 24 2021.
- k. "National Economic Recovery Program: Efficiency and Effectiveness in Financial System Stability;" LPPI; July 1, 2021.
- l. "Operational ATMR and Risk Management Culture;" LPPI; August 9, 2021.
- m. "Retired Not Expired – Non-Financial Aspects of Retirement;" PT PPA; August 20, 2021.
- n. "Socialization of Decision Letter No: SK-103/MBU/03/2021 regarding the Criteria for Public Accounting Firms, Public Appraisal Services Offices and Actuarial Consulting Firms in State-Owned Enterprises ;" Ministry of SOEs; September 14, 2021.
- o. "State Capital Participation (PMN): Between Social and Financial Interests;" LPPI; September 2, 2021.
- p. "Responsibility of the Audit Committee When the Company faces Legal Issues Related to Financial Statements;" Indonesian Audit Committee Association; September 23 2021.
- q. "Business Judgment Rules;" Pertamina Training & Consulting (PTC); October 26-28 2021.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh organ pendukung Dewan Komisaris, realisasi pencapaian Kinerja Komite Audit di tahun 2021 mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

Assessment of Performance of the Board of Commissioners

With all of the duties that have been carried out by the supporting organs of the Board of Commissioners, realization of the achievement of the Audit Committee in 2021 reached 100% with the criteria Excellent.

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/VI/2011 tentang Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan telah memiliki pedoman kerja yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, yang mengacu pada Peraturan Dewan Komisaris No. PER-03/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (*Charter*) Komite Audit dan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Desember 2014.

Isi piagam tersebut, antara lain mencakup keanggotaan, tugas dan fungsi, masa jabatan, persyaratan keanggotaan, program kerja dan penganggaran, rapat-rapat komite, pelaporan, akses dan kerahasiaan informasi, evaluasi kinerja Komite, dan penghasilan anggota Komite Pemantauan Risiko dan GCG. Piagam Komite ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan pedoman selalu sejalan dengan kebutuhan, peraturan atau regulasi terkait lain yang berlaku dan relevan dengan kondisi Perusahaan saat ini.

Persyaratan Komite Pemantau Risiko dan GCG

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan profesional di bidang hukum, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan;
2. Tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *Conflict of Interest* ataupun dampak negatif;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam hal melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif; dan
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota komite dilakukan melalui proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja sebagai berikut:

THE RISK OVERSIGHT AND THE GCG COMMITTEE

The Risk Oversight and The GCG Committee was established according to Board of Commissioners Regulation No. PER-01/KOM/PPA/VI/2011 regarding The Risk Oversight and The GCG Committee in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and Regulation of the Minister of SOEs No PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 in conjunction with No PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 juncto No: PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021

The Risk Oversight and The GCG Committee Charter

In carrying out the functions and roles, the Company's Risk Oversight and GCG Committee Charter has been equipped with a working Manual as in the Risk Oversight and the GCG Committee Charter referring to Board of Commissioners Decree number PER-03/KOM/PPA/XI/2014 regarding Audit Committee Charter and Risk Oversight and GCG Charter as legalized by the Board of Commissioners on December 19, 2014.

The Risk Oversight and the GCG Committee Charter cover the membership, duty, function, terms of office, membership requirements, working program and budgeting, committee's meeting, reporting, information access and confidentiality, performance evaluation, and remuneration for the Risk Oversight and GCG Committee members. The Committee Charter is regularly reviewed to ensure that the guideline's scope is always in line with the requirements, regulations, or other related and relevant provisions of the Company's current condition.

The Risk Oversight and The GCG Committee Requirements

The Risk Oversight and the GCG Committee members shall fulfill requirements, as follows:

1. Having professional capability in legal, risk management, and corporate governance aspects.
2. Not having any personal interest or affiliation that may cause Conflict of Interest or negative impact;
3. Being capable to communicate effectively, particularly in analyzing various issues and capable to provide constructive suggestions; and
4. Being capable to allocate sufficient time to complete the duties.

The Appointment and The Dismissal of Risk Oversight and GCG Committee

According to the Risk Oversight and the GCG Committee Charter, Risk Oversight and GCG Committee appointment and dismissal are done by Board of Commissioners and reported to the GMS. The appointment of Risk Oversight and GCG Committee members shall pass fit and proper test process based on the prevailing law in order to ensure the capability to implement the role appropriately. Education and career experience qualifications are as follows:

1. Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG. Profil Anggota Komite dapat dilihat dalam bagian Profil Komite Pemantau Risiko dan GCG;
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama;
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris;
4. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite PR dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan berakhir.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2021

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan di tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite yang juga merupakan Komisaris Independen Perusahaan, dan 1 (satu) anggota yang berasal dari luar manajemen. Komposisi dan susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. The Risk Oversight and the GCG Committee in the Company has sufficient education and career experience qualifications to support the implementation of duties as Risk Oversight and GCG Committee. The profile of the Committee members is presented on the Risk Oversight and the GCG Committee Profile section.
2. The Risk Oversight and the GCG Committee Members recruitment process is done by Board of Commissioners by considering competency, expertise, and integrity as well as team work capability.
3. Board of Commissioners conducted interview to observe more about the Risk Oversight and the GCG Committee member candidate. Next, the Board of Commissioners holds meeting to determine the appointed Risk Oversight and GCG Committee member candidate. Furthermore, the stipulation and the appointment of Risk Oversight and GCG Committee member candidate is done under Board of Commissioners Decree.
4. Every Risk Oversight and GCG Committee member has integrity, competency, and good financial Reputation.

The Terms of Tenure

According to the Company's Risk Oversight and GCG Committee Charter, the terms of Risk Oversight and GCG Committee member who is not appointed by the Company's Board of Commissioners members is a maximum 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years terms, by not reducing the rights of Board of Commissioners to dismiss anytime.

The dismissal of the Risk Oversight and the GCG Committee members can be done if the membership terms of the respective member have been ended and dismissed under the Board of Commissioners Decree. The related person is dismissed because he or she is considered for not fulfilling the expected performance and/or not being competent in carrying out the duties. However, for the Company's Board of Commissioners Member who serves as the Chairman of Risk Oversight and GCG Committee, the terms will be ended automatically if the terms as Board of Commissioners member in the Company have ended.

The Number, Composition, and Structure of Risk Oversight and GCG Committees in 2021

The number of the Company's Risk Oversight and GCG Committee members in 2021 are 3 (three) persons, consisting of 1 (one) Chairman of the Committee who is also an Independent Commissioner of the Company, and 1 (one) member who come from outside management. The composition and structure of Risk Oversight and GCG Committee throughout 2021 are as follows:

Komposisi Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2021

Composition of the Risk Monitoring and GCG Committee in 2021

Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG 1 Januari - 31 Desember 2021

The Composition of Risk Oversight and GCG Committee January 1 – December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan The Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Service Period
Marwanto Harjowiryo	Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Risk Oversight and GCG Committee Chairman/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. S-15/KEP.KOM/PPA/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Board of Commissioners Decree No. S-15/KEP.KOM/PPA/X/2020 dated October 13, 2020	9 Oktober 2020 -habis masa periode jabatan Dewan Komisaris October 9, 2020 – the end of Board of Commissioner's tenure	ke-1 1 st
Krisna Wijaya	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/ Komisaris Independen Risk Oversight and GCG Committee Deputy Chairman/Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. S-15/KEP.KOM/PPA/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Board of Commissioners Decree No. S-15/KEP.KOM/PPA/X/2020 dated October 13, 2020	9 Oktober 2020 - habis masa periode jabatan Dewan Komisaris October 9, 2020 – the end of Board of Commissioner's tenure	ke-1 1 st
Iko Marita Mustokoweni	Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen Risk Oversight and GCG Committee Member/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No 09/ KEP. KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Board of Commissioners Decree No. 09/KEP. KOM/PPA/IV/2020 dated April 20, 2020	20 April 2020 – 20 April 2025 April 20, 2020 – April 20, 2025	ke-1 1 st

Profil Komite Pemantau Risiko dan GCG

Profile of Risk Monitoring Committee and GCG

Marwanto Harjowiryo

Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris

Profil lengkap disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Marwanto Harjowiryo

Head of Risk Monitoring Committee and GCG/Commissioner

His full profile is presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report

Krisna Wijaya

Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Independen

Profil lengkap disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Krisna Wijaya

Deputy Chairman of the Risk Monitoring Committee and GCG/Independent Commissioner

His full profile is presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report

**IKO MARITA MUSTOKOWENI**

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG / Pihak Independen

Members of the Risk Monitoring and GCG Committee/ Independent Party

20 April 2020 – 20 April 2025
April 20, 2020 – April 20, 2025

Warga Negara Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	55 tahun pada tahun buku 2021 55 years in fiscal 2021
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Malang, 24 Mei 1966 Malang, May 24 1966
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Decree of the Board of Commissioners No. 09/KEP. KOM/PPA/IV/2020 April 20, 2020
Pendidikan Educational Background	Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1989) Bachelor Degree in Accounting from Brawijaya University (1989)
Sertifikasi Profesi Profession Certificate	Tidak ada None
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Komite Audit PT PPA (May 2015 – April 2020) • Senior Staf Dewan Komisaris PT PPA (Januari 2006 – April 2015) • Sekretaris Dewan Komisaris PT PPA • Anggota Tim Pemberesan BPPN (April 2004 – Januari 2006) • Wakil Kepala Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2002 – Januari 2006) • Kepala Divisi Informasi Kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk (November 1999 – Juni 2000) • Credit Reviewer (1990 – 1999) • Member of PT PPA's Audit Committee (May 2015 – April 2020) • Senior Staff to the Board of Commissioners of PT PPA (January 2006 – April 2015) • Secretary to Board of Commissioners PT PPA • Member of IBRA's Clearing Team (April 2004 – January 2006) • Deputy Head of the Secretariat of the Financial Sector Policy Committee (2002 – January 2006) • Head of Credit Information Division of PT Bank CIMB Niaga Tbk (November 1999 – June 2000) • Credit Reviewers (1990 – 1999)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak ada None

Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Untuk menguatkan/mendukung penerapan ketentuan tentang independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG tersebut di atas, telah dibuat Surat Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG pada saat pengangkatan. Aspek independensi Keanggotaan komite seperti dijabarkan melalui tabel di bawah ini:

**The Risk Oversight and The GCG Committee
Independency**

In order to strengthen/support the implementation of provisions on the Risk Oversight and the GCG Committee's independence as mentioned above, a Statement of Independency of the Risk Oversight and the GCG Committee is prepared that outlines the independency aspects as follows:

Aspek Independensi Independency Aspect	Marwanto Harjowiryo	Krisna Wijaya	Iko Marita Mustokoweni
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	X	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi Having managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated companies	X	X	X
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Having shares ownership in the Company	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Having family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Audit Committee members	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serving in a leadership position at a political party or local Government officials	X	X	X

√: Memiliki Hubungan
X: Tidak Memiliki Hubungan
√: Has relation
X: Has no relation

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah membantu Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Pemantau Risiko dan GCG bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG yang disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG Edisi 2014 tertanggal 19 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi pada seluruh proses bisnis (ERM);
2. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) termasuk penerapan GCG pada Perusahaan Anak;
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola perusahaan yang baik;
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan baik dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan;

The Risk Oversight and The GCG Committee Duty and Responsibility

According to the provisions in the Minister of State-Owned Enterprise Regulation no. PER-12/MBU/2012 regarding The Supporting Structure under the Board of Commissioners/ Supervisory Board in SOEs, the main function of the Risk Oversight and the GCG Committee is to assist the Board of Commissioners in Integrated with Risk Management and Good Corporate Governance implementation effectively and efficiently. In the duty implementation and reporting, the Risk Oversight and the GCG Committee are independent and responsible directly to the Board of Commissioners. Therefore, the accountability report from the Risk Oversight and the GCG Committee to the Board of Commissioners is a manifestation of supervisory accountability on the Company's management with regard to GCG principles implementation.

The duty and responsibility of Risk Oversight and GCG Committee are stipulated in the Risk Oversight and the GCG Committee Charter as legalized through Board of Commissioners Decree No. PER-02/KOM/PPA/XI/2014 the Risk Oversight and the GCG Committee Charter Edition 2014 dated December 19, 2014, as follows:

1. To assist Board of Commissioners in ensuring the Integrated/enterprise Risk Management (ERM) implementation in entire business process.
2. To support Board of Commissioners in ensuring Good Corporate Governance (GCG) implementation including the GCG implementation in Subsidiaries.
3. To provide the recommendation related to Integrated Risk Management and Good Corporate Governance implementation.
4. To analyze, evaluate, prepare recommendation, and submit information about reviewed issues according to duty and authority.
5. To protect confidentiality of Corporate Document, Data, and Information both from external and internal parties of the Company.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

Pembagian Tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG

Lingkup tugas masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG adalah sebagai berikut:

6. To submit the Risk Oversight and the GCG Committee duty implementation report to the Board of Commissioners.
7. To prepare and to submit annual working program to the Board of Commissioners to be legalized before current fiscal year.

The Division of Duties in Risk Oversight and GCG Committee Membership

The scope of duties of each members of Risk Oversight and GCG Committees are as follows:

Nama Name	Pembagian Tugas Division of duties
Marwanto Harjowiryo (Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris) Risk Oversight and GCG Committee Chairman/ Commissioner	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Umum Responsible for handling the General field
Krisna Wijaya (Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/ Komisaris Independen) Risk Oversight and GCG Committee Deputy Chairman/Independent Commissioner	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Umum Responsible for handling the General field
Iko Marita Mustokoweni (Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG) Risk Oversight and GCG Committee Member	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Aspek Teknis, Aspek Administrasi Dan Keuangan Responsible for handling the Technical, Administrative And Finance field

Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG

Kebijakan

Komite Pemantau Risiko dan GCG mengadakan rapat secara berkala mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG. Dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat mengundang Manajemen Perusahaan melalui Divisi Manajemen Risiko untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Berikut, risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Risk Monitoring and GCG Committee Meeting

Policy

The Risk Oversight and the GCG Committee hold meeting regularly referring to the Risk Oversight and the GCG Committee Charter. In implementing the Risk Oversight and GCG Committee meeting, the Committee may invite the Company's Management through Internal Audit Division to provide the necessary information.

Meeting Frequency and Attendance

The following are the minutes and recapitulation of attendance of the Risk Oversight and the GCG Committee meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting Held	Jumlah Kehadiran Meeting Attended	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Marwanto Harjowiryo	Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/ Komisaris Head of Risk Monitoring Committee and GCG/ Commissioner	13	13	100%
Krisna Wijaya	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/ Komisaris Independen Deputy Chairman of the Risk Monitoring Committee and GCG/Independent Commissioner	13	13	100%
Iko Marita Mustokoweni	Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/ Pihak Independen Member of Risk Monitoring Committee and GCG/Independent Party	19	19	100%

Komite Pemantau Risiko dan GCG Risk Oversight and GCG Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Marwanto Harjowiryo Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG*** (Risk Oversight and GCG Committee Chairman)***	13	13	100%
Krisna Wijaya (Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG) (Risk Oversight and GCG Committee Deputy Chairman)	13	13	100%
Iko Marita Mustokoweni (Anggota)***** (Member)	19	19	100%

Risalah Rapat

Minutes of Meeting

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	29 Januari 2021 January 29, 2021	RIS- 01/PPA/ KPR&GCG/0121	Pembahasan Rencana Rapat Komite Pemantau Risiko & GCG Tahun 2021 dan Rencana Kunjungan Dewan Komisaris Tahun 2021 Discussion on the 2021 Risk Monitoring & GCG Committee Meeting Plan and the 2021 work visit plan of the Board of Commissioners	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Marita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
2	16 Februari 2021 February 16, 2021	RIS-01A/PPA/ KPR&GCG/0221	Pembahasan Progress Assessment GCG Tahun 2021 Discussion on the Progress assessment of 2021 GCG	1. Iko Marita Mustokoweni 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 4. Hendy M. Fakhruddin 1. Mr. Iko Marita Mustokoweni 2. Mr. Awal Susmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis 4. Mr. Hendy M. Fakhruddin
3	17 Februari 2021 February 17, 2021	RIS- 02/PPA/ KPR&GCG/0221	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Januari 2021, Progress Assessment GCG PT PPA Tahun Buku 2021 dan Lain-lain Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in January 2021, Assessment of the Progress of PT PPA's GCG for Fiscal Year 2021 and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Marita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
4	17 Maret 2021 March 17, 2021	RIS- 03/PPA/ KPR&GCG/0321	Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun 2021, Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Februari 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Audit Results of PT PPA's 2021 Consolidated Financial Statements, Evaluation of PT PPA's Financial Performance in February 2021 and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Marita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
5	21 April 2021 April 21, 2021	RIS- 04/PPA/ KPR&GCG/0421	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA Triwulan I Tahun 2021 dan Lain-lain. Discussion on the evaluation of PT PPA's 1st Quarter 2021 Financial Performance and other agenda.	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Marita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
6	19 Mei 2021 May 19, 2021	RIS-04A/PPA/ KPR&GCG/0521	Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2021 dan Lain-lain Discussion on the risk profile of the 1st quarter 2021 and other agenda	1. Iko Marita Mustokoweni 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Diah Triana 1. Mr. Iko Marita Mustokoweni 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Ms. Diah Triana
7	19 Mei 2021 May 19, 2021	RIS- 05/PPA/ KPR&GCG/0521	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan April 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in April 2021 and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Marita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
8	21 Juni 2021 June 21, 2021	RIS-05A/PPA/ KPR&GCG/0621	Pembahasan Update Kegiatan DSPI bulan Mei 2021 dan Lain-lain Discussion on the updates of DSPI's Activities for May 2021 and other agenda	1. Iko Marita Mustokoweni 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Awal Susmanto 4. Diah Triana 1. Mr. Iko Marita Mustokoweni 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Awal Susmanto 4. Diah Triana



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9	22 Juni 2021 June 22, 2021	RIS- 06/PPA/ KPR&GCG/0621	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Mei 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in May 2021 and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Martita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
10	28 Juli 2021 July 28, 2021	RIS- 07/PPA/ KPR&GCG/0721	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA Triwulan II Tahun 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Evaluation of PT PPA's 2nd Quarter 2021 Financial Performance and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Martita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
11	13 Agustus 2021 August 13, 2021	RIS-07A/PPA/ KPR&GCG/0821	Pembahasan Tindak Lanjut AOI GCG Tahun 2021 Discussion on the follow up of 2021 AOI GCG	1. Iko Marita Mustokoweni 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Awal Susmanto 4. Diah Triana 1. Mr. Iko Marita Mustokoweni 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Awal Susmanto 4. Ms. Diah Triana
12	25 Agustus 2021 August 25, 2021	RIS- 08/PPA/ KPR&GCG/0821	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Juli 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in July 2021 and other agenda.	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Martita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
13	20 September 2021 September 20, 2021	RIS-08A/PPA/ KPR&GCG/0921	Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021 Discussion on the 2nd quarter 2021 risk profile report	1. Iko Marita Mustokoweni 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Awal Susmanto 4. Diah Triana 1. Mr. Iko Marita Mustokoweni 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Awal Susmanto 4. Ms. Diah Triana
14	21 September 2021 September 21, 2021	RIS- 09/PPA/ KPR&GCG/0921	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Agustus 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in August 2021 and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Martita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
15	27 Oktober 2021 October 27, 2021	RIS- 10/PPA/ KPR&GCG/1021	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan September 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in September 2021 and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Martita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
16	16 November 2021 November 16, 2021	RIS- 11/PPA/ KPR&GCG/1121	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Oktober 2021 dan Lain-lain. Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in October 2021 and other agenda	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Martita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni
17	1 Desember 2021 December 1, 2021	RIS-11A/PPA/ KPR&GCG/1221	Pembahasan AOI GCG Tahun 2021 Discussion on the 2021 AOI GCG	1. Iko Marita Mustokoweni 2. Ahmad Malkan Lubis 3. Awal Susmanto 4. Diah Triana 1. Mr. iko Marita Mustokoweni 2. Mr. Ahmad Malkan Lubis 3. Mr. Awal Susmanto 4. Ms. Diah Triana
18	20 Desember 2021 December 20, 2021	RIS- 12/PPA/ KPR&GCG/1221	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan November 2021 dan Pencapaian KPI Dewan Komisaris sampai dengan November 2021. Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in November 2021 and KPI Achievements of the Board of Commissioners as of November 2021.	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Martita Mustokoweni 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
19	28 Desember 2021 December 28, 2021	RIS-13/PPA/KPR&GCG/1221	Pembahasan Laporan Profil Risiko TW III Tahun 2021 dan Kebijakan Mutu Discussion on the 3rd quarter 2021 Risk Profile Report and Quality Policy	1. Marwanto Harjowiryo 2. Krisna Wijaya 3. Iko Marita Mustokoweni 4. Ahmad Malkan Lubis. 5. Awal Susmanto 6. Hendy M. Fakhruddin 7. Diah Triana 1. Mr. Marwanto Harjowiryo 2. Mr. Krisna Wijaya 3. Mr. Iko Marita Mustokoweni 4. Mr. Ahmad Malkan Lubis 5. Mr. Awal Susmanto 6. Mr. Hendy M. Fakhruddin 7. Ms. Diah Triana

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Pemantau Risiko dan GCG, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko dan GCG di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Kebijakan Remunerasi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, penghasilan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Penghasilan Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terdiri dari:

- Honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
- Fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
- Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Pemantau Risiko dan GCG telah melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan evaluasi oleh Dewan Komisaris atas kinerja perusahaan dalam bentuk konsep:
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
 - Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.

The Risk Oversight and The GCG Committee Competency Development

The Company has policies for the competence development and improvement of its Risk Oversight and GCG Committee via training and education. The list of training and competency development activities that the Risk Oversight and GCG Committee participated in throughout 2021 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

The Risk Oversight and The GCG Committee Remuneration Policy

As disclosed in the Risk Oversight and GCG Committee Charter, the remuneration of Risk Oversight and GCG Committee as stipulated by the Board of Commissioners with due regard to the Company's capability.

The income of members of the Risk Monitoring Committee and GCG, as referred to in paragraph (1) of the Regulation of the Minister of SOE No: PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021, consists of:

- The maximum honorarium is 20% (twenty percent) of the salary of the Company's President Director;
- Health facilities in the form of inpatient, outpatient, and medicine excluding his or her immediate family; and
- Holiday allowance which is paid once in 1 (one) year in the amount of 1 (one) time honorarium.

Implementation of the Duties of the Risk Monitoring and GCG Committee in 2021

Throughout 2021, the Risk Monitoring and GCG Committee carried out the following duties and activities:

- Prepared subjects of evaluation for the Board of Commissioners on the company's performance in the form of concepts:
 - Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners in 2020, and Quarter I, II and III of 2021.
 - The Board of Commissioners' response to the Company's Management Report 2020, and Quarter I, II and III of 2021.

2. Mengevaluasi Laporan PMN tahun 2015 yang disiapkan oleh Direksi sebelum ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
3. Menyiapkan telaahan atas usulan/laporan Direksi mengenai :
 - a. Menyiapkan telaahan atas Project Paris yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris
 - b. Menyiapkan telaahan dan draft surat Dewan Komisaris atas Rencana Penerbitan Obligasi Global dan/atau Obligasi Nasional yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - c. Menyiapkan draft surat Dewan Komisaris mengenai Laporan Hasil Audit Khusus atas Kegiatan Investasi PT PPA Kapital pada PT Asia Kaolin Raya ("PT AKR")
 - d. Rencana Pelaksanaan Pengelolaan Aset Non-Produktif PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Project 147").
 - e. Rencana Penerbitan Obligasi Domestik II PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
 - f. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Tahun 2020, serta Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
 - g. Menyiapkan telaahan atas Manajemen Risiko Tahun 2020, serta Triwulan I, II dan III 2021.
 - h. Perubahan Struktur Organisasi Satu Tingkat Di Bawah Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
 - i. Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap dan Non Aktiva PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
4. Mengikuti rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Dengan manajemen terkait agenda Perkembangan Audit Laporan Keuangan PT PPA oleh KAP.
 - b. Dengan KAP terkait agenda progres pekerjaan KAP dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2020.
 - c. Dengan Dewan Komisaris mengenai rencana rapat Komite dan rencana kunjungan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020.
 - d. Dengan manajemen terkait *progress assessment* GCG tahun 2020.
 - e. Dengan Dewan Komisaris terkait Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA 2021 dan *Progress Assessment* PT PPA Tahun 2020.
 - f. Dengan Dewan Komisaris terkait Pembahasan Hasil Deloitte.
 - g. Pemaparan/Presentasi serta Diskusi Tugas dan Fungsi Divisi IT dan Operasi Bisnis PT PPA bersama Komite.
 - h. Dengan KAP RSM Indonesia dengan agenda *Exit Meeting* KAP.
 - i. Pembahasan Surat Tanggapan Komisaris Terkait Rencana Penerbitan *Global Bond* dan Obligasi Rupiah.
2. Evaluated the 2015 PMN Report prepared by the Board of Directors before the report was signed by the Board of Commissioners for 2020, and Quarter I, II and III of 2021.
3. Prepared a review of the proposal/report of the Board of Directors:
 - a. Prepared a review of Project Paris which has been submitted to the Board of Commissioners
 - b. Prepared a review and draft of the Board of Commissioners' letter on the Global Bonds and/ or National Bonds Issuance Plan that has been submitted to the Board of Commissioners.
 - c. Prepared a draft letter from the Board of Commissioners regarding the Special Audit Results Report on the Investment Activities of PT PPA Kapital at PT Asia Kaolin Raya ("PT AKR")
 - d. The Plan for the Management Implementation of Non-Earning Asset of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Project 147").
 - e. Plan for Domestic Bonds II Issuance of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
 - f. Followed up on Recommendations for Improvement in the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of the Company in 2020, as well as Quarter I, II and III of 2021.
 - g. Prepared a review of Risk Management in 2020, as well as Quarter I, II and III of 2021.
 - h. Changes in Organizational Structure One Level Below the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
 - i. Write-off and Transfer of Fixed Assets and Non Assets of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
4. Attended the following meetings:
 - a. With management related to the agenda for the Development of the Audit of PT PPA's Financial Statements by KAP.
 - b. With KAP related to the agenda of KAP's work progress in conducting the audit on PT PPA's 2020 Financial Statements.
 - c. With the Board of Commissioners regarding the planned Committee meetings and planned visits by the Board of Commissioners throughout 2020.
 - d. With the management regarding the progress of the 2020 GCG assessment.
 - e. With the Board of Commissioners regarding the Financial Performance Evaluation of PT PPA 2021 and the Progress in the Assessment on PT PPA in 2020.
 - f. With the Board of Commissioners regarding the Deloitte Results Discussion.
 - g. Presentation/Presentation and Discussion of Tasks and Functions of PT PPA's IT Division and Business Operations with the Committee.
 - h. With KAP RSM Indonesia with an agenda on KAP Exit.
 - i. Discussion of the Board of Commissioners' Response Letter Regarding the Plan for Issuance of Global Bonds and Rupiah Bonds.

- j. Rapat Komite dengan DSPI dengan agenda Pembahasan Laporan Hasil Audit Khusus atas Kegiatan Investasi PT PPA Kapital pada PT Asian Kaolin Raya (PT AKR).
 - k. Rapat Ketua dan Wakil Ketua Komite dengan Divisi SDM dan Umum dengan agenda Pembahasan *Man Power Plan* Tahun 2021.
 - l. Rapat rutin Komite dan Internal Dewan Komisaris pada Tahun 2021.
 - m. Rapat dengan Divisi Satuan Pengawas Internal guna membahas Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021, *update* kegiatan DSPI sampai Desember 2021,
 - n. Rapat dengan Manajemen mengenai Tindak Lanjut AOI GCG Tahun 2020.
 - o. Rapat dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi, DSPI dan Sekper mengenai Inisiasi Penunjukan KAP Pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2021
 - p. Rapat dengan Manajemen mengenai KPI Individu Direksi Perusahaan.
 - q. Mengikuti paparan Manajemen PT PPA terkait Proyek Odin.
 - r. Rapat dengan Divisi RM Pembahasan Laporan Profil Risiko Tahun 2020, Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
 - s. Rapat Komite dengan Divisi SDMU mengenai Permohonan Persetujuan Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap & Non Aktiva (Barang Inventaris Kantor) PT PPA Tahun 2021.
 - t. Rapat Komite dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi, DSPI dan Sekper mengenai Draft Laporan RKAP Tahun 2022, *Update* terkait Laporan Keuangan s.d. Juni 2021 (untuk kepentingan Penerbitan Obligasi Domestik) dan *Update* Persiapan Penunjukan KAP RSM untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021.
 - u. Rapat Komite dengan Group Pengadaan mengenai Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021.
 - v. Rapat Komite dengan Divisi Manajemen Risiko mengenai Kebijakan Mutu dan Pelayanan Tahun 2021.
5. Mengikuti Kunjungan Dewan Komisaris :
- a. PT Alim Investindo pada tanggal 8 Juli 2021
 - b. PT Ade Textile Industries tanggal 16 September 2021
 - c. PT Pindad (Persero) tanggal 15 Desember 2021
6. Mengikuti kegiatan seminar online (webinar):
- a. *Corporate Restructuring Enhancing Economic and Social Value* tanggal 28 Januari 2021 – LPPI.
 - b. Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak – Kementerian Keuangan.
 - c. *Sovereign Wealth Fund* Strategi Pendanaan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – LPPI.
 - d. *How Indonesia's Financial Institutions & Stakeholders Respond to Climate-Related Financial Risks* Tanggal 18 Februari 2021 – LPPI.
 - e. Industri Asuransi Jiwa – Hikmah dari Pandemi dan Bagaimana Selanjutnya tanggal 10 Maret 2021.
- j. Committee meeting with DSPI with the agenda of discussing the Special Audit Report on Investment Activities of PT PPA Kapital at PT Asian Kaolin Raya (PT AKR).
 - k. Meeting of the Chairman and Deputy Chairman of the Committee with the HR and General Division discussing 2021 Man Power Plan.
 - l. Regular Committee meeting and Internal Meetings of the Board of Commissioners in 2021.
 - m. With the Internal Audit Unit Division to discuss the 2020 Internal Audit Unit Activity Report, and Quarter I, II and III of 2021, updates on DSPI activities until December 2021,
 - n. Meeting with Management regarding the follow up on the 2020 AOI GCG.
 - o. Meeting with the Finance and Accounting Division, DSPI and Cor-Sec regarding the Initiation of Appointment of KAP for the Preparation of the Company's 2021 Financial Statements
 - p. Meeting with Management regarding the Individual KPI of the Company's Board of Directors.
 - q. Following the presentation of PT PPA Management regarding the Odin Project.
 - r. Meeting with the RM Division Discussing the 2020 Risk Profile Report, and Quarter I, II, III of 2021.
 - s. Committee Meeting with HRU Division regarding Application for Approval of Write-off & Transfer of Fixed Assets & Non-Assets (Office Inventory Goods) of PT PPA in 2021.
 - t. Committee meeting with the Finance and Accounting Division, DSPI and Cor-Sec regarding the Draft 2022 RKAP Report, Updates related to Financial Reports up to and including. June 2021 (for the purpose of Issuing Domestic Bonds) and Update on Preparation for Appointment of RSM KAP Audit on 2021 Financial Statement.
 - u. Committee Meeting with the Procurement Group regarding the Discussion on the Implementation of the Procurement of Goods and Services Policy in 2021.
 - v. Committee Meeting with Risk Management Division regarding Quality and Service Policy in 2021.
5. Accompanied the Board of Commissioners during their visit to:
- a. PT Alim Investindo on July 8, 2021
 - b. PT Ade Textile Industries on September 16, 2021
 - c. PT Pindad (Persero) on December 15, 2021
6. Participated in online seminars (webinar):
- a. Corporate Restructuring Enhancing Economic and Social Value on January 28, 2021 – LPPI.
 - b. Determinants of Government Treasurer Compliance in Depositing Tax Revenue –Ministry of Finance.
 - c. Sovereign Wealth Fund Sustainable Economic Growth Financing Strategy – LPPI.
 - d. How Indonesia's Financial Institutions & Stakeholders Respond to Climate-Related Financial Risks on February 18, 2021 – LPPI.
 - e. The Life Insurance Industry – Lessons from the Pandemic and What's Next on March 10, 2021.

- f. Penguatan Tata Kelola di Pasar Modal (POJK No. 3/POJK.04/2021) tanggal 18 Maret 2021.
- g. Mengikuti kegiatan *Risk Management* Kementerian BUMN tanggal 24 Mei 2021 (pembahasan BOC Charter dan *Sharing Session Sub PMO Financial & Risk Policy* "Penguatan *Risk Management Cluster* BUMN Karya)
- h. Mengikuti Seminar LPPI mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 3 Juni 2021
- i. Seminar *Update* dan Prospek Ekonomi yang diselenggarakan oleh LPPI pada tanggal 7 Juli 2021 dengan pembicara antara lain Ibu Destry Damayanti (Dewan Gubernur Bank Indonesia) dan Handy Yuniarto (*Head of Fixed Income Research*).
- j. *Workshop* ATMR Operasional dan Budaya Manajemen Risiko tanggal 9 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh LPPI.
- k. Seminar PMN antara kepentingan sosial dan finansial tanggal 2 September 2021 yang diselenggarakan oleh LPPI dengan pembicara Bapak Robertus Bileta dan Bapak Silvano Rumanthir.
- l. Seminar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Opini WTP yang diselenggarakan oleh Corpu Kementerian Keuangan tanggal 8 September 2021 dengan pembicara antara lain Juska Meidy Enyke Sjam (Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan pada Badiklat PKN BPK RI), dan Laksamana Pertama TNI Mulyono (Inspektur BAKAMLA RI).
- m. Seminar Mengelola Risiko Siber dan Industri Digital yang diselenggarakan oleh LPPI pada tanggal 23 September 2021 dengan pembicara antara lain Badan Siber dan Sandi Negara, BrigJen Pol Helmy Santika SH, SIK, MSI dan Pramudya Iriawan Buntoro (Direktur Perencanaan Strategis & Teknologi Informasi).
- n. Webinar *Online Series Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – "Business Judgment Rule"* yang diselenggarakan oleh Pertamina Training & Consulting (PTC) pada tanggal 26-28 Oktober 2021.
- f. Strengthening Governance in the Capital Market (POJK No. 3/POJK.04/2021) on March 18, 2021.
- g. Participated in the Risk Management activity of the Ministry of SOEs on May 24, 2021 (discussion on BOC Charter and Sharing Session Sub PMO Financial & Risk Policy "Strengthening Risk Management Cluster BUMN (SOE) Karya)
- h. Participated in the LPPI Seminar on National Economic Recovery on June 3, 2021
- i. Seminar on Update and Economic Prospects held by LPPI on July 7, 2021 with key speakers including Mrs. Destry Damayanti (Board of Governors of Bank Indonesia) and Handy Yuniarto (Head of Fixed Income Research).
- j. Workshop on Operational RWA and Risk Management Culture on August 9, 2021, organized by LPPI.
- k. PMN seminar between social and financial interests on September 2, 2021, organized by LPPI with Mr. Robertus Bileta and Mr. Silvano Rumanthir as speakers.
- l. Seminar on Central Government Financial Reports with WTP Opinions organized by Corpu Ministry of Finance on September 8, 2021 with speakers: Juska Meidy Enyke Sjam (Head of Planning and Implementation Center at the BPK RI PKN Training and Training Center), and First Admiral TNI Mulyono (Indonesian BAKAMLA Inspector).
- m. Seminar on Managing Cyber Risk and the Digital Industry held by LPPI on September 23, 2021 with speakers including the National Cyber and Crypto Agency, Brigadier General Helmy Santika SH, SIK, MSI and Pramudya Iriawan Buntoro (Director of Strategic Planning & Information Technology).
- n. Webinar of Online Series Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – "Business Judgment Rule" organized by Pertamina Training & Consulting (PTC) on October 26-28 2021.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PPA merupakan emiten, sebagai akibat dari melakukan penawaran umum surat berharga di pasar modal. Dengan demikian, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi wajib, sesuai Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, begitu juga berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PPA is automatically an issuer after it conducted a public offering of securities in the capital market. The IPO makes it mandatory for the Company to establish a Nomination and Remuneration Committee pursuant to OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee. The Establishment also complies with Minister of SOE Regulation No: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 in conjunction with No: PER-06/MBU/04/2021 dated 13 April 2021 juncto Number: PER-14/MBU/ 10/2021 October 29, 2021

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, terutama mengacu pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi juga berdasarkan kewajiban dari Kementerian BUMN.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk melalui Surat keputusan Dewan Komisaris PT PPA No. 06/KEP.KOM/PPA/IV/2020 tanggal, 20 April 2020 tentang Piagam *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi.

Persyaratan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang berasal dari selain Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, jika diperlukan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan, dan Pemberhentian Keanggotaan Komite diatur sebagai berikut:

1. Penggantian anggota Komite yang berasal dari pihak independen dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
2. Dewan Komisaris berhak sewaktu-waktu meninjau kembali keanggotaan Komite atau memberhentikan anggota Komite sebelum masa jabatan berakhir.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan keanggotaan Komite diatur sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Komite yang berasal dari unsur Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, dan pejabat manajerial di bawah Direksi akan berakhir dengan sendirinya apabila masa jabatannya berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite yang berasal dari pihak independen paling lama 5 (lima) tahun, dengan periode jabatan pertama 3 (tiga) tahun, dan periode jabatan kedua 2 (dua) tahun.

Legal Basis

The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers specifically to OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee also complies the obligations of the Ministry of SOEs.

Nomination and Remuneration Committee Working Guidelines

The work guidelines of the Nomination and Remuneration Committee were established through the Decree of the Board of Commissioners of PT PPA No. 06/KEP.KOM/PPA/IV/2020 dated, April 20, 2020 regarding the Nomination and Remuneration Committee Charter.

Nomination and Remuneration Committee Requirements

Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function originating from other than the Board of Commissioners/Supervisory Board must meet the following criteria:

1. Having professional capability in legal, risk management, and corporate governance aspects.
2. Not having any personal interest or affiliation that may cause Conflict of Interest or negative impact;
3. Being capable to communicate effectively,
4. Being capable to allocate sufficient time to complete the duties.
5. Having other criteria as stipulated in the charter of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function, if necessary.

Appointment and Dismissal of the Nomination and Remuneration Committee

Appointment and Dismissal of Committee Membership is regulated as follows:

1. The replacement of a Committee member from independent parties shall be made no later than 60 (sixty) days after the referred Committee member is no longer able to carry out their functions.
2. The Board of Commissioners has the right at any time to review the membership of the Committee or to dismiss members of the Committee before their term of office ends.

Terms of Service

The term of office of the Committee's membership is regulated as follows:

1. The term of office of members of the Committee who are either a commissioner, the Secretary to the Board of Commissioners, or any managerial officer under the Board of Directors will automatically end when their term of office ends.
2. The term of office for Committee members from independent parties is a maximum of 5 (five) years, with the first term of office being 3 (three) years, and the second term of office being 2 (two) years.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Number, Composition, and Structure of the Nomination and Remuneration Committee in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Krisna Wijaya	Ketua Chairman	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020 PPA's Board of Commissioners Decree No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-habis masa periode jabatan Dewan Komisaris October 13, 2020 – the end of Board of Commissioner's term of office
Marwanto Harjowiryo	Wakil Ketua Vice Chairman	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020 PPA's Board of Commissioners Decree No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-habis masa periode jabatan Dewan Komisaris October 13, 2020 – the end of Board of Commissioner's term of office
Hendy M. Fakhruddin	Anggota Member	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020 PPA's Board of Commissioners Decree No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020	13 Oktober 2020-13 Oktober 2023 October 13, 2020 – October 12, 2023

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Independency of the Nomination and Remuneration Committee

Krisna Wijaya

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Krisna Wijaya

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

His profile is presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report

Marwanto Harjowiryo

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Marwanto Harjowiryo

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

His profile is presented in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report.



HENDY M. FAKHRUDDIN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of the Nomination and Remuneration Committee

13 Oktober 2020-13 Oktober 2023
October 13, 2020-October 13, 2023

Warga Negara Citizenship	Indonesia Indonesian
Usia Age	52 Tahun 52 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Samarinda, 5 September 1969 Samarinda, September 5 1969
Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris PPA No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020 Decree of the Board of Commissioners of PPA No. 16/KEP.KOM/PPA/X/2020
Pendidikan Educational Background	• Si Teknik Industri UI Jogjakarta • Si Manajemen FE UGM Jogjakarta • S2 Magister Management UBINUS Jakarta • S2 Magister Hukum FH Usakti Jakarta • Bachelor Degree in Industrial Engineering from UI Jogjakarta • Bachelor Degree in Management from FE UGM Jogjakarta • Master Degree in Management UBINUS Jakarta • Master Degree in Law, Faculty of Law Usakti Jakarta

Sertifikasi Profesi Profession Certificate	Assessor of Competency-BNSP, Certified Securities Analyst (CRA) LSPPM-BNSP, Certified Risk Professional (CRP) LSPPM-BNSP, International Certified on Governance Risk Compliance Professional (GRCP)-OCEG, International Certified on Governance Risk Compliance Audit (GRCA)-OCEG, International Certified on Sustainability Report Specialist (CSRS)-GRI Assessor of Competency-BNSP, Certified Securities Analyst (CRA) LSPPM-BNSP, Certified Risk Professional (CRP) LSPPM-BNSP, International Certified on Governance Risk Compliance Professional (GRCP)-OCEG, International Certified on Governance Risk Compliance Audit (GRCA)-OCEG, International Certified on Sustainability Report Specialist (CSRS)-GRI
Pengalaman Kerja Work Experience	- PT PPA (Persero) sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi (Oktober 2020 - saat ini) - PT PPA (Persero) sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG (Juli 2011 - September 2020) - PT Phapros (Persero) Tbk sebagai Komite Audit (Januari 2018 - Agustus 2019) - Komite Nasional Kebijakan Governance sebagai Direktur Eksekutif (Februari 2011 - September 2012) - PT PPA (Persero) as member of the Nomination and Remuneration Committee (October 2020 - present) - PT PPA (Persero) as member of the Risk Monitoring Committee and GCG (July 2011 - September 2020) - PT Phapros (Persero) Tbk as member of the Audit Committee (January 2018 - August 2019) - Member of National Committee on Governance Policy as Executive Director (February 2011 - September 2012)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak ada None

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independency of the Nomination and Remuneration Committee

Pernyataan independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diindikasikan melalui sejumlah aspek, yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The statement of independency of the members of the Nomination and Remuneration Committee is indicated through a number of aspects, with the following details:

Aspek Independensi Independency Aspect	Krisna Wijaya	Marwanto Harjowiryo	Hendy M. Fakhrudin
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having financial affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	X	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi Having managerial affiliation in the Company, subsidiaries or affiliated companies	X	X	X
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Having shares ownership in the Company	X	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Having family affiliation with Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow Audit Committee members	X	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serving in a leadership position at a political party or local Government officials	X	X	X

√: Memiliki Hubungan
X: Tidak Memiliki Hubungan
√: Has relation
X: Has no relation

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee as stated in the Nomination and Remuneration Committee Charter are as follows:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Komite secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Menyusun pedoman atau piagam Komite yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

1. The Nomination and Remuneration Committee shall act independently in discharging its duties and is responsible to the Board of Commissioners.
2. Holding regular Committee meetings at least 1 (one) time in 4 (four) months.
3. Preparing committee guidelines or committee charter that are binding on each member of the Committee and submitted to the Board of Commissioners for stipulation.

4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
 5. Terkait Fungsi Nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) Kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Membantu Dewan Komisaris mengenai melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris; dan
 - d. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 6. Terkait Fungsi Remunerasi
 - a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penentuan kebijakan remunerasi;
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Struktur Remunerasi, Kebijakan atas Remunerasi dan Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
4. Discharging other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the applicable rules and regulations.
 5. Regarding Nomination function:
 - a. Preparing and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - 1) The composition and the process of nominating members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
 - 2) Policies and criteria required in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
 - 3) Policy for performance appraisal and evaluation on members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
 - b. Assisting the Board of Commissioners in assessing and evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners against the predetermined benchmarks as evaluation material;
 - c. Preparing and giving recommendations regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners; and
 - d. Reviewing and proposing candidates who have met the criteria for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
 6. Regarding the Remuneration Function
 - a. Collecting data and information related to the determination of remuneration policies;
 - b. Preparing and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding: Remuneration Structure, Policy on Remuneration and Amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners,
 - c. Assisting the Board of Commissioners in making performance assessment in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sebanyak 15 (lima belas) kali sepanjang tahun 2021. Risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana terlampir di bawah ini.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Policy

The Nomination and Remuneration Committee held 15 (fifteen) meetings throughout 2021. Minutes and recapitulation of the attendance of the Nomination and Remuneration Committee meetings are as attached below.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat, disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Frequency and Attendance

Minutes and recapitulation of meeting attendance are presented in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Meeting Held	Jumlah Kehadiran Meeting Attended	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Krisna Wijaya	Ketua Chairman	14	14	100%
Marwanto Harjowiryo	Wakil Ketua Vice Chairman	14	14	100%
Hendy M. Fakhruddin	Anggota Member	15	15	100%

Risalah Rapat

Minutes of Meeting

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	29 Januari 2021 January 29, 2021	RIS- 01/PPA/ KNR/0121	Pembahasan Rencana Jadwal Rapat Komite NR dan Jadwal Bulanan Rapat Direksi dan Komisaris dan Rapat Komisaris Tahun 2021. Discussion on the Meeting Schedule plan of the NR Committee and the Monthly Meeting Schedule of the Board of Directors and Commissioners as well as the 2021 Board of Commissioners' Meetings.	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana
2	17 Februari 2021 February 17, 2021	RIS- 02/PPA/ KNR/0221	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Januari 2021 dan Progress Assessment GCG PT PPA Tahun Buku 2020 Discussion on the Evaluation of PT PPA's Financial Performance in January 2021 and Progress of PT PPA's GCG Assessment for the Fiscal Year 2020	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana
3	17 Maret 2021 March 17, 2021	RIS- 03/PPA/ KNR/0321	Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan PT PPA bulan Februari 2021 dan Lain-lain Discussion on the evaluation of PT PPA's financial performance in February 2021 and other agenda	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana
4	21 April 2021 April 21, 2021	RIS- 04/PPA/ KNR/0421	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan Maret (Triwulan I Tahun 2021) dan Lain-lain Discussion on the performance of the 1st quarter 2021 financial report and other agenda	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M, Fakhruddin 4. Ms. Diah triana
5	5 Mei 2021 May 5, 2021	RIS- 05/PPA/ KNR/0521	Pembahasan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT PPA Tahun 2021. Discussion on the proposal for the 2021 remuneration of the Board of Directors and Commissioner of PT PPA	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. krisna Wijaya 2. Mr. Marwanto Harjowiryo 3. Mr. hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
6	19 Mei 2021 May 19, 2021	RIS- 06/PPA/ KNR/0621	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan April dan Lain-lain Discussion on the performance of the financial report in April 2021 and other agenda	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo. 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah triana
7	22 Juni 2021 June 22, 2021	RIS- 07/PPA/ KNR/0621	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan Mei dan Lain-lain Discussion on the performance of the financial report in May 2021 and other agenda	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo. 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah triana
8	28 Juli 2021 July 29, 2021	RIS- 08/PPA/ KNR/0721	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan Juni (Semester I) Tahun 2021 dan Lain-lain Discussion on the performance of the 1st semester 2021 financial report and other agenda	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah triana
9	19 Agustus 2021 August 19, 2021	RIS- 09/PPA/ KNR/0821	Pembahasan Surat Direksi Nomor: S-2842/PPA/DU/0821, tanggal 3 Agustus perihal Penyampaian Kandidat Kepala Satuan Pengawasan Intern. Discussion on the Board of Directors' Letter Number: S-2842/PPA/DU/0821, dated August 3, regarding the Submission of Candidates for the Head of the Internal Audit Unit	1. Krisna Wijaya 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana
10	25 Agustus 2021 August 25, 2021	RIS- 10/PPA/ KNR/0821	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan Juli Tahun 2021 dan Lain-lain Discussion on the performance of the July 2021 financial report and other agenda	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana
11	8 September 2021 September 8, 2021	RIS- 11/PPA/ KNR/0921	Pembahasan KPI Individu Direksi PT PPA (Persero) Discussion on the individual KPI of the Board of Directors of PT PPA (Persero)	1. Hendy M Fakhruddin 2. Awal Susmanto 3. Ahmad Malkan Lubis 4. Iko Marita Mustokoweni 5. Diah Triana 1. Mr. Hendy M. Fakhruddin 2. Mr. Awal Susmanto 3. Mr. Ahmad Malkan Lubis 4. Mr. Iko Marita Mustokoweni 5. Ms. Diah triana
12	21 September 2021 September 21, 2021	RIS- 12/PPA/ KNR/0921	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan Agustus Tahun 2021 dan Lain-lain Discussion on the performance of the August 2021 financial report and other agenda	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana
13	27 Oktober 2021 October 27, 2021	RIS- 13/PPA/ KNR/1021	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan September (Triwulan III) Tahun 2021 dan Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 Discussion on the Performance of the September 2021 (3rd quarter) Financial report and Discussion on the Proposal for 2022 Work Plan and Corporate Budget (RKAP)	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhruddin 4. Ms. Diah Triana

No.	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Minutes of Meeting No	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
14	16 November 2021 November 16, 2021	RIS- 14/PPA/ KNR/1121	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan Oktober Tahun 2021 Discussion on the performance of the October 2021 financial report	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhrudib 4. Ms. Diah Triana
15	20 Desember 2021 December 20, 2021	RIS- 15/PPA/ KNR/1221	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Bulan November Tahun 2021 Discussion on the performance of the November 2021 financial report	1. Krisna Wijaya. 2. Marwanto Harjowiryo 3. Hendy M. Fakhruddin 4. Diah Triana 1. Mr. Krisna Wijaya 2. Mr. Maryanto Harjowiryo 3. Mr. Hendy M. Fakhrudin 4. Ms. Diah Triana

Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

- Berkaitan dengan fungsi nominasi, membantu Dewan Komisaris dalam:
 - menyusun dan merekomendasikan komposisi jabatan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - menyusun konsep kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - menyusun konsep kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris; serta
 - menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Berkaitan dengan fungsi remunerasi, membantu Dewan Komisaris dalam :
 - Mengumpulkan data dan informasi terkait penentuan kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - Remunerasi yang berlaku tahun 2021 pada industri sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan skala usaha Perusahaan dalam industrinya;
 - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;

Nomination and Remuneration Committee Work Program

- In relation to the nomination function, assisting the Board of Commissioners in:
 - formulating and recommending the composition of positions and the nomination process for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - formulating the concept of policies and criteria needed in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - formulating the concept of policies of performance appraisal and evaluation of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Compiling and giving recommendations regarding the capacity development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners; and
 - reviewing and proposing candidates who have met the criteria for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
- In relation to the remuneration function, assisting the Board of Commissioners in:
 - Collecting data and information related to the determination of remuneration policies that at least include:
 - Remuneration applicable in 2021 in the similar industry and the Company's business scale in the industry;
 - Duties, responsibilities and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that are related to the achievement of the goals and performance of the Company;

- 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- b. Melakukan evaluasi atas data dan informasi dalam angka B.1. tersebut di atas, dan menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Dewan Komisaris termasuk rekomendasi perbaikan.
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
4. Berkaitan dengan Organisasi PT PPA :
 - a. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait perubahan Struktur Organisasi PT PPA sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - b. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait job description masing-masing fungsi di dalam organisasi PT PPA sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, guna memastikan bahwa seluruh tugas pokok telah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dan telah diakomodasi dengan baik, efisien dan efektif.
5. Berkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP"):
 - a. Apabila Direksi menyusun perubahan RJPP 2020 - 2024, sesuai dengan RPJMN, 2020 - 2024, KNR akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi atas RJPP yang disampaikan oleh Direksi, terkait dengan aspek nominasi dan remunerasi.
 - b. KNR akan membantu menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris untuk tahun 2021, terkait dengan aspek nominasi dan remunerasi.
 - c. KNR akan meneliti dan menelaah RKAP PT PPA tahun 2022 yang diusulkan oleh Direksi dari aspek nominasi dan remunerasi. Dari hasil telaahan tersebut, KNR akan berkontribusi dalam menyusun konsep pendapat dan saran Dewan Komisaris atas RKAP PT PPA tahun 2022.
6. Berkaitan dengan tugas-tugas PT PPA yang bersifat administratif dalam rangka pelaksanaan GCG, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerjasama dengan Komite Audit, Komite PR & GCG akan:
 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya untuk merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditor) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun berjalan.
- 3) Target performance or performance of each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners; and
- 4) The balance between fixed and variable benefits.
- b. Evaluating the data and information in point B.1 mentioned above, and submitting the results of the evaluation to the Board of Commissioners including recommendations for improvement.
3. Assisting the Board of Commissioners in assessing and evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners against the predetermined benchmarks as subjects of evaluation.
4. In relation to the PT PPA Organization:
 - a. Evaluating the recommendation of the Board of Directors regarding changes in the Organizational Structure of PT PPA up to 1 (one) level below the Board of Directors.
 - b. Evaluating the Board of Directors' proposal regarding the job description of each function within the PT PPA organization up to 1 (one) level below the Board of Directors, to ensure that all main tasks are in accordance with the company's aims and objectives in the Company's Articles of Association, and have been accommodated properly, efficiently and effectively.
5. In relation to the Company's Long Term Plan ("RJPP") and the Company's Work Plan and Budget ("RKAP"):
 - a. If the Board of Directors makes changes to the RJPP 2020 - 2024, in accordance with the RPJMN, 2020 - 2024, the NRC will assist the Board of Commissioners in evaluating the RJPP submitted by the Board of Directors in all aspects related to nomination and remuneration.
 - b. KNR will help prepare the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2021 in all aspects related to nomination and remuneration.
 - c. KNR will research and review PT PPA's 2022 RKAP proposed by the Board of Directors from the aspect of nomination and remuneration. Based on the results, the KNR will contribute to the drafting of opinions and suggestions of the Board of Commissioners on PT PPA's RKAP 2022.
6. In relation to PT PPA's administrative duties in GCG implementation, the Nomination and Remuneration Committee in collaboration with the Audit Committee, PR & GCG Committee will:
 - a. Assist the Board of Commissioners within the limits of their authority to respond to suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors) that are submitted directly to the Board of Commissioners.
 - b. Assist the Board of Commissioners in overseeing and providing advice on the policies and implementation of procurement of goods and services in the current year.

c. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan tentang mutu dan pelayanan pada tahun berjalan. d. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan pada tahun berjalan. e. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi serta pemahaman dan pelaksanaan nilai dan budaya organisasi (core values perusahaan). f. Membantu Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP. g. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi kepada RUPS atas usulan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. 7. Berkaitan dengan kegiatan audit, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris untuk : a. Mendukung Komite Audit dalam melakukan evaluasi secara berkala atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Audit Internal. b. Mendukung Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris untuk memastikan audit eksternal dan internal dilaksanakan secara efektif serta membantu melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PT PPA yang diterima oleh Dewan Komisaris. 8. Berkaitan dengan evaluasi atas kinerja Direksi: Komite Nominasi dan Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi atas kinerja Direksi, untuk kemudian hasilnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. 9. Berkaitan dengan pelaporan-pelaporan, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris untuk: a. Menyusun laporan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan, agar dapat segera disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS b. Menyusun tanggapan atas Laporan Berkala yang disampaikan oleh Direksi (Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III serta Laporan Tahunan), agar dapat segera disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. c. Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (Triwulan I, II, dan III, serta Tahunan), agar dapat segera disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.	c. Assist the Board of Commissioners in overseeing and providing advice on the policies and implementation of quality and service in the current year. d. Assist the Board of Commissioners in overseeing and providing advice on the policies and implementation of company compliance in implementing regulations in the current year e. Assist the Board of Commissioners in overseeing and providing advice on the policies and implementation of human resources policies, particularly those relating to competency improvement as well as the comprehension and implementation of organizational values and culture (company core values). f. Assist the Board of Commissioners in overseeing and monitoring the compliance of the Board of Directors in running the company with the RKAP and/or RJPP. g. Assist the Board of Commissioners in giving approval and/or recommendation to the GMS on the recommendation of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and applicable rules and regulations. 7. In relation to audit activities, the Nomination and Remuneration Committee will assist the Board of Commissioners in: a. Supporting the Audit Committee in conducting regular evaluations of the results of the examinations conducted by the Internal Audit. b. Supporting the Audit Committee in assisting the Board of Commissioners to ensure that external and internal audits are carried out effectively and giving assistance to reviewing complaints relating to PT PPA received by the Board of Commissioners. 8. In relation to the evaluation of the performance of the Board of Directors: The Nomination and Remuneration Committee will assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of the Board of Directors whose results will be submitted by the Board of Commissioners to the GMS. 9. In relation to reports, the Nomination and Remuneration Committee will assist the Board of Commissioners in: a. Preparing reports if there are symptoms of declining performance and ensuring that all suggestions for improvement that have been submitted to the Board of Directors are immediately submitted to the GMS b. Preparing responses to the Periodic Reports submitted by the Board of Directors (Quarter I, II, and III Management Reports and Annual Reports), so that the Board of Commissioners can immediately submit them to the GMS. c. Preparing the Supervisory Task Report for the Board of Commissioners (Quarter I, II, and III, and Yearly), so that the Board of Commissioners can immediately submit it to the GMS.

- d. Melakukan evaluasi atas laporan-laporan lain yang disampaikan Direksi.
10. Berkaitan dengan kehadiran dan penyelenggaraan rapat:
 - a. Komite Nominasi dan Remunerasi akan turut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan RKAP tahun 2021, sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi akan turut hadir Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan PT PPA untuk Tahun Buku 2019, sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.
 - c. Hadir dan berpendapat secara aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 1 bulan).
 - d. Menyelenggarakan Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi (minimal 1 kali dalam 4 bulan).
11. Berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan kerja:

Berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris (untuk meninjau antara lain, aset kelolaan, BUMN yang berada dalam proses maupun telah melaksanakan kegiatan RR oleh PT PPA, proyek-proyek investasi PT PPA, Aset Kelolaan dan Anak Perusahaan dari Perusahaan Anak PT PPA).
12. Berkaitan dengan Aspek Dinamis (Peningkatan Kompetensi):

Peningkatan kompetensi dimaksudkan sebagai program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka meningkatkan kemampuan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Bentuk kegiatan antara lain melalui keikutsertaan dalam short course, workshop (rapat kerja), seminar, atau sertifikasi. Keikutsertaan masing-masing anggota Komite Audit dalam kegiatan tersebut sebanyak minimal satu kali dalam setahun, sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.
13. Melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan tugas-tugasnya selama tahun 2021, dengan target penyelesaian pada akhir Februari 2022.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan rapat Komite secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
3. Menyusun pedoman atau piagam Komite yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

- d. Evaluating other reports submitted by the Board of Directors.

10. With regard to attendance and holding of meetings:
 - a. The Nomination and Remuneration Committee will attend the General Meeting of Shareholders for the Ratification of the 2021 RKAP, in accordance with the assignment of the Board of Commissioners.
 - b. The Nomination and Remuneration Committee will attend the General Meeting of Shareholders of PT PPA's Annual Report for the 2019 Fiscal Year, in accordance with the assignment of the Board of Commissioners.
 - c. Attend and actively give opinions in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (at least 1 time in 1 month).
 - d. Organizing the Nomination and Remuneration Committee Internal Meetings (at least 1 time in 4 months).
11. In relation to the implementation of working visits:

Based on the assignment from the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee accompany the Board during work visit (to review i.e. assets under management, SOEs that are in the process of or have implemented RR activities by PT PPA, PT PPA's investment projects, Assets under Management and Subsidiaries from the Subsidiary Company PT PPA).
12. Regarding Dynamic Aspects (Competency Improvement):

Competency improvement is intended as a program to increase the knowledge and insight of the Nomination and Remuneration Committee in order to its competence in discharging its duties, functions and responsibilities. Forms of activity include participation in short courses, workshops (work meetings), seminars, or certifications. Members of the Audit Committee shall participate in at least of such activities, subject of course to assignment of the Board of Commissioners.
13. Making self-assessment on the implementation of its duties during 2021, with a target for completion by the end of February 2022.

Implementation of the Duties of the Nomination and Remuneration Committee

1. Must act independently in carrying out their duties and be responsible to the Board of Commissioners;
2. Hold at least 1 (one) regular Committee meeting in 4 (four) months;
3. Prepare guidelines or committee charters that are binding on each member of the Committee and submit them to the Board of Commissioners for stipulation.
4. Carry out other duties assigned to it by the Board of Commissioners in accordance with the applicable rules and regulations.

5. Terkait fungsi Nominasi:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) Kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- b. Membantu Dewan Komisaris mengenai melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris; dan
- d. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

6. Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penentuan kebijakan remunerasi;
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Struktur Remunerasi, Kebijakan atas Remunerasi dan Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam mewujudkan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, calon anggota Direksi Perusahaan telah melalui rangkaian proses sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham.

Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

5. Regarding the Nomination function:

- a. Preparing and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - 1) Position composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
 - 2) Policies and criteria required in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
 - 3) Policy for performance appraisal and evaluation on members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
- b. Assisting the Board of Commissioners in assessing and evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners against the predetermined benchmarks as subjects of evaluation;
- c. Preparing and giving recommendations on capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners; and
- d. Reviewing and proposing candidates who have met the criteria for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

6. Regarding the Remuneration Function

- a. Collecting data and information related to the determination of remuneration policies;
 - b. Preparing and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding: Remuneration Structure, Policy on Remuneration and Amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners,
- Assisting the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners

Board of Directors Succession Policy

In order to embody a transparent, accountable, and responsible Board of Directors members appointment and succession, the candidate for the Company's Board of Directors members has passed several processes before proposing to the Shareholders.

The Board of Directors' succession policy refers to SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, on Amendment to SOE Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, regarding the Implementation of Good Corporate Governance; and SOE Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 regarding the Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 mengatur bahwa sumber Bakal Calon Direksi BUMN dapat berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas:
 - a. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak usaha dari BUMN/perusahaan patungan BUMN.
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Sumber Lain yang terdiri dari:
 - a. Pejabat BUMN lain;
 - b. Sumber lainnya.

Direksi diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham. Proses pencalonan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan mekanisme penilaiannya tercantum dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut disampaikan bagan pengusulan hingga penetapan Direksi di lingkup Perusahaan.

The Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 stipulates that the prospective candidates for Director of SOE may be originated from:

1. SOE Board of Directors
2. SOE Board of Commissioners/Supervisory Board
3. SOE Talents consisting of:
 - a. Official 1 (one) level below Board of Directors or officials who have special achievements
 - b. Directors of subsidiaries of SOE/SOE joint ventures
4. Ministry of SOE Talents
5. Other Sources consisting of:
 - a. Another SOE officials
 - b. Other Sources

The Board of Directors is appointed by shareholders through the GMS from the candidates nominated by Shareholders. The nomination process is carried out in accordance with applicable laws and regulations, and the nomination is binding for the GMS.

To ensure integrity and professionalism in their fields, all candidates for the Board of Directors undergo a fit and proper test carried out in accordance with applicable laws and regulations. The implementation of fit and proper test for candidates for Directors referring to the Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 and the evaluation mechanism is contained in the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-09A/MBU/2002 regarding Fit and Proper Test of Prospective Candidates of SOE Board of Directors, as well as other laws and regulations. The following is a chart describing the proposal until the Directors' determination within the Company.

Organ Pendukung Direksi

THE SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF DIRECTORS

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, Direksi dibantu oleh organ pendukung yang menjalankan fungsi bisnis serta pengawasan internal. Fungsi bisnis dijalankan oleh Direktur Utama dan Direksi lainnya serta organ di bawahnya. Sedangkan fungsi pengawasan internal terhadap berbagai aspek didukung oleh Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, Fungsi Manajemen Risiko, serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

In carrying out the Company's operational activities, the Board of Directors is assisted by the supporting organs that carry out business functions as well as the internal supervision. The business function is carried out by the President Director and other Directors along with the organs under them. The internal control function on various aspects is supported by the Internal Audit Unit, Corporate Secretary, Corporate Strategic Planning and Performance Management, Risk Management Function, and Investment and Risk Management Committee.

DIREKSI DAN ORGAN PENDUKUNG

The Supporting Organs of Board of Directors



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang berperan memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan dan hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola Perusahaan serta nilai-nilai Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a supporting organ of the Board of Directors that has the role of facilitating the communication among the Company's organs, being responsible for the policy formulation, planning, as well as ensuring the effectiveness and transparency of the corporate communication, institutional relation and investor relation by always concerning corporate governance principles, and corporate values.

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-57/PPA/0919 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Perusahaan telah menunjuk Agus Widjaja sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-10/PPA/0221 tanggal 25 Februari 2021.



AGUS WIDJAJA

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretariat Division

Menjabat sejak 25 Februari 2021
Serving since February 25, 2021

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesian
Usia Age	50 tahun pada tahun buku 2021	50 years in fiscal 2021
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Bekasi, 25 November 1971	Bekasi, November 25, 1971
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat	Depok, West Jawa
Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi No. SK-10/ PPA/0221 tanggal 25 Februari 2021.	Board of Directors Decree No. SK-10/PPA/0221 dated February 25, 2021.
Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas Jakarta (1994)	Bachelor Degree in Economics from STIE Perbanas Jakarta (1994)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Kepala Grup Komunikasi Perusahaan PT PPA (2018 - 2020) - Kepala Unit Communication External & Stakeholder - Group Corporate Communication PT PPA (2014 - 2018)	- Head of Corporate Communications Group (2018 - 2020) - Head of External & Stakeholder Communication Unit - Group Corporate Communication (2014 - 2018)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak ada	None

Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan

Secara struktural, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan berada langsung di bawah Direktur Utama. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi SK-64/PPA/1021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Structurally, the Corporate Secretary is an official who reports directly to the President Director. The functions and roles of the Corporate Secretary are described in the Decree of the Board of Directors No. SK-57/PPA/0919 concerning the Main Duties and Functions of the Work Unit at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

The Party in charge of Corporate Secretary Appointment and Dismissal

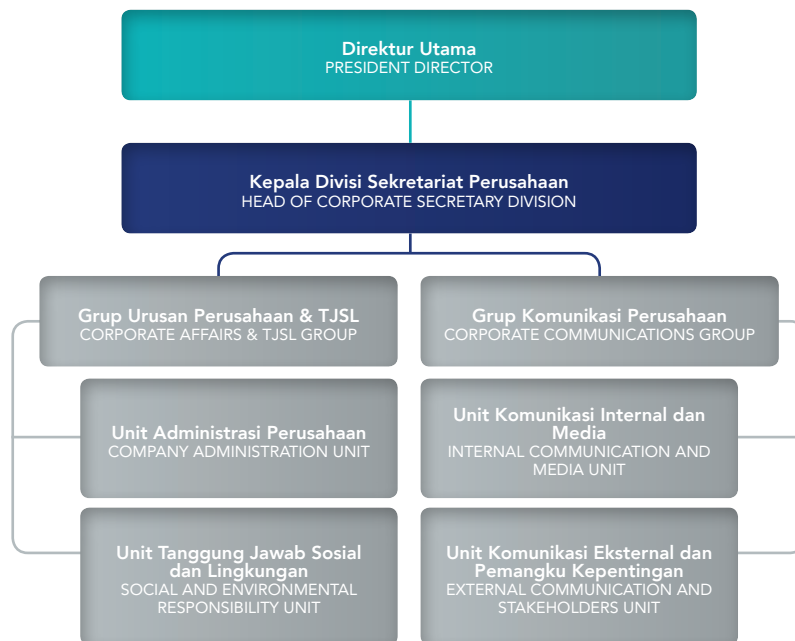
The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director and is appointed and dismissed based on the Decree of the President Director based on the Company's internal mechanism with the Board of Commissioners' approval.

Corporate Secretary

The Company has appointed Agus Widjaja as the Head of the Corporate Secretariat Division based on Board of Directors Decree No. SK-10/PPA/0221 dated February 25, 2021.

Organizational Structure of Corporate Secretariat Division

Structurally, the Head of the Corporate Secretariat Division is directly under the President Director. The organizational structure of the Corporate Secretary is determined in accordance with Board of Directors Decree SK-64/PPA/1021 dated October 6, 2021, regarding the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).



Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Sekretariat Perusahaan sebanyak 11 orang.

As of the end of 2021, there were 11 (eleven) employees in the Corporate Secretariat Division.

No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Head of Corporate Secretariat Division	1
2	Kepala Grup Urusan Perusahaan dan TJSL Group Head of Corporate Affairs and TJSL	1
3	Kepala Grup Komunikasi Perusahaan Group Head of Corporate Communication	1
4	Kepala Unit Administrasi Perusahaan Unit Head of Corporate Administration	1
5	Kepala Unit Komunikasi Perusahaan Unit Head of Corporate Communication	1
6	Kepala Unit TJSL Head of Social and Environmental Responsibility Unit	1
7	Staf Staff	5
Jumlah Total		11

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara khusus, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas untuk mewujudkan keterbukaan informasi oleh Direksi, serta komunikasi dan hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan. Rincian tugas dan tanggung jawab lainnya mencakup:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*);

The Duty and Responsibility

Specifically, the Corporate Secretary has the task of realizing information disclosure by the Board of Directors, as well as communication and relations between the Company and stakeholders. Details of other duties and responsibilities include:

1. Ensuring that the Company complies with the regulations on disclosure provisions in line with the implementation of GCG principles.
2. Providing the information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or as requested.
3. Serving as a liaison officer.

4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, dan risalah rapat Direksi serta risalah rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
5. Mengkoordinasikan kegiatan PKBL.

Keterbukaan Informasi Perusahaan

Dalam hal keterbukaan informasi, Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Triwulanan/Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Selain pengungkapan informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya, antara lain mengenai:

1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan;
2. Penilaian terhadap Perusahaan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
3. Riwayat hidup anggota Dewan komisaris, Direksi dan pimpinan senior Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka;
4. Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor Perusahaan;
5. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
7. Informasi material mengenai karyawan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan;
8. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan;
9. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung; dan
10. Pelaksanaan pedoman GCG.

Komunikasi dan Hubungan Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan prinsip GCG dan materialitas masalah yang dihadapi. Seluruh Organ Perusahaan memastikan bahwa semua informasi dan/atau produk Perusahaan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif kepada segenap pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Tata kelola Perusahaan yang baik milik Perusahaan, antara Perusahaan dengan

4. Being the administer as well as keeping the corporate documents, including but not limited to Shareholder Register, Special list, and Minutes of Meetings of Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS.
5. Coordinating the partnership program and community development activities.

Disclosure of Corporate Information

In terms of the information disclosure, the Board of Directors is required to disclose the important information in the Quarterly/ Annual Report and Financial Statements of the Company to the Shareholders and related Government institutions according to prevailing law on time, accurately, clearly, and objectively.

Besides the information disclosure as required under the prevailing laws and regulations in Annual Report and Financial Statements, the Board of Directors shall take the initiative to disclose other important issues that are useful in the decision-making process of Shareholders and other Stakeholders, among others:

1. The purposes, objectives, and strategy of the Company's business;
2. The assessment of the Company by external auditors, credit rating agencies, and other agencies;
3. Curriculum vitae of members of Board of Commissioners, Board of Directors, and key executives of the Company, as well as their salaries and allowances;
4. The honorarium provision system for the Company's external auditors.
5. The payroll system and the provision of allowances to members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
6. The material risk factors that can be anticipated, including the management's assessment of the business climate and risk factors;
7. The material information regarding the Company's employees and Stakeholders;
8. The material claims filed by and/or against the Company and the case in judicial or arbitration institutions involving the Company;
9. The conflict of interests that is ongoing or may occur; and
10. The implementation of Code of GCG.

Corporate Communication and Relations with Stakeholders

The Board of Directors and the Board of Commissioners actively implement the GCG principles and the materiality of problems encountered. All of the organs from the Company are ensuring that all information and/or a product of the Company are confidential until they are publicly announced.

To be able to convey the information comprehensively to all stakeholders, as mandated in the Code of Corporate Governance of the Company, the Company and the Stakeholders should build a relationship that is in accordance

Pemangku Kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling menghormati berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

with the principles of fairness, equality, and mutual respect based on the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Para Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan milik Perusahaan meliputi:

1. Karyawan;
2. Instansi Pemerintah terkait;
3. BUMN lain;
4. Kreditur;
5. Rekanan;
6. Masyarakat;
7. Pemangku kepentingan lain yang mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan.

The stakeholders, as referred to in the Code of Corporate Governance of the Company, include:

1. Employees
2. The Related Government Institutions
3. Other SOEs
4. Creditors
5. Partners
6. Community
7. Other stakeholders that have legal relationships with the Company.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

The Competency Development Program

Kebijakan

Kebijakan Perusahaan terkait dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, yaitu dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Perusahaan akan memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran.

Policy

The Company has policies related to the development and improvement of the competencies of the Corporate Secretary, which is carried out through various training and education.

Realisasi

Realisasi kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Realization

The list of training activities and competency improvement that the Head of the Corporate Secretariat Division participated in throughout 2021 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Agus Widjaja Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Publik Public Training	Rencana Penerbitan <i>Global Bond</i> dan Pelaksanaan <i>Project Paris</i> PT PPA bersama Konsultan dan Kementerian BUMN Plan for the Issuance of Global Bonds and Implementation of the Paris Project of PT PPA with Consultants and the Ministry of SOEs	Online, 1 April 2021 Online, April 1, 2021	PT PPA
Agus Widjaja Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Publik Public Training	Penanganan BUMN Titip Kelola dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN) The Handling of SOEs Entrusted Management with the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance (DJKN)	Online, 21 Mei 2021 Online, May 21, 2021	PT PPA

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Implementation of Duties of Corporate Secretary in 2021

No.	Kegiatan Activity	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization
1	Mengorganisasikan dan mengoordinasikan Rapat Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan Organizing and coordinating the Board of Directors Meeting which is held at least once a month.	12	93
2	Mengorganisasikan dan mengoordinasikan Rapat Dewan Komisaris & Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan Organizing and coordinating the Board of Commissioners & Board of Directors Meeting which is held at least once a month.	12	12
3	Membuat Risalah Rapat Direksi Making Minutes of Board of Directors Meeting.	12	93
4	Mengelola Dokumen Perusahaan: Penatausahaan dokumen setiap kali dokumen diterima Managing Company Documents: Document administration every time the documents are received.	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan Administering of all Company documents	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan Administering of all Company documents
5	Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi Carrying out the function of implementing and documenting GMS and Board of Directors Meetings	2 Keputusan RUPS dan 12 Risalah Rapat Direksi 2 GMS Resolutions and 12 Minutes of Board of Directors Meeting	2 Keputusan RUPS dan 93 Risalah Rapat Direksi 2 GMS Resolutions and 93 Minutes of Board of Directors Meeting
6	Membuat Laporan Manajemen: a. Triwulan b. Tahunan Preparing The Management Reports: a. Quarterly b. Annually	- Laporan Manajemen Triwulan 1 Laporan Manajemen Tahunan - Quarterly Management Report 1 Annual Management Report	a. Laporan Manajemen Triwulan I, II, III b. 1 Laporan Manajemen Tahunan a. First, Second, Third Quarterly Management Reports b. 1 Annual Management Report
7	Membuat Laporan Tahunan Making Annual Report	Penyusunan Laporan Tahunan The Preparation of Annual Report	Laporan Tahunan tahun 2020 2020 Annual Report
8	Melaksanakan Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru setiap ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru Holding the Company Orientation Program for the new members of Board of Commissioners and Board of Directors each time there is a new member of Board of Directors and Board of Commissioners	Setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru Each of the new member of Board of Directors and Board of Commissioners	1 anggota Direksi baru 1 new member of Board of Directors
9	Menyalurkan dana Program Kemitraan Channeling funds for the Partnership Program	Penyaluran di atas 80% dari dana tersedia The disbursements above 80% of the available funds	Realisasi penyaluran dana PK sebesar 97,28% PK disbursement was realized at 97.28%
10	Monitoring kolektibilitas Pinjaman Program kemitraan Monitoring the collectibility of the Partnership Program Loans	Kolektibilitas Pinjaman di atas 80% dari dana yang disalurkan Loan collectibility above 80% of the disbursed funds	Realisasi kolektibilitas penyaluran pinjaman sebesar 99,00% Collectibility of loan disbursement was realized at 99.00%
11	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan Distributing funds for the Community Development Program	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan di atas 80% dari dana tersedia Distributing the Community Development Program funds above 80% of the available funds	Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan sebesar 100% The distribution of Community Development funds was realized at 100%
12	Media Monitoring	Rutin dilakukan harian Routinely done on a daily basis	Rutin dilakukan harian Routinely done on a daily basis
13	News Analysis	Rutin dilakukan bulanan Routinely done on a monthly basis	Rutin dilakukan bulanan Routinely done on a monthly basis

No.	Kegiatan Activity	RKAP 2021 2021 RKAP	Realisasi 2021 2021 Realization
14	Publikasi Berita PPA PPA News Publication	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Routinely done according to the Company's activities	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Routinely done according to the Company's activities
15	Transparansi Informasi: <i>website</i> Perusahaan & Portal BUMN The Information Transparency: Company Website & SOE Portal	Update dan Maintenance Data Update and Maintenance of Data	Update dan Maintenance Data Update and Maintenance of Data
16	Transparansi Informasi: pengelolaan <i>e-mail</i> corpsec@ptppa.com The Information Transparency: corpsec@ptppa.com e-mail management	Rutin dilakukan harian Routinely done on a daily basis	Rutin dilakukan harian Routinely done on a daily basis
17	Dukungan pada kegiatan acara peringatan hari besar nasional Supporting the activities of national holidays	Disesuaikan dengan program acara Pemerintah Adjusted to Government events	Pelaksanaan: • Upacara HUT RI ke-75 • Upacara Kesaktian Pancasila • Upacara Hari Pahlawan Implementation: • 75th RI Anniversary Ceremony • Pancasila Sanctity Ceremony • Hero's Day Ceremony
18	Company Visit	Disesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Adjusted to Company activities	
19	Penyusunan Infrastruktur <i>Branding</i> Branding The Infrastructure Development	Pelaksanaan distribusi kalender 2021 Perusahaan kepada stakeholder eksternal dan media. The distribution of the Company's 2021 calendar to external stakeholders and the media.	Selesai Done
20	Dukungan kegiatan Perusahaan Supporting the Company's activities	Disesuaikan dengan kebutuhan Adjusted to needs	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Routinely carried out according to the Company's activities
21	Protokol Direksi Director's Protocol	-	Dilaksanakan sesuai kebutuhan Carried out as needed

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus diberikan oleh Direksi dengan berbagai strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada publik. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Perusahaan. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dengan KPI Sekretaris Perusahaan.

The Corporate Secretary Performance Assessment

Corporate Secretary has carried out the duties specifically assigned by Board of Directors with various strategies and work plans related to the delivery of information to the public. In GCG internalization, Corporate Secretary has conducted various activities continuously to internalize GCG implementation in the entire Company's circumstances. Corporate Secretary Performance Assessment is measured by the KPI of Corporate Secretary.

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh Kepala Divisi atau *General Manager* dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI menjadi mitra strategis (*strategic partner*) Perusahaan dalam pengawasan terhadap implementasi tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian, melalui auditor yang kompeten dan independen untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, SPI dipimpin oleh seorang kepala, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Hal itu merujuk pada Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Profil Kepala SPI

Perusahaan telah menunjuk Muhammad Reza Maulana sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 68A/PPA/1021 tanggal 25 Oktober 2021.



MUHAMMAD REZA MAULANA
Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Division

Warga Negara Citizenship	Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia Age	42 tahun	42 years old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Denpasar, 8 Februari 1979	Denpasar, February 8, 1979
Domisili Domicile	Jakarta Timur	East Jakarta
Bergabung di Perusahaan First Joined the Company	25 Oktober 2021	October 25, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (2002)	Bachelor Degree in Accounting from Brawijaya University, Malang (2002)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	- Certified Fraud Examiner dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sejak tahun 2020 - Qualified Internal Auditor (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) sejak tahun 2012	- Certified Fraud Examiner from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) since 2020 - Qualified Internal Auditor (QIA) from the Internal Audit Education Foundation (YPIA) since 2012
Riwayat Pekerjaan Work Experience	- Kepala Departemen Internal Audit & Risk Management PT Astra International, Tbk (Januari 2014 – Oktober 2021) - Senior Auditor PT Astra International, Tbk (Juli 2007 – Desember 2013) - Auditor PT Bank Syariah Mandiri (Maret 2003- Juli 2007)	- Head of the Internal Audit & Risk Management Department of PT Astra International, Tbk (January 2014 – October 2021) - Senior Auditor of PT Astra International, Tbk (July 2007 – December 2013) - Auditor at PT Bank Syariah Mandiri (March 2003- July 2007)

THE INTERNAL AUDIT/INTERNAL AUDIT UNIT

The Internal Control Unit (SPI) is an independent work unit led by the Head of Division or General Manager and reports directly to the President Director. SPI is a strategic partner of the Company in supervising the implementation of governance, risk management, and control through competent and independent auditors to achieve the Company's objectives.

In carrying out the internal audit function, the Internal Audit Unit is led by a head appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners. This refers to Article 28 and Article 29 of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 in conjunction with PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

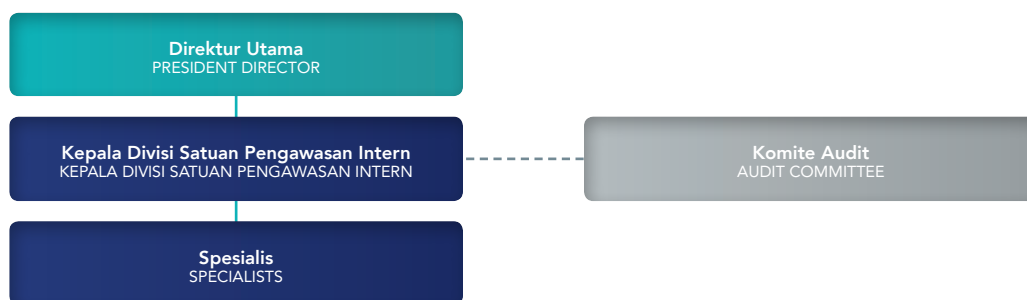
SPI Head Profile

The Company has appointed Muhammad Reza Maulana as Head of the Internal Audit Division based on the Decree of the Board of Directors No. 68A/PPA/1021 on October 25, 2021.

Struktur dan Kedudukan Divisi Satuan Pengawasan Intern

Secara struktural, Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern berada langsung di bawah Direktur Utama. Setiap auditor dalam organisasi SPI memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan penugasan audit internal yang mengacu pada panduan profesi dan rencana kegiatan yang telah disusun.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-84/PPA/1120 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), struktur organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Internal Audit Division Organizational Structure

Structurally, the Head of the Internal Audit Division works under the President Director. However, each auditor in the SPI organization has the duty, authority, and responsibility to do internal audit assignments that refer to professional guidelines and activity plans.

Based on Board of Directors Decree No. SK-84/PPA/1120 regarding the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), the organizational structure of the Internal Audit Division as of December 31, 2021, is as follows:

Sumber Daya Manusia Satuan Pengawasan Intern

Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Satuan Pengawasan Intern sebanyak 5 (lima) orang.

Human Resources Internal Audit Unit

As of the end of 2021, there were 5 employees in the Internal Audit Division.

No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Division	1
2	Kepala Grup/Spesialis Madya Group Head/Associate Specialist	1
3	Kepala Unit/Spesialis Unit Head/Specialist	3
4	Junior Spesialis Junior Specialist	-
5	Staf Staff	-
Jumlah Total		5

Piagam Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern Perusahaan telah memiliki Piagam Audit Internal atau *Internal Audit Charter*. Dokumen formal Perusahaan ini merupakan panduan bagi SPI dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus sebagai wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terhadap keberadaan fungsi *Audit Internal*. Piagam Audit Internal menjelaskan mengenai visi, misi, ruang lingkup, struktur dan kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan kode etik, serta hubungan kerja Audit Internal.

The Internal Audit Charter

The Company's Internal Audit Unit has an Internal Audit Charter, a formal corporate document regarding the existence and commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Internal Audit function. In addition, the Internal Audit Charter describes the Vision, Mission, Scope, Structure and Position, Responsibilities, Authority and Code of Conduct, and Work Relationship of the Internal Audit.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga perlu ditinjau secara berkala. Pada tahun 2019, telah dilakukan perubahan atas Piagam Audit Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan No. SK-1/KEP.KOM/PPA/I/2020 dan SK-9/PPA/0120 tentang Piagam Audit Internal, sehingga Piagam Audit Internal yang ditetapkan tanggal 22 Juni 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Persyaratan Auditor Internal

Perusahaan telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk menjadi auditor Perusahaan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit, Piagam Internal Audit mengharuskan auditor memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu:

1. Memiliki integritas serta perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas yang dijalankan;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
6. Mematuhi kode etik Auditor Internal;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau penetapan, atau putusan pengadilan, atau kewajiban profesi;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesi secara terus-menerus.

Sertifikasi Profesi

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi auditor, sertifikasi dibutuhkan untuk menunjukkan kualitas auditor yang memadai dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Adapun karyawan SPI yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut.

The Internal Audit Charter is a dynamic document; hence that needs to be reviewed regularly. Therefore, at the end of 2019, an amendment was made to the Internal Audit Charter determined by the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company No. SK-1/KEP.KOM/PPA/I/2020 and SK-9/PPA/0120 regarding the Internal Audit Charter supersedes the previous Internal Audit Charter established on June 22, 2017.

The Requirements as Internal Auditor

The Company has determined mandatory requirements for an employee to be appointed as the Company's auditor. To support the success of audit implementation, Internal Audit Charter requires the auditor to fulfill specific qualifications, as follows:

1. Having integrity as well as the objective and professional attitudes in implementing the duties.
2. Having the technical knowledge and/or experience in audit and other disciplines that are relevant to their scope of duties, including related laws and regulations
3. Having the knowledge regarding laws and regulations that are relevant to the task at hand.
4. Having good interaction and effective communication skills, both verbal and written.
5. Required to comply with the professional standards issued by the internal audit association.
6. Required to comply with the Internal Auditor's code of conduct.
7. Protecting the confidentiality of the information and/or data related to implementing internal audit's duty and responsibility except those regulated under the law, Court Sentence, or professional obligation.
8. Understanding the risk management, audit, and good corporate governance principles.
9. Willing to develop knowledge, expertise, and professional capability continuously.

Professional Certification

In order to improve the quality and the competency of auditors, certification is needed to demonstrate the adequate quality of auditors to support their duties and responsibilities. Therefore, the SPI employees who have participated in the certification program are as follows.

No.	Nama Name	Nama Sertifikat Profesi Name of Certificate and Profession	Lembaga Penerbit Issuer
1	Muhammad Reza Maulana	Qualified Internal Auditor (QIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Certified Fraud Examiner (CFE)	Association of Fraud Examiners (ACFE)
2	Erwin Adiyatno	Auditor Ahli Expert Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
		Certified Management Accountant (CMA)	The Institute of Certified Management Accountant (ICMA) Australia
		Certified Risk Management Professional (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Institute of Risk Management Professional Certification (LSPMR)
		Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Government Goods/Services Procurement Expert	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)
3	Dady Atma Priyagi	Auditor Ahli Expert Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
		Certified Professional Management Accountant (CPMA)	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAM)
		Associate Certified Public Accountant (ACPA)	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)
		Certified Risk Management Professional (CRMO)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Institute of Risk Management Professional Certification (LSPMR)
		ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)	ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating committee
		Governance Risk and Compliance Professional (GRCP)	Open Compliance and Ethic Group (OCEG)
		Governance Risk and Compliance Auditor (GRCA)	Open Compliance and Ethic Group (OCEG)
4	Hidayah Widyaningrum	Auditor Ahli Expert Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
5	Fajar Setianto	Auditor Ahli Expert Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
		Chartered Accountant (CA)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Indonesian Institute of Accountants (IAI)
		Certified Risk Management Professional (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Institute of Risk Management Professional Certification (LSPMR)

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Divisi SPI berperan melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Divisi SPI sesuai Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja rencana audit internal berbasis risiko sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun;

The Duty, Responsibility, and Authority of Internal Audit Division

The Internal Audit Division is in charge of performing the independent and objective assurance and consulting functions to the management to encourage the added value creation and improve the Company's business operations. According to the Internal Audit Charter, the duties and responsibilities of the Internal Audit Division include:

1. Preparing and carrying out the risk-based internal audit plan work program at least once a year.

2. Menyampaikan rencana audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan *review* dan persetujuan;
 3. Menguji, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
 4. Melakukan audit/*review* serta penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, manajemen risiko, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 5. Melakukan audit/*review* dengan tujuan tertentu pada satuan kerja dan/atau kegiatan, sesuai dengan rencana audit internal tahunan;
 6. Memberikan informasi yang objektif serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang diperlukan tentang kegiatan yang diaudit kepada *stakeholder* terkait;
 7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaiakannya kepada pihak terkait;
 8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi yang telah diberikan;
 9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
 10. Melakukan kegiatan konsultasi (*consulting*) atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen;
 11. Melakukan tugas lain yang dipandang perlu oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
 12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama Perusahaan dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.
 13. Baik dalam penugasan audit maupun konsultasi, Auditor Internal hanya bertanggung jawab pada rekomendasi dan/atau masukan serta opini dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur yang dilakukan secara memadai dari penugasan tersebut.
2. Submitting the Internal Audit Plan to President Director and Board of Commissioners through Audit Committee for further review and approval.
 3. Examining, evaluating, and reporting the implementation of governance, risk management, and control of the Company in accordance with the Company's policy.
 4. Performing the audit/*review* as well as evaluating the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, risk management, human capital, marketing, information technology, and other activities.
 5. Performing the audit/*review* with a specific purpose in the work unit and/or activities, in accordance with the annual internal audit plan.
 6. Providing the objective information and recommendations for improvements as required on the activity being audited to related stakeholder.
 7. Drafting the audit reports and submitting them to the relevant parties.
 8. Monitoring, analyzing, and reporting the implementation of corrective follow-up actions on the recommendations given.
 9. Creating the programs to evaluate the quality of internal audit activities conducted.
 10. Conducting the consulting activities based on the management's request in order to achieve Company's goals without taking over management responsibilities.
 11. Performing the other duties as deemed necessary by the Company's President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee.
 12. Submitting the quarterly activity reports on the implementation of tasks to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
 13. Either in the audit or the consulting assignments, the Internal Audit Division is only responsible for the recommendation and/or input as well as the opinions and/or conclusions resulting from the procedure, which are performed adequately from the assignment.

Pengembangan Kompetensi Auditor Internal

Perusahaan memiliki kebijakan pengembangan dan peningkatan kompetensi Auditor Internal. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, baik secara internal maupun yang diadakan oleh lembaga eksternal.

Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Satuan Pengawas Intern di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab "Profil Perusahaan" dalam laporan tahunan ini. Sementara program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh auditor internal lain sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Development of Internal Auditor Competency

The Company has policies related to the development and the improvement of the competency of Internal Auditors, conducted through various training and education both internally and held by external institutions.

The list of training and the competency development activities attended by the Head of the Internal Audit Unit throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. In addition, the competency development programs attended by internal auditors throughout 2020 are as follows:

Nama Name	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Muhammad Reza Maulana	Internal	Knowledge Management	Jakarta/1-2 Juni 2021 Jakarta/June 1-2, 2021	PT Astra International, Tbk
	Internal	Transformation Leadership	Jakarta/17-18 November 2021 Jakarta/November 17-18, 2021	PT PPA (Persero)
Erwin Adiyatno	Publik Public	Qualified Internal Auditor Lanjutan	Jakarta/15-27 Maret 2021 Jakarta/ March 15-27, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
	Publik Public	Fraud Detection Solution	Jakarta/8 Juni 2021 Jakarta/June 8, 2021	FKSPI Asgarajaskeu Plus
	Internal	Effective Leadership for First Line Manager	Jakarta/30 September 2021 Jakarta/September 30, 2021	PT PPA (Persero)
	Internal	Leadership Challenges	Jakarta/24-25 November 2021 Jakarta/November 24-25, 2021	PT PPA (Persero)
Dady Atma Priyagi	Publik Public	Penguatan Pengendalian Internal untuk Menciptakan Nilai How to Strengthen Internal Controls to Create Value	Jakarta/29 April 2021 Jakarta/April 29, 2021	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
	Publik Public	Fraud Detection Solution	Jakarta/8 Juni 2021 Jakarta/June 8, 2021	FKSPI Asgarajaskeu Plus
	Publik Public	Qualified Internal Auditor Lanjutan	Jakarta/11-25 Oktober 2021 Jakarta/October 11-25, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Hidayah Widyaningrum	Publik Public	Fraud Detection Solution	Jakarta/8 Juni 2021 Jakarta/June 8, 2021	FKSPI Asgarajaskeu Plus
	Publik Public	Qualified Internal Auditor Lanjutan	Jakarta/6-18 Desember 2021 Jakarta/December 6-18, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
Fajar Setianto	Publik Public	Assessing Internal Control – Coso Based	Jakarta/19-20 April 2021 Jakarta/April 19-20, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation

Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern Tahun 2021

Selama tahun 2021, SPI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan SPI, antara lain:

1. Layanan *assurance* 6 (enam) penugasan;
2. Layanan *consulting* 2 (dua) penugasan dan lainnya sesuai dengan permintaan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi, permintaan dari Unit Bisnis atau Unit Kerja lainnya, serta penawaran yang dilakukan oleh SPI;
3. Kegiatan pendampingan/*counterpart* atas audit/kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asesor GCG, dan Pihak terkait lainnya;
4. Manajemen SPI yang meliputi pemantauan tindak lanjut rekomendasi Auditor (SPI, BPK, KAP), administrasi penugasan, pemutakhiran rencana, serta pelaporan kegiatan (perencanaan tahunan/RKAP, Laporan dan, Laporan Tahunan), *meeting* dengan Komite Audit, serta pengembangan kapasitas SDM SPI.

Internal Audit Unit Activities in 2021

During 2021, SPI has carried out its duties and responsibilities in accordance with the SPI Annual Work Plan, including:

1. The assurance services for 6 (six) assignments;
2. Two (2) Consulting the services in accordance with requests from Board of Commissioners and/or Board of Directors, requests from Business Units or other Work Units, as well as the offers made by SPI;
3. The assistance/*counterpart* activities for audits/activities carried out by Public Accounting Firms (KAP), Supreme Audit Agency (BPK), GCG Assessors, and other related parties;
4. SPI management includes monitoring the follow-up to Auditor's recommendations (SPI, BPK, KAP), assignment administration, updating plans, reporting activities (annual planning/RKAP, Reports, Annual Reports), meetings with Audit Committee, and SPI human capital capacity building.

Realisasi Penugasan Audit/Reviu

Dari 6 (enam) penugasan *assurance* dan 2 (dua) penugasan *consulting* yang direncanakan, selama tahun 2021 SPI telah melakukan penugasan *assurance* sebanyak 6 (enam) penugasan dari RKAP 2021 dan sebanyak 4 (empat) penugasan non-RKAP 2021. Dengan demikian, total penugasan *assurance* dan *consulting* yang dilaksanakan selama tahun 2021 sebanyak 10 penugasan atau mencapai 125% dari RKAP.

The Realization of Audit/Review Assignments

As from the 6 (six) planned assurance assignments, during 2021, SPI has carried out 6 (six) 2020 RKAP assurance assignments and 4 (four) non-RKAP 2020 assignments. Thus, the total assurance assignments carried out by SPI during 2020 were 10 (ten) assignments or reached up to 125% of the 2021 RKAP.

No.	Rincian Penugasan Assurance Details of Assurance Assignment	Rincian Penugasan Consulting Details of Consulting Assignment
1	Evaluasi terhadap Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT PPA (Persero). Evaluation of the Results of the Assessment and Follow-up on Recommendations to Improve the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT PPA (Persero).	Kajian atas <i>Project 147</i> . Review of <i>Project 147</i> .
2	Reviu atas Penerapan <i>Internal Control</i> pada PT PPA (Persero). Review of the Implementation of <i>Internal Control</i> at PT PPA (Persero).	Kajian atas <i>Project Eiffel</i> . Review of <i>Eiffel Project</i> .
3	Verifikasi atas Kelengkapan Prosedur dan Dokumen Pengadaan PT PPA (Persero). Verification of the Adequacy of PT PPA's (Persero) Procurement Procedures and Documents.	Kajian atas Pembiayaan PT Varia Intra <i>Finance</i> . Review of PT Varia Intra Finance Financing.
4	Reviu atas Kelengkapan Administrasi Jaminan Kegiatan Investasi PT PPA (Persero). Review of the Administrative Adequacy of PT PPA's Investment Activities Guarantee (Persero).	Kajian atas Pembiayaan PT Niaga Bumi Energi. Review of Financing for PT Niaga Bumi Energi. Penyampaian usulan perbaikan <i>policy</i> Investasi PT PPA (Persero). Submission of proposals for improvement of PT PPA's (Persero) Investment policy. Penyampaian risiko dan mitigasi atas rencana penerapan <i>e-invoicing</i> PT PPA (Persero). Submission of risks and mitigation of PT PPA's (Persero) e-invoicing implementation plan.

Realisasi Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Divisi SPI adalah:

1. Sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) serta narahubung antara PT PPA (Persero) dengan KPK-RI untuk WBS terintegrasi.
2. Rapat-rapat berkala dengan Direktur Utama dan Komite Audit.
3. Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak pada PT PPA Tahun 2020.
4. Pendamping/*Counterpart* atas Kegiatan Audit Laporan Keuangan PT PPA (Persero) Konsolidasian dan Entitas Anak Tahun Buku 2020, 2021, dan Review Terbatas Laporan Keuangan Interim PT PPA periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 oleh KAP RSM Indonesia.
5. Kegiatan Audit Keuangan BUMN Titip Kelola oleh KAP RSM Indonesia.
6. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal (BPK RI, Kantor Akuntan Publik), maupun tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh SPI.
7. Pelaksanaan *training* secara bertahap 3 orang auditor untuk sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA).

The Realization of Other Activities

Other activities carried out by SPI Division are:

1. As Chairman and Secretary of the Whistle Blowing System Management Team and the liaison between PT PPA (Persero) and the KPK-RI for integrated WBS.
2. Regular meetings with the President Director and the Audit Committee.
3. Tax Audit by the Directorate General of Taxes at PT PPA 2020.
4. Companion/*Counterpart* on Audit Activities of Consolidated Financial Statements of PT PPA (Persero) and its Subsidiaries Fiscal Year 2020, 2021, and Limited Review of PT PPA's Interim Financial Statements for the period January 1, 2021 to June 30, 2021 by KAP RSM Indonesia.
5. Financial Audit Activities of State-Owned Enterprises Trust Management by KAP RSM Indonesia.
6. Monitoring the follow-up to recommendations on audit results carried out by external parties (BPK RI, Public Accounting Firms), as well as follow-up to recommendations on audit results by SPI.
7. Implementation of training in stages for 3 auditors for *Qualified Internal Auditor* (QIA) certification.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Keberadaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Regulasi tersebut mengamanatkan, Direksi harus menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Efektivitas pelaksanaan SPI akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan perusahaan. Karena itu, Sistem Pengendalian Internal menjadi dasar bagi kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan aman.

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen sebagai Perusahaan yang tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki Perusahaan termasuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan.

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Konsistensi penerapan kebijakan/ketentuan baik internal maupun eksternal;
4. Akurasi dan keandalan akuntansi.

Pedoman dan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. SK-35/PPA/0713 tanggal 17 Juli 2013. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh karyawan.

Upaya tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) terdiri atas unsur:

THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's effective Internal Control System is an important element in the Company's management and forms the basis for sound and safe operational activities, to Article 26 of the Minister of State-Owned Enterprise Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding The Good Corporate Governance Implementation in SOEs, Board of Directors shall stipulate an effective internal control system to secure the investment and assets of the Company.

The effectiveness of the SPI implementation will have a positive effect on the management of the company. Therefore, the Internal Control System serves as the basis for healthy and safe company operations.

The establishment of Internal Control System is also intended to actualize the Company's commitment as a Company that complies and obeys the Good Corporate Governance implementation principle. The internal control initiative is particularly implemented in the key aspects such as operational, financial, HC aspects as well as compliance with the laws and regulations.

The Company's internal control system is also intended to reduce the business risk potential as well as the violation against business ethics with negative impact on the Company's performance.

The Objectives of Internal Control System

The implementation of Internal Control System in the Company has the following objectives:

1. To secure the investment and the assets of the Company.
2. The effectiveness and efficiency of goals achievement in the Program and Activity implemented by the Company.
3. The consistency of internal and external policy/regulation implementation.
4. The accounting accuracy and reliability

The Company's Internal Control System Guidelines and Policies

The policy of Internal Control System is stipulated through the Board of Directors Decree No. SK-35/PPA/0713. Internal Control System Policy is an integral process of actions and activities carried out continuously by the leaders and all employees

This effort provides an adequate confidence in the achievement of organizational goals through the effective and efficient activities, financial reporting reliability, security of company's assets and compliance with applicable laws and regulations. Internal Control System consists of the following elements:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*);
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan seluruh proses pengendalian pada Perusahaan berjalan secara efektif. SPI juga bertanggung jawab melaporkan kepada Direksi serta Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada Perusahaan, yang disertai dengan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengendalian.

Kesesuaian Kebijakan Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yang di terapkan perusahaan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

- Seluruh tingkatan manajemen dalam Perusahaan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) di lingkungan kerja Perusahaan melalui:
- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran pengawasan intern yang efektif.

2. Penilaian Risiko

Dilakukan oleh Perusahaan dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko/potensi risiko yang timbul dari kegiatan Perusahaan untuk merumuskan mitigasi/langkah penanganan, dan memantau penerapan kontrol atas risiko/potensi risiko dimaksud;

3. Kegiatan Pengendalian

Meliputi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit Perusahaan;

1. Controlling Environment
2. Risk Assessment
3. Controlling Activity
4. Information and Communication

5. Monitoring

SPI in accordance with the Internal Audit Charter has the responsibility to ensure that all controlling processes in the Company are running effectively. SPI is also responsible to submit reports to Board of Directors and Audit Committee on the adequacy and effectiveness of Internal Control System that is applied in the Company, which is accompanied by the recommendations to improve the controlling process.

The Conformity Between Internal Control Policy with Coso Framework

In general, the internal control system is not an additional activity in the management process, but an integrated part of the process. Five components that support the effectiveness of internal control based on COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) framework applied in the Company.

Five components that support the effectiveness of internal control based on COSO framework applied in the Company are as follows:

1. Controlling the Environment

- All of management level in the Company shall create and maintain to control environment that encourages positive and conducive behavior for the Internal Control System implementation in the Company's working circumstances, through:
- a. Integrity and ethical values enforcement.
 - b. Commitment on competency.
 - c. Conducive leadership.
 - d. Establishment of organization structure based on needs.
 - e. Effective delegation of authority and responsibility.
 - f. Preparation and implementation of sound policy on human capital development.
 - g. Establishment of effective internal audit role.

2. Risk Assessment

Implemented by the Company by identifying and analyzing the risk/risk potential occurred from the Company's activity to formulate mitigation/handling plan, and to oversee the implementation of control over the certain risk/risk potential.

3. Controlling Activity

Includes the policy and procedure that are designed to mitigate risk with potential to disrupt the Company's goals achievement in every level and unit in the Company.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan;

5. Pemantauan (Monitoring)

Merupakan proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*), termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pemantauan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

4. Information and Communication

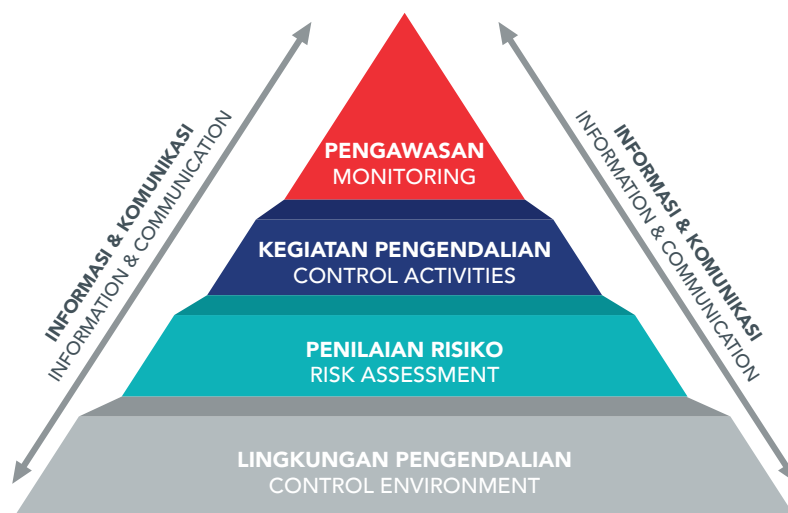
System, a report presentation process, as well as obedience and compliance with prevailing Law by the Company.

5. Monitoring

Monitoring refers to an evaluation process over the Internal Control System quality, including internal audit function in every level and unit in the Company's organization structure, to be implemented optimally.

Monitoring on the Internal Control System is done through continuous monitoring, separated evaluation, follow-up on the audit results and other reviews.

COSO INTERNAL CONTROL MODE



Mekanisme Kerja Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan melalui pembuatan prosedur proses bisnis sebagai pedoman untuk setiap rangkaian bisnis yang ada serta melakukan *assessment* secara berkala atas penerapannya. Dalam kegiatan itu, terutama melakukan perbaikan desain pengendalian internal guna mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis terkini.

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar, seperti keluhan pelanggan dan respons dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen pengendalian internal tersebut berlaku dalam audit setiap unit bisnis.

The Internal Control Work Mechanism

The implementation of the Company's Internal Control System is carried out by developing the business process procedures as manual for every existing business process as well as perform the assessment periodically on the implementation, primarily performing the internal control design improvement to anticipate the current changes in the business circumstances.

Monitoring activities may include the use of information and communications with outside parties, such as customer complaints and responses from regulatory agencies that can give clues on issues or areas that need improvement. The components of internal control apply in the audit of each business unit.

Pengendalian atas Pelaksanaan Operasional dan Pelaporan Keuangan

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang, yaitu meliputi seluruh elemen yang terdapat di Perusahaan. Pengendalian keuangan dan operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di antaranya, terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi karyawan.

Divisi SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan audit internal di Perusahaan, Divisi SPI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (*internal control*) dalam pelaporan keuangan berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Perusahaan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.

Pengendalian atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan unsur-unsur yang diuji oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Rekan, Perusahaan telah mematuhi hukum, peraturan, dan kontrak, dalam semua hal yang material.

Tinjauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan selalu berupaya meningkatkan sistem pengendalian internal agar penerapannya berjalan secara efektif. Untuk tujuan tersebut, manajemen selalu meninjau dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Divisi SPI yang memiliki peran penting dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan.

Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur di setiap kegiatan pada unit kerja. Dengan demikian, apabila terjadi penyimpangan maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

The Controlling on Operational Activity and Financial Reporting

The implementation of financial and operational controlling is done in tiered and covered all elements in the Company. Financial and Operational controlling that are done by Board of Commissioners by conducting the supervision and advisory related to sufficiency and fairness process in the financial statements preparation and risk management by considering prudent principle and supported by Audit Committee and Risk Oversight and GCG Committee.

Meanwhile, Board of Directors implements internal control system through the consistent corporate policy and the procedure implementation as well as the compliance with prevailing regulation, namely related to the Company's business activity and risk management, strategic plan, division of duty, delegation of authority, and adequate accounting policy.

Board of Directors applies an effective internal control system to secure investment and assets of the Company. Internal control environment in the Company is carried out with discipline and order, high integrity, ethical values, and competency of the employees.

Internal Audit Division is part of the Internal Control System that is established to support President Director in fulfilling the obligation to Shareholders with responsibility in internal audit implementation in the Company, Internal Auditor Division performs internal control improvement initiative in the financial reporting of various operational activities in the Company. Internal control in the Company is always evaluated to follow the Company's business development.

The Internal Control System Review and Evaluation

Based on the elements tested by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf & Rekan, the Company has complied with laws, regulations and contracts, in all material respects.

Internal Control System Review and Evaluation

The Company strives to improve its internal control system so that its implementation can be effective. The Internal Control System is always reviewed and evaluated by management. In this case, Internal Auditor Division has an important role in evaluating the sufficiency and effectiveness of the internal control that is implemented by the Company's management.

Internal Control is an integrated part in the system and procedure at every activity in working units, therefore, if there is any violation, the violation can be early acknowledged to conduct the improvement action by the related working units.

Reviu atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal dalam pelaporan keuangan adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan dan penyiapan laporan keuangan yang ditujukan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Divisi SPI telah melakukan reviu pengendalian internal atas operasional Perusahaan dan Pelaporan Keuangan Perusahaan dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional yaitu *COSO-Internal Control Framework*. Menurut *framework* COSO tersebut terdapat 5 (lima) komponen yang dievaluasi sebagaimana disebutkan di atas yaitu: Lingkungan Pengendalian Intern, Kajian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

Sesuai dengan Rencana Pemeriksaan Tahun 2021, Divisi SPI telah melakukan audit operasional di seluruh Unit Kerja dan beberapa entitas anak, evaluasi atas penerapan manajemen risiko Perusahaan, dan Audit atas Permintaan/Audit Khusus sebagaimana telah dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Tahun 2021.

Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian internal dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dari hasil audit terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, Manajemen Perusahaan menilai aspek pengendalian internal perusahaan cukup memadai.

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN KINERJA

Pembentukan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja memiliki sejumlah tujuan. Di antaranya, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi perumusan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), mengevaluasi implementasi program-program strategis, melakukan analisa dan kajian perkembangan usaha untuk mencapai target perusahaan serta manajemen kinerja Perusahaan dan entitas anak

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja efektif tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-89/PPA/1121 tanggal 18 November 2021 tentang Pengangkatan Sdri. Yessy Indahwati Hadipurnama sebagai Karyawan tetap.

The Review on Internal Control System in Financial Reporting

In the financial reporting, Internal Control refers to a process that is designed and implemented by management of the Company to generate the sufficient assurance on the financial reporting and financial statements preparation reliability that is intended for external purpose according to the prevailing accounting principle.

SPI Division has reviewed internal control over the Company's operations and financial reporting by referring to international-standard framework, COSO – Internal Control Framework. According to the COSO framework, there are 5 (five) components that are evaluated as mentioned above, such as: Internal Control Environment, Risk Assessment, Controlling Activity, Information and Communication System, and Monitoring.

According to 2021 Audit Plan, Internal Audit Division has conducted operational audit in the entire Work Units and some Subsidiaries, evaluation on risk management implementation in the Company, and Audit on Special Request/Audit as explained in this Annual Report at the discussion of Internal Audit Division 2021 Activity Report.

Results of audit on internal control system effectiveness is disclosed in Independent Auditor Report on Compliance with the Law and Internal Control.

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Committee on the Adequacy of the Internal Control System

Based on the results of audit on internal control system effectiveness, the Company's Management considers that the internal control aspect in the Company is fairly sufficient.

CORPORATE STRATEGIC PLANNING AND PERFORMANCE MANAGEMENT DIVISION

Corporate Strategic Planning and Performance Management Division was established with the aim of planning, coordinating, and evaluating the strategic formulation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), evaluating the implementation of strategic programs, analyzing and reviewing business developments to achieve the Company's targets, and managing the performance of the Company and its subsidiaries.

The Head of Corporate Strategic Planning and Performance Management Division was appointed based on Board of Directors Decree No. SK-89/PPA/1121 dated November 18, 2021 regarding the Admission and Appointment of Yessy Indahwati Hadiprana as permanent employee.

Profil Kepala Divisi

Profile of Division Head



YESSY INDAH WATI HADIPURNAMA

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja
Head of Corporate Strategic Planning and Performance Management Division

Menjabat sejak 18 Agustus 2021
Has served since August 18, 2021

Warga Negara Citizenship	Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia Age	38 tahun pada tahun buku 2021	38 years in the fiscal year 2021
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Jakarta, 1 Juli 1983	Jakarta, July 1, 1983
Domisili Domicile	Jakarta Barat	West Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi No. SK-89/PPA/1121 tanggal 18 November 2021	Decree of the Board of Directors No. SK-89/PPA/1121 dated November 18, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2, Commerce (Finance), UNSW, Universitas New South Wales (2005-2005) S1, Teknik Kimia, Universitas New South Wales (2001-2004)	Master of Commerce (Finance), University of New South Wales (2005-2005) Bachelor of Chemical Engineering, University of New South Wales (2001-2004)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja, 2021-sekarang, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) - Non Cards PFS Business Finance, 2020-2021, PT Bank UOB Indonesia - Business Planning and Strategic Initiative, 2018-2020, PT Bank DBS Indonesia - Consumer Treasury Business Head, 2015-2018, PT Bank DBS Indonesia - Business Unit Control for Treasury & Markets, 2015-2015, PT Bank DBS Indonesia - Capital and Balance Sheet Management, 2011-2015, PT Bank DBS Indonesia - Business Unit Control for Consumer Banking Group, 2010-2011, PT Bank DBS Indonesia - Risk Manager, 2009 – 2010, PT Bank Commonwealth Indonesia - Exchange Traded Options & Equity Desk, 2006-2008, Commonwealth Securities Australia	- Head of Strategic Planning and Performance Management Division, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) - Non Cards PFS Business Finance, 2020-2021, PT Bank UOB Indonesia - Business Planning and Strategic Initiative, 2018-2020, PT Bank DBS Indonesia - Consumer Treasury Business Head, 2015-2018, PT Bank DBS Indonesia - Business Unit Control for Treasury & Markets, 2015-2015, PT Bank DBS Indonesia - Capital and Balance Sheet Management, 2011-2015, PT Bank DBS Indonesia - Business Unit Control for Consumer Banking Group, 2010-2011, PT Bank DBS Indonesia - Risk Manager, 2009 – 2010, PT Bank Commonwealth Indonesia - Exchange Traded Options & Equity Desk, 2006-2008, Commonwealth Securities Australia
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak ada	None

Sumber Daya Manusia

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, jumlah sumber daya manusia di lingkungan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja mencapai 6 (enam) orang. Rinciannya sebagai berikut:

HRD

Until the end of 2021, the Strategic Planning and Performance Management Division was carried out by 6 persons with the following positions:

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Kepala Divisi Head of Division	1
2	Kepala Grup Group Head	1
3	Kepala Unit Unit Head	1
4	Senior Officer Senior Officers	3
Jumlah Total		6

Tugas dan Tanggung Jawab

Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perumusan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), mengevaluasi implementasi program-program strategis, melakukan analisa dan kajian perkembangan usaha untuk mencapai target Perusahaan serta manajemen kinerja Perusahaan dan entitas anak.

The Duty and Responsibility

The Corporate Strategic Planning and Performance Management Division has duties and responsibilities in planning, coordinating, and evaluating the strategic formulation of the Corporate Long-Term Plan (RJPP), evaluating the implementation of strategic programs, analyzing, and evaluating business development to achieve the Company's targets and performance management of the Company and subsidiaries.

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Yessy Indahwati Hadipurnama	Workshop	Transformational Leadership	Jakarta, 17-18 November 2021	IPDC Training Institute
Nadia Anindita	Training	Risk Analysis in Corporate Finance	Jakarta, 1 – 24 Sept 2021	Pimley & Pimley Inc
Hadi Wijaya	Training	BIMTEK INDI 4.0	Jakarta, 18-21 Nov 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Training	Agile Leadership	Jakarta, 9-10 Nov 2021	IPDC Training Institute
	Training	Leadership Challenges	Jakarta, 24-25 Nov 2021	IPDC Training Institute
Ricky Firmansyah	Training	BIMTEK INDI 4.0	Jakarta, 18-21 Nov 2021	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
	Workshop	Transformasi BUMN di Era Industri 4.0 SOE Transformation in the Industrial 4.0 Era	Jakarta, 12 Nov 2021	Forum Ekselen BUMN
	Training	Valuation on Merger & Acquisition	Jakarta, 17-18 2021	PPM Manajemen

Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Selama tahun 2021, Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Melakukan kegiatan monitoring kinerja Anak Perusahaan dan Saham Minoritas baik secara bulanan maupun triwulanan;
2. Melakukan kegiatan pengelolaan Anak Perusahaan dan Saham Minoritas sebagai Pemegang Saham yang berkaitan dengan persetujuan, pelaksanaan RUPS, aksi korporasi dan sebagainya;
3. Melakukan kegiatan monitoring dan pelaporan lainnya kepada Danareka dan Dewan Komisaris;

Duty Implementation in 2021

During 2021, the Division of Corporate Strategic Planning and Performance Management has carried out its duties and responsibilities in accordance with the work plan that has been set, including:

1. Monitoring the performance of Subsidiaries and Minority Shares, both monthly and quarterly;
2. Carry out management activities of Subsidiaries and Minority Shares as Shareholders related to approval, implementation of GMS, corporate actions and so on;
3. Carry out monitoring and other reporting activities to Danareka and the Board of Commissioners;

4. Kegiatan dukungan lainnya seperti
 - a. Proses berkelanjutan rencana Inbreng PPA kepada Danareksa
 - b. Menyusun KPI Individu Direksi 2021
 - c. Koordinasi dengan divisi internal terkait program dan/atau *project* maupun kegiatan dukungan lainnya
 - d. Melakukan *monitoring* atas aktivitas divisi perusahaan (*activities tracking*)

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Direksi membentuk Divisi Manajemen Risiko dalam rangka mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko secara korporasi. Pembentukan Divisi Manajemen Risiko yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada SEVP3 (CRO) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-64/PPA/1021 tanggal 6 Oktober 2021.

Pedoman Manajemen Risiko

Perusahaan telah melengkapi penerapan manajemen risiko melalui penetapan pedoman manajemen risiko, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-14/PPA/0320 tanggal 18 Maret 2020. Pedoman Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perusahaan yang mengacu pada standar ISO 31000 : 2018 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Divisi Manajemen Risiko

Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal Perusahaan.

Pejabat Divisi Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/PPA/0221 tanggal 15 Februari 2021, Perusahaan telah menunjuk Pongky Afriandita sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko.

4. Other supporting activities such as
 - a. The ongoing process of the Inbreng of PPA plan to Danareksa
 - b. Preparing the 2021 Directors' Individual KPIs
 - c. Coordination with internal divisions related to programs and/or projects as well as other support activities
 - d. Monitoring the activities of the company division (*activities tracking*)

RISK MANAGEMENT DIVISION

Board of Directors established the Risk Management Division in order to coordinate and to facilitate the implementation of corporate risk management. The establishment of an independent Risk Management Division that reports directly to SEVP2 is determined through the Company's Board of Directors Decree No. SK-64/PPA/1021 dated October 6, 2021.

The Risk Management Manual

The Company has completed the application of risk management through the establishment of risk management manual, which has been validated through Board of Directors Decree No. SK-14/PPA/0320 dated March, 2020. The Risk Management Manual regulates the risk management systems in the Company which refer to ISO 31000:2018 standard "*Risk Management-Principles and Guidelines*" and serves as a guideline for all Company's people in carrying out risk management activities.

The Person in Charge of Risk Management Division Official Appointment and Dismissal

The Head of Risk Management Division is appointed and dismissed based on the Board of Directors' Decree through the Company's internal mechanism.

Risk Management Division Official

According to Board of Directors Decree SK-6/PPA/0221 dated February 15 2021, the Company has appointed Sarda Yunus as Head of Risk Management Division.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division Profile



PONGKY AFRIANDITA

Kepala Divisi Manajemen Risiko

Head of Risk Management Division

Menjabat sejak 15 Februari 2021

Has Served since February 15, 2021

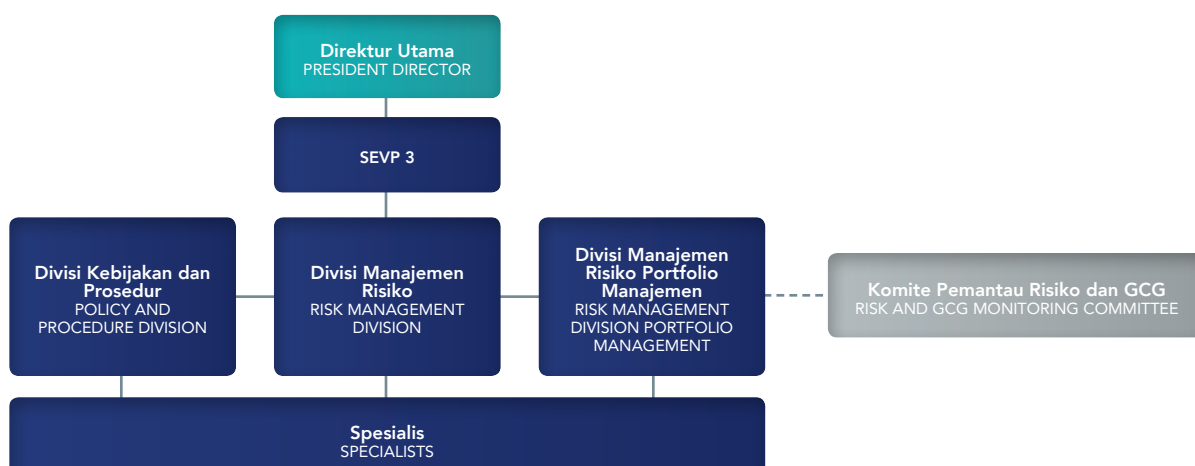
Warga Negara Citizenship	Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia Age	40 tahun	40 years old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Jakarta, 8 April 1981	Jakarta, April 8, 1981
Domisili Domicile	Jakarta Timur	East Jakarta
Bergabung di Perusahaan First Joined the Company	5 Januari 2021	January 5, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik, Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2004	Bachelor Degree in Engineering, Environmental Engineering, Diponegoro University, 2004
Pengalaman Kerja Work Experience	- Kepala Divisi Manajemen Risiko - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2021 s/d saat ini) - VP Risk Management - PT Indonesia Infrastructure Finance (2013-2020) - Head of Business Intelligence - PT Bank Rabobank International Indonesia (2011-2013) - Head of Portfolio Management - PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2011) - Risk Management Senior Officer - PT Bank Hagabank (2006-2008) - Dedicated Credit Admin - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2005-2006)	- Head of Risk Management Division - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2021 to present) - VP Risk Management - PT Indonesia Infrastructure Finance (2013-2020) - Head of Business Intelligence - PT Bank Rabobank International Indonesia (2011-2013) - Head of Portfolio Management - PT Bank Rabobank International Indonesia (2009-2011) - Risk Management Senior Officer - PT Bank Hagabank (2006-2008) - Dedicated Credit Admin - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2005-2006)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Professional (CRP) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko sejak tahun 2017	Certified Risk Professional (CRP) issued by the Risk Management Professional Certification Institute in 2017

Keorganisasian Divisi Manajemen Risiko Investasi

Agar dapat menggambarkan cakupan fungsi Divisi Manajemen Risiko dan koordinasi antar organ Perusahaan, berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko per 31 Desember 2021:

Risk Management Division Organizational Structure

In order to illustrate the scope of functions of Risk Management Division and coordination between organs, the following is the organizational structure of Risk Management Division as of December 31, 2021.



Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Kebijakan dan Prosedur, Divisi Manajemen Risiko Investasi, dan Divisi Manajemen Risiko Portofolio Manajemen sebanyak 9 orang.

Until the end of 2021, there were 9 employees who are members of the Policy and Procedure Division, Investment Risk Management Division, and Portfolio Management Risk Management Division.

No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Kepala Divisi Head of Division	1
2	Spesialis (setara Kepala Grup) Specialist (at Group Head level)	2
3	Spesialis (setara Kepala Unit) Specialist (at Unit Head level)	5
4	Spesialis Junior Junior Specialist	1
Jumlah Total		9

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kebijakan dan Prosedur, Divisi Manajemen Risiko Investasi, serta Divisi Manajemen Risiko Portofolio Manajemen

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko dalam mendorong terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun/mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan utama Perusahaan.
2. Melakukan evaluasi efektivitas penerapan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Perusahaan.
3. Melaksanakan kajian risiko atas kegiatan Perusahaan.
4. Memberikan layanan konsultasi atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan.
5. Memfasilitasi satuan kerja Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dalam melakukan penilaian risiko.
6. Melakukan pelaporan Profil Risiko Perusahaan sebagai *early warning signal* kepada Direksi.
7. Memastikan pelaksanaan kajian kepatuhan terhadap ketentuan internal terhadap implementasi pembiayaan maupun investasi.
8. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja tahunan Divisi Manajemen Risiko dan Operasi Bisnis dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
9. Memastikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada Divisi Manajemen Risiko.

Duties and Responsibilities of Policy and Procedure Division, Investment Risk Management Division, and Portfolio Management Risk Management Division

The duty and responsibility of Risk Management Division in supporting risk management implementation effectively refers to the Risk Management Policy, as follows:

1. To design/develop Risk Management policy and other policies related to the Company's main activities.
2. To evaluate effectiveness of policy and Standard Operating Procedure (SOP) that are applied in the Company.
3. Carry out a risk assessment of the Company's activities.
4. Provide consulting services on the implementation of risk management in the Company.
5. To facilitate the preparation of Risk Profile report at Risk Owner working unit.
6. To report the Company's Risk Profile as an early warning signal to the Board of Directors.
7. To ensure the implementation of compliance studies with internal regulations on the implementation of financing and investment.
8. To prepare and propose an annual work plan for the Risk Management and Business Operations Division in order to support the achievement of company goals.
9. To ensure the implementation of human resource development in the Risk Management Division.

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memiliki program pengembangan kompetensi baik secara internal maupun yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya.

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2021

Selama tahun 2021, Divisi Manajemen Risiko berhasil melaksanakan seluruh program kerja yang ditetapkan. Kegiatan/program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Risk Management Division Competency Development Program

The Company has policies related to the development and enhancement of the competency of Risk Management Division, which is carried out through various trainings and education.

Implementation of the Duties of the Risk Management Division in 2021

During 2021, the Risk Management Division succeeded in running its predetermined work programs. Activities/work programs that have been implemented in 2021 are as follows:

1. Melakukan penyusunan dan revisi atas 10 Kebijakan.
2. Melakukan penyusunan 4 SOP.
3. Melakukan review dan memberi masukan atas 7 Kebijakan yang disusun oleh satuan kerja diluar Divisi Manajemen Risiko.
4. Melakukan kajian risiko atas 175 dokumen usulan kegiatan Perusahaan.
5. Memfasilitasi penyusunan Profil Risiko pada *risk owner* dan menyusun Laporan Profil Risiko Perusahaan secara triwulanan.
6. Memberi masukan dan/atau pendapat terkait manajemen risiko kepada satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.
7. Menjadi anggota Tim Evaluasi untuk 35 pengadaan barang dan jasa.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Direksi membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko (KIMR) dalam rangka memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka pengambilan keputusan investasi, termasuk pertimbangan terkait pengelolaan risiko dalam keputusan investasi yang diambil oleh Direksi. Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-50/PPA/0819 tanggal 27 Agustus 2019.

Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Keanggotaan KIMR dan dasar pengangkatan anggota komite ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-50/PPA/0819 tanggal 27 Agustus 2019.

Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko (KIMR)

1. Sarda Yunus menjabat sejak 11 September 2019 sampai dengan 14 Februari 2021.
2. Pongky Afriandita menjabat sejak 15 Februari 2021

Profil mengenai Pongky Afriandita dapat dilihat di bagian Pejabat Divisi Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi Perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan Investasi atas:
 - a. Usulan kegiatan Investasi yang diajukan oleh satuan kerja bisnis.
 - b. Usulan penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, antara lain pelampauan limit/batasan transaksi yang diatur dalam Pedoman Investasi, penyimpangan ketentuan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan, penyimpangan atas ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian transaksi (perjanjian pinjaman/ penerbitan surat utang, dan lain-lain);
2. Melakukan pembahasan dan memberikan saran/masukan atas usulan kegiatan Investasi dari Anak Perusahaan;

1. Prepared and revised 10 Policies.
2. Prepared 4 SOPs.
3. Reviewed and providing input on 7 policies prepared by work units outside the Risk Management Division.
4. Made risk assessment of 175 documents proposed for the Company's activities.
5. Facilitated the preparation of the Risk Profile for the risk owner and compiling the Company's Risk Profile Report on a quarterly basis.
6. Provided input and/or opinions related to risk management to work units in the implementation of the Company's activities.
7. Served as member of the Evaluation Team for 35 procurement of goods and services.

Investment and Risk Management Committee

The Board of Directors established the Investment and Risk Management Committee (KIMR) in order to provide advice and recommendations to the Board of Directors in investment decision making, including consideration on risk management in investment decisions taken by the Board. This committee was formed based on the Decree of the Board of Directors No. SK-50/PPA/0819 dated August 27, 2019.

Membership of the Investment and Risk Management Committee

KIMR membership and the basis for the appointment of committee members are stipulated in the Decree of the Board of Directors No. SK-50/PPA/0819 dated August 27, 2019.

Chairman of the Investment and Risk Management Committee (KIMR)

1. Sarda Yunus was in office from September 11, 2019 until February 14, 2021.
2. Pongky Afriandita has served since February 15, 2021

Pongky Afriandita's profile can be seen in the Risk Management Division Officer section.

Duties and Responsibilities

The Investment and Risk Management Committee has the following duties and responsibilities:

1. Evaluate and provide advice / recommendations to the Company's Board of Directors in the context of making investment decisions on:
 - a. Proposed Investment activities submitted by the business work unit.
 - b. Proposed policies and/or business decisions that deviate from normal procedures, including one that are over the limits/transaction limits stipulated in the Investment Guidelines, deviations from the provisions stipulated in the Company's policies, deviations from the terms and conditions stipulated in the transaction agreement (loan/issuance agreement) debt securities, and others);
2. Discuss and provide advice/input on the proposed Investment activities of the Subsidiaries;

3. Memberikan masukan/saran atas Kebijakan Investasi dan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Memberikan masukan/saran atas Pedoman Investasi antara lain tingkat pengembalian minimal Investasi, batas Investasi per sektor industri, dan *negative list* Investasi.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko Tahun 2021

Pada tahun 2021, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan tugas sebagai berikut:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan 90 (sembilan puluh) rapat untuk membahas rencana investasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan investasi.
2. Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (melalui Memo Evaluasi Risiko) atas 90 dokumen memo usulan kegiatan baik usulan investasi maupun usulan atas kegiatan penanganan investasi.

Evaluasi Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Evaluasi kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko di lihat dari pelaksanaan *review* dan rekomendasi (Memo Evaluasi Risiko) yang diberikan atas 90 memo usulan kegiatan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan sistematis merupakan salah satu aspek penting bagi Perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif, efisien dan konsisten sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Dalam perjalanannya, Perusahaan senantiasa mengevaluasi dan menyempurnakan proses bisnis, kebijakan serta prosedur untuk mendukung kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan efektivitas strategi manajemen risiko agar tetap sejalan dengan model dan perkembangan bisnis Perusahaan yang semakin kompleks.

Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam penerapan manajemen risiko secara luas, sistematis dan terintegrasi, Perusahaan telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-62/PPA/1109 tanggal 16 November 2009, yang secara berkelanjutan dievaluasi dan diperbaharui kembali dengan perubahan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-14/PPA/0320 tanggal 18 Maret 2020. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perusahaan yang mengacu pada

3. Give input/advice on Investment Policy and Risk Management Policy;
4. Give input/suggestions on the Investment Guidelines, including the minimum rate of return on investment, investment limits per industrial sector, and negative list of investments.

Implementation of the Duties of the Investment and Risk Management Committee in 2021

In 2021, the Investment and Risk Management Committee has carried out the following duties:

1. The Investment and Risk Management Committee held 90 (ninety) meetings to discuss investment plans and matters related to investment implementation.
2. The Investment and Risk Management Committee evaluated and gave recommendations (through the Risk Evaluation Memo) on 90 document for proposed activities, both in investment proposals and in investment handling.

Performance Evaluation of the Investment and Risk Management Committee

The evaluation of the performance of the Investment and Risk Management Committee is seen from the implementation of the reviews and recommendations (Risk Evaluation Memos) given on 90 proposed activity memos.

RISK MANAGEMENT

In performing the business activity, the Company realizes that risk is an inseparable part of every operational activity that may influence the Company's business and performance results. Therefore, the implementation of comprehensive risk management becomes an important aspect for the Company to manage various risk profiles effectively, efficiently, and consistently as well as manifestation of Good Corporate Governance (GCG) implementation.

As the business moves forward, the Company always prepares, evaluates, and improves policy and procedure to support business activity in achieving the effectiveness of risk management strategy to be in line with more complex business development.

The Guidelines and Policies of the Company's Risk Management

As its commitment to implementing general, systematic, and integrated risk management, the Company has formulated a Risk Management Policy as stipulated in Board of Directors Decree No. SK-62/PPA/1109 dated November 16, 2009, which has been reevaluated and renewed based on the Board of Directors Decree No SK-14/PPA/0320 dated March 18, 2020. Such policy regulates the Company's risk management system, which refers to ISO 31000:2009 standard "Risk Management-Principles and Guidelines," which becomes the guidelines for all employees of the

standar ISO 31000 : 2018 "*Risk Management-Principles and Guideline*" dan menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan dan penerapan manajemen risiko serta sebagai acuan dalam pengelolaan risiko.

Sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko, penerapan manajemen risiko di Perusahaan dilakukan pada:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Penyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/transaksi yang akan dilaksanakan.
3. Pembuatan laporan profil risiko.
4. Penyusunan/pengembangan Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP)

Tujuan dari penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan adalah:

1. Memberikan perlindungan dan kesinambungan kegiatan Perusahaan dari kemungkinan timbulnya kejadian dengan tingkat risiko signifikan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan Perusahaan yang diakibatkan dari berbagai aktivitas bisnisnya serta menjaga tingkat risiko pada level yang dapat diterima oleh Perusahaan.
2. Menyediakan *early warning signal* bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik.
3. Membantu manajemen dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan guna memberikan nilai tambah (*operational excellence*).
4. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi/meminimalisir risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja Perusahaan.
5. Mendorong setiap insan Perusahaan untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional Perusahaan sehari-hari, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai Perusahaan demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
6. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Perusahaan sesuai dengan filosofi manajemen risiko yaitu manajemen risiko bersifat melekat pada setiap Karyawan dan Direksi Perusahaan dan harus diintegrasikan ke dalam proses kerja.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Komite Pemantau Risiko dan GCG yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris
4. Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko.
5. Divisi Manajemen Risiko
6. *Risk Owner* (seluruh satuan kerja bisnis dan *support*)
7. Divisi Satuan Pengawasan Intern

Company in implementing the risk management activities as well as basis compliance to risk management.

In line with the Risk Management Policy, the implementation of risk management in the Company is based on:

1. Preparation of Corporate work and Budget Plan;
2. Preparation and approval for the proposal of activities/ transactions;
3. Drafting of risk profile report;
4. Preparation/development of Policies and Standard Operating Procedure (SOP).

The purposes of risk management for the Company are as follows:

1. Provide the protection for and sustain the Company's activities from the possibility of events that may arise to disrupt the realization of the Company's goals due to its business activities, as well as maintaining risk level at an acceptable rate for the Company;
2. Provide the early warning signal for decision-making process with proper risk control;
3. Assist the management in analyzing the implementation of the Company's business activities to give the added values (*operational excellence*);
4. Encourage the management to act proactively in reducing the risk of loss, making risk management a source of competitive advantage and excellence in the Company's performance;
5. Encourage all employees of the Company to act prudently in dealing with Company risks, as an effort to maximize the value of the Company in order to achieve common goals;
6. Ensure the Company's compliance with the prevailing laws and regulation.

Risk Management Governance Structure

The risk management implementation is conducted by all work units according to its philosophy, meaning that risk management is inherent in every employee and the Company's Board of Directors and should be integrated into the Company's work process.

The Company's risk management governance is as follows:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Risk Oversight and Good Corporate Governance Committee, chaired by one of Board of Commissioners members;
4. Risk Management Division chaired by Head of the Risk Management Division;
5. Risk Owner (all business and support units);
6. Internal Audit Unit Division.
7. Internal Control Unit

Keberadaan Divisi Manajemen Risiko

Untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko yang independen. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-64/1021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebutkan bahwa Divisi Manajemen Risiko di bawah *Senior Executive Vice President* 3 (SEVP3) yang bertindak sebagai *Chief Risk Officer* (CRO) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Strategi Manajemen Risiko

Dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyusun dan memastikan tersedianya Kebijakan dan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan dan penerapan manajemen risiko.
2. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan, antara lain dengan cara:
 - a. Melakukan kajian risiko atas sasaran strategis Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. Menerapkan pelaksanaan kajian risiko atas setiap usulan kegiatan/proyek yang akan dilakukan oleh Perusahaan;
 - c. Melakukan asesmen risiko secara berkala dan menyusun laporan profil risiko Perusahaan.
3. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan.

Selain itu, Direksi mengkomunikasikan secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perusahaan tentang pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif dalam rangka memastikan pencapaian tujuan Perusahaan.

Sistem Manajemen Risiko PPA

Perusahaan mengembangkan sistem manajemen risiko yang sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai serta sesuai dengan standar manajemen risiko yang berlaku umum.

Secara umum sistem manajemen risiko tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Manajemen Risiko
Prinsip manajemen risiko merupakan landasan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan, di mana prinsip-prinsip tersebut meliputi:
 - a. Manajemen risiko merupakan bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi;
 - b. Manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
 - c. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaannya (*customized*);
 - d. Manajemen risiko bersifat inklusif;
 - e. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan;
 - f. Manajemen risiko didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;

The Existence of Risk Management Division

To coordinate and facilitate the risk management implementation, the Company has established an independent Risk Management Division that is responsible directly to the President Director as stipulated in the Board of Directors Decree No SK-64/1021 dated October 6, 2021, on The organizational structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) which states that the Risk Management Division is under Senior Executive Vice President 3 (SEVP3) who acts as the Chief Risk Officer (CRO) and reports to the President Director.

The Risk Management Strategy

In supporting the Company's business activity, risk management is done through following strategies:

1. Preparing and ensuring the availability of policy and SOP as guideline in the Company's business activity and risk management implementation.
2. Integrating risk management process into the Company's business process namely through:
 - a. Conducting the risk review on the Company's strategic goals during preparation of the Company's Budget Plan,
 - b. Implementing the risk review for every activity/project proposal that will be carried out by the Company.
 - c. Conducting risk assessment periodically and preparing the Company's risk profile report.
3. Conducting the socialization and facilitating risk management in on going basis to increase the risk awareness in the Company.

In addition, the Board of Directors communicates the importance of effective risk management implementation to all Company's people continuously to ensure the achievement of the Company's goals.

PPA Risk Management System

The Company develops a risk management system in line with the objectives to be achieved and in accordance with generally accepted risk management standards.

In general, the risk management system includes the followings:

1. Risk Management Principles
Risk management principles are the foundation of risk management implementation in the Company, that include:
 - a. Risk management is an integral part of all organizational activities.
 - b. Risk management must be carried out in a structured and comprehensive manner to provide consistent and comparable results.
 - c. Risk management must be adjusted according to its users (*customized*).
 - d. Risk management is inclusive.
 - e. Risk management is dynamic, repetitive, and responsive to change.
 - f. Risk management is based on the best available information.

- g. Manajemen risiko harus mempertimbangkan faktor budaya dan manusia;
- h. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan secara berkelanjutan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

a. Mandat dan Komitmen.

Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara efektif, manajemen melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mensosialisasikan/mengkomunikasikan akan pentingnya manajemen risiko bagi Perusahaan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko;
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran Perusahaan;
- Memastikan bahwa tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko

b. Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Hal-hal yang diperhatikan dalam merencanakan kerangka kerja manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang secara jelas menyatakan komitmen Manajemen terhadap penerapan manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai;
- Mengintegrasikan proses manajemen risiko sebagai bagian dari seluruh praktik manajemen serta proses bisnis Perusahaan. Proses Manajemen Risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis dan proses manajemen perubahan;
- Pengembangan proses Manajemen Risiko dan memastikan kecukupan tindakan pengendalian risiko;
- Pemenuhan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko baik sumber daya manusia, proses dan prosedur, sistem dan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko;
- Penyusunan mekanisme pelaporan dan komunikasi dalam pelaksanaan manajemen risiko.

c. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, manajemen memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan proses manajemen risiko pada setiap kegiatan Perusahaan;
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan;
- Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para *stakeholder* terkait.

- g. Risk management must consider the cultural and human factors.

- h. Risk management must facilitate the continuous improvement.

2. Risk Management Framework

a. Mandate and Commitment.

In order to carry out the risk management effectively, the management executes the followings:

- Socializing/communicating the importance of risk management for the Company and establishing the Risk Management Policy.
- Ensuring the compliance with laws and regulations.
- Ensuring that risk management objectives are aligned with the Company's strategies and objectives.
- Ensuring that the sufficient resources are allocated for risk management activities

b. Risk Management Framework Planning.

The matters that need to be considered in planning a risk management framework are as follows:

- Preparing the Risk Management Policy that clearly states the management's commitment to the application of risk management and the objectives to be achieved by implementing Risk Management.
- Integrating risk management processes to be part of all management practices and Company's business processes. The Risk Management Process must be part of the business policy development process, strategic planning, business plan preparation, and change management processes.
- Developing Risk Management process and ensuring the adequacy of risk control measures.
- The fulfillment of adequate resources for the implementation of risk management either in human capital, processes and procedures, systems, or other resources needed for each stage of risk management implementation.
- The preparation of reporting and communication mechanisms in the implementation of risk management.

c. Risk Management Application

In implementing risk management, the management pays attention to the following matters:

- Implement Risk Management Policies and risk management processes in each of the Company's activities.
- Comply with all applicable laws and regulations.
- Document the entire decision making process.
- Conduct the communication and the consultation with relevant stakeholders.

d. Pemantauan dan Peninjauan Ulang

Untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif dan mendukung kinerja Perusahaan, maka manajemen:

- Menetapkan ukuran kinerja;
- Melakukan *review* atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan perkembangan kegiatan Perusahaan;
- Melakukan tindak lanjut atas hasil kaji ulang.

Perusahaan memandang bahwa kerangka kerja manajemen risiko harus selalu dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkelanjutan. Hal itu penting sebagai bagian dari proses peningkatan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan antara lain perubahan struktur organisasi, model bisnis Perusahaan terkini, ketentuan perundang-undangan baru yang terkait dengan kegiatan Perusahaan, penetapan strategi baru atau perubahan strategi Perusahaan.

Selain itu, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan penilaian risiko secara berkala atas kegiatan utama Perusahaan melalui pendekatan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA).
2. *Review* atas Kebijakan dan SOP untuk memastikan bahwa Perusahaan senantiasa memiliki Kebijakan dan SOP terkini sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Rapat berkala antara Divisi Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, maka Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan asesmen risiko (*self-assessment*).
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif.
4. Ketersediaan sumber daya.
5. Risiko-risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja, dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

Perusahaan menyadari bahwa penerapan manajemen risiko bersifat dinamis sesuai dengan tantangan Perusahaan kedepan, sehingga akan terus dikembangkan sesuai dengan *road map* pengembangan Manajemen Risiko yang telah disusun.

d. Monitoring and Review

To ensure that risk management is implemented effectively and supports the Company's performance, the management:

- Establish performance measures.
- Review the suitability of Risk Management Policy with the development of the Company's activities.
- Follow up on the review results.

The Company views that the risk management framework must always be periodically evaluated and updated. This is important for improving the risk management framework, risk management policies, and risk management implementation.

The Evaluation on Risk Management System Effectiveness

The evaluation of risk management system effectiveness is periodically performed by considering the changes to the organizational structure, the issuance of new laws and regulations related to the Company's activities, the establishment of a new strategy, or changes in the Company's strategy.

In addition, evaluation of the effectiveness of risk management is also carried out through:

1. The implementation of periodic risk assessment on the main activities of the Company through Risk & Control Self-Assessment (RCSA) approach.
2. Review Policies and Standard Operating Procedure (SOP) to ensure that the Company has the latest policies and SOPs at all times in accordance with the Company's progress.
3. Regular meetings between the Risk Management Division and Risk Oversight and GCG Committee.

Based on the result of the assessment mentioned above, Risk Management System in the Company has been effectively implemented. This is proven from:

1. Awareness of the risk owner to perform the self-assessment.
2. Risk awareness culture has been embedded in the risk owner, marked by the efforts to perform risk reviews in the Company's operational activity.
3. The stakeholders in the risk management aspect are evaluated to be capable of performing the risk review effectively.
4. Resources availability.
5. Risks that have been identified from all work units are evaluated and measured based on the level of possibility and impact to obtain the risk priority to be mitigated.

The Company realizes that the implementation of risk management is dynamic in line with the Company's challenges in the future. Therefore, it will continue to be developed according to the Risk Management development roadmap that has been prepared.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen menilai kecukupan sistem manajemen risiko perusahaan cukup memadai.

Profil Risiko dan Mitigasi Risiko

Sejalan dengan komitmen Direksi untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek yang akan dijalankan bagi kelangsungan Perusahaan.

Dalam rangka melindungi dan memberi nilai tambah serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan, penerapan manajemen risiko di Perusahaan antara lain dilakukan pada aktivitas sebagai berikut:

1. Menyusunan dan persetujuan usulan kegiatan/proyek
Dalam menyusun suatu usulan kegiatan/proyek, satuan kerja pengusul harus melakukan kajian risiko yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat timbul dari kegiatan yang diusulkan serta mitigasi atas risiko tersebut. Selanjutnya Divisi Manajemen Risiko akan melakukan *review* atas kecukupan kajian risiko yang dilakukan oleh satuan kerja pengusul sebagai masukan/pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
Secara berkala setiap satuan kerja/*risk owner* melakukan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka menyusun profil risiko dari satuan kerjanya. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko oleh *risk owner* akan difasilitasi oleh Divisi Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan penilaian risiko tersebut, Perusahaan menggunakan pendekatan RCSA.

Identifikasi risiko untuk tahun 2021 dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pencapaian RKAP 2021. Berdasarkan kajian yang dilakukan selama periode tahun 2021, risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan terbagi kedalam beberapa jenis risiko yaitu risiko strategis, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko reputasi.

Risiko Strategis #01

Potensi Penyebab:

Tidak tercapainya target kinerja sebagian Entitas Anak.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Menyelaraskan strategi Entitas Anak dengan PPA Induk
- Melakukan kajian dan pemantauan atas penanganan aset bermasalah serta solusi penyelesaiannya.

Risiko Strategis #02

Potensi Penyebab:

Ketidaktepatan penetapan strategi penanganan BUMN Titip Kelola.

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

Management assesses that the Company already has an adequate risk management system

Risk Profile and Risk Mitigation

In line with the Board of Directors' commitment to implement the risk management effectively and efficiently, every level of the Company's organization shall implement the risk management by considering the priority and benefit of each working program/project for the Company's business sustainability.

In order to protect and to provide the added value and be part of the decision-making process, the risk management implementation in the Company is namely carried out in activities as follows:

1. The preparation and approval of the proposed activities/projects
In developing a proposed activity/project, the proposing work unit must perform a risk assessment, which is the identification and analysis of risks that may arise from the proposed activities as well as mitigation of such risks. Furthermore, the Risk Management Division will conduct a review of the adequacy of the risk assessment performed by the proposing work unit as advice/considerations for the management in making decisions.
2. The Risk Identification and Assessment
Periodically, each work unit/*risk owner* conducts identification and risk assessment to develop its work unit's risk profile. The Risk Management Division will facilitate the implementation of the identification and assessment of risks by risk owners. The Company uses the Risk & Control Self Assessment (RCSA) approach in the risk assessment.

Risk identification for 2021 was made according to the purpose and objectives of the 2021 RKAP achievement. Based on the review done in the 2020 period, key risks that the Company experienced are classified into strategic risk, credit risk, business risk, market risk, liquidity risk, and reputation risk.

Strategic Risk #01

Potential Cause:

Subsidiaries fail to achieve target performance

Risk Management Efforts:

- Aligning Subsidiary's strategy with PPA's as holding
- Conducting studies and monitoring on the handling of problem assets and the solutions.

Strategic Risk #02

Potential Causes:

Inaccurate strategy for handling the entrusted management of of SOEs.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Melibatkan pihak ketiga/konsultan independen yang profesional dalam melakukan kajian atas opsi penanganan
- Melakukan kajian restrukturisasi pinjaman secara menyeluruh sesuai kemampuan *cashflow* dan kondisi Perusahaan, serta mengupayakan sinergi antar BUMN dalam mengembangkan bisnisnya.

Risiko Kredit #01**Potensi Penyebab:**

Tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi (R/R) kepada beberapa BUMN R/R (debitur) yang antara lain dipengaruhi oleh:

- Operasional BUMN R/R yang tidak efisien dan/atau beban utang terlalu besar
- Revenue lebih rendah dari biaya usaha
- Kondisi fasilitas produksi yang relatif kurang baik
- Keterbatasan sumber pendanaan untuk modal kerja dan revitalisasi alat produksi
- Sebagian BUMN R/R sudah berhenti beroperasi dan/atau diputus pailit
- Tingkat persaingan sektor industri yang tinggi sehingga BUMN R/R tidak dapat bersaing dengan baik (sulit melakukan penetrasi pasar)

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Melakukan restrukturisasi pinjaman secara menyeluruh
- Melakukan optimalisasi aset dan sinergi antar BUMN dalam mengembangkan bisnis
- Peningkatan kualitas *monitoring* dan *recovery* internal Perusahaan
- Membantu pendanaan untuk membiayai proyek BUMN yang layak

Risiko Kredit #02**Potensi Penyebab:**

Tingkat pengembalian dari aset bermasalah tidak tercapai

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Memastikan aset debitur yang diikat sebagai jaminan diikat secara sempurna
- Penyelesaian aset bermasalah dilakukan antara lain melalui *rescheduling/restrukturisasi/refinancing*, eksekusi jaminan, penagihan intensif, dan/atau tindakan hukum lain yang diperlukan.
- Pemantauan kualitas aset dan likuiditas melalui rapat ALM

Risiko Kredit #03**Potensi Penyebab:**

Peningkatan 370 aset investasi (aktiva produktif) tidak tercapai sehingga target laba tidak terpenuhi.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Melakukan transformasi proses bisnis, antara lain untuk mempertajam proses kajian, penyusunan *control limits* & *risk appetite*, memperbaiki proses *monitoring*.
- Memperkuat SDM dan reorganisasi

Risk Management Efforts:

- Involving a professional third party/independent consultant in reviewing options of how to handle the issue
- Conducting a comprehensive review of loan restructuring in accordance with the company's cashflow capabilities and conditions, as well as seek synergies between SOEs in developing their business.

Credit Risk #01**Potential Causes:**

Failure to pay loans given for restructuring/revitalization (R/R) to several SOEs R/R (debtors) which, among other things, were influenced by:

- Inefficient R/R SOE operations and/or too large a debt burden
- Lower Revenue than operating expenses
- Relatively unfavorable condition of production facilities
- Lack of sources of funding for working capital and revitalization of production equipment
- Some SOE R/R have stopped operating and/or have been declared bankrupt
- High level of competition in the industrial sector so SOE R/R cannot compete well (difficult to penetrate the market)

Risk Management Efforts:

- Have a comprehensive loan restructuring
- Optimize assets and synergies between SOEs in developing business
- Improve the quality of the Company's internal monitoring and recovery
- Assist with funding to finance viable SOE projects

Credit Risk #02**Potential Causes:**

Failure to achieve rate of return on non-performing assets

Risk Management Efforts:

- Ensure that the debtor's assets that are placed as collateral
- Non-performing assets shall be settled among others through *rescheduling/restructuring/refinancing*, execution of guarantees, intensive collection, and/or other necessary legal actions.
- Monitoring asset quality and liquidity through ALM meetings

Credit Risk #03**Potential Cause:**

Failure to achieve the planned increase of 370 investment assets (productive assets), leading to unmet profit target.

Risk Management Efforts:

- Transform business processes, among others, to sharpen the review process, formulate control limits & risk appetite, improve monitoring processes.
- Strengthen HR and reorganization

Risiko Likuiditas #01

Potensi Penyebab:

Ketidaktersediaan dana dan/atau ketidakmampuan mendapatkan pendanaan dari pihak lain untuk membayar kewajiban jatuh tempo dan membiayai kegiatan usahanya.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Pencarian pendanaan melalui penerbitan obligasi dan perbankan
- Penanganan aset bermasalah melalui *rescheduling/restructuring/refinancing*, eksekusi jaminan dan penagihan intensif
- Pemantauan kualitas aset dan likuiditas melalui rapat ALM

Risiko Likuiditas #02

Potensi Penyebab:

Keterbatasan dana untuk kesinambungan pelaksanaan program R/R BUMN karena:

- Penggunaan dana PMN memerlukan persetujuan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, sehingga terdapat risiko keterlambatan/tidak diperoleh persetujuan atas penggunaan dana PMN tersebut untuk program restrukturisasi BUMN
- Sebagian pendanaan menggunakan dana talangan/operasional PPA, sehingga BUMN restrukturisasi yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya dapat mempengaruhi likuiditas Perusahaan

Upaya Pengelolaan Risiko:

- *Reprofiling liabilities* untuk merealokasi sumber pendanaan
- Penyelesaian eksekusi jaminan untuk menyelesaikan pinjaman beberapa BUMN

Risiko Reputasi

Potensi Penyebab:

Pengelolaan NPL Perbankan dapat menyebabkan Perusahaan terekspos risiko reputasi.

Upaya Pengelolaan Risiko:

- Melakukan pemantauan terhadap pemberitaan di media, komunikasi dengan *stakeholder* terkait, dan publikasi melalui media/*website* terkait visi dan misi Perusahaan kedepan sebagai *National Asset Management Company*
- Menunjuk konsultan dalam rangka melakukan kajian dan persiapan infrastruktur untuk pengelolaan NPL Perbankan

Upaya Peningkatan Budaya Risiko

Faktor penting untuk mendukung efektivitas implementasi manajemen risiko Perusahaan adalah adanya budaya risiko yang kuat (*strong risk culture*) di dalam suatu organisasi. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan dilakukan melalui:

1. Direksi secara berkesinambungan mengkomunikasikan dan mendorong agar seluruh satuan kerja (*risk owner*) untuk terus mengembangkan budaya risiko (*risk*

Liquidity Risk #01

Potential Cause:

Lack of fund funds and/or inability to obtain funding from other parties to pay maturing obligations and finance business operations.

Risk Management Efforts:

- Fundraising through bond issuance and banking
- Handling non-performing assets through *rescheduling/restructuring/refinancing*, execution of guarantees and intensive collection
- Monitoring asset quality and liquidity through ALM meetings

Liquidity Risk #02

Potential Cause:

Lack of funds for sustainable implementation of the SOE R/R program was because:

- The use of PMN funds requires the approval of the Minister of SOE and the Minister of Finance, which may result in delay/late approval for the use of PMN funds for the SOE restructuring program
- Part of the funding uses PPA bridging/operational funds, so the restructured SOEs who were unable to meet their payment obligations may affect the Company's liquidity

Risk Management Efforts:

- Reprofile liabilities to reallocate funding sources
- Bring guarantee execution to completion in order to settle loans of several SOEs

Reputation Risk

Potential Cause:

An improper NPL management can expose the Company to reputational risk.

Risk Management Efforts:

- Monitor news in the media, communicate with relevant stakeholders, and publications through media/websites related to the Company's vision and mission in the future as a National Asset Management Company
- Appoint consultants in order to conduct studies and prepare infrastructure for NPL management

The Risk Culture Improvement Program

The important supporting factor of the effectiveness of risk management implementation in the Company is the strong risk culture in an organization. The initiatives to strengthen risk culture in the Company are done through the following activities:

1. Board of Directors communicates and encourages all work units (*risk owner*) continuously to develop risk culture and to improve the risk management quality and

culture) dan meningkatkan *quality risk management* serta kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.

2. Penyusunan Kebijakan, prosedur persetujuan kegiatan (*approval procedure*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko.
3. Divisi Manajemen Risiko secara aktif memberikan dukungan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko di Perusahaan.
4. Mengikuti pelatihan, seminar serta sertifikasi di bidang manajemen risiko dalam rangka peningkatan *risk awareness* dan kompetensi manajemen risiko.

compliance with the Company's policy and prevailing law in the Company's activity implementation.

2. The formulation of policy, activity approval procedure, and SOP refer to the risk management consideration.
3. Risk Management Division actively supports and facilitates the risk management implementation in the Company.
4. Participate in the risk management training, seminar, and certification to develop risk management knowledge and competency.

Audit Independen/Akuntan Publik

INDEPENDENT AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

Akuntan publik berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anggota *holding* terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Auditor eksternal tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan terhadap SAK di Indonesia.

The public accountant provides opinions related to the conformity of the consolidated financial statements presentation of the Company and Holding Members to the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). Accordingly, the External Auditor may not have a conflict of interest with the Company to guarantee the independency and quality of the audit results. The External Auditor is responsible for presenting an opinion on the conformity of the Company's Financial Statements with IFAS.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

The Management is responsible for presenting the Company's financial statements and complies with IFAS as stipulated by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian *intern*, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan;

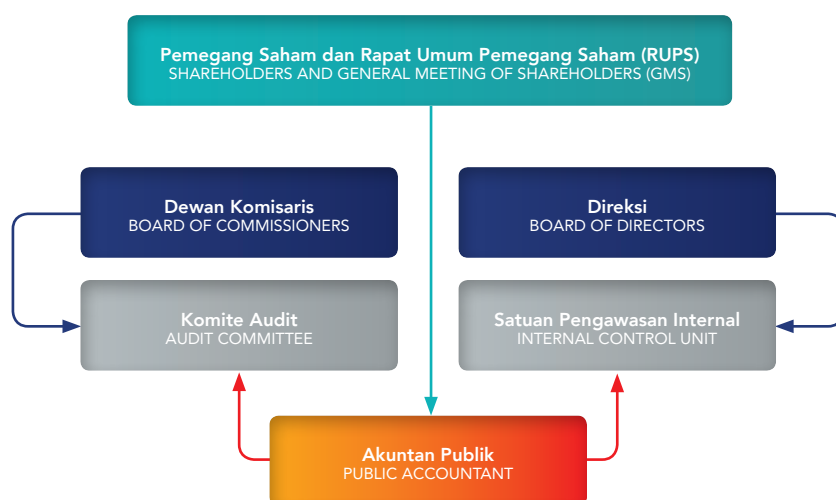
External Audit Procedures and Audit Standards

1. An audit of the Company's financial statements is conducted according to the professional standards of a Public Accountant covering all the audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.
2. Audit includes testing and evaluation of internal control systems, as well as examinations, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as an assessment of the overall presentation of financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) issued by IAI.
3. As a part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts a question and answer to the management regarding the management statement presented in the financial statements.

4. Audit mengandung risiko <i>inheren</i> bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen; 5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait; 6. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.	4. An audit contains an inherent risk if there are material mistakes and irregularities. If there is such a thing, KAP will convey it to the management. 5. The management approves the KAP's examination paper on the Company to be reviewed by the relevant institution or authority. 6. The audit is performed based on the Professional Standards of Certified Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). In addition, if there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is performed based on the State Audit Standards (SPKN) issued by the Financial Supervisory Board (BPK) of the Republic of Indonesia.

Hubungan auditor eksternal dengan organ internal Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The relationship of external auditor with the Company's internal organs can be seen in the chart below.



Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan.

Shareholders through the GMS have the authority to appoint External Auditor who will conduct an audit of the Company's financial statements.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa;
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan;
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/ imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan perusahaan;

The Public Accountant Appointment Mechanism

The stages of KAP appointment mechanism:

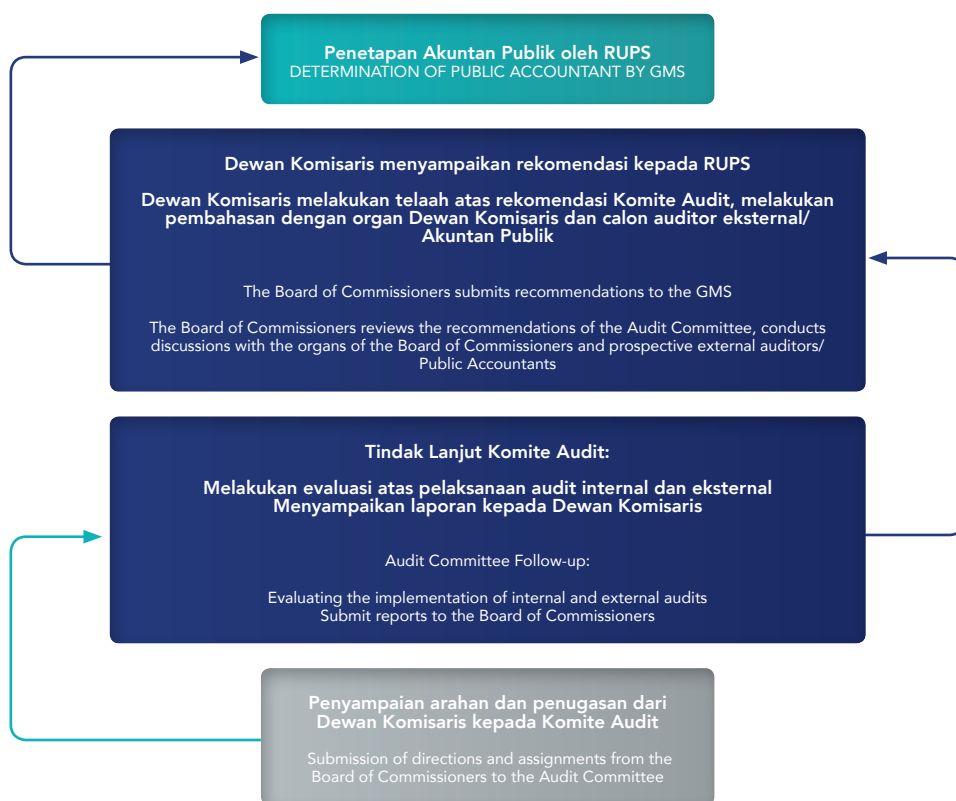
1. Board of Commissioners through Audit Committee shall process the appointment of external Auditor candidates by requesting to Board of Directors' assistance in the appointment process in accordance with the provisions of procurement of goods/services;
2. Board of Commissioners may re-appoint the external auditor based on the evaluation result on the external auditor's performance to audit the financial statements;
3. Board of Commissioners submits the reasons for such nomination to the GMS and the amount of fee/reward for the proposed external auditor. The proposal to the GMS may be submitted through a separate letter as a part of Board of Commissioners' letter of response to the annual performance of the Company;

4. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

4. Board of Commissioners evaluates the external auditor's performance through the Audit Committee in accordance with prevailing rules and standards.

The appointment of external auditor candidate and/or the re-appointment of external auditor conducted by the GMS, Board of Commissioners shall simply authorize the GMS to determine the auditor.



Akuntan Publik Tahun 2021

Public Accountant Year 2021

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	
Akuntan Accountant	Benny Andria	
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2021	Fiscal Year 2021
Periode Penugasan Audit Period	Desember 2021- Maret 2022	December 2021 – March 2022
Jasa Audit Service	- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA (Persero) - Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2021	- Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PPA (Persero) - Financial Reports and Program Implementation Funding for Micro and Small Business (UMK) for fiscal Year 2021
Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Professional (CRP) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko sejak tahun 2017	Certified Risk Professional (CRP) issued by the Risk Management Professional Certification Institute in 2017
Jasa Lainnya Other Service	Tidak ada	None
Biaya Audit Fee	Rp410.000.000	Rp410,000,000

Pengawasan terhadap Auditor Eksternal

Penunjukan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dilakukan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan *audit fee* atas dasar kewajaran.

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit, melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, serta memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Divisi SPI Perusahaan melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja, baik dari segi keuangan maupun operasional. Perusahaan berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan di tahun berikutnya.

Daftar Akuntan Publik

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, daftar KAP yang telah ditunjuk oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Supervision on External Auditor

The appointment of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners (RSM Indonesia) was made according to the prevailing regulation. The appointment has been reviewed and supervised by the Audit Committee, including audit fee stipulation based on fairness consideration.

The audit Committee performs monitoring throughout the implementation of the external audit process through regular meetings with the Public Accounting Firm to discuss all the findings and progress during the audit done by Public Accountant Firm, to help ensure there is no constraint in the audit process, performs the evaluation on the quality of the audit process, as well as ensures the audit implementation which has been complied with the prevailing regulation and standards.

The Effectiveness of Audit Implementation by Public Accountant

Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit Division in the Company to review the effectiveness of external audit implementation to ensure that all of the findings can be followed up according to the designated authority and improve the performance, both in terms of financial and operational performances. The Company attempts to follow up on every finding from the audit done by Public Accounting Firm and is effectively capable of reducing findings in the upcoming years.

The List of Public Accountants

The following is the list of Public Accounting Firms of the Company's Financial Statements 5 (five) consecutive years:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Lingkup Audit Scope of Audit	Opini Opinion	Biaya Fee	Izin AP AP License Number
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian; - Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program; - Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2021. - Audit of Consolidated Financial Statements; - Financial Reports and Program Implementation; - Funding for Micro and Small Enterprises (UMK) for the 2021 Financial Year.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	Rp410.000.000	AP0181
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	- Audit atas Laporan Keuangan; - Audit Laporan Keuangan PKBL; - Audit Kepatuhan; - Audit Hasil Evaluasi Kinerja. - Audit of Financial Statements; - Audit of PKBL Financial Statements; - Compliance Audit; - Performance Evaluation Audit.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	Rp682.000.000	AP0181
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	- Audit atas Laporan Keuangan; - Audit Laporan Keuangan PKBL; - Audit Kepatuhan; - Audit Hasil Evaluasi Kinerja. - Audit of Financial Statements; - Audit of PKBL Financial Statements; - Compliance Audit; - Performance Evaluation Audit.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	Rp594.000.000	AP0181
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Saptoto Agustomo	- Audit atas Laporan Keuangan; - Audit Laporan Keuangan PKBL; - Audit Kepatuhan; - Audit Hasil Evaluasi Kinerja. - Audit of Financial Statements; - Audit of PKBL Financial Statements; - Compliance Audit; - Performance Evaluation Audit.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	Rp500.000.000	AP0499



Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Lingkup Audit Scope of Audit	Opini Opinion	Biaya Fee	Izin AP AP License Number
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Saptoto Agustomo	- Audit atas Laporan Keuangan; - Audit Laporan Keuangan PKBL; - Audit Kepatuhan; - Audit Hasil Evaluasi Kinerja. - Audit of Financial Statements; - Audit of PKBL Financial Statements; - Compliance Audit; - Performance Evaluation Audit.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	Rp528.000.000	AP.0499

PERKARA PENTING

LEGAL CASE

Rekapitulasi Perkara Hukum

Recapitulation of Legal Cases

Permasalahan Hukum Legal Cases	2021		2020	
	Perdata Civil	Pidana Crime	Perdata Civil	Pidana Crime
Perusahaan The Company				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and have legal force	7	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	4	-	7	-
Jumlah Total	11	-	7	-
Dewan Komisaris dan Direksi Boards of Commissioners and Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and have legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiaries				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and have legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	1	-	-	-
Jumlah Sub Total	1	0	0	0
Jumlah Keseluruhan Total	1	0	0	0

Rincian Perkara Hukum

Legal Case Details

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The details of legal cases faced by the Company in 2021 are as follows.

PERKARA #1:

PIHAK YANG BERPERKARA:

- CV Delima Jaya
- PT PPA (turut tergugat II)

CASE #1

LITIGATION PARTY:

- CV Delima Jaya
- PT PPA (co-defendant II)

POKOK PERKARA:

PERDATA No. 104/Pdt.G/2016 PN Bgr

CASE PRINCIPLE:

Civil code No. 104/Pdt.G/2016 PN Bgr

STATUS PERKARA:

Putusan banding No. 523/PDT/2018/PT BDG tgl.20 Desember 2018, amarnya:

- Menerima permohonan banding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tgl 4 Oktober 2017, No. 104/Pdt/2016/PN Bgr
- KPKNL ajukan Kasasi di MA tgl. 08 Maret 2019

CASE STATUS:

Decision on appeal No. 523/PDT/2018/PT BDG on December 20, 2018, the verdict:

- Received the appeal;
- Strengthening the decision of District Court dated October 4, 2017, No. 104/Pdt/2016/PN Bgr
- KPKNL submitted Cassation in Supreme Court on March 08, 2019

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Monitor perkara

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

Monitoring the Case.

PERKARA #2

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Anthony Handoko
2. PT PPA (tergugat II)

POKOK PERKARA:

PERDATA No. 279/Pdt.G/PN.Jkt Sel

STATUS PERKARA:

Putusan Pengadilan Negeri tgl. 07 Desember 2017, amarnya:

- Mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah SHM No. 1065/Kemanggisian.

Putusan Banding tgl 16 Oktober 2018, amarnya: menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Terdapat permohonan Kasasi dari Tergugat III, IV dan V namun telah dicabut pada tgl 5 Maret 2019.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Perkara Telah Selesai.

CASE #2

LITIGATION PARTY:

1. Anthony Handoko
2. PT PPA (defendant II)

CASE PRINCIPLE:

Civil Code No. 279/Pdt.G/PN.Jkt Sel

CASE STATUS:

Decision on December 07, 2017, the verdict:

- Granted the Plaintiff's claim in its entirety;
- Declared that the Defendants have committed acts against the law;
- Declared that the Plaintiff is the legal owner of the land with SHM No. 1065/Kemanggisian

Decision on appeal on October 16, 2018, the verdict: Strengthen District Court decision.

Defendant III, IV, V applied for cassation, but then revoke the application by March 5, 2019.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

CASE CLOSED.

PERKARA #3

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Batam Island Marina (dalam pailit)
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

KEPAILITAN No. 16/Pdt.-Sus-PKPU/2018 PN Niaga Mdn

STATUS PERKARA:

PT BIM dinyatakan pailit tanggal 24 Februari 2019.
Kurator: Deni Amsari Purba, SH, LLM;
Hakim Pengawas: Masrul, SH, MH
Tagihan PPA: Rp305.334.176.892,-

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Perkara Telah Selesai.

CASE #3

LITIGATION PARTY:

1. PT Batam Island Marina (in bankruptcy)
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

BANKRUPTCY No. 16/Pdt.-Sus-PKPU/2018 PN Niaga Mdn

CASE STATUS:

PT BIM was declared bankrupt on February 24, 2019.
Curator: Deni Amsari Purba, SH, LLM;
Supervisory Judge: Masrul, SH, MH
PPA Invoice: Rp305,334,176,892

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

CASE CLOSED.

PERKARA #4**PIHAK YANG BERPERKARA:**

1. PT Kertas Leces (Persero)
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

1. KEPAILITAN No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Jo, No.05/Pdt.Sus/ PKPU/2014/PN Sby;
2. Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit

STATUS PERKARA:

1. PT Kertas Leces (KL) dinyatakan pailit pada tanggal 25 September 2018.
 - Tim Kurator KL: Anggi Gitaharani; Rayi Baskara dan Febry Arisandi, SH
 - Hakim Pengawas: BP. Sarwedi, SH
 - Tagihan PPA: Rp104.706.182.222,-
2. Penjualan oleh Kreditor separatis (PPA):
 - Tanggal 11 Desember 2018 telah dilaksanakan lelang atas jaminan milik KL, HGB No.227/Kramat Pela, terletak di Jalan Radio IV No.5, Jakarta Selatan melalui Pejabat Lelang KPKNL Jakarta V telah laku terjual Rp11.495.000.000,-
 - Pemenang Lelang: PT PPA Kapital
 - Terkait Daftar pembagian harta pailit tertanggal 26 April 2019 ("daftar pembagian") yang dibuat oleh Tim Kurator diajukan perlawanan atau keberatan oleh PPA selaku Pelawan.
 - Dalam daftar pembagian, PPA memperoleh Rp1.291.375.490,-
 - Putusan keberatan tanggal 29 Agustus 2019 atas keberatan dari PPA dinyatakan ditolak
 - Putusan keberatan tanggal 29 Agustus 2019 atas keberatan dari PPA dinyatakan ditolak, PPA kemudian mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung tgl.06 September 2019.
 - Putusan Kasasi No. 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 24 Februari 2020, amarnya: menyatakan Daftar Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian dinyatakan batal atau tidak sah; menyatakan PT PPA selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat I memperoleh hak sebesar Rp9.500.000.000,- belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka eksekusi lelang atas objek lelang; memerintahkan Tim Kurator untuk memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari PT PPA selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat I memperoleh hasil penjualan agunan;
 - Putusan Peninjauan Kembali No. 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 3 Mei 2021, amarnya: Menolak permohonan Peninjauan Kembali.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Perkara Telah Selesai.

CASE #4**LITIGATION PARTY:**

1. PT Kertas Leces (Persero)
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

1. BANKRUPTCY No. 1/Pdt.Sus- Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Jo, No.05/Pdt.Sus/ PKPU/2014/PN Sby;
2. Objection to the List of Bankrupt Assets Distribution

CASE STATUS:

1. PT Kertas Leces (KL) was declared bankrupt on September 25, 2018.
 - KL Curator Team: Anggi Gitaharani; Rayi Baskara and Febry Arisandi, SH
 - Supervisory Judge: BP. Sarwedi, SH
 - PPA Invoice: Rp104,706,182,222
2. Sales by Separatist Creditor (PPA):
 - On December 11, 2018, an auction held for collateral belonging to KL, HGB No.227/Kramat Pela, located at Jalan Radio IV No.5, South Jakarta through KPKNL Jakarta V Auction Officer, with the sales amount of Rp11,495,000,000,-
 - Auction Winner: PT PPA Kapital
 - Regarding the list of distribution of bankrupt assets dated April 26, 2019 ("list of distribution") made by the Curator Team, a challenge or objection was filed by PPA as the Opponent.
 - In the distribution list, PPA obtains Rp1,291,375,490
 - The objection decision dated August 29, 2019 on the objection from PPA was declared to be rejected
 - The decision for objection dated August 29, 2019: Objection rejected. PPA filed Cassation to the Supreme Court on September 06, 2019.
 - Cassation No. 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, February 24, 2020, the verdict: Division List that made and arranged by curator team are incorrect, resulting in null, void and invalid, declared PT PPA as separatist creditor obtain the rights as much as Rp9,500,000,000,- excluded the expenses incurred for auction. Ordered the curator team to repair and create new division list that do not reduce PT PPA recovery rights as separatist creditor.
 - Decision of Supreme Court Review No. 19 PK/Pdt. Sus-Pailit/2021, May 3, 2021, the verdict: Objected the review application.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

CASE CLOSED.

PERKARA #5

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Kertas Leces (Persero)
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

Perkara No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Jo, No.05/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Sby, PT PPA mengajukan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit tanggal 1 Desember 2021.

STATUS PERKARA:

Menunggu putusan dari PN Niaga Surabaya.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Monitoring perkara.

CASE #5

LITIGATION PARTY:

1. PT Kertas Leces (Persero)
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

Case No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Jo, No.05/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Sby, Objection to the List of Bankrupt Assets Distribution dated December 1, 2021.

CASE STATUS:

Waiting for the decision from Surabaya Commercial Court.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

MONITORING CASE.

PERKARA #6

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP)
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

PKPU No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Niaga Surabaya, Jawa Timur

STATUS PERKARA:

Putusan tanggal 28 Feb 2020 dari PN Niaga Surabaya menyatakan PT Duta Cipta Pakarperkasa pailit.

Kurator: M. Agung Budiman, SH

Hakim Pengawas: Sifa' urosidin, S.H., M.H.

Tagihan PPA: Rp29.643.669.931,94

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Perkara Telah Selesai

CASE #6

LITIGATION PARTY:

1. PT Duta Cipta Pakarperkasa (DCP)
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

PKPU No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Niaga Surabaya, East Java

CASE STATUS:

PT Duta Cipta Pakarperkasa was declared bankrupt on February 28, 2020.

Curator team: M. Agung Budiman, SH

Supervisory Judge: Sifa' urosidin, S.H., M.H.

PPA invoice: Rp29.643.669.931,94

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

CASE CLOSED

PERKARA #7

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Petro Energy
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

PKPU No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Jakarta Pusat

STATUS PERKARA:

Putusan tanggal 29 Juni 2020 menyatakan PT Petro Energy pailit

Kurator: Fitri Safitri, S.H.

Hakim Pengawas: Makmur, S.H., M.H.

Tagihan PPA: Rp. 1.000.000.000,-

CASE #7

LITIGATION PARTY:

1. PT Petro Energy
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

PKPU No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN Jakarta Pusat

CASE STATUS:

PT Petro Energy pailit was declared bankrupt on June 29, 2020.

Curator team: Fitri Safitri, S.H.

Supervisory Judge: Makmur, S.H., M.H.

PPA Invoice: Rp. 1.000.000.000,-



RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI
NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Perkara Telah Selesai.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL
VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

CASE CLOSED

PERKARA #8

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Magnesium Gosari Internasional
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

PKPU No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

STATUS PERKARA:

tanggal 18 Oktober 2021 telah terdapat putusan PN Niaga Surabaya yang menyatakan sahnya perdamaian antara PT Magnesium Gosari Internasional dengan para krediturnya dan menghukum PT Magnesium Gosari Internasional dan para krediturnya untuk mentaati perdamaian tersebut.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI
NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Perkara Telah Selesai.

CASE #8

LITIGATION PARTY:

1. PT Magnesium Gosari Internasional
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

PKPU No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

CASE STATUS:

On October 18, 2021, Surabaya Commercial Court declared the validity of reconciliation agreement between PT Magnesium Gosari Internasional and the creditors, ordered PT Magnesium Gosari Internasional and the creditors to obey the reconciliation agreement.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL
VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

CASE CLOSED

PERKARA #9

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Barata Indonesia (Persero)
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

PKPU No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

STATUS PERKARA:

tanggal 26 November 2021 telah terdapat putusan PN Niaga Surabaya yang menyatakan sahnya perdamaian antara PT Barata Indonesia (Persero) dengan para krediturnya.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI
NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Perkara Telah Selesai.

CASE #9

LITIGATION PARTY:

1. PT Barata Indonesia (Persero)
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

PKPU No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

CASE STATUS:

On November 26, 2021, Surabaya Commercial Court declared the validity of reconciliation agreement between PT Barata Indonesia (Persero) and the creditors.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL
VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

CASE CLOSED

PERKARA #10

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
2. PT PPA (selaku kreditor)

POKOK PERKARA:

PKPU No. 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

CASE #10

LITIGATION PARTY:

1. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
2. PT PPA (as creditor)

CASE PRINCIPLE:

PKPU No. 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

STATUS PERKARA:

tanggal 4 Oktober 2021 telah terdapat putusan PN Niaga Surabaya yang menyatakan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam PKPU dan akan dilakukan pembahasan proposal perdamaian antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan para krediturnya.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Monitor Perkara

CASE STATUS:

On October 4, 2021, Surabaya Commercial Court declared the PT Dok dan Perkapalan Surabaya on PKPU, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) and the creditors will discuss about reconciliation proposal.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

MONITORING THE CASE

PERKARA #11

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT Prabu Wahana International
2. PT PPA (selaku tergugat)

POKOK PERKARA:

Perkara No. 1182/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

STATUS PERKARA:

Gugatan dari PT Prabu Wahana International yang meminta agar Perjanjian Kredit antara PT PPA dengan PT Prabu Wahana International dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan sisa kewajiban PT Prabu Wahana International kepada PT PPA adalah sebesar Rp3.428.082.851,-.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

-

TINDAK LANJUT:

Monitor Perkara

CASE #11

LITIGATION PARTY:

1. PT Prabu Wahana International
2. PT PPA (defendant)

CASE PRINCIPLE:

Case No. 1182/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

CASE STATUS:

Lawsuit from PT Prabu Wahana International ask the court to declare credit agreement between PT PPA and PT Prabu Wahana International null and void and declare Prabu Wahana International remaining liabilities are Rp3,428,082,851,-.

RISK FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS/LAWSUITS:

-

FOLLOW-UP:

MONITORING THE CASE

Perkara Hukum Entitas Anak

Rincian Perkara Hukum PT PPA Kapital dan PT PPA Finance

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Rachman Soleh (dalam hal ini bertindak dan mewakili PT Timas Merak)
2. PT PPA Finance (tergugat VI)

POKOK PERKARA:

PERDATA No. 468/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

STATUS PERKARA:

Pembuktian Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan:

-

TINDAK LANJUT:

Monitor perkara

Legal Cases of Subsidiaries

Details of Legal Case of PT PPA Kapital and PT PPA Finance

PARTIES INVOLVED:

1. Rachman Soleh (in this case acting and representing PT Timas Merak)
2. PT PPA Finance (Defendant VI)

MERITS OF CASE:

CIVIL CASE No. 468/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

STATUS OF CASE:

Proof of the Risks faced by the Company and the Nominal Value of Claims/Lawsuits:

-

FOLLOW-UP:

Case monitoring

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai induk, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

THE DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELATED AUTHORITIES

In 2021, there were no material administrative sanctions that affected the Company's business continuity and there were also no administrative sanctions imposed on the Company as the parent entity, subsidiaries, members of Board of Directors or members of Board of Commissioners by the relevant authorities.

Perusahaan Entities	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
Perusahaan The Company	
Perusahaan The Company	Tidak Ada None
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Tidak Ada None
Entitas Anak Subidiaries	
PT PPA Finance	Tidak Ada None
PT PPA Kapital	Tidak Ada None
PT Nindya Karya	Tidak Ada None

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Di sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris maupun Direksi.

NON-LEGAL IMPORTANT CASES

Throughout 2021, the Company did not have any important case outside the legal aspect that involved the Company as an organization, subsidiaries, Board of Commissioners, or Board of Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Ketersediaan akses informasi dan data Perusahaan untuk para pemangku kepentingan merupakan perwujudan dari prinsip transparansi yang dijalankan Perusahaan. Karena itulah, Perusahaan selalu berupaya untuk mempermudah akses para pemangku kepentingan terhadap informasi Perusahaan, termasuk mengenai laporan keuangan, non-keuangan, serta data Perusahaan lainnya yang selalu diperbarui.

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

The availability of access to Company information and data for stakeholders embodies the transparency principle applied by the Company. For this reason, the Company continues to facilitate its stakeholders in accessing the periodically updated Company information, including financial, non-financial reports, and other Company data.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak. Sehingga, integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan terjaga sebagaimana diatur dalam pada Pedoman Kebijakan Perusahaan. Beberapa akses Informasi yang disediakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary is in charge of coordinating communication media management, both electronic and printed media. Therefore, the integrity and credibility of the Company's information to the public can be maintained as regulated in the Corporate Policy Manual. Some information access provided by the Company are as follows:

Komunikasi Eksternal

1. Website

Situs web memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan tata kelola keterbukaan informasi. Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat <http://www.ptppa.com> yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

External Communication

1. Website

Website has a significant role in information disclosure governance. The Company has an official website at <http://www.ptppa.com> both in Indonesian (Bahasa) and English.

Informasi yang tersedia antara lain:

- a. Struktur grup Perusahaan;
- b. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan;
- c. Pemegang saham;
- d. Informasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
- e. Informasi mengenai tata kelola perusahaan;
- f. Informasi pelaksanaan RUPS.

2. Surat Elektronik

Perusahaan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui surat elektronik untuk mengakomodir berbagai pertanyaan terkait dengan Perusahaan dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan pada *E-mail*: corpsec@ptppa.com.

3. Hubungan dengan Media Massa

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Perusahaan juga selalu menjaga hubungan baik dengan media massa untuk memberikan pembaruan informasi penting Perusahaan dengan melakukan kunjungan media dan melalui *workshop*. Selama tahun 2021, [kegiatan dengan media]

4. Siaran Pers

Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra untuk menyebarkan informasi tentang Perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat umum, seperti dalam bentuk siaran pers. Sepanjang tahun 2021, realisasi siaran pers Perusahaan adalah:

Press Release PPA:

- 1) Nomor PR 003/PPA/CS/0421 tanggal 19 April 2021, perihal Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadan, PPA Salurkan 300 Paket Sembako untuk Anak Yatim, Duafa, dan Keluarga Wartawan.
- 2) Nomor PR 004/PPA/CS/0421 tanggal 28 April 2021, perihal Dukong PPA menjadi National Asset Management Company (NAMCO), Pemerintah Alihkan 5 Saham Minoritas.
- 3) Nomor PR 005/PPA/CS/0421 tanggal 25 April 2021, perihal Klaster Danareksa-PPA Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Badai Siklon NTT.
- 4) Nomor PR-7/PPA/CS/0821 tanggal 12 Agustus 2021, perihal PPA Dukong Nakes dan Bantu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Terdampak Pandemi.
- 5) Nomor PR-8/PPA/CS/0921 tanggal 14 September 2021, perihal Menteri BUMN Lengkapi Formasi Direksi PT PPA (Persero).
- 6) Nomor PR-9/PPA/CS/0921 tanggal 14 September 2021, perihal Lakukan Restrukturisasi, PT PPA Bantu PT Iglas untuk Menyelesaikan Pesangon Eks Karyawan.
- 7) Nomor PR-10/PPA/CS/0921 tanggal 15 September 2021, Dukong Penguatan Perbankan Syariah, PT PPA, BPKH, dan Bank Muamalat Tanda Tangan Perjanjian Induk Pengelolaan Aset.

The information includes:

- a. Corporate group structure;
- b. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors.
- c. Shareholders;
- d. Information about Annual Report and Financial Statements.
- e. Information about corporate governance.
- f. Information about GMS implementation

2. E-mail

The Company has prepared communication with the stakeholders transparently through electronic mail to accommodate various inquiries related to the Company by contacting Corporate Secretary at E-mail address: corpsec@ptppa.com.

3. Mass Media

To be able to convey the information comprehensively, the Company conducts media relations to a number of national and local media. The Company also maintains good relationship with the media to update the important information about the Company through media visit and workshop. Throughout 2021,

4. Press Release

The Company actively utilizes the mass media as a partner to disseminate information about the Company to the public. The following are the press releases conducted by the Company throughout 2021.

Press Release of PPA:

- 1) Number PR 003/PPA/CS/0421 dated April 19, 2021, regarding Sharing Happiness in the Month of Ramadan, PPA Distributes 300 Food Packages for Orphans, Duafa, and Journalists' Families.
- 2) Number PR 004/PPA/CS/0421 dated April 28, 2021, regarding Supporting PPA to become a National Asset Management Company (NAMCO), the Government Transfers 5 Minority Shares.
- 3) Number PR 005/PPA/CS/0421 dated April 25, 2021, regarding the Danareksa-PPA Cluster Distributing Humanitarian Aid to Victims of the NTT Cyclone.
- 4) Number PR-7/PPA/CS/0821 dated August 12, 2021, regarding PPA Supporting Healthcare Workers and Helping Fulfilling the Basic Needs of Communities Affected by the Pandemic.
- 5) Number PR-8/PPA/CS/0921 dated September 14, 2021, regarding the Minister of BUMN Completes the Formation of the Directors of PT PPA (Persero).
- 6) Number PR-9/PPA/CS/0921 dated September 14, 2021, regarding Restructuring, PT PPA Assists PT Iglas to Complete Severance Pay for Ex-Employees.
- 7) Number PR-10/PPA/CS/0921 dated September 15, 2021, Support the Strengthening of Sharia Banking, PT PPA, BPKH, and Bank Muamalat Sign Asset Management Master Agreement.

- 8) Nomor PR-11/PPA/CS/1021 tanggal 22 Oktober 2021, Dukong Kegiatan Usaha, PT PPA Peroleh Fasilitas Pendanaan USD75 Juta dari Bank KB Bukopin.
- 9) Nomor PR-13/PPA/CS/1221 tanggal 17 Desember 2021, Dukungan Penguatan BUMN Manufaktur Indonesia, PT PPA Restrukturisasi dan Revitalisasi Barata.
10. Nomor PR-14/PPA/CS/1221 tanggal 31 Desember 2021, PPA Perkuat Fondasi untuk Menjadi NAMCO

- 8) Number PR-11/PPA/CS/1021 dated October 22, 2021, Supporting Business Activities, PT PPA Obtains USD75 Million Funding Facility from Bank KB Bukopin.
- 9) Number PR-13/PPA/CS/1221 dated December 17, 2021, Support for Strengthening Indonesian Manufacturing SOEs, PT PPA Restructuring and Revitalizing Barata.
- 10) Number PR-14/PPA/CS/1221 dated December 31, 2021, PPA Strengthens the Foundation to Become a NAMCO

5. Laporan Tahunan

Perusahaan menyediakan informasi lengkap yang telah dikemas dalam laporan tahunan. Laporan ini secara resmi disampaikan kepada pemegang saham, regulator, serta para pemangku kepentingan lain yang relevan. Kendati demikian, masyarakat dapat mengaksesnya melalui website Perusahaan.

5. Annual Report

The Company provides information channel through Annual Report that is published every year. The Annual Report is distributed to the shareholders, regulator, and other relevant stakeholders. However, the public can also access it through the Company's website.

Publikasi Laporan Tahunan 5 Tahun Terakhir

Publication of the Last 5 Years Annual Report

Tahun Year	Tema Theme
2021	Preserving Values Instilling Resilience
2020	Strategic Roles for Better Performance
2019	Strengthening the Strength
2018	Repositioning For the Future Growth
2017	Optimizing Strengths Into Excellence, Enhancing Capacity for Growth

6. Laporan Keberlanjutan

Selain laporan tahunan, Perusahaan juga menyajikan laporan keberlanjutan yang merupakan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

6. Sustainability Report

The Company also provides information channel about the Company's social and community activities comprehensively in Sustainability Report.

Publikasi Laporan Keberlanjutan 5 Tahun Terakhir

The publication of Sustainability Report for the last 5 years.

Tahun Year	Tema Theme
2021	Preserving Values Instilling Resilience
2020	Strengthening the Role, Integrating Sustainability
2019	Continue to Grow Increasing Benefits
2018	Achieving Excellence for Sustainable Growth
2017	Sustaining Growth with Strong Values of Responsibilities

7. Laporan Manajemen

Laporan manajemen disampaikan secara triwulanan kepada Pemegang Saham.

7. Management Report

The submits Quarterly Management Report to the Shareholders.

Komunikasi Internal

Untuk kepentingan internal, Perusahaan menyediakan sarana komunikasi sebagai ruang diskusi bagi karyawan dengan manajemen. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, baik secara korporasi maupun per masing-masing unit kerja. Bentuk kegiatan tersebut, antara lain:

Internal Communication

The Company provides communication channel as discussion forum between employees and management periodically either at corporate or working unit level.

1. Town Hall Meeting

Kegiatan ini merupakan pertemuan secara berkala yang melibatkan interaksi langsung antara manajemen

1. Town Hall Meetings

The Company organizes regular meeting which involves direct interaction between the Company's Management

dengan seluruh karyawan Perusahaan untuk membahas pencapaian target Perusahaan serta membahas isu-isu terkini Perusahaan.

2. Meet and Greet

Kegiatan ini berupa talkshow yang dihadiri oleh seluruh karyawan Perusahaan dengan mengundang narasumber dari berbagai instansi pemerintah maupun lainnya sebagai pembicara dan memaparkan hal-hal yang bersifat inspiratif. *Meet and Greet* ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan karyawan Perusahaan dengan maksud untuk menciptakan talkshow yang interaktif.

3. Peringatan Hari Besar Nasional

Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara senantiasa menghargai jasa para pahlawan dengan cara melaksanakan Upacara, seperti Upacara memperingati Hari Pahlawan, Upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Upacara memperingati Hari Kartini dan lainnya. Adapun yang menjadi petugas pelaksana adalah dari karyawan Perusahaan.

Media Sosial

Media sosial termasuk saluran komunikasi yang dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan Perusahaan kepada masyarakat melalui Facebook, Instagram dan Twitter.

Instagram: PT PPA (Persero)

Twitter : PT PPA (Persero)

Facebook: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Komunikasi Langsung

Permintaan komunikasi secara langsung dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan melalui:

PT PPA (Persero)

Gedung Menara Mandiri II Lantai 7 – 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Telepon: +62 21 5798 2222
Faksimili: +62 21 5798 2233
E-mail: corpsec@ptppa.com

Dalam menyampaikan/mengeluarkan informasi secara umum, Perusahaan telah mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-33/PPA/0516 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Perusahaan.

Pada tahun 2021, tidak terjadi kejadian/kasus atau temuan Divisi SPI terkait pelanggaran terhadap Kebijakan Komunikasi Keluar atau Pedoman Kebijakan Perusahaan, seperti kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

Ragam Media kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Perusahaan menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan melalui beragam media. Rinciannya disampaikan dalam tabel berikut ini:

and all employees to discuss the Company's target achievement and current issues experienced by the Company.

2. Meet and Greet

The Company organizes the talks attended by all employees of the Company by inviting people from various Government's institution or other organizations as speakers and presents inspirational topics. The Meet and Greet is closed with question & answer session between the speakers and employees with purpose to create an interactive talk.

3. National Holiday Celebration

As a State-Owned Enterprise, the Company respects the national Holiday and dedication of the National Heroes through various ceremonies such as National Heroes Day Ceremony, Independence Day Ceremony, Kartini Day Ceremony and other ceremonies. The ceremony officers are appointed from the Company's employees.

Social Media

The Company utilizes social media as a means of conveying information about the Company's activities to the public through Facebook, Instagram and Twitter.

Instagram: PT PPA (Persero)

Twitter : PT PPA (Persero)

Facebook: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Direct Communication

Communication inquiry can be directly delivered to Corporate Secretary via:

PT PPA (Persero)

Menara Mandiri II Building North Tower 7th-9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Phone: +62 21 5798 2222
Fax: +62 21 5798 2233
E-mail: corpsec@ptppa.com

In submitting/issuing the information publicly, the Company has followed the procedure stipulated in the Board of Directors Decree No. SK-33/PPA/0516 regarding The Corporate Information Disclosure Policy.

In 2021, there were no incidents/cases or findings of the SPI Division related to violations of the Outgoing Communications Policy or Company Policy Guidelines, such as leakage of confidential information.

The Variety of Media to Shareholders and Stakeholders

The Company conveys the data and information through various media as presented in the table below:



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-bentuk Media Media Forms
Regulator Regulator	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen Financial Reports, Annual Reports, Management Reports
Pemegang Saham Shareholders	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Manajemen Financial Reports, Annual Reports, Management Reports
Investor Investor	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Lembaga Publik Public Institution	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Konsumen Consumer	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Karyawan Employee	Buletin Internal, Intranet Internal Bulletin, Intranet
Perusahaan Sejenis Lainnya Similar company	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Mitra Kerja dan Rekanan Business Partners	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Organisasi Profesi Profession Organization	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports
Masyarakat/Ummum Public	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Financial Statements and Annual Reports

Tata Kelola Teknologi dan Informasi

TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE

PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA"), ("Perusahaan") menyadari pentingnya peran teknologi informasi (TI) dalam menunjang proses bisnis yang berkembang dengan pesat. Karena itu, kebutuhan terhadap TI, antara lain sebagai penunjang kegiatan operasional menjadi sangat penting.

Penerapan TI yang tepat akan memberikan keunggulan kompetitif bagi Perusahaan, karena penggunaan teknologi secara efisien, tepat waktu, dan efektif dalam penggunaan biaya, dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, andal, dan aman. Selain itu, teknologi juga menjadi sarana penunjang keberlanjutan usaha sekaligus pendukung efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan kepada konsumen.

Perusahaan terus berupaya mengembangkan sistem teknologi informasi secara terarah dan terukur guna mendukung strategi bisnis. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pengembangan TI di Perusahaan mengacu pada *Master Plan* Teknologi Informasi periode 2020-2024, yang dikembangkan secara bersinergi antar sesama BUMN.

Landasan lain yang digunakan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-18/ PPA/0315 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berlaku.

The Company realizes the important role of Information Technology (IT) in supporting the Company's business processes. The rapid development of business and organizational needs requires the Company always to prepare the technology needed to support business development.

An effective IT implementation will provide a competitive advantage for the Company since utilizing technology in an efficient, timely, and cost-effective manner will create high-quality, reliable, and secure products and services. In addition, the use of technology will also support business sustainability as well as the efficient operational activity and quality of services delivered to the customers.

The Company continues to develop information technology systems in well-directed and measured ways to support business strategy. In its practice, IT application and development adopts a governance system as disclosed in Information Technology Master Plan for the 2020–2024 period, developed as synergy among SOEs.

Another regulatory basis used is the Decree of the Company's Board of Directors No. SK-18/PPA/0315 dated March 24, 2015, regarding Information and Communication Technology Governance Policies and applicable Standard Operating Procedures (SOP).

Tata Kelola

Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan berkala serta pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, antara lain seperti termuat dalam Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan tanggal 18 Februari 2013.

Struktur Organisasi dan Fungsi TI

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Perusahaan berada di bawah Divisi Teknologi Informasi dan Operasi Bisnis, Direktorat Utama. Tugas pokok Grup TI berdasarkan No. SK-57/PPA/0919 adalah menyediakan dan mengoptimalkan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data.

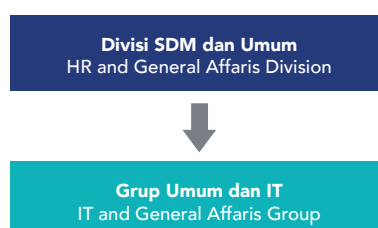
Dalam melaksanakan tugasnya, Grup TI menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem aplikasi dan pengelolaan data;
2. Pelaksanaan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Penyediaan dan pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk melalui proses pengamanan dan duplikasi (*back up*) data secara berkala dan penyediaan sarana untuk penanggulangan kondisi bencana (*disaster recovery plan*).

Sesuai dengan surat keputusan direksi No. SK-84/PPA/1120 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sampai dengan Jabatan Kepala Unit, Grup TI terdiri dari 2 (dua) unit yaitu:

1. Unit Pengembangan Sistem;
2. Unit Dukungan dan Administrasi Sistem;

Berdasarkan Keputusan Direksi No. SK-64/PPA/1021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), pengelolaan TI ada di level unit berada di bawah Divisi SDMU dan secara struktur dapat digambarkan sebagai berikut:



Governance

The Company conducts periodic monitoring and remains in compliance with regulations as contained in e.g. the Guidelines for the Preparation of SOE IT Management in accordance with the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-2/MBU/2013 on Guidelines for the Preparation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises issued February 18, 2013.

Organizational Structure and IT Function

The Company's Information and Communication Technology (ICT) is managed under the Main Directorate Information Technology and Business Operations Division. The main tasks of the IT Group based on No. SK-57/PPA/0919 provides and gives optimum support to information technology and telecommunications infrastructure, application systems, and data management.

In discharging its duties, the IT Group does the following functions:

1. Prepare policies for the provision and optimization of information and communication technology infrastructure support, application systems and data management;
2. Implement the provision and optimization of information and communication technology infrastructure support;
3. Implement the provision and development of application systems as well as conducting research and development in information and communication technology;
4. Provide and implement information and communication technology infrastructure security, including securing and periodically backing up data and providing facilities for disaster recovery plans.

Pursuant to the decision of the Board of Directors No. SK-84/PPA/1120 on the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) up to the Head of Unit Position, the IT Group consists of 2 (two) units, namely:

1. System Development Unit;
2. System Administration and Support Unit;

Pursuant to the Decree of the Board of Directors No. SK-64/PPA/1021 dated October 6, 2021 on the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), IT at unit level is managed under the HRU Division with the following structure:

Portofolio Layanan TIK Perusahaan

Portofolio Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PPA pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Enterprise ICT Services Portfolio

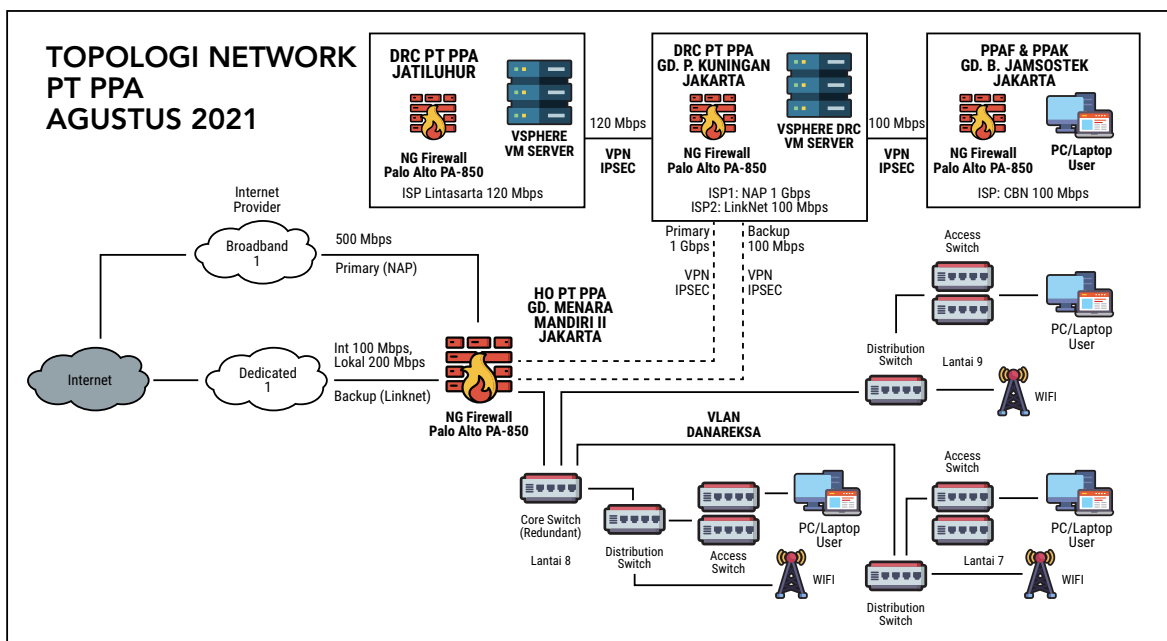
The table below shows PPA's Information and Communication Technology (ICT) Services Portfolio in 2021:

Jenis Layanan Type of Service	Kegiatan Activity
SUPPORT	
Unified Communication & Work Facility	Menyediakan layanan <i>E-mail, mobile devices, video conference, Unified Communication, virtual private network, dealing room</i> dan fasilitas kerja karyawan yang mendukung kegiatan Perusahaan. Providing E-mail services, mobile devices, video conference, Unified communication, virtual private networks, dealing room, and working facilities for employees to support the Company's activities
Data Center dan DRC Data Center and DRC	Menyediakan dan mengoperasikan <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> yang mampu menjaga ketersediaan dan keandalan informasi PPA. Providing and operating data center and disaster recovery center to maintain the availability and reliability of PT PPA's information
Aplikasi Pendukung Kegiatan Supporting Application	Menyediakan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Aplikasi <i>Meeting Room</i> , aplikasi <i>Carpool</i> , aplikasi <i>Helper</i> yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan dan dapat diakses secara <i>mobile</i> , dan aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi dengan proyek <i>Paperless Office</i> serta aplikasi pelaporan kegiatan perusahaan untuk menunjang <i>green environment</i> . Provide the supporting applications such as Meeting Room Application, Carpool application, Helper application which can be used by all employees that can be accessed by mobile and secretarial applications that are integrated with Paperless Office project and corporate activity reporting application to support green environment
Pusat Layanan TIK ICT Service Center	Menyediakan layanan TIK terintegrasi dan dapat memberikan solusi tepat waktu untuk seluruh permasalahan terkait pemanfaatan TIK dengan menyediakan <i>Single Point of Contact (SPOC)</i> , termasuk dukungan operasional TIK anak perusahaan. Providing the integrated ICT services and offering on time solutions for entire issues related to ICT utilization by providing Single Point of Contact (SPOC), including ICT operational support at subsidiaries
KEY OPERATIONAL	
Aplikasi <i>Document Management</i> The Document Management Application	Aplikasi pengelolaan dokumen elektronik untuk menciptakan, <i>review</i> , persetujuan, publikasi dokumen dan kemudahan pengaksesan terhadap informasi. The availability of electronic document management application to create, review, approve, and publish documents and easy information access
Corporate Communication	<i>Website</i> Perusahaan yang menjadi ujung tombak penyampaian informasi mengenai PT PPA dan intranet sebagai sarana komunikasi internal karyawan PPA. The availability of Company's website as PT PPA information publication channel, intranet as internal communication channel for PT PPA employees
Aplikasi Keuangan Finance Application	Menyediakan aplikasi keuangan (PUM, SPM, kas kecil, penagihan), Sistem Informasi Investasi (saham dan obligasi) dan <i>treasury</i> yang bermuara ke dalam aplikasi ERP (<i>Oracle E-business Suites</i>). Providing the financial applications (PUM, SPM, petty cash, billing), Investment Information Systems (stocks and bonds), and treasury leading to ERP application (<i>Oracle E-business Suites</i>)
Aplikasi Pengelolaan Pinjaman Debitur dan Kreditur Debtor and Creditor Loan Management Application	Menyediakan aplikasi <i>Core System</i> untuk mengelola pinjaman Debitur dan Kreditur yang bermuara ke dalam aplikasi ERP (<i>Oracle E-Business Suites</i>). Providing a Core System application to manage Debtor and Creditor loans which lead to an ERP (<i>Oracle E-Business Suites</i>) application.
STRATEGIC	
Pengelolaan Aset Asset Management	Memiliki aplikasi pengelolaan aset yang terintegrasi untuk aset <i>property</i> , hak tagih, saham, dan surat berharga. Having in place an application for integrated asset management for property assets, claim rights, shares, and securities.
Restrukturisasi dan Revitalisasi Restructuring and Revitalization	Implementasi <i>Microsoft Project</i> dan pelaporan ringkasan eksekutif untuk setiap BUMN di PPAWORLD dalam rangka mendukung pelaksanaan dan <i>monitoring</i> kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN The implementation of Microsoft Project and executive summary reporting for each SOE in PPAWORLD in order to support the implementation and monitoring of SOE restructuring and revitalization activities
Laporan Kinerja Performance Report	Sistem pelaporan kinerja perusahaan berupa <i>Dashboard</i> guna mempermudah manajemen dalam melakukan <i>monitoring</i> kinerja Perusahaan. The Company's performance reporting system is a dashboard to facilitate management in monitoring the company's performance.

Jenis Layanan Type of Service	Kegiatan Activity
IT Shared Services dan Due Dilligence TIK IT Shared Services and ICT Due Dilligence TIK	Menyediakan layanan <i>shared services</i> untuk anak perusahaan dan layanan <i>due diligence</i> TIK dalam rangka kegiatan <i>business advisory</i> . Providing shared services for subsidiaries and ICT due diligence services for business advisory activities.
Forum antar BUMN dan Kementerian BUMN SOEs and Ministry of SOEs Forum	Terlibat aktif dalam Forum teknologi Informasi (FORTI) BUMN dan mengkoordinir pengisian Portal BUMN. Actively involved in the SOE Information Technology Forum (FORTI) and coordinating the filling of the SOE Portal.

Arsitektur Infrastruktur TIK Perusahaan

ICT Infrastructure Architecture of the Company



Kondisi infrastruktur TIK PPA tahun 2021 adalah:

1. PPA memiliki sebuah *collocation* 1 rak 42U di Data Center PT NAPINFO yang terletak di Jakarta Selatan yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi bagi Perusahaan.
2. Perangkat jaringan PPA menggunakan ekosistem *UniFi* dari *Ubiquiti* yang terintegrasi dengan *Unifi Cloud Key Controller* sebagai perangkat manajemen jaringan yang mendistribusi segmentasi jaringan (*vlan*) berdasarkan struktur organisasi Perusahaan. Segmentasi ini menjaga sistem keamanan agar lebih maksimal.
3. Perangkat keamanan jaringan PPA menggunakan perangkat *Next Generation Firewall* dari Palo Alto yang berfungsi melindungi jaringan komputer internal dari serangan *cyber*, melindungi *Virtual Private Network* (VPN) dengan enkripsi data ke jaringan DRC dan *partner* serta meningkatkan kualitas IP telekomunikasi dengan *Quality of Services* (QoS) yang dapat memprioritaskan data VoIP.
4. *Bandwith* total jaringan internet adalah 1,02 Gbps terdiri dari 3 koneksi *broadband* masing-masing sebesar 500 Mbps, 500 Mbps dan 20 Mbps.

The Company's ICT infrastructure condition in 2021:

1. PT PPA also has a *collocation* of 1 42U rack in PT NAPINFO data center located South Jakarta which functioned as an information management center for PT PPA.
2. Network service of PT PPA has applied *UniFi* ecosystem of *Ubiquiti* integrated with *Unifi Cloud Key Controller* as a network management device that distributes network segmentation (*vlan*) based on the organizational structure in PT PPA. This segmentation guarantees more optimum security system.
3. PT PPA's network security uses the *Next Generation Firewall* from Palo Alto with the function to protect internal computer network from *cyber* attack, protect *Virtual Private Network* (VPN) with data encryption to DRC network and *partner* as well as improve quality of IP telecommunication using *Quality of Service* (QoS) that prioritizes VoIP data.
4. Total internet network bandwidth is 1.02 Gbps consisting of 3 broadband connections, respectively 500 Mbps, 500 Mbps and 20 Mbps;

5. Server yang dimiliki PPA saat ini sebagian besar berumur lebih dari lima tahun, yaitu sebanyak sembilan unit. Namun, ada tiga unit server baru yang berumur di bawah lima tahun dengan spesifikasi tinggi yang digunakan untuk operasional aplikasi inti. Sedangkan yang berumur di atas lima tahun hanya digunakan untuk aplikasi penunjang, backup dan pengembangan.
6. Domain Controller menggunakan Microsoft Windows Server 2016 di mana performansi jaringan, keamanan jaringan, dan kemudahan pemeliharaan masih terjaga dengan baik.
7. Microsoft Office 365 Business Premium digunakan untuk mendukung kerja secara kolaborasi di PT PPA dengan memanfaatkan Microsoft Teams, OneDrive, dan Sharepoints.
8. Sistem E-mail menggunakan hybrid Microsoft Exchange 2016 dan Exchange Office 365 yang mendukung smart device dengan keamanan yang cukup baik.
9. Implementasi wireless connection (wifi) menggunakan ekosistem Unifi dari Ubiquiti yang menerapkan teknologi terbaru yang mengintegrasikan satu hotspot dengan hotspot lain (single id) dan memungkinkan koneksi perangkat tidak terputus selama berada di area kantor PPA serta penggunaan dua gelombang 2,4 Ghz dan 5 Ghz dengan protokol terbaru AC untuk kualitas sinyal wifi yang lebih baik.
10. Sistem komunikasi menggunakan teknologi unified communication yang mengintegrasikan voice over IP, video telephony, video conferencing, fax dan E-mail.
11. Teknologi virtualisasi server menggunakan VMWARE 6.7 yang sudah dilengkapi dengan fitur teknologi backup Veeam.
12. PPA memiliki Disaster Recovery Center (DRC) yang berlokasi di Jawa Barat. DRC dibutuhkan sebagai tempat penyimpanan backup sistem PPA dan sebagai tempat pemulihan pada saat terjadi kondisi bencana sebagai bagian dari Business Continuity Plan.
5. Most of the servers owned by PT PPA are more than 5 years old (9 units), but there are 3 new server units under 5 years old with high specifications. For core application operations, the using servers are less than 5 years old, while those over 5 years old are only used for supporting, backup and development applications.
6. Domain Controller uses Microsoft Windows Server 2016 where network performance, network security and maintenance accessibility are well-maintained.
7. Microsoft Office 365 Business Premium is used to support collaborative work at PT PPA by utilizing Microsoft Teams, OneDrive, and Sharepoints.
8. E-Mail system uses Microsoft Exchange 2016 and Exchange Office 365 that support smart device with sufficient security.
9. Implementation of wireless connection (WiFi) uses up-to-date technology that integrates one hotspot with another (SID: Single ID) and allows uninterrupted device connections while in PPA office area as well as the use of two 2.4 GHz and 5 GHz waves with the latest AC protocol for better wifi signal quality.
10. Communication system uses Unified Communication technology that integrates voice over IP, video telephony, video conferencing, fax, and e-mail.
11. Server virtualization technology uses VMWARE 6.7 supported with Veeam Backup technology feature.
12. PT PPA has Disaster Recovery Center (DRC) located in Jatiluhur. The DRC is required as a back-up system storage location and also recovery center during disaster condition as well as part of the Business Continuity Plan.

Portofolio Aplikasi PPA

Hingga tahun 2021, portofolio aplikasi Perusahaan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

PPA Application Portfolio

Until 2021, the Company's application portfolio is outlined in the table below:

No.	Aplikasi Application	Infrastruktur Infrastructure	Integrasi Integrated
1	Aplikasi Monitoring Kesehatan Karyawan PPA + Inquiry dan Grafik PPA Employee Health Monitoring Application + Inquiry and Graphics	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	
2	Aplikasi MOMA - Interface Ke Oracle (Dalam Proses Development) MOMA Application - Interface To Oracle (Under Development)	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5, MSSQL, ORACLE INHOUSE	Terintegrasi dengan Oracle Finance Integrated with Oracle Finance
5	Aplikasi Protokol Covid Internal & Eksternal PPA + QR Code Internal & External Covid Protocol Application PPA + QR Code	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	
7	Aplikasi Minutes Meeting / Laporan SEVP2 SEVP2 Minutes Meeting / Report Application	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	
8	Aplikasi CMIS di APPS CMIS App on APPS	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5, MSSQL INHOUSE	
9	Aplikasi Pernyataan Kesehatan Health Declaration App	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	

No.	Aplikasi Application	Infrastruktur Infrastructure	Integrasi Integrated
10	Aplikasi PPA Group (<i>Sappa, Teaser PPA, Subsidiary PPAK, Induction Kits</i>) PPA Group Applications (<i>Sappa, PPA Teaser, PPAK Subsidiary, Induction Kits</i>)	OS: LINUX CENTOS 7, Android, iOS DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	
11	Aplikasi <i>Core Info</i> (<i>Summary Fasilitas, Billing Item Requery, Laporan Portofolio, Laporan Kewajiban Tagihan Pembayaran, Laporan Jatuh Tempo, Informasi Jaminan</i>) Core Info Application (<i>Summary Facility, Billing Item Requery, Portfolio Report, Payment Bill Obligation Report, Maturity Report, Guarantee Information</i>)	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan <i>Core System</i> Integrated with <i>Core System</i>
12	Aplikasi <i>Survey</i> (<i>Web + PPA Mobile</i>) Survey Application (<i>Web + PPA Mobile</i>)	OS: LINUX CENTOS 7, Android, iOS DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	
13	Aplikasi <i>Multi Menu</i> (<i>PPA Mobile</i>) Multi Menu Application (<i>PPA Mobile</i>)	OS : Android / iOS	
14	<i>Log Surat</i> Mail Log	OS: LINUX CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	terintegrasi dengan aplikasi Penomoran Surat, <i>e-mail</i> dan PPAWORLD integrated with Mail Numbering, e-mail and PPAWORLD applications
15	<i>Letter Numbering</i> Letter Numbering	OS: LINUX CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	terintegrasi dengan aplikasi <i>Log Surat</i> dan PPAWORLD integrated with Mail Log application and PPAWORLD
16	<i>Car Pool</i> Car Pool	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	terintegrasi dengan sistem <i>e-mail</i> dan <i>SMS Content</i> integrated with e-mail system and SMS Content
17	<i>Billing System</i> Billing System	OS: WINDOWS 2003 DIBELI DARI PT.Datacom	
18	<i>Alat Tulis Kantor</i> Office stationery	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	
19	PPAWORLD PPAWORLD	OS: LINUX CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	
20	<i>Helpdesk IT</i> Helpdesk IT	OS: LINUX CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
21	<i>Oracle E-Business Suites R12 – Purchase Order, Account Payable, General Ledger, Fixed Asset</i> Oracle E-Business Suites R12 – Purchase Order, Account Payable, General Ledger, Fixed Asset	OS: Oracle Linux DBMS: Oracle 12	
22	<i>Penagihan</i> Billing	OS: LINUX CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
23	<i>Treasury (Money Market)</i> Treasury (Money Market)	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	Terintegrasi dengan <i>Oracle Apps</i> Integrated with Oracle Apps
24	<i>Investasi Saham</i> Stock investment	OS: LINUX CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	terintegrasi dengan <i>Oracle Apps</i> Integrated with Oracle Apps
25	HRIS HRIS	OS: WINDOWS 2008 DBMS: SQL SERVER 2008 DIBELI DARI DATAON SQL SERVER 2008	terintegrasi dengan sistem <i>e-mail</i> dan <i>active directory</i> integrated with e-mail system and active directory
26	<i>Asset Tracking System</i> Asset Tracking System	OS: LINUX CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
27	<i>Custodian Management Information System</i> Custodian Management Information System	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	
28	<i>Working Files Management Information System</i> Working Files Management Information System	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	
29	<i>Working Document</i> Working Document	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



No.	Aplikasi Application	Infrastruktur Infrastructure	Integrasi Integrated
30	Website PPA Website PPA	OS: LINUX CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5.5 VENDOR : CANVAS	
31	Integrated Credit Management Information System	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	
32	Integrated Property Management Information System	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	
33	Shares Management Information System	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	
34	Credit and Shares Management Information System	OS: WINDOWS 2003 DBMS: SQL SERVER 2000 INHOUSE	
35	Ringkasan Eksekutif BUMN SOE Executive Summary	OS: CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
36	Kegiatan Perusahaan Corporate Activity	OS: CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
37	Unified Communication Unified Communication	OS: CENTOS 6 INHOUSE	Terintegrasi dengan Server Active Directory
38	Aplikasi perpustakaan Library Application	OS: CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
39	Knowledge Management	OS: CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
40	Document Trailer PPA	OS: CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
41	Electronic Filing PPAK	OS: CENTOS 5.5 DBMS: MYSQL 5 INHOUSE	Terintegrasi dengan PPAWORLD Integrated with PPAWORLD
42	Dashboard Kinerja Keuangan dan Finansial Financial and Financial Performance Dashboard	Microsoft Power BI	
43	Aplikasi FPPD FPPD Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	
44	Aplikasi Mailing Room Mailing Room Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	
45	Aplikasi Meeting Room Meeting Room Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	Terintegrasi dengan Sistem E-mail Integrated with E-mail System
46	Aplikasi Trading Trading Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	Terintegrasi dengan Sistem E-mail dan Oracle Integrated with E-mail System and Oracle
47	Aplikasi Minutes Meeting PPA PPA Minutes Meeting Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	
48	Aplikasi Minutes Meeting PPAF PPAF Minutes Meeting Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	
49	Aplikasi Minutes Meeting PPAK PPAK Minutes Meeting Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	
51	Aplikasi Pengarsipan Filing Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	Terintegrasi dengan Sistem Penomoran Surat dan Surat Masuk (Paperless) Integrated with Letter and Incoming Numbering System (Paperless)
52	Aplikasi Office Helper Officer Helper Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	Terintegrasi dengan E-mail dan SMS Content Integrated with E-mail and content
53	Aplikasi Informasi Portofolio Debitur Debtor Portfolio Information Application	OS: CENTOS 7 DBMS: MYSQL 5	
54	Core System PPA	OS : Windows 2016 DBMS : MSSQL 2016	Terintegrasi dengan e-mail dan Oracle Finance Integrated with E-mail and Oracle Finance
55	PPA Mobile / Mobile Platform Application	OS : Android/IOS	Terintegrasi dengan e-mail, SMS Gateway PPA, website PPA, dan platform aplikasi PPA Integrated with e-mail, PPA SMS Gateway, PPA website, and PPA application platforms

No.	Aplikasi Application	Infrastruktur Infrastructure	Integrasi Integrated
56	Desktop Platform <i>Application</i> Desktop Platform <i>Application</i>	OS : Centos 7 DBMS : Mysql 5.x	Terintegrasi dengan <i>E-mail, SMS Gateway</i> PPA dan <i>active directory</i> Integrated with E-mail, SMS Gateway PPA and active directory
57	<i>Paperless</i> PPAK	OS : Centos 7 DBMS : Mysql 5.x	Terintegrasi dengan <i>e-mail</i> Integrated with e-mail
58	<i>App</i> PPAK	OS : Centos 7 DBMS : Mysql 5.x	Terintegrasi dengan <i>e-mail</i> Integrated with e-mail
59	HRIS versi 6 HRIS version 6	OS : Centos 7 App. Server : Lucee 5 DBMS : Maria DB	Terintegrasi dengan <i>e-mail, active directory</i> dan <i>HRIS Mobile</i> Integrated with e-mail, active directory and HRIS Mobile
60	Aplikasi <i>Auditing/Teammate</i> Auditing/Teammate Application	OS : Windows 2016 DBMS : MSSQL 2016	Terintegrasi dengan <i>e-mail</i> Integrated with e-mail
61	Aplikasi <i>Trading House</i> Baja Steel Trading House App	OS : Centos 7 DBMS : Mysql 5.x	

Survei Kepuasan Pelanggan

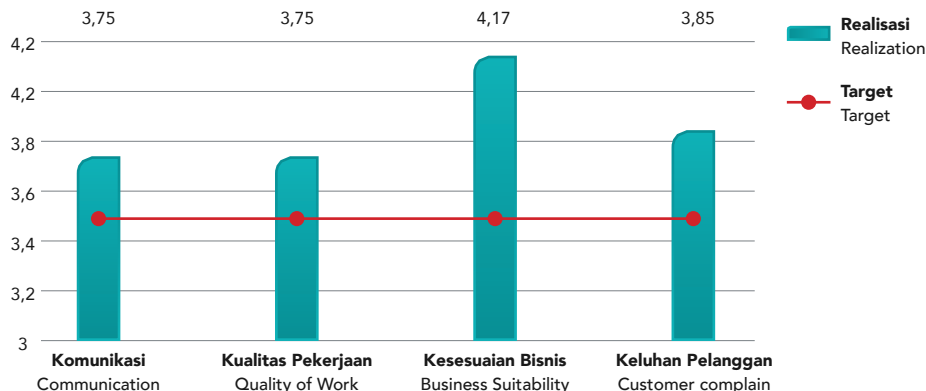
Pada bulan November 2021, Perusahaan telah melakukan survei kepuasan pengguna layanan TI *shared service* yang mencakup aspek: komunikasi, kualitas pekerjaan, kesesuaian bisnis, keluhan pelanggan.

Angka hasil survei kepada pihak eksternal tersebut rata-rata melebihi dari ditargetkan pada rencana kerja 2021. Rincian hasil survei tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Customer Satisfaction Survey

In November 2021, the Company conducted a satisfaction survey of its IT shared services users on the following aspects: communication, quality of work, business suitability, and customer complaints.

The average number of external parties' survey results exceeded the 2021 work plan target. Details of the survey results can be seen in the diagram below:



Pada bulan yang sama, Perusahaan juga melakukan survei kepuasan pengguna layanan TI internal yang mencakup aspek: waktu pelayanan, respons staf, kualitas layanan dan layanan komplain.

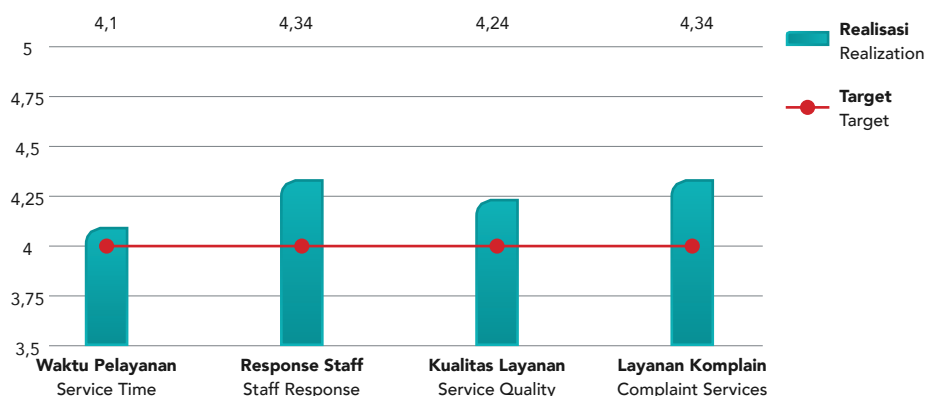
Angka penilaian mulai dari Sangat Buruk (1) sampai dengan Sangat Baik (5). Angka hasil survei tersebut rata-rata melebihi dari ditargetkan pada rencana kerja 2021.

Rincian hasil survei tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

In the same month, the Company also conducted an internal IT service user satisfaction survey on these different aspects: service time, staff response, service quality, and complaint service.

Ratings range from Very Poor (1) to Very Good (5). The average number of survey results exceeded the target in the 2021 work plan.

Details of the survey results can be seen in the diagram below:



Kegiatan TI untuk Mendukung Kegiatan Bisnis Perusahaan

Terkait dukungan TI terhadap kegiatan bisnis, Grup TI telah terlibat aktif dalam beberapa kegiatan, yaitu:

A. Core System

Pengembangan *Core System* yang dimulai pada akhir tahun 2018, telah berhasil diimplementasikan dan *live* digunakan pertama kali pada bulan Juni 2019. Implementasi *Core System* dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan tugas di Grup Operasi Bisnis, yang meliputi proses pencatatan debitur, perhitungan angka kewajiban, *monitoring* pembayaran dan *billing*.

Pada tahun 2021 Grup TI melanjutkan pengembangan Sistem Administrasi Investasi dan Sistem Informasi Dokumen Perjanjian yang terintegrasi dengan *Core System*. Kedua sistem tersebut memberikan informasi yang komprehensif bagi para pihak yang menggunakan *Core System*, baik yang menggunakan *laptop* maupun yang menggunakan *mobile device* melalui PPA Mobile.

B. Mobile Office

Implementasi *mobile office* di PPA dengan penerapan *Office 365*, peremajaan perangkat WiFi Ubiquity seri *UniFi* dengan tujuan antara lain untuk menghilangkan *blankspot* *Wifi* di kantor PPA serta *data center collocation*.

C. PPA Mobile

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis. Banyak perusahaan telah memulai perjalanan transformasi digital dengan mencoba cara digital baru dalam berbisnis. Dengan begitu, data dimanfaatkan secara lebih cerdas untuk menghadirkan tingkat efisiensi, kelincahan (*agility*) dan produktivitas yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Teknologi, mulai dari ponsel hingga *cloud*, kini telah menjadi bagian integral dari setiap bisnis di semua jenis industri. Perusahaan yang gagal menentukan strategi digital yang efisien dan memaksimalkan dampak digitalisasi, berisiko tertinggal oleh perusahaan pesaingnya.

IT Activities to Support Business Units

In supporting business unit activities, IT Group is actively involved in several activities, namely:

A. Core System

Core System Development, which began at the end of 2018, has been successfully implemented and went live for the first time in June 2019. Core System implementation is carried out to facilitate the implementation of functions and tasks in the Business Operations, including the debtor recording process, calculation of liability figures, payment monitoring, and billing.

In 2021 the IT Group continued to develop the Investment Administration System and Agreement Document Information System, which was integrated with the Core System. Both systems will provide comprehensive information for parties using the Core System, both laptops and mobile devices, through PPA Mobile.

B. Mobile Office

The implementation of mobile office at PPA with the application of Office 365, the rejuvenation of UniFi series Ubiquity wifi devices with the aim, among other things, to eliminate wifi blank spots in the office and data center collocation.

C. PPA Mobile

Industrial revolution 4.0 is characterized by a blend of technologies that blur the boundaries between the physical, digital, and biological worlds. As a result, many companies have embarked on a journey of digital transformation to try new digital ways of doing business. This means that data is used more intelligently to bring about efficiency, agility, and productivity that have never been achieved before.

From mobile to cloud, technology has become an integral part of every business in all types of industries. Companies that fail to determine an efficient digital strategy and maximize the impact of digitalization has the risk of being left behind by other companies/competitors.

Guna mencapai keberhasilan dalam melakukan transformasi digital dan peningkatan kinerja organisasi maka telah berhasil diimplementasikan PPA Mobile yang berbasis *Android* dan *iOS*. PPA Mobile memiliki kekuatan sebagai berikut:

1. Performa lebih cepat dibandingkan *web base application*.
2. *User interface* yang nyaman dan mudah.
3. Kualitas keamanan yang handal.
4. Pengguna memiliki akses penuh ke perangkat *mobile*, seperti kamera, *gesture*, *notification*, *speaker*, dan fitur lainnya.
5. Kemudahan mengakses informasi kapanpun dan di manapun.
6. Kemudahan untuk menambah modul baru.

Adapun PPA Mobile bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja organisasi sebagai bagian dari penguatan sistem Manajemen Bisnis PT PPA yang bertujuan untuk menyiapkan sistem Teknologi Informasi serta perangkat pendukungnya yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan hubungan kerja PT PPA dengan para *stakeholders* maupun pengguna jasa.
2. Membangun kesadaran merek dan pengakuan, dengan membangun sebuah *Mobile Application Platform* untuk PT PPA yang diharapkan akan dapat memberikan kontribusi untuk kesadaran merek dan dalam rangka pembangunan pengakuan. Kesadaran merek akan terbangun dari kualitas produk bisnis perusahaan yang tentunya dapat diinformasikan melalui *Mobile Application Platform* baik secara verbal ataupun visual, dan selanjutnya pengakuan mulai terbentuk seiring dengan banyaknya user yang men-download dan menggunakan PPA Mobile.
3. Membangun suatu platform bagi aplikasi-aplikasi PPA baik yang saat ini sudah berjalan dan yang dalam proses pengembangan. Aplikasi yang sudah berjalan antara lain adalah Layanan *Helpdesk*, *Carpool*, *Helper*, *Paperless* (Disposisi Surat), *Meeting Room*, dan HRIS.

Pada tahun 2021, pengembangan PPA Mobile yang telah dilaksanakan yaitu modul *Dashboard* Kinerja Keuangan yang digunakan bagi manajemen untuk memantau kinerja organisasi secara keseluruhan.

D. Dashboard Kinerja Keuangan

Dashboard kinerja keuangan bertujuan untuk mempermudah manajemen memantau kinerja organisasi secara keseluruhan di mana pun dan kapan pun, sehingga mempercepat dalam pengambilan keputusan, yang meliputi:

1. *Cash Management*
2. KPI Kinerja Kunci
3. KPI Tingkat Kesehatan
4. Laba Rugi Konsolidasi
5. Pendapatan dan Beban

E. Server Colocation

Pada tahun 2021 dilakukan *monitoring* dan *maintenance* pada server yang telah dibangun sebelumnya yang berlokasi di Jakarta Selatan. *Monitoring* dan *maintenance* tersebut bertujuan agar user dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan *agile*.

To achieve success in digital transformation and improve organizational performance, the Company has successfully implemented PPA Mobile for *Android* and *iOS* users. PPA Mobile has the following strengths:

1. Faster performance than *web base application*.
2. Comfortable and easy *user interface*.
3. Reliable safety quality.
4. Users have full access to *mobile devices*, such as cameras, gestures, notifications, speakers, and other features.
5. Ease of accessing information anytime, anywhere.
6. Ease of adding new modules.

The purposes of PPA Mobile are to:

1. Improve organizational performance as part of PT PPA's Business Management system strengthening which aims to prepare an Information Technology system and its supporting devices that suit the needs, conditions, and working relationships of PT PPA with its stakeholders and service users.
2. Build brand awareness and recognition, by building a *Mobile Application Platform* for PT PPA which is expected to be able to contribute to brand awareness and building recognition. Brand awareness will be built from the quality of the Company's business products, which of course can be informed via the *Mobile Application Platform* both verbally or visually. Then the recognition will begin to be created along with the number of users who download and use PPA Mobile.
3. Establish a platform for both existing and ongoing PPA applications that are in the process of development. Applications that are already running which include the *Helpdesk Service*, *Carpool*, *Helper*, *Paperless* (Letter Disposition), *Meeting Room*, HRIS.

A developed PPA Mobile feature was Financial Performance *Dashboard* module used for management to monitor the overall performance of the organization.

D. Financial Performance Dashboard

Dashboard for monitoring financial performance that aims to make it easier for the management to see wherever and whenever, so as to accelerate the decision making which includes:

1. Cash management
2. KPI of Key Performance
3. KPI of Soundness Index
4. Consolidated Profit and Loss
5. Revenues and Expenses

E. Server Colocation

In 2021, monitoring and maintenance were carried out on the previously built server located in South Jakarta. Monitoring and maintenance is intended to allow users to do their jobs well and *agilely*.

F. Kegiatan Rutin dan Insidentil

Kegiatan rutin yang dilakukan Grup TI pada tahun 2021 di antaranya menindaklanjuti permasalahan dan keluhan karyawan dalam penggunaan TI, operasional data center dan *disaster recovery center*. Selain itu, Grup TI juga melaksanakan *rehearsal disaster recovery center*, pemantauan kualitas jaringan data dan telepon, pengisian portal BUMN, penyediaan sarana dan prasarana kerja karyawan baru, koordinasi kegiatan *scanning*, mengelola *website* perusahaan (www.ptppa.com) dan pemeliharaan intranet perusahaan (PPAWorld).

Sedangkan terkait dengan kegiatan insidentil yang direalisasikan pada tahun 2021, yaitu:

1. Persiapan perpindahan kantor PPA
2. Terlibat menjadi salah satu pengurus dalam Forum Teknologi Informasi BUMN.
3. Terlibat dalam PMO Support Danareksa PPA dalam mempersiapkan holding Danareksa PPA.
4. Pengembangan *Smart Meeting Room* untuk ruang pertemuan dengan menggunakan teknologi dan *gadget* terkini, sehingga rapat dapat berjalan lancar, terutama untuk melakukan *video conference*.
5. Berkoordinasi dalam proses *assessment* INDI 4.0 yang mulai dilakukan pada bulan November 2021.

F. Routine and Incidental Activities

The IT Group routines in 2021 included following up on employee problems and complaints with regards to IT use, data center operations, and disaster recovery centers. In addition, the IT Group also made a rehearsal disaster recovery center, monitored the quality of data and telephone networks, filled out SOE portals, provided a new employee with work facilities and infrastructure, coordinated scanning activities, managed the company website (www.ptppa.com) and maintained the company intranet (PPAWorld).

There were also some related to incidental activities realized in 2021, such as:

1. Preparation for relocating the PPA office
2. Participation as one of the administrators in the SOE Information Technology Forum.
3. Participation in PMO Support for Danareksa PPA in preparing the holding for Danareksa PPA.
4. Development of Smart Meeting Room for using the latest technology and gadgets allowing smooth operations of the meeting room, especially for video conferencing.
5. Coordinated in the INDI 4.0 assessment process which began in November 2021.

Kode Etik

CODE OF ETHICS

Perusahaan telah memiliki Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etika yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan. Pedoman ini diterapkan sebagai etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan maupun kehidupan sehari-hari.

Pedoman Etika dan Perilaku juga mengatur tentang tata cara berperilaku Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan terhadap pemangku kepentingan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika. Sebagai upaya menegakkan Pedoman Etika dan Perilaku, Perusahaan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bisnis.

Visi, Misi, dan Nilai

Penetapan Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Pedoman tersebut diperkenalkan kepada seluruh tingkatan di dalam Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai.

The Company has a Code of Conduct that regulates policies of ethical values stated explicitly as a standard of behavior that must be obeyed by all Company's employees both in business ethics and work ethics, both in carrying out the Company's operational activities and everyday life.

Code of Conduct also regulates the rule of conduct for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of the Company to the Stakeholders based on the sound and corporate ethical principles. As an initiative to enforce the ethical business codes, the Company complies with laws and regulations related to business.

Vision, Mission, and Values

The Company has established the code of conduct in accordance with the Company's vision and mission, which serves as guidance of behavior for all employees in interacting with internal and external parties. The Company's code of conduct is introduced to all levels in the Company and written in the employee recruitment contract that all employees must understand and sign.

Seluruh pegawai diharapkan berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari. Perusahaan secara berkala mengadakan acara untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para pegawai.

Visi

Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi.

Misi

- Memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan *advisory*;
- Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan memiliki integritas tinggi;
- Menerapkan manajemen yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi;
- Memberikan kontribusi kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.

Budaya dan Nilai Perusahaan

AKHLAK

- **AMANAH**
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- **KOMPETEN**
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- **HARMONIS**
Saling peduli dan menghargai perbedaan
- **LOYAL**
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- **ADAPTIF**
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- **KOLABORATIF**
Membangun kerja sama yang sinergis

Penetapan Kode Etik Perusahaan

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 24 Agustus 2021. Kode etik tersebut menjadi pedoman dan panduan bagi:

1. Insan Perusahaan;
2. Pihak Eksternal yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan;
3. Perusahaan dan seluruh entitas Anak Perusahaan;
4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Komitmen Code of Conduct dan Pemberlakuan Kode Etik kepada Seluruh Level Organisasi

Perusahaan menjadikan etika berperilaku dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan sebagai komitmen dan perhatian utama. Bagi Perusahaan, hal itu akan menciptakan nilai tambah (*value creation*) bagi Perusahaan serta para pemangku kepentingan. Penyusunan Pedoman

All employees are expected to behave according to the Company's values and implement the code of conduct in their daily activities. The Company regularly holds events to remind and emphasize the application of the code of conduct for employees.

Vision

To be a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring

Mission

- Provide the sustainable growth for all stakeholders through investment, restructuring, asset management and advisory activities.
- Develop excellent, professional, and high-integrity human capital.
- Implement a transparent management according to good corporate governance principles, risk management, and compliance in an integrated manner.
- Contribute to environment and community development.

Company Culture and Values

AKHLAK

- **TRUSTWORTHY**
Upholding the trust given
- **COMPETENT**
Continuously learning and developing capabilities
- **HARMONIOUS**
Caring of each other and respecting diversity
- **LOYAL**
Being dedicated and prioritizing the interest of the Nation and the country
- **ADAPTIVE**
Continuously innovating and being eager to drive or overcome change
- **COLLABORATIVE**
Building synergistic collaboration

Code of Conduct Establishment

The Company's Code of Conduct (CoC) was signed by Board of Directors and Board of Commissioners on August 24, 2021. The Company's Code of Conduct becomes guideline and reference for:

1. Company's People
2. External Party who acts on behalf of the Company
3. Company and all Subsidiaries
4. Working Partners who Cooperates with the Company

Code Of Conduct Commitment and Enforcement of Code of Conduct to All Organizational Levels

The commitment to behaving and interacting with the stakeholders becomes the primary concern of the Company and part of the Company's business and work ethics in the value creation, not only for the Company but also for the stakeholders. Therefore, the Company formulates and

Etika dan Perilaku sesuai dengan standar yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk kriteria kepuasannya.

Perusahaan menerapkan pedoman tersebut secara konsisten dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan yang menjunjung tinggi moral dan integritas dalam menjalankan roda bisnis Perusahaan. Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan di setiap jenjang organisasi, mulai dari pegawai, Direksi hingga Dewan Komisaris. Seluruhnya diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan.

Pokok-Pokok Isi dan Keberlakuan *Code of Conduct* atau Kode Etik

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan memuat sejumlah hal yang mencakup:

Bab I: Pendahuluan

1. Latar belakang;
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*;
3. Landasan Penyusunan *Code of Conduct*;
4. Visi dan Misi Perusahaan
5. Definisi dan Istilah.

Bab II: Etika Usaha

1. Etika Perusahaan dengan Karyawan;
2. Etika Perusahaan dengan Pemerintah;
3. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham;
4. Etika Perusahaan dengan Pelanggan;
5. Etika Perusahaan dengan Mitra Usaha;
6. Etika Perusahaan dengan Pesaing;
7. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investor;
8. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa;
9. Etika Perusahaan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar;
10. Etika Perusahaan dengan Media Massa;
11. Etika Perusahaan dengan Anak Perusahaan

Bab III: Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perusahaan

1. Komitmen Insan Perusahaan.
2. Etika Kerja Insan Perusahaan.
 - a. Etika Kerja Sesama Insan Perusahaan;
 - b. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan.
3. Tata Perilaku Insan Perusahaan.
 - a. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya;
 - b. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan;
 - c. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi;
 - d. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan;
 - e. Kesempatan yang Sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;

develops a Code of Conduct with the highest standard and concerns the stakeholders' interests, including their satisfaction criteria.

Code of Conduct implementation in the Company continuously and sustainably in the form of attitude, conducts, commitment and provision support the establishment of corporate culture that upholds moral and integrity in running the Company's business. The Company's Code of Conduct applies to all Company personnel at every level of the Company's organization, starting from employees, Board of Directors, and Board of Commissioners of the Company, who are required to sign a statement of commitment to comply with the Company's Code of Conduct.

Code of Conduct Contents and Implementation

The Company's Code of Conduct contains the followings:

Chapter I Introduction

1. Background.
2. Purpose, Objectives, and Benefit of Code of Conduct.
3. Code of Conduct Preparation Framework.
4. Vision and Mission of the Company.
5. Definition and Glossary.

Chapter II Business Ethics

1. Ethics Between the Company and Employees.
2. Ethics Between the Company and Government.
3. Ethics Between the Company and Shareholders.
4. Ethics Between the Company and Customers.
5. Ethics Between the Company and Business Partners.
6. Ethics Between the Company and Competitors.
7. Ethics Between the Company and Creditors/Investors.
8. Ethics Between the Company and Goods/Services Suppliers.
9. Ethics Between the Company and Society and Surrounding Environment.
10. Ethics Between the Company and Mass Media.
11. Ethics Between the Company and Subsidiaries.

Chapter III Commitment, Work Ethics and Code of Conduct for Company's People

1. The Commitment of Company's People.
2. Work Ethics of Company's People.
 - a. Work Ethics Among Company's People.
 - b. Work Ethics of Management and Employees.
3. Code of Conducts for Company's People.
 - a. Compliance with Law, Regulation and other provisions.
 - b. Conflict of Interest and Abuse of Position.
 - c. Gift/Souvenir, Reception, Entertainment, and Donation Giving and Acceptance.
 - d. Occupational Health, Safety, and Environment Conservation.
 - e. Fair Career and Promotion Opportunity

- f. Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*;
- g. Perlindungan Harta Perusahaan;
- h. Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan;
- i. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok;
- j. Aktivitas Politik

- f. Protection on Corporate Information and Intangible Asset.
- g. Protection on Corporate Assets.
- h. Corporate Data Administration and Report Preparation.
- i. Dishonor Attitude, Narcotics, Illegal Drugs and Smoking.
- j. Social and Political Activities.

Bab IV: Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku

1. Komitmen Penegakan *Code of Conduct*;
2. Sosialisasi dan Internalisasi;
3. Pelanggaran;
4. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran;
5. Sanksi atas Pelanggaran.

Chapter IV Code of Conduct Enforcement

1. Code of Conduct Enforcement Commitment.
2. Socialization and Internalization.
3. Violation.
4. Violation Reporting Mechanism.
5. Violation Punishment

Bab V: Penutup

Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

Chapter V Closing

Appendix of Code of Conduct

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku

Pedoman Etika dan Perilaku disosialisasikan kepada semua Insan Perusahaan melalui berbagai media yang dimiliki Perusahaan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses setiap saat. Media sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku antara lain melalui:

1. *Website*;
2. Peraturan Perusahaan;
3. Surat Elektronik;
4. Pernyataan Komitmen yang ditandatangani bersama;
5. Iklan di Koran;
6. Sosial Media.

Code of Conduct Socialization and Enforcement

The Code of Conduct is disclosed and/or disseminated to all Company's People through various media of the Company, including the information technology that is accessible by the Company's people anytime. Code of Conduct socialization media is as follows:

1. Website
2. Corporate Regulation
3. Electronic Mail
4. Signed Commitment Declaration
5. Advertising at Newspaper
6. Social Media

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tentang sanksi terhadap pelanggaran terkait kode etik, mencakup:

1. Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
2. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi;
3. Dewan komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Sanksi bagi mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Sanction to Code of Conduct Violation

Provisions on sanctions for violations related to the code of ethics include:

1. Each employee of the Company proven to violate the Code of Conduct will be imposed with sanctions that are in line with the prevailing rules and regulations in the Company.
2. Sanctions for the employees conducting the violation are determined by the Board of Directors.
3. Board of Commissioners and/or Board of Directors determine whether to impose the disciplinary sanction, training, and/or other action as well as the prevention measures to be implemented.
4. Sanctions for members of Board of Directors and Board of Commissioners conducting the violation are determined by the Shareholders.
5. If other stakeholders conduct the violation, sanctions will be imposed according to the provisions stipulated in the contract. If the violation is related to criminal act, the matter shall be handed over to the authorized parties.

Penegakan Kode Etik dan Sanksi

Perusahaan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Enforcement of the Code of Ethics and Sanctions

The company imposes provides sanctions on violations of the code of ethics according to the level of violation.

Tingkat Pelanggaran Type of Violation	Jenis Sanksi Type of Sanction
Hukuman Disiplin Ringan Light Discipline Punishment	Surat Peringatan Pertama First Warning Letter
Hukuman Disiplin Sedang Medium Discipline Punishment	Surat Peringatan Kedua Second Warning Letter
	Surat Peringatan Ketiga Third Warning Letter
Hukuman Disiplin Berat Heavy Discipline Punishment	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Termination of Employment

Laporan dan Penindakan Tahun 2021

Report and Action in 2021

Sanksi Sanction	2021	2020
Hukuman Disiplin Ringan Light Discipline Punishment	-	-
Hukuman Disiplin Sedang Medium Discipline Punishment	-	-
Hukuman Disiplin Berat Heavy Discipline Punishment	-	-
Jumlah Total	-	-

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik

Perusahaan telah melakukan survei pemahaman atas kode etik sebagai evaluasi terhadap efektivitas pemahaman dan pelaksanaannya yang dilakukan pada tahun 2021, sekaligus sebagai tindak lanjut atas hasil asesmen penerapan GCG tahun 2020.

The Evaluation on CoC Implementation Effectiveness

The Company has conducted a survey on the effectiveness of Code of Conduct understanding as an evaluation on effectiveness of CoC understanding and implementation that had been done in 2021 as well as follow-up on GCG assessment results in 2020.

Pengendalian Gratifikasi

GRATIFICATION CONTROL

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengendalian gratifikasi yang disahkan melalui Surat Keterangan No. SK- 13/KEP/KOM/PPA/VII/2020 dan SK-58/PPA/0720 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di PPA.

In running the business, the Company has a commitment to avoid conflicts of interest, to keep maintain business relation with the stakeholders. This effort is realized through Gratification Control Policy that has been ratified through Certificate No. SK-13/KEP/KOM/PPA/VII/2020 and SK-58/PPA/0720 regarding the Gratification Control Policy in PPA.

Latar Belakang

Kegiatan bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak, baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip GCG.

Background

In running the business, the Company cannot separate itself from the relationship and interaction with other parties, both internal and external, with whom it establishes harmonious, aligned and sustainable cooperation with due regards on the ethics and principles of GCG.

Dalam interaksi itu, potensi terjadinya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lain sangat besar. Untuk menjaga hubungan bisnis yang berintegritas dengan para pemangku kepentingan, Perusahaan merasa perlu mengatur hal-hal terkait gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan menyadari pentingnya penerapan sikap tegas terhadap pengendalian gratifikasi yang melibatkan Insan Perusahaan, karena gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, Perusahaan telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Kebijakan ini disusun untuk mengatur penanganan gratifikasi antara Insan Perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan. Penanganan gratifikasi menjadi sangat penting, karena dapat menjadi tindak pidana suap yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan.

This interaction gives a very large room for gratification from one way or the other. In order to maintain business relationships with integrity with its stakeholders, the Company feels the need to regulate gratification matters and set up the procedures or reporting mechanisms within the Company.

The Company is fully aware of the importance of implementing a strict attitude towards Gratification control that is involving Company's People in the activities of the Company, because Gratification under certain conditions can violate the Corruption Eradication Act. To deal with this, a Gratification Control Guideline was prepared which refers to the applicable laws and regulations and is in line with the Code of Corporate Governance and the Code of Conduct as well as the values that apply in the Company.

This guideline was set up to regulate Gratification in handling the Company's People and parties related to the Company's business activities. In handling the Gratification, it is very important for the Company because the Gratification can be a crime of bribery if not reported in accordance with the applicable laws and regulations. This can have a legal impact as well as negative image for the Company.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 4756);
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297);
2. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);
3. Law No. 30 of 2002 regarding the Corruption Eradication Commission.
4. Law No. 31 of 1999 regarding The Eradication of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 140 of 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874), as amended by Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150).
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.1341/01-13/0312017 tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.
6. The Decree of Secretary of Minister of SOE Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding The Indicators/Parameters of Evaluation and Assessment of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.
7. Corruption Eradication Commission Letter No. B.143/01-13/01/2013 dated January 21, 2013 regarding The Appeal Regarding Gratification, addressed among them to the Board of Directors of SOEs.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan;
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Perusahaan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik;
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Perusahaan mewajibkan semua Insan Perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Insan Perusahaan dilarang baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:
 - a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
 - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/karyawan.
 - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
2. Apabila Insan Perusahaan ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang diperkenankan dalam kebijakan ini sesuai dengan ketentuan pada Bagian 3.3.3 di bawah ini, wajib melakukan penolakan secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya kebijakan ini di Perusahaan.
3. Dalam hal Insan Perusahaan tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi karena kondisi tertentu seperti:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi; dan
 - d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, misalnya dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain maka untuk menghindari ancaman pidana, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan

Purpose, Objectives and Benefits

1. As a Guideline for Company's People to understand, prevent, and overcome Gratification in the Company.
2. As a Guideline for Company's People to take a firm attitude towards Gratification in the Company to realize good corporate management.
3. Realizing the management of a company that is free from all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN).

Basic Principles of Gratification

1. The Company requires all Company's People to comply with the prevailing laws and regulations, including the provisions regarding acceptance of Gratification. Therefore, all Company's People are prohibited, either directly or indirectly receiving Gratification from any party to:
 - a. Influencing policies/decisions/treatment of stakeholders;
 - b. Influencing services related to their duties, authorities and responsibilities;
 - c. Affects the process of recruitment/promotion/mutation of executives/employees.
 - d. Obtain information, or something that is not justified by the prevailing laws and regulations, or to influence the intended party to do and/or not do something related to his/her position.
2. If the Company's personnel are offered to receive Gratification, except as permitted in this policy in accordance with the provisions in Section 3.3.3 below, they must politely refused by providing an explanation regarding the application of this policy in the Company.
3. In the event that the Company's personnel cannot refuse the gratuity due to certain conditions, such as:
 - a. Gratification is not received directly;
 - b. Gratuity giver is the unknown;
 - c. Recipient doubts about Gratification qualification; and
 - d. There are certain conditions that are impossible to refuse, for example, can cause damage to the good relationship of the institution, self-harm/career of the recipient/another threat, so as to avoid criminal threats, the person concerned must immediately report to the KPK no later than 30 (thirty) days from the date of gratuity receipt, or through the

gratifikasi tersebut, atau melalui Tim Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK.

4. Terhadap barang Gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola oleh Perusahaan, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan sebagai barang *display* Perusahaan;
 - b. Digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan;
 - c. Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan; atau
 - d. Diserahkan kepada karyawan yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

Kategori Gratifikasi

Gratifikasi dikategorikan menjadi:

1. Gratifikasi terkait jabatan;
2. Gratifikasi dalam kedinasan;
3. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan

Pemantauan Gratifikasi

Divisi Satuan Pengawasan Intern melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala setiap tahunnya kepada Direktur Utama.

Mekanisme Pelaporan

Tata cara atau mekanisme pelaporan gratifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Kebijakan ini;
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Insan Perusahaan melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh alasannya minimal setingkat Kepala Grup selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan *form* penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ini;
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Kebijakan ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut;
4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah kadaluarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 kebijakan ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern;
5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ini;

Gratification Control Team no later than 7 (seven) working days which are then forwarded to the KPK.

4. For the Gratification items that are recommended to be managed by the Company, the following things can be done:
 - a. Placed as the Company's display items;
 - b. Used for of the Company's operational activities;
 - c. Distributed to party in need; or
 - d. Submitted to employees who receive gratuities to be used as performance support.

Gratification Category

Gratification are categorized into:

1. Gratification related to position;
2. Gratification in official service;
3. Gratification that does not need to be reported.

Gratification Monitoring

The Internal Audit Unit Division monitors the implementation of gratification control policy and provides periodic reports every year to the President Director.

Reporting Mechanism

The following describes the procedure or mechanism for reporting gratification:

1. If there is a receipt of Gratification that must be reported, the Company's Personnel shall report the matter and submit the money or goods received to the Gratification Control Team to be continued to the KPK if necessary according the stipulated in this Policy;
2. Gratification reporting receipt is carried out by the Company's personnel through the Gratification Control Team with known reasons at least at the level of Group Head no later than 5 (five) working days from the receipt date, by submitting the Gratification Acceptance Form according to the sample format as set out in the Attachment to this Gratification Control Policy;
3. For receipt of perishable/rotten or expired goods (for example: food and beverages), the receipts are submitted to the Gratification Control Team no later than 1 (one) working day after receipt by using Attachment 1 of this Policy. The Gratification Control Team will decide on the distribution of the Gratification receipt;
4. For the receipt of expired goods, the receipts are submitted to the Gratification Control Team no later than 1 (one) working day after the receipt by using Attachment 1 of this policy. The Gratification Control Team will destroy the Gratuity items witnessed by the Internal Audit Unit Division;
5. For receiving the Gratification in Official Service, the recipient reports to the Gratification Control Team according to the sample format as set out in Attachment 2 of this Gratification Control Policy;

6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK.

Laporan Gratifikasi dan Tindak Lanjut Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi yang melibatkan Insan Perusahaan.

6. Gratification reporting other than in the form of perishable/rotten or expired goods and Gratification in official service shall be carried out using the format issued by the KPK.

Gratification Report in 2020

Throughout 2021, there were no reports of gratification acceptance and giving the gratification that involve the Company's employee.

Kebijakan Anti Korupsi

ANTI-CORRUPTION POLICY

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.

Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi kepada Karyawan

Pada tanggal 5-7 Oktober 2021 beberapa karyawan Perusahaan mengikuti *E-learning* Antikorupsi WBS yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi – Komisi Pemberantasan Korupsi.

PEDOMAN PERUSAHAAN TERKAIT KETERLIBATAN DALAM AKTIVITAS POLITIK

Perusahaan memiliki kebijakan tidak akan ada kontribusi yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik Perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat politik mana pun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan independensi Perusahaan sebagai BUMN yang memiliki integritas dalam pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pelarangan pemberian dana juga berguna untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan yang ditetapkan.

Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees constantly uphold fair competition, the value of sportsmanship and professionalism, as well as GCG principles. The Company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions, behaviors or conducts that can lead to conflict of interest, corruption, collusion, and nepotism (KKN) and always prioritizing the interests of the Company above the interest of personal, family, or group.

The Company also pays attention to anti-corruption policies as written in Law No. 20 of 2001 regarding Amendment to Law No. 31 of 1999 regarding The Eradication of Corruption Crimes.

Anti-Corruption Training/Socialization to Employees

On 5-7 October 2021, some of the Company's employees participated in the WBS Anti-Corruption E-learning organized by the Directorate of Anti-Corruption Education and Training – the Corruption Eradication Commission.

CORPORATE GUIDELINES RELATED TO ENGAGEMENT IN POLITICAL ACTIVITIES

The Company has a policy that no contributions will be originated from the Company's funds, goods, and facilities which belong to belonging to the Company, to support any political party or candidate, except to the extent that is justified according to applicable laws and regulations.

This aims to create the Company's independence as an SOE that has the integrity in management in accordance with applicable regulations. Provisions on the prohibition of funding are also useful to avoid conflicts of interest in decision making and to realize the transparent and accountable budget management in accordance with the intended designation.

Kendati demikian, Perusahaan tidak melarang seluruh karyawan untuk terlibat dalam politik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, Perusahaan melarang karyawan yang terlibat dalam politik menggunakan atribut Perusahaan.

The Company does not prohibit all employees from engaging in politics. However, the Company prohibits employees that are involved in politics to use attributes of the Company.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

THE POLICY OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa bertujuan menciptakan kegiatan pengadaan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan akuntabel serta memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, Perusahaan telah menyusun Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Guideline Pengadaan Jasa Konsultan dan Guideline Pengadaan Barang dan Jasa Operasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012.

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, maka Perusahaan menerbitkan Keputusan Direksi No. SK-48/PPA/0620 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor SK-23/PPA/0420 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Tujuan penyusunan kebijakan adalah:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
2. Sebagai dasar penyusunan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih rinci dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disusun oleh satuan kerja yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

1. Prinsip, etika dan pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa;
2. Jenis pengadaan, pengguna, pelaksana pengadaan, tim evaluasi, serta penyedia barang/jasa;
3. Metode pengadaan barang/jasa, harga perkiraan sendiri, dan metode evaluasi penetapan pemenang;
4. Sanggahan dan pengadaan gagal;
5. Kontrak, serah terima dan pembayaran barang/jasa;
6. Administrasi dan pelaporan.

Policies for procurement of goods and services aim to create efficient, effective, open, competitive, transparent, and accountable procurement activities that meet the principles of good corporate governance. The Company has therefore formulated a Policy for the Procurement of Goods and Services, Guidelines for Procurement of Consultants and Guidelines for Procurement of Operational Goods and Services by referring to the SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2008 on General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises as amended through SOE Minister Regulation No. PER-15/MBU/2012.

To address the SOE Regulation No. PER-08/MBU/12/2019 on General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises, the Company has issued a Decree of the Board of Directors No. SK-48/PPA/0620 dated June 24, 2020 on the Amendment to the Decision of the Board of Directors No SK-23/PPA/0420 on the Policy on the Procurement of Goods and Services.

The objectives of this Policy formulation are:

1. As a guideline for all work units in carrying out the procurement of goods and services.
2. As a basis for preparing the provisions for procurement of goods and services in more detail in the form of Standard Operating Procedures (SOP) compiled by work units that handle the procurement of goods and services.

The scope of this Policy includes:

1. Principles, ethics, and integrity pact in the procurement of goods/services.
2. Types of procurement, users, executors of procurement, evaluation teams, and providers of goods/services.
3. Method of procurement of goods/services, self-estimated prices, and evaluation methods of determining the winner.
4. Disclaimer and failed procurement.
5. Contracts, handover, and payment of goods/services.
6. Administration and reporting.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak berlaku untuk pengadaan/penunjukan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perusahaan dikarenakan pengadaan/penunjukan Kantor Akuntan Publik yang dimaksud mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan.

This policy does not apply to the procurement/appointment of Public Accounting Firm service that will audit the PPA financial statements, bearing in mind that the procurement/appointment of Public Accounting Firm refers to PPA's Articles of Association.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai BUMN, Perusahaan wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengikat, termasuk kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan tersebut dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal.

LHKPN dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah memegang jabatan. Selain itu, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pasal 2 ayat (7) undang-undang tersebut beserta penjelasannya menguraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab.

The Basic Principles of State Official Wealth Report

As an SOE owned by the Government of Indonesia, the Company is required to comply with the binding legislations. One form of legislation that is based on the spirit of corruption eradication and internal irregularities is the obligation of State Official Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all assets or wealth of State Official as set forth in LHKPN form which stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decision No. KEP 07/KPK/02/2005 regarding the Procedure for Registration, Examination, and Announcement of State Officials Wealth Report. Law No. 30 of 2002 regarding the Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to execute measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN.

In addition, Law No. 28 of 1999 regarding The State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, giving the mandate that every state official shall report and announce their assets before and after taking office and willing to be examined before and after taking office. Law No. 28 of 1999 Article 2 (7) and its elucidation, describes that other officials with strategic functions in relation to the state administration including Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural executives at State-Owned Enterprises (SOE) and Regional-Owned Enterprises (ROE).

The examination of LHKPN submitted to KPK which aims to materializing the State Officials who adhere to the general principles of state administration free from corruption, collusion, and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Officials are required to report their wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled honestly, correctly, and completely, so that the Commission can analyze, evaluate, and assess all amount, types, and values of reported assets in a true, correct, prompt, accurate, and responsible manner.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Kebijakan LHKPN Perusahaan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, Perusahaan diwajibkan menyusun dan melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan memperkuat peranan LHKPN sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi. Untuk itu, PPA telah menyusun ketentuan terkait LHKPN melalui Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0719 tentang Penetapan Pejabat Wajib Laporkan, Koordinator Pengelolaan dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Tujuan penyusunan Kebijakan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi LHKPN secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat dengan jabatan Kepala Divisi/General Manager dan jabatan fungsional setingkat Kepala Divisi/*General Manager*, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi entitas anak. Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelola LHKPN adalah Kepala Divisi/General Manager *Human Capital*.

LHKPN wajib disampaikan kepada KPK pada saat pengangkatan pertama kali menjabat, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau berakhirnya masa jabatan atau pensiun. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Karyawan.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

LHKPN disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui *e-mail*

Legal and Regulatory Framework in Applying LHKPN in the Company

In applying LHKPN, the Company weights some legal and regulatory framework as the foundation:

1. Law No. 28 of 1999 regarding the State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 regarding the Corruption Eradication Commission.
3. The Minister of SOE Regulation No. PER-01/BUMN/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance on SOEs, and its amendment.
4. The Decree of the Secretary of Minister SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 regarding the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Proper GCG Implementation.

The Company's LHKPN Policy

In order to carry out its obligations and responsibilities to the state, PT PPA is required to compile and to report the assets to the Corruption Eradication Commission with the aim of strengthening the role of the State Official Wealth Report (LHKPN) as one of the instruments of corruption prevention. For this reason, PPA has compiled the provisions related to LHKPN through the Decree of Board of Directors Number SK-31/PPA/0719 regarding The Determination of Report Mandatory Officials, Coordinator of Management Administrator of State Official Wealth Report. The purpose of this Policy is as a guideline for all parties involved in the reporting of assets to LHKPN Corruption Eradication Commission in an effective, efficient, and accountable manner.

Officials who are required to submit LHKPN are Board of Commissioners, Board of Directors Members, Executives with the position of Head of Division/General Manager, and functional positions that are at the same level as Head of Division/General Manager, Board of Commissioners, and Board of Directors Members of subsidiaries. The official appointed as the LHKPN Management Coordinator is the Division Head/General Manager of Human Capital.

LHKPN must be submitted to KPK at the time of first appointment, re-appointment after the end of the tenure or retirement, or the end of tenure or retirement as an employee. Submission of LHKPN as referred to is submitted within a period of no later than 3 (three) months from the time of first appointment/re-appointment/end of tenure as an Employee.

LHKPN submission during an official's active term of office is done periodically every 1 (one) year on the Assets obtained from January 1 to December 31, and submitted to KPK no later than March 31 of the following year.

LHKPN is submitted via e-LHKPN application at www.elhkpn.kpk.go.id; or fill out the excel format LHKPN form to be sent via e-mail elhkpn@kpk.go.id or submitted to the

elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Directorate of LHKPN Registration and Examination (either directly at KPK office or by mail) in the form of an excel file that has been stored in the data storage media. LHKPN form can be downloaded through www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pengumuman LHKPN dilaksanakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK. Dalam hal Wajib LHKPN tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat diberikan sanksi administratif kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan sebagai berikut:

The LHKPN Announcement is carried out no later than 2 (two) months after LHKPN Mandatory Reporter submits LHKPN to KPK. In the case of LHKPN Mandatory Reporter does not submit LHKPN or not fulfill their obligations, administrative sanctions may be given to the LHKPN Mandatory Reporter concerned as follows:

Daftar Wajib LHKPN dan Sanksi Tidak Melaporkan

List of Mandatory LHKPN and Sanctions for Not Reporting

Jabatan Position	Sanksi Administratif Administrative Sanctions
Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Board of Commissioners and Members of the Board of Directors	Penundaan Pembayaran Tantiem/Insentif Kinerja Atau Penundaan Pembayaran Santunan Purna Jabatan Delay in Payment of the Performance Bonus/Incentives or the Postponement Payment of Retirement Benefits
Kepala Divisi/General Manager dan Jabatan Fungsional Setingkatnya Head of Division/General Manager and Functions of the Same Level	Penundaan Pembayaran Apresiasi/Insentif Kinerja Tahun Berjalan Dan Penundaan Promosi Pangkat/Golongan Delay in Payment of the Appreciation/Performance Incentive for Current Year and the Postponement of Grade/Group Promotion
Dewan Komisaris & Anggota Direksi Entitas Anak Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of Subsidiaries	- Penundaan Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja - Penundaan Pengangkatan Kembali Sebagai Dewan Komisaris/Anggota Direksi Kembali - Delay in payment of Tantiem/Performance Incentives - Delay in reappointment as a member of the Board of Commissioners/Member of the Board of Directors

Pengelola LHKPN

Pengelola dan administrator LHKPN di Lingkungan PT PPA ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0719 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lap, Koordinator Pengelolaan dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Adapun pengelola dan administrator LHKPN yang ditunjuk adalah Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

LHKPN Management at PT PPA

The managers and administrators of LHKPN in PT PPA are determined through the Board of Directors Decree No. SK-31/PPA/0719 regarding the Stipulation of Mandatory Officials, Management Coordinators, and Administrators of State Official Wealth Report. The LHKPN managers and administrators appointed are the Human Capital and General Affairs Division.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2021

Tabel Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2021:

The Transparency of Company's Official LHKPN in 2021

The tabel below is the LHPKN reporting up to the end of the 2021 period:

Pejabat Wajib LHKPN LHKPN Mandatory Officials	Jumlah Wajib Lap Number of Mandatory Reports	Telah Melaporkan Report Submitted	
		Jumlah Total	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	2	100%
Direksi Board of Directors	4	4	100%
Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries	14	14	100%
Kepala Divisi (BOD-1) Head of Division (BOD-1)	16	16	100%
Jumlah Total	36	36	100%

Whistle Blowing System

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing System (WBS) merupakan sarana pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Karena itu, WBS menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan penerapan WBS sebagai salah satu bagian yang menjadi acuan perilaku dan budaya kerja Perusahaan. Kebijakan WBS Perusahaan senantiasa dilakukan pemutakhiran untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

Dasar Kebijakan WBS

Pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi: SK-49/PPA/0620 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System-WBS*). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi WBS, Perusahaan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 74 Tahun 2021, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal PT PPA (Persero) terkait penanganan pengaduan;
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
3. Penanganan pengaduan melalui aplikasi;
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
5. Pertukaran data dan/atau informasi.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Tujuan

Penerapan WBS di lingkungan Perusahaan menjadi pedoman dalam menerapkan dan mengelola pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan, sehingga tercipta hal-hal sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dan terjadinya pelanggaran;
5. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

The Whistle-Blowing System (WBS) is a means of reporting alleged violations presumed to have been committed within the Company. Therefore, the WBS is a significant part of applying the principles of good corporate governance.

The Company has implemented the Whistle Blowing System (WBS) as part of the Company's conducts guideline and corporate culture. The Company's WBS policy is constantly updated to improve its implementation effectiveness.

Basis for WBS Policy

Guidelines for reporting violations and the way violations should be handled are set up in the Decision of the Board of Directors: SK-49/PPA/0620 dated June 30, 2020 on the Whistle Blowing System (WBS) Policy. To improve the effectiveness and efficiency of WBS, the Company works with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) through the Cooperation Agreement for Handling Complaints in Efforts to Eradicate Corruption Crimes No. 4 of 2021, with the following scope:

1. Formulation and/or strengthening of PT PPA (Persero) internal regulations on complaint handling;
2. Commitment to complaint handling;
3. Handling complaints through applications;
4. Coordination and joint activities in complaint handling; and
5. Exchange of data and/or information.

This Cooperation Agreement is valid for five years and can be extended upon agreement of both parties.

Objective

The objectives of WBS preparation are to be used as a guideline to determine and to manage the fraud indication report in the Company to encourage the following conditions:

1. Establishment of conducive climate and encouraging the report on issues with financial and non-financial loss potentials, including issues that may harm the Company's reputation.
2. Availability of the early warning system on any possibility of issue due to the particular violation or fraud.
3. Availability of the opportunity to handle the fraud indication through internal mechanism first before spreading into public fraud issue.
4. To reduce the cost in dealing with fraud impact and case.
5. To improve the corporate reputation.

Lingkup Pelaporan Pelanggaran

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Korupsi;
2. Kecurangan;
3. Gratifikasi;
4. Benturan kepentingan;
5. Pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan bisnis Perusahaan;
6. Pelanggaran peraturan/kebijakan/prosedur internal yang dapat merugikan Perusahaan;
7. Ketidapatutan dalam etika bisnis dan etika kerja yang berlaku secara umum.

Pengelola Pengaduan

Perusahaan telah menetapkan Fungsi Penerima Laporan yang berasal dari Divisi Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai pihak yang mengelola laporan pelanggaran di Perusahaan. Setelah menerima laporan, Fungsi tersebut melakukan analisis laporan untuk pengumpulan bukti dan informasi. Hasil analisis disampaikan kepada pihak atau fungsi yang berwenang sesuai peraturan Perusahaan untuk penetapan dan pemberian sanksi.

Berikut adalah Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Perusahaan:

- Ketua: Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern.
- Anggota: Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi SDM dan Umum, Kepala Divisi Manajemen Risiko, dan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG.
- Sekretaris: Personil dari Divisi SPI yang ditunjuk oleh Kepala Divisi SPI untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.

Cara dan Saluran Laporan Pelanggaran

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap pihak terkait dengan Perusahaan atau pihak ketiga di luar Perusahaan yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui:

E-mail : whistleblowing@ptppa.com, atau
Surat : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran,
Gedung Menara Mandiri II 7th – 9 Floor
Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 54-55, RT.5/RW.3,
Jakarta 12190
Website : www.ptppa.co.id

Dalam hal dugaan Pelanggaran dilakukan oleh personel Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, maka laporan dugaan Pelanggaran disampaikan kepada Direktur Utama melalui media sebagai berikut:

E-mail : dirut-whistleblowing@ptppa.com, atau
Surat : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
u.p Direktur Utama
Gedung Menara Mandiri II Lantai 7 – 9
Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 54-55, RT.5/RW.3,
Jakarta 12190

The Scope of Violation Report

Type of violation that is eligible to be reported is including:

1. Corruption;
2. Fraud;
3. Gratification;
4. Conflict of Interest;
5. Action against the law or other regulation that is relevant with the Company's business;
6. Violation against internal regulation/policy/procedure with loss potential to the Company;
7. Inappropriateness in generally applied business and work ethics.

Assigned Body for Complaint Management

The violation report management in the Company is the Report Receiver Function from Internal Audit Unit Division (SPI). The Report Receiver function carries out a report analysis to collect evidence and information. The analysis results are submitted to the authorized party or the function in accordance with Company regulations to determine and impose sanctions.

The following is the Company's Violation Report Management Team:

- Chairman: Head of Internal Audit Division.
- Members: Head of Legal Division, Head of Human Capital and General Affaris Division, Head of Risk Management Division, and Audit Committee and Risk Oversight and GCG Committee.
- Secretary: Personnel from SPI Division who are appointed by Head of SPI Division to carry out administrative tasks.

The Violation Reporting Channel

The parties who are eligible to submit reports are every party related to the Company or third parties outside the Company who recognize any loss or have the intention to report fraud indication. The violation indication report may be submitted by the whistleblower through:

E-mail : whistleblowing@ptppa.com, or
Letter : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
u.p. Whistleblowing System Management Team,
Menara Mandiri II Building 7th – 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 54-55, RT.5/RW.3,
Jakarta 12190
Website : www.ptppa.co.id

In case that the alleged violation is committed by the personnel of Whistle Blowing System Management Team, the report on the alleged violation is submitted to the President Director through the following media:

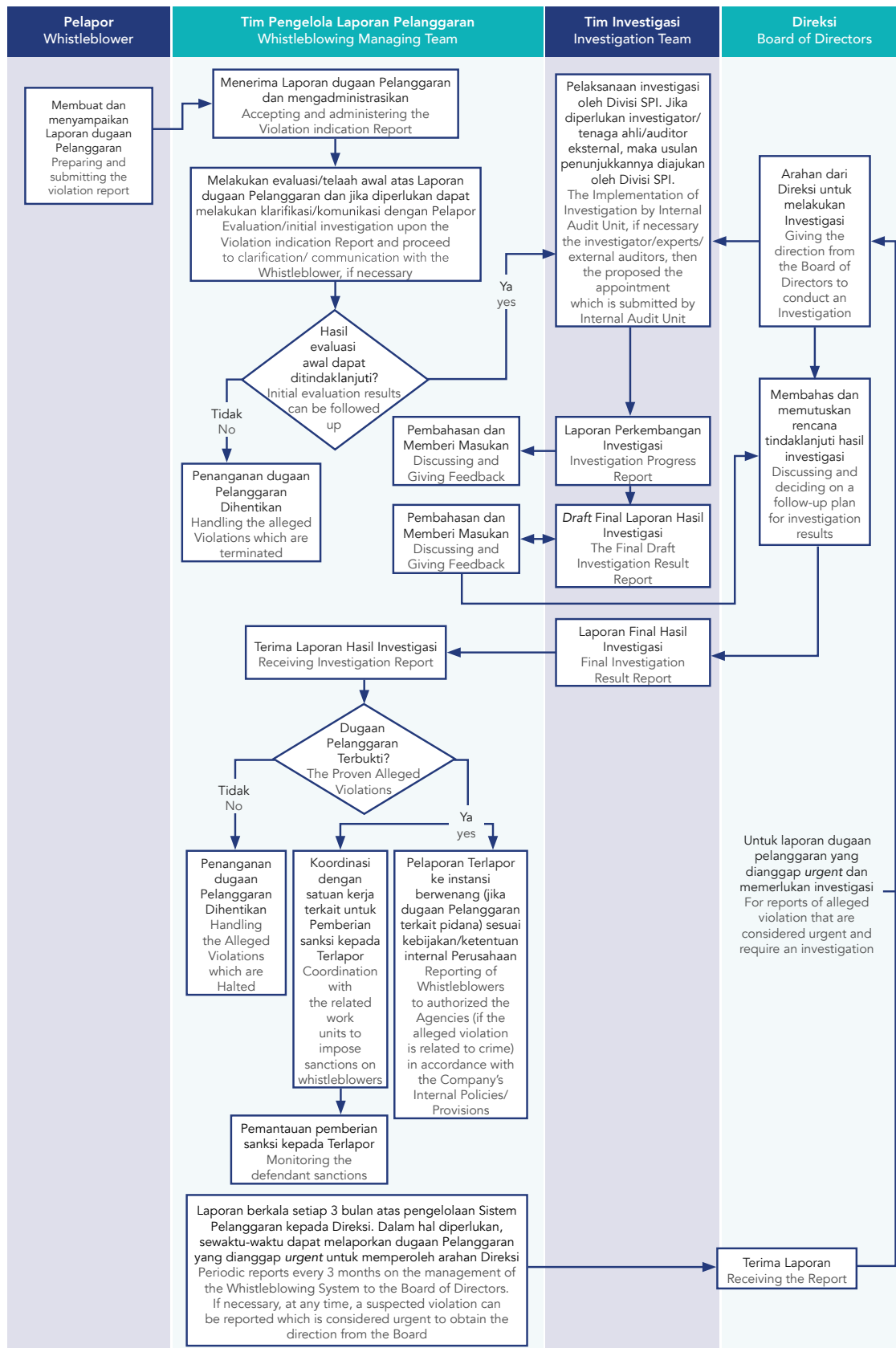
E-mail : dirut-whistleblowing@ptppa.com, or
Letter : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
u.p President Director
Menara Mandiri II Building 7th – 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 54-55, RT.5/RW.3,
Jakarta 12190

Mekanisme dan Alur Pelaporan Pelanggaran

Alur pelaporan melalui WBS adalah sebagai berikut:

Violation Reporting Flow and Mechanism

The reporting flow through the WBS is as follows:



Perlindungan bagi Pelapor

Terkait dengan laporan yang terbukti kebenarannya, Perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan terhadap identitas pelapor.
2. Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di Perusahaan sebagai akibat dari adanya laporan dugaan pelanggaran oleh Insan Perusahaan antara lain:
 - a. Pemecatan yang tidak adil;
 - b. Penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
 - d. Catatan yang merugikan dalam personal *file record*.
3. Jaminan bagi *stakeholders* bahwa Perusahaan tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berhubungan dengan Perusahaan.

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Terhadap seluruh laporan yang masuk ke dalam sistem WBS, proses penanganan yang dilaksanakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap laporan WBS yang masuk akan dicatat dan didaftarkan pada registrasi khusus yang dibuat oleh Tim WBS, kemudian dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan selanjutnya dibuat rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk melakukan pendalaman;
2. Jika laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat minimal pelaporan dalam sistem WBS Perusahaan, Tim WBS dapat menyatakan tidak akan melanjutkannya ke tahap investigasi, dan menutup masalah yang dilaporkan tersebut;
3. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan investigasi, maka Tim WBS menyampaikan perkembangannya kepada Direksi;
4. Setelah selesai investigasi, apabila terbukti maka Tim WBS akan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memberikan sanksi, jika terkait dengan adanya tindak pidana, maka tim WBS akan menyerahkan kepada instansi yang berwenang;
5. Hal-hal yang terkait dengan pelanggaran yang dianggap *urgent* maka akan dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2021, tidak ada pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan. Berikut laporan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Protection to Whistleblower

For any report that is proven to be correct, the Company will provide the protection to the whistleblower. The whistleblower protection includes:

1. Confidentiality guaranteed on the Whistleblower's identity.
2. The protection to any harm in the Company as the consequence of the violation indication report committed by the Company's People, such as:
 - a. Unfair termination.
 - b. Promotion delay or demotion.
 - c. Any means of abuse or discrimination.
 - d. Disadvantageous records in personal file record.
3. Guarantee to the stakeholders that the Company will keep granting equal rights and opportunity to engage with the Company.

If based on the investigation result the defendant is proven committing the violation, the punishment will be granted based on prevailing regulations.

Complaint Handling

The Company handles all complaints received by the WBS system through the following process:

1. Every WBS report will be recorded and registered in special registry prepared by the WBS Team, later on to be evaluated based on the collected evidence and further to prepare the recommendation whether it will be performed the further investigation.
2. If the violation indication report failed to fulfill minimum reporting requirements in the Company's WBS system, the WBS team will declare not to proceed to the investigation stage, and will close the reported issue.
3. If the violation indication report is followed-up with the investigation, then the WBS Team will submit the progress to the Board of Directors.
4. After the investigation is completed, if it is proven to be true the WBS Team will coordinate with the related work unit to grant the punishment, if it is related to criminal acts, the WBS Team will move forward to the authorized agencies.
5. Any issue related to urgent violation will be reported to the Board of Directors to obtain further direction.

The Number of Violation Report and it's Follow Up

Throughout 2021, there were no complaints received through Whistle Blowing System. The following reports compared to the following year.

No	Status	Jumlah Aduan dan Tindak Lanjut Tahun 2021 Number of Complaints and Follow-Up in 2021	Jumlah Aduan dan Tindak Lanjut Tahun 2020 Number of Complaints and Follow-Up in 2020
Proses Klarifikasi & Pemenuhan Persyaratan Clarification & Fulfillment of Requirements Process			
1	Proses klarifikasi Clarification process	-	-
2	Pemenuhan Persyaratan Clarification process		
	a. Memenuhi syarat (untuk diinvestigasi) Eligible (to be investigated)	-	2
	b. Tidak Memenuhi Syarat Not eligible	-	-
Jumlah Aduan Number of Complaints		-	2
Proses Investigasi & Putusan Investigation & Verdict Process			
1	Dalam proses Investigasi In the process of investigation	-	2
2	Telah menjadi putusan Has become a verdict		
	a. Memenuhi syarat (untuk diinvestigasi) Eligible (to be investigated)	-	-
	b. Tidak Memenuhi Syarat Not eligible	-	-

Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin efektivitas penerapan WBS, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencaangan sistem WBS dan memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Direksi melalui Divisi SPI atau menggunakan pihak luar yang independen. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem WBS maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi asesmen penerapan GCG. Hasil *monitoring* dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

Monitoring and Evaluation

To ensure the effectiveness of WBS implementation, monitoring and evaluation are needed to be done. These will be conducted to meet the objectives stipulated at the beginning of the WBS system initiation and to ensure that the achievement conforms with the Company's business demand and the prevailing Law.

Monitoring and evaluation can be done by the Board of Directors through Internal Audit Division or by hiring an external independent party. The monitoring and evaluation will be done to generate WBS system improvement recommendations or to oversee the recommendation from the GCG assessment. The result of monitoring and evaluation is disclosed in the form of a report to the Board of Directors.

Transparansi Praktik *Bad Governance*

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat laporan dari pihak lain atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

The Report on Company Activities Polluting the Environment

In 2021, there were no reports on the Company's activities that pollute the environment.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Selama tahun 2021 Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

THE DISCLOSURE ON FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

In 2021, the Company has fulfilled all tax obligations. The tax contributions from the Company are as follows:

(Rp Juta | Million)

Uraian Description	2021	2020
Perusahaan The Company		
Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax	28.223	23.759
Pajak Penghasilan Pasal 22 Income Tax Article 22	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 Income Tax Article 23	52.894	58.817
Pajak Penghasilan Pasal 25 Income Tax Article 25	-	-
Entitas Anak Subsidiary		
Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax	513.404	573.296
Pajak Penghasilan Pasal 22 Income Tax Article 22	1.636	3.957
Pajak Penghasilan Pasal 23 Income Tax Article 23	1.798	1.567
Pajak Penghasilan Pasal 25 Income Tax Article 25	714	2
Pajak Penghasilan Pasal 28a Income Tax Article 28a	-	-
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 Income Tax 4 Paragraph 2	994	993
Jumlah Total	599.663	662.391

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus terkait dengan Buruh dan Karyawan

Selama tahun 2021 tidak terdapat kasus terkait dengan buruh dan karyawan.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Laporan Keuangan PPA untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan Perusahaan dalam bentuk digital, baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs *web* resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

Unconformity of Presentation of Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (FAS)

The entire presentation of the information in this Annual Report, mainly related to the financial performance and other matters, refers to the Financial Statements for the years which ended on December 31, 2021, and December 31, 2020, which have been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia). The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented according to the Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), as well as the prevailing laws and regulations.

The Cases Related to Workers and Employees

Throughout 2021, there was no case found related to workers and employees.

The Disclosure of Operating Segment in Financial Statements

PPA's Financial Statements for the years ended on December 31, 2021, and December 31, 2020, have adopted SFAS 5 on the Operating Segments.

The Conformity of Annual Report Book and Digital Annual Report

The digital Annual Report of the Company submitted to shareholders, stakeholders, or the one uploaded on the Company's official website conforms with the Annual Report printed and published by the Company.

456	Strategi Keberlanjutan	Sustainability Strategy
461	Ikhtisar Keberlanjutan	Sustainability Overview
466	Profil Perusahaan	Company Profile
468	Tata Kelola Keberlanjutan	Sustainability Governance
475	Kinerja Keberlanjutan	Sustainability Performance

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

CORPORATE SOCIAL
AND ENVIRONMENT
RESPONSIBILITY

06





Strategi Keberlanjutan

SUSTAINABILITY STRATEGY

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Pelaksanaan kegiatan program keuangan berkelanjutan atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA", "Perusahaan"), antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK 51"). Penekanan pada regulasi tersebut adalah dukungan menyeluruh untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Tujuan penting dari POJK 51 tersebut sejalan dengan visi dan misi PPA dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Visi dimaksud adalah sebagai unit khusus yang mendukung Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

Dalam misinya, Perusahaan berusaha untuk berperan aktif dalam: Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri; Memberdayakan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat; dan Meningkatkan dan memberikan citra positif bagi Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perannya bersama Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The implementation of sustainable financial program activities or social and environmental responsibility (CSER) carried out by PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA"), among others, refers to Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies ("POJK 51"). These regulations aim to provide complete support for achieving long-term economic growth through the alignment of economic, social, and environmental objectives.

The important objectives of POJK 51 are in line with the vision and mission of PPA in carrying out social and environmental responsibility (CSER). The vision is intended as a special unit that supports the Company in improving the community's social welfare and creating sustainable independence.

The Company seeks to participate actively in the following areas as part of its mission: Improve the resilience and independence of small businesses; Empower, improve, and enhance the social condition of the community; and Improve and create a positive image for the Company as one of the state-owned enterprises working with the government to improve public welfare.

Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, PPA senantiasa melibatkan para pemangku kepentingan dalam setiap agenda dan program kegiatan TJSL. Perusahaan selalu menempatkan para pemangku kepentingan sebagai mitra strategis yang memiliki harapan serta kepentingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Dengan pelibatan tersebut, Perusahaan meyakini akan terciptanya harmonisasi yang dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha Perusahaan.

Kegiatan TJSL yang merupakan manifestasi dari kebijakan keuangan berkelanjutan dari regulator merupakan aktivitas yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam keputusan bisnis atau investasi. Kegiatan tersebut, antara lain untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs).

Untuk mencapai maksud tersebut, Perusahaan setiap tahun melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup kemasyarakatan, lingkungan hidup, konsumen, serta ketenagakerjaan. Selain itu, hal itu juga diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya terkait dengan prinsip pelaksanaan kegiatan usaha yang adil.

BERBAGI NILAI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Strategi penerapan TJSL Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Regulasi tersebut menjabarkan bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan. Termasuk dalam ketentuan tersebut adalah program pendanaan usaha mikro dan kecil (UMK). Program ini berupaya meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan ketentuan tersebut dan dukungan penuh terhadap upaya keberlanjutan, Perusahaan melaksanakannya secara terarah dan memberikan dampak terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau di Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

In order to achieve this goal and vision, the PPA always includes stakeholders in every agenda and program of CSER activities. Stakeholders are always seen as strategic partners by the Company, which has hopes and interests in the Company's actions. The Company believes that this involvement will create a harmonization that can positively impact the Company's business sustainability.

CSER activities that are manifestations of sustainable financial policies of regulators are activities that integrate environmental, social, and governance criteria into business or investment decisions. These activities, among others, support the United Nations in achieving its Sustainable Development Goals (SDGs).

To achieve this goal, the Company engages in corporate social responsibility activities that include society, the environment, consumers, and employment on a yearly basis. In addition, it is also realized through the implementation of good corporate governance, especially related to the principle of fair business activities.

VALUE DISTRIBUTION TO STAKEHOLDER

The strategy for implementing the Company's social and environmental responsibility also refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-05/MBU/04/2021 regarding State-Owned Enterprises' Social and Environmental Responsibility Program. According to the regulation, the Social and Environmental Responsibility CSER program is an activity that demonstrates the Company's commitment to sustainable development by providing benefits to the economy, society, environment, and law and governance that can be quantified and integrated into the Company's business approach. These provisions include the micro and small business funding program (MSEs). This program aims to make sure that micro and small enterprises' businesses can be resilient and independent.

As a demonstration of its commitment to implementing these provisions and full support for sustainability initiatives, the Company implements them in a directed manner and contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Pelaksanaan TJSL untuk mencapai TPB diharapkan memberikan kemanfaatan pada pilar-pilar pembangunan seperti:

1. Pilar Pembangunan Ekonomi;
2. Pilar Pembangunan Sosial;
3. Pilar Pembangunan Lingkungan; serta
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

PPA turut mendukung pencapaian TPB yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia yang antara lain bertujuan: mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Perusahaan menyusun prioritas TPB dengan menganalisis risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan atas kegiatan usaha, khususnya pada kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, manajemen aset BUMN, kegiatan pelestarian alam dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dengan pembinaan usaha mikro kecil agar dapat berkembang menjadi mandiri dan tangguh.

Sejalan dengan bisnis dan kegiatan sosial lingkungan yang dijalankan oleh PPA, prioritas TPB Perusahaan, namun tidak terbatas pada:

1. TPB 4: Pendidikan Berkualitas
2. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
3. TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim
4. TPB 16: Pedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
5. TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Penerapan Prinsip Keberlanjutan untuk Mengelola Risiko
Dalam menjalankan kegiatan usaha, PPA juga menerapkan prinsip keberlanjutan yang mengacu pada standar dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip dimaksud adalah:

CSER implementation to achieve SDGs is expected to benefit development pillars such as:

1. The Economic Development Pillars;
2. The Social Development Pillars;
3. The Environmental Development Pillars; and
4. The Legal Development and Governance Pillars.

The PPA also supports the achievement of the SDGs, which is a global action plan agreed upon by world leaders, including Indonesia, that aims, among other things, to end poverty, reduce inequality, and protect the environment.

The Company establishes SDGs priorities by analyzing the risks and implications associated with business activities, particularly those associated with SOEs restructuring or revitalizing, SOEs asset management, nature, and environmental conservation efforts, and community empowerment. Likewise, with the development of micro and small enterprise businesses, they can be independent and resilient.

In line with PPA's business and social and environmental activities, the Company's SDGs priorities include, but are not limited to:

1. SDG 4: Quality education
2. SDG 8: Decent work and economic growth
3. SDG 13: Climate Change Management
4. SDG 16: Peace, Justice, and resilient Institution
5. SDG 17: Partnership to Achieve Goals

Risk management using sustainability principles
PPA operates its business in accordance with sustainability principles, which are based on the Financial Services Authority's standards and provisions (OJK). The underlying principles are as follows:

No.	Prinsip Keberlanjutan/ Sustainability Principle	Penjelasan Explanation	Pendekatan/Penerapan di PPA Approach/Application in PPA
1	Prinsip Investasi Bertanggung Jawab Principles of Responsible Investment	Investasi bertanggung jawab (<i>responsible investment</i>) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Responsible investment is an investment approach that takes into account economic, social, environmental, and governance factors in making investment decisions.	Perusahaan senantiasa memperhitungkan dampak yang mungkin timbul dari setiap keputusan investasi. Penerapan manajemen risiko serta upaya mitigasinya selalu dikedepankan, begitu juga aspek manfaat bagi pemangku kepentingan. The Company always takes into account the impact that may arise from every investment decision. The implementation of risk management and its mitigation efforts, as well as benefit aspects for stakeholders, are always prioritized.
2	Prinsip Strategi dan Praktik Berkelanjutan Principles of Sustainable Strategy and Practice	Dalam penerapan prinsip ini, harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Applying this principle requires setting and implementing sustainable company strategies and practices in all decision-making.	Strategi dan praktik berkelanjutan merupakan menekankan pada pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis tersebut, meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam kegiatan usaha. Sustainability strategy and practices prioritize long-term achievement. Business strategy and practice include the vision, mission, organizational structure, strategic plans, standard operating procedures, and work programs, as well as the determination of risk factors in corporate activities.
3	Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup Social and Environmental Risk Management Principles	Memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Have the prudential principle when assessing social and environmental impact associated with fund collection and distribution activities.	Perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan hidup melalui identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Through identification, measurement, mitigation, supervision, and monitoring, the Company considers social and environmental impacts.
4	Prinsip Tata Kelola Governance Principles	Melalui penerapan manajemen dan operasi bisnis yang mencakup, antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara, dan wajar. Through management and business operations that incorporate principles such as openness, accountability, responsibility, independence, professionalism, equality, and reasonableness.	Perusahaan telah memiliki kebijakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang selalu menjadi bagian penting dari penerapan praktik bisnis. Kebijakan tersebut senantiasa dimutakhirkan agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi industri. The Company has a policy of implementing good corporate governance (GCG), which has always been an important part of implementing business practices. These rules are continually updated to reflect and be in line with the changes in regulations and industrial situations.
5	Prinsip Komunikasi yang Informatif Informative Communication Principles.	Menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan/lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan. Prepare and provide informative reports on the Company's strategy, governance, performance, and prospects. Reports must be easy to understand, be accounted for.	Informasi terkait dengan Perusahaan ada yang disampaikan secara berkala sesuai dengan regulasi, ada juga yang secara parsial terkait dengan perkembangan kegiatan usaha. Seluruhnya disampaikan secara informatif dan transparan serta disalurkan melalui beragam kanal informasi. Certain information related to the Company is required to be submitted periodically in accordance with regulations, others are partially related to the development of business activities. They are all presented in an informative and transparent manner and distributed through a variety of information sources.

No.	Prinsip Keberlanjutan/ Sustainability Principle	Penjelasan Explanation	Pendekatan/Penerapan di PPA Approach/Application in PPA
6	Prinsip Inklusif The Principle of Inclusiveness	Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan. Assure the availability and affordability of products and/or services for all segments of society, including those who do not currently have access to banking products and/or services.	Produk dan jasa Perusahaan dapat diakses secara inklusif, tidak terbatas pada BUMN. Selain itu, mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah. The Company's products and services can be accessed inclusively and are not limited to state-owned enterprises (SOEs). Additionally, it covers all economic sectors in accordance with stakeholder needs and government policies.
7	Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas Priority Principle for Leading Sector Development	Mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMN dan RPJP). Taking into account the priority leading sectors that have been determined by the government through the medium-term and long-term development plans (RPJMN and RPJP).	Dalam menetapkan prioritas sektor, Perusahaan mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui RPJMN dan RPJP. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim. When determining priority sectors, the Company takes into account the government-identified priority leading sectors through the RPJMN and RPJP. This is conducted to support the achievement of sustainable development goals, including climate change management.
8	Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi Coordination and Collaboration Principles	Menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional. Aligning strategies/policies, business opportunities, and product innovations with national interests.	Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan juga melaksanakan mandat dari pemerintah, yaitu melalui Surat Kuasa Khusus dari Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Dengan demikian, kebijakan dan strategi Perusahaan sejalan dengan kepentingan nasional. The Company also carries out the government's mission in carrying out its business activities, specifically through a special power of attorney from the Minister of State-owned Enterprises (SOEs) acting as the shareholder's proxy. Thus, the Company's policies and strategies are in line with national interests.

Ikhtisar Keberlanjutan

SUSTAINABILITY OVERVIEW

Aspek Ekonomi ECONOMIC ASPECTS

Aspek ekonomi menunjukkan komitmen PPA dalam menjaga kelangsungan usahanya, yang antara lain ditunjukkan melalui kinerja keuangan seperti disampaikan melalui tabel di bawah ini:

The economic aspect shows PPA's commitment to maintaining its business continuity, which is shown, among other things, through financial performance as presented in the table below:

Kinerja Usaha Business Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
Pendapatan Revenue	Rp Juta Rp Million	6.559.884	4.397.844	6.669.457
Beban Expense	Rp Juta Rp Million	(6.264.226)	(4.154.610)	(6.289.762)
Laba Bersih Net Profit	Rp Juta Rp Million	165.125	105.769	327.070

Komitmen Anggaran Pembangunan Ekonomi/Economic Development Budget Commitment

Uraian Description	Satuan Unit	Anggaran Budget	2021	Persentase Pencapaian Achievement Percentage
Investasi (Realisasi Anggaran) Kegiatan terkait Pembangunan Ekonomi Investment (Budget Realization) Activities related to Economic Development	Rp Juta Rp Million	7.260	7.466	103%

Program Pembangunan Ekonomi The Economic Development Program

No.	Program Program	Indikator Capaian Achievement Indicator
1	Program Pembinaan berupa Pengurusan Izin Usaha dan Digital Marketing UMK Binaan Development program in the form of business license management and digital marketing MSEs partners	Terselenggaranya 2 kali program pembinaan yang diikuti 40 Mitra UMK Binaan PPA The implementation of 2 (two) development programs, which were attended by 40 of PPA's Fostering MSE Partners
2	Program PPA Peduli UMK Spesial PPA Cares for Special MSEs Program	Tersalurkan dana bantuan untuk pengembangan kapasitas 3 UMK Spesial The distribution of aid funds for the capacity-building of 3 special MSEs.

Selain Program Pembangunan Ekonomi yang menjadi anggaran yang dibiayakan di perusahaan sebagaimana disampaikan pada tabel di atas, Perusahaan juga melaksanakan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) yang bersumber dari dana bergulir.

Along with the Economic Development Program, which is the firm's budget, as shown in the table above, the Company also implements the Micro Small Enterprise Financing Program (PUMK), financed by revolving funds.

Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (dana bergulir/ off balance sheet)
Micro and small enterprises financing (revolving fund/off balance sheet)

No.	Keterangan Description	RKA 2021 (Rp Juta) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp Million)	Pencapaian s.d. 31 Desember 2021 (Rp Juta) Achievement up to December 31, 2021 (Rp Million)	Persentase dari RKA Percentage from Work Plan and Budget (RKA)
Pinjaman Program PUMK MSEs financing (PUMK) Loan Program				
1	Usaha Kecil Small Enterprise	7.000.000.000	7.000.000.000	100%
Total		7.000.000.000	7.000.000.000	100%
Dana Pembinaan PUMK MSEs financing (PUMK) Development Fund				
1	Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	120.000.000	90.000.000	75%
2	Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion	140.000.000	-	0%
3	Penelitian dan Pengembangan Research and Development	-	-	0%
Total		260.000.000	90.000.000	34%

Aspek Lingkungan Hidup

ENVIRONMENTAL ASPECTS

Perusahaan memiliki komitmen untuk turut menjaga kelestarian di bidang lingkungan hidup, yang antara lain ditunjukkan melalui sejumlah program di bawah ini:

The Company commits to helping maintain sustainability in the field of the environment, which, among others, is shown through a number of programs below:

Komitmen Anggaran Pembangunan Lingkungan

Environmental Development Budget Commitment

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
Investasi (Realisasi Anggaran) Kegiatan terkait Lingkungan Hidup Investment (Budget Realization) Environmental-related Activities	Rp Juta Rp Million	500	244	48%

Program Lingkungan Hidup

Environment Program

No.	Program Program	Indikator Capaian Achievement Indicator
1	Sarana Air Bersih Clean water facilities	Tersalurkannya dana bantuan partisipasi <i>smart water</i> . Distribution of smart water participation assistance funds.
2	Penanaman <i>Mangrove</i> Mangrove planting	Tersalurkannya dana bantuan sebanyak 10.000 bibit <i>mangrove</i> . The distribution of donations of 10,000 mangrove seedlings.
3	Perbaikan Gedung PAUD binaan PPA Tapos Depok PPA's fostered PAUD building repair in Tapos, Depok.	Tersalurkannya dana bantuan perbaikan gedung PAUD binaan PPA Tapos Depok The distribution of aid funds for PPA's fostered PAUD building repair in Tapos Depok.
4	Perbaikan Gedung Asrama Pendidikan Ponpes binaan PPA Daruttaubah Bekasi PPA's fostered Ponpes (Islamic boarding school) education dormitory facility building repair in Daruttaubah, Bekasi.	Tersalurkannya dana bantuan perbaikan gedung asrama pendidikan ponpes binaan PPA Daruttaubah Bekasi The implementation of PPA's Daruttaubah Bekasi fostered education dormitory facility procurement for Ponpes (Islamic boarding school).

Program Penggunaan Listrik dan Kertas

Jumlah penggunaan listrik dan kertas oleh Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Electricity and Paper Usage Program

The overall electricity and paper use of the Company is shown in the table below:

Program	Realisasi Realization					
	2021		2020		2019	
	Volume	Rp	Volume	Rp	Volume	Rp
Penggunaan Listrik Electricity Usage	49.498,59 kWh	Rp86,527,443.86	237.663 kWh	Rp495,619,430.35	299.073 kWh	Rp586,666,250.41
Penggunaan Kertas Paper Usage	673 rim rims	Rp29,463,775.00	1.055 rim rims	Rp91,777,070.00	1.269 rim rims	Rp134,062,170.00

Aspek Pembangunan Sosial

SOCIAL DEVELOPMENT ASPECTS

Perusahaan selalu berupaya untuk berbagi nilai yang dihasilkan kepada masyarakat demi mendukung keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat melalui beragam program seperti disampaikan melalui tabel berikut

The Company always strives to share its value with the community to ensure the community's social sustainability through a variety of programs, shown in the following table.

Komitmen Anggaran Pembangunan Sosial

Social Development Budget Commitment

Uraian Description	Satuan Unit	Anggaran Budget	2021	Persentase Pencapaian Achievement Percentage
Investasi (Realisasi Anggaran) Kegiatan terkait Pembangunan Sosial Investment (Budget Realization) Activities Related to Social Development	Rp Juta Rp Million	1.400	1.367	97%

Realisasi Program Pembangunan Sosial

Realization of the Social Development Program

No.	Program Program	Indikator Capaian Achievement Indicator
1	Bantuan Uang Saku Pendidikan untuk Tenaga <i>Supporting</i> Assistance with Educational Pocket Money for Supporting Personnel	Tersalurkannya bantuan program yang dilakukan secara bulanan untuk 40 peserta. Monthly distribution of program assistance to 40 participants.
2	Bantuan Biaya Kesehatan untuk Tenaga <i>Supporting</i> Assistance with health-care costs for Supporting Personnel	Tersalurkannya bantuan program yang dilakukan secara bulanan untuk 2 peserta. Monthly distribution of program assistance to 2 participants.
3	Bantuan Penyelenggaraan Webinar dan <i>Campaign</i> Hari <i>Down Syndrome</i> dan Autis Assistance with Webinars and Down Syndrome and Autism Day Campaigns	Terlaksananya program dengan diikuti oleh peserta sesuai target yang direncanakan. The implementation of the program is followed by participants according to the planned targets.
4	Program Berbagi Berkah Ramadhan Ramadan Blessing Sharing Program	Tersalurkannya bantuan dalam bentuk 50 santunan tunai, 350 paket sembako dan 100 paket berbuka kepada penerima bantuan. The donation was distributed in the form of 50 cash donations, 350 basic food (sembako) packages, and 100 iftar packages to the beneficiaries.
5	<i>Workshop</i> Produksi Insan Berkemampuan Khusus (Penyandang difabilitas) Workshop on the Production of Special Ability Persons (Persons with Disabilities)	Tersalurkannya bantuan tahap I dan II untuk penyelenggaraan <i>workshop</i> . The distribution of donations for stages I and II of the workshops.
6	Pelatihan Guru Insan Berkemampuan Khusus (Pengajar Penyandang disabilitas) Specialized Personnel Teacher Training (Teachers with Disabilities)	Tersalurkannya bantuan untuk pelatihan guru. The distribution of assistance for teacher training.
7	Bantuan Qurban Hari Raya Idul Adha 1442H Donation to the Qurbani on Eid al-Adha 1442H	Tersalurkannya bantuan kurban satu ekor sapi untuk masyarakat di sekitar Proyek Properti Green Teksin, Tegal. The distribution of one cow qurbani donation for the community around the Green Teksin Property Project, Tegal
8	Bantuan Paket Sembako untuk Veteran Republik Indonesia Basic Food Package Donations for Indonesian Veterans	Tersalurkannya 150 paket sembako untuk veteran dan terlaksananya kegiatan "Bakti untuk Veteran." The distribution of 150 basic food packages for veterans and the implementation of the "Dedication to Veterans" activity.

No.	Program Program	Indikator Capaian Achievement Indicator
9	Bantuan Penanggulangan COVID-19 COVID-19 Countermeasures Assistance	1. Tersalurkannya Sembako dan santunan kepada 1.600 keluarga wartawan Indonesia. 2. Tersalurkannya Nutrisi untuk Tenaga Kesehatan di RS Darurat Wisma Atlet dan penyandang disabilitas. 3. Tersalurkannya bantuan untuk pelaksanaan program penanggulangan COVID-19 bekerja sama dengan pasar modal Indonesia. 1. Distribution of Basic Food and donations to 1,600 families of Indonesian journalists. 2. Distribution of nutrition to health workers and people with disabilities at Wisma Atlet Emergency Hospital. 3. The distribution of donations for the implementation of COVID-19 countermeasures program in collaboration with the Indonesian capital market.
10	Bantuan penanggulangan bencana alam di Sulawesi Barat Natural disaster relief assistance in West Sulawesi	Tersalurkannya bantuan dalam bentuk uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan dasar tanggap bencana. The distribution of assistance in the form of cash to meet the basic needs of disaster response.
11	Bantuan penanggulangan bencana alam di Kupang, NTB Natural disaster relief assistance in Kupang, NTB	Tersalurkannya bantuan dalam bentuk uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan dasar tanggap bencana. The distribution of assistance in the form of cash to meet the basic needs of disaster response.
12	Pelaksanaan Program IBK Day Implementation of the IBK Day Program	Terselenggaranya program "IBK Day." The implementation of "IBK Day" program
13	Program Bantuan Kaca Mata Koreksi Correction Glasses assistance Program	Tersalurkannya dana bantuan kaca mata koreksi sebanyak 1.000 kaca mata. The distribution of 1,000 correction glasses assistance funds
14	Program Ambulans Ambulance Programs	Tersalurkannya partisipasi dana bantuan ambulans. Participation of ambulance assistance funds
15	Program Beasiswa S1 PPA di 34 PTN PPA Undergraduate Scholarship Program at 34 PTN	Tersalurkannya bantuan program periode 2021 untuk 50 peserta. The distribution of program assistance for the 2021 period for 50 participants.
16	Program Tanggap Bencana Alam Erupsi Semeru Semeru Eruption Natural Disaster Response Program	Tersalurkannya dana bantuan partisipasi program kebutuhan tanggap bencana alam erupsi Semeru. The distribution of assistance funds for the participation in the Semeru eruption natural disaster response needs program.

Profil Perusahaan

COMPANY PROFILE

Visi dan Misi di Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

VISION AND MISSION IN THE FIELD OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

VISI Vision |

Sebagai unit khusus yang mendukung Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

As a special unit that supports the Company in improving the social welfare of the community and creating sustainable independence.

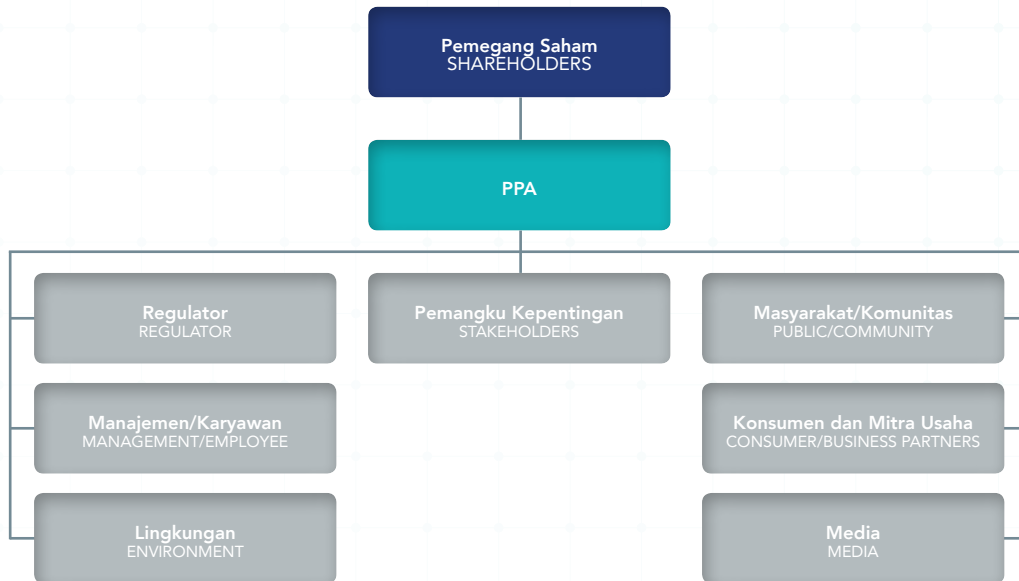
MISI Mission |

Unit TJSL Perusahaan berperan aktif dalam: Meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri; Memberdayakan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat; dan Meningkatkan dan memberikan citra positif bagi Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam perannya bersama Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The Company's CSR Unit takes an active role in: Improvement the ability of small businesses to be resilient and independent; Empower, improve, and enhance the social condition of the community; and Improve and create a positive image for the Company as one of the state-owned enterprises, in cooperation with the Government, to improve the public welfare.

Profil Perusahaan Company Profile

Ekosistem Keberlanjutan PPA PPA SUSTAINABILITY ECOSYSTEM



Skala Usaha Business Scale

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
Aset Assets	Rp Juta Rp Million	17.662.501	12.957.981	14.415.432
Liabilitas Liabilities	Rp Juta Rp Million	8.293.690	9.299.877	8.991.888
Ekuitas Equity	Rp Juta Rp Million	9.368.811	3.658.104	5.423.544
Jumlah Karyawan Number of Employees	Orang People	166	169	176
Entitas Anak: Kepemilikan Langsung Subsidiaries: Direct Ownership	Perusahaan Company	8	3	3
Entitas Anak Kepemilikan Tidak Langsung Subsidiaries Indirect Subsidiary	Perusahaan Company	1	8	8

Uraian lengkap tentang Profil Perusahaan disampaikan pada bab khusus “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

A full description of the Company profile is presented in the special chapter “Company Profile” contained in this Annual Report.

Tata Kelola Keberlanjutan

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

PPA memandang bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan wujud tanggung jawab Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan yang berkenaan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. TJSL memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan hidup dari operasional kegiatan usahanya, tidak hanya mempertimbangkan ekonomi.

Perusahaan secara konsisten terus mengupayakan keseimbangan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) serta menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan melalui program TJSL.

Komitmen tersebut telah membawa Perusahaan menjadi sebuah organisasi yang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik. Bagi Perusahaan, TJSL merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yang berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari *corporate citizen*, Perusahaan berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan 5P: *people, planet, prosperity, partnership, and peace*. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat terwujud keseimbangan manusia, bumi, kesejahteraan, melalui kerja sama yang kuat untuk menciptakan perdamaian. Dengan demikian, Perusahaan tidak hanya mementingkan manfaat bagi para pemegang saham, tetapi juga para pemangku kepentingan lain, baik pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

Perusahaan secara konsisten melaksanakan kegiatan TJSL dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang menyentuh langsung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik kebutuhan pengembangan usaha melalui Program Kemitraan, maupun kebutuhan langsung melalui Program Bina Lingkungan. Hal tersebut dibangun dari kesadaran bahwa dengan kondisi masyarakat sekitar yang sejahtera dan terjamin, akan berdampak positif bagi keberlangsungan usaha Perusahaan.

According to PPA, social and environmental responsibility (CSR) is a form of the Company's economic, social, and environmental responsibilities to stakeholders. CSR is closely related to the principle of sustainable development because the Company must consider the social and environmental impacts of its business operations in addition to the economic impact.

The Company consistently strives to achieve a balance between economic, social, and environmental performance in order to realize the Sustainable Development Goals (SDG) and ensure the Company's long-term business sustainability. To that end, the Company always maintains a harmonious relationship with stakeholders through the CSR program.

This commitment has led the Company to become an organization that carries out social and environmental responsibilities well. For the Company, CSR is one of the essential parts of implementing good corporate governance (GCG) principles, which play a role in realizing sustainable development goals.

As a corporate citizen, the Company makes every effort to achieve sustainable development goals using the 5P approach: *people, planet, prosperity, partnership, and peace*. Through this approach, it is hoped that the balance between humans, the earth, and prosperity can be realized through strong cooperation to create peace. So that the Company is not only concerned with the benefit of shareholders, but also with the interests of other stakeholders, both internal and external parties of the Company.

The Company constantly carries out CSR activities in the form of Partnership and Community Development Programs (PKBL) that directly engage with public welfare improvement initiatives, including business development needs through the Partnership Program or immediate needs through Community Development Program. This is built on the realization that the condition of the surrounding community is prosperous and guaranteed to have a positive impact on the sustainability of the Company's business.

Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

Pemangku Kepentingan yang Terdampak atau Berpengaruh dalam Kegiatan Perusahaan

Perusahaan mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang diperkirakan terpengaruh secara signifikan dari kegiatan, produk, dan/atau layanan Perusahaan. Para pemangku kepentingan tersebut harus dilindungi dari kemungkinan dampak negatif, sehingga Perusahaan senantiasa menerapkan strategi mitigasi risiko. Dengan demikian, kegiatan usaha Perusahaan dalam berjalan secara berkesinambungan serta memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan Perusahaan terdiri dari pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, masyarakat dan lingkungan hidup. Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan tersebut dengan berupaya memenuhi harapan yang wajar. Sebagai upaya untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan, Perusahaan senantiasa taat dan patuh kepada kebijakan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara aktif, Perusahaan juga melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan dan memberikan informasi secara berkala yang salah satunya melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan dan laporan berkala kepada publik. Perusahaan senantiasa menerima segala masukan dari pemangku kepentingan sebagai *feedback* dari dialog dan pelaporan yang ada, di mana selanjutnya *feedback* tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan terkait kegiatan operasional Perusahaan.

Adapun pemangku kepentingan yang signifikan terkait dengan kegiatan, strategi, dan program kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemetaan Pemangku Kepentingan Stakeholder Mapping

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu-isu Penting Important Issues	Harapan Pemangku Kepentingan kepada Perusahaan Stakeholders Expectations of the Company
Pemegang Saham & Pemodal	- Pertumbuhan laba - Pertumbuhan harga saham - Dividen	- Penerapan tata kelola perusahaan yang baik - Ketersediaan informasi mengenai Perusahaan
Shareholders and Investors	- Profits growth - Stock price growth - Dividend	- Implementation of good corporate governance - Availability of information about the Company
Pemasok	- Kontrak jangka panjang - Pembayaran yang cepat - Peningkatan pembelian	- Proses pemilihan pemasok (tender) yang <i>fair</i> - Perlakuan yang wajar dan adil - Ketepatan pemenuhan kewajiban kontraktual - Ketersediaan panduan bagi pemasok
Suppliers	- Long-term contracts - Fast payment - Increased purchases	- Fair supplier selection (tender) process - Fair and equal treatment - Accuracy of contractual obligation fulfillment - Availability of guidelines for suppliers

The Affected Stakeholders or Their Influence on the Company's Activities

The Company defines stakeholders as entities or individuals that are expected to be significantly affected by the Company's activities, products, and/or services. These stakeholders must be protected against potential negative impacts, so the Company consistently implements a risk mitigation strategy. Thus, the Company's business activities are carried out in a sustainable manner and provide benefits to stakeholders.

Shareholders, employees, suppliers, consumers, governments, communities, and the environment are all stakeholders in the Company. The Company always maintains good relations with these stakeholders by trying to meet reasonable expectations. To meet stakeholder expectations, the Company is constantly compliant with applicable policies, laws, and regulations.

The Company actively engages in dialogue with stakeholders and provides periodic information, one of which is through annual reports, sustainability reports, and periodic reports to the public. The Company always receives all input from stakeholders as feedback on the dialogue and reporting. The feedback will then be taken into consideration in the formulation of strategies and policies related to the Company's operational activities.

The significant stakeholders related to the Company's activities, strategies, and work programs are as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu-isu Penting Important Issues	Harapan Pemangku Kepentingan kepada Perusahaan Stakeholders Expectations of the Company
Karyawan & Serikat Pekerja	- Gaji dan upah - Keamanan pekerjaan - Kepuasan kerja - Motivasi	- Kepatuhan pada peraturan Pemerintah mengenai ketenagakerjaan - Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan - Kesejahteraan karyawan
Employee and Workers' Union	- Salary and Allowance - Job security - Job satisfaction - Motivation	- Compliance with Government's regulation on employment - Employee's involvement in decision-making - Employee welfare
Konsumen	- Jaminan mutu - Kestabilan harga - Ketersediaan barang/jasa - Pelayanan konsumen	- Proses tender yang fair - Pemenuhan hak pelanggan - Kepuasan pelanggan
Consumers	- Quality assurance - Price stability - Availability of goods/services - Consumer service	- Fair tender process - Fulfillment of customer rights - Customer satisfaction
Pemerintah	- Legalitas operasi - Penerimaan pajak - Penyediaan lapangan kerja	- Kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan pemerintah - Ketersediaan informasi yang relevan dengan kepentingan pemerintah
Government	- Operations legality - Tax revenue - Job creation	- Compliance with the Law and Government Regulation - Availability of information that are relevant with interest of the Government
Masyarakat	- Dampak ekonomi - Peluang pekerjaan lokal	- Peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan kerja dan kesempatan sebagai pemasok - Program pengembangan masyarakat - Ketersediaan informasi yang relevan dengan kepentingan masyarakat
Society	- Economic impact - Local job opportunities	- Welfare improvement through employment opportunities and opportunities as suppliers - Community development program - Availability of information that are relevant with public interests
Lingkungan	Pencemaran lingkungan	Keseimbangan ekosistem melalui pemeliharaan lingkungan, pelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati
Environment	Environmental pollution	Ecosystem balance through environmental preservation, nature conservation and biodiversity protection

Isu-isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Perusahaan memiliki komitmen untuk menyelaraskan kinerja usaha dengan pemberian manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari pemangku kepentingan, baik manfaat aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Perusahaan berharap melalui kegiatan usahanya akan memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi kelompok masyarakat termasuk Pemerintah.

Kegiatan usaha Perusahaan bidang keuangan tidak berdampak secara langsung terhadap pencemaran lingkungan, sehingga Perusahaan tidak memiliki program khusus terkait pemeliharaan lingkungan. Sedangkan terkait dengan aspek sosial, isu yang relevan adalah masalah ketenagakerjaan serta kemasyarakatan. Untuk isu ekonomi, antara lain berkenaan dengan kewajiban kepada pemegang saham dan pemerintah serta regulator.

The Importance of Social, Economic, And Environmental Issues Related To The Impact Of Company's Activities

The Company is committed to aligning business performance with the provision of benefits to society and the environment as part of the stakeholders, both in the social, economic and environmental aspects. The Company hopes that through its business activities, it will provide increased economic value for community groups, including the Government.

The Company's business activities in the financial sector do not have a direct impact on environmental pollution, hence the Company does not have a special program related to environmental preservation. Meanwhile, in terms of social aspects, the relevant issues are employment and social. In addition, economic issues include obligations to shareholders, the government, and regulators.

Perusahaan meyakini bahwa kesinambungan usaha Perusahaan tidak hanya dicapai melalui target *profit*, melainkan perlu juga ditunjang aspek *non financial* lainnya. Hal itu memberikan dampak pada peningkatan nilai (*value*) bagi kepuasan seluruh *stakeholders* dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Lingkup dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Baik yang Kewajiban Maupun yang Melebihi Kewajiban

Sebagai Perseroan Terbatas dengan pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir, dasar pelaksanaan program TJSL Perusahaan dilandasi pada kewajiban yang mengacu pada beberapa aspek hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut:
 - a. Pasal 2: salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
 - b. Pasal 88: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
6. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
11. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
13. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

Selain itu, Perusahaan juga mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

The Company believes that the sustainability of the Company's operation is achieved not just through profit targets, but also through other non-financial components. It has an impact on increasing value (*value*) for the satisfaction of all stakeholders, as well as providing advantages to the larger community.

The Scope and the Program of Corporate Social Responsibility Both Obligations and Exceeding Obligations

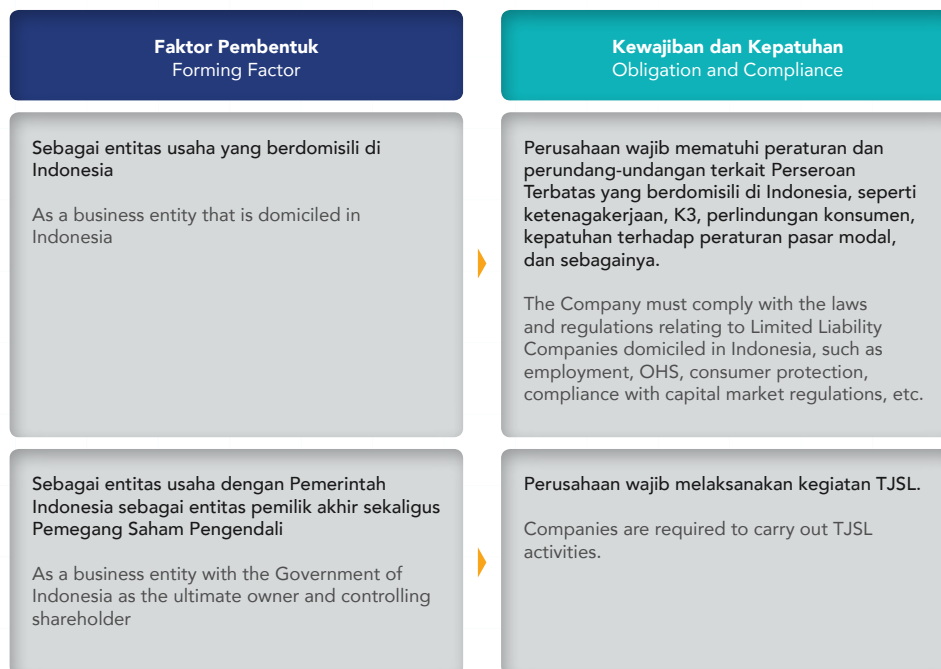
As a limited liability company with the Indonesian government as its ultimate owner, the implementation of the Company's CSR program is based on obligations that refer to several legal aspects, including the following:

1. Law No.1 of 1970 concerning Occupational Safety;
2. Law No. 23 of 1992 concerning Health;
3. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
4. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
5. Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprise, as follows:
 - a. Article 2: One of the purposes and objectives of state-owned enterprises (SOEs) establishment is to actively provide guidelines and assistance to marginal economy entrepreneurs, cooperatives, and society.
 - b. SOEs may allocate part of their net income for small enterprise or cooperative development as well as community development in their neighbourhood.
6. Law Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
7. Law No. 25 of 2007 concerning Investment;
8. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
9. Law No. 36 of 2009 concerning Health;
10. Law No. 13 of 2011 concerning the Poor;
11. Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Administrative Body;
12. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company.
13. Government Regulation No. 50 of 2012 Concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems;
14. Regulation of the Minister of Manpower No. 05/MEN/1996 regarding Occupational Safety and Health Management System (OSHMS)

In addition, the Company also refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.

Berikut disampaikan gambaran tentang kewajiban yang diemban oleh Perusahaan dalam pengimplementasian TJSL.

The following provides the obligations overview carried by the Company in implementing CSER.



Organisasi, Penanggung Jawab, dan Pengelola

Pelaksanaan kegiatan TJSL di Perusahaan dilaksanakan oleh Unit PKBL Kepala PKBL Perusahaan dijabat oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Organization, Person in Charge, and Manager

The implementation of CSER activities in the Company is carried out by the PKBL Unit. The head of the Company's PKBL is concurrently held by the head of the corporate secretary division, who reports directly to the President Director.



Lingkup tugas dan tanggung jawab Unit TJSL adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan rencana kerja, kebijakan dan SOP TJSL dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Perusahaan;
2. Menyusun rencana, mengimplementasikan, dan mengawasi kegiatan Program TJSL;
3. Melaksanakan kegiatan akuntansi Program Pendanaan UMK sampai dengan pelaporan interim dan tahunan;

The scope of duties and responsibilities of the CSR Unit are as follows:

1. input on CSR work plans, policies, and SOPs in order to support the achievement of the Company's goals;
2. Planning, implementing, and supervising the CSR Program's activities;
3. Carry out accounting tasks for the MSE Funding Program, including interim and annual reporting.

4. Menyusun Laporan TJSL secara berkala dan Laporan Tahunan TJSL termasuk pemutakhiran portal TJSL sesuai ketentuan.

4. Prepare periodic CSR Reports and CSR Annual Reports in accordance with the provisions, including updating the CSR portal.

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berikut disampaikan biaya dan/atau investasi yang dikeluarkan Perusahaan dalam kegiatan TJSL di tahun 2021.

Cost And Budget of Corporate Social Responsibility

The following table summarizes the Company's costs and/or investments in CSR activities in 2021.

No.	Jenis Type	Anggaran 2021(Rp) Budget in 2021 (Rp)	Realisasi 2021(Rp) 2021 Realization (Rp)
1	Pilar Pembangunan Ekonomi The Economic Development Pillars	7.260.000.000	7.466.756.054
2	Pilar Pembangunan Sosial The Social Development Pillars	1.400.000.000	1.367.900.000
3	Pilar Pembangunan Lingkungan The Environment Development Pillars	500.000.000	243.861.110
4	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola The Legal Development and Governance Pillars	100.000.000	-
Total		9.260.000.000	9.078.517.164

Pengembangan Budaya Keberlanjutan

DEVELOPMENT OF A SUSTAINABILITY CULTURE

Ikhtisar Utama

Penerapan komitmen terhadap pengembangan budaya keberlanjutan tidak hanya dilakukan di internal organisasi Perusahaan, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan. Hal itu, antara lain diterapkan melalui prinsip-prinsip kode etik serta tata kelola perusahaan yang baik.

The implementation of the commitment to the development of a sustainability culture is not only carried out within the Company's internal organization but also by all stakeholders. This is also implemented through the principles of the code of ethics and good corporate governance.

Laporan Manajemen

Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan kinerja berkelanjutan terus-menerus, sehingga menimbulkan pemahaman dan sikap yang sama. Pada tahun 2021 misalnya, Perusahaan melakukan sosialisasi di internal terkait dengan penerapan TJSL, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

For that purpose, the Company continues socializing policies on sustainable performance to achieve the same understanding and attitude. In 2021, for example, the Company conducted internal socialization regarding the implementation of CSR as required by the Minister of SOEs' Decree No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Melalui penguatan di lingkungan internal tersebut, Perusahaan berharap dapat tercipta budaya keberlanjutan. Dengan demikian, akan memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian komitmen untuk mendukung keberhasilan SDGs.

By strengthening the internal environment, the Company hopes to create a culture of sustainability. Thus, it will support achieving commitments to support the Sustainable Development Goals (SDGs) to be successful.

Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan menyadari bahwa budaya keberlanjutan yang menjadi komitmen Perusahaan, antara lain tercermin dalam budaya korporasi yang kuat, membuat karyawan bangga untuk mewakili Perusahaan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan. Budaya Perusahaan menanamkan nilai-nilai melalui AKHLAK.

The Company recognizes that the sustainability culture that the Company is committed to, among others, is reflected in a strong corporate culture, making employees proud to represent the Company in interaction with stakeholders. Corporate Culture is embedded through the values of AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Seluruh nilai-nilai dan budaya Perusahaan tersebut senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam bentuk pelatihan formal maupun informal, *sharing session*, motivasi, bimbingan, penilaian kinerja karyawan, dan acara-acara kebersamaan karyawan di lingkungan Perusahaan.

All the values and culture of the Company are constantly communicated to all employees at any opportunity, such as through formal and informal training, sharing sessions, motivation, mentorship, employee performance evaluation, and other gathering activities of employees in the Company's environment.

Bagi pemangku kepentingan lain, Perusahaan menyiapkan saluran komunikasi untuk mendiskusikan beragam masalah terkait keberlanjutan, terutama berkenaan dengan dampak dari kegiatan usaha Perusahaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari sosialisasi dan *engagement* untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam kegiatan operasional Perusahaan.

The Company provides communication channels for other stakeholders to discuss various topics linked to sustainability, particularly the impact of the Company's commercial activities. This policy is part of the Company's socialization and involvement to realize common goals, namely incorporating environmental, social, and governance components into its operational activities.

Kinerja Keberlanjutan

SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Pencapaian Kinerja TJSL terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

ACHIEVEMENT OF CSER PERFORMANCE RELATES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBJECTIVES

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 hingga tahun 2030. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kebijakan tersebut mengacu pada “UN Sustainable Summit 2015” yang melahirkan 17 tujuan TPB dan 169 target. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kebijakan tersebut juga termasuk dalam tujuan pelaksanaan TJSL Perusahaan sebagai BUMN. Tanggung jawab terhadap aktivitas Perusahaan adalah memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Program TJSL BUMN dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi BUMN pada pencapaian TPB yang dilaksanakan dengan prinsip: terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya secara akuntabel.

Hingga berakhirnya tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan komitmen tersebut, yang capaiannya disajikan melalui uraian dalam tabel berikut ini:

The Sustainable Development Goals (SDGs) are documents that contain global goals and targets from 2016 to 2030. This definition is contained in Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.

The policy refers to the “UN Sustainable Summit 2015,” which resulted in 17 SDGs and 169 targets. The main objectives are to maintain the continuous improvement of the economic welfare of the community, maintain the sustainability of the social life of the community, maintain the quality of the environment, as well as inclusive development and the implementation of governance that is able to maintain the improvement of the quality of life from one generation to the next.

This policy is also included in the objectives of implementing the Company’s CSR as a SOEs. The responsibility of the Company’s activities is to provide economic, social, environmental, legal, and governance benefits.

The SOEs’ CSR program is implemented as a form of SOEs’ contribution to SDG achievement, which is carried out with the following principles: integrated, directed, and accountable for measuring its impact.

Until the end of 2021, the Company has carried out these commitments, the achievements of which are presented in the following table:

Realisasi Program TJSL Realization of CSER Programs

No.	Nama Program Program Name	TPB SDGs	Pilar Pillar	Uraian Program Program Description	Indikator Capaian Achievement Indicators	Nilai Realisasi (Rp) Realization Value (Rp)
1	Bantuan Uang Saku Pendidikan untuk Tenaga Supporting	4	Sosial	Penyaluran bantuan pendidikan berupa uang saku untuk pendidikan tenaga supporting (outsourcing) di lingkungan Perusahaan.	Tersalurkannya bantuan program yang dilakukan secara bulanan untuk 40 peserta.	284.500.000
	Educational Pocket Money Donations for Supporting Personnel		Social	Distribution of educational assistance in the form of pocket money for the education of supporting (outsourcing) personnel within the Company.	Monthly distribution of assistance programs for 40 participants.	

No.	Nama Program Program Name	TPB SDGs	Pilar Pillar	Uraian Program Program Description	Indikator Capaian Achievement Indicators	Nilai Realisasi (Rp) Realization Value (Rp)
2	Bantuan Biaya Kesehatan untuk Tenaga <i>Supporting</i>	3	Sosial	Penyaluran bantuan kesehatan berupa biaya kesehatan dan kegiatan kepada tenaga <i>supporting</i> (<i>outsourcing</i>) di lingkungan Perusahaan.	Tersalurkannya bantuan program yang dilakukan secara bulanan untuk 2 (dua) peserta.	28.000.000
	Medical Expenses Assistance for Supporting Personnel		Social	Distribution of health assistance in the form of medical expenses and activities for supporting (<i>outsourcing</i>) personnel within the Company.	Monthly distribution of assistance programs for 2 participants.	
3	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Barat	2,13	Lingkungan	Penyaluran bantuan tanggap bencana dan pasca bencana alam di Sulawesi Barat.	Tersalurkannya bantuan dalam bentuk uang tunai sesuai memo persetujuan.	25.000.000
	Natural disaster relief assistance in West Sulawesi		Environment	Distribution of disaster response and post-natural disaster assistance in West Sulawesi.	The distribution of cash donation is in accordance with the approval memo.	
4	Bantuan Penyelenggaraan Webinar dan Kampanye Hari <i>Down Syndrome</i> dan Autis	4	Sosial	Bantuan penyelenggaraan dan penyediaan sarana <i>live streaming</i> kegiatan.	Terlaksananya program dengan diikuti oleh peserta sesuai target yang direncanakan.	15.000.000
	Assistance in Organizing Webinars and Down Syndrome and Autism Day Campaigns		Social	Assistance in organizing and providing live streaming facilities for activities.	The implementation of the program is attended by participants according to the planned targets.	
5	Bantuan penanggulangan bencana alam di Kupang, NTT	2,13	Lingkungan	Penyaluran bantuan pasca bencana alam di Kupang, NTT.	Tersalurkannya bantuan dalam bentuk uang tunai sesuai memo persetujuan kepada BPBD setempat.	25.000.000
	Natural disaster relief assistance in Kupang, NTT		Environment	Distribution of assistance after natural disasters in Kupang, NTT.	The distribution of cash donations is in accordance with the approval memo to the local BPBD.	
6	Program Berbagi Berkah Ramadhan	2	Sosial	Bantuan santunan, paket sembako dan paket berbuka kepada yatim, duafa, keluarga wartawan dan masyarakat umum.	Tersalurkannya bantuan dalam bentuk 50 santunan tunai, 350 paket sembako dan 100 paket berbuka kepada penerima bantuan.	82.500.000
	Ramadan Blessing Sharing Program		Social	Compensation assistance, basic food packages (<i>sembako</i>), and iftar packages for orphans, the poor, journalists' families, and the general public.	The distribution of assistance in the form of 50 cash compensation, 350 packages of basic food and 100 packages of iftar to beneficiaries.	
7	Workshop Produksi Insan Berkemampuan Khusus (Penyandang difabilitas)	4	Sosial	Bantuan penyelenggaraan <i>workshop</i> Produksi cetak kaos, keset dan makanan khusus insan berkebutuhan khusus.	Tersalurkannya bantuan Tahap I dan II untuk penyelenggaraan <i>workshop</i> .	150.000.000
	Workshop on the Production of Special Capable People (Persons with Disabilities)		Social	Assistance in organizing workshops for printing t-shirts, doormats, and special foods for people with special abilities.	The distribution of phase I and II assistance for the implementation of workshops.	

No.	Nama Program Program Name	TPB SDGs	Pilar Pillar	Uraian Program Program Description	Indikator Capaian Achievement Indicators	Nilai Realisasi (Rp) Realization Value (Rp)
8	Pelatihan Guru Insan Berkemampuan Khusus (Pengajar Penyandang Disabilitas)	4	Sosial	Bantuan penyelenggaraan pelatihan guru.	Tersalurkannya bantuan untuk pelatihan guru.	50.000.000
	Teacher Training for Specialized Personnel (Teachers with Disabilities)		Social	Assistance in the implementation of teacher training.	The distribution of assistance for teacher training.	
9	Bantuan Qurban Hari Raya Idul Adha 1442H	2	Sosial	Bantuan kurban sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1442H.	Tersalurkannya bantuan kurban satu ekor sapi untuk masyarakat di sekitar proyek properti Green Teksin, Tegal	23.000.000
	Donations for the 1442 H Eid al-Adha Qurbani		Social	Donations of cow qurban for Eid al-Adha 1442H.	The distribution of one cow qurbani donation for the community around the Green Teksin Property Project, Tegal.	
10	Bantuan Paket Sembako untuk Veteran Republik Indonesia	2	Sosial	Bantuan paket sembako untuk veteran RI dalam kegiatan "Bakti untuk Veteran."	Tersalurkannya 150 paket sembako untuk veteran RI dan terlaksananya kegiatan bakti untuk veteran.	79.000.000
	Basic food package donations for Indonesian veterans		Social	Basic food package donations for Indonesian veterans in the "Dedication to Veterans" activity.	The distribution of 150 basic food packages for Indonesian veterans and the implementation of "Dedication to Veterans" activity.	
11	Bantuan Penanggulangan COVID-19	2	Sosial	Bantuan sembako dan santunan untuk keluarga wartawan Indonesia. Bantuan Nutrisi untuk tenaga kesehatan di RS Darurat Wisma Atlet dan penyandang Disabilitas. Bantuan penanggulangan COVID-19 dalam rangka HUT ke-44 diaktifikannya kembali pasar modal Indonesia.	Tersalurkannya sembako dan santunan kepada 1.600 keluarga wartawan Indonesia. Tersalurkannya nutrisi untuk tenaga kesehatan di RS Darurat Wisma Atlet dan penyandang disabilitas. Tersalurkannya bantuan untuk pelaksanaan program penanggulangan COVID-19 bekerja sama dengan pasar modal Indonesia.	105.000.000
	COVID-19 Countermeasures Assistance		Social	Basic food assistance and compensation for the families of Indonesian journalists. The distribution of Nutrition for Health Workers at Wisma Atlet Emergency Hospital and people with disabilities. Assistance to overcome COVID-19 in the framework of the 44 th anniversary of the re-activation of the Indonesian capital market.	The distribution of food (Sembako) and compensation to 1,600 families of Indonesian journalists. The distribution of nutrition for health workers at Wisma Atlet Emergency Hospital and people with disabilities. The distribution of assistance for the implementation of the COVID-19 countermeasures program in collaboration with the Indonesian capital market.	



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

No.	Nama Program Program Name	TPB SDGs	Pilar Pillar	Uraian Program Program Description	Indikator Capaian Achievement Indicators	Nilai Realisasi (Rp) Realization Value (Rp)
12	Pembinaan Mitra UMK Binaan PPA	8	Ekonomi	Program pembinaan UMK yang meliputi pembuatan izin usaha dan <i>digital marketing</i> di Provinsi Jawa Timur dan Lampung.	Terselenggaranya 2 (dua) kali program pembinaan yang diikuti 40 Mitra UMK binaan PPA.	131.956.054
	PPA's Fostering MSE Partners' Development		Economy	The MSE development program includes making business licenses and digital marketing in East Java and Lampung Provinces.	The implementation of 2 (two) development programs, which were attended by 40 of PPA's fostering MSE partners.	
13	Pelatihan Desa Digital Tawangsari	8	Ekonomi	Partisipasi bantuan program pelatihan "Desa Digital" Tawangsari.	Terselenggaranya program pelatihan "Desa Digital" Tawangsari.	15.000.000
	Tawangsari Digital Village Training		Economy	Participation of tawangsari "Digital Village" training program assistance.	The implementation of Tawangsari digital village training program.	
14	Program Hibah UMK Spesial	8	Ekonomi	Pemberian Bantuan Hibah untuk UMK Spesial kerja sama UKM Indonesia.	Tersalurkan dana hibah untuk 3 (tiga) UMK Spesial.	229.800.000
	Special MSEs Grant Program		Economy	Provision of Grants for Special MSEs in Cooperation with Indonesian SMEs.	Grant funds were distributed for three (3) special MSEs.	
15	Pelaksanaan Program IBK Day	4	Sosial	Partisipasi bantuan pelaksanaan program "Hari Insan Berkemampuan Khusus (IBK)"	Terselenggaranya program "IBK Day."	25.300.000
	Implementation of the IBK Day Program		Social	Participation in the implementation of the program "Special Ability Human Day (IBK)"	The implementation of "IBK Day" program.	
16	Program Bantuan Kaca Mata Koreksi	4	Sosial	Program bantuan kaca mata koreksi untuk siswa dan guru SD di Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Melihat Terang.	Tersalurkannya dana bantuan kaca mata koreksi sebanyak 1.000 buah.	250.000.000
	Correction Glasses Assistance Program		Social	Correction eyeglass assistance program for elementary students and teachers in Indonesia in collaboration with Yayasan Melihat Terang.	The distribution of 1,000 correction glasses assistance funds.	
17	Program Ambulans	3	Sosial	Partisipasi bantuan program ambulans.	Tersalurkannya partisipasi dana bantuan ambulans.	25.000.000
	Ambulance programs		Social	Participation of assistance for ambulance program.	The participation of ambulance assistance funds.	
18	Program Penanaman Mangrove	15	Lingkungan	Partisipasi bantuan penanaman <i>mangrove</i> di Madura.	Tersalurkannya dana bantuan sebanyak 10.000 bibit <i>mangrove</i> .	50.000.000
	Mangrove Planting Program		Environment	Participation of mangrove planting assistance in Madura.	The distribution of donations of 10,000 mangrove seedlings.	

No.	Nama Program Program Name	TPB SDGs	Pilar Pillar	Uraian Program Program Description	Indikator Capaian Achievement Indicators	Nilai Realisasi (Rp) Realization Value (Rp)
19	Program Sarana Air Bersih	6	Lingkungan	Partisipasi pengadaan sarana air bersih – <i>smart water</i> .	Tersalurkannya dana bantuan partisipasi <i>smart water</i> .	100.000.000
	Clean Water Facilities Program		Environment	Participation in the procurement of clean water facilities – <i>smart water</i> .	The distribution of funds for <i>smart water</i> participation assistance.	
20	Program Beasiswa S1 PPA	4	Sosial	Program beasiswa S1 untuk 50 mahasiswa di 34 PTN di Indonesia.	Tersalurkannya bantuan program periode 2021 untuk 50 peserta.	150.600.000
	PPA Undergraduate Scholarship Program		Social	S1 scholarship program for 50 students at 34 universities in Indonesia.	The distribution of program assistance for the 2021 period for 50 participants.	
21	Program Tanggap Bencana Alam Erupsi Semeru	2	Sosial	Partisipasi program tanggap bencana alam erupsi Semeru.	Tersalurkannya dana bantuan partisipasi program kebutuhan tanggap bencana alam erupsi Semeru.	50.000.000
	Semeru Eruption Natural Disaster Response Program		Social	Participation of the Semeru eruption natural disaster response program.	The distribution of assistance funds for the participation in the Semeru eruption natural disaster response needs program.	
22	Program Perbaikan PAUD Binaan PPA	11	Lingkungan	Perbaikan PAUD binaan PPA di Tapos, Depok.	Terlaksananya Perbaikan PAUD Binaan PPA Tapos Depok	43.861.110
	PPA's Fostered PAUD Improvement Program		Environment	PPA's fostered PAUD improvement in Tapos, Depok.	The implementation of PPA's fostered PAUD improvement in Tapos, Depok.	
23	Program Pengadaan Sarana Asrama Pendidikan Binaan PPA	11	Lingkungan	Pengadaan sarana asrama pendidikan binaan PPA di Ponpes Daruttaubah, Bekasi.	Terlaksananya pengadaan sarana asrama pendidikan Ponpes binaan PPA.	50.000.000
	PPA's fostered Education Dormitory Facility Procurement Program		Environment	PPA's fostered education dormitory facility procurement in Ponpes (Islamic boarding schoold) Daruttaubah, Bekasi.	The implementation of PPA's fostered Ponpes (Islamic boarding school) education dormitory facility procurement.	
Jumlah/ Total						1.988.517,164

Bidang Ekonomi ECONOMICS SECTOR

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Pencapaian realisasi dari kegiatan usaha Perusahaan merupakan hasil dari penerapan strategi sepanjang tahun 2021. Dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi tersebut, Perusahaan senantiasa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti rencana jangka panjang Perusahaan.

The realization of the Company's business activities is the result of implementing the strategy throughout 2021. In the preparation and implementation of the strategy, the Company always considers sustainability aspects, such as the Company's long-term plans.

Rincian perkembangan kinerja usaha Perusahaan disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Details of the development of the Company's business performance are presented in the table below:

Perbandingan Target dan Realisasi Comparison of Targets and Realizations

	Realisasi 2021 2021 Realization	Target 2021 2021 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 2021 Realization Against Target (%)
	1	2	(1:2)
Pendapatan Usaha Revenue	6.535.658	6.774.942	96,47%
Beban Usaha Operating Expenses	(6.368.336)	(6.374.913)	99,90%
Laba Usaha Operating Income	167.322	400.029	41,83%
Laba Sebelum Pajak Profit before tax	175.187	150.512	116,39%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	165.125	122.551	134,74%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	2.753.947	122.551	2.247,18%

Lebih lengkap pencapaian realisasi usaha dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disajikan dalam "Tinjauan Keuangan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

A more complete achievement of business realization compared to the targets that have been set is presented in the "Financial Review" contained in this Annual Report.

Kegiatan Program Pendanaan UMK

Sebagai bagian penting dari kegiatan keberlanjutan di bidang ekonomi adalah perhatian Perusahaan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) yang dilaksanakan melalui program pendanaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

MSEs Financing Program Activities

As an important part of sustainability activities in the economic sector, the Company's attention to micro and small enterprises (MSEs) is implemented through funding programs. This is in line with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

Selain itu, kepedulian terhadap UMK juga selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Begitu juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

In addition, concern about MSEs is also in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises, similar to the Sustainable Development Goals (SDGs).

Sumber Dana Program Pendanaan UMK

Sources of Funds for the MSE Financing Program

No.	Keterangan Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Pencapaian s.d. 30 September 2021 (Rp) Achievement up to September 30, 2021 (Rp)
Program Kemitraan Partnership Program			
1	Saldo Dana Awal Tahun Balance at the beginning of the Year	131.010.787	358.245.211
2	Alokasi Dana Awal Tahun Fund Allocation at the Beginning of the Year	-	-
3	Pendapatan dari Jasa Administrasi Administration Services Revenue	27.000.000	28.016.466
4	Pengembalian Pokok Pinjaman Repayment of Loan Principal	7.076.711.114	7.318.084.679
5	Pendapatan Bunga Jasa Giro/ Deposito Interest Income on Current Accounts or Deposits	38.000.000	82.168.064
Total		7.272.721.901	7.786.514.420

Penggunaan Dana Program PUMK

Use of MSEs' financing (PUMK) Program Funds

No.	Keterangan Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Pencapaian s.d. 30 September 2021 (Rp) Achievement up to September 30, 2021 (Rp)	% dari RKA % from RKA
Pinjaman Program PUMK Loans from the MSEs' financing Program				
1	Usaha Kecil Small Enterprises	7.000.000.000	7.000.000.000	0,00%
	Total	7.000.000.000	7.000.000.000	0,00%



No.	Keterangan Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Pencapaian s.d. 30 September 2021 (Rp) Achievement up to September 30, 2021 (Rp)	% dari RKA % from RKA
Dana Pembinaan PUMK MSEs financing Development Fund				
1	Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	120.000.000	90.000.000	75%
2	Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion	140.000.000	-	0,00%
3	Penelitian dan Pengembangan Training and Development	-	-	0,00%
Total		260.000.000	90.000.000	34%
Beban Operasional Operating Expenses				
1	Beban Operasional Operating Expenses	-	-	0,00%
Total		7.260.000.000	7.090.000.000	96,42%
Catatan: Sesuai PER-05, Dana Pembinaan dan Pelatihan UMK Binaan menjadi beban perusahaan atau tidak bersumber dari ketersediaan dana program Pendanaan UMK. Note: In accordance with PER-05, the fund for development and training of Fostered MSEs is an expense for the company and not sourced from the MSEs' financing program fund.				

Laporan Keuangan Pendanaan UMK (PUMK) yang disajikan secara komparatif adalah sebagai berikut:

The financial statements of SME financing, which are presented comparatively, are as follows:

Penggunaan Dana Program PUMK Use of MSEs' financing (PUMK) Program Funds

Uraian Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)		Persentase Pencapaian Achievement Percentage	
		2020	2021		
		1	2	3	3:1
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	12.721.899	358.245.209	692.454.737	5.331%	193,58%
Piutang Pinjaman Mitra Binaan-Bersih Net-Fostered Partners Loan Receivable	18.759.346.17	18.975.230.142	18.398.106.574	100%	98,38%
(Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang) (Less Allowance for Impairment of Receivables)	-	(91.241.274)	(60.909.645)	-	66,76%
Piutang Lain-lain – Bersih Other Receivables - Net	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	18.772.068.036	19.340.224.145	19.097.310.103	103,18%	100,33%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	-			-	-
Jumlah Aset Total Assets	18.772.068.036	19.340.224.145	19.097.310.103	103,18%	100,33%

Uraian Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)		Persentase Pencapaian Achievement Percentage	
		2020	2021		
	1	2	3	3:1	3:2
Liabilitas dan Aset Neto Net Liabilities and Assets					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities					
Uang Muka BUMN Pembina Advances for SOEs Advisors	-				
Kelebihan Pembayaran Angsuran Overpayment of Installments	-	216.576.387	604.166	-	77%
Angsuran Belum Teridentifikasi Unidentified Installments	-				-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	-	216.576.387	604.166	-	77%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	-	216.576.387	604.166	-	77%
Aset Neto Net Assets					
Aset Neto Tidak Terikat Unrestricted Net Assets	18.772.068.036	19.123.647.758	19.096.705.937	102,29%	100,59%
Aset Neto Terikat Restricted Net Assets					
Jumlah Aset Neto Total Net Assets	18.772.068.036	19.123.647.758	19.096.705.937	103,18%	100,59%
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto Total of liabilities and net assets	18.772.068.036	19.340.224.145	19.097.310.103	103,18%	100,33%

Penggunaan Dana Program PUMK Use of MSEs' financing (PUMK) Program Funds

Uraian Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)		Persentase Pencapaian Achievement Percentage	
		2020	2021		
	1	2	3	3:1	3:2
Pendapatan Revenue					
Alokasi Dana Dari BUMN Pembina Allocation of Funds From SOEs Advisors					
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Services Revenue	27.000.000	44.249.361	28.016.466	319,81%	195,15%
Pendapatan Bunga Deposito Deposit Interest Income		6.850.124	6.456.710	-	94,25%
Pendapatan Jasa Giro Income from Current Account Services		144.594.326	75.827.153	-	52,44%
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro Income from Deposit Interest and Current Account Services	38.000.000	158.193.242	82.168.064	216,53%	54,33%
Pendapatan Lain-lain Other Income		-	315.625.505	-	-
Jumlah Pendapatan Total Revenue	65.000.000	232.819.232	427.282.043	745,17%	247,45%



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

Uraian Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)		Persentase Pencapaian Achievement Percentage	
		2020	2021		
	1	2	3	3:1	3:2
Beban Expenses					
Dana Pembinaan PUMK MSEs’ financing Development Fund		90.000.000	90.000.000		-
Penyaluran Bina Lingkungan Distribution of Environmental Development			315.625.505	-	-
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses		463.000	404.900	-	-
Beban Pelatihan Training Expenses	260.000.000	206.000	90.000.000	35%	436,89%
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Allowance for impairment of loans receivable		-	43.066.667	-	-
Jumlah Beban Total Expenses	260.000.000	93.261.376	454.223.864	156,17%	448,66%
				-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat Increase (Decrease) of Unrestrircted Net Assets	(195.000.000)	105.240.811	78.228.760	-40%	74,33%
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Increase (Decrease) of Net Assets	(95.000.000)	105.240.811	78.228.760	-40%	74,33%
Aset Neto Awal Tahun Net Assets at the Beginning of the Year	18.967.068.036	18.984.089.902	19.123.647.758	100,82% 100.82%	100,74% 100.74%
Aset Neto Akhir Tahun Net Assets at the End of the Year	18.772.068.036	19.123.647.758	19.096.705.937	102,29%	100,59%

Laporan Arus Kas Cash Flows Statement

Uraian Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)		Persentase Pencapaian Achievement Percentage	
		2020	2021		
	1	2	3	3:1	3:2
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities					
Penerimaan Dana BUMN Pembina Fund from SOEs Advisors	-				
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Fostered Partners Loan Repayment	7.076.711.114	3.288.789.906	7.318.084.679	103,36%	222,61%
Kelebihan Pembayaran Angsuran Overpayment of Installment	-	216.576.387	-	-	-
Angsuran Belum Teridentifikasi Unidentified Installments	-	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Services Revenue	27.000.000	44.294.361	28.016.466	103,76%	63,25%

Uraian Description	RKA 2021 (Rp) Work Plan and Budget (RKA) 2021 (Rp)	Realisasi (Rp) Realization (Rp)		Persentase Pencapaian Achievement Percentage	
		2020	2021	3:1	3:2
Pendapatan Bunga Jasa Giro Interest Income from Current Account Services		6.850.124	6.456.710	16,99%	94,26%
Pendapatan Bunga Deposito Deposit Interest Income		145.927.657	75.711.354	-	51,96%
Pendapatan Operasional Lain-lain Other Operating Income	-	-	317.097.514	-	-
Total Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Total Cash from Operating Activity	7.141.711.114	3.699.675.053	7.740.431.198	108,39%	209,25%
Penyaluran Pinjaman PUMK MSEs financing Loan Disbursement	(7.000.000.000)	(4.500.000.000)	(7.000.000.000)	100%	155,56%
Dana Pembinaan PUMK MSEs financing (PUMK) Development Fund	(260.000.000)	(90.000.000)	90.000.000)	-	-
Penyaluran Bina Lingkungan Distribution of Environmental Development	-		(315.625.505)	-	-
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses	-	(105.000)	(182.900)	-	174,19%
Pembayaran Beban Lainnya Other Expenses Payments	-	(393.000)	(90.222.000)	-	229,57%
Kas Neto yang Diterima (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi Net Cash Received (Used) for Operating Activities	(118.288.886)	(890.822.944)	334.400.793	-282,70%	-37,54%
Kenaikan (Penurunan) Neto dalam Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(118.288.886)	(890.822.944)	334.400.793	-282,70%	-37,54%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	131.010.787	1.249.068.152	358.245.211	273,45%	28,68%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	12.721.900	358.245.211	692.454.737	5444,9%	193,34%

Atas pinjaman yang sudah tersalurkan kepada mitra binaan, Perusahaan memantau pengembalian pinjaman untuk memastikan berjalan dengan lancar. Pengembalian pinjaman mitra binaan hingga Desember 2021 mencapai tingkat kolektibilitas sebesar 95%.

For loans that have been disbursed to fostered partners, the Company monitors loan repayments to ensure that they run smoothly. Loan repayment of fostered partners until December 2021 reached a collectibility rate of 95%.

Pengembalian Pinjaman Loan Repayment

Outstanding Piutang per 30 Desember 2021 (Rp) Outstanding Receivables as of December 30, 2021 (Rp)	Nilai Tertimbang (Rp) Weighted Value (Rp)	Tingkat Kolektibilitas Collectibility Level
18.500.610.878	18.234.910.879	98,56%

Bidang Lingkungan Hidup

ENVIRONMENTAL ASPECTS

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasional yang dilaksanakan berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Perusahaan senantiasa berupaya untuk meminimalisir dampak tersebut yang dilakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) terkait lingkungan hidup.

Kebijakan Perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal Perusahaan, yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut, antara lain mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu, setiap kegiatan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan tersebut juga selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Untuk itu, dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan senantiasa melakukan penghematan energi dan air.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Lingkungan

Kebijakan Perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal Perusahaan, yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berwawasan lingkungan. Perusahaan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka kesadaran terhadap pelestarian lingkungan.

Commitment and Policy

The Company understands that its operations may have an impact on the surrounding environment. Through social and environmental responsibility (CSR) activities, the Company always attempts to reduce these impacts.

The Company's environmental conservation and preservation policy begin on an internal level, introducing several environmentally beneficial measures. These policies refer to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. As a result, each Company's operations must assure the environmental functions' long-term viability.

This policy also aligns with the Republic of Indonesia's Presidential Instruction No. 13 of 2011 on Energy and Water Saving. The Company accomplishes this goal by saving energy and water in its operating processes.

Stakeholders and Impact of Environmental Responsibility

The Company's environmental conservation and preservation policy begin on an internal level, introducing several environmentally beneficial measures. In addition, the Company actively promotes a culture of environmental responsibility, not just for its employees but also for society at large. This is done in the framework of environmental conservation awareness.

Kegiatan Perusahaan tidak secara langsung berdampak pada lingkungan hidup. Kendati demikian, Perusahaan memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup, yang mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga setiap kegiatan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu, setiap kegiatan Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan sebagai acuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional. Perusahaan juga merealisasikan program penghematan energi dan air sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Tujuan pelaksanaan program TJSI terhadap lingkungan hidup adalah membangun dan menjaga pelestarian ekosistem alam, sekaligus memberi kontribusi nyata untuk lingkungan hidup.

Sasaran, Rencana, dan Target

Perusahaan merumuskan program CSR terkait lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, karena Perusahaan menyadari dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus terdapat keharmonisan antara berbagai aspek salah satunya lingkungan sekitar. Perencanaan pelaksanaan CSR Perusahaan terkait lingkungan disebutkan sebagai berikut:

The Company's operations have no direct effect on the environment. Nonetheless, the Company has an environmental commitment as defined by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which requires that all of the Company's activities contribute to the sustainability of environmental functions.

As a result, each of the Company's activities is documented with an environmental document that acts as a guide for managing the environmental impact of those activities. Additionally, the company realizes energy and water saving in accordance with Presidential Instruction No. 13 of 2011 on Energy and Water Saving. The goal of the environmental CSR program is to grow and protect natural ecosystems while also making a significant contribution to the environment.

Objectives, Plans, and Targets

The Company formulates CSR programs related to the environment as its concern for the environment, as the Company recognizes that in order to achieve its goals, numerous factors must work in harmony, one of which is the surrounding environment. Accordingly, the following are the Company's environmental CSR implementation plans:

No	Strategi Strategy	Tujuan Purpose	Rencana Aksi Action Plan	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
1	Implementasi Pengelolaan Emisi Udara	Pemenuhan baku mutu lingkungan dalam seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan kendaraan dinas	Pemantauan dan pengukuran rutin serta pengendalian proses agar baku mutu terpenuhi	Program keberlanjutan setiap tahun
	Implementation of Air Emission Management	Compliance with environmental quality standards in all emissions of exhaust gases released by official vehicles	Monitoring and measuring on a regular basis, as well as process control, to ensure that quality standard criteria are satisfied	Annual Sustainability program
2	Implementasi Penghijauan	Melakukan penanaman pohon	Penanaman pohon	Program keberlanjutan
	Greening Implementation	Planting of trees	Tree planting	Sustainability Program
3	Implementasi Efisiensi Energi	Penghematan listrik untuk pemakaian sendiri	Melaksanakan program-program efisiensi energi	Program keberlanjutan setiap tahun
	Energy Efficiency Implementation	Electricity savings for personal use	Implement energy efficiency programs	Annual sustainability program

Pelaksanaan Program Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Kegiatan yang dilakukan sebagai wujud komitmen dalam menjaga lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Edukasi Pemeliharaan Lingkungan

Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan pemberian fasilitas tempat sampah.

The Implementation of Environmental Programs Related to Company Operations Activities

The following activities have been undertaken to demonstrate our dedication to environmental protection:

1. Environmental Care Education

Educate the public about the need to maintain a clean environment by providing trash can facilities.

2. Efisiensi Penggunaan Material Kertas (Paperless)

Mengurangi konsumsi kertas dengan beberapa inisiatif, seperti pemakaian kertas bolak balik, menghentikan penggunaan kertas untuk dokumen pembukaan tender, membiasakan mengirim dokumen melalui E-mail, sehingga hanya mencetak halaman yang diperlukan, serta pemakaian kembali kertas bekas. Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan yaitu melalui dukungan Teknologi Informasi sehingga transaksi yang berbasis kertas diganti dengan tanpa kertas (*paperless*).

3. Pengaturan Penggunaan Kendaraan Operasional

Melakukan kontrol yang ketat pada penggunaan bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor serta pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara teratur sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan penghematan bahan bakar.

4. Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal (ME)

Membantu mengurangi penggunaan energi dan listrik serta memperpanjang usia pemakaian peralatan ME yang dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dampak dari limbah peralatan ME.

5. Efisiensi Konsumsi Energi Listrik

Hemat listrik dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, mematikan komputer dan peralatan elektronik lain jika akan ditinggal atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, misalnya saat makan siang atau menghadiri rapat atau pulang kantor. Selain itu, sedapat mungkin mematikan lampu-lampu untuk ruangan yang telah cukup mendapatkan penerangan alamiah dari sinar matahari.

6. Pencapaian Udara Bersih dan Udara Sehat

Mengurangi polusi udara dengan cara menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (oktan tinggi) untuk kendaraan operasional kantor, rutin melakukan uji emisi dan perawatan kendaraan operasional.

7. Pengelolaan Limbah

Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, Perusahaan melakukan berbagai upaya, termasuk di antaranya uji emisi dan penggunaan BBM dengan kualitas yang baik bagi kendaraan dinas dan operasional yang lebih ramah lingkungan. Untuk limbah beracun yang didapat dalam operasional sehari-hari, yaitu oli bekas dari kendaraan operasional, Perusahaan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Program Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan.**2. Efficient Use of Paper Materials (Paperless)**

Reducing paper consumption through various measures, including printing on both sides of the page, discontinuing the use of paper for tender opening documents, establishing the practice of distributing documents by e-mail and printing only what is necessary, and repurposing used paper. In addition, paper use efficiency is constantly being improved through information technology assistance to replace paper-based transactions with paperless ones.

3. Operational Vehicle Usage Arrangement

Carry out strict control on the use of fuel oil for office operational vehicles as well as the implementation of regular maintenance of operational vehicles so as to help reduce environmental pollution and save fuel.

4. Electrical Mechanical Maintenance (EM)

To support reducing energy and electricity use, as well as to extend the EM equipment usage period to help reduce environmental pollution due to the impact of EM equipment.

5. Efficient Electricity Energy Consumption

Electricity efficiency is implemented through various methods, namely, turning off computers and other electronic devices when away or unused for a while, such as during the lunch break, attending meetings, or at the end of office hours. In addition, always try to switch off the lamps in rooms with natural sunlight lighting.

6. Achieving Clean Air and Healthy Air

Reducing air pollution by using more eco-friendly (high octane) fuels for office operational vehicles and periodically doing emission tests and operational vehicle renewals.

7. Waste Treatment

To mitigate the impact of environmental pollution, the Company takes various measures, including emission testing and the use of high-quality and eco-friendly gasoline for official and operational vehicles. In addition, the Company delivers toxic waste generated during daily operations, specifically used oil from operational vehicles, to a third party with permission from the Ministry of Environment and Forestry.

8. Environmental Programs Associated with the Company's Operations

Penerapan Inisiatif Bidang Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjaga keselarasan dan keselamatan bumi, Perusahaan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Inisiatif tersebut diwujudkan dalam program sebagai berikut:

1. Komitmen Perusahaan dalam melakukan hemat energi yaitu melalui kebijakan mematikan lampu-lampu di seluruh area kerja yang telah cukup mendapatkan penerangan alamiah dari sinar matahari pada saat istirahat dan waktu pulang kantor;
2. Komitmen Perusahaan dalam pengurangan penggunaan material berbahan plastik yaitu dengan menyediakan dispenser dan gelas berbahan nonplastik di setiap area kerja dan menghentikan penyediaan minuman dalam kemasan plastik.

Sarana Pengaduan terkait Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, Perusahaan membuka segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, khususnya terkait aktivitas yang dilakukan Perusahaan jika ditemukan terkait dengan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Pengaduan bisa disampaikan melalui website Perusahaan, dengan alamat www.ptppa.com.

Pada tahun 2021, Perusahaan tidak menerima laporan pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan; termasuk juga tidak ada denda atas ketidakpatuhan Perusahaan terhadap undang-undang atau peraturan tentang lingkungan.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Hingga tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki operasi yang langsung berdampak terhadap lingkungan, dengan demikian tidak terdapat sertifikasi terkait lingkungan hidup.

Dampak Kuantitatif atas Pengelolaan Aspek Lingkungan Hidup

Dampak kuantitatif di bidang lingkungan hidup ditunjukkan melalui komitmen Perusahaan dalam penyediaan anggaran terkait dengan program lingkungan hidup seperti disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Uraian Description	Satuan Unit	Anggaran Budget	2021	Persentase Pencapaian Achievement Percentage
Investasi (Realisasi Anggaran) Kegiatan terkait Lingkungan Hidup Investment (Budget Realization) Environmental-related Activities	Rp Juta Rp Million	500	244	48%

Implementation of Initiatives in the Environmental Sector

To ensure the earth's harmony and safety, the Company takes an active role in environmental protection. The following programs embody these initiatives:

1. The Company's commitment to energy saving is demonstrated by its policy of turning off lights in all work locations that receive adequate natural light from the sun during breaks and when working hours finish;
2. The Company's commitment to reducing its use of plastic materials by providing dispensers and non-plastic cups in all working areas and discontinuing providing beverages in plastic containers.

Complaint Facility Related to the Environment

As part of its responsibility to the environment, the Company provides a complaint mechanism related to environmental issues, particularly related to the Company's activities, if an issue related to environmental pollution or hazard is found. The complaint may be submitted through the guest book at the Company's website at www.ptppa.com.

In 2021, the Company did not receive any complaints related to environmental issues, including no penalty charged due to the Company being in compliance with environmental laws or regulations.

Environmental Certification

Until 2021, the Company does not have operations that have a direct influence on the environment, and so there is no environmental certification.

Quantitatif Impact on Environmental Aspects of Management

The Company's quantitative impact in the environmental sector is evidenced by its commitment to budget for environmental projects, as detailed in the table below.

Bidang Sosial Kemasyarakatan

SOCIAL SECTOR OF THE COMMUNITY

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



A. ASPEK KETENAGAKERJAAN

Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan telah mencanangkan langkah strategis yang terdapat perumusan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM). Bagi Perusahaan, SDM yang dimiliki bukan sekadar aset, tetapi juga merupakan mitra kerja strategis untuk mencapai tujuan serta visi dan misi Perusahaan.

Perusahaan menjamin tidak terjadi diskriminasi di lingkungan Perusahaan, sehingga tercipta perlakuan yang adil, jujur, dan transparan di kalangan karyawan. Dengan demikian, semua karyawan dapat bekerja dengan baik dan maksimal sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing dalam mewujudkan target usaha Perusahaan.

Perusahaan juga senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan, baik dalam pengembangan kompetensi, penerimaan karyawan, penilaian kinerja, remunerasi maupun jenjang karier, serta menyediakan pemenuhan hak lainnya seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan dan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif di lingkungan Perusahaan.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam tanggung jawab sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pemangku kepentingan yang berdampak ialah karyawan. Karena itu, Perusahaan senantiasa memberikan hak-

A. EMPLOYMENT ASPECTS

Commitments And Policies

The Company has launched a strategic step that includes the formulation of human resource development (HR). Human resources are more than just assets to the Company. They are strategic partners who help the Company reach its goals, vision, and mission.

The Company assures that there is no discrimination within the organization in order to create a culture of fairness, honesty, and transparency among employees. Thus, all workers can work effectively and efficiently in accordance with their particular positions and responsibilities in order to accomplish the Company's business objectives.

Additionally, the Company consistently provides equal opportunity to all employees, both in terms of competency development, employee recruitment, performance appraisal, remuneration, career path, and other rights such as basic salary, benefits, health insurance, and others. This proves that the Company is not a discriminatory employer.

The Stakeholders and the Scope of Impact of Social Responsibility in Employment, Occupational Health, and Safety

Employees are the impacted stakeholders in the Company's social responsibility efforts relating to employment, Occupational Health and Safety (OHS). As a result, the Company always offers basic rights to its employees,

hak dasar guna meningkatkan kesejahteraan karyawan. Perusahaan juga memantau K3 dan memberikan pengembangan kompetensi bagi para karyawan.

Terkait rekrutmen dan promosi karyawan, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia (WNI) untuk dapat bekerja di Perusahaan. Hal itu juga berlaku untuk pengembangan karier bagi SDM Perusahaan.

Sasaran, Rencana dan Target

Perusahaan senantiasa merumuskan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi para karyawan, yang di dalamnya meliputi aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaan kegiatan TJSL bidang ketenagakerjaan dan K3 Perusahaan menerapkan sistem kesetaraan yang sama dalam proses rekrutmen dan juga pengembangan karier karyawan, diharapkan dengan demikian terjadi hubungan industrial yang baik antara Perusahaan dengan karyawannya.

Perusahaan juga merencanakan reviu terhadap ketentuan remunerasi pegawai agar selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kompetitif pada industri yang sama. Rencana kerja ketenagakerjaan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021.

Penerapan Inisiatif Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesetaraan Kesempatan

Dalam pengelolaan SDM, Perusahaan memastikan telah menerapkan prinsip kesetaraan bagi seluruh karyawan Perusahaan, tanpa adanya diskriminasi dan memandang perbedaan *gender*, ras, suku bangsa, dan agama. Seluruh karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kariernya.

Kesempatan Bekerja bagi Masyarakat Lokal

Perusahaan mengundang seluruh putra putri daerah terbaik, berkualitas, memiliki komitmen, integritas, dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung dan tumbuh bersama keluarga besar Perusahaan. Secara umum, kebijakan terkait kesempatan bekerja bagi warga setempat berlaku pada area aset kelolaan dan entitas anak Perusahaan.

Grup Pengelolaan SDM

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-35/PPA/0614 tentang Kebijakan Manajemen Karir Karyawan, Perusahaan telah mengatur kebijakan terkait pengelolaan SDM Perusahaan, di mana Grup Pengelolaan SDM merancang rencana pengembangan SDM Perusahaan yang sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019-2023 serta kebijakan terkait kepegawaian yang sejalan dengan RJPP tersebut.

monitors occupational health and safety, and provides competency development opportunities for its employees.

Regarding employee recruitment and promotion, the Company provides equal employment opportunities to all Indonesian residents (WNI). This also applies to career development for the Company's human capital.

Objectives, Plans, and Targets

The Company continually formulates valuable activities for the employees, including occupational health and safety aspects. In implementing CSR activities in the fields of employment and OHS, the Company applies an equality system in the recruitment process and career development of employees. Equality is expected to result in good industrial relations between the Company and its employees.

The Company also plans a review of employee remuneration provisions to always comply with applicable laws and regulations in the same industry. Employment work plans are outlined in the 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

Implementation of Initiatives in the Field of Employment and Human Capital Development, as well as Occupational Health and Safety

Equality of Opportunity

In human resource management, the Company ensures that equality is applied to all employees without discrimination and consideration of gender, race, ethnic origin, or religion. As a result, all employees have equal career growth possibilities.

Work Opportunities for Local Community

The Company invites the best young local people who have the quality, commitment, integrity, high morale, and willingness to work hard to join and grow with the Company. In general, the policies related to work opportunities for local people apply to the Company's asset management areas and subsidiaries.

Human Capital Division

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. SK-35/PPA/0614 regarding Employee Career Management Policies, the Company has set policies related to the Company's HC management, in which the Human Capital Division designs the Company's HC development plans in line with the 2019–2023 Corporate Long Term Plan (RJPP), as well as policies related to employment in line with the RJPP.

Tugas pokok Grup Pengelolaan SDM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan SDM, dengan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan kepegawaian;
2. Menyusun dan melaksanakan sistem pengembangan dan pembinaan SDM;
3. Memenuhi kebutuhan SDM yang bersumber dari internal dan eksternal Perusahaan;
4. Melaksanakan sosialisasi ketentuan kepegawaian dan komunikasi internal terkait bidang kepegawaian;
5. Melakukan penatausahaan kegiatan dan administrasi kepegawaian; dan
6. Melakukan pembayaran remunerasi dan manfaat (*benefit*) karyawan (termasuk pembayaran dan pelaporan PPh 21, iuran dana pensiun serta program Jaminan Sosial).

Rekrutmen Karyawan dan Tingkat Turnover Karyawan

Selama tahun 2021, Perusahaan melakukan rekrutmen sebanyak 41 orang untuk menjadi bagian dari Perusahaan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 21 orang.

Sementara tingkat perputaran atau *turnover* karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perusahaan. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

The main duty of Human Capital Division is to carry out HC policy preparation, development and management, with functions, as follows:

1. Drafting employment policies;
2. Create and put in place a system for developing and fostering human resources.
3. Meet the Company's HR needs, both from internal and external sources;
4. Carry out socialization related to staffing provisions and internal communication related to employment;
5. Carry out activity and personnel administration; and
6. Paying employee remuneration and benefits (including payment and reporting of PPh 21, pension fund contributions, and Social Security program).

Employee Recruitment and Turn Over

In 2021, the Company hired 41 new employees to be part of the Company. This number has increased from the previous year's figure of 21 employees.

Meanwhile, the employee turnover rate might provide insight into the Company's productivity performance. Additionally, employee turnover reflects the Company's culture and work system, which can serve as a barometer of the Company's effectiveness in generating a suitable work environment.

Tingkat *turnover* dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Turnover Karyawan} = \frac{\text{Jumlah Karyawan Keluar}}{[(\text{Jumlah Karyawan Awal Tahun} + \text{Jumlah Karyawan Akhir Tahun}) \times 1/2]}$$

$$\text{Employee Turnover Rate} = \frac{\text{Number of Employees Leaving}}{[(\text{Number of employees at beginning of the year} + \text{Number of employees at end of the year}) \times 1/2]}$$

Tingkat *turnover* karyawan di tahun 2021 tercatat sebesar 11%, kondisi tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,8%.

The employee turnover rate in 2021 was recorded at 11%, an increase compared to the previous year at 5.8%.

Tingkat Turnover Pegawai Employees Turnover Rate

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020
Karyawan baru New Employee	Orang People	44	21
Karyawan yang memasuki masa pensiun Employees entering retirement	Orang People	7	4
Karyawan yang mengundurkan diri Resigned Employee	Orang People	18	10
Karyawan yang berakhir masa tugas Employees who have ended their term of service	Orang People	23	11
Total total karyawan akhir tahun Number of employees at end of the year	Orang People	166	169
Persentase <i>turnover</i> Turnover percentage	%	11	5,8

Pelatihan dan Pengembangan SDM

Program pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan pemberian motivasi bagi karyawan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di internal maupun eksternal.

Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada tahun 2021 dibagi dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut:

1. **Pelatihan Publik**, adalah pelatihan yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh sumber eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll);
2. **Pelatihan Internal**, adalah pelatihan teknis maupun non teknis yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll);
3. **Sharing Session/Friday Afternoon**, adalah sarana memberikan pengetahuan secara singkat, minimal 1 jam yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dll);
4. **Keanggotaan**, adalah penggantian biaya keanggotaan (*membership*) karyawan pada suatu lembaga yang terkait dengan pekerjaannya;
5. **Karyawan menjadi Narasumber**, adalah di mana karyawan memberikan *sharing* pengetahuan atau berpartisipasi aktif menjadi pembicara/narasumber.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan disampaikan secara lengkap pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Layanan Sumber Daya Manusia

Perusahaan melaksanakan kegiatan layanan SDM yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antar unit kerja serta antara manajemen dengan karyawan tentang kebijakan-kebijakan terkait karyawan. Bentuk layanan tersebut adalah:

1. Sosialisasi dan orientasi kepada karyawan baru;
2. Pengumuman kelahiran anak karyawan, berita duka, karyawan baru, karyawan mutasi/perubahan data kepegawaian dan karyawan berakhir hubungan kerja;
3. Penyampaian informasi kepada karyawan yang akan pensiun;
4. Penyampaian pengumuman pembaharuan pelaporan wajib LHKPN;
5. Penyampaian pengumuman terkait layanan asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan serta pelaporan perpajakan; dan
6. *Leaders Meeting* secara rutin sepekan sekali dengan peserta para *General Manager* untuk saling berbagi informasi termasuk kajian-kajian sebagai masukan kepada Direksi dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Human Capital Training and Development

Education and training programs are part of initiatives to build employee competence and motivation. These activities are carried out internally and externally.

The Company's training and development activities in 2021 are divided into five categories, as follows:

1. **Public training**, refers to employee training that is organized by outside sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.);
2. **Internal training**, which includes both technical and non-technical training for employees and is organized by the Company using both internal and external sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.);
3. **Sharing Session/Friday Afternoon**, is a place that provide brief information, at least 1 hour held by the Company with internal and external sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.);
4. **Membership**, is the reimbursement of membership fees for employees of a work-related institution;
5. **Employees become resource person**, where employees share knowledge or actively participate as speakers or resource person.

The realization of the implementation of education and training activities is presented in full in the chapter "Company Profile" contained in this Annual Report.

Human Capital Services

The Company conducts activities of HC services in order to establish good communication among work units as well as between the management and employees with regard to employee-related policies. These services include:

1. Introducing new employees and orientation for new employees;
2. Announcement of employees' childbirth, obituary, new employees, employee transfer/changes of employment data and the termination of employment;
3. Information distribution to retiring employees;
4. Announcement of the requirement to renew the State Official Wealth Report (LHKPN reporting);
5. Announcement which is related to services of health, life, and accident insurances as well as tax reporting; and
6. *Leaders Meetings* are held on a regular basis, once a week, with participation from General Managers to share information, including input to the Board of Directors and material for consideration in connection with the Company's strategic decision-making.

Penatausahaan Kegiatan dan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan antara lain:

1. Administrasi dan pelaporan absensi dan cuti;
2. Administrasi karyawan baru, karyawan mutasi, karyawan dalam masa percobaan, promosi dan penetapan jabatan karyawan pada satuan kerja, perubahan/perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu serta karyawan yang berakhir hubungan kerja;
3. Administrasi permohonan pinjaman karyawan;
4. Administrasi permohonan surat keterangan bekerja karyawan untuk keperluan imigrasi, pengurusan visa, bank dan lain-lain;
5. Pemberian bunga/bingkisan bagi karyawan yang melahirkan, rawat inap, menikah dan berduka cita;
6. Administrasi permohonan praktik kerja dan penelitian; dan
7. Administrasi kegiatan karyawan berupa kegiatan olahraga dan seni serta kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar agama.

Remunerasi dan Pemenuhan Hak Karyawan

Strategi remunerasi diperlukan guna meningkatkan pengembangan SDM serta meningkatkan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan dimana salah satunya adalah remunerasi berbasis kompetensi. Kompetensi karyawan akan mendukung laju perkembangan Perusahaan, karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam memuluskan langkah bisnis Perusahaan. Kompetensi karyawan ini akan dimulai dari asesmen terkait kinerja karyawan dalam bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem dan strategi remunerasi ini juga dilakukan evaluasi secara berkala guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan kemampuan keuangan Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan struktur kepangkatan dan gaji karyawan yang berlaku, komponen remunerasi karyawan adalah sebagai berikut:

1. Gaji

Gaji karyawan yang diterima secara bulanan akan mengalami peninjauan berdasarkan:

- a. Pertimbangan dampak inflasi yang berpengaruh terhadap nilai riil gaji karyawan (*Cost of Living Adjustment*);
- b. Kinerja karyawan bersangkutan selama bekerja (*merit system*); dan
- c. Besaran kenaikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan Perusahaan.

2. Tunjangan Hari Raya (THR)

Perusahaan memberikan THR sebesar satu kali upah. THR ini dibayarkan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja tiga bulan atau lebih di Perusahaan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Employment Activity and Administration

Employment administration activities includes:

1. Administration and reporting of attendance and leave;
2. Administration of new employees, transferred employees, probationary employees, promotions, and determination employee positions in work unit, changes or extensions of fixed-term employment agreements, and employees terminating employment relations;
3. Administration of employee loan applications through PT PPA Finance;
4. Administration of employee reference letters for immigration, visa, bank, and other purposes;
5. Flowers/gifts for employees who give birth, hospitalized, married, and in mourning;
6. Administration of application for internship and research; and
7. Administration for employee activities, i.e. Sport and Art Activities as well as Religious Activities and Religious Holidays.

Remuneration and Fulfillment of Employee Rights

Remuneration strategies are required to improve Human Capital development and increase the employees' engagement with the Company, one of which is competency-based remuneration. Employee competencies will support the Company's growth rate as each employee will give their best work to pave the way for the Company's business measures. These employee competencies will be based on the performance assessment of employees in carrying out their tasks based on the current rules and regulations.

The system and remuneration strategy will be reviewed on a regular basis to adjust to the market condition and the Company's financial capability. According to the Company regulation, level and salary structure, components of employee remuneration are as follows:

1. Salary

The monthly salary for employees will be reviewed based on the following:

- a. Consideration of inflation rate with the impact on the real value of the employee's salary (*Cost of Living Adjustment*);
- b. Performance of employees during the working period (*merit system*); and
- c. The amount of the increase is adjusted with the Company's financial capability.

2. Religious Holiday Allowance (THR).

The Company provides a religious holiday allowance in the amount of one month's salary. According to applicable employment regulations, the Religious Holiday Allowance is paid to employees who have worked for the Company for three months or more.

3. Tunjangan Cuti Besar

Perusahaan memberikan tunjangan cuti besar kepada karyawan sebesar dua kali upah setelah memiliki masa kerja 6 (enam) tahun berturut-turut dan kelipatannya atau pada tahun ke-7, 13, 19, dan seterusnya. Karyawan yang mendapatkan tunjangan cuti besar tidak berhak lagi atas tunjangan cuti tahunan.

4. Tunjangan Jabatan, Komunikasi, BBM, Pengemudi, dan Utilitas

Tunjangan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan/kepankangan tertentu dalam Perusahaan.

5. Jaminan Sosial

Perusahaan juga memberikan sejumlah jaminan kepada karyawan melalui Jaminan Sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu:

- BPJS Ketenagakerjaan;
- Jaminan Kematian;
- Jaminan Kecelakaan Kerja;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun; dan
- BPJS Kesehatan.

6. Apresiasi/Insentif Kinerja

Perusahaan memberikan apresiasi berupa insentif kinerja kepada karyawan yang didasarkan pada tolok ukur pencapaian RKAP, penilaian kinerja dan masa kerja karyawan.

7. Fasilitas Kesehatan dan Asuransi

Fasilitas ini diberikan Perusahaan kepada karyawan yang terdiri dari fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggungansuran rawat inap, asuransi jiwa, dan kecelakaan kerja.

3. Long Leave Allowance.

The Company provides a long leave allowance for employees in two months' salary after six consecutive years of working period and multiple periods or during the 7th, 13th, 19th, and next to multiple years. Employees who qualify for a long leave allowance no longer get an annual leave allowance.

4. Allowance for position, Communication, Fuel, Driver, and Utilities

These allowances are provided for employees who have certain positions or ranks in the Company.

5. Social Security

The Company also provides a number of benefits to its employees through Social Security in accordance with the applicable rules. These benefits include:

- Social Security for employment (BPJS Employment).
- Life Insurance;
- Occupational Accident Insurance;
- Old-age Saving;
- Pension Benefit; and
- Social health insurance (BPJS Health)

6. Performance Appreciation/Incentive

The Company provides appreciation as a performance incentive to employees based on Company's work plan and budget achievement, performance evaluation, and working period indicators.

7. Health and Insurance Facilities

These facilities are provided for employees and comprise outpatient facilities, inpatient insurance, life insurance, and occupational accident insurance.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang terakreditasi sesuai standar nasional dan internasional. Untuk itu, dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan K3, Perusahaan melengkapi karyawan dengan prosedur dan peralatan kerja yang memadai sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Perusahaan juga menjalankan pelatihan rutin untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari kecelakaan kerja.

Prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja;
- Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan, keselamatan kerja, kesehatan, dan pelestarian lingkungan secara konsisten;
- Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;
- Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lain-lain sesuai ketentuan Perusahaan;

Occupational Health and Safety

The Company is always committed to implementing accredited occupational health and safety standards according to national and international standards. For this reason, in various activities related to OHS, the Company equips employees with adequate work procedures and equipment in accordance with safety and security standards in the workplace. The Company also carries out regular training to create a healthy and accident-free work environment.

The principles of occupational health and safety listed in the Company's Code of Ethics and Behavior are as follows:

- Compliance with all applicable laws and regulations, and/or security and occupational health and safety standards;
- Mastering and understanding the condition of the work environment and consistently implementing security systems, work safety, health, and environmental preservation;
- Prioritizing preventive measures, i.e., those that prevent accidents from occurring;
- Avoiding all behaviors that are harmful to oneself or others, or that impair one's health, such as drinking alcoholic beverages, consuming drugs, etc., in line with the Company's policy;

5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat;
6. Melaksanakan program kepedulian terhadap pelestarian lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan Program Bina Lingkungan Perusahaan.

Pembentukan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Perusahaan menunjuk 4 (empat) karyawan sebagai *emergency contact person* dan 8 (delapan) karyawan yang bertindak sebagai *floor warden*. Tugas dari *emergency contact person* yaitu menangani bencana/darurat di Gedung Kantor PPA atau di lingkungan sekitar gedung PPA pada saat jam kerja. Tugas-tugas *floor warden* antara lain sebagai berikut:

1. Saat keadaan darurat, memandu semua karyawan di lantainya, evakuasi melalui tangga darurat ke tempat aman (*assembly area*);
2. Memberitahukan kepada seluruh karyawan mengenai lokasi jalan keluar/jalur evakuasi;
3. Jika ada perintah evakuasi, menjamin seluruh karyawan meninggalkan gedung dengan menggunakan tangga darurat dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
4. Memastikan tidak ada penghalang apapun pada tangga darurat;
5. Memprioritaskan bantuan kepada wanita hamil, orang lansia, penyandang disabilitas, dan orang yang dalam keadaan sakit.

Pelatihan dan Sosialisasi K3 untuk Karyawan

Perusahaan secara berkala mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pelatihan K3 bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2021, telah diadakan masing-masing 1 (satu) kali sosialisasi dan simulasi bencana serta kebakaran yang diikuti oleh seluruh karyawan sebagai bagian dari pelatihan K3 yang rutin dilakukan oleh Perusahaan bersama dengan pengelola gedung.

Peralatan Perlindungan Pribadi

Penyediaan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai dengan kondisi dan risiko K3 di masing-masing unit usaha. Hal itu telah menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi setiap insan Perusahaan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

Perlindungan Kesehatan Karyawan

Perlindungan karyawan atas kecelakaan kerja diwujudkan dengan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu:

5. Carrying out countermeasure activities in response to accidents in accordance with current standards and procedures, as well as ensuring that the Company always has a disaster recovery plan;
6. Doing the program for environmental preservation and conducting activities to preserve the environment through the Company's environmental development program.

Formation of OHSC (Occupational Health and Safety Committee)

The Company appointed 4 (four) employees as the emergency contact person and 8 (eight) employees who acted as the floor wardens. The task of the emergency contact person is to handle disasters or emergencies in the PPA Office Building and its surrounding environment during working hours. On the other hand, the floor warden's tasks include the following:

1. During an emergency condition, guiding all employees on the designated floor and evacuating all employees via the emergency stairs to a safe area (*assembly area*);
2. Informing all employees of the escape/evacuation routes;
3. If there is an evacuation order, guarantee that all employees leave the building using the emergency stairs and gather at the designated location;
4. Ensuring that there are no obstacles whatsoever on the emergency stairs;
5. Prioritizing the assistance to pregnant women, elderly, people with disabilities, and people who are sick.

OHS Training and Socialization for Employees

Each year, the Company sends employees to the certified OHS training, which is organized by the Ministry of Manpower. Throughout 2021, there has been 1 (one) socialization and simulation of disasters and fires, which was attended by all employees as a part of regular OHS training conducted by the Company in cooperation with the building management.

Personal Protection Equipment

The provision of personal protection equipment is in accordance with the OHS conditions and risks applicable to every business unit. In addition, it has become part of the Company's efforts to ensure a safe work environment for all employees working within the Company's environment.

Employee Health Protection

Protection for employees against work accidents is actualized by enrolling all employees in the program managed by the Social Security Management Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – BPJS), which includes:

1. BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.
2. BPJS Kesehatan, yang mencakup rawat jalan, dan rawat inap. Selain itu, Perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap.

Selain fasilitas BPJS tersebut, Perusahaan juga memberikan fasilitas kesehatan rawat jalan, pertanggungan asuransi rawat inap, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja dari penyedia jasa asuransi lainnya.

Kecelakaan Kerja serta Layanan Medis

Perusahaan telah menetapkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk mencapai kecelakaan nihil pada setiap operasi. Program tersebut mencakup pelatihan, penyuluhan yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja, melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin. Selain itu seluruh karyawan juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up*) secara rutin.

Survei Kepuasan Karyawan

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para karyawan, Perusahaan melakukan survei kepuasan karyawan. Hasil survei tersebut memastikan seberapa baik Perusahaan memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karier, kesejahteraan, serta keamanan, dan keselamatan lingkungan pekerja.

Survei kepuasan karyawan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pada tahun 2021, survei kepuasan karyawan memperoleh nilai sebesar 3,74 (skala 1-5) di atas target tahun 2021 sebesar 3,00.

Hubungan Industrial

Perusahaan membangun hubungan industrial yang berlandaskan pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala sesuatu yang terkait hubungan antara karyawan dan Perusahaan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang diperbarui setiap dua tahun sekali dan dibagikan kepada seluruh karyawan.

Perusahaan melakukan komunikasi dengan karyawan untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan langkah-langkah antara lain:

1. Melibatkan karyawan dalam pembahasan ketentuan Perusahaan;
2. Kebersamaan dalam penanganan dalam penyelesaian permasalahan karyawan;
3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan karyawan seperti ibadah, sosial, dan kegiatan olahraga karyawan.

1. BPJS Employment, covering Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), Old-Age Insurance (JHT), and Retirement Insurance.
2. BPJS Health, covering outpatient and inpatient facilities, In addition, the Company also enrolls its employees who have been registered as permanent employees in financial institution pension funds (DPLK).

In addition to BPJS facilities, the Company also provides outpatient facility and inpatient insurance, life insurance, and work accident insurance from other insurance service companies.

Work Accident and Medical Service

The Company has stipulated the occupational health and safety program to achieve zero accidents in every operation. The program includes continuous training, counselling, provision of occupational safety facilities and infrastructures, and periodic monitoring and inspection. In addition, all employees are also provided with routine medical check-ups.

Employee Satisfaction Survey

To ensure the fulfillment of employees' requirements and main expectations, the Company performs an employee satisfaction survey. The survey result ensures how well the Company fulfills its employees' requirements and expectations for career development, welfare, as well as occupational health and safety.

Employee satisfaction survey is carried out once a year. In 2021, the employee satisfaction survey achieved a score of 3.74 (scale of 1–5), above the 2021 target of 3.00.

Industrial Relations

The Company builds industrial relations based on prevailing employment regulations. Every issue related to employee and Company relations is regulated as disclosed in the Company Regulation that is updated every two years and distributed to all employees.

The Company communicates with employees to improve industrial relations by taking the following steps:

1. Involving employees in discussing the Company regulations;
2. Cooperation in resolving employee issues;
3. Implementing employee activities such as religious, social, and sports activities.

Perusahaan terhadap dengan terjalin antara Perusahaan dan karyawan maka diharapkan terjalin sinergi kinerja yang optimal sehingga akan memudahkan dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Pada tahun 2021 tidak tercatat adanya pelanggaran dalam hak kebebasan berserikat di Perusahaan.

Serikat Pekerja

Perusahaan memberikan kebebasan secara penuh kepada karyawan untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Hingga akhir tahun 2021 karyawan Perusahaan belum membentuk Serikat Pekerja.

Mekanisme Pengaduan Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan, apabila terjadi ketidakpuasan dari karyawan atas hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsung minimal dengan jabatan Kepala Grup. Apabila belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada atasannya yang lebih tinggi sampai dengan tingkat Direktur. Apabila masih belum dapat diselesaikan, diteruskan kepada Direktur yang membawahi Bidang Sumber Daya Manusia dan apabila ketidakpuasan tersebut berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan maka akan diserahkan kepada keputusan Direksi.

Apabila secara internal hal tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka akan ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup operasional, Perusahaan juga senantiasa mengacu terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun instansi terkait lainnya.

Pada tahun 2021, tidak tercatat adanya pengaduan terkait permasalahan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja di lingkup Perusahaan.

Biaya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Terhadap pengelolaan Ketenagakerjaan (dalam bentuk pengembangan kompetensi SDM), pada tahun 2021 Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp1.365 juta atau sebesar 17,01% dari target tahun 2021 sebesar Rp8.020 juta.

The Company recognizes that its relationship with its employees is anticipated to foster optimal performance synergies, hence facilitating the achievement of the Company's objectives. In 2021, the Company had no documented violations of the right to association in the Company.

Workers Union

The Company provides employees with the full freedom to organize and create trade unions in accordance with existing rules. Until the end of 2021, no Labor Union was organized by the Company's employees.

The Complaint Mechanism Related to Employment, Occupational Health, and Safety

As stated in the Company's Regulations, if an employee is not satisfied with their employment relationship or working conditions, the matter will be resolved through discussion with their direct supervisor, at the very least the position of Group Head. If the issue cannot be handled, it will be escalated to a higher supervisor, up to the director level. If it remains unresolved, it will be referred to the Director in charge of Human Resources, and if the dissatisfaction has an adverse effect on the Company's overall performance, it will be referred to the Board of Directors for decision.

If the Company is not capable of settling the complaint or issue internally, then the decision shall be made based on the prevailing laws and regulations.

In overcoming various operational issues, the Company always refers to the laws and regulations of the government, the Ministry of Manpower and Transmigration, and other related institutions.

In 2021, there were no complaints regarding employment, occupational health, and safety issues within the Company.

The Cost of Corporate Social Responsibility Activities in the Employment, Occupational Health, and Safety Sectors

For the management of employment (in the form of HR competency development), the Company incurred expenses of Rp1,365 million, or 17.01% of the 2021 target of Rp8,020 million.

B. ASPEK KEMASYARAKATAN

Komitmen dan Kebijakan

Dalam pelaksanaan TJSL terkait dengan aspek kemasyarakatan, Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara, terutama pasal 2 dan 88 yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1) huruf e
 - Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
 - b. Pasal 88 ayat (1)
 - BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Pada Bab V Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, di mana Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Selain itu dasar kegiatan CSR Perusahaan tahun 2021 dilakukan dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN-09") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-03/MBU/12/2016 ("PERMEN-03") dan Peraturan Menteri BUMN No. PERMEN-02/MBU/7/2017 ("PERMEN-02").

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam rangka menjaga keselarasan antara tujuan dari kegiatan usaha Perusahaan dengan pemangku kepentingan terutama masyarakat, Perusahaan turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Hingga tahun 2021 partisipasi aktif tanggung jawab Perusahaan terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel Realisasi Program Pembangunan Sosial di halaman 7 Bab TJSL ini.

B. ASPECTS OF COMMUNITY

Commitment And Policy

In implementing CSR related to social aspects, the Company refers to the provisions of various applicable laws and regulations, including others:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise, particularly Article 2 and 88, which state the following:
 - a. Article 2 paragraph (1) letter e
 - Article 2: One of the purposes and objectives of SOEs' establishment is to actively provide guidelines and assistance to marginal economy entrepreneurs, cooperatives, and society.
 - b. Article 88 paragraph (1)
 - SOEs may allocate part of their net income for small enterprise or cooperative development as well as community development in the SOE's neighbourhood.
2. Chapter V, Article 74, Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies ("UUPT") that regulates Social and Environmental Responsibility where the Company that conducts business activities in a sector and/or related to natural resources shall carry out Social and Environmental Responsibility.
3. Furthermore, the basis for the company's CSR activities in 2020 was carried out by continuing to refer to the Minister of SOE Regulation No. PERMEN-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises ("PERMEN-09"), as amended by Minister of SOE Regulation No. PERMEN-03/MBU/12/2016 ("PERMEN-03") and Minister of SOE Regulation No. PERMEN-02/MBU/7/2016 ("PERMEN-02/MBU/7/2016").

Stakeholders and Formulation of the Scope of Social Responsibility Related to Social Community Development

In order to ensure alignment between the objectives of the Company's business activities and stakeholders, especially the community, the Company actively participates in carrying out social responsibility. Until 2021, the active participation of the Company's responsibilities in community social development can be seen in the table of Realization of Social Development Programs on page 7 of this TJSL Chapter.

Penerapan Inisiatif pada Aspek Pengembangan Sosial

Program PUMK

Program Kemitraan merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil melalui penyaluran dana bergulir dalam bentuk pinjaman kepada usaha kecil dengan bunga yang rendah. Dengan dana pinjaman tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) untuk membantu menyalurkan dana PUMK langsung kepada Mitra Binaan melalui Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Kerja sama ini dimaksudkan agar penyaluran dana Program UMK dapat tersebar di seluruh Indonesia dengan target tepat sasaran.

Selama tahun 2021, Perusahaan telah menyalurkan dana pinjaman ke berbagai provinsi di Indonesia sebesar Rp7 miliar. Sebanyak 197 Mitra Binaan baru tergabung dalam Program Kemitraan dengan jenis usaha perdagangan, jasa, industri, pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Selain memberikan pinjaman, Program UMK juga melakukan pembinaan terhadap Mitra Binaan melalui pendidikan/pelatihan serta pemasaran/promosi. Tujuan dari pembinaan tersebut agar Mitra Binaan bukan hanya mendapatkan pinjaman namun nilai tambah bagi sumber daya manusianya.

Saldo Outstanding Piutang Program UMK The Outstanding Receivables Balance MSEs Program

Keterangan Description	Per 31 Desember 2021 (Rp) As of December 31, 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp) As of December 31, 2020 (Rp)
Outstanding Piutang Outstanding Receivables	18.500.610.878	18.729

Untuk meningkatkan kualitas piutang, Perusahaan juga memantau pembayaran angsuran masing-masing Mitra Binaan. Selama tahun 2021, Mitra Binaan tertib dan tepat waktu dalam pengembalian pinjaman dengan tingkat kolektibilitas lancar. Hal ini terbukti dari rasio tingkat kolektibilitas mencapai 98,56% dengan 197 Mitra Binaan.

Tingkat Kolektibilitas 5 Tahun Terakhir Collectability Rate in the Last 5 Years

Tahun Year	Kolektibilitas Collectability
2017	99,74%
2018	97,15%
2019	87,99%
2020	99,81%
2021	98,56%

Implementation of Initiatives on Social Development Aspects

MSEs financing (PUMK) Program

The Partnership Program is an activity in order to improve the welfare of small communities through the distribution of revolving funds in the form of loans to small enterprises with low-interest rates. These loan funds are expected to increase the ability of small enterprises to be more resilient and independent.

In its implementation, the Company collaborates with PT Bahana Artha Ventura (BAV) to assist in channelling MSE Program funds directly to the fostered partners through Regional Venture Capital Companies (PMVD). This collaboration ensures that MSE Program funds are distributed effectively throughout Indonesia.

Throughout 2021, the Company has disbursed loan funds to several provinces in Indonesia for Rp7 billion. In addition, 197 new Foster Partners joined the Partnership Program, representing a variety of economic sectors, including trade, services, industry, agriculture, plantations, and livestock.

Along with lending money, the MSE Program also coaches its foster partners through education, training, and marketing/promotion. The purpose of the coaching is to ensure that Fostered Partners not only obtain loans, but also add value to their human capital.

To improve the quality of receivables, the Company also monitors the instalment payments of each fostered partner. As a result, in 2021, Fostered Partners were orderly and timely in repaying loans, with a "current" collectability rate. This is evident from the collectability ratio of 98.56% with 197 fostered partners.

Kinerja Program TJSL BUMN untuk Program CSV dan Program Unggulan

Sejak tahun 2019, sumber dana kegiatan TJSL selain Program Pendanaan UMK, dicatatkan sebagai beban Perusahaan (dibiayakan). Dengan demikian, pencatatan pada laporan keuangan kegiatan tersebut menjadi satu pada laporan keuangan Perusahaan.

Gambaran kinerja program TJSL BUMN untuk program *Creating Shared Value* (CSV) dan program unggulan adalah sebagai berikut:

Performance of the State-owned Enterprises' CSR Programs for CSV and Featured Programs

Since 2019, the source of funds for CSR activities other than the MSE Funding Program has been recorded as a company expense (financed). Thus, the recordings in the financial statements of these activities are integrated into the Company's financial statements.

The performance overview of the SOEs' CSR Program for the *Creating Shared Value* (CSV) program and the featured program is as follows:

Kinerja Program TJSL BUMN untuk Program CSV dan Program Unggulan Performance of the SOEs' CSER Programs for CSV and Featured Programs

No	Program	Anggaran 2021 (Rp) 2021 Budget (Rp)	Realisasi 2021 (Rp) 2021 Realization (Rp)	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan The Value of CSV for the Company
1	Program Dukungan Pendidikan dan Kesehatan untuk Tenaga <i>Supporting</i> PPA Education and Health Support Programs for PPA Supporting Personnel	284.500.000	284.500.000	Pemberian Bantuan kepada Tenaga <i>Supporting (Outsourcing)</i> berdampak signifikan untuk kesejahteraan keluarganya, dan menambah motivasi kerja. Providing assistance to Supporting Personnel (Outsourcing) has a significant impact on the welfare of their families, and increases work motivation.
2	Program Dukungan Kesehatan untuk Tenaga <i>Supporting</i> PPA Health Support Program for PPA Supporting Personnel	28.000.000	28.000.000	Pemberian Bantuan kepada Tenaga <i>Supporting (Outsourcing)</i> berdampak signifikan untuk kesejahteraan keluarganya, dan menambah motivasi kerja. Providing assistance to Supporting Personnel (Outsourcing) has a significant impact on the welfare of their families, and increases work motivation.

Program Unggulan Featured Programs

No.	Program Unggulan Featured Programs	RKA 2021 (Rp) 2021 Work Plan and Budget (RKA) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp) 2021 Realization (Rp)
1	Program Pembiayaan UMK MSEs Financing Program	7.260.000.000	7.000.000.000
2	Program Beasiswa S1 di 34 PTN Undergraduate Scholarship Program at 34 Public Universities (PTN)	150.600.000	150.600.000
3	Program Bantuan Kaca Mata Koreksi Correction Glasses Assistance Program	250.000.000	250.000.000
4	Program Pemberdayaan IBK IBK Empowerment Program	200.000.000	200.000.000

C. ASPEK PRODUK DAN KONSUMEN

Komitmen dan Kebijakan

Sebagai Perusahaan yang mengelola aset negara yang berasal dari BPPN, R/R BUMN, kegiatan investasi, dan kegiatan pengelolaan aset lainnya, PPA turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan program pembangunan nasional pada umumnya. Pelanggan dari Perusahaan ialah BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya, yang memiliki tugas untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan memastikan bahwa mekanisme dan prosedur pemberian layanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada aspek pemasok, Perusahaan melaksanakan proses pengadaan mengacu pada pedoman sistem *procurement* yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan No. SK-71/PPA/1119 tanggal 4 November 2019 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien

Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

b. Efektif

Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. Kompetitif

Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa yang berminat;

e. Adil

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apa pun;

f. Akuntabel

Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

C. PRODUCT AND CONSUMER ASPECTS

Commitment And Policy

As a company engaged in business activity, including ex-IBRA state assets management, SOE revitalization/restructuring, investment activity, and other asset management activities, the Company aims to implement and support the government's policies and programs in the economic sector and national development program generally. The Company's customers are state-owned enterprises (SOEs), regional-owned enterprises (ROEs), and other private enterprises, ensuring the quality of service to the customers. Therefore, the Company guarantees that service delivery mechanisms and procedures are in accordance with the prevailing laws and regulations.

On the supplier aspect, the Company implements a procurement process referred to in the procurement system guidelines set by the Board of Directors through Decree No. SK-71/PPA/1119 on November 4, 2019, regarding Goods and Services Procurement Policy. In the process of procuring goods and services, the Company applies the following principles:

a. Efficient

Procurement of goods and/or services must strive to get the optimal and best results in the shortest amount of time possible while spending funds fairly and not solely on the basis of the lowest price;

b. Effective

Procurement of goods and/or services must be in accordance with the needs that have been determined and capable of providing the maximum benefit consistent with the target set;

c. Competitive

The procurement of goods and/or services must be open to providers of goods and/or services that fulfill the requirements and must be conducted in a fair and transparent manner among suppliers of goods and/or services that are equal and meet specified conditions/criteria;

d. Transparent

All provisions and information pertaining to the procurement of goods and/or services, including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, and the determination of prospective providers of goods and/or services, are open to interested participants in the provision of goods and/or services;

e. Fair

Provide equal treatment for all prospective providers of goods and/or services that meet the requirements and do not lead to providing benefits to certain parties in any way and/or reason;

f. Accountable

It must achieve targets and be accounted for so as to keep away from potential misuse and deviation.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial terkait Tanggung Jawab kepada Konsumen dan Mitra Kerja

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak pada aspek ini adalah konsumen dan pemasok. Perusahaan berupaya memenuhi tanggung jawabnya terkait mutu kualitas produk/jasa.

Konsumen dan pemasok memiliki hak-hak yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Di samping kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, komitmen PPA atas tanggung jawab terhadap konsumen dan pemasok merupakan bagian dari perwujudan pertumbuhan yang berkelanjutan

Sasaran, Rencana, dan Target

Dalam menetapkan rencana kegiatan sebagai upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyelesaikan pengaduan pelanggan dan melaksanakan survei kepuasan pelanggan yang ditargetkan selalu mengalami peningkatan.

Sementara dari segi pemasok, Perusahaan menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip "Efisien, Efektif, Kompetitif, Transparan, Adil, dan Akuntabel." Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pemasok yang terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Penerapan Inisiatif pada Aspek Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Konsumen dan Pemasok

Pemenuhan Hak-hak Konsumen

Realisasi kegiatan TJSL terkait dengan pelanggan dilaksanakan melalui penyediaan sarana komunikasi dengan pelanggan yang dilakukan melalui memanfaatkan berbagai media. Selain itu, Perusahaan menyediakan *contact person* yang diperlukan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan.

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak pernah menerima sanksi denda atau sanksi hukum yang terkait dengan peraturan pengadaan jasa maupun informasi atau komunikasi pemasaran. Di samping itu, sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap konsumen, Perusahaan melakukan usaha-usaha pemenuhan hak-hak pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja jasa, antara lain dengan:

1. Memberikan pelayanan dengan kualitas prima dan bermutu;
2. Memberikan solusi inovatif dan bertanggung jawab kepada pelanggan;
3. Menyediakan informasi yang akurat;
4. Menjalin hubungan kerja yang wajar;
5. Meminimalkan risiko penggunaan jasa Perusahaan.

Stakeholders and the Scope of Social Responsibility Formulation in Relation to Consumer and Partner Responsibilities

Stakeholders impacted by the responsibility in this aspect are consumers and suppliers. The Company seeks to fulfill its responsibilities related to product or service quality.

Consumers and suppliers have rights that are regulated by laws and regulations. Therefore, besides complying with the prevailing laws and regulations, PPA's commitment to its responsibility to consumers and suppliers is part of the sustainable growth realization.

Objectives, Plans, and Targets

The activity plan was determined as an effort to increase customer satisfaction by resolving customer complaints and conducting customer satisfaction surveys, which were always targeted to increase.

Meanwhile, in terms of suppliers, the Company intends for the entire procurement process of goods and services to adhere to the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, and accountability. These principles are expected to ensure that supplier satisfaction levels are appropriately maintained and impact the Company's overall performance.

The Initiatives Implementation in Responsibility Aspect Towards Products/Services, Consumers, and Suppliers

Fulfillment of Consumer Rights

The realization of CSR activity for customers is carried out by providing a communication channel for the customers using various media. In addition, the Company also provides a contact person to be in charge of direct communication with customers.

Throughout 2021, the Company has never received any penalty or legal punishment for service procurement and information or marketing communication regulations. Moreover, as a form of the Company's responsibility to customers, the Company has fulfilled customers' rights to obtain information about service performance, including through:

1. Providing excellent service and quality;
2. Providing innovative solutions and being accountable to customers;
3. Providing accurate information;
4. Encouraging fair working relationship;
5. Minimizing the risks of the Company's service use.

Membangun Hubungan dengan Pemasok

Kegiatan TJSL terkait dengan pemasok, di antaranya dilakukan melalui sejumlah kegiatan, yaitu:

1. Seluruh kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Pengadaan barang dan/atau jasa, seluruhnya dilakukan melalui media elektronik (*e-procurement*);
3. *E-Procurement* menggunakan metode *e-Bidding* meliputi pemilihan langsung, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas;
4. Melaksanakan survei kepuasan pemasok yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pemasok dalam bekerja sama dengan Perusahaan.

Tingkat kepuasan pemasok tahun 2021 untuk pengadaan barang sebesar 9,46 (skala 1-10) sedangkan untuk pengadaan jasa sebesar 9,01 (skala 1-10) yang menunjukkan bahwa kerja sama antara Perusahaan dengan pemasok telah berjalan dengan baik dan lancar.

Sarana Pengaduan terkait Tanggung Jawab kepada Konsumen dan Mitra Kerja

Untuk menginformasikan layanan secara lengkap serta menerima pengaduan dari konsumen, Perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan *website* Perusahaan, yaitu www.ptppa.com, di mana seluruh informasi layanan Perusahaan terus diperbaharui secara rutin.
2. Publikasi mengenai layanan Perusahaan di berbagai media.
3. Perusahaan juga menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan, yaitu melalui alamat pengaduan ke kantor:

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Gedung Menara Mandiri II

Lantai 7 - 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Telepon : +62 21 5798 2222

Faksmili : +62 21 577 2443

E-mail: corpsec@ptppa.com

Pada tahun 2021 tidak terdapat adanya pengaduan dari konsumen atau mitra kerja yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

Building Relationship with Suppliers

CSR activities related to suppliers, among others, are carried out through a number of activities, including:

1. All of goods and/or services procurement activities are conducted based on Goods and Services Procurement Policy.
2. Goods and/or services procurements are entirely conducted via electronic media (*e-Procurement*).
3. *E-Procurement* applies the *e-Bidding* method, including direct appointment, general tender, and limited tender.
4. Carrying out the supplier satisfaction survey with the aim of evaluating the supplier's level of satisfaction in cooperating with the Company.

In 2021, the supplier satisfaction level for goods procurement was 9.46 (scale 1-10), while for services procurement, it was 9.01 (scale 1-10), which shows the cooperation between the Company and suppliers has been going well and smoothly.

Complaints Facility Related to Responsibilities to Consumers and Work Partners

To inform the services completely and to receive complaints from customers, the Company carries out the following activities:

1. The development of a website, www.ptppa.com, where all of the Company's service information is updated regularly;
2. The publication of the Company's services in various media;
3. The Company also provides a channel to submit complaints addressed to the Corporate Secretary through customer care to the office address:

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Menara Mandiri II Building

7th – 9th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

Phone : +62 21 5798 2222

Fax. : +62 21 577 2443

E-mail: corpsec@ptppa.com

In 2021, there were no complaints from consumers or business partners that had a significant effect on the Company.

Penghargaan dan Sertifikasi

Award and Certification

Penghargaan Awards

No.	Nama Penghargaan Award Title	Event	Pemberi Penghargaan Awarded By:
1	Peringkat ke-1 Kategori Pilar Ekonomi	TJSL & CSR AWARDS 2021	BUMN Track
	First place in the Economic Pillars Category	CSER & CSR AWARDS 2021	SOEs Track
2	BUMN Klasifikasi "Cukup Informatif"	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2021	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
	SOEs Classification "Quite Informative"	2021 Public Information Transparency Award	Central Information Commission of the Republic of Indonesia
3	TJSL 2021 Terbaik dengan Program Pelatihan Kewirausahaan Komunitas	Indonesia TJSL AWARDS 2021	Warta Ekonomi
	The Best TJSL 2021 Training Program for Community Entrepreneurship	Indonesia TJSL AWARDS 2021	Warta Ekonomi
4	The IFN Restructuring Deal of The Year 2021	IFN Deals of The Year 2021	Islamic Finance News
	The IFN Restructuring Deal of The Year 2021	IFN Deals of The Year 2021	Islamic Finance News
5	The IFN Indonesia Deal of The Year 2021	IFN Deals of The Year 2021	Islamic Finance News
	The IFN Indonesia Deal of The Year 2021	IFN Deals of The Year 2021	Islamic Finance News

Sertifikasi Certification

Nama Sertifikasi Certification Name	Pemberi Sertifikasi Certification awarded by	Tanggal Penerimaan Date of Receipt	Masa Berlaku Terms of validity
Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	TUV NORD Indonesia	10 Agustus 2020	9 Agustus 2023
ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System Certification	TUV NORD Indonesia	August 10, 2020	August 9, 2023

Bidang Hak Asasi Manusia

HUMAN RIGHTS SECTOR

Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan



Komitmen dan Kebijakan

Salam melaksanakan kegiatan usaha, Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Perusahaan meyakini bahwa HAM merupakan hak dasar dari seorang manusia, yang antara lain meliputi hak sosial, hukum, dan ekonomi.

Sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosial terkait HAM, Perusahaan menjadikan HAM sebagai panduan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, keberadaan Perusahaan diharapkan dapat tumbuh berkelanjutan dan Perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, mudah memperoleh akses terhadap modal, mampu mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis, mempermudah pengelolaan manajemen risiko serta terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar Perusahaan.

Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat yang ingin bergabung dengan Perusahaan tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal perekrutan calon karyawan.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial terkait HAM

Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan dan norma HAM pada setiap kegiatan operasional. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM di Perusahaan ialah penegakkan

Commitment and Policy

In carrying out business activities, the Company always upholds Human Rights (HAM). The Company believes that human rights are the basic rights of a human being, including social, legal, and economic rights.

As a form of corporate social responsibility related to human rights, the Company uses human rights as a guideline for sustainability principles. Thus, the company's existence is expected to grow sustainably, and the Company will obtain a positive image from the broader community, easy capital access, the capability to maintain high-quality human resources, improve decision-making on critical issues, simplify risk management and labor absorption, and contribute to the social and economic quality of the community around the Company.

The Company also provides equal opportunities for all communities who wish to join the Company regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including recruiting the prospective employees.

Stakeholders and the Scope of Social Responsibility Formulation Related to Human Rights

The Company always upholds the values in the provisions and norms of human rights in every operational activity. The scope of social responsibility related to the Company's human rights includes upholding the principle of diversity

prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.

Sasaran, Rencana, dan Target Kegiatan

Perusahaan menekankan pentingnya hak-hak karyawan khususnya yang berkaitan dengan HAM, seperti mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak-hak dasar hidup lainnya seperti kelahiran.

Secara internal, Perusahaan telah memiliki prosedur tetap yang mengatur pemenuhan HAM bagi karyawan Perusahaan, di mana prosedur tersebut senantiasa dievaluasi dan dikembangkan yang selaras dengan kebutuhan hidup yang semakin berkembang.

Penerapan Inisiatif Hak Asasi Manusia

Perusahaan berkomitmen untuk memberi perhatian yang tinggi atas HAM yang berlandaskan pada kebijakan internasional yakni *Universal Declaration of Human Rights*, termasuk juga kovenan internasional pada hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan kultural serta Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dasar dan hak-hak dalam bekerja, dengan penerapan dan pengelolaan yang baik terhadap praktik ketenagakerjaan serta hak asasi manusia sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa implementasi dalam tanggung jawab sosial yang terkait aspek HAM antara lain:

1. Sebagai penerapan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama baik pria maupun wanita untuk bergabung bersama Perusahaan;
2. Selama tahun 2021 tidak terjadi insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan Perusahaan. Hal ini merupakan bukti penerapan Perusahaan terhadap Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sekaligus mematuhi konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
3. Pegawai tidak tetap, hak-haknya dilindungi berdasarkan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kebijakan Peraturan Perusahaan.

Kesetaraan peluang dalam bekerja di Perusahaan merupakan bagian dari penerapan prinsip hak asasi manusia di tempat kerja. Hak semua orang yang bekerja dengan Perusahaan dihargai sebagaimana mestinya. Kondisi ini diperlukan agar bisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sekaligus terpenuhinya hak-hak asasi manusia.

and equality for all employees, freedom of association, implementation of a remuneration system and employee welfare, commitment to the Collective Labor Agreement (PKB), and other related matters.

Objectives, Plans, and Targets of Activities

The Company emphasizes the importance of employee's rights, especially those related to human rights such as decent living, the right to association and assembly, as well as other life basic rights such as birth.

Internally, the Company has a fixed procedure that regulates the fulfillment of human rights for the Company's employees, in which the procedure is constantly evaluated and developed in line with the growing needs of life.

Implementation of Initiatives in Human Rights

The Company is very concerned about human rights that are based on the Universal Declaration of Human Rights, as well as the international covenant on civil rights, political, economic, social, and cultural rights, as well as the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. The law that governs labor and human rights is called Law No. 13 of 2003 on Manpower.

Some implementations of social responsibility related to human rights aspects include:

1. Implementation of the principle of equality and human rights, the Company provides equal opportunities for both males and females to join the Company.
2. There were no incidents of violations or complaints related to freedom of association in the Company throughout 2021. This is evidence of the Company's applying Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions or Labor Unions while complying with the International Labor Organization (ILO) convention on Freedom of Association and Protection of the Right to Assembly.
3. Non-permanent employees have their rights protected by Specific Time Work Agreement contract that complies with applicable laws and regulations as well as Company Regulation policies.

Equal opportunity in the workplace is a component of the Company's adoption of human rights concepts. All employees' rights are appropriately respected. This condition is necessary to ensure the correct growth and development of the business as well as the fulfillment of human rights.

Kesetaraan di tempat kerja diwujudkan melalui keberagaman dan inklusi untuk semua orang, dengan menghormati dan menghargai ragam perbedaan termasuk suku, gender, usia, asal bangsa, orientasi seksual, pendidikan, dan agama. Sebaliknya, inklusi keberagaman di tempat kerja memberikan bermacam-macam perspektif, pengalaman kerja, gaya hidup dan budaya. Bagi Perusahaan, keberagaman dalam organisasi diperlukan untuk berkembang, keberagaman pikiran dan hati maupun bakat merupakan modal untuk membuka peluang bisnis.

Dampak dan Pencapaian Inisiatif Tanggung Jawab Sosial terkait HAM

Penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait hak asasi manusia sebagian besar menitikberatkan pada isu ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan tidak mendapatkan atau menerima pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia antara lain pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran HAM maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkup Perusahaan serta insiden kerja paksa yang dialami karyawan.

Hal ini dipengaruhi oleh upaya penerapan dan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang telah dijalankan dengan baik oleh seluruh Insan Perusahaan.

Penerapan aspek HAM dalam program tanggung jawab sosial kepada karyawan telah memberikan sejumlah manfaat di antaranya terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman sehingga meningkatkan loyalitas karyawan dan membentuk citra positif Perusahaan.

Equality in the workplace is realized through diversity and inclusion for all by respecting and valuing diversity, including ethnicity, gender, age, national origin, sexual orientation, education, and religion. On the other hand, the inclusion of diversity in the workplace provides a variety of perspectives, work experiences, lifestyles, and cultures. For the Company, diversity in the organization is needed to develop a diversity of mind and heart, as well as talent, which is capital to open up business opportunities.

Impacts and Achievements of Social Responsibility Initiatives Related to Human Rights

Corporate social responsibility in relation to human rights has primarily concentrated on workforce issues. Throughout 2021, the Company received no complaints related to human rights violations such as discrimination, human rights violation incidents, or complaints related to freedom of association within the Company and incidents of forced labor experienced by employees.

This is impacted by the Company's attempts to implement and monitor labor practices that are adhered to by all employees.

The implementation of human rights aspects in the Company's social responsibility program for employees has resulted in a variety of benefits, including the creation of a conducive, safe, and comfortable work environment that enhances employee loyalty and promotes the Company's positive image.

Bidang Operasi yang Adil

HUMAN RIGHTS SECTOR



Komitmen dan Kebijakan

Merujuk kepada ISO 26000, program tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil meliputi anti korupsi, keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*) dan penghargaan atas *property rights*. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi Perusahaan harus bersifat menyeluruh dari hulu sampai hilir. Kegiatan TJSL tidak hanya mencakup kegiatan di luar operasional Perusahaan melainkan juga terkait kegiatan operasi Perusahaan.

Pemangku Kepentingan dan Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial terkait Operasi yang Adil

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel;
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap prosedur tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan;
4. Konsumen dengan kepentingan atas mutu produk dan layanan;
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

Commitment And Policy

Referring to ISO 26000, social responsibility programs related to fair operating practices include anti-corruption, responsible political involvement, fair competition, promotion of social responsibility in the supply chain, and respect for property rights. The implementation of social responsibility for the Company must be comprehensive from upstream to downstream. CSER activities include not only activities outside the Company's operations but also those related to the Company's operations.

Stakeholders and the Scope of Social Responsibility Formulation Related to Fair Operations

Fair operations mainly emphasize the importance of transparent, fair, and equal management of a company. Fulfilling the fair operations aspect involves various stakeholders' interests, including:

1. Shareholders and their interests in a transparent and accountable company management.
2. Employees with their interest in the Permanent Procedures that are reasonable, fair, and accountable work mechanisms.
3. Business partners and suppliers and their interest in the partnership process that relies on transparency and fairness.
4. Consumers with an interest in the quality of products and services;
5. Regulators who have an interest in a stable industry.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan beserta organ internal Perusahaan yakni Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan, yang juga sesuai dengan komitmen Perusahaan untuk terus melawan korupsi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan Inisiatif Operasi yang Adil

Komitmen Anti Korupsi dan Anti Fraud

Komitmen Perusahaan untuk terus mendukung dan berpartisipasi pada upaya dalam pembarantasan korupsi di Indonesia merupakan bentuk implementasi Perusahaan pada penerapan GCG di lingkup internal dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga, segala bentuk pelanggaran atas integritas, etika, dan perilaku tidak pantas khususnya terkait *fraud* dan korupsi merupakan pelanggaran berat bagi Perusahaan.

Sebagai bentuk nyata dalam komitmen Perusahaan untuk menegakkan peraturan tersebut, Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Perilaku dan Etika serta Peraturan Perusahaan. Seluruh karyawan Perusahaan harus memiliki komitmen untuk mematuhi dan mengikuti pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas. Dalam pedoman tersebut juga diatur tentang sanksi yang tegas dan tanpa kompromi kepada siapa saja jika terdapat indikasi korupsi, penipuan, atau pelanggaran perilaku lainnya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan antikorupsi dan penyalahgunaan wewenang, Perusahaan menjalankan 2 (dua) inisiatif utama, yakni implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian internal, serta implementasi kebijakan penindakan. Kebijakan pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal. Sementara implementasi kebijakan penindakan dilakukan melalui Sistem *Whistleblowing* yang pada dasarnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan telah menetapkan *whistleblowing system* untuk mengumpulkan informasi pelanggaran, terutama yang menyangkut hukum dan peraturan, serta untuk menangani tindakan kesalahan melalui sistem perbaikan diri. *Whistleblowing* adalah mekanisme pelaporan internal untuk mencegah dan menghindarkan terjadinya pelanggaran atau *fraud*.

In carrying out its business activities, the Company and its internal organs, i.e., the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees, always uphold fair competition, the values of sportsmanship and professionalism, as well as the principles of good corporate governance (GCG).

In addition, the Company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions, behaviors, or actions that can lead to conflicts of interest, corruption, collusion, and nepotism (KKN), and always prioritizing the interests of the Company above personal, family, group, or class interests. This is also in line with the Company's commitment to continue fighting corruption, as stated in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 Concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Implementation of Initiatives in Fair Operations

Anti Corruption and Fraud Commitment

The Company's commitment to continue to support and participate in efforts to eradicate corruption in Indonesia is a form of GCG implementation in the Company's internal scope in carrying out its business activities. As a result, any violation of integrity, ethics, or inappropriate behavior, particularly when it comes to fraud and corruption, is a serious violation for the Company.

A concrete form of the Company's commitment to enforcing these regulations is that the Company has an anti-corruption policy as declared in the Code of Conduct and Company Regulations. All company employees must follow and comply with the code of conduct while performing their duties. In addition, to strengthen the preventive initiative, the Company has implemented strict sanctions and zero tolerance for any case of corruption, fraud, or other illegal behavior.

To ensure the implementation of anti-corruption and abuse of authority policies, the Company has implemented two main initiatives, namely the implementation of supervision and internal control policies, as well as enforcement policies. The supervision and internal control policies are carried out by the Internal Audit Unit. Meanwhile, the enforcement policy is carried out through the whistleblowing system, which involves all stakeholders.

The Company has built a whistleblower system to collect information about violations, particularly those involving laws and regulations, and address mistakes through a self-improvement mechanism. Whistleblowing is an internal system for reporting violations or fraud in order to prevent and avoid them.

Selain itu, Perusahaan memiliki perangkat kebijakan lainnya, di antaranya mencakup:

A. Pakta Integritas

Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh karyawan Perusahaan telah berkomitmen dan menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan dan tata tertib perusahaan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas juga berlaku bagi seluruh pemasok yang bekerja sama dengan Perusahaan. Tujuan dari pakta integritas tersebut adalah untuk mendorong keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis Perusahaan.

B. Kebijakan Anti Gratifikasi

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat terkait kepatuhan insannya dalam menjaga citra Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang untuk mencemarkan nama baik Perusahaan melalui tindakan-tindakan yang merugikan citra Perusahaan. Seluruh insan Perusahaan dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

C. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pimpinan Senior Perusahaan.

Komunikasi dan Pelatihan Antikorupsi

Untuk menjamin kesamaan persepsi, kesamaan tekad dan efektivitas gerakan pencegahan tindak korupsi, Perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam *E-learning* Antikorupsi WBS pada tanggal 7 Oktober 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dampak dan Pencapaian Inisiatif Tanggung Jawab Sosial terkait Operasi yang Adil

Komitmen Perusahaan dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil turut berkontribusi pada semakin kuatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan juga berhasil meraih sejumlah pencapaian yang tercermin dari tidak terdapatnya laporan kasus indikasi korupsi dan suap yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi serta karyawan maupun anak usaha Perusahaan.

Additionally, the Company has additional policy tools, including the following:

A. Integrity Pact

The Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees have committed and signed an integrity pact to perform all duties, functions, responsibilities, authorities, and roles in accordance with applicable laws and regulations, company rules and regulations, as well as the ability to avoid corruption, collusion, and nepotism. Additionally, the integrity contract extends to all suppliers the Company does business with. The integrity pact's objective is to encourage transparency and honesty, as well as to assist in the execution of high-quality, effective, efficient, and accountable duties within the Company's business environment.

B. Anti Gratification Policy

The Company is committed to its employees' compliance in order to maintain the Company's reputation. Employees in the Company are prohibited from defaming the reputation of the Company through activities that may damage the Company's image. All Company employees are prohibited from receiving gratuities that provide personal benefits to themselves or their families, whether received domestically or internationally, and whether conducted electronically or manually.

C. State Official Wealth Report (LHKPN)

The organization has a policy in place to ensure that its Board of Commissioners, Directors, and Senior Leaders comply with state administration asset reporting requirements.

Anti-Corruption Communication and Training

To ensure a common perception, common determination and effectiveness in the anti-corruption movement, the Company enrolled employees in the WBS Anti-Corruption E-learning on October 7, 2021, organized by the Corruption Eradication Commission.

Impact and Achievement of Social Responsibility Initiatives Related to Fair Operations

The Company's commitment to implementing social responsibility related to fair operating practices has also contributed to strengthening stakeholder trust in the Company. Throughout 2021, the Company also succeeded in a number of achievements, as reflected in the absence of case reports that indicate corruption and bribery faced by members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees, as well as subsidiaries of the Company.



Ikhtisar
Utama

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Pembahasan
dan Analisa
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung
Jawab Sosial
dan
Lingkungan
Perusahaan

VERIFIKASI TERTULIS PIHAK INDEPENDEN

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan belum menggunakan pihak independen untuk melakukan *assessment* terhadap kegiatan berkelanjutan Perusahaan.

LEMBAR UMPAN BALIK

Laporan Berkelanjutan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) memberikan gambaran kinerja sepanjang tahun buku 2021. Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara untuk pengembangan kinerja di masa mendatang, dengan mengirimkan lembar umpan balik ini melalui E-mail maupun faksimili atau pos.

PROFIL

Nama (jika berkenan):
Institusi/Perusahaan:
E-mail:
Telp/Hp:

Golongan Pemangku Kepentingan

Mohon beri tanda kategori di bawah ini:

- A. Pemegang Saham dan/atau Investor
- B. Nasabah
- C. Serikat Pekerja
- D. Media
- E. Pemasok
- F. Organisasi Bisnis
- G. Organisasi Masyarakat
- H. Pemerintah/Regulator
- I. Lain-lain

Pilihlah jawaban berikut yang paling sesuai:

Choose the following answer that is most appropriate:

No.	Indikator Indicator	Jawaban The answer
1	Laporan ini mudah dimengerti This report is easy to understand	Ya/Tidak Yes/No
2	Laporan ini bermanfaat bagi Anda This report is useful for you	Ya/Tidak Yes/No
3	Laporan ini sudah menggambarkan kinerja Laporan Keuangan Berkelanjutan This report describes the performance of the Sustainable Financial Statements	Ya/Tidak Yes/No

FAIR OPERATINDEPENDENT PARTY WRITTEN VERIFICATION

Until the end of 2021, the Company has not used an independent party to conduct an assessment of the Company's sustainable activities.

FEEDBACK SHEET

The Sustainability Report of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) provides an overview of performance throughout the 2021 financial year. We expect input, criticism, and suggestions from you for future performance development by sending this feedback sheet via E-mail, facsimile, or post.

PROFILE

Name (optional):
Institution/Company:
E-mail:
Tel/Hp:

Stakeholder Group

Please tick the categories below:

- A. Shareholders and/or Investors
- B. Customer
- C. Workers Union
- D. Media
- E. Suppliers
- F. Business Organization
- G. Community Organization
- H. Government/Regulator
- I. Others

Mohon berikan penilaian aspek paling penting menurut Anda bagi keberlanjutan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero) dengan skor 1-5, dan nilai 5 bermakna paling penting.

Please rate the most important aspect in your opinion for the sustainability of PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero) with a score of 1-5, where a score of 5 means the most important.

No.	Indikator Indicator	Jawaban The answer
1	Kinerja Ekonomi Economic Performance	1-2-3-4-5
2	Kinerja Bisnis Perusahaan Company Business Performance	1-2-3-4-5
3	Ketenagakerjaan Employment	1-2-3-4-5
4	Produk Product	1-2-3-4-5
5	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	1-2-3-4-5
6	Sosial Kemasyarakatan Social Community	1-2-3-4-5
7	Pelanggan Customers	1-2-3-4-5
8	Anti korupsi Anti-Corruption	1-2-3-4-5
9	Energi, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Energy, Social, and Governance (ESG)	1-2-3-4-5

Jika masih ada aspek lain, mohon disampaikan:

Terima kasih atas partisipasi Anda

Mohon dikirimkan ke alamat:

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero)
Gedung Menara Mandiri II
Lantai 7 - 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Telepon : +62 21 5798 2222
Faksimili : +62 21 577 2443
E-mail : corpsec@ptppa.com

If there are other aspects, please specify:

Thank you for your participation

Please send it to the address:

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero)
Gedung Menara Mandiri II
7th - 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Telepon : +62 21 5798 2222
Faksimili : +62 21 577 2443
E-mail : corpsec@ptppa.com



Laporan Keuangan Konsolidasian

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

07









**PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

***PT PERUSAHAAN PENGELOLA
ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020***

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended Desember 31, 2021 and 2020</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Laporan Keuangan Tersendiri – Induk Saja		<i>Separate Financial Statements – Parent Only</i>
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>
Informasi Tambahan (Entitas Induk)	V	<i>Additional Information (Parent Entity)</i>


PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

State-owned Asset Management Company

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama / Name
Alamat kantor / Office Address

- : Yadi Jaya Ruchandi
- : Gedung Menara Mandiri II, Lantai 7 – 9
- : Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
- : Villa Kebagusan Kav A.03 RT.009/RW.002 Kelurahan
- : Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta
- : Selatan
- : 021-57982222
- : Direktur Utama / President Director

 Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain /
Domicile as stated in ID Card

 Nomor Telpn / Phone Number
Jabatan / Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;

The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;

We are responsible for internal control system within the company and its subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter has been made truthfully.

Jakarta, 25 Februari 2022 / Jakarta, February 25, 2022

Direktur Utama/President Director,



(Yadi Jaya Ruchandi)

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00087/2.1030/AU.1/10/0181-3/1/II/2022

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("the Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2021 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2021 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial

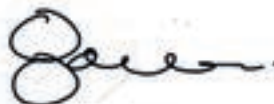
untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We also have tested on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

Jakarta, 25 Februari/February 25, 2022



**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020*) Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	2,627,328	774,100	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	4			Short-term Investment Loans
Pihak Berelasi		115,295	247,161	Related Parties
Pihak Ketiga		459,824	1,284,546	Third Parties
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi kepada				Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit and Loss from
Pihak Ketiga	14	280,522	--	Third Party
Piutang Usaha	5			Accounts Receivable
Pihak Berelasi		224,824	543,091	Related Parties
Pihak Ketiga		893,830	892,294	Third Parties
Piutang Retensi	6			Retention Receivables
Pihak Berelasi		46,328	42,186	Related Parties
Pihak Ketiga		116,694	108,826	Third Parties
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	7	251,106	306,082	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan kepada	8			Loans Receivable-Bailout from
Pihak Berelasi		252,304	340,087	Related Parties
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	9			Gross Amount Due from Customers
Pihak Berelasi		620,724	530,686	Related Parties
Pihak Ketiga		883,828	1,800,538	Third Parties
Persediaan	10	227,777	146,770	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	11	99,725	149,655	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Di Muka	12.a	599,663	662,391	Prepaid Taxes
Cessie Piutang Jangka Pendek	23	55,810	125,070	Short-Term Cessie Receivables
Aset Lancar Lainnya	13	65,364	67,342	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar		7,820,946	8,020,825	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	15	5,234,999	38,944	Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau dan/atau Revitalisasi	16			Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization from
Pihak Berelasi		402,763	536,683	Related Parties
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	19	607,338	681,689	Long-term Investment Loans
Properti Investasi	17	1,005,982	816,998	Investment Property
Aset Pajak Tangguhan	12.e	67,254	73,457	Deferred Tax Assets
Investasi pada Ventura Bersama	18	433,269	344,740	Investment in Joint Ventures
Piutang Lain-lain		238	238	Other Receivables
Investasi Jangka Panjang Lainnya	20	546,711	546,776	Other Long-Term Investments
Investasi pada Efek Ekuitas	21	185,198	220,626	Investment in Equity Securities
Aset Tetap	22	452,775	564,701	Property, Plant & Equipment
Cessie Piutang Jangka Panjang	23	246,430	247,441	Long-Term Cessie Receivables
Aset Hak Guna	24.a	46,499	11,714	Right of Use Assets
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	25	13,321	--	Financial Assets from Concession Arrangement
Aset Tidak Lancar Lainnya	13	598,778	849,611	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		9,841,555	4,933,618	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		17,662,501	12,954,443	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasi (Catatan 51)/ Reclassified (Note 51)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020*) Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	26			Accounts Payable
Pihak Berelasi		46,010	18,264	Related Parties
Pihak Ketiga		1,254,016	1,449,181	Third Parties
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	27			Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi		1,407,134	1,798,194	Related Parties
Pihak Ketiga		809,480	1,731,675	Third Parties
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun kepada Pihak Berelasi		175,000	175,651	Current Maturities of Bank and Financial Institution Loans Related Parties
Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga	28	967,581	929,472	Gross Amount Due to Third Parties
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	29			Short-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi		17,495	13,588	Related Parties
Pihak Ketiga		125,780	151,524	Third Parties
Utang Pajak	12.b	23,803	22,122	Taxes Payable
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	30	344,519	172,584	Accruals Expenses and Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		5,170,818	6,462,255	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	31	23,965	13,104	Employee Benefit Liabilities
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	27			Long-Term Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi		639,559	973,393	Related Parties
Pihak Ketiga		545,195	131,895	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah	33	449,545	748,545	Medium-term Notes
Utang Obligasi	34	640,740	640,360	Bonds Payable
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	32			Long-Term Advances from Customers
Pihak Berelasi		10,943	23,300	Related Parties
Pihak Ketiga		188,527	289,308	Third Party
Liabilitas Sewa	24.b	35,854	14,179	Lease Liabilities
Utang Sukuk - Neto	35	588,544	--	Sukuk Payable - Net
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3,122,872	2,834,084	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8,293,690	9,296,339	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owner of the Parent
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 20.000.000 saham	36			Share Capital - Rp 1,000,000 par value per share - Authorized Capital 20,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Issued and Fully Paid
5.952.623 saham (2020: 2.996.688 saham)		5,952,623	2,996,688	5,952,623 shares (2020: 2,996,688 shares)
Tambahan Modal Disetor		(308,059)	(308,059)	Additional Paid in Capital
Saldo Laba:				Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya		299,350	299,350	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		576,377	312,384	Unappropriated
Labanya Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih		2,594,190	20,800	Unrealized Gain on Available for Sale Securities - Net
Surplus Revaluasi Aset Tetap	36.f	249,634	333,863	Revaluation Surplus of Property, Plant and Equipment
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		9,364,115	3,655,026	Total Equity Attributable to Owner of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	36.e	4,696	3,078	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		9,368,811	3,658,104	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		17,662,501	12,954,443	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Direklasifikasi (Catatan 51) Reclassified (Note 51)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFITS
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2020 Rp	
PENDAPATAN USAHA	37	6,535,658	4,397,844	REVENUES
BEBAN USAHA	38	(6,368,336)	(4,154,610)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA		167,322	243,234	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga		20,518	14,419	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap		241	--	Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Beban Bunga dan Keuangan	39	(79,646)	(91,805)	Interest Expense and Financial Charge
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi		18,752	26,169	Increase in Fair Value of Investment Property
Beban Pajak Final	43	(127,886)	(101,709)	Final Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	40	152,776	87,905	Share of the Profit in Joint Ventures
Penghasilan (Beban) Lain-lain	41	23,110	(15,200)	Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK		175,187	163,013	PROFIT BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAXES
Beban Pajak Kini	12.c	(3,976)	(38,319)	Current Tax Expenses
Beban Pajak Tangguhan	12.c	(6,086)	(18,925)	Deferred Tax Expenses
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(10,062)	(57,244)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		165,125	105,769	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap		10,717	--	Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti		3,467	4,802	Actuarial Gain from Defined Benefit Liabilities
Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar		2,574,638	(1,352)	Financial Assets Measured at Fair Value
Jumlah Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		2,588,822	3,450	Total Item that will not be reclassified to profit or loss
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,753,947	109,219	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		164,468	105,341	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		657	428	Non-Controlling Interests
JUMLAH		165,125	105,769	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik Entitas Induk		2,753,154	108,749	Owners of The Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		793	470	Non-Controlling Interest
JUMLAH		2,753,947	109,219	TOTAL
LABA PER SAHAM (dalam angka penuh)	42	32,860	35,152	EARNINGS PER SHARE (in full amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owner of the Parent

Catatan/ Notes	Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Financial Assets measured at Fair Value through Other Comprehensive Income										Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interests	Jumlah/ Total	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Surplus of Property, Plant and Equipment	Saldo Laba/Retained Earnings *) Telah Ditetapkan Penghasilan/ Appropriated Unappropriated	Belum Ditetapkan Penghasilan/ Unappropriated								
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp					
Saldo tanggal 1 Januari 2020	2,996,688	(308,059)	22,152	413,255	299,350	210,122	3,633,508	6,867			3,640,375		
Dampak Dekonsolidasi terhadap Ekuitas sebagai akibat Perusahaan memenuhi kualifikasi sebagai Entitas Investasi (Catatan 1.b)	-	-	-	(59,935)	-	(27,296)	(87,231)	(4,259)			(91,490)		
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	105,341	105,341	428			105,769		
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	(1,352)	-	-	4,760	3,408	42			3,450		
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	(19,457)	-	19,457	-	-			-		
Saldo Per 31 Desember 2020	2,996,688	(308,059)	20,800	333,863	299,350	312,384	3,655,026	3,078			3,658,104		
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	164,468	164,468	657			165,125		
Tambahan Modal Disetor	2,955,935	-	-	-	-	-	2,955,935	-			2,955,935		
Tambahan Modal Disetor Entitas Anak oleh Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	825			825		
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	-	2,574,638	10,717	-	3,331	2,588,686	136			2,588,822		
Realisasi Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	-	-	(1,248)	-	-	1,248	-	-			-		
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	(94,946)	-	94,946	-	-			-		
Saldo Per 31 Desember 2021	5,952,623	(308,059)	2,594,190	249,634	299,350	576,377	9,364,115	4,696			9,368,811		

Balance as of January 1, 2020

Impact of deconsolidation to equity, as a consequence of

PPAK qualifying as an

investment subsidiaries (Note 1.b)

Profit for The Year

Other Comprehensive Income for the Year

Reclassification of Revaluation Surplus Fixed Asset

Balance as of December 31, 2020

Profit for The Year

Additional Paid in Capital

Additional Paid in Capital by

Non-Controlling Interest

Other Comprehensive Income for the Year

Realized Financial Assets Measured at Fair Value Through

Other Comprehensive Income

Reclassification of Revaluation Surplus Fixed Asset

Balance as of December 31, 2021

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASHFLOW**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2021 Rp	2020 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5,972,746	5,050,817	Cash Receipts from Customers
Penyaluran Pembiayaan Konsumen	(153,191)	(564,728)	Disbursement for Financing
Penerimaan Restitusi Pajak	241,564	24,258	Cash Receipts from Tax Refund
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(4,949,926)	(4,811,959)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Pembayaran Beban Bunga	(516,828)	(551,619)	Payment of Interest
Pembayaran Pajak	(202,862)	(171,918)	Tax Paid
Penerimaan Dividen	1,451,339	--	Dividend Receipt
Penerimaan Lainnya	74,772	19,142	Other Receipts
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1,917,614	(1,006,007)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan Investasi	350,199	--	Proceeds from Investment
Pengeluaran Investasi	(120,909)	(499,179)	Disbursement from Investment
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan	1,432,698	1,927,179	Proceeds from Investment Loans
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan	(838,160)	(2,112,652)	Disbursement from Investment Loans
Penerimaan Pencairan Laba Ventura Bersama	64,247	64,973	Cash Received from Share of the Profit Joint Venture
Perolehan Aset Tetap & Aset Tak Berwujud	(12,045)	(16,832)	Acquisition of Property, Plant and Equipment
Pengeluaran Investasi pada Suku	(2,440,856)	--	Disbursement from Investment in Suku
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1,564,826)	(636,511)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman	5,784,499	7,825,940	Receipts from Loan
Pembayaran Pinjaman	(7,025,561)	(6,664,347)	Payment for Loan
Penerimaan Penerbitan Surat Utang	3,051,069	--	Receipts From Securities
Pembayaran Penerbitan Surat Utang	(300,000)	(460,000)	Payment for Securities
Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Berelasi	--	642,100	Receipts From Securities
Penerimaan Setoran Modal	825	--	Proceed from Capital Share
Pembayaran Liabilitas Sewa	(10,410)	(17,168)	Payment of Lease Liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1,500,422	1,326,525	Net Cash Provided by Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1,853,210	(315,993)	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	774,116	1,107,636	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Direalisasi	2	--	Unrealized Gain (Loss) on Foreign Exchange
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	--	(17,527)	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
dari entitas yang konsolidasi (tidak dikonsolidasi)	--	(17,527)	of a consolidated (unconsolidated) entity
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2,627,328	774,116	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas			Reconciliation of Total Cash & Cash Equivalents
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas	2,627,328	774,116	Amount as reported in statement of cash flows
Penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas	--	(16)	Allowance for impairment losses
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan	2,627,328	774,100	Amount as reported in statement of financial position

Tambahan informasi aktifitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 50.

Additional information of non cash activities are presented in Note 50.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan No. 4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2004 telah diubah dengan diterbitkannya PP No. 61 tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2004 yang menetapkan, antara lain perluasan maksud dan tujuan Perusahaan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 22 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2021 pemegang saham memutuskan:

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020;
2. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perusahaan yang semula berjumlah Rp5.000.000 menjadi sebesar Rp20.000.000;
3. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 2.955.935 saham yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia;
4. Menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.955.935 yang berasal dari pengalihan saham milik Pemerintah di PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia, sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan menjadi sebesar Rp5.952.623;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (the "Company") was established by virtue of the Deed of Notary Public No. 7 dated February 27, 2004 from Lenny Janis Ishak, S.H., Notary Public in Jakarta. This deed of establishment has been ratified by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia by the Decree No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004 and publicized in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 14, 2004, Supplement No. 4541. The Company's deed of establishment was drawn up based on the Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 10 of 2004 dated February 27, 2004, regarding Establishment of Limited Liability Company (Persero) in Asset Management Sector. Several provisions in PP No. 10 of 2004 has been amended by the issue of PP No. 61 of 2008 dated September 4, 2008, regarding Amendment to Government Regulation No. 10 of 2004 stipulating, inter alia expansion of the Company's aims and objectives and the scope of the Company's activities.

Based on Deed No. 22 from Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta on June 10, 2021, shareholder had decided to:

1. Approve the change in the Company's purpose and objectives to be adjusted along with year 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI);
2. Approve the increase in the Company's Authorized Capital from Rp5,000,000 to Rp20,000,000;
3. Approve the issuance of shares in savings as many as 2,955,935 shares which are entirely subscribed by the Republic of Indonesia;
4. Approve the addition of the State capital of the Republic of Indonesia amounting to Rp2,955,935 originating from the transfer of Government-owned shares in PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, and PT Socfin Indonesia, thus the issued and fully paid capital of the Company amounted to Rp5,952,623;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

5. Menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan ini telah disetujui melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0401453. tahun 2021 tanggal 26 Juni 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan, restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, investasi, pengelolaan aset BUMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Kegiatan usaha utama:
 - (1). Pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
 - (2). Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN;
 - (3). Kegiatan Investasi;
 - (4). Kegiatan pengelolaan aset BUMN
2. Kegiatan usaha penunjang:
 - (1). Jasa konsultasi;
 - (2). Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan.
3. Kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan:
 - a. Jasa konsultasi, meliputi:
 - (1). bisnis dan manajemen;
 - (2). Penjualan dan/atau pengembangan aset.
 - b. Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara, meliputi:
 - (1). Penjualan aset;
 - (2). Penyewaan aset;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Approved amendments to Article 3 and Article 4 of the Company's Articles of Association.

This amendment has been approved through Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0401453 year 2021 dated June 26, 2021.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's aims and objectives are to engage in the management of State assets originating from the Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA) for and on behalf of the Minister of Finance, restructuring and revitalizing SOEs, investing, managing SOE assets in accordance with laws and regulations. applicable regulations and supporting business activities that support the main business activities as long as they do not conflict with the laws and regulations.

To attain the aims and objectives above, the Company operate business activities covering:

1. Main business activities:
 - (1). Management of State assets originating from the Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA);
 - (2). Restructuring and/or Revitalizing BUMN;
 - (3). Investment Activities;
 - (4). BUMN asset management activities.
2. Supporting business activities:
 - (1). Consulting services
 - (2). Management of State-owned assets other than State assets originating from IBRA, Regional Governments, legal entities owned and/or established by the State other than BUMN, BUMD and the private sector, including BUMN subsidiaries and joint ventures.
3. Business activities in the context of optimizing the utilization of company resources:
 - a. Consulting services, including:
 - (1). business and management;
 - (2). sale and/or asset development.
 - b. Management of State-owned assets other than State assets, including:
 - (1). Asset sale;
 - (2). Asset rental;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (3). Restrukturisasi piutang;
- (4). Restrukturisasi perusahaan;
- (5). Pengembangan dan pendaya
gunaan aset.

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Gedung Menara Mandiri II Lantai 7-9, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta, 12190.

1.b. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas-entitas anak pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2021/ Total Assets December 31, 2021	Jumlah Pendapatan 31 Desember 2021/ Total Revenues For 2021
			%		Rp	Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	999,485	77,254
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2012	808,342	24,273
PT Nindya Karya ("PT NK")	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	4,899,999	4,415,364
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.490	2013	173,617	108,521
PT Nindya Tirta Unggul *) ("PT NTU")	Cilacap	Pabrikasi/Manufacturing	95.000	2021	32,312	14,429

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT NK/Indirectly Ownership through PT NK

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2020/ Total Assets December 31 2020	Jumlah Pendapatan Tahun 2020 Total Revenues For 2020
			%		Rp	Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	1,389,152	136,797
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2012	829,585	93,625
PT Nindya Karya ("PT NK")	Jakarta	Konstruksi/Construction	99.000	1961	5,486,818	3,516,853
PT Nindya Beton *) ("PT NB")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.490	2013	194,717	155,796

*) Kepemilikan tidak langsung melalui PT NK/Indirectly Ownership through PT NK

Sejak tahun 2020, PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi sehingga PT PPAK tidak mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikategorikan sebagai entitas anak (sesuai dengan PSAK 65).

Pengungkapan informasi entitas anak PPAK yang tidak dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (3). Receivable restructuring;
- (4). Company restructuring;
- (5). Asset development and
utilization.

The Company is owned entirely by the Republic of Indonesia.

The Company has domicile in Gedung Menara Mandiri II, 7th to 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta, 12190.

1.b. Subsidiaries Structure

The Company has control over the subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020 as follows:

Since 2020, PT PPAK has met the requirements as an investment entity thus PT PPAK does not consolidate all entities that are categorized as subsidiaries (in accordance with PSAK 65).

Disclosure of information on unconsolidated subsidiaries of PPAK is as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Entitas yang tidak Dikonsolidasi/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation
PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.997	2014
PT Magnesium Gosari International ("PT MGI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	51.000	2018
PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")	Surabaya	Pabrikasi/Manufacturing	75.000	2007
PT SIPPA Kemasan International ("PT SKI")	Jakarta	Pabrikasi/Manufacturing	99.980	2018
PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")	Jakarta	Kapal Isap Timah/Tin Vessel	60.000	2018
PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB")	Jakarta	Kapal Isap Timah/Tin Vessel	60.000	2018
PT Rejeki Inti Logamjaya ("PT RILJ")	Tangerang	Pabrikasi/Manufacturing	73.530	1997

Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Grup".

The Company and its Subsidiaries hereinafter jointly referred to as "Group".

• **PT PPAF**

Berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.

• **PT PPAF**

Based on the approval of the State Minister-Owned Enterprises No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established PT PPAF with the shares ownership of 99.999%.

• **PT PPAK**

Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, dan memo M-10/PPA/ID/0317 saham Perusahaan pada PPAK sebesar 99,999%.

• **PT PPAK**

Based on the approval of the State Minister-Owned Enterprises through the letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, and memo M-10/PPA/ID/0317 of the Company's shares in PPAK amounting to 99.999%.

Anggaran dasar PT PPA Kapital telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, S.H., M. Hum., Notaris di Jakarta Utara. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0035499.AH.01.02 Tahun 2020. Dengan adanya perubahan tersebut, PPAK menjadi entitas investasi sehingga per 1 Januari 2020 PPAK tidak lagi mengkonsolidasi seluruh laporan keuangan entitas anaknya.

The articles of association of PT PPA Kapital has been subjected amendment based on the Deed No. 6 dated May 6, 2020 drawn before Notary Public Desman, S.H., M. Hum., Notary Public in North Jakarta. This deed of amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decree No. AHU-0035499.AH.01.02 Tahun 2020. By this amendment, PPAK became the investment entity thereby as per January 1, 2020 PPAK will no longer consolidate entire financial statement of its subsidiaries.

• **PT NK**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Perusahaan melakukan penyertaan modal pada PT NK sebesar Rp499.997 atau merupakan 99% dari modal disetor dan ditempatkan.

• **PT NK**

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 of 2012, the Company made the capital subscription in PT NK amounting to Rp499,997 or 99% of the paid-up and subscribed capital.

• **PT NB**

PT NK dan Perusahaan mendirikan Akta Perseroan Terbatas PT NB No. 33 tanggal 19 Februari 2013 dari Khairina S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

• **PT NB**

PT NK and the Company established the Deed of Limited Liability Company PT NB No. 33 dated February 19, 2013 from Khairina S.H., the Notary Public in Jakarta, already obtaining ratification of the Minister of

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-10206.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

• **PT NTU**

PT NTU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 3 Mei 2021 dari Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98.AH.02.02 tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021.

PT PPAK

Mulai 2020, PT PPAK bersama-sama dengan Perusahaan memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasian sebagaimana diatur dalam PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian", oleh karena itu investasi di entitas yang dikendalikan - serta investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) sesuai PSAK 71 dengan pengecualian untuk entitas anak yang dianggap perpanjangan tangan dari aktivitas investasi PT PPAK (yaitu entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi (sesuai dengan PSAK 65) yang hanya memberikan jasa manajemen investasi ke PT PPAK).

Sesuai dengan perubahan yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan PT PPAK, maka PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi (sesuai dengan PSAK 65) berdasarkan fakta bahwa PT PPAK:

- Memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada investor;
- Menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- Mulai mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya (yaitu investasi properti, investasi pada entitas anak, asosiasi, ventura bersama) secara substansial berdasarkan nilai wajar.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-10206.AH.01.01 Tahun 2013 regarding Ratification of Company's Legal Entity.

• **PT NTU**

PT NTU was established based on Notarial Deed No. 08 dated on May 3, 2021 from Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn. the Notary Deed Officer in Jakarta Selatan and has received the validation from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in decreed No. AHU-98.AH.02.02 by 2021 dated October 26, 2021.

PT PPAK

As of 2020, PT PPAK together with the Company fulfilled the requirements as the qualifying investment entities as stipulated in PSAK 65 "Consolidated Financial Statement", therefore investment in the controlled entity - as well as the investment in the associated and joint venture entities are measured at the fair value through the profit/loss (FVTPL) in accordance with PSAK 71 with the exception for the subsidiary considered as extension of the investment activities of PT PPAK (i.e. subsidiaries that are not investment entities (in accordance with PSAK 65) that only provides the investment management service to PT PPAK).

In accordance with the changes occurring in the activities carried out by PT PPAK, PT PPAK has fulfilled the requirements as the investment entity (in accordance with PSAK 65) based on the fact that PT PPAK:

- Obtains the funds from one or more investor(s) with the objective of providing the investment management services to investors;
- Represents the commitment to the investors that its business objective shall be to invest the funds solely to obtain the profit sharing from the increase in the capital value, investment income, or both; and
- Starts to measure and evaluate the performance of all of its investments (i.e. property investment, investment in subsidiaries, associates, joint ventures) substantially based on the fair value.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Selanjutnya, PT PPAK memenuhi karakteristik khusus beserta pedoman penerapan sesuai PSAK 65 yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi apakah PT PPAK merupakan entitas investasi atau bukan, yaitu:

- (a) Memiliki lebih dari satu investasi;
- (b) Memiliki lebih dari satu investor;
- (c) Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas; dan
- (d) Memiliki bagian kepemilikan saham dalam bentuk ekuitas dan kepentingan serupa.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham, Nomor Surat Keputusan:

- 1. SK-326/MBU/10/2020, 9 Oktober 2020;
- 2. SK-325/MBU/10/2020, 9 Oktober 2020;
- 3. SK-309/MBU/09/2021; 14 September 2021

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris

Direksi:
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

2021
Krisna Wijaya
Marwanto Harjowiryo
Diah Triana

Yadi J. Ruchandi
Rizwan Rizal Abidin
Adi Pamungkas Daskian
JF Hasudungan

Manajemen kunci meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Komite Audit
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota

*) Merupakan Komisaris Independen
**) Merupakan Komisaris

2021 dan 2020/ 2021 and 2020

Krisna Wijaya *)
Marwanto Harjowiryo **)
Awal Susmanto
Ahmad Malkan Lubis

Audit Committee
Chairman
Vice Chairman
Members
Members

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Subsequently, PT PPAK fulfills the special characteristics together with the guideline on application in accordance with PSAK 65 that shall be considered in evaluating whether PT PPAK is an investment entity or not, i.e.:

- (a) Have more than one investments;
- (b) Have more than one investors;
- (c) Have investors that are not related parties of the entity; and
- (d) Have the portion of shares ownership in form of equity and similar interests.

1.c. The Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on the Decreed of the State Minister for SOE's in the General Meeting of Shareholders, Decree Number:

- 1. SK-326/MBU/10/2020, October 9, 2020;
- 2. SK-325/MBU/10/2020, October 9, 2020;
- 3. SK-309/MBU/09/2021; September 14, 2021

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

2020
Krisna Wijaya
Marwanto Harjowiryo
Diah Triana

Yadi J. Ruchandi
Rizwan Rizal Abidin
Adi Pamungkas Daskian
-

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Secretary of the Board of Commissioner

Directors:
President Director
Director
Director
Director

Key management covers the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

The composition of the member of audit committee as of December 31, 2021 and December 31, 2020 is as follows:

*) Represent Independent Commissioner
*) Represent Commissioner

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Susunan satuan pengendalian internal per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Kepala Satuan Pengendalian Internal	Muhammad Reza Maulana
Spesialis	Erwin Adiyatno
Anggota Spesialis	Dady Atma Priyagi
Anggota Spesialis	Hidayah Widyaningrum
Anggota Spesialis	Fajar Setianto

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan masing-masing memiliki sejumlah 166 dan 171 karyawan (tidak diaudit).

1.d. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp642.100 pada tahun 2020 dengan tanggal efektif 19 Agustus 2020. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2020 dengan Nomor Surat Pencatatan S-04942/BEI.PP3/08/2020.

Sejak tanggal 8 Desember 2021, Pefindo meningkatkan rating Perusahaan menjadi : idAA (*Double A*) yang berlaku sampai dengan 1 Maret 2022. Terbagi atas 3 (tiga) seri Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount (Rp Juta/ Million)	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Pemeringkat/ Rating Agency	Peringkat/ Rating	Tenor/ Tenor (Tahun/ Years)	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Status/ Status
Obligasi I PPA Tahun 2020/ Bonds I PPA Year 2020									
1	Seri/ Serie A	100,000	9.95%	PEFINDO	id AA	3	19 Agustus 2020/ August 19, 2020	19 Agustus 2023/ August 19, 2023	Belum Lunas/ Outstanding
2	Seri/ Serie B	345,000	10.55%	PEFINDO	id AA	5	19 Agustus 2020/ August 19, 2020	19 Agustus 2025/ August 19, 2025	Belum Lunas/ Outstanding
3	Seri/ Serie C	197,100	11.00%	PEFINDO	id AA	7	19 Agustus 2020/ August 19, 2020	19 Agustus 2027/ August 19, 2027	Belum Lunas/ Outstanding

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The composition of the member of Internal Audit Control as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2020
Head of Internal Control Unit	Wahyu Widodo
Specialist	Erwin Adiyatno
Member of Specialist	Dady Atma Priyagi
Member of Specialist	Hidayah Widyaningrum
Member of Specialist	Fajar Setianto

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has 166 and 171 employees, respectively (unaudited).

1.d. Public Offering of Company's Bonds

The Company has issued the bonds amounted to Rp642,100 in 2020 with the effective date of August 19, 2020. The recording was carried out on the Indonesia Stock Exchange on September 2, 2020 with the Letter of Recording number S-04942/BEI.PP3/08/2020.

Since December 8, 2021, Pefindo has raised the ratings of the Company to idAA (*Double A*) valid to March 1, 2022. Divided into 3 (three) series of Bonds, as follows:

2. Significant Accounting Policies

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparation the Group's financial statements, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group.

Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun pada Berjalan

Berikut adalah amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amandemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amendments and adjustments of standards which effectively applied for the year starting on or after January 1, 2021, are as follows:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- PSAK 112: Accounting for Wakaf;
- PSAK 1 (Annual Improvement 2021): Presentation of Financial Statements;
- PSAK 13 (Annual Improvement 2021): Investment Properties;
- PSAK 48 (Annual Improvement 2021): Impairment of Assets;
- PSAK 66 (Annual Improvement 2021): Joint Arrangement; and
- ISAK 16 (Annual Improvement 2021): Service Concession Arrangements.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Consolidation Principles

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e., the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Grup menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries that are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date when the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control is over.

The Group prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation to reflect the financial position as a single business entity.

The Group attributes the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- (a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that result in the loss of control;*
- (d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- (e) *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other PSAK, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah di mana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama periode/tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021	2020	
1 USD	14,269	14,105	1 USD

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

2.e Transaction and Balance in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the period/year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions.

At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e. middle rate of Bank of Indonesia as of December 31, 2021 and 2020 as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.f. Transaction and Balance with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) A person or a close family member has relationship with the reporting entity if such person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint venture of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associated entity of a third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by the person identified in (a); or
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - viii. The entity, or a member of group in which the entity is a part of such group, provides the key management

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.g. Instrumen Keuangan

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

personnel service to the reporting entity or to the holding entity of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by government. Government refers to government, government agencies and similar agencies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.g. Financial Instrument

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group's financial assets are classified as follows: financial assets measured at the amortized acquisition cost, the financial assets at the fair value through the other comprehensive income, the financial assets measured at the fair value through profit or loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

i. Financial Assets Measured at Amortized Acquisition Cost

Financial assets are measured at the amortized cost if these conditions are met:

- (1) The financial assets is held within a business model whose objective to hold the financial assets to collect contractual cash flows (held to collect); and
- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

- (1) The financial assets is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit and Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs and fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (d) Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher than:
 - (i) The amount of the loss allowance; and
 - (ii) The amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of PSAK 72.
- (d) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognized in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup dan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (b) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12-month expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for accounts receivable and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instrument are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Investasi pada Sukuk

Sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan model usaha pada saat perolehan sebagai berikut:

- (i) Diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Investments in Sukuk

Sukuk can be classified based on business model at acquisition as follow:

- (i) *Measured at amortized cost if the investments are held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows; and contractual requirements specify a specific date of payment of principals and/or the revenue.*

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at cost, including the transaction costs and the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight-line method during sukuk period and recognized in profit or loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain.

- (iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika investasi pada sukuk tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (ii) Measured at fair value through other comprehensive income if the investments are held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows and selling the sukuk; and contractual requirements specify a specific date of payment of principals and/or the revenue.

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value through other comprehensive income, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight-line method during sukuk period and recognized in profit or loss. Gains or losses from changes in fair value are recognized in other comprehensive income after taking into account the balance of the difference between the acquisition cost and the nominal value and the unamortized balance of the cumulative gain or loss in fair value previously recognized in other comprehensive income.

- (iii) Measured at fair value through profit or loss if the investments in sukuk are not classified as measured at cost and measured at fair value through other comprehensive income. At the initial recognition, investments are measured at fair value at acquisition cost exclude transaction costs and subsequently, this investment is measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

For investments in sukuk measured at cost and at fair value through other comprehensive income, if there is indication of impairment, the Company measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Company recognized an impairment losses. For investments in sukuk at fair value through other comprehensive income, an impairment losses recognized in profit or loss is the amount after taking into account the balance recorded in other comprehensive income. Recoverable amount is the amount that would be received from the principal repayment regardless its present value.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Effective Interest Rate Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses.

The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi *FVTPL*, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari *FVTPL* menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi *FVTOCI*, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi.

Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari *FVTOCI* menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification.

Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran *FVTPL* menjadi kategori pengukuran *FVTOCI*, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori *FVTOCI* menjadi kategori pengukuran *FVTPL*, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Klasifikasi Sebagai Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrument ekuitas yang diterbitkan Perusahaan dan Entitas Anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrument ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan Entitas Anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak terutama terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka panjang.

Pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain dan pinjaman bank jangka panjang pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif,

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Classification as Liabilities or Equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instrument

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries' financial liabilities mainly consist short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables, and long-term payables.

Short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables and long-term payables are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value caused by the premium or discount, then the difference is amortized on straight-line basis over the period of sukuk ijarah.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- 1) Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- 2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- 3) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities

The financial assets and financial liabilities are offset if, and only if, the Group currently has the legally enforceable right to offset the recognized amount; and intends to settle on net basis or to realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- 1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
- 2) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
- 3) Unobservable inputs for assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 2.g.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi dan dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, yang akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, adalah pendapatan administrasi proses pembiayaan dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pembiayaan konsumen tersebut.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diberlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the transfer occurred.

2.h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in bank (demand deposit) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Consumer Financing Receivables

Consumer financing receivables are classified financial assets measured at amortized acquisition cost.

Recognition, initial measurement, measurement after initial recognition, reclassification, determination of fair value, impairment and derecognition of consumer financing receivables refers to Note 2. g.

Consumer financing receivables represent the amount of receivables plus (less) unamortized transaction costs (income) and less unrecognized consumer financing income and allowance for impairment losses on consumer financing receivables.

Unrecognized consumer financing income represents the difference between the total installment payments to be received from consumers and the principal amount, plus (less) unamortized transaction costs (income), which will be recognized as income over the term of the contract using the interest rate method. effective consumer financing receivables.

Unamortized transaction costs (revenues) are administrative income for the first-time financing process and transaction costs that are directly related to consumer financing.

The settlement of the contract before the end of the consumer financing period is treated as a cancellation of the consumer financing contract and the resulting gain is recognized as profit or loss for the year.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.j. Anjak Piutang

Anjak piutang diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan dan diamortisasi selama periode kontrak menggunakan suku bunga efektif.

Dalam anjak piutang, debitur mempunyai kewajiban membayar seluruh dana yang diperoleh dari piutang alihan, atau membeli kembali piutang alihan, dalam hal nasabah tidak membayar piutang alihan tersebut kepada faktor pada saat jatuh tempo.

2.k. Aset Tak berwujud

Aset takberwujud diperoleh dari pembelian dan diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 10-20 tahun.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

2.l. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.j. Factoring

Factoring with recourse is recognized as the amount of receivables acquired and is stated at net realizable value, net of deferred income factoring. The difference between the factoring receivables and the amount of payments made to the client is recognized as deferred factoring income and will be amortized over the period of respective factoring agreements using the effective interest rate.

In factoring with recourse, the debtor has the obligation to pay all (full recourse) of the funds obtained from the transferred receivables, or to buy back the transferred receivables, if the customer does not pay the transferred receivables to the factor at maturity.

2.k. Intangible Assets

Intangible assets are acquired on a purchase basis and measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite. Intangible assets are amortized by using straight line method based on estimated useful lives of 10-20 years.

Amortization is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value.

Intangible assets are derecognized if they are disposed of. When no future economic benefits are expected from their use or disposal.

2.l. Retention Receivables

Retention receivable represents The Group's receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.m. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi jasa merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

2.n. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.o. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.m. Gross Amount due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method, which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

2.n. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.o. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the period's benefits using straight-line method.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.p. Investment Property

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group decides to use fair value model and measure all its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- a. *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- b. *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- c. *End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.q. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Kelompok	Tahun/Years	Persentase Depresiasi/ Depreciation Percentage	Group
Bangunan	20	5%	Building
Kendaraan Bermotor	3 - 8	12,5%-13,33%	Vehicle
Peralatan Proyek	2 - 8	12,5%-50%	Project Equipment
Peralatan Kantor	2 - 8	12,5%-50%	Office Equipment

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.

An investment property is derecognizing on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.q. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or because of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation of fixed assets starts when it is available for use, and it is computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasar kondisi teknis.

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk aset tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Self-constructed Fixed Assets are presented as part of the fixed assets under "Asset in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective Fixed Assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of Fixed Assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

The Group choose to use revaluation model for an item of land assets whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated impairment losses.

If asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss.

If asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

2.r. Aset Keuangan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Perusahaan telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak konsesi dalam kontrak.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lainnya (pemberi konsesi) memberikan kontrak untuk penyediaan layanan publik ke entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian 'publik-ke-swasta'.

Dalam perjanjian ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan jasa publik dan mengoperasikan serta mengelola infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan infrastruktur yang ada.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss which is recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

Revaluations are carried out with the sufficient regularity to ensure that the recorded value is not different materially from the amount determined by using the fair value at the end of the reporting period.

2.r. Service Concession Arrangement Financial Assets

The Company has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to the concession rights.

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or other body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). This is often referred to as a 'public – to – private' arrangement.

In this type of arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Beberapa ciri umum dari perjanjian konsesi jasa meliputi:

Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.

Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya mendanai infrastruktur.

Dalam ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan hak dan kewajiban terkait dengan konsesi jasa, Perusahaan tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap namun mengakui sebagai aset keuangan, karena Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas dari Perumdam Tirta Wijaya melalui pembayaran kapasitas berdasarkan Perjanjian Konsesi. Aset keuangan dicatat sebagai "Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi" sesuai dengan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

2.s. Aset Lain-lain

Persediaan properti berupa tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan yaitu beban-beban yang dikeluarkan serta beban bunga yang menjadi beban atas kredit yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

2.t. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Some common features of service concession arrangements include:

The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.

The operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.

Under ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession, the Company does not recognize the infrastructure as property, plant and equipment but recognizes it as a financial asset, as the Company has an unconditional right to receive cash from Perumdam Tirta Wijaya through the capacity payments under the Concession Agreement. The financial asset is accounted as a "Financial Assets at amortized Cost" in accordance with PSAK 71, "Financial Instruments".

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession agreement.

2.s. Other Assets

Property inventory in form of land and building are recorded based on the acquisition cost that are incurred and interest expenses that are used for such activities.

2.t. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.u. Sewa

Grup sebagai Penyewa

Pada tanggal inisiasi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- (a) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasi; dan
- (b) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss which is recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.u. Leases

The Group as Lessee

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

- (a) *the right to obtain substantially all economic benefits from the use of the identified asset; and*
- (b) *the right to direct the use of the identified asset, only if either:*
 - (i) *The Group has right to direct how and for what purposes the assets are used throughout the period of use; or*
 - (ii) *the relevant judgment about how for what objective the assets are used are predetermined and:*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut;
- Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- The Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or
- The Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.

At the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset at cost, which includes the amount of the initial measurement of the lease liability, any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received, any initial direct costs incurred by the Group, and an estimate of costs to be incurred by the Group in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories.

After the commencement date, the Group measures the right-of-use asset by applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Grup sebagai Pesewa

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial tidak mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan sebagai jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Lease liability is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension, or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group as Lessor

Leases for which the Group is a lessor are classified as operating leases. Whenever the terms of the lease did not transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as an operating lease.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.v. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.w. Utang Bruto kepada Pihak Ketiga

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja sub kontraktor yang belum diberita-acarakan, baik dari sub kontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Utang bruto pihak ketiga disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi rugi yang diakui.

2.x. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian atas barang atau jasa diakui dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak Grup dalam pertukaran dengan barang dan jasa tersebut. Grup telah menetapkan secara umum bahwa Grup merupakan prinsipal dalam kontrak pendapatannya karena Perusahaan biasanya mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkan kepada pelanggan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.v. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as joint venture.

Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.w. Gross Amount Due to Third Parties

Gross amount due to third parties represents uncertificated subcontractor working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress since it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

Gross amount due to the third parties is presented as the differences between costs occurred added by gain or deducted by realized loss.

2.x. Revenue and Expenses Recognition

The Group adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers". Revenue from contracts with customers is recognized when control over the goods or services is recognized is transferred to the customer in an amount that reflects the consideration that the Group is expected to be entitled to in exchange for the goods and services. The Group has generally determined that the Group is the principal in its revenue contracts because the Group usually controls the goods or services before transferring them to customers.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Grup berupa penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti dan dividen selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dari yang dijanjikan kepada pelanggan (kontrak dengan pelanggan) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- Kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan.

Grup mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada awal kontrak Grup akan menentukan apakah penyelesaian kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Revenue is the gross inflow of economic benefits arising from the Group's domestic activities in the form of sales of goods, sales of services, interest, royalties and dividends during a period if the inflows result in an increase in equity that does not originate from investment contributions. Revenue from promised to customers (contracts with customers) meets the following criteria:

- The parties to the contract have agreed to the contract (in writing, oral or in accordance with general business practices) and are committed to carrying out their respective obligations;
- An entity can identify each party's rights regarding the goods or services to be transferred;
- An entity can identify the period of payment for the goods or services to be transferred;
- The contract has commercial substance (i.e., the risk, time, or amount of the entity's future cash flows expected to change as a result of the contract); and
- It is probable that the entity will collect the rewards that will be its right in the exchange of goods or services that will be transferred to the customer. In evaluating whether the collectibility of the amount of benefit is likely to occur, the entity only considers the ability and intention of customers to pay the amount of compensation when due. The amount of the benefit that the entity will be entitled to may be less than the price recorded in the contract if the reward is variable because the entity can offer a price concession to the customer.

The Group recognizes revenue when (or as long as) the entity fulfills its performance obligations by transferring promised goods or services (i.e., assets) to customers. Assets are transferred when (or during) the customer gains control of the asset. At the beginning of the contract the Group will determine whether the completion of the performance obligations at over time or a point in time.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pendapatan Pengelolaan Aset

Pendapatan pengelolaan aset diakui pada periode terjadinya yang terdiri dari:

- Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN berupa imbalan pengelolaan aset, imbalan kinerja dan pendapatan yang berkaitan dengan biaya pengelolaan aset yang dapat diperoleh kembali;
- Pendapatan pengelolaan Aset eks BPPN sudah berakhir sejak 31 Desember 2017 karena mulai tahun 2018 tidak terdapat lagi Perjanjian Pengelolaan Aset dengan Kementerian Keuangan (Perjanjian Pengelolaan Aset sudah berakhir sejak tahun 2018);
- Pendapatan Pengelolaan Aset BUMN berupa jasa pengelolaan rutin dan jasa keberhasilan.

Pendapatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pendapatan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN berupa pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Pendapatan Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari jumlah nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada hasil survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Revenue from Asset Management

Revenue of Asset Management is recognized in the period when it is occurred consist of:

- Ex-IBRA Asset Management Income in form Revenue from Asset Management ex-IBRA assets which is made up of asset management fees, success fees and revenues related with reimbursable costs;
- Revenue from Asset Management ex-IBRA assets has ended since December 31, 2017 when starting in 2018 there are no more Asset Management Agreements with the Ministry of Finance (Asset Management Agreements have expired since 2018);
- Revenue from Asset Management SOEs' assets which are routine management fees and success fees.

Revenue from Restructuring and/or Revitalization

The Revenues of SOEs' restructuring and/or revitalization which comprise loan interest income and income from restructuring and/or revitalization are recognized as incurred on an accrual basis.

Construction Revenue

Revenues related to construction contracts are contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the surveys results of work performed.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan Dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Penjualan Barang

Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dengan dasar akrual).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as nonproject expenses (operating expenses).

Rental Revenue

Rental revenue from operating leases are recognized as revenue on a straight line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating and rental arrangements are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Advances received from rental are recorded in unearned revenue account and will be recognized as revenue on a regular basis over the rental periods.

Dividend Revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Interest Income

Interest income is recognized based on timely basis, with an appropriate interest rate or the effective interest rate.

Interest income from finance leases is recognized when it is probable the Subsidiaries will obtain economic benefits related with these transactions and the revenues could be measured reliably.

Sale of Goods

Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group's warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Expenses

Expenses are recognized as incurred (on an accrual basis).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.y. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

2.z. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.y. Borrowing Cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.z. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) initial recognition of goodwill; or*
- b) initial recognition of assets or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No.51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa Konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the income tax imposed upon by the same taxation authority on:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) *has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- b) *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

Final Income Tax

Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable. If the income is already subject to final income tax, the differences between the carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation No. 40 year 2009 concerning amendments of Government Regulation No.51 year 2008 concerning income tax from the construction

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2008 dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

2.aa. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (UU 13/2003).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

business which effective starting August 1, 2008, final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Final income tax is presented outside income tax expense in profit or loss.

2.aa. Employee Benefit

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefit.

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (Law 13/2003).

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determines by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset limit are recognized in other comprehensive income.

The Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.ab.Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.ab. Sources of Estimation Uncertainty and Important Accounting Consideration

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.

The Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared. Assumptions about the future development and situation, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. the changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Perusahaan dan entitas anak melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja disajikan di Catatan 31.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah

Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi. Nilai tercatat properti investasi dan aset tetap disajikan di Catatan 17 dan 22.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Accounting Estimates and Assumptions

Estimated Useful Lives

The Group performs periodic review over the useful life of the fixed assets and intangible assets based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the Company and subsidiaries property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The determination of Group's employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Management believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. The carrying amount of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 31.

Fair Value of Investment Property and Land

The fair value of investment properties and land depend on the selection of assumption used by the independent appraisers in calculating these amounts.

These assumptions include, inter alia: the discount rate, inflation rate and increment rate of the Group's income and expenses. The Group believes that these assumptions are reasonable and appropriate, the significant differences in the Group's assumptions may materially affect the fair value of investment properties and land. The carrying amount of investment property and fixed assets are disclosed in Notes 17 and 22.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan telah diukur sejumlah sepanjang umur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. *Expected Credit Loss* pada instrumen keuangan diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar pelanggan di masa lalu dan analisis posisi keuangan pelanggan saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari pelanggan, kondisi ekonomi umum industri di mana pelanggan beroperasi. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari 36 bulan karena pengalaman historis mengindikasikan bahwa instrumen keuangan tersebut umumnya tidak dapat dipulihkan.

Aset keuangan dihapuskan ketika terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa pelanggan dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan. Nilai tercatat aset keuangan disajikan di Catatan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 dan 25.

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan PSAK 71 untuk perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.g.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

Allowance for impairment losses for financial assets has been measured at an amount equal to lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since its initial recognition. The Expected Credit Loss on financial instruments are estimated using a provision matrix refer to past default history of the customers and an analysis of the customers current financial position, and adjusted for specific factors to the customers, general economic conditions of the industry in which the customers operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables over 36 months past due because historical experience has indicated that financial instruments aren't generally recoverable.

Financial assets is written off when there is information indicating that the customers is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period. The carrying amount of financial assets are disclosed in Notes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 and 25.

Judgement in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71 for accounting treatment since January 1, 2020. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group accounting policies disclosed in Note 2.g.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

2.ac. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 5.005.104 lembar tanggal 31 Desember 2021.

2.ad.Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

2.ac. Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares. The weighted average number of shares outstanding were 5,005,104 shares per December 31, 2021.

2.ad. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the operating segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

	2021 Rp	2020 Rp	
Kas	505	706	Cash on Hand
Bank			Cash in Banks
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	267,102	36,072	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	84,137	194,923	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,189	520	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,115	2,146	Other (each below Rp1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,237	3,577	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	26	18	Other (each below Rp1,000)
Jumlah Pihak Berelasi	355,806	237,256	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Muamalat Tbk	360,232	--	PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	127,725	3,197	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1,150	696	PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	2,318	34,526	Other (each below Rp1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	18	14	Other (each below Rp1,000)
Jumlah Bank - Pihak Ketiga	491,443	38,433	Total Banks - Third Parties
Jumlah Bank	847,249	275,689	Total Cash in Banks
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	485,816	406,367	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	320,000	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	102,700	1,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,461	66,454	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi	938,977	473,821	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Bukopin Tbk	249,371	--	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	250,000	--	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Muamalat Tbk	150,000	--	PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	100,000	--	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia Tbk	49,322	--	PT Bank Shinhan Indonesia Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	31,904	2,900	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	10,000	10,000	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Capital	--	11,000	PT Bank Capital
Jumlah Pihak Ketiga	840,597	23,900	Total Third Parties
Jumlah Deposito Berjangka	1,779,574	497,721	Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	2,627,328	774,116	Total Cash and Cash Equivalents
Dikurangi: Kerugian Kredit Ekspektasian	--	(16)	Less: Expected Credit Losses
Jumlah Kas dan Setara Kas - bersih	2,627,328	774,100	Total Cash and Cash Equivalents - net
Tingkat Suku Bunga Deposito per Tahun	2.5%-5%	4.5%-7%	Interest Rate on Time Deposit per Annum
Jangka Waktu	1 - 3 bulan/months	1 - 3 bulan/months	Maturity Period

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The movements in amount of the allowance for expected credit losses of cash & cash equivalent is as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	(16)	--
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	(82)
Penambahan Tahun Berjalan	--	(13)
Pemulihan Tahun Berjalan	16	79
Saldo Akhir Tahun	--	(16)

Balance at The Beginning of The Year
Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Addition in The Current Year
Recovery in The Current Year
Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa kerugian kredit ekspektasian kas dan setara kas sudah cukup.

Management believes that expected credit losses of cash and cash equivalent is sufficient.

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek

4. Short-term Investment Loans

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi		
PT Pratama Persada Airbone	45,715	23,050
PT Pindad (Persero)	42,640	--
PT Artha Bangun Pratama	32,898	31,711
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	23,738	25,634
PT Duta Mentari Raya	12,236	11,444
PT Energy Management Indonesia (Persero)	8,423	14,173
PT Bondi Syad Mulia	--	106,220
PT Magnesium Gosari International	--	44,951
Total Pinjaman Pihak Berelasi - Pokok	165,650	257,183
PT Pratama Persada Airbone	8,020	211
PT Artha Bangun Pratama	4,898	244
PT Duta Mentari Raya	1,454	470
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	1,139	132
PT Pindad (Persero)	514	--
PT Energy Management Indonesia (Persero)	104	53
PT Magnesium Gosari International	--	3,634
PT Bondi Syad Mulia	--	1,573
Total Pinjaman Pihak Berelasi - Bunga	16,129	6,317
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(66,705)	(16,560)
Total Provisi	221	221
Total Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pihak Berelasi	115,295	247,161
Pihak Ketiga		
PT Alim Investindo	190,000	300,000
PT Varia Intra Finance	160,000	160,000
PT Polowijo Gosari	131,742	131,742
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	47,846	--
PT Bintang Abadi Sempurna	35,730	35,730
PT Inti Adhiyasa	33,279	33,279
PT Niaga Bumi Energi	31,414	31,583
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	26,706	26,706
PT Gali Terus Sejahtera	24,732	25,401
PT Indah Prakasa Sentosa	17,373	14,891
PT Bina Patria Transmitta	16,176	16,176
PT CDM Swamadipa	14,351	14,351
PT Ricon Duta Sarana	11,119	9,000
PT Prabu Wahana International	8,343	8,343
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk	961	--
PT Carpediem Mandiri	--	42,658
PT Lintas Samudra Sejahtera	--	432,935
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	--	10,351
PT Bangun Sarana Baja	--	7,846
Total Pinjaman Pihak Ketiga - Pokok	749,772	1,300,992
PT Polowijo Gosari	26,809	7,635
PT Varia Intra Finance	10,926	4,478
PT Bina Patria Transmitta	3,927	1,566
PT Bintang Abadi Sempurna	3,118	3,118
PT Prabu Wahana International	1,228	1,228
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	1,092	1,092
PT Inti Adhiyasa	821	821
PT Ricon Duta Sarana	677	1,337
PT Alim Investindo	595	940
PT Indah Prakasa Sentosa	235	2,038
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	175	--
PT Tropisindo Sumber Energi	86	--
PT Primarindo Asia Infrastructure	5	--
PT Lintas Samudra Sejahtera	--	29,945
PT Niaga Bumi Energi	--	1,044
PT Wintermar Offshore Marine Tbk	--	47
PT Bangun Sarana Baja	--	38
Total Pinjaman Pihak Ketiga - Bunga	49,694	55,327
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(339,960)	(72,643)
Total Provisi	318	870
Total Pinjaman Investasi Jangka Pendek - Pihak Ketiga	459,824	1,284,546
TOTAL PINJAMAN JANGKA PENDEK	575,119	1,531,707

Related Parties
PT Pratama Persada Airbone
PT Pindad (Persero)
PT Artha Bangun Pratama
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Duta Mentari Raya
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Bondi Syad Mulia
PT Magnesium Gosari International
Short Term Investment - Principal - Related Parties
PT Pratama Persada Airbone
PT Artha Bangun Pratama
PT Duta Mentari Raya
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Pindad (Persero)
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Magnesium Gosari International
PT Bondi Syad Mulia
Total Short Term Investment - Interest - Related Parties
Less: Allowance for Impairment Losses
Total Short Term Investments-Provision
Total Short Term Investment - Principal

Third Parties
PT Alim Investindo
PT Varia Intra Finance
PT Polowijo Gosari
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
PT Bintang Abadi Sempurna
PT Inti Adhiyasa
PT Niaga Bumi Energi
PT Duta Cipta Pakar Perkasa
PT Gali Terus Sejahtera
PT Indah Prakasa Sentosa
PT Bina Patria Transmitta
PT CDM Swamadipa
PT Ricon Duta Sarana
PT Prabu Wahana International
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk
PT Carpediem Mandiri
PT Lintas Samudra Sejahtera
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Bangun Sarana Baja
Short Term Investment - Principal - Third Parties
PT Polowijo Gosari
PT Varia Intra Finance
PT Bina Patria Transmitta
PT Bintang Abadi Sempurna
PT Prabu Wahana International
PT Duta Cipta Pakar Perkasa
PT Inti Adhiyasa
PT Ricon Duta Sarana
PT Alim Investindo
PT Indah Prakasa Sentosa
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
PT Tropisindo Sumber Energi
PT Primarindo Asia Infrastructure
PT Lintas Samudra Sejahtera
PT Niaga Bumi Energi
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Bangun Sarana Baja
Total Short Term Investment - Interest - Third Parties
Less: Allowance for Impairment Losses
Total Short Term Investments-Provision
Total Short Term Investment - Third Parties
TOTAL SHORT TERM INVESTMENT

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

The movements in amount of the allowance for impairment losses of short-term investment loans are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(89,203)	(803)	Balance at The Beginning of The Year
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	(99,803)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(329,983)	(5,261)	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	12,521	16,664	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	<u>(406,665)</u>	<u>(89,203)</u>	Ending Balance

a. PT Pratama Persada Airborne

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* No. PP-50/PPA/1217 pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp23.891 dengan tingkat suku bunga 15,3% per tahun dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman. Jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2022.

a. PT Pratama Persada Airborne

Based on the Standby Loan Investment Loan Agreement No. PP-50/PPA/1217 on December 12, 2017, the Company provided the Loan Facility in form of Standby Investment Loan at maximum total principal amounting to Rp23,891 with 15.3% per annum interest rate and fee of 0.5 % of the loan facility. The due date was on December 11, 2022.

Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk membayar harga pembelian Lidar Tipe ALS100. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan No. PP-09/PPA/0818. Para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai nama Lidar dari semula Lidar Tipe ALS100 menjadi *Leica Terrain Mapper*.

The purpose of using the loan facility is to pay the purchasing price of Lidar Type ALS100. Then on August 10, 2018, it was made the amendment of Amendment to Standby Loan Investment Loan Provision Agreement under No. PP-09/PPA/0818. The parties agreed to amend the provisions on name of Lidar from originally Lidar Type ALS100 to Leica Terrain Mapper.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.050, dan untuk tahun 2021 terdapat reklasifikasi dari pinjaman investasi jangka panjang sebesar Rp22.665 (Catatan 19) karena jatuh tempo dalam 1 tahun. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar nihil. Penerimaan pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar nihil. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.715.

The balance as of December 31, 2020 is amounting to Rp23,050, and for 2021 there was reclassification from long-term investment loans amounting to Rp22,665 (Note 19) due to its maturity in 1 year. Total balance of loan disbursement in the current year is amounting to nil. Receipt from payments in the current year is amounting to nil. The balance as of December 31, 2021 is amounting to Rp45,715.

b. PT Pindad (Persero) ("PT Pindad")

Pada tanggal 31 Maret 2021 telah ditandatangani perjanjian Penyelesaian Hutang No. PP-7/PPA/0321 antara Perusahaan dengan PT Pindad senilai Rp228.125 atas pembiayaan modal kerja dengan tingkat suku bunga sebesar 14% dengan tanggal jatuh tempo pada 18 Desember 2021.

b. PT Pindad (Persero) ("PT Pindad")

On March 31, 2021, the Debt Settlement Agreement No. PP-7/PPA/0321 has been signed between the Company and PT Pindad amounted to Rp228,125 for working capital financing with an interest rate of 14% with maturity date on December 18, 2021.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas, maka pada tahun 2021, Grup melakukan reklasifikasi penyajian dari piutang usaha (Catatan 5) menjadi pinjaman investasi jangka pendek.

Based on the agreement above, in 2021, the Group will reclassify the presentation of accounts receivable (Note 5) into short-term investment loans.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Nihil. Jumlah yang direklasifikasi pada tahun berjalan dari piutang usaha (Catatan 5) adalah sebesar Rp228.125. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp185.485. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp42.640.

The balance as of December 31, 2020 is amounting to Nil. The amount reclassified in the current year from accounts receivable (Note 5) is amounting to Rp228,125. Receipts for payments in the current year amounted is amounting to Rp185,485. The balance as of December 31, 2021 is amounting to Rp42,640.

c. PT Artha Bangun Pratama ("PT ABP")

Pada tanggal 3 Desember 2019, kembali dilakukan Addendum VII atas Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek No. PP-20/PPA/1219 terkait dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas satu tahun dan penambahan pagu kredit pinjaman.

c. PT Artha Bangun Pratama ("PT ABP")

As of Desember 3, 2019 has conducted seventh amendment on the overall Amendment short-term loan Agreement No. PP-20/PPA/1219 for extension of the loan term facility of one year and additional loan's plafond.

Pada tanggal 10 Desember 2020, dilakukan Addendum IX perubahan secara menyeluruh pemberian pinjaman jangka pendek No. PP-026/PPA/1220 dengan PT ABP. Tujuan Perubahan adalah menambahkan pagu kredit fasilitas pinjaman sebesar Rp5.365 dan perpanjangan jangka waktu fasilitas sampai dengan 14 Desember 2021.

As of December 10, 2020, Amendment IX was thoroughly amended to present short-term loans No. PP-026 / PPA / 1220 with PT ABP. The purpose of the Amendment is an additional facility amounting to Rp5,365 and an extension of the facility period until December 14, 2021.

Pada tanggal 6 September 2021, dilakukan Addendum X perubahan secara menyeluruh pemberian pinjaman jangka pendek No. PP-22/PPA/0921 Perusahaan dengan PT Artha Bangun Pratama. Tujuan Perubahan adalah menambahkan plafon fasilitas sebesar Rp325.

On September 6, 2021, Addendum X was made to completely amend the provision of short-term loans No. PP-22/PPA/0921 Company with PT Artha Bangun Pratama. The purpose of the Amendment is to add a facility limit of Rp325.

Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman baru kepada PT ABP berdasarkan perjanjian No-PP/19/PPA/1116 tanggal 3 November 2016, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Addendum IV No. PP-025/PPA/1220 bertujuan untuk penambahan fasilitas pinjaman dan perpanjangan jangka waktu sampai dengan 21 November 2021.

The Company provided a new loan facility to PT ABP based on agreement No- PP/19/PPA/1116 dated on November 3, 2016, which has been amended several times, most recently by Amendment IV No. PP-025/PPA/1220 with aims to add loan facilities and extend the term until November 21, 2021.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the agreement extension was still on process.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.711. Jumlah pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp1.219. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp32. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.898.

The balance as of December 31, 2020 is Rp31,711. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp1,219. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp32. The balance as of December 31, 2021 is Rp32,898.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

d. PT Varuna Tirta Prakasya ("PT VTP")

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada PT VTP No. 14 tanggal 2 Desember 2019 dengan memberikan fasilitas pinjaman Modal Kerja dengan jumlah pagu kredit pinjaman sebesar Rp45.000. Sifat fasilitas pinjaman bersifat *revolving*. Tujuan penggunaan dana fasilitas pinjaman hanya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sehubungan dengan pekerjaan proyek yang diterima dari pemberi kerja. Untuk tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 17% per tahun, provisi sebesar 0,5% persen dari setiap jumlah dana fasilitas pinjaman yang dicairkan, dan denda sebesar 6%. Jaminan yang diberikan PT VTP yaitu hak tanggungan atas 2 bidang tanah dan bangunan dan aset atau kekayaan lainnya yang telah dan akan dimiliki PT VTP.

Addendum II No. 018/PPA/0720 tanggal 10 Juli 2020 berupa penurunan suku bunga pinjaman dari 17% menjadi 15% *gross* per tahun.

Addendum III No. 47 tanggal 15 Desember 2020 berupa perpanjangan jangka waktu selama 1 (satu) tahun sampai dengan 1 Desember 2021.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.634. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp1.896. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.738.

e. PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")

Pada tanggal 15 Maret 2019, Perusahaan dan PT DMR telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja No. PP-08/PPA/0319. Jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp20.400 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2020 dengan tingkat suku bunga 12,95% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. PP-07/PPA/0320 pada tanggal 16 Maret 2020 Perusahaan dan PT DMR melakukan restrukturisasi utang sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman *Tranche A* merupakan Utang Pokok Restrukturisasi sebesar Rp9.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

d. PT Varuna Tirta Prakasya ("PT VTP")

Based on the Deed of Working Capital Loan Agreement to PT VTP No. 14 dated December 2, 2019 by providing the Working Capital loan facility at maximum limit amounting to Rp45,000. The nature of the loan facility is revolving. The objective of using the loan facility funds is only to fulfill working capital need in relation to project work received from the employer. The interest rate imposed upon is 17% per annum, the fee amounting to 0.5% percent of each loan facility amount disbursed and the penalty of 6%. The collateral provided by PT VTP are the mortgage over 2 pieces of land and buildings and other assets or properties already and will be owned by PT VTP.

As of July 10, 2020, amendment II No. 018/PPA/0720 to reduce loan interest rates from 17% to 15% *gross* per annum.

As of December 15, 2020, Amendment III No. 47 PT VTP aims to extend the period for 1 (one) year until December 1, 2021.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the agreement extension was still on process.

The balance as of December 31, 2020 is Rp25,634. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp1,896. The balance as of December 31, 2021 is Rp23,738.

e. PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")

On March 15, 2019, the Company and PT DMR have signed a Working Capital Loan Facility Agreement No. PP-08/PPA/0319. The principal amount of the loan facility amounting to Rp20,400 which will mature on March 15, 2020, with an interest rate of 12.95% per annum.

Based on Debt Restructuring Agreement No. PP-07/PPA/0320 on March 16, 2020, The Company and PT DMR conducted debt restructuring as follows:

- *Tranche A* Loan Facility, represent Principal Debt Restructuring amounting to Rp9,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Fasilitas Pinjaman *Tranche B* merupakan Utang Bunga dan Denda Restrukturisasi sebesar Rp570.
- Fasilitas Pinjaman *Tranche C* merupakan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan nilai maksimum sebesar Rp1.965.

Fasilitas pinjaman dikenakan suku bunga sebesar 14,5% per tahun.

Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan dan PT DMR telah menandatangani surat penawaran No. S-1627/PPA/DINV2/0421 perihal Persetujuan Penyelesaian Utang Modal Kerja PT DMR sebesar Rp12.236 yang berasal dari (i) sisa saldo pinjaman pokok *Tranche A, B, dan C Perjanjian Restrukturisasi* sebesar Rp11.443, dan (ii) kewajiban bunga *Tranche A, B, dan C Perjanjian Restrukturisasi* sebesar Rp792. Tanggal jatuh tempo penyelesaian utang tersebut adalah 12 Maret 2022 dan dikenakan suku bunga sebesar 14,5% (gross) per tahun (*floating*).

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.444. Kemudian dilakukan restrukturisasi adalah sebesar Rp792. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.236.

f. PT Energy Management Indonesia (Persero) ("PT EMI")

Pada 22 Desember 2020, Addendum IV No. 62 telah ditandatangani untuk perpanjangan fasilitas pinjaman modal kerja *revolving* dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2021.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh HT II senilai Rp1.100 atas SHGB No. 00034 berupa sebidang tanah seluas 9.156 m² berikut bangunan pabrik, HT III senilai Rp3.000 atas SHGB No. 00034 berupa sebidang tanah seluas 9.156 m² berikut bangunan pabrik dan Fidusia Piutang senilai Rp17.193.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.173. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- *Tranche B Loan Facility*, represent Interest Payable and Restructuring Penalty amounting to Rp570.
- *Tranche C Loan Facility*, represent additional working capital loan facility with a maximum value amounting to Rp1,965.

The loan facility bears an interest rate of 14.5% per annum .

On April 27, 2021, the Company and PT DMR has been signed the offer letter No. S-1627/PPA/DINV2/0421 concerning Approval for Settlement of PT DMR's Working Capital Debt amounting to Rp12,236 originating from (i) the remaining balance of the principal loans of *Tranche A, B, and C Restructuring Agreements* amounting to Rp11,443, and (ii) liabilities *Tranche A, B, and C interest on the Restructuring Agreement* amounting to Rp792. The settlement due date is March 12, 2022 and bears an interest rate of 14.5% (gross) per year (*floating*).

The balance as of December 31, 2020 is Rp11,444. With restructuring amounted to Rp792. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp12,236.

f. PT Energy Management Indonesia (Persero) ("PT EMI")

On December 22, 2020, Addendum IV No. 62 has been signed for the extension of the revolving working capital loan facility with a period of 12 months from the signing of the agreement, due on December 26, 2021.

Until the issuance date of this consolidated financial statements, the agreement extension was still on process.

Collateral value for loan obligation covered by HT II amounted to Rp1,100 for SHGB No. 00034 in form of a piece of land at extent of 9,156 sqm together with the factory building, HT III worth of Rp3,000 for SHGB No. 00034 in form of a piece of land at extent of 9,156 sqm including the factory building and the Receivable Fiduciary worth of Rp17,193.

The balance as of December 31, 2020 is Rp14,173. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp11,000. Receipt

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rp11.000. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp16.750. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.423.

g. PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")

Pada tanggal 26 April 2019, Perusahaan dan PT BSM telah melakukan perpanjangan perjanjian melalui Addendum I atas perjanjian pemberian Pinjaman Modal Kerja No. 5 tentang tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dari Rp85.000 menjadi Rp110.000 untuk memenuhi kebutuhan modal kerja operasional pabrik Gresik di tahun 2020.

Pada tanggal 29 April 2020, Perusahaan dan PT BSM telah melakukan Addendum II No. PP-10/PPA/2020 untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 30 April 2021.

Pada 31 Desember 2019 PT BSM masih dikonsolidasi oleh PT PPAK sehingga saldo awal pada laporan konsolidasian sebesar Nihil. Pada tahun 2020, PT PPAK melakukan perubahan metode pembukuan. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp106.220.

Pada bulan Desember 2021, Perusahaan dan PT BSM telah menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang yang dimana Jatuh tempo Perjanjian pada tanggal 23 Desember 2029, sehingga pinjaman ini direklasifikasi pindah ke pinjaman investasi jangka panjang (Catatan 19).

h. PT Magnesium Gosari Internasional ("MGI")

Berdasarkan PP-04/PPA/0119 tanggal 17 Januari 2019, Perusahaan dan PT MGI telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas Modal Kerja dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp66.000.

Tujuan penggunaan dana fasilitas ini untuk mempergunakan setiap dan seluruh fasilitas pinjaman hanya untuk pembiayaan modal kerja dan operasional pabrik pupuk berbasis *dolomite*.

Kemudian dilakukan addendum I tanggal 14 Januari 2020 PP-2/PPA/0120 untuk perpanjangan Jatuh Tempo sampai dengan 16 Januari 2021.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

from payment in the current year is amounting to Rp16,750. The balance as of December 31, 2021 is Rp8,423.

g. PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")

On April 26, 2019, the Company and PT BSM have extended the agreement through Amendment I of the Working Capital Loan Agreement No. 5 regarding the additional working capital loan facilities from Rp85,000 to Rp110,000 to meet the operational working capital needs of the Gresik factory in 2020.

On April 29, 2020, The Company and PT BSM have made Addendum II No. PP-10/PPA/2020 to extend the loan facility period until April 30, 2021.

On December 31, 2019, PT BSM was still being consolidated by PT PPAK, thus the beginning balance in consolidated financial statement amounted to Nil. In 2020, PT PPAK made a change in the bookkeeping method. Receipts from payments in the current year amounted to Nil. The balance as of December 31, 2020 is amounting to Rp106,220.

In December 2021, The Company and PT BSM has signed a debt restructuring agreement where the agreement matures on December 23, 2029, so this loan is reclassified to a long-term investment loan (Note 19).

h. PT Magnesium Gosari Internasional ("MGI")

Based on PP-04/PPA/0119 dated January 17, 2019, the Company and PT MGI have signed an investment loan facility agreement for the Working Capital with a total principal amount of Rp66,000.

The purpose of this facility fund for any and all credit facilities is only to finance working capital and for the operation of a *dolomite* fertilizer plant.

Later on, Amendment I was made on January 14, 2020, PP-2/PPA/0120 for the maturity extension until January 16, 2021.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di jaminakan berupa 3 lokasi tanah dan bangunan seluas 19.445 m² atas SHGB No.0024, 47.538 m² atas SHGB No.0004, 7.462 m² atas SHGB No.0025 berikut bangunan pabrik, HT III senilai Rp3.000 atas SHGB No. 00034 berupa sebidang tanah seluas 9.156 m² berikut bangunan pabrik dan Fidusia Piutang senilai Rp17.193.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh HT I senilai Rp21.389 atas SHGB No. 0024 seluas 19.445 m², HT I senilai Rp52.291 atas SHGB No.0004 seluas 47.538 m², HT I senilai Rp8.208 atas SHGB No.0025 seluas 7.462 m² dan Jaminan Fidusia atas Mesin senilai Rp107.438.

Pada tanggal 18 Oktober 2021 dilakukan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby yang menerangkan bahwa PT MGI akan melakukan pembayaran utang terjadwal dalam jangka waktu maksimal 5 tahun dengan tenggang waktu 9 bulan sehingga pembayaran hutang paling lambat hingga tahun 2027, sehingga pinjaman ini direklasifikasi ke pinjaman investasi jangka panjang (Catatan 19).

i. PT Alim Investindo ("PT AI")

Berdasarkan Perjanjian No. 8 pada tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, S.H., Perusahaan memberikan Fasilitas pembiayaan Jangka Pendek kepada PT AI yang digunakan untuk modal kerja PT Alumindo Light Metal Industry Tbk, dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp300.000, tingkat suku bunga 10,25% per tahun, biaya provisi sebesar 2,25% dari fasilitas pinjaman yang dibayarkan secara bertahap. Jaminan atas fasilitas pinjaman ini berupa tanah dan *Corporate Guarantee* senilai Rp1.030.000 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2022.

Pada tanggal 30 Maret 2021 telah dilakukan Addendum Perjanjian melalui Akta No.8 yang dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, S.H., untuk perpanjangan jangka waktu menjadi tanggal 27 Februari 2022, biaya provisi sebesar 3,2% dari sisa saldo pinjaman dan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp10.000 per bulan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Collateral value for the loan obligations covered in the form of 3 land locations and buildings covering an area of 19,445 sqm for SHGB No. 0024, 47,538 sqm on SHGB No. 0004, 7,462 sqm on SHGB No. 0025 including a factory building, HT III amounted to Rp3,000 for SHGB No. 00034 in the form of a block of land with total area of 9,156 sqm including a factory building and a Receivable Fiduciary amounted to Rp17,193.

Collateral value for the loan obligations covered by HT I is Rp21,389 for SHGB No. 0024 covering an area of 19,445 sqm, HT I worth Rp52,291 for SHGB No.0004 covering an area of 47,538 sqm, HT I valued at Rp8,208 for SHGB No.0025 covering an area of 7,462 sqm and Fiduciary Guarantee for Machinery valued at Rp107,438.

On October 18, 2021, a Decree on the Ratification of Peace (Homologation) Number 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby was made which explains that PT MGI will make scheduled debt payments within a maximum period of 5 years with grace period of 9 months thus the repayment of debt (Note 20) will be made by no later than 2027, therefore this loan is reclassified to a long-term investment loan (Note 19).

i. PT Alim Investindo ("PT AI")

Based on the Agreement No. 8 on February 28, 2020, which was drawn before Notary Public Rismalena Kasri, S.H., the Company provided Short Term financing facility to PT AI used for working capital of PT Alumindo Light Metal Industry Tbk, loan facility of Rp300,000, interest rate of 10.25% per annum, fee on 2.25% of the loan facility to be paid each phase. The collaterals for this loan facility are land and Corporate Guarantee amounting to Rp1,030,000 due on February 27, 2022.

As of March 30, 2021, an Amendment to the Agreement through Deed No. 8 which was drawn before the Notary Rismalena Kasri, S.H., for an extension maturity date to February 27, 2022, with provision fee of 3.2% of the outstanding loan and principal installment obligation amounting to Rp10,000 per month.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kewajiban PT AI dilindungi oleh jaminan berupa HT I Tanah seluas 538.575 m² yang berlokasi di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atas nama PT Maspion Industrial Estate dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No.693. Jumlah kecukupan jaminan adalah sebesar Rp390.000.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp300.000. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp110.000. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp190.000.

j. PT Varia Intra Finance ("PT VIF")

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Fasilitas Pembiayaan kepada PT VIF pada tanggal 29 November 2019 No.86, Perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, maksimum sebesar Rp160.000 dengan tingkat suku biaya pendanaan sebesar 14% per tahun yang jatuh tempo pada 28 November 2021.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.

Jaminan atas fasilitas pinjaman ini berupa fidusia piutang sebesar Rp208.000 dari 10.955 debitur, *corporate guarantee* yang jatuh tempo tanggal 28 November 2021 atas nama PT Alter Abadi Tbk dan personal *guarantee* atas nama Rachman Hakim.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp160.000. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp160.000.

k. PT Polowijo Gosari ("PT PG")

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Pinjaman No. PP-1012/PPA/0520 tanggal 27 Mei 2020, jangka waktu pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 28 Mei 2021 untuk pembiayaan bahan baku dan biaya transporter atas kontrak pengadaan pupuk majemuk/tunggal dan pembiayaan biaya transporter atas kontrak pengadaan pupuk berbasis *dolomite*.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses pengurusan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT AI's obligation is protected by the collateral in form of HT I Land at extent of 538,575 sqm located in Desa Sukomulyo, Manyar Sub District, Gresik District, East Java Province in favor of PT Maspion Industrial Estate with evidence of ownership in form of SHGB No.693. Total collateral adequacy amounted to Rp390,000.

The balance as of December 31, 2020 is Rp300,000. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp110,000. The balance as of December 31, 2021 is Rp190,000.

j. PT Varia Intra Finance ("PT VIF")

Based on the Financing Facility Loan Agreement to PT VIF dated November 29, 2019 No. 86, the Company provided the financing facility for the working capital need, maximum amounting to Rp160,000 at financing fee rate of 14% per annum due on November 28, 2021.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the agreement extension was still on process.

The collateral for this facility are a receivables fiduciary amounting to Rp208,000 from 10,955 debtors, corporate guarantee due on November 28, 2021 in favor of PT Alter Abadi Tbk and personal guarantee in favor of Rachman Hakim.

The balance as of December 31, 2020 is Rp160,000. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp160,000.

k. PT Polowijo Gosari ("PT PG")

Based on Addendum IV Loan Agreement No. PP-1012/PPA/0520 dated 27 May 2020, the loan term has been extended until 28 May 2021 for financing raw materials and transporter costs for the procurement contract for compound/single fertilizers and financing transporter costs for dolomite-based fertilizer procurement contracts.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, agreement extension was still on process.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp131.742. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp131.742.

**l. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
("PT WMP")**

Pada tanggal 11 Mei 2021, PT WMP dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi No. 26 tentang penambahan modal kerja untuk PT Widodo Makmur Unggas dengan pagu kredit pinjaman maksimal Rp75.000 dengan jangka waktu selama 18 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022 dengan tingkat suku bunga 12% *gross* per tahun.

Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 dilakukan Perjanjian Kerjasama investasi antara Perusahaan dengan PT WMP No. 75 tentang penambahan modal kerja untuk PT Widodo Makmur Unggas dengan *plafond* sebesar Rp23.692 dengan jangka waktu selama 18 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2023 dengan tingkat suku bunga *gross* 12% per tahun.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Nihil. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp47.846. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.846.

m. PT Bintang Abadi Sempurna ("PT BAS")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Invoice Financing kepada PT BAS No. 99 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Desman S.H., M.Hum. M.M., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah pokok pinjaman maksimum sebesar Rp50.000 untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja untuk pengadaan batubara kepada PT PLN Batubara. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 19 Agustus 2020 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 13% per tahun, biaya monitoring 7% per tahun dan biaya provisi sebesar 0,5% dari jumlah dana yang dicairkan dalam setiap penarikan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as of December 31, 2020 is Rp131,742. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp131,742.

**l. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
("PT WMP")**

On May 11, 2021, PT WMP and the Company has signed the Investment Cooperation Agreement No. 26 regarding the addition of working capital for PT Widodo Makmur Unggas with a credit limit of Rp 75,000 with a term of 18 months which falls on November 25, 2022 with an interest rate of 12% *gross* per year.

Then on October 19, 2021, a Cooperation Agreement was made between the Company and PT WMP No. 75 regarding the additional of working capital for PT WMP with a limit of Rp23,692 with a period of 18 months and will mature on April 26, 2023 with a *gross* interest rate of 12% per year.

The balance as of December 31, 2020 is Nil. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp47,846. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp47,846.

m. PT Bintang Abadi Sempurna ("PT BAS")

Based on the Deed of Investment Cooperation Agreement in the Form of Invoice Financing Loans to PT BAS No. 99 dated August 20, 2019, which was drawn before Desman S.H., M.Hum. M.M., Notary in North Jakarta Administrative City, the Company provided a loan facility with a maximum principal amount of Rp50,000 to finance working capital needs for coal procurement to PT PLN Batubara. The loan facility matures on August 19, 2020, and bears 13% *per annum* interest rate, a monitoring fee of 7% *per annum* and a provision fee of 0.5% based on the total disbursed funds in each withdrawal.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, telah diserahkan jaminan berupa:

1. Dana di *joint signature account* atas nama Perusahaan dan PT BAS yang dibuka pada kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang ditunjuk oleh Perusahaan yang dibuka secara bertahap sesuai jumlah penarikan dana Fasilitas Pinjaman dengan nilai serendah-rendahnya 30% dari sisa saldo pokok Fasilitas Pinjaman. Dana Deposito tersebut diblokir untuk kepentingan pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada Perusahaan;
2. Fidusia atas piutang Debitur kepada PLNBB berdasarkan Proyek PLNBB dengan nilai serendah-rendahnya 125% dari pagu kredit Fasilitas Pinjaman.

Sampai dengan tanggal jatuh tempo PT BAS belum dapat melunasi kewajibannya kepada Perusahaan. Perusahaan melalui kantor hukum Firco telah melakukan proses hukum terkait penyelesaian kewajiban pelunasan PT BAS. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, proses hukum masih berlanjut.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.730. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.730.

n. PT Inti Adhiyasa ("PT IA")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.6 tanggal 29 Mei 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada PT IA berupa pembiayaan pembangunan rumah sederhana untuk proyek perumahan kota Kaharupan Purwakarta dengan saldo maksimum pinjaman senilai Rp50.000. Pinjaman dikenakan tingkat bunga 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian.

Berdasarkan Akta Addendum V Perjanjian Pinjaman No. 6 tanggal 7 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, Fasilitas Pinjaman PT IA telah diperpanjang selama 12 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

As the collateral for the repayment of all debts, the collateral submitted in form of :

1. Funds in the joint signature account in favor of the Company and PT BAS opened in the branch office of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, appointed by the Company opened in phases according to the amounting to withdrawal of Loan Facility funds at minimum value of 30% of the outstanding principal of the Loan Facility. The Deposit Fund is blocked for the objective of payment of all Debtor's obligations to the Company;
2. Fiduciary of the Debtor's receivables to PLNBB based on PLNBB Project at minimum value of 125% of the Loan Facility limit.

Until the maturity date PT BAS has not been able to pay off its obligations to the Company. The Company through Firco Law Firm has carried out a legal process related to the settlement of PT BAS's obligation to pay off. Until the issuance date of this consolidated financial statement, the legal process was still ongoing.

The balance as of December 31, 2020 is Rp35,730. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp35,730.

n. PT Inti Adhiyasa ("PT IA")

Based on Loan Agreement No.6 dated May 29, 2017, the Company provided a Loan Facility to PT IA in the form of financing for the construction of a simple house for the housing project of the city of Kaharupan Purwakarta with a maximum loan amounted to Rp50,000. The loan bears an interest rate of 10% per annum with a loan term of 24 months from the signing date of the Agreement.

Based on the Deed Amendment V Loan Agreement No. 6 dated September 7, 2020 drawn before Notary Lenny Janis Ishak, Loan Facility of PT IA has been extended for 12 months which will mature on May 28, 2022.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pemberian pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas ±4,7 Hektar dengan bukti kepemilikan SHGB atas nama PT IA yang di atasnya telah berdiri perumahan lama dan sebagian besar telah terjual, tanah seluas ±5,2 Hektar berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT IA, tanah seluas 2.8 Hektar berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan SPH yang telah dilakukan proses pengukuran dan telah memperoleh peta bidang, dan tanah seluas 6,1 Hektar dengan bukti kepemilikan SPH dan belum dilakukan proses pengukuran. Jumlah nilai jaminan sebesar Rp38.800.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.279. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp33.279.

o. PT Niaga Bumi Energi ("PT NBE")

Pada tanggal 1 Februari 2019 telah dilakukan addendum II perjanjian No. 06 perihal penambahan pagu kredit fasilitas pinjaman *Tranche A* sebesar Rp1.000.

Pada tanggal 24 Juli 2019 telah dilakukan addendum perjanjian No. 101 perihal penambahan pagu kredit fasilitas pinjaman *Tranche A* sebesar Rp2.500 dan pagu kredit fasilitas pinjaman *Tranche B* sebesar Rp5.000.

Pada tanggal 13 Agustus 2020 telah ditandatangani Addendum Perjanjian Pinjaman No. PP-29 yang berisi mekanisme penyelesaian pinjaman dengan cara sebesar 70% akan dibayar secara bulanan sampai dengan akhir tahun dan sebesar 30% akan diangsur terhitung sejak awal tahun 2021 sampai dengan akhir bulan Mei 2021, dan permohonan penghapusan denda atas fasilitas *Tranche C*.

Sampai dengan tanggal jatuh tempo, PT NBE belum dapat melunasi kewajibannya kepada Perusahaan sehingga pada tanggal 4 Juni 2021 telah diadakan rapat antara Perusahaan dan PT NBE terkait penyelesaian kewajiban.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, restrukturisasi atas penyelesaian hutang PT NBE masih dalam proses.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

This loan is secured by a land area of ±4.7 hectares with proof of ownership of SHGB in the name of PT IA on which the old housing estate has been built and most of it has been sold, a land area of ±5.2 hectares along with the building that stands on it under the name of PT IA, land with an area of 2.8 hectares along with buildings standing on it with proof of ownership of SPH which has been measured and has obtained a plot map, and land of 6.1 hectares with proof of ownership of SPH and the measurement process has not been carried out. The total value of the guarantee is Rp38,800.

The balance as of December 31, 2020 is Rp33,279. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp33,279.

o. PT Niaga Bumi Energi ("PT NBE")

On February 1, 2019, Amendment II was entered into the agreement No. 06 regarding the addition of the Tranche A loan facility limit amounting to Rp1,000.

On July 24, 2019, was entered into the Amendment III to agreement No. 101 regarding addition of Tranche A loan facility limit amounting to Rp2,500 and Tranche B loan facility limit amounting to Rp5,000.

On August 13, 2020, the Addendum to the Loan Agreement No. PP-29 has been signed which contains the loan settlement mechanism by means of 70% will be paid monthly until the end of the year and 30% will be paid in installments starting from the beginning of 2021 until the end of May 2021, and an application for the elimination of fines for the Tranche C facility.

Until the maturity date, PT NBE has not been able to pay off its obligations to the Company so thus on June 4, 2021, a meeting was held between the Company and PT NBE regarding the settlement of obligations.

Until the issuance of this consolidated financial statements, restructuring of PT NBE's debt settlement was still in process.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pinjaman kepada PT NBE dijamin dengan tagihan usaha (berupa fidusia) dan Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan No. 3164/2018 dengan nilai jaminan berdasarkan KJPP tanggal 6 Mei 2019 sebesar Rp53.179.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.583. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp169. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.414.

p. PT Duta Cipta Pakar Perkasa ("PT DCP")

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan putusan (sela) mengabulkan permohonan karyawan PT DCP masuk dalam PKPU sementara. Pengadilan Negeri Surabaya melakukan sidang pembacaan putusan pada tanggal 28 Februari 2020, dengan putusan PT DCP dinyatakan pailit dengan segala konsekuensinya dan mengangkat Tim Pengurus Harta Kepailitan (Kurator).

Pada tahun 2020, Perusahaan berupaya mendapatkan hasil eksekusi boedel pailit yang dilakukan oleh kurator. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dapat terlaksana sehubungan dengan Tim Kurator dalam proses penyusunan boedel pailit.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di cover oleh PT DCP berupa HT Peringkat 2-8 dari 52 Sertifikat Tanah yang merupakan jaminan bersama dengan Bank Mandiri (*Security Sharing Agreement*), jaminan Fidusia tagihan dan persediaan, dan HT Peringkat satu Tanah & Bangunan. Nilai yang tercakup dari jaminan tersebut sebesar Rp226.554.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.706. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.706.

q. PT Gali Terus Sejahtera ("PT GTS")

Pada tanggal 27 Juni 2019 dilakukan Addendum I Perjanjian Investasi No. 15 dengan PT GTS.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The loan to PT NBE is secured by a accounts receivable (in the form of a fiduciary) and Mortgage on a plot of land and building No. 3164/2018 with a guarantee value based on Appraisal on May 6, 2019 amounting to Rp53,179.

The balance as of December 31, 2020 is Rp31,583. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp169. The balance as of December 31, 2021 is Rp31,414.

p. PT Duta Cipta Pakar Perkasa ("PT DCP")

On October 15, 2019, the District Court of Surabaya issued the Verdict (interlocutory) which grant the application of the employee PT DCP to be included in the temporary PKPU. The District Court of Surabaya held the verdict reading session on February 28, 2020, with the verdict that PT DCP has been declared bankrupt with all consequences and was appointed the Bankruptcy Asset Management Team (Receiver).

In 2020, the Company tried to obtain the execution result of bankruptcy case carried out by the receiver. But, until December 31, 2021, it has not been carried out, due to the fact that the Receiver Team is still in the preparation process of the bankruptcy case.

The collateral value for the loan obligations covered by PT DCP in form of HT Ranks 2-8 of 52 Land Certificates constituting the joint collateral with Bank Mandiri (Security Sharing Agreement), Fiduciary collateral of the collection and inventory, and HT Rank one Land & Building. The value covered by the collateral amounted to Rp226,554.

The balance as of December 31, 2020 is Rp26,706. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp26,706.

q. PT Gali Terus Sejahtera ("PT GTS")

On June 27, 2019, Amendment I to Investment Agreement No. 15 with PT GTS was entered.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 26 Agustus 2019, dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman melalui Addendum II Perjanjian Investasi No.121 yang berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan antara Perusahaan dan PT GTS dengan disaksikan oleh Kantor Pengacara Negara – Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang utamanya berisi kesanggupan PT GTS untuk menyelesaikan/melunasi seluruh kewajiban terutang kepada Perusahaan dan penambahan jaminan pribadi dari Tuan Andry Yunus dengan tanggal jatuh tempo yaitu 1 Desember 2020.

Sampai dengan tanggal jatuh tempo PT GTS belum dapat melunasi kewajibannya kepada Perusahaan sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 telah diadakan rapat antara Perusahaan dan PT GTS yang disaksikan oleh Kantor Pengacara Negara – Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Akan dilakukan rapat lanjutan di bulan Maret 2021.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas hasil rapat lanjutan antara Perusahaan dengan PT GTS.

Nilai jaminan atas kewajiban PT GTS dilindungi oleh jaminan berupa fidusia mesin dan alat, Jaminan Perusahaan dari PT Kelsri, Jaminan Pribadi, HT No. 0785/2018 dan HT No.3619/2019. Jumlah kecukupan jaminan sebesar Rp35.193.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.401. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp669. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.732.

r. PT Indah Prakasa Sentosa ("PT IPS")

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Proyek Distribusi Bahan Bakar Minyak pada tanggal 11 Januari 2019 untuk pagu kredit pinjaman senilai Rp20.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Adapun rincian atas fasilitas tersebut dibagi menjadi kedalam 2 *Tranche*. *Tranche A* – dengan tujuan pembiayaan untuk *refinancing* Pembiayaan modal kerja PT IPS di Bank Central Asia (BCA) dan *Tranche B* – dengan tujuan pembiayaan modal kerja Pembelian Bahan Bakar Minyak dalam rangka pemenuhan pesanan dari konsumen.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On August 26, 2019, there was extension of the loan term through Amendment II to Investment Agreement No. 121 based on the Minutes of Agreement between the Company and PT GTS witnessed by the State Attorney's Office - Attorney General of the Republic of Indonesia, especially regarding the capability of PT GTS to settle/ pay off all its obligations to the Company and the addition of personal guarantee from Mr. Andry Yunus with the due date of December 1, 2020.

Until the due date, PT GTS does not yet able to pay off its obligations to the Company thereby on December 18, 2020, the meeting was held between the Company and PT GTS witnessed by the State Attorney's Office - Attorney General of the Republic of Indonesia. The follow-up meeting will be held in March 2021.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, there has been no decision on the results of the meeting between the Company and PT GTS.

The collateral value for PT GTS's obligations is covered by the collateral in form of machine and equipment fiduciary, Corporate Guarantee from PT Kelsri, Personal Guarantee, HT No. 0785/2018 and HT No. 3619/2019. Total collateral cover amounted to Rp35,193.

The balance as of December 31, 2020 is Rp25,401. The total loan disbursement in the current year amounted to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp669. The balance as of December 31, 2021 is Rp24,732.

r. PT Indah Prakasa Sentosa ("PT IPS")

The Company has signed the Cooperation Agreement on Investment in form of Provision of Financing facility for Oil Fuel Distribution Project on January 11, 2019, for the loan limit amounting to Rp20,000 with term of 12 months. The details of these facilities are divided into 2 tranches with the objective of *Tranche A* - Financing for refinancing of PT IPS' working capital financing with Bank Central Asia (BCA) and the objective of *Tranche B* - working capital financing for Procurement of Oil Fuel to fulfill the consumers' orders.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Jaminan kewajiban pinjaman yang dijamin berupa SHGB No 1537 (luas 3280 m²) dan SHGB No 1538 (luas 2960 m²) di Jl Raya Serang-Cilegon Km 17,3, Kabupaten Serang atas nama PT IPS, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Kantor Cabang dan garasi armada truk milik PT IPS.

Hak Tanggungan atas kedua SHGB tersebut telah diikat dengan nilai pengikatan sebesar Rp18.000.

Pada tanggal 6 Mei 2021 telah dikeluarkan surat keterangan No. 080/NOT/V/2021 dari Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., yang menerangkan bahwa PT IPS dan Perusahaan sedang dalam proses pembuatan Akta perjanjian Restrukturisasi Hutang tentang penjadualan kembali atas pelunasan hutang berupa hutang *Tranche I* sebesar Rp17.728 dan *Tranche II* sebesar Rp5.654.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.891. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp2.837. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp355. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.373.

s. PT Bina Patria Transmitta ("PT BPT")

Pada tanggal 16 Oktober 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama investasi Dalam Bentuk Pemberian Fasilitas Pinjaman Kepada PT BPT dengan No. PP-07/PPA/1018. Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp24.500 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun dan biaya provisi sebesar 1% dari pagu kredit pinjaman, jatuh tempo pada 15 Oktober 2020, terdiri dari Fasilitas Pinjaman *Tranche A* yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan Investasi dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp12.000, tujuan penggunaannya yaitu untuk *refinancing* pinjaman investasi dan pembiayaan kebutuhan modal kerja; dan Fasilitas Pinjaman *Tranche B* diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp12.500, digunakan untuk pembiayaan modal.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The collateral for the loan obligations is covered in the form of SHGB No. 1537 (3280 sqm) and SHGB No. 1538 (2960 sqm) on Jl. Raya Serang-Cilegon Km 17.3, District Serang in favor of PT IPS, in form of land and building erected thereon in form of Branch Office and garage for the truck fleet owned by PT IPS.

The Mortgage Right on both SHGB has been tied with the binding value amounting to Rp18,000.

As of May 6, 2021, a certificate No. 080/NOT/V/2021 from Notary Lenny Janis Ishak, S.H., has been issued, which explained that PT IPS and the Company are in the process of making a Debt Restructuring Agreement Deed regarding the rescheduling of the debt repayment for *Tranche I*'s debt amounting to Rp17,728 and *Tranche II* amounting to Rp5,654.

The balance as of December 31, 2020 is Rp14,891. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp2,837. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp355. The balance as of December 31, 2021 is Rp17,373.

s. PT Bina Patria Transmitta ("PT BPT")

On October 16, 2018, the Cooperation Agreement on Investment in form of Loan Facility Provision to PT BPT under No. PP-07/PPA/1018 has been entered into. The Company provided the loan facilities in form of investment loan and working capital loan with the limit amounting to Rp24,500 at interest rate of 13% per annum and fee of 1% of the limit, due on October 15, 2020, consisting of the *Tranche A* Loan Facility provided in form of Investment Financing with limit amounting to Rp12,000, the objective was for investment loan refinancing and capital requirement financing; and the *Tranche B* Loan Facility was provided in form of working capital financing with limit amounted to Rp12,500, that was used for capital financing.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa dua bidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp12.760, jaminan fidusia atas mesin dan alat berat dan jaminan fidusia tagihan/piutang dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp17.500.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses pengurusan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.176. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.176.

t. PT CDM Swarnadipa ("PT CDMS")

Pada tanggal 20 Februari 2019 dilakukan Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dengan Perusahaan berupa pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas sebesar Rp14.600 dengan jatuh tempo pada 19 September 2019. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas pembiayaan *Tranche A* sebesar Rp7.300 dan fasilitas pembiayaan *Tranche B* sebesar Rp7.300. Tujuan penggunaan pinjaman *Tranche A* adalah untuk pembiayaan investasi dan untuk pembelian mesin sedangkan *Tranche B* untuk pembiayaan modal kerja seperti pembelian batu dari tambang, biaya produksi operasional dan lainnya.

Pemberian pinjaman adalah dengan tingkat suku bunga 14,5% per tahun dengan pembayaran bunga setiap bulan. Perusahaan juga berhak atas hak bonus, yaitu dana yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan yang berasal dari margin penjualan batu split dengan pembayaran dan formula sesuai kesepakatan.

Saat ini PT CDMS sedang ditangani oleh kantor hukum Fircro untuk meminta Jamintel agar melacak aset yang telah dijaminkan ke Perusahaan oleh PT CDMS.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.351. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.351.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

As the collateral for the repayment of all debts, several collateral were provided in form of two pieces of land together with the building and all of appurtenances thereof that will be charged with the First Rank Mortgage Right amounting to Rp12,760, fiduciary collateral for machinery and heavy equipment and fiduciary collateral of the claim/ receivables with the collateral value of at least Rp17,500.

Until the issuance date of these consolidated financial statement, the extension of agreement is still in the arrangement process.

The balance as of December 31, 2020 is Rp16,176. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp16,176.

t. PT CDM Swarnadipa ("PT CDMS")

On 20 February 2019, there was Working Capital Loan Agreement has been entered into, the Company provided the investment financing and working capital financing facility amounted to Rp14,600, due on September 19, 2019 with term until September 19, 2019. The facilities consist of *Tranche A* financing facility of Rp7,300 and *Tranche B* financing facility amounting to Rp7,300. The objective for the application of *Tranche A* loan is to finance the investment and the procurement of machinery, while *Tranche B* is to finance the working capital such the procurement of the stone from the mines, operational production costs and others.

The provision of loan is at the interest rate of 14.5% per annum with the interest payment by monthly. The Company is also entitled to bonus right, which is the funds that shall be paid to the Company from the split stone sale margin with the payment and formula according to the agreement.

Currently PT CDMS is being handled by Fircro Law Firm to ask Jamintel to track assets that have been pledged to the Company by PT CDMS.

The balance as of December 31, 2020 is Rp14,351. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp14,351.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

u. PT Riscon Duta Sarana ("PT RDS")

Menindaklanjuti batas akhir penyelesaian SUK pada tanggal 31 Desember 2019, PT Riscon Victory ("PT RV") selaku *corporate guarantor* PT RDS telah memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengambil alih penyelesaian kewajiban PT RDS kepada Perusahaan.

Dalam perkembangannya PT RV telah diputus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga PT RDS mengajukan perubahan permohonan melalui restrukturisasi penyelesaian Surat Utang Konversi ("SUK").

Menanggapi permohonan tersebut, pada tanggal 18 Mei 2020, telah dilakukan rapat Perusahaan dengan menyetujui restrukturisasi SUK menjadi fasilitas pinjaman PT RDS dengan jangka waktu 24 bulan dan PT RDS telah menandatangani dan menyetujui surat penawaran restrukturisasi yang disampaikan oleh Perusahaan, surat PPA No. S-2635/PPA/DI/0620 tertanggal 18 Juni 2020.

Pada tanggal 29 September 2020, PT RDS telah membayar biaya provisi sebesar 0,5% per tahun dari sisa saldo pokok kewajiban untuk sebagai syarat penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Hutang (PRH) PT RDS. Berdasarkan hasil pengecekan sertifikat dan pengukuran/*plotting* aset jaminan Kalisuren Bogor di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) rekanan Perusahaan yang telah ditunjuk PT RDS, terdapat *overlapping* tiga bidang tanah di aset jaminan Kalisuren, sehingga BPN menawarkan solusi untuk diadakan mediasi antara PT RDS dengan pihak-pihak terkait pada *overlapping* tanah tersebut. Pada tanggal 30 Desember 2020, BPN telah mengeluarkan jadwal resmi untuk proses mediasi tersebut yang akan dilakukan di BPN Bogor pada tanggal 3 Februari 2021. Akan ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang masing-masing pihak.

Saat ini Perusahaan masih menunggu hasil mediasi jaminan aset tanah Kalisuren di BPN Bogor sebelumnya dilakukannya penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Hutang (PRH) PT RDS dan pengikatan Hak Tanggungan (HT) jaminan PT RDS.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

u. PT Riscon Duta Sarana ("PT RDS")

Following up the deadline of SUK settlement on December 31, 2019, PT Riscon Victory ("PT RV") as the *corporate guarantor* of PT RDS has issued the statement on capability to take over the settlement of PT RDS' obligations to the Company.

In its development, for PT RV, the Application for Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) has been approved by the Commercial Court of Central Jakarta, thereby PT RDS filed the application for change through the restructuring of Convertible Notes ("SUK") settlement.

In response to the application, on May 18, 2020, the Investment Committee meeting was held to approve the restructuring of SUK into PT RDS loan facility with term of 24 months and PT RDS has signed and approved the restructuring offer letter that was submitted by the Company, based on PPA letter No. S-2635/PPA/DI/0620 on June 18, 2020.

On September 29, 2020, PT RDS has paid the payment of fee amounting to 0.5% per annum of the outstanding principal obligation to process the signing requirements of Debt Restructuring Agreement (PRH) of PT RDS. Based on the result verification certificate and measuring/*plotting* the collateral assets of Kalisuren Bogor at the National Land Board (BPN) Bogor by the Conveyancer (PPAT) of the Company partners that was appointed by PT RDS, there are overlapping of three pieces of land in the collateral assets of Kalisuren, thereby BPN offers the solution for mediation between PT RDS and the relevant parties on the overlapping land. On December 30, 2020, BPN has issued the official schedule for mediation process to be carried out at BPN Bogor on February 3, 2021. It will be followed up by the re-measurement of each party.

Currently, the Company is still waiting for the mediation result of Kalisuren's land asset collateral at BPN Bogor before the signing of the Debt Restructuring Agreement (PRH) of PT RDS and the binding of Mortgage (HT) as collateral by PT RDS.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai Jaminan PT RDS berupa Tanah, 8 Kavling ruko, 2 Unit ruko, dan 5 Unit Rumah. Jumlah Nilai Jaminan sebesar Rp9.900.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.000. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp2.201. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp82. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.119.

v. PT Prabu Wahana International ("PT PWI")

Pada tanggal 31 Januari 2019 telah dilakukan perjanjian pemberian pinjaman modal kerja proyek subsidi Angkatan udara perintis di wilayah Nabire No. PP-06/PPA/0119 dan PP-07/PPA/0119 perjanjian pemberian pinjaman modal kerja proyek subsidi Angkatan udara perintis di wilayah Sitoli dan Nabire, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019.

Nilai Jaminan atas kewajiban pinjaman yang di jamin adalah berupa hak gadai 100% saham PT PWI sebesar Rp2.000.

Saat ini PT Prabu Wahana Internasional sedang ditangani oleh kantor hukum Firco dalam rangka memberikan kajian hukum sehubungan dengan proses PKPU.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.343. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.343.

w. PT Primarindo Asia Infrastructure ("PT PAI")

Tanggal 12 April 2021 telah dilakukan penandatanganan addendum II antara Perusahaan dengan PT PAI No.PP8/PPA/0421 tentang pemberian pinjaman dana talangan yang bertujuan untuk pengurusan perpanjangan jangka waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas aset tanah milik PT PAI yang akan dibayar lunas dari hasil penjualan pada 31 Agustus 2021, dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp1.561 dengan suku bunga 14% gross per tahun.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The collateral value of PT RDS is in form of land, 8 lots of storehouses, 2 store- houses, and 5 house units. Total collateral value amounted to Rp9,900.

The balance as of December 31, 2020 is Rp9,000. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp2,201. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp82. The balance as of December 31, 2021 is Rp11,119.

v. PT Prabu Wahana International ("PT PWI")

On January 31, 2019, there was an agreement on provision of working capital loan for pioneering Air Force subsidy project in Nabire region No. PP-06/PPA/0119 and PP-07/PPA/0119 in Sitoli area, the agreement on provision of working capital loan for pioneering air force subsidy project in Sitoli and Nabire area, due on December 31, 2019.

The collateral value for the loan obligations covered is in form of pledge of 100% of shares of PT PWI amounting to Rp2,000.

Currently PT Prabu Wahana Internasional is being handled by Firco Law Firm for the PKPU process by providing a legal advise.

The balance as of December 31, 2020 is Rp8,343. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp8,343.

w. PT Primarindo Asia Infrastructure ("PT PAI")

On April 12, 2021, the Amendment II between the Company and PT PAI with agreement No. PP8/PPA/0421 has been signed regarding the provision of a bailout loan aimed at managing the extension of Right to Build Certificate period on land owned by PT PAI which will be paid in full from the sales on August 31, 2021, with a limit of Rp1,561 with an interest rate of 14% gross per annum.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 31 Agustus 2021 telah dilakukan addendum III antara Perusahaan dengan PT PAI No.PP-20/PPA/0821 tentang perpanjangan Jangka waktu untuk pelunasan fasilitas pembiayaan Tranche C sampai dengan 31 Januari 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Nihil. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp1.561. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp600. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp961.

x. PT Carpediem Mandiri ("PT CM")

Penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT CM No. 40 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019. Pada tanggal tersebut telah dilakukan perubahan perjanjian restrukturisasi hutang dengan PT CM.

PT CM telah melakukan tambahan pengikatan jaminan kepada Perusahaan melalui gadai atas seluruh saham PT Carpediem Aviassi Mandiri (entitas anak PT Carpediem), yaitu:

- 1) Akta Gadai Saham PT CM kepada Perusahaan No. 66 tanggal 18 Februari 2020 setara dengan Rp90.000 (60% saham PT CAM);
- 2) Akta Gadai Saham Bp. Syafruddin Rachman kepada Perusahaan No. 67 tanggal 18 Februari 2020 setara dengan Rp60.000 (40% saham PT CAM).

Sampai dengan tanggal jatuh tempo PT CM belum dapat melunasi kewajibannya kepada Perusahaan. Perusahaan melalui surat Direktur Utama No. S-4467/PPA/DU/1020 tanggal 20 Oktober 2020 memohon bantuan pendampingan hukum dan dukungan aspek hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penyelesaian kewajiban kepada Perusahaan.

Kemudian pada tanggal 5 November 2021 dilakukan Perjanjian restrukturisasi hutang atas fasilitas pinjaman yang terhutang oleh PT CM dengan tujuan perpanjangan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, serta tunggakan bunga yang tidak dikenakan bunga.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On August 31, 2021, addendum III was carried out between the Company and PT PAI with agreement No. PP-20/PPA/0821 regarding the extension of the period for repayment of the Tranche C financing facility until January 31, 2022.

The balance as of December 31, 2020 is Nil. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp1,561. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp600. The balance as of December 31, 2021 is Rp961.

x. PT Carpediem Mandiri ("PT CM")

The signing of the Deed of Amendment to Debt Restructuring Agreement of PT CM No. 40 was held on August 9, 2019. On that date, the amendments to debt restructuring agreement with PT CM were entered.

PT CM has provided the additional binding collaterals to the Company through the pledge of all shares of PT Carpediem Aviassi Mandiri (subsidiary of PT Carpediem), i.e.:

- 1) Deed of Pledge of Shares of PT CM to the Company No. 66 dated February 18, 2020 equivalent to Rp90,000 (60% shares of PT CAM);
- 2) Deed of Pledge of Shares of Mr. Syafruddin Rachman to the Company No. 67 dated February 18, 2020, equivalent to Rp60,000 (40% shares of PT CAM).

Until the maturity date PT CM has not been able to pay off its obligations to the Company. The Company through the letter of the President Director No. S-4467/PPA/DU/1020 dated October 20, 2020, submitted the application for legal assistance and legal aspect support to the Deputy Attorney General of Civil and State Administration at the Attorney General's Office of Republic of Indonesia for the settlement of PT CM's obligations to the Company.

Then on November 5, 2021, a debt restructuring agreement was made for the loan facility owed by PT CM with the aim of extending the loan term to a maximum of 24 (two-four) months, as well as interest arrears that bear no interest.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.658, karena jatuh tempo dalam dua tahun maka direklasifikasi ke pinjaman investasi jangka panjang (Catatan 19).

y. PT Lintas Samudera Sejahtera ("PT LSS")

Tanggal 30 Desember 2020 Perusahaan melakukan addendum IV No. 14 Perjanjian Kerjasama Pendanaan Proyek Pengadaan Kapal FSU.

Semua kewajiban Pinjaman Modal Kerja berupa pokok dan bunga telah dilunasi/diselesaikan pada tanggal 22 Juni 2021 dan telah dinyatakan lunas sesuai Surat Keterangan Lunas No. SPU-4/PPA/0421.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp432.935. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp432.935. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil.

z. PT Wintermar Offshore Marine Tbk ("PT Wintermar")

Pada tanggal 16 Juni 2020 telah dilakukan addendum II oleh perusahaan dengan PT Wintermar Perjanjian No. PP-015/PPA/0620 bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas Pinjaman sampai dengan 27 Juni 2021.

Semua kewajiban Pinjaman Modal Kerja berupa pokok dan bunga telah dilunasi/diselesaikan pada tanggal 24 Juni 2021 dan telah dinyatakan lunas sesuai Surat Keterangan Lunas No. SPU-5/PPA/0721.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.351. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp10.351. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as of December 31, 2020 is Rp42,658, due to the loan maturity of two years, then reclassified to long-term investment loans (Note 19).

y. PT Lintas Samudera Sejahtera ("PT LSS")

On December 30, 2020, the Company entered into the Amendment IV No. 14 to FSU Vessel Procurement Project Financing Cooperation Agreement.

All Working Capital Loan obligations in the form of principal and interest have been repaid/settled on June 22, 2021, and has been declared paid off in accordance with the Certificate of Settlement No. SPU-4/PPA/0421.

The balance as of December 31, 2020 is Rp432,935. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp432,935. The balance as of December 31, 2021 is Nil.

z. PT Wintermar Offshore Marine Tbk ("PT Wintermar")

On June 16, 2020, the Amendment II by the company with PT Wintermar has been signed with agreement No. PP-015/PPA/0620 aimed at extending the term of the Loan facility until June 27, 2021.

All obligations of the Working Capital Loan in the form of principal and interest have been repaid/settled on June 24, 2021 and has been declared paid off in accordance with the Certificate of Settlement No. SPU-5/PPA/0721.

The balance as of December 31, 2020 is Rp10,351. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp10,351. The balance as of December 31, 2021 is Nil.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

aa. PT Bangun Sarana Baja ("PT BSB")

Pada tanggal 26 Maret 2020 telah dilakukan addendum III No. PP-09/PPA/0320 antara Perusahaan dengan PT BSB bertujuan untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 30 April 2021.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.846. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp7.846. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil.

Semua kewajiban Pinjaman Modal Kerja berupa pokok dan bunga telah dilunasi/diselesaikan pada tanggal 13 September 2021 dan telah dinyatakan lunas sesuai Surat Keterangan Lunas No. SPU-6/PPA/1121.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

aa. PT Bangun Sarana Baja ("PT BSB")

On March 26, 2020, the Amendment III No. PP-09/PPA/0320 between the Company and PT BSB has been agreed, aimed at extending the loan term period until April 30, 2021.

The balance as of December 31, 2020, is Rp7,846. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp7,846. The balance as of December 31, 2021 is Nil.

All Working Capital Loan obligations in the form of principal and interest have been repaid/settled on September 13, 2021, and has been declared paid off in accordance with the Certificate of Settlement No. SPU-6/PPA/1121.

5. Piutang Usaha

5. Accounts Receivable

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi		
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	189,613	383,071
Piutang Jasa Konstruksi	71,980	123,096
Piutang Bunga dan Monitoring	57,921	45,532
Piutang Advisory	20,214	16,746
Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur	10,212	11,753
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	9,369	13,333
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	5,166	94,037
Jumlah Pihak Berelasi	364,475	687,568
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(139,651)	(144,477)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	224,824	543,091
Pihak Ketiga		
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	750,149	771,458
Piutang Jasa Konstruksi	135,734	104,222
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	71,356	70,505
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	29,416	25,831
Piutang Bunga dan Monitoring	15,560	--
Bunga Deposito Berjangka	2,479	2,554
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	15,835	24,494
Jumlah Pihak Ketiga	1,020,529	999,064
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(126,699)	(106,770)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	893,830	892,294
Jumlah - Bersih	1,118,654	1,435,385

Related Parties
Financial Lease Receivables - Net
Construction Services Receivable
Monitoring and Interest Receivables
Advisory Receivable
Asset Management Fee Bailouts
Consumer Finance Receivables - Net
Factoring Receivables - Net
Total Related Parties
Less: Allowance for Impairment Losses
Total Related Parties - Net

Third Parties
Financial Lease Receivables - Net
Construction Services Receivables
Factoring Receivables - Net
Consumer Finance Receivables - Net
Monitoring and Interest Receivables
Interest on Time Deposits
Others (belows Rp 1,000 each)
Total Third Parties
Less: Allowance for Impairment Losses
Total Third Parties - Net
Total - Net

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable to the customers are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi		
PT Rejeki Intilogam Jaya	33,455	15,629
PT Perikanan Nusantara (Persero)	29,532	14,594
PT Barata Indonesia (Persero)	20,342	29,650
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	24,041	18,903
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	14,811	23,264
PT Sippa Kemasan Internasional	91,748	85,854
PT Garam (Persero)	12,570	--
PT Bhanda Graha Rekso (Persero)	10,765	14,354
PT Dok dan Perkapalan Surabaya	12,001	1,869
Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta	11,636	10,844
PT Pindad (Persero)	--	258,696
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	103,574	213,911
Jumlah Pihak Berelasi	364,475	687,568
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(139,651)	(144,477)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	224,824	543,091
Pihak Ketiga		
PT Synergi Tharada	39,102	8,876
PT Indostar Aviation	39,060	38,628
PT Perintis Embee	38,496	34,952
Pemerintah Daerah Kota Cimahi	36,132	--
PT Ciremai Putera Mandiri	33,745	38,957
PT Pelayaran Glora Kaltim	36,242	35,578
PT Bara Surya Perkasa	34,605	33,702
PT Mandala Trading	33,786	32,018
PT Bitilasegara Indoperkasa	29,574	28,317
PT Bahari Samudera Sentosa	25,878	26,078
PT Indoraya Makmur Energi	24,669	24,669
PT Bumi Bangka Energi	24,140	24,140
PT Alam Sentosa Propertindo	22,955	22,955
PT Karunia Citra Indonesia	22,842	22,842
PT Natbour International Energy	22,463	29,778
PT Sarana Multi Sejahtera	21,868	20,427
PT Rumah Swara Indonesia	20,513	26,450
PT Saranova Neola Energi	19,574	19,574
PT Aneka Raya Prima Persada	19,143	--
PT Crytal Garden	18,267	18,267
Koperasi Karyawan PT Waskita Karya	15,986	22,408
PT Citra Panji Manunggal	15,563	--
PT Batulicin Energi Utama	15,549	21,341
PT Prans Corpora	14,235	18,344
PT Manggala Usaha Manunggal	12,969	35,638
Penjualan Ritel Beton	12,591	27,309
PT KNE Global Persada	12,391	12,391
PT Karunia Berkas Sejahtera	12,377	13,763
PT Alam Sejahtera Indonesia Abadi	12,119	20,615
PT Tribara	11,663	--
PT Positim Perdana	11,302	15,450
Maringan Pandapotan Siagian	11,291	11,291
PT Setiabudi Inti Prima	10,959	10,959
PT Asia Kaolin Raya	10,663	10,663
PT Sarana Sirkuitindo Utama	10,223	10,223
PT Meranti Berkah Prima	10,161	10,161
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10 Milyar)	257,433	272,300
Jumlah Pihak Ketiga	1,020,529	999,064
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(126,699)	(106,770)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	893,830	892,294
Jumlah Piutang Usaha	1,118,654	1,435,385

Related Parties
PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya
PT Sippa Kemasan Internasional
PT Garam (Persero)
PT Bhanda Graha Rekso (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya
Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta
PT Pindad (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)
Total Related Parties
Less: Allowance for Impairment Losses
Total Related Parties - Net
Third Parties
PT Synergi Tharada
PT Indostar Aviation
PT Perintis Embee
Cimahi City Regional Government
PT Ciremai Putera Mandiri
PT Pelayaran Glora Kaltim
PT Bara Surya Perkasa
PT Mandala Trading
PT Bitilasegara Indoperkasa
PT Bahari Samudera Sentosa
PT Indoraya Makmur Energi
PT Bumi Bangka Energi
PT Alam Sentosa Propertindo
PT Karunia Citra Indonesia
PT Natbour International Energy
PT Sarana Multi Sejahtera
PT Rumah Swara Indonesia
PT Saranova Neola Energi
PT Aneka Raya Prima Persada
PT Crytal Garden
Koperasi Karyawan PT Waskita Karya
PT Citra Panji Manunggal
PT Batulicin Energi Utama
PT Prans Corpora
PT Manggala Usaha Manunggal
Penjualan Ritel Beton
PT KNE Global Persada
PT Karunia Berkas Sejahtera
PT Alam Sejahtera Indonesia Abadi
PT Tribara
PT Positim Perdana
Maringan Pandapotan Siagian
PT Setiabudi Inti Prima
PT Asia Kaolin Raya
PT Sarana Sirkuitindo Utama
PT Meranti Berkah Prima
Others (each below Rp 10 Billion)
Total Third Parties
Less: Allowance for Impairment of Receivables
Total Third Parties - Net
Total Accounts Receivable

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari)
sebagai berikut:

Total accounts receivable by aging (day) are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Umur Piutang Usaha yang belum diturunkan nilainya			<i>Aging of trade accounts receivable not impaired</i>
Belum jatuh tempo	990,069	989,660	<i>Not yet due</i>
Lewat Jatuh tempo:			<i>Past due:</i>
1 - 90 hari	202,112	457,052	<i>1 - 90 days</i>
91 - 120 hari	18,185	11,027	<i>91 - 120 days</i>
121 - 180 hari	3,976	137,895	<i>121 - 180 days</i>
> 180 hari	170,662	90,998	<i>>180 days</i>
Jumlah	1,385,004	1,686,632	<i>Total Accounts Receivable</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(266,350)	(251,247)	<i>Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
Jumlah Bersih	1,118,654	1,435,385	<i>Total</i>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang
usaha adalah sebagai berikut:

*The movements in amount of the allowance for
impairment losses of accounts receivable is as
follows:*

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(251,247)	(103,884)	<i>Balance at The Beginning of The Year</i>
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	(153,950)	<i>Adjustment on Initial Implementation PSAK 71</i>
Penambahan Tahun Berjalan	(112,905)	(27,262)	<i>Addition in The Current Year</i>
Pemulihan Tahun Berjalan	97,802	33,849	<i>Recovery in The Current Year</i>
Saldo Akhir Tahun	(266,350)	(251,247)	<i>Ending Balance</i>

Jumlah piutang berdasarkan kolektibilitasnya
adalah sebagai berikut:

*Total accounts receivables based on
collectibility is as follows:*

	2021 Rp	2020 Rp	
Lancar	990,069	989,660	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	202,112	457,052	<i>Special Mention</i>
Kurang lancar	18,185	11,027	<i>Substandard</i>
Diragukan	3,976	137,895	<i>Doubtful</i>
Macet	170,662	90,998	<i>Loss</i>
Jumlah Piutang Usaha	1,385,004	1,686,632	<i>Total Accounts Receivable</i>
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(266,350)	(251,247)	<i>Less: Allowance for Impairment of Receivables</i>
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	1,118,654	1,435,385	<i>Total Accounts Receivable - Net</i>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020,
seluruh nilai tercatat atas piutang usaha Grup
berdenominasi dalam Rupiah.

*As of December 31, 2021 and 2020, all of the
carrying amount of Group's accounts receivable
were denominated in Rupiah.*

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan
pihak ketiga dilakukan dengan ketentuan yang
setara dengan yang berlaku dalam transaksi
yang wajar.

*Transactions with related parties and third
parties are carried out with the conditions that
are applicable in the arms' length transactions.*

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
kerugian penurunan nilai piutang usaha cukup
untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya
piutang usaha di kemudian hari.

*Management believes that the allowance for
impairment losses of account receivables is
adequate to cover the possible non-collection of
account receivables in the future.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

6. Piutang Retensi

Rincian saldo piutang retensi pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi		
PT Angkasa Pura II (Persero)	29,099	28,705
PT Krakatau Engineering & Construction	7,048	7,048
PT Pupuk Kalimantan Timur	6,559	957
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	4,677	418
Perum Perumnas (Persero)	3,485	3,485
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,924	--
PT Magnesium Gosari Internasional	2,562	2,562
PT Hutama Karya (Persero)	1,846	1,846
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	--	4,356
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	--	1,387
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	--	2,563
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	2,507	393
Jumlah	60,707	53,720
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(14,379)	(11,534)
Jumlah Pihak Berelasi	46,328	42,186
Pihak Ketiga		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	107,073	106,114
PT Sinergi Solusi Utama	10,377	10,377
Bank Indonesia	9,261	201
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	5,231	4,943
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	4,891	2,603
Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4,077	4,077
PT Karya Unggulan Gemilang	3,528	3,528
Kementerian Perhubungan	3,284	--
PT Mandiri Karya Cipta Indah	2,126	2,126
PT Royal Residen	1,540	1,540
PT Maju Santosa Cemerlang	1,228	1,228
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	--	4,110
Pemerintah Provinsi Papua	--	3,883
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,454	2,457
Jumlah	154,070	147,187
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(37,376)	(38,361)
Jumlah Pihak Ketiga	116,694	108,826
Jumlah Piutang Retensi - Bersih	163,022	151,012

Jumlah piutang retensi berdasarkan umur (hari) sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
< 12 Bulan	147,785	123,709
> 12 - 24 Bulan	185	36,348
> 24 Bulan	66,807	40,850
Jumlah	214,777	200,907
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(51,755)	(49,895)
Jumlah - Bersih	163,022	151,012

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal Tahun	(49,895)	(24,530)
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	(27,773)
Penambahan Tahun Berjalan	(2,980)	(713)
Pemulihan Tahun Berjalan	1,120	3,121
Saldo Akhir	(51,755)	(49,895)

6. Retention Receivables

The details of retention receivables to the related parties and third parties are as follows:

Related Parties	
PT Angkasa Pura II (Persero)	
PT Krakatau Engineering & Construction	
PT Pupuk Kalimantan Timur	
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	
Perum Perumnas (Persero)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Magnesium Gosari Internasional	
PT Hutama Karya (Persero)	
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
Others (each below Rp1.000)	
Total	
Less: Allowance for Impairment of Losses Receivables	
Total Related Parties	
Third Parties	
The Ministry of Public Work and Public Housing	
PT Sinergi Solusi Utama	
Bank Indonesia	
Pesisir Barat District Government	
Public Works and Spatial Planning Office West Sumatera	
The Ministry of Youth and Sports	
PT Karya Unggulan	
Ministry of Transportation	
PT Mandiri Karya Cipta Indah	
PT Royal Residen	
PT Maju Santosa Cemerlang	
Kotabaru District Government	
Papua Provincial Government	
Others (each below Rp1.000)	
Total	
Less: Allowance for Impairment of Receivables	
Total Third Parties	
Total Retention Receivables - Net	

Total retention receivable by aging (day) are as follows:

< 12 Months	
> 12 - 24 Months	
> 24 Months	
Total	
Allowance for Impairment Losses of Receivables	
Total - Net	

The movements in amount of the allowance for allowance for impairment losses of retention receivables is as follows:

Beginning Balance of the Year	
Adjustment on Initial Implementation PSAK 71	
Addition in the Current Year	
Recovery in the Current Year	
Ending Balance	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Transactions with related parties and third parties are carried out with the conditions that are applicable in the arms' length transactions.

Management believes that the allowance for impairment losses of retention receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible retention receivables in the future.

7. Piutang Ventura Bersama Konstruksi

7. Joint Venture Construction Receivables

	2021 Rp	2020 Rp	
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan	75,606	70,741	JV Nindya - Pembangunan Perumahan
Ventura Bersama Nindya - Sacra	38,676	40,045	JV Nindya - Sacra
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Sarana Baja	31,026	13,033	JV Nindya - Gerbang Sarana Baja
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	30,496	16,178	JV Nindya - Citra - Kharisma
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	27,380	27,738	JV Nindya - Bumi Karsa
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangun Nusa	21,256	21,124	JV Nindya - Bahagia Bangun Nusa
Ventura Bersama Nindya - Bunga Raya Lestari	17,309	17,027	JV Nindya - Bunga Raya Lestari
Ventura Bersama Nindya - Bina Nusa Sarana	16,387	--	JV Nindya - Bina Nusa Sarana
Ventura Bersama Nindya - Waskita - Jaya Purnama	14,922	19,645	JV Nindya - Waskita - Jaya Purnama
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	14,213	15,772	JV Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	11,949	13,023	JV Nindya - Dewa Ruci
Ventura Bersama Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	12,944	816	JV Nindya - Rapi Tirta Treatmindo
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	8,022	28,334	JV Nindya - Karya Sarana
Ventura Bersama Nindya - Adhi	7,740	48,065	JV Nindya - Adhi
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan - Hutama Karya	7,709	7,709	JV Nindya - Pembangunan Perumahan - Hutama Karya
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	6,892	6,892	JV Nindya - Cipuga
Ventura Bersama Nindya - Sejahtera	5,995	5,995	JV Nindya - Sejahtera
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	5,206	8,768	JV Nindya - MCC - Wika - Waskita
Ventura Bersama Nindya - Brantas	4,531	4,531	JV Nindya - Brantas
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	4,623	8,840	JV Nindya - Bangun Bejana Baja
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	2,223	440	JV Nindya - Hutama Karya
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Abipraya	2,243	1,571	JV Nindya - Adhi - Abipraya
Ventura Bersama Nindya - Mettana	1,718	--	JV Nindya - Mettana
Ventura Bersama Nindya - Inti	1,650	1,650	JV Nindya - Inti
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	3,370	2,297	Others (belows Rp1,000 each)
Jumlah	374,086	380,234	Total
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(122,980)	(74,152)	Less: Allowance for Impairment of Receivables
Jumlah Piutang Ventura Bersama - Bersih	251,106	306,082	Total Joint Venture Receivables - Net

Merupakan piutang kepada ventura bersama konstruksi untuk pembelian material, biaya bank, *overhead*, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ventura bersama.

Represents receivable from the Joint Venture Construction Receivable (JV) to purchase the material, bank fees, overhead, and others for the joint venture purposes.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada ventura bersama konstruksi sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of the joint venture construction receivable is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(74,152)	--	Beginning Balance of the Year
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	--	(77,839)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(49,901)	(6,615)	Addition in the Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	1,073	10,302	Recovery in the Current Year
Saldo Akhir Tahun	(122,980)	(74,152)	Ending Balance of the Year

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang ventura bersama konstruksi cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang ventura bersama di kemudian hari.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Management believes that allowance for impairment losses of joint venture construction receivable is sufficient to cover possible losses on uncollectible joint venture receivables in the future.

**8. Pinjaman yang Diberikan – Dana Talangan
Kepada Pihak-Pihak Berelasi**

	2021 Rp	2020 Rp
Pokok Pinjaman Dana Talangan		
PT Barata Indonesia (Persero)	99,001	--
Perum Perumnas	93,510	100,000
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	75,044	26,000
PT Boma Bisma Indra (Persero)	71,013	67,829
PT Istaka Karya (Persero)	68,858	62,443
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	53,841	20,800
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	51,346	51,346
PT Industri Gelas (Persero)	49,962	49,962
PT Kertas Leces (Persero)	28,939	38,500
PT Aviassi Pariwisata Industri (Persero) d/h		
PT Survai Udara Penas (Persero)	15,525	123,057
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Talangan	607,039	539,937
Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan		
PT Istaka Karya (Persero)	2,007	8,378
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	1,927	1,927
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2,268	99
PT Kertas Leces (Persero)	1,534	1,535
PT Barata Indonesia (Persero)	1,066	--
PT Aviassi Indonesia Pariwisata d/h PT Survai Udara Penas	626	3,131
PT Boma Bisma Indra (Persero)	507	150
Perum Perumnas	371	397
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Talangan	10,306	15,617
Jumlah Pinjaman Dana Talangan	617,345	555,554
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Dana Talangan		
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	(76,971)	(5,566)
PT Istaka Karya (Persero)	(70,864)	(65,610)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(51,346)	(51,346)
PT Industri Gelas (Persero)	(49,962)	(17,999)
PT Boma Bisma Indra (Persero)	(39,748)	(32,428)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	(31,054)	(2,799)
PT Kertas Leces (Persero)	(30,473)	(39,180)
Perum Perumnas	(9,418)	(17)
PT Barata Indonesia (Persero)	(2,916)	--
PT Aviassi Pariwisata Industri (Persero) d/h		
PT Survai Udara Penas (Persero)	(2,289)	(522)
Jumlah Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(365,041)	(215,467)
Jumlah Pinjaman Dana Talangan - Bersih	252,304	340,087

Mutasi Penyisihan kerugian nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal Tahun	(215,467)	(154,524)
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	(139,111)
Penambahan Tahun Berjalan	(158,281)	(1,294)
Pemulihan Tahun Berjalan	8,707	79,462
Saldo Akhir Tahun	(365,041)	(215,467)

8. Loans Receivables - Bailouts Related Parties

Principal Bailout Loans
PT Barata Indonesia (Persero)
Perum Perumnas
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Industri Gelas (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Aviassi Pariwisata Industri (Persero) d/h
PT Survai Udara Penas (Persero)
Total Principal Bailout Loans
Interest Receivable on Bailout Loans
PT Istaka Karya (Persero)
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Aviassi Indonesia Pariwisata d/h PT Survai Udara Penas
PT Boma Bisma Indra (Persero)
Perum Perumnas
Total Receivable on Bailout Loans Interest
Total Bailout Loans
Less:
Allowance for Impairment of Loans Receivable
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Industri Gelas (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Kertas Leces (Persero)
Perum Perumnas
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Aviassi Pariwisata Industri (Persero) d/h
PT Survai Udara Penas (Persero)
Total Allowance for Impairment of Loans
Total Bailout Loans - Net

The movements in allowance for impairment losses of loans receivable are as follows:

Balance at The Beginning of The Year
Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Addition in The Current Year
Recovery in The Current Year
Ending Balance

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Suku bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur adalah sebagai berikut:

The interest rates for loans receivables granted to debtors are as follows:

Nomor/ Number	Debitur/ Debtor	Suku Bunga Pinjaman/ Loan Interest Rate
1	PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survai Udara Panas (Persero)	0.59% - 14%
2	Perum Perumnas	13%
3	PT Boma Bisma Indra (Persero)	6%
4	PT Istaka Karya (Persero)	12%
5	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	7% - 13%
6	PT Industri Gelas (Persero)	13.5% - 14.5%
7	PT Kertas Leces (Persero)	12%
8	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	13%
9	PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	16%
10	PT Barata Indonesia (Persero)	15%

9. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

9. Gross Amount Due from Customers

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Konstruksi	3,999,776	3,260,842	Constructions Costs
Laba yang diakui	--	--	Recognized profit
Sub Jumlah	3,999,776	3,260,842	Sub Total
Penagihan	(2,457,663)	(878,659)	Progress billing
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	1,542,113	2,382,183	Due from customer
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(37,561)	(50,959)	Allowance for impairment losses
Jumlah Tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih	1,504,552	2,331,224	Total due from customer - net

Rincian saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customer are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parti
PT Pertamina (Persero)	210,608	148,307	PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	82,256	14,536	PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi
PT Angkasa Pura I (Persero)	75,197	150,118	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	66,057	104,458	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC	58,159	--	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pupuk Kalimantan Timur	38,359	22,791	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	28,698	25,250	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT PLN (Persero)	28,264	--	PT PLN (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,689	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	9,267	--	Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	4,455	9,211	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	38,418	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	--	11,468	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	--	2,529	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	--	3,600	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	339	--	Others (Each below Rp 1 billion)
Sub Jumlah Pihak Berelasi	625,348	530,686	
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(4,624)	--	
Sub Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	620,724	530,686	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Ketiga			Third Parties
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	820,345	1,577,326	The Ministry of Public Work and Public Housing
PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia	50,062	50,062	PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	35,930	41,692	West Coast District Government
Ventura Bersama Abipraya - Bodiacs	5,063	--	JV Abipraya - Bodiacs
Pemerintah Kota Padang	2,507	--	Padang City Government
Penjualan Retail Beton	2,189	2,316	Concrete Retail Sales
Kementerian Perhubungan	626	25,755	The Ministry of Transportation
Bank Indonesia	--	29,562	Bank Indonesia
Kementerian Pemuda dan Olahraga	--	86,395	The Ministry of Youth and Sports
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	--	32,110	Dharmasraya District Government
Pemerintah Daerah Kota Makassar	--	6,033	Local Government of Makassar City
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	44	246	Others (Each below Rp 1 Billion)
Sub Jumlah Pihak Ketiga	916,766	1,851,497	Total Third Parties
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(32,938)	(50,959)	Less: Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	883,828	1,800,538	
Total Tagihan Bruto - Net	1,504,552	2,331,224	Total Gross Amount Due from Customers

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto kepada pemberi pekerja adalah sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses on gross amount due from customers are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(50,959)	--	Beginning Balance of The Year
Penyesuaian Penerapan PSAK 71	--	(50,959)	Adjustment on Application of PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(8,850)	--	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	22,248	--	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(37,561)	(50,959)	Ending Balance of The Year

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian nilai tagihan bruto cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto di kemudian hari.

Management believes that allowance for impairment losses of due from customers is sufficient to cover possible losses on uncollectible gross amount due from customers in the future.

10. Persediaan

10. Inventories

	2021 Rp	2020 Rp	
Persediaan Jasa Konstruksi			Construction Inventory
Material Bahan Baku Konstruksi	183,867	116,734	Material Construction Supplies
Beton Pracetak	4,967	4,396	Precast Concrete
Suku Cadang	973	298	Spare Parts
Sub Jumlah Persediaan Jasa Konstruksi	189,807	121,428	Sub Total Inventory of Construction
Aset Real Estat			Real Estate Assets
Tanah Sedang Dikembangkan	13,033	12,554	Land Under Development
Bangunan Dalam Konstruksi	8,030	7,625	Building Under Construction
Bangunan dan Tanah Siap Jual	16,907	5,163	Building and Land Ready for Sale
Jumlah Aset Real Estat	37,970	25,342	Sub Total Real Estate Assets
Jumlah	227,777	146,770	Total

Persediaan merupakan material bahan baku konstruksi berupa perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh PT NK.

Inventories are the construction raw materials in form of project equipment that are still available in the project warehouse owned by PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Untuk material beton pracetak merupakan persediaan milik Nindya Beton meliputi *Box Culvert, partel precast, lead bearing, u-ditch, squart mini pile, square pile, tutup u-ditch, Lining concrete*.

Tanah sedang dikembangkan yaitu merupakan tanah yang siap untuk dibangun yang berlokasi di Gowa-Makassar, Desa Kragilan, Cisait Tangerang dan daerah Cilangkap, Jakarta Timur.

Bangunan dalam konstruksi yaitu persediaan berupa Kavling Perumahan Permata Gowa yang berlokasi di Jalan Teknik (Samata), Kabupaten Gowa, Makassar, dan bangunan Perumahan Purinatha Jalan Cilangkap Baru, Jakarta Timur milik Divisi Properti PT NK.

Bangunan dan tanah siap jual terdiri dari Ruko Pabaeng-baeng yang berlokasi di Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng, Makassar dan Bangunan rumah jadi Permata Gowa yang berlokasi di Jalan Teknik (Samata) Kabupaten Gowa, Makassar, Persediaan Apartemen Dago Suites Bandung, Persediaan Kios Sadang Terminal Square.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan manajemen PT NK berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan dan tidak ada penghapusan persediaan yang rusak atau usang.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

For precast concrete, Nindya Beton's inventory includes *Box Culvert, precast partel, lead bearing, u-ditch, squart mini pile, square pile, u-ditch cover, Lining concrete*.

Land under development is land that is ready to be developed which is located in Gowa-Makassar, Kragilan Village, Cisait Tangerang and Cilangkap area, East Jakarta.

Buildings under construction are inventories in the form of the Permata Gowa Housing Lot located at Jalan Teknik (Samata), Gowa Regency, Makassar, and the Purinatha Housing building at Jalan Cilangkap Baru, East Jakarta belonging to the PT NK's Property Division.

Buildings and land ready for sale consist of Pabaeng-baeng shophouses located at Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng, Makassar and Permata Gowa finished house buildings located at Jalan Teknik (Samata) Gowa Regency, Makassar, Dago Suites Apartment Bandung Supplies, Sadang Kios Supplies Terminal Square.

Based on the review of inventories condition, the management of PT NK believes that no appropriation for depreciation of inventories is required and there is no write-off of damaged or obsolete inventories.

11. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

	2021 Rp	2020 Rp
Uang Muka Pihak Ketiga	69,098	92,980
Biaya Dibayar di Muka	30,627	56,675
Jumlah	99,725	149,655

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka kepada pemasok dan subkontraktor. Biaya dibayar di muka merupakan biaya untuk sewa gedung dan asuransi.

Berdasarkan Surat Penugasan Menteri BUMN nomor: S-863/MBU/12.2015 tanggal 3 Desember 2015 yang antara lain menugaskan Perusahaan membantu penyelesaian kewajiban karyawan PT Industri Gelas (Persero) ("PT Iglas"). Dukungan penyelesaian kewajiban karyawan tersebut dilakukan oleh Perusahaan melalui pembelian aset tanah dan bangunan yang dimiliki PT Iglas di Gresik. Aset tersebut

11. Advances and Prepaid Expenses

Advance to Third Parties
Prepaid Expenses
Total

Advance payment to the third parties constitutes the advance payment to the suppliers and subcontractors. The prepaid costs represent the costs for building rental and insurance.

Based on the Letter of Assignment from the Minister of SOEs number: S-863/MBU/12.2015 dated December 3, 2015, which among other things assigned the Company to help settle the obligations of PT Industri Gelas (Persero) ("PT Iglas") employees. The support for the settlement of employee obligations is carried out by the Company through the purchase of land and building assets owned by PT Iglas in Gresik.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

merupakan aset jaminan yang masih dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Bank BNI dan Perusahaan, maka PT Iglas dan Perusahaan masih dalam proses permohonan penerbitan surat roya kepada Bank BNI untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses Akta Jual Beli.

Pada tanggal 7 Desember 2021, Perusahaan melakukan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Rully Maharany, S.H., M.Kn., atas pembelian Lahan PT Iglas SHGB 11 – SHGB 17, sesuai Akta Jual Beli Nomor 124/2021 – 130/2021. Dengan telah dilakukan proses AJB ini maka proses pembelian Lahan PT Iglas yang tadinya dicatat sebagai Uang Muka telah direklas menjadi Properti Investasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The asset being pledge as a collateral is still under the binding Mortgage to Bank BNI and the Company, currently PT Iglas and the Company are still in the process of requesting the issuance of a letter of roya to Bank BNI for further will be followed up with the process of the Sale and Purchase Deed.

On December 7, 2021, the Company entered into a Sale and Purchase Deed before PPAT Rully Maharany, S.H., M.Kn., for the purchase of PT Iglas SHGB 11 – SHGB 17, in accordance with the Sale and Purchase Deed Number 124/2021 – 130/2021. With the AJB process being carried out, the land purchase process for PT Iglas which was previously recorded as an Advance has been reclassified as an Investment Property.

12. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	2021 Rp	2020 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Pertambahan Nilai	28,223	23,759
Pajak Penghasilan Pasal 23	52,894	58,817
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Pertambahan Nilai	513,404	573,296
Pajak Penghasilan Pasal 22	1,636	3,957
Pajak Penghasilan Pasal 23	1,798	1,567
Pajak Penghasilan Pasal 25	714	2
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2	994	993
Jumlah	599,663	662,391

Surat ketetapan lebih bayar pajak yang diterima selama tahun 2021 sebagai berikut:

12. Taxation

a. Prepaid Taxes

<u>Company</u>
Value Added Tax
Income Tax Article 23
<u>Subsidiaries</u>
Value Added Tax
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 25
Income Tax Article 4 (2)
Total

The tax assessment letter received during 2021 is as follows:

No. / No.	Entitas/ Entity	Jenis Surat / Tax Letter	Nomor Surat / Tax Letters No.	Tanggal Surat / Date Issued	Periode / Period	Jumlah Total
1	PT PPA	SKP Lebih Bayar PPh Badan/ Overpayment CIT	00008/406/19/093/21	05/04/2021	2019	35,425
2	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00013/407/19/093/20	07/12/2020	01/01/2019	24,427
3	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00014/407/19/093/20	07/12/2020	01/02/2019	15,842
4	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00015/407/19/093/20	07/12/2020	01/03/2019	19,913
5	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00039/407/19/093/20	23/12/2020	01/04/2019	16,726
6	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00040/407/19/093/20	23/12/2020	01/05/2019	12,288
7	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00041/407/19/093/20	23/12/2020	01/06/2019	10,913
8	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00043/407/19/093/20	30/12/2020	01/07/2019	15,676
9	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00044/407/19/093/20	30/12/2020	01/08/2019	21,124
10	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00045/407/19/093/20	30/12/2020	01/09/2019	16,595

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

No. / No.	Entitas/ Entity	Jenis Surat / Tax Letter	Nomor Surat / Tax Letters No.	Tanggal Surat / Date Issued	Periode / Period	Jumlah Total
11	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00046/407/19/093/20	30/12/2020	01/10/2019	23,571
12	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00047/407/19/093/20	30/12/2020	01/11/2019	22,083
13	PT NK	Lebih Bayar PPN / Overpayment Tax Return VAT	00039/407/19/093/21	18/05/2021	01/12/2019	15,549
14	PT NK	Keberatan Masa November 2017	KEP-00008/KEB/WPJ.19/20	12/01/2021	01/11/2017	412
15	PT NK	Keberatan Masa Desember 2017	KEP-00009/KEB/WPJ.19/20	12/01/2021	01/12/2017	93
16	PT NK	Keberatan Masa Mei 2018	KEP-00012/KEB/WPJ.19/20	12/01/2021	01/05/2018	10
17	PT NK	Keberatan Masa Juni 2018	KEP-00013/KEB/WPJ.19/20	12/01/2021	01/06/2018	5
18	PT NK	Keberatan Masa Agustus 2018	KEP-00014/KEB/WPJ.19/20	12/01/2021	01/08/2018	2
19	PT PPAK	SKP Lebih Bayar Pajak Penghasilan/ Overpayment CIT	00024/406/19/063/21	08/06/2021	01/01/2019	1,278
						251,932

Perusahaan

Penerimaan uang sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 00282A adalah sebesar Rp26.335 dengan nilai SKPKB sebesar Rp35.425 yang mana selisih Rp9.090 merupakan pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) atas koreksi hasil pemeriksaan, yang dicatat pada akun Beban Operasional Lainnya pada bulan Mei 2021.

The Company

Money received in accordance with SPMKP No.00282A amounting to Rp26,335 with SKPKB of Rp35,425 for which the amount of Rp9,090 is the payment for Tax Collection Letter (STP) for corrections to the audit results, which are recorded in the Other Operating Expenses account for May 2021.

PT NK

Pada tahun 2021, PT NK telah menerima pencairan restitusi pajak tersebut diatas sebesar Rp215.229.

PT NK

In 2021, PT NK has received the disbursement of tax refunds amounting to Rp215,229.

PT PPAK

Pada tanggal 8 Juni 2021, PT PPAK menerima surat SKPLB tahun pajak 2019 sebesar Rp1.278 yang digunakan sebagai kompensasi pajak-pajak terutang lainnya.

PT PPAK

As of June 8, 2021, PT PPAK has received SKPLB letter for fiscal year 2019 amounting to Rp1,278 which has been used as a compensation for other tax liabilities.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2021 Rp	2020 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Company</u>
PPh Pasal 21	6,645	6,393	Income Article 21
PPh Pasal 22	--	2	Income Article 22
PPh Pasal 23	273	911	Income Article 23
PPh Pasal 26	73	2	Income Article 26
PPh Pasal 4(2)	69	118	Income Article 4(2)
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPh Pasal 21	2,445	1,910	Income Article 21
PPh Pasal 22	3,630	3,430	Income Article 22
PPh Pasal 23	1,730	1,044	Income Article 23
PPh Pasal 25	92	80	Income Article 25
PPh Pasal 29	1,045	1,425	Corporate Income Tax
PPh Pasal 4(2)	7,000	6,116	Income Article 4(2)
Pajak Pembangunan I (PB I)	232	155	Development tax
Pajak Pertambahan Nilai	569	536	Value Added Tax
Jumlah	23,803	22,122	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

c. Manfaat (Beban) Pajak

c. Tax Benefit (Expenses)

	2021 Rp	2020 Rp	
Pajak Kini	(3,976)	(38,319)	Current Tax
Pajak Tangguhan	(6,086)	(18,925)	Deferred Tax
Jumlah	(10,062)	(57,244)	Total

d. Pajak Penghasilan Badan

d. Income Taxes

	2021 Rp	2020 Rp	
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian	175,187	163,013	Income Before Tax Based on Consolidated Statement of (Profit) or Loss and Other Comprehensive Income
Laba/ (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak	(18,389)	31,933	Income Before Tax of Subsidiaries
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan	193,576	131,080	Income (Loss) Before Corporate Income Tax
Beda Waktu:			Timing Differences:
Apresiasi Karyawan	12,912	(7,802)	Employees' Appreciation
Penyisihan Penurunan Nilai	1,149,108	56,177	Allowance for Impairment Loss
Beban Imbalan Pasca Kerja - Bersih	(65)	4,519	Employee Benefits Expense - Net
Tantiem	6,639	7,548	Tantiems
Penyusutan Aset Tetap	--	(50)	Fixed Assets Depreciation
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(30)	60	Intangible Assets Amortization
Lain-lain	7,980	5,353	
Beda Tetap:			Permanent Differences:
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	1,806	1,036	Increase in Fair Value of Investment Property
Dividen	(1,450,814)	--	Dividend
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	218,125	36,759	Non Deductible Expenses
Jumlah Koreksi Fiskal	(54,339)	103,600	Total Tax Correction
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan			
Pajak Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak	(128,417)	(51,362)	
Laba Kena Pajak Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal	10,820	183,318	Taxable Income Before Tax Losses Compensation
Kompensasi Rugi Fiskal:			Fiscal Tax Losses Compensation:
Tahun 2020	--	--	Year 2020
Tahun 2019	--	(6,234)	Year 2019
Tahun 2018	--	(32,628)	Year 2018
Tahun 2017	--	--	Year 2017
Laba Fiskal (Akumulasi Rugi Fiskal)	10,820	144,456	Taxable Income (Accumulated Tax Losses)
Kurang Bayar PPh Badan Tahun Berjalan (22%)	2,380	31,780	Corporate Income Tax Expense on Current Year (22%)

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020, Pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh Badan) dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Base on Law No. 2 of 2020 concerning the Determination of Perppu 1 of 2020, the Government has lowered the Income Tax rate in accordance with Article 17 of the Income Tax Law (Corporate Income Tax) from the previous 25% to 22% for the 2020 and 2021 tax years, and to 20 percent starting tax year 2022.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

	Penyesuaian Saldo atas Penerapan PSAK 71 dan 73/ Balance Adjustments on the Adoption of PSAK 71 and 73	Efek Dekonsolidasian/ the Impact of Deconsolidation	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	Penyesuaian Akibat Perubahan Tarif Pajak Tarif / Adjustment due to Changes Tax rate		Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan									
<i>Perusahaan</i>									<i>Deferred Tax Assets Company</i>
Rugi Fiskal Tidak Bisa Terpulihkan	6,965	--	--	(6,965)	--	--	--	--	Unrecoverable Tax Losses
Liabilitas Imbalan Kerja	235	--	--	143	--	--	378	(14)	364
Akumul Tantien	3,911	--	--	1,191	--	--	5,102	1,460	6,562
Akumul Apresiasi Karyawan	9,940	--	--	(2,909)	--	--	7,031	2,477	9,508
Aset Tetap	45	--	--	(17)	--	--	28	39	67
Aset Takterwujud	21	--	--	11	--	--	32	(62)	(30)
Pinjaman Yang Diberikan	(149)	--	--	--	--	--	(149)	--	(149)
Sub Jumlah	20,968	--	--	(8,546)	--	--	12,422	3,900	16,322
<i>PT PPA Finance</i>									<i>PT PPA Finance</i>
Akumul Tantien dan Apresiasi Karyawan	301	--	--	38	--	(9)	330	149	479
Piutang Sewa Pembiayaan	1,413	24,900	--	(2,509)	--	(3,167)	20,837	(15,351)	5,286
Tagihan Anjak Piutang	4,542	1,014	--	(741)	--	(588)	4,227	339	4,566
Piutang Pembiayaan Konsumen	128	(20)	--	(90)	--	(13)	5	604	609
Liabilitas Imbalan Kerja	--	--	--	--	--	--	--	223	(48)
Sub Jumlah	6,384	25,894	--	(3,302)	--	(3,777)	25,199	(14,036)	11,115
<i>PT PPA Kapital</i>									<i>PT PPA Kapital</i>
Rugi Fiskal	11,185	--	--	(8,857)	--	--	378	(378)	--
Liabilitas Imbalan Kerja	1,294	--	--	(1,398)	--	(31)	(84)	305	(114)
Apresiasi	385	--	--	(177)	--	--	196	241	437
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	203	30,925	--	(44)	--	525	31,609	2,192	33,801
Sub Jumlah	13,067	30,925	--	(1,911)	--	494	32,099	2,360	(114)
<i>PT Nindya Beton</i>									<i>PT Nindya Beton</i>
Rugi Fiskal	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Penyisihan Rugi Fiskal	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imbalan Pasca Kerja	86	--	--	--	27	(4)	109	--	45
Aset Tetap	1,561	--	--	(739)	--	(78)	744	9	753
Aset Hak Guna Usaha	--	32	--	--	--	--	32	(32)	--
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	--	4,840	--	(1,144)	--	(844)	2,852	1,713	4,565
Sub Jumlah	1,647	4,872	--	(1,883)	27	(926)	3,737	1,690	45
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	42,068	61,691	(10,476)	(15,642)	27	(4,209)	73,457	(6,086)	67,254
									Total Deferred Tax Assets

13. Aset Lain-lain

13. Other Assets

	2021 Rp	2020 Rp	
Aset Lancar Lainnya			Other Current Assets
Piutang Proyek	41,269	64,493	Project Receivable
Piutang Denda	32,155	32,200	Penalty Receivable
Piutang Bagi Hasil Sukuk	25,590	--	Sukuk Profit Sharing Receivable
Piutang Talangan Biaya BUMN	6,398	14,031	SOEs' Bailout Loans Receivable
Piutang Pegawai	2,133	2,525	Employee Receivable
Asuransi	1,227	1,226	Others
Sub Total	108,772	114,475	Sub Total
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(43,408)	(47,133)	Less: Allowance for Impairment of Receivables
Jumlah	65,364	67,342	Total
Aset Tidak Lancar Lainnya			Other Non-Current Assets
Deposito Berjangka yang Dijamin	590,143	815,253	Time Deposits Pledged as Collateral
Proyek Dalam Penyelesaian	3,542	2,952	Project in Progress
Uang Jaminan	2,683	9,578	Deposit Guarantee
Aset Tak Berwujud	1,339	2,941	Intangible Assets - Software
Persediaan Properti	--	6,092	Property Inventory
Lain-lain	1,256	12,980	Others
Sub Total	598,963	849,796	Sub Total
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(185)	(185)	Less: Allowance for Impairment of Receivables
Jumlah	598,778	849,611	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- a. Piutang Proyek Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kuansing adalah tagihan kepada PT Manunggal Muara Palma (MMP) dari PT NK. Proyek ini bernilai Rp94.272 dan USD2,912 (termasuk PPN). Proyek dihentikan sebab MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI). Dalam Putusan BANI PT NK telah memenangkan dan MMP diharuskan membayar sejumlah Rp93.801 ditambah dengan Rp576 atas beban perkara yang ditalangi terlebih dahulu oleh PT NK. Status hukum perkara saat ini adalah menunggu terbitnya surat penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Pengacara Novian & Partners No. 1139/NP.XII/BK/2012 Tanggal 28 Desember 2012, Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi telah diterbitkan oleh PN Rengat sesuai surat No. 01/Eks.ARB/2012.-PN.RGT, tanggal 27 November 2012. PT NK melalui surat No. 008/SEKPER/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 meminta kepada Novian & Rekan untuk dibuatkan *time frame* tahapan dan biaya pelaksanaan lelang eksekusi terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 27 November 2012.

PT NK telah mengajukan permohonan Lelang Sita Eksekusi kepada Pengadilan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang telah disita tersebut tanggal 1 Agustus 2013 sebagaimana surat Pengacara Novian & Rekan No. 0729/NP.VIII/BK/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Pengadilan Negara Jakarta Selatan telah mengeluarkan penetapan lelang eksekusi tanggal 6 November 2013. Tanggal 18 November 2014, pelaksanaan lelang dengan harga limit Rp21.000 terhadap barang-barang pabrik kelapa sawit Kuansing tidak dihadiri oleh peminat lelang dan Ketua Pengadilan Negeri Rengat menyampaikan apabila PT NK menghendaki lelang lanjutan, maka PT NK harus melakukan appraisal ulang yang terkini terhadap peralatan/mesin di pabrik PKS. Sampai dengan 31 Desember 2021, PT NK sudah membukukan penurunan nilai sebesar Rp39.239.

- b. Piutang talangan biaya BUMN merupakan piutang atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- a. *The receivables of Project construction of the palm oil factory (PKS) Kuansing was billed to PT Manunggal Muara Palma (MMP) from PT NK. This project worth Rp94,272 and USD2,912 (include VAT). The project was suspended because MMP could not fulfill the payment of obligations in accordance with the agreements that have been made by Badan Arbitrase Nasional (BANI). In BANI's decision PT NK has won and MMP is required to pay Rp93,801 plus Rp576 on caseload who bailed in advance by PT NK. The legal status of case is currently awaiting the publication of a letter from the Chairman of the State Court Jakarta Selatan. Based on Letter Lawyer Novian & Partners No. 1139/NP.XII/BK/2012 dated December 28, 2012, the implementation of the seizure execution has been issued by PN Rengat according to letter No. 01/Eks.ARB/2012.-PN.RGT dated November 27, 2012. PT NK through the letter No. 008/SEKPER/01/2013 dated January 7, 2013, asked Novian and Partners to make a time frame phase and the cost of execution auction of the seizure execution report, dated November 27, 2012.*

PT NK has filed a petition about Seizure Execution Auction to the Court against the moving goods and non-moving goods that has been seized on August 1, 2013 as well as Letter of Lawyer Novian & Partners No. 0729/NP.VIII/BK/2013 dated August 21, 2013. South Jakarta District Court has issued a determination of execution date auction, November 6, 2013. On November 18, 2014, the auction with the price limit of Rp21,000 toward project construction of the palm oil Kuansing's goods was not attended by any auction enthusiast and The Chairman of Rengat District Court had conveyed that PT NK wanted to hold an advanced auction, therefore PT NK should re-appraise toward the tools/engines in PKS factory. Until December 31, 2021, PT NK has recognized an impairment amounted to Rp39,239.

- b. *SOE's Bailout loans receivable represent receivable to SOE's restructuring/revitalization.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- c. Berdasarkan Akta Gadai Deposito Nomor: 001/AG/CSTD/CLS/VIII/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 antara Perusahaan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bahwa debitur telah menerima fasilitas kredit dari bank sebesar Rp390.000. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang debitur kepada bank sehubungan dengan perjanjian kredit maka debitur dengan akta ini memberikan gadai berupa deposito berjangka di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk senilai Rp390.000.

Berdasarkan Akta Gadai Deposito Nomor : 009/AG/CSTD/CLS/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 bahwa jaminan atas Fasilitas Pinjaman Kredit Swadana berupa Deposito Berjangka di Bank BTN diperpanjang 1 tahun sesuai Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 008/PK/CSTD/CLS/VIII/2021 pada tanggal 30 Agustus 2021.

Deposito berjangka yang dijaminan sebesar Rp25.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten atas fasilitas pinjaman kredit.

Sesuai surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. B.0216/PI-BB/VI/2021 pada tanggal 21 Juni 2021 sehubungan dengan lunasnya seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana disampaikan dalam Surat Keterangan Lunas No. 043/SKL/BB-PI/06/21 tanggal 21 Juni 2021 bahwa agunan berupa Bilyet Deposito nominal Rp25.000 yang diikat secara Gadai sebagaimana tersebut dalam Akta Gadai No.009/2020 tanggal 30 Juli 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sudah tidak mempunyai kepentingan dan melepaskan segala hak apapun yang melekat pada agunan tersebut. Sejak 21 juni 2021 deposito berjangka yang dijaminan sebesar Rp25.000 telah direklas ke kas dan setara kas.

Berdasarkan Akta Gadai Deposito Nomor: 002/AG/CSTD/CLS/IX/2020 pada tanggal 3 September 2020 antara Perusahaan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bahwa debitur telah menerima fasilitas kredit dari bank sebesar Rp200.000. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang debitur kepada bank sehubungan dengan perjanjian kredit maka debitur

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- c. Based on Deposit Pawn Deed Number: 001/AG/CSTD/CLS/VIII/2020 on August 28, 2020 between the Company and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that the debtor has received a credit facility from the bank amounted to Rp390,000. That to collateral the repayment of debtor's debt to the bank in connection with the credit agreement then the debtor with this deed provides a mortgage in the form of a time deposit in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk worth Rp390,000.

Based on the Deed of Pledge of Deposits Number: 009/AG/CSTD/CLS/VIII/2021 dated 30 August 2021 that the guarantee for the Self-funded Loan Facility in the form of Time Deposits at Bank BTN is extended by 1 year according to the Extension of Credit Agreement Number: 008/PK/CSTD/CLS /VIII/2021 on August 30, 2021.

A guaranteed time deposit of Rp25,000 is the company's time deposit of PT Bank Pembangunan Daerah Banten for credit loan facilities.

According to the letter from PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk No. B.0216/PI-BB/VI/2021 on June 21, 2021 in connection with the settlement of all obligations of the Company as stated in the Certificate of Settlement No. 043/SKL/BB-PI/06/21 dated June 21, 2021, that the collateral is in the form of a Deposit Certificate with a nominal value of Rp25,000 which is bound by Pledge as stated in the Deed of Pawn No. 009/2020 dated July 30, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk has no interest and waives any rights attached to the collateral. Since June 21, 2021, time deposits which are pledged as collateral in the amount of Rp25,000 have been reclassified to cash and cash equivalents.

Based on Deposit Pawn Deed Number: 002/AG/CSTD/CLS/IX/2020 on September 3, 2020 between the Company and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that the debtor has received a credit facility from the bank of Rp200,000. That to guarantee the repayment of debtor debtors to the bank in connection with the credit agreement then the debtor with this deed provides a

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

dengan akta ini memberikan gadai berupa deposito berjangka di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk senilai Rp200.000.

Berdasarkan surat dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 239/S/JKH.UT/BCSU.L/XII/2021 tanggal 24 Februari 2021 Fasilitas Pinjaman Kredit Swadana No. 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dinyatakan lunas dan bilyet deposito yang menjadi agunan telah sebesar Rp200.000 telah dibuka blokirnya.

Deposito berjangka yang dijaminan sebesar Rp200.000 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas fasilitas pinjaman kredit sesuai Perjanjian Gadai Deposito Nomor: 07/BIN/GADAI/2020 yang ditandatangani pada tanggal 24 April 2020 dan diperpanjang 1 tahun sesuai Perubahan Perjanjian Kredit No.(1).061/BIN/PK/2020.

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 061/BIN/PK/2020 tanggal 20 April 2021 bahwa jaminan gadai deposito berjangka nominal Rp200.000 diperpanjang 1 tahun sesuai dengan jatuh tempo fasilitas pinjaman kredit tanggal 23 April 2022.

Deposito berjangka yang dijaminan sebesar Rp145.115 merupakan deposito berjangka Perusahaan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas jaminan fasilitas kredit.

Berdasarkan surat nomor 543/RHS/CSTD/CB1/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 disampaikan bahwa fasilitas kredit PT Aviati Indonesia Pariwisata d/h PT Survai Udara Panas (Persero) yang dituangkan dalam perjanjian Kredit No 22/PK-Swad/KGS/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 per tanggal 30 Desember 2021 telah dinyatakan lunas.

Mutasi deposito berjangka yang dijaminan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal Tahun	815,253	390,786
Penambahan Tahun Berjalan	145,115	424,467
Pengurangan Tahun Berjalan	(370,225)	--
Saldo Akhir Tahun	<u>590,143</u>	<u>815,253</u>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

mortgage in the form of a term deposit in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk worth Rp200.000.

Based on a letter from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 239/S/JKH.UT/BCSU.L/XII/2021 dated 24 February 2021 Self-funded Loan Facility Number: 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 dated 3 September 2020 is declared paid off and the deposit slip as collateral has reached Rp200,000 has been unblocked.

A guaranteed time deposit amounted to Rp200,000 is the company's time deposit of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for credit loan facilities according to the Pledge of Deposit Agreement Number: 07/BIN/GADAI/2020 signed on April 24, 2020 and extended by 1 year according to the Amendment to the Credit Agreement No.(1).061/BIN/PK/2020.

Based on the Approval of Amendment to the Credit Agreement No. 061/BIN/PK/2020 dated April 20, 2021, that the pledged collateral for a nominal time deposit of Rp200,000 was extended by 1 year in accordance with the maturity date of the credit facility on April 23, 2022.

A guaranteed time deposit amounted to Rp145,115 is the company's time deposit of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk for guarantee credit facilities.

Based on letter number 543/RHS/CSTD/CB1/XII/2021 dated 31 December 2021, it was stated that the PT Aviati Indonesia Pariwisata d/h PT Survai Udara Panas credit facility as stated in the Credit agreement No. 22/PK-Swad/KGS/ BCSU/XII/2020 dated 30 December 2020 per December 30, 2021 has been declared to have been paid in full.

The movements in time deposit are as follows:

*Balance at The Beginning of The Period
Addition in The Current Year
Deduction in The Current Year
Ending Balance of The Year*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of other assets are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
<u>Aset Lancar Lainnya</u>		
Saldo Awal Tahun	(47,133)	(50,988)
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	--	(101)
Penambahan Tahun Berjalan	--	(63)
Pemulihan Tahun Berjalan	3,725	4,019
Subtotal	(43,408)	(47,133)
<u>Aset Tidak Lancar Lainnya</u>		
Saldo Awal Tahun	(185)	--
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	--	--
Penambahan Tahun Berjalan	--	(185)
Pemulihan Tahun Berjalan	--	--
Subtotal	(185)	(185)
Saldo Akhir Tahun	(43,593)	(47,318)

Other Current Assets
Balance at The Beginning of The Year
Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Addition in The Current Year
Recovery in The Current Year
Subtotal

Other Non Current Assets
Balance at The Beginning of The Year
Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Addition in The Current Year
Recovery in The Current Year
Subtotal
Ending Balance

- d. Piutang bagi hasil sukuk merupakan piutang atas imbal hasil tunai indikatif setara dengan 1% per tahun dari nilai nominal aset keuangan Perusahaan berupa Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk Mudharabah nomor 20 tanggal 15 November 2021 (Catatan 35).

- d. Profit sharing sukuk receivables are receivables from indicative cash yields equivalent to 1% per annum of the nominal value of Sukuk Mudharabah issued by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, which the Company holds based on Issuance Deed of Sukuk Mudharabah Akad number 20 dated November 15, 2021 (Note 35).

14. Aset Keuangan yang diukur Nilai Wajar melalui Laba Rugi – Pihak Ketiga

14. Financial Asset Measured at Fair Value Through Profit and Loss – Third Party

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	Jumlah Saham/ Total Share	Nilai Pasar/ Market Value	Jumlah Saham/ Total Share	Nilai Pasar/ Market Value
<u>Pihak Ketiga</u>				
PT Bank Bukopin Tbk	1,038,968,631	280,522		
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	1,038,968,631	280,522	--	--
Jumlah - Bersih	1,038,968,631	280,522	--	--

Third Parties
PT Bank Bukopin Tbk
Total Third Parties - Net
Total - Net

Pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelolaan Aset, Perusahaan menerima penyertaan saham Seri A dan Seri B pada PT Bank Bukopin, Tbk sejumlah 1.038.968.631 lembar saham, dengan nilai wajar saat pengalihan senilai Rp330 (nilai penuh) per lembar saham.

Nilai wajar per 31 Desember 2021 senilai Rp270 (nilai penuh) per lembar saham. Kerugian akibat penurunan nilai wajar per 31 Desember 2021 dicatat pada rugi belum realisasi atas investasi pada efek ekuitas sebesar Rp61.991 (Catatan 36).

On February 15, 2021, based on Government Regulation of Republic Indonesia no 51 of 2021 regarding Additional Investment from the Republic of Indonesia to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelolaan Aset share capital, the Company received Series A and Series B shares in PT Bank Bukopin Tbk totaling 1,038,968,631 shares with a fair value amounted to Rp330 (full amount) per share.

The fair value as of December 31, 2021 amounted to Rp270 (full amount) per share. The loss due to decline in fair value as of December 31, 2021 is recorded in unrealized loss of equity securities investment amounting to Rp61,991 (Note 36).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Perhitungan metode nilai wajar menggunakan nilai kuotasi harga (tanpa disesuaikan) dalam pasar aktif yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran (Tingkat 1).

The calculation of the fair value method using quoted prices (unadjusted) in active market that the entity has access to the measurement date (Level 1).

15. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

15. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income

	2021 Rp	2020 Rp
Saham - PT Indosat Tbk	4,815,075	--
Saham - PT Socfin Indonesia	257,291	--
Saham - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	130,508	--
Saham - PT Waskita Karya (Persero) Tbk	13,374	38,944
Saham - PT Pratama Persada Airborne	13,666	--
Saham - PT Kawasan Industri Lampung	5,085	--
Nilai Wajar	5,234,999	38,944

Shares - PT Indosat Tbk
Shares - PT Socfin Indonesia
Shares - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
Shares - PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Shares - PT Pratama Persada Airborne
Shares - PT Kawasan Industri Lampung
Fair Value

Berikut adalah informasi jumlah lembar saham dan nilai wajar untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

The following is information on the number of shares and fair value for financial assets measured at fair value through other comprehensive income:

	2021 Rp	2020 Rp
Saham - PT Waskita Karya (Persero) Tbk		
Jumlah Lembar	21,061,708	27,044,608
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	635	1,440
Saham - PT Indosat (Persero) Tbk		
Jumlah Lembar	776,624,999	--
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	6,200	--
Saham - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri		
Jumlah Lembar	50	--
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	2,610,160,000	--
Saham - PT Socfin Indonesia		
Jumlah Lembar	5,000	--
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	51,458,200	--
Saham - PT Kawasan Industri Lampung		
Jumlah Lembar	1,762,087	--
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	2,886	--
Saham - PT Pratama Persada Airborne		
Jumlah Lembar	9,009	--
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	1,516,942	--

Shares - PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Number of Share
Fair Value (in full Rupiah)
Shares - PT Indosat (Persero) Tbk
Number of Share
Fair Value (in full Rupiah)
Shares - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri
Number of Share
Fair Value (in full Rupiah)
Shares - PT Socfin Indonesia
Number of Share
Fair Value (in full Rupiah)
Shares - PT Kawasan Industri Lampung
Number of Share
Fair Value (in full Rupiah)
Shares - PT Pratama Persada Airborne
Number of Share
Fair Value (in full Rupiah)

Mutasi penghasilan komprehensif lainnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Movement of other comprehensive income on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	20,800	22,152
Perubahan Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	--	--
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2,574,638	--
Penyesuaian Reklasifikasi Aset Keuangan	(1,248)	(1,352)
Jumlah	2,594,190	20,800

Beginning Balance
Changes in Unrealized Gain (Loss)
Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Other Comprehensive Income for The Year
Reclassification Adjustment on Financial Assets
Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**16. Pinjaman yang Diberikan – Restrukturisasi
dan/atau Revitalisasi kepada Pihak Berelasi**

**16. Loans Receivable – Restructuring and/or
Revitalization to Related Parties**

	2021 Rp	2020 Rp	
Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Loans Receivable Restructuring/Revitalization Principal
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	666,929	663,995	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	605,000	605,000	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	206,176	211,670	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	141,612	141,612	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Industri Gelas (Persero)	89,084	89,084	PT Industri Gelas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	28,507	28,507	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Pokok Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	1,737,308	1,739,868	Total Principal Loan Restructuring/Revitalization
Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi			Interest Receivables on Restructuring/Revitalization Loans
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	23,484	23,484	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Industri Gelas (Persero)	12,359	12,359	PT Industri Gelas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	4,801	2,893	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	698	--	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
Jumlah Piutang Bunga Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	41,342	38,736	Total Interest Receivables on Restructuring/Revitalization Loans
Jumlah Pinjaman Dana Restrukturisasi/Revitalisasi	1,778,650	1,778,604	Total Restructuring/Revitalization Loans
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman			Allowance for Impairment of Loans
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(666,929)	(624,029)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	(288,157)	(273,330)	PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	(158,593)	(157,215)	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(141,612)	(141,612)	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
PT Industri Gelas (Persero)	(101,443)	(33,572)	PT Industri Gelas (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	(19,153)	(11,566)	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Jumlah Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(1,375,887)	(1,241,324)	Total Allowance for Impairment of Principal Loans
Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi			Unamortized Cost
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	--	(228)	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	--	(208)	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Industri Gelas (Persero)	--	(161)	PT Industri Gelas (Persero)
Jumlah Biaya Perolehan yang Belum Diamortisasi	--	(597)	Total Unamortized Cost
Jumlah Pengurangan	(1,375,887)	(1,241,921)	Total Deduction
Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi - Bersih	402,763	536,683	Total Loans Restructuring/Revitalization Receivable - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of loans receivables are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(1,241,324)	(349,120)	Balance at The Beginning of The Year
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	(880,238)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(134,563)	(15,637)	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	--	3,671	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(1,375,887)	(1,241,324)	Ending Balance

Suku bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur adalah sebagai berikut:

The interest rates for loans receivables granted to debtors are as follows:

Nomor Number	Debitur/ Debtor	Suku Bunga Pinjaman/ Loan Interest Rate
1	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.18%
2	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	8% - 10.5%
3	PT Penataran Angkatan Laut (Persero)	1% - 2%
4	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	10%
5	PT Industri Gelas (Persero)	11.17%
6	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	1-6.5%

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Perikatan dan Perjanjian terkait Pinjaman yang diberikan restrukturisasi dan/atau revitalisasi kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan Catatan 44.

Commitments and agreements related to loans receivable on restructuring and/or revitalization to related parties are disclosed in Note 44.

17. Properti Investasi

17. Investment Property

2021						
1 Januari/ January 1	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Efek Dekonsolidasi/ Deconsolidation Effect	31 Desember/ December 31	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	517,734	--	170,232	--	687,966	Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	517,734	--	170,232	--	687,966	Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	299,264	20,558	(1,806)	--	318,016	Fair Value
Nilai Tercatat	816,998				1,005,982	Carrying Value
2020						
1 Januari/ January 1	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Efek Dekonsolidasi/ Deconsolidation Effect	31 Desember/ December 31	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah dan Bangunan	552,470	--	29,150	(63,886)	517,734	Lands and Buildings
Jumlah Biaya Perolehan	552,470	--	29,150	(63,886)	517,734	Acquisition Cost
Akumulasi Perubahan						Accumulated Changes
Nilai Wajar	313,113	26,169	--	(40,018)	299,264	Fair Value
Nilai Tercatat	865,583				816,998	Carrying Value

Perusahaan

Tanah dan Bangunan Eks PT EMI (Persero)

SHGB Nomor 1393 dan 1399 tanggal 6 Oktober 2010 terletak di Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta dengan luas tanah 1.775 m². Di atas tanah ini berdiri bangunan kantor dengan luas 944 m² sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 2862/IMB/PG/1977 Tanggal 16 Juni 1977.

Pada tahun 2021, nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 10 Januari 2022. Nilai wajar per 31 Desember 2021 sesuai metode Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya sebesar Rp145.715.

Asset Settlement dari PT MNA (Persero)

Pada tahun 2016, Perusahaan memperoleh Aset Tanah dan Bangunan Syamsudin Noor dan Tompo Balang dengan nilai perolehan sebesar Rp11.080

The Company

Land and Building Ex PT EMI (Persero)

SHGB Number 1393 and 1399 dated October 6, 2010 is located in Melawai, Kebayoran Baru District, Jakarta with a land area of 1,775 sqm. On this land stands an office building with an area of 944 sqm in accordance with Building Permit Number: 2862/IMB/PG/1977, June 16, 1977.

In 2021, the fair value of investment property as of December 31, 2021 is estimated based on an assessment of the market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (registered with OJK) report dated January 10, 2022. Fair value as of December 31, 2021 in accordance with the Market Approach and Cost Approach method of Rp145,715.

Asset Settlement from PT MNA (Persero)

In 2016, the Company acquired Land and Building Assets Syamsudin Noor and Tompo Balang with an acquisition value of Rp11,080

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

Aset Syamsudin Noor terletak di KO Bandara Syamsudin Noor RT. 038 RW. 08, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru – Kalimantan Selatan, berupa tanah dengan luas 1.991 m² dan bangunan gudang dengan luas 180 m².

Pada tahun 2021, nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 10 Januari 2022. Nilai wajar per 31 Desember 2021 sesuai metode Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya sebesar Rp4.457.

Aset Tompo Balang terletak di Jalan G. Bawakaraeng No. 10, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Bontala, Kota Makassar – Sulawesi Selatan, berupa tanah dengan luas 593 m² dan bangunan eks kantor dengan luas 420 m².

Pada tahun 2021, nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 10 Januari 2022. Nilai wajar per 31 Desember 2021 sesuai metode Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya sebesar Rp10.584.

Pada tahun 2017, Perusahaan memperoleh aset tanah Maros dengan jumlah nilai perolehan sebesar Rp57.675 milik PT MNA, diserahkan kepada Perusahaan sebagai kompensasi pembayaran atas sebagian Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan.

Aset Maros terletak di Jalan Poros Makassar – Maros KM.22, Kelurahan Ma'rumpa, Dusun Bulutanae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros – Sulawesi Selatan, berupa Tanah dengan luas 37.649 m² dan Bangunan dengan luas 1.024 m².

Pada tahun 2021, nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 10 Januari 2022. Nilai wajar per 31 Desember 2021 sesuai metode Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya sebesar Rp75.823.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

belonging to PT MNA, submitted to the Company as compensation for payment for some loans provided by the Company.

Syamsudin Noor's assets are located at KO Syamsudin Noor Airport RT. 038 RW. 08, Syamsudin Noor Village, Ulin Runway Subdistrict, Banjar Baru City – South Kalimantan, in the form of land with an area of 1,991 sqm and warehouse buildings with an area of 180 sqm.

In 2021, the fair value of investment property as of December 31, 2021 is estimated based on an assessment of the market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (registered with OJK) report dated January 10, 2022. Fair value as of December 31, 2021 in accordance with the Market Approach and Cost Approach method of Rp4,457.

Tompo Balang assets are located at Jalan G. Bawakaraeng No. 10, Tompobalang Village, Bontala Subdistrict, Makassar City – South Sulawesi, in the form of land with an area of 593 sqm and ex-office buildings with an area of 420 sqm.

In 2021, the fair value of investment property as of December 31, 2021 is estimated based on an assessment of the market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (registered with OJK) report dated January 10, 2022. Fair value as of December 31, 2021 in accordance with the Market Approach and Cost Approach method of Rp10,584.

In 2017, the Company acquired Maros land assets with a total value of Rp57,675 belonging to PT MNA, submitted to the Company as compensation for payment for a portion of the Loan provided by the Company.

Maros assets are located on Jalan Poros Makassar – Maros KM.22, Ma'rumpa Village, Bulutanae Hamlet, Maros Baru Subdistrict, Maros Regency – South Sulawesi, in the form of Land with an area of 37,649 sqm and Buildings with an area of 1,024 sqm.

In 2021, the fair value of investment property as of December 31, 2021 is estimated based on an assessment of the market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (registered with OJK) report dated January 10, 2022. Fair value as of December 31, 2021 in accordance with the Market Approach and Cost Approach method of Rp75,823.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Asset Settlement PT Kertas Leces (Persero)

Aset yang dinilai milik Perusahaan berupa Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan jumlah luas LT/LB +/- 1.775 / 936,3 m² disertai sarana pelengkap yang terletak di Jalan Cimanuk No. 29&31, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 10 Januari 2022. Nilai wajar per 31 Desember 2021 sesuai metode Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya sebesar Rp32.880.

Aset Tegal

Pada tahun 2015, Perusahaan memperoleh Aset Tanah dan Bangunan Tegal dengan nilai perolehan sebesar Rp44.611 milik PT ISN, diserahkan kepada Perusahaan melalui proses Lelang KPKNL Tegal.

Aset Tegal terletak di Jalan Pala Raya No. 1 (SHGB No. 123, LT. 60.660 m² dan Bangunan 1.260 m²), Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah dan Jalan Pala Raya (SHGB No.194, LT.47.060 m² dan Bangunan 5.474 m²), Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (terdaftar di OJK) laporan tertanggal 10 Januari 2022. Nilai wajar per 31 Desember 2021 sesuai metode Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya sebesar Rp93.760.

Aset Gresik

Berdasarkan Surat Penugasan Menteri BUMN nomor: S-863/MBU/12.2015 tanggal 3 Desember 2015 yang antara lain menugaskan Perusahaan membantu penyelesaian kewajiban karyawan PT Industri Gelas (Persero) ("PT Iglas"). Dukungan penyelesaian kewajiban karyawan tersebut dilakukan oleh Perusahaan melalui pembelian aset tanah dan bangunan yang dimiliki PT Iglas di Gresik.

Pada tanggal 7 Desember 2021, Perusahaan melakukan Akta Jual Beli di hadapan PPAT Rully Maharany, S.H., M.Kn. atas pembelian Lahan PT Iglas SHGB 11 – SHGB 17, sesuai Akta Jual Beli Nomor 124/2021 – 130/2021. Dengan telah dilakukan proses AJB ini maka proses pembelian Lahan PT Iglas yang tadinya dicatat

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Asset Settlement of PT Kertas Leces (Persero)

Assets assessed by the Company in the form of Land and Residential Buildings with an area of LT / LB + - 1,775 / 936.3 sqm. accompanied by complementary facilities located at Jalan Cimanuk No.29&31, Darmo Village, Wonokromo Subdistrict, Surabaya City, East Java Province.

Fair value of investment property on December 31, 2021 is estimated based on an assessment of market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (registered with OJK) report dated January 10, 2022. Fair value as of December 31, 2021 in accordance with the Market Approach and Cost Approach method of Rp32,880.

Asset Tegal

In 2015, the Company acquired Tegal Land and Building Assets with an acquisition value of Rp44,611 belonging to PT ISN, submitted to the Company through the KPKNL Tegal Auction process.

Tegal Assets are located at Jalan Pala Raya No. 1 (SHGB No. 123, LT. 60,660 sqm and Building 1,260 sqm), Dampyak Village, Kramat District, Tegal Regency – Central Java and Pala Raya Road (SHGB No.194, LT.47,060 sqm and Building 5,474 sqm), Dampyak Village, Kramat District, Tegal Regency – Central Java.

Fair value of investment property on December 31, 2021 is estimated based on an assessment of market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan (registered with OJK) report dated January 10, 2022. Fair value as of December 31, 2021 in accordance with the Market Approach and Cost Approach method of Rp93,760.

Asset Gresik

Based on the Assignment Letter of the Minister of SOEs number: S-863 / MBU / 12.2015 dated December 3, 2015 which among others assigned the Company to assist in the settlement of employee obligations of PT Industri Gelas (Persero) ("PT Iglas"). Support for the settlement of employee obligations is carried out by the Company through the purchase of land and building assets owned by PT Iglas in Gresik.

On December 7, 2021, the Company conducted a Deed of Sale and Purchase drawn before PPAT Rully Maharany, S.H., M.Kn. on the purchase of PT Iglas SHGB 11 - SHGB 17 Land, in accordance with Deed of Sale and Purchase Number 124/2021 - 130/2021. With this AJB process, the process of purchasing PT Iglas Land

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

sebagai uang muka telah direklasifikasi menjadi properti investasi.

Aset Iglas terletak di Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur berupa tanah seluas 27.235 m². Nilai perolehan per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.826.

PT NK

Properti investasi merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Bajak V Medan (tanah) dengan luas tanah 9.363 m²; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian Sidoarjo (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 10.440 m²; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (tanah) dengan luas tanah 4.572 m²; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.828 m²; Jl Majapahit Nomor 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan kota Mataram (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.977 m²; Jl. Bontosunggu nomor 22 Makassar dengan luas tanah 1.559 m²; dan Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan dengan luas tanah 1.057 m²; Jl. Bridgend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan kota Semarang (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 3.768 m². Jl. Mustofa no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan luas 1.338 m². Tanah di Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Kota Bandung dengan luas 2.720 m².

Tanah dan bangunan SHGB No. 366/Harjosari II dengan luas tanah sebesar 5.170 m² yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Tanah di Jalan Tenggilis Tengah No. 4 Surabaya, Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali, Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali, Tanah dan bangunan SHGB No. 20019/Losari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 966 m² yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

which was previously recorded as a down payment has been reclassified into investment property.

PT Iglas' assets are located in Tenggulunan Village, Kebomas Subdistrict, Gresik Regency, East Java Province in the form of land area of 27,235 sqm. The acquisition value as of December 31, 2021 amounted to Rp63,826.

PT NK

The investment property represents the land and buildings located at Jl. Bajak V Medan (land) at land area of 9,363 sqm; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian Sidoarjo (land and building) at land area of 10,440 sqm; Jl. Poros Dusun Patene, Marusu Sub District, Maros District, Makassar (land) at land area of 4,572 sqm; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, East Jakarta (land and building) at land area of 5,828 sqm; Jl Majapahit No. 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan Mataram Municipality (land and building) at land area of 5,977 sqm; Jl. Bontosunggu number 22 Makassar at land area of 1,559 sqm.; and Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan at land area of 1,057 sqm; Jl. Bridgend Sudiarto No.496 Pedurungan Lor Village, Pedurungan Sub District Semarang Municipality (land and building) at land area of 3,768sqm. Jl. Mostopha no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung Municipality at extent of 1,338 sqm. Land on Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Bandung Municipality at extent of 2,720 sqm.

Land and building SHGB No. 366/Harjosari II with a land area of 5,170 sqm which is located on Jl. Sisingamaraja Ex. Harjosari II, Medan Amplas District, Medan City, North Sumatra, Land on Tenggilis Tengah Street No. 4 Surabaya, Land and buildings above SHGB No. 3 and SHGB No. 4 which is located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Sumerta Kelod Village, East Denpasar, Bali, Land and buildings above SHGB No. 352 which is located on Jl. Ciung Wanara No. 1 Badung Regency, Bali, Land and building SHGB No. 20019/Losari on behalf of the Company with a land area of 966 sqm located on Jl. Lamadukelleng No. 28 Ex. Losari, Ujung Pandang District, Makassar City, South Sulawesi, Land/office building and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Ex. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya above SHGB No. 599.

	2021 Rp	2020 Rp	
Pendapatan Sewa	10,594	9,044	Rental Income
Beban Langsung yang Timbul dari Properti			Direct Operating Cost Arises from
Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	8,590	7,485	Rental Generated from Investment Property

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan laporan tertanggal 2 November 2021 dan adanya penilaian yang dilakukan oleh KJPP Herman Meirizki & Rekan dengan laporan tertanggal 22 Desember 2021.

Hierarki nilai wajar Tingkat 2 dari properti investasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dihitung berdasarkan hasil penilaian pendekatan berikut ini:

- Pendekatan Pendapatan
Input yang paling signifikan dalam pendekatan ini adalah asumsi-asumsi digunakan dalam perhitungan tingkat kapitalisasi seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan.
- Pendekatan Biaya
Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Biaya pengganti baru disesuaikan dengan estimasi penyusutan dengan mempertimbangkan tingkat umur ekonomis, kemunduran fisik dan keusangan.

Properti investasi berupa tanah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 27).

PT PPAK

PT PPAK melakukan pembelian atas tanah dan bangunan lelang jaminan PT Kertas Leces (Persero) berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas keseluruhan kurang lebih 434 m², serta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas satu bidang tanah dengan luas yang berdasarkan dokumen kepemilikan 623 m² senilai 11.725. Aset tersebut terletak di Jalan Radio IV No. 5, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2019, berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") pada tanggal 17 Januari 2019, terdapat BPHTB yang dikapitalisasi sebesar Rp571.

Akumulasi kenaikan nilai wajar properti investasi setelah direvaluasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.445.

PT PPAK melakukan penilaian nilai wajar dari properti investasi yang diukur berdasarkan perhitungan dari penilai berkualifikasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki & Rekan dengan laporan tanggal 10 Februari 2022 dengan menggunakan teknik pendekatan biaya dan pendekatan pasar (nilai wajar level 2).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The fair value of the investment property as of December 31, 2021 was estimated based on an assessment of the market value conducted by KJPP Jimmy Prasetyo & Partners report dated November 2, 2021 and an assessment conducted by KJPP Herman Meirizki & Rekan with a report dated December 22, 2021.

The Level 2 fair value hierarchy of investment properties for land and buildings that are rented is calculated using following approaches:

- *Revenue Approach*
The most significant input in this approach is the assumption used in the calculation of the capitalization rate such as the discount rate and the growth rate.
- *Cost Approach*
The most significant input to this valuation approach is the estimation of the cost for new reproduction or the cost for new replacement. The cost for new replacement is adjusted to the estimated depreciation by taking into account the level of economic life, physical deterioration and obsolescence.

Investment properties in form of land are used as collateral for bank loans (Note 27).

PT PPAK

PT PPAK purchased the land and building from the auction guarantee of PT Kertas Leces (Persero) in form of a piece of land and building at total area of about 434 sqm, as well as other complementary facilities erected on a piece of land at extend that based on the ownership document 623 sqm worth of 11,725. The asset is located at Jalan Radio IV No. 5, Kramat Pela Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta Municipality, DKI Jakarta Province.

In 2019, based on the Regional Tax Payment Slip on Cost for Acquisition of Right to Land and Building on January 17, 2019, there was the Cost for Acquisition of Right to Land and Building capitalized at Rp571.

The accumulated increase in fair value of investment properties after being revalued on December 31, 2020 amounted to Rp7,445.

PT PPAK assesses the fair value of the investment property measured based on the calculation of qualified appraiser by the Public Appraisal Service Office Herman Meirizki & Partners with the report dated February 10, 2022 by using the cost approach and market approach (fair value level 2).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

18. Investasi pada Ventura Bersama

18. Investments in Joint Venture

Nama Ventura Bersama / Name of Joint Venture	Proyek / Project	Persentase/ Percentage	2021 Rp	2020 Rp
Ventura Bersama - Pembangunan Perumahan Green Teksin	Proyek Pembangunan Perumahan Green Teksin	86%	48,613	60,289
Ventura Bersama - ISN - LBD - PPA	Proyek Pembangunan Perumahan Bekasi	33%	38,087	45,259
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Bendungan Sadawarna	60%	86,910	48,793
Ventura Bersama Nindya - Bina Nusa Lestari	Bendungan Temef Di Kab. Timor Tengah Selatan Paket 3 (Myc)	70%	36,193	--
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangun Nusa	Bendungan Tiusuntuk	65%	36,023	20,491
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Cisumdawu	8.7%	26,769	20,750
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Bendungan Meninting	73%	25,671	24,705
Ventura Bersama Nindya - Modern Widya Tehnical	Fasilitas Sisi Udara Bandara Nabire Baru I	60%	15,286	11,669
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Bendungan Bomberay	70%	13,656	11,352
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau	70%	10,479	10,237
Ventura Bersama Nindya - Surya Mataram Sakti	Pengendalian Banjir Dan Rob Semarang – Demak Paket II	65%	9,817	--
Ventura Bersama Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	SPAM Kalideng KAP. 150 liter/detik	70%	8,546	5,133
Ventura Bersama Nindya - Passokkorang	Jalan Tompe-Dalam kota Palu	70%	8,535	7,044
Ventura Bersama Nindya - Abel	Proyek Preservasi Jalan SP. Perdu - Batu Ampar	65%	7,308	901
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya - Panrisau	Pembangunan Jl. Depapre	35%	7,169	7,169
Ventura Bersama Nindya - Damai	Jalan Bts. Kec. Siding/Seluas - Bts. Kec. Sekayan/Entikong (MYC)	60%	6,512	962
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	Waduk Bendo	33%	6,207	8,128
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	Irigasi Doplang	70%	5,077	6,140
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Jalan Rianiate	60%	4,898	4,898
Ventura Bersama Nindya - Bumi Agung Annusa	Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika	70%	4,519	3,731
Ventura Bersama Nindya - Utama Karya	Bendungan Tanju Milla	60%	3,937	3,937
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Tol Solo - Kertosono	31%	3,823	3,823
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	Takengon - Uning	75%	2,611	2,611
Ventura Bersama Nindya - Inti	Ipal Aceh	60%	2,479	2,479
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Sei Wampu	45%	2,431	3,151
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Penta	Indoor Multifunction Stadium Dalam Rangka Kejuaraan Dunia Bola Basket	30%	2,150	--
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara	60%	1,958	3,151
Ventura Bersama Nindya - Bunga Raya Lestari	Pengembangan Dan Pembangunan MICE, Infrastruktur Kawasan Tana Mori	60%	1,944	--
Ventura Bersama Nindya - Andesmont	Jaringan Irigasi Di. Bintang Bano Sumbawa Barat (Paket 3)	70%	1,868	210
Ventura Bersama Nindya - Kencana	Rembele Tahap II	70%	1,855	1,855
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Irigasi Batang Anai Tahap 2	70%	1,738	1,738
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Basuki	Sukodono	70%	1,522	1,522
Ventura Bersama Nindya - Mettana	Works For Pasigala Raw Water Transmission System Rehabilitation (Package II)	25%	1,295	--
Ventura Bersama Nindya - Surya	Waduk Pondok Ranggon Dan Waduk Wirajasa Beserta Kelengkapannya	98%	1,051	--
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	Irigasi Lematang	70%	--	5,680
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Pantai Marore	60%	--	2,854
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Miliar)	Sungai Ciliwung	40%	--	1,300
			(3,668)	12,778
			433,269	344,740

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investment in joint ventures are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai tercatat awal tahun	344,740	321,808	Carrying Amount at Beginning of Year
Mutasi Investasi - bersih	(64,247)	(64,973)	Investment Movements - Net
Bagian Laba Ventura Bersama (Catatan 40)	152,776	87,905	Share of the Profit in Joint Venture (Note 40)
Nilai tercatat akhir tahun	433,269	344,740	Carrying Amount at the end of Year

Ringkasan informasi keuangan dibawah ini merupakan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ventura bersama dengan rincian berikut ini:

The summary of financial information below represents amount shown in joint venture's financial statements with the details belows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Aset Lancar	2,340,241	3,367,127	Current Asset
Aset Tidak Lancar	31,202	81,281	Non-Current Asset
Liabilitas Jangka Pendek	1,748,471	2,213,659	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	244,785	275,803	Non-Current Liabilities
Pendapatan Usaha	1,433,578	1,582,618	Revenue
Laba Bersih Tahun Berjalan	117,712	147,518	Net Income
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	Other Comprehensive Income of The Year
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	117,712	147,870	Comprehensive Income of The Year

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

19. Pinjaman Investasi Jangka Panjang

19. Long Term Investment Loans

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Magnesium Gosari International	203,557	154,691	PT Magnesium Gosari International
PT National Utility Helicopters	174,293	174,293	PT National Utility Helicopters
PT Bondi Syad Mulia	167,874	47,000	PT Bondi Syad Mulia
PT Rejeki Intilogam Jaya	132,684	128,437	PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Matoa Kidung Samudera	38,683	38,859	PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera	35,544	35,746	PT Matoa Kidung Bahtera
PT Pratama Persada Airbone	--	22,665	PT Pratama Persada Airbone
Jumlah Pihak Berelasi - Pokok	752,635	601,691	Total Related Parties - Principal
PT Rejeki Intilogam Jaya	28,188	8,427	PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Magnesium Gosari International	21,884	12,474	PT Magnesium Gosari International
PT National Utility Helicopters	14,020	2,930	PT National Utility Helicopters
PT Matoa Kidung Samudera	10,266	5,896	PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera	10,028	5,769	PT Matoa Kidung Bahtera
PT Bondi Syad Mulia	2,116	251	PT Bondi Syad Mulia
PT Pratama Persada Airbone	--	1,175	PT Pratama Persada Airbone
Jumlah Pihak Berelasi - Bunga	86,502	36,922	Total Related Parties - Interest
<i>Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</i>	<i>(424,443)</i>	<i>(84,185)</i>	<i>Less: Allowance for Impairment Losses</i>
<i>Jumlah Provisi</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>Total Provision</i>
Jumlah Pinjaman Investasi Jangka Panjang - Pihak Berelasi	414,702	554,436	Total Long-Term Investment - Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	98,692	--	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
PT Carpediem Mandiri	60,790	--	PT Carpediem Mandiri
PT Widodo Makmur Unggas	49,750	99,750	PT Widodo Makmur Unggas
PT Wisarada Sarana Aviasi	25,416	26,765	PT Wisarada Sarana Aviasi
PT Tropisindo Sumber Energi	9,438	9,438	PT Tropisindo Sumber Energi
Jumlah Pihak Ketiga - Pokok	244,086	135,953	Total Third Parties - Principal
PT Wisarada Sarana Aviasi	994	357	PT Wisarada Sarana Aviasi
PT Carpediem Mandiri	532	--	PT Carpediem Mandiri
PT Widodo Makmur Unggas	190	381	PT Widodo Makmur Unggas
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	116	--	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
PT Survai Udara Panas	--	--	PT Survai Udara Panas
Jumlah Pihak Ketiga - Bunga	1,832	738	Total Third Parties - Interest
<i>Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</i>	<i>(53,282)</i>	<i>(9,438)</i>	<i>Less: Allowance for Impairment Losses</i>
Jumlah Pinjaman Investasi Jangka Panjang - Pihak Ketiga	192,636	127,253	Total Long-Term Investment - Third Parties
Total Pinjaman Investasi Jangka Panjang - Bersih	607,338	681,689	Total Long Term Investment Loan - net

Mutasi investasi pada pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

Changes in investment in long term investment loan are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	(93,623)	(9,438)	Balance at The Beginning of The Year
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	(73,866)	Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan Tahun Berjalan	(384,102)	(10,319)	Addition in The Current Year
Pemulihan Tahun Berjalan	--	--	Recovery in The Current Year
Saldo Akhir Tahun	(477,725)	(93,623)	Ending Balance

a. PT Magnesium Gosari Internasional ("PT MGI")

Pada tanggal 17 Januari 2019 dilakukan penandatangan Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman investasi proyek pengembangan Kawasan Pabrik Pupuk dengan PT MGI No. PP-03/PPA/0119. Pinjaman fasilitas ini terdiri dari *Tranche A* sebesar Rp23.000 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembelian mesin *dolomite train II*, *Tranche B* sebesar Rp59.200 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembelian dan pemasangan mesin *dolomite*

a. PT Magnesium Gosari Internasional ("PT MGI")

On January 17, 2019, an agreement was signed on the granting of investment loan facilities for the development of the Fertilizer Factory Area between PT MGI and PP-03/PPA/0119 Companies. This facility loan consists of *Tranche A* amounted to Rp23,000 with the aim of using funds to finance the purchase of *dolomite train II* machines, *Tranche B* in amounted to Rp59,200 with the aim of using funds to finance the purchase and installation of *dolomite III* machines, *Tranche C* amounted to Rp9,800 with the

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

III, *Tranche C* sebesar Rp9.800 dengan tujuan penggunaan dana untuk Pembelian 2 bidang tanah, *Tranche D* sebesar Rp57.200 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan pembangunan Gudang dan infrastruktur pendukung Gudang serta pabrik pupuk.

Tranche E sebesar Rp15.800 dengan tujuan pembiayaan *improvement* pabrik II dan III dan *Tranche F* sebesar Rp20.000 dengan tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan *Interest during construction* dengan jumlah pokok sebesar Rp185.000. Jangka waktu Pinjaman fasilitas selama 84 bulan dengan tingkat suku bunga 15% per tahun.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp154.691. Jumlah bunga yang direstrukturisasi menjadi pokok adalah sebesar Rp48.866. Saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp203.557.

b. PT National Utility Helicopters ("PT NUH")

Pada tanggal 8 Maret 2019, Perusahaan dan PT NUH melakukan penandatanganan Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman melalui Akta Notaris Desman S.H., M.Hum., M.M., No.18 tanggal 8 Maret 2019. PT NUH memperoleh tambahan pagu kredit pinjaman setinggi-tingginya Rp37.500 melalui tiga Fasilitas Pinjaman baru yaitu *Tranche II*, *Tranche III* dan *Tranche IV*. Tingkat suku bunga 17% per tahun, biaya provisi sebesar 1,5% dari pagu kredit pinjaman dan biaya administrasi penarikan sebesar Rp3 untuk setiap penarikan pinjaman.

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan PT NUH melakukan penandatanganan Addendum I Perubahan secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman melalui Akta Notaris Desman S.H., M.Hum., MM., No. 113. PT NUH memperoleh tambahan pagu kredit pinjaman untuk Modal Kerja sebesar Rp98.000 melalui 5 (lima) Fasilitas Pinjaman baru yaitu *Tranche V*, *Tranche VI*, *Tranche VII*, *Tranche VIII* dan *Tranche IX*. Tingkat suku bunga 17% per tahun, biaya provisi sebesar 1,8% dari pagu kredit pinjaman dan biaya administrasi penarikan sebesar Rp5 untuk setiap penarikan pinjaman

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

purpose of using funds for the purchase of 2 plots of land, *Tranche D* amounted to Rp57,200 with the objective of using funds to finance the construction of warehouses and supporting infrastructure of warehouses and fertilizer factories.

Tranche E amounted to Rp15,800 with the objective of financing improvements to factories II and III and *Tranche F* amounted to Rp20,000 with the objective of using the funds to finance Interest during construction with a total principal amounted to Rp185,000. The facility loan period is 84 months with an interest rate of 15% per annum.

The balance as of December 31, 2020 is Rp154,691. The total interest that was restructured into principal is amounting to Rp48,866. The balance of loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt of payments in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp203,557.

b. PT National Utility Helicopters ("PT NUH")

On March 8, 2019, the Company and PT NUH signed the Comprehensive Amendment to the Loan Agreement through Notarial Deed Desman S.H., M.Hum, M.M., No. 18 dated March 8, 2019. PT NUH obtained an additional loan limit amounting to Rp37,500 through three new Facility Loan which is *Tranche II*, *Tranche III* and *Tranche IV*. Interest rate of 17% per annum, a provision fee of 1.5% of the loan limit and a withdrawal administration fee amounting to Rp3 for each loan withdrawal.

On December 20, 2019, the Company and PT NUH signed the 1st Amendment to Overall Loan Agreement through Notarial Deed Desman S.H., M.Hum, MM., No. 113. PT NUH received an additional loan limit amounting to Rp98,000 for working capital through 5 (five) new Facility Loan which is *Tranche V*, *Tranche VI*, *Tranche VII*, *Tranche VIII* and *Tranche IX*. Interest rate of 17% per annum, a provision fee of 1.8% of the loan limit and an administration fee of withdrawal of Rp5 for each loan withdrawal

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 24 Januari 2020, Perusahaan melakukan perpanjang perjanjian melalui Addendum II Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 7 yang dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, S.H., Addendum ini terkait dengan pelepasan sebagian jaminan gadai saham PT Dinamika Danatama Dirgantara.

Pada tanggal 3 Maret 2020 dilakukan Addendum III Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 06 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum., Addendum ini terkait dengan perubahan tujuan penggunaan dana Fasilitas Pinjaman *Tranche VII* dan penambahan jaminan fidusia berupa mesin pesawat helicopter AW 119Kx reg. PK-USE dengan nilai jaminan Rp40.500.

Pada tanggal 18 Maret 2020 dilakukan Addendum IV Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 76 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum. Addendum ini terkait dengan penambahan pagu kredit Fasilitas Pinjaman *Tranche X* senilai Rp65.000, sehingga jumlah pagu kredit pinjaman yang diberikan kepada PT NUH adalah sebesar Rp180.932. Tujuan fasilitas pinjaman ini untuk modal kerja dan pembelian helicopter, *spare part* dan peralatan serta pembayaran asuransi helicopter. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 24 (dua puluh empat bulan). Perusahaan juga memperoleh tambahan jaminan fidusia berupa mesin pesawat helicopter Bell 412EP reg. PK-URB dengan nilai jaminan Rp55.000.

Pada tanggal 26 Juni 2020, telah dilakukan Addendum V Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Pinjaman No. 96 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum. PT NUH memperoleh tambahan pagu kredit pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp24.000 melalui Fasilitas Pinjaman *Tranche XI*. Selain itu PPA akan mendapatkan *Management Fee* sebesar Rp6.856 dan Provisi sebesar Rp144. Perusahaan juga mendapatkan tambahan jaminan berupa fidusia atas tagihan/piutang usaha PT NUH setinggi-tingginya Rp31.200 serta penyerahan Bilyet Giro senilai Rp10.000.

Pada tanggal 3 September 2020, PT NUH telah melunasi sisa pinjaman pokok dan bunga atas Fasilitas Pinjaman *Tranche VII*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On January 24, 2020, the Company made Amendment II to Amendment Overall Loan Agreement Number 7 through Notary Rismalena Kasri, S.H.. This Amendment is related to the release of part of the pledge of shares of PT Dinamika Danatama Dirgantara.

On March 3, 2020, was made for Amendment III to Overall Loan Agreement No. 06 through Notary Desman, S.H., M. Hum. This Amendment is related to the change the purpose of the *Tranche VII* Loan Facility and the addition of fiduciary guarantees in the form of an AW 119Kx reg. PK- USE with a collateral value amounted to Rp40,500.

On March 18, 2020, was made Ammendment IV to Overall Loan Agreement through Number 76 through Notary Desman, S.H., This amendment is related to the addition of the *Tranche X* Loan Facility amounting to Rp65,000, therefore the total loan limit granted to PT NUH amounted to Rp180,932. The objective of the loan facility is to obtain working capital financing and purchase of helicopters, spare parts, and equipment along with payment of helicopter insurance. The term of the loan facility is 24 (twenty four) months. The Company also obtained additional fiduciary security in the form of a Bell 412EP reg. PK-URB with a guaranteed value amounted to Rp55,000

On June 26, 2020, Amendment V Overall Loan Agreement was made through Number 96 drawn before Notary Desman, S.H., M.Hum., PT NUH obtained an additional loan limit amounting to Rp24,000 for working capital through the *Tranche XI* Loan Facility. In addition, PPA will receive a Management Fee of Rp6,856 and a Provision of Rp144. The company also received additional guarantees in the form of fiduciary over accounts receivable of PT NUH amounted to Rp31,200 and submission of a Giro amounted to Rp10,000.

On September 3, 2020, PT NUH has paid the outstanding principal and interest on the *Tranche VII* Loan Facility amounting to

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

senilai jumlah Rp13.300 melalui Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Chailease International Financial Services Co Ltd. Pada hari yang sama juga dilakukan penghapusan (roya) atas salah satu aset yang dijaminkan ke PPA yaitu berupa 1 unit mesin helicopters PK-USE dengan nilai jaminan Rp40.500, sehingga jumlah nilai jaminan PT NUH di Perusahaan saat ini menjadi sebesar Rp271.898 dengan *collateral coverage ratio* sebesar 154%.

Pada tanggal 22 Oktober 2021 dilakukan penandatanganan perjanjian restrukturisasi Hutang antara Perusahaan dengan PT NUH No. 84 dengan tujuan perubahan *rate* bunga menjadi 13% dengan pembayaran 10% pembayaran di tahun 2021 dan 3% dibayar di tahun 2022 serta perpanjangan jangka waktu sampai dengan 21 Oktober 2024

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp174.293. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp174.293.

c. PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")

Pada tanggal 20 April 2018 telah ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi (SUK) PT BSM Nomor No. 20, dengan nilai setinggi-tingginya Rp64.000. Jatuh Tempo tanggal 30 April 2023. Tujuannya adalah untuk pembelian pabrik dan rencana pengalihan saham eksisting ke PT PPAK. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo SUK yang belum ditebus/dikonversi sebesar Rp27.000 dengan *rate* bunga 13% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 49 tanggal 24 Agustus 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit investasi kepada Bondi Syad Mulia dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp25.000 untuk mempergunakan seluruh dana fasilitas pinjaman hanya untuk tujuan pembelian aset di Gresik dengan tingkat suku bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu pinjaman terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rp13,300 through the Loan Facility obtained from Chailease International Financial Services Co., Ltd. On the same day, one of the assets pledged 1 unit of PK-USE as collateral to PPA was also released, helicopters with a collateral value amounted to Rp40,500, therefore the total PT NUH guarantee value in the Company amounted to Rp271,898 with collateral coverage ratio of 154%.

On October 22, 2021, a Debt restructuring agreement was signed between the Company and PT NUH No. 84 with the aim of changing the interest rate to 13% with 10% payment in 2021 and 3% paid in 2022 and an extension of the term until 21 October 2024.

The balance as of December 31, 2020 is Rp174,293. The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payments in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp174,293.

c. PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")

As of April 20, 2018, the Deed of Sale and Purchase Agreement of Convertible Bonds PT BSM Number No. 20, with a maximum value amounting to Rp64,000. Due on April 30, 2023 has been signed. The objective is to purchase the factory and plans to transfer the existing shares to PT PPAK. As of December 31, 2021, the unredeemed/converted SUK balance amounted to Rp27,000 with an interest rate of 13% per annum.

Based on the Loan Agreement No. 49 dated August 24, 2018, the Company signed the investment credit agreement with Bondi Syad Mulia at maximum total principal amounting to Rp25,000 to use all loan facility funds only for the objective to purchase assets in Gresik with interest rate of 13% per annum with the loan term commencing as of the effective date until August 23, 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp47.000. Dikarenakan jatuh tempo sampai dengan 23 Agustus 2023, sehingga saldo sebelumnya yang dicatat pada pinjaman investasi jangka pendek (Catatan 4) direklasifikasi ke pinjaman investasi jangka panjang sebesar Rp106.220. Jumlah bunga dan denda yang direstrukturisasi menjadi pokok sebesar Rp15.154. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp500. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp167.874.

d. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

PT RILJ pada tanggal 29 Mei 2019 melakukan penandatanganan addendum I perjanjian pemberian fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi.

Pada tanggal 27 Januari 2020 telah dilakukan Addendum II PP No. 39 atas perubahan alokasi penggunaan dana fasilitas pinjaman.

Kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 dilakukan addendum ke III PP No. 04 telah ditandatangani dengan tujuan perubahan *cut off* perhitungan bunga dan tanggal pembayaran bunga yaitu paling lambat 23 setiap bulannya dan *cut off* bunga setiap tanggal 20 setiap bulannya.

Selanjutnya Addendum IV dilakukan antara PT PPA dan RILJ PP No. 9 dengan tujuan untuk penambahan fasilitas pinjaman Modal Kerja dan pinjaman Dana Talangan dengan nilai *plafond* Rp73.379 dengan jaminan berupa fidusia piutang usaha yang timbul dari transaksi pemenuhan ingot pesanan.

Pada tanggal 23 Maret 2021 dilakukan Addendum V dengan tujuan penambahan limit kredit modal kerja maksimum sebesar Rp69.000 dan Kredit Talangan sebesar Rp4.390. Tanggal jatuh tempo *Tranche A* yaitu 22 Februari 2021 dan *Tranche B* tanggal 22 Maret 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp128.437. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp24.677. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp20.430. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp132.684.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as of December 31, 2020 is Rp47,000. Due to maturity until August 23, 2023 thus the previous balance recorded in short-term investment loans (Note 4) was reclassified to long-term investment loans is amounting to Rp106,220. The amount of interest and fines that have been restructured into principal is amounting to Rp15,154. Total balance of loan disbursement in the current year is amounting to Nil. The receipt of payments in the current year is amounting to Rp 500. The balance as of December 31, 2021 is Rp167,874.

d. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

PT RILJ on May 29, 2019 signed the Amendment I to the agreement to provide working capital and investment loan facilities.

On January 27, 2020, Addendum II PP No. 39 for changes in the allocation of the use of loan facility funds has been entered into.

Subsequently, on May 18, 2020, the third addendum to PP No. 04 has been signed with the objective of changing the interest calculation cut off and interest payment date, which is no later than the 23rd of each month and the cut off of interest every 20th of each month.

Furthermore, Addendum IV was carried out by PT PPA and RILJ PP No. 9 with the aim of providing additional working capital loan facilities and bailout loans with a limit value of Rp73,379 with collateral in the form of fiduciary trade receivables arising from ingot order fulfillment transactions.

On March 23, 2021, Amendment V was carried out with the aim of increasing the maximum working capital limit of Rp69,000 and bailout credit of Rp4,390. The maturity date of *Tranche A* is 22 February 2021 and *Tranche B* is 22 March 2022.

The balance as of December 31, 2020 is Rp128,437. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp24,677. Receipt from payment in the current year is amounting to Rp20,430. The balance as of December 31, 2021 is Rp132,684.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

e. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk ("PT WMP")

Pada tanggal 19 Oktober 2021 dilakukan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Perusahaan dengan PT Widodo Makmur Perkasa No. 75 tentang penambahan Modal Kerja untuk PT Widodo Makmur Unggas dengan *plafond* sebesar Rp23.692. Tingkat suku bunga 12% *gross* per tahun dengan jangka waktu selama 18 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2023.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Nihil. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp98.692. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.692.

f. PT Carpediem Mandiri ("PT CM")

Penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT CM No. 40 pada tanggal 9 Agustus 2019, telah dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019 atas perubahan perjanjian restrukturisasi hutang dengan PT CM.

PT CM telah melakukan tambahan pengikatan jaminan kepada Perusahaan melalui gadai atas seluruh saham PT Carpediem Aviast Mandiri (entitas anak PT Carpediem), yaitu:

- 1) Akta Gadai Saham PT CM kepada Perusahaan No. 66 tanggal 18 Februari 2020 setara dengan Rp90.000 (60% saham PT CAM);
- 2) Akta Gadai Saham Bp. Syafruddin Rachman kepada Perusahaan No. 67 tanggal 18 Februari 2020 setara dengan Rp60.000 (40% saham PT CAM).

Sampai dengan tanggal jatuh tempo PT CM belum dapat melunasi kewajibannya kepada Perusahaan. Perusahaan melalui surat Direktur Utama No. S-4467/PPA/DU/1020 tanggal 20 Oktober 2020 memohon bantuan pendampingan hukum dan dukungan aspek hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penyelesaian kewajiban PT CM kepada Perusahaan.

Kemudian pada tanggal 5 November 2021 dilakukan Perjanjian restrukturisasi hutang atas fasilitas pinjaman yang terhutang oleh

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

e. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk ("PT WMP")

On October 19, 2021, a Cooperation Agreement between the Company and PT WMP No. 75 concerning additional working capital for Widodo Makmur Unggas with a limit amounting to Rp23,692. The interest rate is 12% *gross* per year with a tenor of 18 months and will mature on April 26, 2023.

The balance as of December 31, 2020 is Nil. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp98,692. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp98,692.

f. PT Carpediem Mandiri ("PT CM")

The signing of the Deed of Amendment to Debt Restructuring Agreement of PT CM No. 40 on August 9, 2019, was performed on August 9, 2019, the amendments to debt restructuring agreement with PT CM were entered.

PT CM has made the additional binding collaterals to the Company through the pledge of all shares of PT Carpediem Aviast Mandiri (subsidiary of PT Carpediem), i.e.:

- 1) PT CM's Shares' Deed of Pledge to the Company No. 66 dated February 18, 2020 equivalent to Rp90,000 (60% shares of PT CAM);
- 2) Deed of Pledge of Shares of Mr. Syafruddin Rachman to the Company No. 67 dated February 18, 2020, equivalent to Rp60,000 (40% shares of PT CAM).

Until the maturity date PT CM has not been able to pay off its obligations to the Company. The Company through the letter of the President Director No. S-4467/PPA/DU/1020 dated October 20, 2020, submitted the request for legal assistance and legal support to the Deputy Attorney General of Civil and State Administration at the Attorney General's Office of Republic of Indonesia for the settlement of PT CM's obligations to the Company.

Then on November 5, 2021, a debt restructuring agreement was made for the loan facility owed by PT CM with the aim of

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT CM dengan tujuan perpanjangan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, serta tunggakan bunga yang tidak dikenakan bunga.

Pada tanggal tersebut sebesar Rp42.658 karena jatuh tempo dalam dua tahun, maka direklasifikasi dari pinjaman investasi jangka pendek (Catatan 4). Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penambahan pokok sehubungan dengan restrukturisasi utang adalah sebesar Rp18.132. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60.790.

g. PT Widodo Makmur Unggas ("PT WMU")

Pada tanggal 4 November 2019 telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Investasi Dalam Bentuk Pembelian Surat Utang PT WMU No. 09 dengan tujuan penggunaan dana untuk investasi pembangunan peternakan ayam terinteragasi milik PT WMU yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Besarnya kupon yang dikenakan sebesar 12,50% dan *monitoring fee* sebesar Rp125 dibayarkan setiap bulan. Jaminan yang diberikan PT WMU kepada Perusahaan yaitu jaminan pembayaran, fidusia piutang usaha, fidusia persediaan, *corporate guarantee* (termasuk di dalamnya *Cash Deficit Guarantee*) dari PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.750. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp49.750. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp99.750. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp49.750.

h. PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")

Pada tanggal 22 Oktober 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Investasi No.16 dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp26.250 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT MKS mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan *refinancing* pengadaan KIP Matoa 1.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

extending the loan term to a maximum of 24 (two-four) months, as well as interest arrears that bear no interest.

On that date, the balance amounted to Rp42,658 due to maturity in two years, then it transferred from short-term investment loans (Note 4). The total loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Receipt from payment in the current year is amounting to Nil. Principal addition from debt restructuring is amounting to Rp18,132 The balance as of December 31, 2021, is Rp60,790.

g. PT Widodo Makmur Unggas ("PT WMU")

On November 4, 2019, the Deed of Cooperation Agreement on Investment in form of Purchase of Notes of PT WMU No. 09 was signed with the objective of using the funds for investment of construction of the integrated chicken farms owned by PT WMU located in West Java, Central Java, and the Special Region Yogyakarta Province.

The amounting to coupon charged is 12.50% and the monitoring fee of Rp125 is paid by monthly. The guarantee provided by PT WMU to the Company are the payment guarantee, account receivables fiduciary, inventory fiduciary, corporate guarantee (including therein Cash Deficit Guarantee) from PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.

The balance as of December 31, 2020 is Rp99,750. The total loan disbursement balance in the current year is amounting to Rp49,750. Receipt from payments in the current year is amounting to Rp99,750. The balance as of per December 31, 2021 is Rp49,750.

h. PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")

On October 22, 2018, the Cooperation Agreement on Investment Financing No.16 was signed, with total principal amounting of the loan facility amounted to Rp26,250 that will due on October 22, 2023 at interest rate of 13.5% per annum. The objective of the Financing Facility of PT MKS is for any and all of the fund facility utilization for the objective of financing the refinancing of KIP Matoa 1 procurement.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal yang sama, Perusahaan dan PT MKS menandatangani perjanjian Kerjasama sehubungan Pembiayaan Modal Kerja melalui Perjanjian No. 18 yaitu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp7.500 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun.

Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT MKS untuk mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan modal kerja operasional PT MKS atas KIP Matoa 1.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.859. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp176. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.683.

i. PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB")

Pada tanggal 22 Oktober 2018 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Investasi No.17 dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp26.250 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT MKB mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan *refinancing* pengadaan KIP Matoa 2.

Kemudian pada tanggal yang bersamaan Perusahaan dan PT MKB menandatangani perjanjian Modal Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja dilakukan Perjanjian No. 19 yaitu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Modal Kerja jumlah pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp7.500 yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2023 dengan tingkat suku bunga 13,5% per tahun. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan PT MKB untuk mempergunakan setiap dan seluruh dana fasilitas dana untuk tujuan pembiayaan modal kerja operasional PT MKB atas KIP Matoa 2.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On the same date the Company and PT MKS signed the Cooperation Agreement through Working Capital Financing No. 18, i.e. the Cooperation Agreement on Working Capital Financing. Total principal of the loan facility amounted to Rp7,500 that will due on October 22, 2023 at interest rate of 13.5% per annum.

The purpose of the Financing Facility of PT MKS is any and all of the fund facility utilization for the objective of financing the operational working capital of PT MKS for KIP Matoa 1.

The balance as of December 31, 2020 is Rp38,859. The total loan disbursement balance in the current year is amounting to Nil. Receipt from payments in current year is amounting to Rp176. The balance as of per December 31, 2021 is Rp38,683.

i. PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB")

As of October 22, 2018, an Investment Funding Cooperation Agreement No. 17 was signed with total principal amount of the loan facility amounting to Rp26,250 which will mature on October 22, 2023 with an interest rate of 13.5% per annum. The objective of PT MKB Financing Facility is any and all fund facilities utilization for the purpose of financing the procurement of Matoa KIP 2.

Then on the same date the Company and PT MKB signed the Agreement on Working Capital for Working Capital Financing Cooperation No. 19 that is the Working Capital Financing Cooperation Agreement. The total principal of the loan facility amounting to Rp7,500 which will mature on October 22, 2023 with an interest rate of 13.5% per annum. Purpose of Using PT MKB Financing Facility to use any and all fund facilities for the purpose of financing PT MKB operational working capital for KIP Matoa 2.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.746. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp202. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.544.

j. PT Wisarada Sarana Aviati ("PT WSA")

Tanggal 7 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi dalam Bentuk Pengadaan Dan Pengoperasian Pesawat *Fixed Wing* BN-2T No. PP-28/PPA/0818 bertujuan pengadaan dan pengoperasian Pesawat BN-2T.

Jumlah fasilitas pendanaan modal dengan limit maksimal sebesar Rp9.900, tingkat suku biaya pendanaan sebesar 14% per tahun yang jatuh tempo pokok pada tahun 2022.

Jaminan atas pembayaran kembali semua utang, diserahkan jaminan berupa fidusia atas Mesin Pesawat BN-2T dengan nilai obyek dan nilai penjaminan sebesar Rp9.543, fidusia atas Badan/*Airframe* Pesawat BN-2T dan kelengkapan lainnya dengan nilai obyek dan nilai pinjaman sebesar Rp3.181, fidusia atas tagihan PT WSA dengan nilai obyek dan nilai penjaminan sebesar Rp9.279, dan pemberian jaminan pribadi.

Pada tanggal 22 Oktober 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian restrukturisasi Hutang antara Perusahaan dengan PT NUH No. 84 dengan tujuan penundaan pembayaran pokok dan bunga terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Juli 2023 perubahan tanggal pembayaran bunga sebagian bunga *Tranche A* sebesar 7,5% (*gross*) selama *deferred interest period* untuk *Tranche B* sebesar 7,5% dihitung sejak Hutang Restrukturisasi sampai dengan tanggal 20 September 2022 ditanggguhkan dan wajib dibayar lunas, dengan jadwal pembayaran mulai dari bulan ke-13 tanpa dikenai bunga. serta perpanjangan jangka waktu sampai dengan Agustus 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as of December 31, 2020 is Rp35,746. The total loan disbursement balance in the current year is amounting to Nil. Receipt from payments in current year is amounting to Rp202. The balance as of per December 31, 2021 is Rp35,544.

j. PT Wisarada Sarana Aviati ("PT WSA")

On August 7, 2018, the Cooperation Agreement on Investment in form of the Procurement and Operation of BN-2T Fixed Wing Aircraft under No. PP-28/PPA/0818 was signed with the objective procurement and operate BN-2T aircraft.

Total capital funding facility is at maximum limit of Rp9,900, funding fee rate of 14% per annum with principal due date in 2022.

The collateral for the repayment of all debts, the fiduciary collateral is provided for BN-2T Aircraft Engine with the object value and collateral value amounted to Rp9,543, the fiduciary for BN-2T Airframe and other equipment with the object value and loan value of Rp3,181, the fiduciary for PT WSA bills with the object value and collateral value of Rp9,279, and the provision of personal collateral.

On October 22, 2021, a Debt restructuring agreement was signed between the Company and PT NUH No. 84 with the aim of delaying the payment of principal and interest starting from January 2022 to July 2023, changing the date of interest payments for Tranche A interest of 7.5% (*gross*) during the deferred interest period for Tranche B of 7.5% calculated from Restructuring Debt until September 20, 2022, is deferred and must be paid in full, with a payment schedule starting from the 13th month without interest. and an extension of the period until August 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.765. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp3.065. Penerimaan atas pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp4.414. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.416.

k. PT Tropisindo Sumber Energi ("PT TSE")

Pada tanggal 22 Desember 2016 PT TSE dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual beli Surat Utang Konversi nomor SU-10/PPA/1216 dengan limit sebesar Rp12.000 yang akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) Sengak 1 dengan tingkat suku bunga 12,5% per tahun bersih ditambah dengan insentif bunga yang dibayarkan secara tahunan.

Surat Utang tersebut memiliki jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal efektif dan dapat dikonversi menjadi saham pada PT TSE pada tanggal jatuh tempo surat utang. PT TSE belum melakukan penerbitan atas surat utang tersebut

Selain Perjanjian Surat Utang Konversi, PT TSE dan Perusahaan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman nomor PP-23/PPA/1216 tertanggal 22 Desember 2016 dengan limit sebesar Rp1.500. Perjanjian tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan untuk Pembayaran bunga surat utang konversi selama masa konstruksi / *Interest During Construction* (IDC).

Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 12,5% per tahun (bersih) dengan jangka waktu fasilitas pinjaman selama 48 bulan sejak di tanda tangannya perjanjian. Pada tahun 2017, Pembangunan dan penyelesaian Proyek PLTMH Sengak-1 terhenti karena terjadi *cost overrun* dan eskalasi biaya, sehingga membutuhkan tambahan biaya dalam melanjutkan pembangunan proyek

Pada tanggal 26 April 2019 Perusahaan dan PT TSE melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Jual Beli Surat Utang yang isi perjanjiannya:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as of December 31, 2020 is Rp26,765. The total loan disbursement balance in the current year is amounting to Rp3,065. Receipt from payments in the current year is amounting to Rp4,414. The balance as of per December 31, 2021 is Rp25,416.

k. PT Tropisindo Sumber Energi ("PT TSE")

On December 22, 2016 PT TSE and the Company signed the Sale and Purchase Agreement of Convertible Notes number SU-10/PPA/1216 with the limit of Rp12,000 that will be used to finance the development of Sengak Mini Hydro Power Plant (PLTMH) project at interest rate of 12.5% per annum net plus interest incentives paid annually.

The Notes have 60 months period of time until due date as of the effective date and can be converted into shares in PT TSE on the due date of the notes. PT TSE does not yet issue the bonds.

Besides the Convertible Notes Agreement, PT TSE and the Company have also signed the Loan Facility Agreement number PP-23/PPA/1216 dated December 22, 2016 with the limit of Rp1,500. The agreement is for the facility provided by the Company for the payment of conversion debt interest during the construction period/*Interest During Construction* (IDC).

The loan facility is subject to the interest rate amounting to 12.5% per annum (net) with the loan facility term of 48 months as of the signing of agreement. In 2017, the construction and completion of Sengak-1 PLTMH project was ceased due to the cost overruns and cost escalation, thereby requiring the additional costs to continue the project construction.

On April 26, 2019 the Company and PT TSE have signed the Amendment to Sale and Purchase Agreement of Debt Instrument, which content of agreement are:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- a) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Surat Utang terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029;
- b) Perubahan suku bunga Surat Utang dari 12,5% (bersih) menjadi 3,6%; dan

PT Tropisindo Sumber Energi akan membayar sebesar Rp4.000 kepada Perusahaan secara bertahap yaitu Rp2.000 pada tanggal 30 April 2019 dan Rp2.000 pada tanggal 25 Agustus 2019.

Pembayaran tersebut digunakan pertama kali untuk melunasi utang pokok Perjanjian PP-23/PPA/1216 tertanggal 22 Desember 2016 dan selanjutnya digunakan untuk penebusan pokok Surat Utang. Sisa pinjaman pokok senilai Rp9.438 akan dilunasi dalam jangka waktu 9 tahun sesuai dengan jadwal penebusan pokok surat utang.

Perkembangan penyelesaian Proyek PLTMh Sengak I masih terhambat pada tahap *finishing* karena adanya pembatasan operasional waktu kerja selama pandemi Covid-19. Hingga akhir Desember 2020 pembangunan proyek telah mencapai 95,10%. Kondisi tersebut menyebabkan PT TSE belum memenuhi kewajiban jatuh tempo kepada Perusahaan serta kewajiban lanjutan lainnya.

Melalui surat No.0017/TSE/UM-PPA/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 PT TSE mengajukan permohonan untuk penggantian aset jaminan sehingga kewajiban lanjutan pengikatan jaminan dapat segera dipenuhi

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.438. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.438.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- a) *Extension of term of Notes Agreement starting from December 22, 2016 until March 31, 2029;*
- b) *Change of interest rate of the Notes from 12.5% (net) to 3.6%; and*

PT Tropisindo Sumber Energi will pay Rp4,000 to the Company gradually amounted to Rp2,000 on April 30, 2019 and Rp2,000 on August 25, 2019.

The payment was used for the firstly to settle the principal of Agreement PP-23/PPA/1216 dated December 22, 2016 and then used for the redemption of the principal of Notes. The remaining outstanding principal amounting to Rp9,438 will be repaid within period of 9 years in accordance with the principal redemption schedule.

The completion progress of Sengak I PLTMh Project is still hampered at the finishing phase due to the operational restriction on working time during the Covid-19 pandemic. Until the end of December 2020 the project construction has reached 95.10%. This condition causes PT TSE fails to fulfill its obligations due to the Company and other continuing obligations.

Through the letter No.0017/TSE/UM-PPA/XII/2020 dated December 17, 2020 PT TSE submitted the request for replacement of collateral assets thereby further obligations for collateral binding can be fulfilled immediately.

The balance as of December 31, 2020 is Rp9,438. Total balance of loan disbursement in the current year is amounting to Nil. The receipts in the current year is amounting to Nil. The balance as of December 31, 2021 is Rp9,438

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

I. PT Pratama Persada Airborne ("PT Airborne")

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* No. PP-50/PPA/1217 pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp23.891 dengan tingkat suku bunga 15,3% per tahun dan biaya provisi sebesar 0,5% dari fasilitas pinjaman. Jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2022.

Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk membayar harga pembelian Lidar Tipe ALS100. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 dilakukan addendum atas Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman Investasi *Standby Loan* dengan No. PP-09/PPA/0818. Para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai nama Lidar dari semula Lidar Tipe ALS100 menjadi *Leica Terrain Mapper*.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.665, karena jatuh tempo dalam satu tahun telah direklasifikasi ke pinjaman investasi jangka pendek (Catatan 4).

I. Pratama Persada Airborne ("PT Airborne")

Based on the Standby Loan Investment Loan Agreement No. PP-50/PPA/1217 on December 12, 2017, the Company provided the Loan Facility in form of Standby Investment Loan at maximum total principal amounting to Rp23,891 with 15.3% per annum interest rate and fee of 0.5 % for the loan facility. The due date was on December 11, 2022.

The purpose of using the loan facility is to pay the purchasing price of LIDAR Type ALS100. Then on August 10, 2018, it was made the amendment of Amendment to Standby Loan Investment Loan Provision Agreement under No. PP-09/PPA/0818. The parties agreed to amend the provisions on name of Lidar from originally Lidar Type ALS100 to Leica Terrain Mapper.

The balance as of December 31, 2020 is Rp22,665, due to the loan maturity of one year, has been reclassified to short-term investment loans (Note 4).

20. Investasi Jangka Panjang Lainnya

20. Other Long Term Investment

	2021 Rp	2020 Rp	
Surat Berharga - Surat Utang			Securities - Notes
PT Rejeki Intilogam Jaya	357,461	357,461	PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Duta Mentari Raya	115,600	115,600	PT Duta Mentari Raya
PT SIPPA Kemasan Internasional	95,901	95,901	PT SIPPA Kemasan Internasional
PT KNE Global Persada	49,477	49,477	PT KNE Global Persada
PT Asia Kaolinraya	15,000	15,000	PT Asia Kaolinraya
PT Ciptaindah Permata	10,000	10,000	PT Ciptaindah Permata
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	4,803	4,028	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
Jumlah Surat Berharga - Surat Utang	648,242	647,467	Total Securities - Notes
<i>Dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</i>	<i>(101,531)</i>	<i>(100,691)</i>	<i>Less Allowance for Impairment Losses</i>
Jumlah Investasi Jangka Panjang Lainnya - Bersih	546,711	546,776	Total Other Long Term Investments - Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai investasi jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of other long term investment are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal Tahun	100,691	51,567
Efek Perubahan menjadi Entitas Investasi	--	(36,567)
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	81,595
Penambahan di Tahun Berjalan	840	4,096
Saldo Akhir Tahun	101,531	100,691

1. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

PT PPAK telah mengambil alih utang PT RILJ kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp357.586 berdasarkan Akta Perjanjian Utang Piutang No. 39 tanggal 27 Maret 2019. Atas hal tersebut utang PT RILJ kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk beralih menjadi utang kepada Perusahaan (novasi kredit). Jangka waktu angsuran sampai dengan tahun 2028 dengan tingkat suku bunga 5,88%.

2. PT Duta Mentari Raya

PT PPAK memiliki Surat Utang dengan PT DMR sesuai perjanjian sebagai berikut: Perjanjian Nomor SU-02/PPAK/0216 tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 23 Februari 2020 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).

1. Perjanjian Nomor SU-01/PPAK-DMR/0517 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp15.400 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 23 Mei 2023 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
2. Perjanjian Nomor SU-02/PPAK-DMR/1017 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp7.217 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
3. Perjanjian No. SU-03/PPAK-DMR/1217 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp745 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
4. Perjanjian Nomor SU-01/PPAK-DMR/0218 tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp2.534 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 28 Februari 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	100,691	51,567	Balance at Beginning of The Year
Efek Perubahan menjadi Entitas Investasi	--	(36,567)	Effect of change to become Investment Entities
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	81,595	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Penambahan di Tahun Berjalan	840	4,096	Addition in Current Year
Saldo Akhir Tahun	101,531	100,691	Balance at Ending of The Year

1. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

PT PPAK has taken over PT RILJ's debt to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp357,586 based on the Deed of Debt-Receivables Agreement No. 39 dated March 27, 2019. For this matter, PT RILJ's debt to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk was shifted into debt to the Company (credit novation). The installment period is until 2028 at interest rate of 5.88%.

2. PT Duta Mentari Raya

PT PPAK has Debt Securities with PT DMR according to the following agreement: Agreement Number SU-02/PPAK/0216 dated February 23, 2016 amounting to Rp15,000 with term as of the effective date until February 23, 2020 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).

1. Agreement Number SU-01/PPAK-DMR/0517 dated May 24, 2017 amounting to Rp15,400 with term as of the effective date until May 23, 2023 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
2. Agreement no. SU-02/PPAK-DMR/1017 dated October 24, 2017 amounting to Rp7,217 with term as of the effective date until December 31, 2019 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax) (in the restructuring process).
3. Agreement Number SU-03/PPAK-DMR/1217 dated December 27, 2017 amounting to Rp745 with term as of the effective date until December 31, 2019 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
4. Agreement Number SU-01/PPAK-DMR/0218 dated February 22, 2018 amounting to Rp2,534 with term as of the effective date until February 28, 2019 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

5. Perjanjian Nomor SU-02/PPAK-DMR/0918 tanggal 26 September 2018 sebesar Rp1.604 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 25 September 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
6. Perjanjian Nomor SU-03/PPAK-DMR/1218 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp69.847 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 27 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
7. Perjanjian Nomor SU-02/PPAK-DMR/0119 tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp1.253 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 27 Januari 2024 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
8. Perjanjian Nomor SU-03/PPAK-DMR/0219 tanggal 7 Februari 2019 sebesar Rp2.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 6 Februari 2020 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).

Restrukturisasi kewajiban PT DMR kepada PT PPAK masih dalam proses mengingat restrukturisasi tersebut akan disesuaikan dengan restrukturisasi kewajiban PT PPAK kepada Perusahaan.

3. PT SIPPA Kemasan Internasional ("PT SKI")

PT SKI mengadakan perjanjian jual beli surat utang No. SU-01/SKI/0918 pada tanggal 26 September 2018 yang menjelaskan bahwa, PT SKI akan menerbitkan dan menjual surat utang kepada PT PPAK berupa surat utang dengan nilai dan tanggal penerbitan surat utang yang disesuaikan dengan kebutuhan dana oleh PT SKI dengan nilai jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp206.750 dalam jangka waktu 8 tahun dengan nilai kupon sebesar 16% per tahun.

Pada tanggal 20 Juni 2020 telah dilakukan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang Kupon sebesar Rp19.139 menjadi Surat Utang baru.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

5. Agreement Number SU-02/PPAK-DMR/0918 dated September 26, 2018 amounting to Rp1,604 with term as of the effective date until September 25, 2019 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
6. Agreement Number SU-03/PPAK-DMR/1218 dated December 28, 2018 amounting to Rp69,847 with term as of the effective date until December 27, 2019 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
7. Agreement Number SU-02/PPAK-DMR/0119 dated January 28, 2019 amounting to Rp1,253 with term as of the effective date until January 27, 2024 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
8. Agreement Number SU-03/PPAK-DMR/0219 dated February 7, 2019 amounting to Rp2,000 with term as of the effective date until February 6, 2020 bears interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).

The restructuring of PT DMR's obligations to PT PPAK is still in process considering that the restructuring will be adjusted to the restructuring of PT PPAK's obligations to the Company

3. PT SIPPA Kemasan Internasional ("PT SKI")

PT SKI entered into the sale and purchase agreement for debentures No. SU-01/SKI/0918 on September 26, 2018 explaining that PT SKI will issue and sell the debt securities to PT PPAK in form of debt securities with the value and issue date of debt securities adjusted to the need for funds by PT SKI at total loan value until Rp206,750 in 8 years with the coupon value of 16% per annum.

On June 20, 2020, the restructuring of obligation to pay Coupon debt amounted to Rp19,139 into new Notes Payable was made.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 28 Juli 2020 PT PPAK melakukan pembelian surat utang PT SKI sebesar Rp517 dan surat utang tersebut dilunasi sebesar Rp517 pada tanggal 23 November 2020. Pada tanggal 14 Desember 2020 PT PPAK melakukan pembelian surat utang PT SKI sebesar Rp541, sehingga Nilai Surat Berharga – Surat Utang pada PT SKI pada 31 Desember 2021 sebesar Rp95.901.

4. PT KNE Global Persada (“PT KNE”)

PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi (“SUK”) dengan PT KNE sesuai dengan Akta Perjanjian No. 86 tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu dari mulai tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2025, yang memiliki tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak). Realisasi surat utang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.500. Pada Januari dan Maret 2017 telah dilakukan pencairan atas sisa *limit* SUK PT KNE sejumlah Rp3.500.

PT PPAK memiliki SUK kedua dengan PT KNE sesuai dengan Akta Perjanjian No. 59 tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp12.600 dengan jangka waktu perjanjian satu tahun sejak tanggal efektif, yang memiliki tingkat suku bunga 11% per tahun (sudah termasuk pajak).

PT PPAK memiliki Surat Utang yang berasal dari pengalihan *cessie* piutang Perusahaan dengan PT KNE Global Persada sesuai Perjanjian No. PJ-08/PPAK/1218 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp21.826 dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Utang sampai dengan tanggal 28 Desember 2024, yang memiliki tingkat suku bunga 11% per tahun (sudah termasuk pajak).

PT PPAK memiliki tambahan surat utang dengan PT KNE sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Surat Utang No. 01 tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp102, dengan jangka waktu perjanjian satu tahun sejak tanggal efektif dan memiliki tingkat suku bunga 11% per tahun bersih.

5. PT Asia Kaolinraya (“PT AKR”)

PT PPAK memiliki SUK dengan PT AKR sesuai dengan Akta Perjanjian No. 56 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp15.000

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On July 28, 2020, PT PPAK purchased PT SKI's debt securities amounted to Rp517 and the debt securities were repaid amounted to Rp517 on November 23, 2020. On December 14, 2020, PT PPAK purchased PT SKI's debt securities amounted to Rp541, thereby the value of the Securities - Notes with PT SKI on December 31, 2021, amounted to Rp95,901.

4. PT KNE Global Persada (“PT KNE”)

PT PPAK has Convertible Notes (“SUK”) with PT KNE in accordance with the Deed of Agreement No. 86 dated August 30, 2016 amounting to Rp15,000 with term commenced as of the effective date until December 31, 2025, bears interest rate of 16% per annum (including tax). The realization of debt securities as per December 31, 2016 amounted to Rp11,500. In January and March 2017, the remaining limit of PT KNE's Convertible Notes was disbursed amounting to Rp3,500.

PT PPAK has the second SUK with PT KNE in accordance with the Deed of Agreement No. 59 dated May 26, 2017 amounting to Rp12,600 with agreement term of one year as of the effective date, bears the interest rate of 11% per annum (including tax).

PT PPAK has Notes Payable originating from the transfer of the Company's receivable *cession* with PT KNE Global Persada in accordance with Agreement No. PJ-08/PPAK/1218 dated December 28, 2018 amounting to Rp21,826 with agreement term starting as of the Issue date of the Notes until December 28, 2024, bears interest rate of 11% per annum (including tax).

PT PPAK has additional Notes Payable with PT KNE in accordance with the Sale and Purchase Agreement of Notes No. 01 dated January 4, 2019 amounting to Rp102, with the agreement term of one year as of the effective date and bears interest rate of 11% per annum net.

5. PT Asia Kaolinraya (“PT AKR”)

PT PPAK has SUK with PT AKR in accordance with the Deed of Agreement No. 56 dated January 18, 2016 amounting

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Desember 2022 yang memiliki tingkat suku bunga 20% per tahun (tidak termasuk pajak). Pada tahun 2017, Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai investasi atas seluruh Surat Utang Konversi PT PPA kepada PT AKR senilai Rp15.000.

6. PT Ciptaindah Permata ("PT CIP")

PT PPAK memiliki SUK dengan PT CIP sesuai dengan Akta Perjanjian No. 90 tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp10.000 dengan jangka waktu 33 bulan, dengan tingkat suku bunga 16% per tahun (sudah termasuk pajak).

7. PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng ("PT JM KC")

PT JM KC merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran - Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2021, PT NK melakukan tambahan setoran modal kepada PT JM KC sebesar Rp774, sehingga per 31 Desember 2021 nilai investasi PT NK menjadi Rp4.803 dengan persentase kepemilikan sebesar 0,32%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

to Rp15,000 with term as of the effective date until December 30, 2022 bearing interest rate of 20% per annum (excluding tax). In 2017, the Company established the investment depreciation reserve for all Convertible Notes of PT PPA to PT AKR amounting to Rp15,000.

6. PT Ciptaindah Permata ("PT CIP")

PT PPAK has SUK with PT CIP in accordance with the Deed of Agreement No. 90 dated March 29, 2016 amounting to Rp10,000 with 33 months term, at interest rate of 16% per annum (including tax).

7. PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng ("PT JM KC")

PT JM KC is company with main business activity is to provide the management of Kunciran - Cengkareng Toll Road, covering the funding, technical planning, construction, operation and maintenance of toll roads, as well as other businesses in accordance with the prevailing provisions and legislation.

In 2021, PT NK paid an additional capital deposit to PT JM KC amounting to Rp774, therefore as of December 31, 2021, the Company's investment value was Rp4,803 with ownership percentage of 0.32%.

21. Investasi pada Efek Ekuitas

PT PPAK

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 1.b., mulai tahun 2020, PT PPAK memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasian, oleh karena itu, PT PPAK tidak lagi mengkonsolidasi dan diharuskan untuk mencatat investasinya di entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

21. Investment in Equity Securities

PT PPAK

As explained in note 1.b., starting from 2020, PT PPAK has met the requirements as a qualifying investment entity, and therefore, PT PPAK are no longer consolidated and required to record its investment in subsidiaries at fair value through the profit or loss (FVTPL).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**a. Investasi pada Entitas Anak yang Tidak
Dikonsolidasi**

	Nilai Tercatat 31 Desember 2020/ Carrying Value December 31, 2020 Rp	Nilai Wajar 31 Desember 2021/ Fair Value December 31, 2021 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Entitas Investasi			
PT Bondi Syad Mulia	83,945	83,600	(345)
PT Magnesium Gosari Internasional	48,427	40,400	(8,027)
PT Matoa Kidung Bahtera	17,439	27,630	10,191
PT Matoa Kidung Samudera	14,378	4,455	(9,923)
PT Rejeki Intilogam Jaya	2	2	--
Total	164,191	156,087	(8,104)
	Nilai Wajar 1 Januari 2020/ Fair Value January 1, 2020 Rp	Nilai Wajar 31 Desember 2020/ Fair Value December 31, 2020 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Efek dekonsolidasi terhadap ekuitas sebagai akibat PPAK memenuhi kualifikasi sebagai entitas investasi			
PT Bondi Syad Mulia	71,000	83,945	12,945
PT Matoa Kidung Samudera	13,385	14,378	993
PT Matoa Kidung Bahtera	16,650	17,439	789
PT Magnesium Gosari Internasional	25,351	48,427	23,076
PT Rejeki Intilogam Jaya	2	2	--
Total	126,388	164,191	37,803

Unconsolidated Subsidiaries
PT Bondi Syad Mulia
PT Magnesium Gosari Internasional
PT Matoa Kidung Bahtera
PT Matoa Kidung Samudera
PT Rejeki Intilogam Jaya
Total

**Deconsolidation effect on equity
as a result of PPAK met qualification
as an investment entities**
PT Bondi Syad Mulia
PT Matoa Kidung Samudera
PT Matoa Kidung Bahtera
PT Magnesium Gosari Internasional
PT Rejeki Intilogam Jaya
Total

Selisih nilai wajar investasi sebagai bagian dari keuntungan atas investasi dicatat pada efek ekuitas (Catatan 36).

Difference in the fair value of the investment as part of the gain on investment recorded in equity securities (Note 36).

**b. Investasi pada Ventura Bersama dan
Entitas Asosiasi**

**b. Investment in Joint Ventures and
Associates**

	Nilai Wajar 31 Desember 2020/ Fair Value December 31, 2020 Rp	Nilai Wajar 31 Desember 2021/ Fair Value December 31, 2021 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	5,894	4,419	(1,475)
PT National Utility Helicopters	50,541	24,692	(25,849)
	56,435	29,111	(27,324)
	Nilai Tercatat 1 Januari 2020/ Carrying Value January 1, 2020 Rp	Nilai Wajar 31 Desember 2020/ Fair Value December 31, 2020 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	4,846	5,894	1,048
PT National Utility Helicopters	32,209	50,541	18,332
	37,055	56,435	19,380

Selisih nilai wajar investasi dicatat sebagai bagian dari keuntungan atas investasi pada efek ekuitas (Catatan 36).

Difference in fair value of the investment as part of the gain on investment recorded in equity securities (Note 36).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas
("PPAK RC")**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama antara PT PPAK dengan PT Rumah Cerdas No. 52 tanggal 19 Februari 2016, Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, dibentuklah suatu Ventura Bersama antara PT PPA Kapital dengan PT Rumah Cerdas, dimana ventura bersama ini melaksanakan pembangunan dan penyelesaian Proyek Mutiara Java Regency yaitu berupa bangunan hunian dan/atau komersial beserta dengan sarana dan prasarannya untuk ditawarkan dan dijual kepada konsumen. Pada tanggal 19 Februari 2016, PT PPAK melakukan penyeteroran modal sebesar Rp9.700 dengan persentase kepemilikan sebesar 94,17%.

Pada tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ventura Bersama PPAK RC No. S-351/PPAK/DIR/0919 tanggal 10 September 2019 Ventura Bersama PPAK RC melakukan penarikan modal sebesar Rp2.500.

Berdasarkan Surat Pembagian Laba Ventura Bersama PPAK RC No. S-927/KSOPPAKRC/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, Ventura Bersama PPAK RC membagikan laba sebesar Rp1.883.

Pada tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan No. S-165/PPAK/DIR/0620 tanggal 12 Juni 2020 Perusahaan melakukan penarikan modal sebesar Rp2.354.

PT National Utility Helicopter ("PT NUH")

PT PPAK membeli sebanyak 31.551 lembar saham atau 18,43% saham kepemilikan PT NUH milik PT Dinamika Danatama Dirgantara dengan nilai Rp31.551 pada tanggal 24 Januari 2020 dan PT PPAK membeli sebanyak 11.260 lembar saham kepemilikan PT NUH milik PT Dinamika Danatama Dirgantara dengan nilai Rp11.260 pada tanggal 30 Juli 2020, berdasarkan Akta Notaris Rismalena Kasri, S.H., nomor 6 tanggal 24 Januari 2020 dan nomor 9 tanggal 30 Juli 2020 serta telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03.-0044181.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**Joint Venture PPAK Rumah Cerdas
("PPAK RC")**

Based on the Deed of Cooperation Agreement between PT PPAK and PT Rumah Cerdas No. 52 dated February 19, 2016, Notary Public Mala Mukti, S.H., LL.M, Notary Public in Jakarta, the Joint Venture was established between PT PPA Kapital and PT Rumah Cerdas, where this joint venture carried out the construction and completion of Mutiara Java Regency Project in form of residential and/or commercial buildings together with facilities and infrastructure thereof to be offered and sold to the consumers. On February 19, 2016, PT PPAK paid up the capital amounting to Rp9,700 with the ownership percentage of 94.17%.

In 2019, based on the Joint decision of Joint Venture PPAK RC No. S-351/PPAK/DIR/0919 dated September 10, 2019, the Joint Venture PPAK RC made the capital withdrawal of Rp2,500.

Based on the Joint Venture Profit Sharing of PPAK RC No. S-927/KSOPPAKRC/III/2019 dated March 14, 2019, Joint Venture PPAK RC distributed the profit of Rp1,883.

In 2020, based on the decision letter Decree No. S-165/ PPAK/DIR/0620 dated June 12, 2020, PT PPAK made the capital withdrawal of Rp2,354.

PT National Utility Helicopter ("PT NUH")

PT PPAK purchased 31,551 shares or 18.43% ownership shares of PT NUH owned by PT Dinamika Danatama Dirgantara amounting to Rp31,551 on January 24, 2020 and PT PPAK purchased 11,260 shares of PT NUH owned by PT Dinamika Danatama Dirgantara amounting to Rp11,260 on July 30, 2020, based on the Deed of Notary Public Rismalena Kasri, S.H., number 6 dated January 24, 2020 and number 9 dated July 30, 2020 and has been approved by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH. 01.03.-0044181.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

c. Pengukuran Nilai Wajar (Level 3)

Perhitungan metode nilai wajar menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan nilai aset bersih

PT PPAK menggunakan nilai tercatat aset bersih pada perusahaan investasi dalam menentukan nilai investasi mereka. Investasi yang dinilai dengan menggunakan pendekatan ini, umumnya hanya berlaku untuk entitas (entitas dimana Grup melakukan investasi) yang memiliki pos-pos dalam laporan keuangan di mana nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan

PT PPAK menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan (analisa arus kas terdiskonto (DCF) dan pendekatan pasar (berdasarkan pada beberapa pasar dari perusahaan sejenis) untuk mengestimasi nilai wajar dari investasi tersebut. Pendekatan pasar digunakan untuk memeriksa kembali nilai estimasi berdasarkan analisa DCF.

Nilai wajar investasi pada efek ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Iskandar & Rekan dan KJPP Herman Meirizky & Rekan (terdaftar di OJK).

Sedangkan pada tahun 2021, PT BSM, PT MKS, PT MKB, dan PT SKI nilai wajar investasi pada efek ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian internal PT PPAK. Nilai wajar investasi pada efek ekuitas PT MGI pada tanggal 31 Desember 2021 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Iskandar & Rekan (terdaftar di OJK).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

c. Fair Value Measurement (Level 3)

The calculation of the fair value method uses several approaches as follows:

Net asset value approach

PT PPAK uses the recorded value of net assets in the investment company in determining the value of their investments. The investments valued by using this approach generally only apply to the entities (entities in which the Group invests) having the entries in the financial statement where the recorded value approximates its fair value.

Market approach and income approach

PT PPAK uses two approaches, i.e. the income approach (discounted cash flow analysis (DCF) and the market approach (based on several markets from the similar companies) to estimate the fair value of the investment. The market approach is used to re-examine the estimated value based on DCF analysis.

The fair value of investment in the equity securities as of December 31, 2020 is estimated based on the assessment of the market value conducted by KJPP Iskandar & Partners and KJPP Herman Meirizky & Partners (registered with OJK).

Meanwhile in 2021, PT BSM, PT MKS, PT MKB, PT MGI, and PT SKI the fair value of investment equity securities as of December 31, 2021 is estimating based on internal valuation of PT PPAK. The Fair value of investment in the equity securities PT MGI as per December 31, 2021 is estimated based on the assessment of the market value conducted by KJPP Iskandar & Partners (registered with OJK).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

22. Aset Tetap

22. Fixed Assets

2021								
1 Januari / January 1	Dampak Pelepasan Entitas Anak/ The Disposing of Investment Entity Subsidiaries	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	31 Desember/ December 31		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Biaya Perolehan:							Acquisition Cost:	
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership	
Tanah	380,120	--	1,545	--	(102,113)	10,717	290,269	Lands
Bangunan	137,645	--	3,197	--	(3,726)	--	137,116	Buildings
Kendaraan Bermotor	9,131	--	--	(3,134)	(209)	--	5,788	Vehicles
Peralatan Proyek	181,425	--	--	(9,260)	8,906	--	181,071	Project Equipments
Peralatan Kantor	27,377	--	399	--	(5,980)	--	21,796	Office Equipments
Prasarana umum	2,214	--	--	--	(2,204)	--	10	Asset in Progress
Aset dalam penyelesaian	7,605	--	10,851	--	(515)	--	17,941	Assets in settlement
Jumlah	745,517	--	15,992	(12,394)	(105,841)	10,717	653,991	Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation	
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership	
Bangunan	45,485	--	11,442	--	(1,643)	--	55,284	Buildings
Kendaraan Bermotor	6,262	--	859	(3,134)	3	--	3,990	Vehicles
Peralatan Proyek	84,124	--	21,630	(9,260)	24,910	--	121,404	Project Equipments
Peralatan Kantor	44,935	--	1,525	--	(25,932)	--	20,528	Office Equipments
Prasarana umum	10	--	--	--	--	--	10	Public Infrastructure
Jumlah	180,816	--	35,456	(12,394)	(2,662)	--	201,216	Total
Nilai Tercatat	564,701						452,775	Carrying Value
2020								
1 Januari / January 1	Dampak Pelepasan Entitas Anak/ The Disposing of Investment Entity Subsidiaries	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	31 Desember/ December 31		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Biaya Perolehan:							Acquisition Cost:	
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership	
Tanah	699,657	(290,387)	--	--	(29,150)	--	380,120	Lands
Bangunan	333,618	(225,655)	--	--	29,682	--	137,645	Buildings
Kendaraan Bermotor	17,592	(8,669)	208	--	--	--	9,131	Vehicles
Peralatan Proyek	621,936	(440,511)	--	--	--	--	181,425	Project Equipments
Peralatan Kantor	32,235	(5,008)	216	(66)	--	--	27,377	Office Equipments
Prasarana umum	12,895	(10,681)	--	--	--	--	2,214	Asset in Progress
Aset dalam penyelesaian	165,974	(145,095)	16,408	--	(29,682)	--	7,605	Assets in settlement
Jumlah	1,883,907	(1,126,006)	16,832	(66)	(29,150)	--	745,517	Total
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation	
Kepemilikan Langsung							Direct Ownership	
Bangunan	82,063	(46,238)	9,660	--	--	--	45,485	Buildings
Kendaraan Bermotor	11,562	(6,239)	939	--	--	--	6,262	Vehicles
Peralatan Proyek	207,991	(123,801)	--	(66)	--	--	84,124	Project Equipments
Peralatan Kantor	19,954	(2,849)	27,830	--	--	--	44,935	Office Equipments
Prasarana umum	5,541	(5,531)	--	--	--	--	10	Public Infrastructure
Jumlah	327,111	(184,658)	38,429	(66)	--	--	180,816	Total
Nilai Tercatat	1,556,796						564,701	Carrying Value

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan

Aset yang dinilai milik Perusahaan berupa Tanah dan Bangunan Gudang dengan jumlah luas LT/LB +/- 576/406,5 m disertai sarana pelengkap yang terletak di Jalan Tekno 1 Kav C 2 I, Kelurahan Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2021.

PT NK

Pada tahun 2020, PT NK melakukan reklasifikasi atas aset tetap berupa tanah ke properti investasi atas tanah yang terletak di Jl. PH Mustofa, Bandung dan tanah yang terletak di Jl. Rancabolang, sebesar Rp29.150 (Catatan 17).

Aset tetap berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 27).

Pada tahun 2021, PT NK melakukan reklasifikasi atas aset tetap berupa tanah ke properti investasi atas tanah yang terletak di Makasar, Sisingamaraja, Surabaya, Bali dan Jayapura, sebesar Rp156.025 (Catatan 17).

Nilai aset tanah tercatat 31 Desember 2021 berdasarkan laporan penilai independen yang menggunakan nilai pasar wajar tahun 2021 oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan. Surplus revaluasi dicatat sebesar Rp9.174 per 31 Desember 2021.

Bangunan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp133.272 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, dan PT Asuransi Jasa Tania.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Company

The valued assets owned by the Company is Land and Warehouse Building with total area of LT/LB +/- 576/406.5 sqm furnished with the complementary facilities located at Jalan Tekno 1 Kav C 2 I, Pasir Gombang Village, Cikarang Utara Sub District, Bekasi District, West Java Province.

Based on Management's review, there is no events nor changes in the condition indicating the impairment of fixed assets, therefore the Management did not establish the impairment reserve of fixed assets as of December 31, 2021, respectively.

PT NK

PT NK reclassified the fixed assets in form of land to investment property on land located at Jl. PH Mustofa, Bandung and land located on Jl. Rancabolang, amounting to Rp29,150 (Note 17).

Fixed assets in form of land and buildings are pledged as collateral for the credit acquisition to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, the Indonesian Export Financing Agency, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 27).

In 2021, PT NK reclassified the fixed assets in form of land to investment property on land located at Makasar, Sisingamangaraja, Surabaya, Bali and Jayapura, amounting to Rp156,025 (Note 17).

The fair value of investment property as of December 31, 2021, are estimated by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, independent appraisal. Surplus revaluation of fixed assets as of June 20, 2021 amounted to Rp9,174 as of December 31, 2021.

Building and vehicle are insured with of coverage value amounting to Rp133,272 against the risk of fire accident and others to PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, and PT Asuransi Jasa Tania.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Aset dalam penyelesaian yang dicatat oleh PT NK adalah aset tetap berupa Bangunan *Mixed Use Mustofa Bandung*. Biaya perijinan Hotel Mataram NTB dan Biaya Perijinan Hotel Bontosunggu Makassar dalam proses instalasi. Rincian aset tetap dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap/ <i>Type of Fixed Assets</i>	Nilai Kontrak/ <i>Acquisition Cost</i> Rp	Realisasi/ <i>Realization</i> Rp	% Nilai Kontrak/ <i>% Contract Amount</i> Rp	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimation of Completion</i>
Bangunan Mixed Use Mustofa Bandung	12,513	10,356	83%	31 Desember 2021/ <i>December 31, 2021</i>
Bangunan Hotel Mataram Nusa Tenggara Barat	114,556	4,789	4%	<i>Idle</i> , Realisasi Biaya Perijinan, Status Menunggu Keputusan Kementerian BUMN Terkait Holding Perhotelan
Bangunan Hotel Bontosunggu Makassar	42,867	2,104	5%	
Alat Bitumen Decanter (Instalasi)	515	515	100%	100% DI 2021
Prsed.Bangunan Dlm Konstruksi Kav Badak Semarang	6,450	5,945	92%	2021
Persed.Bang Dlm Konstruksi Gowa Makassar	10,887	11,191	103%	2022
Persed.Bang Dlm Konstruksi Perumahan Cilangkap	11,783	7,856	67%	2022

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Beban penyusutan dialokasikan ke beban usaha konstruksi dan beban usaha non konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Usaha Konstruksi (Catatan 38)	20,829	25,847	Construction Operating Expenses (Note 38)
Beban Usaha Non Konstruksi (Catatan 38)	14,627	12,582	Non Construction Operating Expenses (Note 38)
Jumlah	35,456	38,429	Total

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2021 dan 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Assets in progress recorded by PT NK are fixed assets in the form of *Mixed Use Mustofa Bandung Building*, *Mataram NTB Hotel Licensing Fees* and *Bontosunggu Hotel Licensing Fees Makassar* in the installation process. Details of assets in progress are as follows:

Management has reviewed the estimated useful lives, methods and residues at the end of reporting period.

Depreciation expenses allocated to construction operating expenses and non construction operating expenses, with the details are as follows

Based on Management's review, there are no events or changes in the condition indicating the depreciation of the fixed assets, thereby the Management does not provide allowance for impairment of fixed assets as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

23. Cessie Piutang

23. Cessie Receivables

	2021 Rp	2020 Rp
<u>Cessie Piutang Jangka Pendek</u>		
Cessie Piutang PT Batam Islands Marina eks PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	243,000	243,000
Cessie Piutang KPR eks PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	35,955	38,269
Subtotal	278,955	281,269
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(223,145)	(156,199)
Jumlah	55,810	125,070
<u>Cessie Piutang Jangka Panjang</u>		
Cessie Piutang PT Ade Textile Industries eks PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	298,860	288,924
Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure eks PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29,730	29,390
Subtotal	328,590	318,314
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(82,160)	(70,873)
Jumlah	246,430	247,441

<u>Short-term Cessie Receivables</u>
Cessie Receivable of PT Batam Islands Marina ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Cessie Receivable of KPR (Mortgage) ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Subtotal
Less: Allowance for Impairment Losses
Total

<u>Long-Term Cessie Receivable</u>
Cessie PT Ade Textile Industries ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cessie Receivable of PT Primarindo Asia Infrastructure ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal
Less: Allowance for Impairment Losses
Total

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai cessie piutang adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of cessie receivables are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal Tahun	(227,072)	(2,436)
Penyesuaian Penerapan awal PSAK 71	--	(224,732)
Penambahan Tahun Berjalan	(78,233)	(845)
Pemulihan Tahun Berjalan	--	941
Saldo Akhir Tahun	(305,305)	(227,072)

Balance at The Beginning of The Year
Adjustment on Initial Implementation PSAK 71
Addition in The Current Year
Recovery in The Current Year
Ending Balance

Cessie Piutang KPR Eks Debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

- Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No.72 tanggal 21 Desember 2018 dan No.104 tanggal 28 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") menjual piutang nasabah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada Perusahaan, dengan harga jual masing-masing sebesar Rp31.143 dan Rp16.302.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang Nomor 105 tanggal 28 Desember 2018 di depan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dinyatakan bahwa dalam penyelesaian transaksi aset yang dialihkan tersebut, mekanisme yang dilakukan yaitu:

Cessie Receivable KPR Ex Debtor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

- Based on the Deed of Sale and Purchase of Receivables No.72 dated December 21, 2018, and No.104 dated December 28, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") sold the customer's receivables for Home Ownership Credit (KPR) to the Company, at the selling price amounting to Rp31,143 and Rp16,302.
- Based on the Deed of Cooperation Agreement on Receivables Management Number 105 dated December 28, 2018 before the Notary Public Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., it is stated that in the settlement of the transferred asset transaction, the mechanisms carried out are:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Melakukan eksekusi aset yang merupakan jaminan atas piutang sesuai dengan Perjanjian Kredit;
 - Menjual aset yang dijaminan tersebut kepada pihak ketiga;
 - Menerima pelunasan dari Debitur.
- Berdasarkan Addendum No. 11 Pada tanggal 8 April 2020 atas Perjanjian Kerjasama Pengelola hutang yang merubah jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2021 dan tata cara penerimaan dan Penggunaan Dana Hasil Koleksi dari Bank BTN.
 - Berdasarkan Addendum No. II Pada tanggal 6 Februari 2020 atas Perjanjian Kerjasama Pengelola hutang yang merubah jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2020 dan tata cara penerimaan dan Penggunaan Dana Hasil Koleksi dari Bank BTN.
 - Berdasarkan Addendum No. III Pada tanggal 27 Oktober 2021 atas Perjanjian Kerjasama Pengelola hutang yang merubah jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2021 dan tata cara penerimaan dan Penggunaan Dana Hasil Koleksi dari Bank BTN.

Cessie Piutang PT BIM Eks Debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No 115 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan membeli piutang Bank BTN kepada PT Batam Island Marina (PT BIM). Jumlah piutang yang dialihkan sebesar Rp300.669, dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman sebesar Rp243.000
- Tunggalan Bunga dari bunga berjalan sebesar Rp56.352
- Tunggalan denda dari denda berjalan sebesar Rp1.317

Berdasarkan Akta Cessie Piutang No. 116 tanggal 31 Desember 2018, Bank BTN dan Perusahaan mengefektifkan pengalihan piutang tersebut beserta seluruh hak-hak yang melekat pada piutang berdasarkan syarat dan kondisi dalam Akta Cessie Bank BTN dan Perusahaan sepakat bahwa transaksi jual beli piutang berdasarkan akta jual beli ini dilakukan dengan harga Rp243.000.

Akta Perjanjian Kerjasama Pengelola Piutang No. 117 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menunjuk Bank BTN sebagai pengelola piutang tersebut dengan jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Execute the assets constituting the collateral for receivables in accordance with the Credit Agreement;
 - Sell the guaranteed assets to the third parties;
 - Receive the settlement from the Debtor.
- Based on Amendment No. 11 On April 8, 2020 for the Cooperation Agreement on Debt Management change the due date to become December 31, 2021 and the procedures for collections and the Fund Collection Utilization from Bank BTN.
 - Based on Amendment No. II On February 6, 2020 for the Cooperation Agreement on Debt Management change the due date to become December 31, 2020 and the procedure for collections and the Fund Collection Utilization from Bank BTN
 - Based on Amendment No. III On October 27, 2021 for the Cooperation Agreement on Debt Management change the due date to become December 31, 2020 and the procedure for collections and the Fund Collection Utilization from Bank BTN

Cessie Receivable PT BIM Ex Debtor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Based on the Deed of Sale and Purchase of Receivables No. 115 dated December 31, 2018, the Company purchased Bank BTN's receivables from PT Batam Island Marina (PT BIM). Total receivable transferred was amounting to Rp300,669, with details as follows:

- Principal amounting to Rp243,000
- Interest overdue from the current interest amounting to Rp56,352
- Penalty overdue from the current penalty amounting to Rp1,317

Based on the Deed of Receivables Cessie No. 116 dated December 31, 2018, Bank BTN and the Company has made into effect the transfer of receivables together with all rights attached to the receivables based on the terms and conditions in the Deed of Cessie. Bank BTN and the Company agreed that the sale and purchase of receivables based on the deed of sale and purchase was carried out at Rp243,000.

The Deed of Cooperation Agreement on Receivables Management No. 117 dated December 31, 2018, the Company appointed Bank BTN as the manager of the receivable for period of 1 year as of December 31, 2018.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Addendum No. 11 pada tanggal 8 April 2020 atas Perjanjian Kerjasama Pengelola hutang yang merubah jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2020 dan tata cara penerimaan dan Penggunaan Dana Hasil Koleksi dari Bank BTN.

**Cessie Piutang PT Primarindo Asia
Infrastructure Tbk eks PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk**

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan telah mengambil alih piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk sebesar USD1,720,046.

Pada hari yang sama juga ditandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk yang berisi restrukturisasi hutang atas pengambilalihan piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan pembiayaan modal kerja dengan limit sebesar USD1,279,953.36 dengan tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 6% per tahun.

Tanggal jatuh tempo fasilitas pembiayaan *Tranche A* dan *Tranche B* adalah terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan 19 Desember 2024 (5 tahun).

**Cessie Piutang PT Ade Textile Industries Eks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Perusahaan mengambil alih piutang Bank Mandiri kepada PT Ade Textile Industries ("PT Adetex") serta seluruh hak bank mandiri berdasarkan perjanjian kredit bank mandiri termasuk jaminan telah dialihkan kepada Perusahaan berdasarkan perjanjian pengalihan piutang (cessie) Nomor 38 dibuat di hadapan Adrian Juani, Notaris di Jakarta tertanggal 20 Desember 2019. Jumlah Keseluruhan pengalihan hutang pokok PT Adetex kepada Perusahaan adalah sejumlah USD18,526,367.

Pada Tanggal 20 Desember 2019 telah ditandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang Nomor 44 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak S.H., Notaris di Jakarta termasuk penambahan fasilitas modal kerja sejumlah USD3,900,000.

Tujuan penambahan fasilitas modal kerja adalah untuk kebutuhan modal kerja perusahaan dan perbaikan/penggantian fasilitas produksi yang rusak.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Amendment No. 11 On April 8, 2020 for the Cooperation Agreement on Debt Management change the due date to become December 31, 2020 and the procedure for revenues and Use of the Collected Funds from Bank BTN.

**Cessie Receivable PT Primarindo Asia
Infrastructure Tbk ex PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk**

On December 20, 2019, the Company has taken over the receivable from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk amounting to USD1,720,046.

On the same day, it was also signed the Debt Restructuring Agreement of PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk, containing the debt restructuring for the taking over of receivables of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and working capital financing with the limit of USD1,279,953.36 at interest rate of 6% per annum.

The maturity date of the *Tranche A* and *Tranche B* is from the effective date until December 19, 2024 (5 years).

**Cessie Receivable PT Ade Textile Industries
Ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

The Company has taken over the receivable of Bank Mandiri to PT Ade Textile Industries ("PT Adetex") as well as all rights of Bank Mandiri based on the credit agreement of bank mandiri including the collateral were transferred to the Company based on the receivables (cession) transfer agreement Number 38 drawn up before Adrian Juani, Notary Public in Jakarta dated December 20, 2019. Total amount of transfer of principal of PT Adetex to the Company is USD18,526,367.

On December 20, 2019, it was signed the Debt Restructuring Agreement Number 44 before Lenny Janis Ishak S.H., Notary Public in Jakarta including the addition of working capital facility amounting to USD3,900,000.

The objective of addition of working capital facilities is for the company's working capital need and repair/replacement of the damaged production facilities.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah 5% per tahun. Jaminan yang diberikan kepada Perusahaan adalah berupa jaminan tanah bangunan, jaminan fidusia persediaan, piutang dan mesin-mesin serta peralatan lainnya.

Tanggal jatuh tempo perjanjian ini terhitung sejak tanggal efektif 1 Januari 2019 sampai dengan 19 Desember 2029 (10 Tahun).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The interest rate applied is 5% per annum. The collateral provided to the Company are in form of collateral of building land, fiduciary collaterals for inventories, receivables and other machinery and equipment.

The maturity date of this agreement is from the effective date of January 1, 2019 until December 19, 2029 (10 years).

24. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

a. Aset Hak Guna

	Tanah dan Bangunan/ Land and Buildings	Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicles	Laptop/ Laptop/	Jumlah/ Total
Saldo per 1 Januari 2021	2,007	9,707	--	11,714
Penambahan selama periode berjalan	42,567	60	2,028	44,655
Beban penyusutan selama periode berjalan	(10,532)	1,594	(932)	(9,870)
Saldo per 31 Desember 2021	<u>34,042</u>	<u>11,361</u>	<u>1,096</u>	<u>46,499</u>

Balance at January 1, 2021
Additions for the period
Depreciation charge for the period
Balance at December 31, 2021

b. Liabilitas Sewa

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal Tahun	14,179	--
Dampak Penerapan Awal PSAK 73	--	28,263
Arus kas	(10,410)	(17,168)
Perubahan Non Kas		
Penambahan	32,085	3,084
Saldo akhir	<u>35,854</u>	<u>14,179</u>

Beginning balance
The Impact of Initial Implementation PSAK 73
Cash flows
Non Cash changes
Additions
Ending balance

Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

24. Right of Use Assets and Lease Liabilities

a. Right of Use Assets

b. Lease Liabilities

The following is the summary of components for the changes in liabilities arising from the lease:

There are exceptions for the recognition of the short-term leases and leases of low-valued goods.

25. Aset Keuangan dari Proyek Konsesi

Aset Keuangan Konsesi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.321 dan Nihil.

Akun ini merupakan piutang jangka panjang dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum sehubungan dengan pembayaran ketersediaan layanan di masa depan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dan Pengelolaan Unit Produksi di Kesugihan (Bangun, Kelola, Alih Milik) yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16.

25. Financial Assets from Concession Arrangement

Concession Financial Assets as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp13,321 and Nil, respectively.

This account represents long-term receivable from Perusahaan Umum Daerah Air Minum in relation to the future service availability payments set forth in Cooperation Agreement for Investment and Management of Production Units at Kesugihan (Build, Manage, Transfer of Ownership) that have been classified as financial asset as a result of adoption of ISAK 16.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada akhir masa konsesi 15 tahun terhitung setelah sejak tanggal operasi, aset prasarana, aset fasilitas perawatan prasarana dan aset fasilitas perawatan sarana dikembalikan ke pemberi konsesi.

Pada bulan Oktober 2021, Perusahaan memulai pelaksanaan konstruksi untuk proyek konsesi ini.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

At the end of the concession period of 15 years from the date of operation, infrastructure assets, maintenance facility assets and maintenance facility assets will be returned to the concessionaire

On October 2021, the Company has started its construction progress on this concession project.

26. Utang Usaha

26. Accounts Payable

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi	46,010	18,264	Related Parties
Pihak Ketiga	1,254,016	1,449,181	Third Parties
Jumlah	1,300,026	1,467,445	Total

Jumlah utang usaha berdasarkan umur sebagai berikut:

Total accounts payable based on aging are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
< 3 bulan	465,604	86,273	< 3 months
3-6 bulan	421,903	139,897	3-6 months
6-12 Bulan	168,029	1,090,520	6-12 months
12-24 bulan	52,194	131,800	12-24 months
> 24 bulan	192,296	18,955	> 24 months
Jumlah	1,300,026	1,467,445	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh nilai tercatat atas utang usaha Grup berdenominasi dalam Rupiah.

As of December 31, 2021 and 2020, all of the carrying amount of Group's accounts payable were denominated in Rupiah.

Utang usaha dari subkontraktor dan supplier dijamin menggunakan fasilitas SCF untuk utang usaha kepada subkontraktor dan SKBDN untuk utang usaha kepada supplier, dimana manajemen telah menandatangani kerjasama dengan bank penjamin untuk memberikan jaminan SCF dan SKBDN dalam pembiayaan proyek.

Accounts payable from subcontractors and suppliers are guaranteed using the SCF facility for trade payables to subcontractors and SKBDN for trade payables to suppliers, where management has signed an agreement with the guarantor bank to provide guarantees for SCF and SKBDN in project financing.

Pelunasan utang usaha bersumber dari penerimaan pembayaran termin pada masing-masing proyek yang masih berjalan di tahun 2021.

Payment of trade payables comes from receipt of term payments for each project that still running in 2021.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

27. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan

27. Bank and Financial Institution Loans

	2021 Rp	2020 Rp
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Pendek		
Pihak Berelasi		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	550,814	885,172
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	496,006	450,570
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	148,091	22,993
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	42,259	84,759
<u>Entitas Anak</u>		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	110,000	166,500
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	188,200
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	59,964	--
Jumlah	1,407,134	1,798,194
Pihak Ketiga		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	363,386	349,463
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	132,271	134,539
PT Bank Shinhan Indonesia Tbk	79,283	91,124
PT Bank Mega Tbk	1	872,255
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	--	25,000
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	146,000	217,400
PT Bank MNC Internasional Tbk	46,539	--
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	42,000	41,894
Jumlah	809,480	1,731,675
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Pendek	2,216,614	3,529,869
Bagian Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun		
Pihak Berelasi		
<u>Entitas Anak</u>		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	110,000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	65,000	109,651
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	66,000
Jumlah Pinjaman yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	175,000	175,651
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang		
Pihak Berelasi		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	53,161
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	510,041	546,997
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	70,000	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	59,518	54,604
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	250,166
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	68,465
Jumlah	639,559	973,393
Pihak Ketiga		
<u>Perusahaan</u>		
PT Bank Bukopin Tbk	428,070	--
<u>Entitas Anak</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	117,125	131,895
Jumlah	545,195	131,895
Jumlah Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1,184,754	1,105,288

Short Term Bank and Financial Institution Loans

Related Parties

The Company

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Subsidiaries

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Total

Third Parties

The Company

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

PT Bank Shinhan Indonesia Tbk

PT Bank Mega Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Subsidiaries

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

PT Bank MNC Internasional Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Total

Total Short Term Bank Loans

**Current Maturities of Bank and
Financial Institution Loans**

Related Parties

Subsidiaries

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total

Long Terms Bank and Financial Institution Loans

Related Parties

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Subsidiaries

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Total

Third Parties

The Company

PT Bank Bukopin Tbk

Subsidiaries

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Total

Total Long Terms Bank and Financial Institution Loans

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

1) PT Bank Shinhan Indonesia Tbk ("Bank Shinhan")

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No.286/PPWK/XII/2021 pada tanggal 20 Desember 2021, bank setuju untuk memberikan kepada Perusahaan berupa Fasilitas Kredit Pinjaman *Demand Loan* sebesar Rp350.000 dan memperpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit Pinjaman *Demand Loan* yang semula jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2021, untuk selanjutnya diperpanjang 12 bulan sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Atas perpanjangan jangka waktu kredit ini Perusahaan wajib membayar kepada bank berupa suku bunga 8,75% per tahun, biaya provisi 0,25% per tahun dari limit kredit.

Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung, Perusahaan wajib melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Membayar bunga dan pembayaran kembali hutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kredit;
- b. Melaksanakan pengikatan jaminan, baik secara di bawah tangan maupun di hadapan Notaris yang ditunjuk oleh Bank Shinhan;
- c. Perusahaan dan/atau Penjamin (jika berbadan hukum), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Shinhan apabila merubah bentuk/status hukum perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan, susunan pengurus dan susunan pemegang saham Perusahaan dan/atau Penjamin;
- d. Bagi Debitur berbentuk perusahaan yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, termasuk setiap perubahan dan penggantian, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan *Audited* dan harus diserahkan selambatnya-lambatnya pada akhir semester I tahun berikutnya;
- e. Memelihara keberadaan usahanya serta menjalankan usahanya dengan rajin, baik dan efisien sesuai dengan praktek keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasa menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku;
- f. Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Bank Shinhan serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1) PT Bank Shinhan Indonesia Tbk ("Bank Shinhan")

The Company

Based on the Credit Term Extension Agreement No.286/PPWK/XII/2021 on December 20, 2021, Bank Shinhan has agreed to provide the Company in form of the Demand Loan Credit Facility amounting to Rp350,000 and to extend the term of the Demand Loan Credit Facility from originally due on December 27, 2021, was extended for 12 months until December 27, 2022. For this extension of credit term, the Company shall pay the bank the interest rate of 8.75% per annum, provision fee of 0.25% per annum of the credit limit.

As long as the Credit Agreement is still in progress, the Company comply with the following matters:

- a. Pay the interest and repay the debt in accordance with the time specified based on the Credit Agreement;
- b. Carry out the collateral binding, both privately made and before the Notary Public appointed by Bank Shinhan;
- c. The Company and/or Guarantor (if in form of legal entity), shall notify the Bank Shinhan in writing if it changes the legal form/status of the Company, the company's Articles of Association, the composition of management and shareholders of the Company and/or Guarantor;
- d. For the Debtor's in form of Company already fulfilling one of criteria as stipulated in the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and the Regulation of Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 regarding Asset Quality Assessment of Commercial Banks, including any amendments and substitutes thereof, they shall submit the audited annual financial statement and shall be submitted within not later than the end of the first semester of the subsequent year;
- e. Maintain the existence of its business and run its business diligently, well and efficiently in accordance with the prevailing financial and business practices and always comply with all prevailing regulations;
- f. Create and maintain the satisfactory cost accounting and control system for the Bank Shinhan as well as maintain the records and administration reflecting properly and fairly the Company's financial condition and business

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

serta hasil usaha Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang ditetapkan secara terus menerus;

- g. Senantiasa memberikan izin, dan/atau membantu diperolehnya izin kepada Bank Shinhan serta para pejabat Bank Shinhan pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Bank Shinhan untuk memasuki bangunan dan/atau tempat/bangunan dimana jaminan kredit berada serta kantor Perusahaan dan/atau Penjamin untuk mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap bangunan jaminan-jaminan, tagihan-tagihan asli *invoice* tagihan, bukti-bukti pengiriman barang-barang, perjanjian/kontrak, pembukuan dan administrasi Perusahaan. Biaya-biaya dan ongkos-ongkos pemeriksaan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh Perusahaan;
- h. Memberitahukan kepada Bank Shinhan bilamana terjadi perubahan dalam ruang lingkup usaha Perusahaan atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat memengaruhi secara mendalam keadaan usaha Perusahaan;
- i. Memberitahukan kepada Bank Shinhan bilamana terjadi perubahan bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha Perusahaan;
- j. Memberitahukan kepada Bank Shinhan bilamana hendak mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, atau kewajiban-keajiban tersebut timbul atas dasar keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, setelah tanggal Perjanjian Kredit;
- k. Membayar kewajiban pajak, upah buruh, rekening-rekening listrik, air PAM dan telpon pada waktunya dan dengan cara sebagaimana mestinya;
- l. Menyerahkan kepada Bank Shinhan semua asli dokumen jaminan dan asli persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh Bank Shinhan untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian, dokumen jaminan, surat promes dan perjanjian jaminan serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan;
- m. Bank Shinhan berhak untuk meminta:
 - i. Dalam waktu 90 hari sejak akhir setiap 6 bulan dari suatu tahun buku Perusahaan, laporan keuangan Perusahaan (yang dinyatakan sah oleh Direksi Perusahaan) untuk 6 bulan yang bersangkutan, paling sedikit terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang disusun sesuai dengan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

results in accordance with the accounting principles applicable in Indonesia and determined continuously;

- g. Always issue permission, and/or assist in obtaining permit for Bank Shinhan and the Bank Shinhan officials at any time if deemed necessary by the Bank Shinhan to enter the building and/or place/building where the credit collateral is located and the office of the Company and/or Guarantor to conduct the audit of collateral buildings, original invoices of collection, evidences of goods delivery, agreement/contract, accounting and administration of the Company. The costs and charges of the examination above will be borne and payable by the Company;
- h. Notify Bank Shinhan in case of change of the Company's business scope or in case of event or condition that may profoundly affect the Company's business condition;
- i. Notify Bank Shinhan in case of change of the form/legal status and/or line of business of the Company;
- j. Notify Bank Shinhan when it wants to bind itself as guarantor/collateral to the other parties and/or pledge and/or transfer its assets to the other parties, or these obligations arise based on the judge's judgment having permanent and definite legal force, after the date of the Agreement Credit;
- k. Pay tax obligations, labor pay, electricity bills, PAM water and telephones on time and in appropriate manner;
- l. Submit to Bank Shinhan all original collateral documents and original approvals required by the Bank Shinhan to enter into, submit and exercise the Agreement, collateral document, promissory notes and collateral agreements as well as other related agreements;
- m. Bank Shinhan shall be entitled to request:
 - i. Within 90 days as of the end of every 6 months of a Company's fiscal year, the Company's financial statement (declared valid by the Company's Board of Directors) for the relevant 6 months, at least consisting of the balance sheet and profit/loss calculation prepared in

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk jangka waktu yang lalu;

- ii. Dalam waktu 180 hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan Perusahaan (yang telah diperiksa/diaudit oleh akuntan publik) untuk tahun buku yang baru lalu, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disusun menurut prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia serta diterapkan secara terus menerus dan selaras dengan pembuatan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku-tahun buku yang lalu;
- n. Membuka rekening pada bank, baik rekening pinjaman dan/atau maupun rekening penampungan serta mengupayakan mengalihkan seluruh aktivitas melalui rekening Perusahaan pada Bank Shinhan;
- o. Menyetorkan ke rekening Perusahaan pada Bank dan/atau langsung kepada Bank Shinhan untuk setiap pembayaran termasuk akan tetapi tidak terbatas pada jumlah pokok, bunga, denda-denda dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Perusahaan;
- p. Menggunakan seluruh dana yang ditarik dari Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit;
- q. Memelihara harta kekayaan Perusahaan termasuk harta jaminan yang dijaminkan kepada Bank Shinhan;
- r. Memberikan informasi kepada bank atas hal-hal yang dianggap dapat membahayakan keadaan usaha Perusahaan dan/atau Penjamin dan mengizinkan Bank Shinhan untuk meninjau usaha Perusahaan setiap saat bila dianggap perlu oleh Bank Shinhan, dan Perusahaan wajib menginformasikan setiap perkembangan usaha Perusahaan;
- s. Menandatangani setiap akta dan dokumen yang diminta oleh Bank Shinhan untuk melengkapi dan memperkuat hak Bank Shinhan berdasarkan Perjanjian, dokumen jaminan, perjanjian jaminan dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan;
- t. Memenuhi dan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Mengizinkan dan memberi bantuan sepenuhnya kepada Bank Shinhan atau pihak yang ditunjuk Bank Shinhan untuk setiap waktu memeriksa fasilitas, aktivitas, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

accordance with the GAAP accounting principles generally accepted in Indonesia and applied continuously and in harmony with the preparation of the balance sheets and profit/loss calculation for the previous period;

- ii. Within 180 days as of the end of a fiscal year, the Company's financial statement (already audited by the public accountant) for the latest fiscal year, at least consist of the Balance Sheet and Profit/Loss Statement prepared according to the accounting principle generally accepted in Indonesia as well as applied continuously and in harmony with the preparation of the balance sheets and profit/loss calculations for the previous fiscal years;
- n. Open the account with bank, both loan account and/or escrow account as well as seek to transfer all activities through the Company's account with Bank Shinhan;
- o. Deposit into the Company's account with the Bank and/or directly to Bank Shinhan for each payment including but not limited to the amount of principal, interest, penalties and fees being the Company's obligations;
- p. Use all funds withdrawn from the Loan Facility based on the Credit Agreement;
- q. Maintain the Company's assets including collateral assets guaranteed to Bank Shinhan;
- r. Provide information to the bank on matters considered to be harmful to the business condition of the Company and/or Guarantor and allow Bank Shinhan to review the Company's business at any time if deemed necessary by Bank Shinhan, and the Company shall inform every development of the Company business;
- s. Sign any and every deed and document requested by the Bank to complete and strengthen the Bank's rights based on the Agreement, collateral document, collateral agreement and other related agreements;
- t. Fulfill and comply with all prevailing legislations;
- u. Permit and provide full assistance to the Bank or a party appointed by Bank Shinhan to check facilities, activities, books and records made by the Company as considered necessary by Bank Shinhan to

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

oleh Perusahaan yang dianggap perlu oleh Bank Shinhan guna menilai kemampuan Perusahaan dan/atau Penjamin dalam memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen jaminan, perjanjian jaminan dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dan segala biaya yang timbul untuk keperluan tersebut merupakan beban Perusahaan;

- v. Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Shinhan, apabila terjadi proses perkara, baik perdata maupun pidana yang mempengaruhi usaha Perusahaan maupun harta kekayaannya. Lebih lanjut, Perusahaan akan dengan segera memberikan pemberitahuan kepada Bank Shinhan mengenai terjadinya setiap peristiwa kelalaian/cidera janji, atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya, merupakan suatu peristiwa kelalaian/cidera janji;
- w. Mengupayakan untuk menyalurkan aktivitas usaha Perusahaan melalui rekening Perusahaan pada Bank Shinhan;
- x. Menjamin bahwa kewajibannya untuk melaksanakan pembayarannya kepada Bank Shinhan berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian jaminan serta dokumen jaminan mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kewajiban pembayarannya atas pinjaman-pinjaman lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman pemegang saham baik yang sekarang maupun yang akan timbul dikemudian hari;
- y. Melaksanakan pengikatan atas barang jaminan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Shinhan berdasarkan Perjanjian Kredit;
- z. Membayar semua biaya yang timbul dan relevan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit;
- aa. Setiap waktu atas permintaan Bank Shinhan dapat dilakukan penilaian terhadap jaminan melalui konsultan/perusahaan penilai yang disetujui oleh Bank dengan biaya yang ditanggung oleh Perusahaan;
- bb. Melaksanakan pengikatan jaminan dan/atau hutang sebagaimana yang diminta/disyaratkan Bank Shinhan, di hadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Bank Shinhan, apabila Bank Shinhan meminta penambahan jaminan, atas biaya Perusahaan;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

assess the capability of the Company and/or Guarantor to fulfill all obligations based on the Credit Agreement, collateral documents, collateral agreements and other related agreements and all costs incurred for such purposes shall be borne by the Company.

- v. Submit the notification to Bank Shinhan, if there is any case process, both civil and criminal affecting the Company business and assets. Subsequently, the Company will immediately submit notification to Bank Shinhan regarding the occurrence of any event of negligence/breach of promise, or event which, by the submission of notification or the lapse of time, or both, it constitutes either negligence/event of default;*
- w. Strive to channel the Company's business activities through the Company's account with Bank Shinhan;*
- x. Ensure that its obligations to make payment to Bank Shinhan based on the Credit Agreement and collateral agreements and collateral documents have priority position over their payment obligations from other loans, including but not limited to the shareholders' loans both now and that will arise in the future;*
- y. Carry out the binding on collateral goods in accordance with the prevailing regulation and under the terms and conditions stipulated by Bank Shinhan based on the Credit Agreement;*
- z. Pay all costs incurred and relevant to the provision of Loan Facilities based on the Credit Agreement and the implementation of the provisions in the Credit Agreement;*
- aa. At any time at Bank Shinhan's request, the assessment of the collateral may be carried out through the Company's consultant/appraisal approved by Bank Shinhan at costs borne by the Company;*
- bb. Carry out binding of collateral and/or debt as requested/required by Bank Shinhan, drawn before the Notary Public and/or Conveyancer (PPAT) appointed by Bank Shinhan, if the Bank requests for the additional collateral, at the Company's expenses;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- cc. Melaksanakan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp91.124. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp131.907. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp143.748. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79.283.

2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank CCBI")

Perusahaan

Berdasarkan Perubahan Kelima atas Perjanjian Kredit Nomor: 540/APK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 antara Perusahaan dan Bank CCBI, bahwa Bank CCBI setuju untuk memparpanjang jangka waktu Fasilitas Kredit Demand Loan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2022. Jumlah *plafond* Rp400.000 dan tingkat suku bunga 8,5% per tahun (*floating*). Bunga dapat ditinjau setiap saat oleh Bank, mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank.

Ketentuan Khusus:

- Sebelum penarikan, Perusahaan wajib menyerahkan kepada Bank CCBI, dokumen yang mendasari (*underlying documents*) yang akan diperiksa oleh Bank CCBI terlebih dahulu, dimana Bank CCBI berhak untuk menolak permintaan penarikan dari Perusahaan berdasarkan layak atau tidak layaknya dokumen yang mendasari (*underlying documents*) menurut Bank CCBI;
- Menyerahkan salinan Perjanjian Kredit antara Bank CCBI dengan Perusahaan yang dilegalisir dengan minimum CCR 100% dari sisa saldo pinjaman;
- Hasil penarikan tidak diperkenankan untuk melakukan restrukturisasi atau revitalisasi;
- Nasabah/pelanggan Perusahaan tidak termasuk dalam daftar investasi yang dilarang (*List of Negative Investment*);
- Memberi izin Bank CCBI untuk memeriksa aktivitas bisnis, buku dan catatan Perusahaan dan informasi lain yang diperlukan oleh Bank CCBI dengan pemberitahuan sebelumnya;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- cc. Carry out the collateral binding in accordance with the provisions and law applicable in the Republic of Indonesia.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

The balance as of December 31, 2020 is Rp91,124. The total disbursement during the year is amounting to Rp131,907. The payment during the year is amounting to Rp143,748. The balance as of December 31, 2021 is Rp79,283.

2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank CCBI")

The Company

Based on the Fifth Amendment to the Credit Agreement Number: 540/APK/XII/2021 dated December 28, 2021 between the Company and Bank CCBI, Bank CCBI has agreed to extend the term of the Demand Loan Credit Facility for 12 months commencing on September 28, 2021 until 28 September 2022. The credit limit amounting Rp400,000 and the interest rate is at 8.5% per year (*floating*). Interest can be reviewed at any time by the Bank, following the applicable regulations at the Bank.

Special Terms:

- Before the withdrawal, the Company shall submit to Bank CCBI the underlying documents that will be firstly checked by Bank CCBI, where Bank CCBI has the right to decline the request for withdrawal from the Company based on whether or not the underlying documents are appropriate according to Bank CCBI;
- Submit the legalized copy of Credit Agreement between Bank CCBI and the Company with minimum CCR of 100% of the outstanding;
- Withdrawal of proceeds are not allowed for restructuring or revitalization;
- The Company's customers are excluded from the list of prohibited investment (*List of Negative Investment*);
- Issue permit for Bank CCBI to examine the business activities, books and records of the Company and other information required by the Bank by prior notification;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- f. Perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan laporan keuangan triwulanan *in-house* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal periode laporan keuangan berakhir;
- g. Perusahaan wajib membuka rekening operasional pada Bank CCBI;
- h. Perusahaan tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berkaitan dengan perubahan bidang usaha, penurunan modal dan perubahan pemegang saham mayoritas (minimum 51% wajib dimiliki oleh Republik Indonesia);
- i. Perusahaan wajib melakukan subordinasi hutangnya kepada para pemegang sahamnya baik yang telah ada (jika ada) maupun yang akan ada;
- j. Apabila Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat dengan menggunakan dana pinjaman yang diperoleh dari bank/pihak lain, maka Perusahaan wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pembayaran dipercepat tersebut;
- k. Perusahaan wajib mengupayakan aktivitas bisnis melalui rekening Perusahaan pada Bank CCBI;
- l. Perusahaan wajib menjaga *Current Ratio* (rasio antara jumlah aset lancar dengan pasiva lancar) minimal satu kali;
- m. Perusahaan wajib untuk menyerahkan dan mendaftarkan tagihan yang dijadikan jaminan setiap pertiga bulanan dan apabila setiap kali tagihan yang diberikan jatuh tempo dan/atau tidak lancar, Perusahaan wajib memberikan kepada Bank CCBI penggantian tagihan yang belum jatuh tempo dan lancar dan penggantian tersebut akan didaftarkan pada masa pendaftaran ulang yang terdekat;
- n. Perusahaan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional-Bank Indonesia;
- o. Fasilitas Kredit hanya dapat digunakan apabila Perusahaan tidak lalai melaksanakan atau mematuhi salah satu dari janji-janji atau kewajiban-kewajiban, atau ketentuan-ketentuan dari persyaratan-persyaratan lainnya dan dokumen-dokumen lainnya berdasarkan SKU dan Perjanjian Kredit yang dibuat dengan Bank CCBI, maupun perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya antara Perusahaan dengan bank dan/atau kreditur lainnya;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- f. The Company shall submit an annual financial statement already audited by the registered Public Accountant not later than 6 (six) months and the in-house quarterly financial statement not later than 90 (ninety) days after the expiry of the financial statement period;
- g. The Company shall open the operational account with Bank CCBI;
- h. The Company shall not be allowed to amend the articles of association related to the change of business line, decrease in capital and change of the majority shareholder (minimum 51% shall be owned by the Republic of Indonesia);
- i. The Company shall subordinate their debts to their existing (if any) or future shareholders;
- j. If the Company makes early repayment by using loan fund obtained from the bank/other party, the Company shall pay penalty amounting to 2% (two percent) of the accelerated payment;
- k. The Company shall do its best to carry out the business activities through the Company's account with the Bank CCBI;
- l. The Company shall maintain the *Current Ratio* (the ratio between total current assets and current liabilities) at least one time;
- m. The Company shall submit and register the bills used as the collateral by quarterly and if at any time the invoices are due and/or not current, the Company shall provide Bank CCBI with the replacement for bills not yet due and current and the reimbursement will be registered during the closest re-registration period;
- n. The Company is not included in the Bank Indonesia National Black List;
- o. The credit facilities can only be used if the Company fails to carry out or comply with any of undertakings or obligations, or the provisions of the other requirements and other documents based on SKU and the Credit Agreement entered into with the Bank CCBI, and other agreements and documents between the Company and other banks and/or creditors;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- p. Menghapus ketentuan yang terdapat dalam huruf b ayat 2 Pasal 11 pada SKU, sehingga untuk selanjutnya ayat 2 Pasal 11 SKU;
- q. Khusus untuk Perusahaan badan usaha, tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan seperti namun tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
 - ii. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya dalam Perusahaan;
- r. Menghentikan salah satu kegiatan usahanya untuk mengubah jenis usaha yang dilakukan secara substansial berakibat buruk pada keuangan perusahaan;
- s. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (*corporate structure*) antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan;
- t. Menambah ketentuan ayat 11 Pasal 10 pada SKU, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Perusahaan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank CCBI, maksimum 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya keputusan RUPS atas tindakan mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham, atau pengurus atau pihak lainnya yang setara lainnya dalam Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp349.463. Jumlah pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp108.000. Pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp94.077. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp363.386.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- p. Delete the provisions contained in item b paragraph 2 Article 11 of SKU, thereby for the next paragraph 2 Article 11 of SKU;
- q. Specifically for the Company's business entity, any acts related to the Company's corporate structure such as but not limited to:
 - i. Change the aims, objectives and business activities of the Company;
 - ii. Announce and distribute the dividends and/or other forms of business profits to the shareholders and/or other equivalent parties in the Company's company;
- r. Discontinue one of its business activities to change the line of business carried out that substantially having the negative impact on the Company's finances;
- s. Change the company's capital structure (*corporate structure*), including amalgamation, merger and acquisition;
- t. Add the provisions in paragraph 11 Article 10 on SKU, thereby subsequently state as follows: The Company shall submit the written notification to the Bank, maximum 15 (fifteen) Business Days after the receipt of RUPS' resolution on any act to change the composition of the board of directors, board of commissioners and shareholders, or management or other equivalent parties within the Company.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has complied with the required ratio and covenant.

The balance as of December 31, 2020 is Rp349,463. The total disbursement during the year is amounting to Rp108,000. The payment during the year is amounting to Rp94,077. The balance as of December 31, 2021 is Rp363,386.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**3) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("Bank BTN")**

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 tanggal 3 September 2020 Perusahaan dengan Bank BTN sehubungan dengan pemberian kredit swadana pagu kredit pinjaman sebesar Rp200.000, sifat kredit *Revolving* dengan jangka waktu kredit 12 bulan, tingkat suku bunga 7,25%. Jatuh tempo kredit tanggal 3 September 2021.

Berdasarkan surat dari Bank BTN No. 239/S/JKH.UT/BCSU.L/XII/2021 tanggal 24 Februari 2021 Fasilitas Pinjaman Kredit Swadana Nomor: 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dinyatakan lunas dan bilyet deposito yang menjadi agunan telah sebesar Rp200.000 telah dibuka blokirnya.

Berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Swadana antara Bank BTN dengan Perusahaan Nomor: 008/PK/CSTD/CLS/VIII/2021 pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan ketentuan Perjanjian Kredit berikut: Jenis kredit adalah Kredit Swadana BTN Lembaga, *Plafond* kredit sebesar Rp390.000, Sifat kredit adalah *Revolving*. Jangka waktu 12 bulan yaitu 30 Agustus 2022. Jenis agunan kredit adalah Deposito Berjangka sebesar Rp390.000 dengan suku bunga sebesar 3,75%.

Jaminan atas fasilitas kredit ini berupa deposito yang dijaminkan pada Bank BTN senilai Rp390.000 (Catatan 13).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 Tanggal 28 Februari 2019 Perusahaan dengan Bank BTN dengan memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp226.000. Tujuan Kredit Modal Kerja untuk Modal Kerja Pendanaan Perusahaan kepada end user (Refinancing/Reimbursement). Kredit Modal Kerja bersifat non revolving. Jangka waktu kredit selama 36 bulan dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2022. Berdasarkan surat dari Bank BTN No. 524/CSTD/CB1/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 8,5%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**3) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("Bank BTN")**

The Company

Based on the Credit Agreement Number: 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 dated September 3, 2020, the Company and Bank BTN by the provision self-funding credit with the limit amounting to Rp200,000, revolving credit with the credit term of 12 months, the interest rate is at 7.25%. The credit due date is September 3, 2021.

Based on a letter from Bank BTN No. 239/S/JKH.UT/BCSU.L/XII/2021 dated 24 February 2021 Self-funded Loan Facility Number: 002/PK/CSTD/CLS/IX/2020 dated 3 September 2020 is declared paid off and the deposit slip as collateral has reached IDR 200,000 has been unblocked.

Based on Addendum I to the Self-funding Credit Agreement between Bank BTN with Company Number: 008/PK/CSTD/CLS/VIII/2021 on 30 August 2021 with the following Credit Agreement provisions: Type of Credit is Institutional BTN Swadana Credit, Credit limit amounting to Rp390,000, Credit nature is *Revolving*. The period of 12 months is August 30, 2022. Type of credit collateral is Time Deposits amounting to Rp390,000 with an interest rate at 3.75%.

The collateral for this credit facility is in form of time deposit guaranteed at Bank BTN amounting to Rp390,000 (Note 13).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 On 28 February 2019 the Company and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by providing a Working Capital Credit of Rp226,000. The purpose of Working Capital Credit is for Working Capital Funding of the company to end users (Refinancing/Reimbursement). Working Capital Loans are non-revolving. The credit period is 36 months and the maturity date is February 28, 2022. Based on the letter from Bank BTN No. 524/CSTD/CB1/XII/2021 dated December 20, 2021, the interest rate at 8.5%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.24 tanggal 28 Agustus 2020, Perusahaan dan Bank BTN dengan memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp128.000. Tujuan kredit adalah untuk *Refinancing* Modal Kerja pembiayaan usaha kepada PT Varia Intra Finance. Kredit yang diberikan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kredit ini bersifat *Non Revolving*. Jangka waktu kredit yang diberikan Bank BTN kepada Perusahaan adalah selama 15 bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kredit ini tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2021.

Berdasarkan surat dari Bank BTN No. 472/CSTD/CB1/XI/2021 tanggal 29 November 2021 Fasilitas Pinjaman Modal Kredit Kerja PK No. 24 tanggal 28 Agustus 2020 dinyatakan lunas per tanggal 26 November 2021.

Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan *non-financial covenant* kepada Bank BTN, antara lain sebagai berikut:

- Menyerahkan laporan dan melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank BTN terkait laporan perkembangan piutang, laporan penerimaan uang/*cash in* dan laporan penggunaan dana per triwulan atau laporan lainnya apabila dianggap perlu atau diminta oleh Bank BTN;
- Melakukan pengikatan secara fidusia atas piutang usaha yang dijadikan agunan di Bank setiap proses pencairan. Apabila terdapat *end user* menunggak maka Perusahaan wajib mengganti dengan piutang lancar yang lain;
- Menyerahkan laporan nilai fidusia atas piutang yang diikat sebagai agunan Bank BTN setiap triwulan;
- Menjaga rasio agunan selalu dalam rasio lebih dari atau sama dengan 120% (seratus dua puluh persen) selama masa kredit berlangsung;
- Menyerahkan laporan keuangan (neraca dan laba/rugi bersama penjelasannya). Laporan Keuangan Semesteran, paling lambat 30 hari setelah tanggal pelaporan. Laporan Keuangan Tahunan *Audited* selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal pelaporan.

Bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya dari selisih atau kekurangan biaya (*cost over run*) atas proyek yang dijadikan usaha pembiayaan oleh Perusahaan, jika ternyata melebihi *project cost* dalam anggaran

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 24 dated August 28, 2020, the Company and Bank BTN provided the Working Capital Credit amounting to Rp128,000. The objective of the credit is to refinance the working capital for business financing to PT Varia Intra Finance. The credit granted to the Company based on this Credit Agreement is Non Revolving. The credit term provided by the bank to the Company is 15 months as of the signing of this Credit Agreement on August 28, 2020 until November 28, 2021.

Based on a letter from Bank BTN No. 472/CSTD/CB1/XI/2021 dated November 29, 2021, the Working Capital Loan Facility PK No. 24 dated August 28, 2020 is declared as repaid as of November 26, 2021.

The Company shall fulfill the requirements of *non-financial covenants* to Bank BTN, as follows:

- Submit the report and reconcile with bank related to the receivables progress report, report on receipt of money/cash in and quarterly report on use of funds or other reports as considered necessary or requested by Bank BTN;
- Enter into the fiduciary binding of accounts receivable as the collateral with Bank BTN if every withdrawal. If there are end users is overdue, the Company shall replace it with the other current accounts;
- Submit the report on fiduciary value of receivables tied as Bank BTN's collateral by quarterly;
- Keep the collateral ratio is always in ratio of more than or equal to 120% (one hundred twenty percent) during the ongoing credit term;
- Submit the financial statement (balance sheet and profit/loss statement, together with explanations thereof). The Semi-annual Financial Statement not later than 30 days after the date of reporting date. The Audited Annual Financial statement within not later than 120 days after the reporting date.

Be prepared and able to bear the costs of the difference or insufficiency of costs (*cost overrun*) on the project used as the financing business by the Company, if in fact it exceeds the project cost in the Company's budget. Be

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan. Bersedia dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya dari selisih atau kekurangan biaya (*cost over run*) atas proyek yang dijadikan usaha pembiayaan oleh Perusahaan, jika ternyata melebihi *project cost* dalam anggaran Perusahaan.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio* diatas 100% (seratus persen);
- Debt Service Coverage* diatas 100% (seratus persen);
- Rasio modal disetor terhadap jumlah hutang Perusahaan (hutang yang ada dan yang akan ada) di Bank BTN minimal sebesar 10% (sepuluh persen);
- Debt to Equity Ratio* (rasio hutang terhadap jumlah modal) maksimal sebesar 500% (lima ratus persen).

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan tertentu di dalam perjanjian pinjaman-pinjaman di atas.

Pada 31 Desember 2020 Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memenuhi pembatasan keuangan yang dipersyaratkan oleh bank.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp885.172. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp345.519. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp679.877. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp550.814.

PT PPAF

Pada tanggal 31 Maret 2017, PT PPAF menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 dengan Bank BTN di hadapan Notaris Eddy. F. Saparung, S.H., M.H dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000. dengan tingkat bunga 10,75% efektif per tahun. Sifat kredit dari pinjaman ini adalah *revolving*. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan, yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2022. PT PPAF menyerahkan jaminan kepada Bank BTN berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan Piutang dengan kolektibilitas lancar dengan *coverage* minimal 110% yang terdiri dari piutang yang ada dan yang akan dibiayai oleh bank BTN dan tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

prepared and able to bear the costs of the difference or insufficiency of the costs (cost overrun) on the project used as the financing business by the Company, if it in fact exceeds the project cost in the Company's budget.

The Company shall maintain the financial covenants during the credit term reflected in the financial statement as follows:

- Current Ratio* above 100% (one hundred percent);
- Debt Service Coverage* above 100% (one hundred percent);
- The ratio of paid-up capital to total debt of the Company (existing and future debt) with Bank BTN at least 10% (ten percent);*
- Debt to Equity Ratio (the ratio of debt to total capital) maximum amounting to 500% (five hundred percent).*

The Company are required to comply with certain financial covenants under the terms of the loan agreements.

As of December 31, 2020 , the Company has fulfilled the required ratio and restriction. As of December 31, 2021, the Company did not meet the required financial covenants from the banks.

The balance as of December 31, 2020 is Rp885,172. The total disbursement during the year is amounting to Rp345,519. The payment during the year is amounting to Rp679,877. The balance as of December 31, 2021 is Rp550,814.

PT PPAF

On March 31, 2017, PT PPAF signed the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 30 with Bank BTN drawn before Notary Public Eddy. F. Saparung, S.H., MH at maximum loan value amounting to Rp100,000. with the effective interest rate of 10.75% per annum. The credit nature of this loan is revolving. The credit term is 60 months as of the signing date, due on March 30, 2022. PT PPAF submits the collateral to the bank in form of fiduciary collateral binding for Receivables with the performing collectability at minimum coverage of 110% consisting of the existing receivables and that will be financed by Bank BTN and not being guaranteed to other parties.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 5 Maret 2018, PT PPAF menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 dengan Bank BTN di hadapan Notaris Eddy. F. Saparung, S.H., M.H dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp43.000 dengan tingkat bunga 10,25% efektif per tahun. Sifat kredit dari pinjaman ini adalah Kredit Angsuran Berjangka. Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2022. PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank BTN berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan Piutang dengan kolektibilitas lancar sebesar Rp95.675.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp68.465. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp130. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp8.631. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.964.

**4) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
("BPD Banten")**

Perusahaan

Berdasarkan addendum perjanjian kredit No. 006/2020 antara Perusahaan dan BPD Banten, BPD Banten setuju untuk memberikan perpanjangan jangka waktu pinjaman kepada Perusahaan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021.

Sesuai dengan surat nomor: 043/SKL/BB-PI/06/21 dari BPD Banten pada tanggal 21 Juni 2021 bahwa pinjaman kredit PT PPA (Persero) dengan jenis kredit KMK-TRANS EFEKTIF 360 dengan jumlah pagu kredit pinjaman sebesar Rp25.000 dinyatakan lunas.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.000. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp25.000. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil.

PT PPAF

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Kredit tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., PT PPAF telah mendapatkan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran maksimum sebesar Rp42.000 dan Pinjaman Rekening Koran bersifat *revolving*.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On March 5, 2018, PT PPAF signed the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 with Bank BTN drawn before Notary Public Eddy. F. Saparung, S.H., M.H at maximum loan value amounting to Rp43,000 with effective interest rate of 10.25% per annum. The nature of this loan credit is Term Installment Loan. The credit term is 48 months as of the signing date, due on March 5, 2022. PT PPAF provides the collateral to the bank BTN in form of fiduciary collateral binding for the receivables with the performing collectibility amounting to Rp95,675.

The balance as of December 31, 2020 is Rp68,465. The total disbursement during the year is amounting to Rp130. The payment during the year is amounting to Rp8,631. The balance as of December 31, 2021 is Rp59,964.

**4) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
("BPD Banten")**

The Company

Based on the amendment to credit agreement No. 006/2020 between the Company and BPD Banten, BPD Banten has agreed to extend the loan term to the Company for 12 months starting from June 21, 2020 until June 21, 2021.

In accordance with letter number: 043/SKL/BB-PI/06/21 from BPD Banten on June 21, 2021 that the credit loan of PT PPA (Persero) with the type of credit KMK-TRANS EFEKTIF 360 has a limit amounting to Rp25,000 was declared paid off.

The balance as of December 31, 2020 is Rp25,000. The total disbursement during the year is amounting to Nil. The payment during the year is amounting to Rp25,000. The balance as of December 31, 2021 is Nil.

PT PPAF

Based on Amendment III to Credit Agreement dated August 18, 2020 Number 20 drawn up before Notary Public Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., PT PPAF has obtained the Current Account Loan Credit facility maximum amounting to Rp42,000 and the nature of the Current Account Loan facility is revolving.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit tanggal 23 November 2021 Nomor 157 yang dibuat di hadapan Notaris Putranto Nur Utomo, S.H, M.Kn. Jangka waktu Pinjaman Rekening Koran telah diperpanjang sampai dengan 24 Mei 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 11%

PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan piutang bersih senilai minimal 110% dari pokok pinjaman. PT PPAF diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan mempertahankan *Debt Equity Ratio* maksimal 8 kali. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT PPAF telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan BPD Banten.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, PT PPAF memenuhi pembatasan keuangan yang dipersyaratkan oleh bank.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp41.894. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp4.658. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp4.552. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp42.000

**5) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")
PT NK**

Berdasarkan surat persetujuan kredit No. BMN/SP3/15/2021 dan No. 006/PJMN/SP3/06/2021 tanggal 08 Juni 2021, PT NK, memperoleh kredit modal kerja dari LPEI, antara lain:

- 1) Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor Sublimit KMKE *Trade Finance – Pre Shipment Financing* untuk Pembiayaan *Trust Receipt* (LC/SKBDN Jatuh Tempo)
 - a. Pagu kredit yang diberikan Rp400.000;
 - b. Tujuan Penggunaan:
 - KMKE
Pembiayaan modal kerja untuk proyek-proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/penunjang ekspor yang telah dan akan diperoleh;
 - Sublimit KMKE *Trade Finance – Pre Shipment*
Pembiayaan *Trust Receipt* (LC/SKBDN Jatuh Tempo) atas proyek dalam negeri ataupun proyek luar negeri yang terkait/penunjang ekspor yang telah dan akan diperoleh.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the Credit Agreement Addendum dated November 23, 2021 Number 157 drawn before Notary Putranto Nur Utomo, S.H, M.Kn. The term of the Current Account Loan has been extended until May 24, 2022 with an interest rate of 11%

PT PPAF submits the collateral to the bank in form of fiduciary collateral binding for the net receivables collection worth of minimum 110% of the principal. PT PPAF shall comply with the financial condition limit by maintaining the *Debt Equity Ratio* of maximum 8 times. As per December 31, 2020, PT PPAF has complied with the loan terms and conditions stipulated by BPD Banten.

As of December 31, 2021 and 2020, PT PPAF meet the required financial covenants from banks.

The balance as of December 31, 2020 is Rp41,894. The total disbursement during the year is amounting to Rp4,658. The payment during the year is amounting to Rp4,552. The balance as of December 31, 2021 is Rp42,000.

**5) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")
PT NK**

Based on the credit agreement letter No. BMN/SP3/15/2021 and 006/PJMN/SP3/06/2021 date June 8, 2021, PT NK, obtained working capital credit from LPEI, as follows:

- 1) KMKE Sublimit Export Working Capital Credit Financing Facility *Trade Finance – Pre Shipment Financing* for *Trust Receipt Financing* (LC/SKBDN Maturity)
 - a. Maximum credit limit is amounting to Rp400,000;
 - b. The purpose:
 - KMKE
Working capital financing for foreign projects or domestic projects related/supporting exports that have been and will be obtained;
 - Sublimit KMKE *Trade Finance – Pre Shipment*
Trust Receipt (LC/SKBDN Maturity) financing for domestic or foreign projects that related to providing support for export that has been and will be obtained.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- c. Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2022;
- d. Jaminan berupa:
- Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh LPEI minimal 125% dari jumlah pagu kredit (Catatan 5);
 - Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 19 yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp1.918 (Catatan 17);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama Perusahaan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862 (Catatan 17);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp11.563 (Catatan 17);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133 (Catatan 17);
 - Tanah dan Bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999 (Catatan 17);
 - Tanah di atas SHGB No. 1347 yang berlokasi di Jl. Cisait, Kelurahan Walantaka, Kragilan, Serang, Banten (Catatan 17).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- c. Term of 1 (one) year as of June 9, 2021 until June 9, 2022;
- d. Collaterals in the form of:
- Receivables on contract financed and/or guaranteed by LPEI at least 125% of total credit limit (Note 5);
 - Land and building above SHGB No. 19 located at Jl. Padma No. 6 Denpasar Municipality, Bali in favor of PT NK bound with first rank Mortgage amounting to Rp1,918 (Note 17);
 - Land and Building above SHGB No. 352 located at Jl. Ciung Wanara No. 1 Badung District, Bali in favor of PT NK bound with first rank Mortgage amounting to Rp4,862 (Note 17);
 - Land and Building above SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located at Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Sumerta Kelod Village, East Denpasar, Bali in favor of PT NK bound with first rank Mortgage amounting to Rp11,563 (Note 17);
 - Land and Building above SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Ampenan Selatan Village, Mataram, West Nusa Tenggara in favor of PT NK bound with first rank Mortgage amounting to Rp10,133 (Note 17);
 - Land and Building above SHGB No. 356 located at Jl. Parikesit No. 10, Cakranegara Barat Village, Cakranegara, West Nusa Tenggara, in favor of PT NK bound with first rank Mortgage amounting to Rp999 (Note 17);
 - Land above SHGB No. 1347 located at Jl. Cisait, Walantaka Village, Kragilan, Serang, Banten (Note 17).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- 2) Fasilitas Penerbitan dan/atau Pembiayaan LC/SKBDN
 - a. Pagu kredit yang diberikan Rp150.000;
 - b. Tujuan penggunaan untuk proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor);
 - c. Jangka waktu 1 tahun sejak 9 Juni 2021 s/d 9 Juni 2022;
 - d. Tingkat suku bunga 8,75%-9,00%.
 - e. Jaminan: piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Indonesia Eximbank minimal sebesar 125% dari jumlah limit kredit.
- 3) Fasilitas Penjaminan LPEI
 - a. Pagu kredit yang diberikan Rp150.000;
 - b. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor;
 - c. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp166.500. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp267.742. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp324.242. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp110.000.

**6) PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.121 tanggal 27 Mei 2019 di hadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank Mega. Bahwa berdasarkan perjanjian Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mega dalam bentuk:

- a. Fasilitas *Demand Loan* 1 dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000;
- b. Fasilitas *Demand Loan* 2 dalam jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp500.000.

Tingkat suku bunga Fasilitas DL 1 dan DL 2 adalah masing-masing sebesar 10,5% per tahun yang dihitung dari adalah masing-masing jumlah sisa saldo fasilitas pinjaman dengan ketentuan tingkat bunga tersebut dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh bank (*floating rate*).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- 2) LC/SKBDN Issue and/or Financing facility
 - a. Credit limit of Rp150,000;
 - b. Objective of use is for foreign project or domestic project related to/supporting the international trade (export);
 - c. Term of 1 year as of June 9, 2021 to June 9, 2022;
 - d. Interest Rate 8,75%-9,00%
 - e. Collateral: receivables on contract financed and/or guaranteed by Indonesia Eximbank at least 125% of total credit limit.
- 3) Collateral Facility of LPEI
 - a. Credit limit provided Rp150,000;
 - b. The objective of use is for infrastructure project carried out both in the home country and overseas supporting the export activities;
 - c. Term of 1 (one) year as of June 23, 2021 to June 23, 2022.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has complied by covenant.

The balance as of December 31, 2020 is Rp166,500. The total disbursement during the year is amounting to Rp267,742. The payment during the year is amounting to Rp324,242. The balance as of December 31, 2021 is Rp110.000.

**6) PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")
The Company**

Based on the Credit Agreement No.121 dated May 27, 2019, drawn before the Notary Public Desman, S.H., M.Hum., M.M., the Company signed the Credit Agreement with Bank Mega. Based on the agreement, the Company obtains the loan facilities from Bank Mega in the form of:

- a. Demand Loan 1 facility with principal not more than Rp500,000;
- b. Demand Loan 2 facility with principal not more than Rp500,000.

Facility interest rate DL 1 and DL 2 is at 10.50% per annum, respectively calculated from the amount of debit/outstanding balance of the loan facility given that the interest rate is subject to change and will be reviewed at any time by the bank (*floating rate*).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada 5 Oktober 2021 telah ditandatangani Perjanjian Kredit Kesebelas No .062/ADD-PK/LCCL/21 untuk perpanjangan waktu fasilitas sebagai berikut:

- a. Untuk Fasilitas *Demand Loan* 1 selama 7 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
- b. Untuk Fasilitas *Demand Loan* 2 selama 7 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal akhir Mei 2022.

Perusahaan wajib menjaga *non-financial covenant* selama jangka waktu Kredit sebagai berikut:

- a. Penggunaan Fasilitas Pinjaman Perusahaan wajib, menggunakan fasilitas pinjaman semata-mata hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dan tidak untuk keperluan lain;
- b. Penarikan Modal Disetor Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi penarikan modal disetor;
- c. Perubahan Anggaran Dasar, Struktur Modal, Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi Perubahan anggaran dasar yang mengakibatkan berubahnya struktur modal, susunan pemegang saham atau susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Perubahan Usaha Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi perubahan bidang atau jenis kegiatan usaha Perusahaan;
- e. Pembagian Dividen Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terdapat persetujuan untuk pembayaran/pembagian dividen baik dari pendapatan maupun modal;
- f. Mengalihkan Usaha atau Jaminan Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memberitahu Bank Mega apabila terjadi

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On October 5, 2021, the Eleventh Credit Agreement No.062/ADD-PK/LCCL/21 was signed for the extension of facility time as follows:

- a. For Demand Loan Facility 1 for 7 months starting from the due date of October 9, 2021 until the end date of May 9, 2022;
- b. For Demand Loan Facility 2 for 2 months starting from the due date of October 9, 2021 until the end date of May 9, 2022.

The Company shall maintain the non-financial covenants during the credit term as follows:

- a. The use of Loan Facility, the Company shall use the loan facility solely for the purposes as mentioned in the Agreement and not for other purposes;
- b. The withdrawal of Paid-up Capital, the Company shall, within 15 (fifteen) Business Days as of the receipt of the resolution of the General Meeting of Shareholders, notify Bank Mega in case of withdrawal of the paid-up capital;
- c. Amendment to Articles of Association, Capital Structure, Shareholders and Management, the Company shall, within 15 (fifteen) Business Days as of the receipt of the resolution of the General Meeting of Shareholders, notify Bank Mega if there is amendment to articles of association resulting in the change of capital structure, composition of shareholders or composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- d. The change of Business, the Company shall, within 15 (fifteen) Business Days as of the receipt of the resolution of the General Meeting of Shareholders, notify Bank Mega if there is change of line or type of business activity of the Company;
- e. Dividend distribution, the Company shall, within 15 (fifteen) Business Days as of the receipt of the resolution of the General Meeting of Shareholders, notify Bank Mega if there is approval for the payment/distribution of dividends from both income and capital;
- f. Transfer of Business or Collateral, the Company shall, within 15 (fifteen) Business Days as of the receipt of the resolution of the General Meeting of Shareholders, notify Bank Mega in case of sale, transfer or

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- penjualan, pengalihan atau beralihnya usaha atau jaminan Perusahaan kepada pihak lain;
- g. Menyerahkan Laporan Perusahaan wajib, menyampaikan kepada Bank Mega:
- i. Laporan Keuangan Tahunan. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang independen dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah berakhir setiap tahun buku yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang disetujui Bank Mega;
 - ii. Laporan Keuangan Enam Bulanan. Laporan keuangan enam bulanan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya setiap periode enam bulanan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan secara konsisten diterapkan, yang disertifikasi oleh Direksi Perusahaan;
 - iii. Laporan *aging* bulanan atas portofolio piutang pembiayaan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya setiap periode pelaporan tersebut.
- h. Membuka dan mengaktifkan rekening Perusahaan wajib, segera setelah tanggal perjanjian ini tetapi tidak kurang dari tanggal penarikan pertama dilakukan, membuka rekening koran pada kantor atau kantor-kantor Bank Mega dan mengaktifkan transaksi keuangan usahanya melalui rekening atau rekening-rekening yang dibuka pada Bank Mega;
- i. Pemeriksaan Perusahaan wajib, setiap saat dalam jam kerja atau tidak, mengizinkan Bank Mega atau karyawannya atau wakilnya masuk ke kantor dan tempat lain milik Perusahaan, termasuk lokasi usaha Perusahaan, dan memeriksa, meneliti dan membuat salinan buku-buku keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas kepada piutang-piutang) dan catatan Perusahaan sehubungan dengan usaha Perusahaan, dan kunjungan tersebut bukan merupakan suatu tindakan memasuki pekarangan tanpa hak;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- assign of Company's business or collateral to the other party;*
- g. *The Company's Report Submission shall be submitted to Bank Mega:*
- i. *Annual Financial Statement. Annual financial statement already audited by the independent registered public accountant not later than 180 (one hundred eighty) calendar days after the expiry of every fiscal year consisting of balance sheet and profit/loss statement, prepared in accordance with the accepted accounting principles in Indonesia and consistently applied, audited by the registered public accountant approved by Bank Mega;*
 - ii. *Six-Month Financial Statement. Six-month financial statement by not later than 60 (sixty) calendar days after the expiry of each six-month period, consisting of balance sheet and profit/loss account, prepared in accordance with accounting principles and practices generally acceptable in Indonesia and consistently applied, certified by the Company's Board of Directors;*
 - iii. *Monthly aging report on financed receivables portfolio within not later than 15 (fifteen) calendar days after the expiry of each reporting period.*
- h. *Open and activate account, the Company shall, immediately after the date of this agreement but not less than the date of the first withdrawal, open the current account at the office or offices of Bank Mega and activate its business financial transaction through the account or accounts opened with Bank Mega;*
- i. *Company Audit, at any time during the working hours or not, allow Bank Mega or its employees or representatives to enter the offices and other places owned by the Company, including the Company's business locations, and audit, examine and make the copies of financial books (including but not limited to the receivables) and records of the Company in relation to the Company's business, and the visit does not constitute an act of entering the yard without right;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- j. Sengketa Perusahaan wajib, segera dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank Mega apabila terjadi perselisihan, sengketa atau perkara dimana Perusahaan menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau harta kekayaan Perusahaan dan berdampak terhadap kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian;
- k. Kejadian Pelanggaran Perusahaan wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank Mega apabila terjadi kejadian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian atau kejadian lain yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu Kejadian pelanggaran, termasuk sifat dari kejadian tersebut dan langkah yang diambil oleh Perusahaan untuk menanggulangnya;
- l. Penggunaan Laba Usaha Perusahaan wajib menggunakan laba usaha untuk pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Bank Mega berdasarkan Perjanjian;
- m. Pencatatan Pembukuan dan Pengawasan Pengeluaran Perusahaan wajib mengelola sistem pencatatan pembukuan dan mengawasi pengeluaran biaya serta pencatatan transaksi keuangan lainnya dengan benar dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia;
- n. Membayar Pajak Perusahaan wajib, membayar tepat pada waktunya pajak-pajak dan beban-beban lain yang wajib dibayar oleh Perusahaan, baik atas pendapatan yang diperoleh maupun atas harta kekayaan Perusahaan;
- o. Kerugian Perusahaan wajib, segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya, memberitahu Bank Mega apabila terjadi kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan yang dibiayai oleh Bank Mega sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha Perusahaan;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- j. *The dispute of the Company, immediately within a period of 7 working days since its occurrence to, notify the Bank Mega if there is any dispute, the dispute or cases where the Company becomes a party to or involving many sum of money or assets of the Company and have an impact on the ability of the Company to perform its obligations under the agreement and other documents related to the agreement;*
- k. *Violation by the Company, the Company shall, immediately within 7 (seven) Business Days as of the occurrence, to notify Bank Mega in case of event of default as referred to in the agreement or other events that by the notification or the lapse of time, or both, will constitute the event of breach, including the nature of the incident and the steps taken by the Company to overcome the same;*
- l. *Use of Operating Profit, the Company shall use the operating profit for the payment of the Company's obligations to Bank Mega based on the Agreement;*
- m. *Accounting records and expenditure supervision, the company shall manage the accounting recording system and supervise the cost expenditure as well as the other financial transaction recording correctly and honestly in accordance with the Indonesian accounting principles;*
- n. *Tax payment, the Company shall, pay the taxes timely and other charges that shall be paid by the Company, both on the income acquired and on the Company's assets;*
- o. *Loss, the Company shall, immediately within 7 (seven) Business Days after the occurrence, to notify Bank Mega in case of loss of or damage to the Company's assets related to the Company's business activities financed by Bank Mega that cause the disruption to the Company's business activities;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- p. Mematuhi Peraturan Perusahaan wajib mematuhi dan menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga dan memelihara izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang yang perlu untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara tertib, termasuk namun tidak terbatas kepada Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- q. Perizinan di kemudian hari, Perusahaan wajib atas biayanya sendiri dalam mengurus, membuat dan mendapatkan izin serta persetujuan atau dokumen lain yang disyaratkan dikemudian hari oleh, dan harus melakukan pemberitahuan atau laporan yang diperlukan di kemudian hari kepada, setiap badan pemerintah yang berwenang guna melaksanakan usaha atau melaksanakan kegiatan usahanya dan membuat serta melaksanakan perjanjian ini (apabila ada) dan tepat pada waktunya mengirimkan salinan daripadanya kepada Bank Mega;
- r. Penandatanganan Dokumen Jaminan Atas permintaan Bank Mega dan atas biayanya sendiri Perusahaan wajib membuat dan menandatangani setiap Dokumen Jaminan yang disyaratkan oleh Bank Mega dalam Perjanjian ini;
- s. Pengikatan Jaminan Perusahaan harus mengikat atau menyebabkan diikatnya Jaminan berdasarkan Perjanjian menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan hak preferensi kepada Bank Mega;
- t. Menjaga Harta Kekayaan, Eksistensi dan Izin Perusahaan wajib menjaga: (i) harta kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; (ii) kelangsungan eksistensi hak-hak, ijin-ijin dan, kepentingan yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara tertib dan efisien;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- p. *Comply with Regulation, the Company shall comply with and adhere to all prevailing legislation as well as keep and maintain the permits and approvals required by the competent party to carry out their business activities orderly, including but not limited to the Taxpayer Identification Number, Company Registration Certificate, Industrial Business Permit and Trade Operation Permit;*
- q. *Permit in the future, the Company shall at its own expenses in administering, making and obtaining permit as well as approval of other documents required in the future by, and shall submit the notification or report required in the future to any competent government agency to carry out business or carry out its business activities as well as enter into and implement this agreement (if any) and submit the copy thereof to Bank Mega timely;*
- r. *Signing of Collateral Document at request of Bank Mega and at its own expense, the Company shall enter into and sign every Collateral Document required by Bank Mega in this Agreement;*
- s. *Collateral Binding, the Company shall bind or cause the binding of Collateral based on the Agreement according to the law and provisions in the legislation applicable in Indonesia thereby able to provide the preference right to Bank Mega;*
- t. *Safeguard Asset, Existence and Permit, the Company shall maintain: (i) its assets that is important for its business activities; (ii) the continuity of existence of rights, permits and interests required to carry out their business orderly and efficiently;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- u. Dokumen Tambahan Perusahaan wajib tepat pada waktunya dan atas permintaan Bank Mega, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan dan mendaftarkan atas biayanya sendiri semua perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen, sertifikat dan surat-surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya serta melakukan tindakan-tindakan seperti itu sebagaimana yang harus atau wajar dilakukan guna melaksanakan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian;
- v. Informasi Lain Perusahaan wajib, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal permintaan oleh Bank Mega, menyampaikan kepada Bank Mega, setiap informasi, sehubungan dengan Perjanjian dan kegiatan operasional usahanya sebagaimana Bank Mega setiap saat memintanya;
- w. Penyerahan piutang yang menjadi jaminan Perusahaan wajib, menyerahkan piutang yang dijamin kepada Bank Mega, dengan kondisi:
 - e. Piutang dalam kondisi lancar (*current*);
 - ii. Piutang berkaitan dengan proyek BUMN atau anak perusahaan BUMN;
 - iii. Piutang tidak *double pledge* dengan kreditur lainnya;
 - iv. Tidak termasuk kategori piutang *bailout* atau revitalisasi BUMN yang ditugaskan langsung oleh pemerintah;
- x. Rekonsiliasi dan verifikasi piutang Perusahaan wajib, mengizinkan Bank Mega, setiap bulannya, untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi piutang yang dijamin;
- y. Penukaran Piutang
 - Perusahaan wajib melakukan penukaran piutang dengan piutang yang lancar dan *clear*, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilakukannya rekonsiliasi dan verifikasi, apabila dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, ditemukan:
 - a) Piutang yang *Date Past Due* (DPD) lebih besar dari 0 (nol) hari;
 - b) Piutang *double pledge/double financing* dengan kreditur lain;
 - c) Piutang fiktif/piutang yang telah lunas;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- u. *Additional Document, the Company shall, timely and at the request of Bank Mega, sign, acknowledge, fulfill, request and register at its own expense all agreements, documents, certificates and additional letters that shall be made further as well as take any other acts as what shall or is reasonable to carry out the other agreements related to the Agreement;*
- v. *Other Information, the Company shall, within 14 (fourteen) calendar days as of the date of the request by Bank Mega, submit to Bank Mega any information in relation to the Agreement and its business operation as requested by Bank Mega at any time;*
- w. *Submission of receivables being collateral, the Company shall submit the guaranteed receivables to Bank Mega, with the following conditions:*
 - i. *Receivables are in the current condition;*
 - ii. *Receivables related to SOE project or SOE subsidiaries;*
 - iii. *Receivables are not double pledged with the other creditors;*
 - iv. *Excludes the category of bailout receivables or revitalization of SOE assigned directly by the government;*
- x. *Reconciliation and verification of receivables, the Company shall allow Bank Mega, by monthly, to reconcile and verify the guaranteed receivables;*
- y. *Receivable Exchange*
 - *The Company shall exchange the receivables with any receivables that are current and clear, within not later than 1 (one) week after the reconciliation and verification, if from the result of the reconciliation and verification as referred to in this Agreement, it has been found:*
 - a) *Receivables which Date Past Due (DPD) is greater than 0 (zero) days;*
 - b) *Receivables of double pledge/double financing with the other creditors;*
 - c) *Fictitious receivables already fully settled;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Dalam hal Perusahaan tidak dapat melakukan penukaran piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka seluruh fasilitas pinjaman akan dihentikan (*freeze*)/tidak dapat melakukan pencairan sebelum dilakukannya penukaran piutang dimaksud;
- z. Pendaftaran/Pengkinian Data List Piutang Perusahaan wajib, melakukan pendaftaran piutang yang dijamin pada Bank Mega melalui Kantor Pendaftaran Fidusia serta melakukan pengkinian data list piutang yang dijamin setiap triwulan.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal 1,2 kali;
- b. *Leverage* minimal 1,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp872.255. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp872.254. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.

**7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No.24 tanggal 7 November 2018 berdasarkan surat No. CRO.KP/397/KMK/2018 di hadapan notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri. Bank memberikan Fasilitas Kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat perjanjian dengan limit sebesar Rp500.000. Minimal limit untuk setiap underlying Perjanjian Pinjaman antara Perusahaan dengan nasabah Perusahaan yang dapat dibiayai Fasilitas KMK Transaksional Bank sebesar Rp20.000. Bank Mandiri memberikan waktu pinjaman selama 48 bulan terhitung dari tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 November 2022.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- In case the Company is unable to exchange the receivables as referred to in this paragraph, then all loan facilities will be suspended (*freeze*)/cannot be withdraw before the exchange of the relevant receivables;
- z. Registration/Updating of Data List of Receivables, the Company shall, register the receivables guaranteed with Bank Mega through the Fiduciary Registration Office as well as update the data list of guaranteed receivables by quarterly.

The Company shall maintain the financial covenants during the credit term reflected in the financial statement as follows:

- a. *Current Ratio* minimum 1.2 times;
- b. *Leverage* minimum 1.5 times.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction.

The balance as of December 31, 2020 is Rp872,255. The total disbursement during the year is amounting to Nil. The payment during the year is amounting to Rp872,254. The balance as of December 31, 2021 is Rp1.

**7) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
The Company**

Based on the Transactional Working Capital Credit Agreement No. 24 dated November 7, 2018, based on the letter No. CRO.KP/397/KMK/2018 drawn before the Notary Public Desman, S.H., M.Hum., M.M., the Company signed the Credit Agreement with Bank Mandiri. The Bank provides the Credit Facility by taking into account the terms and conditions of agreement with the limit amounting to Rp500,000. The minimum limit for every underlying of Loan Agreement between the Company and the Company's customer that can be financed by the Bank's Transactional KMK Facility amounting to Rp20,000. Bank Mandiri provides the loan term for 48 months starting as of November 7, 2018 to November 6, 2022.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. HBK.GI2/1818/2021 tanggal 30 November 2021 bahwa pihak Bank Mandiri setuju untuk menurunkan tingkat suku bunga Fasilitas KMK Transaksional Limit Rp500.000 menjadi 6,15%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 76 Tanggal 16 Desember 2019 Perusahaan dengan Bank Mandiri dengan memberikan Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar Rp250.000. Tujuan Kredit Modal Kerja untuk pembiayaan cashflow perusahaan dalam rangka pengelolaan portofolio pembiayaan (di luar pembiayaan restrukturisasi dan revitalisasi dan dana talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Kredit Modal Kerja Transaksional bersifat revolving.

Berdasarkan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional Nomor CRO.KP/547/KMK/2019 tanggal 15 Desember 2021 antara Perusahaan dan Bank Mandiri (Persero) Tbk, bahwa jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional ditetapkan untuk diperpanjang selama 12 bulan yaitu tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022. Tingkat suku bunga sebesar 6,15% per annum dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Atas perpanjangan Fasilitas Kredit dikenakan provisi sebesar 0,125% dari Limit Kredit.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 77 tanggal 16 Desember 2019, Bank Mandiri memberikan Kredit Modal Kerja Transaksional kepada Perusahaan sebesar USD30.000. Tujuan Kredit Modal Kerja untuk pembiayaan cashflow perusahaan dalam rangka pengelolaan portofolio pembiayaan (di luar pembiayaan restrukturisasi dan revitalisasi dan dana talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Kredit Modal Kerja Transaksional bersifat revolving.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on a letter from Bank Mandiri No. HBK.GI2/1818/2021 dated November 30, 2021, Bank Mandiri agreed to reduce the interest rate for the Transactional Limit KMK Facility by Rp500,000 to 6.15%..

Based on the deed of the transactional working capital credit No. 76 dated December 16, 2019, the Company with Bank Mandiri, which provides the transactional working capital credit amounting to Rp250,000. The purpose of the working capital credit for the company's cashflow financing in order to manage the financing portfolio (beyond the restructuring and revitalization financing and related party bailouts that use the state Capital Participation Fund (PMN). Transactional working capital Credit is revolving.

Based on Addendum II (Second) of the Transactional Working Capital Credit Agreement Number CRO.KP/547/KMK/2019 dated December 15, 2021 between the Company and Bank Mandiri (Persero) Tbk, that the term of the Transactional Working Capital Credit Facility is set to be extended for 12 month, namely December 16, 2021 until December 15, 2022. The interest rate is 6.15% per annum and can change at any time in accordance with the prevailing regulations at the Bank. For the extension of the Credit Facility, there is a provision of 0.125% of the Credit Limit.

Based on the Deed of the Transactional Working Capital Credit No. 77 dated December 16, 2019 Bank Mandiri (Persero) provides the transactional working capital credit to the Company of USD30.000 The purpose of working capital credit for the company's cashflow financing in order to manage the financing portfolio (beyond the restructuring and revitalization financing and related party bailouts that use the state Capital Participation Fund (PMN). Transactional working capital Credit is revolving.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. CRO.KP/548/KMK/2019 tanggal 15 Desember 2021 antara Perusahaan dan Bank Mandiri (Persero) Tbk, bahwa jangka waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional ditetapkan untuk diperpanjang selama 12 bulan yaitu tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022. Tingkat suku bunga sebesar 2,5% per tahun selama belum ada penarikan kredit. Apabila terdapat penarikan kredit, suku bunga fasilitas menjadi 3,5% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Non Performing Financing* piutang di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Pernyataan Modal Negara (PMN) maksimal 5% (lima persen);
- b. Jumlah sisa saldo pinjaman piutang di luar pembiayaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi dan/atau dana talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari kalender dibagi dengan jumlah sisa saldo pinjaman piutang (di luar pembiayaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi dan/atau dana talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal (PMN) sama dengan maksimal 5%;
- c. *Leverage* maksimal 150% dengan perhitungan jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas sama dengan maksimal 150%;
- d. Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan *audited* tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank Mandiri Kategori A, paling lambat telah diterima Bank 180 hari setelah akhir periode laporan;
- e. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap daftar piutang pembiayaan yang dibiayai oleh Bank Mandiri dan *checklist* pemenuhan kriteria jenis piutang setiap 3 bulan;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on Addendum II (Second) of the Transactional Working Capital Credit Agreement No. CRO.KP/547/KMK/2019 on December 15, 2021 between the Company and Bank Mandiri (Persero) Tbk, that the term of the Transactional Working Capital Credit Facility is set to be extended for 12 month, namely December 16, 2021 until December 15, 2022. The interest rate at 2.5% per annum as long as there is no credit withdrawal. If there is a credit withdrawal, the interest rate of the facility will be at 3.5% per annum and can change at any time in accordance with the provisions in force at the Bank.

The Company shall maintain the financial covenant during the Credit term reflected in the financial statement as follows:

- a. *Non-Performing Financing* of receivables beyond the financing of Restructuring and/or Revitalization and/or Bailout Fund of the related party using the State Capital Statement (PMN) funds maximum 5% (five percent);
- b. *Total outstanding receivables* beyond the financing of restructuring and/or revitalization and/or bailout loan of the related party using State Capital Participation (PMN) funds with principal and/or interest overdue of more than 90 calendar days divided by total outstanding receivables (beyond the financing of restructuring and/or revitalization and/or Bailout Fund of related party using Capital Participation (PMN) funds equal to maximum 5%;
- c. *Maximum leverage* is 150% with the calculation of total liabilities divided by total equity equal to maximum 150%;
- d. *Submit the unaudited financial statement* by quarterly and received by Bank Mandiri within not later than 60 days after the expiry of the reporting period and the annual audited financial statement audited by the Public Accountant Office being the Partner of Bank Mandiri Category A, has been received by Bank Mandiri within not later than 180 days after the expiry of the reporting period;
- e. *Permit Bank Mandiri or the party designated* to carry out the examination of the list of financing receivables financed by Bank Mandiri and the checklist of fulfillment of criteria of the type of receivables by every three months;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- f. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk dan memperoleh kuasa dari Bank Mandiri (sepanjang bukan melakukan kompetitor Perusahaan) untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha, aktivitas usaha, dokumen pembiayaan termasuk memeriksa asli bukti kepemilikan obyek pembiayaan terkait dengan Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan 5 hari kalender sebelumnya. Di samping itu, Perusahaan juga mengijinkan Bank Mandiri untuk masuk ke dalam *database* piutang Perusahaan secara nasional untuk dapat meyakinkan tingkat *accuracy* dan *integrity* dan laporan-laporan/informasi yang disampaikan Perusahaan kepada Bank Mandiri;
- g. Selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perusahaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dalam hal telah dilakukan sebagai berikut:
 - i. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (*subordinate loan*);
 - ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman/hutang dari pihak lain dimana pemberitahuan tersebut dapat disampaikan melalui laporan pemberitahuan tersebut dapat disampaikan melalui laporan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - iii. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, mengadakan atau melakukan pemanggilan rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa dengan agenda mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi perubahan pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham mayoritas;
- h. Perusahaan wajib menjaga saldo minimum Dana Pihak Ketiga di Bank Mandiri setiap bulannya minimal sebesar Rp15.000;
- i. Perusahaan menggunakan fasilitas Mandiri *Cash Management* untuk operasional Perusahaan;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- f. Allow Bank Mandiri or other parties appointed and authorized by Bank Mandiri (as long as they are not the Company's competitors) to at any time conduct the inspections/supervision of the business, business activities, financing document including checking the original evidence of ownership of financing objects related to the Credit Facilities from the Bank Mandiri by firstly notify in writing to the Company in 5 calendar days in advance. In addition, the Company also allows Bank Mandiri to enter the Company's receivable database nationally to ensure the level of accuracy and integrity and the report/information submitted by the Company to Bank Mandiri;
- g. As long as the relevant credit agreement is effective, the Company shall notify Bank Mandiri in writing within not later than 30 (thirty) calendar days in case the following acts have been carried out:
 - i. Pay debts to the shareholders/owners of the company itself (*subordinate loan*);
 - ii. Obtain the credit facilities or loans/debts from the other parties where the notification can be submitted through the report of notification can be submitted through the report in accordance with the provisions in this Agreement;
 - iii. Hold merger, acquisition, sell the assets except in the fair business transaction, hold or convene the annual general meeting of shareholders or extraordinary general meeting of shareholders with the agenda of changing the capital and or changing the name of management (Board of Directors and Board of Commissioners) as well as record the submission /transfer of shares, provided that in case of change of shareholders, the Government of Republic of Indonesia remain becoming the majority shareholder;
- h. The Company shall maintain the minimum balance of Third Party's Funds with Bank Mandiri by monthly minimum amounting to Rp15,000;
- i. The Company uses Mandiri Cash Management facility for the Company's operation;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- j. Pengikatan dan pembaharuan daftar piutang pembiayaan yang dijamin ke Kantor Fidusia dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dimana biaya pendaftaran piutang tersebut menjadi beban Perusahaan;
- k. Bahwa pelaksanaan penandatanganan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian lain antara Perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, termasuk tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga lainnya atas Fasilitas Kredit yang diberikan;
- l. Perusahaan dalam menjalankan usahanya wajib mengikuti/tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- m. Perusahaan dapat melakukan pembagian dividen dan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk membagikan dividen selama Perusahaan tidak lalai melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Mandiri;
- n. Menyampaikan rencana pelunasan atas *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan Perusahaan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo MTN;
- o. Seluruh pembayaran kewajiban ke Bank Mandiri dilakukan dengan mekanisme debit rekening giro escrow atau operasional dan Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan dana dalam rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan tertentu di dalam perjanjian pinjaman-pinjaman di atas. Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memenuhi pembatasan keuangan yang dipersyaratkan oleh bank. Perusahaan telah mengirimkan surat permohonan *waiver* kepada Bank atas tidak terpenuhinya rasio keuangan yang dipersyaratkan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menerima tanggapan dari Pihak Bank dan Pihak Bank belum menyampaikan ketidaksetujuannya atas permohonan *waiver* tersebut.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp503.731. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Efek atas selisih kurs adalah sebesar Rp3.592. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp11.317. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp496.006.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- j. The binding and renewal of the list of financing receivables guaranteed to the Fiduciary Office is carried out by every six months where the costs for registration of such receivables is borne by the Company;
- k. That the execution of the signing of this Agreement does not breach the other agreements between the Company and the other third parties, including the unnecessary of approval from the other third parties for the Credit Facilities provided;
- l. The Company in running its business shall comply with/adhere to the law provisions applicable in Indonesia;
- m. The Company can distribute the dividends and requires no prior written approval to distribute the dividends as long as the Company does not fail to pay its obligations to Bank Mandiri;
- n. Submit the settlement plan of the Medium Term Notes (MTN) issued by the Company, not later than 3 (three) months before the due date of MTN;
- o. All payment obligations to Bank Mandiri are made by using the mechanism of debiting the escrow or operational giro account and the Company shall provide the funds in such account within not later than the payment date.

The Company are required to comply with certain financial covenants under the terms of the loan agreements. As of December 31, 2021, the Company did not meet the required financial covenants from the bank. The Company has sent waiver letters to the Bank in relation to the breaches of financial ratio covenants as required. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has not received a response from the Bank and the Bank has not yet conveyed its disapproval of the waiver request.

The balance as of December 31, 2020 is Rp503,731. The total disbursement during the year is amounting to Nil. Effect on foreign exchange amounted to Rp3,592. The payment during the year is amounting to Rp11,317. The balance as of December 31, 2021 is Rp496,006.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PPAK

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit CRO.KP/084/KMK/2019 No.37 tanggal 27 Maret 2019 dari Notaris Adrian Djuaini, S.H., PT PPAK memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp147.043. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 4% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dari 27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2029.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit CRO.KP/084/KMK/2019 No. 38 tanggal 27 Maret 2019 di hadapan Notaris Adrian Djuaini, S.H., PT PPAK memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp210.542. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 2% per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dari 27 Maret 2019 sampai 27 Maret 2029.

Terhadap kewajiban bunga, ditangguhkan pembayarannya selama 6 bulan sejak tanggal efektif perjanjian dan bunga yang ditangguhkan dibayar pro rata selama 12 bulan.

Terkait dengan *debt covenant*, PT PPAK berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Bank Mandiri sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan Neraca, Laba/Rugi PT RILJ dan PT PPAK per 3 (tiga) bulanan paling lambat telah diterima 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode per bulan;
- Menyampaikan laporan aktivitas usaha meliputi laporan penjualan, laporan utang dan piutang usaha, dan rekening koran dari seluruh bank atas nama PT RILJ setiap bulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir periode per bulan;
- Menyerahkan Laporan Keuangan *audited* tahunan PT RILJ yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik yang masih terdaftar sebagai rekanan Bank Mandiri dan paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
- Menyalurkan seluruh aktivitas transaksi keuangan dan operasional PT RILJ melalui kantor Cabang Bank Mandiri;
- Senantiasa menjaga dana di dalam rekening penampungan/*escrow* perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya sebesar angsuran pokok dan atau bunga yang akan jatuh tempo;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PPAK

Based on the Deed of Credit Agreement CRO.KP/084/KMK/2019 No.37 dated March 27, 2019 drawn before Notary Adrian Djuaini, S.H., PT PPAK obtained a loan from Bank Mandiri with a maximum credit limit of Rp147,043. This loan bears an interest rate at 4% per annum with a tenor of 10 years from March 27, 2019 to March 27, 2029.

Based on the Deed of Credit Agreement CRO.KP/084/KMK/2019 No. 38 dated March 27, 2019 drawn before Notary Adrian Djuaini, S.H., PT PPAK obtained a loan from Bank Mandiri with a maximum credit limit of Rp210,542. This loan bears an interest rate at 2% per annum with a tenor of 10 years from March 27, 2019 to March 27, 2029.

For the interest obligation, the payment is deferred for 6 months as of the effective date of agreement and the deferred interest is paid pro rata for 12 months.

In relation to the debt covenant, PT PPAK shall submit to Bank Mandiri the following report:

- Submit the Balance Sheet, Profit/Loss statement of PT RILJ and PT PPAK by quarterly within not later than 60 (sixty) calendar days after the expiry of period per month;
- Submit the business activity report covering the report on sales, report on debt and account receivable, and the current account from all banks in favor of PT RILJ by monthly within not later than 30 (thirty) calendar days after the end of period per month by Bank Mandiri;
- Submit the annual audited Financial statement of PT RILJ prepared by the Public Accountant that is still registered as the partner of Bank Mandiri and received by the Bank within not later than 180 (one hundred and eighty) calendar days after the expiry of the reporting period;
- Distribute all financial and operational transaction activities of PT RILJ through Bank Mandiri Branch office;
- Always keep the funds in the escrow account of PT PPAK before the due date at least amounting to the principal and or the interest installment that will due;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- f. Menjaga rasio *covenant DSCR (Debt Service Coverage Ratio)* minimal 100%, *Current Ratio* minimal 100% dan *Equity* selalu positif yang tercermin dalam laporan keuangan PT PPAK mulai tahun 2019 dan seterusnya;
- g. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan PT PPAK;
- h. Melaporkan setiap kejadian dan peristiwa yang dapat memengaruhi kelancaran PT PPAK dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan;
- i. Meningkatkan modal disetor, termasuk konversi hutang pemegang saham menjadi modal disetor, apabila disyaratkan oleh Bank Mandiri.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, PT PPAK telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp352.299. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp2.701. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp349.598.

PT PPAF

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja I No. 154 tanggal 29 November 2017, di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H., PT PPAF memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri dengan nilai maksimum sebesar Rp75.000 dan dikenakan tingkat bunga 9,75% sampai dengan 1 tahun pertama, selanjutnya 9,9% dari tahun pertama sampai tahun kedua, selanjutnya 10% dari tahun kedua sampai dengan tahun ketiga.

Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 29 November 2021. Pinjaman ini dijamin dengan pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada Bank Mandiri. Berdasarkan surat nomor HBK.G12/1780/2021, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021 fasilitas Kredit Modal Kerja tersebut telah lunas.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- f. Maintain the covenant ratio of *DSCR (Debt Service Coverage Ratio)* minimum 100%, *Current Ratio of minimum 100%* and *Equity* are always positive as reflected in the financial statement of PT PPAK starting from 2019 and so forth;
- g. Permit Bank Mandiri or other appointed parties to at any time carry out the audit/supervision of business activities and financial statement of PT PPAK;
- h. Report any incidents and events that may affect the operation of PT PPAK in fulfilling its obligations based on the Credit Agreement including but not limited to fire event, occupational accident and employees' strike;
- i. Increase the paid-up capital, including the conversion of the shareholders' debt into paid-up capital, if required by Bank Mandiri.

As of December 31, 2021 and 2020, PT PPAK has fulfilled the required ratios and restrictions.

The balance as of December 31, 2020 is Rp352,299. The total disbursement during the year is amounting to Nil. The payment during the year is amounting to Rp2,701. The balance as of December 31, 2021 is Rp349,598.

PT PPAF

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement I No. 154 dated November 29, 2017, drawn before Notary M. Kholid Artha, S.H., PT PPAF obtained a loan from Bank Mandiri with a maximum amount of Rp75,000 and bears an interest rate at 9.75% for the first year, then at 9.9% from the first year to the second year, then at 10% from the second year to the third year.

The credit period is 48 months from the date of signing until November 29, 2021. This loan is secured by a fiduciary guarantee amounting to a minimum of 110% from the principal amount of the credit facility to Bank Mandiri. Based on letter number. HBL.G12/1780/2021, as of October 25, 2021, the Working Capital Credit facility has been paid off.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Revolving* No. 111 Pada tanggal 29 Maret 2019, dari Notaris M. Kholid Artha S.H., PT PPAF memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri dengan nilai maksimum sebesar Rp150.000, dan dikenakan tingkat bunga 9,17% - 9,54% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 28 Maret 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada Bank Mandiri. PT PPAF diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan DPD (*Date Past Due*) lebih dari 60 hari atas seluruh portofolio tidak melebihi 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Revolving* Akta No. 112 tanggal 29 Maret 2019 di hadapan Notaris M. Kholid Artha S.H., PT PPAF memperoleh pinjaman dengan nilai maksimum sebesar Rp150.000 dan dikenakan tingkat bunga 9,17% - 9,54% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 24 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 29 Maret 2021.

PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank. PT PPAF diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan DPD (*Date Past Due*) lebih dari 60 hari atas seluruh portofolio tidak melebihi 3%.

Semua kewajiban Pinjaman Kredit Modal Kerja *Revolving* berupa pokok dan bunga telah dilunasi/diselesaikan pada 29 Maret 2021 dan telah dinyatakan lunas sesuai Surat Keterangan Lunas no. HBK.G12/467/2021, tertanggal 1 April 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp194.697. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Pembayaran pada tahun berjalan adalah sebesar Rp99.603. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp95.094.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the Deed of Revolving Working Capital Credit Agreement No. 111 dated March 29, 2019, from Notary M. Kholid Artha S.H., PT PPAF obtained a loan from Bank Mandiri with a maximum amount of Rp150,000, and bears an interest rate at 9.17% - 9.54% effective per annum. The credit period is 48 months from the date of signing until March 28, 2023.

This loan is secured by a fiduciary guarantee amounting to a minimum of 110% from the principal amount of the credit facility to Bank Mandiri. PT PPAF is required to comply with financial conditions with DPD (*Date Past Due*) of more than 60 days on the entire portfolio not exceeding 3%.

Based on the Revolving Working Capital Credit Agreement Deed No. 112 dated March 29, 2019, drawn before Notary M. Kholid Artha S.H., PT PPAF obtained a loan with a maximum amount of Rp150,000 and bears an interest rate of 9.17% - 9.54% effective per annum. The credit term is 24 months from the date of signing until March 29, 2021.

PT PPAF submits the collateral to the bank in form of binding fiduciary collateral worth of minimum 110% of the principal of credit facility to the bank. PT PPAF shall comply with the financial condition limit with DPD (*Date Past Due*) of more than 60 days on entire portfolio not exceeding 3%.

All Revolving Working Capital Loans obligations in the form of principal and interest have been repaid/settled on March 29, 2021 and has been declared paid off in accordance with the Certificate of Settlement no. HBK.G12/467/2021 dated April 1, 2021.

As of December 31, 2021 and 2020, PT PPAF has complied with the terms and conditions of loan set forth by the bank.

The balance as of December 31, 2020 is Rp194,697. The total disbursement during the year is amounting to Nil. The payment during the year is amounting to Rp99,603. The balance as of December 31, 2021 is Rp95,094.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT NK

Berdasarkan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 tanggal 02 September 2019 dan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.099/2021 tanggal 21 Agustus 2019, PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dan Tambahan Limit Fasilitas *Non Cash Loan* dari Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja
 - a. Pagu kredit sebesar Rp300.000;
 - b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek jasa Konstruksi sesuai dengan SPK/Kontrak;
 - c. Jangka Waktu: Sejak penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan 25 Agustus 2022;
 - d. Tingkat suku bunga sebesar 9,5%
 - e. Jaminan:
 - Piutang usaha dan/atau piutang retensi dan/atau piutang ventura bersama dan/atau tagihan bruto kepada pemberi kerja serta stock persediaan barang diikat fidusia (Catatan 5 dan 10);
 - Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 414/Cipinang Cempedak, seluas 5.828 m², terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Perusahaan (Catatan 17);
 - Dua bidang tanah dan bangunan SHGB No. 1689 dan 1690, seluas 159 m² dan 100 m² di Komp. Sudirman Business Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru atas nama Perusahaan (Catatan 17).
- 2) *Non Cash Loan*
 - a. Pagu kredit sebesar Rp1.100.000;
 - b. Jangka Waktu: sejak penandatanganan Perjanjian Kredit
 - c. Jaminan dikaitkan dengan jaminan KMK.

PT NK wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal 105%;
- b. *Debt to Equity Ratio* (rasio hutang terhadap jumlah modal) maksimal sebesar 500%.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020 Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT NK

Based on the Letter No. CBG.CB2/SCD.SPPK.062/2019 dated September 02, 2019 and the Letter No. CBG.CB2/SCD.SPPK.099/2021 dated August 21, 2019, PT NK received the Transactional KMK Facility and Additional Non-Cash Loan Facility Limit from Bank Mandiri, with the details are as follows:

- 1) Working capital credit facility
 - a. Credit limit amounted to Rp300,000;
 - b. Purpose of use: additional working capital to support the implementation of construction services projects in accordance with the SPK/Contract;
 - c. Term: As of the signing of the Credit Agreement until August 25, 2022;
 - d. Interest rate 9,5%
 - e. Collateral:
 - Account receivables and/or retention receivables and/or joint venture receivables and/or gross invoice to the employer as well as the goods inventory stock tied to fiduciary (Notes 5 and 10);
 - A piece of land and building SHGB No. 414/Cipinang Cempedak, at extent of 5,828 sqm, located in Cipinang Cempedak Village, Jatinegara Sub District, East Jakarta in favor of PT NK (Note 17);
 - Two pieces of land and building SHGB No. 1689 and 1690, at extent of 159 sqm and 100 sqm in Komp. Sudirman Business Center Kav. 1 & 2, Simpang Tiga Village, Pekanbaru in favor of the Company (Note 17).
- 2) *Non Cash Loan*
 - a. Credit limit amounted to Rp1,100,000;
 - b. Term: As of the signing of the Credit Agreement;
 - c. The collateral is related to KMK collateral.

PT NK shall maintain the financial covenants during the credit term reflected in the financial statement as follows:

- a. *Current Ratio* at least 105%;
- b. *Debt to Equity Ratio* (debt to capital amount ratio) maximum of 500%.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.000. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp165.349. Pembayaran pada tahun berjalan adalah sebesar Rp166.000. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.349.

**8) PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk
("Bank Woori")
Perusahaan**

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 109 tanggal 24 Februari 2021 di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit *General Financing* dalam rangka pembiayaan modal kerja dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp140.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 8,75% selama 12 bulan dan biaya provisi 0,2% dan administrasi 0,1% dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2022.

a. Berdasarkan persyaratan perjanjian pinjaman, Perusahaan akan:

- i. Menerapkan setiap Pencairan yang dibuat berdasarkan Perjanjian untuk atau dalam rangka tujuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
- ii. Dari waktu ke waktu sesuai permintaan Bank Woori, memberikan kepada Bank Woori informasi mengenai kondisi keuangan dan bisnis dari Perusahaan sebagaimana diperlukan secara wajar oleh Bank Woori.
- iii. Mengizinkan perwakilan Bank Woori setidaknya sekali dalam setahun untuk memasuki kantor/wilayah tempat kerja Perusahaan dan untuk memiliki akses ke administrasi keuangan dari Perusahaan untuk melaksanakan inspeksi acak dari laporan keuangan, setelah disampaikannya pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang wajar oleh Bank Woori atau berdasarkan permintaan dari badan otoritas yang berwenang atau sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Balance as of December 31, 2020 is Rp66,000. The total loan disbursement in the current year is amounting to Rp165,349 The payment during the year is amounting to Rp166,000. The balance as of December 31, 2021 is Rp65,349.

**8) PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk
("Bank Woori")
The Company**

Based on the Credit Facility Agreement No. 109 dated February 24, 2021, drawn before Notary Fathiah Helmi, S.H., the Company obtained a General Financing Credit Facility for working capital financing with a credit limit amounted to Rp140,000. This loan bears an interest rate at 8.75% for 12 months and 0.2% provision fee and 0.1% administration fee and will mature on February 25, 2022.

a. Based on the conditions of the loan agreement, the Company will:

- i. Apply any Disbursement made based on the Agreement for or in the interest of objectives as specified in the Agreement.
- ii. From time to time at the request of Bank Woori, provide Bank Woori with information on the financial and business conditions of the Company as reasonably required by Bank Woori.
- iii. Allow Bank Woori representatives at least annually to enter the Company's office/working area and to have access to the financial administration of the Company to carry out random inspection of the financial statement, after the submission of the reasonable prior written notification by Bank Woori or based on the request from the competent authority agency or as required by the prevailing legislation.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- iv. Mempertahankan asuransi dengan perusahaan asuransi yang dapat diterima Bank Woori dan dalam bentuk dan substansi yang memuaskan Bank Woori, atas semua properti dan aset dengan cakupan pertanggungan yang biasa dan lazim dalam bidang-bidang usaha dan operasional Perusahaan dan untuk properti dan aset yang dimiliki dan dari waktu ke waktu sesuai permintaan Bank Woori, Perusahaan akan mengirimkan kepada Bank Woori daftar, yang disahkan oleh petugas yang berwenang dari Perusahaan sebagai suatu daftar yang tepat dan benar, yang berisikan semua asuransi Perusahaan yang pada saat itu berlaku.
- v. Tanpa mengabaikan ketentuan di atas, Perusahaan akan dalam hal apapun mempertahankan asuransi dengan perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh Bank Woori terhadap semua properti yang dijamin berdasarkan Dokumen Jaminan yang dirujuk dalam Perjanjian dengan cakupan dan dalam jumlah sebagaimana dapat diminta oleh Bank Woori dari waktu ke waktu.
- vi. Semua polis asuransi atas properti tersebut harus memuat *loss payable endorsement* untuk kepentingan dan dalam bentuk yang memuaskan Bank Woori.
- b. Perusahaan tidak akan (tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang wajar kepada Bank Woori dan dengan ketentuan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan atau yang secara wajar dapat timbul sebagai akibat daripadanya):
 - i. Menjual, mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau melepaskan dengan cara lain atas seluruh aset-asetnya atau bagian darimanapun dari Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan.
 - ii. Mengubah struktur modal, kecuali untuk tujuan peningkatan modal dari laba ditahan atau langganan baru dari pemegang saham yang ada atau persentase dari kepemilikan saham masing-masing.
 - iii. Memberikan pertanggungan atau ganti kerugian untuk pinjaman pihak manapun.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- iv. *Maintain insurance with the insurance company acceptable to Bank Woori and in the form and substance satisfactory to Bank Woori, for all property and assets with the usual and customary coverage in the lines of business and operation of the Company and for the property and assets owned and from time to time at the request of Bank Woori, the Company will send to Bank Woori the list, ratified by the competent official of the Company as a true and correct list, containing all the Company's insurances currently effective.*
- v. *Notwithstanding the foregoing, the Company will in any case maintain the insurance with the insurance company acceptable to Bank Woori for all properties guaranteed based on the Collateral Documents referred to in the Agreement with the coverage and at amount as may be requested by Bank Woori from time to time.*
- vi. *All insurance policies on the property shall contain the loss payable endorsement in the interest of and in the form satisfactory to Bank Woori.*
- b. *The Company shall not (without reasonable prior written notification to Bank Woori and provided that no Event of Default continues or that may reasonably arise as the consequence thereof):*
 - i. *Sell, transfer, rent, lease out or release in other manners all of its assets or any part of this Agreement and Collateral Documents.*
 - ii. *Change the capital structure, except for the objective of increasing capital from the retained profit or new subscriptions of the existing shareholders or the percentage of the respective shares ownership.*
 - iii. *Provide coverage or compensation for loan to any parties.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp134.539. Pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp135.900. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp138.168. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp132.271.

**9) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk ("BPD Jateng")
PT PPAF**

Pada tanggal 17 November 2017, PT PPAF dan BPD Jateng menandatangani Perjanjian KUP Modal Kerja No. Akta 38 di hadapan Notaris Dini Handanayatie, S.H. dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 11,5% efektif per tahun yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan BPD Jateng. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 17 November 2022.

PT PPAF menyerahkan jaminan kepada BPD Jateng berupa pengikatan jaminan fidusia atas daftar piutang yang dijamin kolektibilitas lancar minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada BPD Jateng.

PT PPAF diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan kondisi keuangan sebagai berikut:

1. *Gearing ratio* maksimum 9 kali;
2. Tingkat NPF di atas 90 hari maksimum 5% dari piutang bersih;
3. *Financing Asset Ratio* (FAR) minimum 40%;
4. Rasio Modal Sendiri - Modal Disetor (MSMD) minimum 50%;
5. Rasio penyertaan Modal (PEYT) maksimum 40%;
6. Rasio likuiditas minimum 1 kali.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020. Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp131.895. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp27.415. Jumlah pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp42.185. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp117.125.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction

The balance as of December 31, 2020 is Rp134,539. The total disbursement during the year is amounting to Rp135,900. The payment during the year is amounting to Rp138,168. The balance as of December 31, 2021 is Rp132,271.

**9) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk ("BPD Jateng")
PT PPAF**

On November 17, 2017, PT PPAF and BPD Jateng signed the Working Capital KUP Agreement No. Deed 38, drawn before Notary Dini Handanayatie, S.H., with a maximum loan amounted to Rp75,000 and bears an interest rate at 11.5% effective per annum which is subject to change at any time according to the provisions of BPD Jateng. The credit term is 60 months from the date of signing until November 17, 2022.

PT PPAF provides the collateral to BPD Jateng in the form of fiduciary collateral binding on the list of receivables guaranteed with the current collectability of minimum 110% of the principal of credit facilities to BPD Jateng.

PT PPAF shall comply with several restrictions to maintain their financial condition as follows:

1. *Gearing ratio* of maximum 9 times;
2. NPF level of above 90 days maximum 5% of net receivables;
3. *Financing Asset Ratio* (FAR) minimum 40%;
4. *Equity Ratio* - Paid-up Capital (MSMD) minimum 50%;
5. *Capital subscription ratio* (PEYT) maximum 40%;
6. *Liquidity ratio* minimum 1 time.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction.

The balance as of December 31, 2020 is Rp131,895. The total disbursement during the year is amounting to Rp27,415. The payment during the year is amounting to Rp42,185. The balance as of December 31, 2021 is Rp117,125.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

10) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI")

Perusahaan

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 21 Oktober 2021 di hadapan Notaris Surjadi S.H., M.K., M.M., M.H., perusahaan menandatangani perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja *Withdrawal* dengan Bank BRI dengan *plafond* Rp250.000 diperpanjang waktunya sampai dengan tanggal 24 Juli 2022. Tingkat suku bunga kredit 9.25% dan dikenakan *Upfront Fee* 0.25% dan *Servicing Fee* 0.25%.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memenuhi pembatasan keuangan yang dipersyaratkan oleh bank. Perusahaan telah mengirimkan surat permohonan *waiver* kepada Bank atas tidak terpenuhinya rasio keuangan yang dipersyaratkan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menerima tanggapan dari Pihak Bank dan Pihak Bank belum menyampaikan ketidaksetujuannya atas permohonan *waiver* tersebut. Pada 31 Desember 2020 Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp84.759. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp42.288. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp84.788. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp42.259.

PT PPAF

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 08 tanggal 13 Juli 2018, PT PPAF memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Sewa Pembiayaan (*Leasing*) dari Bank BRI dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp125.000. yang bersifat *non revolving* dengan suku bunga kredit sebesar 10,25% per tahun. Jangka waktu kredit adalah 60 bulan dihitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023. Atas pinjaman ini PT PPAF memberikan jaminan pengikatan jaminan fidusia atas tagihan lancar senilai 110%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

10) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI")

The Company

Based on the Addendum to the Credit Agreement Number 44 dated October 21, 2021 drawn before Notary Surjadi S.H., M.K., M.M., M.H., the company signed an extension of the *Withdrawal Working Capital Credit Agreement* with Bank BRI with a *plafond* of Rp. 250,000, extended until July 24, 2022. The loan interest rate is at 9.25% and subject to 0.25% *Upfront Fee* and 0.25% *Servicing Fee*.

As of December 31, 2021, the Company did not meet the required financial covenants from banks. the Company has sent waiver letters to Banks in relation to the breaches of financial ratio covenants as required. As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Company has not received a response from the Bank and the Bank has not yet conveyed its disapproval of the waiver request. As of December 31, 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction.

The balance as of December 31, 2020 is Rp84,759. The total disbursement during the year is amounting to Rp42,288. The payment during the year is amounting to Rp84,788. The balance as of December 31, 2021 is Rp42,259.

PT PPAF

Based on the Deed of Agreement No. 08 dated July 13, 2018, PT PPAF obtained the *Working Capital Credit Facility for Leasing* from Bank BRI at maximum loan amounting to Rp125,000. which is *non revolving* with the loan interest rate of 10.25% per annum. The credit term is 60 months starting from July 13, 2018 until July 12, 2023. For this loan, PT PPAF provides the *fiduciary collateral* for current claims of 110%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PPAF diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan kondisi keuangan sebagai berikut:

1. Tidak mengalami kolektabilitas 2/3/4/5 di Bank BRI dan Bank lain;
2. Tidak terdapat tunggakan pembayaran dengan angsuran pokok maupun bunga atas piutang debitur yang dibiayai dana Bank BRI;
3. *Gearing ratio* maksimal 8 kali;
4. *Non Performing Financing* atas piutang yang dibiayai Bank BRI dan atau piutang jumlah milik debitur >3%.

PT PPAF diwajibkan untuk memenuhi pembatasan keuangan tertentu di dalam perjanjian pinjaman-pinjaman di atas. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT PPAF tidak memenuhi pembatasan keuangan yang dipersyaratkan oleh bank. PT PPAF telah mengirimkan surat permohonan *waiver* kepada Bank atas tidak terpenuhinya rasio keuangan yang dipersyaratkan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, PT PPAF belum menerima tanggapan dari Pihak Bank dan Pihak Bank belum menyampaikan ketidaksetujuannya atas permohonan *waiver* tersebut.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.604. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp38.000. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp33.086. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.518.

**11) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("Bank BNI")
Perusahaan**

Berdasarkan akta perjanjian No.061/BIN/PK/2020 tanggal 24 April 2020 telah ditandatangani Perjanjian Kredit *Cash Collateral Credit* antara Perusahaan dan Bank BNI dengan permohonan Fasilitas pagu kredit pinjaman sebesar Rp200.000. Jaminan kredit atas Fasilitas pinjaman tersebut adalah Deposito Berjangka dengan waktu 12 bulan yang diblokir di bank dan diikat secara Gadai untuk kepentingan bank serta dilengkapi dengan surat kuasa pemblokiran dan pencairan deposito dibawah tangan (Catatan 13).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PPAF shall comply with several restrictions to maintain its financial condition as follows:

1. Not experiencing collectability of 2/3/4/5 at Bank BRI and other Banks;
2. No overdue in payment with principal or interest installment on the Debtor's receivables financed by the funds from Bank BRI;
3. *Gearing ratio* maximum 8 times;
4. *Non Performing Financing* on receivables financed by Bank BRI and/or total receivables owned by the debtor >3%.

PT PPAF are required to comply with certain financial covenants under the terms of the loan agreements. As of December 31, 2021, PT PPAF did not meet the required financial covenants from banks. PT PPAF has sent waiver letters to Banks in relation to the breaches of financial ratio covenants as required. As of the issuance date of the consolidated financial statements, PT PPAF has not received a response from the Bank and the Bank has not yet conveyed its disapproval of the waiver request.

The balance as of December 31, 2020 is Rp54,604. The total disbursement during the year is amounting to Rp38,000. The payment during the year is amounting to Rp33,086. The balance as of December 31, 2021 is Rp59,518.

**11) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("Bank BNI")
Company**

Based on the agreement deed No.061/BIN/PK/2020 dated April 24, 2020, the Collateral Credit Cash Credit Agreement has been signed between the Company and Bank BNI with the application for plafond facility of Rp200,000. The credit collateral for the loan facility is Time Deposit with term of 12 restricted months which is blocked at the bank and bound by Pledge in the interest of the bank and equipped with the power of attorney for blocking and disbursing deposits privately made (Note 13).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (*Cash Collateral Credit*) No.(1) 061/BIN/PK/2020 telah dilakukan perubahan Perjanjian Kredit. Fasilitas Kredit diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo 24 April 2021 sampai dengan 23 April 2022. Bunga dikenakan 0.95% di atas suku bunga deposito Rupiah Penerima Kredit yang dijaminan sebesar Rp200.000. Biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp5.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.993. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp421.862. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp296.764. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp148.091.

PT NK

- 1) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/023 tanggal 20 Januari 2021, PT NK mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dari Bank BNI, dengan rincian sebagai berikut:

KMK Transaksional

- a. Pagu kredit sebesar Rp375.000.
- b. Tingkat suku bunga 9,25%
- c. Jangka Waktu:
 - Pagu kredit: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2022. Sesuai dengan surat No. BIN/2.1/023 tanggal 22 Januari 2021, fasilitas pinjaman telah diperpanjang sampai 20 Januari 2022;
 - Realisasi Kredit: Maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak.

KMK Revolving

- a. Pagu kredit sebesar Rp50.000.
- b. Jangka Waktu: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2022.
- c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk keperluan operasional.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the Agreement on Changes in Credit Agreement (*Cash Collateral Credit*) No.(1) 061/BIN/PK/2020, several changes in Credit Agreement has been made. Credit Facility is extended for 12 months from the maturity date of April 24, 2021 to April 23, 2022. Interest is charged at 0.95% above the deposit rate of Rupiah Credit Recipients guaranteed was amounting Rp200,000. The administration fee is Rp5.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction

The balance as of December 31, 2020 is Rp22,993. The total disbursement during the year is amounting to Rp421,862. The payment during the year is amounting to Rp296,764. The balance as of December 31, 2021 is Rp148,091.

PT NK

- 1) Based on letter No. BIN/2.1/023 dated January 20, 2021, the Company obtained a extension of credit facility from Bank BNI, with the details are as follows:

KMK Transactional

- a. Maximum credit limit is amounting to Rp375,000;
- b. Interest rate at 9,25%
- c. Period:
 - Credit limit: 12 months from the due date of the facility, namely from Januari 21, 2021 to January 20, 2022. In accordance with letter No. BIN / 2.1 /023 dated January 20, 2021, the loan facility has been extended until January 20, 2022.
 - Credit realization: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract.

KMK Revolving

- a. Maximum limit is amounting to Rp50.000;
- b. Period: 12 months starting January 21, 2021 until January 20, 2022.
- c. The purpose: additional working capital for the company operating necessities.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Non Cash Loan

- a. Pagu kredit sebesar Rp2.675.000;
- b. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2022. Sesuai dengan surat No. BIN/2.1/023 tanggal 20 Januari 2021, fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 20 Januari 2022.
- c. Jaminan dikaitkan jaminan KMK revolving.

Jaminan berupa:

- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Brigjend Sudiarto No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Jateng di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama PT NK (Catatan 17);
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama PT NK (Catatan 17);
- Tanah/bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama PT NK (Catatan 17);
- Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama PT NK (Catatan 17);
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jatim di atas SHGB No. 2 atas nama PT NK (Catatan 17).
- Tanah/bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197/Mangasa) atas nama PT NK (Catatan 17);
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama PT NK (Catatan 17);
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama PT NK (Catatan 17);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Non Cash Loan

- a. Credit limit amounted to Rp2,675,000;
- b. The period is 12 months since January 21, 2021 until January 20, 2022. Based on the letter No. BIN/2.1/023 dated January 20, 2021, the loan facility was extended until January 20, 2022.
- c. Collateral is related to revolving KMK collateral.

Collaterals:

- Land/office buildings and warehouse on Jl. Pedurungan No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Central Java on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of PT NK (Note 17);
- Land/house building at Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya Municipality, East Java with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 in favor of PT NK (Note 17);
- Land/building at Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung Municipality, Lampung with SHGB No. 05 in favor of PT NK (Note 17);
- Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatra with SHGB No. 546 in favor of PT NK (Note 17);
- Land/office building and warehouse at Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, East Java above SHGB No. 2 in favor of PT NK (Note 17);
- Land/buildings for residential houses and warehouses located at Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, South Sulawesi above SHGB No. 20005/Manuruki (formerly 4197/Mangasa) in favor of PT NK (Note 17);
- Land/house building at Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya above SHGB No. 798/Gurabesi (formerly No. 508/Gurabesi) in favor of PT NK (Note 17);
- Land/office building and warehouse at Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi, Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya above SHGB No. 599 in favor of PT NK (Note 17);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah/bangunan gedung kantor pusat di Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur di atas SHGB No.36 atas nama PT NK (Catatan 17).
- 2) Berdasarkan Surat No. BIN/2.3/108/R tanggal 10 Mei 2019, PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari Bank BNI sebagai berikut:
 - a. Pagu kredit sebesar Rp175.000;
 - b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket 1 (MYC);
 - c. Jangka Waktu: 45 (empat puluh lima) bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit;
 - d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.
 - 3) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/105/R tanggal 13 April 2020, PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari Bank BNI sebagai berikut:
 - a. Pagu kredit sebesar Rp123.818;
 - b. Tujuan penggunaan: tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Batang Asai Paket I Kabupaten Sorolangun (MYC);
 - c. Jangka Waktu: 21 (dua puluh satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit;
 - d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.
 - 4) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/188/R tanggal 02 Juni 2020, PT NK mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari Bank BNI sebagai berikut:
 - a. Pagu kredit sebesar Rp156.000;
 - b. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan *Spilway* Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek (MYC);
 - c. Jangka Waktu: 19 (sembilan belas) bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit;
 - d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.
 - 5) Berdasarkan Surat No. KPS3/2.1/315/R tanggal 06 September 2021 Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:
 - a. Pagu kredit sebesar Rp 45.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Land/building for head office building at Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, East Jakarta above SHGB No.36 in favor of PT NK (Note 17).
- 2) Based on the Letter No. BIN/2.3/108/R dated 10 May 2019, PT NK obtained the Transactional KMK Facility from Bank BNI as follows:
 - a. Credit limit amounted to Rp175,000;
 - b. Objective of use: Additional working capital for the Construction Project of Rukoh Dam of Pidie District Package 1 (MYC);
 - c. Term: 45 (forty-five) months as of the Credit Agreement;
 - d. Collateral: Receivables on the project financed will be tied to the cession and related to the current facility.
 - 3) Based on Based on the letter No. BIN/2.1/105/R dated April 13, 2020, PT NK obtained Transactional KMK Facility from Bank BNI are as follows:
 - a. Credit limit amounted to Rp123,818;
 - b. Objective of use: additional working capital of Constrction Project of Irrigation Network DI. Batang Asai Package I Sorolangun District (MYC);
 - c. Term: 21 (twenty-one) months as of the Credit Agreement;
 - d. Collateral: Receivables on the project being financed will be tied to the cession and related to to the current facility.
 - 4) Based on the Letter No. BIN/2.1/188/R dated June 2, 2020, PT NK received the Transactional KMK Facility from Bank BNI are as follows:
 - a. Credit limit amounted to Rp156,000;
 - b. Objective of use: Additional working capital for Tugu Dam Spillway Construction Project in Trenggalek District (MYC);
 - c. Term: 19 (nineteen) months as of the Credit Agreement;
 - d. Collateral: Receivables on the project being financed will be tied to the cession and related to the current facility.
 - 5) Based on Letter No. KPS3/2.1/315/R dated September 6, 2021. The Company obtained the Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, as follows:
 - a. Credit limit of Rp45,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- b. Tujuan penggunaan: Modal kerja Proyek Pembangunan *Underpass* Sriwijaya Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- c. Jangka Waktu: 5 bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit ;
- d. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan tidak memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar adalah Rp359.818. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp2.760.037. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp3.054.855. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.000.

12) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("PT SMI")

PT NK

Berdasarkan surat yang diterbitkan No. S-452/SMI/DPI/0621 tanggal 22 Juni 2021, PT NK mendapatkan kredit modal kerja dari PT SMI melalui Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* Fasilitas Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan.

- a. Pagu kredit sebesar Rp200.000 (Jumlah Fasilitas Pembayaran);
- b. Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai berikut:
 - Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket – II) di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03-AS/KONT/SNVT PB NT I/904/2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - Proyek Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk (Paket I) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/KONT/SNVT PB NT I/38/2020 tanggal 23 Januari 2020;
 - Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA KM. 4+200 S/D KM.6+800 Dan Pembangunan BH.37 Dan Penataan Emplasemen ST. Batu Tulis Antara Batu Tulis – Ciomas Lintas Bogor – Sukabumi, berdasarkan Surat Perjanjian No.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- b. Purpose of use: Working capital of the Sriwijaya *Underpass* Development Project, Baros Village, Central Cimahi District, Cimahi City;
- c. Term: 5 months from the date of the Credit Agreement;
- d. Collateral: Receivables on the project being financed will be tied to the *cessie* and linked to the current facility.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction

The balance as of December 31, 2020 is Rp359,818. The total disbursement during the year is amounting to Rp2,760,037. The payment during the year is amounting to Rp3,054,855. The balance as of December 31, 2021 is Rp65,000.

12) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("PT SMI")

PT NK

Based on the credit agreement No. S-452/SMI/DPI/0621 dated June 22, 2021, PT NK obtained the working capital loans from PT SMI through the *Revolving Working Capital Financing Facility*, the *Financing Facility* and *Financing Agreement*.

- a. Maximum credit limit Rp200,000 (total financing facility);
- b. Purposes of working capital is to carry out the construction of infrastructure projects as follows:
 - Sila Beringin Dam Construction Project (Package – II) in Sumbawa District, West Nusa Tenggara Province, based on Unit Price Contract Agreement No. HK.02.03-US/KONT/SNVT PB NT I/904/2018 dated December 31 2018;
 - Tiu Suntuk Dam Construction Project (Package I) in Sumbawa Barat District, West Nusa Tenggara based on Unit Price Contract Agreement No. HK.02.03/KONT/SNVT PB NT I/38/2020 dated January 23, 2020;
 - KM Double Track Construction Project. 4+200 to KM.6+800 and the construction of BH.37 and the arrangement of the ST. Slate Between Slate – Ciomas Lintas Bogor – Sukabumi, based on the Agreement No. PL.107/8/JGBC.01/PPK-

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- PL.107/8/JGBC.01/ PPK-BSP/BTP-JABAR/VIII-20 tanggal 18 Agustus 2020;
- Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket III di Kabupaten Oku Selatan, berdasarkan Surat Perjanjian No. 01/SP/Bend.II/PB-Ah/2019 tanggal 16 Oktober 2018;
 - Proyek-proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sesuai POJK No. 46/POJK.05/2020 tanggal 27 Oktober 2020, berikut perubahannya.
- c. Jangka Waktu: 30 bulan sejak 27 Juni 2021 s/d 27 Desember 2023;
- d. Tingkat suku bunga 8,75%;
- e. Jaminan berupa jaminan yang sesuai dipersyaratkan oleh Kreditur dalam Fasilitas Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Tanah dan bangunan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama PT NK dengan luas tanah sebesar 5.170 m² yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara (Catatan 17);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.442 m² yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 17);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 20019/Losari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 966 m² yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan) (Catatan 17);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 601/Sukarami atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.619 m² yang terletak di Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan) (Catatan 17);
 - Tanah dan bangunan SHGB No. 22/Neglasari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 17);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- BSP/BTP-JABAR/VIII-20 dated August 18, 2020;
- The Tiga Dihaji Dam Construction Project Package III in South Oku Regency, based on the Letter of Agreement No. 01/SP/Bend.II/PB-Ah/2019 dated October 16, 2018;
 - Other infrastructure projects financed from APBN funds and in accordance with POJK No. 46/POJK.05/2020 dated 27 October 2020, following the amendments.
- c. Term: 30 months starting from June 27, 2021 to December 27, 2023;
- d. Interest rate at 8,75%;
- e. Collateral in the form of guarantees in accordance with the requirements of the creditors in this financing facilities including but not limited to:
- Land and building SHGB No. 366/Harjosari II in favor of PT NK at land area of 5,170 sqm located at Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kec. Amplas Medan, Medan, North Sumatra (Note 17);
 - Land and building SHGB No. 118/Harjosari II in favor of PT NK at land area of 1,442 sqm located at Jl. Village/Lorong IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan Municipality, North Sumatra (Note 17);
 - Land and building SHGB No. 20019/Losari in favor of PT NK at land area of 966 sqm located at Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, District. Ujung Pandang, Makassar Municipality, South Sulawesi) (Note 17);
 - Land and building SHGB No. 601/Sukarami in favor of PT NK at land area of 1,619 sqm located in Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Palembang Municipality, South Sumatra) (Note 17);
 - Land and building SHGB No. 22/Neglasari in favor of PT NK at land area of 1,085 sqm located at Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung Municipality, West Java (Note 17);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Tanah dan bangunan SHGB No. 23/Neglasari atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.085 m² yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat (Catatan 17);
- Tanah dan bangunan SHGB No. 00023/Besusu Tengah atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.548 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 17);
- Tanah dan bangunan SHGB No. 00022/Besusu Tengah atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.078 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 17);
- Tanah dan bangunan SHGB No. 25/Besusu atas nama PT NK dengan luas tanah sebesar 1.169 m² yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 17);
- Tagihan/piutang (sisa termin) atas proyek yang dibiayai dan akan dilakukan pengikatan awal secara Fidusia minimal sebesar 150% dari Jumlah Fasilitas Pembiayaan. Selanjutnya nilai tagihan/piutang (sisa termin) dijaga minimal 150% dari sisa saldo pinjaman Fasilitas Pembiayaan;
- Pembayaran utang Pokok Fasilitas Pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi Kerja atau pemilik proyek infrastruktur (*bouwheer*) atau berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp188.200. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp201.437. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp209.637. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp180.000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Land and building SHGB No. 23/Neglasari in favor of PT NK at land area of 1,085 sqm located at Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung Municipality, West Java (Note 17);
- Land and building SHGB No. 00023/Besusu Tengah in favor of PT NK at land area of 1,548 sqm located in Kel. Basusu Tengah. Kec. Palu Timur Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 17);
- Land and building SHGB No. 00022/Besusu Tengah in favor of PT NK at land area of 1,078 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. East Palu Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 17);
- Land and building SHGB No. 25/Besusu in favor of PT NK at land area of 1,169 sqm located in Kel. Basusu Tengah Kec. East Palu Kab. Dongkala, Central Sulawesi (Note 17);
- Receivables/receivables (remaining terms) for the project being financed and for which initial fiduciary binding will be carried out at minimum 150% of total Financing Facility. Subsequently, the value of invoices/receivables (remaining terms) is maintained at least 150% of the outstanding Financing Facility;
- Principal of payment financing facility is conducted no later than at the of expiry of the contractual agreements between the debtor and employer or the owner of the infrastructure projects or the expiry of the period of financing facility.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction

The balance as of December 31, 2020 is Rp188,200. The total disbursement during the year is amounting to Rp201,437. The payment during the year is amounting to Rp209,637. The balance as of December 31, 2021 is Rp180,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

13) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")

Perusahaan

Berdasarkan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No. 01 hari Jum'at tanggal 5 November 2021 di hadapan Notaris Nenny Yusni Hendriani, S.H., Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank BJB dengan bentuk dan sifat kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C) Terbatas adalah *Revolving* dengan *plafond* maksimum Rp200.000. Jangka waktu Kredit Modal Kerja termasuk perpanjangannya adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Awal yaitu tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2022.

Sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit, Perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan antara lain sebagai berikut:

a. Menyampaikan kepada Bank BJB:

- i. Laporan keuangan tahunan *audited* yang paling lambat diterima Bank BJB 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
- ii. Laporan keuangan *unaudited* setiap triwulan dan paling lambat diterima Bank BJB 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
- iii. Laporan bulanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan dalam bentuk *hardcopy* yang terdiri atas:
 - (a) daftar piutang yang dibiayai oleh Bank BJB dimana dalam daftar tersebut memuat *checklist* atas pemenuhan kriteria jenis piutang yang dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit ini dan nilainya tidak kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari sisa saldo pinjaman Fasilitas Kredit per posisi akhir bulan sebelumnya dan disertai surat pernyataan yang menyatakan bahwa piutang sebagaimana Daftar Piutang sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - (b) Laporan portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
 - (c) Realisasi pembiayaan investasi baru yang mencantumkan nama nasabah, nominal pembiayaan, objek pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

13) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")

The Company

Based on Addendum II (Second) Credit Agreement No. 01 Friday, November 5, 2021, drawn before Notary Nenny Yusni Hendriani, S.H., the Company signed a Credit Agreement with Bank BJB with the form and nature of credit Working Capital Account (R/C) Limited is Revolving with a maximum limit amounting to Rp 200,000. The term of the Working Capital Credit including its extension is 36 months from the date of signing the Initial Credit Agreement, which is November 6, 2019 until November 6, 2022.

In accordance with the requirements in the credit agreement, the Company is required submit to report as follows:

a. Deliver to Bank BJB:

- i. Audited annual financial statement lastly received by Bank BJB not later than 180 (one hundred eighty) Calendar Days after the expiry of the reporting period;
- ii. Unaudited financial statement by quarterly and lastly received by Bank BJB 60 (sixty) Calendar Days after the expiry of the reporting period;
- iii. Monthly report with not later than 30 (thirty) days after the expiry of the reporting month in form of *hardcopy* consisting of:
 - (a) List of receivables financed by Bank BJB wherein the list contains the checklist for the fulfillment of the criteria of receivables type required in this Credit Facility and the value is not less than 125% (one hundred twenty-five percent) of the outstanding Credit Facility per position at the end of the previous month and furnished with the statement stating that the receivables as contained in the List of Receivables are in accordance with the actual condition;
 - (b) Report on overall financing portfolio.
 - (c) Realization of new investment financing mentioning the name of customer, the nominal of financing, the financing object and financing period;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- (d) Laporan *write off* dan pengambilalihan agunan secara keseluruhan;
- (e) Sisa saldo pinjaman di bank dan atau lembaga keuangan lainnya.
- b. Menyediakan dana dalam Rekening Pinjaman atau Operasional Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit;
- c. Menyerahkan salinan perubahan Anggaran Dasar dan perpanjangan perizinan perusahaan (apabila telah jatuh tempo) paling lambat diserahkan kepada Bank 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo;
- d. Memperoleh, memiliki atau memenuhi ijin-ijin dan syarat-syarat yang diperlukan serta mempertahankan keberlakuan ijin-ijin tersebut, baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menjaga/memelihara dengan baik kualitas dan nilai barang-barang jaminan kredit sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan;
- f. Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank BJB paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik Perusahaan sendiri (*sub ordinate loan*);
 - ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman/hutang dari pihak lain, kecuali fasilitas pinjaman yang akan digunakan dalam rangka kegiatan usaha Perusahaan;
 - iii. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan acara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun komisaris) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Pemerintah Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham mayoritas;
- g. Menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan serta mengikuti/tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- (d) Report on *write off* and taking over of the collateral entirely;
- (e) Outstanding loan with the bank and or other financial institutions.
- b. Provide funds in the Company's Loan or Operational Account not later than the payment date as stipulated in the Credit Agreement;
- c. Submit the copy of amendment to Articles of Association and the extension of the company's permit (if already due) within not later than 3 (three) months as of the due date;
- d. Obtain, have or fulfill the permits and requirements required as well as maintain the validity of the permits, both currently existing and arising in the future in accordance with the prevailing provisions;
- e. Keep/maintain well the quality and value of the credit collateral goods in accordance with the collateral binding agreement;
- f. As long as the Credit Agreement is still in progress, the Company shall notify Bank BJB in writing within not later than 30 (thirty) Calendar Days in taking the following acts:
 - i. Pay the debts to shareholders/owners of the Company (*sub-ordinate loan*);
 - ii. Obtain the credit facilities or loan/debt from the other parties, except for loan facilities that will be used for the Company's business activities;
 - iii. Hold merger, acquisition, sell the assets except in normal business transaction, convening or summoning the annual general meeting or extraordinary general meeting of shareholders by changing the capital and or changing the name of management (board of directors or board commissioners) as well as recording the delivery/transfer of shares, provided that in case of change of shareholders, the Government of Republic of Indonesia remains becoming the majority shareholder;
- g. Run its business properly and continuously as well as comply with/adhere to the law provisions applicable in Indonesia;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- h. Menjaga agunan dengan baik secara kualitas maupun nilainya;
- i. Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Jumlah sisa saldo pembiayaan di luar pembiayaan Dana Talangan dan pembiayaan restrukturisasi dan revitalisasi dengan tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Jumlah sisa saldo pembiayaan di luar pembiayaan Dana Talangan dan pembiayaan Restrukturisasi dan Revitalisasi maksimal 5%;
 - b. *Current Ratio* (CR) di atas 1 kali dengan perhitungan jumlah aset lancar di atas 1 kali;
 - c. *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 1,5 kali dengan perhitungan jumlah ekuitas maksimal 1,5 kali;
 - d. Rasio antara lembaga keuangan dengan tujuan penggunaan piutang pembiayaan/ sisa saldo pinjaman perbankan minimal sebesar 125% sesuai dengan nilai penjaminan piutang kepada Bank BJB.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020 Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Nihil. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp38.277. Pembayaran pada tahun berjalan adalah sebesar Rp38.277. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil.

PT NK

Berdasarkan Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Nindya Karya (Persero) No. 245/KKO-KO2/2021 tanggal 5 April 2021, PT NK mendapatkan pinjaman Bank BJB, sebagai berikut:

- a. Jenis fasilitas kredit yaitu Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) *Standby Loan switchable* fasilitas *non cash loan*. Fasilitas KMKK *standby loan switchable* fasilitas *Non Cash Loan* dengan sifat *Revolving* dengan proyek yang berbeda. Sifat fasilitas *Non Cash Loan II* adalah *Uncommitted, Advised, Revolving*;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- h. *Maintain collateral both in quality and value;*
- i. *The Company shall maintain the financial covenants during the Credit term reflected in the financial statement as follows:*
 - a. *Total financing outstanding beyond the Bailout Funds financing and restructuring and revitalization financing with principal and/or interest overdue of more than 30 (thirty) Calendar Days. Total outstanding financing beyond the Bailout Funds and Restructuring and Revitalization financing maximum amounting to 5%;*
 - b. *Current Ratio (CR) above 1 time with the calculation of total current assets of above 1 time;*
 - c. *Debt Equity Ratio (DER) maximum 1.5 times at calculation of total equity of maximum 1.5 times;*
 - d. *The ratio between financial institution with the objective of using financing receivables/ outstanding bank loan shall be minimum 125% in accordance with the receivables collateral value to Bank BJB.*

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restrictions.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restrictions.

The balance as of December 31, 2020 is Nil. The total disbursement during the year is amounting to Rp38,277. The payment during the year is amounting to Rp38,277. The balance as of December 31, 2021 is Nil.

PT NK

Based on the Letter of Offer for Extension of Credit Facility PT Nindya Karya (Persero) No. 245/KKO-KO2/2021 dated April 5, 2021, PT NK obtained a loan from Bank BJB, as follows:

- a. *Type of credit facility is Working Capital Credit Constructions facility Standby Loan switchable non cash loan. The KMKK standby loan switchable facility is a Non Cash Loan facility with a Revolving nature with different projects. The nature of the Non Cash Loan II facility is uncommitted, Advised, Revolving;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- b. Tujuan:
Modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN. Fasilitas *Non Cash Loan* dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, dan *Supply Chain Financing* (SCF);
- c. Pagu kredit sebesar Rp700.000, dengan rincian Fasilitas *Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000, yang dapat ditarik untuk pembiayaan proyek sedangkan Fasilitas *Non Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000;
- d. Jangka Waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2021 sampai dengan 11 April 2022;
- e. Jaminan:
Piutang proyek diikat secara fidusia sebesar 125% dari pagu kredit pinjaman.
- f. Tingkat suku bunga 8,5%-9%

Pada 31 Desember 2021 dan 2020. Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp217.400. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp272.500. Jumlah pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp343.900. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp146.000.

**14) PT Bank MNC Internasional Tbk ("Bank MNC")
PT PPAF**

Pada tanggal 19 Maret 2021 PT PPAF telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 65 yang dibuat di hadapan Notaris Edison Jingga, S.H., M.H., PT PPAF telah mendapatkan fasilitas Kredit Pinjaman sebesar Rp50.000. dengan tingkat bunga 11,5%. Sifat fasilitas Pinjaman bersifat *revolving* dan Jangka waktu Pinjaman adalah 12 bulan.

PT PPAF menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 100% dari pembiayaan bank. PPAF diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan mempertahankan tingkat piutang macet 90 hari maksimum 5%.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020. Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- b. Purposes:
Working capital of construction and procurement services for the project which the funds originate from APBN/APBD/SOE. Disposition for such transactions, such as SKBDN, L/C, Bank Bond, and Supply Chain Financing (SCF);
- c. *Maximum credit limit is at Rp700,000, with the details maximum of Cash Loan Facility at Rp350,000, which could be drawn for project financing, while the maximum of Non-Cash Loan Facility at Rp350,000;*
- d. *Time Period*
12 (twelve) months since the previous credit's due date on April 11, 2021 until April 11, 2022;
- e. *Collaterals:*
Project receivables are tied in fiduciary terms of 125% of the credit limit.
- f. *Interest rate at 8,5%-9%*

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction.

The balance as of December 31, 2020 is Rp217,400. The total disbursement during the year is amounting to Rp272,500. The payment during the year is amounting to Rp343,900. The balance as of December 31, 2021 is Rp146,000.

**14) PT Bank MNC Internasional Tbk ("Bank MNC")
PT PPAF**

On March 19, 2021, PT PPAF has signed the Deed of Credit Agreement Number 65, drawn before Notary Edison Jingga, S.H., M.H., PT PPAF has obtained a Loan Credit facility amounting to Rp50,000. with an interest rate of 11.5%. The nature of the loan facility is revolving in nature and the loan term is 12 months.

PT PPAF submits a collateral to the bank in the form of a fiduciary collateral at least 100% of the bank's financing. PT PPAF is required to comply with financial condition constraints by maintaining a maximum 90 day bad debt rate of 5%.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has fulfilled the required ratio and restriction.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Nihil. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp48.439. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp1.900. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp46.539.

**15) PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
PT NK**

Berdasarkan Surat No. 291/IBD/EXT/21 tanggal 16 September 2021. Perusahaan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Pinjaman *Money Market*;
 - a. Pagu kredit sebesar Rp100.000;
 - b. Tujuan penggunaan: modal kerja umum;
 - c. Jangka Waktu: sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
 - d. Jaminan: Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
- 2) Fasilitas Pembukaan SKBDN/ Bank Garansi
 - a. Pagu kredit sebesar Rp150.000
 - b. Tujuan penggunaan: Merealisasi pembelian bahan baku, bahan pendukung produksi dan suku cadang;
 - c. Jangka Waktu: sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
 - d. Jaminan: Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
- 3) Fasilitas Transaksi Valuta Asing
 - a. Pagu kredit sebesar USD2.
 - b. Tujuan penggunaan: Memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung-nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional;
 - c. Jangka waktu sampai dengan 7 Oktober 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Nihil. Jumlah pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp350.000. Pembayaran selama tahun berjalan adalah sebesar Rp350.000. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil.

**16) Bank Bukopin Tbk
Perusahaan**

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 18306/DBW/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, di hadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum., Perusahaan mendapatkan persetujuan Fasilitas Kredit Modal

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as of December 31, 2020 is Nil. The total disbursement during the year is amounting to Rp48,439. The payment during the year is amounting to Rp1,900. The balance as of December 31, 2021 is Rp46,539.

**15) PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
PT NK**

Based on Letter No. 291/IBD/EXT/21 dated September 16, 2021. The Company obtained facilities as follows:

- 1) *Money Market Loan Facility*;
 - a. Maximum credit limit is Rp100,000;
 - b. The purpose: general working capital
 - c. Period: until July 7, 2022;
 - d. Collateral: Fiduciary of an existing project contract with a value of at least 100% of Principal.
- 2) *SKBDN Facility/Bank Collateral Facility*
 - a. Maximum credit limit is amounting to Rp150,000
 - b. The purpose: Realizing the purchase of raw materials, production support and spare parts;
 - c. Period: until July 7, 2022;
 - d. Collateral: Fiduciary on existing project contracts with a minimum value of 100% of the Loan Principal.
- 3) *Foreign Exchange Transaction Facility*:
 - a. Maximum credit limit is amounting to USD2.
 - b. The purpose: operational transaction for foreign exchange to fulfill the foreign exchange transaction needs and hedging which arising from the operational activities;
 - c. Period: until October 7, 2022.

The balance as of December 31, 2020 is Nil. The total disbursement during the year is amounting to Rp350,000. The payment during the year is amounting to Rp350,000. The balance as of December 31, 2021 is Nil.

**16) Bank Bukopin Tbk
The Company**

Based on the Letter of Approval for the Provision of Credit Facilities Number 18306/DBW/X/2021 dated October 12, 2021, drawn before Notary Desman, S.H., M.Hum., The company obtained approval for the Working

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kerja dari Bank Bukopin dengan *Plafond* USD 75.000.000 dengan sifat Kredit *Uncommitted* dengan jangka waktu 36 bulan + 24 bulan sejak tanggal pengikatan kredit. Tingkat suku bunga 3.9% dengan provisi 0.4% dan *Commitment Fee* sebesar 0.5%.

Selama jangka waktu fasilitas kredit Perusahaan harus mematuhi persyaratan keuangan antara lain :

- Menjaga rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) maksimum sebesar 5x (500%).
- Menjaga modal minimum sebesar Rp6.000.000.
- Menjaga NPF (*Non Performing Financing*) maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.81 hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di hadapan notaris Desman, S.H., M. Hum., Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Bahwa berdasarkan perjanjian Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berupa Kredit Modal Kerja dengan *plafond* sebesar USD75.000. Bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja adalah Reguler dengan sifat kredit berkomitmen.

Tingkat suku bunga terhadap pinjaman sebesar 3,9% efektif per tahun. Kewajiban bunga dibayar setiap 3 bulan berjalan dan kewajiban pokok dibayar selambat-lambatnya pada saat fasilitas kredit jatuh tempo. Biaya provisi atas pinjaman sebesar 0,4%. Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal pengikatan kredit 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2024. Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya pinjaman tersebut tidak terjadi pelanggaran atas isi Perjanjian maka jangka waktu pinjaman akan diperpanjang untuk jangka waktu 24 bulan lagi sehingga jangka waktu pinjaman menjadi efektif 60 bulan yaitu tanggal 22 Oktober 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

Saldo pada awal tahun 2021 adalah sebesar Nihil. Total pencairan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp425.040. Pembayaran pada tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Efek atas selisih kurs adalah sebesar Rp3.030. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp428.070.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Capital Credit Facility from Bank Bukopin with a limit of USD 75,000,000. With the nature of Uncommitted Credit with a period of 36 months + 24 months from the date of credit binding. Interest rate at 3.9% with 0.4% provision and 0.5% Commitment Fee.

During the term of the credit facility, the Company must comply with financial requirements, including:

- Maintain the maximum DER (Debt to Equity Ratio) ratio of 5x (500%).*
- Maintain a minimum capital of Rp 6,000,000.*
- Maintain a maximum NPF (Non-Performing Financing) of 5%.*

Based on Credit Agreement No.81 Friday, October 22, 2021, drawn before a notary Desman, S.H., M.Hum., Credit Agreement Company with PT Bank KB Bukopin Tbk. Whereas based on the agreement, the Company obtained a credit facility in the form of a Working Capital Credit with a limit of USD75.000. The form of the Working Capital Credit Facility is Regular with committed credit nature.

The interest rate on loans is at 3.9% effective per annum. Interest is payable every 3 months and the principal is paid at the latest when the credit facility is due. Provision fee for credit is at 0.4%. The credit period is 36 months from the date of the credit agreement, October 22, 2021, until October 22, 2024. If there is no violation of the agreement until the date of the credit agreement, the credit period will be extended for another 24 months, the credit term will become effective 60 month which is October 22, 2026.

As of December 31, 2021, the Company has fulfilled the required ratio and restriction

The balance as of December 31, 2020 is Nil. Total disbursement during the year is amounting to Rp425,040. Payments in the current year is amounting to Nil. Effect on foreign exchange is amounting to Rp3.030. The balance as of December 31, 2021 is Rp428,070.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

28. Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga

28. Gross Amount Due to Third Parties

	2021 Rp	2020 Rp	
Divisi Infrastruktur II	342,056	--	Infrastructure Division 2
Divisi Gedung	271,161	--	Building Division
Divisi Infrastruktur I	127,852	--	Infrastructure Division 1
Divisi EPC	153,835	106,085	EPC Division
PT Nindya Beton	65,917	59,891	PT Nindya Beton
Kantor Pusat	3,265	4,347	Head Office
Divisi Properti	2,448	813	Division of Property
Divisi Peralatan	1,034	3,362	Equipment Division
PT Nindya Tirta Unggul	13	--	PT Nindya Tirta Unggul
Ex. Wilayah I	--	210,227	Ex. Region I
Ex. Wilayah II	--	143,217	Ex. Region II
Ex. Wilayah III	--	109,525	Ex. Region III
Ex. Wilayah IV	--	161,286	Ex. Region IV
Ex. Wilayah V	--	130,719	Ex. Region V
Jumlah	967,581	929,472	Total

Utang bruto kepada pihak ketiga merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Gross amount due to third parties represent amount outstanding from third parties or project workers regarding to the field work.

Sejak 1 Januari 2021, PT NK melakukan perubahan nama per masing-masing Wilayah menjadi Divisi.

Since January 1, 2021, PT NK has changed the name per each Region to become the Division.

29. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek

29. Short-term Advances from Customers

	2021 Rp	2020 Rp	
Pihak Berelasi:			Related Parties:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16,670	4,122	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	192	8,746	PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1000)	633	720	Others (each below Rp 1000)
Jumlah Pihak Berelasi	17,495	13,588	Total Related Parties
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	113,707	82,555	The Ministry of Public Works and Public Housing
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	5,876	6,804	Pesisir Barat District Government
PT Karya Unggulan Gemilang	1,310	1,310	PT Karya Unggulan Gemilang
Kementerian Pemuda dan Olahraga	--	25,771	Ministry of Youth and Sports
Dinas Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	--	12,856	North Sulawesi Provincial Settlement Infrastructure Office
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Dharmasraya	--	6,864	Public Works and Spatial Planning Office of Dharmasraya Regency
Bank Indonesia	--	3,627	Bank Indonesia
PT Bhandha Graha Reksa (Persero)	--	2,533	PT Bhandha Graha Reksa (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	4,887	9,204	Others (Each below Rp1.000)
Jumlah Pihak Ketiga	125,780	151,524	Total Third Parties
Jumlah Uang Muka Pemberi Kerja	143,275	165,112	Total Advances From Customers

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi akan dikompensasi dengan kemajuan pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan kemajuan di lapangan.

Advances for project implementation received from the employer in accordance with the construction work contract will be compensated with the progress of the work and payment terms in accordance with progress in the field.

30. Beban Akruai dan Utang Lain-lain

30. Accruals and Other Payables

	2021 Rp	2020 Rp	
Akrual Biaya Apresiasi Karyawan	56,456	31,957	Accrued Employee Appreciation
Utang Ventura Bersama	55,151	20,173	Joint Venture Payables
Akrual Biaya Tantiem	35,209	23,193	Accrued Tantiem
Akrual Bunga Bank	25,006	10,157	Accrued Bank Loan and Bonds
Utang Bagi Hasil Sukuk	21,752	--	Sukuk Revenue Sharing
Akrual Beban Kantor dan Umum	17,140	1,049	Accrued Office and General Expenses
Utang Operasional Proyek	13,086	7,130	Projects Operational Payables
Akrual Bunga MTN dan Obligasi	12,493	16,932	Accrued Interest MTN and Bonds
Utang Lain-lain	108,226	61,993	Other Payables
Jumlah	344,519	172,584	Total

Utang operasional proyek merupakan utang atas beban ventura bersama yang terjadi atas pinjaman-pinjaman sementara ke proyek-proyek yang dikerjasamakan. Utang-utang ini akan diperhitungkan dengan laba ataupun kerugian yang dialami oleh masing-masing ventura bersama, setelah proyek dinyatakan selesai dan ventura bersama ditutup.

Projects operational payables constitute the joint venture charges occurring on the temporary loans to the project cooperated. These payables will be calculated with the profit or loss experienced by each joint venture, after the project is declared complete and the joint venture is closed.

Akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The accrual of tantiem fees and costs for employees' appreciation is the recording of costs on accrual basis based on the budget already approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

31. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

31. Employee Benefit Liabilities

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan			Employee Benefit Liabilities
PT NK	20,136	9,933	PT NK
PT PPA	1,652	1,717	PT PPA
PT PPAK	485	796	PT PPAK
PT NB	896	658	PT NB
PT PPAF	796	--	PT PPAF
Jumlah	23,965	13,104	Total

Grup memberikan imbalan pasca kerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

The Group provides the minimum of post-employment benefit to entitled employees based on Labor Law No. 13 regarding Manpower.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Grup menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pascakerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Grup dengan DPLK BRI Nomor: PPJ-39/PPA/1111 dan No. B.51-DPLK/11/2011 yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2011. Bagi 3 orang karyawan yang tidak diikutkan dalam program tersebut, Perusahaan telah menghitung liabilitas imbalan sebesar Rp2.187. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat realisasi pembayaran imbalan pascakerja karyawan sebesar Rp535, sehingga per 31 Desember 2021 saldo liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan sebesar Rp1.652.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pascakerja Grup per 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh konsultan aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan, berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)* dengan asumsi sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Dasar Perhitungan		
Tingkat kenaikan gaji	3% - 8% per tahun/ year	
Tingkat bunga	7.4% - 7.6% per tahun/ year	6.9% - 7.3% per tahun/ year
Usia pensiun	56 tahun/ year	
Tabel mortalita	Tabel Mortalita IV - 2019/ Mortality Table IV - 2019	Tabel Mortalita III - 2011/ Mortality Table III - 2011
Metode perhitungan	Projected Unit Credit	

Basic Calculation
Salary Increase Rate
Interest Rate
Retirement age
Mortality table

Method of calculation

Perusahaan

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Biaya Jasa Kini	470	1,515
Beban Bunga	--	--
Hasil Aset Program yang Diharapkan	--	--
Jumlah Beban Imbalan Kerja	470	1,515

Current Service Cost
Interest Cost
Expected Results of Program Assets
Total Post-employment Benefits

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1,652	1,717
Penambahan Cadangan	--	--
Liabilitas Imbalan Kerja	1,652	1,717

Present Value of Defined Benefit Obligation
Additional of Reserve
Post-employment Benefits Liability

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Group has organized the defined contribution program for post-employment benefits of employees working with Pension Fund ("Pension Fund") Financial Institution BRI, according to the Cooperation Agreement between the Group and Pension Fund BRI Number: PPJ-39/PPA/1111 and No. B.51-DPLK/11/2011 signed on November 21, 2011. For 3 employees who are not included in the program, the Company has calculated the liability for benefits amounted to Rp2,187. As of December 31, 2021, there is a realization of the payment of employee benefits amounting to Rp535, as a result as of December 31, 2021, the balance of the post-employment benefits liability is Rp1,652.

Actuarial valuation post employment benefits of the Group as of December 31, 2021 and 2020 were conducted by the actuarial consulting firm of Muh Imam Basuki and Partners, based on the *Projected Unit Credit Method (PUC Method)*, with assumptions as follows:

The Company

The details of the Company's employee benefit expenses for the current year are as follows:

The details of the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Movement in the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Kewajiban pada Awal Tahun	1,717	939	Beginning Balance of Liabilities
Pembayaran Imbalan Kerja	(535)	(737)	Employee Benefit Payment
Penambahan Cadangan	470	1,515	Additional of Reserves
Liabilitas pada Akhir Tahun	1,652	1,717	Ending Balance of Liabilities

PT NK

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NK adalah sebagai berikut:

PT NK

The details of PT NK's employee benefit expenses for the current year are as follow

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	2,319	2,156	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	14,738	--	Past Service Cost
Beban Bunga	661	3,220	Interest Cost
Hasil Aset Program yang Diharapkan	79	(1,675)	Expected Return on Plan Assets
Jumlah Beban Imbalan Kerja	17,797	3,701	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

The details of PT NK's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	41,967	31,364	Present Value of Defined Benefit Obligation
Nilai Wajar Aset Program	(21,832)	(21,431)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas Imbalan Kerja	20,135	9,933	Post-employment Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NK adalah sebagai berikut:

Movement in PT NK's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	9,933	14,934	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	17,797	3,701	Employee Benefit Expenses
Pembayaran Imbalan Kerja	(1,870)	(3,061)	Benefit Payment
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(3,097)	(4,429)	Other Comprehensive Loss (Income)
Iuran Dana Pensiun/Premi Asuransi	(2,627)	(1,212)	Dues Pension Fund
Liabilitas pada Akhir Tahun	20,136	9,933	Ending Balance of Liabilities

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT PPAF

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAF adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	967	--	Current Service Cost
Beban Bunga	490	--	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	1,457	--	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

PT PPAF

The details of PT PPAF's employee benefit expenses for the current year are as follows:

The details of PT PPAF's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	3,714	--	Present Value of Defined Benefit Obligation
Nilai Wajar Aset Program	(2,918)	--	Fair Value of Program Assets
Liabilitas Imbalan Kerja	796	--	Post-employment Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah sebagai berikut:

Movement in PT PPAF's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Kewajiban pada Awal Tahun	--	--	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	1,457	--	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(221)	--	Other Comprehensive Loss (Income)
Iuran Dana Pensiun / Premi Asuransi	(440)	--	Dues Pension Fund / Insurance Premiums
Liabilitas pada Akhir Tahun	796	--	Ending Balance of Liabilities

PT PPAK

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT PPAK adalah sebagai berikut:

PT PPAK

The details of PT PPAK's employee benefit expenses for the current year are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	195	353	Current Service Cost
Beban Bunga	145	163	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	340	516	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

The details of PT PPAK's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	485	796	Present Value of Defined Benefit Obligation
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	485	796	Total Post-employment Benefit Expense

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

Movement in PT PPAK's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	796	1,025	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	340	516	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	(517)	(602)	Other Comprehensive Loss (Income)
Pembayaran Imbalan Kerja Tahun Berjalan	(134)	(143)	Payment of Employee Benefits for the Current Year
Liabilitas pada Akhir Tahun	485	796	Ending Balance of Liabilities

PT NB

Rincian beban imbalan kerja yang diakui di tahun berjalan milik PT NB adalah sebagai berikut:

PT NB

The details of PT NB's employee benefit expenses for the current year are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	164	166	Current Service Cost
Beban Bunga	51	25	Interest Cost
Dampak Perubahan Manfaat, Kurtailmen dan Penyelesaian	(183)	--	Changes in Benefit, Curtailment and Completion
Jumlah Beban Imbalan Kerja	32	191	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NB adalah sebagai berikut:

The details of PT NB's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	896	658	Present Value of Defined Benefit Obligation
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	896	658	Total Post-employment Benefit Expense

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT NB adalah sebagai berikut:

Movement in PT NB's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	658	344	Beginning Balance of Liabilities
Beban Imbalan Kerja	32	191	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	206	123	Other Comprehensive Loss (Income)
Liabilitas pada Akhir Tahun	896	658	Ending Balance of Liabilities

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek reksadana dan saham, instrumen utang dan lainnya. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek reksadana dan saham dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The defined benefit pension plan typically provides exposure for the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit health care plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has relatively balanced investment in mutual fund and equity securities, and debt instruments and others. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested portion of the plan and equity securities and in debt instruments to leverage the return generated by the fund.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined liabilities are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

32. Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang

32. Long-term Advances from Customers

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi:		
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	6,804	11,063
PT Pupuk Kalimantan Timur	4,139	12,237
Jumlah Pihak Berelasi	10,943	23,300
Pihak Ketiga:		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	169,178	276,009
Kementerian Perhubungan	19,349	13,299
Jumlah Pihak Ketiga	188,527	289,308
Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	199,470	312,608

Related Parties:
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi
PT Pupuk Kalimantan Timur
Total Related Parties

Third Party:
The Ministry of Public Work and Public Housing
The Ministry of Transportation
Total Third Parties
Total Long-Term Contract Advances

Akun ini merupakan saldo uang muka yang telah diterima dari pemberi pekerjaan (*bouwheer*) yang pembayarannya dipotongkan dengan tagihan atas setiap pekerjaan yang telah diselesaikan.

This account represents the advance balance that has been received from the customers (bouwheer), which is deducted with the payment for any work on progress that had been completed.

33. Surat Utang Jangka Menengah

33. Medium-term Notes

	2021 Rp	2020 Rp
Surat Utang Jangka Menengah		
PT PPA	450,000	750,000
Biaya yang dapat diatribusikan	(455)	(1,455)
Jumlah	449,545	748,545

Medium Term Notes
PT PPA
Attributable Cost
Total

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019 No. 1 tanggal 1 November 2019 dari Notaris Lenny Jannis Ishak S.H., Perusahaan menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) dengan cara penawaran terbatas untuk penambahan modal kerja dan/atau *refinancing*. Nilai pokok keseluruhan MTN sebesar Rp750.000, yang terdiri dari Seri A sebesar Rp300.000 dan Seri B sebesar Rp450.000 yang masing-masing akan jatuh tempo pada 8 November 2021 dan 8 November 2022. MTN Seri A dan Seri B dikenakan bunga masing-masing sebesar 10,05% dan 10,30% yang akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal penerbitan MTN.

Perusahaan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai *Arranger* dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau.

Berdasarkan surat dari KSEI No. KSEI-20361/JKU/2021 tanggal 8 November 2021 bahwa Perusahaan telah melakukan pelunasan MTN Seri A sebesar Rp300.000.

The Company

Based on the Deed of Issue of Medium Term Notes I Perusahaan Pengelola Aset of 2019 No. 1 dated November 1, 2019 from Notary Public Lenny Jannis Ishak S.H., The Company issued medium-term debt securities (MTN) through a limited offering for additional working capital and/or refinancing. Total principal value of MTN amounted to Rp750,000, consisting of Series A amounting to Rp300,000 and Series B amounting to Rp450,000 that will due on November 8, 2021 and November 8, 2022, respectively. Series A and Series B MTNs bear interest at 10.05% and at 10.30%, respectively which will be paid by quarterly as of the issue date of MTN.

The Company has appointed PT Danareksa Sekuritas as Arranger and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Monitoring Agent.

Based on a letter from KSEI No. KSEI-20361/JKU/2021 dated November 8, 2021, the Company has paid off MTN Series A amounted to Rp300,000.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

34. Utang Obligasi

	2021 Rp	2020 Rp
Utang Obligasi - Pokok		
Obligasi - Seri A	100,000	100,000
Obligasi - Seri B	345,000	345,000
Obligasi - Seri C	197,100	197,100
Biaya yang dapat diatribusikan	(1,360)	(1,740)
Jumlah Utang Obligasi	640,740	640,360

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perusahaan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp642.100, yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp100.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,95% per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp345.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp197.100 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun, yang berjangka waktu 7 tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A, 19 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B dan 19 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri C.

34. Bonds Payable

Bonds Payable - Principal
Bonds - Series A
Bonds - Series B
Bonds - Series C
Attributable Cost
Total Bonds Payable

In accordance with the provisions contained in the Trustee Agreement, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has been appointed by the Company as the Trustee representing the interests of the Bondholders.

These bonds were issued with the principal amount of Rp642,100, which guaranteed with the full commitment. These bonds were issued scriptless, except for the Jumbo Bond Certificates which were issued in favor of the Indonesian Central Securities Depository.

This Bond provides the option for the public to choose the desired series, i.e. by having 3 (three) Bond series offered as follows:

- Series A** *The Principal Amounting to Series A Bonds amounted to Rp100,000 with fixed interest rate at 9.95% per annum, with term at 3 years as of the Issue Date.*
- Series B** *The Principal Amounting to Series B Bonds amounted to Rp345,000 with fixed interest rate at 10.55% per year, having term of 5 years as of the Issue Date.*
- Series C** *The Principal Amounting to Series C Bonds amounted to Rp197,100 with fixed interest rate at 11.00% per year, having term of 7 years as of the Issue Date.*

These bonds are offered at value of 100% of the principal amounting to the bonds. Bond Interest is paid quarterly, according to the payment date of each Bond Interest. The first Bond Interest payment will be made on December 1, 2020 while the last Bond Interest payment as well as the due date of each Bond is on August 19, 2023 for the Series A Bonds, August 19, 2025 for the Series B Bonds and August 19, 2027 for the Series C Bonds.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-313/PEF-DIR/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perusahaan adalah: idA (Single A). Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 23 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2021 dan telah diperpanjang masa berberlakunya menjadi untuk periode 9 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2022.

Sejak tanggal 8 Desember 2021, Pefindo meningkatkan rating Perusahaan menjadi idAA (Double A) yang berlaku sampai dengan 1 Maret 2022.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The Company has carried out a rating carried out by Pefindo. Based on Pefindo's letter No. RC-313/PEF-DIR/III/2020 dated March 23, 2020, the rating results for the Company's long-term debt securities (Bonds) are: idA (Single A). The rating results are valid for the period from March 23, 2020 to March 23, 2021 and the validity period has been extended to be for the period from March 9, 2021 to March 9, 2022.

Since December 8, 2021, Pefindo has raised the ratings of the Company to become idAA (Double A) valid to March 1, 2022.

35. Utang Sukuk - Neto

	2021 Rp	2020 Rp
Utang Sukuk		
Sukuk Wakalah PT PPA	13,051,069	--
Dikurangi Diskonto yang belum Diamortisasi	(9,916,667)	--
Jumlah Utang Sukuk	3,134,402	--
Investasi pada Sukuk		
Sukuk Mudharabah PT BMI - Diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi	(2,545,858)	--
Jumlah Investasi pada Sukuk	(2,545,858)	--
Jumlah Utang Sukuk - Neto	588,544	--

35. Sukuk Payables - Net

Sukuk Payable
Sukuk Wakalah PT PPA
Less Unamortized Discount
Total Sukuk Payable
Investment in Sukuk
Sukuk Mudharabah PT BMI - Measured at Amortized Acquisition Cost
Total Investment in Sukuk
Total Sukuk Payable - Net

Utang Sukuk

Berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Nomor 19 tanggal 15 November 2021, Perusahaan telah menerbitkan sukuk wakalah dengan nilai penerbitan sukuk Rp3.051.069 dan dengan nilai nominal Rp13.051.069. Jangka waktu sukuk selama 20 tahun dan jatuh tempo sukuk adalah 15 November 2041. Sukuk wakalah ini memiliki imbal hasil indikatif setara 1% (satu persen) per tahun dari akumulasi keuntungan dan nilai penerbitan sukuk sampai dengan tanggal jatuh tempo ("Imbal Hasil") yang akan dibayarkan setiap tahun oleh Perusahaan sebagai penerbit.

Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Perusahaan berbentuk akad Wakalah Bi Al-Istitsmar. Mengacu pada akad tersebut Perusahaan selaku Penerbit Sukuk (Wakil) menerima kuasa dari Pemodal Sukuk (Muwakkil) untuk melakukan kegiatan investasi dan pengembangan harta Pemodal. Dalam akad ini, Perusahaan selaku penerbit akan mengelola dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk ini untuk melakukan beberapa kegiatan usaha antara lain berupa pembiayaan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan kegiatan investasi pada perusahaan kendaraan elektrik.

Sukuk Payable

Based on the Issuance Deed (Akad) of Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Akad number 19 dated November 15, 2021, The Company has issued wakalah sukuk with the issuance value amounted to Rp3,051,069 and a nominal value of Rp13,051,069. The term of the sukuk is 20 years and the maturity date of the sukuk is November 15, 2041. This wakalah sukuk has an indicative yield at 1% (one per cent) per annum from the accumulated profit and the value of the sukuk issuance up to the maturity date ("Yield"), will be paid annually by the Company as Issuer.

The deed used in the issuance of the Sukuk of the Company is in the form of Wakalah Bi Al-Istitsmar Akad. Based on this deed, the Company as Issuer (Wakil) has been granted by the sukuk Investor (Muwakkil) to carry out investment activities and the development of Investors' assets. In this deed, the Company as the issuer will manage the funds obtained from the issuance of this Sukuk to carry out several business activities, such as financing provision to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and investment activities in electric vehicle companies.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai tercatat Utang Sukuk pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.134.402. Amortisasi selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp83.333 telah dicatat sebagai beban pada laba rugi. Selanjutnya utang sukuk ini disebut sebagai sukuk PPA.

Investasi pada Sukuk

Berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk Mudharabah nomor 20 tanggal 15 November 2021, Perusahaan telah membeli sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("PT BMI") dengan nilai penerbitan sukuk sebesar Rp2.440.856 dan dengan nilai nominal Rp15.041.101. Investasi pada sukuk mudharabah tersebut dicatat sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dimana Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual baik berupa imbal hasil maupun pokok dari Sukuk ini. Sukuk Mudharabah ini memiliki jangka waktu selama 20 Tahun dan akan dilunasi pada saat jatuh tempo pada tanggal 15 November 2041 sebesar nilai nominal sukuk. Sukuk mudharabah ini memiliki nisbah bagi hasil untuk pemegang sukuk sebesar 50,72% dari usaha pembiayaan yang menjadi porsi penerbit dalam mata uang Rupiah, setara imbal hasil tunai indikatif 1% per tahun dari nilai nominal.

Nilai tercatat Investasi Sukuk per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.545.858. Amortisasi selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal per 31 Desember 2021 senilai Rp105.002 telah dicatat sebagai pendapatan pada laba rugi. Selanjutnya investasi pada sukuk ini disebut sebagai sukuk BMI.

Berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam No. 30 tanggal 9 September 2021 terkait Perjanjian Restrukturisasi Induk antara Perusahaan, BMI, dan Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH"), para pihak telah sepakat atas proyeksi nilai nominal akrual Sukuk PPA dan Sukuk BMI sampai pada tahun ke 20 sejak tanggal penerbitan disajikan sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The carrying amount of Sukuk Payable as of December 31, 2021, is Rp3,134,402. Amortization of the difference between the acquisition cost and nominal value as of December 31, 2021, amounting to Rp83,333 has been recorded as expense in profit or loss. Furthermore, this sukuk payable is referred as sukuk PPA.

Investment in Sukuk

Based on the Issuance Deed of Sukuk Mudharabah Akad number 20 dated November 15, 2021, The Company has purchased sukuk Mudharabah issued by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("PT BMI") with the issuance value amounted to Rp2,440,856 and nominal value amounted to Rp15,041,101. The investment in sukuk mudharabah has been recorded as a financial asset measured at amortized cost. The Company's objective is to obtain contractual cash flows in yields and principals from the Sukuk. This Mudharabah Sukuk has a tenor of 20 years and will be repaid at maturity on November 15, 2041, at the nominal value of the Sukuk. This mudharabah Sukuk has a nisba profit sharing percentage at 50,72% from the financing proceed which is the Sukuk issuer portion in Rupiah, equivalent to an indicative cash yield at 1% per annum based on the nominal value of Sukuk.

The carrying amount of Sukuk Investment as of December 31, 2021, is Rp2,545,858. Amortization from the difference between the acquisition cost and nominal value as of December 31, 2021, amounting to Rp105,002 has been recorded as income in profit or loss. Furthermore, this investment in sukuk is referred as sukuk BMI.

Based on the Notarial Deed of Ashoya Ratam No. 30 dated September 9, 2021, regarding the Master Restructuring Agreement between the Company, BMI, and the Hajj Financial Management Agency ("BPKH"), the parties have agreed with the projected nominal accrual value of Sukuk PPA and Sukuk BMI which due on the 20 years from the date of issuance is as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Ilustrasi Indikatif Sukuk PPA/ Indicative Illustration of Sukuk PPA				
Tahun /Year	Nilai Nominal /Nominal Value	Nisbah/Nisba	Jumlah/ Total	Imbal Hasil Tunai Indikatif/ Indicative Cash Return
1	3,051,069	100,000	3,151,069	130,511
2	3,151,069	100,000	3,251,069	130,511
3	3,251,069	100,000	3,351,069	130,511
4	3,351,069	100,000	3,451,069	130,511
5	3,451,069	100,000	3,551,069	130,511
6	3,551,069	100,000	3,651,069	130,511
7	3,651,069	100,000	3,751,069	130,511
8	3,751,069	300,000	4,051,069	130,511
9	4,051,069	300,000	4,351,069	130,511
10	4,351,069	300,000	4,651,069	130,511
11	4,651,069	300,000	4,951,069	130,511
12	4,951,069	300,000	5,251,069	130,511
13	5,251,069	300,000	5,551,069	130,511
14	5,551,069	300,000	5,851,069	130,511
15	5,851,069	1,200,000	7,051,069	130,511
16	7,051,069	1,200,000	8,251,069	130,511
17	8,251,069	1,200,000	9,451,069	130,511
18	9,451,069	1,200,000	10,651,069	130,511
19	10,651,069	1,200,000	11,851,069	130,511
20	11,851,069	1,200,000	13,051,069	130,511

Perusahaan mencatat selisih antara nilai transaksi dan nilai nominal atas utang sukuk dan investasi pada sukuk tersebut mengacu pada PSAK 110: Sukuk dimana sukuk akan diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait. Lalu setelah pengakuan awal, jika jumlah nominal terdapat diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Saling Hapus

Berdasarkan Perjanjian Retensi Sukuk PPA pada tanggal 15 November 2021 BMI selaku pembeli Sukuk PPA dan Perusahaan selaku pembeli sukuk BMI, para pihak telah sepakat atas ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan dapat mengaplikasikan perjumpaan utang atas hak tagihnya kepada PT BMI (PT BMI sebagai penerbit diwajibkan untuk memegang Sukuk PPA sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk) berdasarkan Sukuk BMI dengan kewajiban pembayarannya berdasarkan Sukuk PPA pada tanggal bagi hasil, tanggal jatuh tempo sukuk dan/atau tanggal pengakhiran awal.
- PT BMI dapat mengaplikasikan perjumpaan utang atas hak tagihnya kepada Perusahaan (Perusahaan sebagai penerbit diwajibkan untuk memegang Sukuk BMI sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk) berdasarkan Sukuk PPA dengan kewajiban pembayarannya berdasarkan Sukuk BMI pada tanggal bagi hasil, tanggal jatuh tempo sukuk dan/atau tanggal pengakhiran awal.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Ilustrasi Indikatif Sukuk BMI/ Indicative Illustration of Sukuk BMI				
Tahun /Year	Nilai Nominal /Nominal Value	Nisbah/Nisba	Jumlah/ Total	Imbal Hasil Tunai Indikatif/ Indicative Cash Return
1	2,440,856	181,637	2,622,493	153,542
2	2,622,492	202,838	2,825,330	153,542
3	2,825,330	226,513	3,051,843	153,542
4	3,051,843	252,952	3,304,795	153,542
5	3,304,795	282,477	3,587,272	153,542
6	3,587,273	315,449	3,902,722	153,542
7	3,902,722	352,269	4,254,991	153,542
8	4,254,990	393,386	4,648,376	153,542
9	4,648,377	439,303	5,087,680	153,542
10	5,087,680	490,580	5,578,260	153,542
11	5,578,259	547,841	6,126,100	153,542
12	6,126,100	611,786	6,737,886	153,542
13	6,737,887	683,195	7,421,082	153,542
14	7,421,082	762,939	8,184,021	153,542
15	8,184,021	851,991	9,036,012	153,542
16	9,036,012	951,437	9,987,449	153,542
17	9,987,449	1,062,491	11,049,940	153,542
18	11,049,940	1,186,507	12,236,447	153,542
19	12,236,447	1,324,999	13,561,446	153,542
20	13,561,446	1,479,655	15,041,101	153,542

The Company records the difference between the transaction value and the nominal value of the sukuk payable and investment in sukuk in accordance with PSAK 110: Sukuk, sukuk will be recognized at the nominal value, adjusted for premium or discount, and related transaction costs. Then after the initial recognition, if the nominal amount is discounted, the difference is amortized on a straight-line basis over the term of the Sukuk.

Offsetting

Based on the PPA Sukuk Retention Agreement dated November 15, 2021, BMI as the buyer of sukuk PPA and the Company as the buyer of Sukuk BMI, both parties have agreed on the following terms:

- The Company may apply to offset its rights to PT BMI (PT BMI as the issuer is required to hold the Sukuk PPA until the Sukuk maturity date) based on the Sukuk BMI with its payment obligations under the Sukuk PPA on the profit-sharing date, the maturity date of the Sukuk and/or the early termination date.
- PT BMI may apply to offset its rights to the Company (the Company is required to hold the Sukuk PPA until the Sukuk maturity date) based on the Sukuk PPA with its payment obligations under the Sukuk BMI on the profit-sharing date, the maturity date of the Sukuk and/or the early termination date.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Dengan adanya hak hukum yang dapat dipaksakan untuk saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan maka Perusahaan menyajikan investasi pada sukuk dan utang sukuk yang dimiliki oleh perusahaan secara neto.

With the legal rights that is enforceable for the financial assets and financial liabilities to be offset, the Company presents the investment in sukuk and sukuk payables owned by the Company on a net basis.

36. Ekuitas

a. Modal Saham

Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.952.623 yang mewakili 5.952.623 lembar saham (Catatan 1).

Modal saham yang ditempatkan per tanggal 31 Desember 2021 seluruhnya berjumlah Rp5.952.623 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, terdiri dari:

	2021 Rp	
Lembar Saham/ Shares		
Setoran modal awal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan telah dituangkan dalam akta Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak SH yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.	300,000	
Setoran Modal Pemerintah RI sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud eks BPPN yang telah ditetapkan nilainya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.32/KMK.06/2007 tanggal 31 Juli 2007 masing-masing sebesar Rp 1.205 dan Rp 153.	1,358	
Setoran Modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari Laba Bersih Tahun 2007 sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 8 Mei 2008.	1	
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008.	1,500,000	
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009.	1,000,000	
Setoran modal Pemerintah RI yang dialokasikan dari cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA Nomor:SK-366/MOU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.	1	
Pengurangan penyertaan modal Negara RI berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait dengan pengalihan saham PT PPA pada PT Waskita Karya (99%) kepada Pemerintah RI.	(804,672)	
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.	1,000,000	
Penambahan penyertaan modal Negara RI yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara RI pada 5 Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 135/KMK.06/2021 tanggal 1 April 2021.	2,955,935	
Jumlah Modal Saham	5,952,623	

36. Shareholders' Equity

a. Share Capital

The Company is wholly owned by the Republic of Indonesia. The issued and fully paid-up capital by the Republic of Indonesia on December 31, 2021 was amounting to Rp5,952,623 representing 5,952,623 shares (Note 1).

Shares capital issued and fully paid as of December 31, 2021 amounting to Rp5,952,623 have been fully paid by the Republic of Indonesia, consists of:

	2020 Rp	
Lembar Saham/ Shares		
Initial capital contribution by Government Regulation no. 10 year 2004 juncto Decree of the Minister of Finance No.82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 and has stated under deed No. 7 dated February 27, 2004 drawn before Notary Lenny Janis Ishak S.H., which have been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 on March 9, 2004.	300,000	
Capital from the Government of Republic of Indonesia in accordance with Article 2 Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 February 27, 2004 in form of fixed assets and intangible assets of ex-BPPN which were pre determined value based on the Minister of Finance Decree No.32/KMK.06/2007 July 31, 2007 amounted to Rp 1,205 and Rp 153, respectively.	1,358	
Capital from the Government of Republic of Indonesia were allocated from Net Income year 2007 in accordance with the General Meeting of Shareholders of PT PPA concerning the Approval of Annual Report for Year 2007 dated May 8, 2008.	1	
Additional capital from the Government of Republic of Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 78 year 2009.	1,500,000	
Additional capital from the Government of Republic of Indonesia from the 2009 state budget in accordance with the Government Regulation No 77 year 2009.	1,000,000	
Paid up the Capital from Government of Republic of Indonesia allocated capital of the Company pursuant to the general reserve Minister of SOEs as GMS PT PPA Number: SK-366/MOU/2012 dated October 9, 2012.	1	
RI State equity reduction in Government of Republic of Indonesia based on Regulation Number 86 Year 2012 Date October 20, 2012 relating to the transfer of the shares of PT PPA on PT Waskita Karya (99%) to the Government of Indonesia.	(804,672)	
Additional capital from the Government of Republic of Indonesia from the 2015.	1,000,000	
Additional capital from the Government of the Republic of Indonesia originating from the transfer of all shares owned by the Government of the Republic of Indonesia to 5 companies in accordance with the Decree of the Minister of Finance Number: 135 / KMK.06 /2021 dated 1 April 2021.	2,955,935	
Total Shares Capital	2,996,688	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Akta No. 22 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2021 memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan yang semula berjumlah Rp5.000.000 menjadi sebesar Rp20.000.000;
2. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 2.955.935 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima) saham yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia;
3. Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp2.955.935 yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah di PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia, sehingga modal disetor/ditempatkan Perusahaan menjadi sebesar Rp5.952.623.

Perubahan ini telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 26 Juni 2021.

b. Tambahan Modal Disetor

Dalam rangka restrukturisasi PT NK yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Nindya Karya (Persero) Tanggal 13 Agustus 2012, dilakukan penambahan modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya sebesar Rp499.997.421.000 (angka penuh) melalui penerbitan saham baru seri B dengan nominal per saham sebesar Rp84.882 (angka penuh).

Saham baru diambil bagian oleh Perusahaan untuk melaksanakan program restrukturisasi PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on Deed No. 22 from Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta on June 10, 2021, decided and agreed to the following matters:

1. An increase in the Company's Authorized Capital from Rp5,000,000 to Rp20,000,000;
2. Approved the issuance of shares in savings as many as 2,955,935 (two million nine hundred fifty five thousand nine hundred and thirty five) shares which are entirely subscribed by the Republic of Indonesia;
3. The addition of the State capital of Republic of Indonesia into the Company's share capital amounting to Rp2,955,935 originating from the transfer of all Government-owned shares in PT Indosat Tbk, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, and PT Socfin Indonesia, thus the paid-up/issued capital of the Company amounted to Rp5,952,623.

These changes were recorded by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, Directorate General of General Legal Administration on June 26, 2021.

b. Additional Paid in Capital

PT NK restructurization was established by Government Regulation Number 11 of 1972 regarding the Transfer of the State Building Company Nindya Karya into a Limited Liability Company (Persero) as stated in the Government Regulation of Republic of Indonesia Number 69 of 2012 regarding Changes in the State Share Ownership Structure through the Issue of New Shares At PT Nindya Karya (Persero) On August 13, 2012, PT Nindya Karya (Persero) capital was added by the Company amounted to Rp499,997,421,000 (full amount) through the issue of new series B shares with par per share amounted to Rp84,882 (full amount).

The new shares were subscribed by the Company to carry out PT NK's restructuring program.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pengambilan bagian saham oleh Perusahaan mengakibatkan kepemilikan saham Negara secara langsung pada PT NK menjadi 1% (satu persen) dan kepemilikan saham Perusahaan pada PT NK menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Perusahaan yang menerima bisnis tersebut, dalam PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Pada tahun 2018, Perusahaan melalui anak usahanya PPAK melepas bisnis dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali yaitu PT Pratama Persada Airbone ke PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survei Udara Penas (Persero) dan sesuai PSAK 38 mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Jumlah yang masuk kedalam pos tambahan modal disetor dari penerimaan bisnis dan pelepasan bisnis tersebut masing-masing sebesar Rp305.768 dan Rp2.291 sehingga jumlah menjadi sebesar Rp308.059.

c. Dividen dan Cadangan Umum

UU Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.40/2007 yang diterbitkan bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 29 Juni 2020 para pemegang saham memutuskan tidak ada pembagian dividen dan seluruh laba bersih tahun berjalan sebagai saldo laba.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The acquisition of shares by the Company resulted in the State's direct share ownership in PT NK being 1% (one percent) and the Company's share ownership in PT NK being 99% (ninety-nine percent).

The company that obtain the business, in PSAK 38 business combination of entities under common control recognize the difference amount between to the consideration transferred and the recorded value of each business transaction of entities under common control in equity and presents it as additional paid-up capital.

In 2018, the Company through its subsidiary PPAK divested its business in the disposal of the business of entities under common control, which are PT Pratama Persada Airbone to PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survei Udara Penas (Persero) and in accordance with PSAK 38 recognize the difference between the benefits received and the recorded value of the business disposed of in equity and presents the equity of its additional paid-up capital entry.

The amount included in the additional paid-up capital account from business receipts and business disposals was amounting to respectively Rp305,768 and Rp2,291, to total Rp308,059.

c. Dividend and General Reserves

Law on Limited Liability Company of Republic of Indonesia No.1/1995 issued in March 1995 and has been amended by the Law No. 40/2007 issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve of net income of at least 20% of total issued and paid-up capital. There is no time limit for forming the reserve.

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated June 29, 2020 the shareholders decided that there would be no dividend distribution and all net income for the year as retained earnings.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

**d. Saldo Laba yang Belum Ditentukan
Penggunaannya**

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	312,384	1,993,292
Realisasi Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	1,248	--
Laba Bersih	164,468	105,341
Dampak Penerapan Awal PSAK Baru	--	(1,783,169)
Dampak Konsolidasian Entitas Anak	--	(27,296)
Penghasilan Komprehensif Lainnya	3,331	4,760
Reklasifikasi atas Surplus Revaluasi Aset Tetap	94,946	19,456
Saldo Akhir	576,377	312,384

d. Unappropriate Retained Earnings

Beginning Balance
Realized Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Net Income
The Impact of Initial Implementation of New PSAK
The impact of Consolidation
Other Comprehensive Income
Impact of Inter-Company Elimination
Ending Balance

e. Kepentingan Non Pengendali

	2021 Rp	2020 Rp
Saldo Awal	3,078	6,867
Tambahan Modal Disetor oleh Kepentingan Non Pengendali	825	--
Atribusi Laba Tahun Berjalan	657	428
Atribusi Penghasilan Komprehensif Lain	136	42
Dampak Dekonsolidasi	--	(4,259)
Jumlah	4,696	3,078

e. Non-Controlling Interest

Beginning Balance
Additional Paid in Capital by Non-Controlling Interest
Attribution of Income for the Year
Attribution of Other Comprehensive Income
The Impact of Deconsolidation
Total

f. Surplus Revaluasi Aset Tetap

Dalam rangka penyajian informasi keuangan yang lebih obyektif terkait dengan kemampuan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, dalam tahun 2021 PT NK telah melakukan revaluasi atas aset tanah. Revaluasi aset tanah tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya yang disampaikan pada tanggal 21 September 2021.

Tidak ada dampak perpajakan dari revaluasi aset tanah tersebut, karena revaluasi ini tidak memenuhi persyaratan penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan untuk tujuan perpajakan sehingga secara fiskal, tidak ada perubahan atas nilai buku aset.

f. Revaluation Surplus of Fixed Assets

In order to enhance the objectivity on the presentation of financial information related with company's capability in performing it's activity, in 2021 PT NK has revaluated its land asset. Revaluation of land asset performed by Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo dan Rekan as stated in their report which submitted on September 21, 2021.

There were no tax impact regarding those revaluation, since it does not meet the Company's fixed asset revaluation criteria for taxation purpose, there were no changes in asset's book value.

37. Pendapatan Usaha

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan Jasa Konstruksi	4,259,315	3,496,210
Pendapatan Hasil Investasi	2,025,952	492,371
Pinjaman yang Diberikan	117,443	184,829
Pendapatan Manufaktur	103,462	96,549
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi	34,466	46,243
Pendapatan Properti	30,039	17,487
Pendapatan Investasi Infrastruktur	14,429	--
Pendapatan Sewa Alat	8,119	6,237
Pendapatan Penggantian Biaya	4,424	2,700
Keuntungan/(Kerugian) atas Investasi pada Efek Ekuitas	(61,991)	55,218
Jumlah	6,535,658	4,397,844

37. Revenues

Construction Service Revenues
Revenue from Investment
Revenue from Interest and Provision of Loans
Manufacturing Income
Revenue from Consultation Fee
Property Income
Infrastructure Investment Income
Equipment Rental Income
Revenue from Reimbursable Cost
Gain/ (Loss) on Equity Securities Effect Investment
Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- a. Dari hasil kegiatan investasi, Grup memperoleh hasil sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Dividen Tunai	1,450,814	93
Hasil Investasi Bunga	322,577	424,165
Bunga Deposito Berjangka	168,067	54,173
Pendapatan Right Issue PT Bukopin Tbk	84,494	--
Kerugian Perubahan Nilai Wajar Saham	--	13,940
Jumlah	2,025,952	492,371

Cash Dividend
Interest income from investment
Interest on Time Deposits
Gain on Right Issue PT Bukopin Tbk
Loss on Fair Value of Shares
Total

- b. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan periode 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
PT Perum Perumnas (Persero)	14,915	7,276
PT Istaka Karya (Persero)	4,015	9,094
PT Industri Sandang Nasional (Persero)	5,188	4,119
PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	5,327	3,278
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)	4,160	4,250
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2,136	2,013
PT Barata Indonesia	1,910	--
PT Aviati Pariwisata Indonesia	--	--
d/h PT Survey Udara Penas (Persero)	887	2,942
PT Boma Bisma Indra (Persero)	790	1,650
PT Merpati Nusantara Airlines	408	--
PT Indah Karya (Persero)	279	--
PT Industri Gelas (Persero)	161	--
PT Albai Indonesia	14	--
PT Dirgantara Indonesia	--	13,409
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	77,253	136,798
Jumlah	117,443	184,829

PT Perum Perumnas (Persero)
PT Istaka Karya (Persero)
PT Industri Sandang Nasional (Persero)
PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Barata Indonesia
PT Aviati Pariwisata Indonesia
d/h PT Survey Udara Penas (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Merpati Nusantara Airlines
PT Indah Karya (Persero)
PT Industri Gelas (Persero)
PT Albai Indonesia
PT Dirgantara Indonesia
Others (less than Rp 1,000)
Total

- c. Pendapatan imbalan jasa konsultasi periode enam bulan yang berakhir pada 31 Desember 2021 terbesar terdiri dari Pendapatan *Monitoring Fee* kepada PT Widodo Makmur Unggas sebesar Rp1.500, PT Polytama Propindo sebesar Rp225, PT Matoa Kidung Bahtera sebesar Rp158 dan kepada PT Matoa Kidung Sejahtera sebesar Rp155.

- c. The largest revenues from consultation fee for the six month periods ended December 31, 2021 consist of Monitoring Fee Income to PT Widodo Makmur Unggas amounting to Rp1,500, PT Polytama Propindo amounting to Rp225, to PT Matoa Kidung Bahtera amounting to Rp158 and to PT Matoa Kidung Sejahtera amounting to Rp155.

- d. Kerugian perubahan nilai wajar atas 7 Entitas PPAK adalah sebesar Rp8.140 (Catatan 21)

- d. Loss on investment equity securities of 7 PPAK investment entities amounted to Rp8,140 (Note 21).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- e. Pelanggan berikut memiliki pendapatan jasa konstruksi yang melebihi 10% pada tahun 2021 dan 2020:

- e. The following customer represent more than 10% of the construction services revenues in 2021 and 2020:

	2021 Rp	2020 Rp	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2,711,206	1,838,032	The Ministry of Public Work and Public Housing

38. Beban Usaha

38. Operating Expenses

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Usaha			Operating Expense
Beban Proyek:			Constructions Services:
Bahan Baku	1,865,349	1,207,243	Raw Materials
Subkontraktor	1,018,838	1,129,402	Subcontractors
Overhead Proyek	420,212	346,308	Project Overhead
Upah	366,577	339,059	Wages
Peralatan	341,855	229,240	Equipments
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 22)	20,829	25,847	Property and Equipment Depreciation (Note 22)
Biaya Pinjaman	16,170	19,661	Financial Charges
Pemeliharaan, Listrik dan Air	3,647	2,559	Maintenance, Electricity and Water
Subjumlah	4,053,477	3,299,319	Subtotal
Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai	1,170,777	(63,004)	Allowance for Impairment (Recovery)
Beban Bunga	428,582	446,080	Interest Expenses
Pegawai	325,725	295,303	Employee
Jasa Konsultan	58,115	16,136	Consultant Fees
Keperluan Kantor	42,546	38,931	Office Supplies
Penurunan Nilai Wajar Entitas Investasi	37,466	--	Impairment of Fair Value of Investment Entity
Sewa dan Asuransi	33,911	28,093	Rent and Insurance
Investasi	25,343	11,357	Investment
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 22)	14,627	12,582	Property and Equipment Depreciation (Note 22)
Pemasaran dan Penjualan	--	11,009	Sales and Marketing
Perjalanan Dinas	11,032	12,459	Business Travelling
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	7,801	7,343	Employees Benefit - Net
Lain-lain (di bawah Rp 1.000)	158,934	39,002	Others (below Rp 1.000)
Jumlah Beban Usaha	6,368,336	4,154,610	Total Operating Expense

39. Beban Bunga dan Keuangan

39. Interest Expense and Financial Charge

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Bunga	75,601	81,668	Interest Expense
Beban Pajak Bunga Deposito	3,901	2,634	Deposits Interest Tax Expense
Beban Pajak Jasa Giro	95	11	Current Account Service Tax Expense
Beban Administrasi	35	7,476	Administration Expense
Beban Transfer	14	16	Transfer Expense
Jumlah Beban Bunga dan Keuangan	79,646	91,805	Total Interest Expense and Financial Charge

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

40. Bagian Laba Ventura Bersama

40. Share of the Profit in Joint Ventures

	2021 Rp	2020 Rp	
Nindya - Adhi Karya	38,117	25,415	Nindya - Adhi Karya
Nindya - Bina Nusa Sarana	36,193	--	Nindya - Bina Nusa Sarana
Nindya - Modern WT	17,701	11,669	Nindya - Modern WT
Nindya - Bahagia bangunnusa	15,532	20,491	Nindya - Bahagia bangunnusa
Nindya - Surya Mataram Sakti	9,817	--	Nindya - Surya Mataram Sakti
Nindya - MCC - Wika - Waskita	9,018	3,428	Nindya - MCC - Wika - Waskita
Nindya - Abel	6,407	901	Nindya - Abel
Nindya - Damai	6,377	962	Nindya - Damai
Nindya - Bunga Raya Lestari	3,601	210	Nindya - Bunga Raya Lestari
Nindya - Rapi Tirta Treatmino	3,413	5,133	Nindya - Rapi Tirta
Nindya - Bumi Agung	2,849	3,731	Nindya - Bumi Agung
Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya	2,719	8,128	Nindya - Utama Karya - Wijaya Karya
Nindya - Waskita - Jaya Purnama	2,304	4,933	Nindya - Waskita - Jaya Purnama
Nindya - Adhi - Penta	2,150	--	Nindya - Adhi - Penta
Nindya - Citra - Kharisma	1,806	--	Nindya - Citra - Kharisma
Nindya - Passokkorang	1,748	6,694	Nindya - Passokkorang
Nindya - Mettana	1,613	--	Nindya - Mettana
Nindya - Adhi - Basuki	1,295	--	Nindya - Adhi - Basuki
Nindya - Bangun Bejana Baja	1,242	8,718	Nindya - Bangun Bejana Baja
Nindya - Rudy Jaya	--	3,888	Nindya - Rudy Jaya
Nindya - Surya	--	3,880	Nindya - Surya
Nindya - Utama Karya	--	2,872	Nindya - Utama Karya
Nindya - Thamrin - Dwifarita	--	1,277	Nindya - Thamrin - Dwifarita
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	(11,126)	(24,425)	Others (Each below Rp1,000)
Jumlah	152,776	87,905	Total

41. Penghasilan (Beban) Lain-lain

41. Other Income (Expenses)

	2021 Rp	2020 Rp	
Pendapatan Lain-lain			Other Incomes
Pemulihan Piutang	105,125	43,975	Recovery of Receivables
Penerimaan atas Proyek Selesai	5,684	3,030	Revenue from Completed Project
Bunga/Jasa Giro	4,891	26,456	Interest Deposit
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	14,496	9,260	Others (each below Rp1,000)
Sub Jumlah	130,196	82,721	Sub Total
Beban Lain-lain			Others Expense
Beban Penurunan Nilai	(39,327)	(15,809)	Impairment Expenses
Beban Pajak	(30,558)	(2,955)	Tax Expense
Beban atas Proyek Selesai	(21,272)	(25,593)	Expense from Completed Project
Selisih Kurs	(4,018)	--	Different Exchange Rate
Administrasi Bank	(1,357)	--	Decrease in fair value of investment property
Kerugian atas Dampak Dekonsolidasian	--	(41,279)	Losses on the Impact of the Deconsolidation
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	(10,554)	(12,285)	Others (each below Rp1,000)
Sub Jumlah	(107,086)	(97,921)	Sub Total
Jumlah Bersih	23,110	(15,200)	Net Total

42. Laba (Rugi) per saham

42. Earning (Loss) per Share

Laba per saham 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah Rp32.860 dan Rp35.152 (angka penuh).

Earning per share as of December 31, 2021 and 2020 is calculated from income for the year attributable to owners of the parent is amounting to Rp32,860 and Rp35,152 (full amount).

	2021 Rp	2020 Rp	
Laba (Rupiah penuh)	164,467,837,285	105,340,636,040	Income (In full of Rupiah)
Jumlah Lembar Saham	5,005,104	2,996,688	Number of Shares
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh)	32,860	35,152	Basic Earning per Share (In full of Rupiah)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tidak ada potensi dilusi sehingga tidak menghitung laba dilutif.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

There is no potential for dilution so it does not calculate dilutive profit.

43. Beban Pajak Final

	2021 Rp	2020 Rp
Jasa Konstruksi		
Pendapatan Jasa Konstruksi	4,259,315	3,496,210
Pendapatan Jasa Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak	20,875	115,038
Jumlah Pendapatan Jasa Konstruksi	4,238,440	3,381,172
Non Jasa Konstruksi		
Pendapatan Jasa Non Konstruksi	141,620	120,272
Pendapatan Jasa Non Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak Final	121,846	111,628
Jumlah Pendapatan Non Jasa Konstruksi	19,774	8,644
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena Pajak Final	4,238,440	3,381,172
Pendapatan Non Jasa Konstruksi Kena Pajak Final	19,774	8,644
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak Final	4,258,214	3,389,816
Beban Pajak Final Konstruksi		
3% x 2021 : Rp4.238.440	127,153	--
3% x 2020 : Rp3.381.172	--	101,435
Beban Pajak Final Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan		
10% x 2021 : Rp3.183	318	--
10% x 2020 : Rp774	--	77
Beban Pajak Final atas Penjualan Properti		
2.5% x 2021 : Rp16.590	415	--
2.5% x 2020 : Rp7.869	--	197
Jumlah Beban Pajak Final	127,886	101,709

Construction
Construction Income
Construction Non-taxable Income
Construction Total Income
Non-construction
Construction Income
Non-Construction Non-Final taxable Income
Construction Total Income
Construction Final Taxable Income
Non-construction Final Taxable Income
Total Final Taxable Income
Constructions Final Tax Expenses
3% x 2021 : Rp4,238,440
3% x 2020 : Rp3,381,172
Land and Building Rental Final Tax Expenses
10% x 2021 : Rp3,183
10% x 2020 : Rp774
Non Constructions Final Tax Expenses
2.5% x 2021 : Rp16,590
2.5% x 2020 : Rp7,869
Total Final Income Tax Expenses

44. Kontinjensi

PT NK sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. PT NK meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja PT NK.

Per tanggal 31 Desember 2021 perkara hukum yang sedang berjalan antara lain:

1. Piutang kepada PT Buana Risma ("PT BR") adalah sisa tagihan proyek kerjasama pembangunan perumahan Malaka Asri. PT BR sebagai konsultan manajemen proyek pembangunan serta membuat program pemasaran, akan tetapi PT BR telah melampaui batas kewenangannya dengan melakukan penjualan atas rumah dan menerima pembayaran langsung dari pembeli. Namun hasilnya tidak disetorkan kepada PT NK.

44. Contingencies

PT NK is facing several legal cases both in the process of filing a lawsuit and currently waiting for a court verdict or cassation. PT NK believes that the decision of the court or cassation in such cases will not bring material impacts on the financial condition and performance of the PT NK.

Up to December 31, 2021, legal cases in progress, are as follows:

1. *Accounts receivable to PT Buana Risma ("PT BR") is remaining billing of Malacca Asri residential construction cooperation project. PT BR as the projects construction management consultant as well as the creator of marketing program has exceeded its limit by selling home and received direct payment from the buyer. Meanwhile, the payment has not been received by PT NK.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan kesepakatan PT BR mengakui memiliki utang kepada PT NK sebesar Rp3.083 termasuk bunga dan status penyelesaian tagihan saat ini adalah menunggu PT BR melakukan perhitungan kewajiban dan pelepasan hak tanggungan untuk aset yang akan diserahkan kepada PT NK. Perkara ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun).

Tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan, dalam perkara tersebut PT NK sebagai Pihak Penggugat dan PT BR sebagai Tergugat. Putusan menyatakan gugatan PT NK tidak diterima. Sehingga PT NK mengajukan Banding.

Tanggal 19 Juni 2015 terbit putusan Pengadilan Tinggi yang isinya menerima permohonan banding PT NK dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga menyatakan PT BR telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap PT NK dan menghukum PT BR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.083.

Sesuai surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Permohonan Keterangan Inkracht, disampaikan bahwa dalam perkara perdata antara PT NK dan PT BR jika sampai dengan batas waktu yg ditentukan oleh Undang-undang para pihak (Penggugat & Tergugat) tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan PN Jakarta Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto No.131/PDT/2015/PT.DKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the deal, PT BR admits that it has debt to PT NK amounting to Rp3,083 including interest. The current status of the bill is waiting PT BR to calculate liabilities and mortgage waiver for assets which shall be submitted to PT NK. These matters are handled by the Young Attorney General Civil and TUN (Jamdatun).

As of November 13, 2014 the District Court of South Jakarta has determined the verdict that contains PT NK accusation. The verdict stated that the PT NK's lawsuit is not accepted. Thus PT NK decided to fill the appeal.

Then, as of June 19, 2015 the Supreme Court declared the verdict which stated that the Supreme Court had received the appeal of PT NK and issued cancelation of the South Jakarta District Court Verdict. The Supreme Court also stated that PT BR had done a default that caused losses to PT NK and punished PT BR to pay compensation amounting to Rp3,083.

*Based on the letter from South Jakarta District Court Number: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 dated August 30, 2016 about Inkracht Certification Request, stated that the civil case between PT NK and PT BR up to the time limit specified by Law, the parties (Prosecutor & Defendant) would not filled a legal action, then the Sentence of South Jakarta District Court No. No.171/Pdt.G/ 2014PN.Jkt.Sel subject No.131/PDT/2015/PT.DKI has a permanent legal course (*inkracht van gewijsde*).*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Karena tidak ada upaya hukum lagi dari PT BR, dan sebagai tindak lanjut dari putusan PN Jakarta Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PT.DKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), PT NK mengajukan permohonan eksekusi putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, Tanggal 23 Agustus 2017 telah diterbitkan Surat Penetapan Eksekusi Putusan dari Ketua Pengadilan Negeri. Melalui Penetapan Eksekusi Tersebut, PT BR dipanggil sebanyak 2 kali oleh PN Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 PT NK mengajukan permohonan sita dan eksekusi putusan perkara No. 171/PDT.G/2014/PN.JKTSEL juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PT.DKI.

Tanggal 11 Juli 2018, adanya surat dari PN Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Hal: Menindaklanjuti Pengajuan Bukti Pendaftaran Blokir Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 555 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017.

Tanggal 30 Juli 2018, adanya Surat dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat kepada Ketua PN Jakarta Selatan perihal menindaklanjuti pengajuan bukti pendaftaran blokir terhadap Sertipikat HGB No.555 dan Sertipikat SHM No. 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017. Tanggal 21 Januari 2019 terbit pelaksanaan sita eksekusi.

Tanggal 22 April 2019 PT NK telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi oleh KJPP Dolly dan tim Kuasa Hukum untuk melakukan appraisal terhadap asetnya BR dalam rangka penentuan harga limit dari Pengadilan Negeri. Pada tanggal 11 September 2019 telah dilakukan survey terhadap aset PT BR.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Due to no further legal remedies from PT BR, and as a follow up to the South Jakarta DC decision No. 171/Pdt.G/2014PN.Jkt Sel juncto HC Decision No.131/PDT/2015/PT.DKI has legal force still (inkracht van gewijsde), PT NK submitted an application for the execution of the verdict through the South Jakarta District Court. Then, on August 23, 2017, a Decision Letter on the Execution of Decisions has been issued from the Chair of the District Court. Through the Determination of Execution, PT BR was summoned twice by the South Jakarta DC. Then on October 10, 2017 PT NK submitted a petition for seizure and the execution of case decision No. 171/PDT.G/2014/PN.JKTSEL juncto HC Decision No.131/PDT/2015/PT.DKI.

As of July 11, 2018, there was a letter from the South Jakarta District Court to the Head of the West Bandung Regency Land Office, following up on the submission of proof of registration against Right to Build Certificate (HDB) No. 555 and Certificate of Property (SHM) No. 1452, for Determination of Number: 42/Eks.Pdt/2017.

As of July 30, 2018, there was a letter from the Ministry of Agrarian & Spatial Planning /BPN West Bandung Regency Land Office of West Java Province to the Chairperson of the South Jakarta District Court regarding the follow up on the submission of blocking registration evidence to the Certificate of HGB No. 555 and Certificate of SHM No. 1452, for Determination of Number: 42/Eks.Pdt/2017. January 21, 2019, the execution of seizure execution.

As of April 22, 2019, PT NK has submitted an application for Execution for Auction to the District Court.

As of August 7, 2019 a location survey was conducted by KJPP Dolly and Lawyer Team to conduct an appraisal of PT BR assets in the context of determining the price limit of the District Court. As of September 11, 2019, a survey of assets of PT BR.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 15 November 2019, KJPP Dolli Siregar & Rekan menyerahkan laporan final appraisal atas tanah kosong seluas 130 m² dan bangunan seluas 39 m² dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. nilai pasar sebesar Rp543.
- b. nilai likuidasi sebesar Rp434.

Tanggal 6 Desember 2019, PT NK telah menyerahkan hasil laporan penilaian appraisal atas tanah kosong dari KJPP Dolly & Siregar kepada kuasa hukum untuk selanjutnya diserahkan ke PN Bandung.

Tanggal 6 Februari 2020 telah diajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kantor Lelang Kabupaten Bandung. Proses Lelang di jadwalkan pada 22 Juli 2020.

Tanggal 22 Juli 2020 telah di adakan lelang eksekusi namun belum ada peminatnya.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan menunggu proses lelang.

2. Proyek Aston adalah proyek paket pekerjaan struktur dan *general finishing* Aston Mangga Dua Jakarta dengan PT Mandiri Karya Cipta Indah (PT MKCI) sebagai pemilik pekerjaan. Nilai proyek sebesar Rp52.000, proyek berakhir karena PT MKCI selalu menghindar untuk penetapan *progress* fisik pekerjaan termasuk menunda pembayaran sebagai akibat belum adanya kesepakatan *progress*. Tagihan yang diajukan sebesar Rp13.678 termasuk kenaikan harga (eskalasi) dan status penyelesaian tagihan pada 2013 adalah menunjuk Tim Jamdatun sebagai kuasa direksi PT NK untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dilakukan registrasi perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

As of November 15, 2019, the KJPP Dolli Siregar & Partners has submitted a final appraisal report on vacant land measuring 130 square meter and building area of 39 square meter with the following conclusion:

- a. market value amounting to Rp543.
- b. liquidation value amounting to Rp434.

As of Date December 6, 2019, PT NK has submitted the results of the assessment report on the appraisal of land left blank KJPP Dolly & Siregar to legal counsel to then submitted to the Bandung District Court.

As of February 6, 2020, a bid execution for auction was submitted to the Bandung Regency Auction Office. The Auction Process is scheduled for July 22, 2020.

As of July 22, 2020, an execution auction was held but there was no bidder yet.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case was still on going and waiting for the duction process.

2. Aston Project is a structural work package project and general finishing for Aston Mangga Dua Jakarta with PT Mandiri Cipta Karya Indah (PT MKCI) as the owner of the project. The project which values amounting to Rp52,000 had to be ended due to PT MKCI always evading the establishment of physical work progress, included delaying payments as the result of the lack of progress agreement. The proposed Bill amounting to Rp13,678 including price increases (escalation) and the status of the settlement Bill in 2013 is pointing to the Jamdatun Team as the power of the directors of PT NK to file a lawsuit through the Central Jakarta District Court and registration have been made through the Registrar of the District Court in Central Jakarta.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan PT NK tidak dapat diterima. PT NK mengajukan upaya banding dan pada tanggal 23 April 2013 telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2014 mengeluarkan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. PT NK mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan dari Kasasi tersebut antara lain menolak permohonan Kasasi PT NK.

Tanggal 2 Oktober 2017 sesuai surat Direksi nomor: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 perihal Permohonan Pendapat Hukum, PT NK bersurat kepada Jamdatun meminta pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet pada proyek Aston Mangga Dua. Sampai saat ini Jamdatun masih mengkaji pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet tersebut.

Tanggal 3 Oktober 2019 telah dilakukan ekspose terhadap *Legal Opinion* (LO) untuk Nindya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Pada tanggal 29 Oktober 2019, melalui surat no. B- 569/G/Gph.1/10/2019, Kejaksaan RI mengeluarkan Pendapat Hukum (LO) atas permohonan pendapat hukum PT Nindya Karya pada perkara perdata, *Lawyer Opinion* tersebut pada intinya menyarankan untuk mengajukan kembali gugatan terhadap PT MKCI.

Tanggal 22 November 2019, LO (*Legal Opinion*) dari *Retainer* telah diterima PT NK, yang menyarankan PT NK harus mengajukan gugatan ulang.

Tanggal 19 Juni 2020, hasil rapat dengan Dewan Direksi dan NSR, bagian hukum diminta untuk membuat rekap progres dan pembayaran yang telah direalisasikan dan tambahan dokumen terkait guna analisa lebih lanjut oleh NSR terkait posisi hukum Nindya dalam kasus proyek Aston ini.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Then Central Jakarta District Court issued a ruling stating that PT NK lawsuit was not acceptable. PT NK submitted an appeal attempt and on April 23, 2013, delivered a memory of the appeal to the High Court through the Central Jakarta District Court as of May 20, 2014 issued a ruling stating that the District Court's verdict was upheld. PT NK submitted a request for cassation at the Supreme Court. The decision of the Cassation, among others, rejected the application for the Cassation of PT NK.

As of October 2, 2017 according to the Directors' letter number: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 regarding the Request for Legal Opinion, PT NK corresponded to Jamdatun asking for legal considerations for the elimination of bad debts in the Aston Mangga Dua project. Until now, Jamdatun is still reviewing legal considerations for the elimination of bad debts.

As of October 3, 2019, an Legal Opinion was held for Nindya at the Deputy Attorney General for Civil and Administrative Affairs (Jamdatun).

As of October 29, 2019, through letter No.B- 569/G/Gph.1/10/2019, AGO RI issued a Legal Opinion (LO) on the request for a legal opinion PT Nindya Karya on civil cases, the Opinion Lawyer in essence advised to resubmit the lawsuit against PT MKCI.

As of November 22, 2019, the Legal Opinion (LO) of the retainer has been received Company, which the advice the company must be boils down to the rule of law should.

As of June 19, 2020, the results of a meeting with Board of Directors and NSR, the legal department was asked to make a recap of progress and payment that had been realized and additional related documents for further analysis by NSR regarding Nindya's legal position in the Aston project case.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 14 September 2020 NSR memberikan kajian antara lain PT NK dapat mengupayakan penyelesaian secara negosiasi dengan MKCI guna melakukan *set off* atau Nindya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusbukuan piutang (*write off*) proyek Aston Mangga Dua.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses pertimbangan manajemen.

3. Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan proyek tahun Anggaran 2004-2011. Jumlah nilai kontrak proyek sebesar Rp771.599 dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai pemilik pekerjaan. Dalam mengerjakan proyek tersebut PT NK menjalin kerjasama operasi dengan PT Tuah Sejati, dan membentuk perjanjian kerjasama dengan nama Nindya-Sejati Kerjasama Operasi (KSO).

Persentase nilai kepesertaan masing-masing PT NK tersebut adalah PT NK sebesar 55% dan PT Tuah Sejati 45%. Laba yang dibukukan dari pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Lanjutan porsi PT NK yaitu sebesar Rp44.681.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, PT NK telah melakukan penurunan nilai atas dana yang dibatasi penggunaannya.

4. Piutang kepada PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) adalah sisa tagihan kerjasama proyek Pada paket pekerjaan struktur dan arsitektur pembangunan Koja Trade Mall di Jakarta Utara, MSC tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 90,7696 % dan pekerjaan tambah/kurang kepada PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

As of September 14, 2020, NSR provided a study, among others, that PT NK could seek negotiations with MKCI to set off or Nindya could consider writing off (write off) Aston Mangga Dua's Project receivables.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on management's considerations.

3. Sabang Loading Dock Construction Projects in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is a project for 2004-2011 fiscal year. Total project's value amounting to Rp771,599 with Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) as the project owner. In the project implementation, The Company established joint operations with PT Tuah Sejati, and formed a joint venture as Nindya-Sejati Joint Operation (JO).

The share value percentage for each companies is PT NK amounted to 55% and PT Tuah Sejati 45%. Accounted operating income from the Sabang Loading Dock Construction Projects in the portion of PT NK which amounted to Rp44,681.

Until December 31, 2021, PT NK has make allowances for impairment losses of restricted fund.

4. Receivables from PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) are the remaining project collaboration debts. In the Koja Trade Mall construction structure and architecture package in North Jakarta, MSC did not pay 90.7696% for work performance and added/less work to PT NK.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT NK mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan isi putusan mengabulkan gugatan MSC untuk sebagian. PT NK mengajukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan isi putusan menyatakan MSC telah wanprestasi kepada PT NK. Menghukum MSC membayar kerugian kepada PT NK sebesar Rp5.226. Putusan kasasi telah terbit, Pada tanggal 24 Oktober 2018 PT MSC minta waktu 2 minggu untuk menyiapkan usaha penyelesaian kewajiban MSC kepada PT NK.

Pada tanggal 5 Agustus 2019 telah dilaksanakan survei lokasi aset MSC oleh KJPP Dolly dan Tim Kuasa Hukum.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 telah keluar hasil appraisal dari KJPP Dolly Siregar & Rekan atas aset yang terletak di Jalan Kramat Jaya Koja, Jakarta Utara.

Pada tanggal 20 Januari 2020, Nindya bersurat ke Toni Hendarto dan Rekan perihal Permohonan Pendapat hukum terkait tindak lanjut dan upaya hukum yang dilakukan PT NK dengan dikeluarkannya penetapan PN Jakarta Utara. Dan Nindya telah bersurat kepada Kuasa Hukum untuk pengajuan KPKU.

Pada tanggal 23 Juni 2020 bagian hukum menyampaikan Kajian *Pro Cons* kasus Koja untuk penanganan upaya hukum selanjutnya.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara masih berlangsung dan sedang dalam proses kajian lanjutan.

5. PT NK telah menyelesaikan Prestasi 94,76% kepada PT Fatimah Azzahra (FA) sehingga PT Fatimah Azzahra berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada NK sebesar Rp17.457 namun faktanya PT Fatimah Azzahra baru menyelesaikan kewajiban kepada PT NK sebesar Rp13.948.

Putusan BANI no. 861/VI/ARB-BANI/2016, tanggal 27 Maret 2017 yang memutuskan bahwa kewajiban PT Fatimah Azzahra kepada PT NK adalah sebesar Rp3.567 telah bersifat mengikat dan final.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT NK Submits a lawsuit through the South Jakarta District Court, with the contents of the decision Granting the MSC claim for part. PT NK submitted an appeal effort through the DKI Jakarta High Court, with the contents of the decision stating MSC had defaulted to PT NK. Sentencing MSC to pay losses to PT NK for a total amounted to Rp5,226. The decision on cassation has been issued. As of October 24, 2018, PT MSC requested 2 weeks to prepare an effort to settle MSC's obligations to PT NK.

As of August 5, 2019, MSC's asset location survey was conducted by KJPP Dolly and the Legal Counsel Team.

As of August 20, 2019, an appraisal result was issued by KJPP Dolly Siregar & Partners for assets located at Jalan Kramat Jaya Koja, North Jakarta.

As of January 20, 2020, Nindya corresponded to Toni Hendarto and colleagues regarding the petition for legal opinions related to the follow-up and legal remedies carried out by PT NK with the issuance of the North Jakarta District Court. And Nindya has written to the Attorney General for filing KPKU.

As of June 23, 2020, the legal department submitted a Pro Cons Study on the Koja case for further handling of legal remedies

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment process.

5. *PT NK has completed the working progress 94.76% to PT Fatimah (FA) so then PT Fatimah Azzahra is obliged to carry out payments to NK amounting to Rp17,457 but in fact the new PT Fatimah Azzahra settle liabilities to PT NK amounted to Rp13,948.*

BANI Decision no. 861/VI/ARB-BANI/2016, dated March 27, 2017, which decided that the obligation PT Fatimah to PT NK amounting to Rp3,567 has to be final.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 29 Oktober 2019 Kejati Riau menyampaikan surat ke PT NK, Perihal Penyerahan Proposal Rencana Pembayaran dari PT Fatimah Azzahra, yang pada intinya PT FA bersedia membayar sisa pembayaran dalam bentuk penyerahan sebuah aset apartemen di daerah Dago, Bandung dan terhadap kekurangan sisa pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil dalam rentang waktu 3 tahun terhitung sejak Januari 2020 sampai Desember 2022.

Tanggal 8 Juni 2020, PT NK bersurat setuju akan ambil unit dan furnish apartemen yang diajukan PT Fatimah Azzahra yang akan dikompensasikan sebagai bagian penyelesaian kewajiban PT Fatimah Azzahra kepada PT NK.

Tanggal 12 September 2020 PT NK dan FA menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Nomor 1 di hadapan Notaris Lili Lastari, S.H., M.Kn. Di Pekanbaru, kemudian FA menyerahkan 36 Bank Giro sebagai pelaksanaan dari Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

Tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan penandatanganan AJB dan Serah Terima Unit Apartemen di Dago Suites 2 Bandung untuk penyelesaian Kewajiban FA kepada PT NK.

Sisa kewajiban sebesar Rp2.057 akan dibayar secara bertahap selama 36 bulan terhitung sejak Januari 2021 sd Desember 2023. Sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp686.

6. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (PT DPS) tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan Pembangunan Landasan Galangan DPS-Lamongan yang telah diselesaikan oleh PT NK.

PT NK bersurat ke PT DPS sesuai surat nomor: 112/NK-WIL.IV/KEU/04/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Percepatan Penyelesaian sisa kewajiban PT DPS.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

As of October 29, 2019 Attorney Lists deliver a letter to PT NK, Subject Submission of Proposals Payment Plan of PT Fatimah, who in essence PT FA are willing to pay the remainder of the payment in the form of delivery of an asset apartments in the area in Dago, Bandung and the shortage of the rest of the payment will be made by by installments within the period of 3 years commencing from January 2020 until December 2022.

As of June 8, 2020, PT NK consented to take the apartment units and furnishings proposed by PT Fatimah Azzahra which would be compensated as part of the settlement of PT Fatimah Azzahra's obligations to PT NK.

As of September 12, 2020, PT NK and FA signed the Debt Settlement Agreement Act No.1 before Notary Lili Lastari, S.H., M.Kn. In Pekanbaru, the FA then handed over 36 Bank Giro as an implementation of the Debt Settlement Agreement Act.

On December 17, 2020, AJB was signed and the Apartment Unit Handover at Dago Suites 2 Bandung for the settlement of FA's Obligations to PT NK.

The remaining obligation amounted to Rp2,057 will be paid in installments over 36 months from January 2021 to December 2023. As of December 31, 2021, the Company has received a payment amounted to Rp686.

6. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (PT DPS) does not payments accomplishment of the Project Runway construction Shipyard DPS-Lamongan accomplished by PT NK.

PT NK sent a letter to PT DPS corresponded to the corresponding letter number:112/NK-WIL.IV/KEU/04/2016 dated April 13, 2016, concerning the Acceleration Resolution Outstanding PT DPS.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT NK bersurat ke PT DPS sesuai surat nomor: 304/NK-WIL.IV/KEU/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian sisa kewajiban PT DPS.

PT DPS bersurat ke PT NK nomor: 16/3501-12/DS/IV/N-Awn tanggal 30 Desember 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian sisa pembayaran. Disampaikan bahwa berkaitan dg nilai sisa pembayaran PT DPS sebesar Rp4.730 akan dibahas dalam pertemuan pada minggu ke 2 bulan Januari 2017 dengan agenda acara Pembahasan Penyelesaian para pihak dalam bentuk sinergi BUMN seperti melakukan KSO, pengerjaan proyek bersama ataupun dengan cara lainnya untuk penyelesaiannya.

Adanya pertemuan dari pihak PT NK dengan PT DPS pada tanggal 28 Mei 2018, dengan kesepakatan PT DPS memutuskan untuk melepaskan Aset Tanah dan Bangunannya yang berlokasi di Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya

Tanggal 14 Agustus 2018, Direktur Utama PT DPS bersurat kepada Menteri BUMN RI. Sesuai surat nomor: 18/1958-8/DS/I/M-1 perihal Permohonan Persetujuan Ijin Pelepasan & Optimalisasi Aset PT NK.

Tanggal 23 September 2019 PT NK telah bersurat kembali untuk penagihan kepada PT DPS sesuai surat nomor: 1689/DKS/SEKPER/09/2019, perihal: Penyelesaian sisa kewajiban PT DPS.

PT NK bersurat ke Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN tanggal 11 Maret 2020 yang intinya setuju dengan usulan PT DPS pembayaran secara bertahap. PT NK telah menyerahkan konsep perjanjian penyelesaian kewajiban antara PT NK dan PT DPS kepada PT DPS tanggal 30 Maret 2020.

Tanggal 5 Agustus 2020 telah PT NK kirimkan kembali koreksi konsep perjanjian penyelesaian kewajiban DPS. Dan Tanggal 9 Oktober 2020, PT NK telah menerima Perjanjian Penyelesaian Kewajiban yang telah di tanda tangani PT DPS.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

PT NK corresponded to PT DPS, corresponding letter number 304/NK-WIL.IV/KEU/09/2016 on September 14, 2016, concerning the follow-up to Accelerate Completion of Outstanding PT DPS.

PT DPS sent a letter to PT NK number: 16/3501-12/DS/IV/N-Awn December 30, 2016, concerning the Follow-Up to Accelerate Completion of Outstanding. Submitted that the outstanding amount related dg PT DPS. Rp4,730 will be discussed during the week to 2 months in January 2017 with the agenda discussion of the Settlement of the parties in the form of synergy conducting KSO, jointly working on projects or otherwise for its completion.

A meeting of PT NK with PT DPS dated May 28, 2018, with the agreement of PT DPS decided to release the Assets Land and building located at Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya.

On August 14, 2018, President Director of PT DPS sent a letter to the Minister of State Owned Enterprises RI. Corresponding letter number: 18/1958-8/DS/I/M-1 regarding the Request Approval Waiver & Optimization Company Assets.

On September 23, 2019, PT NK has sent a letter back to the billing to the DPS accordance with the letter number: 1689/DKS/SEKPER/ 09/2019, regarding: Completion of Outstanding of PT DPS.

PT NK corresponded to the Deputy for Legal Affairs and Debt of the Ministry of BUMN dated March 11, 2020, which basically agreed to the DPS proposal in stages. Nindya has submitted the concept of an obligation settlement agreement between PT NK and PT DPS to PT DPS dated March 30, 2020.

On August 5, 2020, PT NK sent back the corrections to the draft DPS debt settlement agreement. And on October 9, 2020, PT NK has received the Debt Settlement Agreement that has been signed by PT DPS.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Tanggal 16 Desember 2020, PT NK menyampaikan surat Penyelesaian Kewajiban kepada DPS untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

Tanggal 29 Maret 2021, PT NK telah menyampaikan surat Perihal Penyelesaian Kewajiban kepada DPS untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

Pada tanggal 13 Oktober 2021, PT NK menerima surat putusan PKPU dari PT DPS. Pada Tanggal 29 Desember 2021, PT NK menghadiri rapat penyampaian usulan Perdamaian PT DPS kepada para Kreditor.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

7. PT NK dan PT Lampiri Djaya Abadi telah membentuk dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi nomor: 334/NKDI/TEKNIK/07/2013 tertanggal 2 Juli 2013 (NINDYA-LAMPIRI, JO) untuk Proyek Aceh Reconstruction Project (IP-545) – Road Sub Project Package No. I: Section Sp. Kraft-Batas Aceh Tengah dengan porsi kepesertaan PT Nindya Karya (Persero): 51% dan PT Lampiri Djaya Abadi: 49%. Tanggal 23 Agustus 2017, Kuasa Hukum PT NK mengajukan permohonan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Tanggal 13 Juli 2018 dibacakan putusan BANI, antara lain sebagai berikut:

- a. Lampiri dinyatakan telah wanprestasi;
- b. Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan dan membayar hutang sisa pencairan/ pinjaman dana kepada PT NK sebesar Rp16.422;
- c. Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan biaya BANI kepada PT NK sebesar Rp280.

Tanggal 12 November 2019, Permohonan Sita Eksekusi telah diajukan permohonan oleh kuasa hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On December 16, 2020, PT NK submitted a Letter of Settlement of Obligations to DPS to make installment payments as stated in the Obligation Settlement Agreement.

On March 29, 2021, PT NK has submitted a letter regarding the Settlement of Obligations to DPS to make installment payments as stated in the Liability Settlement Agreement.

On October 13, 2021, PT NK received a PKPU decision letter from PT DPS. On December 29, 2021, PT NK attended a meeting to submit proposals for PT DPS to Creditors.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment for the settlement agreement.

7. PT NK and PT Lampiri Djaya Abadi has formed and signed a Joint Operation Agreement number: 334/NKDI/ENGINEERING/07/2013 dated July 2, 2013 (Nindya-Lampiri, JO) to project the Aceh Reconstruction Project (IP-545) - Road Sub Project Package No. I: Section Sp. Kraft-Border Central Aceh with a portion of membership PT Nindya Karya (Persero): 51% and PT Lampiri Djaya Abadi: 49%. On August 23, 2017, Attorney PT NK apply to BANI (Indonesian National Board of Arbitration).

On July 13, 2018 Date of BANI verdict was read, as follows:

- a. Lampiri was declared to have been in default;
- b. Lampiri ordered to restore and pay the residual debt disbursement/ loan funds to PT NK amounting to Rp16,422;
- c. Lampiri ordered to refund the cost of BANI of PT NK amounted to Rp280.

On November 12, 2019, the application has been filed Sita execution request by the attorney to the West Jakarta District Court.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 10 Juni 2020, berdasarkan Pemberitahuan Putusan PT DKI Jakarta, yang amarnya berbunyi "Menguatkan Putusan PN Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2019 Nomor 79/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim".

Pada tanggal 2 Februari 2021, Kuasa Hukum menyampaikan bahwa telah menerima rilis pemberitahuan pernyataan terhadap kasasi terhadap Perkara Nomor 20/PDT/2020/PT DKI Jo. 79/Pdt.G/2019/PN.Jak.Tim.

Tanggal 16 Maret 2021, Kuasa hukum menyampaikan kontrak memori Kasasi atas pengajuan permohonan Kasasi Lampiri.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih dalam tahap kasasi dan memori kasasi PT Lampiri Jaya Abadi sedang dalam proses dan belum ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung RI.

8. Dalam Pekerjaan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipanisasi transmisi serta distribusi primer, sekunder dan tersier berikut pekerjaan sipil untuk pendistribusian air bersih kota Bontang-Kaltim, dimana PT NK masih memiliki tagihan sebesar Rp2.600 kepada PT Altra Excis Investama tetapi hingga saat ini PT Altra masih belum merealisasikannya.

Pada tanggal 26 November 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Rekan selaku Kuasa Hukum PT NK mengirimkan Surat No: 7005.2611/TH.R/XI/2019 Perihal Somasi ke 1 (satu) kepada PT Altra.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Kuasa hukum telah menyampaikan somasi ke-2 kepada Altra. Pada tanggal 14 Mei 2020 Altra telah menyampaikan tanggapan somasi dari kuasa hukum PT NK, dimana isinya Altra akan melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp1.200 selama 5 tahun dan sisanya melalui kerjasama usaha.

Pengacara Toni Hendarto menyampaikan Pendapat Hukum melalui surat Nomor 2002.2209/TH.R/LO/IX/2021 tanggal 22 September 2021 Perihal Pendapat Hukum yang pada pokoknya Toni menyampaikan agar PT NK mengajukan gugatan melalui BANI atas permasalahan tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On June 10, 2020, based on the willingness to Notify PT DKI Jakarta's Decision, the ruling reads "Strengthening the East Jakarta District Court Decision on May 21, 2019 Number 79/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim".

On February 2, 2021, the attorney for law said that he had received release a notification of the cassation statement regarding Case Number 20/PDT/2020/PT DKI Jo. 79 / Pdt.G/2019/PN.Jak.Tim.

On March 16, 2021, the attorney submitted a memorandum of cassation contract for the submission of the Lampiri Cassation application.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the case status is still going in cassation and the cassation memorandum of PT Lampiri Jaya Abadi which being processed and no notification yet from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

8. On Procurement and Installation of primary, secondary and tertiary transmission and distribution pipelines along with civil works for the distribution of clean water in the city of Bontang-East Kalimantan Projects, where PT NK still has a bill amounted to Rp2,600 to PT Altra Excis Investama but to date PT Altra still hasn't realized it.

On November 26, 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Partners as Legal Counsel PT NK sent Letter No: 7005.2611 / TH.R / XI / 2019 Regarding the 1st (one) Somasi to PT Altra.

On March 26, 2020, the attorney has delivered the second summons to Altra. On May 14, 2020 Altra has submitted a summons response from Nindya's attorney, wherein Altra will make a payment in the amount amounted to Rp1,200 in stages over 5 years and the rest through cooperation.

Lawyer Toni Hendarto submitted his Legal Opinion through letter No. 2002.2209/TH.R/ LO/IX/2021 dated 22 September 2021 Regarding Legal Opinions, basically Toni conveyed that PT NK should file a lawsuit through BANI on the matter.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

9. Pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Siding/Seluas – Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC). PT Jayasinga Muda telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati, oleh karena itu PT NK bermaksud mencairkan Bank Garansi yang telah di terbitkan oleh PT BPD Kalimantan Barat senilai Rp909.587 namun s/d saat ini PT BPD Kalimantan Barat tidak melakukan kewajibannya untuk mencairkan Bank Garansi yang telah diterbitkannya.

Pada tanggal 18 Juni 2020 diadakan sidang dengan agenda pembacaan gugatan dan penyerahan jawaban dari PT BPD kepada PT Jayasinga Muda.

Pada tanggal 27 Juli 2020 diadakan sidang dengan agenda pembuktian Tergugat I dan Pemeriksaan Saksi Penggugat, dalam acara tersebut Penggugat mengajukan 1 saksi, dan mengajukan permohonan kepada majelis untuk dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi fakta lagi.

Pada tanggal 23 September 2020, Majelis hakim membacakan Putusan Perkara nomor 7/Pdt.G /2020 /PN Stg yang pada pokoknya amarnya adalah menyatakan gugatan tidak diterima.

Pada tanggal 7 Mei 2021, PT NK melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan memori Kasasi kepada MA.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment for the settlement agreement.

9. *In the Siding Boundary Road Construction Work Project - Kec. Sekayam/Entikong (MYC). PT Jayasinga Muda has defaulted by not completing the work in accordance with the agreed time period, therefore PT NK intends to withdraw the Bank Guarantee which has been issued by PT BPD West Kalimantan worth Rp. Rp909,587 but until now PT BPD Kalimantan Barat has not fulfilled its obligation to withdraw the Bank Guarantee that it has issued.*

On June 18, 2020, a hearing was held with the agenda of reading the lawsuit and submitting answers from PT BPD to PT Jayasinga Muda.

On 27 July 2020 the trial session with the agenda of proving Defendant I and Examination of Plaintiff's Witnesses, in that event the Plaintiff filed 1 lawsuit, and submitted an application to the panel to be given the opportunity to present another witness.

On September 23, 2020, the panel of judges read out the Decision on Case number 7/Pdt.G /2020 /PN Stg which basically stated that the lawsuit was not accepted.

On May 7, 2021, PT NK through his attorney submitted the memorandum of cassation to the Supreme Court.

Until the issuance date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment for the settlement agreement.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

45. Perikatan dan Perjanjian

**Perjanjian Restrukturisasi dan Dana Talangan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

1. PT Merpati Nusantara Airlines ("PT MNA")

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-716/MBU/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penyelesaian PT MNA dan Surat Menteri Keuangan No. S-478/MK.06/2008 tanggal 5 September 2008 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT MNA, Perusahaan memberikan pinjaman dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp300.000 dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berlaku pada awal periode pembayaran bunga.

Pinjaman akan jatuh tempo dalam 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 8 September 2016, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga pertama kali pada tanggal 8 Maret 2010.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-152/MBU/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT MNA dan surat persetujuan Menteri Keuangan No. S-427/MK.06/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal persetujuan usulan Menteri BUMN terkait tambahan pemberian fasilitas pinjaman oleh Perusahaan kepada PT MNA sebesar Rp561.000 dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT MNA sebagai dana talangan untuk PT MNA sementara menunggu pencairan dana tambahan Penyertaan Modal Negara

Pada Tanggal 16 Februari 2016, Perusahaan melalui Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) Nomor 17 memberikan pinjaman dengan pagu kredit pinjaman sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun bruto (termasuk pajak atas bunga).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

45. Commitments and Agreements

**Restructuring and Fund Advance of State Own
Enterprise (SOE's) Agreement**

1. PT Merpati Nusantara Airlines ("PT MNA")

Based On the Letter Of The Minister of State-Owned Enterprises No. S-716/MBU/2008 September 4, 2008 subject Bank PT MNA and the letter of the Minister of Finance No. S-478/MK. 06/2008 dated September 5, 2008 subject to approval of restructuring and/or Revitalizing PT MNA, the company provides loans with a limit amounting to Rp300,000 based on Bank Indonesia Certificates (SBI) interest rate in effect at the beginning of the the period of interest payments.

The loan will be due in 8 (eight) years starting from the signing of the loan agreement or no later than September 8, 2016, while overdue interest payments the first time on March 8, 2010.

Based on the decision letter of the Minister of State-owned enterprises no. KEP-152/MBU/2011 dated June 27, 2011 about the restructuring and revitalization of the PT MNA and/or approval of Finance Minister no. S-427/MK. 06/2011 dated July 27, 2011 subject to approval of the proposals of the Minister of State-Owned Enterprises the granting of additional related facilities loans by the company to PT MNA amounted to Rp561,000 restructuring and/or revitalization of PT MNA as bailouts for PT MNA While waiting for the disbursement of additional Equity Capital of the country.

On February 16, 2016, based on Deed of Agreement Fund Lending for Restructuring and/or Revitalization Loan PT Merpati Nusantara Indonesia Airlines (Persero) No.17, the Company approved loans with maximum credit facility amounting to Rp500,000 with the interest rate at 10.5% per annum gross (including tax on interest).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pinjaman akan jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2018. Pinjaman akan dialokasikan untuk membayar upah tertunggak dan/atau sebagian pesangon karyawan PT MNA serta biaya proses RR lainnya.

Pada tanggal 16 November 2016 dilakukan Addendum V No. 09 Perjanjian Pinjaman Yang Dapat Dikonversikan Dalam Rangka Penyelamatan Usaha PT MNA yang diantaranya mengatur perpanjangan jangka waktu Fasilitas Pinjaman dengan masa perpanjangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman CLF serta penyampaian informasi perubahan.

Pada tahun 2019, PT MNA telah memperoleh dokumen legal opinion atau keabsahan proses Restrukturisasi dan Revitalisasi PT MNA dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Jaminan dari PT MNA adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 32 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp27.983, hipotik atas 18 unit pesawat dengan nilai Rp13.275, fidusia mesin pesawat Boeing 737-300 dan Boeing 737-400 dengan nilai Rp68.652, gadai 99,82% saham PT Merpati Maintenance Facility dan gadai 99,86% saham PT Merpati Training Center dengan jumlah nilai sebesar Rp349.542.

2. PT PAL Indonesia (Persero) ("PT PAL")

Pada tanggal 30 Desember 2015, telah dilakukan restrukturisasi utang terhadap pemberian pinjaman untuk pembiayaan korporasi – *Tranche D* yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Utang PT PAL Indonesia (Persero) Nomor 47. Tanggal Jatuh Tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2030. Utang pokok sebesar Rp151.841 direstruktirisasi menjadi Fasilitas *Tranche A*, utang bunga sebesar Rp88.742 dan denda pokok sebesar Rp4.465 direstruktirisasi menjadi Fasilitas *Tranche B*.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The loan will due in 2 (two) years starting from the signing of the loan agreement or at the latest dated February 15, 2018. The loan will be allocated to pay the owed wages and / or some of PT MNA employee severance and other RR process costs.

On November 16, 2016, Amendment V No. 09 Convertible Loan Agreement in order to Rescue PT MNA Ventures including arrangement of an extension period on loan facility with a maximum extension period 10 (ten) years from the date of the signing of the loan agreement as well as the delivery of information changes to CLF outstanding debt over loan facility CLF.

In 2019, PT MNA has obtained legal opinion document on the validity of PT MNA's Restructurization and Revitalization process from the Deputy Attorney General for Civil and State Administration.

The collateral from PT MNA is in the form of first rank mortgage I for 32 land and/or building assets with a value amounting to Rp27,983, mortgages for 18 aircraft with a value amounting to Rp13,275, fiduciary Boeing 737-300 aircraft engines and Boeing 737-400 with value amounting to 68,652, pawn of 99.82% stake in PT Merpati Maintenance Facility and pawn of 99.86% stake of PT Merpati Training Center with a total value amounting to Rp349,542.

2. PT PAL Indonesia (Persero) ("PT PAL")

On December 30, 2015, a debt restructuring was made on loan lent to finance corporation – Tranche D, as outlined in the Debt Restructuring Agreement PT PAL Indonesia (Persero) Number 47. The expiry date of the agreement is on December 31, 2030. Debt principal amounted to Rp151,841 was restructured into Facility Tranche A, interest payable amounted to Rp88,742, and fine charged to loan amounted to Rp4,465 were restructured into Facility Tranche B.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Jaminan dari PT PAL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 9 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai sebesar Rp25.194, fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai sebesar Rp190.241, fidusia piutang dengan nilai sebesar Rp27.697.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("PT KKA")

Pada tanggal 19 November 2013, ditandatangani Perjanjian No PP-11/PPA/1113 antara Perusahaan dengan PT KKA perihal Perubahan Menyeluruh Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan menjadi Pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara BUMN selaku ketua Komite Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN No. KEP-02/MBU/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan PT KKA, maka Perusahaan melakukan pengalihan atas pinjaman dana talangan yang termasuk dalam program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi menjadi pinjaman Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

Berdasarkan surat No. S-397/PPA/DU/0119 merupakan surat persetujuan Perpanjangan fasilitas Dana Talangan Modal Kerja Pengadaan Gas yang diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2019 dengan tujuan agar PT KKA dapat melakukan pembayaran atas pemakaian gas operasi periode Desember 2018 dan Januari 2019 tepat waktu.

Dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan diubah menjadi Perjanjian Sewa maka seluruh fasilitas pinjaman Perusahaan kepada PT KKA jatuh tempo. Atas sisa pinjaman PT KKA yang tidak terbayarkan dibuat suatu perjanjian Pengubahan Perjanjian Restrukturisasi Dana Talangan PT KKA dalam Rangka Penyelesaian Utang No. PP-16/PPA/0719 tanggal 31 Juli 2019.

Jaminan dari PT KKA adalah berupa Surat Senior Kreditur dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memegang jaminan atas aset PT KKA dengan nilai Rp300.080.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Collateral from PT PAL is in the form of a first rank mortgage for 9 land and/or building assets with a value amounting to Rp25,194, fiduciary machinery and production equipment with a value amounting to Rp190,241, fiduciary receivables with a value amounting to Rp27,697.

3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("PT KKA")

On November 19, 2013, Agreement No PP-11/PPA/1113 between the Company and PT KKA regarding the Comprehensive Amendment of Lending Bailout Loan Agreement to become Restructuring and/or Revitalization Loan was signed.

As with the release of the Decision of State-Owned Enterprises Minister as the Chairman of State-Owned Enterprises Restructuring and Revitalizing Committee No. KEP-02/MBU/2012 on 4 January 2012 about Restructuring and/or Revitalization of PT KKA, therefore the Company transferred the bailout loan that was included in Restructuring and Revitalizing Program into Restructuring and/or Revitalization Loan.

Pursuant to No.S-397/PPA/DU/0119 is an approval letter for the Extension of the Gas Procurement Working Capital Expansion Fund facility which is extended until February 28, 2019 with the aim that PT KKA can make payments for the use of operating gas for the period December 2018 and January 2019 on time.

With the termination of the Electricity Sale and Purchase Agreement and converted into a Lease Agreement, all of the Company's loan facilities to PT KKA are due. For the remaining outstanding loans of PT KKA, an agreement to amend the PT KKA Bailout Restructuring Agreement in the Debt Settlement Framework No. PP-16 / PPA / 0719 dated July 31, 2019.

The collateral from PT KKA is in the form of a Senior Credit Creditor from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk which holds a collateral for the assets of PT KKA amounted to Rp300,080.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) ("PT DI")

Pada tanggal 18 Agustus 2011, Perusahaan dan PT DI telah menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan korporasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55, dimana Perusahaan memberikan pinjaman sebesar Rp675.000. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2021, telah dilakukan beberapa kali addendum perubahan atas Akta No.55 tersebut dan yang terakhir adalah Akta Perubahan XI (kesebelas) Perjanjian Pembiayaan korporasi PT DI No.PP-1/PPA/0121 pada tanggal 11 Januari 2021. Akta perubahan XI (kesebelas) tersebut mengatur jatuh tempo fasilitas pinjaman pada tanggal 29 Desember 2021.

Jaminan dari PT DI adalah 7 sertifikat aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp590.265 yang telah mendapat persetujuan pemegang saham PT DI untuk pengikatan jaminan.

5. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) ("PT IKI")

Pada tanggal 27 Desember 2016, telah dilakukan restrukturisasi utang terhadap seluruh kewajiban PT IKI kepada Perusahaan yang dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Utang PT Industri Kapal Indonesia (Persero) No. 42 ("Perjanjian") tanggal jatuh tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2022. Utang pokok sebesar Rp31.639 direstrukturisasi menjadi Tranche A, utang bunga sebesar Rp2.061 direstrukturisasi menjadi Tranche B.

Perubahan Perjanjian melalui Addendum I Perjanjian No. 11 tanggal 4 Desember 2019 mengenai perubahan tanggal jatuh tempo perjanjian menjadi 31 Desember 2028.

Jaminan dari PT IKI adalah berupa hak tanggungan peringkat I dan 2 atas 4 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp185.000 dan fidusia mesin dan peralatan produksi dengan nilai Rp45.000.

6. PT Industri Gelas (Persero) ("PT Iglas")

Pemberian pinjaman dalam rangka restrukturisasi dan atau revitalisasi PT Iglas berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-15/MBU/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Penugasan Pelaksanaan Restrukturisasi dan /atau Revitalisasi PT Iglas dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-621/MK.06/2010 tanggal 29 November 2010 perihal persetujuan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) ("PT DI")

On August 18, 2011, The Company and PT DI signed the Deed of PT Dirgantara Indonesia (Persero) No.55, in which The Company provided a loan amounted to Rp675,000. Since 2011 until 2021, there have been several amendment changes to the Deed No.55 and the latest is the Deed of Amendment XI (eleventh) of PT DI No. PP-1/PPA/0121 Corporate Financing Agreement on January 11, 2021. Deed of amendment XI (eleventh) regulates the maturity date of the agreement to December 29, 2021.

Collateral from PT DI are 7 certificate land asset and/or building with amounted to Rp590,265 which have been approved from shareholders PT DI regarding binding of guarantees.

5. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) ("PT IKI")

On December 27, 2016, a debt restructuring was carried out on all obligations of PT IKI to the Company as set forth in the PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Debt Restructuring Agreement No. 42 ("Agreement") the maturity date of the agreement to become December 31, 2022. The principal Debt amounted to Rp31,639 was restructured into Tranche A, the interest payable amounted to Rp2,061 was restructured into Tranche B.

The Agreement has been amended through Amendment I Agreement No. 11 December 4, 2019 concerning changes in the maturity date of the agreement to December 31, 2028.

The collateral from PT IKI is in the form of first and second rank mortgage for 4 land and / or building assets with a value amounting to Rp185,000 and fiduciary machinery and production equipment amounted to Rp45,000.

6. PT Industri Gelas (Persero) ("PT Iglas")

Provision of loans for the restructuring and / or revitalization of PT Iglas based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-15/MBU/2011 dated January 14, 2011 regarding the Assignment of the Restructuration and/or Revitalization of PT Iglas and the Minister of Finance Number S-621/MK.06/2010 dated November 29, 2010 concerning the approval of Restructuring and/or Revitalization.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas No. 10 tanggal 15 April 2011, pagu kredit pinjaman yang diberikan sebesar Rp106.770 untuk pembayaran kekurangan dana atas pembangunan kembali pabrik yang berlokasi di Gresik yang dikenal dengan rebuild G-1 serta pembayaran hutang, dengan tingkat bunga sebesar bunga SBI ditambah 3% per tahun bersih.

Perubahan VIII Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 43 tanggal 20 Desember 2019 perihal penambahan pagu kredit fasilitas pinjaman Tranche A maksimal Rp50.000 dan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Desember 2021.

Jaminan dari PT Iglas adalah berupa hak tanggungan peringkat 6 dan 7 atas 14 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp139.100. Adapun atas peringkat HT 1 sampai dengan 5 yang sebelumnya dipegang oleh BNI sudah dilakukan Roya, sehingga saat ini posisi Perusahaan dan BNI sudah setara.

7. PT Kertas Leces (Persero) ("PT KL")

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-511/MBU/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Pemberian Dana Talangan kepada PT KL untuk *Revolving Working Capital* yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Talangan kepada PT KL No. 13 tanggal 11 Oktober 2012. Berdasarkan Perjanjian tersebut Perusahaan memberikan Pinjaman Dana Talangan dengan jumlah pokok fasilitas maksimum Rp50.000.

Tanggal 26 April 2019, Tim Kurator PT KL telah mengumumkan pembagian hasil dana lelang eksekusi dimana Perusahaan selaku kreditor separatis dan pemegang HT peringkat I diberikan sebesar Rp1.291. Atas pembagian ini dinilai terlalu rendah sehingga Perusahaan mengajukan keberatan atau perlawanan (Prosedur *Renvoi*).

Tanggal 29 Agustus 2019 telah dilaksanakan pembacaan putusan Prosedur *Renvoi*, yang mana putusannya Menolak keberatan atau perlawanan dari Pelawan (Perusahaan) untuk seluruhnya, Perusahaan melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Ari Zulfikar & Partners (AZP) telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan menyerahkan memori Kasasi di Mahkamah Agung RI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the Loan Agreement in the Context of Restructuration and/or Revitalization of PT Iglas No. 10 dated April 15, 2011, loan plafond amounting to Rp106,770 for the payment of underfunded funds for the rebuilding of a factory located in Gresik known as the G-1 rebuild and debt payments, with an interest rate of SBI plus 3% per annum net.

Amendment VIII No. 43 dated 20 December 2019 regarding the addition of a maximum Tranche A loan facility plafond of Rp50,000 and an extension of the term of the loan facility until December 31, 2021.

Collateral from PT Iglas is in the form of a mortgage of rights rank 6 and 7 for 14 land and/or building assets amounted to Rp139,100. As for the rank of 1 through 5 previously held by BNI has been Roya, thus the currently the position of the Company and BNI is equal.

7. PT Kertas Leces (Persero) ("PT KL")

Based on the Minister of SOE letter No. S-511/MBU/2012 dated September 18, 2012 regarding the Provision of Bailout Funds to PT KL for Revolving Working, the Bailout Loan Fund Loan Agreement has been signed to PT KL No. 13 dated October 11, 2012. Based on the agreement, the Company provided a Bailout Loan with a maximum principal amount of Rp50,000.

On April 26, 2019, Receiver Team of PT KL has announced the distribution of proceeds from auction funds wherein the Company as a separatist creditor and holding HT rank I was given Rp1,291. With regard to this distribution was deemed too low, the Company considered to raised an objection or resistance (Renvoi Procedure).

On August 29, 2019 the reading of the decision of the Renvoi Procedure has been carried out, in which the decision rejects all the objection or resistance of the Opponents (the Company) for, the Company through legal counsel from the Law Office of Ari Zulfikar & Partners (AZP) has filed an appeal Cassation and handed over the memory of Cassation in the Supreme Court of Republic of Indonesia.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan surat Mahkamah Agung RI nomor 100/Pts.Pailit/VI/1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 12 Juni 2020 telah disampaikan Salinan Putusan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya MARI mengabulkan keberatan Perusahaan dan memerintahkan agar Tim Kurator membuat daftar pembagian harta terbaru.

Perusahaan melalui surat No.S2722/PPA/DKBAM/0620 tanggal 23 Juni 2020 menyampaikan kepada Tim Kurator agar dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI. Menanggapi surat tersebut, Tim Kurator melalui surat no. 245/PAIIT-KL/AG-RB-FEB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 memberikan tanggapan bahwa akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut setelah diterimanya Salinan Putusan Kasasi dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Tanggal 9 Juli 2020, AZP selaku kuasa hukum Perusahaan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI dari Pengadilan Negeri Surabaya. Atas diterimanya salinan tersebut, Perusahaan kembali menyampaikan surat no. S-3077/PPA/DKBAM/0720 tanggal 20 Juli 2020 kepada Tim Kurator agar dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya 31 Juli 2020.

Tim Kurator beberapa kali melakukan lelang mesin dan peralatan pabrik PT KL, namun belum terjual.

Jaminan dari PT KL adalah berupa hak tanggungan peringkat I atas 1 aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp9.500, fidusia mesin dengan nilai Rp50.000.

8. PT Barata Indonesia (Persero)

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Talangan dan Modal Kerja No. PP-61/PPA/0821 pada tanggal 12 Agustus 2021, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pembiayaan Talangan Proyek, dan Modal Kerja dengan PT Barata Indonesia dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp295.000 dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2022.

Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk mendanai kebutuhan pelaksanaan pembangunan spare part turbin uap PLTU Banten (Jawa 9 & 10) dan Ulsan (Korea), dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Based on the letter of the Supreme Court of Republic of Indonesia number 100/Pts.Pailit/VI/1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dated June 12, 2020, a copy of the decision has been submitted to the Surabaya District Court. In its decision, MARI granted the Company's objection and ordered the Receiver Team to make an updated list of asset distribution.

The Company through letter No. S-2722/PPA/DKBAM/0620 dated June 23, 2020, has submitted a letter to the Receiver Team in order to implement the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Responding to the letter, the Receiver Team through letter no.245/PAIIT-KL/AG-RB-FEB/VI/2020 dated June 25, 2020, gave a response that they would implement the Supreme Court decision after receiving a copy of the Cassation Decision from the Surabaya District Court.

As of July 9, 2020, AZP as the Company's attorney has received a copy of the Supreme Court's decision from the Surabaya District Court. Upon receipt of this copy, the Company submitted letter no. S-3077/PPA/DKBAM/0720 dated July 20, 2020, to the Receiver Team in order to carry out the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia by July 31, 2020.

The Receiver Team conducted auctions for PT KL factory machines and equipment no proceed yet.

The collaterals from PT KL are in the form of a mortgage of right of rank I for 1 land and / or building asset amounted to Rp9,500, a machine fiduciary amounted to Rp50,000.

8. PT Barata Indonesia (Persero)

Based on the Bailout Loan and Working Capital Agreement No. PP-61/PPA/0821 on August 12, 2021, the Company provided a Loan Facility in the form of Project bailout Financing, and Working Capital with PT Barata Indonesia with a maximum principal amount of Rp295,000 with an interest rate at 15% per annum. Due on August 11, 2022.

The purpose of the loan facility withdrawal is to fund the construction of spare parts for steam turbine PLTU Banten (Java 9 & 10) and Ulsan (Korea), with a contract value of approximately Rp232,000. A special event to fund the need for

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rp232.000. Secara khusus untuk mendanai kebutuhan pembelian barang dan jasa modal kerja untuk pelaksanaan keseluruhan Proyek Siemens.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan sebesar Rp99.000. Penerimaan pembayaran di tahun berjalan sebesar Nihil. Saldo pada 31 Desember 2021 sebesar Rp99.000.

9. Perum Perumnas

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Talangan No. PP-06 pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan memberikan Fasilitas Pinjaman berupa Pembiayaan Talangan PT Perumnas dengan jumlah pokok fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp140.000 dengan tingkat suku bunga 13% per tahun. Jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2021.

Tujuan Penggunaan fasilitas pinjaman menjadi 2 (dua) Tranche yaitu Tranche A untuk pemenuhan pendanaan guna melakukan refinancing atas Sebagian utang pokok MTN VII Perumnas 2019 sedangkan Tranche B guna untuk pemenuhan modal kerja untuk perbaikan unit persediaan.

Kemudian dilakukan Addendum I pada tanggal 05 Januari 2021 PP No. 01 dengan tujuan perpanjangan Jatuh Tempo pinjaman sampai dengan 21 April 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp100.000. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Nihil. Penerimaan pembayaran di tahun berjalan adalah sebesar Rp6.490. Saldo pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp93.510.

10. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survei Udara Penas (Persero)

Pada tahun 2020, Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham PT Survei Udara Penas ("PT Penas") memiliki kebijakan strategis melalui pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, dengan PT Penas yang akan menjadi induk holding. PT Penas memperoleh arahan dari PMO Holding untuk melakukan restrukturisasi secara menyeluruh melalui:

- Pelepasan saham yang dimiliki di anak perusahaan PT Penas yaitu PT Pratama Persada Airborne;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

the procurement of goods and working capital services for the implementation of the entire Siemens Project.

The balance as of December 31, 2020 is Nil. The total loan balance for the current year is amounting to Rp99,000. Payment receipts in the current year is amounting to Nil. The balance on December 31, 2021 is Rp 99,000.

9. Perum Perumnas

Based on the Bailout Loan Agreement No. PP-06 on July 6, 2020, the Company provided a Loan Facility in the form of PT Perumnas bailout financing with a maximum principal amount of Rp140,000 with an interest rate of 13% per annum. Due on January 5, 2021.

The purpose of the loan facility withdrawal consists of 2 (two) tranches, namely Tranche A to fulfill funding to refinance part of the 2019 Perumnas MTN VII principal debt, while Tranche B is to fulfill working capital to repair inventory units.

Then Addendum I was carried out on January 5, 2021, PP No. 01 with the aim of extending the maturity of the loan until April 21, 2022.

The balance as of December 31, 2020 is amounting to Rp100,000. The total balance of loan disbursement in the current year is amounting to Nil. Payment receipts in the current year is amounting to Rp6,490. The balance on December 31, 2021 is amounting to Rp93,510.

10. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) d/h PT Survei Udara Penas (Persero)

In 2020, the Ministry of SOE as the Shareholder of PT Survei Udara Penas ("PT Penas") has a policy through the establishment of a Tourism and Supporting BUMN Holding, with PT Penas as the holding parent. PT Penas received a directive from PMO Holding to carry out a complete restructuring through:

- Release of shares owned by a subsidiary of PT Penas, namely PT Pratama Persada Airborne;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Pelunasan/restrukturisasi seluruh kewajiban PT Penas.

Dengan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2020, PT Penas melakukan pelunasan kewajiban kepada Perusahaan sebesar Rp134.496 dengan rincian utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman

- i) Perjanjian Pinjaman Investasi dengan utang pokok sebesar Rp11.000 dan utang bunga sebesar Rp2.994;
- ii) Perjanjian Panjima Dana Talangan dengan utang pokok sebesar Rp5.268, utang tunggakan bunga sebesar Rp84 dan utang denda bunga sebesar Rp0,2;
- iii) Perjanjian Restrukturisasi Hutang dengan utang pokok sebesar Rp107, utang tunggakan bunga sebesar Rp0,5;
- iv) Biaya talangan total sebesar Rp8.307;

Adapun pelunasan seluruh kewajiban PT PPA dilakukan melalui mekanisme:

- 1) Pelepasan seluruh saham PT Penas di PT Airborne (90%) dilakukan sebagai kompensasi pembayaran sebagian kewajiban PT Penas sebesar Rp13.959 kepada PT PPA melalui Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang melalui Share-Settlement Saham dalam PT Airborne No. 130 tanggal 31 Desember 2020, yang ditindaklanjuti dengan pengalihan saham PT Airborne kepada PT PPA melalui Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 132 tanggal 31 Desember 2020;
- 2) Pelunasan sisa kewajiban PT Penas sebesar Rp120.536 kepada PT PPA dan PT PPA Finance yang bersumber dari penerimaan pinjaman baru berupa Fasilitas *Refinancing* dari Bank BTN dengan plafond sebesar Rp145.115 melalui Akta Perjanjian Kredit Swadana No. 22/PK-Swad/KGS/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Untuk mendukung proses pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung serta penerimaan pinjaman baru dari Bank BTN, Perusahaan memberikan 2 (dua) fasilitas pinjaman baru kepada PT Penas sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Pinjaman Modal Kerja No. 126 tanggal 31 Desember 2020 dengan plafond sebesar Rp50.000, dengan tujuan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Repayment / restructuring of all obligations of PT Penas.

With the maturity date on November 30, 2020, PT Penas paid off its obligations to PT PPA amounting to Rp134,496 with details of the debt based on the Loan Agreement:

- i) Investment Loan Agreement with principal debt of Rp11,000 and interest payable of Rp2,994;
- ii) Agreement of Panjima Fund Bailout with principal debt of Rp5,268, interest arrears payable of Rp84 and interest penalty payable of Rp0.2;
- iii) Debt Restructuring Agreement with principal debt of Rp107, interest arrears payable of Rp0.5;
- iv) The total bailout fee is Rp8,307;

The settlement of all obligations of PT PPA is carried out through the following mechanisms:

- 1) The disposal of all PT Penas shares in PT Airborne (90%) was carried out as compensation for the partial payment of PT Penas' obligations of Rp. 13,959 to PT PPA through Deed of Debt Settlement Agreement through Share-Settlement of Shares in PT Airborne No. 130 dated December 31, 2020, which was followed up by the transfer of PT Airborne's shares to PT PPA through the Deed of Share Purchase Agreement No. 132 December 31, 2020;
- 2) Repayment of the remaining liabilities of PT Penas in the amount of Rp120,536 to PT PPA and PT PPA Finance from the receipt of a new loan in the form of Refinancing Facility from Bank BTN with a ceiling of Rp.145,115 through the Deed of Self-funding Credit Agreement No. 22/PK-Swad/KGS/BCSU/XII/2020 dated December 30, 2020;

To support the process of establishing the Tourism and Supporting BUMN Holding and receiving new loans from Bank BTN, The Company provided 2 (two) new loan facilities to PT Penas as follows:

- 1) Working Capital Loan Facility No. 126 dated December 31, 2020 with a ceiling of Rp50,000, with the aim of using the funds to

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional PT Penas dalam melaksanakan pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, termasuk pembayaran biaya dan bunga terkait Fasilitas Refinancing dari Bank BTN;

- 2) Fasilitas Pinjaman Siaga No. 127 tanggal 31 Desember 2020 dengan plafond sebesar Rp145.115, dengan tujuan penggunaan dana untuk melunasi seluruh pokok yang terutang oleh PT Penas kepada Bank BTN berdasarkan Fasilitas Refinancing dari Bank BTN ketika jatuh tempo. Atas fasilitas ini, PT PPA memberikan jaminan deposito sebesar Rp145.115 yang diikat secara Gadai kepada Bank BTN berdasar Akta Gadai No. 10 tanggal 18 Januari 2021;

PT Penas memberikan jaminan berupa hak tanggungan peringkat I atas 2 (dua) aset tanah dan/atau bangunan dengan nilai Rp4.840, fidusia 2 (dua) unit airframe pesawat Cessna 402B dan C208 dengan nilai Rp1.250, fidusia 4 (empat) unit engine pesawat 402B dengan nilai Rp2.160, fidusia 1 (satu) unit engine C208 dengan nilai Rp1.055, fidusia 1 (satu) unit Camera Large Format dan 16 peralatan IT dengan nilai Rp13.173.

Pada tanggal 1 Juli 2021, PT Penas telah mendapatkan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Perubahan Maksud dan Tujuan termasuk perubahan PT Penas menjadi PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero). Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2021 telah terbit Peraturan Pemerintah No. 104 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT API serta Keputusan Menteri Keuangan No. 498/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perso) PT API. Serta pada tanggal 14 Desember 2021, melalui surat keputusan Menteri BUMN No. S-970/MBU/12/2021 dan S-971/MBU/12/2021 perihal Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar PT API.

Paralel dengan proses pembentukan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, PT API juga berupaya mengajukan fasilitas pinjaman baru kepada Bank BTN sebesar Rp500.000 dengan tujuan penggunaan dana untuk corporate general purpose loan, termasuk dapat digunakan juga untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Perusahaan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

meet the operational cost needs of PT Penas in carrying out the establishment of a Tourism and Supporting BUMN Holding, including payment of fees and interest related to Refinancing Facilities from Bank BTN;

- 2) Standby Loan Facility No. 127 dated December 31, 2020 with a ceiling of Rp145,115, with the aim of using the funds to pay off all principal owed by PT Penas to Bank BTN based on the Refinancing Facility from Bank BTN when it matures. For this facility, PT PPA provides a deposit guarantee of Rp145,115 which is tied as a Pawn to Bank BTN based on the Deed of Pawn No. 10 January 18, 2021;

PT Penas provides guarantees in the form of first rank mortgage over 2 (two) land and/or building assets with a value of Rp4,840, fiduciary 2 (two) units of Cessna 402B and C208 airframes with a value of Rp1,250, fiduciary 4 (four) units 402B aircraft engine with a value of Rp2,160, fiduciary 1 (one) C208 engine unit with a value of Rp1,055, fiduciary 1 (one) unit Camera Large Format and 16 IT equipment with a value of Rp13,173.

On July 1, 2021, PT Penas has received Government Regulation No. 72 concerning Changes in Purpose and Objectives including the change from PT Penas to PT Aviassi Wisata Indonesia (Persero). Furthermore, on October 6, 2021, Government Regulation No. 104 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT API and the Decree of the Minister of Finance No. 498/KMK.06/2021 concerning the Determination of the Value of the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Perso) PT API. And on December 14, 2021, through the Decree of the Minister of SOEs No. S-970/MBU/12/2021 and S-971/MBU/12/2021 regarding Changes in Capital Structure and Changes in the Articles of Association of PT API.

Parallel to the process of forming the Tourism and Supporting BUMN Holding, PT API is also trying to apply for a new loan facility to Bank BTN amounting to Rp.500,000 with the aim of using the funds for corporate general purpose loans, which can also be used to pay off all obligations to the Company.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.057. Jumlah saldo pencairan pinjaman di tahun berjalan adalah sebesar Rp15.525. Penerimaan pembayaran di tahun berjalan menggunakan settlement saham adalah sebesar Rp.123.057. Saldo pada 31 Desember 2021 sebesar Rp15.525

11. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH")

Berdasarkan Akta Perjanjian Induk Restrukturisasi/ Master Restructuring Agreement ("MRA") No. 30 tanggal 9 September 2021 ("MRA"), Perusahaan, PT BMI, dan BPKH ("Para Pihak") sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan aset tagihan milik PT BMI ("Tagihan BMI") dengan melaksanakan serangkaian transaksi dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Perusahaan akan menerbitkan Sukuk PPA yang akan dialihkan kepada BMI. Sukuk PPA dialihkan dengan nilai nominal Rp13.051.069, jangka waktu 20 tahun dan jatuh tempo tanggal 15 November 2041 (Catatan 35);
- ii. PT BMI melakukan transaksi jual beli dan pengalihan Tagihan BMI senilai Rp10.000.000 kepada pembeli tagihan yang disepakati oleh Para Pihak;
- iii. Para Pihak sepakat dalam rangka mengelola Tagihan BMI akan ada suatu perjanjian kerja sama pengelolaan aset;
- iv. PT BMI akan menerbitkan Sukuk BMI yang akan dialihkan kepada Perusahaan. Sukuk BMI dialihkan dengan nilai nominal Rp15.041.101, jangka waktu 20 tahun dan jatuh tempo tanggal 15 November 2041 (Catatan 35);
- v. Sebagai penerbit Sukuk, maka Perusahaan dan PT BMI dapat mengaplikasikan perjumpaan utang atas hak tagih pada tanggal jatuh tempo sukuk dan/atau tanggal pengakhiran awal dari perjanjian kerja sama pengelolaan aset

12. PT AMC Indonesia Sukses ("PT AMC")

Dalam rangka melaksanakan arahan MRA, pada Perusahaan, BMI, dan PT AMC telah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset (PKPA) No 25 tanggal 15 November 2021 ("PKPA") dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tagihan BMI yang dialihkan kepada PT AMC ("Aset yang Dikelola").

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

The balance as of December 31, 2020 is amounting Rp123,057. The total balance of loan disbursement in the current year is Rp15,525. Payment receipts in the current year using share settlement is amounting Rp123,057. The balance as of December 31, 2021 is amounting Rp15,525.

11. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH")

According to Master Restructuring Agreement ("MRA") Deed No. 30 dated September 9, 2021, the Company, PT BMI, and BPKH ("Parties") have agreed to cooperate in the management of PT BMI claimed asset ("BMI Claims") by carrying out a series of transactions and terms as follow:

- i. The Company will issue Sukuk PPA which will be transferred to PT BMI. The Sukuk PPA will have a nominal value of Rp13,051,069, term of 20 years, and maturity date on November 15, 2041 (Note 35);
- ii. PT BMI will carry out a sales and purchase transactions and transfer of PT BMI amounted to Rp10,000,000 to the agreed Claim Buyer;
- iii. The Parties agreed that to manage the BMI Claim there will be an asset management cooperation agreement;
- iv. PT BMI will issue Sukuk BMI which will be transferred to The Company. The Sukuk BMI will have a nominal value of Rp15.041.101, term of 20 years, and maturity date on November 15, 2041 (Note 35);
- v. As the issuer of the Sukuk, The Company and PT BMI may apply the meeting offsetting debt and claiming rights at the date of maturity or the early termination date of the asset management cooperation agreement.

12. PT AMC Indonesia Sukses ("PT AMC")

In relation to carry out the directives of MRA, the Company, BMI, and PT AMC have agreed to sign the Deed of Asset Management Cooperation Agreement No. 25 dated November 15, 2021 ("PKPA") in order to optimally manage the BMI Claims transferred to PT AMC ("Managed Assets").

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tanggal 7 Februari 2022, PKPA diubah dengan Addendum No. PK-4/PPA/0222, dengan tambahan ketentuan yang termasuk didalamnya sebagai berikut:

- i. Jangka waktu PKPA adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal PKPA dan dapat diperpanjang AMC atas diskresinya sendiri;
- ii. AMC akan melakukan peninjauan atas kinerja Perusahaan berdasarkan Laporan Triwulan Asset Manager;
- iii. Perusahaan dapat merekomendasikan perwakilannya dalam Komite Pengelola untuk disetujui oleh AMC;
- iv. Keputusan Komite Pengelola dan pelaksanaannya perlu mendapatkan persetujuan dari AMC.

46. Manajemen Risiko Keuangan

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko finansial yang utamanya terkait risiko kredit, likuiditas dan risiko pasar. Risiko-risiko tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- Risiko kredit: risiko yang timbul karena ketidakmampuan debitur atau pihak lawan untuk membayar kewajiban jatuh tempo, sehingga Grup akan mengalami kerugian.
- Risiko likuiditas: risiko yang terjadi ketika Grup gagal memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau dalam hal penyediaan dana kepada pihak lain atau kewajiban untuk membiayai kegiatan Grup.
- Risiko pasar: risiko kerugian yang terjadi karena adanya fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terutama suku bunga dan nilai tukar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Menetapkan rasio jaminan terhadap pinjaman debitur 130%;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

On February 7, 2022, PKPA has been revised with Side Letter No. PK-4/PPA/0222, with additional terms which include as follow:

- i. The terms of the PKPA is 6 (six) month since the date of the PKPA and can be extended by the discretion of PT AMC;
- ii. AMC will monitor the performance of the Company based on the Asset Manager Three Months Reports;
- iii. The Company may recommend their representative in the Management Committee to be approved by PT AMC;
- iv. The decision of the Management Committee and the implementation require the approval of PT AMC.

46. Manajemen Risiko Keuangan

a. Financial Risk Management Policies

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to financial risks which mainly related to credit risk, liquidity risk and market risk. Those risks are defined as follows:

- Credit risk: the risk that occurs due to debtor or counterparty's failure to pay its maturing obligations, hence the Group will incur loss.
- Liquidity risk: the risk that occurs when the Group fails to meet its short-term obligations, or in relation to provide funds to other parties or obligation to finance the Group's activities.
- Market risk: the risk of losses that occurs due to fluctuation in the value of financial instrument as a result of changes in market price, mainly due to movements in interest rates and exchange rates.

In order to effectively manage those risks, the Board of Directors have approved some strategies for the management of financial risks, which are in line with corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks that the Group face.

The major guidelines of this policy are the following:

- Determine the collateral ratio for debtor's loans of 130%;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

- Menetapkan diversifikasi sektor industri.
- Menetapkan daftar negatif investasi;
- Menetapkan maksimal penempatan dana pada satu pihak;
- Tersedia kebijakan, prosedur, pedoman serta tata kerja yang memadai dan menyeluruh untuk menjaga kelangsungan operasi Grup.

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang yang timbul dari kegiatan investasi dan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN.

Tabel berikut menyajikan jumlah eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

- Determine the diversification of the industrial sector.
- Establish a negative list of investments;
- Determine the maximum placement of funds on one party;
- Adequate and comprehensive policies, procedures, guidelines and work procedures are in place to maintain the continuity of the Group's operations.

Credit Risks

Credit risk arises due to counterparties' failure to fulfill their contractual obligations that result in financial losses to the Group. The Group's credit risk is primarily inherent in cash and cash equivalents, receivables arising from investing activities and restructuring and/or revitalization of BUMN.

The following table presents the maximum amount of exposure to credit risk on financial assets:

	31 Desember 2021/ Desember 31, 2021			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai <i>Unimpaired in Value</i>	Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired in Value</i>	Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Asset
Kas dan Setara kas	2,627,328	--	2,627,328	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	575,119	339,642	914,761	Short-term Investment Loans
Piutang usaha	1,118,654	266,350	1,385,004	Accounts Receivable
Piutang retensi	163,022	51,755	214,777	Retention Receivables
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	251,106	122,980	374,086	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang diberikan - Dana Talangan	252,304	365,041	617,345	Loan Receivable - Bailout
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	1,504,552	32,938	1,537,490	Gross Amount Due from Customers
Cessie Piutang	302,240	305,305	607,545	Receivable Cessie
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	607,338	53,282	660,620	Long-term Investment Loans
Pinjaman yang diberikan - Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	402,763	1,375,887	1,778,650	Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi	280,522	--	280,522	Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	5,234,999	--	5,234,999	Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Investasi Jangka Panjang lainnya	546,711	101,531	648,242	Long term investment and others
Investasi Sukuk	--	--	--	Sukuk Investment
Aset Lancar Lainnya	65,364	43,408	108,772	Other Current Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	598,778	185	598,963	Other Non Current Assets
Jumlah	14,530,800	3,058,304	17,589,104	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	31 Desember 2020/ 31 December 2020			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai <i>Unimpaired in Value</i>	Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired in Value</i>	Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Asset
Kas dan setara kas	774,100	16	774,116	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	1,531,707	89,203	1,620,910	Short-term Investment Loans
Piutang usaha	1,435,385	251,247	1,686,632	Accounts Receivable
Piutang retensi	151,012	49,895	200,907	Retention Receivables
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	306,082	74,152	380,234	Joint Venture Construction Receivables
Pinjaman yang diberikan - Dana Talangan	340,087	215,467	555,554	Loan Receivable - Bailout
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	2,331,224	50,959	2,382,183	Gross Amount Due from Customers
Cessie Piutang	372,511	227,072	599,583	Receivable Cessie
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	681,689	93,623	775,312	Long-term Investment Loans
Pinjaman yang diberikan - Dana Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	536,683	1,241,324	1,778,007	Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	38,944	--	38,944	Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Investasi pada Efek Ekuitas	220,626	--	220,626	Investment in Equity Securities
Aset Lancar Lainnya	67,342	47,133	114,475	Other Current Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	849,611	185	849,796	Other Non Current Assets
Jumlah	9,637,003	2,340,276	11,977,279	Total

Kualitas Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit terkait dengan penempatan dana pada bank-bank bereputasi baik dengan peringkat layak investasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait kegiatan investasi seperti pembiayaan dan pembelian surat utang, pengelolaan risiko kredit dilakukan dengan cara, antara lain namun tidak terbatas pada:

- Melakukan *due diligence* dan kajian mengenai kelayakan suatu pembiayaan/investasi (antara lain aspek komersial, keuangan, hukum) sebelum membuat keputusan investasi.
- Memantau dan mengevaluasi kinerja debitur/proyek/penerbit surat utang untuk memastikan pemenuhan persyaratan/kondisi yang diatur dalam perjanjian.
- Memperkuat proteksi struktural dalam setiap skema pembiayaan, seperti: *cash waterfall*, kewenangan untuk mengontrol, jaminan dan penjaminan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja setiap investasi secara aktif sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasi secara dini apabila terjadi penurunan kinerja investasi.
- Melakukan upaya penagihan secara intensif agar pembayaran kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia)

Quality Of Financial Assets

The Group manages credit risk associated with placement of funds in reputable banks with investment grade ratings to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy.

Regarding investment activities such as loans and debt purchase, the credit risk management is carried out by, including but not limited to:

- Conducting due diligence and feasibility study of a loan/investment (e.g. aspects of commercial, financial, and legal) before making an investment decision.
- Monitoring and evaluating the performance of debtor/project/debt issuer to ensure compliance against terms/condition stipulated in the agreement.
- Strengthening structural protection in each financing scheme, such as: cash waterfall, control of authority, collateral and collateral.
- Actively monitoring and evaluating the performance of each investment thus early anticipatory action can be taken in the event of any potential decline in the investment performance.
- Conducting intensive collection efforts hence repayment of obligations aligns with the agreed agreement.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur. Peringkat menggunakan Lembaga PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

counterparty default rates. The rating uses Lembaga PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

	2021 Rp	2020 Rp
Kas dan Bank		
Bank Pihak Berelasi		
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal		
AAA	355,123	237,442
AA	1,188	520
Subtotal	356,311	237,962
Bank Pihak Ketiga		
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal		
AAA	1,416	1,247
AA	344	1,239
A+	820	--
A	128,135	35,947
AA-	410	--
BBB	86	--
Tanpa Peringkat	360,232	--
Subtotal	491,443	38,433
Deposito Berjangka		
Bank Pihak Berelasi		
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal		
AAA	453,161	67,454
AA+	485,816	--
AA	--	406,367
Sub Total	938,977	473,821
Bank Pihak Ketiga		
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal		
AAA	430,597	2,900
A	10,000	21,000
A+	250,000	--
Tanpa Rating	150,000	--
Subtotal	840,597	23,900
Dikurangi Kerugian Kredit Ekspektasian	--	(16)
Total Kas dan Setara Kas	2,627,328	774,100

Cash and Banks
Cash in Banks Related Party
Counterparty With External Credit Rating
AAA
AA
Subtotal
Cash in Banks Third Parties
Counterparties With External Credit Rating
AAA
AA
AA
A
AA-
BBB
Without Rating
Subtotal
Time Deposit
Cash in Banks Related Party
Counterparty With External Credit Rating
AAA
AA+
AA
Sub Total
Cash in Banks Third Parties
Counterparty With External Credit Rating
AAA
A
AA
Without Rating
Sub Total
Less : Expected Credit Loss
Total Cash and Cash Equivalents

Risiko Likuiditas

Manajemen telah menetapkan ketentuan/kebijakan terkait dengan pengelolaan likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menerapkan strategi sebagai berikut:

- Penetapan skala prioritas untuk kegiatan investasi yang akan dibiayai dengan mempertimbangkan antara lain tingkat imbal hasil, risiko, dan nilai strategis proyek yang akan dibiayai.
- Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan berbagai pihak serta mendayagunakan sumber daya Perusahaan dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak lain, baik sumber dana dari perbankan maupun dari hasil penerbitan surat utang.
- Melakukan restrukturisasi atas debitur bermasalah agar mampu membayar kewajibannya kepada Perusahaan sesuai dengan arus kas hasil usahanya.

Liquidity Risks

Management has set provisions/policies related to liquidity management. The Group manages liquidity risk by implementing strategies as follows:

- Determining the priority scale for investment activities to be financed by considering, among others, the level of returns, risks, and the strategic value of the projects to be financed.
- Build good relationships and networks with various parties and utilize the Company's resources in order to obtain funding from other parties, both sources of funds from banks and from the issuance of debt securities.
- Undertake restructuring of problematic debtors enabling them to pay their obligations to the Company in accordance with the cash flow from their operations.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya dari tanggal laporan posisi keuangan:

The following table analyse financial liabilities based on their maturity since the date of statement of financial position:

2021							
<i>Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months</i>	<i>3-12 Bulan/ Months</i>	<i>1 - 5 Tahun/ Years</i>	<i>Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 years</i>	<i>Jumlah/ Total</i>			
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities	
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>						<u>Measured at amortised cost</u>	
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	343,618	2,048,278	834,874	349,598	3,576,368	Bank and Financial Institution Loans	
Utang Sukuk	--	--	--	3,134,402	3,134,402	Sukuk Liabilities	
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	--	--	449,545	--	449,545	Short-Term Medium Term Notes	
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	967,581	--	--	--	967,581	Gross Amount Due to Third Parties	
Obligasi	--	--	445,000	197,100	642,100	Bonds	
Jumlah	1,311,199	2,048,278	1,729,419	3,681,100	8,769,996	Total	
2020							
<i>Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months</i>	<i>3-12 Bulan/ Months</i>	<i>1 - 5 Tahun/ Years</i>	<i>Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 years</i>	<i>Jumlah/ Total</i>			
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities	
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>						<u>Measured at amortised cost</u>	
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	348,639	3,249,695	862,876	349,598	4,810,808	Bank and Financial Institution Loans	
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	--	--	748,545	--	748,545	Short-Term Medium Term Notes	
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	929,472	--	--	--	929,472	Gross Amount Due to Third Parties	
Obligasi	--	--	445,000	197,100	642,100	Bonds	
Jumlah	1,278,111	3,249,695	2,056,421	546,698	7,130,925	Total	

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing terjadi apabila Grup memiliki posisi mata uang asing yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dengan debitur. Mitigasi risiko atas posisi mata uang asing ini antara lain dengan menerapkan lindung nilai secara alami, dimana pemberian pembiayaan dalam mata uang asing menggunakan sumber dana dalam mata uang asing yang sama.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat pada denominasi aset dan liabilitas Grup, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap:

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange rate risk occurs if the Group has a foreign currency position arising from transactions in foreign currencies with Debtors. The mitigation of risk on foreign currency positions, among others, is through the establishment of a natural hedging policy, namely the provision of financing in foreign currency using sources of funds in foreign currencies as well.

The following table shows the sensitivity to possible changes in the United States Dollar exchange rate of the Group denominated assets and liabilities, with all other variables held constant:

	Kenaikan (Penurunan) Dalam Mata Uang Asing Dalam Basis Poin/ Increase (Decrease) In Currency in Basis Points	Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax	
31 Desember 2021	+ 100 - 100	16,023,990 (16,023,990)	31 December 2021
31 Desember 2020	+ 100 - 100	25,977,514 (25,977,514)	December 31, 2020

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Tabel berikut menunjukkan instrumen keuangan Grup dalam mata uang asing:

The following table shows the financial instruments of the Group in foreign currency:

	2021		2020		
	Nilai Penuh/ Full Amount	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	Nilai Penuh/ Full Amount	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Kas dan Setara Kas	160,240	2,286,463,934	259,775	3,664,128,350	Cash and Cash Equivalents
Aset Keuangan	<u>160,240</u>	<u>2,286,463,934</u>	<u>259,775</u>	<u>3,664,128,350</u>	Financial Asset

Risiko Suku Bunga Pasar

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko nilai wajar instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Secara umum risiko suku bunga yang dihadapi Grup relatif kecil karena suku bunga sumber dana Grup dalam bentuk suku bunga tetap.

Interest Rate Risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows on a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The fair value of interest rate risk is the risk that the fair value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. In general, the interest rate risk faced by the Group is relatively small because the interest rate on the Group's sources of funds is in the form of a fixed interest rate.

Aset atau liabilitas keuangan yang terpengaruh risiko suku bunga pasar adalah penerimaan pinjaman oleh Grup dari bank (kreditur).

Financial assets or liabilities that are subject to market interest rate risk are the receipt of loans by the Group from banks (creditors).

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan telah mencerminkan nilai wajarnya.

b. Fair Value of Financial Instrument

As of December 31, 2021, and 2020, management estimates that the carrying value of short-term financial assets and liabilities and those which maturity not determined have reflected their fair value.

Investasi saham pada PT Bank Bukopin Tbk merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari harga di pasar aktif (Tingkat 1). Investasi saham pada PT Indosat (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari harga di pasar aktif (Tingkat 1).

Investment in shares in PT Bank Bukopin Tbk represent financial assets measured at the fair value through Profit and Loss based on price in an active market (Level 1). Investment in shares in PT Indosat (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) represent financial assets measured at the fair value through other comprehensive income based on price in an active market (Level 1).

Investasi saham pada PT Bondi Syad Mulia, PT Magnesium Gosari Internasional, PT Matoa Kidung Bahtera, PT Rezeki Intilogam Jaya, PT Sippa Kemasan Internasional, Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas dan PT National Utility Helicopters merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Investment in shares in PT Bondi Syad Mulia, PT Magnesium Gosari Internasional, PT Matoa Kidung Bahtera, PT Rezeki Intilogam Jaya, PT Sippa Kemasan Internasional, Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas dan PT National Utility Helicopters represent financial assets measured at the fair value through Profit and Loss (Level 3). Investment in

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

(Tingkat 3). Investasi saham pada PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Pratama Persada Airborne, dan PT Kawasan Industri Lampung merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Tingkat 3).

Pendekatan nilai aset bersih

Grup menggunakan nilai tercatat aset bersih pada perusahaan investasi dalam menentukan nilai investasi mereka. Investasi yang dinilai dengan menggunakan pendekatan ini, umumnya hanya berlaku untuk entitas (entitas dimana Grup melakukan investasi) yang memiliki pos-pos dalam laporan keuangan dimana nilai tercatatnya mendekati nilai wajar

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

shares in PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Pratama Persada Airborne, dan PT Kawasan Industri Lampung represent financial assets measured at the fair value through other comprehensive income (Level 3).

Net assets approach

The value of the Group's investments determined by using net assets investment of the investment entities. Investments that are calculated using this approach, only applied to entities (entities in which the Group invests) that have items in the financial statements where the carrying amount is close to fair value.

47. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada stakeholder lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

47. Capital Management

The objectives of the Group when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

	2021 Rp	2020 Rp
Manajemen Permodalan		
Total Liabilitas	8,293,690	9,296,339
Dikurangi : Kas dan Setara Kas	2,627,328	774,100
Utang Neto	5,666,362	8,522,239
Total Ekuitas	9,368,811	3,658,104
Rasio Utang terhadap Modal	0.60	2.33

Capital Management
Total Liability
Less: Cash and Cash Equivalent
Net Debt
Total Equity
Debt to Equity Ratio

48. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

48. Related Parties Balance and Transactions

Disclosure of significant balance and transactions with related parties are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
JV Nindya - Sarana	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Sejahtera	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Adhi Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha / Investment in Joint Ventures, Accounts Receivable
JV Nindya - Abel	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Adhi - Basuki	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Adhi - Penta	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Andesmont	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Bahagia Bangunnusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Bangun Bejana Baja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Bina Nusa Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Bumi Agung	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Bumi Agung Annusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Bumi Karsa	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Bunga Raya Lestari	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Cipuga	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Citra - Kharisma	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI / Investment in Associates and Joint Ventures, Control by the Central Government of the RI	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha / Investment in Joint Ventures, Accounts Receivable
JV Nindya - Damai	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Dewa Ruci	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi/ Retention Receivable
JV Nindya - Gerbang Saranabaja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Hutama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI / Investment in Associates and Joint Ventures, Control by the Central Government of the RI	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha / Investment in Joint Ventures, Accounts Receivable
JV Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Inti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Jaya Konstruksi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Karya Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Kencana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - MCC - Wika - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI / Investment in Associates and Joint Ventures, Control by the Central Government of the RI	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha / Investment in Joint Ventures, Accounts Receivable
JV Nindya - Mettana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

<i>Related Parties</i>	<i>Relationship</i>	<i>Transactions</i>
JV Nindya - Modern Widya Tehnical	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Modern WT	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Passokkorang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - PDKA	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - PP	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI / Investment in Associates and Joint Ventures, Control by the Central Government of the RI	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha / Investment in Joint Ventures, Accounts Receivable
JV Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI / Investment in Associates and Joint Ventures, Control by the Central Government of the RI	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha / Investment in Joint Ventures, Accounts Receivable
JV Nindya - Rudy Jaya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Sacna	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI / Investment in Associates and Joint Ventures, Control by the Central Government of the RI	Investasi pada Ventura Bersama, Piutang Usaha / Investment in Joint Ventures, Accounts Receivable
JV Nindya - Sarana	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Surya	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
JV Nindya - Surya Mataram Sakti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Tamiang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Waskita Jaya Purnama	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Wijaya - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama / Investment in Joint Ventures
JV Nindya - Wijaya Karya (Persero)	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / Investment in Associates and Joint Ventures	Investasi pada Ventura Bersama, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Investment in Joint Ventures, Billing of Construction Service
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk / Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Investasi Jangka Panjang Lainnya / Other Long Term Investment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro/ Uang Muka Jk. Pendek/ Cash and Cash Equivalent, Bank and Financial Institution Loan Placement of Current Account, Short-term Advances from Customers
PT Bank Bukopin Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro/ Cash and Cash Equivalent, Bank and Financial Institution Loan Placement of Current Account
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro/ Cash and Cash Equivalent, Bank and Financial Institution Loan Placement of Current Account
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro/ Cash and Cash Equivalent, Bank and Financial Institution Loan Placement of Current Account
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan, Penempatan Giro/ Cash and Cash Equivalent, Bank and Financial Institution Loan Placement of Current Account
Perum LPPNPI (Airmav Indonesia)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
Perum Perumnas	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pertamina Geothermal Energy	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT PTPN IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Waskita Beton Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penagihan atas Jasa Konstruksi / Billing of Construction Service
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / Controlled by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro / Placement of Current Account
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / Placement of Current Account, Bank and Non Bank Loans
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Bank dan Non Bank, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Bank and Non Bank Loans, Billing of Construction Service
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Retention Receivable, Billing of Construction Service
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Retention Receivable, Billing of Construction Service
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Retention Receivable, Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service
PT PLN (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Retention Receivable, Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service
Perum Perumnas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi/ Retention Receivable
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi/ Retention Receivable
PTPP Presisi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Retensi/ Retention Receivable
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Billing of Construction Service/ Accounts Receivable, Billing of Construction Service
PT Hakaaston	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Accounts Receivable, Billing of Construction Service
PT Utama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Accounts Receivable, Billing of Construction Service

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Hubungan/ Relationship	Transaksi/ Transactions
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Accounts Receivable, Billing of Construction Service
PT Survai Udara Panas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Accounts Receivable, Billing of Construction Service
PT Yodya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Accounts Receivable, Billing of Construction Service
PT Bukit Asam Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Accounts Receivable, Billing of Construction Service
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Accounts Receivable, Billing of Construction Service
PT Utama Karya Infrastruktur	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Accounts Receivable, Retention Receivable, Billing of Construction Service
PT Krakatau Engineering & Construction	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Penagihan atas Jasa Konstruksi / Accounts Receivable, Retention Receivable, Billing of Construction Service
PT Magnesium Gosari Internasional	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Piutang Usaha, Piutang Retensi/ Accounts Receivable, Retention Receivable
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Uang Muka Jk. Pendek/ Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers, Short-term Advances from Customers
PT PP Presisi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha, Tagihan Bruto/ Accounts Receivable, Gross Amount Due from Customers
PT Adhi Persada Gedung	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
PT Perkebunan Nusantara IV	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
PT Telekomunikasi Selular	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
PT Telkom	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Piutang Usaha/ Accounts Receivable
PT Pertamina Bina Medika IHC	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Tagihan Bruto, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Gross Amount Due from Customers, Billing of Construction Service
PT Bhandha Ghara Rekasa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Uang Muka Jk. Pendek, Penagihan atas Jasa Konstruksi/ Short-term Advances from Customers, Billing of Construction Service
PT Pindad (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Artha Bangun Pratama	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Control by the Central Government of the RI	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Duta Mentari Raya	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Bondi Syad Mulia	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Magnesium Gosari International	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT National Utility Helicopters	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Rejeki Intilogam Jaya	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Matoa Kidung Samudera	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Matoa Kidung Bahtera	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT Pratama Persada Airbone	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan
PT SIPPA Kemasan Internasional	Entitas Investasi Perusahaan/ Corporate Investment Entity	Pinjaman Investasi/ Investment Loan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Detail of items associated with the related parties transaction:

	2021 Rp	2020 Rp	2021 %	2020 %	
Aset					Asset
Kas dan Setara Kas	1,294,783	711,077	7.33%	5.58%	Cash & Cash Equivalent
Piutang Usaha	224,824	543,091	1.27%	3.98%	Accounts Receivable
Piutang Retensi	46,328	42,186	0.26%	0.33%	Retention Receivable
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	252,304	340,087	1.43%	2.62%	Loans Bailout
Tagihan Bruto	620,724	530,686	3.51%	4.10%	Gross Amount Due from Customers
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	402,763	536,683	0.00%	4.14%	Loans Receivable Restructuring and/or Revitalization
Liabilitas					Liabilities
Utang Usaha	46,010	18,264	0.26%	0.14%	Accounts Payable
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan	2,221,693	2,947,238	12.58%	23.82%	Bank and Financial Institution Loans
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Pendek	21,495	13,588	0.12%	0.10%	Short-Term Advances from Customers
Uang Muka Pemberi Kerja Jangka Panjang	10,943	23,300	0.06%	0.18%	Long-Term Advances from Customers
Pendapatan					Revenue
Pendapatan Usaha	117,443	184,829	0.66%	4.20%	Revenue

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah pendapatan.

The percentage above is a comparison with total assets, total liabilities and total revenue.

Transaksi-transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar

Related party transactions are carried out on terms equivalent to those applicable in a normal transaction.

49. Segmen Operasi

49. Operating Segment

Segmen operasi Grup dapat digambarkan sebagai berikut dengan pembagian per masing-masing entitas dimana penjelasan operasional masing-masing entitas dapat dilihat pada informasi umum.

The Group's operating segments can be displayed as follows by dividing each entity while the operational explanation of each entity can be seen in general information.

Berikut ini adalah informasi berdasarkan segmen operasi:

Segment information based on operating segments:

	31 Desember/ December 31 - 2021							
	Investasi/ Investment	Investasi/ PPA	Investasi/ PPAK	Pembiayaan/ Financing	Fabrikasi Beton/ Concrete Fabrication	Konstruksi/ Construction	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation
PENDAPATAN USAHA	2,139,954	2,115,681	24,273	77,254	108,521	4,306,842	(96,913)	6,535,658
BEBAN USAHA	(2,073,579)	(1,936,821)	(136,758)	(135,480)	(119,135)	(4,148,237)	108,065	(6,368,336)
LABA USAHA	66,375	178,860	(112,485)	(58,226)	(10,614)	158,605	11,152	167,322
Pendapatan Bunga	20,518	20,518	--	--	--	--	--	20,518
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	241	241	--	--	--	--	--	241
Beban Bunga dan Keuangan	(4,045)	(4,045)	--	--	(1,708)	(73,893)	--	(79,646)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	(1,040)	(1,806)	766	--	--	19,792	--	18,752
Beban Pajak Final	--	--	--	--	--	(127,886)	--	(127,886)
Bagian Laba Ventura Bersama	(642)	(642)	--	--	--	153,418	--	152,776
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(2,687)	(4,703)	2,016	83,841	(9,192)	(42,852)	(6,000)	23,110
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	78,720	188,423	(109,703)	25,615	(21,514)	87,214	5,152	175,187
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN	3,880	1,520	2,360	(14,036)	1,690	(1,596)	--	(10,062)
LABA TAHUN BERJALAN	82,600	189,943	(107,343)	11,579	(19,824)	85,618	5,152	165,125
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA								
- Pemilik Entitas Induk	82,600	189,943	(107,343)	11,579	(19,626)	84,763	5,152	164,468
- Kepentingan nonpengendali	--	--	--	--	(198)	855	--	657
TOTAL	82,600	189,943	(107,343)	11,579	(19,824)	85,618	5,152	165,125
TOTAL ASET	13,801,346	12,993,005	808,341	999,485	173,616	4,726,382	(2,038,328)	17,662,501
Total Liabilities	5,035,788	4,396,858	638,930	569,278	169,758	3,131,938	(613,072)	8,293,690
Total Ekuitas	8,765,558	8,596,147	169,411	430,207	3,858	1,594,444	(1,425,256)	9,368,811
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	13,801,346	12,993,005	808,341	999,485	173,616	4,726,382	(2,038,328)	17,662,501

REVENUES
OPERATING EXPENSE
OPERATING INCOME
Interest Income
Advantages of Sales of Fixed Assets
Interest and Financial Charges
Increase in Fair Value of Investment Properties
Final Tax Expense
Joint Venture Profit Section
Other income (Expenses)
INCOME BEFORE TAX
Total Income Tax Expense
INCOME FOR THE YEAR
INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Owners of The Parent Entity
Non-Controlling Interests
TOTAL
TOTAL ASSETS
Total Liabilities
Total Equity
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	31 Desember/ December 31 - 2020								
	Investasi/ Investment	Investasi/ PPA	Investasi/ PPAK	Pembiayaan/ Financing	Fabrikasi Beton/ Concrete Fabrication	Konstruksi/ Construction	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
PENDAPATAN USAHA	768,052	674,427	93,625	136,797	155,796	3,460,687	(123,488)	4,397,844	REVENUES
BEBAN USAHA	(648,179)	(547,499)	(100,680)	(136,227)	(154,472)	(3,348,670)	132,938	(4,154,610)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	119,873	126,928	(7,055)	570	1,324	112,017	9,450	243,234	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga	14,419	14,419	--	--	--	--	--	14,419	Interest Income
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	--	--	--	--	--	--	--	Advantages of Sales of Fixed Assets
Beban Bunga dan Keuangan	(2,693)	(2,693)	--	--	(1,290)	(87,821)	--	(91,805)	Interest and Financial Charges
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	7,445	--	7,445	--	--	18,724	--	26,169	Increase in Fair Value of Investment Properties
Beban Pajak Final	--	--	--	--	(1,502)	(100,207)	--	(101,709)	Final Tax Expense
Bagian Laba Ventura Bersama	(3,437)	(1,746)	(1,691)	--	--	91,342	--	87,905	Joint Venture Profit Section
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(45,522)	(5,828)	(39,694)	18,806	(13,125)	30,641	(6,000)	(15,200)	Other income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	90,065	131,080	(40,995)	19,376	(14,593)	64,695	3,450	163,013	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(41,792)	(40,326)	(1,466)	(8,173)	(1,883)	(5,396)	--	(57,244)	Total Income Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	48,293	90,754	(42,461)	11,203	(16,476)	59,299	3,450	105,769	INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA									INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
- Pemilik Entitas Induk	48,293	90,754	(42,461)	11,203	(16,311)	58,707	3,450	105,341	Owners of The Parent Entity
- Kepentingan nonpengendali	--	--	--	--	(165)	593	--	428	Non-Controlling Interests
TOTAL	48,293	90,754	(42,461)	11,203	(16,476)	59,300	3,450	105,769	TOTAL
TOTAL ASET	8,382,523	7,552,938	829,585	1,389,152	194,718	5,292,101	(2,304,051)	12,954,443	TOTAL ASSETS
Total Liabilities	5,596,417	4,682,511	913,906	1,220,697	172,374	3,796,370	(1,489,519)	9,296,339	Total Liabilities
Total Ekuitas	2,786,106	2,870,427	(84,321)	168,455	22,344	1,495,731	(814,532)	3,658,104	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8,382,523	7,552,938	829,585	1,389,152	194,718	5,292,101	(2,304,051)	12,954,443	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

50. Transaksi Non Kas

Sampai dengan tahun 2021, Grup memiliki transaksi non kas sehubungan dengan penambahan aset tetap sebesar Rp3.947.

50. Non Cash Transaction

Until the year of 2021, Group has non-cash transactions related to the addition of property, plant and equipment is amounting to Rp 3,947.

	2021 Rp	2020 Rp	
Aktivitas Investasi yang tidak mempengaruhi arus kas:			Non Cash investing activities:
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	3,947	--	Addition of property, plant and equipment through accounts payable
Penambahan (pengurangan) nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi	19,792	19,759	Addition (deduction) of value of assets through revaluation and increase in fair value of investment property
Penambahan (pengurangan) nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar aset tetap	10,711	--	Addition (deduction) of value of assets through revaluation and increase in fair value of property, plant and equipment
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	103,218	--	Addition of investment properties from property, plant and equipment reclassification
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi uang muka	67,014	--	Addition of investment properties from advance reclassification

51. Reklasifikasi

Pinjaman Bank dan Non Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan Penyajian Neraca Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan rincian yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

51. Reklasifikasi

Bank and Non-Bank Loans for the year ended 31 December 2020 have been reclassified according to the statement of financial position as of December 31, 2021 with details are as follows

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
	Rp	Rp	Rp	
Laporan Posisi Keuangan:				Statement of Financial Statement
Aset				Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	853,149	(3,538)	849,611	Other Non-Current Assets
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan				Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi	1,804,378	(6,184)	1,798,194	Related Parties
Pihak Ketiga	1,734,175	(2,500)	1,731,675	Third Parties
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	165,692	6,892	172,584	Accruals Expenses and Other Payables
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun				Current Maturities of Long Term Loans
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan				Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi	--	175,651	175,651	Related Parties
Liabilitas Jangka Panjang				Non-Current Liabilities
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan				Bank and Financial Institution Loans
Pihak Ketiga	--	131,895	131,895	Third Parties
Pihak Berelasi	1,282,685	(309,292)	973,393	Related Parties

	2020			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(4,839,557)	27,598	(4,811,959)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran Pinjaman	(6,653,917)	(10,430)	(6,664,347)	Payment for Loan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran Liabilitas Sewa	--	(17,168)	(17,168)	Payment of Lease Liabilities

52. Rekonsiliasi Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan

52. Reconciliation of Liability arising from Financing Activities

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the period ended December 31, 2021, and 2020, as follows:

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows				Transaksi Non Kas/ Non Cash Transactions			
2020 Rp	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance Cost	Amortisasi/ Amortization	Penambahan/ Additional	Selisih Kurs/ Foreign Exchange	2021 Rp	
Pinjaman Bank	4,810,808	5,784,499	(7,025,561)	--	--	--	3,576,368	Bank Loans
Utang Sukuk sebelum Saling Hapus dengan Investasi pada Sukuk	--	3,051,069	--	--	83,333	--	3,134,402	Sukuk Payable before Offsetting with Investment in Sukuk
Surat Utang Jangka Menengah	748,545	--	(300,000)	1,000	--	--	449,545	Medium Term Notes
Utang Obligasi	640,360	--	380	--	--	--	640,740	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	14,179	--	(10,410)	--	32,085	--	35,854	Lease Liabilities
	6,213,892	8,835,568	(7,335,971)	1,380	83,333	32,085	7,836,909	

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Transaksi Non Kas/ Non Cash Transaction				
2019	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance Cost	Non Cash Changes	Penambahan/ Additional	2020		
Rp				Amortization		Rp		
Pinjaman Bank	3,718,481	7,834,696	(6,664,347)	--	(78,022)	--	4,810,808	Bank Loans
Surat Berharga Komersial	93,572	--	(93,572)	--	--	--	--	Commercial Paper
Surat Utang Menengah Jangka Pendek	1,107,455	--	(366,428)	--	7,518	--	748,545	Medium Term Notes
Utang Obligasi	--	642,100	--	(3,134)	1,394	--	640,360	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	--	(17,168)	--	--	--	31,347	14,179	Lease Liabilities
	4,919,508	8,459,628	(7,124,347)	(3,134)	(69,110)	--	6,213,892	

53. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd;
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi;
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsesi Jasa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

53. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 1 (Annual Improvement 2021): Presentation of Financial Statements;
- PSAK 13 (Annual Improvement 2021): Investment Properties;
- PSAK 48 (Annual Improvement 2021): Impairment of Assets
- PSAK 66 (Annual Improvement 2021): Joint Arrangement; and
- ISAK 16 (Annual Improvement 2021): Service Concession Arrangements.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

- Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2021.

Amendments to the standard that are effective for periods beginning on or after April 1, 2021 are:

- PSAK 73: Leases regarding Covid-19-related Rent Concessions Beyond 30 June 2021.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;
- Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;
- PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;
- PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and
- PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates; and
- Amendment PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

54. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 24 Januari 2022, telah diputuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan melakukan pengurangan penyertaan modal di Perusahaan sebesar Rp499.997 yang merupakan modal disetor Perusahaan pada PT NK. Pengurangan penyertaan modal negara tersebut menjadikan kepemilikan saham Perusahaan pada PT NK menjadi saham milik Negara.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan tanggal 24 Januari 2022, telah diputuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa yang berasal dari :

- a. Pengalihan seluruh saham Seri B dan saham Seri C milik Negara Republik Indonesia pada PT Nindya Karya (Persero), sebanyak 5.890.500 saham Seri B dan 59.499 saham Seri C.
 1. PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero), sebanyak 14.399 saham Seri B;
 2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), sebanyak 5.952.622 saham Seri B;

54. Events after Reporting Period

Reduction of Government Equity Participation

Based on Government Regulation of Republic of Indonesia No. 6 of 2022 regarding Reduction of Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset dated January 24, 2022, it has been decided that the Government of Republic of Indonesia will reduce its equity participation in the Company to PT NK. The reduction in state equity participation makes the Company's share ownership in PT NK become state-owned shares.

Additional Government Equity Participation

Based on Government Regulation of Republic of Indonesia No. 7 of 2022 regarding the Addition of Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Share Capital of the Company's Company dated January 24, 2022, it has been decided that the Government of Republic of Indonesia will increase its capital participation in the share capital of the Company (Persero) PT Danareksa originating from:

- a. Transfer of all Series B shares and Series C shares owned by the Republic of Indonesia to PT Nindya Karya (Persero), totaling 5,890,500 Series B shares and 59,499 Series C shares
 1. PT Publishing and Printing Balai Pustaka (Persero), 14,399 shares of series B;
 2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), totaling 5,952,622 shares of series B;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

55. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2022.

55. Management Responsibility on the Financial Statements

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements which are authorized by Directors for issuance on February 25, 2022.

56. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

56. Supplementary Financial Information

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2021 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

LAMPIRAN I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

	2021 Rp	2020 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	2,171,586	478,863
Pinjaman Investasi Jangka Pendek		
Pihak Berelasi	485,739	1,390,765
Pihak Ketiga	459,824	1,333,795
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui		
Laba Rugi		
Pihak Ketiga	280,522	--
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	28,114	25,692
Pihak Ketiga	18,315	27,047
Piutang Anak Perusahaan	7,850	6,189
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan		
Pihak Berelasi	252,304	340,087
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka	10,296	45,437
Pajak Dibayar Di Muka	81,118	82,575
Cessie Piutang Jangka Pendek	55,810	125,070
Aset Lancar Lainnya	27,820	6,240
Jumlah Aset Lancar	3,879,298	3,861,760
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui		
Penghasilan Komprehensif Lainnya	5,845,670	38,944
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi		
dan/atau Revitalisasi		
Pihak Berelasi	402,763	536,683
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	628,992	681,689
Properti Investasi	430,234	365,026
Aset Pajak Tangguhan	16,322	12,422
Investasi pada Ventura Bersama	135,699	151,341
Investasi Jangka Panjang - Entitas Anak	749,995	749,995
Piutang Lain-lain	14,143	66,534
Aset Tetap	3,213	3,355
Cessie Piutang Jangka Panjang	246,430	247,441
Aset Hak Guna	46,499	11,714
Aset Tidak Lancar Lainnya	593,746	826,034
Jumlah Aset Tidak Lancar	9,113,706	3,691,178
JUMLAH ASET	12,993,004	7,552,938

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
Short-term Investment Loans
Related Parties
Third Parties
Financial Assets Measured at Fair Value Through
Profit and Loss
Third Parties
Accounts Receivable
Related Parties
Third Parties
Subsidiaries Receivable
Loans Receivable-Bailout
Related Parties
Advances and Prepaid Expenses
Prepaid Taxes
Short-term Cessie Receivables
Other Current Assets
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Financial Assets Measured at Fair Value Through
Other Comprehensive Income
Loans Receivable - Restructuring
and/or Revitalization
Related Parties
Long-term Investment Loans
Investment Property
Deferred Tax Assets
Investment in Joint Ventures
Long Term Investments-Subsidiary
Other Receivables
Property, Plant & Equipment
Longterm Cessie Receivables
Right of Use Assets
Other Non-Current Assets
Total Non-Current Assets
TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY (Continued)
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	2021 Rp	2020 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Accounts Payable
Pihak Berelasi	230	--	Related Parties
Pihak Ketiga	12,950	4,771	Third Parties
Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan			Bank and Financial Institution Loans
Pihak Berelasi	1,237,170	1,443,535	Related Parties
Pihak Ketiga	574,942	1,472,381	Third Parties
Utang Pajak	7,061	7,427	Taxes Payable
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	420,151	296,434	Accruals Expenses and Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2,252,504	3,224,548	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	1,652	1,717	Employee Benefit Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Panjang			Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	--	53,161	Related Parties
Pihak Ketiga	428,070	--	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah	449,545	748,545	Medium-term Notes
Utang Obligasi	640,740	640,361	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	35,854	14,179	Lease Liabilities
Utang Sukuk - Neto	588,544	--	Sukuk Payable - Net
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2,144,405	1,457,963	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4,396,909	4,682,511	TOTAL LIABILITIES
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			Equity Attributable to Owner of the Parent
Modal Saham-Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham - Modal Dasar 20.000.000 saham			Share Capital - Rp 1,000,000 par value per share - Authorized Capital 20,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2021 dan 2020, masing-masing 5.952.623 dan 2.996.688 saham	5,952,623	2,996,688	Issued and Fully Paid As of 2021 and 2020 5,952,623 and 2,996,688, respectively
Saldo Laba:			Retained Earnings:
Telah Ditentukan Penggunaannya	299,350	299,350	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	(250,068)	(446,411)	Unappropriated
Laba Belum Direalisasi dari Efek Tersedia untuk Dijual - Bersih	2,594,190	20,800	Unrealized Gain on Available for Sale Securities - Net
JUMLAH EKUITAS	8,596,095	2,870,427	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	12,993,004	7,552,938	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

LAMPIRAN II

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
INDUK PERUSAHAAN

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

	2021 Rp	2020 Rp
PENDAPATAN USAHA	2,115,681	674,427
BEBAN USAHA	(1,931,669)	(547,499)
LABA USAHA	184,012	126,928
Pendapatan Bunga	20,519	14,419
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	241	--
Beban Bunga dan Keuangan	(4,045)	(2,693)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	(1,806)	--
Bagian Laba Ventura Bersama	(642)	(1,746)
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(4,703)	(5,828)
LABA SEBELUM PAJAK	193,576	131,080
PAJAK PENGHASILAN		
Beban Pajak Kini	(2,381)	(31,780)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	3,900	(8,546)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	1,519	(40,326)
LABA TAHUN BERJALAN	195,095	90,754
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar	2,574,638	(1,352)
Jumlah Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2,574,638	(1,352)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,769,733	89,402

APPENDIX II

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT COMPANY

December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

REVENUES
OPERATING EXPENSE
OPERATING INCOME
Interest Income
Gain on Sale of Property, Plant, and Equipment
Interest Expense and Financial Charge
Increase in Fair Value of Investment Property
Share of the Profit of Joint Ventures
Other Income (Expenses)
PROFIT BEFORE TAX
INCOME TAXES
Current Tax Expenses
Deferred Tax Benefit (Expenses)
Total Income Tax Expense
PROFIT FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Item that will not be reclassified to profit or loss
Financial Assets Measured at Fair Value
Total Item that will not be reclassified to profit or loss
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

LAMPIRAN III

APPENDIX III

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT COMPANY

For the Years Ended

December 31, 2021 and 2020

(In Million of Rupiah, unless Share Data)

	Jumlah Ekuitas/Total Equity				
	Modal Saham/ Capital Stock	Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ Available for Sale Financial Assets	Saldo Laba/Retained Earnings Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo tanggal 31 Desember 2019	2,996,688	22,152	299,350	885,731	4,203,921
Dampak Penerapan PSAK 71, 72, 73	--	--	--	(1,422,896)	(1,422,896)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	90,754	90,754
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	(1,352)	--	--	(1,352)
Saldo tanggal 31 Desember 2020	2,996,688	20,800	299,350	(446,411)	2,870,427
Laba Periode Berjalan	--	--	--	195,095	195,095
Tambahan Modal Disetor	2,955,935	--	--	--	2,955,935
Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	--	2,574,638	--	--	2,574,638
Realisasi Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya	--	(1,248)	--	1,248	--
Saldo tanggal 31 Desember 2021	5,952,623	2,594,190	299,350	(250,068)	8,596,095

Balance as of December 31, 2019

Impact of the Application of PSAK 71, 72, 73

Income for the Year

Comprehensive Income for the Year

Balance as of December 31, 2020

Income for The Period

Additional Paid in Capital

Other Comprehensive Income for the Period

Realized Financial Assets Measured at Fair Value Through

Other Comprehensive Income

Balance as of December 31, 2021

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

LAMPIRAN IV

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
INDUK PERUSAHAAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

	2021 Rp	2020 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	417,504	436,636
Penerimaan Restitusi Pajak	26,335	24,258
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(243,233)	(231,277)
Pembayaran Beban Bunga	(374,423)	(367,944)
Pembayaran Pajak	(72,122)	(63,668)
Penerimaan Dividen	1,450,814	--
Penerimaan Lainnya	74,335	16,648
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1,279,210	(185,347)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Investasi	349,257	--
Pengeluaran Investasi	(120,133)	(447,102)
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan	1,446,094	2,041,108
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan	(838,142)	(2,580,863)
Penerimaan Pencairan Laba Ventura Bersama	15,000	--
Perolehan Aset Tetap & Aset Tak Berwujud	(398)	(186)
Pengeluaran Investasi pada Suku	(2,440,856)	--
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1,589,178)	(987,043)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman	1,648,793	2,745,981
Pembayaran Pinjaman	(2,384,270)	(2,206,250)
Penerimaan Penerbitan Surat Utang	3,051,069	642,100
Pembayaran Penerbitan Surat Utang	(300,000)	(100,000)
Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Berelasi	(2,653)	--
Pembayaran Liabilitas Sewa	(10,248)	--
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2,002,691	1,081,831
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1,692,723	(90,559)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	478,863	569,422
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2,171,586	478,863

APPENDIX IV

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOW
PARENT COMPANY
 For the Years Ended
 December 31, 2021 and 2020
 (In Million of Rupiah, unless Share Data)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Cash Receipts from Customers
Cash Receipts from Tax Refund
Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Payment of Interest
Tax Paid
Dividend Receipt
Other Receipts
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from Investment
Disbursement from Investment
Proceeds from Investment Loans
Disbursement from Investment Loans
Cash Received from Share of the Profit Joint Venture
Acquisition of Property, Plant and Equipment
Disbursement from Investment in Suku
Net Cash Used in Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Receipts from Loan
Payment for Loan
Receipts From Securities
Payment for Securities
Receipts From Securities
Payment of lease liabilities
Net Cash Provided by Financing Activities
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
INFORMASI TAMBAHAN
INDUK PERUSAHAAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali Data Saham)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
ADDITIONAL INFORMATION
PARENT COMPANY**

For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Million of Rupiah, unless Share Data)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terlampir adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

2. Investasi Pada Entitas Anak

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tersendiri dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Entitas Anak/ Subsidiaries	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Saldo Awal Biaya Perolehan/ Beginning Balance of Acquisition Cost Rp	Penambahan Penyertaan/ Addition in Participation Rp	Pengurangan Penyertaan/ Reduction in Participation Rp	Saldo Akhir Biaya Perolehan/ Ending Balance of Acquisition Cost Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	99.999	149,999	--	--	149,999
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	99.999	99,999	--	--	99,999
PT Nindya Karya ("PT NK")	99.000	499,997	--	--	499,997
PT Nindya Beton ("PT NB")	99.490	49,000	--	--	49,000
PT Nindya Tirta Utama ("PT NTB")	95.000	--	16,500	--	16,500

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan saham baru pada PT Nindya Karya (Persero) tanggal 13 Agustus 2012, telah diputuskan Pengambilan bagian saham oleh PT PPA (Persero) untuk melaksanakan program restrukturisasi PT Nindya Karya (Persero) yang bersifat sementara.

Sejak tahun 2020, PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi sehingga PT PPAK tidak mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikategorikan sebagai entitas anak (sesuai dengan PSAK 65).

Pengungkapan informasi entitas investasi yang tidak dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Entitas yang tidak Dikonsolidasi/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation
PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")	Jakarta	Pabrikasi/ Manufacturing	99.997	2014
PT Magnesium Gosari International ("PT MGI")	Jakarta	Pabrikasi/ Manufacturing	51.000	2018
PT Bondi Syad Mulia ("PT BSM")	Surabaya	Pabrikasi/ Manufacturing	75.000	2007
PT SIPPA Kemasan International ("PT SKI")	Jakarta	Pabrikasi/ Manufacturing	99.980	2018
PT Matoa Kidung Samudera ("PT MKS")	Jakarta	Kapal Isap Timah/ Tin Vessel	60.000	2018
PT Matoa Kidung Bahtera ("PT MKB")	Jakarta	Kapal Isap Timah/ Tin Vessel	60.000	2018
PT Rejeki Inti Logamjaya ("PT RILJ")	Tangerang	Pabrikasi/Manufacturing	73.530	1997

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

1. Separate Financial Statements

The statements of financial position, statements of comprehensive income, statement of changes in equity and the statements of cash flows are separate financial statements which are additional information on the consolidated financial statements.

2. Investment in Subsidiaries

Investments in subsidiaries as stated in separate financial statements are recorded using the cost method.

According to Regulation of The Government of The Republic of Indonesia Number 69 of 2012 on the changes of state share ownership structure through issuing new shares through PT Nindya Karya (persero) dated 13th of August 2012, it was decided that the shares taken by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to carry out restructuring program for PT Nindya Karya (Persero) was temporary.

Since 2020, PT PPAK has met the requirements as an investment entity so that PT PPAK does not consolidate all entities that are categorized as subsidiaries (in accordance with PSAK 65).

The disclosure of information on non-consolidated investment entities is as follows:

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

List of Disclosure Based on POJK NO.51/POJK.03/2017 [G.4]

Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:		The Sustainability Report contains information about:	Halaman Page
A.	Strategi Keberlanjutan	A. Sustainability Strategy	
A.1.	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	A.1. Elaboration of Sustainability Strategy	456-460
B.	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	B. Overview of Performance on Sustainability Aspects	
B.1	Apek Ekonomi	B.1 Economic Aspects	461-462
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	B.2 Environmental Aspects	463
B.3	Aspek Sosial	B.3 Social Aspects	464-465
C.	Profil Perusahaan	C. Company Profile	
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	C.1 Vission, Mission, Sustainable Values	466, 68
C.2	Alamat Perusahaan	C.2 Company Address	58
C.3	Skala Usaha, paling sedikit meliputi:	C.3 Business Scale, covering at least:	
	Total Aset atau Kapitalisasi Aset, dan Total Kewajiban;	Total assets or assets capitalizationm and total liabilities;	144-145
	Jumlah Karyawan menurut Jenis Kelamin, Jabatan, Usia Pendidikan, dan Status Ketenagakerjaan	Total employee based on gender, position, age, education and employment status;	90-93
	Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Saham;dan	Name Of Shareholders and Shareholding Percentage;and	106
	Wilayah Operasional.	Operational Area.	79
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan;	C.4 Products, Services, and Business Activities;	72-78
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi;	C.5 Member Association	79
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	C.6 Significant Changes	-
D.	Penjelasan Direksi	D. Director Explanation	
D.1	Penjelasan Direksi	D.1 Elaboration of Board of Directors	44-54
E.	Tata Kelola Keberlanjutan	E. Sustainable Corporate Governance	
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan;	E.1 Person in Charge Responsibility for Sustainable Finance	468-473
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan;	E.2 Sustainable Finance Competency Development	468-473
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	E.3 Sustainable Finance Risk Assessment Implementation	468-473
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	E.4 Stakeholders Relations	468-473
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan.	E.5 Sustainable Finance Implementation Problems	468-473
F.	Kinerja Keberlanjutan	F. Sustainable Performance	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	F.1 The Activities of Building a Culture of Sustainability	474
	Kinerja Ekonomi	Economic Performance	
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	F.2 Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Financial Targets, or Investment, Revenue and Profit	480-485
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	F.3 Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects in Line With the Implementation of Sustainable Finance	480-485

Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:		The Sustainability Report contains information about:		Halaman Page
Kinerja Lingkungan Hidup		Environmental Performance		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	F.4	Environment Cost Incurred	463, 487-489
Aspek Material		Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	F.5	Environment-Friendly Material Consumption	463, 487-489
Aspek Energi		Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	F.6	The Amount and Intensity of Energy Used	463, 487-489
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	F.7	Efforts and Achievement of Energy Efficiency Including Use of Renewable Energy Sources	463, 487-489
Aspek Air		Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air	F.8	Water Used	463, 487-489
Aspek Keanekaragaman Hayati		Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	F.9	Impacts from Operational Areas Close to or in Conservation Areas or Having Biodiversity	-
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	F.10	Biodiversity Conservation Efforts	-
Aspek Emisi		Emissions Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	F.11	The Amount and Intensity of Emissions Produced by Type	-
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan;	F.12	Efforts and Achievement Emission Reduction Carried Out	-
Aspek Limbah dan Efluen		Waste and Effluent Aspect		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	F.13	The Amount of Waste and Effluent Produced by Type	-
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	F.14	Mechanism of Waste and Effluent Management	-
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada).	F.15	Spill That Occur (If Any).	-
Aspek Pengaduan terkait Lingkungan Hidup		Environmental Complaint Aspect		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima, dan Diselesaikan.	F.16	The Amount and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	489
Kinerja Sosial		Social Performance:		
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen	F.17	Commitment to Provide Services for Equivalent Products and/or Services to Consumers	502
Aspek Ketenagakerjaan		Employment Aspect		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja;	F.18	Equality of Employment Opportunities	491
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa;	F.19	Child Labor and Forced Labor	507
F.20	Upah Minimum Regional;	F.20	The Regional Minimum Wage	494-495
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman;	F.21	Decent and Safe Working Environment	496
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai.	F.22	Training and Capacity Building of Employees	493
Aspek Masyarakat		Community Aspect		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar;	F.23	Operational Impacts to the Surrounding Community	471-472
F.24	Pengaduan Masyarakat;	F.24	Public Complaints	504

Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:		The Sustainability Report contains information about:		Halaman Page
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL);	F.25	Responsibilities for Developing Sustainable Products/Services	-
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan		Responsibility For Sustainable Products/ Services		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan;	F.26	Innovation and Development of Sustainable Financial Products and/or Services	-
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan;	F.27	Products/Services that have been Evaluated for Safety for Customers	72-78
F.28	Dampak Produk/Jasa;	F.28	Products/Service Impacts	-
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali;	F.29	Number of Products Recalled	-
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.	F.30	Customer Satisfaction Survey of Sustainable Finance and/or Services	504
G	Lain-Lain	G.	Others	
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (Jika Ada)	G.1	Written Verification from an Independent Party (if any)	-
G.2	Lembar Umpan Balik	G.2	Feedback Form	512-513
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	G.3	Feedback on Previous Year's Sustainability Report	-
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	G.4	Disclosure List Based on POJK No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Listed Companies and Public Companies	√

Kriteria Annual Report Awards

Annual Report Award Criteria

Keterangan		Halaman Page	Description
I. Umum			General
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√	The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√	The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	√	The Annual Report shall present clear identity of the company
4	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di:		Company name and the Annual Report financial year shall be presented on:
	a. Sampul muka;	√	a. Front Cover;
	b. Samping;	√	b. Side Cover;
	c. Sampul belakang; dan	√	c. Back Cover; and
	d. Setiap halaman.	√	d. Every page
5	Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan	√	The Annual Report shall be posted in the company's website
	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	Including the latest Annual Report as well as those for the last four years, at least.
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting			Key Financial Highlights
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain:		Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information contains the following:
	a. Penjualan/pendapatan usaha;	12	a. Income;
	b. Laba (rugi):	13	b. Profit (loss):
	• Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	13	• Attributable to equity holders of the parent entity; and
	• Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali;	13	• Attributable to non controlling interest;
	c. Penghasilan komprehensif periode berjalan:	13	c. Total comprehensive profit (loss):
	• Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	13	• Attributable to equity holders of the parent entity; and
	• Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali; dan	13	• Attributable to non controlling interest;
	d. Laba (rugi) per saham.	13	d. Earning (loss) per share.
	Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	-	Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain:		Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information contains the following:
	a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	16	a. Total investment on associates;
	b. Jumlah aset;	16	b. Total assets
	c. Jumlah liabilitas; dan	16	c. Total liabilities; and
	d. Jumlah ekuitas.	16	d. Total equity.
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	17-18	Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.		Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.

Keterangan		Halaman Page	Description
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	-	Share price information in tables and charts
	a. Jumlah saham yang beredar;		a. Number of shares outstanding;
	b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:		b. The table forms contain the following information:
	• Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;		• Market capitalization based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed;
	• Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan		• Highest, lowest and closing share price based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
	• Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.		• Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.
	c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:		c. The graph forms contain at least the following information:
	• Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan		• The closing price of shares based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
	• Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.		• Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed
	Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.		For each quarter in the latest 2 (two) financial years.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.			Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	21	Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years
	Informasi memuat:		Information contains:
	a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>);		a. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds;
	b. Tingkat bunga/imbalan;		b. Interest rate/yield;
	c. Tanggal jatuh tempo; dan		c. Maturity date; and
	d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2019.		d. Rating of bonds/sukuk in 2018 and 2019.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.			Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		-	Board of Commissioners and Board of Directors' Reports
1	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut:		Board of Commissioners' Report Contain the following:
	a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	29	a. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation;
	b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	34	b. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration;
	c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	35-36	c. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and
	d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	37	d. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.
2	Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:		Board of Directors' report Contain the following:
	a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:	41	a. Analysis of the company's performance, covering among others:
	• kebijakan strategis;	47-48	• strategic policies;
	• perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	49-50	• comparison between targets and achievements; and
	• kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	46-47	• challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges;
	b. Analisis tentang prospek usaha;	50-51	b. Analysis on business prospects;
	c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	51-52	c. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and
	d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	53-54	d. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.

Keterangan		Halaman Page	Description
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:		Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors Contain the following:
	a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	55	a. Signatures on a separate page;
	b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	55	b. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report;
	c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	55	c. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and
	d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	-	d. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation in separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.
IV. Profil Perusahaan			Company Profile
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, <i>e-mail</i> , dan <i>website</i> .	58	Name and complete address of the company Information contains, among others, name and address, post code, telephone number, fax, e-mail and website.
2	Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	59-64	Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name.
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	-	Note: to be disclosed if the company never had a change of name
3	Bidang usaha Uraian mengenai antara lain:		Line of business Description of, among others:
	a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	72	a. The line of business as stated in the latest Articles of Association;
	b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	73	b. Business activities; and
	c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	74-78	c. Product and/or services offered.
4	Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	80-81	Organization structure Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:		Vision, Mission and Corporate Culture Covers:
	a. Visi perusahaan;	68	a. Vision;
	b. Misi perusahaan;	68	b. Mission;
	c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	69	c. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and
	d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	69-70	d. Statement on the corporate culture.
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain:		Profiles of members of the Board of Commissioners Contain information on:
	a. Nama;	82-83	a. Name;
	b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);		b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
	c. Umur;		c. Age;
	d. Domisili;		d. Domicile;
	e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);		e. Education (study field and education institution);
	f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan		f. Work experience (position, company, and period in position); and
	g. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.		g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.

Keterangan		Halaman Page	Description
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain:		Profiles of members of the Board of Directors Contain information on:
	a. Nama;	84-87	a. Name;
	b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);		b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
	c. Umur;		c. Age;
	d. Domisili;		d. Domicile;
	e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);		e. Education (study field and education institution);
	f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan		f. Work experience (position, company, and period in position); and
	g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.		g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain:		Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization Information contains, among others:
	a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	90	a. Number of employees at each level of the organization;
	b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	92	b. Number of employees by education;
	c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	92	c. Number of employees by employment status;
	d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	94-95	d. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning position of participants, type of training, and purpose of training; and
	e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	95	e. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.
9	Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain:		Shareholders composition Covering among others:
	a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	106	a. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage;
	b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:	106	b. Details of shareholders and shareholding percentage:
	• Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	106	• Names of shareholders with 5% or more shareholding; and
	• Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	-	• Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each.
	c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.	106	c. Names of Director and Commissioner with direct or indirect share-ownership and the percentage of such shareholding.
	Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:		List of subsidiaries and/or associated entities In table form, containing:
	a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;	109-118	a. Name of subsidiary and/or associated entity;
	b. Persentase kepemilikan saham;		b. Share-ownership percentage;
	c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan		c. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and
	d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).		d. Operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).
11	Struktur grup perusahaan		Corporate group structure
	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	107	Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).

	Keterangan	Halaman Page	Description
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	119	Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year
	Mencakup antara lain:		Covers, among others:
	a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>);	-	a. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action;
	b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan		b. Total number of shares outstanding following the corporate action; and
	c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.		c. The stock exchange where the shares are listed.
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if the company does not have a chronology of share listing.
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku		Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year
	Mencakup antara lain:		Covers, among others:
	a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	119-120	a. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date;
	b. Nilai penawaran efek lainnya;	119-120	b. Offering price of other securities;
	c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	119-120	c. The stock exchange where the securities are listed; and
	d. Peringkat efek.	119-120	d. Rating of securities.
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan	-	Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain:		Name and address of supporting institutions and/or professionals Covers, among others:
	a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	121, 123	a. Name and address of the company's Share Registrar;
	b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	121	b. Name and address of Public Accountant Firm; and
	c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	121	c. Name and address of rating agencies.
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain:		Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels Covers, among others:
	a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;		a. Name of award and/or certification;
	b. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;		b. Year received/issued;
	c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	124	c. Name of institution that issued the award/certification; and
	d. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		d. Validity period (certification).
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain:		Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any) Covers information on:
	a. Nama dan alamat entitas anak; dan	111-116	a. Name and address of subsidiaries; and
	b. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	79	b. Name and address of branch/representative office.
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	79	Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.
17	Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang:		Information in the corporate website Covers at the very least:
	a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	125	a. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder;
	b. Isi Kode Etik;	125	b. Contents of the Code of Conduct;
	c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	125	c. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, and announcement of summary GMS resolutions;
	d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	125	d. Annual financial statements (last 5 years);

Keterangan		Halaman Page	Description
e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan		125	e. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and
f. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.		125	f. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18 Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal			Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit
Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):			Cover at least information of type of training and participant of:
a. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;		96-98	a. Training and/or education for Board of Commissioners;
b. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;		99	b. Training and/or education for Board of Directors;
c. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;		100	c. Training and/or education for Audit Committee;
d. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;		-	d. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;
e. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;		100	e. Training and/or education for other Committee(s);
f. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan		101-102	f. Training and/or education for Corporate Secretary; and
g. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku.		103	g. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan		-	Note: should be disclosed if there is no training and/or education during the fiscal year
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan			Management Discussion and Analysis on the Company Performance
1 Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai:			Operation review per business segment Includes analysis on:
a. Penjelasan masing-masing segmen usaha.			a. Elaboration on each business segment.
b. Kinerja per segmen usaha, antara lain:			b. Performance of each business segment, among others:
• Produksi;		134-142	• Production;
• Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;			• Increase/Decrease of production capacity;
• Penjualan/pendapatan usaha; dan			• Sales/income; and
• Profitabilitas.			• Profitability.
2 Uraian atas kinerja keuangan perusahaan			Description on the Company's financial performance
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:			An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in:
a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;		144-151	a. Current assets, non-current assets, and total assets;
b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;		152-177	b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;
c. Ekuitas;		157-159	c. Equity;
d. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan		159-164	d. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and
e. Arus kas.		165-167	e. Cash flows.
3 Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang:			Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry Explanation on:
a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan		169	a. Solvability, both short term and long term; and
b. Tingkat kolektibilitas piutang.		170-171	b. Level of receivables collectibility.

Keterangan		Halaman Page	Description
4	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) Penjelasan atas:		Discussion on capital structure, and management policy on capital structure Explanation of:
	a. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	171-172	a. Details of capital structure comprising of interest-bearing debts/sukuk and equity;
	b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan	171	b. Capital structure policies; and
	c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.		c. Basis for the determination of capital structure policies.
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang:		Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year Explanation on:
	a. Nama pihak yang melakukan ikatan;	172-175	a. Parties in the commitments;
	b. Tujuan dari ikatan tersebut;		b. Objectives of the commitments;
	c. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;		c. Sources of funds to meet the commitments;
	d. Mata uang yang menjadi denominasi; dan		d. Denomination currency of commitments; and
	e. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		e. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk.
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment for capital investments in the fiscal year.
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang:		Discussion on capital investment realized at the latest financial year Explanation on:
	a. Jenis investasi barang modal;	175	a. Type of capital investment;
	b. Tujuan investasi barang modal; dan		b. Objectives of capital investment; and
	c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.		c. Nominal value of capital investment realized in the last fiscal year.
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no capital investment.
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain:		Information on the comparison between initial target at the beginning of financial year and the realization and target or projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered significant target for the company. Contain information on:
	a. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	176-182	a. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and
	b. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	176-182	b. Targets or projections set for the next 1 (one) year.
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan		Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events)
	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	183	Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future.
	Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if there are no subsequent events.
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan		Business prospects
	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	180-182	Description on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources

Keterangan		Halaman Page	Description
10	Uraian tentang aspek pemasaran		Marketing aspects
	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.		Description on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai:		Description on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years Contain information on:
	a. Kebijakan pembagian dividen;	183	a. Dividend payout policy;
	b. Total dividen yang dibagikan;	184	b. Total dividend disbursement;
	c. Jumlah dividen kas per saham;	184	c. Total cash dividend per share;
	d. Payout ratio; dan	184	d. Payout ratio; and
	e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.	184	e. Announcement date and cash dividend payout for each year.
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai:	185	Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) still ongoing in the fiscal year Contain information on:
	a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;		a. Number of ESOP/MSOP shares and its execution;
	b. Jangka waktu;		b. Period;
	c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	-	c. Eligible employee/management; and
	d. Harga exercise.		b. Exercise price.
	Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no such programs
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai:		Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report) Covers the following:
	a. Total perolehan dana;	185	a. Total proceeds;
	b. Rencana penggunaan dana;		b. Proceeds utilization plan;
	c. Rincian penggunaan dana;		c. Proceeds utilization details;
	d. Saldo dana; dan		d. Proceeds balance; and
	e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	-	d. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any).
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai:		Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties Covers the following:
	a. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	188-194	a. Name of transacting parties and the nature of related parties;
	b. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	195	b. Description of the transaction fairness;
	c. Alasan dilakukannya transaksi;	195	c. Transaction background;
	d. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	195-196	d. Transaction realization at the last financial year;
	e. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan	197	e. Company policy related with transaction review mechanism; and
	f. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	197	f. Compliance to relevant regulations and provisions.
	Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	-	Note: To disclose if there are no transactions.

Keterangan		Halaman Page	Description
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain:	198	Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company Covers information on:
	a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	-	a. Name of regulations; and
	b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	-	b. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-	Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain:		Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year Descriptions include among others:
	a. Perubahan kebijakan akuntansi;	198	a. Changes in accounting policy;
	b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	198	b. Reasons for the change; and
	c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	199	c. Quantitative impact on the financial statements
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-	Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year
17	Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:		Information on business continuity Disclosures on:
	a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	200	a. Significant issues on the company business continuity at the last financial year;
	b. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	201	b. Management assessment on point 1; and
	c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> .	201	c. Assumption implemented by the management in conducting the assessment.
	Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	-	Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year.
VI. Good Corporate Governance			Good Corporate Governance
1	Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain:		Description on the Board of Commissioners Covers the following:
	a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;	270-273	a. Board of Commissioners responsibilities;
	b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan	278-279	b. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and
	c. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	226-227	c. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain:		Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners) Covers the following:
	a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	280	a. Assignment criteria of Independent Commissioners; and
	b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	280	b. Independency statement of each Independent Commissioner.
3	Uraian Direksi Uraian memuat antara lain:		Description on the Board of Directors Covers information on, among others:
	a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	284-287	a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
	b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan	-	b. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and
	c. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	281-282	c. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)

Keterangan		Halaman Page	Description
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2019 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai:	218-228	GCG implementation assessment for 2019, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors Covers the following:
	a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;	218-228	a. Assessment criteria;
	b. Pihak yang melakukan penilaian;	218-228	b. Assessor;
	c. Skor penilaian masing-masing kriteria;	218-228	c. Assessment score on each criteria;
	d. Rekomendasi hasil penilaian; dan	218-228	d. Recommendations on results of assessment; and
	e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	218-228	e. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations.
	Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2019, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if there are no GCG assessments for fiscal 2019.
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain:		Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors Covers the following:
	a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;	334-335	a. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners;
	b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;	334-335	b. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors;
	c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	334	c. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners;
	d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;	335	d. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors;
	e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan	333-334	e. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and
	f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/ atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).	335	f. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any).
	Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Informasi memuat antara lain:	291-318	Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months) Covers among others:
	a. Tanggal Rapat;	291-318	a. Date;
	b. Peserta Rapat; dan	291-318	b. Attendance; and
	c. Agenda Rapat.	291-318	c. Agenda.
	untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.		of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD.
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu		Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder
	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.	106	Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders
	Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.		Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder

	Keterangan	Halaman Page	Description
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain:	232-233	Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders Covers, among others:
	a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	232-233	a. Affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors;
	b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	232-233	b. Affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners;
	c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	232-233	c. Affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder;
	d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	232-233	d. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and
	e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.	232-233	e. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder.
	Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if there are no affiliation relationship
9	Komite Audit Mencakup antara lain:		Audit Committee Includes the following:
	a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	340-343	a. Name, position and tenure of Audit Committee members;
	b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	340-343	b. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of Audit Committee members;
	c. Independensi anggota komite audit;	344	c. Independency of Audit Committee members;
	d. Uraian tugas dan tanggung jawab;	344-345	d. Duties and responsibilities;
	e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	349-352	e. Brief report of Audit Committee activity; and
	f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.		f. Meeting frequency and attendance of Audit Committee.
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain:		Nomination and/or Remuneration Committee Includes the following:
	a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	365-367	a. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee;
	b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	367	b. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee;
	c. Uraian tugas dan tanggung jawab;	367-368	c. Duties and responsibilities;
	d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku;	374-375	d. Brief report of committee activity in the fiscal year;
	e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	368	e. Meeting frequency and attendance;
	f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	365	f. Statement of committee charter; and
	g. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	375	g. Policies on Director succession.
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain:		Other committees under the Board of Commissioners Includes the following:
	a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	353-364	a. Name, position and brief profile of members of committee;
	b. Independensi komite lain;		b. Independence of committee;
	c. Uraian tugas dan tanggung jawab;		c. Duties and responsibilities;
	d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan		d. Committee activity in the fiscal year; and
	e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran rapat komite lain.		e. Committee meeting frequency and attendance.

	Keterangan	Halaman Page	Description
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain:		Description of duties and functions of Corporate Secretary Information on, among others:
	a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	378	a. Name and brief work experience of Corporate Secretary;
	b. Domisili;	378	b. Domicile;
	c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	379-380	c. Duties and responsibilities; and
	d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	382-383	d. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.
13	Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain:		Description on Internal Audit Unit Includes the following:
	a. Nama ketua unit audit internal;	384	a. Name of Internal Audit Unit head;
	b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	383	b. Total employees (internal auditors) in Internal Audit Unit;
	c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	386-387	c. Certification on Internal Audit profession;
	d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	385	d. Internal Audit Unit composition in the company's structure;
	e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	389-390	e. Brief report on Internal Audit Unit activity implementation; and
	f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	384	f. The parties responsible to appoint/terminate the Internal Audit Unit head.
14	Akuntan Publik Informasi memuat antara lain:		Public Accountant Includes the following:
	q. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	413-414	a. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;
	b. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	413-414	b. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and
	c. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	413-414	c. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year.
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		Note: to disclose if there are no other services rendered
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain:		Description on risk management of the company Includes the following:
	a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	402-406	a. Explanation on risk management system implemented by the company;
	b. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	406	b. Explanation on risk management system effectiveness evaluation;
	c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	407-409	c. Explanation on risks faced by the company; and
	d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	407-409	d. Risk mitigation.
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain:		Description of internal control system Includes the following:
	a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	394	a. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control;
	b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan	392-393	b. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and
	c. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	395	c. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.

	Keterangan	Halaman Page	Description
17	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tata kelola tanggung jawab sosial		Description of Corporate Social Responsibility related to organizational governance of social responsibility:
	a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial	457-460	a. Information on Company's commitment to social responsibility;
	b. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan	-	b. Information on methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of Company's activities;
	c. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan	469-470	c. Information on significant stakeholders that are impacted by, or having an influence to the impact of, the Company's activities;
	d. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan	471	d. Information on significant social, economic and environmental issues related to impact of the Company's activities;
	e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban	471-472	e. Information on the scope of the Company's Corporate Social Responsibility, both obligatory as well as beyond obligatory;
	f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i>		f. Information on the Company's strategy and work programs in the management of social, economic and environmental issues, as a form of stakeholder engagement and in creating value for stakeholders and shareholders;
	g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan		g. Information on programs that are beyond the minimum obligatory level for the Company as relevant with its business activities;
	h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial		h. Information on the funding and budgeting of social responsibility programs.
18	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia		Description of Corporate Social Responsibility related to core subject - Human Rights:
	a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia	506	a. Information on commitment and policies related to social responsibility core subject - Human Rights;
	b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Azasi Manusia	506-507	b. Information on Company's definition on the scope of social responsibility core subject - Human Rights;
	c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia	507	c. Information on the planning of CSR initiatives in the area of Human Rights;
	d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	507-508	d. Information on the execution of CSR initiatives in the area of Human Rights;
	e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	508	e. Information on achievements and awards for CSR initiatives in the area of Human Rights.
19	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil		Description of Corporate Social Responsibility related to fair operation core subject
	a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil	506	a. Information on commitment and the core social responsibility policy subject to fair operation
	b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil	506-507	b. Information about the company's definition of the scope of social responsibility, the core subject of fair operations
	c. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil	507	c. Informasi tentang perencanaan Corporate Social Responsibility bidang operasi yang adil
	d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	507-508	d. Information on Corporate Social Responsibility planning in fair operations
	e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	508	e. Information on achievements and awards of fair operations CSR initiatives
20	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang:		Description of Corporate Social Responsibility related to the environment:
	a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan	486	a. Information on commitment and policies on environment;
	b. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan	486-487	b. Information on significant environmental impact and risks, both directly or indirectly related to the Company;
	c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen;	487	c. Information on 2020 activity target/plan established by the Management;

Keterangan	Halaman Page	Description
d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan	487-489	d. Information on environment-related activities or programs undertaken as related to the Company's operational activities;
e. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup	487-489	e. Information on the execution of CSR initiatives related to the environment;
f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	489	f. Information on the quantitative impact or achievement of such CSR initiatives, such as the use of environmental-friendly and recyclable material and energy, waste processing system, mechanism for environment-related complaints, consideration of environmental aspects in the granting of credit to creditors, and others.
g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	489	g. Environment-related certification.
21 Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:		Description of Corporate Social Responsibility related to labor practices, covering information on, among others:
a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan	490	a. Commitment and policies on social responsibility core subject - labor practices;
b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan	490-491	b. Information on scope and definition of social responsibility related to labor practices;
c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; dan	491	c. Information on 2020 activity target/plan established by the Management;
d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut	491-498	d. Information on initiatives undertaken and the quantitative impact of such initiatives;
e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	491-498	e. Information related to labor practices and work health and safety, such as gender equality and equal work opportunity, work health and safety equipment, employee turnover rate, work accident rate, employee remuneration, mechanism for labor-related complaints, and others.
22 Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, mencakup antara lain:		Description of Corporate Social Responsibility related to consumer issues, covering among others:
a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun buku ditetapkan manajemen	503	a. Information on activity target/plan established by the Management;
b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut	503-504	b. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives;
c. Informasi Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	503-504	c. Information related to product stewardship, such as consumer health and safety issues, product information, mechanism, number and resolution of consumer complaints, and others.
23 Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang:		Description of Corporate Social Responsibility related to community involvement and development, covering among others:
a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan kemasyarakatan	499	a. Commitment and policies on social responsibility core subject-community involvement and development;
b. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan	499	b. Information on social issues relevant to the Company;
c. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan	499	c. Information on social risks managed by the Company;
d. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan	499	d. Information on scope and definition of social responsibility related to community involvement and development;
e. Target/rencana kegiatan pada tahun buku yang ditetapkan manajemen;	500-501	e. Information on activity target/plan established by the Management;
f. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	500-501	f. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives;
g. Biaya yang dikeluarkan	500-501	g. Budget spent;

Keterangan		Halaman Page	Description
h. Informasi terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.		500-501	h. Information related to community involvement and development, such as use of local workers, empowerment of surrounding communities, improvement of public facilities or infrastructure, other forms of donations, communications on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.
24	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain:		Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period Includes the following:
	a. Pokok perkara/gugatan;	414-419	a. The principal litigation/claims;
	b. Status penyelesaian perkara/gugatan;	414-419	b. Settlement status of litigation/claims;
	c. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	414-419	c. Impact to the company's condition; and
	d. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	420	d. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged)
	Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	-	Note: To disclose in the event of no litigation
25	Akses informasi dan data perusahaan		Access to company information and data
	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	420-424	Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.
26	Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain:		Discussion on Code of Conduct Includes the following:
	a. Pokok-pokok kode etik;	436-437	a. Contents of Code of Conduct;
	b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	435	b. Disclosure of Code of Conduct application in all level of organization;
	c. Penyebarluasan kode etik;	437	c. Code of Conduct dissemination;
	d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	438	d. Sanctions on Code of Conduct violations; and
	e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	438	e. Number of violation and sanction in the last fiscal year.
	Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if there are no violations of Code of Conduct in the last fiscal year.
27	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain:		Disclosure on whistleblowing system Includes the following mechanism of whistleblowing system:
	a. Penyampaian laporan pelanggaran;	448-449	a. Violations report submission;
	b. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ;	450	b. Whistleblowers protection;
	c. Penanganan pengaduan;	450-451	c. Claims handling;
	d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	448	d. Claims managers; and
	e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	451	e. Total claims registered; and
	f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	451	f. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures.
	Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	-	Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.

Keterangan		Halaman Page	Description
28	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	319-322	Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition
	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.		Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender
	Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	-	Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied
VII. Informasi Keuangan			Financial Information
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	519	Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements
	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.		Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan	521	Independent Auditor opinion on financial statements
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini	522	Independent Auditor Description in the Opinion
	Deskripsi memuat tentang:		Description contains the following:
	a. Nama dan tanda tangan;		a. Name & signatures;
	b. Tanggal Laporan Audit; dan		b. Audit Report date; and
	c. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik.		c. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant
4	Laporan keuangan yang lengkap		Comprehensive financial statements
	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		Comprehensively covers the financial statements elements:
	a. Laporan posisi keuangan;	523-524	a. Statements of financial position;
	b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	525	b. Statements of comprehensive income and other comprehensive income;
	c. Laporan perubahan ekuitas;	524	c. Statements of changes in equity;
	d. Laporan arus kas;	527	d. Statements of cash flows;
	e. Catatan atas laporan keuangan;	528-751	e. Notes to financial statements;
	f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	523-751	f. Comparative information on previous periods; and
	g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	523, 548-550,612	g. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).
5	Perbandingan tingkat profitabilitas	526	Profitability level comparison
	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya		Comparison of current profit (loss) with the previous year
6	Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	527	Statements of Cash Flows Conformity to the following provisions:
	a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;		a. Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing;
	b. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;		b. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity;
	c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan		c. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities;
	d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.		d. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.

Keterangan		Halaman Page	Description
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya:		Summary of accounting policies Including at least:
	a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	748-750	a. Compliance statement to SAK;
	b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;		b. Basis of measurement and formulation of financial statements;
	c. Pajak penghasilan;		c. Recognition of income and expense;
	d. Imbalan kerja; dan		d. Employee benefits; and
	e. Instrumen Keuangan.		e. Financial instrument.
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		Disclosure of related parties transactions The disclosures includes:
	a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	740-745	a. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties;
	b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan		b. Transaction values and its percentage to total income and expense; and
	c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.		c. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan:		Disclosure related to taxes The disclosures shall includes:
	a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	604-607	a. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;
	b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;		b. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit;
	c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;		c. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return;
	d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan		d. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and
	e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.		e. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan:		Disclosure related to fixed assets The disclosures shall includes:
	a. Metode penyusutan yang digunakan;	607-612	a. Used depreciation method;
	b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;		b. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model;
	c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan		c. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and
	d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.		d. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan:		Disclosure related to operations segments The disclosures shall includes:
	a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	745-746	a. General information covering factors used to identify reported segments;
	b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;		b. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities;
	c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan		c. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and
	d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.		d. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.

Keterangan		Halaman Page	Description
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan:		Disclosure related to Financial Instruments The disclosures shall includes:
	a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	734-740	a. Financial instrument classification;
	b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;		b. Fair value of every financial instrument group;
	c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;		c. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk; and
	d. Kebijakan manajemen risiko; dan		d. Risk management objectives and policies;
	e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.		e. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.
13	Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		Financial statements publication The disclosures includes:
	a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	520-522	a. Date of financial statements authorized for publication; and
	b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.		b. Parties responsible to authorize the financial statements.

2021

LAPORAN TAHUNAN
Annual Report

PRESERVING
VALUES
INSTILLING
RESILIENCE.



PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

Member of Danareksa

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Menara Mandiri II Lantai 7-9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Phone: 021 - 5798 2222
Fax: 021 - 5798 2233

www.ptppa.com